LAPORAN TAHUNAN 2013

JAMSOSTEK
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

MEMPERKOKOH LANDASAN BPJS KETENAGAKERJAAN

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

MEMPERKOKOH LANDASAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Melanjutkan persiapan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014, PT Jamsostek (Persero) menetapkan tahun 2013 sebagai tahapan *Fit-In Infrastructure*.

Pada tahapan ini dilakukan penguatan pada aspek pengelolaan kepesertaan, peningkatan pelayanan, keuangan, penguatan *database* dan teknologi informasi, investasi, sumber daya manusia dan *Good Corporate Governance*.

Pertumbuhan dan capaian positif di berbagai aspek menunjukkan bahwa Perusahaan sangat siap mengemban tanggung jawab dan sekaligus menjawab tantangan, serta semakin memperkokoh landasan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

DAFTAR ISI

01. TEMA : MEMPERKOKOH LANDASAN BPJS KETENAGAKERJAAN

06. IKHTISAR KINERJA

12. LAPORAN DEWAN KOMISARIS

18. LAPORAN DIREKSI

24. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2013

26. SEKILAS JAMSOSTEK
- Identitas Perusahaan

- Makna Logo, Filosofi, Moto dan *Rebranding* Perusahaan
- Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan
- Etos Kerja dan Karakter
- Tujuan dan Bidang Usaha
- Struktur Organisasi
- Profil Dewan Komisaris dan Direksi
- Penghargaan
- Peristiwa Penting
- PT Binajasa Abadi Karya (PT Bijak)
- Dana Pensiun Karyawan Jamsostek
- Nama dan Alamat Penunjang Pasar Modal

64. PROSPEK USAHA
- Tinjauan Perekonomian Dunia
- Tinjauan Perekonomian Indonesia

- Tinjauan Industri Jaminan Sosial
- Prospek Pertumbuhan Pangsa Pasar
- Prospek Pertumbuhan Upah
- Prospek Kewenangan Pengawasan dan Pemeriksaan
- Prospek Pengelolaan Keuangan
- Prospek Perubahan Lingkungan Teknologi Informasi dan Sosial

72. PENGUNGKAPAN PIHAK BERELASI, PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
- Pihak Berelasi
- Perubahan Peraturan Perundang-undangan
- Perubahan Kebijakan Akuntansi

75. PENGECUALIAN PENGUNGKAPAN LAPORAN
- Kronologis Pencatatan Saham
- Kronologis Pencatatan Efek lainnya
- Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali
- Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP)
- Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
- Realisasi Emisi Obligasi, Sukuk dan Obligasi Konversi
- Kebijakan Dividen
- Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

76. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

77. Analisis Kinerja Operasional

- Analisis Operasi Per Segmen Usaha
- Segmentasi Profitabilitas
- Pertumbuhan Kepesertaan/ Pangsa Pasar
- Pemasaran dan Pangsa Pasar
  - Strategi Umum Perusahaan
  - Strategi Pemasaran
  - *Brand Equity*
  - *Customer Relationship Management* (CRM)
  - *Service Blue Print*
  - Tingkat Kepuasan Peserta

91. Analisis Kinerja Keuangan

- Analisis Pertumbuhan Kinerja Keuangan
  - Analisis Pertumbuhan Posisi Keuangan
  - Analisis Pertumbuhan Pendapatan dan Beban
  - Analisis Pertumbuhan Arus Kas
  - Analisis Pertumbuhan Ratio Likuiditas, Solvabilitas dan Kolektibilitas
- Analisis Capaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
  - Analisis Capaian Posisi Keuangan
  - Analisis Capaian Pendapatan dan Beban
  - Analisis Capaian Belanja Modal
- Struktur dan Kebijakan Modal
- Investasi dan Realisasi Belanja Modal
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014
- Peristiwa Setelah Tanggal Neraca
  - Transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
  - Modal Awal BPJS Ketenagakerjaan
  - Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan
  - Pengesahan Neraca (Laporan Keuangan) Penutup dan Neraca (Laporan Keuangan) Pembuka
  - Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

120. TATA KELOLA PERUSAHAAN

121. Pendahuluan

- Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

- Roadmap Tata Kelola Perusahaan
- Tujuan Tata Kelola Perusahaan
- Konsistensi Implementasi Tata Kelola Perusahaan

126. Rapat Umum Pemegang Saham

- Pokok-pokok Keputusan RUPS RKAP Tahun 2013
- Pokok-pokok Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2013
- Pengesahan Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013
- Tindak Lanjut Pengarahan RUPS RKAP Tahun 2013
- Tindak Lanjut Pengarahan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2012

DAFTAR ISI

134. Dewan Komisaris

- Pembagian Tugas
- Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
- Komposisi Dan Honorarium Dewan Komisaris
- Remunerasi Dewan Komisaris
- Frekuensi, Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat Dewan Komisaris
- Program Pengembangan
- Komisaris Independen
- Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris *(Board Charter)*
- Laporan Pelaksanaan Tugas
  - Pokok-pokok Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2013
  - Pokok-pokok Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan tahun Buku 2013
  - Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris lainnya
  - Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
  - Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
- Organ Pendukung Dewan Komisaris
  - Sekretaris Dewan Komisaris
  - Komite Audit
  - Komite Pemantau Manajemen Risiko
  - Komite Remunerasi dan Nominasi

166. Direksi

- Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab
- Frekuensi Pertemuan, Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat
- Program Pelatihan
- Pedoman dan Tata Tertib Direksi *(Board Charter)*
- Kebijakan Suksesi Direksi
- Penilaian Kinerja Direksi secara Kolegial
  - Kontrak Manajemen
  - Tingkat Kesehatan Perusahaan
- Penilaian Kinerja Direksi secara Individu
  - Direktorat Utama
  - Direktorat Keuangan
  - Direktorat Investasi
  - Direktorat Renbang dan Informasi
  - Direktorat Umum dan SDM
  - Direktorat Kepesertaan
  - Direktorat Pelayanan
- Kebijakan Remunerasi
- Keberagaman Komposisi Direksi
- Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
- Sekretaris Perusahaan
- Biro Pengawasan Intern
- Sistim Pengendalian intern
- Auditor Eksternal
- Perkara Penting yang dihadapi Perusahaan
- Manajemen Risiko Perusahaan
  - Roadmap Manajemen Risiko
  - Penerapan Manajemen Risiko
  - Evaluasi Efektifitas Sistim Manajemen Risiko
  - Risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan
  - Upaya Pengelolaan Risiko
- Sumber Daya Manusia
  - *Roadmap* Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - Kebijakan Strategis

  - Evaluasi Penerapan *Roadmap* Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - Statistik Sumber Daya Manusia
  - Seleksi Karyawan

- Kesejahteraan Karyawan
- Internalisasi Budaya Perusahaan
- Penghargaan dan Sanksi Disiplin
- Hasil *Survey Employee Engagement*
- Rencana Ke Depan Sumber Daya Manusia

• Teknologi Informasi
- *Grand Design* Teknologi Informasi
- Pengembangan Teknologi Informasi

• Akses informasi dan Pelayanan
- *Website*
- Media Sosial
- Majalah Eksternal
- *Call Centre*
- Pemberitaan di Media massa

• Kode Etik Perusahaan
- Etika Bisnis
- Ruang Lingkup Etika Bisnis
- Penyebarluasan Kode Etik;
- Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik
- Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan *(Corporate Culture)*

• Komite *Good Corporate Governance*
• Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
• Pelaksanaan *Assessment* GCG

284. Perspektif Jamsostek Bersih
• Dasar Pelaksanaan
• Sosialisasi dan Diklat *Good Corporate Governance*
• Penandatanganan Pakta Integritas dan Antisuap
• Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
• Pengendalian Kecurangan
• Pengendalian Gratifikasi
• Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
• Kontribusi Manajemen Risiko Terhadap Perspektif Jamsostek Bersih
• *Internal Governance Award*
• Sistim Pelaporan Pelanggaran *(Whistle Blowing system)*
• Penilaian Jamsostek Bersih

300. INFORMASI KEUANGAN
• Laporan Keuangan 31 Desember 2013
- Surat Pernyataan Direktur Utama dan Direktur Keuangan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
- Opini Auditor Independen atas Laporan Keuangan
- Deskripsi Auditor Independen di Opini
- Perbandingan Tingkat Profitabilitas
- Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
- Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi
- Pengungkapan yang Berhubungan dengan Perpajakan
- Pengungkapan yang Berhubungan dengan Aset Tetap
- Pengungkapan yang Berhubungan dengan Segmen Operasi
- Pengungkapan yang Berhubungan dengan Instrumen Keuangan

• Laporan Penutup 31 Desember 2013
• Laporan Pembuka 1 Januari 2014

681. DAFTAR NAMA DAN ALAMAT KANTOR PUSAT, KANTOR WILAYAH, KANTOR CABANG DAN KANTOR CABANG PEMBANTU

IKHTISAR KINERJA

Ikhtisar Kinerja penting yang dicapai perusahaan selama tahun 2013 dan tahun sebelumnya.

RATA-RATA PERTUMBUHAN 5 TAHUN (2009-2013)

Kepesertaan aktif tenaga kerja tumbuh
9,80%

Kepesertaan non aktif tenaga kerja tumbuh
0,18%

Kepesertaan aktif perusahaan tumbuh
12,53%

Kepesertaan non aktif perusahaan tumbuh
8,78%

Laba
tumbuh
13,44
%
Pendapatan Iuran
tumbuh
26,99%
Aset
tumbuh
16,23%
Investasi
tumbuh
16,61%

IKHTISAR KINERJA

PENCAPAIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2013

URAIAN	RKAP	Realisasi	%
Kepesertaan aktif tenaga kerja	13.241.423	12.348.464	93,25
Kepesertaan aktif perusahaan	188.956	185.507	98,17
Pendapatan Iuran (triliun)	24,76	26,92	108,71
Aset (triliun)	157,87	153,73	97,37
Aset Investasi (triliun)	149,10	149,21	100,07
Laba (triliun)	2,19	2,28	104,84

PENCAPAIAN RASIO KEUANGAN TAHUN 2013

RATIO (%)	2013
Rentabilitas	9,40
Likuiditas	397,71
Solvabilitas	295,04
Claim Ratio	43,82
Expense Ratio	9,38
YOI Bruto	10,44

PENILAIAN KINERJA

a. Tingkat Kesehatan Perusahaan : **94% (AA) sehat**
b. Kontrak Manajemen : **106,31**
c. Opini Auditor Independen : **Wajar Tanpa Pengecualian**

d. Penilaian Kinerja Individu Direksi
- Direktorat Utama : **110,17**
- Direktorat Kepesertaan : **108.04**
- Direktorat Pelayanan : **106,16**
- Direktorat Investasi : **110,11**
- Direktorat Keuangan : **109,08**
- Direktorat Renbang & Informasi : **107,01**
- Direktorat Umum dan SDM : **106,46**

e. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris :
- Dewan Komisaris : **96,60**
- Komite Audit : **101,75**
- Komite Pemantau Manajemen Risiko : **98,75**

TATA KELOLA PERUSAHAAN

• Sosialisasi GCG	: **2701 Karyawan**
• Penandatanganan Pakta Integritas dan antisuap	: **2701 karyawan & 227 mitra kerja**
• Tingkat pemahaman pedoman GCG	: **84,76 %**
• Penyampaian LHKPN	: **96,65 %**
• Laporan Gratifikasi pada KPK	: **3 Orang**
• Diagnosis *fraud*	: **Cukup Memadai**
• *Internal Governance Award*	: **89,32 %**
• *Assessment* GCG	: **95,04% (sangat baik)**
• *Assessment* Jamsostek bersih	: **92,38%**

PENERIMAAN PENGADUAN MELALUI

• *Whistle Blowing System*	: **551**
• *Call Centre*	: **78.165**
• *Website*	: **15.447**

KINERJA LAINNYA

Tingkat *Maturity Level* Manajemen Risiko	: **2,7 (interval 1-4)**
Survey Engaged Employee	: **4,11 (interval 1-5)**
Hasil *Survey* Kepuasan Pelanggan	: **87,10 %**
Hasil *Survey* Total *Brand Equity*	: **80,80 %**

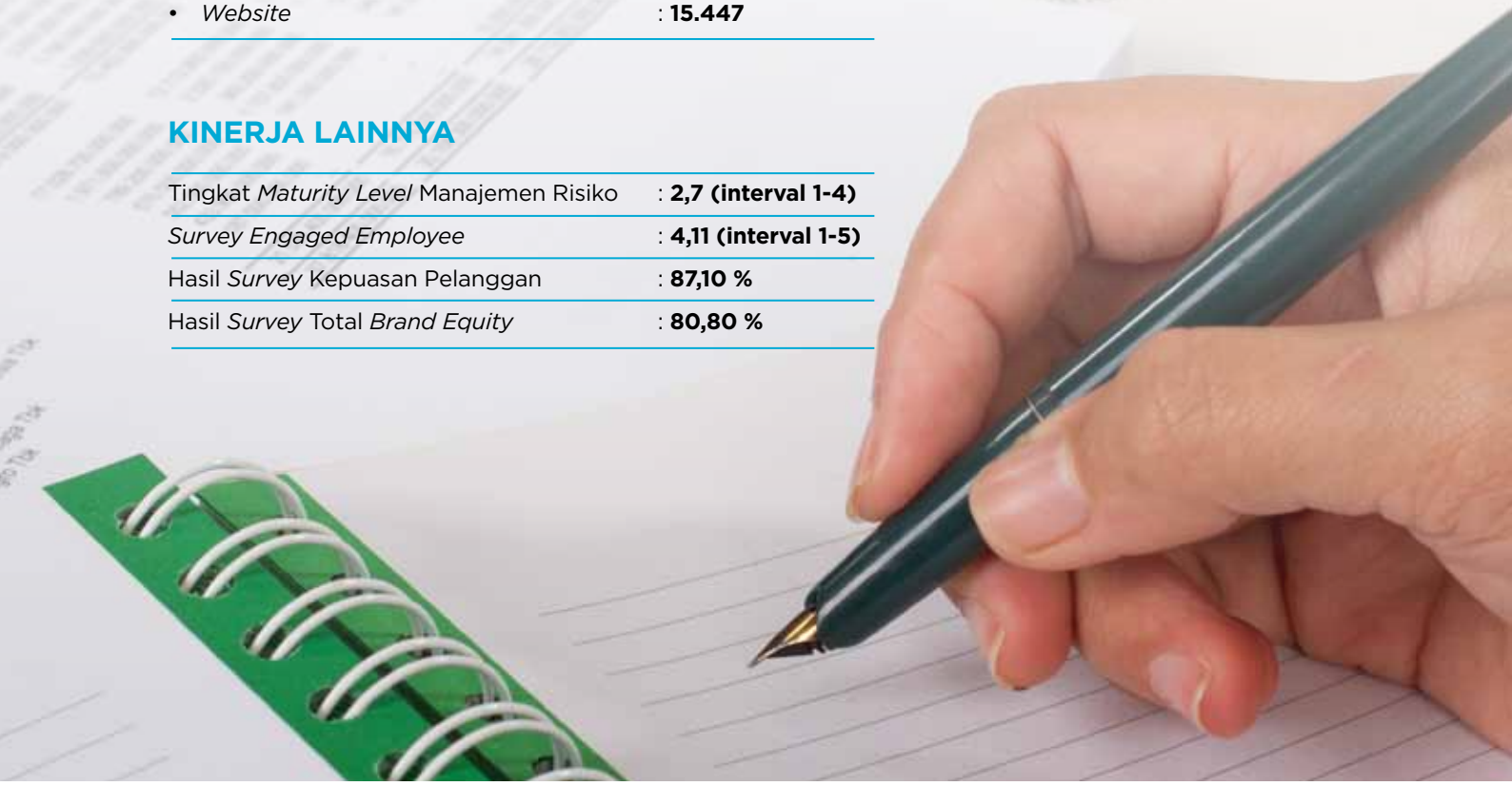

PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DAN OPERASIONAL

IKHTISAR PERTUMBUHAN DATA KEUANGAN PENTING

IKHTISAR PERTUMBUHAN HASIL USAHA DAN POSISI KEUANGAN

(dalam miliar Rp.)

DESKRIPSI	2009	2010	2011	2012	2013	Δ 2012 - 2013 (%)	CAGR (%)
Pendapatan Iuran JHT & Non JHT	11,941	13,915	16,788	20,369	26,924	32.18	22.54
Beban Jaminan JHT	5,789,841	5,878,393	6,877,718	7,966,740	9,968,268	25.12	14.55
Beban Jaminan Non JHT	1,295,305	1,474,301	1,739,912	2,099,498	3,031,641	44.40	23.69
Beban Jaminan JHT & Non JHT	7,085	7,352	8,617	10,066	12,999	29.14	16.38
Pendapatan Investasi (netto)	8,476	10,794	1,627	1,702	2,036	19.62	(29.99)
Beban Usaha	1,217	1,299	1,595	2,087	2,758	32.15	22.69
Laba Usahan Kotor	7,827	10,104	2,188	2,494	2,808	12.59	(22.61)
Bagian Peserta Atas Hasil Investasi JHT	6,335	8,368	8,640	9,718	10,704	10.15	14.01
Laba Setelah Pajak (komprehensif)	1,381	1,532	2,020	2,181	2,287	4.86	13.44
Aset Investasi	80,698	98,981	111,787	132,834	149,210	12.33	16.61
Jumlah Aset	84,248	102,741	116,627	137,532	153,733	11.78	16.23
Liabilitas Kepada Peserta	78,952	96,034	110,332	129,400	145,173	12.19	16.45
Jumlah Liabilitas	80,106	97,350	111,801	130,980	147,383	12.52	16.47
Jumlah ekuitas	4,141	5,390	4,825	6,551	6,349	(3.08)	11.28

*) Mulai tahun buku 2011 perusahan menerapkan PSAK 23 sehingga hasil dan beban investasi JHT tidak disajikan pada laporan pendapatan dan beban tetapi pada Laporan Posisi Keuangan.

IKHTISAR PERTUMBUHAN RASIO KEUANGAN

DESKRIPSI	2009	2010	2011	2012	2013	Δ 2012 - 2013 (%)	CAGR (%)
RENTABILITAS (%)	10.76	11.03	10.06	9.78	9.40	(3.91)	(3.32)
LIKUIDITAS (%)	675.65	443.98	690.27	350.51	397.71	13.47	(12.41)
SOLVABILITAS (%)	302.00	355.40	215.99	254.04	295.04	16.14	(0.58)
CLAIM RATIO (%)	48.69	47.87	45.51	45.15	43.82	(2.94)	(2.60)
EXPENSE RATIO (%)	8.60	8.54	8.74	9.35	9.38	0.33	2.21
Y O I Bruto (%)	12.86	12.38	11.57	10.83	10.44	(3.55)	(5.08)

IKHTISAR PERTUMBUHAN DATA OPERASIONAL

DESKRIPSI	2009	2010	2011	2012	2013	Δ 2012 - 2013 (%)	CAGR (%)
Kepesertaan Perusahaan:							
Aktif	115,683	134,035	154,453	168,532	185,507	10.07	12.53
Non Aktif	84,531	91,416	100,140	103,574	118,382	14.30	8.78
Jumlah Perusahaan	200,214	225,451	254,593	272,106	303,889	11.68	11.00
Kepesertaan Tenaga Kerja:							
Aktif	8,495,732	9,646,398	10,311,669	11,552,557	12,348,464	6.89	9.80
Non Aktif	20,534,941	23,383,330	16,689,965	18,259,544	20,684,515	13.28	0.18
Jumlah Tenaga Kerja	29,030,673	33,029,728	27,001,634	29,812,101	33,032,979	10.80	3.28
Penerimaan Iuran (Dalam Miliar Rp):							
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1,093.03	1,263.93	1,561.90	1,731.53	2,365.02	36.59	21.28
Jaminan Kematian (JK)	512.35	592.36	729.42	812.13	1,095.46	34.89	20.92
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	926.77	1,089.37	1,344.91	1,786.81	3,188.24	78.43	36.19
Jasa Konstruksi	117.77	116.88	156.37	270.16	193.04	(28.55)	13.15
Tenaga Kerja Mandiri	10.35	17.42	30.77	49.85	76.90	54.26	65.10
Jaminan Hari Tua (JHT)	9,281.19	10,835.64	12,965.48	15,718.95	20,005.41	27.27	21.17
Pembayaran Jaminan (Dalam Miliar Rp):							
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	343.44	376.79	499.49	506.00	563.44	11.35	13.17
Jaminan Kematian (JK)	255.80	247.11	274.99	357.37	406.84	13.84	12.30
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	665.58	813.66	931.55	1,168.33	1,957.53	67.55	30.96
Jasa Konstruksi	21.40	24.77	15.60	31.19	40.36	29.40	17.19
Tenaga Kerja Mandiri	9.08	11.97	18.28	35.79	63.46	77.31	62.59
Jaminan Hari Tua (JHT)	5,789.84	5,878.39	6,877.72	7,966.74	9,968.27	25.12	14.55
Kasus Jaminan:							
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	96,314	98,711	99,491	103,074	103,285	0.20	1.76
Jaminan Kematian (JK)	14,567	15,252	16,738	18,436	19,849	7.66	8.04
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	15,968,886	18,616,298	21,127,303	22,787,446	27,806,125	22.02	14.87
Jaminan Hari Tua (JHT)	898,889	867,723	904,927	943,324	1,054,231	11.76	4.07

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

MENGAWAL DAN MEMASTIKAN SELURUH PROSES TRANSFORMASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemegang Saham yang kami hormati

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas limpahan rahmatnya Dewan Komisaris dapat menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi PT Jamsostek (Persero) selama tahun 2013.

Penilaian kinerja Direksi

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai salah satu organ perusahaan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris telah mendayagunakan auditor internal dan eksternal serta organ pendukung Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan tahun 2013.

Berangkat dari proses transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, Direksi telah melakukan berbagai upaya untuk memperkokoh landasan dan mempersiapkan diri menjadi Badan Hukum Publik dengan melakukan serangkaian kegiatan yang terstruktur dan sistemik yang melibatkan seluruh elemen Insan Jamsostek secara masif yang meliputi:

a. Upaya yang dilakukan oleh Direksi untuk mendukung visi perusahaan diantaranya dengan menyediakan Pusat Pelayanan Informasi Program Jamsostek *(call center)*, kerjasama dengan perbankan dalam sistem informasi JHT dan pembayaran iuran melalui ATM serta Jamsostek *Service Point Office* (JSPO). Dewan Komisaris mengharapkan agar usaha yang telah dilakukan selama ini dapat berkelanjutan dan terus meningkat untuk mendukung visi BPJS Ketenagakerjaan.

Denny Indrayana
Komisaris Utama

b. Dalam kaitannya dengan misi perusahaan, perusahaan telah memberikan kontribusinya kepada peserta dan masyarakat selama ini melalui program Jamsostek, DPKP dan PKBL untuk mewujudkan misi BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi tenaga kerja, pengusaha dan pemerintah. Kelanjutan program DPKP melalui program manfaat layanan tambahan dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perlu dipersiapkan dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat bagi seluruh *stakeholders*.
c. Secara proaktif Direksi telah ikut berkontribusi menciptakan kebijakan publik yaitu mempersiapkan berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai turunan dari Undang-Undang nomor; 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan seiring dengan itu secara internal BPJS Ketenagakerjaan telah mempersiapkan Peraturan Dewan Komisaris dan Peraturan Direksi sebagai pengejawantahan peraturan perundang-undangan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka menyongsong penerapan Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan yang baik.
d. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Akuntan Publik yang telah diseleksi oleh Dewan Komisaris telah melakukan audit terhadap laporan Keuangan Perusahaan Per 31 Desember 2013 yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor: S-143/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014, Neraca Penutup Per 31 Desember 2013 yang telah disahkan oleh Menteri Negara BUMN melalui Surat Keputusan Nomor: SK-50/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014, serta Neraca Pembuka BPJS Ketenagakerjaan Per tanggal 1 Januari 2014 yang dalam proses pengesahan oleh Menteri Keuangan.
e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan audit atas kesiapan perusahaan menjadi BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya sehingga dapat diketahui langkah-langkah yang diperlukan pada masa yang akan datang.
f. Inisiasi Direksi untuk menjadikan Jamsostek bersih dari segala unsur korupsi, kolusi dan nepotisme telah mengefektifkan penerapan laporan gratifikasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan internalisasi masalah yang terkait dengan anti korupsi dengan melibatkan unsur KPK dan BPKP sebagai penyaji materi.
g. Direksi telah membangun sistem penilaian kinerja Direksi secara individu yang merupakan turunan dari *Key Performance Indicators* (KPI) korporat, danDireksi telah melakukan self assessment untuk masing-masing KPI anggota Direksi pada tahun 2013, namun demikian Dewan Komisaris akan melakukan penetapan dan penilaian KPI individu Direksi pada tahun yang akan datang.
h. Sesuai dengan undang-undang Nomor: 24 tahun 2011 tentang BPJS bahwa PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi, dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, untuk temuan audit hendaknya ditindak lanjuti.
i. Kelemahan di-bidang pengelolaan data, besarnya jumlah peserta non aktif, pesatnya pertumbuhan peserta non aktif, serta banyaknya peserta tenaga kerja perusahaan yang memiliki lebih dari satu kartu Jamostek merupakan permasalahan yang saling terkait. BPJS Ketenagakerjaan secara kontinu perlu melakukan langkah-langkah perbaikan secara komprehensif, integral dan terencana.
j. Pencapaian rasio keuangan perusahaan untuk tahun 2013 secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun pencapaian *Yield on Investment* (YoI) bruto mengalami penurunan dari tahun 2012. Dewan Komisaris menyarankan agar dapat mengembangkan strategi alokasi aset yang memberikan tingkat penghasilan yang optimal namun *prudent* dan tetap memenuhi kaidah kebijakan investasi dan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor: 99 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan.
k. Piutang iuran non JHT merupakan bagian dari siklus pendapatan iuran, sehingga sifatnya rutin dan nilainya cukup signifikan. Pada laporan keuangan penurunan nilai dari piutang iuran non JHT terus meningkat dari tahun ke tahun (2011-2013). Hal ini perlu diwaspadai karena menunjukkan kemungkinan terjadinya penambahan kepesertaan yang non aktif semakin meningkat. Untuk kedepannya manajemen dalam mengelola program non JHT agar terus mengadakan pembenahan pedoman dan sistem pencatatan.

Pandangan atas Prospek Usaha

Dalam rangka membangun kapasitas organisasi yang menunjang keunggulan operasional menuju BPJS Ketenagakerjaan yang berkelas dunia sebagai prospek usaha kedepan, pandangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Kepesertaan merupakan salah satu aspek operasional,maka diharapkan keunggulan operasional dalam mengelola data kepesertaan dapat dicapai dengan dihasilkannya data base yang berkualitas, cukup memadai dan akuntabel melalui penyelesaian her-registrasi dan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk

mendorong penyelesaian her-registrasi agar dapat dijalankan secara optimal.

b. Penambahan kepesertaan terjadi dari tahun ketahun, akan tetapi penambahan tersebut perlu diwaspadai karena penambahan kepesertaan aktif lebih kecil dibandingkan dengan kepesertaan non aktif. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan langkah-langkah yang lebih fokus yaitu mempertahankan peserta aktif dengan memberikan pelayanan yang memuaskan peserta baik kepada tenaga kerja maupun kepada perusahaan peserta.
c. Melakukan optimalisasi aset-aset investasi yang terdiversifikasi dengan baik sehingga dapat memberikan total benefit kepada peserta yang optimal, penyempurnaan pengelolaan sistem informasi investasi serta penyelesaian masalah investasi yang *non performing*.
d. Memerlukan sumber daya manusia yang adaptif dan kompeten, dan harus didukung oleh infrastruktur yang memadai melalui sistem pengelolaan *Human Capital* yaitu dengan telah diterapkannya *Competency Based Human Resources Management* (CBHRM) yang dapat memberikan dampak positif pada kompetensi SDM yang semakin meningkat, sehingga dapat memenangi kompetensi mencapai BPJS yang berkelas dunia.

Penilaian kinerja Komite audit

Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan rekomendasi secara efektif atas berbagai hal yang menjadi tugas pokok Komite Audit antara lain melakukan evaluasi sistem pengendalian intern, evaluasi hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal maupun oleh Auditor Internal (Biro Pengawasan Intern), juga melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris khususnya dalam hal pengawasan umum dan ketaatan perusahaan pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penilaian Dewan Komisaris, *Key Performance Indicator* (KPI) Komite Audit atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun 2013 mencapai skor 101.75.

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai organ pendukung Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan rekomendasi secara efektif atas berbagai hal yang menjadi tugas pokok Komite Pemantau Manajemen Risiko antara lain melakukan evaluasi lingkungan bisnis yang berdampak pada kegiatan pokok perusahaan, dan melaksanakan evaluasi atas implementasi manajemen risiko, serta menyusun Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko. Berdasarkan penilaian Dewan Komisaris, *Key Performance Indicator* (KPI) Komite Pemantauan Manajemen Risiko atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun 2013 mencapai skor 98,75%

Komite lain.

Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris, tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan dasar pertimbangan bahwa :

- Dewan Komisaris dapat membentuk Komite lainnya apabila diwajibkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan atau disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas.
- Dalam rangka memberdayakan Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris menganggap bahwa belum diperlukan adanya Komite Nominasi dan Remunerasi, hal ini akan dipertimbangkan pada saat operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan.
- Untuk itu fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko yang telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Perubahan komposisi Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) pada awal tahun 2013, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-70/MBU/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja:

Komisaris Utama : Bambang Subianto
Komisaris : Prijono Tjiptoherijanto
Komisaris : Herry Purnomo

Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-11/MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja, memberhentikan dengan hormat Prijono Tjiptoherijanto dan mengangkat anggota Dewan Komisaris lainnya, sehingga komposisi Dewan Komisaris sejak tanggal 16 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Bambang Subianto
Komisaris : Herry Purnomo
Komisaris : Herman Hidayat
Komisaris : Mathias Tambing
Komisaris : Iskandar Maula
Komisaris Independen : Bambang Wirahyoso

Keputusan Menteri BUMN nomor: SK-155/MBU/2013 tanggal 20 Februari 2013 memberhentikan Bambang Subianto sebagai Komisaris Utama dan mengangkat Denny Indrayana sebagai Komisaris Utama, sehingga komposisi Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) terhitung mulai tanggal 20 Februari 2013 menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Denny Indrayana
Komisaris	: Herry Purnomo
Komisaris	: Herman Hidayat
Komisaris	: Mathias Tambing
Komisaris	: Iskandar Maula
Komisaris Independen	: Bambang Wirahyoso
Komisaris Independen	: Hariyadi B.Sukamdani

Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-368/MBU/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu Herry Purnomo, sehingga komposisi Dewan Komisaris terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2013 menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Denny Indrayana
Komisaris	: Herman Hidayat
Komisaris	: Mathias Tambing
Komisaris	: Iskandar Maula
Komisaris Independen	: Bambang Wirahyoso
Komisaris Independen	: Hariyadi B.Sukamdani

Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-430/MBU/2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu Denny Indrayana dan Herman Hidayat, serta Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhitung mulai tanggal 30 Desember 2013, sehingga komposisi Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Mulabasa Hutabarat
Komisaris	: Mathias Tambing
Komisaris	: Iskandar Maula
Komisaris	: Ninasapti Triaswati
Komisaris	: Saleh Khalid
Komisaris Independen	: Bambang Wirahyoso
Komisaris Independen	: Hariyadi B.Sukamdani

Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka berdasarkan KeputusanPresidenNomor 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Mengakhiri laporan pengawasan Dewan Komisaris, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan kerjasama dari Direksi dan karyawan perusahaan serta pemangku kepentingan, dengan harapan kedepan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menjadi lebih baik.

Jakarta, 30 Juni 2014

Dewan Komisaris

Denny Indrayana

Komisaris Utama

LAPORAN DIREKSI

MEMPERKOKOH LANDASAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Para pemangku kepentingan yang kami hormati

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dengan segala tantangan yang ada, PT Jamsostek (Persero) telah mengawali penyelesaian proses transformasi dan mengakhiri status badan hukum korporasi menjadi badan hukum publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Oleh karena itu perkenankanlah kami untuk menyampaikan laporan tahunan PT Jamsostek (Persero) tahun 2013 sebagai berikut:

KEBIJAKAN STRATEGIS

Strategi umum perusahaan tahun 2013 sebagai tahapan *fit-in infrastructure* bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi menuju era baru implementasi jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan dengan pergeseran pada *grand strategy* yang meliputi :

1. Pengeloaan organisasi yang *product centric* menjadi lebih *costumer centric*.
2. Mengubah persepsi pendekatan kepada peserta yang bersifat wajib menjadi kebutuhan peserta.
3. Pendekatan dengan mendahulukan penegakan hukum menjadi lebih berbasis hubungan jangka panjang
4. Pengelolaan kepesertaan dan pelayanan yang pasif menjadi aktif
5. Pengelolaan administrasi perkantoran yang tradisional dan menggunakan kertas menjadi pengelolaan yang lebih modern dan ramah lingkungan

ELVYN G. MASASSYA
Direktur Utama

Inisiatif strategis pada tahapan *fit-in infrastructure* dicanangkan sebagai tahapan untuk membangun seluruh kebijakan dan infrastruktur pendukung untuk menyiapkan kapasitas organisasi sesuai paradigma dan nilai-nilai baru di era BPJS ketenagakerjaan.

Dengan menjalankan inisiatif ini pencapaian kinerja perusahaan di tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012.

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN

1. Analisis capaian dan pertumbuhan keuangan
   a. Aset
      Total aset pada akhir tahun 2013 sebesar Rp.153.73 triliun atau mencapai 97.37% dari target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2013 sebesar Rp. 157.87 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan aset selama 5 tahun terakhir (2009-2013) sebesar 16.23%.

   b. Aset Investasi
      Total aset Investasi pada akhir tahun 2013 sebesar Rp.149.21 triliun atau mencapai 100.07% dari target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2013 sebesar Rp. 149.10 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan aset Investasi selama 5 tahun terakhir (2009-2013) sebesar 16.61%.

   c. Liabilitas
      Total Liabilitas pada akhir tahun 2013 sebesar Rp.147.38 triliun atau mencapai 98.52% dari target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2013 sebesar Rp. 149.58 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan Liabilitas selama 5 tahun terakhir (2009-2013) sebesar 16.46%.

   d. Ekuitas
      Total Ekuitas pada akhir tahun 2013 sebesar Rp.6.35 triliun atau mencapai 76.61% dari target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2013 sebesar Rp. 8.28 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan Ekuitas selama 5 tahun terakhir (2009-2013) sebesar 11.27%.

   e. Penerimaan Iuran
      Realisasi penerimaan Iuran untuk periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 sebesar Rp.26,92 triliun atau mencapai 108.71% dari target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2013 sebesar Rp.24,76 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan iuran selama 5 tahun terakhir (2009-2013) sebesar 26.99%.

   f. Pendapatan Investasi
      Realisasi pendapatan Investasi untuk periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 sebesar Rp.14,87 triliun atau mencapai 101.77% dari target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2013 sebesar Rp.14,62 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan investasi selama 5 tahun terakhir (2009-2013) sebesar 14.45%.
   g. Pembayaran Jaminan
      Realisasi pembayaran jaminan untuk periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 sebesar Rp.12,99 triliun atau mencapai 124.94% dari target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2013 sebesar Rp.10,40 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan pembayaran jaminan selama 5 tahun terakhir (2009-2013) sebesar 16.39%.

   h. Beban Usaha
      Realisasi beban usaha untuk periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 sebesar Rp.2,75 triliun atau mencapai 107.59% dari target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2013 sebesar Rp.2,56 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan beban usaha selama 5 tahun terakhir (2009-2013) sebesar 22.68%.

   i. Laba Bersih
      Realisasi laba bersih untuk periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 sebesar Rp. 2,28 triliun atau mencapai 104.84% dari target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2013 sebesar Rp.2,19 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan laba bersih selama 5 tahun terakhir (2009-2013) sebesar 13.44%.

2. Kinerja perusahaan
   a. Tingkat kesehatan perusahaan
      Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Yusuf, Mawar dan Saptoto melakukan penilaian atas tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-04 MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan dengan capaian skor tahun 2013 sebesar 94 dengan predikat Sehat (AA), yang capaiannya sama dengan tahun 2012 dengan skor 94 dengan predikat Sehat (AA).

   b. Penilaian KPI Kontrak manajemen
      Berdasarkan kontrak manajemen yang telah ditandatangani antara Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT Jamsostek (Persero) dengan Dewan Komisaris dan Direksi, dilakukan penilaian secara *self assessment* oleh Tim yang dibentuk, dengan hasil penilaian tahun 2013 sebesar 106.31 mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar 94,53

   c. Tingkat solvabilitas
      Kemampuan PT Jamsostek (Persero) dalam

membayar hutang jangka panjang tercermin dalam perhitungan solvabilitas dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2011. Tingkat solvabilitas perusahaan tahun 2013 sebesar 295,41% naik 16,28% dibandingkan tahun 2012 sebesar 254,04%. Meskipun diakhir tahun 2013 harga pasar efek melemah, nilai ini masih jauh di atas target solvabilitas yang ditetapkan yaitu sebesar 159,72%. Ini berarti Perusahaan mampu memenuhi semua kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

d. Tingkat kepuasan peserta
Survey kepuasan peserta tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Konsultan Independen, dan dari hasil berbagai pelayanan dan pengembangan produk mendapat apresiasi dari peserta dengan meningkatnya hasil survei kepuasan pelanggan dari 83,6% pada tahun 2012 menjadi 87,1% pada tahun 2013.

e. Tingkat kepuasan karyawan
Survey kepuasan karyawan tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Konsultan Independen, Dari hasil *survey engagement* yang telah dilakukan maka untuk *Employee Engagement Level* (EEL) Karyawan PT Jamsostek (Persero) secara nasional adalah 4,1 dengan interval 1 sampai 5.

f. *Assessment* Jamsostek Bersih
Berdasarkan kriteria *Roadmap* BUMN Bersih sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor : S-684/MBU/2013 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Persiapan Survai BUMN Bersih maka PT Jamsostek (Persero) telah dilakukan s*elf assessment* oleh Komite GCG dengan capaian sebesar 92.38 yaitu Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk melaksanakan Jamsostek Bersih.

g. Pengukuran Pengelolaan Merk dan Pengelolaan Peserta
PT Jamsostek (Persero) telah melakukan pengukuran terhadap beberapa indikator pemasaran oleh Konsultan Independen, yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sisi pengelolaan merk dan pengelolaan peserta, melalui *brand equity,* dengan hasil adalah *Brand awareness index*: 86,0%, *Brand association index*: 72,6%, *Brand loyalty index*: 89,1%, *Brand perceived quality index*: 75,5% dan *Corporate brand equity index*: 80,6%.

h. Hasil *Assessment* GCG
Pada tahun 2013 PT Jamsostek (Persero) melakukan *assessment* GCG oleh Konsultan Independen, dimana capaian hasil *assessment* GCG PT Jamsostek (Persero) dengan skor 95,04 atau mencapai kualifikasi Sangat Baik.

i. Opini auditor independen
Opini auditor independen atas audit laporan keuangan konsolidasian PT Jamsostek (Persero) tahun buku 2013 adalah "Wajar Tanpa Pengecualian".

3. Kendala yang dihadapi
Berdasarkan tahapan transformasi yang telah dipersiapkan, perusahaan memperkuat bangunan infrastruktur pendukung dalam rangka operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan yang kokoh. Tahun 2013, merupakan tahapan *Fit – In Infrastructure* yang meliputi penguatan pada 7 (tujuh) elemen, yaitu kepesertaan, pelayanan, penguatan *database* dan teknologi informasi, investasi, keuangan, sumber daya manusia, dan *good corporate governance*. Terlepas dari capaian kinerja perusahaan yang sudah mendekati titik optimal pada tahun 2013, namun juga sangat disadari adanya kendala yang dihadapi khususnya kendala eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan.

Berdasarkan UU nomor 24 tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi meliputi:
a. Menyiapkan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan
b. Menyiapkan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian;
c. Menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan; dan
d. Menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan transformasi BPJS Ketenagakerjaan, terdapat beberapa kendala teknis operasional yang dapat diselesaikan oleh internal perusahaan, namun ditemukan kendala utama yang meliputi keterlambatan pengesahan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga pada akhir tahun 2013 pelaksanaan tahapan transformasi mengalami hambatan yang cukup berarti.

ANALISIS PROSPEK USAHA.
Tahun 2013 merupakan *milestone* akhir bagi PT Jamsostek (Persero) dalam menyiapkan transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Faktor pendorong perubahan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan adalah penetapan regulasi UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Target pasar yang harus digarap PT Jamsostek (Persero) kedepan makin besar. yang menjadi target kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari pasar formal dan pasar informal. Tahun 2014 diprediksikan akan terdapat market untuk sektor formal dan informal sebanyak 118,4 juta tenaga kerja. Sedangkan tahun 2018 diprediksikan akan mencapai jumlah tenaga kerja sebanyak 124,4 juta Tenaga kerja.

Pertumbuhan volume usaha PT Jamsostek (Persero) juga ditopang oleh pertumbuhan upah/ gaji sebagai dasar perhitungan jumlah iuran Jamsostek. Data historis menunjukkan bahwa UMP di Indonesia mengalami peningkatan rata-rata tahunan sebesar 15,64% Dengan pertumbuhan tersebut, kedepan PT Jamsostek (Persero) optimis pertumbuhan rata-rata upah akan diatas nilai 10%.

Untuk dapat memberikan perlindungan jaminan sosial secara efektif, BPJS Ketenagakerjaan kedepan mempunyai fungsi pengawasan dan inspeksi yang melekat di BPJS Ketenagakerjaan. Fungsi ini diharapkan akan meningkatkan jumlah kepesertaan mencapai *market share* sampai dengan 80% pada tahun 2018.

Tantangan dan sekaligus peluang kedepan berupa perubahan pengelolaan keuangan dan batasan biaya pengelolaan. Sesuai dengan regulasi yang akan diterapkan, pengelolaan keuangan antar program dibuat terpisah dan tidak diperbolehkan subsidi antar program. BPJS Ketenagakerjaan memperoleh biaya operasional dari *fee* pengelolaan pembiayaan 4 program

Teknologi Informasi merupakan salah satu penggerak perubahan dan menjadi salah satu upaya BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan kapasitas organisasi. dengan mengantisipasi penggunaan teknologi informasi yang berubah adalah penggunaan internet, dimana tahun 2018 menjadi 191,13 juta orang. Trend pemakaian internet ini akan dimanfaatkan untuk melakukan *contact* dan akses BPJS Ketenagakerjaan melalui internet.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Mengulangi peristiwa sosialisasi secara masif dan terstruktur atas pedoman GCG pada tahun 2007, dengan adanya penyempurnaan pedoman GCG pada tahun 2012 dan penyusunan infrastruktur GCG terutama yang terkait dengan Pedoman Kepatuhan LHKPN, pedoman pengendalian gratifikasi dan sistem pelaporan pelanggaran serta diagnosis *fraud*, perusahaan telah melaksanakan *workshop* dan sosialisasi kembali atas infrastruktur GCG kepada seluruh Insan Jamsostek dengan menghadirkan KPK dan BPKP sebagai instruktur.

Salah satu bentuk implementasi GCG agar dapat dipahami dan diterapkan pada seluruh insan jamsostek, perusahaan telah melaksnakan *Internal Governance Award* yang diikuti oleh seluruh Unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor cabang, yang telah diapresiasi dan diberikan penghargaan kepada unit kerja terbaik pada hari ulang tahun PT Jamsostek (Persero) tanggal 5 Desember 2013.

Sekalipun belum terlalu signifikan bahwa Direksi dan beberapa karyawan termasuk Direksi telah menjadi *role* model untuk melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK, seiring dengan itu pula wajib lapor yang telah menyampaikan LHKPN kepada KPK sudah mencapai 96.66% hal ini ingin membuktikan komitmen Insan Jamsostek untuk menjadi perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik dan sekaligus menjadi perusahaan yang bebas dari korupsi, suap dan gratifikasi.

Hal ini menunjukan bahwa perusahaan akan memperkokoh fondasi posisi tata kelola perusahaan dan pembentukan wilayah integritas yang bebas dari korupsi, suap, gratifikasi, kolusi dan nepotisme dalam menyongsong badan hukum baru yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
Selama Tahun 2013, Perusahaan tidak menyalurkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Hal ini sesuai dengan surat Kementerian BUMN nomor : S-478/D5.MBU/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Kewajiban Melakukan Rekonsiliasi Data PKBL dan *Cut-Off Date* Kegiatan dan Pelaporan PKBL per 31 Desember 2012. Mulai tahun 2013 perusahaan telah menetapkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP yang digunakan untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan dengan jumlah penyaluran sebesar Rp.16.4 miliar.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor: SK-295/MBU/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT. Jamsostek (Persero), susunan Direksi PT. Jamsostek (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama : Elvyn G. Masassya
2. Direktur Umum dan SDM : Amri Yusuf
3. Direktur Renbang dan Informasi : Agus Supriyadi
4. Direktur Kepesertaan : Junaedi
5. Dirketur Pelayanan : Achmad Riadi
6. Direktur Investasi : Jeffry Haryadi PM
7. Direktur Keuangan : Herdy Trisanto

Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian kami sampaikan laporan tahunan PT Jamsostek (Persero) tahun 2013, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran secara utuh atas pengelolaan perusahaan,dan kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, 30 Juni 2014

Direksi

Elvyn G. Masassya

Direktur Utama

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan 2013 (Audited), sebagai laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris PT. Jamsostek (Persero) atas pengawasan dan penasehatan pengurusan perusahaan selama tahun 2013.

PT Jamsostek (Persero)

Dewan Komisaris

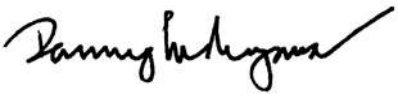

Denny Indrayana
Komisaris Utama

Herman Hidayat
Komisaris

Mathias Tambing
Komisaris

Iskandar Maula
Komisaris

Hariyadi B.Sukamdani
Komisaris Independen

Bambang Wirahyoso
Komisaris Independen

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan 2013 (Audited), sebagai laporan pertanggungjawaban Direksi PT. Jamsostek (Persero) atas pengurusan perusahaan selama tahun 2013.

PT Jamsostek (Persero)

Direksi

Elvyn G. Masassya
Direktur Utama

Jeffry Haryadi PM
Direktur Investasi

Achmad Riadi
Direktur Pelayanan

Herdy Trisanto
Direktur Keuangan

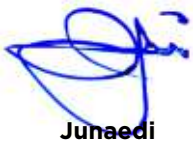

Junaedi
Direktur Kepesertaan

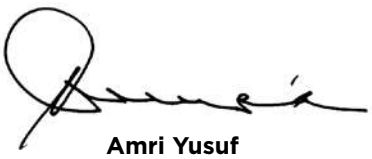

Amri Yusuf
Direktur Umum dan SDM

Agus Supriyadi
Direktur Perencanaan
Pengembangan dan Informasi

SEKILAS JAMSOSTEK

Rebranding, perubahan identitas dari esensi terbaik nilai-nilai perusahaan.

Identitas Perusahaan

PT JAMSOSTEK (Persero) atau yang selanjutnya disebut perusahaan memiliki sejarah panjang. Dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS) dan diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja.

Tahun 1977 menjadi tonggak sejarah penting bagi Jamsostek, yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/ pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Di waktu yang sama terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK, yaitu Perum Astek.

Tonggak sejarah penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Menindaklanjuti UU tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No.36/1995 yang menetapkan PT Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Fungsi yang dijalankan Jamsostek sendiri merupakan kelanjutan program asuransi sosial tenaga kerja yang dirintis oleh PT ASTEK sejak tahun 1977.

Sejak diamandemennya UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, yang disusul dengan terbitnya UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), keberadaan dan peran Jamsostek menjadi semakin penting dan strategis. Terlebih lagi dengan ditetapkannya UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, Jamsostek yang akan berubah menjadi Badan Hukum Publik, tetap menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja, dengan nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Menjadi BPJS Ketenagekerjaan menjadi tonggak sejarah penting bagi PT Jamsostek (Persero) untuk secara terus menerus memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. Menciptakan satu tekad baru *(positioning)* menjadi Jembatan Menuju Kesejateraan Pekerja merupakan suatu janji yang harus diwujudkan setelah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Diusianya yang ke-36 tahun pada 5 Desember 2013, keberadaan dan kehadiran perusahaan ini semakin terasa manfaatnya, tidak hanya bagi pengusaha dan pekerja, tetapi juga bagi negara dan masyarakat. Peningkatan manfaat program terus diupayakan. Kualitas pelayanan juga terus disempurnakan. Seluruh upaya itu dilakukan untuk semakin memantapkan dirinya sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, Jamsostek pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Seluruh program tersebut telah dirancang untuk memberikan perlindungan dasar yang memenuhi kebutuhan minimal tenaga kerja dan keluarganya, yang diharapkan juga dapat memberikan kepastian bagi tetap berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program Jamsostek tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Profil Perusahaan PT. Jamsostek (Persero)	
Nama	PT. Jamsostek (Persero)
Nama Panggilan	Jamsostek
Bidang Usaha	Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Alamat	Jalan Jenderal Gatot Subroto No.79., Jakarta 12930
Telepon	021 – 520 7797
Faksimili	021 – 526 0441
Call Center	021 – 520 7797 ext 9
Homepage	www.jamsostek.co.id
Email	biro.humas@jamsostek.co.id
Tanggal Berdiri	5 Desember 1977
Dasar Hukum Pendirian	▪ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja ▪ Akta Notaris Nomor : 19 tanggal 22 November 2012 notaris Elly Halida SH
Modal Dasar	Rp. 8.000.000.000.000,-
Modal Disetor	Rp. 4.000.000.000.000,-
NPWP	(01.001.676.4.093.000)
TDP	(09.03.1.84.36592)
SIUP	(PP 36 tahun 1995)
Kantor Cabang dan Kantor Layanan	▪ 11 Kantor Wilayah ▪ 121 Kantor cabang ▪ 53 Kantor Cabang Pembantu
Jumlah Karyawan	▪ 3277 Karyawan di tahun 2012 ▪ 3854 Karyawan di tahun 2013
Pemegang Saham	Pemerintah Republik Indonesia (100,00%)
Serikat Karyawan	Serikat Pekerja Jamsostek

Makna Logo, Filosofi, Motto dan Rebranding Perusahaan

JAMSOSTEK
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

Makna Logo Perusahaan

Logo PT Jamsostek (Persero) dengan bentuk yang tampak saat ini mulai diberlakukan melalui Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/228/0896 tanggal 1 Agustus 1996. Secara keseluruhan, logo tersebut merupakan interprestasi dari tugas PT Jamsostek (Persero) dalam menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap risiko sosial sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk dan lambang luwes tanpa garis tepi atau *outline* namun tampil tegas dan lugas menggambarkan kualitas atau nilai-nilai dasar perusahaan yang berpikiran terbuka, tanggap dan profesional. Huruf J menggambarkan PT Jamsostek (Persero) menggalang dan menjembatani hubungan atas dasar kemitraan dengan pelanggan, pemasok dan antar organisasi sendiri.

Bentuk lingkaran tanpa garis tepi melambangkan tekad PT Jamsostek (Persero) untuk mewujudkan dirinya menjadi Pusat Keunggulan dan menjadi tauladan bagi BUMN lainnya. Tulisan JAMSOSTEK pada lambang dilengkapi dengan tulisan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), dimaksudkan untuk menjamin kesamaan dan mengukuhkan posisinya sebagai penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Warna lambang hijau, (perpaduan warna hijau *Cyan* 100 persen dan *Yellow* 100 persen) melambangkan rasa teduh yang didapatkan dari kepuasan pelanggan atas pelayanan dan kemanfaatan program adalah nilai budaya perusahaan yang menjadi pola tingkah laku perusahaan. Warna hitam dan nuansanya melambangkan ketegasan, keterkaitan dan keterikatan (komitmen) melengkapi warna hijau yang teduh. Jenis huruf *Avant Garde Bold* untuk tulisan JAMSOSTEK dan *Helvetca Italic* untuk tulisan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) digunakan karena keduanya adalah jenis huruf yang mudah dibaca, bersifat universal penggunaannya, tegas dan luwes.

Filosofi Jamsostek

a. Jamsostek dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain.

b. Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program Jamsostek dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

Moto Jamsostek

Tahun 2013 PT Jamsostek (Persero) menyampaikan motto yang baru kepada publik yaitu

"Untuk Hidup Lebih Berkualitas"

Penyusunan motto Perusahaan dilandaskan pada UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan peraturan yang ada, Perusahaan dituntut untuk tidak hanya memberikan perlindungan yang bersifat dasar, tapi juga harus dapat berkompetisi dalam memberikan manfaat yang komprehensif kepada peserta.

Hal tersebut juga sejalan dengan visi Perusahaan, yaitu menjadi BPJS berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, unggul dalam operasional dan pelayanan. Karena itu, Perusahaan berupaya untuk merealisasikan pemberian *benefit* yang lebih komprehensif dari hanya sekedar *financial benefit*, yaitu memberikan *total benefit* untuk setiap peserta selain manfaat pokok program JKK,JHT, JKM dan JPK berupa *housing benefit, food benefit* dan lain-lain.
Selain itu, Perusahaan juga secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan menjadi lebih bersahabat sehingga peserta dapat merasakan pelayanan yang berstandar internasional. Peningkatan kualitas layanan dimulai dari penyempurnaan *service blue print* dan menjalankan program Pelayanan Prima di semua kantor cabang.

Rebranding PT Jamsostek (Persero)

Transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan diiringi dengan semangat untuk memberikan yang lebih baik kepada peserta dan calon peserta program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia. Transformasi yang dilakukan ini juga disertai dengan keinginan yang kuat dari manajemen PT Jamsostek (Persero) untuk menciptakan "Jamsostek yang baru", yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya.
Walaupun transformasi merupakan sebuah tuntutan dari disahkannya UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, bukan itu saja alasan perusahaan dalam melakukan transformasi tersebut bagi PT Jamsostek (Persero), Undang-Undang hanya menjadi salah satu *trigger* terjadinya transformasi. Dibelakang itu, perusahaan memang telah memiliki kemauan yang sangat kuat untuk melakukan perubahan. Perusahaan ingin berubah dari *institutional oriented* ke *consumer oriented.*

Bersamaan dengan itu, nama dan juga logo perusahaan juga sudah tidak bisa lagi digunakan. Sehingga perlu dilakukan proses merumuskan kembali esensi merek *(rebranding)* bagi BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, perubahan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengganti logo Jamsostek menjadi logo BPJS Ketenagakerjaan.

Tiga hal utama yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan merek *(brand)* sejak triwulan pertama tahun 2013, yaitu membangun *strategic brand platform*, *visual communication platform* dan *engagement platform.* Semua *platform* tersebut disusun berdasarkan esensi BPJS Ketenagakerjaan yang baru yaitu "Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja".
Proses *rebranding* BPJS Ketenagakerjaan diselesaikan dalam 6 bulan. Proses *rebranding* dilaksanakan bekerjasama dengan konsultan merek, DM ID Holland. Penggalian informasi atau data dilakukan dengan keterlibatan internal (Direksi, Dewan Komisaris, Manajemen) dan keterlibatan eksternal (perusahaan peserta, asosiasi pengusaha serta serikat pekerja). Beberapa cara yang dilakukan yaitu wawancara, diskusi dan riset. Selain itu, visi, misi dan tata nilai yang sudah ada di PT Jamsostek (Persero) juga menjadi pertimbangan dalam merumuskan esensi merek.

Hasilnya adalah rumusan empat pilar penunjang "jembatan" yang menjadi pengantar masyarakat pekerja menuju kesejahteraannya, yaitu *security prosperity, integrity* dan *sustainability*. Keempat pilar tersebut dipresentasikan dalam bentuk pewarnaan logo BPJS Ketenagakerjaan:

BPJS Ketenagakerjaan

Hijau
Warna hijau melambangkan kesejahteraan. Warna hijau diharapkan dapat merepresentasikan nilai-nilai pertumbuhan, harmoni, kesegaran, stabilitas dan keamanan.

Putih
Warna putih melambangkan integritas. Warna putih diharapkan dapat merepresentasikan kemurnian, kebersihan dan kesempurnaan sebagai simbol kebaikan.

Kuning
Warna kuning melambangkan optimisme. Warna kuning diharapkan dapat merepresentasikan optimisme, pencerahan dan kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik.

Biru
Warna biru melambangkan keberlanjutan. Warna biru diharapkan dapat merepresentasikan kepercayaan, kesetiaan, kebijaksanaan, kepercayaan diri, keahlian dan ketahan jangka panjang.

Logo

Secara kasat mata, logo BPJS Ketenagakerjaan tidak jauh berbeda dibandingkan dengan logo PT Jamsostek (Persero). Berdasarkan hasil survey, logo Jamsostek sudah sangat kuat melekat di benak peserta Jamsostek dan masyarakat. Tujuannya tak lain agar peserta tidak menjadi bingung dan *awareness* masyarakat terhadap Jamsostek yang sudah sangat baik dapat tetap terjaga.

Selain dari sisi warna, perbedaan lain pada logo BPJS Ketenagakerjaan adalah pada tipologi huruf "J" yang membelah lingkaran. Sama seperti pada logo PT Jamsostek (Persero), huruf "J" pada logo BPJS Ketenagakerjaan juga dibuat membelah lingkaran. Perbedaannya adalah huruf "J" pada logo BPJS Ketenagakerjaan dibuat makin membesar dari bawah ke atas. Ini melambangkan cita-cita BPJS Ketenagakerjaan yang terus bergerak naik dan semakin memberikan banyak manfaat bagi pekerja. Huruf "J" juga dibuat melebihi diameter lingkaran melambangkan sebagai puncak pencapaian, yaitu *universal coverage* bagi kesejahteraan seluruh tenaga kerja di Indonesia.

Pengaplikasian logo tersebut ke dalam operasional BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan sejak 1 Januari 2014. *Signboard, façade, phylon* (penunjuk kantor) sampai *stationary* yang digunakan telah berganti dengan logo baru.

Visi, Misi Dan Tata Nilai Perusahaan

PT Jamsostek (Persero) menjalankan usaha dengan dilandasi visi dan misi sebagai pilar setiap aktivitas pengelolaan manajemen dan operasional perusahaan. Sebagai badan penyelenggara program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya dalam menghadapi risiko sosial ekonomi. Risiko yang terjadi berupa berkurang atau hilangnya sebagian penghasilan karena kecelakaan kerja, mencapai usia tua, meninggal, atau sakit.

Hal ini sesuai dengan maksud pendirian perusahaan, sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero). Berdasarkan tujuan perusahaan tersebut, dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2009–2013 ditetapkan visi dan misi perusahaan, dimana Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyatakan persetujuan atas Visi dan Misi perusahaan sebagaimana tertuang dalam surat Menteri BUMN nomor: S-419/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Jamsostek (Persero) Periode 2013-2017.

VISI

Dalam rangka mempersiapkan transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, Visi PT Jamsostek dirumuskan kembali menjadi:

"Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam operasional dan pelayanan."

Penjelasan Visi

BPJS berkelas dunia adalah BPJS yang mampu memberikan pelayanan yang memiliki standar tinggi dalam hal desain produk dan manfaat minimal sesuai dengan konvensi internasional yang diakui oleh pelaku jaminan sosial di seluruh dunia dan kualitas pelayanan terbaik sesuai dengan praktik-praktik terbaik yang diimplementasikan ditingkat internasional. Dengan menerapkan dan mengimplementasikan standarisasi tersebut, maka diharapkan tingkat layanan BPJS Ketenagakerjaan dapat bersaing dan disandingkan dengan penyedia jaminan sosial di negara-negara lain.

BPJS yang terpercaya adalah BPJS yang bersih dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan harkat dan martabat masyarakat luas dan pengelola dana publik. BPJS Ketenagakerjaan dituntut agar dapat mendesain sistem operasional dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan jaminan sosial dapat benar-benar transparan dan meminimalkan tingkat *fraud*. Kepercayaan publik dan peserta hanya bisa kita peroleh apabila BPJS dapat mengembangkan mekanisme pengawasan ini secara efektif dan konsisten.

BPJS yang bersahabat adalah BPJS yang memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan peserta. Selayaknya sahabat yang mengerti akan kebutuhan sahabatnya, BPJS diharapkan menjadi penyedia jaminan sosial yang mengerti akan kebutuhan pesertanya. Sesuai dengan amanah baru UU BPJS, BPJS dituntut agar dapat mendekatkan diri dengan seluruh peserta di seluruh Indonesia sehingga peserta dapat lebih dekat, lebih mudah dan lebih nyaman dalam mengakses seluruh jaringan pelayanan BPJS.

Dalam mencapai kesemuanya itu diperlukan integrasi terhadap semua aspek sehingga dapat menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang unggul dalam operasional dan pelayanan. Sebagai administrator pelayanan jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dituntut untuk membangun proses bisnis yang benar-benar efisien dan bebas dari kesalahan *(free error)* dengan data yang akurat dan ditunjang oleh teknologi informasi dan sistem informasi yang handal. Desain tersebut akan menunjang *platform* pelayanan yang lebih komprehensif dalam menjawab kebutuhan dan keinginan peserta (*e-registration, e-payment* dan *e-claim*).

Basis keunggulan operasional tersebut akan menunjang keunggulan pelayanan kepada peserta pada aspek penghantaran layanan dan proses inovasi pelayanan kepada peserta. Dengan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan tersebut kedepannya pelayanan yang diberikan kepada peserta dapat lebih mudah diakses oleh peserta, lebih akurat dan lebih cepat dengan perlindungan yang komprehensif *(total benefit)*.

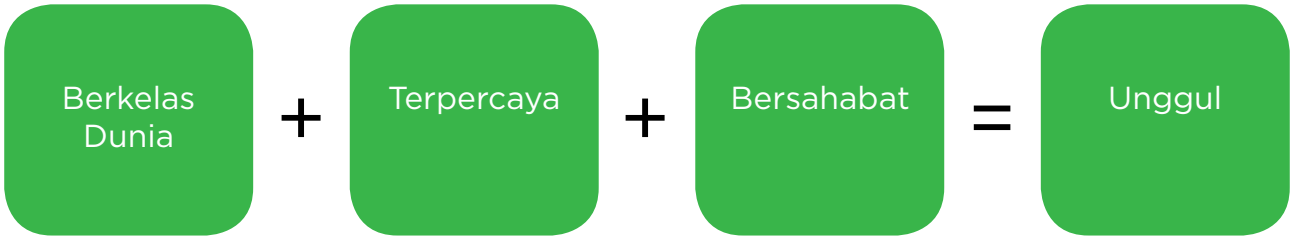

Misi

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi :

Tenaga Kerja : Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga.
Perlindungan yang layak mutlak dibutuhkan oleh setiap tenaga kerja di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, tenaga kerja tidak lepas dari keluarga mereka. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan oleh BPJS tidak berhenti sampai individu tenaga kerja melainkan melingkupi anggota keluarga yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut.

Pengusaha : Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.
Dalam usaha melindungi tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan merupakan mitra pengusaha dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Jaminan sosial yang diberikan BPJS diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi setiap tenaga kerja dan pada akhirnya membantu setiap tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitasnya.

Negara : Berperan serta dalam pembangunan.
Pemberian jaminan kepada setiap tenaga kerja di Indonesia akan memampukan setiap tenaga kerja untuk berproduktivitas secara maksimal. Dengan setiap tenaga kerja yang berpoduktivitas secara maksimal akan terbentuk suatu angkatan kerja yang produktif dalam menyokong pembangunan negara. Dana yang terhimpun dan menjadi kelolaan BPJS diharapkan dapat menjadi akumulasi modal dalam pembiayaan pembangunan negara Indonesia.

Perubahan visi dan misi tersebut tentunya membutuhkan perubahan paradigma, pola dan budaya kerja pada seluruh insan Jamsostek. Oleh karena itu, Manajemen membangun etos kerja baru di seluruh lingkungan perusahaan untuk menopang implementasi nilai-nilai perusahaan yang selama ini sudah dicanangkan sebelum memasuki proses transformasi menuju BPJS Ketenagakerjaan.

Tata Nilai

Tata nilai perusahaan yang dianut oleh segenap insan Jamsostek adalah memiliki keyakinan iman dalam diri, bekerja profesional, menjadi teladan, memiliki integritas, serta mampu bekerjasama.

Iman	Profesional	Teladan	Integritas	Kerjasama
▪ Taqwa ▪ Berpikir Positif ▪ Tanggung Jawab ▪ Pelayanan Tulus Ikhlas	▪ Berprestasi ▪ Bermental Unggul ▪ Proaktif ▪ Bersikap Positif terhadap perubahan dan pembaharuan	▪ Berpandangan jauh kedepan ▪ Penghargaan dan bimbingan ▪ Pemberdayaan	▪ Berani ▪ Komitmen ▪ Keterbukaan	▪ Kebersamaan ▪ Menghargai pendapat ▪ Menghargai orang lain

Nilai budaya PT Jamsostek (Persero) diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KEP/355/122009 Tentang Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero)

Etos Kerja Dan Karakter

Sebagai salah satu bentuk komitmen Direksi untuk mendorong motivasi kinerja karyawan, telah disepakati pula Etos Kerja bagi seluruh insan Jamsostek yaitu: *Teamwork, Open Mind, Passion, Action, Sense of Belonging* atau dikenal dengan TOPAS.

- ***Teamwork*** **:** Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan perusahaan.
- ***Open Mind*** **:** Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima gagasan gagasan baru yang lebih baik.
- ***Passion*** **:** Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan.
- ***Action*** **:** Segera melaksanakan rencana pekerjaan/ tugas yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.
- ***Sense*** **:** Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggung jawab dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah perusahaan.

Sebagai pondasi untuk memperkuat nilai-nilai dan etos kerja perusahaan, maka insan Jamsostek juga diharapkan untuk memiliki karakter-karakter:

- *Less Beurocratic (Decision Making Process)*
- *Less Feudalism (Professional Intimacy)*
- *More Modern (World Class Company* berbasis Teknologi, dan *Customer Oriented)*
- *More Friendly (World Class Service)*
- *More Fancy (Homey Office, fun, sense of art, sense of sport)*

Tujuan Dan Bidang Usaha

Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT Jamsostek (Persero), Akta Notaris Elly Halida, SH Nomor: 19 tanggal 22 November 2012 dicantumkan dalam Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha adalah: "Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial melalui penyelenggaraan program perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem jaminan sosial, serta optmalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas."

Perusahaan dapat pula mendirikan atau menjalankan perusahaan dan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan lainnya sepanjang yang demikian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan -ketentuan dalam anggaran dasar ini.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
(b) Jaminan Kematian (JK)
(c) Jaminan Hari Tua (JHT)
(d) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Disamping itu dalam perkembangannya, untuk meningkatkan cakupan perlindungan kepada semua tenaga kerja, PT Jamsostek (Persero) menyelenggarakan program perlindungan untuk Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan diluar Hubungan Kerja dan perlindungan di Sektor Jasa Konstruksi, yang dipayungi dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP 196/ MEN/1999 Tanggal 29 September 1999.

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial

Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis, Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jamsostek menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan karena sakit, cacat atau kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental. Jaminan itu mencakup kompensasi dan rehabilitasi jika pekerja mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai kembali ke rumah atau menderita penyakit berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.

Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya meliputi:

a. Biaya transportasi meliputi darat/sungai/danau, laut dan udara
b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan dan
c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu *(orthese)* dan/atau alat ganti *(prothese)* bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Selain penggantian biaya kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi:

a. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
b. Santunan cacat meliputi cacat sebagian tetap, total-tetap dan kurang fungsi
c. Santunan kematian dan uang kubur dan/atau
d. Santunan berkala.

Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian (JK) diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja peserta Jamsostek yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JK diperuntukkan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman uang santunan. Program ini bukan hanya meringankan ahli waris peserta Jamsostek, melainkan juga tidak membebani pekerja semasa hidupnya karena iuran JK ditanggung oleh pengusaha.

Jaminan Kematian yang diberikan adalah Rp 21 juta, terdiri dari Rp14,2 juta untuk santunan kematian, Rp2 juta biaya pemakaman, dan santunan berkala sebesar Rp200.000 per bulan selama 24 bulan. Dengan demikian, keluarga mendiang peserta Jamsostek teringankan beban hidupnya.

Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti meninggal dunia, cacat total tetap, atau telah memasuki usia pensiun (55 tahun). JHT dikelola dengan pendekatan tabungan wajib yang dibiayai dari iuran yang dibayarkan oleh setiap tenaga kerja dan pemberi kerja/pengusaha. Iuran tersebut dikaitkan dengan tingkat upah yang dibayarkan oleh pengusaha.

Iuran program JHT adalah sebesar 5,7 persen dari upah setiap bulan berasal dari pengusaha sebesar 3,7 persen dan pekerja yang bersangkutan sebesar

2,0 persen. Manfaat JHT akan dibayarkan kepada peserta berdasarkan akumulasi iuran dan hasil pengembangan dengan memenuhi salah satu dari persyaratan berikut:

- Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap.
- Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan masa tunggu 1 (satu) bulan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009.
- Pergi ke luar negeri dan tidak kembali, atau menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sebagai salah satu program untuk membantu tenaga kerja dan keluarganya memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan sebagai hak yang harus diperolehnya. Pemeliharaan kesehatan diberikan secara komprehensif terdiri dari jasa pelayanan yang berhubungan dengan promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Iuran JPK sepenuhnya dibayarkan oleh pengusaha sebesar 3 persen dari upah untuk pekerja lajang dan 6 persen untuk pekerja yang telah berkeluarga.

Adanya jaminan pemeliharaan kesehatan memberikan ketenangan bagi para pekerja untuk lebih berkonsentrasi dan lebih produktif dalam bekerja. Setiap tenaga kerja yang telah mengikut program JPK akan memperoleh Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), terdiri dari:

a. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama meliputi pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum dan dokter gigi serta tindakan medis sederhana.
b. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan berupa pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis.
c. Pelayanan rawat inap.
d. Pertolongan persalinan.
e. Pelayanan penunjang *diagnostic* meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi, *Electro Encephalography* (EEG), *Electro Cardiography* (ECG), *Ultra Sonography* (USG), *Computerized Tomography Scanning (CT. Scanning)*.
f. Pelayanan khusus meliputi penggantian biaya kacamata, *prothese*, dan *orthose.*
g. Pelayanan gawat darurat,
h. Pelayanan kesehatan untuk penyakit kronis dan kritis meliputi: tindakan hemodialisa (cuci darah), tindakan operasi jantung, pengobatan, perawatan dan/atau tindakan medis atas penyakit kanker, biaya transplantasi organ tubuh ginjal, hati atau sumsum tulang belakang, dan pengobatan, perawatan dan/atau tindakan medis atas penyakit HIV/AIDS. Pelayanan diberikan melalui jaringan Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK)

Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) adalah Tenaga Kerja yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi atau usaha-usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut (pada umumnya mereka yang bekerja pada sektor informal) dengan tujuan:

- Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko, antara lain kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
- Memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja.

Sektor Jasa Konstruksi

Adalah Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP 196/MEN/1999 Tanggal 29 September 1999.
Setiap Kontraktor Induk maupun Sub Kontraktor yang melaksanakan proyek Jasa Konstruksi dan pekerjaan borongan lainnya wajib mempertanggungkan semua tenaga kerja (borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek tersebut kedalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Adapun proyek-proyek tersebut meliputi:

- Proyek-proyek APBD
- Proyek-proyek atas Dana Internasional
- Proyek-proyek APBN
- Proyek-proyek swasta, dll

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pusat yang menggambarkan pembagian tugas Direksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor : KEP/111/032013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Jamsostek (Persero) adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Jamsostek (Persero)

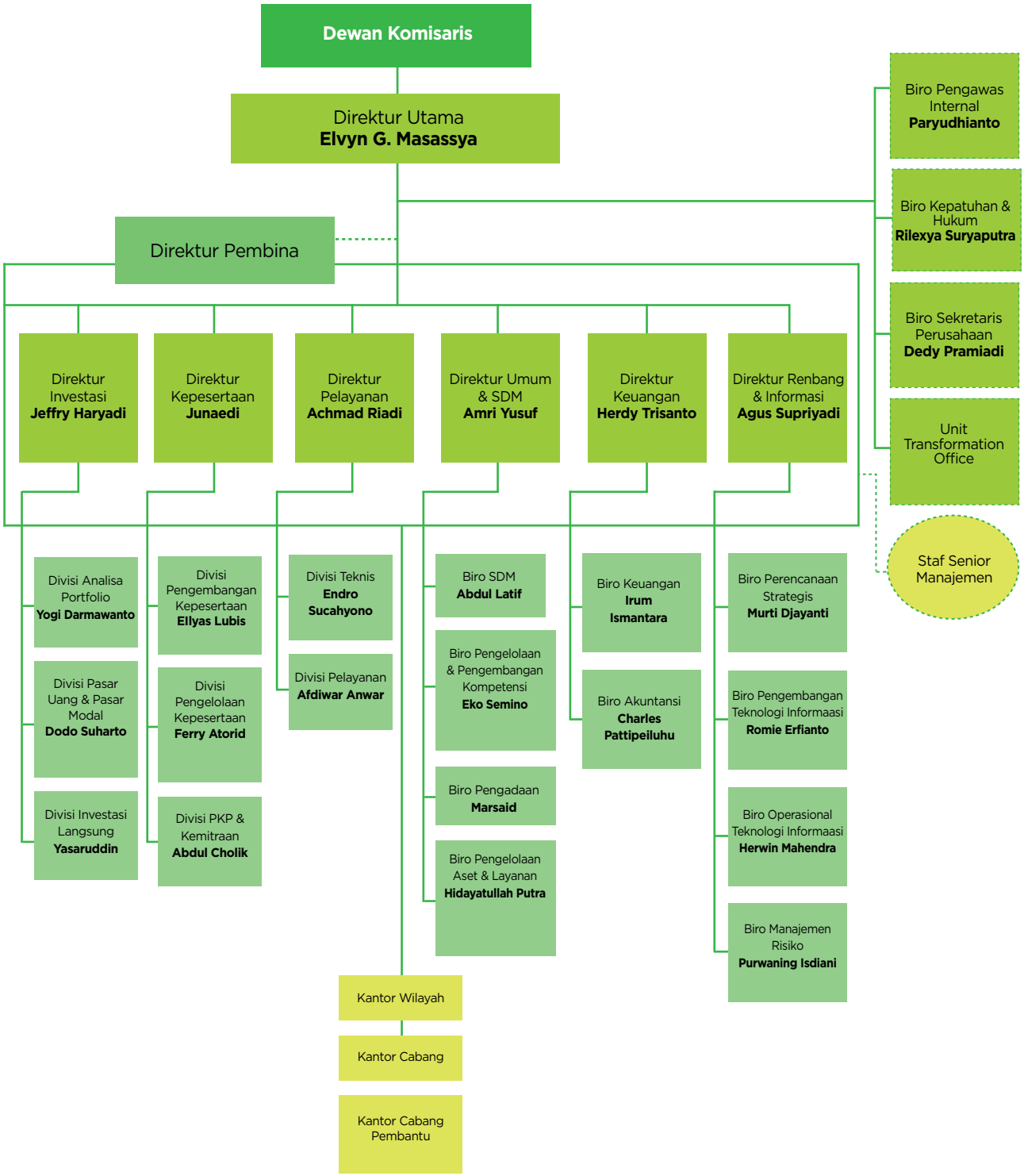

Struktur organisasi Kantor Wilayah

Kantor Wilayah berada dibawah koordinasi Direktur Utama, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah. Kantor Wilayah mempunyai fungsi dan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengarahan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan operasional Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang berada di bawahnya serta menerapkan kepatuhan *(Good Coorporate Governance/GCG)*. Kantor Wilayah membawahi Kantor Cabang yang berada di wilayahnya.

Bagan struktur organisasi Kantor Wilayah sesuai KEP/111/032013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Jamsostek (Persero) adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kantor Wilayah PT Jamsostek (Persero)

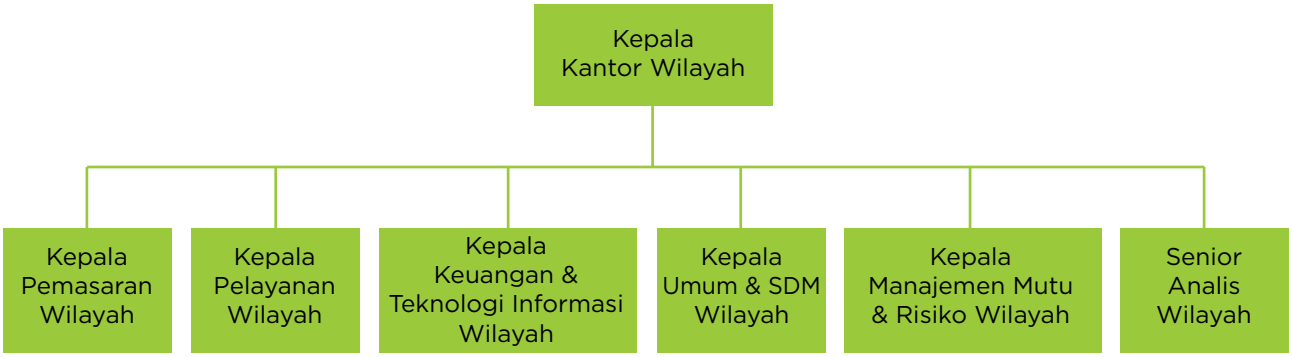
Kepala Kantor Wilayah
Kepala Pemasaran Wilayah
Kepala Pelayanan Wilayah
Kepala Keuangan & Teknologi Informasi Wilayah
Kepala Umum & SDM Wilayah
Kepala Manajemen Mutu & Risiko Wilayah
Senior Analis Wilayah

Struktur organisasi Kantor Cabang

Kantor Cabang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Cabang. Kantor Cabang mempunyai fungsi perencanaan pengarahan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan pemasaran, pelayanan peserta, keuangan, umum dan SDM serta penerapan kepatuhan yang didukung teknologi informasi guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan terselenggaranya pelayanan kepada peserta. Kantor Cabang membawahi Kantor Cabang Pembantu yang berada di Wilayahnya dimana Kantor Cabang Pembantu terdiri dari staf pemasaran dan pelayanan serta staf administrasi dan dukungan usaha.
Bagan struktur organisasi Kantor Cabang Kelas I, sesuai KEP/111/032013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Jamsostek (Persero), adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kantor Cabang Kelas I PT Jamsostek (Persero)

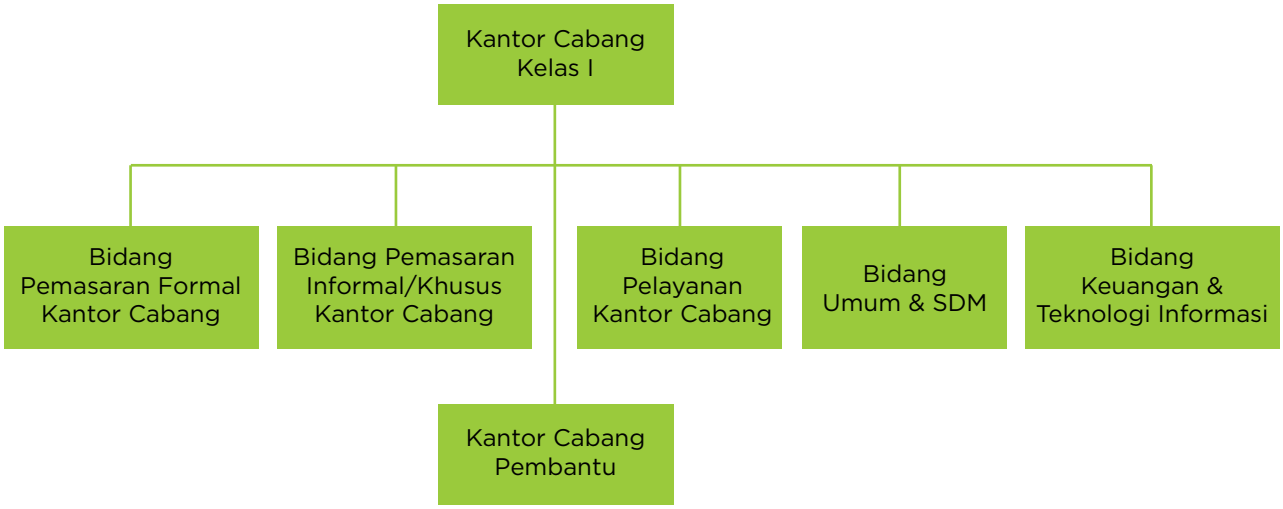
Kantor Cabang Kelas I
Bidang Pemasaran Formal Kantor Cabang
Bidang Pemasaran Informal/Khusus Kantor Cabang
Bidang Pelayanan Kantor Cabang
Bidang Umum & SDM
Bidang Keuangan & Teknologi Informasi
Kantor Cabang Pembantu

Bagan struktur organisasi Kantor Cabang Kelas II, Kelas III dan Kantor Cabang Pembantu, sesuai KEP/111/032013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Jamsostek (Persero), adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kantor Cabang Kelas II PT Jamsostek (Persero)

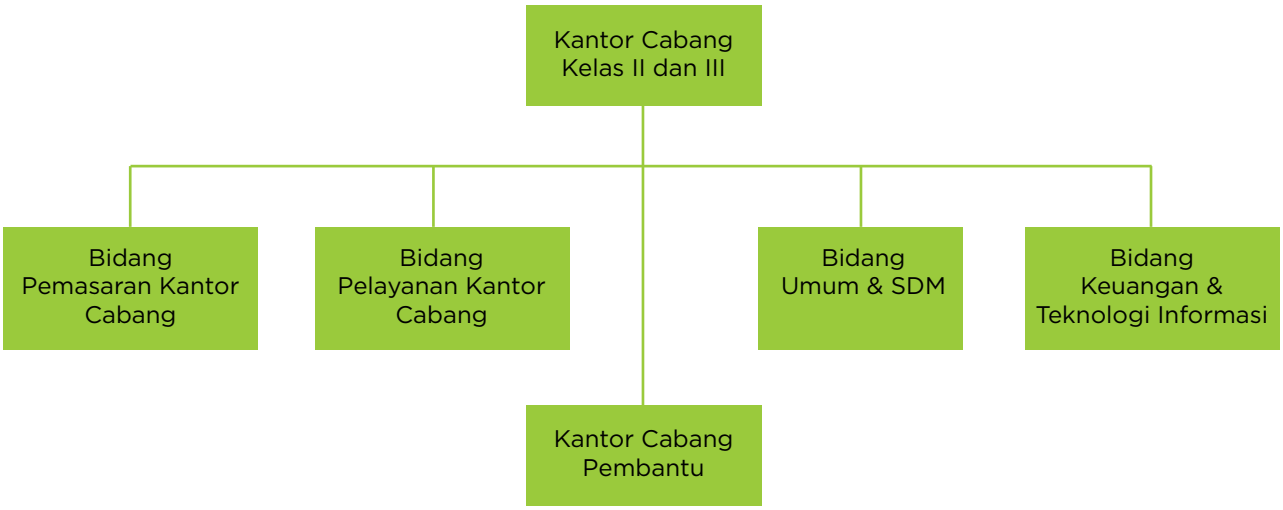
Kantor Cabang Kelas II dan III
Bidang Pemasaran Kantor Cabang
Bidang Pelayanan Kantor Cabang
Bidang Umum & SDM
Bidang Keuangan & Teknologi Informasi
Kantor Cabang Pembantu

Struktur Organisasi Kantor Cabang Kelas III PT. Jamsostek (Persero)

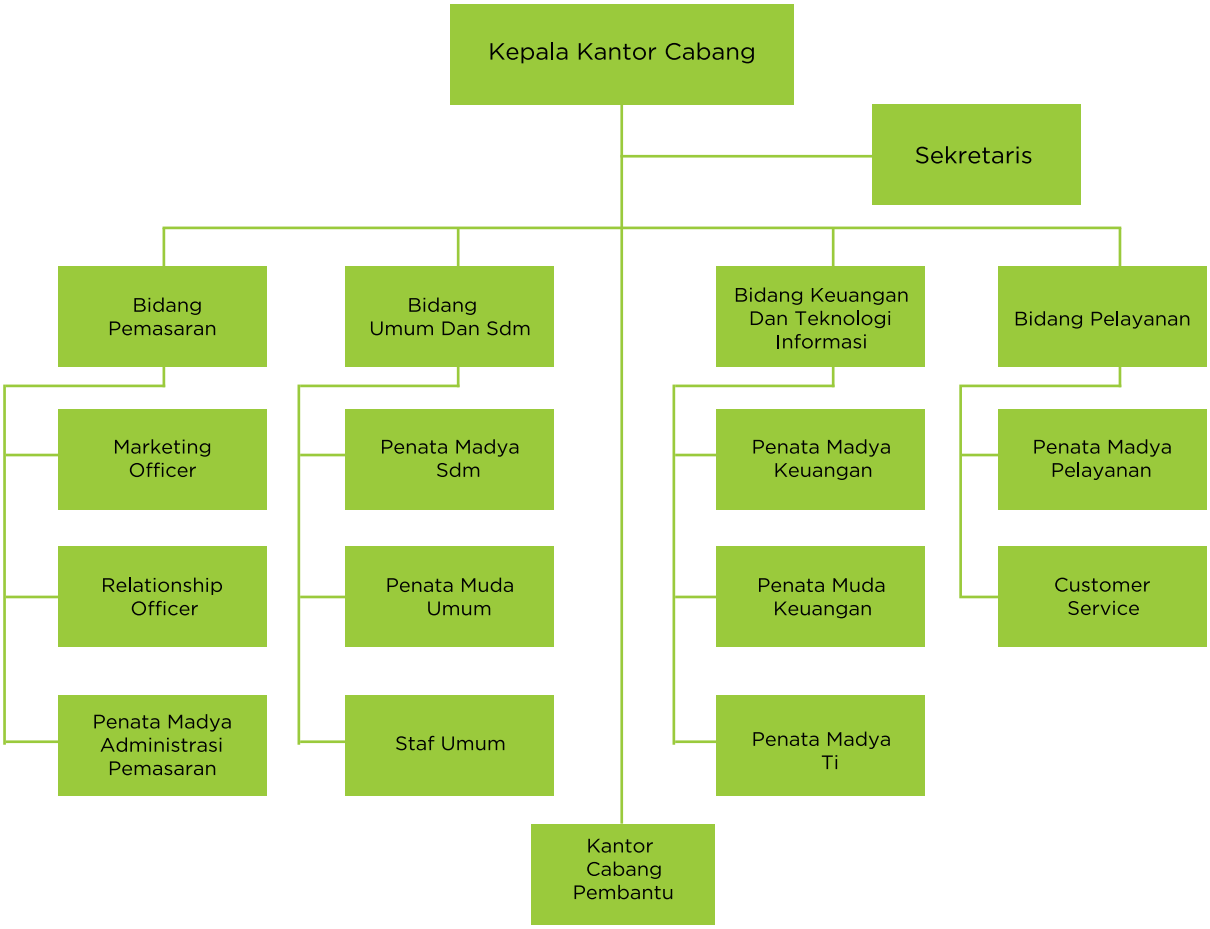

Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu PT. Jamsostek (Persero)

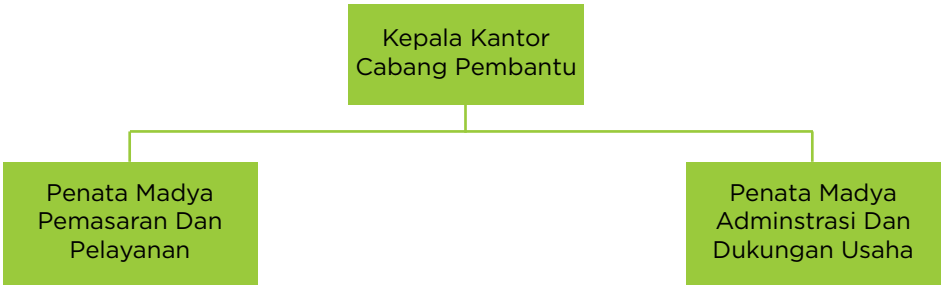

Dalam rangka meningkatkan perluasan dan pembinaan kepesertaan serta pelayanan kepada peserta Jamsostek dalam wilayah kerja Kantor Wilayah PT Jamsostek (Persero), maka dipandang perlu membentuk Kantor Cabang Pembantu sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/118/042013 tanggal 01 April 2013 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pembantu dalam wilayah kerja Kantor Wilayah PT Jamsostek (Persero), yaitu sebanyak 53 Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebagai berikut:

Profil Dewan Komisaris Dan Direksi

I. Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2013, komposisi Dewa Komisaris berganti sebanyak 3 (tiga) kali. Pergantian tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indoensia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-228/MBU/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-70/MBU/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka komposisi Dewan Komisaris sampai tanggal 16 Januari 2013 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Bambang Subianto
Komisaris : Prijono Tjiptoherijanto
Komisaris : Herry Purnomo

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-11/MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang memberhentikan dengan hormat Prijono Tjiptoherijanto dan mengangkat anggota Dewan Komisaris lainnya, sehingga komposisi Dewan Komisaris sejak tanggal 16 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Bambang Subianto
Komisaris : Herry Purnomo
Komisaris : Herman Hidayat
Komisaris : Mathias Tambing
Komisaris : Iskandar Maula
Komisaris Independen : Bambang Wirahyoso
Komisaris Independen : Hariyadi B.Sukamdani

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-155/MBU/2013 tanggal 20 Februari 2013 memberhentikan Bambang Subianto sebagai Komisaris Utama dan mengangkat Denny Indrayana sebagai Komisaris Utama, sehingga komposisi Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) terhitung mulai tanggal 20 Februari 2013 menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Denny Indrayana
Komisaris : Herry Purnomo
Komisaris : Herman Hidayat
Komisaris : Mathias Tambing
Komisaris : Iskandar Maula
Komisaris Independen : Bambang Wirahyoso
Komisaris Independen : Hariyadi B.Sukamdani

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Nomor SK-368/MBU/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu Herry Purnomo, sehingga komposisi Dewan Komisaris terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2013 menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Denny Indrayana
Komisaris : Herman Hidayat
Komisaris : Mathias Tambing
Komisaris : Iskandar Maula
Komisaris Independen : Bambang Wirahyoso
Komisaris Independen : Hariyadi B.Sukamdani

Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-430/MBU/2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu Denny Indrayana dan Herman Hidayat, serta Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhitung mulai tanggal 30 Desember 2013, sehingga komposisi Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Mulabasa Hutabarat
Komisaris	: Mathias Tambing
Komisaris	: Iskandar Maula
Komisaris	: Ninasapti Triaswati
Komisaris	: Saleh Khalid
Komisaris Independen	: Bambang Wirahyoso
Komisaris Independen	: Hariyadi B.Sukamdani

Sesuai amanah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, maka Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris selama tahun 2013, maka laporan ini menyajikan susunan Dewan Komisaris, identitas dan riwayat hidup singkat dari Dewan Komisaris.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Nomor SK-368/MBU/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu Herry Purnomo, sehingga komposisi Dewan Komisaris terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2013 menjadi sebagai berikut:

1. Komisaris Utama : **Denny Indrayana**
2. Komisaris : **Herman Hidayat**
3. Komisaris : **Iskandar Maula**
4. Komisaris : **Mathias Tambing**
5. Komisaris Independen : **Bambang Wirahyoso**
6. Komisaris Independen : **Hariyadi B. Sukamdani**

Identitas dan riwayat hidup singkat dari Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Denny Indrayana
Komisaris Utama

Penunjukkan pertama kali sebagai Komisaris Utama pada 20 Februari 2013

Lahir : Kalimantan Selatan, 11 Desember 1972
Pendidikan : Sarjana Hukum, Universitas Gajah Mada. Program Master, Universitas Minnesotta, Amerika Serikat. Program Doktor, Universitas Melbourne, Australia.
Karir : Wakil Menteri Hukum dan HAM.Sekretaris satgas pemberantasan mafia hukum. Staf Khusus Presiden bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (2008-2011). Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi, Fakultas Hukum UGM. Pendiri sekaligus menjadi Direktur ICM *(Indonesian Court Monitoring)*. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Herman Hidayat
Komisaris

Penunjukkan pertama kali sebagai Dewan Komisaris pada tanggal 16 Januari 2013

Lahir : Jakarta, 9 Juli 1959
Pendidikan : S 1 Hukum Universitas Indonesia
Karir : Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN.Kepala Biro Hukum dan Humas. KabagPeraturan Perundang-Undangan. Komisaris PT Pelindo III (Persero). Komisaris PTPN III. Komisaris PTPN XIII. Komisaris PT Boma Bisma Indra (Persero)

Mathias Tambing
Komisaris

Penunjukkan pertama kali sebagai Dewan Komisaris pada tanggal 16 Januari 2013

Lahir : Sulawesi Selatan, 9 Agustus 1953
Pendidikan : Profesor Manajemen Strategi, Universitas International Philipina, S3 Manajemen Pemerintah, S2 Manajemen Administrasi Publik, S1 Hukum Perdata, S1 Manajemen Pelayaran, Akademi Ilmu Pelayaran
Karir : Pjs Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Ketua Persaudaraan Pekerja Indonesia (PPI), Ketua DPP Konfederasi SPSI, Sekretaris Jendral Kesatuan Pelaut Indonesia (Sekjen KPI)

Iskandar Maula
Komisaris

Penunjukkan pertama kali sebagai Dewan Komisaris pada tanggal 16 Januari 2013

Lahir : Makassar, 11 November 1956
Pendidikan : Magister Manajemen UNKRIS, S1 Hukum Universitas Hasanuddin
Karir : Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kemenakertrans RI, Inspektur II Inspektorat Jendral Kemenakertrans RI, Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jendral Binapenta Kemenakertrans RI

Bambang Wirahyoso
Komisaris Independen

Penunjukkan pertama kali sebagai Dewan Komisaris pada tanggal 16 Januari 2013

Lahir : Pekalongan, 24 Januari 1954
Pendidikan : S 1 (UNWIM) Bandung
Karir : Koordinator Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia (ASPBI). Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) PJS Presiden KSPI Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Ketua DPD SPN Provinsi Jawa Barat

Hariyadi BS. Sukamdani
Komisaris Independen

Penunjukkan pertama kali sebagai Dewan Komisaris pada tanggal 16 Januari 2013

Lahir : Jakarta, 4 Februari 1965
Pendidikan : Insinyur Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta, tahun 1989, Magister Manajemen jurusan Manajemen Akuntansi dari Universitas Indonesia tahun 1992, *Registered Financial Consultant* dari *International Association of Registered Financial Consultants*, Inc. (IARFC).
Karir : Presiden Direktur PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk. Komisaris PT Jamsostek (Persero). Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika, Wakil Komisaris Utama PT Hotel Sahid Jaya International Tbk., Presiden Direktur PT Indotex LaSalle College International, Direktur Utama PT Sahid Gema Wisata, *Vice President* Sahid Group.

SUSUNAN DIREKSI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor: SK-295/MBU/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT. Jamsostek (Persero), susunan Direksi PT. Jamsostek (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama : **Elvyn G. Masassya**
2. Direktur Umum dan SDM : **Amri Yusuf**
3. Direktur Renbang dan Informasi : **Agus Supriyadi**
4. Direktur Kepesertaan : **Junaedi**
5. Dirketur Pelayanan : **Achmad Riadi**
6. Direktur Investasi : **Jeffry Haryadi PM**
7. Direktur Keuangan : **Herdy Trisanto**

Identitas dan riwayat hidup singkat Direksi, adalah sebagai berikut:

Elvyn G. Masassya
Direktur Utama

Lahir: Medan, 18 Juni 1967
Pendidikan: Magister Manajemen (Keuangan) Institut Teknologi Bandung (ITB), Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Jayabaya - Jakarta
Karir: pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bank Bali, Direktur PT Bank Permata Tbk, *Corporate Secretary* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Direktur PT Tuban Petrochemical Industries, dan Direktur Investasi PT Jamsostek (Persero).

Amri Yusuf
Direktur Umum dan SDM

Lahir: Medan, 8 April 1967
Pendidikan: Magister Manajemen (Keuangan) STIE Jagakarsa - Jakarta, Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi STIE Nusa Bangsa - Medan, Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Indonesia
Karir: Kepala Divisi Investasi Langsung, Kepala Urusan Penyertaan - Div. Investasi Langsung, Kepala Urusan Perencanaan Investasi Langsung - Div. Investasi Langsung PT Jamsostek (Persero), Direktur Keuangan PT Samudranayaka Grahaunggul, Sekretaris Komisaris PT BIJAK

Agus Supriyadi
Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi

Lahir: Semarang, 22 April 1958
Pendidikan: Magister Manajemen (Pemasaran) Universitas Mercubuana - Jakarta, Sarjana Administrasi Niaga Universitas Terbuka - Jakarta, Sertifikasi Ahli Bidang Asuransi Jiwa, AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia) Jakarta.
Karir: pernah menduduki Jabatan sebagai Kepala Biro Renbang, Kepala Kantor Wilayah III - DKI Jakarta, Kepala Divisi Operasi, Kepala Kantor Cabang Gatot Subroto, Kepala Kantor Cabang Kebon Sirih, Kepala Kantor Cabang Pluit PT Jamsostek (Persero)

Junaedi
Direktur Kepesertaan

Lahir: Sumedang, 23 Oktober 1959
Pendidikan: Sarjana Ilmu Statistik Universitas Padjajaran - Bandung
Karir: Kepala Kantor Wilayah VI - Jatim Nusra Bali, Kepala Divisi Operasi, Kepala Kantor Wilayah VII - Kalimantan, Kepala Wilayah IV - Jabar Banten, dan Kepala Kantor Cabang Bekasi PT Jamsostek (Persero)

Achmad Riadi
Direktur Pelayanan

Lahir: Lahat, 24 November 1961
Pendidikan: Magister Manajemen (Pemasaran) STIE IPWI LIPI - Jakarta, Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi STIE Perbanas – Jakarta
Karir: Kepala Biro PKP - KBL, Kepala Kantor Wilayah II - Sumbagsel Riau Kepri, Wakil Kepala Kantor Wilayah III - DKI Jakarta, Kepala Kantor Cabang Bekasi, dan Kepala Kantor Cabang Jambi PT Jamsostek (Persero)

Jeffry Haryadi PM.
Direktur Investasi

Lahir: Jakarta, 22 Maret 1966
Pendidikan: Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi
Karir: Kepala Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal, Kepala Divisi Investasi Langsung, Direktur PT Samudera Nayaka Graha Unggul, Kepala Divisi Riset Investasi, dan Kepala Divisi Properti dan Penyertaan PT Jamsostek (Persero)

Herdy Trisanto
Direktur Keuangan

Lahir: Jakarta, 25 September 1958
Pendidikan: Magister Manajemen (Keuangan) Universitas Pancasila - Jakarta, Sarjana Ekonomi Universitas Krisnadwipayana - Jakarta
Karir: Kepala Kantor Wilayah III - DKI Jakarta, Direktur Utama PT Bijak, Kepala Divisi Investasi Langsung, Kepala Divisi Pasar Uang & Pasar Modal, dan Kepala Divisi Teknis & Pelayanan PT Jamsostek (Persero)

Penghargaan

Penghargaan yang diterima oleh PT Jamsostek (Persero) selama tahun 2013 menunjukkan penilaian yang semakin baik dari publik. Kriteria penghargaan yang diterima terdiri dari berbagai kategori. Hal tersebut menunjukkan pengakuan masyarakat akan keunggulan operasional dan pelayanan perusahaan. Penghargaan yang telah diperoleh PT Jamsostek (Persero) sebagai berikut:

Daftar Penghargaan PT Jamsostek (Persero) Tahun 2013

No	Uraian	Badan Pemberi Penghargaan	Tanggal Terima
1.	Silver Winner KategoriThe Best Of State Own Enterprise	SPS (Serikat Perusahaan Pres) dan InMa (Indonesia Inhouse Magazine Award) 2013	8 Februari 2013
2.	Peningkatan Pelayanan Peserta Melalui Jamsostek Point of Service Office dan Pengembangan Unit Trauma Center	Kementerian BUMN	19 Mei 2013
3.	Merek Asli Indonesia 1. The 1st Champion of Indonesia Original Brand 2013 Product Category : Life Insurance 2. The 1st Champion of Indonesia Original Brand 2013 Product Category : Health Insurance	Majalah SWA	4 Juli 2013
4.	1st Winner Merek Asli Indonesia (Indonesia Original Brand 2013) Kategori Life Insurance	Majalah SWA	4 Juli 2013
5.	1st Winner Merek Asli Indonesia (Indonesia Original Brand 2013) Kategori Health Insurance	Majalah SWA	4 Juli 2013
6.	1. The Best Social Insurance 2. 1st for Marketing 3. 1st for Risk Management 4. 1st for Finance 5. 1st for Human Capital 6. 1st for Corporate Communication 7. 1st for GCG 8. 1st for Tchnology Information	Indonesia Insurance Award 2013	18 Juli 2013
7.	Silver Winner Kategori Strategi dan Taktik Marketing	MarkPlus dan BUMN Track	27 Agustus 2013
8.	Penghargaan Merek Terbaik Indonesia (Best Brand Award) Kategori Health Insurance	Majalah SWA	20 September 2013
9.	5th Winner The Best GCG Implementation of The Year	Business Review 2013	24 September 2013
10.	4th Winner The Best Finance Performance of The Year	Business Review 2013	24 September 2013

No	Uraian	Badan Pemberi Penghargaan	Tanggal Terima
11.	2nd Winner The Best Non Listed Company of The Year	Business Review 2013	24 September 2013
12.	5th Winner The Best Corporate of The Year	Business Review 2013	24 September 2013
13.	3rd Winner The Most Reliable Improvement	Bisnis Indonesia (Insurance Award)	8 Oktober 2013
14.	2nd Winner Annual Report Award 2012 Kategori BUMN Keuangan – Non Listed	Kementerian BUMN RI	17 Oktober 2013
15.	Peringkat V dalam Keterbukaan Informasi Publik kategori Badan Publik BUMN	Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia	12 Desember 2013

CEO AWARD

Beberapa penghargaan yang diterima oleh CEO PT Jamsostek (Persero) Elvyn G Masassya diterima dari beberapa institusi media nasional antara lain :

No	Uraian	Badan Pemberi Penghargaan	Tanggal Terima
1.	Most Inspiratual Chief Eksekutif Officer 2014	Men's Obsession	28 Januari 2013
2.	The Amazing Stars	Men's Obsession Tough CEO'S 2012-2013	28 Januari 2013
3.	Indonesia Most Admired CEO 2013	Warta Ekonomi Award	27 Februari 2013
4.	Inspiration Award	RMOL Award	20 Maret 2013
5.	Sebagai Direktur Utama Yang Sukses Membangun Citra Korporasi Kategori Perusahaan Tertutup Dengan Kapital > Rp.10 T	Media Pekerja BUMN Award	19 Mei 2013
6.	The Most "Analytical" Insurance CEO' 2013	Indonesia Insurance Award	18 Juli 2013
7.	The Best CEO With High Responsibility of The Year 2013	Business Review Award	24 September 2013
8.	Antara Award Sebagai tokoh yang selalu menyerukan kesadaran kepada pekerja akan pentingnya Jaminan Sosial	LKBN ANTARA	18 Desember 2013

Penghargaan PT Jamsostek (Persero) Tahun 2013

Penghargaan PT Jamsostek (Persero) Tahun 2013

Penghargaan PT Jamsostek (Persero) Tahun 2013

Peristiwa Penting

Januari

Jamsostek Futsal International Tournament
7 Januari 2013 PT Jamsostek (Persero) menggelar turmanen futsal tingkat international bertempat dilapanngan futsal Vidi Pancoran Jakarta. Pertandingan digelar selama 7 hari mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Januari 2013.

Tanggap Darurat Banjir 2013
26 Januari 2013 Sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang terkena musibah banjir di wilayah kota Jakarta, PT Jamsostek (Persero) membuka posko kesehatan serta membagikan sembako dan alat rumah tangga di bilangan Kampung Melayu dan sekitarnya, tampak dalam gambar foto bersama Kepala Biro Humas Kuswahyudi seusai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para penerima bantuan.

Press Gathering 2013
30 Januari 2013, Sebagai bentuk penguatan silaturrahmi dengan para media, PT Jamsostek (Persero) menggelar acara *Press Gathering* yang dilaksanakan di Bandung, acara tersebut di hadiri oleh seluruh jajaran Direksi Jamsostek dan seluruh pejabat eselon satu.

Februari

Diklat Kepemimpinan Muda
12 Februari 2013 Guna meningkatkan kualitas dan kapabilitas Karyawan PT Jamsostek (Persero), Jamsostek menggelar secara estafet Diklat Kepemimpinan Muda. Tampak dalam gambar foto bersama Direktur Umum dan SDM Bapak Amri Yusuf, Kepala Biro pengelolaan dan pengembangan kompetensi Eko Samino, serta Kepala Biro SDM Abdul Latief Algaff.

Customer Gathering 2013
18 Februari 2013 Guna mensosialisasikan kesiapan transformasi PT Jamsostek (Persero) menuju BPJS Ketenagekerjaan, PT Jamsostek (Persero) menggelar *Customer Gathering* yang dilaksanakan di 8 kantor wilayah di seluruh indonesia. Tampak dalam gambar *Customer Gathering* yang diadakan di wilayah Medan.

The Most Admired CEO 2013
26 Februari 2013 Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menerima penghargaan *The Most Admired* CEO 2013 yang diberikan oleh Majalah warta ekonomi pada tanggal 26 Februari 2013 di Hotel Crown Plaza Jakarta.

Maret

Marketeer Club
20 Maret 2013, bertempat di lantai 11 gedung Jamsostek Pusat, Sebagai tuan rumah PT Jamsostek menggelar forum antar BUMN yang bertajuk BUMN *Marketeers Club*. Tampak dalam gambar foto bersama Komisaris Utama Danny Indrayana, Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Elvyn G Masassya dan para undangan.

April

MOU Bank Tabungan Negara
1 April 2013, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) PT Jamsostek (Persero) bersama BTN Bank Tabungan Negara, *Real Estate* Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Tentang Penyediaan Rumah Bagi Peserta Jamsostek dengan Fasilitas KPR dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan, di Menara BTN Jakarta.

Pisah Sambut Dewan Komisaris
5 April 2013, Bertempat di Hotel Sultan Jakarta, PT Jamsostek (Persero) menggelar Pisah Sambut Dewan Komisaris dimana sebelumnya sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara Nomor: SK-11/MBU/2013 tentang "Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja" tanggal 15 Februari, dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK155/MBU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditetapkan jajaran komisaris baru. tampak dalam gambar foto bersama jajaran direksi dengan Bapak Bambang Subianto dan Bapak Priyono Anggota komisaris sebelumnya.

MOU Mendagri
15 April 2013, PT Jamsostek (Persero) dan PT Askes (Persero) menandatangani kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memanfaatkan data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan *databese* kependudukan yang berbasiskan Nomor Induk Kependudukan. Kerjasama tersebut untuk mendukung proses pendataan dan perencanaan kepesertaan masyarakat Indonesia menuju transformasi BPJS bidang ketenagakerjaan dan kesehatan di 2014. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Dirut Jamsostek Elvyn G Masassya, Dirut Askes Fachmi Idris dan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri H Irman di Jakarta.

MOU Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
22 April 2013, PT Jamsostek (Persero) menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kerja sama itu ditandatangani Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Elvyn G. Masassya dengan Jamdatun Kejagung RI Burhanuddin di Jakarta.

April

***Medical Check Up* (MCU) Jamsostek**
23 April 2013, sebanyak 1.300 pekerja mengikuti kegiatan medical *check up* (MCU) yang diselenggarakan PD Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta dan PT Jamsostek (Persero) di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Tahun 2013 PT Jamsostek menganggarkan Rp 240 miliar untuk MCU pekerja di berbagai daerah. Hadir pada acara tersebut Direktur Kepesertaan Jamsostek, Junaedi, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Kemenakertrans, Irianto Simbolon dan juga perwakilan dari PD Pasar Jaya.

MOU Rajawali Nusantara Indonesia
30 April 2013, PT Jamsostek (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero bekerjasama dalam menyediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang murah untuk pekerja peserta Jamsostek. Kerjasama ini tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Jamsosek, Elvyn G Masassya dan Direktur RNI Ismet Hasan Putro di Kantor Pusat Jamsostek.

Juni

MOU dengan Bank Rakyat Indonesia
10 Juni 2013, penandatangan kerjasama JSPO (Jamsostek *Service Point Office*) antara PT Jamsostek (Persero) dengan Bank Rakyat Indonesia bertempat di Merak Banten. Tampak dalam gambar Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menyaksikan penandatangan tersebut.

Diklat Kepemimpinan Madya
10 Juni 2013, Bertempat di Hotel Arya Duta Jakarta, PT Jamsostek (Persero) menggelar Diklat Kepemimpinan Madya guna meningkatkan kompetensi karyawan PT Jamsostek (Persero), tampak dalam gambar Direktur Umum dan SDM Amri Yusuf berfoto bersama peserta Diklat.

Peresmian Kantor Wilayah Jatimbanusra
19 Juni 2013, PT Jamsostek (Persero) meresmikan gedung Kantor Wilayah Jatimbanusra di Surabaya, tampak dalam gambar Direktur Utama Elvyn G Masassya melakukan salam kompak dengan Syaifullah Yusuf Wakil Gubernur Jawa Timur.

Launching Manfaat E-KTP
20 Juni 2013, dilakukan *launching* pemanfaatan E-KTP dalam program-program Jamsostek oleh PT Jamsostek (Persero) di Menara Jamsostek Jakarta. Tampak dalam gambar Direktur Utama Jamsostek Elvyn G Masassya mencoba keakuratan dan kecepatan teknologi E-KTP dalam menampilkan sebuah data.

Juni

Jamsostek Goes To Society

22 Juni 2013, dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat pada umumnya dan peserta khususnya serta mensosialiasikan program Jamsostek, PT Jamsostek menggelar sebuah acara Mall ke Mall yang diberi nama "Jamsostek *Goes To Society*". Acara dilakukan di 11 kota besar di Indonesia. Tampak dalam gambar salah satu kemeriahan Jamsostek *Goes To Society* di Mall Metropolitan Tangerang.

Gerakan Sadar Jaminan Sosial

28 Juni 2013, PT Jamsostek (Persero) mendatangani nota kesepahaman tentang peningkatan kepesertaan di wilayah Sulawesi Utara, penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Achmad Riadi dengan seluruh walikota-walikota Sulawesi Utara disaksikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pada acara Gerakan Sadar Jaminan Sosial di Kota Manado.

Musik Pekerja Jamsostek

30 Juni 2013, berlokasi di Gedung Kesenian Kabupaten Bogor, PT Jamsostek (Persero) menggelar acara musik pekerja guna menghibur para buruh sekitar lokasi. Dalam kesempatan itu, diberikan Beasiswa Jamsostek mulai tingkat SD sampai PerguruanTinggi yang diserahkan langsung oleh Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Juli

Audiensi dengan Wakil Gubernur DKI

3 juli 2013, Bertempat di ruang rapat kerja Wagub DKI, Direksi PT Jamsostek (Persero) antara lain Direktur Perencanaan, Pengambangan dan Informasi Agus Supriyadi, Direktur Pelayanan Achmad Riadi, Direktur Keuangan Herdy Trisanto didampingi Kepala Biro Sekretaris Perusahaan Dedy Pramiadi melakukan kunjungan dan audiensi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) mengenai kesiapan PT Jamsostek (Persero) dalam bertransformasi ke BPJS Ketenagakerjaan per 2014 nanti, dalam kesempatan ini Wagub DKI meminta dan siap jika Provinsi DKI Jakarta dijadikan *Pilot Project* dalam BPJS Ketenagakerjaan. (3/7)

Indonesia Original Brand 2013

4 juli 2013, PT Jamsostek (Persero) mendapatkan dua penghargaan untuk kategori Asuransi Jiwa dan kategori Asuransi Kesehatan terbaik dalam acara Indonesia *Original Brand* 2013 (Penghargaan Merek Asli Indonesia) yang diberikan oleh Majalah SWA yang bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi merk-merk yang unggul di negeri sendiri dan dapat bersaing di negara luar serta menjadi kebanggaan bangsa terhadap produk asli Indonesia. Penghargaan ini diserahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2013.

Juli

Bazar Ramadhan IIKJ

25 Juli 2013, Bertempat di Lantai 11 Gedung Jamsotek Pusat, Ikatan Istri Karyawan Jamsostek (IIKJ) menggelar Bazar Ramadhan 1434 H yang berlangsung selama 3 hari yang dibuka tanggal 25 Juli 2013. Tampak dalam gambar Direktur Utama Jamsostek Elvyn G Masassya beserta jajaran direksi, Ketua IIKJ Ibu Elvyn beserta jajaran Ibu-Ibu Direksi dan Ibu Nafsiah Sabri (Istri Meneg BUMN) saat menggunting pita sebagai tanda dibuka secara resmi acara bazaar tersebut. tanda dibuka secara resmi acara bazaar tersebut.

Bukber FKI

31 juli 2013, Guna mempererat jalinan silaturrahmi Jamsostek dengan instansi BUMN lain yang tergabung dalam FKI BUMN (Forum Komunikasi Investasi Badan Usaha Milik Negara), PT Jamsostek (Persero) menggelar buka bersama yang bertempat di gedung menara Jamsostek pada tanggal 31 Juli 2013. Tampak dalam gambar Dirut Jamsostek Elvyn G Masassya saat membuka acara tersebut.

Agustus

Mudik Bersama Jamsostek

2 Agustus 2013, PT Jamsostek (Persero) menggelar "Mudik Bersama" dalam rangka menyambut Idul Fitri 1434 H sekaligus dalam rangka melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sebanyak 62 bus dilepas oleh Direktur Utama Jamsostek Elvyn G Masassya beserta jajaran direksi lainnya di silang Monas.

Diklat Persiapan Kerja2013

9 Agustus 2013, PT Jamsostek (Persero) melatih 433 karyawan baru sebagai bagian dari persiapan sumber daya manusia dalam menyongsong transformasi perusahaan menjadi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) pada 1 Januari 2014. Tampak dalam gambar foto bersama peserta Diklat bersama Direktur Umum dan SDM, Kepala Biro Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi, Kepala Biro SDM dan Ketua Umum SPJ.

MOU Dengan Aliansi Jurnalis Independen

29 Agustus 2013, PT Jamsostek (Persero) menandatangani kesepakatan bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tentang kepesertaan Jamsostek sebagai upaya meningkatkan perlindungan hak-hak para juru warta, terutama dalam hal jaminan kesejahteraan. Kerja sama ini diresmikan dengan penandatanganan MOU oleh Direktur Kepesertaan PT Jamsostek (Persero) Junaedi dan Ketua AJI Eko Maryadi, bertepatan dengan peringatan HUT AJI ke-19 di Gedung Pusat Perfilman H.Usmar Ismail, Jakarta.

Agustus

Halal Bi Halal Jamsostek
21 Agustus 2013, Bertempat di Balai Kartini Jakarta Selatan, PT Jamsostek (Persero) menggelar Halal Bi Halal yang dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi, Dewan Komisaris, Para Pensiunan dan Karyawan/ Karyawati PT Jamsostek Persero pada tanggal 21 Agustus 2013.

September

Rapat Kerja Nasional 2013
4-6 September 2013, PT Jamsostek (Persero) menggelar Rapat Kerja Nasional 2013 yang dilaksanakan di Kota Batam. Tampak dalam gambar bergandeng tangan salam kompak jajaran Direksi yang menggambarkan Etos Kerja Jamsostek TOPAS.

Audiensi Bank Mandiri VS Jamsostek
20 September 2013, Dalam rangka memperkuat hubungan kerja dengan Bank Mandiri, PT Jamsostek (Persero) bertempat di ruang rapat lantai 3 gedung Jamsostek pusat menerima kunjungan para manajemen Bank Mandiri dan berdiskusi guna meningkatkanhubungan keduanya.

The Most Valuable Brand
20 September 2013, Direktur Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Achmad Riadi seusai menerima penghargaan didampingi pemimpin redaksi Metro TV, Suryopratomo. PT Jamsostek (Persero) memperoleh penghargaan *The Most Valuable Brand* in Indonesia untuk kategori *Health Insurance*. Penghargaan itu diserahkan pada malam Indonesia *Best Brand Award* (IBBA) yang diselenggarakan Mars dan majalah Swa.

Penghargaan Business Review
24 September 2013, Direktur utama Jamsostek Elvyn G Masassya menerima penghargaan sebagai CEO *With High Responsibility* yang dianugerahi oleh Majalah Business Review pada tanggal 24 September 2013 di Shangri La hotel, Jakarta.

Oktober

Jamsostek Goes To Campus
7 Oktober 2013, guna mensosialisasikan program Jamsostek, PT Jamsostek (Persero) menggelar acara Jamsostek *Goes to Campus* di 11 kampus yang terletak di Kantor Wilayah-Kantor Wilayah PT Jamsostek di seluruh Indonesia, Tampak dalam gambar Direktur Perecanaan, Pengembangan dan Informatika Agus Supriyadi menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi di Universitas Pattimura Ambon.

Oktober

Jamsostek *Goes To Factory*
30 Oktober 2013, Jamsostek menggelar acara Jamsostek *Goes To Factory* ke Kantor Wilayah Sulawesi. Direktur Pelayanan Jamsostek, Achmad Riadi, menyaksikan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul YL saat melakukan *Medical Check Up* pada acara tersebut.

Desember

Orasi Ilmiah Jusuf Kalla
3 Desember 2013, rentetan kegiatan HUT Jamsostek, dihadirkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI untuk memberikan orasi ilmiah bertema "Menuju Negara Sejahtera" yang digelar di Kantor Pusat PT Jamsostek lantai 11.

Uji Coba *Prototype Smart Card* BPJS Ketenagakerjaan
5 Desember 2013, dilakukan uji coba pertama kali *prototype Smart Card* BPJS Ketenagakerjaan, bertepatan dengan hari jadi Jamsostek yang ke-36 di lobi Kantor Pusat PT Jamsostek (Persero). Seusai uji coba tersebut dilakukan foto bersama oleh jajaran Direksi dan Komisaris sembari menunjukkan *Smart Card* BPJS Ketenagakerjaan.

Syukuran HUT Jamsostek
5 Desember 2013, dalam rangka memperingati HUT Jamsostek ke-36 dilakukan do'a bersama dipimpin oleh Direktur Umum dan SDM, Amri Yusuf di Kantor Pusat PT Jamsostek (Persero).

Audiensi dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
15 Desember 2013, PT Jamsostek (Persero) melakukan audiensi dengan Kemenkokesra tentang persiapan Jamsostek dalam bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Kemenkokesra. Tampak dalam gambar Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) menerangkan arti logo BPJS Ketenagakerjaan kepada Menkokesra Agung Laksono.

Jaminan Hari Tua Timor Leste
17 Desember 2013, penandatanganan perjanjian pencairan JHT 4.255 karyawan swasta bekas Provinsi Timor Timur dilakukan oleh Direktur Pelayanan PT Jamsostek (Persero), Achmad Riadi, dengan Angelo Des Santos, perwakilan Timor Leste dan disaksikan oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Muhammad Anshor, bertempat di Kantor Kementerian Luar Negeri.

Desember

Antara *Award* 2013
18 Desember 2013, Bertepatan dengan hari jadi LKBN ANTARA, Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) menerima penghargaan sebagai tokoh yang selalu menyerukan kesadaran kepada pekerja akan pentingnya jaminan soasial. Penyerahan ini diberikan di kantor LKBN Antara.

Hibah Bus Sekolah
19 Desember 2013, PT Jamsostek (Persero) memberikan Bus Sekolah kepada Pemerintah Provisi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD). Tampak dalam gambar Menkokesra, Agung Laksono, menyerahkan kunci secara simbolis kepada Gubernur NAD Zaini Abdullah disaksikan Direktur Utama Elvyn G Masassya di kediaman Gubernur Aceh.

MOU Dengan Jasaraharja dan PT Pembangunan Perumahan
23 Desember 2013, PT Jamsostek (Persero) melakukan penandatanganan dengan Jasa Raharja dan PT Pembangunan Perumahan tentang pembentukan *property company* dan koordinasi manfaat dalam implementasi jaminan kecelakaan kerja. Penadatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Jamsostek Elvyn G Masassya bertempat di Kantor Pusat Jamsostek.

Pertemuan Bilateral Jamsostek-Askes
24 Desember 2013, dalam rangka memastikan kesiapan peralihan prgram JPK Jamsostek kepada PT Askes yang akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, PT Jamsostek (Persero) dan PT Askes menggelar Forum Bilateral di Hotel Pullman Jakarta. Konsolidasi serupa telah dilakukan beberapa kali oleh kedua BUMN. Pada kesempatan itu diserahkan data terakhir kepesertaan JPK Jamsostek.

Peresmian BPJS
31 Desember 2013, bertempat di Istana Bogor, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Desember

Khataman Qur'an
31 Desember 2013, di Masjid Almaghfirah Jamsostek dalam rangka memanjatkan rasa syukur untuk keberhasilan dan kelancaran transformasi Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, PT Jamsostek (Persero) menggelar khataman kitab suci Alqur'an Tampak dalam gambar Direktur Umum dan SDM saat menyampaikan sambutan pada acara tersebut.

Malam Tahun Baru dan Transformasi BPJS Ketenagakerjaan
31 Desember 2013, menjelang transformasi Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, bertepatan dengan pergantian tahun 2013 ke 2014, PT Jamsostek (Persero) menggelar Malam Transformasi menuju BPJS Ketenagakerjaan di halaman depan Kantor Pusat Jamsostek dengan ditandai penekanan tombol sirene dan pelepasan selubung signage Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.

PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak)

Perusahaan memiliki satu anak perusahaan yang bernama PT Binajasa Abadikarya atau disingkat PT BIJAK. Perusahaan ini didirikan berdasarkan akte pendirian No. 1 tanggal 6 April 1994.

Visi Perusahaan
Menjadi perusahaan terdepan dalam bidang penyedia tenaga kerja andal dan manajemen jasa yang dapat dipercaya.

Misi Perusahaan
1. Memberikan pelayanan berkualitas dalam bidang pengelolaan gedung dan penempatan tenaga kerja dengan profesionalisme yang humanis dan menjunjung tinggi kepatuhan.
2. Membangun hubungan kemitraan jangka panjang yang efektif melalui *customer intimacy*.
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja berdasarkan kompetensi melalui program pengembangan SDM berkesinambungan.
4. Memperluas pasar penempatan tenaga kerja dalam rangka perluasan kesempatan kerja.
5. Melaksanakan budaya BIJAK untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan dan menjadi perusahaan pilihan di Indonesia.

Nilai-Nilai Budaya Kerja
Dalam rangka mengoptimalkan operasional dan budaya perusahaan, perusahaan memiliki motto perusahaan sebagai berikut:

B : Bertanggung Jawab
I : Integritas
J : Jaminan Kepuasan
A : Amanah
K : Kerjasama

Adapun perilaku karyawan diharapkan:
- Melayani
- Taat Peraturan
- Kreatif dan Inisiatif
- Bertanggung Jawab
- *Team Work*
- Jujur
- Loyal
- Profesional
- Tidak Menyalahgunakan jabatan

Bidang Usaha
1. Dalam bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di dalam dan ke luar negeri, jasa pelatihan antara lain mendirikan Balai Latihan keterampilan Tenaga Kerja, Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Poliklinik *Medical Centre*, Jasa Telekomunikasi, *Cleaning Service Catering* dan Komputer.
2. Dalam bidang Pembangunan bertitik sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya *(General Contractor)* dan kegiatan usaha terkait lainnya baik sebagai perencana, pelaksanaan maupun pengawasan.
3. Dalam bidang perdagangan umum.
4. Dalam bidang perindustrian umum.
5. Dalam bidang percetakan.

Pilar Bisnis (*Outsourcing, Property Management*, PJTKI, BLK, *Parking Services,* IT dan *Financial Services*)

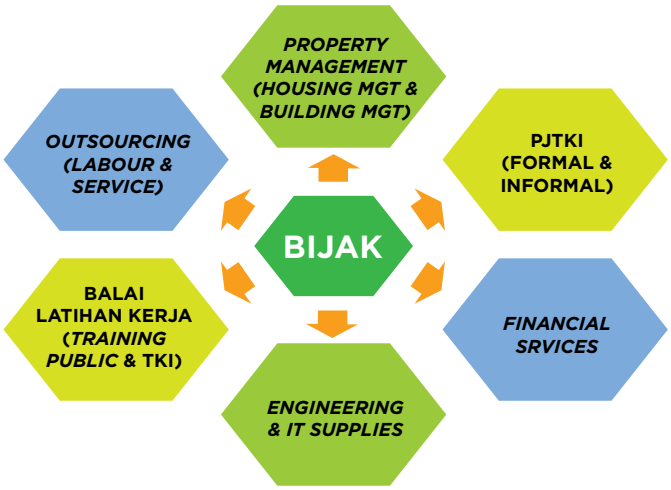
PROPERTY MANAGEMENT (HOUSING MGT & BUILDING MGT)
OUTSOURCING (LABOUR & SERVICE)
PJTKI (FORMAL & INFORMAL)
BIJAK
BALAI LATIHAN KERJA (TRAINING PUBLIC & TKI)
FINANCIAL SRVICES
ENGINEERING & IT SUPPLIES

Pemegang Saham

Pemegang Saham terbesar PT. BIJAK adalah PT. Jamsostek (Persero). PT.BIJAK merupakan satu-satunya anak perusahaan PT.Jamsostek dengan kepemilikan sebanyak 99,98% ditambah dengan Koperasi Karyawan PT. Jamsostek (Persero) sebesar 0,02%.

Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Surat Pemegang Saham Nomor : B/892/102012 tanggal 10 Oktober 2012 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris PT. Binajasa Abadikarya (PT. BIJAK) dengan susunan Komisaris Baru periode berikutnya sebagai berikut :

Komisaris Utama : Dedy Pramiadi
Komisaris : Yogi Dharmawanto
Direktur Utama : Albertus Bambang Koes Rudiyanto
Direktur : Toto Suharto

Akte pendirian tersebut diatas telah mengalami perubahan dan yang terakhir dengan akte No. 4 tanggal 12 Nopember 2012, yang dibuat dihadapan Ratna Djatnika, SH, Notaris di Jakarta, tentang Perubahan Susunan Komisaris dan Direksi sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Ratna Djatmika, SH., tanggal 23 Nopember 2012 dengan susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama : Dedy Pramiadi
Komisaris : Yogi Dharmawanto
Direktur Utama : Albertus Bambang Koes Rudiyanto
Direktur : Toto Suharto

Manager dan Personil Inti

Sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada Per 31 Desember 2013, maka posisi jabatan masing-masing manager adalah sebagai berikut :

- Staf Ahli Direksi - Kantor Pusat : -
- *Manager Outsourcing* : Iman Sakti Mangalo
- *Manager Labor Placement* (TKI) : Soni Budiman
- *Manager Training Centre* : -
- *Manager Human Resources* & GA : Endrawarman
- Manager Keuangan : Zaki Hidayat
- *General Manager Property* /GMF : Bunga Hasbunawan
- *Building Manager* Menara Jamsostek : Agung Widiantoro
- *Building Manager* Gedung Jamsostek : Djumali W
- *Branch Manager* Batam : Rahmat Riyadi (sebagai penanggung jawab Rusunawa Bumi Lancang Kuning & Muka Kuning, Kabil)
- *Housing Manager* Rusunawa Cikarang : Dedi Kusmayadi
- *Housing Manager* Rusunawa Kabil : Dev Ivan Saut Martua
- *Branch Manager* Jatim di Surabaya : Dwi Yulianto

Kerjasama Kemitraan (Penanggung Jawab)

- Kacab Pati (termasuk Cilacap) : Muslikan
- Kacab Cirebon : Saiful
- Kacab Medan : IndahRatna Sari
- Kacab Makassar : Aras Mondding
- Kacab Kendal : Suwarto
- Kacab NTB / Lombok : Riza Umami

Alamat

PT Binajasa Abadikarya berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Gedung Bijak Jalan Raya Condet No. 27 Jakarta 13840, Indonesia.
Telp. (021) 8413331, Fax. (021) 8414789,
Email: bijak@bijak.co.id
Website: www.bijak.co.id, www.bi-mex.com

Dana Pensiun Karyawan Jamsostek

Tujuan Pendirian
Maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun Karyawan Jamsostek adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan/atau keluarganya setelah purna bakti, melalui:

1. Penyelenggaraan program pensiun yang sehat sehingga memperoleh hasil yang optimal.
2. Pendanaan program pensiun di selenggarakan secara terarah dan terpadu untuk memberikan jaminan manfaat pensiun yang berkesinambungan. Dengan demikian, pengelolaan Dana Pensiun Karyawan Jamsostek pada hakekatnya merupakan amanah yang sangat mulia dan sepatutnya dijalankan serta dikelola dengan baik.

Pendiri
Dana Pensiun Karyawan Jamsostek adalah PT. Jamsostek (Persero)

Visi
Visi Dana Pensiun Karyawan Jamsostek adalah Menjadi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Utama dan Terpercaya.

Misi
Misi Dana Pensiun Karyawan Jamsostek adalah:
a. Menyelenggarakan sistim kepesertaan program pensiun secara rapi, tertib, dan akurat.
b. Menyelenggarakan sistim penerimaan iuran dan pembayaran manfaat pensiun secara tertib, tepat waktu dan tepat sasaran.
c. Mengelola kekayaan Dana Pensiun secara efisien dengan hasil yang optimal dan aman.
d. Meningkatkan budaya kerja melalui peningkatan kualitas SDM dan penerapan Tata Kelola yang baik.

Nilai-Nilai Dasar
Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun, yang juga mendasari penyusunan dan penetapan Kode Etik ini pada hakekatnya adalah nilai – nilai dalam Budaya Kerja Dana Pensiun Karyawan Jamsostek, yang terbentuk dari berbagai hasil dan pengalaman serta catatan keberhasilan dan kegagalan, sepanjang sejarah Dana Pensiun Karyawan Jamsostek.

Segenap Insan Dana Pensiun Karyawan Jamsostek selalu berpikir dan bertindak sesuai prinsip – prinsip dalam Nilai – nilai dasar tersebut dalam semua aktifitas mereka untuk kepentingan Dana Pensiun Karyawan Jamsostek.

Nilai – nilai Dasar tersebut terdiri dari :

a. Integritas
Karyawan Dana Pensiun Karyawan Jamsostek adalah pribadi yang mendapatkan kepercayaan, melaksanakan tugas pekerjaan yang bersifat amanah, sehingga Karyawan Dana Pensiun Karyawan Jamsostek harus bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu mengutamakan kebenaran, serta menjaga kehormatan dan nama baik.

b. Kepuasan Peserta dan Pensiunan
Karyawan Dana Pensiun Karyawan Jamsostek harus selalu berusaha untuk mengutamakan kepentingan Peserta dan Pensiunan dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

c. Keteladanan
Karyawan Dana Pensiun Karyawan Jamsostek dalam kedudukannya sebagai panutan yang dengan konsisten selalu bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar.

d. Perbaikan dan pembelajaran secara terus menerus
Karyawan Dana Pensiun Karyawan Jamsostek harus selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara terus menerus sehingga terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Direksi
Susunan Direksi Dana Pensiun Karyawan Jamsostek Januari s/d November Tahun 2013 adalah:
Direktur Utama : **Charles Pattipeiluhu**
Direktur : **Nugroho Agung Tristianto**

Berdasarkan Surat Keputusan Pendiri Nomor KEP/412/122013 tanggal 1 Desember 2013 maka susunan Direksi Dana Pensiun Karyawan Jamsostek berubah menjadi:
Direktur Utama : **Nugroho Agung Tristianto**
Direktur : **Titus Budi Dwiatmono**

Struktur Organisasi Dana Pensiun Karyawan Jamsostek

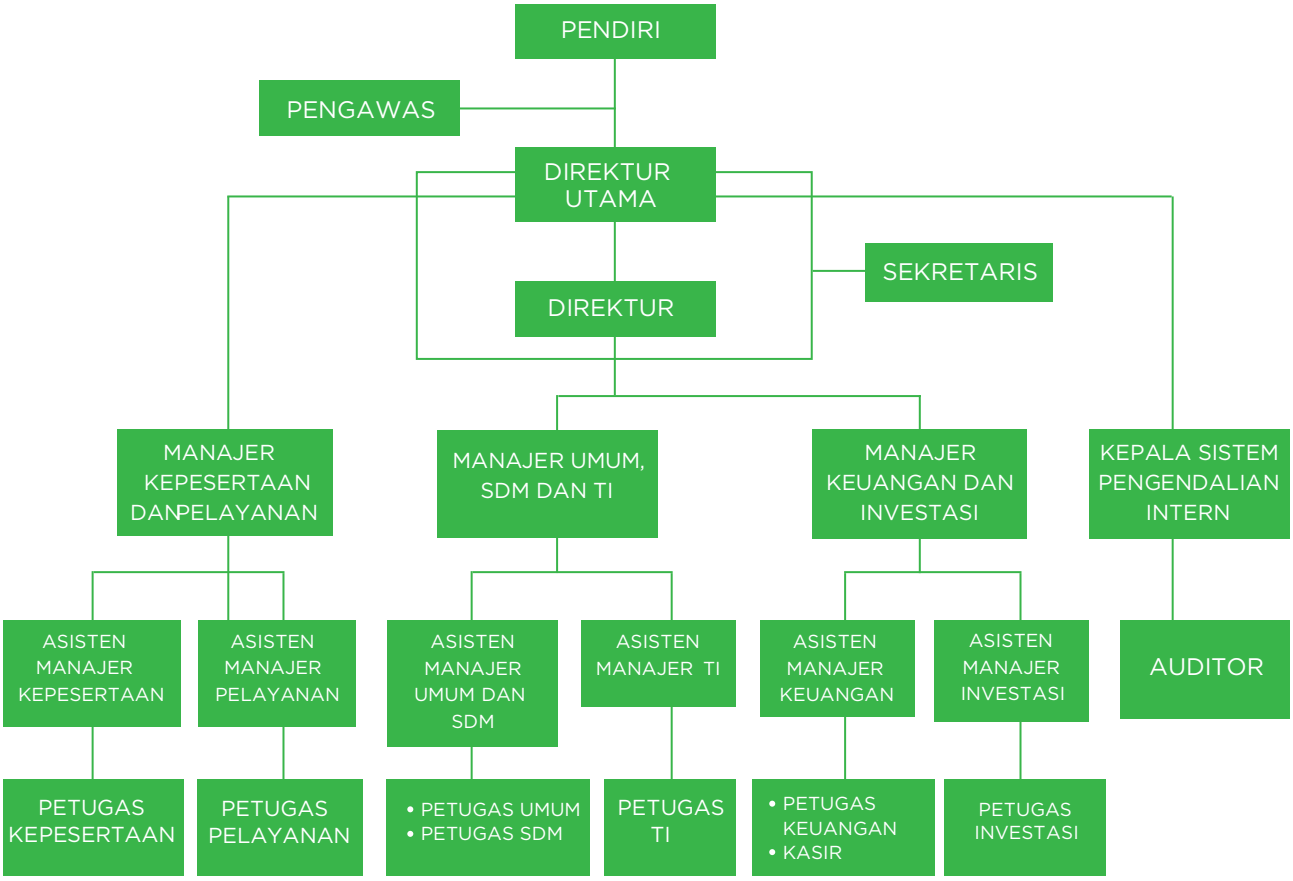

Alamat

Dana Pensiun KaryawanJamsostek berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan Tangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta 12930, Indonesia.

Telp. (021) 5204362, 5254880 Fax. (021) 5228530,
Email: dpk-jamsostek@cbn.net.id
Website: www.dpk-jamsostek.co.id

Nama Dan Alamat Penunjang Pasar Modal

Daftar Entitas Anak Dan Asosiasi

No	Perusahaan	Bidang Usaha	Tahun Perolehan	% Kepemilikan	Jumlah Saham (Unit)	Nilai Penyertaan (Rp Juta)	Alamat Perusahaan
1.	PT Bijak (Anak Perusahaan)	Pengiriman TKI	1994	99.98	4,999	11,584	Gedung Bijak Jl. Raya Condet No 27 Jakarta 13840 Telp (021) 8413331, 8414328

No	Perusahaan	Bidang Usaha	Tahun Perolehan	% Kepemilikan	Jumlah Saham (Unit)	Nilai Penyertaan (Rp Juta)	Alamat Perusahaan
2.	PT Arsinda Arthas Angga	*Underwriting Mgt Service*	1991	11.00	82,500	82	Rukan Sentra Pemuda Kav 15-16 Jl. Pemuda No. 61 Jakarta Telp (021) 47862574
3.	Bank Syariah Bukopin (Eks. PT BPI)	Perbankan	2005	9.46	350,000,000	25,630	Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta 10440 Telp (021) 2300912
4.	PT Marga Mandala Sakti	Penyelenggara Jalan Tol	1993	0.45	6,500,000	650	Karawaci *Office Park* Blok H No. 66-68 Lippo Karawaci Tangerang Telp (021) 557769412
5.	PT Bank Muamalat	Perbankan	1992	0.01	106,500	109	Gedung Arthaloka Jl. Jend Sudirman No. 2 Jakarta 10220 Telp (021) 2511414-51
6.	PT Pusako Tarinka	Perhotelan	1996	18.67	15,307,500	0	Jl. Barito II No. 15A Jakarta 12130 Telp (021)72790067

Lembaga/profesi penunjang pasar modal

BUMN

1. **Mandiri Sekuritas**
   Plaza mandiri lantai 28 Jl. Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan 12190 Telp 5263445 Fax. 5275374 Direktur Utama *Presiden Director* : Abiprayadi Riyanto

2. **Bahana Sekuritas**
   Graha Niaga Lantai 19 Jl. Jend Sudirman Kav 58 Jakarta 12190 Telp 2505080 Fax 5225887 Direktur Utama *Presiden Director* : Andi Sidharta

3. **BNI Securities**
   Sudirman Plaza Indofood Tower Lantai 16 Jend Sudirman Kav 76-78 Jakarta Telp 25563946 Fax 57935830 Direktur Utama *Presiden Director* : Ananta Wiyogo

4. **Danareksa Sekurtitas**
   Jl. Medan Merdeka Selatan 14 Jakarta Pusat Telp 3509888 Fax 3501724-25 Direktur Utama *Presiden Director* : Marciano Herman

SWASTA

1. **CIMB Securities Indonesia**
   Gedung BEJ Tower II Lantai 20 Jl. Jend Sudirman Kav. 52 -53 Jakarta 12190 Telp 515 5253 Fax 5155847 Direktur Utama *Presiden Director* :Harry Supoyo

2. **RHB OSK Securities**
   Plaza CIMB Niaga Lantai 14-15 Jl. Jend Sudirman Kav 25 Jakarta 12920 Telp 25986888 Fax 25986850 Direktur Utama *Presiden Director* : Halim Susanto

3. **Am Capital Indonesia**
   Gedung GKBI Lantai 5 Room 501 Jl. Jend Sudirman Kav.21 JakartaTelp 5742310 fax 5713706 Direktur Utama *Presiden Director* : Ferry Kojongian

4. **Kim Eng Securities**
   Plaza Bapindo Lantai 17, Tower Citibank Jl. Jend Sudirman Kav 54-55 Jakarta 12190 Telp 25571188 Fax 25571189 Direktur Utama *Presiden Director* : Widjaya Subekti

5. **UOB Kay Hian Securities**
   UOB Plaza Lantai 9 Th Jl. MH Thamrin Kav 8-10 Jakarta Telp 2993 3888 Fax 31906231 Direktur Utama *Presiden Director*: Himawan Gunadi

LOKAL

1. **SAMUEL Sekuritas**
   Menara Imperium Lantai 25 Jl. HR Rasuna Said Kav1 Telp 83701608 fax 83701609-10 Direktur Utama *Presiden Director* : Widjana Wirharjanto

2. **Sucorinvest Central Gani**
   Equity Tower Lantai 31 Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Telp 29960999 Fax 57973938 Direktur Utama *Presiden Director* : Ratih D. Item

3. **Kresna Graha Sekurindo**
   Gedung BEJ Tower I Lantai 30 Jl. Jend Sudirman kav 52-53 Jakarta Telp 25557105 Fax 5155787 Direktur Utama *Presiden Director* : Michael Steven

4. **Andalan Artha Advisindo Sekuritas**
   Equity Tower Lantai 22 Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Telp 29916700 Fax 5153608 Direktur Utama *Presiden Director* : Andri Rukminto

5. **Batavia Prosperindo Sekuritas**
   Gedung Chase Plaza lantai 12 Jl. Jend Sudirman Kav.21 Jakarta Telp 5207374 Fax 5206936 Direktur Utama *Presiden Director* : Martono Sutanto

6. **Indo Premier Securities**
   Wisma GKBI lantai 7 Room 718 Jl. Jend Sudirman No 28 Jakarta Telp 57931168 Fax 57931167 Direktur Utama *Presiden Director*: Moleonoto

7. **Trimegah Securities**
   Gedung Artha Graha Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Telp 5152233 Fax 5153860 Direktur Utama *Presiden Director* : Stephanus Turangan

8. **Mega Capital Indonesia**
   Menara Bank Mega lantai 2 Jl. Kapten Tandean Kav 12 – 14 A Jakarta 12790 Telp 79175599 Fax 79173900 Direktur Utama *Presiden Director* : Nany Susilowaty

9. **PT. Ciptadana Securities**
   Plaza ASIA *Office Park* Unit 2 Jl. Jend. Sudirman Kav 59 Jakarta 12190 Telp 25574800 Fax 25574804 Direktur Utama *Presiden Director* : Ferry Budiman Tanja

Peningkatan Kepatuhan Peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui kewenangan pengawasan dan pemeriksaan

PROSPEK USAHA

Tinjauan Perekonomian Dunia

Perekonomian global, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, perkembangan harga komoditas, dan perkembangan bursa saham terpantau membaik. Hal ini terlihat dari perkembangan ekonomi negara Amerika Serikat, Eropa dan Jepang yang terindikasi lebih baik dari perkiraan sebelumnya seiring dengan membaiknya indikator ekonomi negara-negara tersebut. Perbaikan ekonomi negara maju yang menguat pada gilirannya mendorong harga komoditas nonmigas global meningkat lebih tinggi dari prakiraan semula dan mendorong kenaikan kinerja pasar keuangan global. Berbeda dengan perkembangan ekonomi negara maju, perkembangan ekonomi di negara berkembang khususnya China dan India menunjukkan terjadinya moderasi pertumbuhan ekonomi.

Melihat kondisi perekonomian global di tahun 2013, diharapkan prospek perekonomian di tahun 2014 mengalami perbaikan atau pertumbuhan yang lebih tinggi di tahun 2013 dengan dukungan dari pemulihan perekonomian negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang serta pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang khususnya negara-negara *emerging market* seperti China dan India.

Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak sesuai harapan tersebut, tantangan bagi perekonomian Indonesia semakin kuat karena pada saat bersamaan beberapa tantangan dari domestik masih mengemuka. Dari sisi domestik, tantangan yang dihadapi, antara lain adanya fragmentasi ekses likuiditas rupiah di sektor perbankan, pasar

keuangan yang belum dalam dan likuid, serta defisit neraca transaksi berjalan. Salah satu faktor yang akan mempengaruhi defisit transaksi berjalan tersebut ialah struktur industri domestik yang belum mampu mengimbangi permintaan barang industri berteknologi tinggi dari kelompok kelas menengah Indonesia. Diharapkan perbaikan dari negara maju dan negara berkembang berlanjut pada tahun 2014 sehingga dapat menopang ekonomi Indonesia ke depan, baik dari jalur perdagangan maupun dari jalur finansial.

Tinjauan Perekonomian Indonesia

Ekonomi global yang menurun berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia tahun 2013 tumbuh sebesar 5,7%, melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 sebesar 6,2%. Penurunan pertumbuhan ekonomi 2013 bersumber dari masih terbatasnya pertumbuhan ekspor riil akibat melambatnya ekonomi global. Investasi, khususnya investasi nonbangunan, juga melambat. Sementara itu konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama pertumbuhan dibarengi konsumsi pemerintah yang tetap kuat. Secara keseluruhan, kebijakan stabilisasi yang terukur mampu diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi 2013 yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain.

Inflasi pada tahun 2013 meningkat menjadi 8,38% dari 4,30% pada 2012, atau berada di atas sasaran inflasi yang telah ditetapkan 4,5 ± 1%. Kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh peningkatan inflasi *volatile food* sebagai dampak gejolak harga pangan domestik serta peningkatan inflasi *administered price* yang dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM bersubsidi pada akhir Juni 2013. Kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut pada gilirannya menyebabkan kenaikan harga-harga secara umum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kinerja neraca pembayaran Indonesia yang menurun memberikan tekanan kepada nilai tukar rupiah pada tahun 2013 dan disertai volatilitas yang meningkat. Rupiah secara *point to point* melemah 20,8% (yoy) selama tahun 2013 ke level Rp. 12.170 per dolar AS atau secara rata-rata melemah 10,4% (yoy) ke level Rp. 10.445 per dolar AS. Tekanan terhadap rupiah terutama cukup kuat terjadi sejak akhir Mei 2013 hingga Agustus 2013. Tekanan yang kuat ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya aliran modal keluar dipicu ketidakpastian pemulihan ekonomi global, kenaikan *inflasi domestic* pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, persepsi terhadap prospek transaksi berjalan, serta pengaruh global akibat sentimen terhadap rencana pengurangan stimulus moneter oleh *The Fed.* Pengaruh global yang cukup kuat tersebut tergambar pada pergerakan rupiah yang searah dengan pelemahan mata uang di negara kawasan.

Tabel Indikator Makro Ekonomi

NO.	INDIKATOR	TAHUN 2013	
		RKAP	REALISASI
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,2% – 6,6%	5,7%
2	Tingkat Inflasi	4,5% ±1%	8,38%
3	Nilai Tukar Rupiah/ 1 US Dolar	Rp. 9.300– 9.400	Rp. 10.445
4	BI Rate	5,75%	7,5%

Tren perlambatan ekonomi mengakibatkan tertahannya perbaikan kesejahteraan pada tahun 2013. Tingkat pengangguran 2013 meningkat seiring melambatnya aktivitas perekonomian. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2013 mencapai 6,3%, meningkat dibandingkan dengan Agustus 2012 (6,14%), setelah sebelumnya mengalami penurunan sejak 2005.

Tahun 2013 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia akibat meningkatnya tekanan pada stabilitas makroekonomi. Dalam merespon berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui lima pilar, yaitu kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial, penguatan strategi komunikasi kebijakan, dan penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah. Di sepanjang tahun 2013, Bank Indonesia telah menempuh kebijakan moneter yang lebih ketat berupa kenaikan BI Rate sebesar 175 bps untuk memitigasi tekanan inflasi dan mendorong penyesuaian, defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat dan berkesinambungan.

Tinjauan Industri Jaminan Sosial

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia melalui perlindungan jaminan sosial, UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengamanahkan transformasi PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 dan selambat-lambatnya beroperasional paling lambat 1 Juli 2015.

Proses transformasi ini bertujuan untuk memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial, manfaat, dan pelayanan, serta meningkatkan kapasitas dan mindset organisasi. Transformasi yang dilakukan meliputi:

1. Perubahan badan hukum organisasi dari BUMN menjadi Badan Hukum Publik.
2. Perubahan pola koordinasi yang semula bertanggung jawab kepada Menteri BUMN menjadi bertanggung jawab kepada Presiden RI.
3. Perubahan cakupan kepesertaan wajib dari Tenaga Kerja Formal menjadi perlindungan untuk

PT.Jamsostek (Persero) s.d.31 Desember 2013	BPJS Ketenagakerjaan 1 Januari 2014 BERDIRI	BPJS Ketenagakerjaan Paling lambat 1 Juli 2015 BEROPERASI PENUH
UU No.3 Tahun 1992	UU No.40 Tahun 2004 UU No. 24 Tahun 2011	
BUMN ▪ Bertanggung jawab pada Kementerian ▪ *Profit Oriented*	Badan Hukum Publik ▪ Bertanggung jawab pada Presiden ▪ Nirlaba	
Program: JHT, JKK, JKM dan JPK	Program JHT, JKK, JKM sesuai ketentuan UU No. 3 Tahun 1992	Program JP, JHT, JKK, JKM sesuai ketentuan UU SJSN
Kepesertaan: Wajib untuk Pekerja Formal	1. Kepesertaan 2. Wajib untuk seluruh pekerja ▪ Formal : 41,5 juta (kecuali PNS/TNI/POLRI) ▪ Tenaga Kerja Asing ▪ Informal : 68,2 juta 3. BPJS melakukan inspeksi 4. Penerapan Sanksi Administratif	Kepesertaan: ▪ 1 Juli 2015 : PNS/TNI/POLRI untuk program JKK dan JKM ▪ 2029 : PNS/TNI/POLRI untuk program JP
Keuangan: ▪ JHT dan Non-JHT ▪ Pengawasan: Kementerian BUMN	Keuangan: 1. Dana Jaminan Sosial (per Program) dan Aset BPJS 2. Pengawasan: OJK & DJSN	

seluruh tenaga kerja baik Tenaga Kerja Formal dan Informal.

4. Perubahan pengalihan wewenang pelaksanaan inspeksikepatuhan kepesertaan dalam sistem Penegakan Hukum *(Law Enforcement)* dari Kementerian Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan.
5. Perubahan manfaat dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) menjadi JHT, JK, JKK, Pensiun.
6. Perubahan pengelolaan laporan keuangan dari laporan keuangan JHT dan non-JHT menjadi laporan keuangan dana jaminan sosial per program dan laporan asset BPJS.
7. Perubahan pengawasan yang semula dilakukan oleh Kementerian BUMN menjadi oleh OJK dan DJSN.

Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Ketenagakerjaan resmi berdiri dengan tetap menjalankan program JHT, JK, JKK sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992 dengan kepesertaan yang bersifat wajib bagi seluruh tenaga kerja formal, informal dan tenaga kerja asing. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan peserta dalam pelaksanaan Jaminan Sosial dan wewenang untuk memberikan sanksi administratif yang diamanahkan melalui PP No. 86 tahun 2013 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Pada tanggal 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan akan beroperasi penuh dengan menjalankan 4 program JHT, JK, JKK dan JP sesuai dengan ketentuan UU SJSN dengan penambahan kepesertaan dari PNS/ TNI/ POLRI untuk program JKK dan JKM sedangkan untuk program JHT dan JP akan diintegrasikan pada tahun 2029.

Prospek Pertumbuhan Pangsa Pasar

Tahun 2013 merupakan tahun yang krusial bagi PT Jamsostek (Persero) dalam menyiapkan transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Driver utama perubahan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan adalah regulasi berupa UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Implementasi UU ini dan peraturan dibawahnya merubah *landscape* industri Jaminan Sosial di Indonesia.

Market yang harus digarap PT Jamsostek (Persero) kedepan makin besar. Berikut ini adalah target *market* kedepan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang menjadi target kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari pasar formal dan pasar informal:

Tahun	Pasar		Target Bappenas				Target BPJS TK			
	Formal	Informal	Formal		Informal		Formal		Informal	
			Nominal (juta TK)	Share (%)	Nominal (juta TK)	Share (%)	Nominal (juta TK)	Share (%)	Nominal (juta TK)	Share (%)
2014	47,30	71,10	12,2	25,79%	0	0,00%	14,30	30,23%	0,9	1,27%
2015	48,00	72,00	14,5	30,21%	0,7	0,97%	19,42	40,45%	1,3	1,85%
2016	48,60	72,90	21,2	43,62%	1,8	2,47%	25,78	53,05%	2,2	3,00%
2017	49,10	73,80	29,4	59,88%	3,3	4,47%	32,05	65,28%	3,5	4,70%
2018	49,70	74,70	39,1	78,67%	5,2	6,96%	40,16	80,81%	5,2	6,96%

Sumber: Proyeksi Bappenas 2014-2018

Jumlah *market* tenaga kerja Indonesia diproyeksikan semakin lama semakin banyak seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dikisaran 5% sd 7%.

Tahun 2014 diprediksikan akan terdapat market untuk sektor formal dan informal sebanyak 118,4 juta tenaga kerja. Sedangkan tahun 2018 diprediksikan akan mencapai jumlah tenaga kerja sebanyak 124,4 juta Tenaga kerja. Pertumbuhan tersebut setara dengan *CAGR (compound annual growth rate)* 1,24%.

Dari jumlah tersebut sesuai dengan kemampuan infrastruktur dan kapabilitasnya, BPJS Ketenagakerjaan merencanakan untuk mengakuisisi dan mengelola sebanyak 40,16 juta juta tenaga kerja formal dan 5,2 juta tenaga kerja informal pada tahun 2018. PNS, TNI/Polri yang selama ini tidak masuk dalam skema perlindungan jaminan sosial Jamsostek secara bertahap masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data dari BPS, Jumlah PNS, TNI/Polri sebanyak 4,3 juta jiwa. Tahun 2015 ditargetkan 2,5 juta PNS, TNI/Polri yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKK dan JKM.

Prospek Pertumbuhan Upah

Selain pertumbuhan dari sisi jumlah tenaga kerja, pertumbuhan volume usaha PT Jamsostek (Persero) juga ditopang oleh pertumbuhan upah/gaji sebagai dasar perhitungan jumlah iuran Jamsostek. Data historis menunjukkan bahwa UMP di Indonesia mengalami peningkatan rata-rata tahunan sebesar 15,64% (CAGR dari tahun 1997 sampai dengan 2014). Dengan pertumbuhan tersebut, kedepan PT Jamsostek (Persero) optimis pertumbuhan rata-rata upah akan diatas nilai 10%. Pertumbuhan upah tersebut akan mendorong pertumbuhan volume bisnis PT Jamsostek (Persero).

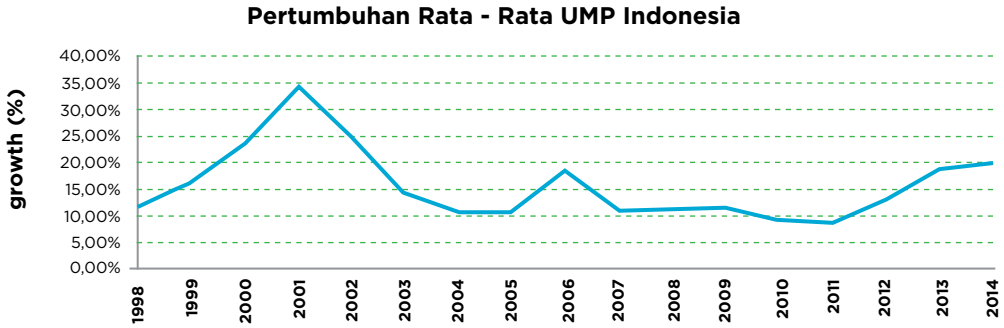

Prospek Kewenangan Pengawasan dan Pemeriksaan

Untuk dapat memberikan perlindungan jaminan sosial secara efektif, BPJS Ketenagakerjaan kedepan mempunyai fungsi pengawasan dan inspeksi yang melekat di BPJS Ketenagakerjaan. Fungsi ini diharapkan akan meningkatkan jumlah kepesertaan mencapai market share sampai dengan 80% pada tahun 2018. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai hak untuk menghentikan pelayanan publik kepada perseorangan/perusahaan yang tidak patuh pada skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berupa ketidak ikut sertaan program, data yang tidak valid untuk upah, jumlah tenaga kerja, dan program. Untuk menjalankan fungsi ini diperlukan beberapa proses yang sedang dikembangkan yang meliputi:

- Komunikasi & change management
- Kolaborasi
- Deteksi
- Inspeksi dan Investigasi
- Pemberian Sanksi

Prospek Pengelolaan Keuangan

Selain perubahan lingkungan yang kondusif, terdapat juga tantangan kedepan berupa adanya perubahan pengelolaan keuangan dan batasan biaya pengelolaan. Sesuai dengan regulasi yang akan diterapkan, kedepan pengelolaan keuangan antar program dibuat terpisah dan tidak diperbolehkan subsidi antar program. Selain itu terdapat pengelolaan *entitas institusi*/BPJS Ketenagakerjaan yang terpisah dengan pengelolaan entitas program. BPJS Ketenagakerjaan memperoleh biaya operasional dari fee pengelolaan atas 4 program dengan skema:

- 10% atas iuran program JKK dan JKM
- 2% atas *asset under management* program JHT dan Pensiun

Surplus dari keuangan program akan dikembalikan lagi ke dana program. Sementara surplus dari dana BPJS Ketenagakerjaan ditentukan oleh kebijakan Dewan Pengawas. Surplus ini bisa sebagai *retained earning* untuk memperkuat kapasitas organisasi, ataupun bersifat subsidi untuk pengembangan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kebijakan pengelolaan keuangan ini menjadi batasan dan tantangan bagi PT Jamsostek (Persero) untuk berkembang secara cepat. Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas BPJS Ketenagakerjaan.

Prospek Perubahan Lingkungan Teknologi Informasi dan Sosial

Teknologi Informasi merupakan salah satu penggerak perubahan dan menjadi salah satu upaya BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan kapasitas organisasi. Salah satu komponen teknologi informasi yang berubah adalah penggunaan internet. Gambar berikut menunjukkan trend pemakaian internet di Indonesia.

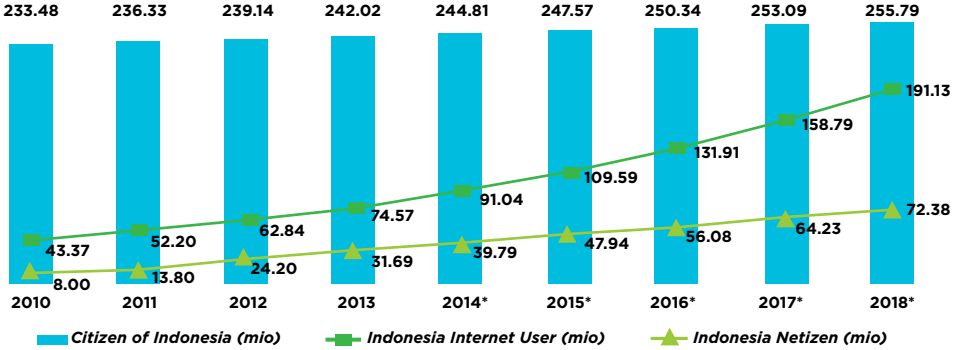

Sumber: markplus research (2013)

Tahun 2014 diprediksikan akan terdapat 91,04 juta orang Indonesia yang menggunakan internet dan jumlah tersebut akan terus berkembang sampai tahun 2018 menjadi 191,13 juta orang. *Trend* pemakaian internet ini akan dimanfaatkan untuk melakukan *contact* dan akses BPJS Ketenagakerjaan melalui internet. BPJS Ketenagakerjaan akan mendorong kearah akses melalui prinsip *anywhere, anytime* dan *anyhow*. Prinsip ini menekankan bahwa peserta dan calon peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat berinteraksi dengan BPJS Ketenagakerjaan kapan saja, dimana saja dan melalui alat yang ada, bisa *smartphone* atau internet. Hal lain adalah mendorong peserta melakukan *self service* sehingga meningkatkan kenyamanan peserta dari sisi waktu mereka.

PENGUNGKAPAN PIHAK BERELASI, PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perusahaan melakukan perubahan kebijakan dikarenakan perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh perubahan PSAK yang dikeluarkan oleh IAI dalam rangka adopsi IFRS. Hal ini dibuktikan dari tahun ke tahun seluruh perubahan PSAK telah diadopsi secara penuh tanpa penundaan.

Pihak Berelasi

Perusahaan dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK 7 (Revisi 2010) mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian. Transaksi antara Perusahaan dengan badan usaha milik negara diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak yang berelasi sesuai dengan PSAK 7 (Revisi 2010).

Pada tahun 2013, penjualan dengan pihak berelasi berjumlah Rp. 6,73 miliar, sementara pembelian barang/jasa dengan pihak berelasi berjumlah Rp. 85,85 miliar.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya telah melakukan transaksi dengan pihak berelasi murni sebagai berikut:

(dalam jutaan)

No	Nama Perusahaan	Jenis/Hubungan	Tingkat Kepemilikan	Jenis Pekerjaan	Pendapatan		Beban	
					2012	2013	2012	2013
1	PT Nayaka Era Husada (NEH)	Anak Perusahaan Yayasan Dana Pensiun Karyawan	75% (oleh Yayasan Dana Pensiun Karyawan)	Pengelolaan Kesehatan Karyawan & Pensiun	-	-	21.780,44	23.180
2	PT Bina Jasa Abadikarya (BIJAK)	Anak Perusahaan	99,98% (oleh PT Jamsostek (Persero))	Jasa Pengelola Gedung dan penempatan TK	5.631	6.738	23.046,35	30.295
3	Yayasan Dana Pensiun (YDP)	Dana Pensiun Karyawan	100 % anggota (karyawan aktif dan pensiunan)	Pengelola Dana Pensiun Karyawan PT Jamsostek	-	-	50.700,48	32.380,91
	Total				**5.631**	**6.738**	**95.527**	**85.856**

Meski jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan total pendapatan dan beban perusahaan, dalam melakukan transaksi dengan anak perusahaan dan perusahaan asosiasi tetap sesuai ketentuan yang berlaku yaitu melalui prosedur pengadaan yang transparan (*e-procurement*), sehingga tidak merugikan kepentingan perusahaan.

Disamping itu, sesuai PSAK 7 (revisi 2010) Pengungkapan Pihak yang Berelasi, Perusahaan melakukan transaksi hubungan dengan perusahaan di bawah pengendalian pemerintah, seperti penempatan investasi pada pemerintah, BUMN dan BPD diklasifikasikan sebagai transaksi pihak berelasi, dengan rincian sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi- Obligasi, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, penitipan surat berharga,
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi- Saham, Penempatan Investasi - Obligasi, Virtual Account,Co Branding
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi- Obligasi, Virtual Account,Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB), Penempatan Investasi - Saham
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi- KIK-EBA, Penempatan Investasi - Obligasi, Penempatan Investasi - Saham, Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP -KB)

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Sukuk
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penemp atan Investasi - Obligasi
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pupuk Kaltim	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Gresik (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	Perum Pembangunanan Perumahan Nasional	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Timah (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham

Jumlah transaksi pada pihak berelasi dibawah pengendalian pemerintah ini sangat signifikan, yaitu mencakup 57% atau sebesar Rp.84,76 triliun dari transaksi Investasi pada tahun 2013, namun mengingat mayoritas pelaku pasar dikuasai oleh perusahaan dibawah pengendalian pemerintah maka transaksi tersebut tidak dapat dihindari. Meskipun demikian seluruh transaksi tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, antara lain PP Nomor 22 tahun 2004, Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Investasi dan GCG. Perusahaan juga melakukan *review* atas setiap pihak yang melakukan transaksi investasi, antara lain berupa pemberian bobot untuk setiap mitra investasi yang ditinjau secara berkala dan tinjauan aspek menajemen risiko (*four eyes principles*).

Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Pada tanggal 25 November 2011, ditetapkan Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sesuai UU 24 Tahun 2011, PT Jamsostek (Persero) akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi sejak tanggal 01 Juli 2015, maka secara resmi UU 3 Tahun 1992 dicabut dan PT Jamsostek (Persero) dibubarkan tanpa likuidasi. Program yang diselenggarakan mengalami perubahan yaitu ditambah Jaminan Pensiun, sedangkan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) diserahkan kepada BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan /ASKES (Persero). Untuk melaksanakan UU Nomor: 24 Tahun 2011, sesuai pasal 70 maka selambat-lambatnya pada bulan November 2013 seluruh aturan pelaksanaan UU ini harus sudah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2013 telah diterbitkan peraturan pelaksanaan undang-undang 24 tahun 2011 yaitu terdiri dari 5 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden dan 1 Keputusan Presiden yang seluruhnya berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan ini berdampak terhadap perubahan seluruh kebijakan dan proses bisnis Perusahaan yang harus disesuaikan dan dipersiapkan pada tahun 2013. Penerapan UU 24 tahun 2011 yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan adalah sebagai berikut:

a. BUMN menjadi Badan Hukum Publik, dan bertanggung jawab kepada Presiden
b. Cakupan bersifat wajib menjadi lebih luas, yakni:
   - BPJS Kesehatan: seluruh penduduk
   - BPJS Ketenagakerjaan: seluruh pekerja
c. Perubahan Sistem Penyelenggaraan:
   - Perusahaan melakukan administrasi dengan dua BPJS (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan)
   - Tenaga Kerja dilayani oleh dua BPJS (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan)
d. Perubahan Program dan Manfaat:
   - Jaminan Pensiun untuk Tenaga Kerja Swasta dan Informal
   - Jaminan Kesehatan untuk seluruh Penduduk
e. Perubahan Keuangan, yaitu:
   - Pemisahan Aset
   - Perubahan pelaporan keuangan

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada 2013 Perusahaan mengeluarkan beberapa kebijakan baru antara lain sebagai berikut:

a. PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011)
   Kebijakan baru atas piutang iuran program Jamsostek dan piutang properti investasi merupakan kelanjutan dari penerapan PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) yang belum seluruhnya selesai diterapkan pada 2012 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:
   - KEP/365/102013 tentang Klasifikasi Piutang Iuran Program Jamsostek; dan
   - KEP/342/092013 tentang Piutang Properti Investasi.

   Penetapan kebijakan akuntansi ini berdampak terhadap peningkatan nilai piutang iuran program jamsostek dan piutang properti investasi pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012.

b. PSAK 13 (Revisi 2011)
   Kebijakan baru atas properti investasi merupakan penerapan PSAK 13 (Revisi 2011): Pengakuan Properti Investasi yang diterapkan pada 2013 sesuai Keputusan Direksi Nomor KEP/343/092013 tentang klasifikasi properti investasi berdasarkan tujuan penggunaannya. Penetapan kebijakan ini berdampak terhadap penetapan nilai sisa (residu) aset properti dikelompokan menjadi beberapa jenis.

Berikut ini ditampilkan daftar perubahan kebijakan akuntansi yang berlaku pada 2013 dan 2012:

No	Rincian Perubahan	PSAK Terkait	Nomor Keputusan Direksi
Tahun 2013			
1	Klasifikasi Piutang Iuran	PSAK 55 (revisi 2011) : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran	KEP/365/102013

No	Rincian Perubahan	PSAK Terkait	Nomor Keputusan Direksi
2	Piutang Properti Investasi	PSAK 50 (revisi 2010) : Instrumen Keuangan : Penyajian PSAK 55 (revisi 2011) : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran	KEP/342/092013
3	Pengungkapan Properti Investasi	PSAK 13 (revisi 2011) : Properti Investasi	KEP/343/092013
Tahun 2012			
1	Perubahan Penyajian Posisi Keuangan	PSAK 1 (revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan	KEP/76/032012
		PSAK 28 (revisi 2010) : Akuntansi Asuransi Kerugian	
		PSAK 36 (revisi 2010) : Akuntansi Asuransi Jiwa	
2	Perubahan Penyajian Laba Rugi Komprehensif	PSAK 23 (revisi 2009) : Pendapatan	KEP/76/032012
		PPSAk 9: Pencabutan ISAk 5: Interpretasi atas Paragraf 14	
		PSAk 50 (1998) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam kelompok Tersedia Untuk Dijual	
3	Reklasifikasi dan Penentuan Nilai	PSAK 10 (revisi 2011) : Akuntansi Sukuk	KEP/77/032012
4	Klasifikasi Piutang Program dan Jasa Konstruksi	PSAK 55 (revisi 2011) : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran	KEP/316/082012
5	Dana Pengambangan JHT	Voluntary oleh manajemen	KEP/476/122012

PENGECUALIAN PENGUNGKAPAN LAPORAN

Sehubungan dengan keberadaan PT Jamsostek (Persero) sebagai perusahaan yang bergerak di jasa keuangan dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah (100%) dan tidak menjual sahamnya kepada pasar modal serta tidak menerbitkan efek lainnya, sehingga terdapat beberapa hal yang tidak relevan untuk disajikan dalam Laporan Tahunan 2013 sebagai berikut:

1. Kronologis Pencatatan Saham
2. Kronologis Pencatatan Efek lainnya
3. Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik Individu
4. Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP)
5. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
6. Realisasi Emisi Obligasi, Sukuk dan Obligasi Konversi
7. Kebijakan Dividen
8. Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

Program JHT memberikan kontribusi iuran sebesar Rp. 20,01 triliun atau 74,30% dari total iuran JHT dan Non JHT sebesar Rp. 26,92 triliun.

ANALISIS KINERJA OPERASIONAL

Analisis Operasi Per Segmen Usaha

Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial dari negara untuk warganya, sehingga kepesertaannya bersifat wajib.Begitu pula halnya dengan jaminan sosial tenaga kerja, program ini bersifat wajib bagi seluruh tenaga kerja formal non PNS/TNI/Polri atau pekerja swasta dan BUMN.Penyelenggaraan program Jamsostek dilakukan dengan mekanisme asuransi sosial dan tabungan wajib. Berdasarkan mekanisme penyelenggaraan ini, PT Jamsostek mengelompokkan program yang dikelola ke dalam dua kelompok yaitu:

1. Program JHT, merupakan tabungan wajib dan melekat pada akun individu masing-masing tenaga kerja
2. Program non JHT, merupakan program yang dijalankan dengan mekanisme asuransi yang terdiri dari:
   a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

b. Program Jaminan Kematian (JK)
c. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
d. Program Khusus

Selama tahun 2013, kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan ratio klaim masing-masing Program, sebagai berikut:

1. Kepesertaan

Pertumbuhan kepesertaan PT Jamsostek (Persero) baik aktif dan non aktif selama tahun 2009 sampai dengan 2013, sebagai berikut :

DESKRIPSI	2009	2010	2011	2012	2013	Δ 2012-2013 (%)	CAGR (%)	RKAP 2014
Kepesertaan Perusahaan:								
Aktif	115,683	134,035	154,453	168,532	185,507	10.07	12.53	218,300
Non Aktif	84,531	91,416	100,140	103,574	118,382	14.30	8.78	
Jumlah Perusahaan	200,214	225,451	254,593	272,106	303,889	11.68	11.00	
Kepesertaan Tenaga Kerja:								
Aktif	8,495,732	9,646,398	10,311,669	11,552,557	12,348,464	6.89	9.80	15,197,802
Non Aktif	20,534,941	23,383,330	16,689,965	18,259,544	20,684,515	13.28	0.18	
Jumlah Tenaga Kerja	29,030,673	33,029,728	27,001,634	29,812,101	33,032,979	10.80	3.28	

Realisasi target kepesertaan pada tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:

DESKRIPSI	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN	RKAP 2014
Perusahaan Aktif	188,956	185,507	98.17	218,300
Tenaga Kerja Aktif	13,241,423	12,348,464	93.26	15,197,802
Perusahaan (Paket A dan Paket B)	35,000	33,076	94.5	Disajikan Per Program
Penambahan Tenaga Kerja:				
a. Program Paket A (JKK, JK, JHT)	4,000,000	4,973,177	124.33	
b. Program Paket B (JKK, JK)	101,713	423,592	416.46	
c. Program Paket C (JPK)*	1,500,000	1,845,029	123.00	
d. Program Khusus:				
- Jasa Konstruksi	1,950,000	5,632,527	113.79	
- TK Mandiri (LHK)	250,000	334,402	133.76	
- TK Perseorangan	70,000	86,604	123.72	

**** anggaran dan realisasi TK program paket A sudah termasuk TK program paket C***

Sampai dengan akhir tahun 2013, ada sebanyak 33.076 perusahaan yang mendaftar menjadi peserta baru Jamsostek, jumlah ini merupakan 94,50% dari target penambahan peserta perusahaan selama tahun 2013. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi penambahan kepesertaan mencapai 104,27%.

Untuk kepesertaan tenaga kerja, penambahan kepesertaan dikelompokkan sesuai programnya yaitu program paket, program JPK dan program khusus yang terdiri dari jasa konstruksi, TK di luar hubungan kerja (TK LHK) dan TK perseorangan. Untuk program paket (A + B) telah terjadi penambahan peserta sebanyak 5.396.769 tenaga kerja sampai dengan akhir tahun 2013. Pencapaian ini mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012, dimana pada tahun 2012 terjadi penambahan peserta tenaga kerja sebanyak 5.458.006 orang atau telah terjadi penurunan sebesar 1,12% tetapi terjadi penambahan sebesar 131,57% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu 4.101.713.

Sampai akhir tahun 2013, penambahan peserta program JPK mencapai 1.845.029 tenaga kerja atau telah mencapai 123% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2013. Jumlah ini mencapai 101,01% dari penambahan peserta program JPK tahun 2012. Sedangkan untuk program khusus

jasa konstruksi target penambahan tenaga kerja tercapai sebesar 113,79% atau sebanyak 5.632.527 orang; program TK LHK tercapai penambahan sebanyak 334.402 orang atau mencapai 133,76% dan program TK Perseorangan tercapai penambahan sebanyak 86.604 orang atau sebesar 123,72% dari target yang ditetapkan tahun 2013.

Target kepesertaan Tenaga Kerja (TK) Aktif per Program sesuai RKAP 2014, sebagai berikut:

KELOMPOK PESERTA	TARGET TK AKTIF PADA RKAP 2014			
	PROGRAM JKK	PROGRAM JK	PROGRAM JHT	TOTAL
Penerima Upah				
(TK dari perusahaan dengan skala):				
Perusahaan Besar	5,400,866	5,400,866	5,400,866	5,400,866
Perusahaan Menengah	5,424,952	5,424,952	5,424,952	5,424,952
Perusahaan Kecil	1,618,725	1,618,725	1,618,725	1,618,725
Perusahaan Mikro	665,259	665,259	375,802	665,259
Jasa Konstruksi	1,188,000	1,188,000	0	1,188,000
	14,297,802	14,297,802	12,820,345	14,297,802
Bukan Penerima Upah				
Pemberi Kerja	23,544	23,544	23,544	23,544
TK Mandiri	876,456	876,456	54,340	876,456
	900,000	900,000	77,884	900,000
Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	**15,197,802**	**15,197,802**	**12,898,229**	**15,197,802**

Target kepesertaan penambahan Tenaga Kerja (TK) per Program sesuai RKAP 2014, sebagai berikut:

KELOMPOK PESERTA	TARGET PENAMBAHAN TK PADA RKAP 2014			
	PROGRAM JKK	PROGRAM JK	PROGRAM JHT	TOTAL
Penerima Upah				
(TK dari perusahaan dengan skala):				
Perusahaan Besar + Menengah	2,026,539	2,026,539	2,026,539	2,026,539
Perusahaan Kecil	1,960,517	1,960,517	1,960,517	1,960,517
Perusahaan Mikro	1,101,976	1,101,976	-	1,101,976
Jasa Konstruksi	5,632,527	5,632,527	-	5,632,527
	10,724,559	10,724,559	3,987,056	10,724,559
Bukan Penerima Upah				
Pemberi Kerja	23,544	23,544	23,544	23,544
TK Mandiri	976,456	976,456	-	976,456
	1,000,000	1,000,000	23,544	1,000,000
Total	**11,724,559**	**11,724,559**	**4,010,600**	**11,724,559**

Pertumbuhan dan capaian kepesertaan tersebut sangat mempengaruhi penerimaan iuran dan pembayaran jaminan khususnya program JHT, JKK, JK dan JPK sebagaimana uraian berikutnya.

2. Program JHT

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan Program Jamsostek dengan mekanisme tabungan wajib yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti meninggal dunia, cacat total tetap, atau telah mencapai usia pensiun.

Penerimaan Iuran dan Pembayaran JHT

Rincian penerimaan iuran dan pembayaran JHT dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

Tabel Iuran dan Jaminan Program JHT

(Rp. Miliar)

NO.	KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	PERTUMBUHAN 2012-2013(%)	CAGR (%) *)	TARGET 2014
1	Iuran	9.281	10.836	12.965	15.719	20.005	27,27	21,17	26.981
2	Jaminan	5.790	5.878	6.878	7.967	9.968	25,12	14,55	10.040

*) *CAGR (Compound Annual Growth Rate)* atau rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun

Pertumbuhan iuran JHT disebabkan adanya penambahan jumlah peserta dan kenaikan upah peserta, sementara meningkatnya jumlah pembayaran jaminan karena meningkatnya jumlah kasus setiap tahunnya.

Tahun 2014 perusahaan menargetkan penerimaan iuran JHT sebesar Rp. 26,98 triliun dan pembayaran jaminan Rp. 10,04 triliun. Target penerimaan iuran meningkat cukup besar yaitu 34,87%, mengingat target kepesertaan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Kasus Klaim JHT

Rincian kasus klaim JHT dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

Tabel kasus klaim Program JHT

(Rp. Miliar)

NO.	JENIS KLAIM	2009	2010	2011	2012	2013	PERTUMBUHAN 2012-2013(%)	CAGR (%) *)
1	Usia 55 tahun	64.130	61.816	66.332	67.441	73.861	9,52	3,59
2	M. Wilayah RI	592	633	636	610	710	16,39	4,65
3	Cacat Total Tetap	45	45	43	38	37	(2,63)	(4,78)
4	Jadi PNS/TNI/Polri	13.151	12.333	7.897	3.513	2.933	(16,51)	(31,28)
5	Kepesertaan 5 tahun	802.378	773.311	808.150	848.449	951.265	12,12	4,35
6	Meninggal	18.593	19.585	21.869	23.273	25.425	11,76	8,14
	Total	**898.889**	**867.723**	**904.927**	**943.324**	**1.054.231**	**11,76**	**4,07**

*) CAGR *(Compound Annual Growth Rate)* atau rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun

Tabel diatas menunjukan bahwa klaim didominasi oleh jenis kasus kepesertaan 5 tahun, dimana pada tahun 2013 jumlahnya mencapai 90,23% dari total klaim JHT. Hal ini dikarenakan persepsi peserta yang salah tentang fungsi program JHT yaitu sebagai dana talangan.

Perbandingan antara Pengembangan JHT dengan Bunga Deposito

Dana JHT bersifat tabungan yang melekat pada akun individu tenaga kerja, sehingga peserta mendapatkan pengembangan atas dana yang disimpan. Hasil pengembangan tersebut diperoleh dari kinerja investasi JHT yang seluruhnya dikembalikan kepada peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan.

Jika dibandingkan dengan besarnya bunga deposito, pengambangan dana JHT yang diberikan kepada peserta selalu lebih tinggi dengan selisih berkisar antara 1,42%-4,1%. Ini menunjukkan komitmen PT Jamsostek (Persero) untuk memberikan hasil pengembangan yang optimum kepada peserta.

Berikut ini adalah perbandingan antara kinerja pengembangan JHT dengan nilai bunga deposito sebagai berikut:

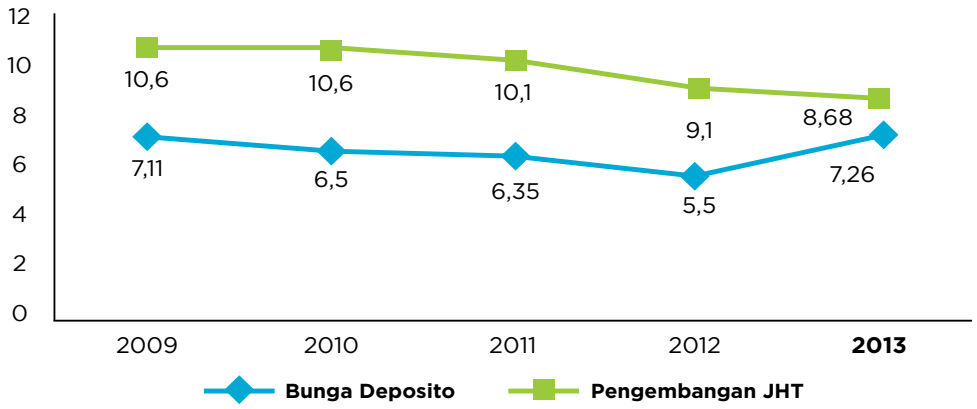

3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program ini memberikan jaminan bagi pekerja ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja.Sampai saat ini program perlindungan bersifat campuran antara yang sifatnya menggantikan penghasilan yang hilang karena terjadi kecelakaan dan membantu mengembalikan fungsi-fungsi yang hilang karena kecelakaan kerja.

Penerimaan Iuran dan Pembayaran JKK

Rincian penerimaan iuran dan pembayaran JKK dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

Tabel Iuran dan Jaminan Program JKK

(Rp. Miliar)

NO.	KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	PERTUMBUHAN 2012-2013(%)	CAGR (%)*)	TARGET 2014
1	Iuran	1.093	1.264	1.562	1.732	2.365	36,55	21,28	3.607
2	Jaminan	343	377	499	506	563	11,26	13,19	637
3	Klaim Rasio	31,38%	29,81%	31,98%	29,21%	23,81%	(18,49)	(6,67)	17,66%

*) *CAGR (Compound Annual Growth Rate)* atau rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun

Pertumbuhan iuran JKK disebabkan adanya penambahan jumlah peserta dan kenaikan upah peserta, sementara meningkatnya jumlah pembayaran jaminan karena meningkatnya jumlah kasus setiap tahunnya. Namun pertumbukan iuran lebih tinggi dibandingkan jaminan sehingga klaim rasio setiap tahun cenderung mengalami penurunan.Karena sifatnya asuransi, maka klaim rasio yang semakin rendah akan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perolehan laba perusahaan.

Di tahun 2014 ditargetkan penerimaan iuran JKK sebesar Rp. 3,61 triliun (tumbuh 52,52%) dengan jaminan Rp. 637 miliar (tumbuh 13,14%). Peningkatan target iuran yang cukup signifikan dipengaruhi oleh tingginya peningkatan target peserta aktif.

Kasus Klaim JKK

Rincian kasus klaim JKK dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

Tabel Kasus Klaim Program JKK

(Rp. Miliar)

NO.	JENIS KLAIM	2009	2010	2011	2012	2013	PERTUMBUHAN 2012-2013(%)	CAGR (%) *)
1	Cacat Fungsi	4.380	4.061	4.130	3.915	3.985	1,79	(2,34)
2	Cacat Sebagian	2.713	2.550	2.722	2.685	2.693	0,30	(0,18)
3	Cacat Total Tetap	42	36	34	37	44	18,92	1,17
4	Meninggal Dunia	2.144	2.191	2.218	2.419	2.438	0,79	3,26
5	Kasus Sembuh	87.035	89.873	90.387	94.018	94.125	0,11	1,98
	Total	**96.314**	**98.711**	**99.491**	**103.074**	**103.285**	**0,2**	**1,76**

*) *CAGR (Compound Annual Growth Rate)* atau rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun

Kasus kecelakaan kerja rata-rata tumbuh 1,76% setiap tahunnya dan sebagian besar korban dari kasus tersebut kembali sembuh. Pada tahun 2013 terjadi 103.285 kasus kecelakaan kerja, atau rata-rata terjadi 283 kecelakaan kerja setiap hari, dengan korban meninggal rata-rata 7 orang, cacat 18 orang dan sisanya kembali sembuh.

Selain memberikan jaminan saat terjadi kecelakaan, PT Jamsostek (Persero) juga melakukan upaya preventif dengan memberikan pelatihan K3 bagi tenaga kerja dan perusahaan peserta.Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta, mulai tahun 2014 Perusahaan akan menerapkan skema rehabilitasi dan JKK *Return To Work,* dimana peserta yang mengalami kecelakaan kerja akan ditangani langsung oleh pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, sampai tenaga kerja tersebut sembuh dan bisa kembali bekerja.

4. Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.Santunan dibayarkan secara langsung dari PT Jamsostek (Persero) kepada ahli waris.

Penerimaan Iuran dan Pembayaran JK

Rincian penerimaan iuran dan pembayaran JK dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

Tabel Iuran dan Jaminan Program JK

(Rp. Miliar)

NO.	KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	PERTUMBUHAN 2012-2013(%)	CAGR (%)*)	TARGET 2014
1	Iuran	512	592	729	812	1.095	34,85	20,93	1.579
2	Jaminan	256	247	275	357	407	14,00	12,29	429
3	Klaim Rasio	50%	41,72%	35,25%	43,97%	37,17%	(15,47)	(7,14)	27,17

*) *CAGR (Compound Annual Growth Rate)* atau rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun

Baik jumlah iuran yang diterima maupun jumlah jaminan yang dibayarkan, setiap tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan iuran lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jaminan, sehingga klaim rasio setiap tahun cenderung mengalami penurunan.Karena sifatnya asuransi, maka klaim rasio yang semakin rendah akan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perolehan laba perusahaan.

Di tahun 2014 ditargetkan penerimaan iuran dari program Jaminan Kematian sebesar Rp.1,58 triliun yaitu tumbuh 44,20% dengan jaminan Rp. 429 miliar yaitu tumbuh 5,41% dan klaim rasio 27,17% yaitu turun 10%. Seperti halnya program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian, target penerimaan iuran untuk program Jaminan Kematian di tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup besar, yang dipengaruhi oleh peningkatan target jumlah peserta.

Kasus Klaim JK

Rincian kasus klaim JK dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

Tabel Kasus klaim Program JK

(Rp. Miliar)

NO.	JENIS KLAIM	2009	2010	2011	2012	2013	PERTUMBUHAN 2012-2013(%)	CAGR (%)*)
1	Meninggal Aktif	8.941	9.621	10.908	12.573	13.783	9,62	11,43
2	Perlindungan 6 bulan	5.405	5.338	5.538	5.567	5.809	4,35	1,82
3	Setelah Klaim JHT	221	293	292	296	257	(13,18)	3,84
	Total	**14.567**	**15.252**	**16.738**	**18.436**	**19.849**	**7,66**	**8,04**

*) *CAGR (Compound Annual Growth Rate)* atau rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun

Kasus kematian rata-rata tumbuh 8,04% setiap tahunnya, dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada kasus kematian pada saat tenaga kerja masih aktif sebagai peserta program Jamsostek. Pada tahun 2013 terjadi 19.849 kasus kematian, atau rata-rata terjadi 54 kematian setiap hari dengan rata-rata jumlah peserta yang meninggal saat masih aktif sebesar 37 orang setiap hari.

5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah program Jamsostek yang diperuntukkan bagi tenaga kerja dan keluarganya dalam mengatasi risiko kesehatan. Program JPK bersifat optional, artinya jika perusahaan mampu menyelenggaran pelayanan kesehatan yang lebih baik dari program JPK Jamsostek, maka perusahaan tersebut diperbolehkan untuk tidak mengikutsertakan pegawainya dalam program JPK Jamsostek dengan syarat pengusaha/perusahaan harus dapat menunjukkan buktinya, baik berupa dokumen ataupun keterangan dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Dengan kondisi tersebut, program JPK bersaing secara langsung dengan berbagai penyedia program kesehatan bagi perusahaan-perusahaan.Kelebihan yang ditawarkan program JPK adalah program kesehatan yang murah dengan layanan yang handal.

Penerimaan Iuran dan Pembayaran JPK

Rincian penerimaan iuran dan pembayaran JPK dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

Tabel Iuran dan Jaminan Program JPK

(Rp. Miliar)

NO.	KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	PERTUMBUHAN 2012-2013(%)	CAGR (%)*)
1	Iuran	927	1.089	1.345	1.787	3.188	78,40	36,18
2	Jaminan	666	814	932	1.168	1.958	67,64	30,94
3	Klaim Rasio	71,84%	74,74%	69,29%	65,36%	61,42%	(6,41)	(3,84)

*) *CAGR (Compound Annual Growth Rate)* atau rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun

Baik jumlah iuran yang diterima maupun jumlah jaminan yang dibayarkan, setiap tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan iuran lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jaminannya, sehingga klaim rasio setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan yang signifikan terjadi di tahun 2013, disebabkan karena meningkatnya *ceiling* upah dan jumlah peserta yang meningkat sebesar 10,81%. Kenaikan jumlah peserta disebabkan adanya peningkatan *coverage* dan *benefit* layanan.

Jaringan pelayanan program JPK

Untuk melayani peserta dan keluarganya dalam hal pemeliharaan kesehatan, PT Jamsostek (Persero) bekerja sama dengan jaringan pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan dokter keluarga yang digolongkan ke dalam Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat I (PPKI), rumah sakit, apotik, *optic* dan laboratorium yang digolongkan kedalam Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat II (PPKII).

Daftar jumlah jaringan pelayanan program JPK dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

Tabel Jaringan Pelayanan Program JPK

NO.	PELAYANAN KESEHATAN	2009	2010	2011	2012	2013	PERTUMBUHAN 2012-2013(%)	CAGR (%) *)
1	PPK I	2.889	2.903	3.032	3.124	3.147	0,74	2,16
2	Rumah Sakit	575	590	651	714	740	3,64	6,51
3	Apotek	350	367	367	360	303	(15,83)	(3,54)
4	Optik	321	330	330	342	304	(11,11)	(1,35)
5	Laboratorium	52	59	63	61	55	(9,84)	1,41

*) *CAGR (Compound Annual Growth Rate)* atau rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada peserta, PT Jamsostek (Persero) terus mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan dengan menambah jumlah jaringan pelayanan kesehatan baik tingkat I maupun tingkat II. Untuk jumlah jaringan apotek dan laboratorium mengalami penurunan jumlah jaringan karena untuk jenis layanan tersebut sudah termasuk di dalam pelayanan rumah sakit.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, Program JPK mulai 1 Januari 2014 dialihkan kepada BPJS Kesehatan.

6. Program Jasa Konstruksi (Jakons)

Program ini memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada proyek-proyek pembangunan konstruksi seperti gedung, jalan dan sarana publik lainnya. Besaran iuran dihitung dari besaran nilai proyek, oleh karena itu jumlah peserta, penerimaan iuran, dan pembayaran jaminan program ini akan sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penerimaan Iuran dan Pembayaran Jakons

Rincian penerimaan iuran dan pembayaran Jakons dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

Tabel Peserta, Iuran dan Jaminan Program JAKONS

NO.	KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	PERTUMBUHAN 2012-2013(%)	CAGR (%)*)
1	Peserta (ribu)	5.168	4.330	4.825	6.457	5.632	(12,76)	2,18
2	Iuran (Rp.mil)	118	117	156	270	193	(28,52)	13,09
3	Jaminan (Rp.mil)	21	25	16	31	40	29,03	17,48
4	Klaim Rasio	17,8%	21,37%	10,26%	11,48	20,72%	80,49	3,87

*) *CAGR (Compound Annual Growth Rate)* atau rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun

Jumlah tenaga kerja yang terdaftar program jasa konstruksi Jamsostek di tahun 2013 sebanyak 5,6 juta orang atau mengalami penurunan 12,76% jika dibandingkan dengan jumlah peserta tahun 2012. Salah satu faktor penyebab turunnya kepesertaan ini adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 dibandingkan tahun 2012, yang berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur sehingga menyebabkan berkurangnya proyek-proyek yang didaftarkan ke program Jamsostek. Secara rata-rata terjadi peningkatan 2,18% peserta setiap tahun dalam kurun waktu 2009-2013.

Sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah peserta, maka penerimaan iuran di tahun 2013 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, tetapi tidak demikian halnya dengan nilai jaminan yang justru mengalami peningkatan sebesar 29,03%.

7. Program Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja/ Mandiri

Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja (LHK) adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal.Iuran TK LHK ditetapkan berupa nominal tertentu berdasarkan upah sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penerimaan Iuran dan Pembayaran TK LHK/ Mandiri

Rincian penerimaan iuran dan pembayaran TK LHK/Mandiri dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

Tabel Peserta, Iuran dan Jaminan Program TK LHK/Mandiri

NO.	KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	PERTUMBUHAN 2012-2013 (%)	CAGR (%)*)
1	Peserta	157.775	142.065	145.049	392.200	334.402	(14,74)	20,66
2	Iuran (Rp. Mil)	10	17	31	50	77	54 00	50,42
3	Jaminan (Rp. Mil)	9	12	18	36	63	75,00	47,58
4	Klaim Rasio	90%	70,59%	58,06%	72%	81,82%	13,64	(2,35)

*) *CAGR (Compound Annual Growth Rate)* atau rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun

Tahun 2013 terdapat 334.402 orang yang mendaftar sebagai peserta Jamsostek, mengalami penurunan 14,74% dibandingkan dengan jumlah peserta tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu lima tahun, rata-rata terjadi pertumbuhan jumlah peserta program TK LHK sebesar 20,66%. Sifat kepesertaan untuk program TK LHK ini masih bersifat suka rela, sehingga angka kepesertaannya masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah pekerja informal di seluruh Indonesia.

Profitabilitas dan pertumbuhan JHT lebih tinggi dari Non JHT

Segmentasi Profitabilitas

Sejalan dengan pertumbuhan kepesertaan, tingkat profitabilitas Perusahaan juga mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Disamping pertumbuhan kepesertaan yang berdampak pada peningkatan penerimaan iuran, peningkatan profitabilitasjuga dipengaruhi oleh ketepatan dalam memilih instrumen investasi yang berdampak pada penerimaan hasil investasi. Hal ini terlihat dari laba bersih segmen JHT yang dibukukan Perusahaan pada tahun 2013 yang mencapai Rp.20,74 trillun atau 118,72% dari laba tahun sebelumnya. Sedangkan segmen Non JHT mencapai Rp. 2,29 trillun atau 104,84% dari laba pada periode yang sama tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 2,18 trillun.

Berikut tingkat profitabilitas 5 (lima) tahun terakhir:

dalam miliar rupiah

URAIAN	2009		2010		2011		2012		2013		RATA-RATA	
	JHT	NON JHT	JHT	NON JHT	JHT	NON JHT	JHT	NON JHT	JHT	NON JHT	JHT	NON JHT
Pendapatan Iuran	9.281	2.660	10.836	3.080	12.965	3.823	15.719	4.650	20.005	6.919	13.761	4.227
Pembayaran Jaminan	(5.790)	(1.295)	(5.878)	(1.474)	(6.878)	(1.740)	(7.967)	(2.099)	(9.968)	(3.032)	(7.296)	(1.928)
Cadangan Teknis	-	(812)	-	(1.027)	-	(1.298)	-	(1.341)	-	(2.093)	-	(1.314)
Pendapatan Iuran Bersih	**3.491**	**553**	**4.957**	**579**	**6.088**	**786**	**7.752**	**1.210**	**10.037**	**1.794**	**6.465**	**985**
Pendapatan Investasi	7.721	1.308	9.664	1.395	10.287	1.740	11.392	1.826	12.700	2.177	10.353	1.689
Beban Investasi	(415)	(137)	(149)	(125)	(323)	(111)	(171)	(121)	(318)	(140)	(275)	(127)
Pendapatan Investasi Bersih	**7.307**	**1.170**	**9.516**	**1.270**	**9.964**	**1.629**	**11.221**	**1.705**	**12.382**	**2.037**	**10.078**	**1.562**
Beban Pengelolaan Jht	(971)	971	(1.147)	1.147	(1.323)	1.323	(1.502)	1.502	(1.678)	1.678	(1.325)	1.325
Beban Usaha	-	(1.207)	-	(1.276)	-	(1.569)	-	(2.045)	-	(2.725)	-	(1.765)
Pendapatan Lain Bersih	-	4	-	16	-	20	-	121	-	23	-	37
Pph Badan	-	(110)	-	(204)	-	(169)	-	(311)	-	(520)	-	(263)
Laba Per Segmen	**9.827**	**1.381**	**13.326**	**1.532**	**14.728**	**2.020**	**17.471**	**2.182**	**20.741**	**2.288**	**15.219**	**1.881**
Pertumbuhan	**60**	**291**	**3.499**	**151**	**1.403**	**488**	**2.743**	**162**	**3.270**	**106**	**2.195**	**239**
	1%	**27%**	**36%**	**11%**	**11%**	**32%**	**19%**	**8%**	**19%**	**5%**	**17%**	**16%**

Laba bersih Perusahaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berfluktuatif. Pertumbuhan rata-rata per tahun selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2013 persegmen adalah sebesar Rp.2,20 trillun untuk JHT dan sebesar Rp. 239,43 miliar untuk Non JHT atau setara dengan 17% dan 16% setiap tahunnya.

Pertumbuhan Kepesertaan/Pangsa Pasar

Hasil dari berbagai strategi pemasaran menghasilkan pertumbuhan kepesertaan tenaga kerja aktif sebanyak 6,89% dan pertumbuhan perusahaan aktif sebanyak 10,07%. Hasil secara lengkap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel Pertumbuhan Peserta Program Jamsostek

NO.	PESERTA	2009	2010	2011	2012	2013	PERTUMBUHAN 2012-2013 (%)	CAGR*) 20092013 (%)
1	Perusahaan Aktif	115.683	134.035	154.453	168.532	185.507	10,07	12,53
2	Perusahaan Non Aktif	84.531	91.416	100.140	103.574	118.382	14,30	8,78
	Jumlah Perusahaan	**200.214**	**225.451**	**254.593**	**272.106**	**303.889**	**11,68**	**10,99**
3	Tenaga Kerja Aktif	8.495.732	9.646.398	10.311.669	11.552.557	12.348.464	6,89	9,80
4	Tenaga Kerja Non Aktif	20.534.941	23.383.330	16.689.965	18.259.544	20.684.515	13,28	0,18
	Jumlah Tenaga Kerja	**29.030.673**	**33.029.728**	**27.001.634**	**29.812.101**	**33.032.979**	**10,80**	**3,28**
5	Peserta JPK – Perusahaan	41.398	51.236	63.620	75.930	85.742	12,92	19,96
6	Peserta JPK – Tenaga Kerja	1.871.422	2.180.825	2.567.671	3.059.777	3.390.526	10,81	16,02
7	Peserta JPK – Tertanggung	4.402.552	5.044.375	5.884.528	6.976.601	7.582.785	8,69	14,56

*)*CAGR (Compound Annual Growth Rate)* atau rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun

Capaian kepesertaan jika dibandingkan dengan jumlah pasar program Jamsostek yaitu tenaga kerja formal non PNS/TNI/Polri (pekerja swasta/ BUMN), terlihat cakupan kepesertaan yang sudah dicapai selama lima tahun berturut-turut sebagai berikut:

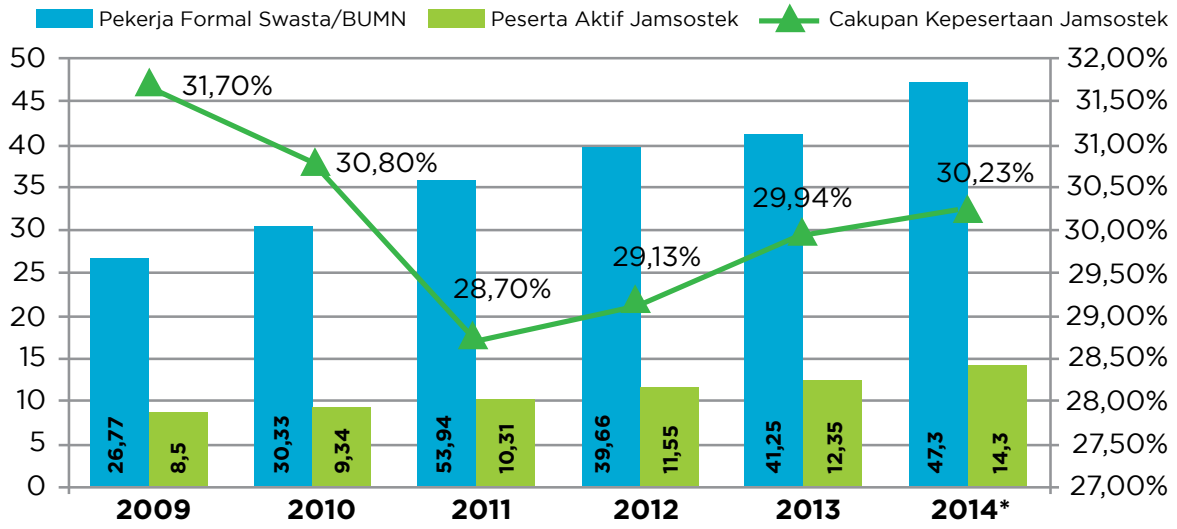

CAGR Pekerja swasta/BUMN: 11,41%
CAGR Peserta Aktif Jamsostek:9,79%
*Angka RKAT 2014

Dari grafik di atas terlihat bahwa:
1. Jumlah pekerja di sektor formal (swasta/ BUMN) setiap tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia pasca krisis, sehingga pangsa pasar Jamsostek menjadi semakin besar. Tahun 2013 terjadi pertumbuhan jumlah pekerja di sektor formal sebesar 4% dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun 11,41%.
2. Peserta aktif program Jamsostek terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 9,79%. Tahun 2013 terdaftar peserta aktif 12,3 juta tenaga kerja, mengalami peningkatan 6,9% dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 11,55 juta tenaga kerja.

Pemasaran Dan Pangsa Pasar

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian tinjauan per segmen usaha, produk Jamsostek terdiri dari produk yang bersifat wajib dan produk yang bersifat optional. Produk Jamsostek yang bersifat wajib adalah produk JHT-Jaminan Hari Tua, JKK-Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM-Jaminan Kematian, sementara produk yang bersifat optional adalah produk JPK-Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Produk JHT, JKK dan JKM dipasarkan secara bersama-sama dan bersifat bundling. Akan tetapi sifat dari ketiga program ini berbeda. JHT bersifat tabungan sosial dan melekat ke akun individu dari masing-masing peserta. PT Jamsostek (Persero) mendapatkan *fee* atas pengelolaan dana akumulatif (*asset under management*) sebesar maksimal 2% sebagai dana operasional. Sementara produk JKK dan JKM bersifat asuransi dan bersifat kumpulan dana jangka pendek. Iuran yang terkumpul dikurangi dengan cadangan teknis dikurangi dengan klaim, sisanya akan menjadi keuntungan untuk PT Jamsostek (Persero). .

Dalam mencapai tujuan perusahaan, manajemen membagi strategi umum dan strategi fungsional. Strategi terdiri dari 3 tahapan yakni rekonsolidasi (2012), *fit-in infrastructure* (2013) dan *sustainability in benefit & services* (2014). Sementara strategi fungsional terdiri dari strategi direktorat PT. Jamsostek (Persero).

Strategi Umum Perusahaan
Tahun 2013 sebagai tahapan *fit-in infrastructure* bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi menuju era baru implementasi jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan dengan pergeseran pada *grand strategy* yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:
1. Pengelolaan organisasi yang *Product Centric* menjadi lebih *Customer Centric*.
2. Mengubah persepsi pendekatan kepada peserta yang bersifat wajib (*compulsory*) menjadi kebutuhan peserta.
3. Pendekatan dengan mendahulukan penegakan hukum menjadi lebih berbasis hubungan (*relationship*) jangka panjang.
4. Pengelolaan kepesertaan dan pelayanan yang pasif menjadi lebih aktif.
5. Pengelolaan administrasi perkantoran yang traditional dan menggunakan kertas (*paper based*) menjadi pengelolaan yang lebih modern dan elektronik.

Inisiatif strategis pada Tahapan *Fit – in Infrastructure* dicanangkan sebagai tahapan untuk membangun seluruh kebijakan dan infrastruktur pendukung untuk menyiapkan kapasitas organisasi sesuai paradigma dan nilai–nilai baru di era BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjalankan inisiatif-inisiatif ini, pencapaian kinerja perusahaan di tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012.

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, kinerja utama Perusahaan dilihat dari jumlah peserta program Jamsostek baik peserta aktif maupun non aktif.

Pertumbuhan peserta non aktif tahun 2013 baik perusahaan maupun tenaga kerja, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan peserta aktif. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengangguran di tahun 2013 akibat banyaknya PHK yang dipicu oleh pemogokan, *sweeping* dan relokasi usaha. Tetapi secara rata-rata, pertumbuhan peserta tenaga kerja non aktif sangat rendah, disebabkan oleh adanya penyempurnaan tata cara pengelolaan data perusahaan dan tenaga kerja program Jamsostek di dalam sistem informasi terpadu *online* oleh tim penyusunan transformasi sistem pengelolaan data kepesertaan di tahun 2011 sehingga di tahun ini jumlah peserta non aktif mengalami penurunan yang sangat drastis.

Meskipun jumlah peserta aktif terus mengalami peningkatan, tetapi cakupan kepesertaan terhadap pekerja formal swasta/BUMN cenderung mengalami penurunan, yang disebabkan oleh rata-rata pertumbuhan peserta aktif lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan pekerja formal. Pertumbuhan cakupan kepesertaan yang rendah berarti Jamsostek belum mampu mengimbangi pertumbuhan pasar tenaga kerja formal, yang disebabkan oleh belum kuatnya *positioning* Jamsostek sebagai penyelenggara jaminan sosial. Selain itu masih banyak perusahaan yang menganggap jaminan sosial sebagai beban (tambahan biaya) dan tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program Jamsostek, sementara Jamsostek tidak memiliki kewenangan dalam hal *Law Enforcement*/penegakan hukum.

Untuk memperluas cakupan kepesertaan, di tahun 2014 perusahaan menargetkan jumah peserta aktif untuk sektor formal sebanyak 14,3 juta tenaga kerja mengalami peningkatan 15,79% dibandingkan tahun 2013 dan tenaga kerja dari sektor informal sebanyak 900 ribu orang, sehingga secara total target kepesertaan aktif di tahun 2014 adalah sebanyak 15,2 juta orang tenaga kerja. Untuk mencapai target kepesertaan yang cukup tinggi ini dilakukan dengan menerapkan strategi *sustainability benefit & service* yang didasarkan pada 6 pilar utama yaitu:

1. Peningkatan kepesertaan dan perluasan pangsa pasar.
2. Peningkatan dana kelolaan, hasil investasi dan sistem pengelolaan keuangan secara optimal.
3. Pengembangan program/manfaat dan implementasi pelayanan prima
4. Pengembangan komunikasi terintegrasi melalui berbagai media.
5. Implementasi keunggulan operasional dan layanan melalui model bisnis baru dan penguatan sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan.
6. Pengembangan Human capital, Manajemen Perubahan dan Penguatan Tata Kelola.

Strategi Pemasaran

Beberapa strategi pemasaran yang telah diimplementasikan sebagai berikut :

1. **Memperbanyak Kanal Distribusi *(Distribution Channel)***

   Awal tahun 2013, PT Jamsostek (Persero) mempunyai kanal sebanyak 121 Kantor Cabang yang tersebar diseluruh Indonesia. Jumlah tersebut dirasa kurang mengingat target kepesertaan PT Jamsostek (Persero) kedepan ketika berganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan wajib melindungi seluruh tenaga kerja baik formal maupun informal yang pada tahun 2014 mencapai 118,4 juta tenaga kerja. Untuk memudahkan akses peserta dan calon peserta, maka pada tahun 2013, PT Jamsostek (Persero) melakukan inisiatif berupa penambahan kanal distribusi. Inisiatif dilakukan dengan menggunakan sumber daya sendiri dan kolaborasi dengan industri perbankan.

   PT Jamsostek (Persero) melakukan penambahan kanal melalui pembukaan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 53 unit. Kantor Cabang Pembantu ini memberikan akses yang cepat dan dekat kepada peserta dan calon peserta Jamsostek untuk melakukan pendaftaran, pengiriman data, ataupun mengajukan pelayanan klaim.

Tabel Jaringan Kantor Cabang Pembantu

NO.	NAMA KCP	NO.	NAMA KCP	NO.	NAMA KCP	NO.	NAMA KCP	NO.	NAMA KCP
1	Rantau Prapat	12	Cibitung	23	Tulung Agung	34	Sanggau	44	Pare-Pare
2	Dharmasraya	13	Subang	24	Probolinggo	35	Ketapang	45	Gowa
3	Karimun	14	Cianjur	25	Pandaan	36	Tanjung	46	Bone
4	Indragiri Hilir	15	Indramayu	26	Sumbawa	37	Kutai Kertanegara	47	Pangkajene & Kep.
5	Belitung	16	Sleman	27	Jombang	38	Tanah Laut	48	Maros
6	Lubuk Linggau	17	Purbalingga	28	Maumere	39	Kutai Barat	49	Malili
7	Kecamatan Betung	18	Sukohardjo	29	Badung	40	Seruyan	50	Banggai
8	Kalianda	19	Boyolali	30	Driyorejo	41	Sintang	51	Baubau
9	Marunda	20	Lumajang	31	Sangata	42	Singkawang	52	Merauke
10	Cilegon	21	Tuban	32	Tanah Grogot	43	Mamuju	53	Manokwari
11	Garut	22	Krian	33	Batu Licin				

Sementara JSPO (*Jamsostek Service Point Office*) didirikan dengan melakukan kolaborasi dengan Bank BRI dan Bank Jabar Banten (BJB) sebanyak 512 kantor cabang. JSPO merupakan kantor-kantor cabang bank BRI (500 unit) dan kantor cabang bank BJB (12 unit) yang mempunyai fungsi untuk menerima pendaftaran peserta Jamsostek dan menerima berkas klaim peserta Jamsostek. JSPO ini dihubungkan oleh sistem informasi antara bank tersebut dengan sistem informasi PT Jamsostek (Persero).

2. Meningkatkan Program Komunikasi

Untuk lebih meningkatkan kepesertaan Jamsostek dan mendorong sikap positif terhadap Jamsostek, PT Jamsostek (Persero) melakukan berbagai inovasi dalam bidang komunikasi korporat maupun komunikasi pemasaran. Berbagai inovasi diantaranya adalah program:

a) Jamsostek *Goes To Society*
Program ini bersifat *event activity* mendatangkan publik *figure* di pasar modern/mall dengan lomba dan aktivitas bagi pengunjung.

b) *Jams Session*
Program ini dirancang untuk memberikan *awareness* melalui dialog di TV yang melibatkan beberapa tokoh dan *publik figure*.

c) Jamsostek *goes to Campus*
Program ini mendatangi kampus – kampus untuk memberikan edukasi awal kepada mahasiswa dan sekaligus melakukan rekrutmen kepada *talent* terbaik kampus tersebut.

d) *Social media* facebook dan twitter
Seiring dengan makin bertambahnya pemakaian internet dan *social media*, maka PT Jamsostek (Persero) memanfaatkan saluran ini untuk berkomunikasi dan melakukan *engagement* kepada peserta secara *realtime*. Peserta secara bebas dapat melakukan komplain, pertanyaan dan menyampaikan informasi kepada publik tentang kinerja/persepsi mereka tentang Jamsostek. Jumlah *follower* untuk twitter berjumlah 5.000an dan penggemar *fanpages* facebook Jamsostek sebesar 30an ribu orang.

3. Brand Equity

PT Jamsostek (Persero) secara rutin melakukan pengukuran terhadap beberapa indikator pemasaran, untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sisi pengelolaan merk dan pengelolaan peserta. Untuk mengukur keberhasilan pengelolaan merk, PT Jamsostek (Persero) mengukur melalui *brand equity*. Variabel yang diukur dan hasilnya adalah sebagai berikut:

a. *Brand awareness index*: 86,0%
b. *Brand association index*: 72,6%
c. *Brand loyalty index*: 89,1%
d. *Brand perceived quality index*: 75,5%
e. *Corporate brand equity index*: 80,6%

Total Brand Equity Index adalah 80,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa dari beberapa aspek tersebut merk Jamsostek secara baik dikenal oleh publik, dipersepsikan sebagai merk yang baik dalam melayani pelanggan, dan mempunyai tingkat loyalitas yang tinggi.

Modal ini yang dibawa ketika nanti menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Modal yang baik ini tidak serta merta dihilangkan dalam branding menjadi BPJS ketenagakerjaan. Logo yang dipakai didalam BPJS Ketenagakerjaan masih menggunakan bentuk dasar yang hampir sama dengan logo Jamsostek.

4. CRM/Customer Relationship Management

Sebagai lembaga publik yang mengelola 12 juta peserta dan 185 ribu perusahaan, aspek pengelolaan pelanggan menjadi salah satu fokus manajemen PT Jamsostek (Persero). 12 juta pelanggan dan 185 perusahaan tentunya mempunyai keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Program CRM berusaha mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan tersebut dan mencari pola terbaik dalam melakukan hubungan dengan peserta baik peserta perusahaan dan peserta tenaga kerja. Bentuk-bentuk hubungan dengan peserta yang dilakukan antara lain *customer gathering*, perbaikan layanan komunikasi, customer visit, korespondensi via surat fisik dan elektronik untuk peserta.

Untuk memudahkan akses peserta, maka PT Jamsostek (Persero) membukan akses *contact center* di nomor 500 910 sebagai sarana untuk melakukan *complain*, pertanyaan informasi dan berbagai kebutuhan *contact* dengan PT Jamsostek (Persero).

5. Service Blue Print

Salah satu bentuk CRM untuk peserta tenaga kerja adalah memberikan interaksi terbaik ketika tenaga kerja berhubungan dengan PT Jamsostek (Persero). Salah satu interaksi yang paling sering dilakukan adalah interaksi yang terjadi di Kantor Cabang. Untuk itu harus terdapat pedoman yang jelas yang mengatur tentang tata cara berinteraksi, layout yang baik di kantor cabang, karyawan dan petugas yang ramah, papan informasi yang jelas, dan alur informasi yang jelas. Hal-hal tersebut diatur dalam *service blue print* yang dibuat.

Moto *service* yang dipakai PT Jamsostek (Persero) adalah PRIMA, singkatan dari: Peduli, Ringkas, Interaktif, *Modern* dan Aktif. Pada tahun 2013 diimplementasi pada pilot proyek di beberapa kantor cabang Jamsostek.

P R I M A

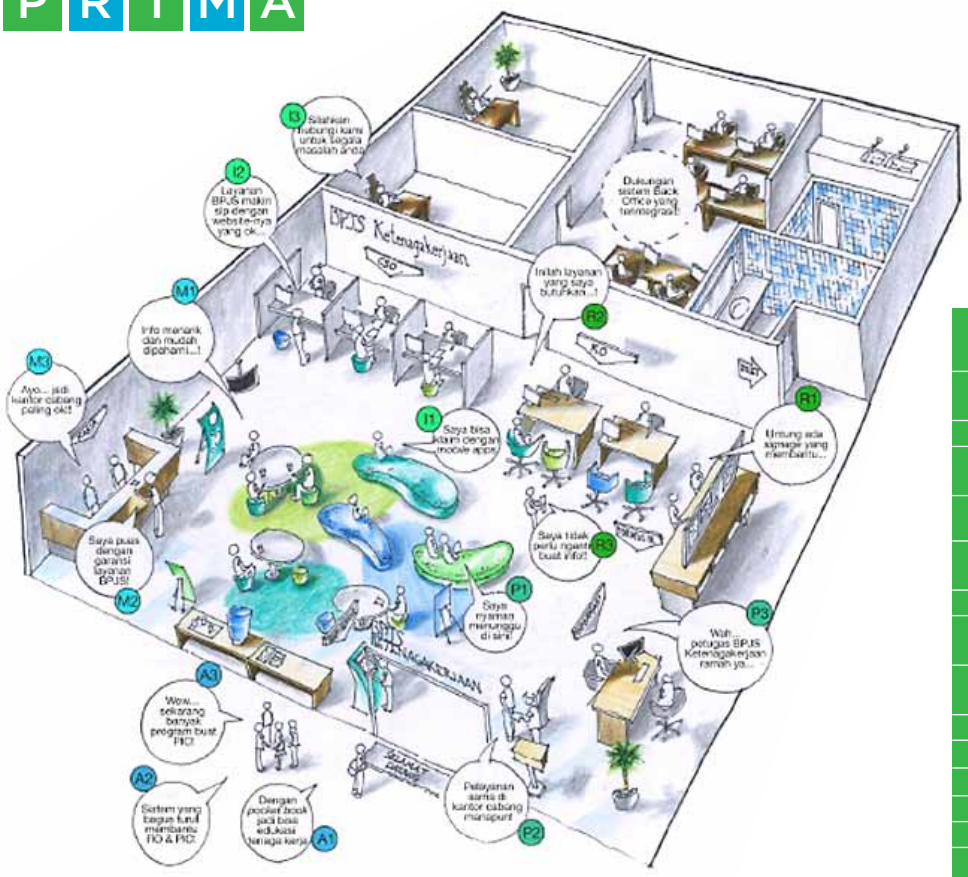
BPJS Ketenagakerjaan
Dukungan sistem Back Office yang terintegrasi
Info menarik dan mudah dipahami...!
Ayo... jadi kantor cabang paling oke!
Saya puas dengan garansi layanan BPJS!
Wow... sekarang banyak program buat PIC!
Sistem yang bagus tuh! membantu PIO & PIC
Dengan pocket book jadi bisa edukasi tenaga kerja
Pelayanan aamis di kantor cabang mantoure
Wah, petugas BPJS Ketenagakerjaan ramah ya...
Saya tidak perlu ngantri buat nabung
Saya nyaman menunggu di sini
Saya bisa akses dengan mobile apps
Layanan BPJS makin top dengan website-nya yang ok...
Silahkan hubungi kami untuk segala masalah anda

P1	Transformasi ruang ruang tunggu
P2	Konsistensi *service delivery*
P3	Gestur Layanan PRIMA
R1	Simplikasi alur pelayanan
R2	Spesifikasi fungsi kantor cabang
R3	Pembagian alur layanan *problem solver*
I1	*Multi-platform channel*
I2	*Website & mobile apps* multifungsi
I3	Petugas sebagai *problem solver*
M1	Visualisasi informasi
M2	*Service Guarantee*
M3	*Innovation Award*
A1	*Pocket book* untuk PIC
A2	*Paperless process*
A3	Optimasi peran PIC

Tingkat Kepuasan Peserta

Hasil dari berbagai perbaikan pelayanan dan pengembangan produk tersebut mendapat apresiasi dari peserta dengan naiknya tingkat kepuasan pelanggan dari 83,6% pada tahun 2012 menjadi 87,1% pada tahun 2013.

Grafik Tingkat Kepuasan Peserta

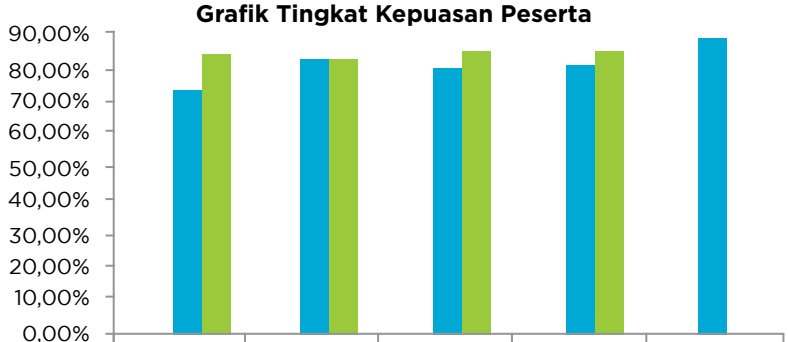

	2009	2010	2011	2012	2013
NON-JPK	73,60%	83,34%	80,60%	81,50%	89,40%
JPK	84,33%	83,21%	85,70%	85,70%	84,40%

Metode pengukuran menggunakan *Top Three Boxes* (3 teratas dari skala 1-7) dari peserta yang menyatakan puas dan sangat puas. Variabel yang diukur adalah: *Moment of Truth* titik-titik kontak layanan yang dilalui oleh peserta.

Dari 11 kanwil yang ada dan dilakukan survey, untuk program non-JPK 10 kanwil mengalami peningkatan tingkat kepuasan peserta dan 1 (satu) kanwil yang mengalami penurunan kepuasan peserta.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN

Analisa dan pembahasan manajemen ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamsostek (Persero), Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus, yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (AAJ) *member firm* dari Robson Rhodes, Salustro Reydel and McGladrey (RSM) dan memperoleh pendapat wajar, dalamsemua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus tanggal 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Pedoman Akuntansi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pajastek).

Analisis Pertumbuhan Kinerja Keuangan

Rata-rata pertumbuhan aset perusahaan selama periode 5 (lima) tahun terakhir sebesar

16,23%.

Analisis Pertumbuhan Posisi Keuangan

Total aset dan liabilitas serta ekuitas konsolidasian pada akhir tahun 2013 ditutup pada posisi sebesar Rp.153,73 triliun. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ 2012-2013 (%)	CAGR (%)
Aset Investasi	80,698,273	98,981,339	111,787,375	132,834,043	149,210,360	12.33	16.61
Aset Lancar	2,108,691	2,164,374	2,949,523	2,226,145	2,959,774	32.96	8.85
Pinjaman Diberikan dan SKP Program DPKP	31,663	79,988	150,945	498,546	666,480	33.68	114.19
Aset Tetap Neto	333,000	347,854	366,135	421,599	582,425	38.15	15.00
Aset Lain	1,076,645	1,167,552	1,373,223	1,552,119	314,089	(79.76)	(26.51)
Total Aset	**84,248,272**	**102,741,106**	**116,627,201**	**137,532,451**	**153,733,128**	**11.78**	**16.23**
Liabilitas Kepada Peserta	78,952,976	96,034,374	110,332,630	129,400,523	145,173,527	12.19	16.45
Liabilitas Lancar	230,002	297,504	348,251	475,618	662,852	39.37	30.29
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	225,469	265,117	308,126	344,793	483,125	40.12	20.99
Liabilitas Lain	17,356	269	2,737	1,716	3,626	111.26	(32.39)
Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta	680,563	753,385	809,817	757,951	1,060,116	39.87	11.72
Total Liabilitas	**80,106,367**	**97,350,649**	**111,801,562**	**130,980,601**	**147,383,246**	**12.52**	**16.46**
Ekuitas	4,141,905	5,390,458	4,825,639	6,551,851	6,349,882	(3.08)	11.27
Total Liabilitas dan Ekuitas	**84,248,272**	**102,741,106**	**116,627,201**	**137,532,451**	**153,733,128**	**11.78**	**16.23**

Total asset tersebut berhasil tumbuh sebesar 11,78 % dibandingkan tahun 2012, untuk pos liabilitas sebesar Rp.147,38 triliun juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,52% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan ekuitas perusahan sebesar Rp. 6,35 triliun mengalami penurunan sebesar 3,08% dibandingkan tahun 2012. Rata-rata pertumbuhan aset perusahaan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah 16,23% dan perusahaan berhasil meningkatkan total aset sebesar Rp.69,48 triliun.

Aset Investasi

Aset investasi pada tahun akhir 2013 ditutup pada posisi sebesar Rp. 149,21 triliun atau 97,06% dari total aset yang dikelola perusahaan. Pertumbuhan dan komposisi Aset Investasi dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Deposito	27,257,342	31,202,595	32,866,981	41,743,556	40,189,782	(3.72)	10.19
Saham	14,044,083	21,921,547	23,439,755	27,435,505	31,811,390	15.95	22.68
Reksadana	3,014,111	5,617,707	8,370,421	9,558,352	11,767,089	23.11	40.57
Obligasi (Termasuk Sukuk & KIK EBA)	35,868,832	39,743,607	46,688,780	53,696,420	65,053,259	21.15	16.05
Penyertaan	26,670	26,670	30,814	30,814	30,814	0.00	3.68
Properti	487,235	469,212	390,210	369,395	358,026	(3.08)	(7.41)
Total	**80,698,273**	**98,981,339**	**111,786,960**	**132,834,043**	**149,210,360**	**12.33**	**16.61**

Total aset investasi tersebut berhasil tumbuh 12,33% atau sebesar Rp.16,38 triliun dibandingkan dengan tahun 2012, pertumbuhan tersebut masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan aset investasi selama periode 5 (lima) tahun sebesar 16,61%. Penurunan pertumbuhan ini disebabkan turunnya nilai pasar efek investasi khususnya saham dan dipengarungi oleh kondisi pasar modal yang bersifat temporer menjelang tahun politik 2014.

Sumber pertumbuhan aset investasi ini berasal dari iuran bersih yang peserta program jaminan sosial tenaga kerja dan hasil investasi neto. Seluruh aset investasi mengalami pertumbuhan kecuali properti, hal ini dikarenakan kebijakan manajemen tidak melakukan penambahan investasi pada sektor properti dan lebih mengoptimalkan aset properti yang telah dimiliki. Aset investasi yang mengalami rata-rata pertumbuhan yang tinggi adalah investasi pada reksadana dan saham yaitu masing-masing sebesar 40,57% dan 22,68%.

Pengelolaan aset investasi perusahan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan PP ini, diatur jenis-jenis instrumen investasi yang diperbolehkan dan batasan-batasan maksimum penempatan per portfolio.

Perbandingan asset investasi JHT dan Non JHT

Dana Jamsostek dikelompokan dalam 2 (dua) jenis yaitu Aset Investasi Jaminan Hari Tua (JHT) dan Aset Investasi Non Jaminan Hari Tua (Non JHT). Aset investasi JHT per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 131,18 triliun merupakan 87,92% dari total aset investasi, turun bila dibandingkan proporsi aset JHT tahun lalu yang mencapai 88,42%. Proporsi aset investasi JHT yang jauh lebih besar dibandingkan aset investasi non JHT antara lain dikarenakan karakteristik program JHT yang merupakan program jangka panjang dan rate iuran JHT sebesar 5,7% lebih tinggi dibandingkan gabungan rate iuran program non JHT yaitu program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kecelakan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Komposisi Aset Investasi JHT dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

ASET INVESTASI JHT

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Deposito	24,229,345	28,739,948	30,336,268	38,451,529	36,022,669	(6.32)	10.42
Saham	9,220,162	14,418,488	16,546,369	19,129,685	23,447,285	22.57	26.28
Reksadana	2,830,759	4,803,809	7,369,024	8,521,535	10,599,348	24.38	39.11
Obligasi (Termasuk Sukuk)	34,123,398	38,018,368	44,163,037	51,049,268	60,829,787	19.16	15.55
Properti	409,771	392,112	313,517	293,214	281,699	(3.93)	(8.94)
Total	**70,813,434**	**86,372,724**	**98,728,215**	**117,445,232**	**131,180,788**	**11.70**	**16.66**

Dari tahun 2009 sampai dengan 2013 aset investasi JHT mengalami kenaikan aset sebesar Rp.60,37 triliun. Investasi program JHT lebih banyak ditempatkan pada portofolio investasi berpendapatan tetap yaitu pada obligasi dan deposito yang memiliki risiko investasi yang terjaga dan juga karena dana program JHT adalah bersifat jangka panjang. Pada akhir tahun 2013 portotofolio obligasi dan deposito merupakan 73,83% dari total investasi JHT. Proporsi portofolio investasi JHT yang mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah reksadana sebesar 39,11%.

ASET INVESTASI NON JHT

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Deposito	3,027,997	2,462,647	2,530,713	3,292,027	4,167,113	26.58	8.31
Saham	4,823,921	7,503,059	6,893,385	8,305,820	8,364,105	0.70	14.75
Reksadana	183,352	813,898	1,001,397	1,036,817	1,167,741	12.63	58.86
Obligasi (Termasuk Sukuk)	1,745,434	1,725,240	2,525,743	2,647,152	4,223,472	59.55	24.72
Penyertaan	26,670	26,670	30,814	30,814	30,814	0.00	3.68
Properti	77,465	77,101	76,694	76,182	76,327	0.19	(0.37)
Total	**9,884,839**	**12,608,615**	**13,058,745**	**15,388,811**	**18,029,572**	**17.16**	**16.21**

Penempatan investasi program Non JHT berbeda dengan program JHT, proporsi penempatan investasi program Non JHT pada instrumen berpendapatan tetap dan instrumen pendapatan tidak tetap berimbang dengan pertimbangan untuk mendapatkan *return of invesment* yang lebih optimal. Pada akhir tahun 2013 penampatan pada instrumen saham merupakan 46,39% dari total investasi Non JHT, rata-rata penempatan instrumen saham selama 5 (lima) tahun terhadap total investasi Non JHT adalah 52,29%. Portofolio investasi Non JHT yang mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah reksadana sebesar 58,86%.

Aset Lancar

Pada akhir tahun 2013 perusahaan membukukan aset lancar sebesar Rp. 2,82 triliun, dengan pertumbuhan dan komposisi Aset Lancar dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Kas dan Setara Kas	970,668	674,231	742,012	569,755	1,141,057	100.27	4.13
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1,049,684	1,191,169	1,273,512	1,386,040	1,559,187	12.49	10.40
Piutang Pendapatan Jatuh Tempo	-	-	2,255	12,301	4,639	(62.28)	-
Piutang Investasi	50,078	-	472,604	132,571	107,207	(19.13)	20.96
Uang Muka Kerja Pegawai	9,014	7,027	5,118	6,411	11,756	83.38	6.87
Uang Muka Pajak	577	34,928	35,460	35,412	2,029	(94.27)	36.97
Beban Usaha Dibayar Dimuka	13,034	15,041	22,843	22,917	23,486	2.48	15.86
Piutang Iuran	17,711	5,692	180,921	51,240	101,950	98.97	54.89
Piutang Usaha	4,568	4,923	7,463	3,287	2,001	(39.11)	(18.64)
Perlengakapan Alat Tulis Kantor	4,709	5,288	6,143	6,191	6,459	4.32	8.22
Aset Dimiliki Untuk Dijual	-		-	21	2	(88.88)	-
Total Aset Lancar	**2,120,041**	**1,938,299**	**2,748,332**	**2,226,145**	**2,823,847**	**26.85**	**7.43**

Total aset lancar tersebut berhasil tumbuh 26,85% dibandingkan dengan tahun 2012, pertumbuhan tersebut berada diatas rata-rata pertumbuhan aset lancar selama periode 5 (lima) tahun sebesar 7,43%.

Pertumbuhan ini dipicu adanya :

1. Kenaikan pada pos kas dan setara kas serta pendapatan yang masih harus diterima, masing-masing naik sebesar 100,27% dan 12,49% dari tahun sebelumnya. Kenaikan kas dan setara kas ini digunakan untuk *rebalancing* aset dalam proses pemisahan aset Badan Penyelenggara dan aset Program Jaminan Sosial, sedangkan kenaikan pendapatan yang masih harus diterima mayoritas disebabkan karena ada pengakuan secara akrual atas hasil investasi pada Obligasi pada akhir periode pelaporan.
2. Kenaikan pada pos uang muka kerja pegawai sebesar 83,38% dibandingkan dengan tahun lalu disebabkan adanya peningkatan kegiatan operasional berkaitan dengan persiapan transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

3. Kenaikan pada pos piutang iuran sebesar 98,97% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan atas perusahaan peserta yang tidak membayar iuran karena kesulitan keuangan atau berhenti beroperasi tetapi tidak melaporkan kepada PT. Jamsostek, selain hal tersebut kenaikan piutang iuran per 31 Desember 2013 juga dikarenakan adanya perubahan kriteria yang digunakan dalam penyajian piutang iuran sesuai dengan surat keputusan direksi nomor: KEP/365/102013.

Aset Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

Pada akhir tahun 2013 perusahaan membukukan aset DPKP sebesar Rp. 666,48 miliar, dengan pertumbuhan dan komposisi Aset DPKP dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Pinjaman Diberikan Diberikan DPKP	159,045	131,050	201,191	330,075	492,099	49.09	32.63
Sarana Kesejahteraan Peserta DPKP	31,663	68,027	73,154	168,471	174,382	3.51	53.19
Total	**190,708**	**199,077**	**274,345**	**498,546**	**666,480**	**33.68**	**36.73**

Program DPKP yang merupakan entitas bertujuan khusus yang dimiliki PT. Jamsostek (Pesero) bertujuan untuk memberikan manfaat lebih lainnya kepada peserta Jamsostek memiliki aset berupa pinjaman diberikan dan sarana kesejahteraan peserta yang dikonsolidasi pada akhir periode tahun 2013 sebesar Rp.666,48 miliar, tumbuh sebesar 33,68% dibandingkan dengan akhir periode tahun 2012 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 36,73% dalam periode 2009 sampai dengan 2013.

Petumbuhan aset DPKP pada tahun 2013 terutama disebabkan adanya kenaikan pada pos pinjaman diberikan DPKP yang berupa kenaikan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp.144,64 miliar dan uang muka sarana kesejahteraan peserta sebesar Rp.13,15 miliar dibandingkan dengan posisi akhir periode tahun 2012. Pinjaman uang muka perumahan merupakan manfaat tambahan yang diterima peserta Jamsostek untuk kepemilikan rumah dengan rate bunga sebesar 6%/tahun, sedangkan uang muka sarana kesejahteraan peserta merupakan biaya pembangunan Rumah Sakit Pekerja di Cilincing Jakarta Utara.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2009 sampai dengan 2013 aset DPKP naik sebesar Rp. 475,77 miliar, sumber aset DPKP sebagian besar berasal dari distribusi laba perusahaan.

Aset Tetap

Pada akhir tahun 2013 perusahaan membukukan aset tetap sebesar Rp.1,21 triliun, dengan pertumbuhan dan komposisi aset tetap dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Tanah	87,721	87,726	101,975	112,761	127,156	12.77	9.73
Bangunan	141,191	176,857	196,880	219,412	253,774	15.66	15.79
Kendaraan Dinas	139,327	141,873	160,222	177,967	224,589	26.20	12.68
Peralatan Kantor	47,501	53,766	58,908	65,556	77,213	17.78	12.91
Peralatan Komputer	201,648	210,714	219,321	259,970	281,690	8.35	8.72
Peralatan Lain	78,968	102,828	111,410	117,765	134,196	13.95	14.18
Aset Dalam Konstruksi	35,447	27,767	92,894	26,162	107,768	311.93	32.05
Total	**731,803**	**801,531**	**941,609**	**979,592**	**1,206,386**	**23.15**	**13.31**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(398,803)	(441,301)	(497,268)	(557,993)	(623,961)	11.82	11.84
Total Aset Neto	**333,000**	**360,230**	**444,342**	**421,599**	**582,425**	**38.15**	**15.00**

Total aset tetap tersebut berhasil tumbuh 38,15% dibandingkan dengan tahun 2012, pertumbuhan tersebut berada diatas rata-rata pertumbuhan aset tetap selama periode 5 (lima) tahun sebesar 15,00%. dan secara nominal naik sebesar Rp. 474,58 miliar.

Aset tetap anak perusahan dan entitas bertujuan khusus masing-masing merupakan 0,66% dan 0,60% atas aset tetap konsolidasi per 31 Desember 2013. Aset dalam kontruksi merupakan aset yang masih dalam proses pembangunan baik untuk gedung maupun sistem teknologi informasi.

Aset Lain

Pada akhir tahun 2013 perusahaan membukukan aset lain sebesar Rp.314,09 miliar, dengan pertumbuhan dan komposisi aset lain dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Aset Tidak Berwujud	23,783	12,290	5,532	12,638	11,950	(5.44)	(15.81)
Aset Pajak Tangguhan	991,548	1,091,498	1,329,890	1,495,993	271,830	(81.83)	(27.64)
Aset Lain	66,919	66,580	37,762	43,487	30,309	(30.30)	(17.96)
Total	**1,082,250**	**1,170,368**	**1,373,184**	**1,552,119**	**314,089**	**(79.76)**	**(26.60)**

Total aset lain tersebut mengalami penurunan sebesar 79,76% dibandingkan dengan tahun 2012 yang disebabkan adanya penyesuian aset pajak tangguhan yang berasal dari cadangan teknis program Jaminan Kecelakan Kerja dan program Jaminan Kematian sebesar Rp.1,37 triliun ke Cadangan Umum pada tahun 2013.

Liabilitas

Pada akhir tahun 2013 perusahaan membukukan liabilitas sebesar Rp.147,38 triliun, dengan pertumbuhan dan komposisi liabilitas dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Liabilitas Kepada Peserta	78,964,487	96,034,374	110,332,630	129,400,523	145,173,527	12.19	16.44
Liabilitas Lancar	235,479	297,504	348,251	475,618	662,852	39.37	29.53
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	225,469	265,117	308,126	344,793	483,125	40.12	20.99
Liabilitas Lain	369	269	2,737	1,716	3,626	111.26	77.00
Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta	680,563	753,385	809,817	757,951	1,060,116	39.87	11.72
Total Liabilitas	**80,106,367**	**97,350,649**	**111,801,562**	**130,980,601**	**147,383,246**	**12.52**	**16.46**

Total liabilitas tersebut berhasil tumbuh 12,52% dibandingkan dengan tahun 2012dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,46%.Secara persentase yang mengalami rata-rata pertumbuhan signifikan adalah liabilitas lain dan liabilitas lancar masing-masing sebesar 77,00% dan 29,53%, sedangkan secara nominal liabilitas kepada peserta tumbuh selama periode 2009 sampai dengan 2013 naik sebesar Rp.67,27 triliun.

liabilitas kepada peserta

Pada akhir tahun 2013 perusahan membukukan liabilitas kepada peserta sebesar Rp.145,17 triliun, dengan pertumbuhan dan komposisi liabilitas kepada peserta dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Liabitas JHT							
Liabilitas program JHT	69,620,401	84,111,385	98,817,984	116,319,161	137,049,526	17.82	18.45
Liabilitas pengelolaan program JHT	3,162,509	4,735,420	1,948,154	2,022,950	(3,845,576)	(290.10)	-
Total Liabilitas JHT	72,782,910	88,846,805	100,766,138	118,342,111	133,203,950	**12.56**	16.31
Liabitas Non JHT							
Liabilitas program Non JHT	5,971,587	7,074,574	9,460,167	11,006,335	11,834,938	7.53	18.65
Liabilitas pengelolaan program Non JHT	-	45,211	301	526	485	(7.82)	-
Total Liabilitas Non JHT	5,971,587	7,119,785	9,460,468	11,006,860	11,835,422	**7.53**	18.65
Iuran Belum Rinci	209,990	67,784	106,024	51,551	134,155	160.23	(10.60)
Total Liabilitas Kepada Pesserta	**78,964,487**	**96,034,374**	**110,332,630**	**129,400,523**	**145,173,527**	**12.19**	**16.44**

Liabilitas JHT per 31 Desember 2013 tumbuh rata-rata 16,31% dengan kenaikan nominal naik Rp. 66,21 triliun selama 5 (lima) tahun dari 2009 sampai 2013. Hal tersebut dipengaruhi adanya pertumbuhan pada liabilitas program JHT sebesar 18,45%.

Kenaikan liabilitas program JHT antara lain disebabkan kenaikan tabungan JHT peserta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 67,43 triliun yang bersumber dari iuran peserta dan hasil pengembangan investasi. Pertumbuhan liabilitas program JHT berbanding terbalik dengan liabilitas pengelolaan program JHT yang mengalami penurunan sebesar Rp.5,84 triliun dibanding tahun 2012. Penurunan liabilitas pengelolaan program JHT terutama disebabkan selisih penilaian efek JHT mengalami tren negatif yaitu menjadi minus 3,85 triliun sebagai dampak adanya gejolak di pasar modal indonesia.

Liabilitas Non JHT per 31 Desember 2013 sebesar Rp.11,84 triliun mengalami rata-rata pertumbuhan 18,65% antara tahun 2009 sampai dengan 2013, kenaikan tersebut didorong karena adanya kenaikan liabilitas program Non JHT sebesar Rp. 5,86 triliun. Hal-hal yang secara signifikan berdampak pada kenaikan dan penurunan liabilitas program Non JHT adalah Kenaikan cadangan teknis dan katastropa pada akhir tahun 2013 sebesar Rp.2,09 triliun berdampak pada kenaikan liabilitas program Non JHT, pada sisi lain pos dana pengembangan Non JHT mengalami penurunan sebesar Rp.1,31 triliun yang berdampak pada penurunan liabilitas program Non JHT. Penurunan pos dana pengembangan Non JHT pada akhir tahun 2013 dikarenakan adanya reklasifikasi sebesar Rp. 1,20 triliun ke Cadangan umum sesuai hasil risalah RUPS tahun buku 2012. Reklasifikasi dana pengembangan Non JHT tersebut dengan pertimbangan bahwa dana pengembangan Non JHT sebagai sumber pendanaan program manfaat tambahan sudah tidak relevan lagi karena program manfaat tambahan sudah masuk kedalam layanan program Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) sesuai surat Direksi Nomor:B/3875/042013 tanggal 16 April 2013 dan rekomendasi Dewan Komisaris melalui surat Nomor:26/DK/042013 tanggal 11 April 2013.

Iuran belum rinci merupakan penerimaan iuran perusahan program Jamsostek dan program LHK yang belum didukung dengan data upah tenaga kerja serta iuran yang belum dapat diidentifkasi penyetornya. Saldo iuran belum rinci per 31 Desember 2013 sebesar Rp.134,16 miliar atau tumbuh 160,23% dibandingkan dengan tahun 2012 tetapi dalam periode tahun 2009 sampai dengan 2013 rata-rata pertumbuhan turun menjadi minus 10,60%.

Liabilitas Non JHT mengalami rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 18,65%.

Cadangan Teknis

Pada akhir tahun 2013 perusahan membukukan cadangan teknis sebesar Rp.11,48 triliun, dengan pertumbuhan dan komposisi cadangan teknis dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ 2012-2013 (%)	CAGR (%)
Cadangan Teknis JKK	3,805,180	4,629,083	5,646,981	6,648,657	8,277,826	24.50	21.45
Cadangan Teknis JKM	1,444,285	1,615,967	1,834,941	2,083,716	2,406,521	15.49	13.61
Cadangan Teknis JPK	93,179	109,691	136,247	181,404	322,649	77.86	36.41
Cadangan Teknis Program Khusus	47,106	46,752	62,547	108,064	77,218	(28.54)	13.15
Cadangan Katastropa	388,246	403,061	421,396	366,454	396,782	8.28	0.55
Total Liabilitas	**5,777,996**	**6,804,555**	**8,102,112**	**9,388,294**	**11,480,995**	**22.29**	**18.73**

Cadangan teknis perusahan pada akhir tahun 2013 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 18,73%. Kenaikan cadangan teknis berbanding lurus dengan kenaikan iuran masing-masing program, cadangan teknis yang mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah cadangan teknis program JPK sebesar 36,41%.

Cadangan teknis dihitung oleh aktuaria dengan tujuan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi karena jumlah pembayaran jaminan melebihi penerimaan iuran. Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2004 disebutkan bahwa cadangan teknis untuk pertanggungan selama satu tahun dihitung sebesar 40% dari iuran tahun berjalan, sedangkan untuk cadangan teknis JPK sebesar 10% dari iuran tahun berjalan dan tidak bersifat kumulatif. Cadangan teknis per 31 Desember 2013 dihitung oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera (KIS AKTUARIA) dalam

laporan Nomor: 2472/KIS/LA/01/2014 tanggal 15 Januari 2014 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Surat Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Nomor : S-289/NB.211/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pengesahan Kenaikan Cadangan Premi Tahun 2013 PT Jamsostek (Persero).

Liabilitas Lancar

Pada akhir tahun 2013 perusahan membukukan liabilitas lancar sebesar Rp.662,85 miliar, dengan pertumbuhan dan komposisi liabilitas lancar dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Iuran Karyawan	-	304	-	296	11	(96.28)	-
Liabilitas Usaha	8,111	8,211	8,753	8,002	7,299	(8.78)	(2.60)
Liabilitas Pajak	39,405	39,441	95,513	106,704	366,986	243.93	74.69
Beban Yang Masih Harus Dibayar	44,863	75,295	42,014	66,647	49,607	(25.57)	2.55
Pendapatan Diterima Dimuka	5,629	642	3,241	3,233	3,302	2.15	(12.48)
Liabilitas Yang Masih Harus Dibayar	111,741	137,726	172,011	248,245	136,770	(44.91)	5.18
Liabilitas Pembelian Aset	8,743	16,103	3,716	17,148	70,307	310.00	68.40
Jaminan Pihak Ketiga	16,987	19,782	23,003	25,343	28,569	12.73	13.88
Total Liabilitas	**235,479**	**297,504**	**348,251**	**475,618**	**662,852**	**39.37**	**29.53**

Saldo liabilitas lancar per 31 Desember 2013 tumbuh 39,37% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.475,62 miliar dan dalam rentang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 29,53%. Persentase rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi pada pos liabilitas pajak sebesar 74,69% dan liabilitas pembelian aset sebesar 68,40%.

Meningkatnya Liabilitas pajak mengalami pertumbuhan yang signifikan selain karena pungutan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang belum disetorkan ke kas negara, juga dikarenakan pada tahun tahun 2013 perusahaan melakukan pembelian tanah dan bangunan sehingga terdapat kewajiban pembayaran PPHTB dan Bea Balik Nama masing-masing sebesar Rp.127,23 miliar dan Rp. 39,24 miliar. Sedangkan meningkatnya liabilitas pembelian aset pada akhir tahun 2013 dikarenakan sampai dengan akhir periode pelaporan terdapat vendor yang belum melengkapi dokumen untuk pencairan anggaran belanja modal sehingga perusahaan belum dapat melakukan pembayaran atau pelunasan pembelian belanja modal tersebut.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada posisi laporan keuangan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 483,13 miliar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,99%. Dasar valuasi imbalan pasca kerja adalah UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PSAK 24 (revisi 2004) dan perjanjian kerja bersama (PKB). Valuasi aktuaria atas imbalan pasca kerja menggunakan meode *Projected Unit Credit* (PUC) dan berbagai asumsi aktuaria.

Perhitungan Manfaat Pensiun tahun 2013 dilakukan oleh aktuaris internal Perusahaan berdasarkan Laporan Aktuaris tanggal 17 Februari 2013 oleh Aktuaris Pramudya Iriawan B, FSAI, AAAI-J No. Reg. PAI 2011101391 dan tahun 2012 dilakukan oleh aktuaris eksternal berdasarkan Laporan Aktuaris oleh Aktuaris Drs. H. Amran Nangasan MSc, FSAI, AAAI-J No. Reg. PAI 2001001. Sedangkan untuk Entitas Anak, dilakukan oleh PT Mitra Aktuaria Solusi dalam laporannya No. 862R/PSAK-BAK/II/2013. Beban imbalan pasca kerja tahun 2013 untuk perusahan dan anak perusahaan masing-masing sebesar Rp.219,61 miliar dan Rp.91,73 juta.

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ 2012-2013 (%)	CAGR (%)
Perusahaan	224,608	264,080	307,070	343,651	481,981	40.25	21.03
Anak Perusahaan	861	1,037	1,056	1,142	1,144	0.22	7.37
Total Liabilitas	**225,469**	**265,117**	**308,126**	**344,793**	**483,125**	**40.12**	**20.99**

Liabilitas Lain

Rata-rata pertumbuhan aset lain selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar 77,00%. Saldo liabilitas lain per 31 Desember 2013 sebesar Rp.3,63 miliar, kenaikan liabilitas tersebut dikarenakan adanya pinjaman modal kerja anak perusahan ke bank Mandiri sebesar Rp.2,5 miliar.

Liabilitas Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

Pada akhir tahun 2013 perusahan membukukan Liabilitas DPKP sebesar Rp.1,06trilyun, dengan pertumbuhan dan komposisi liabilitas DPKP dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
DPKP Untuk Operasional	459,348	453,991	452,272	254,082	392,483	54.47	(3.86)
DPKP Telah Disalurkan	206,461	283,570	352,136	498,546	666,480	33.68	34.04
Angsuran Belum Jelas Penyetor	14,754	1,070	702	615	1,153	87.29	(47.13)
Penyesuaian Saldo Pinjaman	-	14,754	4,708	4,708	-	-	-
Total Liabilitas DPKP	**680,563**	**753,385**	**809,817**	**757,951**	**1,060,116**	**39.87**	**11.72**

Rata-rata pertumbuhan liabilitas DPKP dalam periode 5 (lima) tahun sebesar 11,72%, dan saldonya naik sebesar Rp.379,55 dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2009. Bila dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu, kenaikan terbesar secara nominal terjadi pada DPKP telah disalurkan naik sebesar Rp.167,94 miliar dan DPKP untuk operasional sebesar Rp.138,40 miliar. Kenaikan DPKP untuk operasinal antara lain karena adanya penambahan distribusi laba sebesar Rp.350 miliar, sedangkan kenaikan DPKP telah disalurkan antara lain disebabkan adanya penyaluran bergulir sebesar Rp.215,34 miliar.

Ekuitas

Pada akhir periode 2013 perusahan mencatat saldo ekuitas sebesar Rp.6,35 triliun dengan pertumbuhan dan komposisi ekuitas dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ 2012-2013 (%)	CAGR (%)
Modal Disertor	600,000	600,000	1,000,000	1,500,000	4,000,000	166.67	60.69
Cadangan Umum	731,979	1,006,958	804,808	1,747,995	572,484	(67.25)	(5.96)
Cadangan Tujuan	336,711	380,711	483,211	588,211	863,211	46.75	26.54
Selisih Penilaian Efek (SPE) Non JHT	1,091,762	1,943,881	576,773	594,180	(1,373,459)	(331.15)	-
Saldo Laba	1,381,451	1,458,905	1,960,844	2,121,461	2,287,643	7.83	13.44
Total Ekuitas	**4,141,903**	**5,390,455**	**4,825,636**	**6,551,848**	**6,349,879**	**(3.08)**	**11.27**

Jumlah ekuitas pada akhir tahun 2013 turun 3,08% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp6,55 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan harga pasar efek investasi sebesar Rp.1,97 triliun yang bersifat temporer dan penyesuaian aset pajak tangguhan sebesar Rp.1,37 miliar ke cadangan umum.

Rata-rata pertumbuhan ekuitas selama 5 (lima) tahun sebesar 11,27% yang didorong oleh adanya kenaikan pada pos modal disetor, cadangan tujuan dan saldo laba. Pada tahun 2013 modal disetor mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp.2,50 triliun dari posisi akhir tahun 2012 yang bersumber dari kapitalisasi cadangan umum, Berdasarkan Akta No. 3 tanggal Nopember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dari Notaris Nanda Fauzian, SH, M.Kn, tentang perubahan modal dasar menjadi 8.000.000.000.000 dan modal disetor menjadi 4.000.000.000.000. Perubahan anggaran dasar telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia denga surat No. AHU-60955.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013. Kenaikan cadangan tujuan pada akhir tahun 2013 adalah karena adanya distribusi laba tahun buku 2012 sebesar Rp. 275,00 miliar. Selisih penilaian efek Non JHT bersaldo minus Rp. 1,37 triliun adalah dampak adanya gejolak pasar modal nasional pada tahun 2013.

Rata-rata pertumbuhan laba perusahaan selama periode 5 (lima) tahun terakhir sebesar

13,44%.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Dan Beban

Mulai tahun 2011 sesuai PSAK 23 (revisi 2010) tentang Pendapatan, bahwa hasil investasi JHT tidak memenuhi kriteria sebagai pendapatan sehingga dalam penyajiannya dicatat sebagai liabilitas dalam pos neraca, sehingga pendapatan investasi pada perhitungan laba rugi adalah pendapatan investasi Non JHT.

Pada akhir tahun 2013 perusahan berhasil membukukan laba sebesar Rp. 2,29 triliun, dengan pertumbuhan laba dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Pendapatan Iuran	2,660,272	3,079,961	3,823,377	4,650,483	6,918,669	48.77	26.99
Beban Jaminan	(1,295,305)	(1,474,301)	(1,739,912)	(2,099,498)	(3,031,641)	44.40	23.69
Beban Cadangan Teknis	(811,746)	(1,026,558)	(1,297,557)	(1,341,124)	(2,092,589)	56.03	26.71
Pendapatan Operasional Anak Usaha	10,959	14,244	27,690	45,781	34,875	(23.82)	33.56
Pendapatan Bersih Investasi	8,476,736	10,794,672	1,627,655	1,702,863	2,036,253	19.58	(29.99)
Pendapatan Pengelolaan Investasi JHT	-	-	1,323,443	1,502,403	1,678,226	11.70	-
Beban Usaha	(1,217,952)	(1,299,390)	(1,595,703)	(2,087,516)	(2,758,440)	32.14	22.68
Pendapatan bersih Lain-Lain	4,653	15,861	19,954	120,943	23,145	(80.86)	49.34
Bagian Peserta Atas Hasil Investasi JHT	(6,335,547)	(8,368,381)	-	-	-	-	(100.00)
Pajak Penghasilan Badan & Tangguhan	(110,619)	(203,816)	(168,856)	(312,394)	(520,854)	66.73	47.31
Laba	**1,381,451**	**1,532,291**	**2,020,091**	**2,181,942**	**2,287,643**	**4.84**	**13.44**

Perolehan laba pada akhir tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 4,84% dibandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan laba perusahaan selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar 13,44% hal ini menunjukan peningkatan kinerja keuangan perusahan dari tahun ke tahun.

Pendapatan Iuran

Pada akhir tahun 2013 perusahan berhasil membukukan pendapatan iuran sebesar Rp. 26,92 triliun, dengan pertumbuhan pendapatan iuran dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ 2012-2013 (%)	CAGR (%)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1,093,033	1,263,934	1,561,905	1,731,532	2,365,021	36.59	21.28
Iuran Jaminan Kematian	512,352	592,362	729,423	812,133	1,095,463	34.89	20.92
Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	926,773	1,089,369	1,344,908	1,786,809	3,188,236	78.43	36.19
Iuran Jasa Konstruksi	117,766	116,881	156,366	270,159	193,044	(28.54)	13.15
Iuran Jasa Tenaga Kerja Mandiri	10,349	17,416	30,775	49,851	76,904	54.27	65.11
Total Iuran Non JHT	**2,660,272**	**3,079,961**	**3,823,377**	**4,650,483**	**6,918,669**	**48.77**	**26.99**
Iuran Jaminan Hari Tua	9,281,192	10,835,644	12,965,477	15,718,946	20,005,411	27.27	21.17
Total Iuran Non JHT & JHT	**11,941,464**	**13,915,605**	**16,788,854**	**20,369,430**	**26,924,079**	**32.18**	**22.54**

Pendapatan iuran yang masuk dalam perhitungan laba rugi adalah pendapatan iuran Non JHT sedangkan pendapatan iuran JHT sebagai penambah liabitas kepada peserta dalam laporan posisi keuangan. Pada akhir periode 2013 perusahan berhasil menghimpun pendapatan iuran dari peserta untuk program Non JHT dan JHT masing-masing sebesar Rp.6,92 triliun dan Rp. 20,01 triliun, rata-rata pertumbuhan pendapatan iuran selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 22,54%.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan iuran Non JHT sebesar 26,99% lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan pendapatan iuran JHT sebesar 21,17%. Pertumbuhan pendapatan iuran Non JHT yang tinggi disebabkan adanya kenaikan yang signifikan pada pendapatan iuran program JPK yang mengalami pertumbuhan sebesar 36,19% selama 5 (lima) tahun terakhir. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu pendatan iuran program JPK mengalami kenaikan 78,43% atau sebesar 1,40 triliun.

Beban Jaminan

Pada akhir tahun 2013 perusahan membukukan beban jaminan sebesar Rp. 12,99 triliun, dengan pertumbuhan beban jaminan dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	343,436	376,827	499,487	506,807	563,443	11.18	13.18
Beban Jaminan Kematian	255,805	247,078	274,999	357,374	406,844	13.84	12.30
Beban Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	665,580	813,655	931,552	1,168,334	1,957,532	67.55	30.96
Beban Jaminan Jasa Konstruksi	21,405	24,767	15,596	31,189	40,362	29.41	17.18
Beban Jaminan Jasa Tenaga Kerja Mandiri	9,080	11,974	18,279	35,794	63,460	77.29	62.60
Total Beban Jaminan Non JHT	**1,295,305**	**1,474,301**	**1,739,912**	**2,099,498**	**3,031,641**	**44.40**	**23.69**
Beban Jaminan Hari Tua	5,789,841	5,878,393	6,877,718	7,966,740	9,968,268	25.12	**14.55**
Total Beban Jaminan Non JHT & JHT	**7,085,146**	**7,352,694**	**8,617,630**	**10,066,238**	**12,999,909**	**29.14**	**16.39**

Beban jaminan hari tua tidak masuk dalam perhitungan laba rugi tetapi sebagai faktor pengurang liabilitas kepada peserta di pos laporan posisi keuangan. Total beban jaminan yang dibayarkan perusahan kepada peserta untuk tahun2013 program Non JHT dan JHT masing-masing sebesar Rp.3,03 triliun dan 9,97 triliun dengan rata-rata pertumbuhan total beban jaminan Non JHTdan JHT selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar 16,39%

Beban jaminan non JHT selama periode 2009 sampai dengan 2013 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 23,69% sedangkan rata-rata pertumbuhan klaim JHT lebih rendah sebesar 14,55%. Pos yang mengalami rata-rata pertumbuhan yang tinggi adalah jaminan jasa tenaga kerja mandiri sebesar 62,60% dan jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 30,96%.

Beban Cadangan Teknis

Pada akhir tahun 2013 perusahan membukukan beban cadangan teknis sebesar Rp. 2,09 triliun, dengan pertumbuhan beban cadangan teknis dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ 2012-2013 (%)	CAGR (%)
Beban Cadangan Teknis JKK	682,804	830,260	1,025,757	1,001,676	1,646,480	64.37	24.61
Beban Cadangan Teknis JKM	111,062	174,655	222,638	248,774	335,822	34.99	31.87
Beban Cadangan Teknis JPK	17,987	21,997	33,369	45,157	141,133	212.54	67.37
Beban Cadangan Jasa Konstruksi	(107)	(354)	15,794	45,517	(30,846)	(167.77)	311.93
Total	**811,746**	**1,026,558**	**1,297,557**	**1,341,124**	**2,092,589**	**56.03**	**26.71**

Beban cadangan teknis per 31 Desember 2013 naik sebesar 56,03% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Secara nominal yang mengalami kenaikan tertinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu adalah beban cadang teknis JKK sebesar Rp. 644,80 miliar. Kenaikan atau penurunan beban cadangan teknis berbanding lurus dengan kenaikan atau penurunan pendapatan iuran Non JHT. Beban cadangan teknis jasa konstruksi per 31 Desember 2013 minus Rp.30,85 miliar, hal ini terjadi karena beban cadang teknis jasa konstruksi tahun 2013 lebih kecil dibandingkan dengan beban cadang teknis tahun 2012 sebagai dampak pendapatan iuran jasa konstruksi tahun 2013 lebih rendah dibanding tahun 2012.

Pendapatan Operasional Anak Perusahaan

Pendapatan operasional anak perusahaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp.34,88 miliar turun 23,82% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penurunan ini disebabkan pada tahun 2013 anak perusahan kehilang pendapatan dari sektor jasa *outsourching* sebagai dampak tidak diperkenankannya jasa *outsourching* petugas administrasi. Apabila dilihat rata-rata pertumbuhan pendapatan operasional selama 5 (lima) tahun sebesar 33,56% mengindikasikan pencapaian yang positif. Diversifikasi usaha anak perusahaan yang tidak hanya fokus pada jasa *outsourching* tetapi ke bidang manajemen *building*, pengelolaan parkir dan jasa pembersihan pesawat udara mulai menghasilkan pendapatan.

Pendapatan Bersih Investasi

Mulai tahun 2011 pendapatan investasi yang disajikan dalam laporan rugi laba adalah pendapatan investasi program Non JHT sebagai dampak penerapan PSAK 23 (revisi 2010), sedangkan pendapatan investasi program JHT disajikan dalam laporan posisi keuangan pos liabilitas kepada peserta.

Pendapatan Investasi Program JHT

Pada akhir tahun 2013 perusahan berhasil membukukan pendapatan bersih investasi program JHT sebesar Rp.12,38 triliun, dengan pertumbuhan pendapatan bersih investasi program JHT dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

HASIL INVESTASI BERSIH PROGRAM JHT

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Deposito (termasuk Bank Investasi & DOC)	2,542,625	2,455,168	2,507,226	2,483,851	2,501,443	0.71	(0.41)
Saham	849,576	2,464,888	2,259,080	2,926,080	3,264,449	11.56	40.01
Reksadana	107,255	452,123	700,534	816,227	1,009,874	23.72	75.17
Obligasi	3,795,138	4,126,022	4,578,176	4,964,757	5,562,336	12.04	10.03
Penyertaan	-	-	-	-	-	-	-
Properti	9,888	17,639	313,517	30,278	44,363	46.52	45.54
Total	**7,304,482**	**9,515,840**	**10,358,533**	**11,221,193**	**12,382,464**	**10.35**	**14.10**

Pendapatan bersih investasi program JHT tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 10,35% dibandingkan dengan pendapatan bersih investasi tahun 2012. Secara prosentase kenaikan tertinggi pada instrumen properti yang mengalami kenaikan sebesar 46,52% hal ini dipengaruhi dengan membaiknya tingkat hunian gedung Menara Jamsostek, sedangnya yang secara nominal mengalami kenaikan tertinggi adalah Obligasi yang berhasil naik sebesar Rp.597,58 miliar. Rata-rata pertumbuhan hasil investasi bersih selama tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah sebesar 14,10%.

Pendapatan Investasi Program Non JHT

Pada akhir tahun 2013 perusahan berhasil membukukan pendapatan bersih investasi program Non JHT sebesar Rp.2,04 triliun, dengan pertumbuhan pendapatan bersih investasi program Non JHT dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

HASIL INVESTASI BERSIH PROGRAM NON JHT

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Deposito (termasuk Bank Investasi & DOC)	237,874	215,990	185,976	192,489	170,001	(11.68)	(8.06)
Saham	726,891	837,592	1,127,898	1,197,775	1,434,539	19.77	18.53
Reksadana	7,756	28,749	93,429	90,609	135,344	49.37	104.39
Obligasi	196,777	187,979	216,685	222,389	297,136	33.61	10.85
Penyertaan	3,914	812	4,644	544	661	21.60	(35.89)
Properti	(957)	(1,197)	(1,024)	(943)	(1,428)	51.42	-
Total	**1,172,255**	**1,269,925**	**1,627,608**	**1,702,863**	**2,036,253**	**19.58**	**14.80**

Pendapatan bersih investasi program Non JHT mengalami pertumbuhan sebesar 19,58% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau sebesar Rp.333,39 miliar, pertumbuhan tersebut berada diatas rata-rata pertumbuhan selama periode 5 (lima) tahun sebesar 14,80%. Instrumen properti pada akhir periode 2013 belum memberikan hasil yang positif dikarena beban investasi properti lebih besar dari pada pendapatan investasi properti. Investasi properti Non JHT lebih banyak pada aset investasi properti tanah sehingga belum menghasilkan pendapatan investasi.

Pendapatan Pengelolaan Investasi JHT

Pendapatan Pengelolaan Investasi JHT per 31 Desember 2013 sebesar Rp.1,68 trilun sedangan untuk periode yang sama tahun lalu sebesar 1,50 triliun. Berdasarkan PMK No. 48/PMK.010/2011 tentang Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua, ditetapkan bahwa persentase pengelolaan JHT tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 1,35% dan 1,39% dari rata-rata dana investasi JHT. Rata-rata pertumbuhan prosentase pendapatan pengelolaan investasi JHT dari tahun 2009 sampai dengan 2013 tidak signifikan.

Beban Usaha
Beban usaha per 31 Desember 2013 sebesar Rp.2,76 triliun naik 32,14% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Rata-rata pertumbuhan beban usaha dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar 31,60%. Kenaikan beban usaha pada tahun 2013 adalah karena kegiatan operasional perusahaan dalam rangka transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Proporsi beban usaha personil dan no personil dalam struktur beban usaha adalah 40 : 60 persen.

Pendapatan Bersih Lain-Lain
Per 31 Desember 2013 perusahan mencatat pendapatan bersih lain-lain sebesar Rp.23,15 miliar. Rata-rata pertumbuhan pendapatan bersih lain-lain selama periode tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah sebesar 49,34%. Pos pendapatan bersih lain-lain adalah untuk mencatat transaksi pendapatan dan beban yang bukan merupakan kegiatan utama perusahan seperti pendapatan jasa giro, pendapatan hasil lelang, pendapatan bunga DOC non investasi dan lain-lain.

Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Tangguhan
Beban pajak penghasilan badan dan pajak tangguhan tahun 2013 yang dihitung perusahaan adalah sebesar Rp.520,85 miliar naik 66,73% dibandingkan pajak penghasilan badan dan tangguhan tahun 2012. Beban pajak perusahan dari tahun ketahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan operasionbal perusahan, peningkatan pajak tersebut tercemin dalam rata-rata pertumbuhan selama 5 (lima) tahun sebesar 47,31%.

Analisis Pertumbuhan Arus Kas

Rata-rata pertumbuhan arus kas aktivitas operasi dan aktivitas investasi selama periode 5 (lima) tahun terakhir masing-masing sebesar

19,93% dan 6,91%.

Laporan Arus Kas Perusahaan merupakan informasi perubahan kas dan setara kas, yang disusun dengan menggunakan metode langsung, ditujukan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas dan setara kas serta memenuhi kebutuhan dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Posisi saldo kas dan setara Perusahaan pada akhir tahun 2013 adalah sebesar Rp.1,14 triliun, dengan pertumbuhandari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	486,526	56,703	362,415	215,871	1,006,346	366.18	19.93
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(145,210)	(84,714)	(100,990)	(133,529)	(189,678)	42.05	*1006.91
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	(148,535)	(92,426)	(193,644)	(254,599)	(245,367)	(3.63)	13.37
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas & Setara Kas	192,781	(120,437)	67,782	(172,257)	571,302	(431.66)	31.20
Saldo Kas & Setara Kas Awal Periode	601,887	794,668	674,231	742,012	569,755	(23.21)	(1.36)
Saldo Kas & Setara Kas Akhir Periode	794,668	674,231	742,012	569,755	1,141,057	100.27	9.47

Posisi kas ini meningkat 100,27% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2012 yang hanya sebesar Rp. 569,75 miliar atau jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan dari tahun 2009 sampai dengan 2013 yang hanya sebesar 9,47%. Peningkatan tersebut terutama karena peningkatan penerimaan dari aktivitas operasi.

Arus Kas dari Kegiatan Operasi
Arus kas Perusahaan dari kegiatan operasi meningkat 366,18% atau Rp.790,47 miliar dari akhir tahun 2012 atau jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan dari tahun 2009 sampai dengan 2013 yang hanya sebesar 19,93%. Kenaikan yang cukup besar ini berasal dari peningkatan penerimaan sebesar Rp.219,18 triliun. Kenaikan hasil investasi JHT dan penerimaan iuran merupakan penyumbang terbesar dari peningkatan penerimaan kas, dengan kenaikan masing-masing sebesar Rp.12,73 triliun dan Rp.26,62 triliun.

Sejalan dengan peningkatan penerimaan, pengeluaran untuk kegiatan operasional pun mengalami kanaikan sebesar Rp.218,17 triliun yang didominasi oleh pembayaran jaminan dan penempatan dana investasi. Tetapi kenaikan penerimaan lebih besar dibanding kenaikan pengeluaran untuk kegiatan operasi.

Arus Kas dari Kegiatan Investasi
Arus kas Perusahaan yang digunakan untuk aktivitas investasi menurun 42% atau sebesar Rp.56,14 miliar atau jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan dari tahun 2009 sampai dengan 2013 yang hanya sebesar 6,91%. Arus kas pada aktivitas ini digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp.189,80 miliar atau meningkat sebesar Rp.56,28 miliar dibanding tahun 2012. Kenaikan perolehan aset tetap ini, merupakan pemenuhan infrastruktur dalam rangka transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan
Arus kas Perusahaan yang diginakan untuk aktivitas pendanaan menurun 4% atau sebesar Rp.9,23 miliar disebabkan tidak dialokasikan lagi distribusi laba Perusahaan untuk kegiatan Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Analisis Pertumbuhan *Ratio* Likuiditas, Solvabilitas dan Kolektibilitas

396% likuiditas
295,41% solvabilitas
96,95% kolektibiltas

Tahun 2013, posisi tingkat likuiditas sebesar 396%, tingkat solvabilitas sebesar 295,41% dan tingkat kolektibiltas sebesar 96,95%.

NO	RASIO	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	Δ2012-2013 (%)	CAGR (%)
1	Likuiditas	675.65	443.98	690.27	350.51	396.23	13.04	(12.49)
2	Solvabilitas	297.26	355.40	215.99	254.04	295.41	16.28	(0.16)
3	Kolektibilitas	87.88	76.76	96.38	97.26	96.95	(0.32)	2.49

Tingkat Likuiditas
Rasio likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi). Tahun 2013 rasio likuiditas Perusahaan mencapai 396% naik 46% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan Perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya sampai dengan hampir empat kali lipat dari kewajibannya.

Tingkat Solvabilitas
Kemampuan PT Jamsostek (Persero) dalam membayar hutang jangka panjang tercermin dalam perhitungan solvabilitas dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2011. Tingkat solvabilitas perusahaan tahun 2013 sebesar 295,41% naik 16,28% dibandingkan tahun 2012 sebesar 254,04%. Meskipun diakhir tahun 2013 harga pasar efek melemah, nilai ini masih jauh di atas target solvabilitas yang ditetapkan yaitu sebesar 159,72%. Ini berarti Perusahaan mampu memenuhi semua kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

Sedangkan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) dibagi menjadi dua yaitu RKI JHT dan RKI Non JHT. Tingkat RKI JHT tahun 2013 sebesar 100,34% sedangkan RKI Non JHT sebesar 153,03%.

Dari perhitungan Solvabilitas dan RKI ini menggambarkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Tingkat Kolektibilitas
Tingkat ketertagihan piutang iuran PT Jamsostek (Persero) tahun 2013 sebesar 96,95% naik 0,69 % dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 96,26%. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini terdapat beberapa perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak atas piutang iuran Jamsostek. Perubahan kebijakan akuntansi ini adalah bagian dari penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2011) yang merupakan penyempurnaan atas kebijakan sebelumnya.

ANALISIS CAPAIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Capaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Jamsostek (Persero) Tahun 2013 dan penyajian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014.

Analisis Capaian Posisi Keuangan

Laporan Keuangan

Total aset pada akhir tahun 2013 ditutup pada posisi sebesar Rp.153,73 triliun atau 97,37% dari target yang sudah ditetapkan dalam RKAP 2013 sebesar Rp157,87 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN	RKAT 2014				
				JHT	JKK	JKM	BPJS	TOTAL
Aset Investasi	149.102.728	149.210.360	100,07	161.602.692	11.704.539	3.683.149	8.053.561	185.043.941
Aset Lancar	2.679.183	2.959.774	110,47	1.851.954	947.085	43.169	1.054.447	3.896.655
Pinjaman Diberikan dan SKP Program DPKP	616.420	666.480	108,12				1.022.941	1.022.941
Aset Tetap Neto	1.084.215	582.425	53,72				891.633	891.633
Aset Lain	4.395.786	314.089	7,15	488			372.626	373.115
Total Aset	**157.878.333**	**153.733.128**	**97,37**	**163.455.134**	**12.651.624**	**3.726.318**	**11.395.208**	**191.228.284**
Liabilitas Kepada Peserta	147.264.274	145.173.527	98,58	3.168	1.879.899	840.465		2.723.531
Liabilitas Lancar	714.965	662.852	92,71	83.119	1.366	433	1.070.775	1.155.693
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	501.048	483.125	96,42				500.045	500.045
Liabilitas Lain	78.466	3.626	4,62	11.238.635	67.602	21.973	185.585	11.513.795
Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta	1.031.031	1.060.116	102,82				1.285.516	1.285.516
Total Liabilitas	**149.589.784**	**147.383.246**	**98,52**	**11.324.923**	**1.948.867**	**862.870**	**3.041.920**	**17.178.579**
Ekuitas	8.288.548	6.349.882	76,61	152.130.212	10.702.757	2.863.449	8.353.288	174.049.705
Total Liabilitas dan Ekuitas	**157.878.333**	**153.733.128**	**97,37**	**163.455.134**	**12.651.624**	**3.726.318**	**11.395.208**	**191.228.284**

Dari rincian pos-pos pada laporan posisi keuangan diatas terlihat bahwa target aset yang tidak tercapai adalah terletak pada aset tetap dan aset lain yang hanya mencapai masing-masing 53% dan 7,15%. Sedangkan untuk aset lancar, aset investasi dan DPKP diatas target yang sudah ditetapkan.

Sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2011 dan PP nomor 99 tahun 2013, Perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangan secara terpisah. Sehingga tahun 2014 Perusahaan menetapkan target laporan keuangaan berdasarkan masing-masing program, yaitu Program JHT Rp. 163,46 triliun, Program JKK Rp. 12,65 triliun program JKM Rp. 3,73 triliun dan BPJS Rp. 11,40 triliun.

Aset Investasi

Total aset investasi pada akhir tahun 2013 ditutup pada posisi sebesar Rp.149,21 triliun atau 100,07% dari target yang sudah ditetapkan dalam RKAP 2013 sebesar Rp149,10 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN	RKAT 2014				
				JHT	JKK	JKM	BPJS	TOTAL
Deposito	41.056.590	40.189.782	97,89	41.880.895	6.979.471	2.331.562	1.842.996	53.034.924
Saham	30.702.202	31.811.390	103,61	29.665.811	1.762.813	457.917	3.458.268	35.344.809
Reksadana	11.981.642	11.767.089	98,21	12.971.187	665.311	198.350	492.856	14.327.704
Obligasi (Termasuk Sukuk & KIK EBA)	62.695.650	65.053.259	103,76	73.761.094	2.296.944	695.320	1.753.218	78.506.576
Penyertaan	1.920.329	30.814	1,60	2.200.000			110.117	2.310.117
Properti	746.315	358.026	47,97	1.123.705			396.106	1.519.811
Total	**149.102.728**	**149.210.360**	**100,07**	**161.602.692**	**11.704.539**	**3.683.149**	**8.053.561**	**185.043.941**

Dari rincian instrumen investasi diatas terlihat bahwa target aset investasi yang tidak tercapai adalah terletak pada instrumen deposito, reksadana, penyertaan dan properti yang pencapaiannya masing-masing 97,89%, 98,21%, 1,60% dan 47,97%. Sedangkan untuk saham dan obligasi diatas target yang sudah ditetapkan.

Mayoritas dana investasi Jamsostek ditempatkan dalam instrumen berpendapatan tetap berupa deposito dan Obligasi yaitu mencapai 70,53 % dari total aset investasi, dikarenakan karakteristik hasil yang lebih likuid dan pasti, risiko yang relatif aman dan disesuaikan dengan *maturity profile* liabilitas yang umumnya bersifat jangka menengah hingga panjang yaitu Jaminan Hari Tua (JHT).
Secara per segmen investasi Jamsostek terdiri dari investasi JHT sebesar Rp131,18 triliun dan Non JHT sebesar Rp18,04 triliun. Apabila dikaji secara per segmen maka program JHT memiliki bauran portofolio yang lebih moderat dibandingkan program Non JHT. Hal ini tercermin dari '3 besar' instrumen program JHT terdiri dari obligasi, deposito dan saham, sedangkanprogram Non JHT didominasi oleh saham baru diikuti obligasi dan deposito.

Rincian jumlah dana investasi per program sampai dengan 31 Desember 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut :

JENIS INVESTASI	JHT			NON JHT		
	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN
Deposito	39.380,53	36.022,68	91,47	1.676,06	4.167,11	248,62
Saham	21.733,46	23.447,29	107,89	8.968,74	8.364,11	93,26
Reksadana	10.728,64	10.599,35	98,79	1.253,00	1.167,74	93,20
Obligasi	58.229,68	60.829,79	104,47	4.465,97	4.223,47	94,57
Penyertaan	1.300,00	-	-	645,59	30,81	4,77
Properti	665,63	281,70	42,32	80,69	76,33	94,60
JUMLAH	**132.037,94**	**131.180,79**	**99,35**	**17.090,05**	**18.029,57**	**105,50**

Sumber pertumbuhan aset investasi ditentukan oleh 3 (tiga) faktor yaitu faktor penambahan dana segar (*fresh money*) yang bersumber dari penerimaan iuran dan hasil investasi, faktor pasar yaitu harga pasar efek investasi berupa saham, obligasi dan reksadana dan terakhir faktor penyesuaian akuntansi berupa penurunan nilai, amortisasi, eliminasi dan penyusutan.

Dari ketiga faktor pertumbuhan tersebut pada tahun 2013 hanya faktor pertama yaitu penambahan dana segar yang berkontribusi dominan terhadap pertumbuhan dana.

Nilai wajar efek investasi dihitung berdasarkan hirarki nilai wajar sebagaimana ditetapkan dalam PSAK No. 55. Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP/44/022011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Penetapan Nilai Wajar Investasi Saham dan Reksadana dan Keputusan Direksi No. KEP/332/122010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Nilai Wajar Investasi Obligasi, diatur sebagai berikut:

1. Saham
   Terdapat dua kelompok saham yaitu saham yang memiliki pasar aktif dan saham yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk saham yang memiliki pasar aktif, nilai wajar ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan dari penutupan hari bursa. Sedangkan untuk saham yang tidak memiliki pasar aktif maka menggunakan harga penutupan dari hari bursa terakhir yang tersedia.

2. Reksadana
   Untuk reksadana menggunakan nilai aset bersih yang dipublikasikan oleh manajer investasi.

3. Obligasi
   Terdapat dua kelompok obligasi yaitu obligasi yang memiliki pasar aktif dan obligasi yang tidakmemiliki pasar aktif. Untuk obligasi yang memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan (*bid price*) dari transaksi terakhir, atau apabila tidak tersedia maka menggunakan harga penutupan (*closing price*).

Sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2011 dan PP nomor 99 tahun 2013, Perusahaan dilarang melakukan subsidi anatr program. Sehingga tahun 2014 Perusahaan menetapkan target dana investasi berdasarkan masing-masing program, yaitu Program JHT Rp. 161,60 triliun, Program JKK Rp. 11,70 triliun program JKM Rp. 3,68 triliun dan BPJS Rp. 8,05 triliun.

Aset Lancar
Total aset lancar pada akhir tahun 2013 ditutup pada posisi sebesar Rp.2,95 triliun atau 110,47% dari target yang sudah ditetapkan dalam RKAP 2013 sebesar Rp2,67 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN
Kas dan Setara Kas	269.470	1.141.057	423,44
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1.450.159	1.559.187	107,52
Piutang Pendapatan Jatuh Tempo	399	4.639	1.163,19
Piutang Investasi	578.186	107.207	18,54
Uang Muka Kerja Pegawai	6.855	11.756	171,50
Uang Muka Pajak	301.704	2.029	0,67
Beban Usaha Dibayar Dimuka	29.045	23.486	80,86
Piutang Iuran	29.767	101.950	342,49
Piutang Usaha	7.549	2.001	26,51
Perlengakapan Alat Tulis Kantor	6.006	6.459	107,54
Aset Dimiliki Untuk Dijual	43	2	5,54
Total Aset Lancar	**2.679.183**	**2.959.774**	**110,47**

Dari rincian pos-pos aset lancar diatas terlihat bahwa target yang tidak tercapai adalah terletak pada pos piutang investasi, uang muka pajak, beban usaha dibayar dimuka, piutang usaha dan aset dimiliki untuk dijual yang pencapaiannya masing-masing 18,54%, 0,67%, 80,86%, 26,51% dan 5,54%. Sedangkan untuk kas setara kas, pendapatan yang masih harus diterima piutang jatuh tempo, uang muka kerja pegawai piutang iuran dan perlengkapan alat tulis kantor diatas target yang sudah ditetapkan.

Tahun 2014 perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi terhadap penyajian laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2011 dan PP nomor 99 tahun 2013 yang mewajibkan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan perprogram. Sehingga tahun 2014 Perusahaan menetapkan target aset lain sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	RKAT 2014				
	JHT	JKK	JKM	BPJS	TOTAL
Kas Setara kas	327.594	879.143	24.992	332.717	1.564.446
Piutang Operasional				163.593	163.593
Piutang Investasi	19.257	16.912	5.406	10.745	52.320
Piutang Hasil Investasi	1.505.103	29.969	9.054	27.129	1.571.256
Uang Muka				19.929	19.929
Pajak dibayar dimuka				334.618	334.618
Beban Usaha Dibayar Dimuka				36.205	36.205
Piutang Iuran		21.061	3.717		24.777
Piutang usaha				11.755	11.755
Piutang Lain				108.877	108.877
Perlengakapan Alat Tulis Kantor				7.990	7.990
Aset Dimiliki Untuk Dijual				888	888
Total Aset Lancar	1.851.954	947.085	43.169	1.054.447	3.896.655

Aset Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

Total aset DPKP dalam bentuk pinjaman dan sarana kesejahteraan peserta pada akhir tahun 2013 ditutup pada posisi sebesar Rp. 666 miliar atau 108,12% dari target yang sudah ditetapkan dalam RKAP 2013sebesar Rp. 616,42 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN	RKAT 2014 BPJS
Pinjaman Diberikan Diberikan DPKP	460.983	492.099	106,75	598.490
Sarana Kesejahteraan Peserta DPKP	155.436	174.382	112,19	424.451
Total	**616.420**	**666.480**	**108,12**	**1.022.941**

Dari rincian aset DPKP diatas terlihat bahwa semua target pinjaman dan sarana kesejahteraan peserta yang sudah ditetapkan dapat terlampaui.

Tahun 2014 program DPKP berubah nama menjadi Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang berlaku hingga juli 2015. Sehingga di tahun 2014 perusahaan menargetkan Pinjaman diberikan kepada peserta dan Sarana Kesejahteraan peserta sebesar Rp. 1,02 triliun yang disajikan didalam laporan keuangan BPJS.

Aset Lain

Total aset lain pada akhir tahun 2013 ditutup pada posisi sebesar Rp.314,08 miliar atau 7,15% dari target yang sudah ditetapkan dalam RKAP 2013 sebesar Rp. 4,40 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN	RKAT 2014 BPJS
Aset Tidak Berwujud	130.912	11.950	9,13	201.827
Aset Pajak Tangguhan	1.329.733	271.830	20,44	125.341
Aset Lain	2.935.141	30.309	1,03	45.458
Total	**4.395.786**	**314.089**	**7,15**	**372.626**

Dari rincian aset lain diatas terlihat bahwa semua target tidak tercapai. Hal ini dikarenakan adanya penangguhan pembelian perangkat lunak dan reklas cadangan umum ke aset pajak tangguhan. Sedangkan tahun 2014 perusahaan menargetkan aset lain sebesar Rp. 372 miliar yang disajikan didalam laporan keuangan BPJS.

Liabilitas

Total liabilitas pada akhir tahun 2013 ditutup pada posisi sebesar Rp.147,38 triliun atau 98,52% dari target yang sudah ditetapkan dalam RKAP 2013 sebesar Rp149,58 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN	RKAT 2014				
				JHT	JKK	JKM	BPJS	TOTAL
Liabilitas Kepada Peserta	147.264.274	145.173.527	98,58	11.051.529	1.879.899	840.465		13.771.892
Liabilitas Lancar	714.965	662.852	92,71	83.119	1.366	433	1.070.775	1.155.693
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	501.048	483.125	96,42				500.045	500.045
Liabilitas Lain	78.466	3.626	4,62	190.275	67.602	21.973	185.585	465.434
Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta	1.031.031	1.060.116	102,82				1.285.516	1.285.516
Total Liabilitas	**149.589.784**	**147.383.246**	**98,52**	**11.324.923**	**1.948.867**	**862.870**	**3.041.920**	**17.178.579**

Dari rincian liabilitas diatas terlihat bahwa hanya liabilitas Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta yang mencapai target sebesar 102,82%, sedangkan untuk liabilitas yang lain tidak mencapai target. Tidak tercapainya target liabilitas tahun 2013 merupakan dampak atas kebijakan perusahaan yang memutuskan untuk meminimalisasi utang kepada peserta maupun pihak ketiga pada akhir periode. Kebijakan ini diambil perusahaan karena terkait transformasi ke BPJS Ketenagakerjaan.

Tahun 2014 perusahaan menargetkan total liabilitas sebesar Rp. 17,17 triliun yang disajikan kedalam masing-masing program, sesuai amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2011 dan PP nomor 99 tahun 2013 yang mewajibkan perusahaan menyajikan laporan secara terpisah.

Ekuitas

Total ekuitas pada akhir tahun 2013 ditutup pada posisi sebesar Rp.6,35 triliun atau 76,61% dari target yang sudah ditetapkan dalam RKAP 2013 sebesar Rp8,28 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN	RKAT 2014				
				JHT	JKK	JKM	BPJS	TOTAL
Modal Disertor/Aset Neto	1.500.000	4.000.000	266,67	152.130.212	10.702.757	2.863.449	7.230.754	172.927.171
Cadangan Umum	3.117.829	572.484	18,36					-
Cadangan Tujuan	692.185	863.211	124,71					-
Selisih Penilaian Efek (SPE) Non JHT	789.323	(1.373.459)	(174,00)				910.330	910.330
Saldo Laba	2.189.212	2.287.643	104,50				212.200	212.200
Total Ekuitas	**8.288.548**	**6.349.879**	**76,61**	**152.130.212**	**10.702.757**	**2.863.449**	**8.353.284**	**174.049.701**

Dari rincian ekuitas diatas terlihat bahwa hanya saldo laba yang mencapai target sebesar 104,50%, sedangkan untuk ekuitas yang lain tidak mencapai target. Tidak tercapainya target ekuitas tahun 2013 merupakan dampak atas kebijakan perusahaan yang memutuskan untuk melakukan reklasifikasi cadangan umum ke aset pajak tangguhan.

Tahun 2014 perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas ekuitas, dimana sebelumnya struktur ekuitas terdiri dari modal cadangan umum, cadangan tujuan, SPE dan saldo laba sedangkan terhitung mulai tanggal 1 januari 2014, sejalan dengan pemberlakukan UU 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan, struktur ekuitas dibagi berdasarkan program yaitu aset netto untuk program JHT, JKK dan JKM sedangkan modal, SPE dan perubahan penghasilan (beban) untuk BPJS.

Distribusi Laba

Sejak tahun 2007, dalam rangka menyelaraskan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemerintah selaku pemegang saham tunggal (100%) telah menerapkan kebijakan zero dividend yaitu meniadakan distribusi bagian laba kepada pemegang saham dan dialihkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Alokasi dividen dialihkan ke dana pengembangan JHT dan Non-JHT yang dimanfaatkan untuk pemberian insentif JHT dan manfaat tambahan Non-JHT kepada peserta.

Rincian distribusi laba perusahaan yang ditetapkan setiap tahun melalui keputusan RUPS tentang pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan, sebagai berikut:

URAIAN	2009		2010		2011		2012		2013	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Dana Pengembangan JHT	1.002	72		-	-	-	-	-	-	-
Dana Pengembangan Non JHT	-	-	1.072	70	391	19	-	-	-	-
DPKP	62	4	100	7	-	-	350	16	400	17
Kemitraan	28	2	31	2	40	2	-	-	-	-
Bina Lingkungan	21	2	31	2	40	2	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Tujuan	44	3	103	7	105	5	275	13	210	9
Cadangan Umum	226	16	196	13	1.443	71	1.557	71	1.678	73
	1.383	100	1.532	100	2.020	100	2.182	100	2.288	100

Pada tahun 2012 dan tahun 2013, distribusi laba lebih fokus pada penguatan ekuitas sebagai bagian dari persiapan PT Jamsostek bertranformasi menuju BPJS ketenagakerjaan sesuai undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hasil RUPS laporan keuangan tahun 2013 diputuskan alokasi sebesar Rp.1,68 triliun atau 73% dari total laba 2013 untuk penguatan ekuitas PT Jamsostek (Persero) berupa cadangan umum dan sebesar Rp.210 miliar untuk cadangan tujuan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 400 miliar dialokasikan ke DPKP untuk pembangunan Rumah Sakit Pekerja.

Analisis Capaian Pendapatan dan Beban

Pada tahun 2013 Perusahaan telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp. 2,29 triliun atau 104,84% dari target yang sudah ditetapkan dalam RKAP 2013sebesar Rp. 2,19 triliun. Pertumbuhan laba Perusahaan dipicu oleh peningkatan penerimaan iuran dan hasil investasi.

Penyajian pendapatan dan beban pada laporan tahun 2014 mengalami perbedaan dari tahun 2013. Hal ini dilakukan sesuai dengan perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan mulai 1 januari 2014. Pada tahun 2014 laporan pendapatan dan beban disajikan sesuai rujukan pedoman akuntansi yang diterapkan pada program masing-masing.

Berikut perbandingan realisasi dan anggaran pendapatan dan beban tahun 2013 dan target tahun 2014 :

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN	RKAT 2014				
				JHT	JKK	JKM	BPJS	TOTAL
Pendapatan Iuran	5.581.652	6.918.669	123,95	26.980.824,47	3.607.017,77	1.578.660,76	2.464.402,09	34.630.905,09
Beban Jaminan	(2.201.611)	(3.031.641)	137,70	(10.036.559,80)	(637.088,75)	(428.866,70)		(11.102.515,25)
Beban Cadangan Teknis	(1.858.327)	(2.092.589)	112,61		(1.785.795,99)	(777.683,61)		(2.563.479,61)
Pendapatan Operasional Anak Usaha	13.122	34.875	265,78				99.751,15	99.751,15
Pendapatan Bersih Investasi	1.971.100	2.036.253	103,31	13.581.672,60	907.185,69	274.432,49	660.381,95	15.423.672,73
Pendapatan Pengelolaan Investasi JHT	1.667.005	1.678.226	100,67					-
Beban Usaha	(2.571.167)	(2.758.440)	107,28	(1.945.834,24)	(389.195,04)	(163.838,04)	(2.950.688,33)	(5.449.555,65)
Pendapatan bersih Lain-Lain	12.647	23.145	183,01		3.963,28	1.353,29	3.410,74	8.727,31
Bagian Peserta Atas Hasil Investasi JHT								-
Pajak Penghasilan Badan & Tangguhan	(419.458)	(520.854)	124,17				(63.066,92)	(63.066,92)
Laba	**2.194.961**	**2.287.643**	**104,22**	**28.580.103**	**1.706.087**	**484.058**	**214.191**	**30.984.439**

Penerimaan Iuran

Realisasi penerimaan iuran untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp.26,92 triliun atau 108,71% dari target yang sudah ditetapkan dalam RKAP 2013 sebesar Rp24,77 triliun, dengan rincian sebagai berikut :

dalam miliar rupiah

URAIAN	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN	RKAT 2014
JHT				
Jaminan Hari Tua (JHT)	19.185,57	20.005,41	104,27	26.965,46
NON JHT				
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.250,07	2.365,02	105,11	3.369,55
Jaminan Kematian (JK)	1.025,60	1.095,46	106,81	1.535,54
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	2.057,54	3.188,24	154,95	-
Jasa Konstruksi (Jakon)	201,91	193,04	95,61	255,42
Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	46,53	76,90	165,27	40,54
TOTAL IURAN NON JHT	**5.581,65**	**6.918,66**	**123,95**	**5.201,05**
TOTAL IURAN JHT DAN NON JHT	**24.767,22**	**26.924,07**	**108,71**	**32.166,50**

Penerimaan iuran dikelompokkan atas penerimaan iuran JHT dan penerimaan iuran Non JHT. Realisasi penerimaan iuran JHT sebesar Rp. 20,0 1triliun atau 104,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 19,19 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan iuran non JHT mencapai Rp. 6,92 triliun atau sebesar 123,95% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5,58 triliun.

Disamping penerimaan iuran diatas, terdapat penerimaan iuran yang belum dicatat sebagai penerimaan iuran JHT dan Non JHT sehingga dicatat dalam iuran belum rinci. Hal ini disebebkan belum diterimanya data iuran dari perushaan peserta sehuingga belum dilakukan rekonsiliasi. Penerimaan iuran belum rinci pada akhir tahun 2013 sebesar Rp.134,15 miliar, jumlah ini meningkat sebesar 160,54% dibanding realisasi tahun 2012.

Tahun 2014 perusahaan telah menetapkan kenaikan target total penerimaan iuran menjadi Rp. 32,17 triliun, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 terhitung 1 Januari 2014 BPJS Ketenagakerjaan tidak mengelola program JPK lagi.

Pembayaran Jaminan

Realisasi pembayaran jaminan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 12,99 miliar atau 124,94% dari target yang sudah ditetapkan dalam RKAP 2013 sebesar Rp10,40 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

dalam miliar rupiah

URAIAN	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN	RKAT 2014
JHT				
Jaminan Hari Tua (JHT)	8.202,99	9.968,27	121,52	10.037,12
NON JHT				
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	515,58	563,44	109,28	590,57
Jaminan Kematian (JK)	327,02	406,84	124,41	407,98
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	1.295,09	1.957,53	151,15	
Jasa Konstruksi (Jakon)	28,54	40,36	141,42	42,41
Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	35,38	63,46	179,37	27,56
TOTAL JAMINAN NON JHT	**2.201,61**	**3.031,63**	**137,70**	**1.068,52**
TOTAL JAMINAN JHT DAN NON JHT	**10.404,60**	**12.999,90**	**124,94**	**11.105,64**

Pembayaran jaminan dikelompokkan atas pembayaran jaminan JHT dan pembayaran jaminan Non JHT. Realisasi pembayaran jaminan JHT sebesar Rp. 9,97 triliun atau 121,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8,20 triliun.
Sedangkan realisasi pembayaran jaminan Non JHT mencapai Rp. 3,03 triliun atau sebesar 137,70% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2,20 triliun.

Jumlah klaim JHT selama tahun 2013 sebanyak 1.054.231 klaim yang terdiri dari klaim kepesertaan 5 (lima) tahun sebesar 90,23%, klaim JHT usia 55 (lima puluh lima) tahun sebesar 7,01%, sebesar 2,41% karena meninggal dunia, 0,28% menjadi PNS/TNI, sisanya sebesar 0,07% meninggalkan wilayah RI dan mengalami cacat total tetap.

Realisasi pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tahun 2013 sebesar Rp.563,44 miliar atau 109,28% diatas RKAP 2013. Dengan kasus kecelakaan kerja sebanyak 103.285 yang terdiri dari 91,13% sembuh, 3,86% cacat fungsi, 2,61% cacat sebagian, 2,36% meninggal dunia dan 0,05% cacat total. Rata-rata kecelakaan kerja 283 setiap harinya.

Realisasi pembayaran Jaminan Kematian (JK) tahun 2013 sebesar Rp. 406,84 miliar atau 124,41% diatas RKAP 2013. Dengan kasus kematian sebanyak 19.849, sebesar 69,44% terjadi saat peserta masih aktif, sedangkan 29,27% adalah peserta yang sudah non aktif atau melakukan klaim JHT tetapi masih dalam masa perlindungan 6 (enam) bulan.

Realisasi pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) tahun 2013 sebesar Rp.1,96 triliun atau 151,15% diatas RKAP 2013.

Tahun 2014 perusahaan telah menetapkan penurunan target total pembayaran jaminan menjadi Rp. 11,10 triliun. Penurunan target pembayaran jaminan ini dikarenakan sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 terhitung 1 Januari 2014 perusahaan tidak menggelola program JPK lagi.

Pendapatan Investasi

Realisasi pendapatan investasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 14.877 milliar atau 101,77% dari target yang sudah ditetapkan dalam RKAP 2013 yaitu sebesar Rp14,62 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

dalam miliar rupiah

JENIS DANA	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN	RKAT 2014
JHT				
Deposito	2.683,38	2.501,54	93,22	3.116,28
Saham	3.269,50	3.394,40	103,82	3.268,15
Reksadana	1.104,78	1.010,51	91,47	1.294,48
Obligasi	5.305,68	5.670,51	106,88	5.981,26
Penyertaan	-	-	-	1,84
Properti	86,37	122,79	142,17	102,06
JUMLAH	**12.449,70**	**12.700,04**	**102,01**	**13.764,07**
NON JHT				
Deposito	203,71	212,76	104,44	604,78
Saham	1.417,13	1.473,17	103,95	925,36
Reksadana	173,65	135,34	77,94	157,52
Obligasi	369,79	353,64	95,63	419,74
Penyertaan	3,70	0,66	17,86	1,42
Properti	0,81	0,66	81,26	0,66
JUMLAH	**2.168,79**	**2.176,23**	**100,34**	**2.109,48**
TOTAL	**14.618,49**	**14.877,08**	**101,77**	**15.873,55**

Pendapatan investasi dikelompokkan atas investasi JHT dan investasi Non JHT. Realisasi pendapatan investasi JHT sebesar Rp. 12,70 triliun atau 102,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 12,45 triliun. Sedangkan realisasi pendapatan investasi Non JHT mencapai Rp. 2,18 triliun atau sebesar 100,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2,17 triliun.

Yield on Investment (YOI)

Dari hasil investasi tahun 2013, pencapaian dan target YOI bruto untuk masing-masing program adalah sebagai berikut:

Portofolio	RKAP 2013 %		YOI (BRUTO) 2013 %		% PENCAPAIAN		YOI (BRUTO) TAHUN 2014 %					
	JHT	NON JHT	JHT	NON JHT	JHT	NON JHT	JHT	JKK	JK	Total DJS	BPJS	Total
Deposito	7,09	7,84	6,84	6,48	96,51	82,65	8,00	8,13	8,12	8,02	7,82	8,01
Obligasi	9,69	10,67	9,87	10,24	101,86	96,01	8,89	9,51	9,54	8,91	9,09	8,92
Saham	16,23	17,02	16,42	18,02	101,19	105,89	12,31	14,52	14,59	12,58	11,63	12,49
Reksadana	11,49	14,92	10,03	10,55	87,32	70,74	10,98	13,96	13,79	11,17	10,06	11,13
Properti	18,03	1,06	48,65	0,86	269,82	81,40	14,52	-	-	14,52	0,28	10,94
Penyertaan	-	1,07	-	2,25	-	209,99	0,17	-	-	0,17	1,60	0,27
Total	10,08	13,57	10,07	13,31	10,07	13,31	9,40	10,69	10,51	9,50	9,55	9,51

Realisasi YOI (bruto) tahun 2013 mencapai 10,44% merupakan 99,64% dari RKAP 2013 yang berada pada level 10,48%, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan dana investasi tahun 2013 sebesar Rp.16,38 triliun atau 12,33% dari tahun 2012.

Pendapatan investasi tertinggi diperoleh dari pendapatan bunga baik deposito maupun obligasi, karena penempatan dana pada kedua instrumen ini juga jumlahnya paling besar yaitu lebih dari 70,53% dana JHT.

Tahun 2014 perusahaan telah menetapkan kenaikan target pendapatan investasi sebesar 6,70% dari realisasi tahun 2013 atau menjadi Rp. 15,87 triliun.

Beban Usaha

Realisasi beban usaha untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp.2,76 triliun atau 107,59% dari target yang sudah ditetapkan dalam RKAP 2013 yaitu sebesar Rp.2.563,92 milliar, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN RKAP	RKAT 2014	% PERTUMBUHAN RKAT 2014 THD REALISASI 2013
Penyuluhan dan Pembinaan	301,45	368,10	122,11%	282,77	(0,23)
Manajemen	51,35	44,98	87,59%	64,63	43,68%
Personil	1.208,64	1.132,87	93,73%	1.561,61	37,85%
Jasa Produksi dan Tantiem	289,24	307,21	106,21%	169,42	-44,85%
Pengembangan SDM	32,61	29,73	91,18%	26,12	-12,14%
Imbalan Pasca Kerja	150,43	219,70	146,05%	214,18	-2,51%
Penyelesaian Masalah Hukum	10,46	3,68	35,20%	4,82	30,97%
Perencanaan dan Pengembangan	52,53	36,00	68,54%	52,46	45,70%
Administrasi dan Umum	309,80	417,28	134,69%	388,91	-6,80%
Penyusutan Dan Amortisasi	111,12	82,81	74,52%	90,81	9,66%
Penyisihan Piutang Iuran	46,28	116,07	250,82%	-	-100,00%
Jumlah	**2.563,92**	**2.758,44**	**107,59%**	**2.855,73**	**3,53%**

Kenaikan beban usaha disebabkan oleh:

1. Beban imbalan pasca kerja mengalami kenaikan sebesar 107,43 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya atau jika diperbandingkan dengan targetnya di tahun 2013 sebesar Rp. 150,43 miliar maka telah tercapai sebesar 46,05% diatas targetnya. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan gaji yang berpengaruh terhadap tunjangan cuti besar karyawan. Kedua komponen tersebut menjadi dasar atas perhitungan imbalan kerja.
2. Beban jasa produksi mengalami kenaikan sebesar 23,84 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya atau jika diperbandingkan dengan targetnya di tahun 2013 sebesar Rp. 289,24 miliar maka telah tercapai s e b e s a r 6,21% diatas targetnya.disebabkan adanya penambahan karyawan dan kenaikan gaji direksi serta karyawan yang menjadi dasar perhitungan jasa produksi dan tantiem.
3. Beban administrasi dan umum mengalami kenaikan sebesar 89,31 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya atau jika diperbandingkan dengan targetnya di tahun 2013 sebesar Rp. 309,80 miliar maka telah tercapai sebesar 34,69% diatas targetnya. Kenaikan ini terjadi karena adanya penambahan Kantor Jaringan Layanan sebanyak 52 Unit Kantor Cabang Pembantu.
4. Beban penyisihan piutang iuran mengalami kenaikan sebesar 91,16 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya atau jika diperbandingkan dengan targetnya di tahun 2013 sebesar Rp. 46,28 miliar maka telah tercapai sebesar 150,82% diatas targetnya. hal ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan dalam penentuan kriteria piutang iuran sesuai Keputusan Direksi nomor: 365/102013 tentang klasifikasi piutang iuran program Jamsostek. Perusahaan menetapkan bahwa piutang yang memenuhi kriteria andal adalah piutang yang telah mendapat persetujuan perusahaan peserta, sedangkan piutang iuran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai aset kontinjensi.

Tahun 2014 perusahaan telah menetapkan kenaikan target biaya usaha sebesar 3,53% dari realisasi tahun 2013 atau menjadi Rp. 2,86 triliun.

Analisis Capaian Belanja Modal

Realisasi belanja modal untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp.239,61 miliar atau 49,28% dari target yang sudah ditetapkan dalam RKAP 2013 yaitu sebesar Rp. 486,26 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

dalam miliar rupiah

JENIS ASET TETAP	RKAP 2013	REALISASI 2013	% PENCAPAIAN RKAP	RKAT 2014	% PERTUMBUHAN RKAT 2014 THD REALISASI 2013
Tanah	35,23	14,00	39,74%	33,75	141,02%
Bangunan	118,23	51,96	43,95%	106,52	105,01%
Kendaraan Dinas	32,74	50,80	155,14%	5,93	88,33%
Peralatan Kantor	10,07	14,19	140,88%	20,23	42,64%
Peralatan Komputer	162,05	31,73	19,58%	126,79	299,59%
Peralatan Lain	14,59	28,82	197,52%	35,44	22,98%
Jumlah	**372,91**	**191,49**	**51,35%**	**328,66**	**71,63%**
Aset Tidak Berwujud	113,35	48,12	42,45%	100,59	109,04%
Total	**486,26**	**239,61**	**49,28%**	**429,25**	**79,14%**

Rendahnya realisasi belanja modal Tanah terutama disebabkan oleh kegagalan proses pembelian tanah untuk Kantor Cabang Semarang II, pada Kantor Cabang Muara Enim terjadi karena harga appraisal terlalu rendah dibandingkan penawaran, selanjutnya pada Kantor Cabang Bontang dari 11 lokasi yang ditawarkan tidak ada yang sesuai standar yang ditetapkan Manajemen.

Rendahnya realisasi belanja modal Bangunan terutama disebabkan rencana pembangunan Learning Centre baru selesai dalam proses perencanaan, selanjutnya pada Kantor Cabang Palu, Pangkalan Bun dan Timika baru dimulai proses lelangnya pada akhir tahun. Rencana pembangunan kembali bangunan Kantor cabang Tangerang 1 yang mengalami kebakaran belum dapat dimulai proses pembangunannya dikarenakan menunggu selesainya proses klaim asuransi kebakaran gedung.

Rendahnya belanja modal peralatan komputer terutama disebabkan antara lainkarena baru selesainya proses *review* dan *assessment system* dan infrastruktur DC/DRC oleh konsultan independen dan aplikasi CRM masih dalam proses pelelanggan. Sedangkan rendahnya realisasi belanja modal aset tidak berwujud terutama disebabkan oleh masih adanya pengembangan aplikasi yang masih dalam proses penyelesaian di akhir tahun.

Adanya pelampauan anggaran pada anggaran Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor dan Peralatan Lain disebabkan oleh kebijakan Manajemen dalam rangka optimalisasi pemanfaatan anggaran bangunan yang tidak tercapai yang digunakan untuk Implementasi awal service blue print. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Surat nomor: 73/DK/092013 tanggal 30 September 2013 Perihal: persetujuan pergeseran anggaran antar mata anggaran Belanja Modal.

Tahun 2014 perusahaan telah menetapkan kenaikan target belanja modal sebesar 79,14% dari realisasi tahun 2013 atau menjadi Rp. 429 miliar. Kenaikan target belanja modal ini dipersiapkan untuk peningkatan infrastruktur teknologo informasi dan perluasan jaringan kantor.

STRUKTUR DAN KEBIJAKAN MODAL

Struktur Modal

Struktur Modal terhadap aset dan liabilitas menunjukan posisi yang signifikan karena dipengaruhi oleh liabilitas kepada peserta program JHT, dapat digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR MODAL TERHADAP ASET JAMSOSTEK (%)

Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013
Liabilitas	95	95	96	95	96
Ekuitas	5	5	4	5	4
Aset	100	100	100	100	100

Pada tahun 2013 aset perusahaan dibiayai oleh 96 % dari liabilitas dan 4 % dari ekuitas, turun dibandingkan tahun 2012 dengan perbandingan 95% dan 5 %. Rendahnya ratio ekuitas terhadap aset ini tidak terlepas dari proses bisnis Jamsostek yang tidak mengakui penerimaan iuran JHT dan hasil investasinya sebagai komponen pembentuk laba, sehingga jumlah pendapatan yang benar-benar mengalir menjadi laba dan akhirnya memperkuat ekuitas dari tahun ke tahun relatif kecil dibandingkan yang mengalir menjadi liabilitas. Selain itu, sejak tahun 2007, sesuai kebijakan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham atas sebagian besar laba Jamsostek yang sebenarnya merupakan laba program Non JHT dikembalikan lagi kepada peserta JHT dalam bentuk pemberian insentif JHT. Jumlah laba non JHT yang dikembalikan kepada peserta JHT dalam kurun waktu 2007 – 2013 mencapai total Rp. 3,05 triliun. Kebijakan ini semakin menegaskan fungsi sosial Jamsostek dibandingkan fungsi komersialnya selaku BUMN.

Kebijakan Modal
Kebijakan dan struktur ekuitas Jamsostek terdiri dari 4 klasifikasi, yaitu modal disetor, cadangan tujuan, cadangan umum dan laba ditahan.

Dasar pemilihan kebijakan adalah berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, PSAK 50 (revisi 2010) Instrumen Keuangan tentang Penyajian dan anggaran dasar PT. Jamsostek (Persero).

> Kebijakan dan struktur ekuitas Jamsostek terdiri dari 4 klasifikasi, yaitu modal disetor, cadangan tujuan, cadangan umum dan laba ditahan. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan

Modal Disetor
Modal disetor merupakan modal yang telah efektif diterima entitas penyelenggara Jamsostek dari pemerintah sebesar nilai nominal saham. Jumlah modal disetor tidak boleh berkurang bahkan harus diperkuat, dan posisi saat ini sebesar Rp.1 triliun. Jumlah ini sebagian besar merupakan konversi dari cadangan umum sesuai amanat RUPS.

Cadangan Tujuan
Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba untuk tujuan tertentu setelah mendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar entitas penyelenggara Jamsostek. Cadangan tujuan digunakan untuk:
a. Membiayai belanja modal;
b. Menutup kerugian yang diderita apabila melebihi cadangan umum;
c. Tujuan lainnya yang sesuai dengan kepentingan entitas penyelenggara Jamsostek.

Cadangan Umum
Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba untuk tujuan tertentu minimum 20% dari modal disetor setelah mendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar entitas penyelenggara Jamsostek yang digunakan untuk:
a. Menutup kerugian yang diderita;
b. Perluasan usaha;
c. Modal kerja;
d. Tujuan lainnya yang sesuai dengan kepentingan entitas penyelenggara Jamsostek

Saldo Laba
Saldo Laba merupakan jumlah laba tahun berjalan yang belum didistribusikan berdasarkan persetujuan RUPS dan atau berasal dari koreksi perubahan akuntansi yang mempengaruhi laba tahun lalu.

Jumlah saldo laba yang belum terdistribusi berdasarkan RUPS akan diusulkan untuk direklas ke pos cadangan umum berdasarkan persetujuan Menteri BUMN.

INVESTASI DAN REALISASI BELANJA MODAL

Perikatan yang Material Belanja Modal
Pada tahun 2013 dan 2012 Perusahaan melakukan perikatan belanja modal yang signifikan antara lain sebagai berikut:

Tahun 2013
a. Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk pelaksanaan pekerjaan *Wide Area Network* dengan nilai sebesar Rp.7.651.733.688 sesuai dengan perjanjian Nomor: PER/80/062011 dengan masa kontrak 1 Maret 2013 sampai dengan 28 Februari 2014.
   Tujuan : Untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan data
   Sumber dana : Internal, yaitu dari alokasi laba tahun 2012
   Mata Uang : Rupiah, sehingga tidak terdapat risiko terkait mata uang

b. Pengelolaan gedung Menara Jamsostek dengan PT Binajasa Abadikarya sebesar Rp.16.150.000.000 sesuai dengan PER/109/082012.
   Tujuan : Untuk jasa pengelolaan gedung Menara Jamsostek yang seluruhnya disewakan kepada tenant (*rental building*) yang dilakukan oleh anak perusahaan
   Sumber dana : Internal, yaitu dari alokasi laba tahun 2012
   Mata Uang : Rupiah, sehingga tidak terdapat risiko terkait mata uang

c. Jasa penyewaan PC dengan PT Pacifik Agung Tridaya sesuai dengan perjanjian nomor PER/80/062011 dan PER/145/052013 masing-masing sebesar Rp.1.919.775.000 dan Rp.39.952.000.
   Tujuan : Menjamin ketersediaan PC untuk setiap karyawan yang tepat waktu, tepat lokasi dan tepat spesifikasi termasuk perawatannya
   Sumber dana : Internal, yaitu dari alokasi laba tahun 2012
   Mata Uang : Rupiah, sehingga tidak terdapat risiko terkait mata uang

d. Jasa Pemeliharaan Perangkat Jarkom dengan PT Master System Infotama sebesar Rp.3.190.000.000 sesuai dengan PER/21/022012.
   Tujuan : Menjamin kualitas perangkat Jaringan Komunikasi yang dipergunakan selalu dalam kondisi sempurna
   Sumber dana : Internal, yaitu dari alokasi laba tahun 2012
   Mata Uang : Rupiah, sehingga tidak terdapat risiko terkait mata uang

Tahun 2012

a. Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
   1. Pekerjaan pengadaan Layanan Infrastruktur *Data Center* dan *Recovery Center* untuk SIPT Online dengan nilai sebesar Rp.22.162.500.000;
      Tujuan : Untuk memitigasi risiko kegagalan operasi Perusahaan akibat kerusakan sistem yang disebabkan seluruh kejadian yang merugikan
      Sumber dana : Internal, yaitu dari alokasi laba tahun 2011
      Mata Uang : Rupiah, sehingga tidak terdapat risiko terkait mata uang
   2. Pekerjaan *Wide Area Network* dengan nilai sebesar Rp.22.112.374.860. Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan SPMB/22/112009 dan SPMB/23/112009 masing-masing tertanggal 23 Nopember 2009 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Hal tersebut telah dituangkan dalam perjanjian No. PER/87/062010 tanggal 10 Juni 2010 dan PER/86/062010 tanggal 10 Juni 2010.
      Tujuan : Untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan data
      Sumber dana : Internal, yaitu dari alokasi laba tahun 2011
      Mata Uang : Rupiah, sehingga tidak terdapat risiko terkait mata uang

b. Pengelolaan gedung Menara Jamsostek dengan PT Binajasa Abadikarya sebesar Rp.14.759.800.000 sesuai dengan PER/121/082011.
   Tujuan : Untuk jasa pengelolaan gedung Menara Jamsostek yang seluruhnya disewakan kepada tenant (rental building) yang dilakukan oleh anak perusahaan
   Sumber dana : Internal, yaitu dari alokasi laba tahun 2011
   Mata Uang : Rupiah, sehingga tidak terdapat risiko terkait mata uang

c. Pengadaan server Jamsostek *e-channel* dan *external storage* dengan PT Master System Infotama sebesar Rp.13.780.800.000 sesuai dengan PER/186/122011.
   Tujuan : Menjamin ketersediaan storage setiap saat untuk menyimpan data e-channel
   Sumber dana : Internal, yaitu dari alokasi laba tahun 2011
   Mata Uang : Rupiah, sehingga tidak terdapat risiko terkait mata uang

d. Pemeliharaan perangkat keras dengan PT Sinar Surya Teknologi sebesar Rp.8.099.850.000 sesuai dengan PER/126/092011.
   Tujuan : Menjamin ketersediaan hardware komputer selain jaringan komunikasi
   Sumber dana : Internal, yaitu dari alokasi laba tahun 2011
   Mata Uang : Rupiah, sehingga tidak terdapat risiko terkait mata uang

Realisasi Belanja Modal

Realisasi belanja modal pada tahun 2013 sebesar Rp. 189,45 miliar yang seluruhnya ditujukan untuk menunjang Operasional Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliar rupiah)

No	Jenis Investasi	2013	2012	%
1.	Tanah	14,04	11,05	127,06
2.	Bangunan	44,26	20,06	439,96
3.	Kendaraan Dinas	49,57	19,13	259,12
4.	Peralatan Komputer	12,72	59,05	21,54
5.	Peralatan Kantor	29,83	8,74	341,30
6.	Peralatan Lain	19	8,89	213,72
7.	Aset Tak Berwujud	20,04	6,61	303,17
	TOTAL	**189,45**	**123,53**	**153,37**

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TAHUN 2014

Mulai 1 Januari 2014 PT. Jamsostek (Persero)akan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sejak disahkannya Undang-Undang ini pada November 2011, PT. Jamsostek (Persero) diharuskan untuk melakukan persiapan pengalihan baik program, aset, maupun operasional menuju BPJS Ketenagakerjaan.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014 berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2013-2017, hasil rumusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PT Jamsostek (Persero) tahun 2013 yang menitikberatkan progam kerja tahun 2014 pada enam pilar program strategis sebagai pondasi untuk menjadi BPJS yang berkelas dunia, dan kebijakan Direksi tahun 2014. Strategi yang diterapkan untuk tahun 2014 sesuai dengan RJPP adalah *Building Sustainability In Benefit & Services*. Pada tahap ini dilakukan pembangunan manfaat dan service yang berkelanjutan untuk memberikan nilai optimal kepada peserta.

Penyusunan RKAT tahun 2014 tetap memperhatikan dan mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan eksternal maupun internal BPJS Ketenagakerjaan. Basis asumsi yang digunakan adalah asumsi makro RAPBN 2014, hasil analisa para pengamat ekonomi, dan asumsi mikro RJPP tahun 2013-2017 dengan beberapa penyesuaian mengikuti kondisi lingkungan internal dan eksternal.

Berdasarkan hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan tema RKAT Tahun 2014 sebagai berikut:

“Memperkuat Eksistensi BPJS Ketenagakerjaan Melalui Pertumbuhan Agresif, Harmonisasi Manfaat & Pelayanan Prima”

Berdasarkan sasaran, strategi, kebijakan serta program kerja strategis masing-masing Direktorat, *highlight* anggaran BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Target
1.	Kepesertaan		
	• Perusahaan aktif	Perusahaan	218.300
	• Tenagakerja aktif	Orang	15.197.802
	• Market Share	Prosentase (%)	12,75
2.	Kepuasan peserta *Customer satisfaction index*	Prosentase (%)	90
3.	Meningkatkan kepedulian terhadap BPJS Ketenagakerjaan		
	• *Brand Equity*	Prosentase (%)	40
	• *Awareness* tenaga kerja	Prosentase (%)	70
4.	Dana Investasi:		
	• Program JHT	Miliar Rupiah	161.602,692
	• Program JKK	Miliar Rupiah	11.704,538
	• Program JK	Miliar Rupiah	3.683,150
	• BPJS	Miliar Rupiah	8.075,690
5.	Hasil investasi (bruto)		
	• Program JHT	Miliar Rupiah	13.764,070
	• Program JKK	Miliar Rupiah	1.053,521
	• Program JK	Miliar Rupiah	319,789
	• BPJS	Miliar Rupiah	736,171
6.	YOI (Bruto)		
	• Program JHT	Prosentase (%)	9,40
	• Program JKK	Prosentase (%)	10,69
	• Program JK	Prosentase (%)	10,51
	• BPJS	Prosentase (%)	9,55
7.	Total penerimaan iuran		
	• Program JHT	Miliar Rupiah	26.980,824
	• Program JKK	Miliar Rupiah	3.607,018
	• Program JK	Miliar Rupiah	1.578,661
8.	Aset BPJS		
	• Aset Netto Program JHT	Miliar Rupiah	161.678,063
	• Aset Netto Program JKK	Miliar Rupiah	14.519,749
	• Aset Netto Program JKM	Miliar Rupiah	3.962,020
	• Aset BPJS	Miliar Rupiah	9.657,788

PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, sesuai amanah UU Nomor 24 tahun 2014, PT. Jamsostek (Persero) beransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang beroperasi secara penuh per tanggal 1 Juli 2015. Sejak tanggal ini juga program yang dikelola menjadi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP). Sedangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diserahkan Ke BPJS Kesehatan. Untuk melaksanakan UU ini, sesuai Pasal 70 maka Pemerintah harus menetapkan seluruh peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan Pemerintah telah menetapkan 5 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden dan 1 Keputusan Presiden, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggraaan Jaminan Sosial.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Peraturan Presiden Nomor: 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.
7. Peraturan Presiden Nomor: 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
8. Peraturan Presiden Nomor: 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dampak pemberlakukan UU Nomor 24 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Perusahaan harus membuat Neraca Penutup PT Jamsostek (Persero) yang disahkan oleh Kementerian BUMN dan Neraca Pembuka BPJS Ketenagakerjaan yang disahkan oleh Kementerian Keuangan.
2. Penyajian Laporan Keuangan Perprogram
3. Penyerahan Aset dan Liabilitas Program JPK kepada BPJS Kesehatan
4. Risiko Strategis terkait potensi ketidaksesuaian antara pedoman akuntansi dan laporan keuangan yang disusun dengan peraturan pelaksanaan BPJS yang telah disahkan.

Modal Awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan bahwa guna mendukung operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan, maka Negara Republik Indonesia memberikan modal awal kepada BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.500 milliar.

Hal tersebut berdampak terhadap penguatan modal BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp.500 miliar yang akan dipergunakan untuk belanja modal dalam rangka peningkatan infrastuktur dibidang Teknologi Informasi, namun dalam pelaksanaannya mengandung risiko ketidakpatuhan dalam penggunaan dana tersebut.

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Seuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.02/2013 ditetapkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memperoleh dana operasional yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial (DJS) setiap bulan sebesar:

- 10 % dari total penerimaan iuran JKK yang diterima
- 10 % dari total penerimaan iuran JKM yang diterima
- 0.1125% dari rerata bulanan akumulasi iuran dan dana hasil pengembangan JHT

Atas diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212 tahun 2013, berdampak terhadap kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan dan semua kebijakan mengenai biaya operasional dilakukan harmonisasi. Namun hal tersebut memiliki potensi risiko terhadap ketidakcukupan dana operasional untuk menutupi biaya operasional BPJS.

Pengesahan Neraca (Laporan Keuangan) Penutup dan Neraca (Laporan Keuangan) Pembuka

Neraca Penutup PT Jamsostek (Persero) sesuai Laporan Auditor Independen KAP RSM AAJ nomor : R/102.AGA/rhp.2/2014 telah disahkan oleh Kementerian BUMN sesuai Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-50/MBU/2014. Namun Laporan Audit pembuka BPJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 sesuai Laporan Audit Independen Nomor: R/406.AGA/rhp.3/2014 menunggu pengesahan Neraca Pembuka oleh Kementerian Keuangan.

Hal tersebut menunjukan bahwa seluruh proses transformasi keuangan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan secara substansi telah diselesaikan. Namun belum disahkannya Neraca Pembuka BPJS Ketenagakerjaan oleh Kementerian Keuangan menimbulkan risiko ketidakpastian saldo awal laporan keuangan interim BPJS ditahun 2014.
Ikhtisar laporan keuangan penutup dan pembuka:

1. Laporan Keuangan Penutup PT. Jamsostek (Persero)

(dalam Miliar Rupiah)

PROGRAM	ASET			LIABILITAS	EKUITAS
	INVESTASI	NON INVESTASI	TOTAL		
JHT	132.614	732	133.346	133.346	-
JKK	8.073	52	8.126	8.791	(665)
JKM	2.420	44	2.464	2.662	(198)
JPK	291	120	411	411	-
BPJS	7.359	2.028	9.387	2.574	6.813

2. Laporan Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan

(dalam Miliar Rupiah)

PROGRAM	ASET			LIABILITAS	EKUITAS / ASET NETO
	INVESTASI	NON INVESTASI	TOTAL		
JHT	133.367	741	134.109	9.403	124.706
JKK	8.073	52	8.126	919	7.207
JKM	2.420	44	2.464	514	1.950
BPJS	7.650	2.647	10.297	2.984	7.313

Dalam penyajian neraca penutup dan pembuka terdapat beberapa hal yang mengakibatkan perbedaan jumlah aset antara Penutup dan Pembuka, yaitu:

1. Adanya perbedaan Standar Akuntansi antara neraca penutup dan pembuka, dimana pada neraca penutup dalam penyajian laporan keuangan menggunakan PSAK 1 sedangkan pada neraca pembuka menggunakan PSAK 18 untuk program JHT, PSAK 45 untuk prgram JKK dan JKM dan PSAK 1 untuk BPJS

2. Klasifikasi aset investasi, dimana pada neraca penutup aset investasi diklasifikasikan dalam FVTPL, AFS dan HTM sedangkan pada neraca pembuka aset investasi dilklasifikasikan dalam Fair Value dan HTM.

3. Adanya Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) Atas perbedaan perlakukan akuntansi pada saat neraca penutup dan pembuka menyebabkan aset Program JHT meningkat sebesar Rp. 762,56 miliar yang disebabkan oleh revaluasi atas aset properti investasi. Sedangkan peningkatan aset BPJS sebesar Rp. 909,95 miliar disebabkan oleh penyertaan modal pemerintah dan pengalihan aset Peogram JPK yang dititipkan sampai dengan penyerahan ke BPJS Kesehatan. Untuk program JKK dan JKM tidak mengalami perubahan jumlah aset, karena perubahan kebijakan akuntansi hanya bersifat reklasifikasi yang tidak menyebabkan perubahan jumlah aset.

Perubahan susunan Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menetapkan:

1. Pengangkatan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama dua tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut :
   - Ketua Komisaris : Mulabasa Hutabarat
   - Anggota Komisaris : Iskandar Maula
   - Anggota Komisaris : Hariyadi B. Sukamdani
   - Anggota Komisaris : Bambang Wirahyoso
   - Anggota Komisaris : Mathias Tambing
   - Anggota Komisaris : Nina Sapti Triaswati
   - Anggota Komisaris : H.M. Saleh Khalid

2. Pengangkatan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama dua tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sejak 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut :
   - Direktur Utama : Elvyn G. Masassya
   - Direktur : Agus Supriyadi
   - Direktur : Jeffry Haryadi
   - Direktur : Amri Yusuf
   - Direktur : Achmad Riadi
   - Direktur : Junaedi
   - Direktur : Herdy Trisanto

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing telah berkontribusi secara aktif untuk meletakkan landasan BPJS Ketenagakerjaan

Pendahuluan

Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) sudah menjadi ruh bagi korporasi dewasa ini. Pun demikian juga halnya dengan PT Jamsostek (Persero) yang secara konsisten memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara menjalankan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan. Inilah yang meneguhkan pembuktian selama ini bahwa PT Jamsostek (Persero) tetap menjadi profesional yang terbaik di bidangnya.

Untuk itu, Manajemen PT Jamsostek (Persero) telah menempatkan kebijakan *Good Corporate Governance*, berikut seluruh penerapannya, sebagai salah satu kerangka utama pengembangan perusahaan di masa depan

Pengembangan dan penerapan tata kelola perusahaan yang mengacu pada *best-practice standards* di lingkungan kerja PT Jamsostek (Persero) diharapkan dapat memenuhi kepentingan segenap stakeholders secara seimbang, selain juga membuka peluang bagi pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan bagi perusahaan.

Menjadi sebuah *milestone* bagi PT Jamsostek (Persero), bahwa pada tahun 2011 terjadi perubahan regulasi yang mendasar yaitu Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bagi BUMN, sehingga PT Jamsostek (Persero) dihadapkan pada proses antisipasi dan transformasi operasionalisasi BPJS secara efektif pada tanggal 1 Juli 2015 dan penyempurnaan infrastruktur GCG yang pada gilirannya mengubah Struktur Tata Kelola Perusahaan dan membentuk Struktur Tata Kelola BPJS.

Roadmap Tata Kelola Perusahaan

Pengkinian roadmap GCG dilandasi dengan Undang-Undang No: 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di mana terhitung tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN, maka dilakukan penyempurnaan terhadap struktur tata kelola perusahaan dan sekaligus mengantisipasi diberlakukannya BPJS dengan menyusun struktur tata kelola Dewan Jaminan Sosial Nasional dan struktur tata kelola BPJS.

Roadmap yang semula direncanakan 10 tahun (2004-2013) dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan perkembangan regulasi di atas, menjadi periode 5 tahun (2011-2015) dengan sasaran dan *Key Performance Indicator* sebagai berikut :

Good Corporate Governance (2009-2010)	Bauran GCG & GGG 2013	*Good Government Governance* (2014-2015)
Sasaran 1 Penyempurnaan Infrastruktur Tata Kelola *Perusahaan*	**Sasaran 1 *e-governance***	**Sasaran 1 Penyusunan Infrastruktur Tata Kelola BPJS**
1. Penyempurnaan Infrastruktur GCG Direksi 2. Penyempurnaan Infrastruktur GCG Dewan Komisaris 3. Upload Infrastruktur GCG ke website 4. Penyusunan Pedoman Self Assassment GCG	1. Kebijakan e-governance 2. Upload ke website GCG • e-learning • e-infrastruktur • e-LHKPN 3. Sosialisasi 4. Pooling Tingkat Pemahaman	1. Board Manual 2. Code of Cunduct 3. Pengendalian Gratifikasi 4. Kepatuhan LHKPN 5. Sistem Pengendalian Intern 6. Whistle Blowing System
Sasaran 2 Tindak Lanjut Regulasi GCG BUMN	**Sasaran 2 Infrastruktur Tata Kelola BPJS**	**Sasaran 2 Implementasi Tata Kelola BPJS**
1. Penetapan Direktur Penanggung Jawab GCG 2. Restrukturisasi Komite Dewan Komisaris 3. Self Assassment GCG oleh Biro Pengawas Intern 4. Penyempurnaan Roadmap GCG	1. Pedoman Akuntabilitas Keuangan 2. Fraud Control System 3. Kebijakan Umum Tata Kelola BPJS yang baik (BPJS Code) 4. Kebijakan Struktur Tata Kelola BPJS • Presiden • DJSN • BPJS • Dewan Pengawas • Direksi • Komite	1. Sosialisasi 2. Penandatanganan Pernyataan Komitmen /Pakta Integritas 3. Implementasi Struktur Tata Kelola 4. Implementasi Infrastruktur Tata Kelola
Key Performance Indicators	**Key Performance Indicators**	**Key Performance Indicators**
1. Capaian Hasil *Assassment* GCG 85% 2. Capaian C*orporate Governance Perfection Index* 87% dengan kualifikasi *The Most Trust Company* 3. Capaian Skor *Annual Report Award* 88% 4. Peringkat Kedua *Survey* Integritas Pelayanan Publik 5. Peringkat Pertama Inovasi GCG BUMN 6. Mempertahankan Peringkat 1 ARA untuk kategori BUMN Keuangan *Non Listed* 7. Memperoleh peringkat 10 ARA untuk Kategori Umum	1. Capaian Hasil *Assassment* GCG 90% 2. Capaian C*orporate Governance Perfection Index* 90% dengan kualifikasi *The Most Trust Company* 3. Capaian Skor *Annual Report Award* 88% 4. Mempertahankan Peringkat Pertama Survey Integritas Pelayanan Publik 5. Mempertahankan Peringkat Pertama Inovasi GCG BUMN 6. Mempertahankan Peringkat 1 ARA untuk kategori BUMN Keuangan *Non Listed* 7. Memperoleh peringkat 10 ARA untuk Kategori Umum	1. Capaian Hasil *Assassment* GCG 95% 2. Capaian C*orporate Governance Perfection Index* 95% dengan kualifikasi *The Most Trust Company* 3. Capaian Skor *Annual Report Award* 95% 4. Mempertahankan Peringkat Pertama Survey Integritas Pelayanan Publik 5. Mempertahankan Peringkat Pertama Inovasi GCG BUMN 6. Mempertahankan Peringkat 1 ARA untuk kategori BUMN Keuangan *Non Listed* 7. Memperoleh peringkat 5 ARA untuk Kategori Umum

PT Jamsostek (Persero) memiliki komitmen dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan tata kelola perusahaan dengan menetapkan 2 sasaran sesuai dengan *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan yakni penyempurnaan infrastruktur dan pemenuhan tindak lanjut berbagai peraturan-peraturan dan ketentuan terkini yang mengatur tentang penerapan tata kelola perusahaan khususnya di Badan Usaha Milik Negara.

Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Tujuan Umum

- Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara menjalankan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan agar perusahaan dapat dikelola secara profesional;
- Mendorong agar pengelola perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan;
- Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.

Tujuan Khusus

- Tercapainya kesinambungan usaha perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
- Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Menjadikan Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Terciptanya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan.
- Optimalisasi nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- Peningkatan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga menimbulkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Konsistensi Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Transparansi

Implementasi prinsip transparansi pada PT Jamsostek (Persero) antara lain :

- Proses pengambilan keputusan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memenuhi persyaratan Anggaran Dasar Perusahaan.
- Proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi telah dilaksanakan pada rapat Dewan Komisaris Internal dan rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi (rapat gabungan).
- Proses pengambilan keputusan Direksi yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan melalui mekanisme rapat Direksi, dan rapat Direksi yang mengundang Dewan Komisaris (rapat gabungan).
- Perusahaan telah memiliki sistem teknologi informasi *on-line* yang *realtime* untukmempercepat akses informasi.
- Laporan Keuangan disajikan dalam 3 (tiga) Media cetak Nasional terkemuka.
- Laporan Tahunan telah memenuhi syarat kriteria Annual Report dan Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, khususnya informasi BUMN yang disajikan dalam Laman (*website*) perusahaan.
- Seluruh kebijakan perusahaan telah dituangkan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui saluran komunikasi yang telah disediakan perusahaan.

Akuntabilitas

Implementasi prinsip akuntabilitas pada PT Jamsostek (Persero) antara lain :

- Perusahaan telah memiliki Struktur Organisasi, *Job Description* untuk masing-masing *Job Title* dan penilaian *Key performance Indicator* untuk Direksi, Kepala Unit kerja dan masing-masing karyawan.
- Perusahaan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS/ Dewan Komisaris dan telah di-*breakdown* kepada seluruh Unit kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas setiap tahunnya.
- Insan Jamsostek telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan mempertanggung-jawabkan kegiatannya secara transparan setiap triwulanan.

- Auditor eksternal telah melakukan pemeriksaan atas Laporan keuangan Perusahaan dengan opini auditor independen adalah wajar tanpa pengecualian dan tingkat kesehatan antara sehat dan sehat sekali.
- Perusahaan telah mempertanggungjawabkan dan mendapat pengesahan atas Laporan Tahunan oleh RUPS.
- Perusahaan telah memberikan penghargaan dan sanksi (*Reward and Punishment*) kepada karyawan yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran.

Responsibilitas

Implementasi prinsip rensponsibilitas pada PT Jamsostek (Persero) antara lain :

- Perusahaan memiliki peraturan perundangundangan, anggaran dasar, infrastruktur GCG, dan kebijakan pengelolaan *Corporate Social Responsibility* dalam bentuk Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- Insan Jamsostek selalu bersikap prudent sesuai dengan kebijakan manajemen risiko dan memastikan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan.
- Perusahaan setiap tahun telah dilakukan audit kepatuhan oleh Auditor Eksternal dan tidak terjadi peningkatan yang signifikan dan material atas temuan audit kepatuhan.
- Perusahaan telah berkontribusi kepada peserta, melalui Dana Peningkatan Kesejahteran Peserta (antara lain Pembangunan rumah susun, Beasiswa, Bantuan PHK dan pemberian uang muka perumahan).
- Perusahaan telah berkontribusi kepada masyarakat di lingkungan perusahaan, melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (antara lain pinjaman lunak, bantuan kesehatan, lingkungan, donasi dan sumbangan) dalam batas kewajaran dan kepatutan.
- Perusahaan telah memprakarsai terbentuknya Komunitas Pengusaha Antisuap (KUPAS) BUMN.
- Insan Jamsostek telah menandatangani pakta integritas untuk tunduk kepada *Code of Conduct* dan etika bisnis yang telah ditetapkan.

Independensi

Implementasi prinsip independensi pada PT Jamsostek (Persero) antara lain :

- Perusahaan telah memiliki kebijakan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- Perusahaan telah memiliki budaya perusahaan yaitu Iman, Profesional, Teladan, Integritas dan Kerjasama (IPTIK) yang berlaku untuk seluruh Insan Jamsostek.
- Masing-masing organ perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan masing-masing peranannya tanpa adanya intervensi dan mendominasi pihak lainnya.
- Perusahaan telah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan hasil assessment yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.
- Pemegang Saham telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional dan independen.
- Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan fungsi *check and balances* melalui komunikasi formal melalui rapat, persetujuan/penolakan Dewan Komisaris atas usulan Direksi.

Fairness

Implementasi prinsip *fairness* pada PT Jamsostek (Persero) antara lain :

- Perusahaan telah memiliki peraturan perundangundangan yang mengatur hak dan kewajiban peserta.
- Perusahaan telah memiliki kebijakan teknis operasional untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
- Perusahaan telah memberikan perlakuan yang proporsional kepada peserta tanpa membedakan size perusahaan peserta, jumlah upah pekerja, jumlah peserta yang di-*cover* pada masingmasing perusahaan.
- Perusahaan melakukan peningkatan manfaat kepada peserta secara konsisten setiap 2 (dua) tahun.
- Perusahaan telah memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat melalui forum pertemuan, saluran komunikasi elektronik (*website*), saluran pelayanan (*call centre*) dan saluran pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*)
- Perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dengan Serikat Pekerja Jamsotek (SPJ).

Rapat Umum Pemegang Saham

Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah mensahkan Laporan Tahunan tahun buku 2013 dan Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013 sebagai akhir dari pertanggungjawaban keuangan perusahaan.

Rapat Umum Pemegang saham yang berkaitan dengan penyajian laporan tahunan tahun buku 2013 meliputi RUPS RKAP tahun 2013, RUPS Laporan tahunan tahun buku 2013, Pengesahan Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013. Laporan Keuangan Pembuka per 1 Januari 2014 dalam proses pengesahan oleh Menteri Keuangan.

Disamping itu disajikan pula tindak lanjut pengarahan RUPS tahun sebelumnya yang terdiri dari tindak lanjut pengarahan RUPS RKAP tahun 2013 dan tindak lanjut pengarahan RUPS laporan tahunan tahun buku 2012.

Pokok-pokok Keputusan RUPS RKAP Tahun 2013

No	Keputusan RUPS
1.	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Jamsostek (Persero) Tahun 2013, dengan pokok-pokok sebagai berikut: a. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Induk Laporan posisi keuangan induk PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013 dianggarkan ditutup dengan jumlah aset serta liabilitas dan ekuitas masing-masing sebesar Rp. 156.836.437 Juta. b. Perhitungan Laba/Rugi Induk Laba setelah PPh Induk PT Jamsostek (Persero) Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 2.194.961 Juta. c. Rencana Belanja Modal Belanja Modal tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp 486.264,02 Juta. d. Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris serta fasilitas lainnya tahun 2013 untuk sementara ditetapkan sama dengan tahun 2012. Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris secara final akan ditetapkan pada RUPS pengesahan laporan keuangan tahun buku 2012.
2.	Pengesahan Rencana Kerja Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) Tahun 2013, dengan pokok-pokok sebagai berikut: a. Dana yang tersedia sebesar Rp. 679.159 Juta b. Penggunaan dana bergulir sebesar Rp. 518.000 Juta dan penggunaan dana tidak bergulir sebesar Rp100.000 Juta. c. Beban Operasional sebesar R. 636.500 Juta
3.	Persetujuan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2013 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) dengan Pemegang Saham PT Jamsostek (Persero)
4.	Persetujuan *Key Performance Indicators* (KPI) Tahun 2013 antara Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) dengan Pemegang Saham PT Jamsostek (Persero)
5.	Penetapan persetujuan penghapusbukuan Gedung Kantor Cabang Tangerang I akan dilakukan setelah adanya tanggapan dan rekomendasi secara tertulis dari Dewan Komisaris.
6.	Penetapan Saldo Dana Pengembangan Non JHT sebesar Rp. 1.198.421.605.861 dimasukan ke dalam Cadangan Umum akan dihapuskan setelah adanya kajian hokum dari Direksi dan rekomendasi atau tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

Pokok-pokok Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2013

Berdasarkan Surat Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: S-134/MBU/2014 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan PT Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2013, maka pokok-pokok keputusan Menteri BUMN adalah sebagai berikut:

No	Keputusan RUPS
1	Persetujuan RUPS atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahun Buku 2013, dengan pokok-pokok sebagai berikut: a. Laporan Posisi Keuangan Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2013 ditutup dengan jumlah aset dan liabilitas/ekuitas masing-masing sebesar Rp. 153.733.128 Juta b. Laba Rugi Komprehensif Laba setelah pajak konsolidasi PT Jamsostek (Persero) yang akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2013 mencapai sebesar Rp 2.287.643 Juta.
2	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2013, dengan pokok-pokok sebegai berikut: a. Laporan Posisi Keuangan Laporan posisi keuangan dengan jumlah aset sebesar Rp 168.026.865.241 b. Laporan Aktivitas 1) Penerimaan, Pendapatan dan Penyisihan sebesar Rp. 14.354.926.521 2) Kenaikan aset bersih Rp. 7.179.523.910 3) Aset Bersih pada Akhir Periode Rp 167.131.404.258
3	Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013, sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pembebasan tanggungjawab tersebut, tidak melepas tanggung jawab hukum Direksi dan atau Dewan Komisaris apabila laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan atau merugikan perusahaan.
4	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2013. Menetapkan penggunaan Laba Bersih sebesar Rp. 2.287.642.937.018 a. DPKP Rp. 400.000.000.000 (17,49%) b. Cadangan Tujuan Rp. 210.000.000.000 (9,18%) c. Cadangan Umum Rp. 1.677.642.937.018 (73,33%)
5	Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris. a. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris diberikan sebesar Rp. 33.000.000.000 (tiga puluh tiga miliar rupiah) b. Tantiem Direktur, Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris masing-masing sebesar 90%, 40% dan 36% dari tantiem Direktur Utama dan pembayarannya dihitung proporsional dengan memperhatikan masa kerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Tahun Buku 2013. c. Pajak Penghasilan atas tantiem menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.

6	Penetapan Pengalihan Saldo Program Bina Lingkungan Menetapkan pengalihan saldo program Bina Lingkungan bagi program penghijauan kerjasama dengan BUMN Hijau Lestari I sebesar Rp. 2.250.000 dan penyaluran sisa saldo Bina Lingkungan sebesar Rp. 24.993.447.550 untuk pembangunan masjid di Kementerian BUMN sebesar 50% dan sisa 50% digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan. Tujuan penyaluran san jumklah alokasi sana yang akan disalurkan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran dana tersebut agar dilaksanakan melalui Koordinator Wilayah PKBL BUMN yang ada pada wilayah kegiatan penyaluran bantuan.

Pengesahan Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: SK-50/MBU/2014 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013 Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka pokok-pokok keputusan Menteri BUMN adalah sebagai berikut:

NO — **Keputusan RUPS**

1 Mengesahkan Laporan Keuangan Penutup Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jamsostek per 31 Desember 2013 sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2013
Investasi	149.224.338.902.732
Aset Lainnya	3.433.702.021.437
Liabilitas kepada Peserta	145.182.278.192.417
Liabilitas Lainnya	1.125.683.269.974
Ekuitas	6.350.079.461.961
Total Aset	152.658.040.924.170

2 Direksi perusahaan perseroan (Persero) PT Jamsostek agar menyelesaiakan seluruh aspek legalitas kepemilikan asset-aset perseroan (Persero) PT Jamsostek sehingga asset-aset yang tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan mempunyai bukti kepemilikan yang sah.

Tindak Lanjutnya Pengarahan RUPS RKAP Tahun 2013

No	Arahan RUPS	Tindak Lanjut
1.	RKAP 2013 yang disahkan merupakan pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha tahun 2013 yang harus dilaksanakan secara disiplin. Oleh karenanya diminta komitmennya untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan dan berdampak pada pengeluaran biaya dapat dihindari.	Arahan tersebut telah dituangkan dan dipertegas dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/40/012013 tentang Penetapan rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Jamsostek (Persero) Tahun 2013.
2.	Anggaran Pendapatan merupakan target minimal yang harus diupayakan pencapaiannya secara maksimal oleh segenap jajaran perusahaan, sedangkan anggaran biaya merupakan alokasi maksimal yang harus diupayakan seefisien mungkin sehingga dapat dicapai efisiensi yang lebih baik dan laba telah ditargetkan dapat tercapai.	
3.	Terkait Proses Transformasi PT. Jamsotek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, diminta: a. Proaktif melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait guna mendukung penyelesaian peraturan-peraturan yang mendukung kegiatan operasional BPJS. b. Mempersiapkan konsep pedoman atau petunjuk administrasi sebagai tindaklanjut dari pemisahan aset Badan Penyelenggara dan aset Peserta. c. Memperpersiapkan pengalihan progam JPK kepada BPJS Kesehatan. d. Dengan dibekukannya PKBL diminta untuk menyusun kajian mengenai rencana pergeseran program CSR dalam rangka mendukung program peningkatan kepesertaan bagi BPJS Ketenagakerjaan. e. Melakukan sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan kepada *stakeholder* BPJS Ketengakerjaan. f. Melakukan proses penujukan KAP dalam rangka Audit Interim guna mempersiapkan Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) dan mengusulkannya kepada Pemegang Saham. g. Secara berkala melaporkan kepada Kementerian BUMN cq. Deputi Bidang Usaha Jasa atas persiapan transformasi.	Selama Proses Transformasi, PT Jamsostek (Persero): ∞ Senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya percepatan dan penyelesaian peraturan-peraturan yang mendukung operasional BPJS. ∞ Menyiapkan konsep pedoman atau petunjuk administrasi terkait pemisahan aset BPJS. ∞ Telah mensosialisasikan kepada *stakeholder* mengenai BPJS Ketenagakerjaan.
4.	Terkait Bidang Operasional, diminta : a. Menyelesaikan permasalah sistemik khususnya yang berkait dengan : database kepesertaan, *individual account*, "dana tidak bertuan" dan PDS. b. Memprioritaskan penyelesaian her-registrasi data kepesertaan guna menunjang akurasi *database* kepesertaan . c. Dilakukan *pilot project* untuk pelaksanaan program e-registrasi. d. Menggarap potensi tenaga kerja informal secara prudent / selektif. e. Melakukan upaya peningkatan peserta aktif dan menarik kembali peserta non aktif.	PT Jamsostek (Persero) secara aktif dan terus menerus telah melakukan perbaikan dan pembenahan dalam bidang operasional baik terkait *database* kepesertaan, *individual account*, perluasan kepesertaan dan e-registrasi serta mengalihkan dana tidak bertuan kepada Balai Harta Peninggalan.

5.	Terkait Pengelolaan Keuangan dan Investasi, diminta: a. Mengendalikan biaya–biaya yang *controllable* untuk memperbesar *bottom line* sekaligus memperbesar ekuitas perusahaan . b. Menyelesaikan jumlah iuran belum rinci dan dana jaminan hari tua bagi peserta usia 55 tahun yang belum mengajukan klaim. c. Menetapkan kebijakan pengelolaan dana investasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keamanan dana, likuiditas dan hasil yang optimal. d. Penyelesaian optimalisasi dan penyelesaian aset eks investasi yang bermasalah.	Pengelolaan keuangan dan investasi, Manajemen selalu mengutamakan prisip kehati-hatian, keamanan dana, likuiditas dan hasil yang optimal melalui SAA (*Strategy Asset Allocation*), RKAP 2013 dan TAA (*Tactical Asset Allocation*) yang direview dan dievaluasi per triwulan.
6.	Terkait Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi, diminta: a. Mengoptimalkan implementasi sistem Teknologi Informasi yang selama ini telah dibuat guna mendukung kelancaran operasional. b. Mengintensifkan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan. c. Melakukan pemetaan aset dan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN guna mendukung program pembangunan sistem informasi aset BUMN.	Manajemen telah menyusun roadmap Teknologi Informasi serta tata kelola Teknologi Informasi yang dapat mendukung kegiatan operasional dan pelayanan serta persiapan transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
7.	Terkait Bidang Sumber Daya Manusia, diminta : a. Mempersiapkan dan menyusun program peningkatan kualitas SDM yang didahului dengan kajian jumlah dan kompetensi kebutuhan SDM. b. Menyusun kajian dan strategi pengembangan SDM khususnya yang terkait dengan *Account Officer* c. Melakukan kaderisasi pimpinan melalui pendidikan formal maupun informal.	Manajemen telah menyusun kajian kebutuhan, metode rekruitmen, pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM serta kaderisasi pemimpin.
8.	Terkait Bidang Pengadaan Barang, diminta : a. Pengadaan barang dan jasa hendaknya dilaksanakan berdasarkan aspek kebutuhan, sesuai Standar Prosedur Operasi, transparan serta dapat dipertangung jawabkan kewajaran harganya. b. Proses pengadaan yang dilakukan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. c. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.486.264 juta agar dapat direalisasikan sesuai target untuk mendukung pencaian target pertumbuhan bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan. d. Apabila dalam pengadaan terdapat pergeseran pada pos pengeluaran belanja modal tanpa mengubah jumlah keseluruh, harus dimintakan persertujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu.	Manajemen telah mengoptimalkan penggunaan *e-procurement* serta penyempurnaan sistem dan pelaksanaan pengadaan untuk memperoleh barang dan jasa sesuai kebutuhan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta memintakan persetujuan Dekom apabila terdapat pergeseran anggaran.

9.	Dalam rangka mengoptimalkan fungsi manajemen risiko pada seluruh lini organisasi, sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan semua jenis risiko dapat diidentifikasi, dimonitor, diukur dan dikendalikan.	Manajemen senantiasa mengelola risiko dalam setiap kegiatan perusahaan yang dibantu oleh Biro Manajemen Risiko.
10.	Implementasi GCG, menciptakan budaya tata kelola yang baik sehingga implementasi dan hasil *assessment* GCG dapat makin ditingkatkan.	Manajemen menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai pedoman dalam pengurusan perusahaan
11.	Unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) agar terus memastikan setiap unit telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan sistem, peraturan dan proses bisnis yang berlaku untuk menghindari penyimpangan operasional.	Manajemen melalui Biro Pengawasan Intern dan didukung dengan Biro Manajemen Risiko dan Biro Kepatuhan dan Hukum secara aktif memonitoring kegiatan seluruh unit kerja.
12.	RKA Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) a. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pembangunan/renovasi Rusunawa dan Rusunami serta Perumahan bagi peserta. b. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pembangunan Rumah Sakit Pekerja. c. Mengevaluasi kualitas dan kompetensi SDM pada unit kerja yang menangani DPKP (Biro PKPKBL), khususnya berkenaan dengan rencana menghentikan penyaluran dana PKBL. d. Melakukan penjajagan kerjasama dengan BUMN penjamin UKM dan Koperasi untuk meningkatkan penyaluran dana bergulir khususnya pinjaman kepada Koperasi.	Manajemen secara konsisten meningkatkan pengelolaan Program DPKP baik dalam bentuk pemantauan, monitoring, bekerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan peserta.

Tindak Lanjut Pengarahan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2012

No	Arahan RUPS	Tindak Lanjut
1.	Diminta untuk menindaklanjuti temuan-temuan, saran-saran auditor eksternal (BPK RI dan atau KAP) maupun auditor internal (SPI) tahun 2012 dan tahun-tahun sebelumnya, serta menyelesaikan secara tuntas pada tahun 2013.	Manajemen secara optimal telah menindaklanjuti temuan auditor eksternal kecuali permasalahan yang sifatnya *uncontrollable* ditindaklanjuti oleh perusahaan.
2.	Usulan penghapusan MTN PT Hati Prima Perdasa yang telah memperoleh putusan Kasasi MA, usulan penggunaan Cadangan Umum untuk menutupi kekurangan saldo laba tahun 2010 dan 2011, dan usulan penambahan modal disetor agar disampaikan tersendiri kepada Menteri BUMN dengan dilampiri dokumen pendukung dan rekomendasi Dewan Komisaris.	Manajemen telah menyampaikan secara tersendiri permasalahan tersebut kepada Menteri BUMN dengan dilampiri dokumen pendukung dan rekomendasi Dewan Komisaris.

3.	Diminta untuk mengupayakan efisiensi biaya yang sifatnya *controllable* , termasuk biaya usaha dan biaya untuk kegiatan penunjang lainnya.	Manajemen telah meningkatkan pengendalian efisiensi biaya dan monitoringnya pada setiap unit kerja.
4.	Terkait Bidang Pelayanan kepada kepesertaan, diminta : a. Menyelesaikan permasalah sistemik khususnya yang berkait dengan : database kepesertaan, *individual account,* "dana tidak bertuan" dan PDS. b. Memprioritaskan penyelesaian her-registrasi data kepesertaan guna menunjang akurasi database kepesertaan . c. Mengoptimalkan potensi peserta tenaga kerja formal. d. Dilakukan *pilot project* untuk pelaksanaan program e-registrasi. e. Menggarap potensi tenaga kerja informal secara *prudent* / selektif.	Manajemen secara aktif dan terus menerus melakukan perbaikan dan pembenahan dalam bidang operasional baik terkait database kepesertaan, *individual account,* perluasan kepesertaan formal dan informal serta e-registrasi.
5.	Terkait Proses Transformasi PT. Jamsotek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, diminta: a. Melakukan sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan kepada stake holder BPJS Ketengakerjaan. b. Mempersiapkan SDM/tenaga pendukung, sarana dan prasarana operasional BPJS Ketenagakerjaan sebaik mungkin yang didahului dengan kajian yang komprehensif. c. Menyelesaikan pengalihan progam JPK kepada BPJS Kesehatan yang didahului dengan kajian komprehensif termasuk langkah-langkah antisipasi. d. Secara berkala melaporkan kepada Kementerian BUMN cq. Deputi Bidang Usaha Jasa atas persiapan transformasi.	Manajemen telah meningkatkan upaya sosialisasi kepada *stake-holder* mengenai BPJS Ketenagakerjaan serta mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana pendukung transformasi serta berkoordinasi dengan instansi terkait.
6.	Terkait Pengelolaan dan Penempatan Dana Investasi, diminta: a. Secara aktif memberikan masukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan regulasi (PP/Perpres) mengenai investasi BPJS. b. Mengkaji komposisi penempatan dana pada setiap portofolio, dengan sasaran untuk lebih mengoptimalkan hasil investasi. c. Memperkuat peran dan fungsi risk management dalam hal pemantauan dan pengevaluasian kinerja investasi sehinga setiap aktivitas investasi telah sesuai dengan kebijakan investasi d. Mengoptimalkan implementasi aplikasi SIM dan Teknologi Informasi, sehinga sistem pelaporan, analisi dan pengambilan keputusan bidang investasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.	Manajemen telah membentuk Tim serta melibatkan unit kerja terkait untuk aktif dalam menyusun regulasi mengenai Investasi BPJS. Pengelolaan investasi telah didukung dengan SIM dan TI serta pengutan fungsi manajemen risiko sehingga aktivitas investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

7.	Terkait Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi, diminta: a. Melakukan pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi berdasarkan tata kelola Teknologi Informasi yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN no: PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013. b. Mempersiapkan Teknologi Informasi dan segala penunjangnya untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasi.	Manajemen mempersiapkan penyusunan *roadmap* Teknologi Informasi serta tata kelola Teknologi Informasi yang dapat mendukung kegiatan operasional dan pelayanan serta persiapan transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
8.	Terkait Bidang Sumber Daya Manusia, diminta : a. Meningkatkan kompetensi SDM di semua bidang yang terkait dengan aktifitas operasional perusahaan, termasuk kaderisasi pimpinan melalui berbagai pendidikan/*training* b. Menyelaraskan program pendidikan/*training* SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta career planning SDM agar sejalan dengan rencana pengembangan bisnis. c. Menyusun kajian dan strategi pengembangan SDM khususnya yang terkait dengan *Account Officer.* d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *roadmap* SDM yang mencakup career path SDM, mulai dari proses penerimaan, mutasi, diklat dan promosi berdasarkan pada sistem penilaian dengan kriteria yang jelas, obyektif dan transparan.	Manajemen telah menyusun kajian kebutuhan, metode rekruitmen, pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM serta kaderisasi pemimpin.
9.	Diminta untuk meningkatkan peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) terutama dalam hal: a. Melaksanakan program pemeriksaan secara berkala dan sistematis b. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut manajemen atas temuan hasil pemeriksaan auditor eksternal dan SPI c. Senantiasa meningkatkan kompetensi SDM unit SPI agar mampu berperan lebih aktif	SPI telah menyusun pedoman audit operasional berbasis risiko sehingga pelaksanan audit lebih sistematis. Manajemen telah optimal dalam melakukan tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal
10.	Terkait Bidang Pengadaan Barang, diminta : a. Mengevaluasi sistem perencanaan dan pengadaan belanja modal agar anggarannya terserap secara optimal. b. Proses pengadaan yang dilakukan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.	Manajemen telah menyiapkan program *e-procurement* untuk seluruh Kantor Daerah serta penyempurnaan sistem dan pelaksanaan pengadaan sehingga anggaran dapat terserap optimal dan memperoleh barang dan jasa sesuai kebutuhan.

Dewan Komisaris

Pembagian Tugas

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, serta Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, maka Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Tahunan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2013 kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan Tahunan memuat penjelasan atas Mekanisme pengawasan yang dilakukan antara lain pelaksanaan pembahasan kinerja dan permasalahan secara berkala dengan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan atau pejabat perusahaan, melakukan kunjungan kerja ke unit-unit kerja untuk memperoleh dan mengetahui secara langsung kinerja dan aktivitas usaha, pengawasan dalam hal penyempurnaan infrastruktur GCG dan manajemen risiko, kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh unit-unit kerja di lingkungan perusahaan. Dalam melaksanakan tugas selama tahun buku 2013, Dewan Komisaris juga menitikberatkan fungsi pengawasan dan fungsi penasihat untuk persiapan dan kesuksesan transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Peranan Dewan Komisaris untuk menjawab kepatuhan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah menetapkan pembidangan atas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP/02/DEKOM/032012 tanggal 28 Maret 2013 sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel Pembagian Tugas Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	Bambang Subianto	Komisaris Utama s.d. Februari 2013	• Direktorat Perencanaan, Pengembangan & Informasi • Direktorat Kepesertaan
2	Denny Indrayana	Komisaris Utama Februari-Desember 2013	• Direktorat Utama • Direktorat Perencanaan, Pengembangan & Informasi
3	Herry Purnomo	Komisaris	• Direktorat Keuangan • Direktorat Investasi
4	Iskandar Maula	Komisaris	• Direktorat Pelayanan • Direktorat Umum dan SDM
5	Herman Hidayat	Komisaris	• Direktorat Utama • Direktorat Umum dan SDM • Direktorat Investasi
6	Mathias Tambing	Komisaris	• Direktorat kepesertaan • Direktorat Pelayanan
7	Hariyadi B. Sukamdani	Komisaris Independen	• Direktorat Keuangan • Direktorat Investasi
8	Bambang Wirahyoso	Komisaris Independen	• Direktorat Kepesertaan • Direktorat Perencanaan, Pengembangan dan Informasi • Direktorat Keuangan

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Dasar pelaksanaan :

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Persetujuan Laporan Tahunan PT. Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2013.
3. Keputusan RUPS Laporan Tahunan PT. Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2012 adalah Penetapan atas Gaji/Honorarium berikut Tunjangan dan/atau Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2013.
   a. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per bulan dan gaji Direktur ditetapkan sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.
   b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 40% dari gaji Direktur Utama dan honorarium Komisaris ditetapkan sebesar 36% dari gaji Direktur Utama.
   c. Tunjangan dan atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan dengan mengacu kepada keputusan tunjangan dan/atau fasilitas Tahun Buku 2012.
   d. Gaji/honorarium dan tunjangan serta fasilitas sebagaimana tersebut pada point a s/d c berlaku efektif sejak 1 Januari 2013.

Komposisi dan Honorarium Dewan Komisaris

Komposisi dan Honorarium per bulan yang diterima oleh Dewan Komisaris PT. Jamsostek (Persero) tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	HONORARIUM	TUNJANGAN KOMUNIKASI	IURAN JAMSOSTEK	THP BULANAN	THP SETAHUN	THR TAHUN 2013	TANTIEM	TOTAL PENGHASILAN
1	Denny Indrayana	48,000,000	2,400,000	960,000	49,440,000	593,280,000	86,400,000	938.157.661	1.617.837.661
2	Herman Hidayat	43,200,000	2,160,000	864,000	44,496,000	533,952,000	86,400,000	941.261.388	1.561.613.388
3	Mathias Tambing	43,200,000	2,160,000	864,000	44,496,000	533,952,000	86,400,000	946.340.103	1.566.692.103
4	Iskandar Maula	43,200,000	2,160,000	864,000	44,496,000	533,952,000	86,400,000	946.340.103	1.566.692.103
5	Bambang Wirahyoso	43,200,000	2,160,000	864,000	44,496,000	533,952,000	86,400,000	946.340.103	1.566.692.103
6	Hariyadi B. Sukamdani	43,200,000	2,160,000	864,000	44,496,000	533,952,000	86,400,000	946.340.103	1.566.692.103
	JUMLAH	**264,000,000**	**13,200,000**	**5,280,000**	**271,920,000**	**3,263,040,000**	**518,400,000**	5.664.779.462	9.446.219.462

Frekuensi, Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali, dan rapat gabungan minimal 1 (satu) bulan sekali. Namun Dewan Komisaris selalu mengupayakan untuk mengadakan rapat diatas ketentuan minimal.

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Gabungan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rata-rata tingkat kehadiran sebesar 75%, sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan Selama Tahun 2013

No	Nama	Jumlah Rapat Gabungan	Jumlah Kehadiran	Prosentase (%)
1	Bambang Subianto (*)	12	1	3
2	Herry Purnomo (**)	12	3	25
3	Denny Indrayana	12	6	50
4	Herman Hidayat	12	10	83.33
5	Bambang Wirahyoso	12	12	100
6	Hariyadi BS Sukamdani	12	9	75
7	Iskandar Maula	12	11	91.67
8	Mathius Tambing	12	7	58.33
Rata-rata Tingkat Kehadiran		12	9	75

(*) Masa bakti berakhir pada tanggal 20 Februari 2013
(**) Masa bakti berakhir pada tanggal 07 Oktober 2013

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat internal sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan rata-rata tingkat kehadiran sebesar 76.50%, sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Internal Selama Tahun 2013

No	Nama	Jumlah Rapat Internal	Jumlah Kehadiran	Prosentase (%)
1	Bambang Subianto (*)	17	-	0
2	Herry Purnomo (**)	17	5	24.41
3	Denny Indrayana	17	9	52.94
4	Herman Hidayat	17	14	82.35
5	Bambang Wirahyoso	17	17	100
6	Hariyadi BS Sukamdani	17	15	88.23
7	Iskandar Maula	17	14	82.35
8	Mathius Tambing	17	9	52.94
Rata-rata Tingkat Kehadiran		17	13	76.50

(*) Masa bakti berakhir pada tanggal 20 Februari 2013
(**) Masa bakti berakhir pada tanggal 07 Oktober 2013

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Gabungan dengan 12 (dua belas) agenda, sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Rapat Gabungan Selama Tahun 2013

No	Tanggal Rapat	Jenis Rapat	Agenda Rapat
1.	29-Jan-13	Rapat dengan Direksi	1. Perkenalan dengan Anggota Dewan Komisaris yang baru 2. *Progress* transformasi menuju BPJS 3. Informasi tentang RKAP 2013 yang sudah disahkan 4. Lain-lain
2.	05-Feb-13	Rapat dengan Direksi	1. Pembahasan program pengenalan untuk Dewan Komisaris PT Jamsostek 2. Lain-lain
3.	13-Mar-13	Rapat dengan Direksi	1. Program Pengenalan 2. RJPP tahun 2013-2017 3. Progress Persiapan Transformasi menjadi BPJS 4. Dan lain lain
4.	16-Apr-13	Rapat dengan Direksi	1. Pembahasan laporan keuangan sampai dengan triwulan I 2013 2. Permasalahan perpajakan 3. Progress transformasi BPJS 4. Pembahasan hasil *self assessment* GCG tahun 2012 5. Lain-lain
5.	21-Mei-13	Rapat dengan Direksi	1. Progress persiapan transformasi BPJS Ketenagakerjaan 2. Usulan revisi ketentuan jasa administrasi pinjaman program DPKP bergilir 3. Usulan persetujuan peningkatan cadangan umum atas koreksi penyajian kembali laba tahun 2012 sebesar Rp 60 Milion 4. Usul persetujuan penghapusbukuan MTN PT Prima Adiperkasa sebesar Rp 12,8 Milion 5. Lain-lain

Tabel Agenda Rapat Gabungan Selama Tahun 2013

No	Tanggal Rapat	Jenis Rapat	Agenda Rapat
6.	18-Jun-13	Rapat dengan Direksi	1. Progress persiapan transformasi BPJS Ketenagakerjaan 2. Lain-lain
7.	30-Jul-13	Rapat dengan Direksi	1. Surat Direksi nomor: B/6638/072013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Permohonan ijin Penunjukan Kepala BPI; 2. Laporan triwulan I Kegiatan Dewan Komisaris; 3. Laporan Komite Audit tentang agenda Konsinyering dengan BPI tanggal 18-20 Juli 2013; 4. Catatan mengenai pelaksanaan restrukturisasi organisasi dan mutasi serta pembukaan *outlet* pada beberapa bank; 5. *Update* situasi karyawan *outsorcing* PT Jamsostek (Persero) 6. Lain-lain
8.	27-Agust-13	Rapat dengan Direksi	1. *Progress* tindak lanjut hasil Evaluasi Sistem Pengendalian *Intern* tahun 2012 dan rekomendasi strategis tindak lanjut pembenahan kualitas data kepesertaan 2. *Progress* tindak lanjut hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI tertanggal 29 Juli 2013 atas pemeriksaan laporan keuangan TB 2011 dan kinerja JHT tahun 2010 dan tahun 2011 3. Kinerja PT Jamsostek sampai dengan Juli 2013 4. Progres persiapan transformasi BPJS Ketenagakerjaan 5. Lain-lain
9.	24-Sep-13	Rapat dengan Direksi	1. Kinerja anak perusahaan tahun 2013 2. *Update progress* pengalihan program JPK 3. Persiapan RKAP 2014, audit laporan keuangan tahun 2013 dan neraca penutup. 4. Kelangsungan program DPKP 5. Progress persiapan transformasi BPJS Ketenagakerjaan 6. Lain-lain
10.	22-Okt-13	Rapat dengan Direksi	1. Progress persiapan transformasi BPJS Ketenagakerjaan 2. Kinerja perusahaan sampai dengan September 2013 dan RKAP 2014 3. Pembahasan substansi PP dan Perpres pada BPJS 4. Pembahasan manajemen risiko PT Jamsostek (Persero) 5. Lain-lain
11.	26-Nop-13	Rapat dengan Direksi	1. *Update Progress* persiapan transformasi BPJS Ketenagakerjaan 2. Kinerja perusahaan s.d Oktober 2013 3. KPI 4. Perkembangan RKAP 2014 5. Lain-lain
12.	24-Des-13	Rapat dengan Direksi	1. *Update progress* persiapan transformasi BPJS Ketenagakerjaan 2. Kinerja perusahaan sampai dengan Nopember 2013 3. *Update* regulasi terkait transformasi BPJS 4. *Update* tindak lanjut pengalihan tugas wewenang Direksi dan Dewan Komisaris 5. Peraturan Direksi terkait dengan operasional BPJS Ketenagakerjaan 6. Pengesahan RKA BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014 7. Lain-lain

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Internal dengan 17 (tujuh belas) agenda, sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris Selama Tahun 2013

No	Tanggal Rapat	Jenis Rapat	Agenda Rapat
1.	19-Feb-13	Rapat Internal	1. Surat Direksi Nomor: B/463/012013 tanggal 14 Januari 2013 perihal Struktur Organisasi PT Jamsostek (Persero) 2. Surat Direksi Nomor: B/943/012013 tanggal 28 Januari 2013 perihal Rekomendasi Terhadap Penghapusbukuan Gedung Kantor Cabang Tangerang I Dibongkar untuk dibangun kembali pasca kebakaran 3. Surat Direksi Nomor: B/1366/022013 tanggal 03 Pebruari 2013 perihal Kajian Hukum atas Penetapan Saldo Dana Pengembangan Non JHT 4. Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris 5. Pemilihan Ketua Komite Audit 6. Dan Lain-Lain.
2.	26-Feb-13	Rapat Internal	1. Perkenalan dgn Komisaris Utama 2. Pembagian Kerja Anggota Komisaris 3. Dan Lain-Lain
3.	13-Mar-13	Rapat Internal	1. Penyempurnaan Pembagian Kerja 2. Mekanisme untuk hal-hal yang rutin 3. Dan Lain-Lain
4.	26-Mar-13	Rapat Internal	1. Laporan Rapat tanggal 13 Maret 2013 a. Rapat Internal • Pembagian Tugas Dewan Komisaris telah disepakati b. Rapat dengan Direksi • Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2013-2017 • Progress persiapan transformasi menjadi BPJS 2. Laporan Ketua Komite Audit mengenai: a. RJPP b. Audit tahun buku 2012 3. Surat Direksi Nomor: B/2682/032013 perihal Permohonan Persetujuan Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap Kendaraan Kantor Pusat 4. Surat Direksi Nomor: B/2883/032013 perihal Penyampaian Pengalihan Biaya Penyediaan Fasilitas kendaraan dari *Capital Expenditure* ke *Operating Expenditure* 5. Direksi telah menyampaikan Kajian Hukum atas Penetapan Saldo Dana Pengembangan Non JHT, sesuai permintaan Dewan Komisaris dengan surat nomor: 11/DK/022013
5.	16-Apr-13	Rapat Internal	1. Laporan Ketua Komite Audit mengenai: a. *Progress Audit* oleh KAP b. Rencana Kerja Komite Audit c. Permintaan Rekomendasi Pengalihan Saldo Non JHT menjadi Cadangan 2. Surat Direksi nomor: B/2096/032013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran antar sub mata anggaran Belanja Modal 3. Laporan Hasil *Assessment* GCG 4. Lain-lain

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris Selama Tahun 2013

No	Tanggal Rapat	Jenis Rapat	Agenda Rapat
6.	30-Apr-13	Rapat Internal	1. Diskusi persiapan program BPJS dengan Bapak Bambang Subianto 2. Laporan Komite Audit Triwulan I tahun 2013 3. Persiapan rekomendasi KAP tahun buku 2013 (audit Neraca Penutup) 4. Rencana audiensi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Lain-lain
7.	21-Mei-13	Rapat Internal	*Closing* Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2012
8.	18-Jun-13	Rapat Internal	1. Laporan Komite Audit 2. Pembahasan usulan mengenai kebijakan *outsorcing*
9.	16-Jul-13	Rapat Internal	1. Surat Direksi nomor: B/6638/072013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Permohonan ijin Penunjukan Kepala BPI; 2. Laporan TW I Kegiatan Dewan Komisaris; 3. Laporan Komite Audit tentang agenda Konsinyering dengan BPI tanggal 18-20 Juli 2013; 4. Catatan mengenai pelaksanaan restrukturisasi organisasi dan mutasi serta pembukaan *outlet* pada beberapa bank; 5. *Update* situasi karyawan *outsorcing* PT Jamsostek (Persero). 6. Lain-lain.
10.	30-Jul-13	Rapat Internal	1. Surat Direksi nomor: B/6638/072013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Permohonan ijin Penunjukan Kepala BPI; 2. Laporan TW I Kegiatan Dewan Komisaris; 3. Laporan Komite Audit tentang agenda Konsinyering dengan BPI tanggal 18-20 Juli 2013; 4. Catatan mengenai pelaksanaan restrukturisasi organisasi dan mutasi serta pembukaan *outlet* pada beberapa bank; 5. *Update* situasi karyawan *outsorcing* PT Jamsostek (Persero) 6. Lain-lain.
11.	20-Agust-13	Rapat Internal	1. Tanggapan Komite Audit atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern tahun 2012 dan rekomendasi strategis tindak lanjut pembenahan kualitas data kepesertaan 2. Hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI tertanggal 29 Juli 2013 atas pemeriksaan laporan keuangan TB 2011 dan kinerja JHT TB 2010 dan SM I/2011; 3. Lain-lain.
12.	27-Agust-13	Rapat Internal	1. Persiapan Rumusan Arahan Dewan Komisaris dalam Rakernas Jamsostek Tahun 2013 2. Refresh Hasil Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Agustus 2013 mengenai tanggapan Komite Audit atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern tahun 2012 dan rekomendasi strategis tindak lanjut pembenahan kualitas data kepesertaan serta hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI tertanggal 29 Juli 2013 atas pemeriksaan laporan keuangan TB 2011 dan kinerja JHT TB 2010 dan SM I/2011; 3. Lain-lain.

Tabel Agenda Rapat *Internal* Dewan Komisaris Selama Tahun 2013

No	Tanggal Rapat	Jenis Rapat	Agenda Rapat
13.	10-Sep-13	Rapat Internal	1. *Review* hasil agenda rapat Dekom atau rapat gabungan bulan sebelumnya; 2. Laporan Komite Audit atas persiapan *general* audit dan audit neraca penutupan dan pembukaan; 3. Perpanjangan masa bakti anggota Komite Audit dan penetapan Komite Manajemen Risiko; 4. Perumusan/kebijakan terkait Tupoksi Dewan Pengawas BPJS, dengan referensi dari board manual Dekom dan UU BPJS; 5. Lain-lain.
14.	24-Sep-13	Rapat Internal	1. *Review* hasil agenda Rapat Dekom bulan sebelumnya 2. Pandangan Dewan Komisaris atas draft Tupoksi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan 3. Pembahasan RKA Dewan Pengawas tahun 2014 4. Surat Pemegang Saham atas Tanggapan Semester I/2013 5. Audiensi dengan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko 6. Fasilitas dan Tunjangan yang didapatkan oleh Dewan Komisaris 7. Agenda Ragab dengan Direksi 8. Lain-lain
15.	08-Okt-13	Rapat Internal	1. *Review* hasil agenda Ragab atau Rapat Dewan Komisaris bulan sebelumnya 2. Perumusan kebijakan terkait Tupoksi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dengan referensi dari *Board Manual* Dekom dan UU BPJS 3. Laporan hasil kunjungan kerja Dekom ke Makasar dan Ambon 4. Undangan Dirut untuk menghadiri ASSA *Board Meeting* di Laos 5. Lain-lain
16.	26-Nop-13	Rapat Internal	1. Review hasil agenda rapat Dekom atau rapat gabungan bulan sebelumnya; 2. Tanggapan atas Kinerja PT Jamsostek TW III/2013; 3. Permohonan Direksi untuk revisi belanja modal terkait program *rebranding*; 4. Agenda Rapat Gabungan; 5. Lain-lain.
17.	17-Des-13	Rapat Internal	1. Pembahasan Pengalihan Dana Program Kemitraan dan Penyaluran Bina Lingkungan 2. Pergeseran anggaran belanja modal 3. Penghapusbukuan kendaraan 4. Tanggapan Dekom atas RKAP 2014 5. Lain-lain

Program Pengembangan

Dalam rangka menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris, dengan surat nomor: 38/DK/052013 tanggal 21 Mei 2013, Komisaris, yaitu Bambang Wirahyoso, telah mengikuti Seminar dan Munas FKSPI di Medan tanggal 29-31 Mei 2013, dilanjutkan pada tanggal21 Desember 2013 mengikuti Seminar Implementasi Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG di Batam dengan surat nomor: 100/DK/122013 tanggal 19 Desember 2013.

Komisaris Independen

1. Kriteria Komisaris Independen
   Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Pernyataan Independensi Komisaris Independen
   PenetapanKomisaris Independen dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No.SK-155/MBU/2013, Keputusan Menteri BUMN No.SK-368/MBU/2013 dan Keputusan Menteri BUMN SK-430/MBU/2013 menetapkan bahwa Komisaris Independen yaitu : Bambang Wirahyoso dan Hariyadi BS Sukamdani yang telah memenuhi kriteria Komisaris Independen.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi mencakup antara lain pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan anggaran dasar Perusahaan, Keputusan RUPS dan memantau efektifitas penerapan GCG, Manajemen Risiko dan *Information and Technology Governance* yang diterapkan Perusahaan.

1. Fungsi
   Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris memliki fungsi sebagai berikut :
   a. Mematuhi perturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Perusahaan.
   b. Bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus dan jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
   c. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utama, jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku
   d. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas eksekutif kecuali dalam hal Perusahaan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi.
   e. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang memintakan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara proaktif, yang mencakup semua aspek bisnis Perusahaan.

2. Tugas
   Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris memiliki tugas antara lain :
   a. Menyelenggarakan program pengenalan bagi angota Dewan Komisaris yang baru dan menyelenggarakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris secara berkelanjutan yang direalisasikan sesuai Rencana Kerja dan AnggaranTahunan (RKAT) Dewan Komisaris.
   b. Menelaah, menganalisa dan memberikan persetujuan berbagai usulan Direksi yang bersifat strategis dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan.
   c. Menyusun, menetapkan dan menyampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RKAT Dewan Komisaris setiap tahun sebagai bagian dari RKAP, yang memuat antara lain:
      1) Sasaran/target yang ingin dicapai.
      2) Indikator kinerja utama yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat.
      3) Kegiatan-kegiatan lain yang relevan dan menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
   d. Mengevaluasi dan memberikan arahan secara berkala terhadap hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan secara tepat waktu dan relevan.
   e. Mengawasi, mengevaluasi dan memberikan arahan secara berkala terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern Perusahaan meliputi antara lain :
      1) Penguatan rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.
      2) Efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas.
      3) Efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas.
   f. Mengawasi dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris.
   g. Mengawasi, mengevaluasi dan memberikan arahan secara berkala terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan terutama terkait hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya.
   h. Mengawasi, mengevaluasi dan memberikan arahan secara berkala terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir, khususnya tentang :
      1) Pelaksanaan sistem manajemen karir serta pelaksanaan sistem promosi, mutasi dan demosi di Perusahaan pada jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan.
      2) Kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.
   i. Mengawasi, mengevaluasi dan memberikan arahan secara berkala terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
   j. Mengawasi, mengevaluasi dan memberikan arahan secara berkala terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa.
   k. Mengawasi, mengevaluasi dan memberikan arahan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan mutu dan pelayanan.
   l. Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-

undangan yang mengatur bisnis Perusahaan, anggaran dasar Perusahaan serta kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.

m. Mengawasi dan memantau kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan Perusahaan sesuai RJPP dan RKAP.
n. Mengawasi, mengevaluasi dan memberikan arahan secara berkala terhadap kebijakan pengelolaan anak Perusahaan.
o. Mengawasi, memantau dan memastikan efektivitas penerapan pedoman GCG dan pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan GCG, memantau tindak lanjut/*area of improvement* hasil *assessment/review* GCG.
p. Memastikan pedoman GCG, pedoman perilaku (*code of conduct*) maupun pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan GCG ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.
q. Melakukan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris setiap tahun.
r. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang mengundang kehadiran Direksi (Rapat Gabungan).
s. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi dan/atau menugaskan Komite Audit untuk melakukan tugas pengawasan.

3. Wewenang
   Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris memiliki wewenang sebagai berikut :
   a. Memperoleh akses mengenai Perusahaan dan memperoleh informasi secara berkala, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
   b. Merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Pemangku Kepentingan (pelanggan, pemasok, kreditur dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.
   c. Melaksanakan - proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukkan kembali auditor eksternal dan mengajukan usulan calon Auditor Eksternal kepada RUPS disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa.
   d. Mengajukan calon angggota Dewan Komisaris- dan anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.
   e. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jika bertindak bertentangan dengan anggaran dasar Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan.
   f. Melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi berdasarkan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam kontak manajemen Direksi baik secara kolegial maupun secara individual serta melaporkan hasil penilaian kinerja tersebut kepada Pemegang Saham.
   g. Melakukan penilaian dan menyetujui Struktur organisasi Perusahaan yang disampaikan oleh Direksi.
   h. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala Biro Sekretariat Perusahaan dan Kepala Biro Pengawasan Intern yang diusulkan oleh Direksi berdasarkan mekanisme internal Perusahaan.
   i. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, anggota Komite Audit dan staf Sekretariat Dewan Komisaris.
   j. Memantau segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi dengan meminta penjelasan dari Direksi/ atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
   k. Mewakili Perusahaan apabila terdapat peristiwa penting sehingga kepentingan Perusahaan berbenturan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi.
   l. Meminta Direksi dan/atau pejabat lain di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
   m. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
   n. Bersama Direksi mengusulkan kepada RUPS besaran dan jenis penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan dan penilaian kinerja untuk mendapatkan persetujuan
   o. Menetapkan sistem dan prosedur tatakerja dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris.
   p. Menugaskan Komite Audit untuk melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Audit.
   q. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perusahaan, dan/atau keputusan RUPS.

Laporan Pelaksanaan Tugas

Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan tanggapan yang terkait dengan pelaksanaan RUPS

1. Pokok-pokok tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2013
   a. Penyesuaian rencana jangka panjang perusahaan, mengingat transformasi menjadi BPJS membutuhkan perubahan strategi yang sangat fundamental.
   b. Memperkuat pondasi yang ada yaitu investment dan infrastruktur yang terdiri dari data *warehouse, customer relation system* dan *business process*.
   c. Penyelesaian proses her-registrasi hendaknya dilaksanakan secara cermat dan terpadu terutama pelaksanaan teknis di lapangan yaitu koordinasi antar unit, sehingga tidak terulang

lagi ksalahan masa lalu seperti 1 peserta memiliki lebih dari 1 kartu.

d. Pelaksanaan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong penyelesaian proses her-registrasi agar dijalankan secara optimal. Selain itu persiapan pembentukan nomor identitas tunggal kepada peserta terintegrasi dengan NIK (Nomor Identitas Kependudukan) dan disesuaikan dengan kepesertaan yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan.
e. Penambahan kepesertaan perlu diwaspadai karena ternyata penambahan peserta aktif lebih kecil dibandingkan dengan penambahan kepesertaan non aktif, perlu dilaksanakan langkah-langkah yang lebih fokus yaitu mempertahankan peserta aktif dengan memberikan pelayanan yang memuaskan peserta dan mengupayakan peserta non aktif menjadi aktif.
f. Melakukan kajian atas aktiva investasi yang ada, sehingga untuk aktiva yang bermasalah dapat segera diselesaikan berdasarkan prosedur dan hukum yang berlaku, sedangkan untuk aktiva yang belum produktif dapat segera dibuatkan rencana optimalisasi atas aktiva tersebut seperti aset properti dan lahan.
g. Untuk meningkatkan kompetensi, perlu dilakukan pelatihan secara berkesinambungan dan diberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan, serta pemberian *reward* and *punishment* yang dapat mendorong karyawan untuk menunjukkan kinerjanya.
h. Melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan melakukan analisis jabatan, *job evaluation*, sistem karir dan kamus kompetensi diharapkan dapat membangun organisasi yang efektif.
i. Pelaksanaan mutasi dan promosi perlu dilakukan secara transparan dan bersifat obyektif berdasarkan hasil *assessment* yang dilakukan dengan memperhatikan kinerja, pengalaman kerja, kompetensi sehingga setiap penempatan SDM mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan lebih produktif dalam upaya untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan.
j. Khusus mengenai program pensiun, Dewan Komisaris menyarankan agar sangat berhati-hati terutama untuk tidak menggunakan pengertian manfaat pasti sesuai UU Dana Pensiun, agar tidak terjebak dalam kesulitan yang tidak berujung seperti menghitung tingkat solvensi dan kalau tidak cukup siapa yang akan diminta untuk mencukupinya. Di samping itu pola tersebut penuh dengan ketidakpastian. Jadi Dewan Komisaris perlu menegaskan kembali agar Direksi menyikapi terminologi atau istilah manfaat pasti dalam UU BPJS.
k. Segera menuntaskan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan, baik temuan dari eksternal auditor maupun dari internal audit dengan menetapkan batas waktu penuntasannya.

2. Pokok-pokok Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan tahun Buku 2013
   a. Upaya yang dilakukan oleh Direksi untuk mendukung visi perusahaan diantaranya dengan penyediaan Pusat Pelayanan Informasi Program Jamsostek (*call center*),kerjasama dengan perbankan dalam sistem informasi JHT dan pembayaran iuran melalui ATM serta Jamsostek Service *Point Office* (JSPO). Dewan Komisaris mengharapkan agar usaha yang telah dilakukan selama ini dapat berkelanjutan dan terus meningkat untuk mendukung visi BPJS Ketenagakerjaan.
   b. Dalam kaitannya dengan misi perusahaan, kontribusi perusahaan telah dilakukan kepada peserta dan masyarakat selama ini melalui program Jamostek, DPKP dan PKBL untuk mewujudkan misi BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi tenaga kerja, pengusaha dan Negara. Kelanjutan program DPKP melalui program manfaat layanan tambahan dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perlu dipersiapkan dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat bagi seluruh *stakeholders*.
   c. Memberikan apresiasi kepada manajemen atas Opini Auditor Eksternal "Wajar Tanpa Pengecualian" walaupun dengan adanya paragraf tambahan yang menjelaskan situasi yang dihadapi PT. Jamsostek (Persero) di tahun buku 2013.
   d. Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Oleh karena itu untuk semua temuan audit hendaknya segera ditindaklanjuti.
   e. Mengembangkan strategi alokasi aset yang memberikan tingkat penghasilan yang optimal namun *prudent* dan tetap memenuhi kaidah-kaidah kebijakan investasi dan manajemen resiko.
   f. Peningkatan piutang iuran perlu diwaspadai karena menunjukkan kemungkinan terjadinya penambahan kepesertaan yang non aktif semakin meningkat. Untuk ke depannya manajemen dalam mengelola program non JHT agar mengadakan pembenahan sistim dan prosedur secara berkesinambungan.
   g. Untuk pelaksanaan UU BPJS, Direksi diminta untuk menyelesaikan dan mengatasi semua permasalahan yang ada seperti dalam mengelola kepesertaan, sistem akuntansi terutama mengenai proses penyelesaian perusahaan, aset, dan sebagainya.
   h. Untuk meningkatkan efisiensi biaya perlu menetapkan skala prioritas dan menyiapkan pelaksanaan Belanja Modal secara lebih dini,

sehingga dapat direalisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

i. Perlu diadakan review secara menyeluruh atas implementasi SIPT Online, baik SOP IT maupun sarana pendukung, infrastruktur dan sistem aplikasi sehingga akurasi data dapat ditingkatkan. Demikian juga atas strategi pengembangan sumber daya manusia, khususnya tenaga pemasaran di lapangan guna mengoptimalkan pengelolaan kepesertaan dan pemberian pelayanan kepada peserta.

j. Usaha dan strategi untuk peningkatan kuantitas kepesertaan hendaknya dilakukan dengan mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan dan penciptaan image building secara lebih profesional untuk menciptakan kebutuhan dasar akan *social security,* dengan meningkatkan hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Daerah dan institusi lainnya.

k. Perbaikan sistem pengelolaan data kepesertaan harus segera diselesaikan dengan perencanaan dan penjadwalan yang terstruktur dengan jelas atas program kerja dan target waktunya.

l. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan hendaknya dilakukan secara terkoordinasi.

3. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris lainnya

a. Melakukan kunjungan kerja sebanyak 8 kali ke beberapa wilayah operasional PT Jamsostek (Persero), dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atas kemajuan / perkembangan operasional perusahaan secara nyata dan menginventarisir permasalahan yang sering muncul di cabang.

b. Sehubungan dengan surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: tanggal: perihal Usulan Penempatan Sekretaris Dewan Komisaris sebagai pemenuhan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN, Dewan Komisaris telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Kementerian BUMN dengan nomor 09/DK/022013 tanggal 19 Februari 2013 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero).

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) persetujuan RKAP 2013 mengamanatkan Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi terkait usulan Direksi terhadap penghapusbukan Gedung Kantor Cabang Tangerang I. Atas usulan tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi melalui surat nomor: 10/DK/022013 tanggal 19 Februari 2013 dan ditujukan kepada Sekretaris Kementerian BUMN.

d. Dewan Komisaris melalui surat nomor: 11/DK/022013 tanggal 19 Februari 2013 telah memberikan rekomendasi terkait dengan Kajian Kebutuhan atas Penerapan Saldo Dana Pengembangan Non JHT yang dibuat oleh Direksi guna menjadi agenda dalam RUPS pengesahan laporan audit tahun buku 2012 untuk mendapatkan keputusan.

e. Berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan, perubahan struktur organisasi memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, sehingga melalui surat nomor: 12/DK/022013 tanggal 19 Februari 2013 telah menyetujui struktur organisasi PT Jamsostek (Persero) yang baru.

f. Sehubungan dengan *assessment* GCG tahun 2012 yang dilakukan secara mandiri oleh PT Jamsostek (Persero), Dewan Komisaris telah melakukan konsinyering yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Februari 2013 bertempat di Bandung dengan mengundang Direksi dan Biro Sekretariat Perusahaan guna mendapatkan dan mengklarifikasi hal-hal yang diperlukan terkait dengan nilai GCG Dewan Komisaris.

g. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Laporan Keuangan perusahaan tahun buku 2012 mengamanatkan Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi terkait dengan usulan Direksi yaitu:
   - Penghapusan MTN PT Hati Prima Perdasa sebesar Rp 12,8 Milyar;
   - Penggunaan cadangan umum untuk menutupi kekurangan saldo laba tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp 60.479.667.431,-;
   - Penambahan modal disetor yang berasal dari konversi cadangan umum sebesar Rp 2,5 Triliun dan peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp 3 Triliun menjadi Rp 8 Triliun.

   Atas usulan tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi melalui surat nomor: 43/DK/062013 tanggal 13 Juni 2013 yang ditujukan kepada Menteri BUMN.

   a) Dewan Komisaris melalui surat nomor: 24/DK/042013 tanggal 11 April 2013 telah memberikan rekomendasi terkait dengan pengalihan biaya penyediaan kendaraan dari *capital expenditure* menjadi *operating expenditure* yang dibuat oleh Direksi.

   b) Berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan, penghapusbukuan aset tetap yang mempunyai umur ekonomis di bawah 5 tahun memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, sehingga melalui surat nomor: 25/DK/042013 tanggal 11 April 2013 Dewan Komisaris telah menyetujui usulan Direksi untuk melakukan penghapusbukuan aset tetap kendaraan dinas Kantor Pusat.

   c) Sehubungan dengan adanya rencana Direksi untuk melakukan reklasifikasi saldo dana pengembangan non JHT, Dewan

Komisaris melalui surat nomor: 26/DK/042013 tanggal 11 April 2013 telah menyampaikan hasil kajian hukum atas rencana tersebut kepada Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, dengan kesimpulan pendapat bahwa:

- Pemindahan (sebagian) Dana Pengembangan Non JHT ke akun Cadangan Umum tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Jamsostek (Persero),
- Sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Jamsostek (Persero) bahwa Direksi dapat mengusulkan pemindahan (reklas) tersebut untuk disahkan dalam RUPS.

Sehingga Dewan Komisaris merekomendasikan reklas atau pemindahan dari akun Dana Pengembangan Non JHT (pos liabilitas) ke akun Cadangan Umum (pos ekuitas) sebesar Rp.1.198.421.605.861 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

d) Salah satu tugas Dewan Komisaris berdasarkan *board manual* PT Jamsostek (Persero) adalah memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP. Terkait dengan penyusunan RJPP PT Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2013-2017 tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan melalui surat nomor: 28/DK/042013 tanggal 17 April 2013 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT Jamsostek (Persero)

e) Terkait dengan usulan Direksi untuk melakukan pergeseran anggaran antar sub mata anggaran belanja modal tahun 2013, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuannya melalui surat nomor: 29/DK/042013 tanggal 17 April 2013.

f) Dengan telah dilaksanakannya audit terhadap Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2012, Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas Laporan Keuangan tersebut kepada Menteri BUMN melalui surat nomor: 34/DK/052013 tanggal 2 Mei 2013.

g) Sehubungan dengan rencana Direksi untuk mendirikan *Indonesia Investment Company* (IIC) atau *Jamsostek Investment Company* (JIC), Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi terkait permohonan tersebut melalui surat nomor: 41/DK/062013 tanggal 13 Juni 2013 dimana Dewan Komisaris berpendapat bahwa pendirian IIC/JIC ditunda sampai dengan ada kejelasan dalam Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU SJSN / UU BPJS mengenai kewenangan BPJS dalam melakukan investasi / penyertaan langsung.

h) Dewan Komisaris melalui surat nomor: 42/DK/062013 tanggal 13 Juni 2013 telah memberikan persetujuan penunjukan Kepala Biro Sekretariat Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN bahwa pengangkatan Sekretaris Perusahaan memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

i) Dewan Komisaris melalui surat nomor: 46/DK/072013 tanggal 09 Juli 2013 telah memberikan rekomendasi terkait dengan usulan revisi ketentuan jasa administrasi pinjaman program DPKP Bergulir yang dibuat oleh Direksi.

j) Sebagai tindak lanjut Arahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Laporan Keuangan perusahaan tahun buku 2012, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi terkait dengan usulan Direksi melalui surat nomor: 47/DK/072013 tanggal 11 Juli 2013.

k) Sehubungan dengan adanya pengaduan/keluhan dari perwakilan tenaga kerja *outsourcing* kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja *outsourcing*, maka mengingat isu ini bisa menjadi krusial, Dewan Komisaris melalui surat nomor: 48/DK/072013 tanggal 11 Juli 2013 , telah meminta kepada Direksi untuk menyelesaikan masalah yang masih timbul dengan sebaik-baiknya.

l) Atas usulan Direksi untuk rencana penghapusbukuan aset tetap kendaraan dinas operasional di Kantor Pusat sebanyak 21 unit, berdasarkan pertimbangan yang ada, Dewan Komisaris melalui surat nomor 59/DK/082013 tanggal 13 Agustus 2013 telah memberikan persetujuan dimana pelaksanaannya agar memenuhi ketentuan.

m) Memperhatikan kewenangan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bahwa pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Intern memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, maka melalui surat nomor: 60/DK/082013 tanggal 15 Agustus 2013, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas penunjukan Kepala Biro Pengawasan Intern.

n) Untuk pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG maka Dewan Komisaris melalui surat nomor: 70/DK/092013 tanggal 24 September 2013 telah meminta bantuan Direksi untuk dapat melakukan proses penunjukan Konsultan Penilai (*Assessor*) terkait dengan penilaian

(*Assessment*) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada PT Jamsostek (Persero) tahun buku 2013.

o) Memperhatikan Keputusan Direksi nomor: Kep/264/072013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perawatan dan Pengobatan bagi Mantan Direksi PT Jamsostek (Persero), melalui surat nomor 68/DK/092013 tanggal 18 September 2013, Dewan Komisaris meminta Direksi mengkaji kembali atas Keputusan dimaksud sesuai dengan peraturan Menteri BUMN yang mengatur pedoman penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

p) Meneruskan surat keluhan pengaduan dari peserta kepada Direksi untuk ditindaklanjuti, melalui surat Dewan Komisaris nomor 74/DK/092013 tanggal 30 September 2013.

q) Untuk optimalisasi penyerapan anggaran belanja modal yang sampai dengan bulan Agustus 2013 baru mencapai 27,78% dari RKAP 2013, dimana anggaran belanja modal tidak terserap optimal karena beberapa pekerjaan masih dalam tahap perencanaan dan proses pengadaan, Direksi mengusulkan mengalihkan beberapa rencana kerja belanja modal kepada kegiatan yang dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2013 dan juga dan dukungan pelayanan prima implementasi hasil *re-branding*. Berdasarkan pertimbangan Direksi dimaksud, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan revisi anggaran belanja modal melalui surat nomor: 73/DK/092013 tanggal 30 September 2013.

r) Sehubungan dengan masalah kekurangan beban usaha Rp 31,79 Milyar sebagai akibat pemberian pesangon untuk tenaga kerja outsourcing PT Jamsostek yang tidak dapat diangkat menjadi pegawai tetap sesuai UU Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Menakertrans nomor 19 tahun 2012, Dewan Komisaris PT Jamsostek telah memberikan dukungan melalui surat nomor: 75/DK/102013 tanggal 4 Oktober 2013.

s) Dewan Komisaris melalui surat nomor 85/DK/102013 tanggal 31 Oktober 2013 telah memberikan persetujuan penunjukan Konsultan Sodiq Purwoko sebagai *assessor independen* untuk pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di PT Jamsostek tahun 2013.

t) Terkait dengan rencana penerbitan logo BPJS Ketenagakerjaan yang anggarannya belum masuk dalam RKAP tahun 2013, Dewan Komisaris menyetujui pergeseran anggaran antar mata anggaran belanja modal untuk kebutuhan logo BPJS Ketenagakerjaan dengan sebelumnya dimintakan klarifikasi, melalui surat nomor 99/DK/112013 tanggal 29 November 2013.

u) Sebagaimana anggaran dasar perusahaan, Dewan Komisaris melalui surat nomor 98/DK/122013 tanggal 17 Desember 2013 telah memberikan persetujuan penghapusbukuan aset tetap kendaraan dinas roda empat dan roda dua dengan didahului permintaan klarifikasi terhadap Direksi melalui surat nomor 95/DK/112013 tanggal 29 Nopember 2013.

v) Dewan Komisaris melalui surat nomor 97/DK/122013 tanggal 17 Desember 2013 telah menyampaikan rekomendasi atas Rencana Pengalihan Dana Program Kemitraan dan Rencana Kerja Program Bina Lingkungan PT Jamsostek (Persero) yang pada intinya mendukung usulan Direksi.

w) Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap Hasil Evaluasi Triwulan I, II, dan III tahun 2013 PT Jamsostek sebagaimana surat Dewan Komisaris masing-masing Nomor: 54/DK/072013 tanggal 29 Juli 2013, 56/DK/072013 tanggal 31 Juli 2013, 80/DK/102013 tanggal 17 Oktober 2013.

4. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Sebagaimana kebijakan penilaian KPI Dewan Komisaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, bahwa RUPS menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris pada setiap awal tahun menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan atas dasar RKAT, Dewan Komisaris menyusun KPI untuk diusulkan dan ditetapkan oleh RUPS. Dewan Komisaris pada setiap awal tahun berikutnya menyusun laporan tahunan pengawasan dan melakukan penilaian KPI secara *Self Assessment* untuk disampaikan kepada Pemegang Saham yang akan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. KPI tertuang dalamKontrak Manajemen antara Kuasa Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2013

Dewan Komisaris telah berupaya melaksanakan KPI secara optimal dengan hasil pencapaian berdasarkan penilaian *self assessment* tahun 2013 dengan nilai/skor sebesar 96,60, dengan tabel sebagai berikut:

No	ASPEK DAN PARAMETER	PERIODE	SATUAN	BOBOT	RENCANA	REALISASI S/D TW IV	
						REAL	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. Aspek Infrastruktur							
	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris Tahun 2014						
Sub Total I				**10**			**10.00**
II. Aspek Pengawasan dan Nasehat							
1.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap :						
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2014		Surat	6	1	1	6.00
	b. Laporan Tahunan TB 2013	Tahunan	Surat	6	1	1	6.00
	c. Analisis kinerja triwulanan	Triwulanan	Surat	4	4	4	4.00
2.	Memberikan persetujuan atau pendapat atas usulan Direksi yang merupakan wewenang Dewan Komisaris		%	2	100	100	2.00
3.	Rapat Dewan Komisaris						
	a. Jumlah rapat	Bulanan	kali	4	12	21	4.00
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	2	100	90	1.80
	c. Penyelesaian risalah rapat	Bulanan	Risalah	3	12	21	3.00
4.	Memberi nasehat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris.	Setahun	Surat/Risalah	4	6	15	4.00
5.	*Monitoring* tindak lanjut temuan SPI dan Eksternal Audit serta *Assessment* GCG	Triwulanan	Surat	4	4	3	3.00
6.	Monitoring dan Evaluasi Kantor Wilayah/Cabang	Setahun	Kunjungan	3	12	11	2.75
7.	Realisasi rencana kerja Komite Dewan Komisaris	Setahun	%	2	100	90	1.80
Sub Total II				**40**			**38.35**
III. Aspek Pelaporan							
1.	Rencana kerja dan anggaran tahunanTahun 2014	Tahunan	Laporan	7	1	1	7.00
2.	Laporan pelaksanaan tugas	Triwulanan	Laporan	7	4	4	7.00
3.	Laporan pengawasan tahunan tahun 2013	Tahunan	Laporan	12	1	1	12.00
5.	Laporan Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris	Triwulanan	Laporan	8	4	4	8.00
Sub Total III				**34**			**34.00**
IV. Aspek Dinamis							
1.	Hasil *self assessment* GCG Dewan Komisaris	Tahunan	Skor	6	27	32.92	6.00
2.	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, *workshop* dll						
3.	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham						
4.	Penunjukan *Assessor GCG*	Dua Tahunan	Surat	2	1	1	2.00
5.	Tindak lanjut rekomendasi hasil *Assessment* GCG	Setahun	%	3	100	75	2.25
Sub Total IV				**16**			**14.25**
TOTAL (I+II+ III+IV)				**100**			**96.60**

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Perusahaan tidak menentukan secara spesifik target yang harus dicapai dalam keberagaman gender dan budaya di dalam struktur keanggotaan Dewan Komisaris. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris merupakan hak dari Pemegang Saham.

Perusahaan meyakini bahwa keberagaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan penasehatan oleh Dewan Komisaris. Keberagaman itu menjadi kekuatan dan kelebihan untuk saling melengkapi, sebagaimana tabel berikut :

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Pendidikan	Karir/Jabatan/Pengalaman
1.	Denny Indrayana	Laki-Laki	Kalimantan Selatan	• Sarjana Hukum, Universitas Gajah Mada. • Program Master, Universitas Minnesotta, Amerika Serikat. • Program Doktor, Universitas Melbourne, Australia.	a. Wakil Menteri Hukum dan HAM. Sekretaris satgas pemberantasan mafia hukum. b. Staf Khusus Presiden bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (2008-2011). c. Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi, Fakultas Hukum UGM. d. Pendiri sekaligus menjadi Direktur ICM (Indonesian Court Monitoring). e. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2.	Herman Hidayat	Laki-Laki	Jakarta	Sarjana Hukum, Universitas Indonesia	a. Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN. Kepala Biro Hukum dan Humas. b. Kabag Peraturan Perundang-Undangan. Komisaris PT Pelindo III (Persero). c. Komisaris PTPN III d. Komisaris PTPN XIII. e. Komisaris PT Boma Bisma Indra (Persero)
3.	Mathias Tambing	Laki-Laki	Sulawesi Selatan	• Profesor Manajemen Strategi Universitas International Philipina • S3 Manajemen Pemerintah • S2 Manajemen Administrasi Publik, • S1 Hukum Perdata • S1 Manajemen Pelayaran, Akademi Ilmu Pelayaran	a. Pjs Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), b. Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), c. Ketua Persaudaraan Pekerja Indonesia (PPI), d. Ketua DPP Konfederasi SPSI, e. Sekretaris Jendral Kesatuan Pelaut Indonesia (Sekjen KPI
4.	Iskandar Maula	Laki-Laki	Makassar	• Magister Manajemen UNKRIS • S1 Hukum Universitas Hasanuddin	a. Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI, b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kemenakertrans RI, c. Inspektur II Inspektorat Jendral Kemenakertrans RI, d. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jendral Binapenta Kemenakertrans RI

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Pendidikan	Karir/Jabatan/Pengalaman
5.	Bambang Wirahyoso	Laki-Laki	Pekalongan	• S1 UNWIM Bandung	a. Koordinator Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia (ASPBI). b. Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) c. PJS Presiden KSPI d. Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) e. Ketua DPD SPN Provinsi Jawa Barat
6.	Hariyadi BS. Sukamdani	Laki-Laki	Jakarta	• Insinyur Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta • Magister Manajemen jurusan Manajemen Akuntansi dari Universitas Indonesia • Registered Financial Consultant dari International Association of Registered Financial Consultants, Inc. (IARFC)	a. Presiden Direktur PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk. b. Komisaris PT Jamsostek (Persero). c. Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika, Wakil Komisaris Utama PT Hotel Sahid Jaya International Tbk., d. Presiden Direktur PT Indotex LaSalle College International, e. Direktur Utama PT Sahid Gema Wisata, f. Vice President Sahid Group

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dewan Komisaris secara optimal dan sesuai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Dewan Komisaris telah didukung organ pendukung Dewan Komisaris yang terdiri dari Sekretaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. Menindaklanjuti ketentuan tentang pengaturan organ pendukung Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, maka Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) juga melakukan penataan organ pendukung Dewan Komisaris di lingkungan PT Jamsostek (Persero) pada tahun 2013 sebagai berikut :

1. Keputusan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/01/DEKOM/022013 tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua Komite Audit yaitu Bambang Wirahyoso.
2. Keputusan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/04/DEKOM/072013 tentang pemberhentian dan pengangkatan sekretaris Dewan Komisaris yaitu Susi Meyrista Tarigan.
3. Keputusan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/06/DEKOM/102013 tentang pengangkatan Komite Audit yaitu Rinaningsih.
4. Keputusan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/07DEKOM/102013 tentang pengangkatan Komite Audit yaitu Salim Siagian.
5. Keputusan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/09/DEKOM/102013 tentang pembentukan dan pengangkatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yaitu Herman Hidayat sebagai Ketua dan Endi Roswendi sebagai anggota.

Pelaksanaan tugas Sekretariat dan Komite organ pendukung Dewan Komisaris pada tahun 2013 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Komisaris
   a) Pembentukan
      1) Pembentukan Sekretaris Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan

tugas Dewan Komisaris, mendukung pelaksanaan tertib administrasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris termasuk memastikan pelaporan dan dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik sebagaimana ketentuan yang berlaku.

2) Pelaksanaan Kesekretariatan Dewan Komisaris tahun 2013 dipimpin oleh Sdr. Susi Meyrista Tarigan dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf.
3) Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 dan *Board Manual* Perusahaan.

b) Program Kerja
Secara garis besarnya, program kerja Sekretaris Dewan Komisaris meliputi, antara lain:
- Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
- Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila diminta berkenaan dengan kegiatan Perusahaan.
- Mempersiapkan serta menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/ pertemuan antara Dewan Komisaris dengan pemegang saham/Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya,termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris.
- Membuat dan mendistribusikan risalah rapat internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat selesai dilaksanakan.
- Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
- Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.
- Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung (*liason officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

c) Pelaksanaan Program Kerja
Selama tahun 2013 Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

No	Rencana Kerja	Realisasi
1.	Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris	
a	Menyiapkan dan melaksanakan Rapat Dewan Komisaris	Terlaksananya rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan rapat gabungan sebanyak 12 (duabelas) kali. a. Menyampaikan undangan rapat internal kepada anggota Dewan Komisaris. b. Menyampaikan surat kepada Biro Sekretariat Perusahaan dalam hal pelaksanaan Rapat Gabungan. c. Tersedianya bahan/materi rapat Dewan Komisaris d. Tersedianya daftar hadir rapat dan ditandatangani e. oleh masing-masing Dewan Komisaris
b	Membuat dan menyampaikan risalah rapat	a. Membuat risalah rapat sebanyak 13 risalah selama tahun 2013 b. Risalah rapat Dewan Komisaris telah disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris, baik yang hadir maupun yang tidak hadir c. Risalah rapat asli Dewan Komisaris selama tahun 2013 telah disampaikan kepada Biro Sekretariat Perusahaan
c	Memantau tindak lanjut hasil rapat sebelumnya	a. Membuat pemantauan tindak lanjut hasil rapat internal Dewan Komisaris. b. Menjadikan salah satu agenda rapat Dewan Komisaris adalah tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya

No	Rencana Kerja	Realisasi
2.	Pelaksanaan RUPS dan Pelaporan kepada Pemegang Saham	
a	Menyiapkan tanggapan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan RUPS	Tersedianya tanggapan Dewan Komisaris atas pelaksanaan RUPS tentang: a. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2013 b. Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2012
b	Menyiapkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris secara Periodik	Tersedianya 4 (empat) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham
c	Menyiapkan Tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Perusahaan secara Periodik	Tersedianya 4 (empat) Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Perusahaan
3.	Memastikan Pemantauan dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik	
a	Membuat pernyataaan benturan kepentingan, daftar khusus serta pakta integritas dan antisuap	Dewan Komisaris telah menandatangani daftar khusus, pernyataaan benturan kepentingan,pakta integritas dan antisuap pada tahun 2013
b	Mengkoordinasikan proses penetapan *assessor* GCG independen	Dewan Komisaris telah menetapkan Sodiq Purwoko sebagai *assessor* GCG independen tahun 2013.
c	Melaksanakan Program Pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru	Telah dilakukan Program Pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru di awal tahun 2013.
d	Memantau pelaksanaan dan evaluasi hasil *self assessment* penerapan GCG Tahun 2012	a. Dewan Komisaris mempercepat ketepatan waktu menanggapi rancangan RKAP 2014; b. Dekom meningkatkan ketepatan waktu dalam pemberian rekomendasi kepada Direksi. Proses pembahasan usulan Direksi dilakukan dalam waktu yang lebih cepat melalui komunikasi secara email/BB/ataupun agenda Rapat Dewan Komisaris. c. Evaluasi Anak Perusahaan dimasukkan dalam RKA Dewan Komisaris 2014 dan penilaian akan dilakukan jika terdapat proses pengangkatan Dirkom anak perusahaan. d. Ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam Rapat telah dikuasakan kepada Dewan Komisaris yang dapat hadir. e. *Self assessment* kinerja Komite Audit sudah dilaksanakan sesuai KPI Komite Audit dan realisasi Laporan Komite Audit secara triwulanan beserta penyusunan Risalah Rapat Komite Audit
e	Menindaklanjuti *area of improvement* yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris	Rekomendasi hasil *assessment* GCG untuk Dewan Komisaris sebanyak 9 rekomendasi, dan telah ditindaklanjuti
4.	Penyelenggaraan kesekretariatan dan penyimpanan dokumen	
a	Menyiapkan tanggapan dan persetujuan atas usulan Direksi	Tersusun surat Dewan Komisaris kepada Direksi dalam rangka pemberian tanggapan dan persetujuan atas usulan Direksi dalam tahun 2013
b	Menyusun rancangan laporan Dewan Komisaris	a. Terselesaikan rancangan laporan triwulan sebanyak 3 (tiga) laporan. b. Laporan pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan kepada pemangku kepentingan secara periodik.

No	Rencana Kerja	Realisasi
c	Menyiapkan program pengembangan Dewan Komisaris	Terlaksananya program pengembangan Dewan Komisaris dalam tahun 2013
d	Melaksanakan administrasi Dewan Komisaris	Dokumen surat masuk dan keluar serta salinan risalah rapat Dewan Komisaris telah diagendakan dan dapat diperoleh sewaktu-waktu.
e	Menyediakan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan	Menyediakan data dan informasi untuk baik untuk proses pengambilan keputusan maupun untuk materi presentasi Dewan Komisaris
f	Menyimpan dokumen pada fasilitas yang ditentukan	Tersedia ruangan dan fasilitas arsip untuk menyimpan semua dokumen Dewan Komisaris
5.	Menyusun Rancangan Program Kerja dan Laporan	
a	Menyusun rancangan RKAT dan usulan penetapan IPK tahun 2013	Membuat rancangan RKAT dan usulan penetapan IPK Dewan Komisaris dan telah disahkan oleh RUPS
b	Mengkoordinasikan pelaporan dari Komite Organ Dewan Komisaris	Mengkompilasi pelaporan dari Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Bagian dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

2. Komite Audit
   Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisaris selain memberikan masukan dan rekomendasi atas hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal maupun oleh Auditor Internal (Biro Pengawasan Intern), juga melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris khususnya dalam hal pengawasan umum dan ketaatan perusahaan pada peraturan perundang-undangan.
   a) Pembentukan
      - Pembentukan Komite Audit mengacu pada Undang-Undang nomor. 19 tahun 2003 tentang BUMN bahwa Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk Komite Audit, dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
      - Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit telah mengakomodasikan Peraturan Mentei Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisais dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
      - Dengan adanya pergantian Dewan Komisaris pada awal tahun 2013,maka susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:
        1. Ketua : Bambang Wirahyoso
        2. Anggota : Salim Siagian
        3. Anggota : Rinaningsih

   b) Profil Anggota
      Salim Siagian
      - S2 Magister Manajemen Universitas Katolik Leuven, Belgia lulus tahun 1983. S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi lulus tahun 1975.
      - Pengalaman kerja sebagai pendidik di Universitas Indonesia.

      Rinaningsih
      - S3 Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, lulus tahun 2013
      - S2 Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia lulus tahun 2002.
      - S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi lulus tahun 1989.
      - Pengalaman kerja sebagai pendidik di berbagai Institut/Universitas antara lain: Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, STIE Nusantara dan konsultan pada Kantor Akuntan Publik SGV Utomo.

   c) Independensi
      Dalam pelaksanaan tugas membantu Dewan Komisaris, Komite Audit bertindak mandiri (independen) baik dalam pelaksanaan

tugas serta dalam pelaporannya. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari Komite Audit harus memenuhi kriteria kemandirian sebagai berikut:

- Bukan merupakan karyawan kunci Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- Tidak mempunyai saham di Perusahaan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.
- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan.
- Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau menjabat sebagai anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah.

Berdasarkan review atas kriteria independensi, maka semua anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut :

Independensi komite audit

No.	Nama	Kriteria Independensi			
		Bukan Karyawan Kunci	Tidak Mempunyai Hubungan Afiliasi	Tidak Mempunyai Kepentingan Pribadi	Tidak Menjabat Pengurus Partai Politik
1	Bambang Wirahyoso	ya	ya	ya	ya
2	Salim Siagian	ya	ya	ya	ya
3	Rinaningsih	ya	ya	ya	ya

d) Fungsi
Komite Audit memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang berkaitan dengan pengendalian intern, sehingga kegiatan perusahaan dikelola dan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

e) Program Kerja
Program kerja Komite Audit tahun 2013 meliputi, antara lain:

- Menilai dan memastikan efektivitas sistem pengendalian intern.
- Menilai dan memastikan efektivitas seleksi dan pelaksanaan tugas Auditor Eksternal.
- Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Biro Pengawasan Intern.
- Memastikan bahwa telah terdapat evaluasi yang memadai terhadap kebijakan dan informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
- Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
- Menyusun dan menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan Komite Audit sebelum tahun buku berjalan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan. Salinan program kerja Komite Audit disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi yang tidak terpisah dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.

f) Pelaksanaan Program Kerja
Selama tahun 2013 Komite Audit telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan review dan membuat tanggapan atas Laporan Kinerja Perusahaan secara Periodik, Laporan Keuangan (*Audited*) tahun 2013 baik untuk Laporan Keuangan PT Jamsostek (Persero) maupun untuk Laporan Keuangan DPKP dan PKBL serta usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2014.
- Persiapan dan pelaksanaan *wrap-up meeting* dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) mulai dari persiapan jadual closing audit di seluruh Kanwil pada cabang-cabang yang menjadi *sample* pemeriksaan sampai dengan diskusi *pre-closing* audit umum KAP tahun buku 2012.
- Ikut serta sejak dari persiapan sampai dengan tahap *pre-closing self-assessment* GCG bersama tim GCG sesuai dengan ketentuan penilaian GCG terbaru yaitu

SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator Parameter Penilaian atau Evaluasi atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

- Melakukan telaah atas Laporan Hasil Audit Biro Pengawasan Intern (BPI) serta memberikan saran tambahan atas temuan–temuan atas hasil pemeriksaan.
- Melakukan telaah atas beberapa Laporan Strategis yang dibuat oleh Biro Pengawasan Intern (BPI).
- Melakukan telaah atas RJPP tahun 2013-2017 dan lainnya sesuai permintaan Dewan Komisaris untuk masukan kepada Dewan Komisaris.
- Membahas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) tahun 2013 bersama dengan Biro Pengawasan Intern.
- Membahas finalisasi dan sinkronisasi pelaporan berdasarkan risk based audit.
- *Aanwijzing* KAP untuk tugas audit umum laporan keuangan dan audit penutup laporan keuangan tahun buku 2013.
- Mengevaluasi secara teknis atas nilai proposal KAP dan klarifikasi teknis khususnya audit penutup dengan pihak KAP.
- Membantu Penyusunan *Annual Report Award* (ARA) terkait dengan penyediaan data dan informasi yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- Membantu dan Me-*review* penyusunan *Term of Reference* atas penunjukan Konsultan Pelaksana assessment GCG untuk tahun 2013.
- Melakukan telaah atas hasil *assessment* GCG untuk tahun 2012 yang merupakan area of improvement Dewan Komisaris dan Komite Audit serta persiapan atas pelaksanaan *assessment* GCG tahun 2013.
- Melaksanakan tugas-tugas lain untuk memenuhi permintaan Dewan Komisaris sepanjang tugas tersebut merupakan kewenangan Dewan Komisaris.

g) Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Rapat
Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan rapat komite Audit sebagai berikut:

- Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan.
- Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit dan hanya dihadiri oleh anggota Komite Audit. Apabila dipandang perlu peserta rapat Komite Audit dapat diperluas dengan mengundang unit kerja terkait melalui Direktur Utama.
- Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
- Jumlah rapat Komite Audit serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite Audit harus diungkap dalam Laporan Tahunan.
- Setiap anggota Komite Audit berhak menerima salinan risalah rapat Komite Audit, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat selesai.
- Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Ketua Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

h) Frekuensi dan Tingkat kehadiran Rapat
Mengingat luasnya cakupan fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, maka selain dilakukan dalam forum rapat Komite Audit, pembahasan permasalahan yang terkait dengan implementasi pengendalian intern menjadi agenda Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan.

Selama tahun 2013 jumlah rapat sebanyak 31 kali dengan rata-rata Tingkat kehadiran anggota dalam Rapat Komite Audit adalah sebesar 100% sesuai tabel sebagai berikut:

Kehadiran Dalam Rapat Komite Audit Tahun 2013

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	Prosentase Kehadiran
1	Bambang Wirahyoso	Ketua	31	31	100
2	Salim Siagian	Anggota	31	31	100
3	Rinaningsih	Anggota	31	31	100

i) Agenda Rapat
Selama tahun 2013, Komite Audit telah melakukan rapat internal dengan membahas 15 agenda rapat sesuai dengan tabel sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	23/01/13	Persiapan pelaksanaan *wrap – up meeting* dan jadual *closing* audit di seluruh Kanwil dan cabang-cabang yang menjadi sample pemeriksaan general audit tahun buku 2012
2	06/03/13	Melakukan telaah atas Laporan Hasil Audit Biro Pengawasan Intern (BPI) triwulan IV tahun 2012, serta memberikan saran tambahan atas temuan – temuan atas hasil pemeriksaan yang ada,
3	19/3/13	Menelaah laporan RJPP tahun 2013-2017 untuk masukan kepada dewan komisaris dalam memberikan tanggapannya.
4	26/03/13	Melakukan telaah atas beberapa Laporan Strategis yang dibuat oleh Biro Pengawasan Intern (BPI)
5	02/04/13	(1) penyusunan pedoman penilaian kinerja Komite Audit sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) nomor KEP/10/ DEKOM/122012 tentang Penyempurnaan Pembentukan Komite Audit dan penetapan Piagam Komite Audit PT Jamsostek (Persero); (2) revisi rencana kerja Komite Audit 2013 disesuaikan dengan Piagam Komite Audit; (3) Surat Direksi Nomor:B/2675/032013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Penyampaian Hasil Kajian Hukum atas Reklas Saldo Dana Pengembangan Non Jaminan Hari Tua (NJHT).
6	11/06/13	Membahas surat Direksi Nomor : B/4311/042013 Tanggal 5 Juni 2013 Perihal Usulan Revisi Ketentuan Jasa Administrasi Pinjaman Program DPKP Bergulir
7	18/06/13	Membahas surat Direksi Nomor: R/3331/052013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Tindak Lanjut Arahan RUPS PT Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2012.
8	23/07/13	Membahas Surat Direksi Nomor: B/6880/072013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Permohonan Persetujuan Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap Kendaraan Dinas Kantor Pusat
9	20/8/13	Melakukan evaluasi teknis atas proposal KAP AAJMS untuk pelaksanaan *general audit* tahun buku 2013 dan audit laporan keuangan penutup.
10	10/09/13	Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan PT.Jamsostek (Persero) Semester I tahun 2013
11	24/09/13	Membahas Program Kerja Komite Audit tahun 2014 dalam bentuk IPK (Indikator Penilaian Kinerja).
12	08/10/13	Membahas jadual *closing* audit KAP tahun buku 2013. Audit lapangan telah dilaksanakan oleh KAP sejak tanggal 1 Oktober 2013, maka rencana jadual *closing* di Kantor-kantor Wilayah dijadualkan tanggal 24 Oktober – 5 Nopember 2013.
13	19/11/13	Mengevaluasi Laporan Keuangan PT Jamsostek (Persero) Triwulan III tahun 2013.
14	26/11/13	Membahas: (1) Surat Direksi nomor:B/10555/102013 tanggal 30 Oktober 2013 perihal Permohonan Persetujuan Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat (R4) dan Roda Dua (R2) Nasional, (2) Surat Direksi nomor:B/11533/112013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Antar Mata Anggaran Belanja Modal untuk Kebutuhan Perubahan Logo Kantor dalam Rangka Transformasi Menjadi BPJS Ketenagakerjaan,
15	16/12/13	Membahas surat Direksi nomor: B/12441/122013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Rencana Pengalihan Dana Program Kemitraan dan Rencana Kerja Program Bina Lingkungan PT.Jamsostek (Persero) tahun 2013 untuk masukan untuk Dewan Komisaris

Selama tahun 2013, Komite Audit telah melakukan rapat dengan unit kerja yang membahas 16 agenda rapat sesuai dengan tabel sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Pihak/Unit Kerja Terkait
1	2 April 2013	Membahas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) tahun 2013 dan hal lainnya terkait dengan tugas pengawasan	Biro Pengawasan Intern
2	17-19 April 2013	Konsinyer membahas laporan keuangan tahun buku 2012 *audited*	Pihak KAP AAJMS, Biro Akuntansi, Biro Keuangan, Biro Pengendalian Keuangan, BPI dan
3	19-20 April 2013	Workshop dengan tim *Risk Based Audit*, dibimbing oleh Bapak Heru (konsultan) dari IIA (*Institute of Internal Auditors*) Indonesia, tujuan membahas persiapan pedoman audit berdasarkan *risk based*.	BPI, Biro Manajemen Risiko
4	14 Mei 2013	Membahas persiapan dan agenda konsinyer tentang evaluasi KAP AAJMS dan persiapan pemilihan KAP untuk laporan keuangan penutup PT Jamsostek (Persero).	Biro Akuntansi, Pengadaan dan Biro Pengawasan Internal
5	16-18 Mei 2013	Konsinyer membahas evaluasi atas kinerja KAP AAJMS dalam mengaudit PT Jamsostek (Persero) tahun buku 2012, persiapan terkait pemilihan KAP untuk mengaudit tahun buku 2013 antara lain TOR, usulan revisi SK Direksi terkait pengadaan KAP.	BPI, Biro Akuntansi, Biro Pengadaan, Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit.
6	21 Mei 2013	Membahas pandangan KAP AAJMS mengenai tugas untuk audit atas laporan keuangan penutup PT Jamsostek (Persero).	BPI, anggota Komite Audit dan Biro Akuntansi
7	8 Juli 2013	Membahas finalisasi dan sinkronisasi pelaporan berdasarkan risk based audit.	BPI
8	18-20 Juli 2013	Konsinyer mengenai rencana LHA berdasar *risk based audit, Audit Internal Charter*, dan SOP.	Tim GCG. Konsinyer diikuti oleh Komite Audit, BPI dan konsultan dari IIA
9	3 Agustus 2013	Menghadiri *Aanwijzing* KAP oleh pihak Biro Pengadaan, yang membahas tanggungjawab dan wewenang kedua belah pihak dalam menghadapi tugas untuk audit umum atas laporan keuangan PT Jamsostek (Persero) tahun buku 2013 dan audit penutup atas laporan keuangan PT. Jamsostek (Persero) tahun buku 2013.	Biro Pengadaan, Komite Audit, BPI dan pihak KAP.

No	Tanggal	Agenda Rapat	Pihak/Unit Kerja Terkait
10	25 - 27 Agustus 2013	Konsinyer klarifikasi teknis evaluasi nilai proposal KAP AAJMS yang terdiri dari evaluasi teknis oleh Komite Audit dan evaluasi administratif oleh Biro Pengadaan (antara Komite Audit dengan biro Pengadaan) dan klarifikasi teknis khususnya audit penutup dengan pihak KAP AAJMS.	KAP AAJMS BPI, Biro Pengadaan
11	12-13 September 2013	Mengevaluasi perkembangan hasil *self assessment* GCG tahun 2012, evaluasi TOR untuk pengadaan evaluasi GCG tahun 2013.	Tim GCG, anggota Komite Audit, Sekretaris Dewan Komisaris dan konsultan GCG.
12	26 September 2013	*Kick-off meeting* KAP AAJMS sebagai pembuka pelaksanaan audit umum dan audit penutup laporan keuangan tahun buku 2013.	Biro Pengadaan, BPI, Biro Akuntansi dan KAP AAJMS.
13	Bulan Oktober	*Wrap – up meeting* membahas temuan – temuan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan tahun buku serta untuk mengetahui kendala yang ada dalam menyelesaikan masalah tersebut.	KAP, Kantor Wilayah, BPI
14	Tanggal 4 – 6 Desember 2013	Konsinyer membahas persiapan asesmen GCG	Biro Sekretariat Perusahaan, Biro Hukum dan Kepatuhan, Biro Pengawasan Internal, Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris.
16	Tanggal 27 Desember 2013	Diskusi hasil temuan atas pemeriksaan di kantor pusat untuk tahun buku 2013 antara pihak KAP dengan PT. Jamsostek (Persero).	KAP AAJMS.

j) Rekomendasi Kepada Dewan Komisaris
Komite Audit melaksanakan telaah terhadap kegiatan yang berkaitan dengan unit kerja dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, yang meliputi :

REKOMENDASI KEPADA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2013			
No	**Pokok Kegiatan**	**Uraian Kegiatan**	**Keluaran**
1.	Kebijakan sistem pengendalian *intern* dan implementasinya	• Melakukan penelaahan dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan, mencakup strategi dan kebijakan sistem pengendalian intern yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan perusahaan. • Mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan yang disampaikan secara tepat waktu kepada Dewan Komisaris • Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencaaan audit dan jumlah auditor • Memperoleh masukan hasil audit eksternal atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern	Sistem pengendalian intern yang efektif sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan perusahaan.

REKOMENDASI KEPADA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2013			
No	**Pokok Kegiatan**	**Uraian Kegiatan**	**Keluaran**
2.	Mengevaluasi kepatuhan kebijakan Direksi	Me-*review* kepatuhan Direksi atas penerapan berbagai kebijakan perusahaan terutama yang terkait dengan • kebijakan pengendalian intern.	Tersedianya masukan bagi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan Direksi.
3.	Memastikan hasil audit ditindaklanjuti Direksi dan Komisaris.	Memberi masukan untuk memastikan bahwa hasil • audit (eksternal dan internal) dibahas dan dikelola dengan baik.	Memantau penerapan sistem pengendalian intern berjalan dengan efektif.
4.	Evaluasi terhadap usulan transaksi/kegiatan tertentu.	Melakukan evaluasi terhadap transaksi atau kegiatan yang • memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	Tersedia masukan yang tepat untuk pengambilan keputusan DewanKomisaris atas usulan Direksi.
5.	Mengevaluasi independensi, obyektivitas, dan efektivitas hubungan kerja Komite Audit	Me-*review* peningkatan dan keseimbangan: • Hubungan kerja Komite Audit dengan Biro Pengawasan Intern • Hubungan kerja Komite Audit dengan Auditor Eksternal • Hubungan kerja Komite Audit dengan Direksi	Pemahaman yang baik atas fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris.
6.	*Review* permasalahan sistemik dalam bisnis inti Perusahaan	Me-*review* kondisi dan hambatan pengelolaan bisnis inti perusahaan terutama terkait dengan database kepesertaan dan kualitas pelayanan terhadap peserta.	Pelayanan yang prima
7.	Koordinasi dengan auditor eksternal	Melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan Auditor Eksternal dan melakukan pembahasan hasil audit dengan auditor eksternal untuk kualitas audit yang memenuhi standar.	Terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan efektif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
8.	Pertemuan dengan Komite Audit dan BPI.	Mengadakan pertemuan secara berkala maupun insidentil dengan BPI	Terbangunnya koordinasi dan efektivitas masing masing fungsi.
9.	Laporan kepada Dewan Komisaris.	Melaporkan kegiatan, permasalahan, dan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris.	Laporan Berkala Komite Audit.
10.	Laporan Tahunan	Menyusun laporan mengenai komposisi, tanggung jawab, dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit (bagian dari laporan tahunan).	Laporan Tahunan
11.	Menyempurnakan Komite *Audit Charter*	Menyempurnakan Komite *Audit Charter*	Tersusunnya pedoman yang lebih baik.

REKOMENDASI KEPADA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2013			
No	**Pokok Kegiatan**	**Uraian Kegiatan**	**Keluaran**
12.	Indikator Penilaian Kinerja (IPK) Dewan Komisaris dan Direksi	Memberikan masukan dan evaluasi kinerja atas Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) Dewan Komisaris • Melakukan fasilitasi dan rekomendasi penilaian kinerja Direksi berdasarkan IPK • Melakukan *Self Assessment* terhadap kinerja Komite Audit	Menghasilkan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai kontrak manajemen serta rekomendasi besarnya rumunerasi.
13.	Pelaksanaan *assessment* GCG tahun 2013	• Melakukan telaah atas usulan Direksi mengenai penunjukkan *assessor* independen pelaksanaan *assessment* GCG tahun 2013.	Diberikan persetujuan Kantor Konsultan Konsultan Sodiq Purwoko untuk melaksanakan *assessment* GCG tahun 2013

k) Penilaian Kinerja
Parameter yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja Komite Audit sebagai realisasi RKA atau sesuai dengan tugas pokok yang tercantum dalam piagam Komite Audit, sehingga dapat dilakukan identifikasi menjadi ukuran Indikator Pencapaian Kinerja. Seluruh program kerja dapat terlaksana sesuai rencana, sehingga indikator Capaian Kinerja Komite Audit tahun 2013 dapat tercapai 101.75% sesuai dengan tabel sebagai berikut:

INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA (IPK) KOMITE AUDIT TAHUN 2013

No.	ASPEK DAN PARAMETER	PERIODE	SATUAN	BOBOT	RENCANA	REALISASI TAHUN 2013		
						HASIL	PENCAPAIAN	BOBOT
					(1)	(2)	(2)/(1)	
1	Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern	Tahunan	Laporan	10	1	1	100.00%	10.00
2	Laporan Evaluasi Seleksi Eksternal Auditor*)	Tahunan	Laporan	15	2	2	100.00%	15.00
3	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Eksternal Auditor	Tahunan	Laporan	15	1	1	100.00%	15.00
4	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Biro Pengawasan Intern	Triwulanan	Laporan	20	4	4	100.00%	20.00
5	Laporan Hasil Telaah Analisis dan Rekomendasi terhadap segala Informasi yang Dikeluarkan Perusahaan**)	Setahun	Laporan	20	12	12	100.00%	20.00
Sub Total I				**80**			**100.00%**	**80.00**
II. PELAKSANAAN RAPAT								
1	Jumlah Rapat	Bulanan	kali	2	12	15	**125.00%**	**2.50**
2	Tingkat Kehadiran Rapat	Bulanan	%	3	100	100	100.00%	3.00
3	Penyusunan Risalah Rapat	Bulanan	Risalah	5	12	15	125.00%	6.25
Sub Total II				**10**			**117.50%**	**11.75**
III. Program Kerja dan Laporan								
1	Penyusunan Program Kerja Tahunan termasuk Usulan Penetapan Indikator Pencapaian Kinerja (IPK)	Tahunan	Laporan	2	1	1	100.00%	2.00
2	Penyusunan Laporan Triwulanan	Triwulanan	Laporan	5	4	4	100.00%	5.00
3	Penyusunan Laporan Tahunan termasuk usulan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK)	Tahunan	Laporan	3	1	1	100.00%	3.00
Sub Total II				**10**			**100.00%**	**10.00**
TOTAL (I+II+III)				**100**			**101.75%**	**101.75**

3. Komite Pemantau Manajemen Risiko
   Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan fungsi membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko PT Jamsostek (Persero) tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan perusahaan tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan perusahaan.

   Menyadari pentingnya pengawasan penerapan manajemen risiko di PT Jamsostek (Persero), khususnya untuk mengkaji dan mengevaluasi risiko yang ada dan terjadi saat ini serta risiko yang ada yang akan berdampak sejalan dengan proses transformasi menuju BPJS Ketenagakerjaan, maka Dewan Komisaris pada tahun 2013 telah membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko. Komite ini membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko PT Jamsostek (Persero) tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan perusahaan tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan perusahaan khususnya dalam menghadapi proses transformasi menuju badan hukum publik.
   a) Pembentukan
      - Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Rencana Kerja dan Anggaran Komite Manajemen Risiko telah mengakomodasikan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
      - Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko didasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris, dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian secara berkala dan memberi rekomendasi tentang pengelolaan risiko perusahaan.
      - Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KEP/09/DEKOM/102013 tanggal 01 Oktober 2013 tentang pembentukan dan pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan susunan sebagai berikut:
        1. Ketua : Herman Hidayat
        2. Anggota : Endi Roswendi

   b) Profil Anggota
      Endi Roswendi
      - PhD Program in Economics, University of Delaware, Specialization in Finance, 2009;
      - S2, Master of Business Administration (MBA), University of Delaware, in Finance, 2006;
      - S2, Master of Accountancy (MAcc), Bowling Green State University, Accounting Information System (AIS), 2001
      - S1 Bachelor of Science, University of Indonesia (UI)-Extension Program Jurusan Akuntansi, 1997
      - D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta, 1991

   c) Independensi
      Dalam pelaksanaan tugas untuk membantu Dewan Komisaris, Komite Pemantau Manajemen Risiko bertindak mandiri (independen). Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko diatur menurut ketentuan sebagai berikut:
      - Bukan merupakan karyawan kunci Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
      - Tidak mempunyai saham di Perusahaan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung.
      - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.
      - Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan.
      - Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau menjabat sebagai anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah.

   Berdasarkan *review* atas kriteria independensi, maka semua anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut :

INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO					
No	Nama	Kriteria Independensi			
		Bukan Karyawan Kunci	Tidak Mempunyai Hubungan Afiliasi	Tidak Mempunyai Kepentingan Pribadi	Tidak Menjabat Pengurus Partai Politik
1	Herman Hidayat	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Endi Roswendi	Ya	Ya	Ya	Ya

d) Fungsi
Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki fungsi Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan yang efektif terutama menyangkut penerapan manajemen risiko oleh Perusahaan agar:
- Fungsi pengawasan atas penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan baik;
- Terciptanya penerapan *Good Corporate Governance* yang baik;

e) Tugas dan Tanggung Jawab
Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko meliputi, antara lain:
- Mengevaluasi dan mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.
- Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko perusahaan.
- Mengevaluasi dan menganalisis laporan profil risiko perusahaan secara berkala.
- Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko.
- Mengevaluasi dan menganalisis usulan Direksi untuk tindakan transaksional yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan pendapat dan saran atas rancangan RKAP dan RJPP.
- Melakukan telaah, analisis dan memberi pendapat dan saran atas laporan realisasi RKAP dan RJPP.
- Mengkaji dan menganalisis informasi penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.
- Mengkaji dan menganalisis informasi penting mengenai saran, harapan, permasalahan atau keluhan dari *stakeholders* yang diterima oleh Dewan Komisaris.
- Mengkaji dan menganalisis informasi penting bila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan.
- Bersama Komite Audit melakukan kajian, analisis dan tukar pendapat dengan satuan kerja Hukum, Keuangan, Aktuaris, Operasi dan Auditor Independen dalam penentuan adanya risiko yang berarti, langkah pengelola perusahaan dalam meminimumkan risiko dan kebijakan perusahaan atas penetapan dan pengelolaan risiko.
- Melakukan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

f) Program Kerja
Meskipun Komite baru terbentuk pada tanggal 1 Oktober 2013, Komite telah menyusun program Kerja yang secara ideal dapat terselenggara secara penuh dalam periode 1 (satu) tahun.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas program kerja manajemen risiko untuk memastikan bahwa program kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko telah sejalan dengan filosofi dari manajemen risiko perusahaan.
- Mengkaji dan mengevaluasi lingkungan bisnis yang ada dan terjadi saat ini serta risiko yang ada yang akan berdampak kepada kegiatan pokok perusahaan.
- Melakukan evaluasi mengenai tujuan dari Komite Pemantau Manajemen Risiko dan kaitannya dengan tugas dan fungsi dari Biro Manajemen Risiko.
- Memberikan input secara reguler kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan atau implementasi penerapan manajemen risiko perusahaan.
- Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil *assessment Good Corporate Governance* (GCG).
- Memberikan masukan atas laporan pertanggung jawaban atau laporan kegiatan Biro Manajemen Risiko yang di sampaikan kepada Direksi/Dewan Komisaris.
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di amanatkan oleh Dewan Komisaris.

g) Pelaksanaan Program Kerja
Dalam usia yang relatif singkat, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melakukan serangkaian kegiatan, secara garis besar sebagai berikut:
- Menyusun Program Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2013.
- Rangkaian pertemuan dengan Biro Manajemen Risiko untuk mengkaji dan mengevaluasi lingkungan bisnis-bisnis yang ada dan terjadi saat ini serta risiko yang ada yang akan berdampak kepada kegiatan pokok PT Jamsostek (Persero).
- Rangkaian Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko dan bersama Dewan Komisaris.
- Pembahasan implementasi manajemen risiko PT Jamsostek (Persero) tahun 2013 dengan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan pada tanggal 22 Oktober 2013.
- Menyempurnakan *Charter* Komite Pemantau Manajemen Risiko.
- Menyusun Program Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko tahun 2014.

h) Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Rapat
Pelaksanaan rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko diatur menurut ketentuan sebagai berikut:
- Komite Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan.
- Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan hanya dihadiri oleh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko. Apabila dipandang perlu peserta rapat Komite Manajemen Risiko dapat diperluas dengan mengundang unit kerja terkait melalui Direktur Utama.
- Setiap rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang hadir.
- Jumlah rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko serta jumlah kehadiran masing-masing anggota KomitePemantau Manajemen Risiko harus diungkap dalam Laporan Tahunan.
- Setiap anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko berhak menerima salinan risalah rapat KomitePemantau Manajemen Risiko, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat selesai.
- Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris.

i) Frekuensi Rapat
Mengingat luasnya cakupan dan keterkaitan antar masing-masing jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan, maka selain dilakukan dalam forum rapat KomitePemantau Manajemen Risiko, pembahasan permasalahan dan kajian terkait dengan pemantauan implementasi manajemen risiko selain dibahas dalam Rapat Internal Komite, juga dibahas dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan.

Selama tahun 2013, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melakukan rapat baik internal maupun bersama-sama dengan Divisi/ Unit Kerja terkait dalam rangka mengevaluasi penerapan dan pengelolaan kebijakan perusahaan mengenai manajemen risiko.

Terhitung mulai 1 0ktober 2013 jumlah rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko sebanyak 6 (enam) kali dengan rata-rata Tingkat kehadiran sebesar 100% sesuai dengan tabel sebagai berikut:

KEHADIRAN DALAM RAPAT KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2013

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	Prosentase Kehadiran
1	Herman Hidayat	Ketua	6	6	100
2	Endi Roswendi	Anggota	6	6	100

Selama tahun 2013 agenda rapat yang dilaksanakan Komite Pemantau Manajemen Risiko sebanyak 6 (enam) agenda sesuai tabel sebagai berikut:

No	Tanggal	Topik yang Dibahas
1	Tanggal SK	• Pendalam lingkungan bisnis PT Jamsostek (Persero); • Penyusunan Rencana Kerja Komite 2013
2	08 Oktober 2013	• Perumusan Piagam Komite • Perumusan Rencana Kerja Komite 2014 • Perumusan rekomendasi kebijakan terkait Tupoksi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dengan referensi dari Board Manual Dekom dan UU BPJS
3	22 Oktober 2013	• Pembahasan manajemen risiko PT Jamsostek (Persero)
4	26 November 2013	• Pertemuan dengan Biro Manajemen Risiko
5	17 Desember 2013	• Pendalaman Rencana Kerja Komite Tahun 2014 • Persiapan *assessment* implementasi Manajemen Risiko PT Jamsostek (Persero)
6	24 Desember 2013	• Mendampingi Dewan Komisaris dalam wawancara oleh *Assessor* atas *assessment* implementasi Manajemen Risiko PT Jamsostek (Persero)

j) Parameter yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja KomitePemantau Manajemen Risiko sebagai realisasi RKA atau sesuai dengan tugas pokok yang tercantum dalam piagam Komite pemantau manajemen risiko, sehingga dapat dilakukan identifikasi menjadi ukuran Indikator Pencapaian Kinerja. Seluruh program kerja dapat terlaksana sesuai rencana, sehingga indikator Capaian Kinerja Komite pemantau Manajemen Risiko tahun 2013 dapat tercapai 98.75% sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2013

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan	Bobot	Rencana	Realisasi tahun 2013		
						Hasil	Pencapaian	Nilai
I. Tugas Pokok								
1	Melakukan evaluasi program kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko	Triwulanan	Laporan	10	1	1	100	10
2	Melakukan evaluasi lingkungan bisnis	Triwulanan	Laporan	15	1	1	100	15
3	Evaluasi keterkaitan sinergitas tujuan Komite pemantau manajemen risiko dengan Biro manajemen risiko	Triwulanan	Laporan	10	1	1	100	10
4	Evaluasi implementasi penerapan manajemen risiko	Triwulanan	Laporan	15	1	1	100	15
5	Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi *assessment* GCG	Triwulanan	Laporan	10	1	1	100	10
6	Penyusunan *draft Charter* Komite pemantau manajemen risiko	Tahunan	Keputusan Dekom	20	1	1	100	20
Sub Total I				80				80

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2013

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan	Bobot	Rencana	Realisasi tahun 2013		
						Hasil	Pencapaian	Nilai
II. Pelaksanaan Rapat								
1	Jumlah Rapat	Bulanan	Kali	2	6	6	100	2
2	Tingkat Kehadiran Rapat	Bulanan	%	3	100	100	100	3
3	Penyusunan Risalah Rapat	Bulanan	Risalah	5	6	4	75	3.75
Sub Total II				10				8.75
III. Program Kerja dan Laporan								
1	Penyusunan RKA Komite tahun 2013	Tahunan	RKA	2	1	1	100	2
2	Penyusunan RKA Komite tahun 2014	Tahunan	RKA	3	1	1	100	3
3	Penyusunan Laporan tahunan Komite tahun 2013	Tahunan	Laporan	3	1	1	100	3
4	Penyusunan penilaian kinerja Komite tahun 2013	Triwulanan	Laporan	2	1	1	100	2
Sub Total III				10				10
Total I + II + III								98.75

4. Komite Remunerasi Dan Nominasi
   Dewan Komisaris tidak membentuk komite nominasi dan remunerasi berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris, dengan dasar pertimbangan bahwa :
   - Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit atau Komite lainnya apabila diwajibkan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan atau disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas.
   - Dalam rangka memberdayakan Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko, Dewan Komisaris menganggap bahwa belum diperlukan adanya Komite Nominasi dan Remunerasi.
   - Untuk itu fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Direksi

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab

Dalam rangka menjadi badan penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan, maka perlu dilakukan peningkatan pengelolaan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor KEP/111/032013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Jamsostek (Persero), ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi sebagai berikut :

1. Direktur Utama

Direktur Utama dalam memimpin dan mengelola perusahaan mempunyai fungsi merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, efektif dan efisien, sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan, mengoordinasikan kegiatan para Direktur, *Transformation Office,* serta pengembangan kebijakan komunikasi, pengawasan intern, kesekretariatan perusahaan, kepatuhan dan hukum.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Direktur Utama mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kebijakan umum pengelolaan perusahaan sesuai visi, misi dan tujuan perusahaan.
b. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.
c. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan perusahaan serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja.
d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Direktur.
e. Merencanakan dan menentukan kebijakan komunikasi, pengawasan intern, kesekretariatan perusahaan, kepatuhan dan hukum serta *transformation office*.
f. Mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan strategi kesekretariatan, pengawasan intern, komunikasi perusahaan, kepatuhan dan hukum serta *transformation office.*

2. Direktur Kepesertaan

Direktorat Kepesertaan mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan, pengoordinasian, penetapan, pengendalian kebijakan dan strategi operasional kepesertaan guna memperluas dan mengelola kepesertaan program Jaminan sosial untuk tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur Kepesertaan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kepesertaan.
b. Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi bidang kepesertaan.
c. Mengendalikan tercapainya kebijakan kepesertaan yang telah ditetapkan.

3. Direktur Pelayanan

Direktorat Pelayanan mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan, pengoordinasian, penetapan danpengendalian kebijakan dan strategi pengelolaan manfaat program dan pelayanan guna tercapainya kepuasan pelayanan bagi peserta.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Direktur Pelayanan mempunyai tugas :

a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan pelayanan.
b. Merencanakan dan menetapkan kebijakan pengembangan manfaat program.
c. Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi bidang pelayanan dan pengelolaan manfaat program.
d. Mengendalikan tercapainya kebijakan pelayanan dan pengelolaan manfaat yang telah ditetapkan.

4. Direktur Investasi

Direktorat Investasi mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan, pengoordinasian dan pengendalian kebijakan penempatan pengelolaan dana dalam berbagai portofolio berdasarkan prinsip hasil dan keamanan dana investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Direktur Investasi mempunyai tugas:

a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan portofolio dan strategi pengelolaan dana dalam bentuk-bentuk investasi.

b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan strategi pengusahaan penempatan dana.
c. Mengendalikan diversifikasi penempatan dana sehingga memberikan hasil yang optimal dengan memperhatikan keamanan dana.
d. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pengukuran kinerja portofolio investasi.
e. Mengoordinasikan pengelolaan aset dalam pengawasan khusus.
f. Memantau proses analisis dan pengelolaan risiko investasi.

5. Direktur Keuangan

Direktorat Keuangan mempunyai fungsi perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengendalian anggaran perusahaan secara efektif dan efisien serta transparan sesuai sistem akuntansi jaminan sosial.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Direktur Keuangan mempunyai tugas:

a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan.
b. Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pengusahaan bidang keuangan.
c. Mengarahkan dan mengendalikan anggaran perusahaan yang efektif dan efisien.
d. Mengendalikan tercapainya kebijakan keuangan dan pelaporan yang telah ditetapkan.

6. Direktur Umum & SDM

Direktorat Umum dan SDM mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan,pengoordinasian dan pengendalian kebijakan dan strategi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi, Pengadaan serta Pengelolaan Aset dan Layanan Umum guna tercapainya efektivitas sumber daya perusahaan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Direktur Umum dan Sumber Daya :

a. Merencanakan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan di bidang sumber daya manusia, pengelolaandan pengembangan kompetensi, pengadaan serta pengelolaan aset dan layanan umum.
b. Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pengusahaan di bidang sumber daya manusia, pengelolaan dan pengembangan kompetensi, pengadaan serta pengelolaan aset dan layanan umum.
c. Mengendalikan terlaksananya kebijakan sumber daya manusia, pengelolaan dan pengembangan kompetensi, pengadaan, pengelolaan aset dan layanan umum yang telah ditetapkan.

7. Direktur Perencanaan, Pengembangan & Informasi

Direktorat Perencanaan Pengembangan dan Informasi mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan, pengoordinasian, penetapan dan pengendalian kebijakan pengembangan perusahaan dan teknologi informasi.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas :

a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan perencanaan strategis dan pengembangan teknologi informasi perusahaan.
b. Mengendalikan pengelolaan operasional teknologi informasi.
c. Merencanakan, mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perusahaan jangka pendek dan panjang.
d. Mengendalikan evaluasi dan monitoring implementasi rencana strategis perusahaan dan melakukan penilaian kinerja korporat.
e. Mengarahkan pemantauan dan kajian atas proses bisnis dan sistem manajemen perusahaan.
f. Mengendalikan pengelolaan *knowledge management* dan kemitraan strategis di industri penyelenggara jaminan sosial.
g. Mengarahkan dan mengoordinasikan pengelolaan risiko perusahaan.
h. Mengendalikan tercapainya kebijakan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi perusahaan yang telah ditetapkan.

Pembagian tugas supervisi dan pembinaan di samping pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut, dalam rangka efektivitas Operasionalisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, Direksi telah menetapkan pembagian tugas supervisi dan pembinaan sebagai berikut:

PEMBAGIAN SUPERVISI UNIT DAN TUGAS PEMBINAAN DIREKSI

No	Direktur	Membawahi	Wilayah Binaan
1	Direktur Utama	• Biro Sekretaris Perusahaan • Biro Pengawasan Intern • Biro Kepatuhan dan Hukum • Unit *Transformation Office*	
2	Direktur Kepesertaan	• Divisi Pengembangan Kepesertaan • Divisi Pengelolaan Kepesertaan • Divisi Peningkatan Kesejahteraan Peserta (PKP) dan Kemitraan	• Kanwil Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatimbanusra) • Kanwil Banten
3	Direktur Pelayanan	• Divisi Teknis • Divisi Pelayanan	• Kanwil Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) • Kanwil Sulawesi
4	Direktur Investasi	• Divisi Analisa Portofolio • Divisi Investasi Langsung • Divisi Pasar Uang Pasar Modal	• Kanwil Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
5	Direktur Keuangan	• Biro Keuangan • Biro Akuntansi	• Kanwil DKI Jakarta • Kanwil Kalimantan
6	Direktur Umum dan SDM	• Biro SDM • Biro Pengadaan • Biro Pengelolaan Aset & Layanan Umum • Biro Pengelolaan & Pengembangan Kompetensi	• Kanwil Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) • Kanwil Sumatera Barat dan Riau (Sumbarriau)
7	Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi	• Biro Perencanaan Strategis • Biro Pengembangan Teknologi Informasi • Biro Operasional Teknologi Informasi • Biro Manajemen Risiko	• Kanwil Jawa Barat • Kanwil Maluku Papua

Frekuensi Pertemuan, Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat

1. Tingkat Kehadiran
   Selama tahun 2013, Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali, dengan rata – rata tingkat kehadiran rapat sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
1	Elvyn. G. Masassya	Direktur Utama	48	48	100
2	Achmad Riadi	Direktur Pelayanan	48	41	85
3	Junaedi	Direktur Kepesertaan	48	42	87
4	Jeffry Haryadi PM	Direktur Investasi	48	44	91
5	Herdy Trisanto	Direktur Keuangan	48	43	89
6	Agus Supriyadi	Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi	48	47	98
7	Amri Yusuf	Direktur Umum dan SDM	48	44	91
Rata – Rata Tingkat Kehadiran Rapat			**48**	**44.14**	**91.57**

2. Agenda Rapat
Berdasarkan rapat Direksi, agenda rapat Direksi selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat
1.	Selasa, 8 Januari 2013	1. Percobaan Pengoperasian *Teleconference.* 2. Pembahasan RJPP. 3. Pembahasan RPP dan Per Pres. 4. Pembahasan Perubahan Pedoman Pengelolaan Investasi. 5. Pembahasan Personil. 6. Pembahasan Laporan Direktur Bidang. 7. Pembahasan *Pending Matters.* 8. Dan lain-lain.
2.	Sabtu, 12 Januari 2013	1. Pembahasan RJPP. 2. Pembahasan Kelas Kantor. 3. Pembahasan Laporan Direktur Bidang. 4. Pembahasan *Pending Matters*. 5. Dan Lain-Lain.
3.	Selasa, 29 Januari 2013	1. Pembahasan Laporan Direktur Bidang dan *Pending Matters*. 2. Dan Lain-Lain.
4.	Selasa, 5 Februari 2013	1. Pembahasan Laporan Direktur Bidang dan *Pending Matters*. 2. Pembahasan Bahan Persiapan RDP dengan Komisi IX DPR RI.
5.	Selasa, 12 Februari 2013	1. Pembahasan Laporan Direktur Bidang *Pending Matters*. 2. Laporan dan Presentasi *Pilot Project* Pelayanan Prima Kacab Kebon Sirih. 3. Dan Lain-Lain.
6.	Selasa, 19 Februari 2013	1. Pembahasan Laporan Direktur Bidang dan *Pending Matters*. 2. Pembahasan Penyempurnaan KEP/34/022011. 3. Presentasi Pakaian Kerja Tahun 2013. 4. Presentasi *Review* Rekanan Jamsostek. 5. Pembahasan KUP. 6. Personil. 7. *Action Plan* Pengalihan Program JPK PT Jamsostek (Persero). 8. Dan Lain-Lain.
7.	Senin, 25 Februari 2013	1. Pembahasan Laporan Direktur Bidang dan *Pending Matters*. 2. Pembahasan Personil. 3. Pembahasan PKB. 4. Pembahasan *Outsourcing*. 5. Pembahasan *Action Plan* Pengalihan JPK. 6. Pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Prima. 7. Pembahasan *Financial Planing*. 8. Dan Lain-Lain.
8.	Selasa, 5 Maret 2013	1. Presentasi *Rebranding*. 2. Pembahasan Laporan Direkstur Bidang. 3. Pembahasan *Learning Center.* 4. Pembahasan Penetapan Kriteria Beasiswa Karyawan untuk Ke Luar Negeri. 5. Pembahasan KPI. 6. Pengadaan Peralatan *Teleconference*. 7. Dan Lain-Lain.

No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat
9.	Rabu, 13 Maret 2013	1. Pembahasan Laporan Direktur Bidang. 2. Pembahasan KPI (*Draft* Bobot). 3. Pembahasan Pengadaan Peralatan *Video Conference*. 4. Presentasi Aplikasi Survei Kepuasan Pelanggan *Online*. 5. Pemnbahasan *Financial Planning*. 6. Dan Lain-Lain.
10.	Selasa, 19 Maret 2013	1. Pembahasan laporan Direktur Bidang. 2. Presentasi Event Promo Jamsostek. 3. Presentasi Desain Komunikasi & CSR. 4. Presentasi KPI. 5. Pemekaran Kantor Wilayah. 6. Study Awal *Smart Card*. 7. Peningkatan Kapasitas DC/DRC. 8. Dan Lain-Lain.
11.	Selasa, 26 Maret 2013	1. Pembahasan Laporan Direktur Bidang. 2. Personil. 3. Dan Lain-Lain.
12.	Selasa, 2 April 2013	1. Presentasi Final Struktur Organisasi PT Jamsostek (Persero). 2. Pembahasan *Final Redeployment*. 3. Program *Big Bang* dari Masing-Masing Direktur Bidang. 4. Dan Lain-Lain.
13.	Selasa, 9 April 2013	1. Pembahasan Laporan Direktur Bidang 2. Presentasi Pendirian Klinik Plus 3. Presentasi Konsultan Bisnis Proses PT. ADW dan KPMG 4. Presentasi Impelemtasi Indonesia WiFi oleh PT. Telkom 5. Dan Lain–Lain
14.	Kamis, 18 April 2013	1. Pembahasan Laporan Direktur Bidang 2. Pembahasan Rencana *Ground Breaking* Pembangunan Rusunawa di Kawasan Industri BUKAKA 3. Pengisian Jabatan Eselon II (*Redeployment Pejabat*) 4. Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan Konsultan Perencana Proses Bisnis 5. Dan Lain–Lain
15.	Rabu, 24 April 2013	1. Pembahasan *Pending Matters* 2. Pembahasan Laporan Direktur Bidang 3. Dan Lain–Lain
16.	Selasa, 30 April 2013	1. Pembahasan Laporan Direktur Bidang 2. *Grand Design* IT dan *Action Plan* Implementasi Elektronik *Service* 3. Pemutakhiran data 4. Dan Lain–Lain
17.	Kamis, 2 Mei 2013	1. Pembahasan *Pending Matters* 2. *Grand Design* IT dan *Action Plan* Implementasi Elektronik *Service* 3. Dan Lain–Lain
18.	Selasa, 14 Mei 2013	1. Pembahasan Laporan Direktur Bidang 2. Pembahasan *Pending Matters* 3. Dan Lain–Lain

No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat
19.	Selasa, 21 Mei 2013	1. Pembahasan *Desk* BRI untuk Pelayanan 2. Penghapus Bukuan Dana JHT usia diatas 55 Tahun Rp 115 Milyar 3. Pembahasan *Pending Matters* 4. Dan Lain-Lain
20.	Selasa, 4 Juni 2013	1. Pembahasan Materi "Pengisian Personil Ka.Kanwil & Ka.Kacab yang pensiun" 2. Pembahasan *Pending Matters* 3. Pembahasan Laporan Direktur Bidang 4. Presentasi Konsultan PT Dunamis Intrasarana dan Konsultan Mark Plus Indonesia 5. Dan Lain-Lain
21.	Selasa, 11 Juni 2013	1. Pembahasan Laporan Direktur Bidang 2. Pembahasan *Pending Matters* 3. Dan Lain-Lain
22.	Rabu, 19 Juni 2013	1. Pengalihan asset ke BPJS 2. Pengalihan asset liabilitas ke ASKES 3. *Redeployement*: Alokasi fungsi pejabat yang menunggu penempatan kembali. 4. Asset Tanah di Rasuna Said 5. Persiapan Raker BOD dan eselon 1 6. Dan Lain-Lain
23.	Selasa, 2 Juli 2013	1. Pembahasan Penyesuaian hasil pengembangan JHT 2012 2. Progress penyelesaian Klaim JHT Usia 55 tahun 3. Tindak Lanjut Amanah RUPS yang sudah disepakati dengan Komisaris. 4. Dan Lain-Lain
24.	Selasa, 9 Juli 2013	1. *Reward* dan Insentif 2. Safari Ramadhan Direksi 3. Lain-Lain
25.	Rabu, 17 Juli 2013	1. Pengisian Jabatan Kosong (Kakacab) 2. Presentasi Tim RKAP 3. Penilaian Konsultan Proses Bisnis 4. Lain-Lain
26.	Selasa, 23 Juli 2013	1. Presentasi Proses Bisnis 2. *Contact Center* 3. Evaluasi Pengadaan TIK (Teknologi Informasi Komunikas) menggunakan payung sinergi BUMN dengan Telkom 4. Lain-Lain
27.	Selasa, 30 Juli 2013	1. Pembiayaan Penandatangan JSPO 2. *Contact Center* 3. Evaluasi Pengadaan TIK (Teknologi Informasi Komunikas) menggunakan payung sinergi BUMN dengan Telkom 4. Lain-Lain
28.	Selasa, 13 Agustus 2013	1. RS Pekerja 2. Laporan Direktur Pembina 3. Seragam 4. Lain-Lain

No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat
29.	Selasa, 20 Agustus 2013	1. Strategi Operasional 2. Progress Report *Smart Card*, Bisnis Proses, *Rebranding* dan *Service Blue Print*. 3. Evaluasi Pengadaan TIK Menggunakan Sinergi BUMN 4. Permasalahan *Outsourcing* 5. Lain-Lain
30.	Jumat, 23 Agustus 2013	1. Laporan Direktur Pembina 2. Progress Transformasi 3. Struktur Obligasi, *Property Company* dan Penjualan Asset MTN 4. Laporan BPK dan Laporan Kinerja Keuangan 5. *Pending Matters* 6. Lain-Lain
31.	Selasa, 27 Agustus 2013	1. Pengisian Jabatan Direktur Utama DPKJ 2. Pembahasan Materi Ragab 3. *Rebranding* 4. *Contact Centre* 5. Lain-Lain
32.	Selasa, 3 September 2013	1. Struktur Obligasi, *Property Company* dan Penjualan Asset MTN 2. Pergeseran Anggaran Belanja Modal 3. *Review* Tim 4. Kegiatan *Big Bang* 5. Materi Paparan Direksi pada Rakernas 6. Lain-Lain
33.	Rabu, 11 September 2013	1. Presentasi Konsultan *Social Media* 2. Jamsostek *Goes to Campus* 3. Strategi Optimalisasi Lahan *Property* Investasi 2013 4. Lain-Lain
34.	Rabu, 18 September 2013	1. *Big Bang* Direktorat 2. *Review* Tim 3. Presentasi Mitra Optimalisasi Lahan *Property* 4. Lain-Lain
35.	Selasa, 24 September 2013	1. Pembahasan Materi Ragab 2. Presentasi Mitra Optimalisasi Lahan *Property* 3. *Rebranding* 4. Personil 5. Lain-Lain
36.	Selasa, 1 Oktober 2013	1. *Progress* Transformasi Direktorat 2. *Board's Update* Penerapan Manajemen Risiko Korporasi 3. Program Jasa Konstruksi Aset dalam Pengawasan Khusus 4. Rumah Susun 5. *Review* Tim 6. Pengadaan Tanah 7. *Pending Matters* 8. Lain-Lain
37.	Selasa, 8 Oktober 2013	1. Optimalisasi Lahan *Property* 2. RKA BPJS KetenagakerjaanTahun 2014 3. Service *Blue Print*, Balai Harta, Best Service Award 4. Progress Transformasi 5. *Pending Matters* 6. Lain-Lain

No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat
38.	Rabu, 16 Oktober 2013	1. *Rebranding* 2. Optimalisasi Lahan *Property Company* 3. *Pending Matters* 4. Lain-Lain
39.	Selasa, 22 Oktober 2013	1. Pembahasan Materi Rapat Gabungan 2. Lain-Lain
40.	Senin, 28 Oktober 2013	1. *Service Blueprint* 2. Penambahan Kapasitas DC/DRC 3. Rumah Susun Semarang 4. Optmialisasi Lahan *Property Company* 5. *Review Pending Matters* 6. Lain-Lain
41.	Rabu, 6 Nopember 2013	1. Audit dan *Road Human Capital* 2. Penambahan Kapasitas DC/DRC 3. Kajian Mitra Optimalisasi Lahan *Property* 4. Rumah Susun Semarang 5. Pembayaran JHT Eks Karyawan Swasta Timur Timur 6. *Pending Matters* 7. Lain-Lain
42.	Selasa, 19 Nopember 2013	1. Pengisian Jabatan Kosong 2. *Review Service Blue Print (Markplus), Smart Card, Rebranding*, Pelayanan Prima, RPP PerPres 3. Proses Pengadaan Logo BPJS 4. Progress Transformasi 5. Optimalisasi Lahan *Property Company* 6. Strategi Pemutakhiran Data 7. *Pending Matters* 8. Lain-Lain
43.	Selasa, 26 Nopember 2013	1. Pembahasan Materi Ragab a. *Progress* Transformasi b. Kinerja sd. Oktober 2013 c. KPI Direksi dan Pencapaiannya sd. TW III d. Perkembangan RKAP 2014 2. *Pending Matters* 3. Lain-Lain
44.	Kamis, 5 Desember 2013	1. Tindak Lanjut Program PKBL 2. KPI Direksi 3. *Review Best Service Award* 4. Lain-Lain
45.	Selasa, 10 Desember 2013	1. Tindak Lanjut Program PKBL 2. KPI Direksi 3. Kelanjutan Program JPK Karyawan 4. Hasil Pengembangan JHT 5. *Review Best Service Award* 6. Lain-Lain
46.	Selasa, 17 Desember 2013	1. Transformasi Jamsostek 2. Laporan Kinerja Kantor Cabang 3. Laporan Direktur Pembina Mengenai Isu dan Kegiatan yang membutuhkan Perhatian

No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat
		4. Usulan Penyesuaian Remunerasi Karyawan 5. Pemisahan *Asset* 6. *Pending Matters* 7. Lain-Lain
47.	Selasa, 24 Desember 2013	1. Pembahasan Materi Ragab : a. Progress Transformasi. b. Tindak Lanjut Peralihan Kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) menjadi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. c. Status Semua Ketentuan/Peraturan yang Selama Ini Ditetapkan Baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) Setelah menjadi BPJS Ketenagakerjaan (Badan Hukum Publik). d. Kinerja Perusahaan. e. *Progress* PP/Per Pres. f. Koordinasi untuk Penetapan RKAT 2014 BPJS Ketenagakerjaan 2. Lain-Lain. 3. Laporan Kinerja Kantor Cabang 4. Laporan Direktur Pembina Mengenai Isu dan Kegiatan yang Membutuhkan Perhatian. 5. Usulan Penyesuaian Remunerasi Karyawan 6. PHK Karyawan 7. Pemisahan Asset, Rencana Divestasi (PT. Asrinda Arthasangga, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Pusako Tarinka), Rencana Kerjasama Pengusahaan Jalan Tol Atas Laut Jakarta-Surabaya 8. Lain-Lain
48.	Senin, 30 Desember 2013	1. Penempatan Personil 2. KPI Kantor Wilayah/Kantor Cabang 3. Laporan Direktur Pembina 4. *Launching* Logo BPJS 5. Lain-Lain

Program Pelatihan

Program Pelatihan dan pendidikan yang dikombinasikan dalam *self study* dan keikutsertaan pada pelatihan khusus, *workshop*, seminar, *conference*, yang bermanfaat dalam meningkatan kompetensi Direksi. Program pelatihan dan pendidikan dilaksanakan baik secara formal maupun secara informal. Program Pelatihan Direksi dan pendidikan secara formal yang dilaksanakan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Program	Tempat dan Waktu Pelaksanaan
1	Elvyn G. Masassya	"106" Meeting of TLEISSA BUREM	Geneva 15 – 17 Januari 2013
		Seminar Prospek Ekonomis & Sinergi Investasi Tahun 2013	Los Angeles 22 – 25 Februari 2013
		"ISSA" dalam Seminar *Providing Adequate Benefits*	Oslo, Norway 4 – 10 Mei 2013
		Modern Corporate Governance Training	Paris, Perancis 25 Mei – 1 Juni 2013
		Seminar *Fund Forum International* 2013	Monaco, Swiss 22 – 29 Juni 2013
		ASSA *Bound Meeting* 2013	Laos 29 Oktober – 1 November 2013
		World Social Securities Forum	Qatar 9 – 11 November 2013
		World Pension Summit	Amsterdam 11 – 17 November 2013
2	Herdy Trisanto	*Technical Meeting Seminar on Productive and Preventive*	Muscat, Oman 22-25 Februari 2013
3	Jeffry Haryadi PM	Kunjungan *Business Economy Outlook*	New York, Washington, AS 1 – 12 Maret 2013
		Studi Banding Industri *Investment Management*	London 21 – 28 Juni 2013
4	Junaedi	*International Seminar On Contribution and Controling Fraud In Social Security*	Madrid, Spanyol 7 – 15 April 2013
5	Agus Supriyadi	Seminar *Cambridge Global* ASEAN *Leadership Programer*	Cambridge, Inggris 3 – 12 Mei 2013
		ASSA *Bound Meeting* 2013	Laos 29 Oktober – 1 November 2013
		World Social Securities	Doha, Qatar 9 – 15 November 2013
6	Amri Yusuf	Seminar Cambridge Global ASEAN *Leadership Programer*	Cambridge, Inggris 3 – 12 Mei 2013
		Benchmarking Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Australia 24 – 30 November 2013

Pedoman dan Tata Tertib Direksi (*Board Charter*)

1. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas kepengurusan Perusahaan, Direksi memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perusahaan dan keputusan RUPS sepanjang keputusan RUPS tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau anggaran dasar Perusahaan.
b. Memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perusahaan dan Keputusan RUPS serta RKAP yang telah disahkan.
c. Pengelolaan Perusahaan mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, sistem pengendalian intern, komunikasi dan tanggung jawab sosial.
d. Melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Bertanggung jawab dan berwenang melakukan kebijakan jalannya pengurusan Perusahaan dan usaha Perusahaan termasuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Perusahaan.
f. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utama Direksi, jabatan Direksi di Perusahaan lain, termasuk jumlah rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku.

2. Tugas

Dalam melaksanakan kepengurusan Perusahaan, Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menetapkan visi, misi, budaya dan strategi perusahaan.
b. Menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru dan menyelenggarakan program pelatihan/ pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi secara berkelanjutan yang direalisasikan sesuai RKAP.
c. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan mengenai tata kelola Perusahaan.
d. Menghindari terjadinya penyimpangan penerapan prinsip-prinsip GCG sesuai pedoman GCG pada BUMN, pedoman umum GCG Indonesia dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.
e. Melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan dan penyampaian LHKPN.
f. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan mengenai pengendalian gratifikasi.
g. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan mengenai sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*whistle blowing system*).
h. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang pengembangan karier.
i. Memberikan respon terhadap usulan; peluang bisnis, yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan, penghematan Perusahaan, pendayagunaan aset dan manfaat lainnya dalam lingkup kewenangan Direksi dengan melakukan identifikasi hal-hal yang memberikan peluang bisnis dan mengambil keputusan.
j. Melaksanakan program/kegiatan Perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
k. Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja Perusahaan sesuai dengan *shareholders aspiration* yang digunakan sebagai dasar penilaian kontrak manajemen yang ditetapkan dalam RUPS pengesahan RKAP.
l. Menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP untuk jabatan struktural secara berjenjang sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan struktural dilengkapi dengan kontrak kinerja setiap unit/jabatan.
m. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan capaian kinerja untuk unit/jabatan (struktural) di dalam organisasi secara berkala,tepat waktu dan berjenjang serta melakukan pembahasan dengan unut/ jabatan yang tidak/belum mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan.
n. Melaksanakan penilaian kinerja (*performance appraisal*) bagi karyawan secara konsisten sesuai dengan indikator kinerja individu dan target yang ditetapkan. Hasil penilaian kinerja dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan.
o. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang sistem teknologi informasi.
p. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.

q. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang sistem pengadaan barang dan jasa.
r. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perusahaan.
s. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia.
t. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang manajemen risiko Perusahaan.
u. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang sistem pengendalian intern Perusahaan untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
v. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Biro Pengawasan Intern dan auditor eksternal (KAP dan BPK) serta melakukan *monitoring* tingkat penyelesaian (*progress*) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi Biro Pengawasan Intern dan auditor eksternal.
w. Menjalankan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
x. Melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta memperhatikan kepentingan berbagai pihak (Pemangku Kepentingan).
y. Melakukan dan meningkatkan hubungan kerja/kemitraan yang memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan Pemangku Kepentingan berdasarkan pada kebijakan Perusahaan.

3. Wewenang

Dalam pelaksanaan tugas kepengurusan Perusahaan Direksi memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Menetapkan struktur/susunan organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk semua tingkat jabatan.
b. Melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja Direksi kepada Dewan Komisaris dan pencapaian kinerja Perusahaan berdasarkan target-target kolegial Direksi maupun pencapaian target kinerja masing-masing Direksi berdasarkan target-target dalam kontrak manajemen.
c. Menyampaikan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (IPK).
d. Menetapkan dan mengatur mekanisme tertulis untuk menampung dan menyelesaikan keluhan-keluhan Pemangku Kepentingan secara tuntas.
e. Menetapkan dan mengatur mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan Perusahaan (*corporate action*) sesuai peraturan perundang-undangan dan tepat waktu terdiri dari pengambilan keputusan melalui rapat Direksi dan pengambilan keputusan diluar rapat Direksi.
f. Membuat dan menyampaikan laporan manajemen dan laporan tahunan yang memuat informasi-informasi penting dan relevan secara tepat waktu dan disajikan dengan akurat, jelas dan obyektif.
g. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain.
h. Menetapkan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak Perusahaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN. Setelah penetapan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak Perusahaan Direksi wajib melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
i. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
j. Mengangkat dan memberhentikan pejabat Perusahaan sampai jenjang tertentu yang di atur melalui ketetapan Direksi, kecuali untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Biro Sekretariat Perusahaan maupun Kepala Biro Pengawasan Intern setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
k. Mengatur ketentuan tentang karyawan Perusahaan termasuk karyawan pada semua tingkatan jabatan, sesuai, dengan spesifikasi jabatan, memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan Perusahaan serta penetapan gaji, pensiun atau/ jaminan hari penghasilan lain bagi karyawan Perusahaan – berdasarkan peraturan perundang-undangan.
l. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak

lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perusahaan dan/atau Keputusan RUPS.

m. Menyampaikan usulan perubahan anggaran dasar Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
n. Menetapkan kegiatan kerjasama atau kontrak dengan nilai kontrak atau penggunaan/ perolehan aset yang melebihi kewenangan Direktur seperti yang diatur dalam kebijakan keuangan.
o. Bersama Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS mengenai penetapan besaran dan jenis penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi.

Kebijakan Suksesi Direksi

Suksesi kepemimpinan dalam perusahaan adalah peralihan kepemimpinan di dalam perusahaan, yang diawali pada saat rekrutmen, jalur karir yang ditempuh baik di tingkat manajer muda, manajer menengah maupun pada tingkat manajer puncak,yang pada gilirannya diharapkan akan menduduki posisi Direksi perusahaan.

Rencana suksesi merupakan program yang perlu dimiliki setiap perusahaan untuk menjaga regenerasi kepemimpinan dan meningkatkan kinerja organisasi di tengah persaingan yang makin ketat. Rencana suksesi tidak hanya bermanfaat untuk posisi puncak perusahaan, melainkan juga membekali calon-calon pemimpin lainnya di segenap bagian perusahaan dengan skill dan kompetensi yang dibutuhkan.

1. Rekrutmen

Perusahaan telah memiliki rencana suksesi kepemimpinan untuk menyiapkan pimpinan yang handal di masa datang. Dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, telah dilakukan rekrutmen karyawan yang berasal dari Perguruan Tinggi terbaik di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Sehingga dapat dijaring mahasiswa yang lulus dengan nilai terbaik. Rekrutmen itu dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi program Jamsostek (*Jams Goes To Campus*) di 11 Perguruan Tinggi sesuai domisili Kantor Wilayah. Selain itu dilakukan pula rekrutmen lulusan Pascasarjana dari Perguruan Tinggi Terbaik, dan rekrutmen tenaga ahli sesuai kebutuhan perusahaan.

2. *Competency Based Human Resources Management*

Pelaksanaan suksesi kepemimpinan di perusahaan dilakukan dengan manajemen SDM berbasis kompetensi atau *Competency Based Human Resources Management* (CBHRM). Semangat CBHRM adalah untuk menghargai kemampuan dan potensi seseorang agar dapat dikembangkan secara fokus dan optimal. Adapun kompetensi Sumber Daya Manusia perusahaan tertuang dalam Model dan Kamus Kompetensi yang merupakan derivasi dari visi, misi dan nilai-nilai budaya perusahaan yang telah hidup dan berkembang dalam lingkungan perusahaan.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/280/102008 tentang Model dan Kamus Kompetensi yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan pendidikan dan latihan secara berjenjang dengan berbagai jenis Diklat karir, Diklat penunjang profesi dan Diklat lainnya baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Jenis diklat, persyaratan dan pengisian jabatan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP/248/122006 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Karyawan sebagai pendidikan jenjang jabatan minimal yang harus ditempuh oleh calon Direksi ke depan sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Jenis Diklat Karir	Persyaratan	Pengisian Jabatan
1	Kepemimpinan Muda	• S1 • Masa kerja minimal 4 tahun • Ada usulan kepala unit kerja	Kepala Bidang Kelas I, II, III
2	Kepemimpinan Madya	• S1 • Masa kerja minimal 10 thn • Lulus dikpim Muda • Ada usulan kepala unit kerja	Kepala Cabang/Urusan
3	Kepemimpinan Utama	• SI • Masa kerja minimal 15thn • Lulus dikpim madya • Ada usulan kepala unit kerja	Kepala Wilayah/Divisi/Biro

4. Seleksi

Mekanisme rencana suksesi yang di terapkan perusahaan sebelum karyawan ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural seperti Kepala Divisi/Biro, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Cabang dan Kepala Bidang harus melalui tahapan seleksi yaitu:

a. Tahapan seleksi administrasi.
   1) Pendidikan minimal S1
   2) Memiliki masa jabatan sebelumnya minimal 4 (empat) tahun.
   3) Lulus seleksi dan *assessment*
   4) Kandidat berasal dari rumpun jabatan yang sama atau antar rumpun jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya
   5) Kandidat sudah mengikuti diklat kepemimpinan (Utama, Madya, Muda)
   6) Kandidat memiliki kinerja minimal baik sekali
b. Verifikasi kesesuaian kompetensi calon dengan jabatan yang dituju
   1) Memiliki pengalaman dibidang yang relevan
   2) Memiliki kemampuan manajerial yang baik
   3) Latar belakang pendidikan terakhir yang sesuai
c. Penetapan pejabat yang memenuhi persyaratan oleh Direksi dalam bentuk Surat Keputusan Direksi.

5. *Assessment*

Selain Diklat Kepemimpinan, pejabat pada setiap tingkat jabatan harus di ikut sertakan dalam program *assessment* dengan tujuan dan prosedur sebagai berikut:

a. Untuk mengukur dan memetakan tingkat kompetensi individu dalam rangka mengetahui deviasi antara tingkat persyaratan kompetensi jabatan dengan tingkat kompetensi pemegang jabatan.
b. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk menentukan penempatan dan pengembangan pejabat yang memenuhi persyaratan kompetensi.
c. Dalam kegiatan tersebut, peserta diukur melalui dua pendekatan yaitu pengukuran psikologis yang mengukur aspek-aspek potensi dan pengukuran kompetensi yang mengukur *soft competency* individu dalam bekerja.
d. Laporan Hasil *Assessment Competency* meliputi metodologi pengukuran yang dilakukan, peta potensi dan rekomendasi seluruh peserta, dan laporan hasil pengukuran per individu.
e. Hasil dari pengukuran kompetensi tersebut, peserta dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu :
   1) Kuadran 1, yaitu mereka yang dinilai memiliki potensi kepemimpinan yang dapat diandalkan dengan kekuatan sendiri. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan akan mempercepat dan menambah bobot kompetensi yang bersangkutan.
   2) Kuadran 2, yaitu mereka yang dinilai memiliki kompetensi yang dapat dikembangkan dengan bantuan pihak lain, misalnya manajemen. Setelah melalui pelatihan atau magang yang intensif, masih dapat diharapkan untuk mencapai jabatan manajerial yang memerlukan kebijakan dan wawasan.
   3) Kuadran 3, yaitu mereka yang dinilai memiliki kelemahan pada aspek tertentu yang memerlukan usaha yang relatif besar dan waktu yang relatif lebih lama bila ingin dikembangkan lebih lanjut .
   4) Kuadran 4, yaitu mereka yang secara potensial dinilai lemah dalam beberapa aspek tertentu. Untuk pengembangan kompetensi, kemungkinan besar harus ditempuh dalam waktu yang panjang yang membutuhkan waktu yang lama, tenaga yang besar dan kemungkinan juga biaya yang besar.

Untuk menduduki jabatan struktural eselon I (Kepala Divisi/Kepala Biro) calon terpilih yang sudah memenuhi persyaratan diatas, harus mengikuti tahapan seleksi lainnya berupa uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan langsung oleh direksi. Dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut peserta memaparkan visi dan rencana kerja apabila terpilih menduduki jabatan Kepala Divisi/Kepala Biro.

Pelaksanaan *Fit and proper test* adalah sebagai penentu dengan secara langsung menggali kemampuan masing-masing kandidat dari segi *leadership, performance* dan kemampuan dalam memecahkan masalah (*problem solving*) dengan parameter yang digunakan adalah:

a. Aspek Kompetensi Manajerial (*Team Leadership, Problem Solving and Desicion Making, Developing Othter, POC, Buliding Partnership*).
b. Aspek Leadership (*Risk Taking, Responsible and Accountable, Assertive Communication, Inspiring and Role Model*).
c. Aspek Kemampuan Teknikal Pekerjaan.

Penilaian Kinerja Direksi Secara Kolegial

a. Kontrak Manajemen

Berdasarkan Kontrak Manajemen antara Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT Jamsostek (Persero) dengan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) yang telah ditandatangani oleh pemegang saham.

Penilaian Kontrak Manajemen dilaksanakan secara *self assesment* oleh tim yang dibentuk Direksi dan hasil penilaian atas Kontrak Manajemen adalah **106,31** dengan rincian sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA	BOBOT	TARGET	REAL	NILAI
A.	**Aspek Kepemimpinan**						
1	Pengendalian Risiko	Indeks	Maturity Level	2,00	2,50	2,75	2,20
2	Pencapaian Skor GCG	Skor	Skor Indeks GCG	4,00	85,00	95,04	4,47
3	Pemenuhan Portal BUMN	%	Data "Lengkap"	4,00	90,00	90,00	4,00
			Sub Total	**10,00**			**10,67**
B.	**Aspek Perencanaan Strategis**						
1	Penyusunan RJPP	Unit	Persetujuan Pemegang Saham atas RJPP	4,00	1	1	4,00
2	Penyampaian RKAP	Waktu	Tanggal Penyampaian Buku RKAP	4,00	31 Okt	31 Okt	4,00
3	Penyampaian Laporan Keuangan Audited	Waktu	Tanggal Penyampaian Buku Laporan Keuangan Audited	4,00	2 minggu sblm RUPS	11 April 2013	4,80
			Sub Total	**12,00**			**12,80**
C.	**Aspek Fokus pada Pelanggan dan Pasar**						
1	Penambahan Peserta Aktif	%	Peserta Aktif Thn Berjln - Peserta A / Peserta Aktif	4,00	10,72	7,07	2,64
2	Tingkat Kepuasan Peserta						
	- Program Non JPK	%	Realisasi Indeks CS / Standart Indeks CS	4,00	85,00	89,40	4,21
	- Program JPK	%	Realisasi Indeks CS / Standart Indeks CS	4,00	85,00	84,80	3,99
			Sub Total	**12,00**			**10,84**
D.	Aspek Perbaikan Kinerja Pegawai						
1	Pencapaian Strategic Job Readines	%	Jml Job Title Strategis yg Terpenuhi (Jml dan Kompetensi) / Jml Job Title Strategis	4,00	70,00	80,00	4,57
2	Produktivitas Karyawan	Rp.	Penerimaan Iuran / Jumlah Karyawan	4,00	Rp. 6,536 Juta	Rp. 8,565 Juta	4,80
3	Pengembangan SDM	%	Biaya Pendidikan / Beban Pegawai	4,00	2,20	2,11	4,14
			Sub Total	**12,00**		**13,51**	
E.	Aspek Pengelolaan Proses Produksi/Pelayanan						
1	Rata-rata kecepatan Klaim	Hari Day	Standar Hari Penyelesaian / Rata-rata Hari Penyelesaian	4,00	2,00	0,50	4,80
2	Perbaikan SMM ISO 9001:2008	%	Jml Sertifikat Sekarang / Jml Sertifikat yang Dipertahankan	4,00	100,00	100,00	4,00
			Sub Total	**8,00**		**8,80**	
F.	Aspek Hasil Capaian Kinerja Perusahaan						
	Keuangan :						
1	Rentabilitas						
	- Return On Asset (ROA)	%	Laba Sebelum Pajak / Total Aset - Aset JHT	4,00	10,76	9,34	3,47
	- Return On Equity (ROE)	%	Laba Setelah Pajak / Rata-rata Equitas	4,00	10,76	35,46	4,77

NO	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA	BOBOT	TARGET	REAL	NILAI
2	Likuiditas	%	Aset Lancar / Kewajiban Lancar	3,00	250,20	396,23	3,60
3	Solvabilitas	%	Kekayaan yg Diperkenankan - Kewajiban / 20% X Kewajiban Non JHT	3,00	159,72	295,41	3,60
4	Expense Ratio	%	Biaya Usaha / Pendapatan Iuran	4,00	10,76	9,38	4,59
5	Rasio Kecukupan Investasi (RKI)						
	- RKI JHT	%	Investasi JHT / Kewajiban JHT	4,00	98,84	99,48	4,03
	- RKI Non JHT	%	Investasi Non JHT / Cad Teknis + Hutang Klaim	4,00	125,63	153,03	4,80
6	Yield On Investment (YOI)	%	Hasil Investasi / Rata-rata Investasi	4,00	10,5	10,6	4,03
	Non Keuangan						
1	Pertumbuhan Iuran	%	Iuran Th Berjln - Iuran Th Lalu / Iuran Tahun Berjalan	4,00	23,62	32,18	4,80
2	Opini Auditor	Kriteria	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4,00	WTP	WTP	4,00
3	Pencapaian Capex						
	- Program	%	Rencana Program Kerja / Realisasi Program Kerja	4,00	100,00	100,00	4,00
	- Fisik	%	Rencana Jumlah Fisik / Realisasi Jumlah Fisik	4,00	75,00	75,00	4,00
			Sub Total	**46,00**			**48,68**
			Total	**100,00**			**106,31**

b. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Yusuf, Mawar dan Saptoto melakukan penilaian atas Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan maka hasil penilaian atas Tingkat Kesehatan Perusahaan adalah 94,00 dengan rincian sebagai berikut:

RANCANGAN BARU			NILAI		
SATUAN UNIT	KRITERIA PENILAIAN	FORMULA	PERHITUNGAN	Bobot	Score
	A. ASPEK KEUANGAN				
	1. RENTABILITAS				
%	a. RETURN ON ASSET (ROA) (%)	Laba Sebelum Bagian peserta / Rata-rata total Aset	13.511.880 / 144.696.646 = 9,34	5,00	5,00
%	b. RETURN ON EQUITY (ROE) (%)	Laba Setelah Pajak / Rata-rata ekuitas	2.287.643 / 6.450.864 = 35,46	5,00	5,00
%	**2. SOLVABILITAS (%)**	Kekayaan yang diperkenankan - Kewajiban / 20 % X Kewajiban Non JHT	7.000.497 / 2.369.768 = 295,41	15,00	15,00
%	**3. LIKUIDITAS (%)**	Aset Lancar / Hutang lancar	2.547.811 / 643.019 = 396,23	10,00	10,00
	SUB TOTAL KEUANGAN			**35,00**	**35,00**
	B. ASPEK OPERASIONAL				
%	**1. Rasio Kecukupan Investasi (RKI)**				
	a. RKI (JHT) (%)	Dana Investasi JHT / Kewajiban JHT	133.347.885 / 133.309.932 = 100,03	5,00	5,00

RANCANGAN BARU			NILAI		
SATUAN UNIT	KRITERIA PENILAIAN	FORMULA	PERHITUNGAN	Bobot	Score
	b. RKI (Non JHT) (%)	Dana Investasi Non JHT / Cadangan Teknis + Hutang Klaim	18.154.333 / 11.863.595 = 153,03	5,00	5,00
%	**2. YOI**	Hasil Investasi / Rata-rata Investasi	14.877.075 / 141.035.780 = 10,44	10,00	10,00
%	**3. PERTUMBUHAN PREMI**	Iuran tahun berjalan Iuran Tahun Lalu / Iuran tahun Lalu	6.554.650 / 20.369.430 = 32,18	10,00	10,00
%	**4. EXPENSE RATIO**	Biaya Usaha (real cost) / Pendapatan Iuran (JHT + N. JHT)	2.526.318 / 26.924.079 = 9,38	10,00	10,00
%	**5. TINGKAT KEPUASAN PESERTA**	Realisasi Indeks CS Prog. JPK / Standar Indeks CS	84,80	5,00	5,00
		Realisasi Indeks CS Prog. Non JPK / Standar Indeks CS	89,40	5,00	5,00
	SUB TOTAL OPERASIONAL			**50,00**	**50,00**
	C. ASPEK ADMINISTRASI				
bulan	**1. LAPORAN KEUANGAN AUDITED (Laporan perhitungan tahunan)**	Batas Waktu Penyampaian Lap. Keuangan Audit / Realisasi Penyampaian Lap. Keu Audit	11- Apr - 2013	3,00	3,00
bulan	**2. RANCANGAN RKAP**	Batas Waktu Penyampaian RKAP / Realisasi Penyampaian RKAP	28 - Okt - 2012	3,00	3,00
bulan	**3. Laporan Periodik (Triwulanan dan Tahunan Unaudited)**	Batas Waktu Penyampaian Lapmen / Realisasi Penyampaian Lapmen	0<x<= 30 hari	3,00	2,00
	4. KINERJA PKBL				
%	a. KOLEKTIBILITAS PKBL	Rata-rata tertimbang Kolektibilitas Pinjaman / Jumlah Pinjaman yang Disalurkan	22.794.321.092 / 98.214.107.383 = 23,21	6,00	1,00
%	a. EFEKTIFITAS PENYALURAN PKBL *)	Jumlah Dana yg disalurkan / Jumlah Dana yang tersedia	- / - = -	0,00	0,00
	SUB TOTAL ADMINISTRASI			**15**	**9,00**
	TOTAL PENILAIAN KINERJA			**100**	**94,00**
	PREDIKAT PENILAIAN				**SEHAT (AA)**

*) *Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-478/DS.MBU/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Kewajiban melakukan Rekonsiliasi dan Cut off date kegiatan dan pelaporan PKBL Per 31 Desember 2012, yang menyebutkan bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di-"freeze" sehingga terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyalurkan dana bergulir dan tidak bergulir.*

Penilaian Kinerja Direksi Secara Individu

Penilaian Kinerja Individu Direksi disajikan dalam bentuk Penilaian KPI untuk masing-masing Direktorat tahun 2013 dilakukan oleh Tim Penilai KPI dengan hasil penilaian sebagai berikut:

No	UNIT KERJA	KEUANGAN	PELANGGAN	PROSES INTERNAL	PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN	NILAI
1	Direktorat Utama	32.38	26.70	33.92	17.16	110.17
2	Direktorat Keuangan	39.37	26.55	26.20	16.96	109.08
3	Direktorat Investasi	39.37	25.64	28.04	17.06	110.11
4	Direktorat Renbang	19.76	22.64	34.00	30.61	107.01
5	Direktorat Umum	16.41	21.52	18.9	49.63	106.46
6	Direktorat Kepesertaan	22.41	31.45	35.24	18.94	108.04
7	Direktorat Pelayanan	22.41	30.97	33.84	18.94	106.16

1. Penilaian Kinerja Direktur Utama

Penilaian kinerja Direktur Utama tahun 2013 dengan capaian skor sebesar **110,17**

No	SASARAN STRATEGIS			KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
A	**Perspektif Keuangan**									
	1.	Meningkatkan *Corporate Sustainability*	1.	EAT	Laba sebelum pajak x (1-Tax)	Rp (tril)	5	2.19	2.8	6.00
			2.	ROA	Laba Sebelum Pajak / Total Asset- Aset JHT	%	3	2.19 10.76	9.34	2.60
			3.	Solvabilitas	Kekayaan yg diperkenankan - Kewajiban / 20% x Kewajiban Non JHT	%	5	159.72	295.41	6.00
			4.	Likuiditas	Asset lancar / Kewajiban lancar	%	3	250.20	396.23	4.75
	2.	Meningkatkan Dana Kelola dan Pendapatan Investasi	1.	Jumlah Dana Kelola	Total dana investasi / JHT + Non JHT	Rp	4	149.13	149.23	4.00
			2.	YOI	Total Pendapatan Investasi Bruto / Rata-rata Dana Investasi	%	3	10.48	10.55	3.02
	3.	Mengelola struktur biaya secara optimal	1.	*Expense Ratio*	Biaya Usaha / Pendapatan Iuran	%	5	10.76	9.38	6.00
					Sub Total Perspektif Keuangan		**28**			**32.38**
B	**Perspektif langgan**									
	1	Memperluas Cakupan Kepesertaan	1.	Jumlah Peserta Aktif	Total Peserta Aktif (Netto)	TK	9	13,241,423	12,041,955	8.18
			2.	Jumlah Perusahaan Aktif	Total Perusahaan Aktif (Netto)	Perusahaan	7	188,956	184,912	6.85
	2	Jaminan sosial yang terpercaya	1.	*Brand Equity (Awareness, Image, Loyalty)*	Hasil *Survey Brand Equity*	skor/poin	6	40	80.8	7.20
	3	Bersahabat serta unggul dalam pelayanan dan operasional	2.	*Customer Satisfaction*	Index Kepuasan Peserta Non JPK	%	4	80	89.4	4.47
C	**Perspektif Proses Internal**									
	1	***Product Management***								
	1	Meningkatkan manfaat yang diterima peserta	1.	Hasil pengembangan JHT di atas bunga deposito	Pengembalian dana JHT diatas rata-rata bunga deposito Bank Pemerintah	%	1	2.75	6.02	1.20
			2.	Pengembangan Manfaat Tambahan **food benefit, housing benefit*	Jumlah Lokasi yang Diserap oleh Peserta Jamsostek	Lokasi	1	1	2	1.20
	2	Mengembangkan investasi yang mendukung *value creation*	1.	Persentase alokasi dana investasi untuk investasi langsung	Alokasi DIL / Total Dana Kelolaan	%	1	1.79	0.402	0.22

No	SASARAN STRATEGIS			KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
	2	***Customer Management***								
	1	Meningkatkan kapasitas *law enforcement*	1	Penyelesaian proses bisnis sistem pengawasan	Progress Penyelesaian Proses Bisnis Sistem Pengawasan	%	2	100	100	2.00
			2.	Penyelesaian konsep jaminan Pensiun & JKK *Rehabilitation*	Progress penyelesaian konsep jaminan pensiun dan JKK *rehabilitation*	%	1	100	100	1.00
	2	Memperluas jaringan dan meningkatkan fungsi layanan	1.	Jumlah Total akses point:	Jumlah Total: Mobil Keliling+jaringan kantor cabang+*desk service*	Jumlah	3	205	697	3.60
			2.	Rata-rata persentase peserta yang menggunakan fitur layanan digital	Jumlah peserta yg menggunakan fitur layanan Digital (VA+website) Jumlah Peserta (TK/ perusahaan)	%	2	10	100	2.40
	3	Mengembangkan konsistensi layanan melalui penyusunan standar layanan	1.	Pemetaan Proses Bisnis BPJS	Penyelesaian Rancangan Model Bisnis BPJS	%	2	100	100	2.00
	4	Meningkatkan sistem CRM untuk membina hubungan dengan peserta	1.	*Net Promoter Score*	Hasil Survey Loyalitas Pelanggan	%	3	10	28.3	3.60
	3	**Brand Management**								
	1	Membangun citra BPJS Ketenagakerjaan yang Terpercaya	1	Penyelesaian Konsep *Rebranding*	Progress Penyelesaian *Positioning, Differentiation & Branding*	%	2	100	100	2.00
			2	Opini Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Opini	3	"WTP"	"WTP"	3.60
			3	Penyelesaian Laporan keuangan per program	Neraca terpisah per program (JHT, JKK, JK, JPK, BPJS)	Jumlah	2	5	5	2.00
			4	Pelaksanaan *Smart Financial*	Implementasi *Virtual Account* Nasional	%	1	100	100	1.00
			5	Tepat Waktu Penyampaian RKAP ke Kementrian BUMN	Batas Waktu Penyampaian RKAP 2014 (Maksimal 31 Oktober)	%	1	100	110	1.10
			6	Penyusunan Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan	Terbitnya SK Direksi Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan (maksimal 31 Desember)	%	3	100	Sebelum 31 Des	3.60
			7	*Social Marketing*	Konversi *rate* peserta kampanye/sosialisasi yang menjadi peserta	%	2	10	12	2.40
	2	Membangun kerjasama dengan mitra-mitra strategis	1	Utilisasi peserta yang menggunakan layanan hasil kerjasama dengan mitra strategis						
			1.1	Jumlah peserta yang menggunakan kartu dari *bank co-branding*	Jumlah peserta pengguna kartu dari *bank co-branding*	%	1	5	5	1.00
					Sub Total Perspektif Proses Internal		**31**			**33.92**
D	**Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran**									
	1	***Human Capital***								
	1	Meningkatkan daya dukung karyawan dari segi kualitas dan kuantitas	1	*Job person match*	Hasil *Assesment Job Analysis* Persyaratan Jabatan	%	3	70	85	3.60

No	SASARAN STRATEGIS			KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
			2	*Employee Productivity*	Penerimaan Iuran Jumlah Karyawan	Rp (mil)	3	6.6	8.3	3.60
			3	Indeks Kepuasan Karyawan	*survey engagement* karyawan	%	2	85	93	2.19
			4	Penyelesaian kajian *Carreer path* karyawan struktural dan fungsional	% Tersedianya kajian *Carrier Path* yg disampaikan ke Direktur terkait Pengumpulan data/ studi banding = 10% Analisa = 50% *Draft* kajian selesai = 80% Proses persetujuan Direktur terkait = 90% Laporan kajian selesai = 100%, Sosialisasi & implementasi = 120%	% *(staging)*	1	100	100	1.00
	2 1	***Organization Capital*** Membangun budaya perusahaan yang berfokus pada *performance* dan *teamwork*	1	Sharing ide dari Best Practice	Jumlah ide inovasi yang diterima dan disosialisasikan (pelaksanaan sharing dan paper)	Jumlah	1	4	10	1.20
			2	Maturity Level Manajemen Risiko	Maturity Level untuk Manajemen Risiko	Level	1	2.5	2.75	1.10
	2	Membangun kemampuan kepemimpinan dan akuntabilitas di setiap *level*	1	GCG Index	Hasil assesment GCG	%	4	85	95.04	4.47
					Sub Total Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran		**15**			**17.16**
					TOTAL		**100**			**110.17**

2. Penilaian Kinerja Direktur Keuangan

Penilaian kinerja Direktur Keuangan tahun 2013 dengan capaian skor sebesar **109,08**

No	SASARAN STRATEGIS			KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
A.	Perspektif Keuangan									
	1.	Meningkatkan *Corporate Sustainability*	1.	EAT	Laba sebelum Pajak x (1-Tax)	Rp.(tril)	6	2,19	2,8	7,20
			2.	ROA	Laba Sebelum Pajak / Total Asset-Asset JHT	%	2	2,19 10,76	9,34	1,74
			3.	Solvabilitas	Kekayaan yg diperkenankan - Kewajiban / 20% x Kewajiban Non JHT	%	6	159,72	295,41	7,20
			4.	Likuiditas	Asset lancar / Kewajiban lancar	%	5	250,2	396,23	6,00
	2.	Meningkatkan Dana Kelola dan Pendapatan Investasi	1.	Jumlah Dana Kelola	Total dana investasi JHT + Non JHT	Rp	5	149,13	149,23	5,00
			2.	YOI	Total Pendapatan Investasi Bruto / Rata-rata Dana Investasi	%	5	10,48	10,55	5,03
	3.	Mengelola struktur biaya secara optimal	1.	*Expense Ratio*	Biaya Usaha / Pendapatan Iuran	%	6	10,76	9,38	7,20
					Sub Total Perspektif Keuangan		**35**			**39,37**

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
B.	Perspektif Pelanggan								
	1. Memperluas Cakupan Kepesertaan	1.	Jumlah Peserta Aktif	Total Peserta Aktif (Netto)	TK	10	13.241.423	12.041.955	9,09
		2.	Jumlah Perusahaan Aktif	Total Perusahaan Aktif (Netto)	Perusaha-an	6	188.956	184.912	5,87
	2. Jaminan sosial yang terpercaya	1.	*Brand Equity (Awareness, Image, Loyalty)*	Hasil Survey *Brand Equity*	skor/poin	5	40	80,8	6,00
	3. Bersahabat serta unggul dalam pelayanan dan operasional	1.	*Customer Satisfaction*	Index Kepuasan Peserta Non JPK					
				Sub Total Perspektif Pelanggan		**26**			**26,55**
C.	Perspektif Proses Internal								
	1. Product Management								
	1. Meningkatkan manfaat yang diterima peserta	1.	Hasil pengembangan JHT di atas bunga deposito	Pengembalian dana JHT diatas rata-rata bunga deposito Bank Pemerintah	%	1	2,75	6,02	1,20
	2. Customer Management								
	1. Meningkatkan kapasitas *law enforcement*		Penyelesaian konsep jaminan Pensiun & JKK *Rehabilitation*	Progress penyelesaian konsep jaminan pensiun dan JKK *rehabilitation*					
	2. Memperluas jaringan dan meningkatkan fungsi layanan	1.	Jumlah Total akses point:	Jumlah Total: Mobil Keliling+jaringan kantor cabang+*desk service*	Jumlah	2	205	697	2,40
	3. Mengembangkan konsistensi layanan melalui penyusunan standar layanan	1.	Pemetaan Proses Bisnis BPJS	Penyelesaian Rancangan Model Bisnis BPJS	%	2	100	100	2,00
	3. Brand Management								
	1. Membangun citra BPJS Ketenagakerjaan yang Terpercaya	1.	Opini Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Opini	4	"WTP"	"WTP"	4,80
		2.	Penyelesaian Laporan keuangan per program	Neraca terpisah per program (JHT, JKK, JK, JPK, BPJS)	Jumlah	3	5	5	3,00
		3.	Pelaksanaan *Smart Financial*	Implementasi *Virtual Account* Nasional	%	3	100	100	3,00
		4.	Tepat Waktu Penyampaian RKAP ke Kementrian BUMN	Batas Waktu Penyampaian RKAP 2014 (Maksimal 31 Oktober)	%	2	100	110	2,20

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
		5.	Penyusunan Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan	Terbitnya SK Direksi Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan (maksimal 31 Desember)	%	3	100	Sebelum 31 Desember	3,60
	2. Membangun kerjasama dengan mitra-mitra strategis	1.	Utilisasi peserta yang menggunakan layanan hasil kerjasama dengan mitra strategis						
		1,1	Jumlah peserta yang menggunakan kartu dari bank *co-branding*	Jumlah peserta pengguna kartu dari bank *co-branding*					
				Sub Total Perspektif Proses Internal		**24**			**26,20**
D.	Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran								
	1.Human Capital								
	Meningkatkan daya dukung karyawan dari segi kualitas dan kuantitas	1.	*Job person match*	Hasil *Assesment Job Analysis* Persyaratan Jabatan	%	1	70	85	1,21
		2.	*Employee Productivity*	Penerimaan Iuran / Jumlah Karyawan	Rp (mil)	2	6,6	8,3	2,40
		3.	Indeks Kepuasan Karyawan	Survey *engagement* karyawan	%	2	85	93	2,19
		4.	Penyelesaian kajian Carreer path karyawan struktural dan fungsional	% Tersedianya kajian Carrier Path yg disampaikan ke Direktur terkait Pengumpulan data/studi banding = 10% Analisa = 50% Draft kajian selesai = 80% Proses persetujuan Direktur terkait = 90% Laporan kajian selesai = 100%, Sosialisasi & implementasi = 120%	% (staging)	2	100	100	2,00
	2. Organization Capital								
	1. Membangun budaya perusahaan yang berfokus pada *performance* dan *teamwork*	1.	Sharing ide dari *Best Practice*	Jumlah ide inovasi yang diterima dan disosialisasikan (pelaksanaan *sharing* dan *paper*)	Jumlah	1	4	5	1,20
		2.	*Maturity Level* Manajemen Risiko	*Maturity Level* untuk Manajemen Risiko	Level	2	2,5	2,75	2,20
	2. Membangun kemampuan kepemimpinan dan akuntabilitas di setiap level	1.	*GCG Index*	Skor indeks GCG	%	3	85	95,04	3,35

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
	3. Information Capital Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teknologi informasi	1.	Implementasi aplikasi MPPA Online dan Si Pajak	% Terselesaikan nya Pedoman Aplikasi MPPA Online&Si Pajak Proses penyusunan = 50% SK Direksi = 100% Distribusi buku pedoman = 110% Sosialisasi pedoman = 120%	%	2	100	120	2,40
				Sub Total Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran		**15**			**16,96**
				TOTAL		**100**			**109,08**

3. Penilaian Kinerja Direktur Investasi

Penilaian kinerja Direktur Investasi tahun 2013 dengan capaian skor sebesar **110,11**

Penilaian *Key Performance Indicators* - Tahun 2013
Direktorat Investasi

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
A.	Perspektif Keuangan								
	1. Meningkatkan *Corporate Sustainability*	1.	EAT	Laba sebelum pajak x (1-Tax)	Rp (tril)	6	2,19	2,8	7,20
		2.	ROA	Laba Sebelum Pajak / Total Asset- Aset JHT	%	2	2,19 10,76	9,34	1,74
		3.	Solvabilitas	Kekayaan yg diperkenankan - Kewajiban / 20% x Kewajiban Non JHT	%	6	159,72	295,41	7,20
		4.	Likuiditas	Asset lancar / Kewajiban lancar	%	5	250,20	396,23	6,00
	2. Meningkatkan Dana Kelola dan Pendapatan Investasi	1.	Jumlah Dana Kelola	Total dana investasi JHT + Non JHT	Rp	6	149,13	149,23	6,00
		2.	YOI	Total Pendapatan Investasi Bruto / Rata-rata Dana Investasi	%	4	10,48	10,55	4,03
	3. Mengelola struktur biaya secara optimal	1.	*Expense Ratio*	Biaya Usaha / Pendapatan Iuran	%	6	10,76	9,38	7,20
				Sub Total Perspektif Keuangan		**35**			**39,37**
B.	Perspektif Pelanggan								
	1. Memperluas Cakupan Kepesertaan	1.	Jumlah Peserta Aktif	Total Peserta Aktif (Netto)	TK	9	13.241.423	12.041.955	8,18

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
		2. Jumlah Perusahaan Aktif	Total Perusahaan Aktif (Netto)	Perusahaan	6	188.956	184.912	5,87
	2. Jaminan sosial yang terpercaya	1. *Brand Equity (Awareness, Image, Loyalty)*	Hasil Survey *Brand Equity*	skor/poin	5	40	80,8	6,00
	3. Bersahabat serta unggul dalam pelayanan dan operasional	1. *Customer Satisfaction*	Index Kepuasan Peserta Non JPK	%	5	80	89,4	5,59
			Sub Total Perspektif Pelanggan		**25**			**25,64**
C.	Perspektif Proses Internal							
	1. Product Management							
	1. Meningkatkan manfaat yang diterima peserta	1. Hasil pengembangan JHT di atas bunga deposito	Pengembalian dana JHT diatas rata-rata bunga deposito Bank Pemerintah	%	1	2,75	6,02	2,19
		2. Pengembangan Manfaat Tambahan	Jumlah Lokasi yang Diserap oleh Peserta Jamsostek	Lokasi	3	1,00	2,00	3,60
	2. Mengembangkan investasi yang mendukung *value creation*	1. Persentase alokasi dana investasi untuk investasi langsung	Alokasi DIL / Total Dana Kelolaan	%	2	1,79	0,402	0,45
	2. Customer Management							
	1. Meningkatkan kapasitas *law enforcement*	1. Penyelesaian konsep jaminan Pensiun & JKK *Rehabilitation*	Progress penyelesaian konsep jaminan pensiun dan JKK *rehabilitation*	%	2	100	100	2,00
	2. Memperluas jaringan dan meningkatkan fungsi layanan	1. Jumlah Total akses point:	Jumlah Total: Mobil Keliling+jaringan kantor cabang+*desk service*	Jumlah	4	205	697	4,80
	3. Mengembangkan konsistensi layanan melalui penyusunan standar layanan	1. Pemetaan Proses Bisnis BPJS	Penyelesaian Rancangan Model Bisnis BPJS	%	1	100	100	1,00
	4. Meningkatkan sistem CRM untuk membina hubungan dengan peserta	1. *Net Promoter Score*	Hasil Survey Loyalitas Pelanggan	%	3	10	28,30	3,60
	3. Brand Management							
	1. Membangun citra BPJS Ketenagakerjaan yang Terpercaya	1. Opini Laporan Keuangan	jar Tanpa Pengecua	Opini	4	"WTP"	"WTP"	4,80
		2. Penyusunan Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan	Terbitnya SK Direksi Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan (maksimal 31 Desember)	%	3	100	ebelum 31 De	3,60

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
	2.	Membangun kerjasama dengan mitra-mitra strategis	1. Utilisasi peserta yang menggunakan layanan hasil kerjasama dengan mitra strategis						
			1.1 Jumlah peserta yang menggunakan kartu dari bank *co-branding*	Jumlah peserta pengguna kartu dari bank *co-branding*	%	2	5	5	2
				Sub Total Perspektif Proses Internal		**25**			**28,04**
D.	Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran								
	1. Human Capital								
	1.	Meningkatkan daya dukung karyawan dari segi kualitas dan kuantitas	1. *Job person match*	Hasil *Assesment Job Analysis* Persyaratan Jabatan	%	2	70	85	2,40
			2. *Employee Productivity*	Penerimaan Iuran Jumlah Karyawan	Rp (mil)	2	6,60	8,30	2,40
			3. Indeks Kepuasan Karyawan	survey *engagement* karyawan	%	2	85	93	2,19
			4 Penyelesaian kajian Carreer path karyawan struktural dan fungsional	% Tersedianya kajian Carrier Path yg disampaikan ke Direktur terkait Pengumpulan data/studi banding = 10% Analisa = 50% Draft kajian selesai = 80% Proses persetujuan Direktur terkait = 90% Laporan kajian selesai = 100%, Sosialisasi & implementasi = 120%	% (staging)	1	100	100	1,00
	2. Organization Capital								
	1.	Membangun budaya perusahaan yang berfokus pada *performance* dan *teamwork*	1. Sharing ide dari Best Practice	Jumlah ide inovasi yang diterima dan disosialisasikan (pelaksanaan sharing dan paper)	Jumlah	2	4	8	2,40
			2. *Maturity Level* Manajemen Risiko	*Maturity Level* untuk Manajemen Risiko	Level	2	2,5	2,75	2,20
	2.	Membangun kemampuan kepemimpinan dan akuntabilitas di setiap level	1. *GCG Index*	skor indeks GCG	%	4	85	95,04	4,47
				Sub Total Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran		**15**			**17,06**
				TOTAL		**100**			**110,11**

4. Penilaian Kinerja Direktur Renbang dan Informasi

Penilaian kinerja Direktur Renbang dan Informasi tahun 2013 dengan capaian skor sebesar **107,01**

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
A.	Perspektif Keuangan								
	1. Meningkatkan *Corporate Sustainability*	1.	EAT	Laba sebelum pajak x (1-Tax)	Rp (tril)	5	2,19	2,80	6,00
		2.	ROA	Laba Sebelum Total Asset- Aset JHT	%	2	2,19 10,76	9,34	1,74
	2. Meningkatkan Dana Kelola dan Pendapatan Investasi	1.	Jumlah Dana Kelola	Total dana investasi JHT + Non JHT	Rp	3	149,13	149,23	3,00
		2.	YOI	Total Pendapatan Investasi Bruto Rata-rata Dana Investasi	%	3	10,48	10,55	3,02
	3. Mengelola struktur biaya secara optimal	1.	*Expense Ratio*	Biaya Usaha Pendapatan Iuran	%	5	10,76	9,38 8,78	6,00
				Sub Total Perspektif Keuangan		**18**			**19,76**
B.	Perspektif Pelanggan								
	1. Memperluas Cakupan Kepesertaan	1.	Jumlah Peserta Aktif	Total Peserta Aktif (Netto)	TK jt	8	13.241.423	12.041.955	7,28
		2.	Jumlah Perusahaan Aktif	Total Perusahaan Aktif (Netto)	Perusahaan	5	188.956	184.912	4,89
	2. Jaminan sosial yang terpercaya	1.	*Brand Equity (Awareness, Image, Loyalty)*	Hasil Survey *Brand Equity*	skor/poin	5	40	80,8	6,00
	3. Bersahabat serta unggul dalam pelayanan dan operasional	1.	*Customer Satisfaction*	Index Kepuasan Peserta Non JPK	%	4	80	89,4	4,47
				Sub Total Perspektif Pelanggan		**22**			**22,64**
C.	Perspektif Proses Internal								
	1. Product Management								
	Meningkatkan manfaat yang diterima peserta		Pengembangan Manfaat Tambahan **food benefit, housing benefit*	Jumlah Lokasi yang Diserap oleh Peserta Jamsostek	Lokasi	3	1	2	3,60
	2. Customer Management								
	1. Memperluas jaringan dan meningkatkan fungsi layanan	1.	Jumlah Total akses point:	Jumlah Total: Mobil Keliling+jaringan kantor cabang+*desk service*	Jumlah	2	205	697	2,40
		2.	Rata-rata persentase peserta yang menggunakan fitur layanan digital	Jumlah peserta yg menggunakan fitur layanan Digital (VA+*website*) Jumlah Peserta (TK/perusahaan)	%	2	10	100	2,40

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
	2.	Mengembangkan konsistensi layanan melalui penyusunan standar layanan	1. Persentase pelayanan klaim sesuai dengan *service lead time*	Pembayaran klaim yang tepat waktu / Total Klaim x 100%	%	3	80	100	3,60
			2. Implementasi Service *Blueprint* (standard Pelayanan)	Jumlah Kantor Layanan pilot project yang terstandarisasi (kelas 1 JABODETABEK)	%	2	100	50	1,00
			3. Pemetaan Proses Bisnis BPJS	Penyelesaian Rancangan Model Bisnis BPJS	%	5	100	100	5,00
	3.	Meningkatkan sistem CRM untuk membina hubungan dengan peserta	1. *Net Promoter Score*	Hasil Survey Loyalitas Pelanggan	%	2	10	28,30	2,40
	4.	Meningkatkan kapasitas *law enforcement*	1. Penyelesaian proses bisnis sistem pengawasan	Progress Penyelesaian Proses Bisnis Sistem Pengawasan	%	3	100	100	3,00
			2. Penyelesaian konsep jaminan Pensiun & JKK *Rehabilitation*	Progress penyelesaian konsep jaminan pensiun dan JKK *rehabilitation*	%	2	100	100	2,00
	3. Brand Management								
	1.	Membangun citra BPJS Ketenagakerjaan yang Terpercaya	1. Opini Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Opini	2	"WTP"	"WTP"	2,40
			2. Penyelesaian Konsep *Rebranding*	Progress Penyelesaian *Positioning, Differentiation & Branding*	%	3	100	100	3,00
			Tepat Waktu Penyampaian RKAP ke Kementrian BUMN	Batas Waktu Penyampaian RKAP 2014 (Maksimal 31 Oktober)	%	2	100	110	2,20
			Penyusunan Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan	Terbitnya SK Direksi Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan (maksimal 31 Desember)	%	1	100	100	1,00
				Sub Total Perspektif Proses Internal		**32**			**34,00**
D.	Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran								
	1. Human Capital								
	1.	Meningkatkan daya dukung karyawan dari segi kualitas dan kuantitas	1. *Job person match*	Hasil *Assesment Job Analysis* Persyaratan Jabatan	%	2	70	85	2,40

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
		2.	*Employee Productivity*	Penerimaan Iuran / Jumlah Karyawan	Rp (mil)	1	6,60	8,3	1,20
		3.	Indeks Kepuasan Karyawan	Survey *engagement* karyawan	%	3	85	93	3,28
		4.	Penyelesaian kajian Carreer path karyawan struktural dan fungsional	% Tersedianya kajian Carrier Path yg disampaikan ke Direktur terkait Pengumpulan data/studi banding = 10% Analisa = 50% Draft kajian selesai = 80% Proses persetujuan Direktur terkait = 90% Laporan kajian selesai = 100%, Sosialisasi & implementasi = 120%	% (staging)	2	100	100	2,00
	2. Organization Capital								
	1. Membangun budaya perusahaan yang berfokus pada *performance* dan *teamwork*	1.	Sharing ide dari *Best Practice*	Jumlah ide inovasi yang diterima dan disosialisasikan (pelaksanaan *sharing* dan *paper*)	Jumlah	2	4	11	2,40
		2.	*Maturity Level* Manajemen Risiko	*Maturity Level* untuk Manajemen Risiko	Level	4	2,50	2,75	4,40
	2. Membangun kemampuan kepemimpinan dan akuntabilitas di setiap level	1.	*GCG Index*	Skor indeks GCG	%	3	85	95,04	3,35
	3. Information Capital								
	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teknologi informasi	1.	*IT Readiness Level*	Hasil *Assessment* Sistem (IT *Maturity Level*)	Level	4	3	2,98	3,97
		2.	Jumlah proses bisnis yang terotomatisasi	Jumlah proses bisnis yg sudah terotomatisasi / Total seluruh proses bisnis yang dikerjakan	%	4	70	70	4,00
		3.	Implementasi aplikasi MPPA Online dan Si Pajak	% Terselesaikannya Pedoman Aplikasi MPPA Online&Si Pajak Proses SK Direksi = 100% Distribusi buku pedoman = 110% Sosialisasi pedoman = 120%	%	3	100	120	3,60

					Sub Total Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran		**28**			**30,61**
					TOTAL		**100**			**107,01**

5. Penilaian Kinerja Direktur Umum dan SDM

Penilaian kinerja Direktur Umum dan SDM tahun 2013 dengan capaian skor sebesar **106,46**

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
A.	Perspektif Keuangan								
	1. Meningkatkan *Corporate Sustainability*	1.	EAT	Laba sebelum pajak x (1-Tax)	Rp	5	2,19	2,80	6,00
		2.	ROA	Laba Sebelum / Total Asset- Aset JHT	%	3	2,19 10,76	9,34	2,60
	2. Meningkatkan Dana Kelola dan Pendapatan Investasi	1.	Jumlah Dana Kelola	Total dana investasi JHT + Non JHT	Rp	3	149,13	149,23	3,00
	3. Mengelola struktur biaya secara optimal	1.	*Expense Ratio*	Biaya Usaha / Pendapatan Iuran	%	4	10,76	9,38	4,80
				Sub Total Perspektif Keuangan		**15**			**16,41**
B.	Perspektif Pelanggan								
	1. Memperluas Cakupan Kepesertaan	1.	Jumlah Peserta Aktif	Total Peserta Aktif (Netto)	TK	8	13.241.423	12.041.955	7,28
		2.	Jumlah Perusahaan Aktif	Total Perusahaan Aktif (Netto)	Perusahaan	5	188.956	184.912	4,89
	2. Jaminan sosial yang terpercaya	1.	*Brand Equity (Awareness, Image, Loyalty)*	Hasil Survey *Brand Equity*	skor/poin	5	40	80,80	6,00
	3. Bersahabat serta unggul dalam pelayanan dan operasional	1.	*Customer Satisfaction*	Index Kepuasan Peserta Non JPK	%	3	80	89,40	3,35
				Sub Total Perspektif Keuangan		**15**			**16,41**
C.	Perspektif Proses Internal 1. Customer Management								
	1. Memperluas jaringan dan meningkatkan fungsi layanan	1.	Jumlah Total akses poin*t:*	Jumlah Total: Mobil Keliling+jaringan kantor cabang+*desk service*	Jumlah	1	205	697	1,20
	2. Mengembangkan konsistensi layanan melalui penyusunan standar layanan	1.	Persentase pelayanan klaim sesuai dengan *service lead time*	Pembayaran klaim yang tepat waktu / Total Klaim x 100%	%	2	80	100	2,40
		2.	Implementasi Service *Blueprint* (standard Pelayanan)	Jumlah Kantor Layanan pilot project yang terstandarisasi (kelas 1 JABODETABEK)	%	3	100	50	1,50

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
		3.	Pemetaan Proses Bisnis BPJS	Penyelesaian Rancangan Model Bisnis BPJS	%	3	100	100	3,00
	2. Brand Management								
	1. Membangun citra BPJS Ketenagakerjaan yang Terpercaya	1.	Penyelesaian Konsep *Rebranding*	Progress Penyelesaian *Positioning, Differentiation & Branding*	%	3	100	100	3,00
		2.	Opini Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Opini	3	"WTP"	"WTP"	3,60
		3.	Penyusunan Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan	Terbitnya SK Direksi Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan (maksimal 31 Desember)	%	3	100	100	3,00
		4.	*Social Marketing*	Konversi rate peserta kampanye/sosialisasi yang menjadi peserta	%	1	10	12	1,20
				Sub Total Perspektif Proses Internal		**19**			**18,90**
D.	Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran								
	1. Human Capital								
	1. Meningkatkan daya dukung karyawan dari segi kualitas dan kuantitas	1.	Penyelesaian kajian Carreer path karyawan struktural dan fungsional	% Tersedianya kajian Carrier Path yg disampaikan ke Direktur terkait Pengumpulan data/studi banding = 10% Analisa = 50% Draft kajian selesai = 80% Proses persetujuan Direktur terkait = 90% Laporan kajian selesai = 100%, Sosialisasi & implementasi = 120%	% (staging)	4	100	100	4,00
		2.	*Job person match*	Hasil *Assesment Job Analysis* Persyaratan Jabatan	%	3	70	85	3,60
		3.	*Employee Productivity*	Penerimaan Iuran Jumlah Karyawan	Rp (mil)	5	6,60	8,30	6,00
		4.	Indeks Kepuasan Karyawan	survey *engagement* karyawan	%	4	85	93	4,38
		5.	Modul CBHRM yang diselesaikan	Modul CBHRM yang terselesaikan Total Modul CBHRM	Modul	5	2	2	5,00

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
	2. Organization Capital								
	1. Membangun budaya perusahaan yang berfokus pada *performance* dan *teamwork*	1.	Sharing ide dari *Best Practice*	Jumlah ide inovasi yang diterima dan disosialisasikan (pelaksanaan sharing dan paper)	Jumlah	3	4	8	3,60
		2.	*Maturity Level* Manajemen Risiko	*Maturity Level* untuk Manajemen Risiko	Level	2	2,5	2,75	2,20
		3.	Finalisasi *Transformation Culture*	Hasil Penyusunan Budaya Baru	%	5	100	120	6,00
	2. Membangun kemampuan kepemimpinan dan akuntabilitas di setiap level	1.	*Employee Leadership Index*	Hasil *Assesment*	poin/Indeks	4	63	63	4,00
		2.	*GCG Index*	skor indeks GCG	%	4	85	95,04	4,47
	3. Information Capital								
	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teknologi informasi	1.	*IT Readiness Level*	Hasil *Assessment* Sistem (IT *Maturity Level*)	Level	2	2,5	2,98	2,38
		2	Implementasi Sistem Pengadaan Nasional (E-Proc) Untuk Kanwil & Kacab	Penyelesaian sistem Pengadaan Nasional untuk Kanwil & Kacab s/d *Roll Out*	Unit Kerja	4	132	132	4,00
				Sub Total Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran		**45**			**49,63**
				TOTAL		**100**			**106,46**

6. Penilaian Kinerja Direktur Kepesertaan

Penilaian kinerja Direktur Kepesertaan tahun 2013 dengan capaian skor sebesar **108,04**

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
A.	Perspektif Keuangan								
	1. Meningkatkan *Corporate Sustainability*	1.	EAT	Laba sebelum pajak x (1-Tax)	Rp (tril)	5	2,19	2,80	6,00
		2.	ROA	Laba Sebelum Pajak / Total Aset- Aset JHT	%	3	2,19 10,76	9,34	2,60
		3.	Solvabilitas	Kekayaan yg diperkenankan - Kewajiban / 20% x Kewajiban Non JHT	%	2	159,72	295,41	2,40
		4.	Likuiditas	Asset lancar / Kewajiban lancar	%	2	250,2	396,23	2,40
	2. Meningkatkan Dana Kelola dan Pendapatan Investasi	1.	Jumlah Dana Kelola	Total dana investasi JHT + Non JHT	Rp	3	149,13	149,23	3,00

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
	3.	Mengelola struktur biaya secara optimal	1. *Expense Ratio*	Biaya Usaha / Pendapatan Iuran	%	5	10,76	9,38	6,00
				Sub Total Perspektif Keuangan		**20**			**22,41**
B.	Perspektif Pelanggan								
	1.	Memperluas Cakupan Kepesertaan	1. Jumlah Peserta Aktif	Total Peserta Aktif (Netto)	TK	12	13.241.423	12.041.955	10,91
			2. Jumlah Perusahaan Aktif	Total Perusahaan Aktif (Netto)	Perusahaan	8	188.956	184.912	7,83
	2.	Jaminan sosial yang terpercaya,	1. *Brand Equity (Awareness, Image, Loyalty)*	Hasil Survey *Brand Equity*	skor/poin	5	40	80,80	6,00
	3.	bersahabat serta unggul dalam pelayanan dan operasional	2. *Customer Satisfaction*	Index Kepuasan Peserta Non JPK	%	6	80	89,40	6,71
				Sub Total Perspektif Keuangan		**20**			**22,41**
C.	Perspektif Proses Internal								
	1. Product Management								
		Memperluas jaringan dan meningkatkan fungsi layanan	1. Jumlah Total akses point:	Jumlah Total: Mobil Keliling+jaringan kantor cabang+desk service	Jumlah	2	205	697	2,40
			2. Rata-rata persentase peserta yang menggunakan fitur layanan digital	Jumlah peserta yg menggunakan fitur layanan Digital (*VA+website*) / Jumlah Peserta (TK/perusahaan)	%	3	10	100	3,60
	2. Customer Management								
		Meningkatkan kapasitas *law enforcement*	1. Penyelesaian proses bisnis sistem pengawasan	Progress Penyelesaian Proses Bisnis Sistem Pengawasan	%	4	100	100	4,00
			Penyelesaian konsep jaminan Pensiun & JKK *Rehabilitation*	Progress penyelesaian konsep jaminan pensiun dan JKK *rehabilitation*	%	2	100	100	2,00
		Mengembangkan konsistensi layanan melalui penyusunan standar layanan	1. Persentase pelayanan klaim sesuai dengan *service lead time*	Pembayaran klaim yang tepat waktu / Total Klaim x 100%	%	3	100	100	3,60
			2. Pemetaan Proses Bisnis BPJS	Penyelesaian Rancangan Model Bisnis BPJS	%	3	100	100	3,00
		Meningkatkan sistem CRM untuk membina hubungan dengan peserta	1. *Net Promoter Score*	Hasil Survey Loyalitas Pelanggan	%	2	10	28,30	2,40

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
	3. Brand Management								
	Membangun citra BPJS Ketenagakerjaan yang Terpercaya	1.	Penyusunan Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan	Terbitnya SK Direksi Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan (maksimal 31 Desember)	%	2	100	100	2,00
		2.	*Social Marketing*	Konversi rate peserta kampanye/sosialisasi yang menjadi peserta	%	2	10	12	2,4
		3.	Opini Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Opini	3	"WTP"	"WTP"	3,60
	Membangun kerjasama dengan mitra-mitra strategis	1.	Utilisasi peserta yang menggunakan layanan hasil kerjasama dengan mitra strategis						
		1.1	Jumlah peserta yang menggunakan kartu dari bank *co-branding*	Jumlah peserta pengguna kartu dari bank *co-branding*	%	3	5	5	3,00
		1.2	Utilisasi *trauma centre*	Jumlah peserta pengguna *trauma centre* x 100% total kasus JKK	%	3	16,07	17,37	3,24
				Sub Total Perspektif Proses Internal		**32**			**35,24**
D.	Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran								
	1. Human Capital								
	Meningkatkan daya dukung karyawan dari segi kualitas dan kuantitas	1.	*Job person match*	Hasil *Assesment Job Analysis* Persyaratan Jabatan	%	2	70	85	2,40
		2.	*Employee Productivity*	Penerimaan Iuran / Jumlah Karyawan	Rp (mil)	2	6,60	8,30	2,40
		3.	Indeks Kepuasan Karyawan	survey *engagement* karyawan	%	2	85	93	2,19
		4.	Penyelesaian kajian Carreer path karyawan struktural dan fungsional	% Tersedianya kajian Carrier Pengumpulan Analisa = 50% Draft kajian Proses Laporan kajian Sosialisasi & implementasi = 120%	% (staging)	2	100	100	2,00
	2. Organization Capital								
	1. Membangun budaya perusahaan yang berfokus pada *performance* dan *teamwork*	1.	Sharing ide dari *Best Practice*	Jumlah ide inovasi yang diterima dan disosialisasikan (pelaksanaan *sharing* dan *paper*)	Jumlah	2	4	8	2,40

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
		2.	*Maturity Level* Manajemen Risiko	*Maturity Level* untuk Manajemen Risiko	Level	2	2,50	2,75	2,20
	2. Membangun kemampuan kepemimpinan dan akuntabilitas di setiap level		*GCG Index*	hasil *assesment* GCG	%	3	85	95,04	3,35
	3. Information Capital								
	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teknologi informasi	1.	Jumlah proses bisnis yang terotomatisasi	Jumlah proses bisnis yg sudah terotomatisasi / Total seluruh proses bisnis yang dikerjakan	%	2	70	70	2,00
				Sub Total Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran		**17**			**18,94**
				TOTAL		**100**			**108,04**

7. Penilaian Kinerja Direktur Pelayanan

Penilaian kinerja Direktur Pelayanan tahun 2013 dengan capaian skor sebesar **106,16**

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
A.	Perspektif Keuangan								
	1. Meningkatkan *Corporate Sustainability*	1.	EAT	Laba sebelum pajak x (1-Tax)	Rp (tril)	5	2,19	2,80	6,00
		2.	ROA	Laba Sebelum / Total Asset- Aset JHT	%	3	2,19 10,76	9,34	2,60
		3.	Solvabilitas	Kekayaan yg diperkenankan - Kewajiban / 20% x Kewajiban Non JHT	%	2	159,72	295,41	2,40
		4.	Likuiditas	Asset lancar / Kewajiban lancar	%	2	250,20	396,23	2,40
	2. Meningkatkan Dana Kelola dan Pendapatan Investasi	1.	Jumlah Dana Kelola	Total dana investasi JHT + Non JHT	Rp	3	149,13	149,23	3,00
	3. Mengelola struktur biaya secara optimal	1.	*Expense Ratio*	Biaya Usaha / Pendapatan Iuran	%	5	10,76	9,38	6,00
				Sub Total Perspektif Keuangan		**20**			**22,41**
B.	Perspektif Pelanggan								
	1. Memperluas Cakupan Kepesertaan	1.	Jumlah Peserta Aktif	Total Peserta Aktif (Netto)	TK	10	13.241.423	12.041.955	9,09
		2.	Jumlah Perusahaan Aktif	Total Perusahaan Aktif (Netto)	Perusahaan	7	188.956	184.912	6,85
	2. Jaminan sosial yang terpercaya	1.	*Brand Equity (Awareness, Image, Loyalty)*	Hasil Survey Brand Equity	skor/poin	6	40	80,80	7,20
	3. Bersahabat serta unggul dalam pelayanan dan operasional	1.	*Customer Satisfaction*	Index Kepuasan Peserta Non JPK	%	7	80	89,40	7,82
				Sub Total Perspektif Pelanggan		**30**			**30,97**

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
C.	Perspektif Proses Internal								
	1. Product Management								
	Meningkatkan manfaat yang diterima peserta	1.	Pengembangan Manfaat Tambahan **food benefit, housing benefit*	Jumlah Lokasi yang Diserap oleh Peserta Jamsostek	Lokasi	2	1	2	2,40
	Memperluas jaringan dan meningkatkan fungsi layanan	1.	Jumlah Total akses point:	Jumlah Total: Mobil Keliling+jaringan kantor cabang+*desk service*	Jumlah	1	205	697	1,20
		2.	Rata-rata persentase peserta yang menggunakan fitur layanan digital	Jumlah peserta yg menggunakan fitur layanan Digital *(VA+website)* / Jumlah Peserta (TK/perusahaan)	%	1	10	100	1,20
	2. Customer Management								
	Meningkatkan kapasitas *law enforcement*	1.	Penyelesaian konsep jaminan Pensiun & JKK *Rehabilitation*	Progress penyelesaian konsep jaminan pensiun dan JKK *rehabilitation*	%	4	100	100	4,00
	Meningkatkan sistem CRM untuk membina hubungan dengan peserta	1.	*Net Promoter Score*	Hasil Survey Loyalitas Pelanggan	%	2	10	28,30	2,40
	Mengembangkan konsistensi layanan melalui penyusunan standar layanan	1.	Persentase pelayanan klaim sesuai dengan *service lead time*	Pembayaran klaim yang tepat waktu / Total klaim x 100%	%	2	80	100	2,40
		2.	Implementasi Service *Blueprint* (standard Pelayanan)	Jumlah Kantor Layanan pilot project yang terstandarisasi (kelas 1 JABODETABEK)	%	4	100	50	2,00
		3.	Pemetaan Proses Bisnis BPJS	Penyelesaian Rancangan Model Bisnis BPJS	%	3	100	100	3,00
		4.	*Social Marketing*	Konversi rate peserta kampanye/sosialisasi yang menjadi peserta	%	1	10	12	1,20
	3. Brand Management								
	Membangun kerjasama dengan mitra-mitra strategis	1.	Utilisasi peserta yang menggunakan layanan hasil kerjasama dengan mitra strategis						
		1.1	Jumlah peserta yang menggunakan kartu dari bank *co-branding*	Jumlah peserta pengguna kartu dari bank *co-branding*	%	3	5	5	3,00

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
		1.2	Utilisasi *trauma centre*	Jumlah peserta pengguna *trauma centre* x 100% total kasus JKK	%	3	16,07	17,37	3,24
	Membangun citra BPJS Ketenagakerjaan yang Terpercaya	1.	Opini Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Opini	4	"WTP"	"WTP"	4,80
		2.	Penyusunan Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan	Terbitnya SK Direksi Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan (maksimal 31 Desember)	%	3	100	100	3,00
				Sub Total Perspektif Proses Internal		**33**			**33,84**
D.	Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran								
	1. Human Capital								
	Meningkatkan daya dukung karyawan dari segi kualitas dan kuantitas	1.	*Job person match*	Hasil *Assesment Job Analysis* Persyaratan Jabatan	%	2	70	85	2,40
		2.	*Employee Productivity*	Penerimaan Iuran Jumlah Karyawan	Rp (mil)	2	6,60	8,30	2,40
		3.	*Indeks Kepuasan Karyawan*	survey *engagement* karyawan	%	2	85	93	2,19
		4.	Penyelesaian kajian Carreer path karyawan struktural dan fungsional	% Tersedianya kajian Carrier Path yg disampaikan ke Direktur terkait Pengumpulan data/studi banding = 10% Analisa = 50% Draft kajian selesai = 80% Proses persetujuan Direktur terkait = 90% Laporan kajian selesai = 100%, Sosialisasi & implementasi = 120%	% (staging)	2	100	100	2,00
	2. Organization Capital								
1.	Membangun budaya perusahaan yang berfokus pada *performance dan teamwork*	1.	*Sharing* ide dari *Best Practice*	Jumlah ide inovasi yang diterima dan disosialisasikan (pelaksanaan *sharing* dan *paper*)	Jumlah	2	4	5	2,40
		2.	*Maturity Level* Manajemen Risiko	*Maturity Level* untuk Manajemen Risiko	Level	2	2,5	2,75	2,20
2.	Membangun kemampuan kepemimpinan dan akuntabilitas di setiap level	1.	*GCG Index*	hasil *assesment* GCG	%	3	85	95,04	3,35

No	SASARAN STRATEGIS		KPI	FORMULA	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI
	3. Information Capital	1.	Jumlah proses bisnis yang terotomasi	Jumlah proses bisnis yg sudah terotomatisasi / Total seluruh proses bisnis yang dikerjakan	%	2	70	70	2,00
	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teknologi informasi								
				Sub Total Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran		**17**			**18.94**
				TOTAL		**100**			**106.16**

KEBIJAKAN REMUNERASI

Penetapan remunerasi

Penetapan remunerasi bagi Direksi berdasarkan atas:

a. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dengan tindak lanjut sebagai berikut :
   1) Direksi PT Jamsostek (Persero) telah menghitung gaji/honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2013 sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-07/MBU/2010, disertai usulan faktor penyesuaian industri.
   2) Besaran faktor penyesuaian industri dengan memerhatikan:
      a) Peningkatan kompleksitas pengelolaan perusahaan dan peningkatan tingkat persaingan industri.
      b) Peningkatan pencapaian kinerja yang signifkan dibandingkan dengan industri atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
      c) Peningkatan penghasilan pada perusahaan sejenis dan/atau yang memiliki kompleksitas yang setara.
      d) Peningkatan tantangan dan/atau penugasan spesifk yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian dan tanggung jawab yang melebihi kondisi sebelumnya.
      e) Adanya rekomendasi/tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

b. Berdasarkan perhitungan gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris tersebut Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan usulan kepada Pemegang Saham

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Persetujuan Laporan Tahunan PT Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2013, dengan salah satu putusan dalam RUPS Laporan Tahunan PT Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2012 adalah Penetapan atas Gaji/Honorarium berikut Tunjangan dan/atau Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2013.
   1) Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per bulan dan gaji Direktur ditetapkan sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.
   2) Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 40% dari gaji Direktur Utama dan honorarium Komisaris ditetapkan sebesar 36% dari gaji Direktur Utama.
   3) Tunjangan dan atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan dengan mengacu kepada keputusan tunjangan dan atau fasilitas Tahun Buku 2012.
   4) Gaji/honorarium dan tunjangan serta fasilitas sebagaimana tersebut pada point a s/d c berlaku efektif sejak 1 Januari 2013.

2. Struktur Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris

Peraturan Meneg BUMN tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris

Surat Direksi kepada Dekom tentang Usulan Penghasilan Direksi

1, Bersifat Tetap (Gaji/Honor/Tunjangan/Fasilitas)
2. Bersifat Variable
   - Tunjangan
   - Tantiem

Persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Direksi dan menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk:

1. Pengesahan Laporan Tahunan
2. Penghasilan Direksi dan Dekom
   - Gaji/Honorarium
   - Tunjangan
   - Fasilitas
   - Tantiem

Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS tentang Penghasilan, Tunjangan dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2011.

3. Dasar Penetapan Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris

Dasar penetapan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh pemegang saham pada tahun 2013 dengan jumlah dan komposisi sebagai berikut:

NO	JABATAN	PERHITUNGAN	GAJI/HONORARIUM
1	Direktur Utama		120.000.000,00
2	Direktur	90% Gaji Direktur Utama	108.000.000,00
3	Komisaris Utama	40% Gaji Direktur Utama	48.000.000,00
4	Komisaris	36% Gaji Direktur Utama	43.200.000,00

4. Remunerasi Direksi

Penghasilan yang diterima Direksi selama tahun 2013 yang meliputi gaji, tunjangan dan tantiem adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	GAJI	FASILITAS PENGGANTI PERUMAHAN	IURAN JAMSOSTEK	THP BULANAN	THP SETAHUN	THR TAHUN 2013	TANTIEM	TOTAL PENGHASILAN
1	Elvyn G. Masassya	120,000,000	21,000,000	2,820,000	138,180,000	1,658,160,000	240,000,000	2.574.700.169	4.472.860.169
2	Agus Supriyadi	108,000,000	21,000,000	2,580,000	126,420,000	1,517,040,000	216,000,000	2.317.230.332	4.050.270.332
3	Amri Yusuf	108,000,000	21,000,000	2,580,000	126,420,000	1,517,040,000	216,000,000	2.317.230.332	4.050.270.332
4	Junaedi	108,000,000	21,000,000	2,580,000	126,420,000	1,517,040,000	216,000,000	2.317.230.332	4.050.270.332
5	Achmad Riadi	108,000,000	21,000,000	2,580,000	126,420,000	1,517,040,000	216,000,000	2.317.230.332	4.050.270.332
6	Jeffry Haryadi	108,000,000	21,000,000	2,580,000	126,420,000	1,517,040,000	216,000,000	2.317.230.332	4.050.270.332
7	Herdy Trisanto	108,000,000	21,000,000	2,580,000	126,420,000	1,517,040,000	216,000,000	2.317.230.332	4.050.270.332
	JUMLAH	**768,000,000**	**147,000,000**	**18,300,000**	**896,700,000**	**10,760,400,000**	**1,536,000,000**	**16.478.082.161**	**28.774.482.161**

5. Informasi mengenai Pemegang Saham.

Tidak terdapat Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali baik langsung maupun tidak langsung serta kepemilikan individu,karena kepemilikan saham PT Jamsostek (Persero) sepenuhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi dan jumlah Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Perusahaan tidak menentukan secara spesifik target yang harus dicapai dalam keberagaman *gender* dan budaya di dalam struktur Direksi. Penentuan komposisi Direksi merupakan hak dari Pemegang Saham.

Perusahaan meyakini bahwa keberagaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan operasional perusahaan oleh Direksi. Keberagaman itu menjadi kekuatan dan kelebihan untuk saling melengkapi, sebagaimana tabel berikut :

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Pendidikan	Karir/Jabatan/Pengalaman
1.	Elvyn G. Masassya	Laki-Laki	Medan	• Magister Manajemen (Keuangan) Institut Teknologi Bandung (ITB) • Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Jayabaya Jakarta	a. Direktur Investasi PT Jamsostek (Persero) b. Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk c. Direktur PT Bank Permata Tbk d. Direktur PT Tuban Petrochemical Industries e. Komisaris PT Bank Bali
2.	Amri Yusuf	Laki-Laki	Medan	• Magister Manajemen (Keuangan) STIE Jagakarsa Jakarta • Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi STIE Nusa Bangsa Medan • Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara • Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Indonesia	a. Kepala Divisi Investasi Langsung, b. Kepala Urusan Penyertaan - Div. Investasi Langsung, c. Kepala Urusan Perencanaan Investasi Langsung - Div. Investasi Langsung PT Jamsostek (Persero) d. Direktur Keuangan PT Samudranayaka Grahaunggul, e. Sekretaris Komisaris PT BIJAK
3.	Agus Supriyadi	Laki-Laki	Semarang	• Magister Manajemen (Pemasaran) Universitas Mercubuana Jakarta • Sarjana Administrasi Niaga Universitas Terbuka Jakarta • Sertifikasi Ahli Bidang Asuransi Jiwa AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia) Jakarta	a. Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan b. Kepala Kantor Wilayah III - DKI Jakarta, c. Kepala Divisi Operasi d. Kepala Kantor Cabang Gatot Subroto e. Kepala Kantor Cabang Kebon Sirih f. Kepala Kantor Cabang Pluit PT Jamsostek (Persero)
4.	Junaedi	Laki-Laki	Sumedang	Sarjana Ilmu Statistik Universitas Padjajaran Bandung	a. Kepala Kantor Wilayah VI - Jatim Nusra Bali b. Kepala Divisi Operasi c. Kepala Kantor Wilayah VII - Kalimantan d. Kepala Wilayah IV - Jabar Banten e. Kepala Kantor Cabang Bekasi PT Jamsostek (Persero)

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Pendidikan	Karir/Jabatan/Pengalaman
5.	Achmad Riadi	Laki-Laki	Lahat	• Magister Manajemen (Pemasaran) STIE IPWI LIPI Jakarta • Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi STIE Perbanas Jakarta	a. Kepala Biro PKP - KBL b. Kepala Kantor Wilayah II - Sumbagsel Riau Kepri c. Wakil Kepala Kantor Wilayah III - DKI Jakarta d. Kepala Kantor Cabang Bekasi e. Kepala Kantor Cabang Jambi PT Jamsostek (Persero)
6.	Jeffry Haryadi PM	Laki-Laki	Jakarta	Sarjana Akuntansi	a. Kepala Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal b. Kepala Divisi Investasi Langsung c. Direktur PT Samudera Nayaka Graha Unggul d. Kepala Divisi Riset Investasi e. Kepala Divisi Properti dan Penyertaan PT Jamsostek (Persero)
7.	Herdy Trisanto	Laki-Laki	Jakarta	• Magister Manajemen (Keuangan) Universitas Pancasila Jakarta • Sarjana Ekonomi Universitas Krisnadwipayana Jakarta	a. Kepala Kantor Wilayah III - DKI Jakarta b. Direktur Utama PT Bijak c. Kepala Divisi Investasi Langsung d. Kepala Divisi Pasar Uang & Pasar Modal e. Kepala Divisi Teknis & Pelayanan PT Jamsostek (Persero)

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan Perusahaan yang baik adalah hubungan antar Organ Perusahaan yang senantiasa memenuhi peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan serta saling menghargai dan menghormati fungsi dan peranan masing-masing semata-mata demi kepentingan Perusahaan.

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas jalannya usaha Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi mencakup antara lain pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan anggaran dasar Perusahaan, Keputusan RUPS dan memantau efektifitas penerapan GCG, Manajemen Risiko dan *Information and Technology Governance* yang diterapkan Perusahaan. Tugas pengawasan dan nasihat dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan.

Dalam rangka terciptanya hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang harmonis guna mendukung pencapaian kinerja Perusahaan, diperlukan adanya persamaan persepsi dan komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan berupa Rapat Gabungan (Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi). Rapat ini diselenggarakan setiap bulan. Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan dan menyepakati prinsip dasar dalam hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara akurat, lengkap dan tepat waktu. Direksi bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

Dengan demikian, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan tujuan akhir untuk kemajuan

dan peningkatan kinerja Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen bersama untuk melakukan tugas masing-masing sehingga tercapai kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

Disamping itu, tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) yang saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris, Direksi serta karyawan PT Jamsostek memiliki komitmen untuk mementingkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau kelompok manapun seperti yang tercantum dalam Nilai Budaya PT Jamsostek (Persero). Disamping itu, seluruh anggota Direksi PT Jamsostek (Persero) tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BUMN lainnya dan perusahaan lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga dengan							
	Dewan Komisaris		Direksi		Pejabat Eksekutif pada BUMN lainnya		Pejabat Eksekutif pada BUMN lainnya	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris								
Bambang Subianto		√		√		√		√
Prijono Tjiptoherijanto		√		√		√		√
Herry Purnomo		√		√		√		√
Dewan Komisaris								
Bambang Subianto		√		√		√		√
Herry Purnomo		√		√		√		√
Herman Hidayat		√		√		√		√
Mathias Tambing		√		√		√		√
Iskandar Maula		√		√		√		√
Bambang Wirahyoso		√		√		√		√
Hariyadi B. Sukamdani		√		√		√		√
Dewan Komisaris								
Denny Indrayana		√		√		√		√
Herry Purnomo		√		√		√		√
Herman Hidayat		√		√		√		√
Mathias Tambing		√		√		√		√
Iskandar Maula		√		√		√		√
Bambang Wirahyoso		√		√		√		√
Hariyadi B. Sukamdani		√		√		√		√

Dewan Komisaris								
Denny Indrayana		√		√		√		√
Herman Hidayat		√		√		√		√
Mathias Tambing		√		√		√		√
Iskandar Maula		√		√		√		√
Bambang Wirahyoso		√		√		√		√
Hariyadi B. Sukamdani		√		√		√		√

SEKERETARIS PERUSAHAAN

A. Fungsi

Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Fungsi dari Sekretaris Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan keterbukaan sejalan dengan penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Fungsi dari Sekretaris Perusahaan dilaksanakan oleh Biro Sekretariat Perusahaan, dan Biro Kepatuhan dan Hukum.

B. Profil

M. Nasrun Baso

Periode : 1 Februari 2010 s.d 19 April 2013
Lahir : Kendari, 24 Desember 1957
Pendidikan :
Magister Manajemen Universitas Hasanuddin, Sarjana Manajemen dari Universitas Terbuka Jakarta.
Karir:
Kepala Kantor Wilayah VIII
Kepala Kantor Cabang Bali
Kepala Kantor Cabang Tangerang II

Dedy Pramiadi

Periode : 19 April 2013 s.d sekarang
Lahir : Jakarta, 31 Agustus 1962
Pendidikan :
Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta, Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas
Karir:
Kepala Biro Pengadaan
Kepala Biro Sarana dan Prasarana
Kepala Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal

C. Tugas Pokok

Tugas Pokok Sekretaris Perusahaan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat Perusahaan, peningkatan reputasi perusahaan dan Kepatuhan dan Hukum.

1. Pelaksanaan Tugas Biro Sekretaris Perusahaan

Biro Sekretaris Perusahaan PT Jamsostek (Persero) adalah unit kerja penunjang di perusahaan yang melakukan pengelolaan aspek kesekretariatan dan protokoler dengan pelaksanaan tugas-tugas, sebagai berikut:

a. Mengoptimalisasi peranan dan fungsi kesekretariatan, sebagai berikut:
   1) Mengoptimalisasi pengelolaan dokumen/ arsip,
   2) Mengoptimalisasi fungsi kesekretariatan dalam rangka memfasilitasi hubungan antara Dewan Direksi dengan unit kerja diantaranya Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
b. Mempercepat waktu penyelesaian Risalah Rapat Direksi, waktu penerbitan Surat Keputusan Direksi.
c. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait (seperti menjawab beberapa pertanyaan yang harus ditindaklanjuti pada saat Rapat Dengar Pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat).
d. Melaksanakan peringatan HUT Jamsostek.
e. Menyempurnakan dan melaksanakan sosialiasi Pedoman Administrasi Umum.
f. Implementasi pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG).*

Dalam rangka peningkatan reputasi perusahaan melalui pengelolaan komunikasi, Kepala Biro Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Wakil Sekretaris Perusahaan yang melaksanakan tugas-tugas komunikasi eksternal dan internal serta *Corporate Social Responsibility (CSR)*, sebagai berikut:

a. Menyusun strategi dan program kerja kehumasan yang akan digunakan sebagai tema publikasi dan promosi korporasi.
b. Menjalin hubungan yang sinergis dan harmonis dengan insan pers untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan dan pencapaian kinerja perusahaan.
c. Meningkatkan pemahaman program Jamsostek kepada pemangku kepentingan, melalui kegiatan-kegiatan:
   1) Menyelenggarakan *Customer Gathering, Jams Goes To Society dan Jams Goes To Campus.*
   2) Mensponsori acara Jamsession di Metro TV.
   3) Menempatkan iklan layanan masyarakat melalui media luar ruang statis (*billboard*, spanduk, umbul-umbul dan bergerak (kendaraan dina roda empat).
   4) Memproduksi iklan untuk media cetak, media elektronik, dan media *online*.
   5) Mengikuti pameran-pameran.
   6) Menerbitkan majalah dwi bulanan Warta Jams
   7) Meng-*update* informasi di website Perusahaan (www.jamsostek.co.id), social media perusahaan (Facebook dan Twitter), portal berita BUMN, dan publikasi laporan keuangan *(audited)* di media cetak.
d. Meningkatkan pemahaman karyawan terhadap perkembangan perusahaan dilakukan dengan beberapa pola sosialisasi, seperti pembuatan *company profile* dalam bentuk video dan cetak. Secara berkala, melalui personil yang menangani kehumasan di unit-unit kerja Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang telah disampaikan pula klipping berita-berita Jamsostek.
e. Mengikuti *Annual Report Award* (ARA) dan Penilaia Keterbukaan Informasi Publik. Kedua ajang tersebut merupakan perwujudan tekad Perusahaan menghargai keinginan masyarakat untuk mengetahui PT Jamsostek (Persero), sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
f. Melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bagian dari pengelolaan citra perusahaan. Program CSR diarahkan pada 4 bidang utama, yaitu: Bidang Kesehatan, Bidang Lingkungan, Bidang Pendidikan, dan Bidang Sosial Kemasyarakatan

2. Pelaksanaan Tugas Biro Kepatuhan dan Hukum

Biro Kepatuhan dan Hukum PT Jamsostek (Persero) adalah unit kerja penunjang di perusahaan yang melakukan pengelolaan aspek kepatuhan dan hukum. Tahun 2013 adalah tahun yang sangat penting bagi Biro Kepatuhan dan Hukum dalam mempersiapkan tersedianya beberapa produk hukum terkait dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Nomor 24 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu terdiri dari 6 (enam) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) :

a. RPP tentang Program JKK, JK, dan JHT
b. RPP tentang Penyelenggaraan Program Pensiun
c. RPP tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
d. RPP tentang Hubungan Antar Lembaga
e. RPP tentang Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja
f. RPP tentang Sanksi Dewan Pengawas dan Direksi
g. Rperpres tentang Penahapan Kepesertaan
h. Rperpres tentang Bentuk dan Isi Laporan BPJS
i. Rperpres tentang Gaji Dewan Pengawas dan Direksi

Keseluruhan *draft* RPP dan Rperpres tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk dilakukan harmonisasi produk hukum. Pada tahun yangsAgung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap Program Jamsostek, serta meningkatkan kewibawaan Pemerintah. Nota Kesepakatan Bersama tersebut telah ditindaklanjuti dengan penandatangan di tingkat Kantor Wilayah dengan Kejaksaan Tinggi setempat, dan di tingkat Kantor Cabang dengan Kejaksaan Negeri.

Dalam rangka pembelaan kepentingan perusahaan terhadap tuntutan hukum, Biro Kepatuhan dan Hukum selaku kuasa hukum Direksi PT. Jamsostek (Persero) menangani beberapa perkara hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kepatuhan dan Hukum adalah sebagai berikut:

a. Menyelesaikan permasalahan hukum
b. Melakukan penyusunan produk hukum kepesertaan Jaminan Sosial.
c. Melaksanakan kegiatan internal

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Program pelatihan dan pendidikan yang dikombinasikan dalam *self study* dan keikutsertaan pada pelatihan khusus, pelatihan, *workshop*, seminar, *conference*, dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi Pejabat Eksekutif Sekretaris Perusahaan. Program pelatihan dan pendidikan dilaksanakan baik secara formal maupun secara informal. Program pelatihan dan pendidikan secara formal yang dilaksanakan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Nama/Jabatan	Agenda	Tempat & Waktu Pelaksanaan
Dedy Pramiadi (Kepala Biro Sekretaris Perusahaan)	*Workshop* Kedeputian Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN tentang RJPP & GCG	Bali 30 Mei – 1 Juni 2013
	Benchmarking Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Australia 24 – 23 Nopember 2013
Kuswahyudi (Wakil Sekretaris Perusahaan/Humas)	Sarasehan Menjauhi Korupsi	Bandung 1 Nopember 2013
Rilexya Suryaputra (Kepala Biro Kepatuhan & Hukum)	*Workshop* Hukum Bisnis	Bandung 25 – 28 Februari 2013
	Workshop Penerapan GCG di BUMN dalam Permen BUMN	Batam 19 – 20 April 2013
	Workshop on Foreign Arbitration For BUMN Legal Officers	Batam 28 – 29 Mei 2013
	Benchmarking Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Australia 24 – 23 Nopember 2013

BIRO PENGAWASAN INTERN

A. FUNGSI

Fungsi pengawasan PT Jamsostek (Persero) dilaksanakan oleh auditor internal dan auditor eksternal, dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. PT Jamsostek (Persero) telah membentuk Biro Pengawasan Intern (selanjutnya disingkat BPI) untuk menjalankan fungsi sebagai auditor internal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab langsung dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Direktur Utama, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/111/032013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Jamsostek (Persero).

B. PROFIL

Basuki Siswanto

Periode : 01 September 2011 s.d. 30 Juni 2013
Lahir : Tuban, 6 Juni 1958
Pendidikan :
Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM – Jakarta.
Sarjana Sastra Inggris Universitas Nasional – Jakarta.
Karir:
Kepala Kantor Wilayah VIII
Wakil Kepala Kantor Wilayah IV
Kepala Biro Humas
Kepala Biro DPKP dan PKBL

Paryudhianto

Periode : 16 Agustus 2013 s.d sekarang
Lahir : Klaten, 5 Mei 1965
Pendidikan :
S1 Akuntansi Universitas Gajah Mada – Yogyakarta.
Karir:
Kepala Biro Akuntansi
Kepala Biro Pengendalian Keuangan
Kepala Biro Keuangan

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Struktur Organisasi

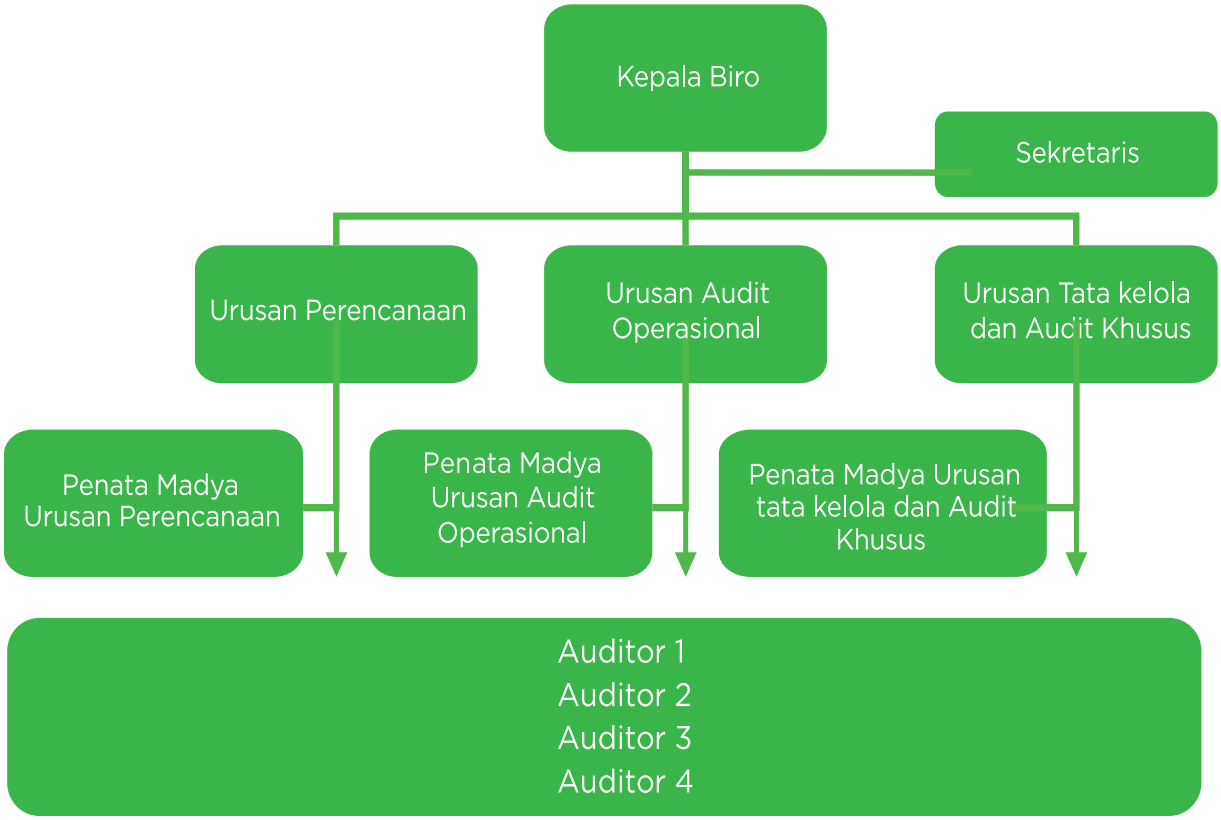

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah auditor yang mendukung pelaksanaan fungsi BPI per 31 Desember 2013 sebanyak 20 Orang, dengan mutasi tenaga auditor selama tahun 2013 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Auditor per 31 Desember 2012	15 Orang
2	Mutasi Ke *Transformation Office*	1 Orang
3	Penambahan dari personil Kantor Pusat	2 Orang
4	Penambahan dari personil Kantor Daerah	4 Orang
5	Jumlah Auditor per 31 Desember 2013	20 Orang

Dalam rangka menunjang kompetensi, pendidikan untuk memperoleh sertifikasi QIA bagi auditor yang dilaksanakan selama tahun 2013 sesuai tabel sebagai berikut :

No	Jabatan	Jml/orang	QIA				
			Dasar I	Dasar II	Lanjutan I	Lanjutan II	Manajerial (QIA)
1.	Kepala Urusan	3	-	-	-	-	1
2.	Senior Auditor	3	-	-	-	-	1
3.	Auditor 1	5	-	-	-	-	5
4.	Auditor 2	1	-	-	-	-	1
5.	Auditor 3	4	2	-	-	2	-
6.	Auditor 4	7	-	4	1	2	-
		23	2	4	1	4	8

Dalam rangka menunjang kompetensi, pendidikan untuk memperoleh sertifikasi CISA, CFE dan ISO 9001:2008 bagi auditor yang dilaksanakan selama tahun 2013 sesuai tabel sebagai berikut :

No	Jabatan	Jml/orang	CISA		CFE			ISO 9001:2008	
			Review	Certified	FA I	FA II	Certified	Lead	Auditor
1.	Kepala Urusan	3	-	-	1	-	1	3	-
2.	Senior Auditor	3	1	-	1	-	-	-	2
3.	Auditor 1	5	2	-	5	-	-	-	5
4.	Auditor 2	1	-	-	1	-	-	-	1
5.	Auditor 3	4	-	-	3	-	-	-	4
6.	Auditor 4	7	-	-	2	-	-	-	7
		23	3	-	13	-	1	3	19

Selain pendidikan untuk memperoleh sertifikasi tersebut di atas, maka untuk meningkatkan kompetensi auditor PT Jamsostek (Persero selama tahun 2013 mengikuti kegiatan pelatihan seminar dan workshop, antara lain :

No	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Jumlah Peserta
d.	Pelatihan Lead Auditor Mutu Internal ISO 9001:2008	PT. SGS Indonesia	1 orang
e.	Sosialisasi PER-19/MBU/2012 dan PER-21/ MBU/2012	Media Pekerja BUMN	2 orang
f.	In-House Training "Malcolm Baldrige For Performance Excellence"	Indonesian Quality Award Foundation	3 orang
g.	Workshop Auditor Mutu Internal ISO 9001:2008	PT. SGS Indonesia	9 orang
h.	Workshop Brand Engagement	DM ID Holland	1 orang
i.	Sarasehan "Menjauhi Korupsi dengan Hati Nurani dan Akal Sehat"	Media Pekerja BUMN	2 orang
j.	Workshop Audit Anti Korupsi (Fraud Audit)	BUMN Track	1 orang
j.	Workshop Pelatihan Fraud Auditing I	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing	13 orang

C Piagam Audit Internal

Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/308/082013 telah ditetapkan Piagam Audit Internal yaitu dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab aktivitas Audit Internal PT Jamsostek (Persero) yang dilaksanakan oleh BPI. Piagam Audit Internal BPI disetujui dan disahkan oleh Direksi dan Dewan KomisarisPT Jamsostek (Persero), yang memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Kedudukan Organisasi dan Jalur Pelaporan

a. BPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
b. BPI dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi.
c. BPI dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) dengan persetujuan Dewan Komisaris.
d. Hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas BPI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

2. Visi dan Misi

Visi BPI:
"Menjadi *Business Support* dan *Business Partner* bagi Manajemen dalam mencapai BPJS *Superior Performance* yang mengedepankan *Corporate Value, Ethics, dan Character"*.

Misi BPI:
a. Mengevaluasi efektifitas proses *Risk Management, Internal Control, dan Corporate Governance* untuk dapat memberikan *Added Value* dan peningkatan operasi perusahaan;
b. Meningkatkan peran dalam pelaksanaan fungsi *Assurance* dan *Consultancy* sekaligus sebagai *Catalyst* (Mitra Strategis) Manajemen dalam mencapai kepatuhan dan mendorong sasaran strategis perusahaan;
c. Meningkatkan integritas, kompetensi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya BPI.

3. Profesionalisme

Aktivitas Audit Internal PT Jamsostek (Persero) yang dilaksanakan oleh BPI mengacu pada:
a. Pedoman mandatori yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors (The IIA)* yang terdiri dari: Definisi Audit Internal, Kode Etik Audit Internal, dan Standar

Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar). Pedoman-pedoman tersebut merupakan persyaratan dasar untuk melaksanakan praktik profesional Audit Internal serta merupakan pedoman untuk mengevaluasi efektivitas kinerja aktivitas Audit Internal. Standar dan Kode Etik Audit Internal dilampirkan dalam Piagam Audit Internal ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Audit Internal BPI;

b. Pedoman yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal Indonesia;
c. Kebijakan dan prosedur operasi yang diterbitkan PT Jamsostek (Persero);
d. Pedoman/manual aktivitas Audit Internal yang diterbitkan oleh Direksi.
e. Pedoman lain yang diterbitkan oleh The IIA yang bersifat sangat direkomendasikan *(strongly recommended)* yang terdiri dari: *Practice Advisories* (Saran Penerapan), *Practice Guides* (Pedoman Praktik), dan *Position Papers* (Penjelasan Posisi). Ketaatan terhadap pedoman-pedoman ini bukan merupakan suatu keharusan

4. Independensi dan Obyektivitas

BPI bebas dari pengaruh dari pihak manapun dalam hal penentuan ruang lingkup, metode/ prosedur, cara, teknik, strategi, pendekatan, frekuensi, waktu dan isi laporan penugasan audit Internal. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan memelihara independensi dan obyektifitas BPI ditunjukkan dalam kenyataan *(in fact)* maupun dalam penampilan *(in-appearance).* Auditor BPI dilarang memiliki tanggung jawab atau otoritas operasional langsung atas kegiatan yang diaudit. Oleh karena itu, mereka dilarang menjadi pelaksana proses manajemen risiko, pengendalian Internal, pengembang prosedur, pemasang sistem, petugas pencatat, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian yang independen dan obyektif auditor Internal. BPI tidak dibolehkan mengambil alih/menerima tanggung jawab atas fungsi eksekutif perusahaan, pengembangan dan implementasi suatu sistem, namun dapat berperan sebagai penasehat *(advisor)* atau konsultan dalam hal tersebut. Selain itu auditor BPI yang berasal dari pindahan dari unit kerja lain, tidak dibolehkan memberikan fungsi asurans atas unit kerja tersebut sampai periode 2 (dua) tahun sejak kepindahan ke unit BPI. Auditor BPI harus menunjukkan tingkat objektivitas profesional yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diuji. Auditor BPI harus memberikan penilaian yang seimbang atas semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau pihak lain dalam memberikan penilaian tersebut. Kepala BPI melaporkan kondisi independensi organisasinya kepada Direksi dan Dewan Komisaris, paling tidak setahun sekali.

5. Kewenangan

Aktivitas Audit Internal, disertai akuntabilitas penuh untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan catatan dan informasi, memiliki kewenangan penuh, bebas, dan tak terbatas atas untuk mengakses setiap dan semua catatan, properti fisik, dan personil PT Jamsostek (Persero) yang terkait dengan penugasannya, yang meliputi namun tidak terbatas pada aktivitas-aktivitas berikut:

a. Menentukan ruang lingkup, metode/ prosedur, cara, teknik, strategi, pendekatan, frekuensi, waktu dan isi laporan hasil penugasan Audit Internal.
b. Mempertimbangkan untuk menerima, menunda, atau menolak permintaan jasa konsultasi dari manajemen dengan memperhatikan prioritas serta ketersediaan sumber daya BPI.
c. Melakukan asuransi dan jasa konsultasi terhadap proses manajemen risiko, pengendalian Internal, tata kelola, sistem pencegahan kecurangan, proses bisnis, serta kualitas kinerja seluruh kegiatan atau unit kerja PT Jamsostek (Persero) meliputi aktivitas:
    1. Memasuki semua kantor, gedung, bangunan, tempat–tempat penyimpanan, tanah, ataupun prasarana fisik lain yang dimiliki oleh PT Jamsostek (Persero) atau dibawah kendali PT Jamsostek (Persero) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau fungsi Biro Pengawasan Intern;
    2. Meminta, melihat, dan mempergunakan semua data atau informasi yang diperlukan;
    3. Melakukan pengamatan dan perhitungan atas kas, surat–surat berharga, perlengkapan dan lain-lain;
    4. Meminta keterangan atau penjelasan dari setiap pejabat/ pegawai PT Jamsostek

(Persero) dan pihak ekstern perusahaan;
5. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil audit, baik hasil audit Biro Pengawasan Intern maupun hasil audit eksternal/ pihak lain yang berwenang;

d. Melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris tentang hasil audit dan permasalahannya, baik yang sudah terjadi maupun yang layak diperkirakan akan terjadi;
e. Melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris tentang setiap usaha yang menghambat penugasan, serta setiap adanya campur tangan terhadap aktivitas BPI;
f. Menyampaikan kepada Direktur Utama dan/ atau Dewan Komisaris tentang setiap kegagalan manajemen mengambil tindakan perbaikan atau dalam melaksanakan tanggung jawabnya;
g. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Personil BPI.

Seluruh *stakeholders* BPI harus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan aktivitas Audit Internal sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya.

6. Peran dan Ruang Lingkup Kegiatan

Peran dan ruang lingkup kegiatan BPI mencakup aktivitas pemberian jasa asuransi dan konsultasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Peran dan ruang lingkupkegiatan BPI dalam pemberian jasa asurans mencakup namun tidak terbatas pada kegiatan pemeriksaan jasa audit, evaluasi dan reviu terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian Internal, tata kelola organisasi, dan sistem pencegahan kecurangan, proses bisnis dan kualitas kinerja perusahaan.
b. Peran dan ruang lingkup kegiatan BPI dalam pemberian jasa konsultasi mencakup namun tidak terbatas pada kegiatan pemberian jasa konsultasi untuk meningkatkan kecukupan manajemen risiko, pengendalian Internal, tata kelola organisasi, sistem pencegahan kecurangan, proses bisnis dan kualitas kinerja perusahaan.

7. Tanggung Jawab *(Responsibility)* dan Akuntabilitas *(Accountability)*

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, Biro Pengawasan Intern memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas sebagai berikut :

a. Menyusun berbagai ketentuan/pedoman/ manual/SOP Pelaksanaan kegiatan BPI.
b. Menyampaikan rencana Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang telah dibahas bersama Komite Audit kepada Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) untuk mendapatkan persetujuan.
c. Melaksanakan penugasan fungsi audit Internal (asuransi dan jasa konsultasi) sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
d. Menyusun laporan hasil penugasan audit/ konsultasi, termasuk rekomendasi.
e. Menyampaikan dengan segera, secara lisan ataupun tertulis informasi atau laporan interim tentang bagaimana hal yang sanagat mendesak kepada Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) sambil menunggu laporan akhir.
f. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/hasil audit BPI, pihak eksternal, atau pihak berwenang lainnya.
g. Mengkoordinasikan kegiatan BPI dengan berbagai kegiatan asurans dan konsultasi lainnya, baik dari dalam maupun luar perusahaan sehingga tugas dan fungsi BPI dapat dilaksanakan dan tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
h. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan kemampuan dan keterampilan personil BPI.
i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan BPI secara periodik (bulanan, triwulanan, dan tahunan) kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

8. Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi dan Manajemen

Tanggungjawab Direksi dan manajemen PT Jamsostek (Persero) dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Biro Pengawasan Intern adalah sebagai berikut:

a. Manajemen bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penerapan proses manajemen risiko, pengendalian Internal, tata kelola dan sistem pencegahan kecurangan. Tanggung jawab BPI terletak pada hasil evaluasi dan reviu atas proses manajemen

risiko, pengendalian Internal, tata kelola dan sistem pencegahan kecurangan.

b. Manajemen bertanggung jawab menyediakan informasi dan memberikan akses yang diperlukan oleh BPI dalam melaksanakan tugas atau fungsinya.
c. Manajemen bertanggung jawab membantu dan memberikan dukungan agar BPI dapat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.
d. Manajemen bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi BPI.
e. Manajemen berwenang memberikan tanggapan terhadap notisi hasil audit yang disampaikan auditor.

9. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas *(Quality Assurance and Improvement Program)*

BPI harus melaksanakan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas fungsi audit Internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya. Program ini mencakup penilaian kualitas yang dilakukan melalui:

a. Pemantauan dari pihak Internal BPI secara berkelanjutan.
b. *Review* oleh BPI atau pihak Internal lain dalam perusahaan secara periodik.
c. *Review* pihak eksternal yang independen secara periodik.

Program ini harus dirancang untuk dapat membantu fungsi Audit Internal dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan serta memberikan jaminan bahwa fungsi Audit Internal telah sesuai dengan Definisi, Kode Etik, dan Standar Audit Internal.

10. Persetujuan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero)

Piagam Audit Internal ini disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk dilaksanakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Audit Internal PT Jamsostek (Persero) yang dilaksanakan oleh BPI. Pedoman lebih rinci yang masih diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Audit Internal pada PT Jamsostek (Persero), akan diatur dalam pedoman audit tersendiri sebagai penjabaran atas Piagam Audit Internal ini, yang ditetapkan oleh Direksi PT Jamsostek (Persero) atau Kepala BPI.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Biro Pengawasan Intern (BPI) melaksanakan kegiatannya berdasarkan Pedoman Pengelolaan Kegiatan Biro Pengawasan Intern Berbasis Risiko sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/374/122011 tanggal 30 Desember 2011. Pedoman Pengelolaan Kegiatan Biro Pengawasan Intern Berbasis Risiko mengacu kepada Standar Internal Auditor (IPPF – 2009), BPI berperan dalam kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan peningkatan operasional. BPI harus membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian (*control*) dan proses tata kelola perusahaan *(corporate governance)*. Berikut ini gambaran peran yang dilaksanakan oleh Biro Pengawasan Intern:

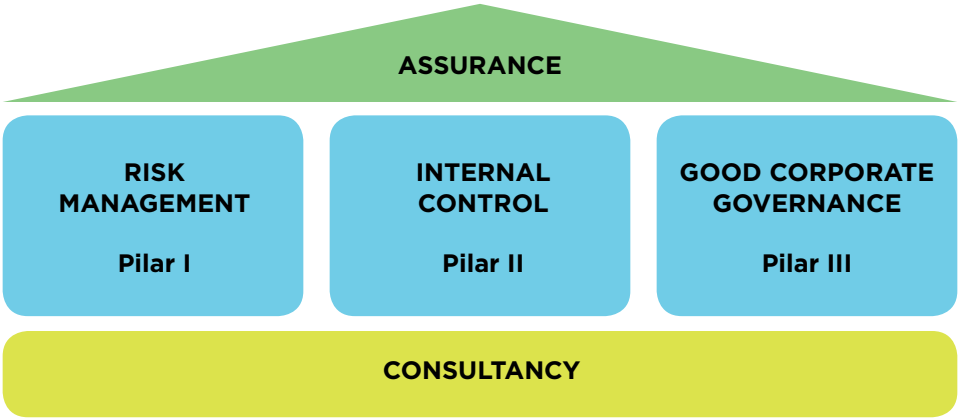

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat tiga bidang pokok yang menjadi fokus utama dari aktivitas BPI yaitu mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola perusahaan. Pelaksanaan 3 (tiga) pilar tersebut menjadi landasan penting dan strategis untuk semua dalam kegiatan BPI guna memberi nilai tambah dan berkontribusi positif bagi pencapaian tujuan PT Jamsostek (Persero), baik dalam pelaksanaan Kegiatan audit maupun kegiatan non audit.

1. Kegiatan Audit

Kegiatan Audit adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan peningkatan operasi PT Jamsostek (Persero). Pelaksanaan kegiatan audit ini dijabarkan dalam beberapa jenis audit yaitu:

a. **Audit Operasional** adalah suatu audit yang dilakukan secara teratur dan sistematis dengan cara menilai dan mengukur efektivitas dan efisiensi suatu unit atau pekerjaan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan dunia usaha dengan menggunakan tenaga auditor yang bertujuan untuk meyakinkan manajemen bahwa aktivitas operasinya telah mencapai sasaran dan/atau menemukan keadaan yang dapat ditingkatkan atau diperbaiki yang disertai dengan rekomendasi perbaikannya.

BPI telah melakukan Audit Operasional di Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat selama tahun 2009 – 2013, dengan data sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Audit
1.	2009	80
2.	2010	80
3.	2011	77
4.	2012	75
5.	2013	37

b. **Audit Khusus** adalah audit yang bertujuan untuk membuktikan indikasi terjadi atau tidaknya penyimpangan atau tindak kecurangan (*fraud*) yang dilakukan/melibatkan karyawan atau bukan karyawan PT Jamsostek (Persero) serta dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau pihak yang dilayani. Informasi untuk audit khusus dapat bersumber dari:
1) Laporan dari pihak intern (karyawan, manajemen) PT Jamsostek,
2) Pengaduan dari peserta Program Jamsostek dan atau masyarakat
3) Pengembangan hasil audit rutin Biro Pengawasan Intern,
4) Informasi lainnya.

BPI telah melakukan Audit Khusus selama tahun 2009 – 2013, dengan data sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Audit
1.	2009	5
2.	2010	15
3.	2011	12
4.	2012	7
5.	2013	1

c. **Audit dengan Tujuan Tertentu** adalah audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa yang dapat bersifat:
1) Eksaminasi (*examination*).
2) *Reviu (review)*.
3) Prosedur yang disepakati *(agreed-upon procedures)*

Selain itu juga terdapat Audit Kinerja yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja unit kerja di lingkungan PT Jamsostek (Persero) berdasarkan tolok ukur keberhasilan yang telah ditetapkan dalam *Key Performance Indicator* (KPI) atau Kontrak Manajemen.

BPI telah melakukan Audit ini selama tahun 2009 – 2013, dengan data sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Audit	Keterangan
1.	2009	0	Audit dengan Tujuan Tertentu
2.	2010	25	Audit Kinerja
3.	2011	6	Audit dengan Tujuan Tertentu
4.	2012	3	Audit dengan Tujuan Tertentu
5.	2013	0	Audit dengan Tujuan Tertentu

d. **Audit Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008** adalah audit yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi secara sistematis dan transparan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal, dengan menetapkan persyaratan dasar bagi organisasi untuk memenuhi dan menunjukkan kemampuannya untuk secara konsisten menyediakan produk (barang/jasa) baik mutu dan spesifikasinya *(consistency of product)* sesuai dengan persyaratan perundang-undangan dan persyaratan pelanggan *(comply to requirements)* serta untuk perbaikan

berkesinambungan yang disertai standardisasi atas kondisi yang baru *(continual improvement)*. Agar PT. Jamsostek (Persero), memenuhi persyaratan dasar yang telah ditetapkan ISO 9001:2008, setiap tahun dilakukan Audit Internal ISO, baik eksternal maupun internal. Audit ini dilakukan berdasarkan proses. Di kantor pusat, kegiatan Audit ISO ini dilakukan oleh Tim Audit Internal ISO di bawah koordinasi Biro Pengawasan Intern dan Biro Perencanaan Strategis, sedangkan di kantor wilayah dan kantor cabang, kegiatan Audit ISO dilakukan oleh Tim Audit Internal ISO di bawah koordinasi Kepala Manajemen Mutu dan Risiko Wilayah. Audit Internal ISO dilaksanakan 2 kali dalam setahun, kecuali di tahun 2013 yang hanya dilakukan 1 kali karena adanya penyesuaian proses bisnis sebagai implikasi bertransformasinya PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang berbadan hukum publik.

Pelaksanaan Audit					
No	**Tahun**	**Pihak Internal**	**Pihak Eksternal**	**Badan Sertifikasi**	**Keterangan**
1	2009	2 kali	2 kali	PT. SGS Indonesia	Sesuai jadual
2	2010	2 kali	2 kali	PT. SGS Indonesia	Sesuai jadual
3	2011	2 kali	2 kali	PT. SGS Indonesia	Sesuai jadual
4	2012	2 kali	2 kali	PT. SGS Indonesia	Sesuai jadual
5	2013	1 kali	1 kali	PT. SGS Indonesia	Tidak sesuai jadual karena ada penyesuaian proses bisnis sebagai implikasi bertransformasinya PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang berbadan hukum publik

2. Kegiatan Non Audit

Kegiatan Non Audit adalah kegiatan BPI dalam rangka memerankan fungsi *assurance*, konsultasi, dan katalis yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan peningkatan operasi PT Jamsostek (Persero), melalui metode *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan non audit ini dijabarkan dalam jenis kegiatan:

a. Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern PT Jamsostek (Persero) berbasis COSO *Framework*.
   Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian efektivitas penerapan pengendalian intern sesuai COSO *Framework* diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP/378/122009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern PT Jamsostek (Persero).
b. *Assesment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
   Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan PT Jamsostek (Persero). Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara internal oleh BPI maupun menunjuk pihak independen di luar PT Jamsostek (Perseto).
c. *Assesment* atas Penerapan *Risk Management.*
   Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian efektivitas penerapan tingkat kematangan *(maturity level)* manajemen risiko apakah berada pada *level naive, aware, defined, managed* atau *enabled.* Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara internal oleh BPI maupun menunjuk pihak independen di luar PT Jamsostek (Persero).
d. Penyusunan Rekomendasi Strategis kepada Direksi *(Board of Director).*
   Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi atas permasalahan strategis yang dihadapi PT Jamsostek (Persero) yang berpengaruh signifikan baik secara finansial maupun non-finansial, misalnya berpengaruh signifikan atas proses bisnis yang ada.
e. *Counterpart Auditor* Eksternal.
   Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan sumber daya PT Jamsostek (Persero) dalam rangka menyukseskan pelaksanaan audit oleh Auditor eksternal seperti BPK-RI, BPKP, Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
f. Pemutkahiran Tindak Lanjut Temuan Audit Internal dan Eksternal.
   Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan *update*

langkah tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh unit kerja PT Jamsostek (Persero) dengan menentukan apakah temuan tersebut telah tuntas atau belum tuntas ditindaklanjuti atas:
1) Temuan audit internal BPI termasuk audit operasional, audit khusus, audit tujuan tertentu, dan audit lainnya.
2) Temuan Auditor eksternal misalnya BPK-RI, BPKP, dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
3) Temuan kegiatan non audit seperti hasil *assesment* CGC, SPI Korporat, Rekomendasi Strategis, dan lain-lain.

g. Kegiatan Asistensi atau Konsultansi sesuai permintaan unit kerja.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peran BPI sebagai Konsultan dan Katalis dalam rangka membantu unit kerja dalam penyusunan SOP atau Pedoman, mengidentifikasi dan memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi unit kerja, dan lain-lain.

h. Kegiatan *Peer Review*.
Kegiatan *peer review* atau telaahan sejawat bertujuan untuk menjaga mutu hasil kegiatan Biro Pengawasan Intern. Kegiatan ini dilaksanakan minimal sekali dalam 3 tahun yang dapat dilaksanakan secara internal oleh BPI maupun menunjuk pihak independen di luar PT Jamsostek (Persero).

i. Uji Coba Sistem Informasi Manajemen Audit Intern (SIMAI).
Uji Coba ini dilakukan dengan melibatkan seluruh Kantor Wilayah untuk memastikan proses perencanaan, monitoring tindak lanjut hingga tuntasnya temuan berjalan dengan baik. SIMAI berfungsi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan audit dalam mengelola proses audit intern serta memberdayakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Proses audit yang dimaksud adalah sejak tahap Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan, sampai dengan Monitoring Tindak Lanjut.

j. Evaluasi atas efektivitas manajemen risiko.
Hasil evaluasi atas *risk management* ini akan menghasilkan *maturity level* penerapan manajemen risiko yang akan menjadi salah satu dasar penyusunan PKAT dan PKNT Biro Pengawasan Intern tahun berikutnya.
Pedoman Audit Intern Berbasis Risiko mengacu kepada Kerangka Praktik Profesional Internasional [*International Profesional and practice Framework* (IPPF)] Audit intern tahun 2013 sebagai revisi terakhir rumusan yang diterbitkan oleh The IIA (*The Institute of International Auditor*), mengharuskan auditor internal menggunakan pendekatan sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan *corporate governance*, sebagai bentuk pelaksanaan aktivitas asuransi dan *consulting* yang independen dan obyektif yang dirancang untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

E. TRANSFORMASI BIRO PENGAWASAN INTERN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), pada tanggal 25 November 2011 maka mulai 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan, yang meliputi perubahan sifat, organ dan prinsip pengelolaan, atau dengan kata lain berkaitan dengan perubahan stuktur dan budaya organisasi.
Dalam UU BPJS Pasal 39 disebutkan bahwa, "Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ pengawas BPJS, yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal."
Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan :
1. Satuan Pengawas Internal terdiri atas beberapa tenaga pengawas internal yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal. Hal ini dituangkan dalam Keputusan DireksiBPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/151/052014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan.
2. Ruang lingkup pengawasan internal mencakup pengawasan internal terhadap dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan, aset BPJS Ketenagakerjaan, pembinaan sumber daya manusia, belanja modal untuk operasional BPJS Ketenagakerjaan, dan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah.
3. Pengawas internal melakukan penilaian risiko dalam pengelolaan dan pengembangan dana BPJS Ketenagakerjaan dan Aset BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi proses-proses identifikasi, analisis, dan pengukuran risiko yang relevan sesuai tujuan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program-program BPJS Ketenagakerjaan

M. SISTIM PENGENDALIAN INTERN

PT Jamsostek (Persero telah mempunyai Sistem Pengendalian Intern yang ditetapkan dalam

Keputusan Direksi Nomor KEP/378/122009 Tentang Sistem Pengendalian Internal PT Jamsostek (Persero.

Unsur Sistem Pengendalian Intern PT Jamsostek (Persero)
Sistem Pengendalian Intern PT. Jamsostek (Persero) yang disingkat SPI Jamsostek terdiri atas unsur:

1) lingkungan pengendalian;
Direksi/Kepala Unit Kerja wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan Direktorat/Unit Kerjanya, melalui:
a) penegakan integritas dan nilai etika;
b) komitmen terhadap kompetensi;
c) kepemimpinan yang kondusif;
d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g) partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit serta perwujudan peran Biro Pengawasan Intern sebagai internal audit yang efektif;
h) hubungan kerja yang baik antara Direktorat/Unit Kerja di kantor pusat dan kantor daerah.

2) Penilaian Risiko;
Direksi/Kepala Unit Kerja wajib melakukan penilaian risiko yang dikoordinasikan oleh Biro Manajemen Risiko yang terdiri atas:
a) identifikasi risiko;
b) analisis risiko;

Dalam rangka penilaian risiko Direksi menetapkan tujuan perusahaan dan tujuan pada tingkatan unit kerja dengan berpedoman Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

3) Aktivitas Pengendalian;
Direksi/Kepala Unit kerja wajib menyelenggarakan aktivitas pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Direktorat/Unit Kerja yang bersangkutan sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Aktivitas pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Direktorat/Unit Kerja;
b) Aktivitas pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
c) Aktivitas pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Direktorat/Unit Kerja;
d) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
e) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis;
f) Aktivitas pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Aktivitas pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a) review atas kinerja Direktorat / Unit Kerja yang bersangkutan;
b) pembinaan sumber daya manusia;
c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d) pengendalian fisik atas aset;
e) penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja;
f) pemisahan fungsi;
g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
j) akuntabilitas terhadap sumberdaya dan pencatatannya;
k) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4) informasi dan komunikasi;
Direksi / Kepala Unit kerja wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif.
Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud Direksi / Kepala Unit kerja harus sekurang-kurangnya:
a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
b) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) pemantauan pengendalian intern.
Direksi/Kepala Unit kerja wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pada masing-masing Direktorat / Unit Kerja.
Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui penilaian, *review*, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dilakukan oleh Biro Pengawasan Intern, atau jika diperlukan dapat dilakukan oleh Komite Audit atau auditor eksternal.

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya sebagaimana dimaksud harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPI Jamsostek.
Pihak-Pihak yang Berkepentingan dengan SPI Jamsostek diantaranya adalah:

1) Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi dan memantau efektifitas pelaksanan Sistem Pengendalian Intern Jamsostek.
2) Direksi mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Perusahaan. Sementara itu Direktur Kepatuhan dan Majemen Risiko berperan aktif dalam:
   a) mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati –hatian;
   b) mendorong budaya risiko *(risk culture)* yang memadai;
   c) mempercepat proses identifikasi terhadap praktek yang tidak sehat melalui sistem deteksi dini yang efisien.
3) Kepala Biro/Divisi, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Cabang bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Unit Kerja masing-masing.
4) Biro Pengawasan Intern harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen. Disamping itu, Perusahaan perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya praktek dan penerapan penilaian risiko.

   Pengawasan atas efektifitas penyelenggaraan SPI Jamsostek dilakukan oleh Biro Pengawasan Intern, melalui kegiatan
   (1) audit;
   (2) *review*;
   (3) evaluasi;
   (4) pemantauan;
   (5) kegiatan pengawasan lainnya.

Hasil Evaluasi Pengendalian Intern Berbasis COSO
Biro Pengawasan Intern pada akhir tahun 2013 telah melakukan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Berbasis COSO yang meliputi 5 Aspek pengendalian.

Sistem pengendalian intern pada PT Jamsostek (Persero) secara umum telah memadai dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan pada sistem pengendalian intern yang memerlukan perbaikan sebagai berikut:

1) Aspek Lingkungan pengendalian terkait dengan pelaksanaan beberapa parameter penilaian GCG pada perusahaan.
2) Aspek Penilaian Risiko terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko seperti RKAP berbasis risiko yang akan disusun tahun 2014, serta penyelarasan toleransi risiko dengan sasaran strategis dari perusahaan.
3) Aspek Aktivitas Pengendalian terkait dengan pengendalian data kepesertaan dan sistem manajemen informasi.
4) Aspek Informasi dan Komunikasi yang meliputi sistem pelaporan keuangan.
5) Aspek Pemantauan Sistem yang meliputi Pengendalian Intern telah dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya baik yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Intern maupun oleh Komite Audit.

   Hasil dari Evaluasi Sistem Pengendalian Berbasis COSO dikirimkan ke Dewan Komisaris, Direksi dan Unit kerja terkait guna dilakukan perbaikan.

Tanggapan Dewan Komisaris
Berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Intern, Dewan Komisaris melalui Rapat Gabungan telah meminta Direksi untuk segera menindaklanjuti kelemahan-kelemahan tersebut.

AUDITOR EKSTERNAL

Audit atas Laporan Keuangan PT Jamsostek (Persero) setiap tahun dilakukan oleh Auditor Independen dan memberikan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan yang disajikan oleh Manajemen.

1. Pemeriksaan oleh Akuntan Perseroan
Sejak PT Jamsostek (Persero) menjadi Perseroan terbatas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program

Jamsostek, Laporan Keuangan Tahunan PT Jamsostek (Persero) telah diaudit oleh Auditor Independen yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Jamsostek (Persero) selama 5 (lima) tahun terakhir yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualiaan" dan biaya sebagai berikut :

KANTOR AKUNTAN PUBLIK				
	Kantor Akuntan Publik	Signing Partner	Fee (Rp milliar)	Jenis Pekerjaan
2013	KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (AAJ)	Rudi Hartono Purba	2,82	General Audit: -Laporan Keuangan -Laporan Keuangan Penutup -Laporan Keuangan Pembuka
2012	KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (AAJ)	Rudi Hartono Purba	1,76	General Audit
2011	KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBSD)	Doli Diapary Siregar, CPA	1,39	General Audit
2010	KAP Hertanto, Sidik dan Rekan (HSR)	Drs Indra Soesetiawan, CPA	1,10	General Audit
	KAP Doli, Bambang, Sudarmadji	Doli Diapary Siregar, CPA	1,25	General Audit

2. Pemeriksaan oleh Auditor Lainnya

Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Jamsostek (Persero) yang dilaksanakan oleh Auditor Lainnya pada tahun 2012 dan tahun 2013 yaitu :

AUDITOR LAINNYA			
Tahun	Lembaga	Jenis Audit	Tahun Buku
2013	Otoritas Jasa Keuangan	Penilaian Kesiapan Perusahaan menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan Penilaian Kewajaran Penyajian Investasi Perusahaan	2012-2013
2012	Badan Pemeriksa Keuangan-RI	General Audit dan Audit Kinerja	2011

3. Tindak Lanjut Temuan Auditor Independen

Berdasarkan pemeriksaan auditor independen pada PT Jamsostek (Persero) masih terdapat 1 (satu) temuan yang masih perlu dipantau tindak lanjutnya, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

REKAPITULASI TEMUAN AUDITOR INDEPENDEN							
Auditor Eksternal	Tahun Buku	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut	Sisa Temuan			
				Jamsostek	DPKP	KBL	Jumlah
KAP-DBSD	2009	6	6	0	0	0	0
KAP-HSR	2010	8	8	0	0	0	0
KAP-DBSD	2011	2	2	0	0	0	0
BPK-RI							
- GA	2011	7	6	1	0	0	1
- Kinerja	2010/2011	5	5	0	0	0	0
KAP AAJ	2012	1	1	0	0	0	0
KAP AAJ	2013	3	3	0	0	0	0
Jumlah Total		**32**	**31**	**1**	**0**	**0**	**1**

Adapun hal-hal yang masih menjadi temuan dari auditor eksternal terhadap Jamsostek yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait General Audit pada tahun 2011 telah ditindaklanjuti secara maksimal oleh PT Jamsostek (Persero) dan saat ini dalam proses menunggu konfirmasi status tindak lanjut.

Pemeriksaan terhadap PT Jamsostek (Persero) untuk menilai Kesiapan Perusahaan menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan Penilaian Kewajaran Penyajian Investasi Perusahaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013, sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-15/NB.2/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan SPRIN-26/NB.2/2013 tanggal 19 Juni 2013 serta Surat Tugas Nomor ST/158/NB.2/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan Surat Tugas Nomor ST/196/NB.2/2013 tanggal 19 Juni 2013. Laporan atas hasil pemeriksaan tersebut, sampai dengan saat ini masih dalam proses finalisasi laporan.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Beberapa perkara penting yang dihadapi perusahaan selama tahun 2013, sebagai berikut:

1. Penanganan masalah hukum diluar Pengadilan :
   a. Bekerjasama dengan Koordinator II Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI dalam rangka penyelesaian aset eks. MTN PT. Sapta Prana Jaya yang terletak di Pandeglang, Lebak, dan Kab. Bogor, dengan menerbitkan Surat Kuasa Nomor. SKS/34/072013 tanggal 3 Juli 2013.
   b. Bekerjasama dengan Koordinator II Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI dalam rangka penyelesaian aset eks MTN PT. Volgren Indonesia yang terletak di Bangka Belitung, dengan menerbitkan Surat Kuasa Nomor. SKS/35/072013 tanggal 3 Juli 2013.
   c. Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmingrasi Provinsi DKI Jakarta atas perselisihan Hak terhadap 9 (sembilan) orang pengemudi tenaga kerja alih daya. Perselisihan diakhiri dengan perdamaian yang difasilitasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmingrasi Provinsi DKI Jakarta melalui penandatanganan Perjanjian Bersama (PB).
   d. Penanganan masalah hukum terkait terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 14 November 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Terdapat 135 (seratus tiga puluh lima) orang dari 1055 tenaga alih daya yang dipekerjakan PT. Jamsostek (Persero) di seluruh Indonesia, yang menurut ketentuan dalam Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 demi hukum status hubungan kerjanya beralih ke PT. Jamsostek (Persero), yang menolak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mediasi terhadap 135 orang tenaga kerja alih daya tersebut saat ini tengah dilakukan oleh Mediator dari Disnakertrans Provinsi DKI, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, Disnakertrans Provinsi Banten, dan Dinsosnaker Padang.
   e. Pemasangan plang papan nama oleh pihak yang tidak bertanggungjawab diatas tanah milik PT. Jamsostek (Persero) di Bogor. Biro Kepatuhan dan Hukum bekerjasama dengan Kantor Pengacara James Purba & Partners dalam rangka pencabutan papan nama pihak lain, dan melakukan penjagaan serta pengamanan atas aset perusahaan tersebut.
   f. Pendampingan pemanggilan sebagai saksi terhadap beberapa karyawan dan mantan karyawan PT. Jamsostek (Persero) oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Sumatera Barat, atas kasus penyaluran dana kemitraan pada Kantor Cabang Bukit Tinggi.

2. Penanganan Masalah Hukum di Pengadilan:
   a. Gugatan ahli waris A.Romli dan PT Royal Bersaudara terhadap PT. Jamsostek (Persero) dengan nomor gugatan 94/Pdt.G/2007/Pnbpp dan telah diputus pada tingkat kasasi dengan putusan MA No:2110 K/Pdt/2011.
   b. Gugatan Abdul Rahman R (Ex karyawan PT Darma Henwa) No.110/Pdt/.G.PN BPP di Pengadilan Tinggi Samarinda.
   c. Kasus Kepailitan PT Eight oh Two Indonesia yang memiliki tunggakan iuran kepada PT. Jamsostek (Persero). Saat ini sedang dalam proses pemberesan harta pailit oleh kurator.
   d. Gugatan ahli waris klaim JKM dan JHT a/n Alm Asimin karyawan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan nomor :159/Pdt.g/PN.Jkt.Tim. Kasus ini telah diputus dengan Putusan PN Jakarta Timur Nomor: 159/Pdt.g/PN.Jkt.Tim menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Saat ini masih dalam proses banding.
   e. Perkara pidana Pembobolan JHT oleh Sdr Harry Mufty Dkk. Kasus ini telah disidangkan dan divonis 9 bulan penjara.
   f. Perkara Kepailitan PT Saripari yang memiliki tunggakan iuran kepada PT. Jamsostek (Persero). Saat ini PT Saripari telah ditetapkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
   g. Gugatan Nomor: 127/Pdt.G/2013/PN.Jaksel antara Alexia W. Dyah terhadap Stephanus Harianta sebagai tergugat, PT Kompas

Gramedia dan PT. Jamsostek (Persero) sebagai turut tergugat. Kasus ini telah diputus bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO) dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 127/Pdt.G/2013/PN.Jaksel. Gugatan H.M Arif dan HJ Petta Intang nomor : 25/Pdt.G/2010/PN.Kdi. Kasus ini telah selesai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomot: 780/K/PDT/2012 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Roadmap Manajemen Risiko

Sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola korporat *(corporate governance)* yang mendorong penerapan roadmap BUMN/Jamsostek Bersih, Biro Manajemen Risiko terus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko perusahaan dengan terus meningkatkan kesadaran (awareness) seluruh karyawan terhadap pengelolaan risiko, mengembangkan kebijakan, prosedur dan alat bantu pengelolaan risiko, memperbaiki kualitas proses pengukuran dan pelaporan risiko serta menyusun dan melaksanakan *roadmap* pengembangan dan penerapan Manajemen Risiko Korporasi 2014 – 2018.

Dengan melaksanakan program kerja sesuai *roadmap* tersebut, kematangan penerapan Manajemen Risiko yang saat ini mencapai 2,7 (prediksi akhir tahun 2013) dengan tingkatan terstandarisasi, dapat mencapai tingkat kematangan 4 atau lebih dengan tingkatan terkelola dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)* dan tata kelola perusahaan yang bersih. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi manajemen risiko pada seluruh lini organisasi, sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan semua jenis risiko dapat diidentifikasi, dimonitor, diukur dan dikendalikan.

Rencana perbaikan dan pengembangan penerapan manajemen risiko korporasi (MRK) tahun 2014-2018 dengan mempertimbangkan RJPP dan transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Roadmap penerapan manajemen risiko tahun 2014-2018 sebagai berikut

"Integrated risk management culture at all level"

	2014	2015	2016	2017	2018
STRATEGIC RISKS	▪ Penyesuaian Kebijakan MR BPJS TK ▪ Membangun RKAT berbasis risiko ▪ Membangun *key risk indicator*	▪ RKAT berbasis risiko ▪ KPI berbasis risiko ▪ Implementasi *Early Warning System* (EWS)	▪ *Review* kebijakan risiko ▪ *Enhancement* EWS	▪ Integrasi pengelolaan risiko pada seluruh fungsi	▪ Renstra BPJS TK berbasis risiko
OPERATIONAL RISKS	▪ Implementasi SIMRK ▪ Penyesuaian dokumen BCM ▪ Kampanye budaya risiko	▪ Implementasi BCM ▪ implementasi *Loss Even Management* ▪ Peningkatan proses asesmen & laporan	▪ *Enhancement* SIMRK ▪ Penguatan budaya risiko daerah yang mandiri	▪ Integrasi pengelolaan risiko pada seluruh aktivitas bisnis BPJS TK ▪ Uji BPC/DRP berkala	▪ *Enhancement* BCM ▪ Budaya risiko di seluruh level
FINANCIALRISKS	▪ Risiko dana BPJS ▪ *Investment Risk Scoring* ▪ Pembentukan Komite Manajemen Risiko	▪ *Review* risiko keuangan & investasi ▪ *Review* kebijakan Pengelolaan Dana Investasi	▪ Penguatan fungsi Komite Manajemen Risiko	▪ *Monitoring* efektivitas pengelolaan risiko keuangan dan investasi	▪ Integrasi pengelolaan risiko keuangan dan investasi
COMPLIANCERISKS	▪ Implementasi audit berbasis risiko ▪ *Fraud Control System* ▪ Implementasi WBS	▪ Integrasi SIMRK dengan SIPATUH dan SIMAI	▪ Integrasi SIMRK pada audit berbasis risiko	▪ Implementasi penuh audit berbasis risiko yang terintegrasi	▪ Perluasan kanal informasi dan pengaduan WBS

Penerapan Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Manajemen Risiko merupakan salah satu pilar dalam penerapan *Good Corporate Governance.* Dalam rangka mendukung penerapan GCG, maka implementasi Manajemen Risiko di PT Jamsostek (Persero) juga dirancang agar dapat memenuhi prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness* (TARIF) dan menjadi bagian dari sistem pengendalian *fraud.*

Dalam mendukung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta tata kelola perusahaan yang bersih dari KKN dalam kerangka Manajemen Risiko, Perusahaan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melekatkan kewajiban pengelolaan risiko-risiko perusahaan dalam deskripsi tugas (job description) SDM Perusahaan, khususnya pejabat struktural sebagai bentuk Responsibilitas terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya.
- Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan batasan risiko yang dapat diterima *Risk Appetite/ Tolerance* atas risiko-risiko utama perusahaan dan diinformasikan kepada seluruh karyawan/unit kerja, sebagai bentuk transparansi dan responsibilitas Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan risiko perusahaan. Guna mendukung kampanye pengendalian *fraud,* anti korupsi, suap dan gratifikasi. Direksi PT Jamsostek (Persero) tidak memberikan toleransi *(zero tolerance)* terhadap risiko *fraud*.
- Kajian risiko operasional, investasi dan keuangan yang merupakan opini independen terhadap unit kerja teknis dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan.
- Identifikasi dan asesmen menggunakan metode *risk and control self assessment* yang dilakukan oleh risk owner. Masing-masing unit kerja sebagai *risk owner* dan penanganan risiko-risiko utama yang telah direncanakan mitigasinya, sehingga prinsip akuntabilitas dan *fairness* terhadap tanggung jawab pengelolaan risiko berjalan dengan baik.
- Guna meningkatkan kualitas tata kelola korporat *(corporate governance)* yang mendorong penerapan roadmap BUMN/Jamsostek Bersih, Perusahaan terus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dengan terus meningkatkan kesadaran *(awareness)* seluruh karyawan terhadap pengelolaan risiko, mengembangkan kebijakan, prosedur dan alat bantu pengelolaan risiko, memperbaiki kualitas proses pengukuran dan pelaporan risiko serta menyusun dan melaksanakan *roadmap* pengembangan dan penerapan Manajemen Risiko Korporasi 2012 – 2017. Dengan melaksanakan program kerja sesuai roadmap tersebut, kematangan penerapan Manajemen Risiko yang saat ini mencapai 2,7 (prediksi akhir tahun 2013) dengan tingkatan terstandarisasi, dapat mencapai tingkat kematangan 4 atau lebih dengan tingkatan terkelola dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)* dan tata kelola perusahaan yang bersih.

Rujukan Penerapan Manajemen Risiko Korporasi PT. Jamsostek (Persero)

Jamsostek menerapkan manajemen risiko pada seluruh aktivitas bisnis yang dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan utama jamsostek yaitu, keuangan, operasional dan investasi. Dalam rangka mengembangkan praktik manajemen risiko di lingkungan perusahaan menuju pada suatu penerapan manajemen risiko korporasi, PT Jamsostek (Persero) telah melaksanakan penerapan manajemen risiko berdasarkan standar praktik terbaik COSO ERM *Integrated Framework.* Adapun penggunaan rujukan ini dilakukan agar dalam penerapannya memiliki *guideline* dalam mengukur kesenjangan sebagai bahan evaluasi dan mengembangkan metodologi dalam memperkuat implementasi manajemen risiko.

Dalam praktik terbaik COSO ERM *Integrated Framework*, implementasi manajemen risiko diukur berdasarkan tiga pilar penerapan manajemen risiko korporasi terpadu (ERM) yaitu, Tata Kelola, Infrastruktur dan Proses Manajemen Risiko yang ketiga pilar tersebut saling keterkaitan baik pemenuhan maupun implementasinya.

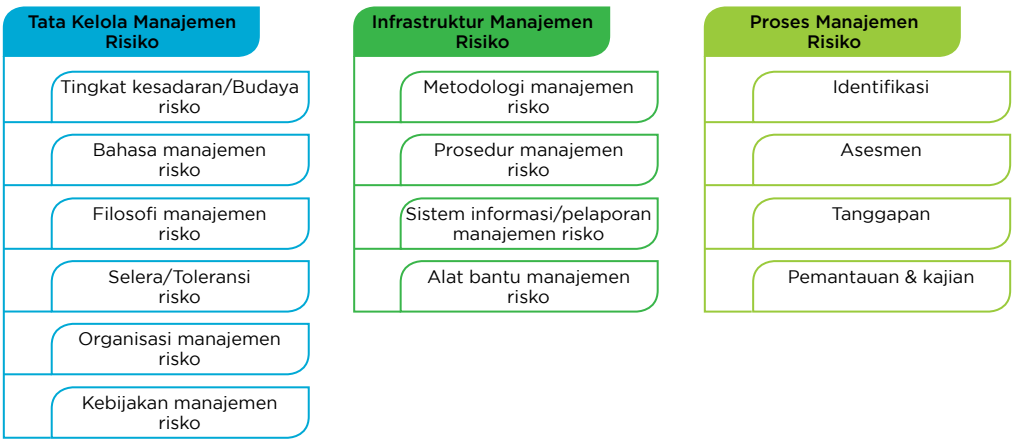

Manajemen risiko mulai diterapkan di PT Jamsostek (Persero) pada tahun 2007 dibawah tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Manajemen Risiko. Direktorat tersebut terbentuk dengan tujuan meningkatkan fungsi kepatuhan dalam pengelolaan risiko.Dalam menjalankan fungsinya, Biro Manajemen Risiko senantiasa mentaati kebijakan-kebijakan dan peraturan yang berlaku. Biro Manajemen Risiko mendisain dan menetapkan kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko, memfasilitasi unit kerja dalam melaksanakan manajemen risiko, serta memonitor pelaporan dan kesesuaian kerangka kerja atau metodologi yang diterapkan unit kerja.

Landasan penerapan manajemen risiko dilingkungan jamsostek adalah kebijakan manajemen risiko korporasi, Petunjuk teknis penyusunan profil risiko unit kerja serta sistem dan prosedur manajemen risiko korporat. Ketiga landasan tersebut dijadikan acuan oleh unit kerja dalam menjalankan aktivitas jamsostek yang berkaitan dengan pengelolaan risiko. Tujuan dari aktivitas manajemen risiko koorporasi yang dilakukan adalah terimplementasinya penerapan manajemen risiko korporasi yang terintegrasi dengan menggunakan praktik terbaik yang mengutamakan pengendalian risiko dan memperkuat perangkat mitigasi.

Ditahun 2012, pengelolaan manajemen risiko berada dibawah tanggung jawab Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi. Disamping itu, pada tahun 2013 organisasi pengelolaan risiko untuk cakupan kantor wilayah berada dibawah Kepala Manajemen Mutu dan Risiko Wilayah.

PT Jamsostek (Pesero) meyakini bahwa manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan. Hal tersebut dikarenakan semakin berkembangnya perusahaan yang diikuti peningkatan kompleksitas aktivitas serta transformasi menuju Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi. Sasaran utama dari penerapan manajemen risiko adalah melindungi perusahaan dari kerugian yang mungkin timbul. Perusahaan mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya sehingga tercapainya hasil yang optimal.

Evaluasi Efektifitas Sistim Manajemen Risiko

Sebagai Sasaran Strategis 2013 – 2017, Perusahaan menetapkan target pencapaian Tingkat Kematangan *(Maturity Level)* Penerapan Manajemen Risiko dengan nilai kematangan penerapan minimal 4,01 pada 2017. Untuk mencapai sasaran terebut, perusahaan telah menyusun Roadmap pembangunan dan penerapan Manajemen Risiko Korporasi sebagai berikut:

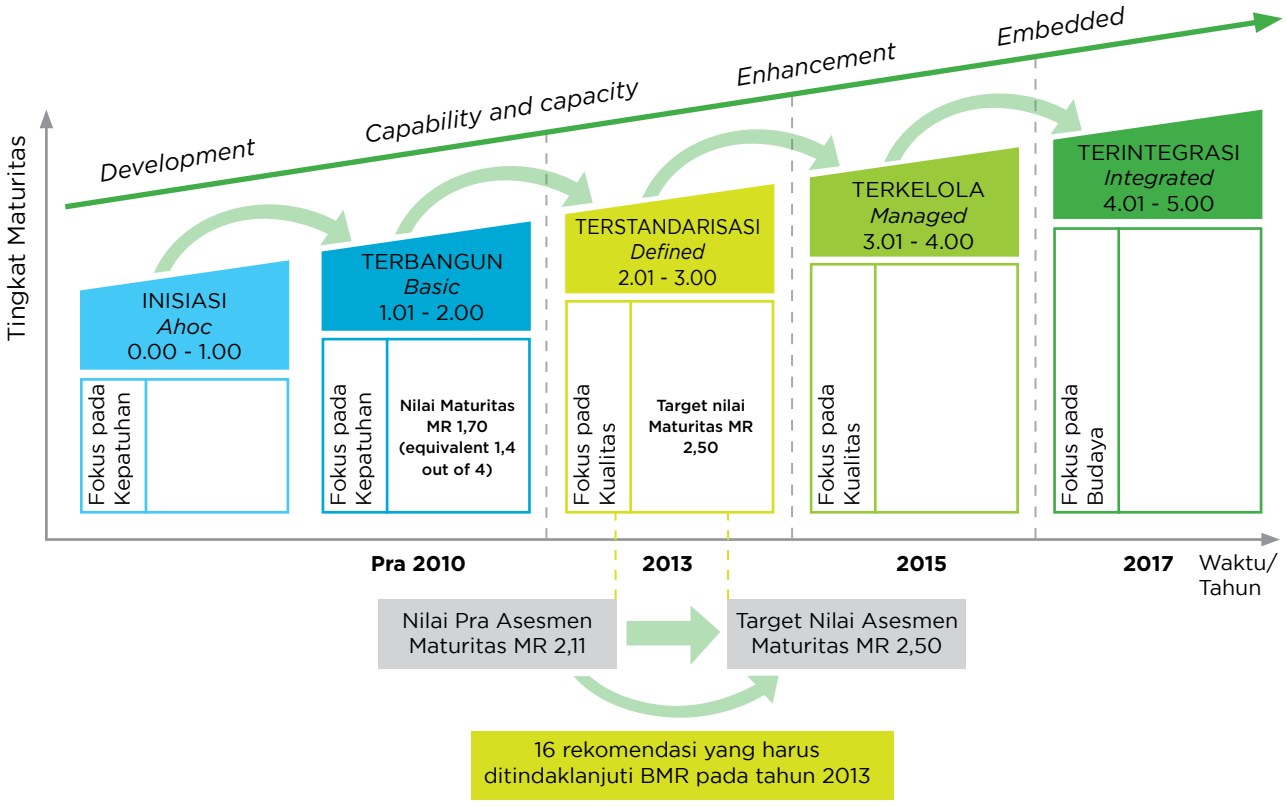

Dalam rangka implementasi roadmap tersebut, sebagai Sasaran Strategis tahun 2013, PT Jamsostek (Persero) menetapkan target pencapaian Tingkat Kematangan *(Maturity Level)* sebesar nilai 2,5. Berdasarkan hasil *pre-assessment* tingkat kematangan penerapan manajemen risiko korporasi yang dilakukan oleh pihak independen. Untuk mencapai target nilai tingkat kematangan *(Maturity Level)* 2,5, perusahaan melaksanakan program kerja *quick win* sesuai rekomendasi hasil *assessment.*

1. Pengukuran tingkat kematangan (maturity level) penerapan manajemen risiko

Redefinisi fungsi manajemen risiko dan meningkatkan maturity level manajemen risiko perusahaan meliputi:

Pembangunan Infrastruktur dan sistem Informasi *Enterprise Risk Managemen*t (ERM):

a. Telah dilakukan *pilot project* implementasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Korporat (SIMRK) di Kantor Cabang Wilayah DKI Jakarta dan Kantor Pusat.
b. Membangun *Risk Library/*penyusunan Pustaka Risiko Kantor Cabang, Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.

- Pencapaian *maturity level* penerapan manajemen risiko korporasi.
- Pengembangan sistem dan interkoneksi *Risk Based Audit* melalui *grand design* dan *coding design* Sistem Informasi Audit Intern (E-Audit) – SIMAI.

2. Evaluasi atas Proses Manajemen Risiko

a. Proses Identifikasi Risiko

Dalam rangka mengidentifikasi peristiwa yang mempertimbangkan kejadian yang sudah terjadi maupun kemungkinan akan terjadi baik berupa peluang maupun kejadian buruk yang akan terjadi (risiko).

Tahap untuk mengenalkan proses identifikasi saat ini dilakukan proses identifikasi dengan merujuk kepada sasaran masing-masing unit kerja mengacu kepada hasil penetapan *key performance indicator*.

Kelemahan proses identifikasi adalah:

1) Tidak seragamnya kalimat peristiwa risiko antar unit kerja untuk satu peristiwa risiko yang sama.
2) Tidak terstrukturnya proses identifikasi. Risiko ata aktivitas yang strategis dan utama dalam upaya pencapaian sasaran seringkali tidak teridentifikasi
3) Proses ini belum mempertimbangkan/ mengidentifikasi peluang yang ada.

Upaya – upaya yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan adalah:

1) Menyusun teknis identifikasi berbasis proses bisnis merujuk pada sasaran KPI.
2) Sosialisasi / *Couching Clinique* mengenai teknik identifikasi.
3) Menyusun *Risk Library.*
4) Merencanakan penetapan risiko prioritas oleh Direksi pada tahun 2014 serta penyusunan *Key Risk Indicator.*

b. Proses Pengukuran *(Assessment)* Risiko

Proses ini merupakan pengukuran terhadap kemungkinan atau probabilitas serta dampak risiko yang teridentifikasi. Perkalian antara nilai probabiltas dengan dampak risikonya menjadi nilai atau eksposur risiko.

Pengukuran telah dilakukan untuk setiap risiko teridentifikasi dalam proses *Risk and Control Self Asessment* (RCSA). Acuan nilai probabilitas dan dampak yang digunakan dalam pengukuran adalah skala probabilitas dan dampak yang terdapat dalam Kebijakan Manajamen Risiko Korporasi.

Kelemahan proses pengukuran adalah :

1) Proses pengukuran belum sepenuhnya mengacu kepada skala probabilitas dan dampak yang terdapat dalam Kebijakan Manajamen Risiko Korporasi, sehingga hasil pengukuran risiko belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
2) Proses pengukuran atas seluruh risiko di satu unit kerja seharusnya dilakukan oleh masing-masing *risk owner*, namun dalam kenyataannya seringkali dilakukan oleh satu orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, sehingga hasil identifikasi dan pengukuran risiko belum mencerminkan profil risiko unit kerja.
3) Proses pengukuran tidak divalidasi oleh atasan langsung atau penanggung jawab unit kerja *(Key Risk Owner).*

Upaya – upaya yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan adalah:

1) Sosialisasi/*Couching Clinique* mengenai teknik pengukuran *(assessment)* risiko.
2) Menetapkan tanggung jawab pengukuran dan validasinya secara berjenjang dalam aplikasi SIMRK yang saat ini dalam proses uji coba implementasi.

c. Proses Penanganan Risiko

Proses penanganan risiko merupakan proses menetapkan rencana tindakan untuk mengatasi risiko serta pelaksanaan rencana tindakan yang telah ditetapkan.Pentingnya suatu penanganan telah disadari oleh jajaran Insan Jamsostek yang secara implisit sebagian telah melekat didalam pelaksanaan program kerja yang ada namun dokumen proses evaluasi penanganan belum sistematis dan terstruktur sesuai basis prosedur pengelolaan risiko yang menggunakan *Risk Indicator*. Laporan Penanganan Risiko belum secara khusus disampaikan dalam bentuk

Laporan Penangan Risiko.

d. Proses Pelaporan dan Pemantauan Risiko

Aktivitas Pelaporan Manajemen Risiko adalah Laporan Profil Risiko Korporasi yang dilaksanakan setiap semester, untuk Laporan Penangan Risiko akan mulai diterapkan secara berkala hingga 3 (tiga) bulan sekali.Pelaksanaan pemantauan saat ini adalah pemantauan sasaran yang tercermin dari kemajuan pelaksanaan program kerja KPI. DalamLaporan Profil Risiko Tahun 2013, telah disajikan Perkembangan Eksposur Risiko yang merupakan tahap awal bentuk pemantauan risiko.

Dengan alat bantu aplikasi SIMRK yang tengah dikembangkan saat ini diharapkan proses pemantauan risiko akan lebih mudah dilaksanakan oleh masing – masing pimpinan unit kerja sebagai *Key Risk Owner*.

Risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan

1. Risiko Prioritas Korporasi

Risiko Prioritas Korporasi yang disampaikan yang dianggappalingberpengaruhterhadappencapaian sasaran korporasi dan memiliki nilai perkalian probabilita dan dampak di atas selera risiko perusahaan yaitu *medium low*, yang diidentifikasi dan upaya pengelolaannya sebagai berikut :

a. Risiko Pasar

Risiko terjadinya perubahan / penurunan kondisi perekonomian dan kinerja fundamental emiten di luar asumsi yang ditetapkan.
Rencana mitigasi yang dilakukan adalah:
- Melakukan *review portofolio* secara periodik.
- Melakukan penyesuaian kebijakan alokasi aset sesuai dengan kondisi makro ekonomi dan pasar.
- Membandingkan realisasi dengan alokasi aset yang ditetapkan secara periodic.
- Menyesuaikan alokasi aset sesuai dengan yang telah ditetapkan.

b. Risiko Strategis

1) Risiko kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah / instansi terkait pelaksanaan program Jamsostek.
Rencana mitigasi yang dilakukan adalah:
- Melakukan pembinaan kepada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang agar secara aktif membangun komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memperoleh dukungan terhadap implementasi program Jamsostek di daerah.
- Menerapkan penghargaan dan sanksi disiplin terhadap Kepala Kantor Cabang.

2) Risiko tidak mampunya DRC mengambil alih proses pengolahan data dengan segera saat terjadi gangguan pada Data Centre.
Rencana mitigasi atas risiko tersebut adalah adalah:
- Mengurangi *capacity gap* antara DC dengan DRC secara bertahap dengan pemenuhan fasilitas DC dan DRC.
- Melaksanakan uji coba *switch over* dalam kondisi minimum pemakaian sumber daya *(resources).*

3) Risiko belum selesainya RPP mengenai penyusunan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dari regulator.
Rencana mitigasi yang dilakukan antara lain adalah lebih aktif mendorong kegiatan yang terkait dengan pembahasan kebijakan operasional, pengelolaan & penyusunan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan serta memberikan masukan saat rapat dengan unsur pemerintah (Depkeu, Depnaker, OJK dan DJSN) terkait Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

4) Risiko terkendalanya pemenuhan sarana/ perangkat utama Teknologi Informasi (Perangkat DC, DRC, Jarkom & WAN).
Rencana mitigasi atas risiko tersebut adalah:
- Memonitor dengan ketat jadwal waktu proses pengadaan Perangkat melalui mekanisme DC dan DRC mulai dari proses perencanaan hingga serah terima pekerjaan.
- Menambah provider jaringan komunikasi selain PT Telkom sebagai *back up / redundancy* saat jaringan komunikasi PT Telkom mengalami gangguan.

5) Risiko tidak efektifnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar atau tidak bersedia mendaftar menjadi peserta Jamsostek.
Rencana Mitigasi yang dilakukan antara lain:
- Membuat jadwal kegiatan dari rencana kerja bersama dinas terkait untuk mendata potensi dan menindaklanjuti PWBD.
- Melakukan kunjungan bersama dalam penindakan dan penyidikan pada perusahaan yang bermasalah.

6) Risiko terlambatnya penyelesaian proses *posting* saldo JHT sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
Rencana mitigasi atas risiko tersebut adalah:
- Mengusulkan penambahan kapasitas infrastruktur *server database production* dan Jarkom Data *Centre.*
- Melakukan re-organisasi dan *rebuild table index* secara rutin sesuai jadwal.

c. Risiko Operasi

1) Risiko tidak segera tertanganinya permintaan perbaikan / koreksi data peserta dari kantor cabang.

   Rencana mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan semakin mengoptimalkan fungsi *Helpdesk* sebagai media Informasi serta IT Support dan IT Engineer sebagai penanggung Jawab penyelesaian masalah.

2) Permintaan pengadaan barang dan jasa oleh *user* disampaikan di luar jadwal pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan semula.
   Rencana mitigasi atas risiko ini adalah unit kerja fungsional menerbitkan atau mendistribusikan rencana pengadaan bulanan untuk mendapatkan perhatian dari unit pengguna.

3) Risiko tidak dapat optimalnya pemanfaatan / pengembangan aset investasi properti yang dimiliki.
   Rencana penanganan atas risiko tersebut antara lain adalah:
   - Melakukan evaluasi atas Pedoman Pengelolaan Investasi.
   - Melakukan sosialisasi pemahaman investasi langsung khususnya terkait dengan properti.
   - Melakukan penyesuaian rencana optimalisasi dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

4) Risiko Kurang lengkap dan kurang validnya data kepesertaan yang dihasilkan dari proses herregistrasi/registrasi.
   Rencana mitigasi atas risiko tersebut adalah:
   - Melakukan re-konfirmasi kembali data peserta yang tidak valid ke perusahaan / tenaga kerja.
   - Melakukan *clean up* data peserta yang tidak valid yang ada di SIPT berdasarkan data valid yang terdapat pada Form 1a atau data Form 1a hasil re-konfirmasi
   - Kabid, Kakacab, dan Kepala Wilayah Pemasaran melakukan pemantauan yang lebih ketat melalui sampling kualitas input data registrasi yang dilakukan oleh *Account Officer.*

5) Risiko tidak validnya informasi data potensi yang diperoleh dan informasi data potensi yang dimiliki.
   Rencana mitigasi atas risiko tersebut adalah:
   - Penyusunan kategori & segmentasi informasi untuk dijadikan referensi perluasan kepesertaan.
   - Evaluasi secara berkala baik di tingkat cabang, wilayah maupun Pusat atas data potensi yang ada misal dengan membuat *reporting* jumlah data potensi yang dapat/tidak ditindak lanjuti.

6) Risiko terdapat data kepesertaan dan data keuangan pada database SIPT yang tidak valid.
   Rencana mitigasi terhadap risiko tersebut adalah:
   - Mengusulkan kepada unit terkait agar dilakukannya Sosialisasi kepada *User* Cabang melalui surat edaran agar lebih disiplin dalam pengelolaan data.
   - Menyampaikan data permasalahan yg sering timbul kepada unit terkait sebagai bahan / data membuat surat edaran kepada *user* (kantor cabang).

7) Risiko ketidaklengkapan data kompetensi karyawan dalam data base kepegawaian.
   Alternatif mitigasi yang dapat dilakukan adalah:
   - Melakukan integrasi kebijakan pengelolaan *Human Capital.*
   - Penyempurnaan pemetaan kompetensi di masing-masing fungsi / unit kerja berdasarkan kondisi terkini.
   - Melakukan verifikasi atas Daftar Suksesi yang dikirimkan oleh Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang.

8) Risiko belum optimalnya *monitoring* terhadap pengamanan *password* secara memadai untuk mencegah klaim fiktif.
   Rencana mitigasi terhadap risiko tersebut adalah secara berkala mengingatkan pejabat struktural di kantor cabang untuk melakukan pengendalian *password* dengan baik dengan cara memastikan semua *password* standar yang disetup oleh perusahaan telah diganti dan mengontrol password yang dipinjamkan/digunakan oleh orang lain.

9) Risiko belum akuratnya identifikasi dan asesmen risiko yang dilakukan oleh unit kerja.
   Rencana mitigasi yang dapat dilakukan antara lain adalah:
   - Melakukan monitoring terhadap unit kerja terkait pengiriman profil risiko secara periodik.
   - Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada unit kerja dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko.
   - Melakukan campaign program untuk meningkatkan *awareness* unit kerja terhadap proses pengelolaan risiko.

10) Risiko terganggunya keberlangsungan *(suistainibility)* program DPKP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang BPJS.
    Rencana mitigasi yang dapat dilakukan adalah:
    - Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada *regulator* dan *stakeholder* lainnya (Serikat Pekerja, dll) mengenai pentingnya

keberlangsungan program PKP sebagai sarana peningkatan kesejahteraan peserta.
- Melakukan eskalasi pembahasan ke tingkat yang lebih tinggi (Kementrian, Kantor Kepresidenan) apabila terjadi *deadlock* pembahasan di tim pembahas / perumus RPP BPJS.
- Melakukan kajian dari aspek hukum terkait keberlangsungan program dan status hukum dana PKP, termasuk kemungkinan untuk menyiapkan konsep/usulan ketentuan / payung hukum yang mengatur program sejenis dan dituangkan dalam struktur yang melekat pada organisasi BPJS Ketenagakerjaan.

d. Risiko Pelaporan

1) Risiko tidak akurat dan tidak lengkapnya data pendukung laporan keuangan yang dapat menimbulkan salah saji material pada laporan keuangan PT Jamsostek (Persero).
Rencana mitigasi terhadap risiko tersebut adalah:
- Membentuk tim *ad hoc* untuk menyelesaikan data yang belum valid yang dapat berpotensi menimbulkan salah saji akun dan mengganggu kewajaran opini laporan keuangan.
- Merumuskan langkah kongrit menyelesaikan data yang tidak valid dan secara ketat memonitor penyelesaiannya.

2) Risiko terlambatnya secara signifikan penerbitan Laporan Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) serta Laporan Keuangan Opening Balance BPJS Ketenagakerjaan.
Rencana mitigasi atas risiko tersebut adalah adalah terus melakukan sosialisasi ke DJSN & Instansi unsur pemerintah mengenai mekanisme pisah aset PT Jamsostek (Persero).

e. Risiko Reputasi

Risiko belum terstandarisasinya dan belum konsistennya pelayanan Jamsostek pada kantor cabang sesuai standar pelayanan prima.

Rencana mitigasi atas risiko tersebut adalah melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan pelayanan oleh Kepala Kantor Cabang serta menerapkan sanksi dan reward terhadap petugas pelayanan atas kualitas pelayanan yang diberikan.

2. Peta Risiko

Peta Risiko merupakan gambaran posisi relatif antara tingkat probabilitas dan dampak risiko dalam suatu format peta risiko yang telah ditentukan. Garis putus-putus dalam Peta Risiko merupakan batas Garis Selera Risiko. Titik risiko yang berada pada area di sebelah bawah Garis Selera Risiko merupakan risiko yang masih sesuai dengan selera risiko Direksi, sebaliknya Titik risiko yang berada pada area di sebelah bawah Garis Selera Risiko merupakan risiko yang berada di luar selera risiko Direksi. Berikut adalah gambar Peta Risiko dan Garis Selera Risiko.

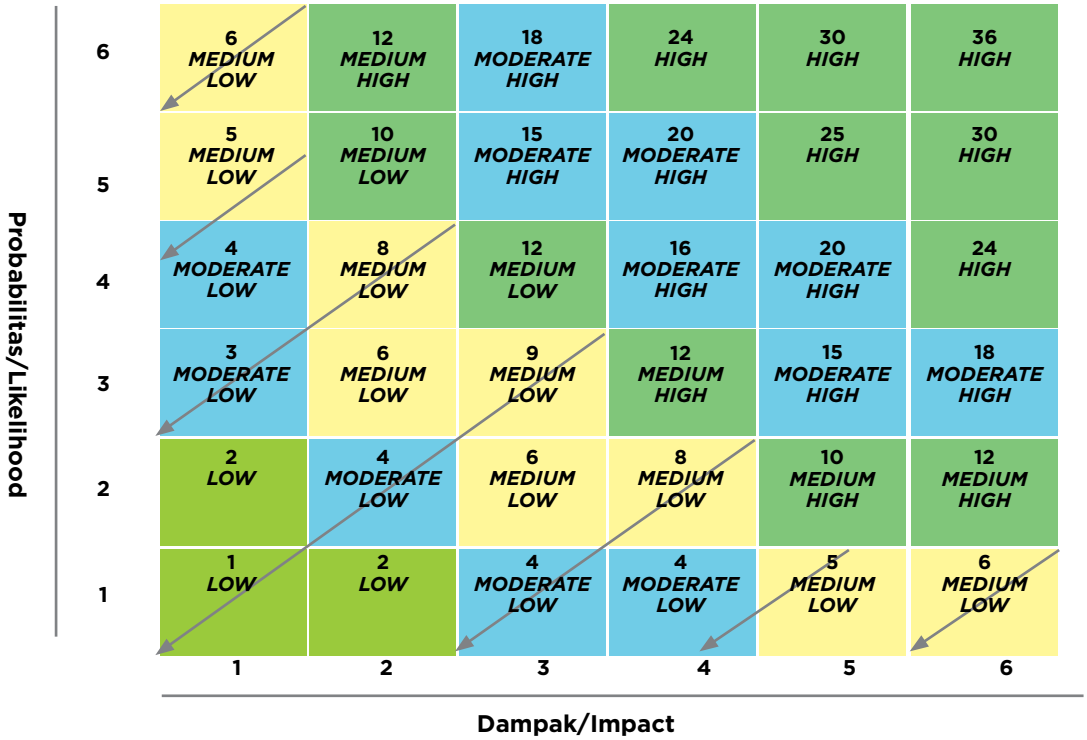

Selera risiko / toleransi risiko merupakan pernyataan risiko dan jumlah *(eksposure)* risiko yang bersedia diambil (siap dihadapi) perusahaan untuk mencapai nilai perusahaan (tujuan perusahaan). Selera risiko dan toleransi risiko telah ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Korporasi dengan batas maksimal *eksposure* risiko yang bersedia diambil adalah *Medium Low*. Dalam implementasi pengelolaan unit kerja, pemahaman tentang selera dan toleransi risiko masih perlu ditingkatkan, dan upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang manajemen Risiko.

Untuk memastikan kesesuaian antara selera dan toleransi risiko terhadap sasaran-sasaran dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2013 - 2017 serta ekspektasi Direksi saat ini menghadapi perubahan status badan hukum menjadi BPJS Ketenagakerjaan, akan dilakukan evaluasi terhadap selera dan toleransi risiko perusahaan. *Eksposure* risiko strategis, risiko operasi serta risiko pasar masih berada di atas selera risiko perusahaan lebih disebabkan oleh risiko yang bersumber dari faktor-faktor sebagai berikut:

a. Masih belum menurunnya risiko yang bersumber dari penyelesaian pembahasan dan pengesahan rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang operasional BPJS.
b. Meningkatnya risiko terkait kesiapan sarana utama Sistem Teknologi Informasi.
c. Pelaksanaan perluasan kepesertaan yang terkendala kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah, validitas data potensi serta penegakan hukum terhadap perusahaan tidak daftar Jamsostek atau PDS TK yang tidak berjalan.
d. Pelayanan klaim jaminan yang belum memenuhi standar pelayanan prima.
e. Kondisi makro ekonomi yang menurun.

E. Upaya Pengelolaan Risiko

1. Tata Kelola Manajemen Risiko

a. Tingkat Kesadaran / Budaya Risiko

Secara umum, mekanisme dan budaya kerja yang ada di lingkungan perusahaan dipandang kondusif dan mendukung dalam pembentukan budaya sadar risiko, disertai dengan upaya-upaya internalisasi berupa program-program *awareness* dan pelatihan di bidang manajemen risiko serta dilakukan sosialisasi tentang kebijakan dan prosedur terkait dengan praktik manajemen risiko. Penetapan tanggung jawab pengelolaan risiko telah didefinisikan dalam masing-masing fungsi yang ada pada unit kerja dengan mencantumkan tanggungjawab terhadap pengelolaan risiko, akan tetapi tingkat pemahaman tentang pengelolaan risiko masih perlu ditingkatkan.

b. Bahasa Manajemen Risiko

Standar bahasa manajemen risiko telah dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Korporasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor : KEP/235/062012 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Korporasi serta Petunjuk Teknis Asesmen Risiko Unit Kerja, dimana Standar Bahasa Manajemen Risiko meliputi:

1) Skala Kriteria Pengukuran Probabilitas dan Dampak Risiko.
2) Peta Risiko.
3) Formulir *Risk and Control Self Assessment* (RCSA).

Untuk meningkatkan kualitas penerapan saat dilakukan assessmen risiko, telah dilakukan *updating* Formulir *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) dengan menambahkan beberapa parameter dalam proses pengukuran risiko sebagai berikut:

1) Hasil *assessmen* risiko / eksposur risiko periode sebelumnya untuk setiap peristiwa risiko.
2) Alasan perubahan eksposur risiko.
3) Mitigasi risiko secara periodik.
4) Rencana Waktu Mitigasi.
5) Penanggung jawab mitigasi.

c. Filosofi Manajemen Risiko

Filosofi manajemen risiko adalah penyataan kepercayaan dan sikap terhadap manajemen risiko dalam segala hal, mulai dari pengembangan strategi hingga penerapan. Perusahaan secara eksplisit telah menetapkan filosofi dalam Kebijakan Manajemen Risiko Korporasi, namun pemahaman landasan penerapan manajemen risiko perusahaan di antara unit kerja masih beragam. Selain itu, manajemen risiko perusahaan cenderung dilaksanakan secara silo. Akan tetapi mulai mendapat perhatian, pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh risiko yang melekat dalam proses bisnis korporasi.

d. Toleransi Risiko

Toleransi risiko merupakan pernyataan risiko dan jumlah *(eksposure)* risiko yang bersedia dihadapi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Toleransi risiko telah ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Korporasi dengan batas maksimal *eksposure* risiko

yang bersedia diambil adalah *Medium Low*. Dalam implementasi pengelolaan unit kerja, pemahaman tentang selera dan toleransi risiko masih perlu ditingkatkan dan upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang manajemen Risiko.

Untuk memastikan kesesuaian antara selera dan toleransi risiko terhadap sasaran-sasaran dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2013 - 2017 serta ekspektasi Direksi saat ini menghadapi perubahan status badan hukum menjadi BPJS Ketenagakerjaan, akan dilakukan evaluasi terhadap selera dan toleransi risiko perusahaan.

e. Organisasi Manajemen Risiko

Struktur organisasi penerapan manajemen risiko merupakan struktur yang memberikan kerangka untuk merencanakan, menjalankan, mengendalikan dan memantau aktifitas penerapan manajemen risiko. Dalam hal ini perusahaan telah memiliki struktur dan deskripsi pekerjaan yang cukup jelas menggambarkan batasan wewenang dan tanggung jawab disetiap tingkatan.

Fungsi Manajemen Risiko dilakukan oleh Direktorat Perencanaan, Pengembangan dan Informasi yang pelaksanaanya senantiasa meningkatkan kepatuhan dan pengembangan metoda pengelolaan risiko korporasi berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/111/032013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Keputusan Direksi Nomor KEP/120/042013 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan, didalamnya dibentuk struktur baru yaitu Kepala Manajemen Mutu dan Risiko Wilayah pada 11 Kantor Wilayah yang berperan sebagai perpanjangan tangan dalam pengendalian dan monitoring penerapan manajemen risiko.

f. Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan dalam penerapan Manajemen Risiko Korporasi (MRK) telah diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP/235/062012 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Korporasi (MRK) PT Jamsostek (Persero) yang menjadi landasan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan pengkinian (*updating*) dokumen di tahun 2012 dengan mengadopsi dan menyesuaikan beberapa perkembangan metodologi penerapan manajemen risiko.

2. Infrastruktur Manajemen Risiko

a. Metodologi Manajemen Risiko

Metodologi penerapan Manajemen Risiko Korporasi (MRK), pengembangan proses penerapan manajemen risiko, alat bantu dan alat ukur manajemen risikomengacu pada COSO ERM Integrated Framework yang banyak diadopsi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

b. Prosedur Manajemen Risiko

Dalam rangka melengkapi perangkat pendukung penerapan manajemen risiko korporat, telah disusun Sistem dan Prosedur Manajemen Risiko Korporasi sesuai Keputusan Direksi Nomor:KEP/375/102013 tentang Sistem Operating Prosedur Manajemen Risiko Korporasi PT. Jamsostek (Persero), sebagai panduan praktik pelaksanaan penerapan manajemen risiko bagi para pemangku kepentingan internal yang terkait.

c. Sistem Informasi/Pelaporan Manajemen Risiko

Pelaporan manajemen risiko perusahaan saat ini dilaksanakan secara periodik. Identifikasi dan asesmen risiko dilaksanakan oleh unit kerja sebagai pemilik risiko (*Risk Owner*) secara mandiri dengan metode *Risk and Control Self Asessment* (RCSA) untuk diolah menjadi Profil Risiko Korporat.

d. Alat Bantu Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan manajemen risiko mengembangkan alat bantu dalam melakukan pengelolaan risiko dan *review* risiko, yaitu:

1) *Bloomberg*
2) I*nternal Investment Risk Scoring Method*
3) *Form Risk and Control Self Assesment*

Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Korporasi (SIMRK) sebagai alat bantu bagi user untuk memudahkan dalam melakukan proses RCSA, telah sampai tahap *User Acceptance Test* (UAT) dan uji coba implementasi di kantor-kantor cabang Wilayah DKI Jakarta dan saat ini dalam proses uji coba di unit kerja Kantor Pusat.

Untuk memudahkan proses identifikasi risiko dan keseragaman terhadap kalimat peristiwa risiko, telah dikembangkan *Risk Library* yang menjadi bagian dan digunakan dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Korporasi (SIMRK).

3. Tindak Lanjut Pengelolaan Risiko

Dalam mendukung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta tata kelola perusahaan yang bersih dari KKN dalam kerangka Manajemen Risiko, PT Jamsostek (Persero) menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melekatkan kewajiban pengelolaan risiko-risiko perusahaan dalam deskripsi tugas *(job description)* SDM Perusahaan, khususnya pejabat struktural sebagai bentuk Responsibilitas terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya.
b. Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan batasan risiko yang dapat diterima R*isk Appetite/Tolerance* atas risiko-risiko utama perusahaan dan diinformasikan kepada seluruh karyawan/unit kerja, sebagai bentuk transparansi dan responsibilitas Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan risiko perusahaan. Guna mendukung kampanye pengendalian *fraud*, anti korupsi, suap dan gratifikasi. Direksi PT Jamsostek (Persero) tidak memberikan toleransi *(zero tolerance)* terhadap risiko *fraud.*
c. Kajian risiko operasional, investasi dan keuangan yang merupakan opini independen terhadap unit kerja teknis dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan.
d. Identifikasi dan asesmen menggunakan *metode risk and control self assessment* yang dilakukan oleh *risk owner.* Masing-masing unit kerja sebagai *risk owner* dan penanganan risiko-risiko utama yang telah direncanakan mitigasinya, sehingga prinsip akuntabilitas dan fairness terhadap tanggung jawab pengelolaan risiko berjalan dengan baik.
e. Guna meningkatkan kualitas tata kelola korporat *(corporate governance)* yang mendorong penerapan roadmap BUMN/ Jamsostek Bersih, Biro Manajemen Risiko terus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko perusahaan dengan terus meningkatkan kesadaran *(awareness)* seluruh karyawan terhadap pengelolaan risiko, mengembangkan kebijakan, prosedur dan alat bantu pengelolaan risiko, memperbaiki kualitas proses pengukuran dan pelaporan risiko serta menyusun dan melaksanakan *roadmap* pengembangan dan penerapan Manajemen Risiko Korporasi, sehingga dapat mendukung tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)* dan tata kelola perusahaan yang bersih.
f. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi manajemen risiko pada seluruh lini organisasi, sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan semua jenis risiko dapat diidentifikasi, dimonitor, diukur dan dikendalikan.
g. Mengintegrasikan fungsi Biro Manajemen Risiko, Biro Kepatuhan dan Hukum, dan Biro Pengawasan Intern dalam penanganan kasus *fraud*.
h. Memberikan pelatihan yang tepat bagi pegawai dalam fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum, dan Pengawasan Intern untuk meningkatkan kompetensi dibidang penanganan *fraud*.
i. Pengelolaan risiko di Direktorat Investasi menjadi bagian dalam setiap proses investasi, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan investasi yang mengedepankan prinsip kehati-hatian keamanan dana, likuiditas dan hasil yang optimal.

SUMBER DAYA MANUSIA

PT Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tenaga kerja mengemban misi menyelenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang memberi perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya dalam menghadapi risiko sosial ekonomi pada saat berkurangnya atau hilangnya penghasilan karena kecelakaan kerja, berhenti bekerja atau meninggal dunia dan memenuhi kebutuhan medis tenaga kerja dan keluarganya. Untuk mendukung tercapainya misi PT Jamsostek perlu ditunjang dengan pengembangan SDM melalui program-program pembinaan Sumber Daya Manusia perusahaan secara terpadu, berlanjut dan berkesinambungan di samping penyempurnaan sistem-sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang mampu mewujudkan karyawan yang unggul dan mampu berkompetisi secara global.

Dengan sistem pengembangan yang berbasis kompetensi *(Competency Based Human Resources Management / CBHRM),* karyawan PT Jamsostek (Persero) siap menyongsong "era baru" Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi, PT Jamsostek (Persero) juga berusaha meningkatkan kualitas sumber daya karyawannya. Pada tahun 2009 mulai diterapkan sistem yang mampu mendorong kinerja maksimal dari SDM, sistem tersebut adalah Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi *(Competency Based Human Resources Management/CBHRM).* Sistem manajemen SDM Berbasis Kompetensi (CBHRM) merupakan kegiatan manajemen Sumber Daya Manusia yang didasarkan pada suatu kompetensi.

Untuk pelaksanaan sistem tersebut PT Jamsostek (Persero) membuat Model Kompentesi *(Competency Model)* yang memiliki 3 (tiga) elemen, yaitu: Kompetensi Inti, Kompetensi Peran dan Kompetensi Fungsional.

A. *ROADMAP* PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka memulai penerapan sistem manajemen SDM Sistem manajemen berbasis kompetensi terlebih dahulu dibangun roadmap pengembangan SDM untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (2009 - 2013) yang menitikberatkan pada manajemen Kinerja, Penilaian, Pengembangan, Sistem Manajemen Karir dan Sistem Informasi SDM.

Roadmap yang telah ditetapkan oleh Direktorat Umum dan SDM untuk periode Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :

Roadmap Pengembangan Sumber Daya Manusia					
	2009	2010	2011	2012	2013
Manajemen Kinerja	Pengambangan		Keunggulan		
	Implementasi Sistem Manajemen Kerja		Sistem Manajemen Kinerja Yang Komprehensif		
	Implementasi Awal PMS : Sosialisasi PMS, Introduksi Performance Based Reward	Implementasi PMS : Pemantapan - Penajaman Link Corporate - Individu, Sistem Standard	Implementasi PMS : Penguatan Sistem, Pemetaan Kinerja Karyawan Obyektif, Transparan	Penguatan Budaya Kinerja : Sistem terpadu antara Perencanaan Perusahaan - PMS - Penghargaan - Kompetensi : Pencapaian Perusahaan dan Tenaga Kerja yang tinggi	
Penilaian	Pengembangan Kompetensi Assessment System, Peta awal Kompetensi Karyawan	Pemantapan Sistem Assessment, Pemanfaatan Hasil Assessment	Pengembangan sistem Assessment, Peningkatan Kemampuan Inhouse untuk Penilaian Assessment	Penguatan Sistem, Kemampuan dan Budaya Assessment secara internal pada semua level	
		Peta Kinerja Kompetensi	Peta Kinerja Kompetensi	Peta Kinerja Kompetensi	Peta Kinerja Kompetensi
	Hi Pot (Talent) Pool	Hi Pot (Talent) Pool	Hi Pot (Talent) Pool	Hi Pot (Talent) Pool	Hi Pot (Talent) Pool
Pengembangan	Pengembangan Pemimpin - awal : MOP Utama, Madya, Muda		Pengemba ngan Pemimpin : Pemantapan : Sistem, Hasil	Sistem Pengembangan Pemimpin secara Komprehensif tertanam dalam Proses Bisnis Perusahaan	
		Identifi Bibit Unggul Pemimpin Masa Depan / MT (MDP Pratama): penyiapan Pemimpin Masa Depan	MT (MDP Pratama): penyiapan Pemimpin Masa Depan	MT (MDP Pratama): penyiapan Pemimpin Masa Depan	MT (MDP Pratama): penyiapan Pemimpin Masa Depan
		Program Akselerasi (Talent Pool)	Program Akselerasi (Talent Pool)	Program Akselerasi (Talent Pool)	

Sistem Manejemen Karir		Pengembangan SIstem Manajemen Karir, Jalur Karir (Temasuk Penataan Rincian Pekerjaan)	Implementasi Sistem Manajemen Karir - Tahap Pengembangan Awal: Perubahan Paradigma	Integrasi Sistem Manajemen Karir Dengan PMS & Pengembangan
Sistem Informasi SDM	Tahap Pengembangan	Implementasi Tahap Awal: Sosialisasi, Pengisian Database, Pemanfaatan Pada Proses Transaksional	Penguatan Sistem dan Optimalisasi Pemanfaatan	

B. KEBIJAKAN STRATEGIS

1. Pengisian karyawan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk memenuhi penambahan Kantor Wilayah baru dan Kantor Cabang Pembantu.
2. Internalisasi Budaya perusahaan kepada semua insan Jamsostek, penyelenggaraan *Workshop Agent of Change* untuk membentuk agen perubahan.
3. Pelaksanaan Audit *Human Capital* untuk mengetahui dan mengukur efektifitas penggunaan sumber daya manusia.
4. Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman pelaksanaan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.
5. Penerapan *coaching* dan *conselling* di seluruh unit kerja untuk meningkatkan produktivitas karyawan.

C. EVALUASI PENERAPAN *ROADMAP* PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan *Roadmap* Pengembangan Sumber Daya manusia pada tahun 2013 PT Jamsostek (Persero) telah sampai pada tahap Pengembangan *Human Capital Management System* dan Optimalisasi Pemanfaatan, yang di dalamnya meliputi internalisasi Budaya Kinerja dan Manajemen Kinerja.Tahapan pembangunan HCMS terselesaikan 2 Modul yaitu implementasi database karyawan dan penyempurnaan manajemen kinerja yang di integrasikan kedalam sistem manajemen karir. Implementasi database karyawan adalah penerapan sistem *Multirating* 3600 yang digunakan untuk menyamakan persepsi dan internalisasi budaya perusahaan melalui kegiatan MVVM *(Mission, Vision, Values & Meanings)* dan kegiatan VBLD *(Value Base Leadership Development).*

Kegiatan manajemen sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen dan seleksi, pengembangan karir, pelatihan, kinerja dan balas jasa yang didasarkan pada suatu kerangka/model yaitu kompetensi karyawan berkinerja superior. Kompetensi merupakan kombinasi antara ketrampilan *(skill),* atribut personal dan pengetahuan *(knowledge)* yang tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievalusi untuk menyelesaikan pekerjaan secara optimal. PT Jamsostek (Persero) membangun sistem pengelolaan kebijakan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi *(Competency Based Human Resources Management / C*BHRM) dengan membangun modul-modul sebagai berikut :

1. Model dan Kamus Kompetensi

Untuk pelaksanaan Sisten CBHRM, PT Jamsostek (Persero) telah membuat model komptensi *(Competency Model)* yang tertuang dalam KEP/280/102008 tentang Model dan Kamus Kompetensi yang memiliki 3 (tiga) elemen, yaitu :

a. Kompetensi Inti *(Integrity, Service Excelence, Achievement Orientation, Assertive Communication, Complience)*, 5 kompetensi ini harus dimiliki seluruh karyawan.
b. Kompetensi Peran (harus dimiliki oleh pegawai di masing-masing tingkat jabatan) terdiri dari tingkat Manajerial, *Officer* dan Administrasi.
c. Kompetensi Fungsional (kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh setiap karyawan sesuai dengan *Job Title*) terdiri dari *Hard Competency* dan *Soft Competency.*

2. Sistem Pengembangan Kompetensi

Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensinya, PT Jamsostek (Persero) melakukan pengembangan diklat, dengan cara:

a. Menyediakan konten pembelajaran mandiri dalam bentuk *E-Learning.*
Adapun pengembangan modul *E-Learning.* selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel Konten *E-Learning*

No	Tahun	Jumlah
1	2009	4
2	2010	9
3	2011	11
4	2012	9
5	2013	19
Total		52

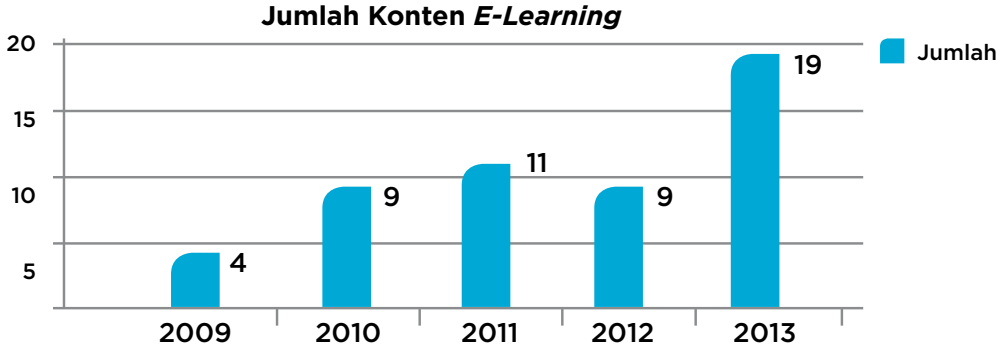

Sampai dengan 2013 telah tersedia 52 konten *E-Learning* yang dapat diakses melalui http://elearning.jamsostek.co.id yang terdiri dari :

	KONTEN E-LEARNING
1	*Good Corporate Governance* (GCG)
2	CBHRM *(Competency Based Human Resource Management)*
3	SMKK-BK *Courses*
4	Panduan Penampilan Pegawai
5	*Supervisory Skills*
6	*Attitude Virus*
7	*Performance Review*
8	*Practical Coach*
9	*Business English 1*
10	Pengantar Layanan
11	Standar Layanan CSO
12	Penampilan Profesional
13	Keluhan Peserta Jamsostek
14	*Business English 3*
15	*Business English 2*
16	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
17	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
18	Filosofi Jaminan Sosial
19	Manajemen Keuangan
20	Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta
21	Identitas Perusahaan
22	Keprotokolan
23	Administrasi Umum
24	Dasar-Dasar Asuransi
25	*I am The Director*
26	Kemahiran Presentasi

	KONTEN E-LEARNING
27	Keterampilan Bernegosiasi
28	Pengantar Manajemen Konflik
29	Menjadi Pribadi Tangguh
30	*Problem Solving Decision Making*
31	Siap Menghadapi Perubahan
32	*Coaching and Mentoring*
33	*Superior Service Skills*
34	*Time Management*
35	Teknik Mengelola Konflik
36	Mengenali Diri-Membangun Sinergi
37	Penerapan 5S
38	Personal Leadership
39	Mengubah Sikap Negatif
40	Stress Management
41	Menangani 'Virus' di Tempat Kerja
42	Berpikir Kreatif
43	Keragaman di Tempat Kerja
44	Etika di Tempat Kerja
45	Manajemen Risiko
46	Pengadaan Barang dan Jasa
47	*Good Corporate Governance*
48	Manajemen Mutu
49	*Customer Relationship Management*
50	Manajemen Aset
51	IPTIK & TOPAS
52	Cerdas Mengelola Keuangan Pribadi

Data karyawan yang telah mengakses *E-Learning* selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Karyawan	Karyawan Yang Menyelesaikan *E-Learning*	Prosentase Penyelesaian	Keterangan
1.	2009	3.046	475	15,59	
2.	2010	3.177	545	17,15	
3.	2011	3.240	677	20,90	
4.	2012	3.277	3.101	94,63	
5.	2013	3.854	3.067	79,58	a. "Calon Karyawan Rekrutmen 2013 sejumlah 682 baru mendapatkan *User E-learning* di Tahun 2014 " b. Terdapat karyawan yang memasuki Masa Persiapan Pensiun di Tahun 2013 sehingga tidak terhitung di penyelesaian untuk Tahun 2013

b. Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme karyawan, maka perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Karyawan.

Tipe Dan Jenis Diklat			
No.	Jenis	Keterangan	
1	Diklat Karir	Pendidikan dan pelatihan yang diadakan sebagai persyaratan untuk menunjang karir karyawan sejak proses rekrutmen hingga menempati puncak karir.	Dilaksanakan secara swakelola denganinstruktur internal dan eksternal.
2	Diklat Teknis	Pendidikan dan pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan fungsi dan bidang tugas karyawan serta untuk persiapan pensiun.	Dilaksanakan secara swakelola denganinstruktur internal dan eksternal.
3	Diklat Penyegaran	Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan sejalan dengan perkembangan lingkungan eksternal.	Diselenggarakan oleh lembaga/institusi eksternal yang berbentuk kursus, seminar, workshop dan lokakarya.

Tabel Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan selama 5 tahun terakhir

No	Nama Diklat	2009	2010	2011	2012	2013
DIKLAT KARIR						
1	Diklat Persiapan Kerja	111	103	145	138	696
2	Diklat Kepemimpinan Muda	58	67	37	111	390
3	Diklat Kepemimpinan Madya	2	68	38	142	140
4	Diklat Kepemimpinan Utama	3	-	-	64	34
5	Asesmen Kompetensi Pra Seleksi Diklat Kepemimpinan	383	170	43	33	-
6	Training of Trainers	32	48	68	20	-
7	Sertifikasi Profesi	42	44	57	65	95
8	Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri	8	11	10	8	3
9	Beasiswa Pascasarjana Luar Negeri	-	-	-	-	3
	JUMLAH PESERTA DIKLAT KARIR	639	511	398	581	1.361
DIKLAT TEKNIS						
10	Bidang Pemasaran	105	66	68	-	72
11	Bidang Pelayanan (CSO/VerJam/JPK)	136	119	121	95	57
12	Bidang Umum & SDM	61	38	62	54	71
13	Bidang Keuangan/Akuntansi	69	-	62	128	-
14	Bidang Investasi	-	-	-	-	34
15	Bidang PKP/KBL	60	32	-	-	-
16	Bidang Teknologi Informasi	30	-	-	-	
17	Diklat Purna Tugas	144	143	153	94	80
18	Diklat Keprotokoleran	-	-	-	-	25
	JUMLAH PESERTA DIKLAT TEKNIS	605	398	466	371	339
DIKLAT PENYEGARAN						
19	Penyegaran (Kursus/Seminar/Workshop/Training)	734	708	309	378	775
ASESMEN KARYAWAN						
20	Asesmen Karyawan	-	-	-	-	119
	TOTAL	**1.978**	**1.617**	**1.173**	**1.330**	**2.594**

Tabel Biaya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

No.	Tahun	Jenis Beban				Total Beban
		Diklat Karir	Diklat Teknis	Diklat Penyegaran	Pengembangan Diklat	
1	2009	5.772.457.081,29	5.321.666.637,62	695.544.550,00	1.639.152.589,00	13.428.820.857,91
2	2010	5.983.759.335,64	3.393.439.001,19	960.650.577,98	2.219.041.520,00	12.556.890.434,81
3	2011	4.557.851.460,00	4.241.995.370,00	135.770.600,00	2.765.241.050,00	11.700.858.480,00
4	2012	9.846.612.440,13	3.883.175.008,84	1.821.050.630,00	145.426.000,00	15.696.264.078,97
5	2013	19.526.033.964,68	3.394.025.163,00	3.185.378.678,40	2.034.551.707,00	28.139.989.513,08

3. Sistem Manajemen Kinerja Karyawan Berbasis Kompetensi (SMKKBK)

SMKKBK merupakan suatu sistem penilaian untuk mengevaluasi/menilai sasaran kinerja karyawan baik yang terkait dengan target yang berbasis *Balance Score Card* dalam mencapai sasaran individu/unit kerja sampai dengan sasaran perusahaan maupun sasaran kompetensi yang dituntut oleh suatu jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, diawali dengan Penetapan Sasaran Kinerja, Pengelolaan Kinerja, sampai dengan Penilaian Kinerja yang dapat dipakai sebagai acuan untuk penghargaan dan program pengembangan karyawan serta sebagai input bagi manajemen dalam perencanaan SDM dan perencanaan karir.

Tujuan dari SMKKBK ini adalah :

a. Membangun komitmen manajemen dan karyawan dalam mencapai Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
b. Panduan bagi karyawan dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan dan diselaraskan dengan RJP dan RKAP.
c. Panduan yang objektif dalam mencapai kinerja karyawan
d. Pedoman yang objektif dalam memberikan penghargaan bagi karyawan
e. Mengembangkan kompetensi karyawan

f. Memberikan masukan bagi manajemen dalam perencanaan SDM dan perencanaan karir Untuk membantu manajemen dalam memantau dan meningkatkan efektivitas kinerja SDM, maka dilakukan pengukuran dalam dua indikator utama yaitu:

Key Performance Indicator (KPI) 70%	• Perspektif Keuangan • Perspektif Pelanggan • Perspektif Proses Internal • Perspektif Pembelajaran Pertumbuhan
Key Behaviour Indicator (KBI) 30%	• Kompetensi Dasar • Kompetensi Peran • Kompetensi Fungsional

4. Sistem Manajemen Karir

Pola pengembangan karir adalah pola pembinaan karyawan yang menggambarkan jalur pengembangan karir karyawan sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.

Prinsip yang digunakan dalam pola pengembangan karir Jamsostek adalah kesamaan hak untuk memperoleh pengembangan karir, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, menciptakan kader kepemimpinan dan sistem berjenjang.

Penerapan pola pengembangan karir dibagi ke dalam dua jenis yaitu horizontal dan vertical. Pola horizontal yaitu mutasi dilakukan pada level yang sama dalam rangka penyegaran dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan, sedangkan pola vertical yaitu mutasi ke tingkat yang lebih tinggi dalam rangka promosi karena prestasi.

PT Jamsostek (Persero) memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan kerja yang sama bagi seluruh karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jender, maupun kondisi fisik. Kesempatan kerja yang dimaksud adalah kesempatan dalam pengembangan karir setiap karyawan. Setiap karyawan juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan potensi melalui berbagai program peningkatan dan pengembangan kompetensi, serta menunjukkan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Dengan demikian diharapkan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif karena diperoleh rasa keadilan dan hak yang sama bagi setiap karyawan, dan lebih dari itu akan semakin meningkatkan kinerja individu maupun kinerja perusahaan.

Selama tahun 2013 telah dilakukan mutasi untuk 771 orang pejabat dan 1.185 orang karyawan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Mutasi	Pejabat	Karyawan
1	Penyegaran	257	393
2	Promosi	503	59
3	Naik Grade	7	709
4	Mutasi APS	1	24
5	Demosi	3	0
	Jumlah	771	1.185

D. STATISTIK SUMBER DAYA MANUSIA

Seiring dengan pertumbuhan kinerja Perusahaan, pertumbuhan karyawan merupakan salah satu aspek strategis yang memegang peranan penting di masa mendatang. PT Jamsostek (Persero) tidak hanya memperhatikan peningkatan kualitas karyawan dari sisi kompetensi saja, akan tetapi juga memperhatikan pentingnya komposisi karyawan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Perusahaan.

Perkembangan Jumlah Karyawan Perusahaan dalam 5 (lima) Tahun Terakhir, adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah Karyawan PT Jamsostek (Persero)

NO.	TAHUN	JUMLAH
1	2009	3,046
2	2010	3,177
3	2011	3,240
4	2012	3,277
5	2013	3,854

Jumlah Karyawan PT Jamsostek (Persero)

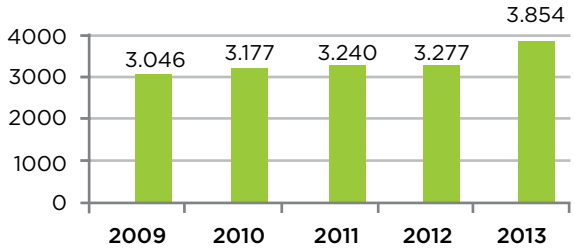

Table Jumlah Karyawan Per Wilayah Tahun 2013

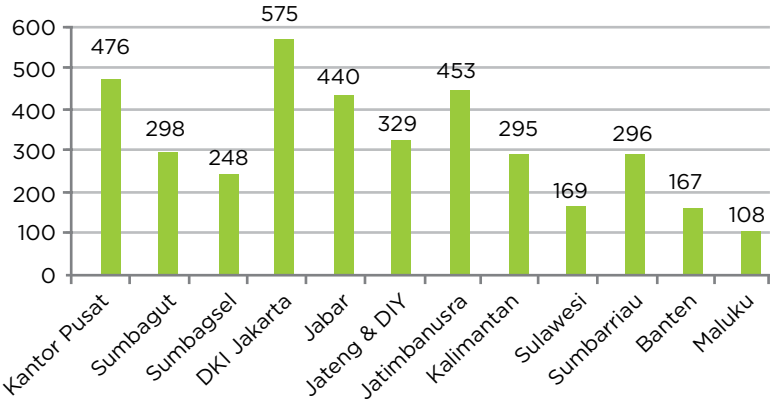

Pada akhir tahun 2013, karyawan PT Jamsostek (Persero) berjumlah 3.854 orang, dengan jumlah karyawan terbanyak berada di Kanwil DKI Jakarta sebanyak 575 orang atau sebesar 14,92% dari keseluruhan jumlah karyawan. Sedangkan jumlah karyawan yang paling sedikit adalah di wilayah Maluku Papua, dengan jumlah karyawan sebanyak 108 orang atau sebesar 2,80% dari keseluruhan karyawan PT Jamsostek (Persero). Komposisi karyawan secara keseluruhan adalah 2.126 orang atau 55% karyawan laki-laki dan 1.728 orang atau 54% karyawan perempuan.

1. Statistik Karyawan PT Jamsostek (Persero) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikannya, PT Jamsostek (Persero) secara berkelanjutan terus meningkatkan kualitas komposisi dan jumlah karyawan. Hal ini dapat dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar karyawan Jamsostek merupakan lulusan S1 yaitu sebanyak 2.612 orang atau 67,77% dari jumlah karyawan. Sementara untuk yang berpendidikan S2 sebanyak 242 orang atau 6,28%. Namun masih ada juga karyawan yang berpendidikan SD, SLTP dan SLTA.

Tabel Statistik Karyawan Berdasarkan Pendidikan

No	Status	Unit Kerja												
		PUSAT	Sumbagut	Sumbagsel	DKI Jakarta	Jabar	Jateng & DIY	Jatimbanusra	Kalimantan	Sulawesi	Sumbarriau	Banten	Maluku	%
1.	S3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
2.	S2	103	103	9	21	22	15	19	15	7	8	11	4	6,25
3.	S1	290	290	175	340	272	235	328	216	136	205	114	90	67,77
4.	D4	6	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,18
5.	D3	47	47	36	117	85	42	40	38	14	41	23	8	13,83
6.	D2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
7.	D1	0	0	3	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0,18
8.	SLTA	27	27	22	93	52	32	58	23	12	36	16	5	10,72
9.	SLTP	0	0	2	0	5	2	6	1	0	2	2	1	0,57
10.	SD	2	2	0	2	3	0	1	1	0	3	1	0	0,39
	TOTAL	**476**	**476**	**248**	**575**	**440**	**329**	**453**	**295**	**169**	**296**	**167**	**108**	**100,00**

Setiap tahun, komposisi karyawan yang berpendidikan tinggi terus meningkat hal ini terjadi karena rekrutmen yang dilakukan sejak beberapa tahun terakhir mensyaratkan minimum pendidikan adalah D3 dan bahkan S1 untuk posisi-posisi tertentu. Hal ini merupakan kondisi yang positif, karena dengan semakin tingginya tingkat pendidikan karyawan, diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerjanya dan memberikan imbas yang positif juga terhadap kinerja perusahaan.

Tabel Statistik Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2012 dan 2013

No	STATUS	TAHUN 2012	TAHUN 2013	PERTUMBUHAN (%)
1	S3	1	1	100
2	S2	234	242	103
3	S1	2172	2612	120,26
4	D4	7	7	100,00
5	D3	398	533	133,92
6	D2	2	2	100,00
7	D1	7	7	100,00
8	SLTA	402	413	102,74
9	SLTP	29	22	75,86
10	SD	25	15	60,00
TOTAL		**3277**	**3854**	**117,61**

2. Statistik Karyawan PT Jamsostek (Persero) Berdasarkan *Level* Organisasi

PT Jamsostek (Persero) terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Kantor Pusat mengelola 11 Kantor Wilayah, Kantor Wilayah Mengelola Kantor Cabang. Jumlah Kantor Cabang di seluruh Indonesia sejumlah 121 kantor.

Tabel Statistik Karyawan Berdasarkan *Level* Organisasi

Level Organisasi PT Jamsostek (Persero)

No	Wilayah	Jumlah Unit Kerja	Komposisi Karyawan
1	Kantor Pusat	22	475
2	Kantor Wilayah Sumbagut	11	298
3	Kantor Wilayah Sumbagsel	8	253
4	Kantor Wilayah DKI Jakarta	17	577
5	Kantor Wilayah Jabar	14	441
6	Kantor Wilayah Jateng & DIY	12	325
7	Kantor Wilayah Jatim	16	371
8	Kantor Wilayah Kalimantan	11	297
9	Kantor Wilayah Sulawesi Maluku	8	200
10	Kantor Wilayah Sumbariau	11	291
11	Kantor Wilayah Banten	6	168
12	Kantor Wilayah Banuspa	7	155

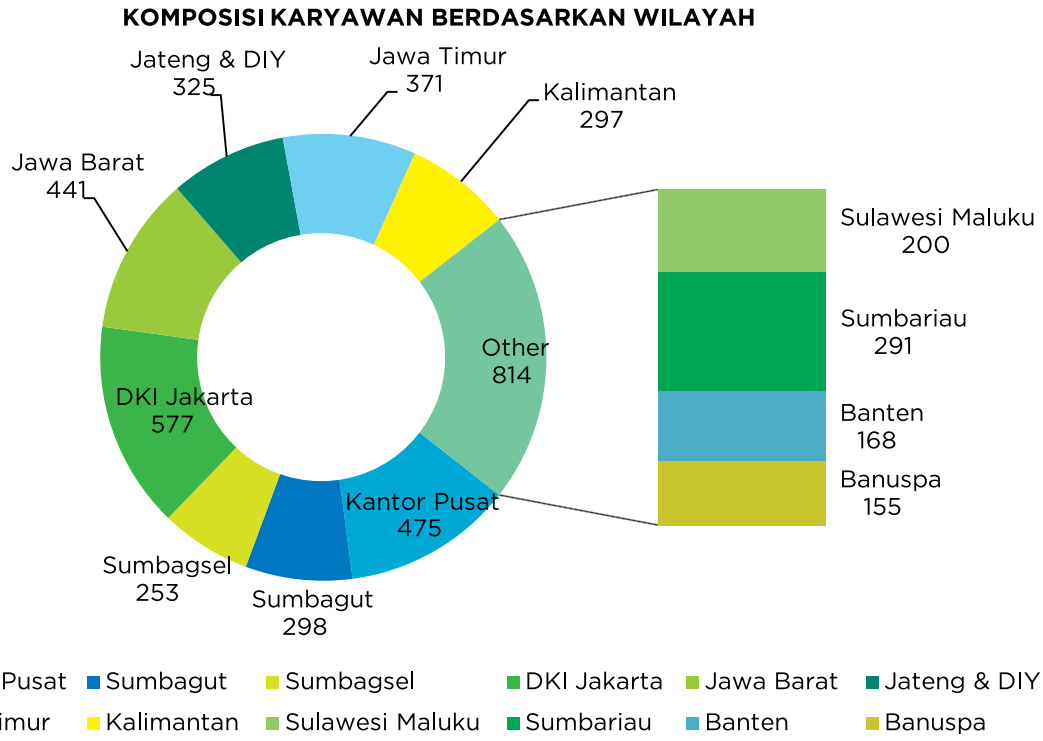

3. Statistik Karyawan PT Jamsostek (Persero) Berdasarkan Lokasi

Berdasarkan lokasi, jika ditinjau berdasarkan komposisi karyawan pada akhir tahun 2013 didominasi oleh Kanwil DKI Jakartadan Kanwil Jatim dengan komposisi masing-masing sebesar 14,94% dan 11,47% terhadap total karyawan. Kemudian diikuti dengan Kanwil Jabar dengan komposisi sebesar 11,42% terhadap total karyawan.

Tabel Statistik Karyawan Berdasarkan Wilayah

NO.	TAHUN	WILAYAH												JUMLAH
		PUSAT	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
		900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	
1	2009	358	280	310	527	494	283	413	199	182	-	-	-	3.046
2	2010	353	320	359	513	483	275	400	240	234	-	-	-	3.177
3	2011	347	313	350	489	482	269	393	308	289	-	-	-	3.240
4	2012	345	341	419	490	486	279	391	276	250	-	-	-	3.277
5	2013	476	298	248	575	440	329	453	295	169	296	167	108	3.854

Keterangan

- Wilayah I : Kanwil Sumbagut
- Wilayah II : Kanwil Sumbagsel
- Wilayah III : Kanwil DKI Jakarta
- Wilayah IV : Kanwil Jabar
- Wilayah V : Kanwil Jateng & DIY
- Wilayah VI : Kanwil Jatim
- Wilayah VII : Kanwil Kalimantan
- Wilayah VIII : Kanwil Sulawesi Maluku
- Wilayah IX : Kanwil Sumbariau
- Wilayah X : Kanwil Banten
- Wilayah XI : Kanwil Banuspa

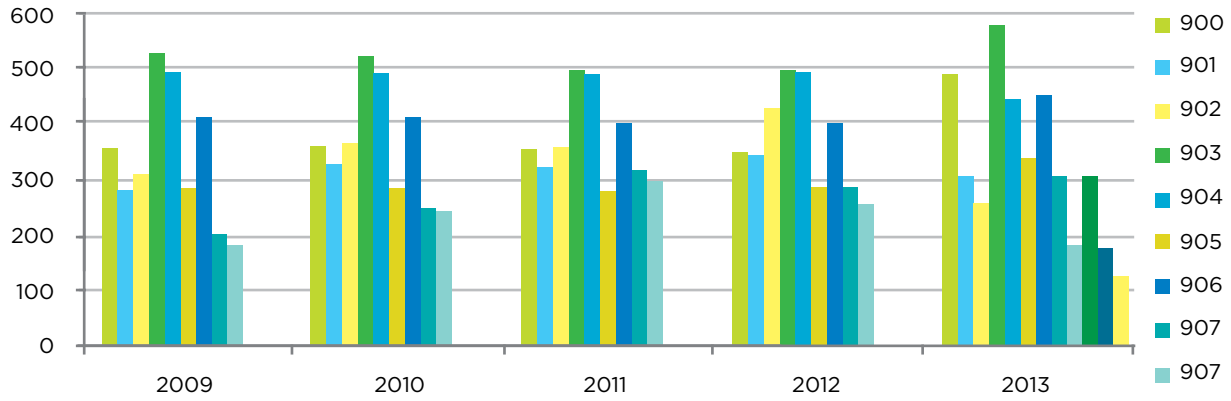

4. Statistik Karyawan PT Jamsostek (Persero) Berdasarkan *Grade* dan Golongan

Bahwa terhitung bulan April 2013, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP/121/042013, tentang Nama Jabatan, Bobot/ Skor dan *Grade* dimana penyebutan dan penulisan grade yang semula menggunakan angka dan abjad seperti 1A, 1B dan seterusnya, diubah dengan angka seperti 18, 17 dan seterusnya.

Berdasarkan *grade,* komposisi karyawan pada akhir tahun 2013 didominasi oleh *grade* 7 dan *grade* 8 dengan komposisi masing-masing sebesar 16,89% dan 17,54% terhadap total karyawan. Kemudian diikuti dengan *grade* 9 dengan komposisi sebesar 7,97% terhadap total karyawan. Selanjutnya *grade* 10 dengan komposisi sebesar 7,01% terhadap total karyawan dan untuk *grade* lainnya rata-rata memiliki komposisi di bawah 6% pada tahun 2013 sebagaimana tabel berikut.

Tabel Statistik Komposisi Karyawan Berdasarkan Grade

No.	Grade	Jumlah 2009	%	Jumlah 2010	%	Jumlah 2011	%	Jumlah 2012	%	Jumlah 2013	%
		2009		2010		2011		2012		2013	
1	1a / 18	7	0.23%	13	0.41%	13	0.40%	10	0.31%	15	0.39%
2	1b / 17	27	0.89%	27	0.85%	25	0.77%	26	0.79%	28	0.73%
3	2a / 16	70	2.30%	74	2.33%	78	2.41%	87	2.65%	77	2.00%
4	2b / 15	110	3.61%	113	3.56%	115	3.55%	111	3.39%	103	2.67%
5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	69	1.79%
6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	32	0.83%
7	2c / 12	218	7.16%	217	6.83%	223	6.88%	250	7.63%	167	4.33%
8	3a / 11	283	9.29%	319	10.04%	336	10.37%	347	10.59%	368	9.55%
9	3b / 10	292	9.59%	313	9.85%	296	9.14%	258	7.87%	270	7.01%
10	4a / 9	188	6.17%	147	4.63%	197	6.08%	222	6.77%	307	7.97%
11	4b / 8	459	15.07%	470	14.79%	494	15.25%	591	18.03%	651	16.89%
12	4c / 7	640	21.01%	663	20.87%	657	20.28%	675	20.60%	676	17.54%
13	5a / 6	498	16.35%	488	15.36%	446	13.77%	369	11.26%	243	6.31%
14	5b / 5	136	4.46%	115	3.62%	95	2.93%	79	2.41%	51	1.32%
15	5c / 4	9	0.30%	10	0.31%	20	0.62%	16	0.49%	21	0.54%
16	6a / 3	5	0.16%	13	0.41%	14	0.43%	20	0.61%	46	1.19%
17	6b / 2	83	2.72%	74	2.33%	70	2.16%	65	1.98%	30	0.78%
18	6c / 1	21	0.69%	19	0.60%	17	0.52%	13	0.40%	8	0.21%
19	CAKAR	-	0.00%	102	3.21%	144	4.44%	138	4.21%	692	17.96%
	JUMLAH	**3,046**	**100%**	**3,177**	**100%**	**3,240**	**100%**	**3,277**	**100%**	**3,854**	**100%**

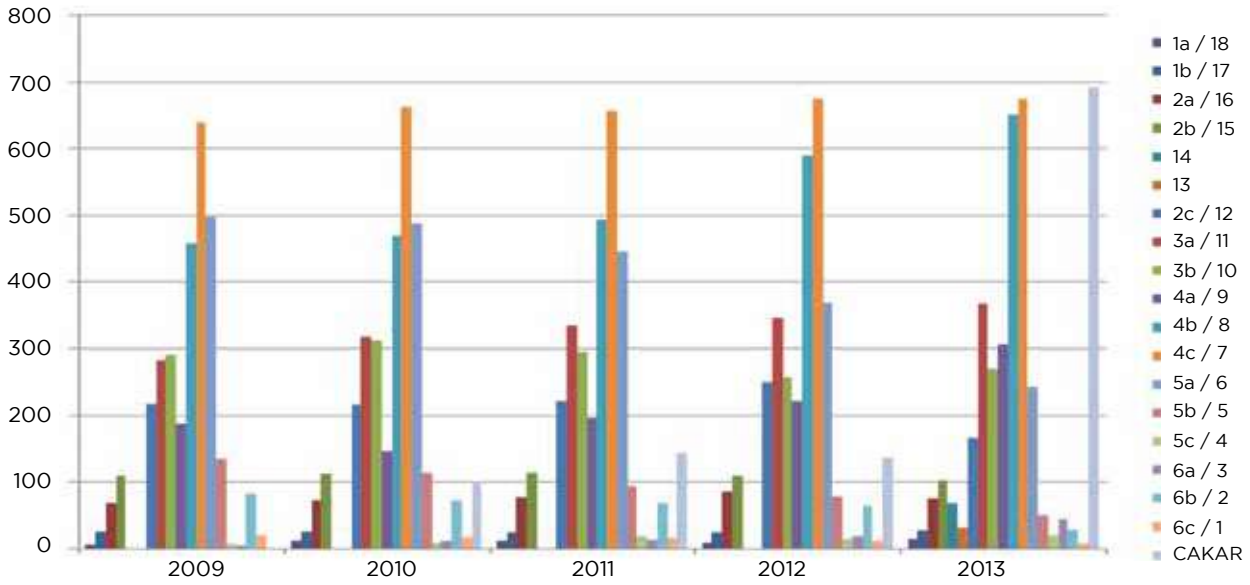

Berdasarkan golongan, komposisi karyawan pada akhir tahun 2013 didominasi oleh golongan V dan dengan komposisi sebesar 20,81% terhadap total karyawan. Kemudian diikuti dengan golongan VI dan golongan VIII yang memiliki komposisi hampir sama masing-masing sebesar 14,79% dan 10,90% terhadap total karyawan. Selanjutnya golongan VII dengan komposisi sebesar 9,89% terhadap total karyawan. Untuk golongan lainnya rata-rata memiliki komposisi di bawah 7% pada tahun 2013 sebagaimana tabel berikut.

Tabel Statistik Komposisi Karyawan Berdasarkan Golongan

NO.	GOL	Jumlah 2009	%	Jumlah 2010	%	Jumlah 2011	%	Jumlah 2012	%	Jumlah 2013	%
		2009		2010		2011		2012		2013	
1	XVI	1	0.03	3	0.09	3	0.09	-	0.00	1	0.03
2	XV	8	0.26	17	0.54	18	0.56	15	0.46	15	0.39
3	XIV	38	1.25	29	0.91	25	0.77	30	0.92	47	1.22
4	XIII	45	1.48	74	2.33	84	2.59	77	2.35	82	2.13
5	XII	136	4.46	131	4.12	136	4.20	134	4.09	143	3.71
6	XI	137	4.50	178	5.60	225	6.94	264	8.06	275	7.14
7	X	271	8.90	323	10.17	278	8.58	240	7.32	193	5.01
8	IX	237	7.78	169	5.32	180	5.56	167	5.10	362	9.39
9	VIII	506	16.61	516	16.24	489	15.09	565	17.24	420	10.90
10	VII	197	6.47	348	10.95	489	15.09	405	12.36	381	9.89
11	VI	574	18.84	421	13.25	472	14.57	508	15.50	570	14.79
12	V	453	14.87	583	18.35	489	15.09	519	15.84	802	20.81
13	IV	157	5.15	98	3.08	243	7.50	270	8.24	292	7.58
14	III	255	8.37	282	8.88	108	3.33	82	2.50	229	5.94
15	II	30	0.98	4	0.13	1	0.03	1	0.03	-	0.00
16	I	1	0.03	1	0.03	-	0.00	-	0.00	42	1.09
	JUMLAH	**3,046**	**100**	**3,177**	**100**	**3,240**	**100**	**3,277**	**100**	**3,854**	**100**

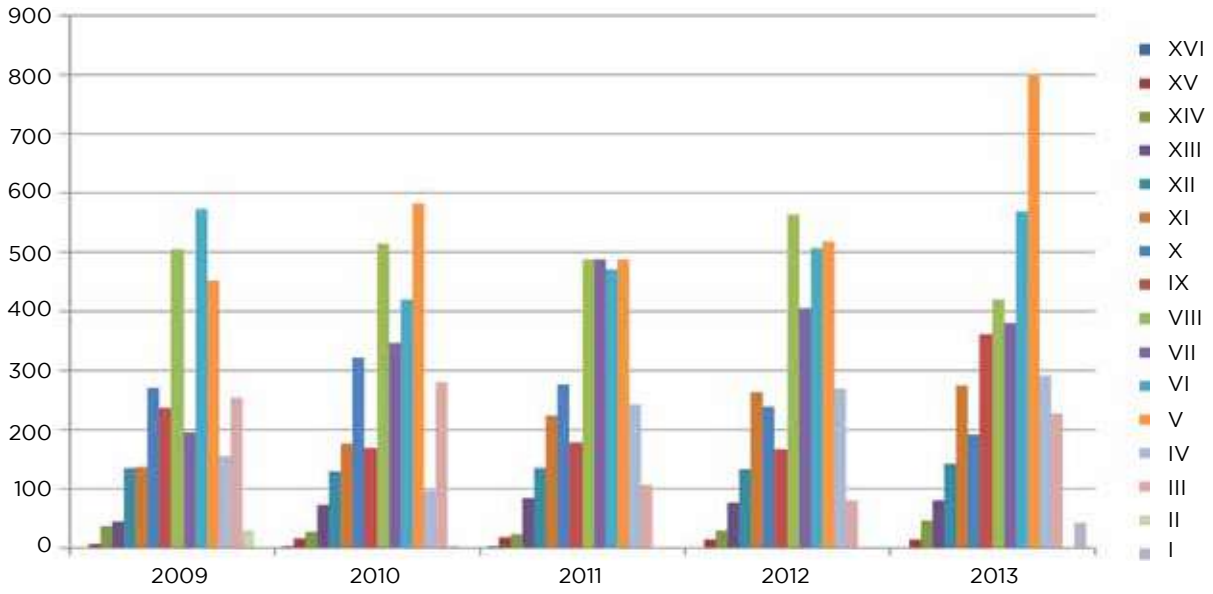

5. Statistik Karyawan PT Jamsostek (Persero) Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, komposisi karyawan pada akhir tahun 2013 karyawan tetap komposisi sebesar 85,76%, selanjutnya diikuti oleh Calon karyawan sebesar 14,07%. Untuk status karyawan lainya dibawah 1% sebagaimana tabel berikut.

Tabel Statistik Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	CAKAR	-	202	140	137	683
2	TETAP	2.641	2.843	2.983	3.120	3.803
3	PENUGASAN	3	6	6	7	7
4	MPP	84	82	83	115	107
	TOTAL	**2.728**	**3.133**	**3.212**	**3.379**	**4.600**

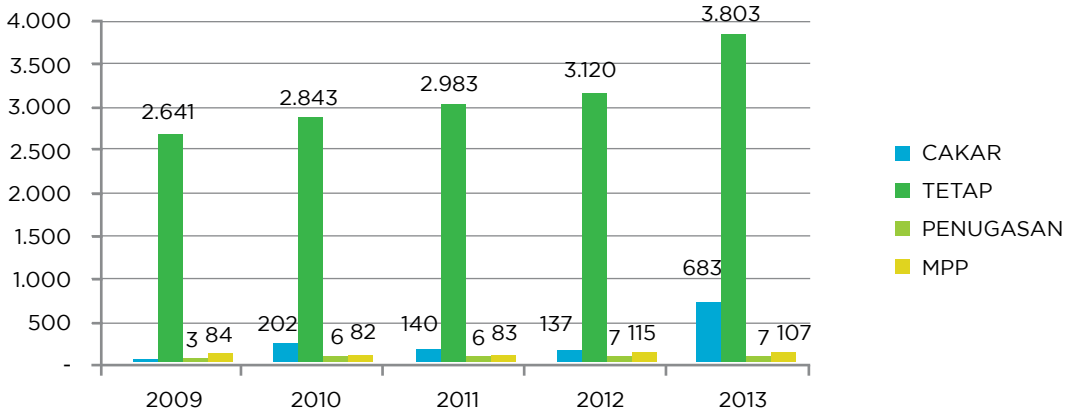

6. Statistik Karyawan PT Jamsostek (Persero) Berdasarkan Masa Kerja

Jumlah karyawan berdasarkan masa kerja terbanyak pada usia masa kerja 0 s/d 5 tahun sebanyak 1.361 orang atau 35,31% dari total karyawan tahun 2013. Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, maka perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Tabel Statistik Karyawan Berdasarkan Masa Kerja

No	Usia Masa Kerja	UNIT KERJA												JML	%
		Pusat	Sumbagut	Sumbagsel	DKI Jakarta	Jabar	Jateng & DIY	Jatimbanusra	Kalimantan	Sulawesi	Sumbarriau	Banten	Maluku		
1.	0 s/d 5	85	156	105	151	124	90	126	168	97	146	49	64	1.361	35,31
2.	6 s/d 10	184	30	32	63	77	58	77	21	13	26	32	6	619	16,06
3.	11 s/d 15	78	42	42	122	81	86	86	50	31	46	25	15	704	18,27
4.	16 s/d 20	29	8	20	42	29	14	40	7	4	23	11	3	229	5,94
5.	21 s/d 25	28	9	5	56	33	19	34	2	2	7	4	4	203	5,27
6.	26 s/d 30	58	43	40	121	72	51	73	37	21	44	40	13	613	15,91
7.	31 s/d 35	13	10	4	20	24	11	16	10	1	4	5	2	120	3,11
8.	>35	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	5	0,13
	TOTAL	**476**	**298**	**248**	**575**	**440**	**329**	**453**	**295**	**169**	**296**	**167**	**108**	**3.854**	**100,00**

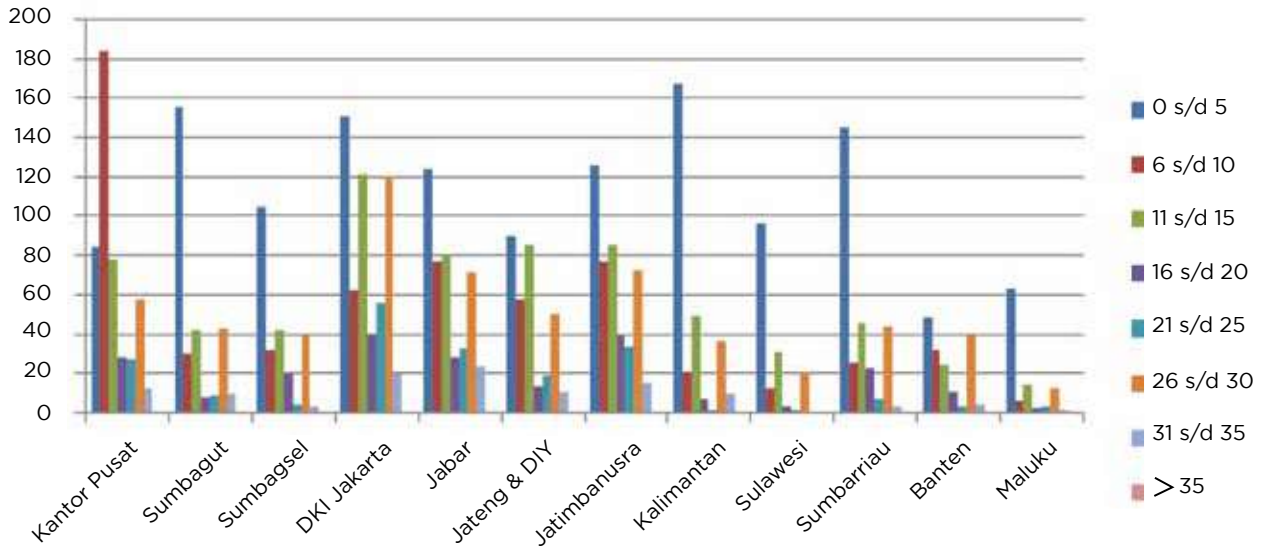

7. Statistik Karyawan PT Jamsostek (Persero) Berdasarkan Usia

Tabel Statistik Karyawan Berdasarkan Usia

No	Usia	UNIT KERJA												JML	%
		Pusat	Sumbagut	Sumbagsel	DKI Jakarta	Jabar	Jateng & DIY	Jatimbanusra	Kalimantan	Sulawesi	Sumbarriau	Banten	Maluku		
1.	20 s/d 25	34	65	58	90	50	43	45	58	39	63	19	20	584	15,15
2.	26 s/d 30	45	83	46	45	50	33	64	111	54	74	24	43	672	17,44
3.	31 s/d 35	126	37	27	69	81	70	87	18	16	34	35	6	606	15,72
4.	36 s/d 40	118	29	30	78	73	54	64	39	18	29	21	13	566	14,69
5.	41 s/d 45	42	23	26	95	54	47	61	18	13	37	16	7	439	11,39
6.	46 s/d 50	53	28	32	94	66	33	64	20	16	32	15	6	459	11,91
7.	51 s/d 54	45	25	22	91	53	40	57	18	11	24	32	9	427	11,08
8.	55 >=	13	8	7	13	13	9	11	13	2	3	5	4	101	2,62
	TOTAL	**476**	**298**	**248**	**575**	**440**	**329**	**453**	**295**	**169**	**296**	**167**	**108**	**3.854**	**100,00**

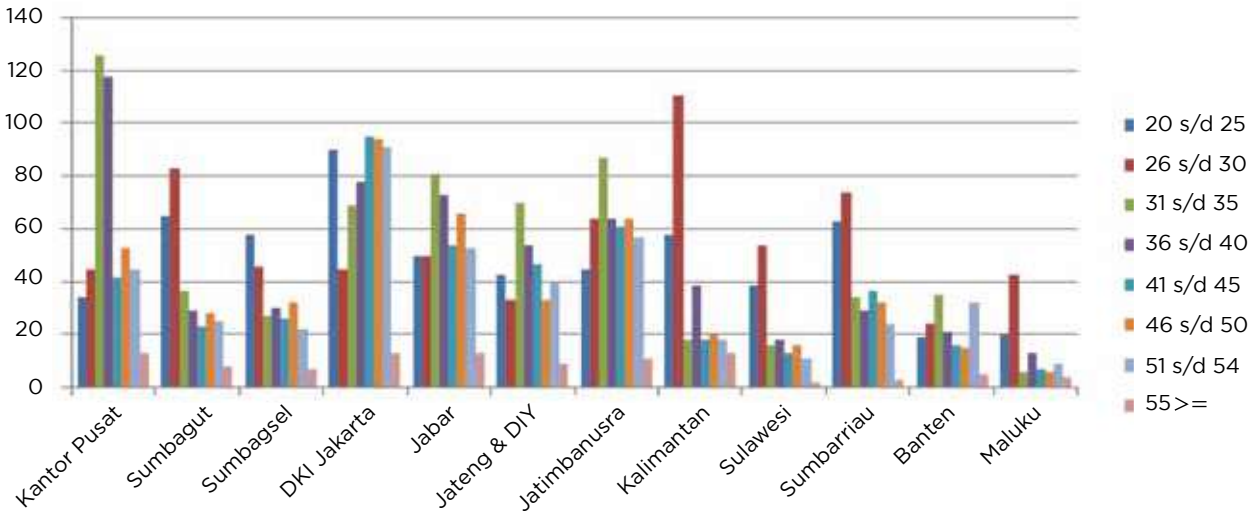

Berdasarkan usia, komposisi karyawan hampir merata pada semua tingkatan usia dengan jumlah terbanyak adalah karyawan dengan rentang usia 26 – 30 tahun yaitu sebanyak 672 orang atau sebesar 17,44%. Jumlah karyawan usia muda (20 s/d 25 tahun) yaitu sebanyak 584 orang dengan jumlah paling banyak berada di wilayah DKI Jakarta.

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah karyawan untuk usia 20 s/d 25 tahun mengalami peningkatan hingga 143,33% dari total karyawan untuk usia yang sama tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh penerimaan karyawan tahun 2013 yang sebagian besar adalah *fresh graduate* dengan *range* usia muda.

Tabel Statistik Pertumbuhan Karyawan Berdasarkan Usia Tahun 2012 dan 2013

NO	USIA	TAHUN		%
		2012	2013	
1.	20 s/d 25	240	584	243,33
2.	26 s/d 30	528	672	127,27
3.	31 s/d 35	566	606	107,07
4.	36 s/d 40	529	566	106,99
5.	41 s/d 45	403	439	108,93
6.	46 s/d 50	498	459	92,17
7.	51 s/d 54	417	427	102,40
8.	≥ 55	96	101	105,21
	TOTAL	**3277**	**3854**	**117,61**

8. Statistik Karyawan PT Jamsostek (Persero) berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi karyawan secara keseluruhan adalah 55,16% karyawan laki-laki, dan 44,84% karyawan perempuan. Untuk karyawan laki-laki terdapat penurunan sebanyak 1,87% dibanding tahun 2012, namun untuk karyawan perempuan dari tahun 2009 sampai dengan 2013 terdapat peningkatan berkisar 1,87% setiap tahunnya.

Tabel Statistik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	TAHUN 2009	%	TAHUN 2010	%	TAHUN 2011	%	TAHUN 2012	%	TAHUN 2013	%
1.	Laki-laki	1.811	59.46	1.836	57.73	1.864	57.53	1.869	57.03	2.126	55.16
2.	Perempuan	1.235	40.54	1.341	42.47	1.376	42.47	1.408	42.97	1.728	44.84
	Jumlah	**3.046**	**100**	**3.177**	**100**	**3.240**	**100**	**3.277**	**100**	**3.854**	**100**

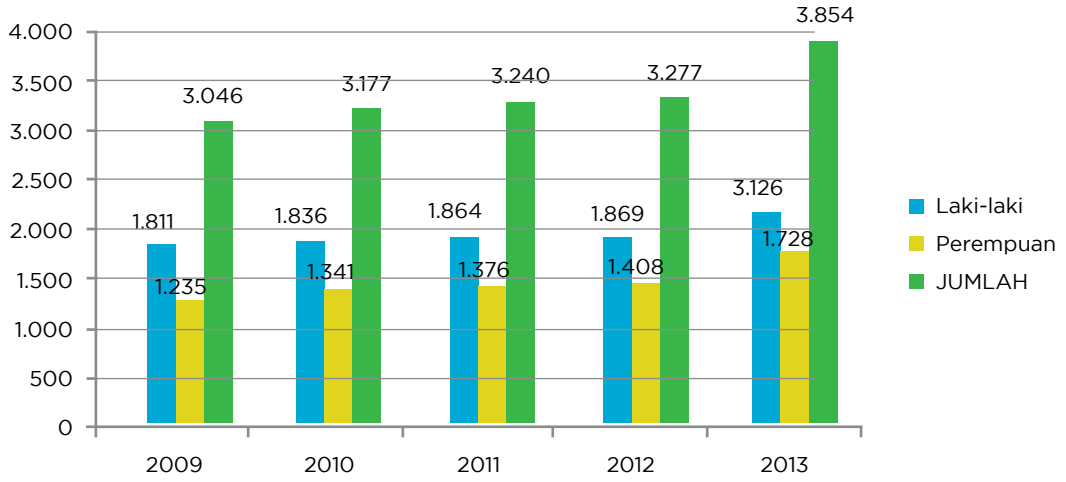

9. Tingkat Perputaran Karyawan

Komposisi karyawan yang keluar pada tahun 2013 sejumlah 106, pensiun masih menempati jumlah terbanyak dari *turn over* karyawan sebanyak 87. Jumlah karyawan yang berhenti sendiri setiap tahun mengalami penurunan, terdapat 3 karyawan yang diberhentikan tidak hormat pada tahun 2013.

No	Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Penerimaan Karyawan		**102**	**146**	**137**	**683**
2.	Pengurangan Karyawan					
	a. Meninggal Dunia	4	4	7	8	9
	b. Pensun	60	55	58	93	87
	c. Berhenti dgn Hormat	0	0	0	0	2
	d. Berhenti Sendiri	17	19	13	10	5
	e. Berhenti tidak dgn Hormat	3	4	4	3	3
	Jumlah	**84**	**82**	**82**	**114**	**106**

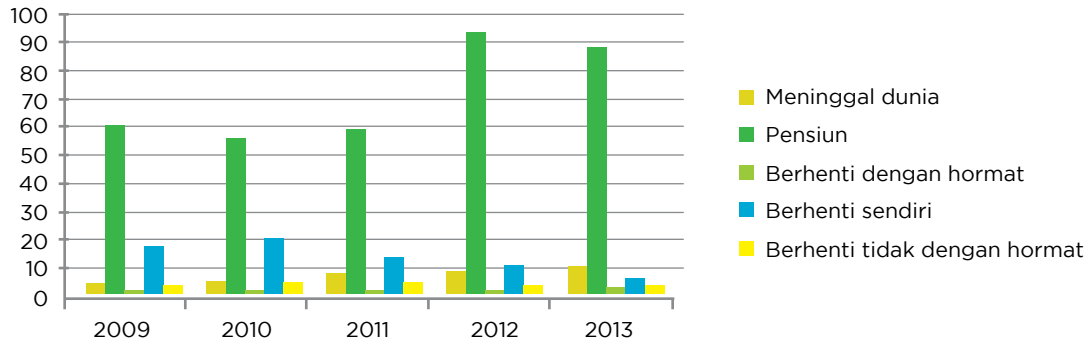

E. SELEKSI KARYAWAN

Untuk dapat mengantisipasi perkembangan lingkungan bisnis dan terus meningkatkan pelayanan, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan adanya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kerjanya, maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja individu yang pada akhirnya akan menentukan tingkat kinerja perusahaan yang optimal. Mengingat SDM mempunyai peran yang strategis dalam pencapaian tujuan perusahaan maka SDM harus dipandang sebagai faktor kunci penentu keberhasilan dan sebagai aset yang harus dikembangkan melalui suatu sistem manajemen SDM yang terpadu.

Dalam rangka mencapai visinya sebagai Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan, maka dibutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan dan karakteristik yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk dapat terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan bisnis. Rekrutmen dan seleksi karyawan merupakan salah satu tahap penting dalam manajemen SDM. Calon karyawan, yang merupakan *output* dari proses tersebut, akan mewarnai kehidupan organisasi dalam jangka panjang.

Tabel Rekrutmen Karyawan Regional Sesuai Bidang Tugas tahun 2010 – 2013

No.	Bidang	2010	2011	2012	2013
1	Pemasaran	44	59	44	271
2	Pelayanan	13	29	16	203
3	JPK	17	4	14	0
4	Keuangan	11	22	21	72
5	Teknologi Informasi	0	3	22	6
6	Umum dan SDM	17	29	20	94
7	Sekretaris	-	-	-	37
	Jumlah	102	146	137	683

***) Pada tahun 2009 tidak ada rekrutmen karyawan**

Untuk mendapatkan calon karyawan dengan kriteria sebagaimana disebut di atas, maka dilakukan program Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan Berbasis Kompetensi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna menyaring kandidat yang tersebar diseluruh wilayah Nusantara.

Metode Seleksi Karyawan

Dengan menerapkan Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan Berbasis Kompetensi, fokus utama adalah menjaring kandidat yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang terdapat dalam persyaratan jabatan. Hal ini didasarkan pada teori perilaku klasik yang menjelaskan hubungan antara Niat *(intention)*, Tindakan *(action)*, dan Hasil *(outcome)* untuk memodelkan kompetensi sebagai sebuah hubungan sebab akibat. Kompetensi akan memprediksi perilaku keahlian, yang kemudian akan dapat memprediksi hasil kinerja karyawan seperti dapat dilihat pada gambar berikut :

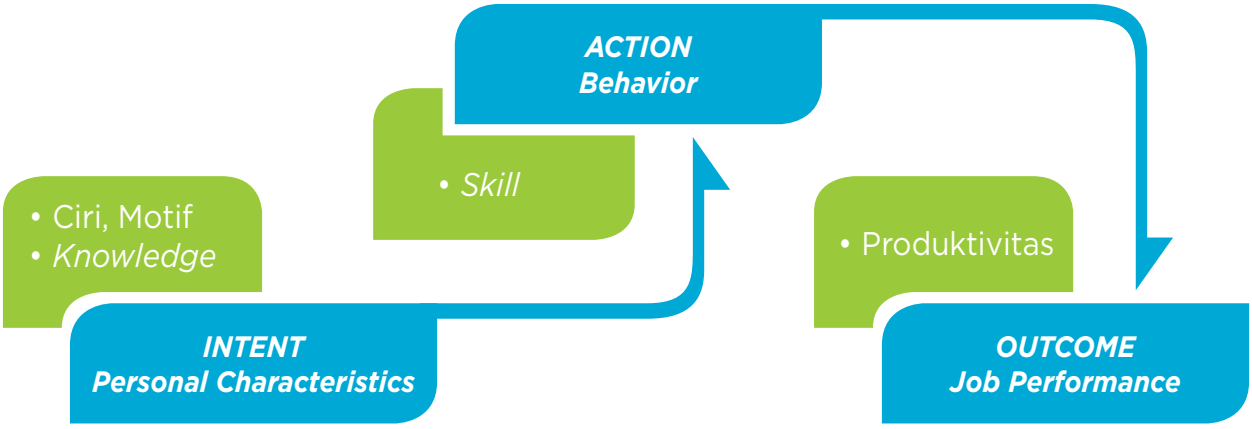

Pemanfaatan Teknologi Informasi diterjemahkan dalam penggunaan dua metode seleksi, yaitu *Web Based (Online based)* sebagai *screening* awal sebelum dilakukan seleksi Tatap Muka *(Paper Based)*. Dengan kombinasi 2 (dua) metode ini maka, didapat kelebihan yaitu :

1. Waktu pelaksanaan dapat menjadi lebih efisien.
2. Seleksi administrasi dapat dilakukan terhadap seluruh peserta yang menyelesaikan proses registrasi *online* tanpa terbatas pada kuota pembukaan berkas lamaran.
3. Dapat dilakukan seleksi pendahuluan secara multi aspek guna mendapatkan s*hort listed candidates* tes tatap muka yang benar-benar memenuhi persyaratan sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan perusahaan seperti :
   - Kesiapan ditempatkan pada unit kerja diseluruh pelosok Nusantara.
   - Minat untuk bekerja di PT Jamsostek (Persero).
   - Kesesuaian minat dan bakat dengan posisi yang dilamar.
4. Dalam pelaksanaan tahap seleksi tatap muka, lokasi seleksi dilakukan di beberapa kota yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara.

Penyebaran kota tempat pelaksanaan lokasi tes tatap muka tersebut memberikan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja di lokal di seluruh wilayah Nusantara untuk berpartisipasi. Dengan strategi ini penyerapan tenaga kerja lokal meningkat dengan tetap menjaga standar kualitas karyawan yang diterima.

F. KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Kesejahteraan karyawan berupa tunjangan karyawan diberikan kepada karyawan yang masih aktif berupa gaji pokok, tunjangan tetap, THR, Jasa Produksi/Bonus serta diberikan tunjangan cuti untuk pelaksanaan cuti tahunan.

Karyawan yang telah mencapai usia 56 tahun berhak menerima pensiun normal, sebelum menjalani pensiun normal diberikan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 tahun dengan menerima gaji, jasa produksi/bonus dan THR Keagamaan. Karyawan yang akan menjalani masa persiapan pensiun atau yang telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai usia pensiun normal diberikan hak pindah atas biaya perusahaan dan masih mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

G. INTERNALISASI BUDAYA PERUSAHAAN MELALUI *AGENT OF CHANGE*

Untuk menghadapi BPJS Ketenagakerjaan, PT Jamsostek (Persero) telah melakukan perubahan struktur organisasi sebagai upaya menjadikan struktur organisasi yang lincah, adaptif dan *governance* terhadap perubahan. Sedangkan untuk memastikan tercapainya visi, misi dan nilai-nilai budaya perusahaan telah dilaksanakan internalisasi intensif nilai-nilai Budaya Perusahaan (IPTIK) dan Etos Kerja (TOPAS) sebagai *key driver* dalam menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif Perusahaan. Tahap pengembangan internalisasi Budaya Perusahaan diawali dengan Assesmen (Pengukuran) Budaya Organisasi, selanjutnya dilaksanakan MVVM untuk level BOD, VBLD untuk *level* Kepala Kantor Cabang dan pembentukan *Change Agent*.

Tujuannya pembentukan *Change Agent* adalah untuk mempersiapkan para *Agent Of Change* yang merupakan karyawan terpilih dan dibekali pengetahuan dan ketrampilan melalui pelatihan dan *workshop* untuk menjadi penggerak perubahan di masing-masing unit kerja. Tahun 2013 telah memiliki 151 *Change Agent* dan pada tahun 2014 akan melibatkan sebanyak 25% dari jumlah karyawan yang ada.

H. PENGHARGAAN DAN SANKSI DISIPLIN

1. Penghargaan *(Reward)*

Dalam rangka mendapatkan karyawan yang profesional sesuai dengan tuntutan jabatan diperlukan suatu pembinaan yang berkesinambungan, yaitu suatu usaha kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan dan pemeliharaan karyawan agar mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien.Sebagai langkah nyata dalam hasil pembinaan maka perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah menunjukkan prestasi kerja yang baik.

Pemberian penghargaan tersebut merupakan upaya perusahaan dalam memberikan balas jasa atas hasil kerja karyawan, sehingga dapat mendorong karyawan bekerja lebih giat dan berpotensi. Karyawan memerlukan suatu penghargaan pada saat hasil kerjanya telah memenuhi atau bahkan melebihi standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Beberapa jenis penghargaan yang diberikan perusahaan kepada perusahaan, diantaranya:

a. Penghargaan Ibadah Keagamaan Penghargaan ibadah keagamaan diberikan perusahaan dalam rangka pembinaan mental spiritual, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan karyawan berupa menunaikan ibadah haji bagi karyawan yang beragama Islam.
   Akibat terkendalanya kepastian jadwal keberangkatan jama'ah haji dan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan yang beragama non Islam maka mulai

tahun 2013 penghargaan ibadah keagamaan dialihkan menjadi:

1) Bagi karyawan yang beragama Islam diberikan penghargaan berupa menunaikan ibadah Umroh.
2) Bagi karyawan yang beragama Kristen dan Katholik diberikan penghargaan berupa perjalanan wisata rohani ke kota Yerusalem.
3) Bagi karyawan yang beragama Hindu diberikan penghargaan berupa perjalanan wisata rohani ke India.

b. Penghargaan Masa Kerja.
Penghargaan masa kerja diberikan kepada Karyawan yang telah memiliki masa kerja selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus di perusahaan. Mulai tahun 2013 BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan bagi karyawan yang akan memasuki usia pensiun dan memiliki masa kerja di atas 25 tahun namun kurang dari 30 tahun.

c. Penghargaan Purna Jasa.
Perusahaan memberikan cenderamata *(souvenir)* berupa koin emas kepada karyawan yang memasuki usia pensiun atau meninggal dunia sebagai bentuk kenang-kenangan dan terima kasih perusahaan atas pengabdian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selama menjadi karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

d. Penghargaan Karyawan Teladan
Penghargaan diberikan kepada karyawan yang berprestasi di rumpun jabatan (Keuangan, Pelayanan, Pemasaran, Teknologi Informasi, Umum dan SDM, Kantor Pusat). *Reward* ini bertujuan untuk mendorong/motivasi meningkatkan prestasi kerja yang lebih tinggi.

Tabel Rekapitulasi Penghargaan Karyawan

NO	KETERANGAN	TAHUN					TOTAL
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Penghargaan ibadah keagamaan berupa umroh dan wisata rohani	-	-	26	26	46	**98**
2	Penghargaan 10 tahun masa kerja	76	101	19	394	123	**713**
3	Penghargaan 20 tahun masa kerja	11	13	63	111	23	**221**
4	Penghargaan 30 tahun masa kerja	66	26	47	55	74	**268**
5	Penghargaan masa kerja lebih dari 25 tahun dan kurang dari 30 tahun	-	-	-	-	29	**29**
6	Penghargaan karyawan teladan	-	-	-	12	12	**24**
7	Penghargaan purna jasa	60	56	60	90	94	**360**
	Total Penerima Penghargaan	**213**	**196**	**215**	**688**	**401**	**1.713**

2. Pembinaan dan Sanksi Disiplin terhadap Karyawan

Dalam menciptakan, memelihara dan meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis antara Perusahan dan Serikat Pekerja telah ditetapkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2013 – 2015, yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif.

Manajemen secara berkesinabungan melakukan pembinaan kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kinerja individu. Terkait dengan karyawan yang melakukan pelanggaran atas PKB, Manajemen terlebih dahulu akan melakukan pembinaan melalui *couching & conseling* serta pemberian sanksi disiplin ringan yang merupakan kewenangan masing–masing pimpinan unit kerja. Namun apabila pelanggaran tersebut tetap berlanjut atau pelanggaran tersebut dianggap signifikan akan dikenakan pembinaan lebih lanjut dalam bentuk sanksi disiplin sedang atau berat yang merupakan kewenangan Direksi.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, adapun jumlah sanksi disiplin yang telah diberikan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut :

SANKSI DISIPLIN						
No	**Jenis Sanksi**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
1	Sanksi Sedang:					
	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala	3	2	3	0	1
	Penundaan Kenaikan Golongan Selama 1 (satu) Tahun	3	0	2	1	4
	Penurunan Golongan 1 (satu) Tingkat	1	3	1	1	1
	Penurunan Grade 1 (satu) Tingkat	0	0	0	0	1
	Pembebasan Jabatan	0	0	2	2	1
	Sub Jumlah	7	5	8	4	8
2.	Sanksi Berat					
	Penurunan Golongan 2 Tingkat dan Grade	0	2	4	1	2
	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	3	3	4	2	3
	Sub Jumlah	3	5	8	3	5
	Total	**10**	**10**	**16**	**7**	**13**

I. HASIL *SURVEY EMPLOYEE ENGAGEMENT*

Untuk mengetahui tingkat *engaged* Karyawan maka telah dilakukan *Survey Employee Engagement,* pada 11 Kantor Wilayah PT Jamsostek (Persero), dengan tujuan:

- Mengetahui dan mengukur *employee engagement* karyawan Jamsostek dengan menggunakan alat ukur empiris
- Mengukur *Transformational Leadership* Jamsostek menggunakan alat ukur empiris
- Mengukur Budaya Organisasi Jamsostek dengan menggunakan alat ukur empiris
- Mengetahui pengaruh Kepemimpinan Jamsostek dan manajemen lainnya terhadap *Employee Engagement*
- Rekomendasi ke depan terkait *Employee Engagement, Leadership,* dan Budaya Kerja Jamsostek sehingga diperoleh hasil yang optimal bagi visi misi organisasi

Tabel Hasil Pengukuran

No.	Matrik Pengukuran	Nilai Mean	Kesimpulan
1	*Engaged*	3,68 – 5,00	Karyawan bekerja dengan semangat dan memiliki keterikatan yang lebih dalam dengan perusahaan, mereka tergerak untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan *performance* perusahan.
2	*Not Engaged*	2,34 – 3,67	Karyawan yang harus di periksa mengenai keterikatan mereka terhadap perusahaan, mereka bekerja dengan pasif dan kurang berinovasi, bekerja tetapi tidak dengan penuh semangat.
3	*Actively Disengaged*	1,00 – 2,33	Karyawan bekerja dengan tidak bahagia, mereka bertindak dengan terpaksa. Mereka merusak dan meracuni rekan-rekan kerja mereka untuk tidak bekerja dengan baik.

Rekomendasi *Employee Engagement*

Dari hasil survey engagement yang telah dilakukan maka untuk *Employee Engagement Level* (EEL) Karyawan PT Jamsostek (Persero) secara nasional adalah 4,1 *(engaged)*, dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. *Employee Engagement* menuju *Customer Engagement*
   a. Tingkatkan *Employee Engagement* menuju *Customer Engagement.*
   b. Membangun *performance Management System* dengan *Key Performance eMatrics* (KPM).
2. *Investing in People*
   a. Merekrut, mendevelop dan mempromosikan.
   b. Mendampingi karyawan menemukan potensi terbaik mereka bagi mereka sendiri dan perusahaan.
3. Tingkatkan sinkronisasi tindakan keorganisasian antara *leadership,* budaya organisasi dan *employee engagement.*
4. Dengan *trend employee engagement, leadership* dan budaya organisasi berada pada sangat puas dan puas, maka penerapan *Competensy Based Human Resources Management* (CBHRM) melalui sistem komputerisasi atau *Human Capital Management System.*
5. *Survey Employee Engagement, leadership* dan budaya perusahaan dilakukan secara berkala dan independen untuk menjaga objektivitas pengisian dan hasil dengan memadukan *survey,* wawancara, *interview* dan *open question.*

J. RENCANA KE DEPAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, oleh karena itu perusahaan sangat menyadari pentingnya keberadaan setiap insan Jamsostek sebagai mitra dalam mencapai tujuan perusahaan. Berbekal kesadaran tersebut, dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan dan terus meningkatkan pelayanan, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Dengan adanya SDM yang miliki kompetensi sesuai dengan bidang kerjanya, maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja individu yang pada akhirnya akan menentukan tingkat kinerja organisasi yang optimal. Mengingat SDM mempunyai peran yang strategis dalam pencapaian tujuan organisasi, maka SDM harus dipandang sebagai faktor kunci penentu keberhasilan dan sebagai asset yang harus dikembangkan melalui suatu sistem manajemen SDM yang terpadu.

PT Jamsostek (Persero) telah merencanakan strategi pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut :

a. *Human Capital People & Organization,* berperan sebagai *"partner"* bisnis
   1) Menciptakan *agent-agent* perubahan pada setiap unit kerja.
   2) Melakukan rekrut karyawan profesional *(Pro Hire)* untuk mendukung percepatan pencapaian Visi Misi perusahaan
b. Pembentukan Pusdiklat berbasis *learning* (tahap perancangan gedung pusdiklat) dengan melakukan kajian analisis kebutuhan pembelajaran.
c. *Human Capital Process & Policy*
   1) Kebijakan dan Program SDM yang berbasis kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
   2) Impelementasi kebijakan secara konsisten.
   3) Sistem SDM disusun secara terintegrasi satu sama lain.

Human Capital Technology

Sistem SDM didukung oleh *Human Capital Management System* (HCMS). Perusahaan telah melakukan audit dan *roadmap Human Capital* (HC) dengan tujuan agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan *System Human Capital* yang mendorong terciptanya karakteristik Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang kompeten, ahli dan memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi berorientasi pada pencapaian kinerja. Berdasarkan hasil audit *Human Capital* tersebut akan dilakukan perbaikan bertahap yang diawali pada 4 Modul yaitu penyusunan model dan kamus kompetensi, penyusunan system pengelolaan karir, dan system pengelolaan kinerja dan pengembangan kepemimpinan.

R. TEKNOLOGI INFORMASI

1. *GRAND DESIGN* TEKNOLOGI INFORMASI

"He who fails to plan, plans to fail," adalah kutipan yang menunjukkan bahwa perencanaan merupakan aspek vital dalam kehidupan manusia dan organisasi. Rencana tersebut akan menjadi arahan strategis bagi organisasi beserta setiap komponen di dalamnya untuk berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi tersebut. Pada saat ini, Teknologi Informasi telah berkembang dengan pesatnya dan memiliki peningkatan peranan yang signifikan dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Begitu pun bagi PT. Jamsostek (Persero), dibutuhkan satu Rencana Teknologi Informasi yang memenuhi standar dan kaidah perencanaan agar Teknologi Informasi dapat memberikan *value* yang optimal bagi perusahaan, di antaranya:

1. Keselarasan strategi bisnis perusahaan dengan strategi Teknologi Informasi
2. Keselarasan arsitektur bisnis dengan arsitektur Teknologi Informasi
3. Keselarasan strategi Teknologi Informasi dengan arsitektur Teknologi Informasi

Untuk memenuhi kebutuhan rencana Teknologi Informasi ini, telah dibentuk *Grand Design* pengembangan Teknologi Informasi di PT. Jamsostek (Persero) tahun 2013-2016 sebagai berikut:

Gambar Fokus Pengembangan IT *Grand Design* 2013-2016

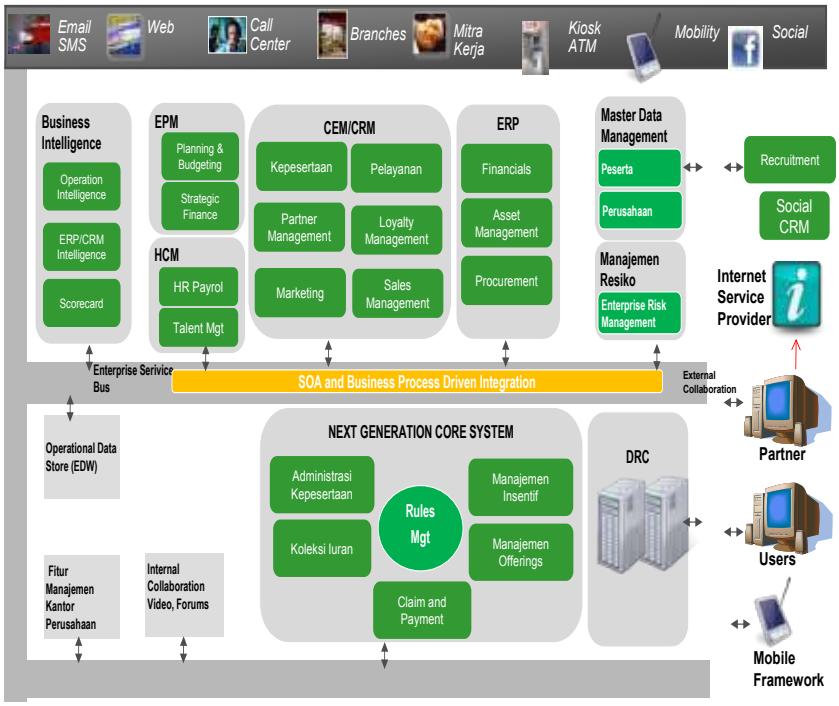

2. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sesuai dengan strategi dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2013-2017 serta tema RKAP PT. Jamsostek (Persero), strategi PT. Jamsostek tahun 2013 dititikberatkan pada *fit in infrastructure* untuk menunjang keunggulan operasional dan pelayanan menuju BPJS Ketenagakerjaan yang berkelas dunia. Dengan perpegang pada strategi tersebut, penerapan teknologi informasi sebagai infrastruktur untuk menunjang operasional perusahaan memiliki peranan yang sangat krusial.

Dari *grand design* teknologi informasi yang telah dimiliki, fokus pengembangan Teknologi Informasi di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Gambar Fokus Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2013

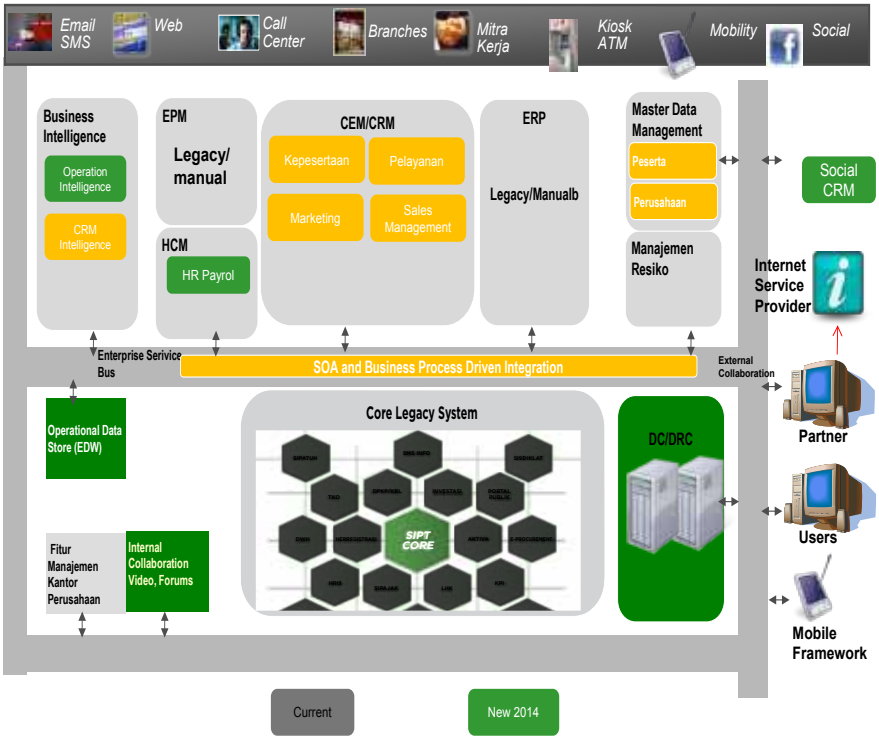

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius ketika peranan teknologi menjadi semakin sentral dalam operasionalisasi perusahaan (baik dari aspek data, aplikasi dan jaringan pendukung) maka isu *Information Technology Governance* menjadi sangat krusial.

Tahun 2013 ini telah dilakukan inisiatif besar untuk merubah struktur organisasi Teknologi Informasi dengan membelah organisasinya menjadi Biro Pengembangan Teknologi Informasi dan Biro Operasional Teknologi Informasi. Tujuan perubahan tersebut adalah memperkuat organisasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan *Information Technology Governance*-nya. Perubahan ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pengelolaan Teknologi Informasi dan merubah paradigma kerja agar masing–masing fungsi dapat semakin dikelola dengan lebih fokus dan beralih dari sekedar menjalankan fungsi *business support* menjadi *"bussiness enabler"* dalam keseluruhan proses transformasi BPJS Ketenagakerjaan.

Strategi ekspansi di era BPJS Ketenagakerjaan yang sangat agresif menuntut adanya penyesuaian manajemen database kepesertaan dan juga pengembangan aplikasi agar sistem informasi yang dikembangkan menjadi lebih handal *(reliable)*. Salah satu dampak terbesar dalam inisiatif ini adalah memisahkan database transaksi dengan reporting sebagaimana kaidah *global best practice*. Apabila hal ini tidak diantisipasi secara serius dan tetap menggunakan struktur pengelolaan seperti sekarang maka dapat dipastikan pengelolaan *database* akan menjadi tidak efisien karena database tersebut akan memakan banyak sumber daya *(hungry resource)* sehingga berdampak pada biaya *overhead* yang sangat besar.

Pengembangan aplikasi secara terus menerus dilakukan baik aplikasi untuk *core system* maupun *support system*. Urgensi di aspek ini khususnya yang terkait kompatibilias sistem informasi dengan perubahan strategi perusahaan.Pengembangan aplikasi dilakukan secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan sistem yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan regulasi. Kita dituntut untuk terus fleksibel mengadaptasi kebutuhan unik proses bisnis khususnya dalam menjembatani karakteristik, kebutuhan dan amanah BPJS ke depan.Salah satu pengembangan aplikasi *core system* yang memberi konsekuensi besar pada operasionalisasi BPJS ke depan adalah pengembangan pola pembayaran iuran melalui *virtual account* (VA) dengan perbankan.Fitur aplikasi VA saat ini sedang dalam proses pengembangan *joint operation* bersama ASKES untuk menjadi platform pembayaran iuran bersama kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Amanah BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja dan kebutuhan ekspansi bisnis menuntut adanya kemampuan infrastruktur jaringan yang mumpuni agar dapat memastikan aspek kehandalan dan aspek keamanan seluruh proses administrasi BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini sudah dilakukan beberapa hal terkait dengan pengembangan DC/DRC antara lain peningkatan kapasitas infrastruktur DC/DRC, pengembangan *Information Technology Disaster Recovery Plan* (DRP), *fine tuning database* dan instalasi/*deliverable* seluruh perangkat keras.

Dengan kompleksitas operasional, potensi database yang sangat kaya (*big data*) dan pendelegasian kewenangan yang lebih luas kepada Kantor Wilayah maka proses pengayaan data sebagai dasar pengambilan keputusan di seluruh level organisasi menjadi sangat penting. Pengelolaan data ini akan dikelola secara terpusat agar dapat menyediakan *Business Intelligence* dan *dashboard management* kepada seluruh level untuk melakukan monitoring secara mandiri. Beberapa keluaran yang terkait dengan inisiatif ini antara lain: *survey elektronic* kepuasan pelanggan (cabang, wilayan dan pusat), *performance dashboard*, SIPP *dashboard, Business Inteligence* dan Portofolio Investasi *Dashboard.*

Mengantisipasi seluruh amanah UU BPJS Ketenagakerjaan yang menuntut perubahan strategi, model bisnis jumlah peserta kelolaan maka dapat dipastikan BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan sistem informasi baru untuk menampung seluruh perubahan tersebut. Mengantisipasi perkembangan pembahasan RPP/RPerpres BPJS Ketenagakerjaan, fokus utama hingga akhir tahun 2013 ini adalah menyiapkan *redesign* aplikasi dan database dengan fokus pada aplikasi administrasi keuangan dan akuntansi. Pada 1 Januari 2014 ketika BPJS Ketenagakerjaan beroperasi, aspek keuangan dan akuntansi ini dituntut untuk langsung segera bisa menampung pencatatan keuangan per program termasuk dalam seluruh proses pengelolaan dananya.

Saat ini sejalan dengan proses redefinisi model bisnis sedang dilakukan *roadmap* sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi. Sistem tersebut diharapkan dapat lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan regulasi sehingga dapat tetap fleksibel untuk mengadaptasi kebutuhan unik proses bisnis BPJS. Selain itu penyesuaian layanan kepada seluruh *stakeholder* dapat dilaksanakan lebih cepat, dengan informasi yang akurat.

AKSES INFORMASI DAN PELAYANAN

Dalam rangka menjalin komunikasi dengan *stakeholders,* Perusahaan telah menyediakan berbagai media akses informasi. Penyediaan beragam media akses itu dilakukan untuk memudahkan peserta Jamsostek mendapatkan informasi pelayanan dan program, pengelolaan perusahaan, dan menyampaikan pertanyaan serta keluhan. Media tersebut tersedia dalam bentuk *website, social media*, juga majalah eksternal, dan *call center.*

1. Website

Website masih menjadi media utama interaksi antara perusahaan dengan *stakeholders. Website* perusahaan di www.jamsostek.co.id (mulai 1 Januari 2014 menjadi www.bpjsketenagakerjaan.go.id) diakses 1.147.836 pengunjung selama tahun 2013. Website tersedia dalam dua Bahasa, yaitu: Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Melalui *website* dapat diakses berbagai informasi yang terkait dengan perusahaan, seperti: profil, program, peraturan, laporan tahunan, berita, CSR, dan *E – Procurement. Website* juga menjadi sarana sosialisasi beberapa aplikasi dan pelayanan terbaru dari perusahaan, serta sumber penghubung ke aplikasi itu diantaranya:

a. *Electronic Payment System*
   Aplikasi system pembayaran melalui *website* untuk memudahkan perusahaan peserta Jamsostek melakukan iuran perusahaan.
b. E - Saldo JHT
   Setiap tahuannya Jamsostek selalu mencetak satu buah Rincian Saldo Jaminan Hari Tua (RSJHT) yang dikirimkan ke setiap peserta Jamsostek yang mencapai kurang lebih 12 juta peserta. Guna mendukung kampanye *Go Green* di perusahaan salah satunya dengan mulai mengurangi kertas, PT Jamsostek (Persero) membuat fitur baru bagi peserta Jamsostek dalam memudahkan proses pencetakan Riancian Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Tahunan. Fitur tersebut dapat diakses melalui *website* PT Jamsostek (Persero) di www.jamsostek.co.id atau www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Setiap perserta yang telah men*download* RSJHT Tahunan secara otomatis tidak akan mendapatkan RSJHT yang dikirimkan dalam bentuk kertas ke setiap perusahaan yang menjadi anggota PT Jamsostek (Persero)
c. Cek Saldo JHT
   Salah satu kemudahan fasilitas yang diberikan oleh PT Jamsostek (Persero) bagi pesertanya adalah pengecekan saldo JHT. Proses pengecekan saldo dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama terdapat jaringan internet di wilayahnya. Fitur ini memudahkan peserta dalam melakukan proses pengecekan saldo sehingga peserta tidak perlu lagi datang ke kantor cabang PT Jamsostek (Persero) hanya untuk melakukan proses pengecekan saldo.
d. BPJSTK *Mobile*
   Perkembangan teknologi informasi nedorong perusahaan untuk mengikuti apa yang menjadi *trend* saat ini. Salah satu bukti bahwa perusahaan terus melakukan pengembangan dalam bidang teknologi informasi adalah penyediaan fitur BPJSTK Mobile. Aplikasi ini terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mempermudah peserta mendapatkan informasi yang berkaitan dengan program dan pelayanan yang selalu hadir dalam perangkat smartphone. Adapun fitur-fitur manfaat yang didapatkan dengan men*download* aplikasi ini adalah pendaftaran melalui data kependudukan, cek saldo online secara cepat dan akurat, simulasi perhitungan Jaminan Hari Tua (JHT), Informasi program, informais kantor cabang dan informasi layanan dan social media PT Jamsostek (Persero).
e. *Whistle Blowing System*
   Aplikasi yang disediakan oleh PT Jamsostek (Persero) bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT Jamsostek (Persero). Aplikasi ini dibuat sebagai bagian dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

2. Media Sosial

Guna memperluas informasi yang cepat dan terkini kepada masyarakat luas mengenai program-program Jamsostek, PT Jamsostek (Persero) menyediakan akses informasi dalam bentuk *social media*. Pengelolaan *social media* ini dimulai tanggal 12 Desember 2013. Perusahaan memperhatikan perkembangan penggunaan *social media* semakin marak akhir-akhir ini. Sehingga diharapkan semakin banyak publik yang mengetahui program dan manfaat Jamsostek.

Nama *social media* PT Jamsostek (Persero) adalah sebagai berikut :

- PT Jamsostek (Persero), mulai 1 Januari 2014 menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
- PT Jamsostek (Persero), mulai1 Januari 2014 menjadi BPJSTKinfo.
- PT Jamsostek (Persero) mulai 1 Januari 2014 BPJS Ketenagakerjaan.

Sampai akhir tahun 2013, jumlah *fans* di dalam *fan page facebook* PT Jamsostek (Persero) adalah 11.432 sedangkan *followers di twitter* adalah 4.946. Sedangkan video-video pada youtube diakses rata-rata 95 pengunjung.

3. Majalah Eksternal

Memperhatikan perlunya sosialisasi transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Selama tahun 2013, perusahaan telah menerbitkan 4 (empat) buah majalah eksternal yang diberi nama Warta Jams. Sasaran penerbitan majalah ini adalah *stakeholders* PT Jamsostek (Persero). Tema-tema yang ditampilkan pada setiap penerbitan diarahkan pada informasi perkembangan persiapan transformasi. Tema-tema majalah Warta Jams edisi 1 (satu) hingga 4 (empat) adalah sebagai berikut :

Edisi Majalah Warta Jams Tahun 2013	Judul Majalah
Edisi Satu (Volume 01)	Bertransformasi untuk Memberikan Layanan dan Mafaat yang Lebih Baik
Edisi Dua (Volume 02)	Tingkatkan Akses dan Pelayanan Publik Untuk Menjaring Peserta Baru
Edisi Tiga (Volume 03)	Demi Kesejahteraan yang Berkelanjutan Bagi Peserta
Edisi Empat (Volume 04)	36 Tahun yang Penuh Arti

4. *Call Center*

PT Jamsostek Persero memiliki *call center* dengan nomor yang 021-29297392. Pertanyaan terbanyak selama tahun 2013 adalah mengenai program JHT mengenai syarat pencairan JHT.

5. Pemberitaan di Media Massa

Stakeholders dan masyarakat umum dapat juga memperoleh informasi dan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui media massa. Jumlah pemberitaan positif membantu perusahaan untuk mendapatkan opini positif dari masyarakat. Pada tahun 2013, persentase berita positif PT Jamsostek di media massa adalah 99,93% dengan jumlah berita positif adalah sebesar 4.787 berita dan jumlah berita negatif adalah 3 berita. *Rate* berita positif secara konsisten bertahan pada 3 (tiga) tahun terakhir. Sedangkan pemberitaan negatif pada tahun 2013 berkurang secara signifikan dari dua tahun sebelumnya. Hal itu menununjukkan bahwa hubungan dengan media massa (*media relations*) terbina dengan baik.

URAIAN	2011	2012	2013
Pemberitaan Media Cetak	5.083	3.819	2.875
Pemberitaan Media *Online*	0	967	1.909
Pemberitaan Negatif	17	26	3
% Berita Positif	99,66%	99,45%	99,93%

KODE ETIK PERUSAHAAN

Etika Bisnis

Etika bisnis PT Jamsostek (Persero) yang diperlakukan secara umum, berlaku untuk seluruh Insan Jamsostek (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan), yang telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, dan yang terakhir disempurnakan melalui Keputusan Direksi Nomor: KEP/483/122012 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Jamsostek (Persero)

Etika Bisnis adalah norma-norma yang berlaku bagi seluruh Insan Jamsostek yang mengatur sikap dan tindakan perusahaan maupun Insan Jamsostek dalam berhubungan dengan pihak ekternal atau internal terkait dengan tugas, jabatan dan kewenangannya.

Ruang Lingkup Etika Bisnis

PT Jamsostek (Persero) memiliki etika bisnis yangdiperlakukan khusus untuk profesi/karyawan, Investor, Auditor, Pengadaan Barang dan Jasa serta pihak lain yang terkait langsung dengan pengelolaan perusahaan. Secara rinci ruang lingkup etika bisnis PT Jamsostek (Persero) sebagai berikut:

ETIKA BISNIS UMUM	
Ruang Lingkup	**Kewajiban / Larangan**
Pemenuhan Hak dan Penyelesaian Keluhan Pelanggan	Insan Jamsostek berkewajiban: • Memenuhi hak-hak peserta sesuai ketentuan yang berlaku. • Tanggap terhadap keluhan dan menyelesaikannya dengan cepat dan tuntas. • Memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, dengan cara berperilaku ramah, sopan dan bersahabat serta peduli, proaktif dan cepat tanggap.
Benturan Kepentingan	Insan Jamsostek dilarang : • Melakukan pekerjaan lain pada jam kerja. • Mengaitkan bisnis pribadi dan keluarganya dengan bisnis PT Jamsostek (Persero). • Mengikuti pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan. • Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga atau pihak-pihak lain.
Etika Berusaha, Anti Korupsi, Hadiah dan Donasi	Insan Jamsostek dilarang: a. Memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Memperkaya diri sendiri/orang lain yang berbuat melawan hukum dengan merugikan keuangan Negara/Ekonomi/Perusahaan yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, suap menyuap, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dan gratifikasi. c. Memberikan hadiah kepada pihak eksternal dalam bentuk uang, barang, fasilitas maupun jamuan harus memperhatikan etika bisnis yang berlaku dan hanya dilakukan untuk kepentingan Perusahaan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan dibukukan sesuai kebijakan akuntansi.

ETIKA BISNIS UMUM	
Ruang Lingkup	**Kewajiban / Larangan**
	d. Menerima hadiah dalam bentuk apapun (uang, setara dengan uang tunai seperti *voucher*, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya maupun jamuan) dari siapapun yang diperkirakan akan menimbulkan potensi berkurangnya independensi atau objektivitas dalam pengambilan keputusan atau menimbulkan persepsi dari pihak lain bahwa hal tersebut telah mempengaruhi pertimbangan bisnis Perusahaan. e. Memberikan Donasi ataupun suatu aset perusahaan kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota badan legislatif maupun eksekutif. Pemberian donasi hanya boleh dilakukan dalam bentuk perhargaan, sumbangan sosial, peristiwa bencana, bantuan kemanusiaan, pendidikan, organisasi keagamaan untuk memperingati hubungan bisnis dalam batas kepatutan sebagaimana yang ditetapkan oleh Perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepedulian terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan	Insan Jamsostek berkewajiban: a. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan. b. Menciptakan Lingkungan kerja yang bebas dari bahaya
Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi	Perusahaan mempunyai komitmen: a. Menerapkan kebijakan untuk memberikan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama bagi Insan Jamsostek dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan profesionalisme. b. Mengembangkan kapabilitas dan kompetensi Insan Jamsostek secara berkelanjutan selaras dengan kepentingan dan rencana pengembangan perusahaan. c. Mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. d. Menyediakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan iklim kerja yang kondusif serta terjamin dari risiko keamanan, keselamatan dan kesehatan. e. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.
Perlindungan Informasi Perusahaan dan *Intangible Asset*	a. Insan Jamsostek melindungi semua informasi dan intangible asset, termasuk riset, teknologi, hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan yang harus dituangkan dalam perjanjian. b. Direksi dapat menetapkan kebijakan perlindungan informasi dan *intangible asset* dalam hal diperlukan oleh pihak lainnya

ETIKA BISNIS UMUM	
Ruang Lingkup	**Kewajiban / Larangan**
Perlindungan Harta Perusahaan	Insan Jamsostek: a. Berkewajiban mengamankan dan memelihara harta perusahaan. b. Dilarang menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi
Administrasi Dokumen dan Rahasia Perusahaan	Insan Jamsostek berkewajiban: a. Mengadministrasikan dan menyimpan dokumen-dokumen penting dengan tertib dan hati-hati b. Melindungi dan menjaga rahasia perusahaan sesuai dengan ketentuan tentang pengungkapan informasi perusahaan. c. Memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai perusahaan, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya d. Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit serta komite, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya. e. Bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. f. Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan.
Kegiatan Sosial dan Politik	Insan Jamsostek dapat: a. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan perusahaan dan masyarakat sekitarnya. b. Menyalurkan aspirasi politiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dilarang menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan Partai Politik.
Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Menghindari Penyalahgunaan Wewenang	Insan Jamsostek berkewajiban: a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan Program Jamsostek maupun yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan.

ETIKA BISNIS UMUM	
Ruang Lingkup	**Kewajiban / Larangan**
Integritas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan	a. Direksi yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan membuat surat pernyataan tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan Bapepam yang meliputi: • Opini akuntan atas laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian (WTP) • Deskripsi Auditor Independen di Opini antara lain nama dan tanda tangan, tanggal laporan audit serta Nomor Ijin KAP (jika ada). • Laporan keuangan yang lengkap, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak usaha dimulai bagi perusahaan yang memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun buku • Penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. b. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan menandatangani pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan
Etika yang terkait dengan *Stakeholders*	PT Jamsostek (Persero) menyentuh seluruh lapisan yang mempunyai kepentingan dan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan peserta dan keluarganya dengan pengelolaan perusahaan secara profesional.
a. Lembaga Legislatif (DPR)	Jamsostek menjalankan UU secara konsisten, beroperasi secara efisien, dan mampu memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja sebagai bagian dari rakyat Indonesia
b. Pemerintah	a. Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi Jamsostek menjalankan amanat undang-undang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial dengan penyelenggaraan yang produktif. b. Kementerian Keuangan Jamsostek memberikan kontribusi pembangungan di pasar uang dan pasar riil melalui investasi dan ketaatan dalam membayar pajak. c. Kementerian BUMN/Pemegang Saham Jamsostek diselenggarakan sebagai organisasi nirlaba dengan tatakelola yang baik/*good governance* sebagai alat negara dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
c. Pengusaha	a. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jamsostek dapat menyediakan perlindungan jaminan sosial yang layak, terjangkau dan mudah diakses dalam hal pembayaran iuran dan penyediaan manfaat serta beroperasi secara efisien. b. *Real Estate Indonesia* (REI) Jamsostek memberikan peluang kerja sama usaha untuk pendirian perumahan bagi peserta tenaga kerja. c. Asosiasi Pengusaha Lainnya Jamsostek dapat memberikan peluang kerja sama dengan pengusaha sejalan dengan usaha memberikan kesejahteraan kepada tenaga kerja

ETIKA BISNIS UMUM	
Ruang Lingkup	**Kewajiban / Larangan**
d. Serikat Pekerja	Jamsostek memberikan pelayanan yang optimal, mudah dijangkau, dan memberikan manfaat yang layak/*meaningful*.
e. Karyawan PT Jamsostek (Persero)	a. Jamsostek sebagai tempat bekerja mencari nafkah dan memberikan kesempatan untuk berkembang secara optimal b. Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi perusahaan, dengan cara berinisiatif melakukan penyempurnaan serta berorientasi menciptakan nilai tambah c. Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan, ketentuan PT Jamsostek (Persero), kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji, dengan cara berperilaku konsisten, disiplin, jujur dan berdedikasi. d. Membangun hubungan yang tulus dan terbuka dengan sesama karyawan dan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama dengan cara berperilaku tulus, terbuka, saling percaya dan menghargai.
f. Peserta	a. Perusahaan Jamsostek sebagai alat memberikan perlindungan jaminan sosial kepada karyawannya dengan mudah diakses, informatif, gampang melakukan pembayaran dan beroperasi secara efisien. b. Tenaga Kerja Jamsostek memberikan pelayanan yang optimal, mudah dijangkau, dan memberikan manfaat yang layak/*meaningful*.
Etika Pengadaan Barang Dan Jasa	
Implementasi Sistem *E-Procurement*	Proses pengadaan barang dan/atau jasa melalui aplikasi *e-procurement* dilaksanakan secara bertahap dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : a. Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik (*e-procurement*) tetap mengacu kepada pedoman pengadaan barang dan/atau jasa PT Jamsostek (Persero). b. Semua dokumen dan transaksi secara elektronik dalam sistem e-procurement PT Jamsostek (Persero) oleh para pengguna yang memiliki otorisasi dapat dijadikan bukti hukum serta dengan dokumen proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan secara manual. c. Sistem *e-procurement* di PT Jamsostek (Persero) dihubungkan dengan portal utama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. d. Selain dapat diakses melalui http://eproc.jamsostek.co.id, sistem *e-procurement* juga dapat diakses melalui portal utama Kementerian Badan Usaha Milik Negara http://www.bumn.go.id e. Karena sebab tertentu maka tidak semua pengadaan barang dan/atau jasa diproses dengan menggunakan sistem *e-procurement*.

ETIKA BISNIS UMUM

Ruang Lingkup	Kewajiban / Larangan
Etika Pengadaan	Pengguna barang dan/atau jasa, pelaksana pengadaan, penyedia barang dan/atau jasa dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya maksud dan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa. b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa. c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat. d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak. e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa (*conflict of interest*) f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa. g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan. h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.
Informasi Rahasia	a. Seluruh Insan Jamsostek harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi rahasia yang diperoleh selama bekerja di PT Jamsostek (Persero), baik informasi bersifat material atau tidak. Dalam hal ini, semua staf di lingkungan Direktorat Investasi dan Direktorat Keuangan, tidak diperkenankan mendiskusikan atau memberikan informasi rahasia mengenai *account* atau bisnis atau posisi keuangan perusahaan kepada pihak lain, baik internal perusahaan di tingkat perusahaan pusat dan daerah, maupun eksternal perusahaan. b. Insan Jamsostek dilarang untuk berusaha mencari informasi rahasia dari Insan Jamsostek lain kecuali : • Insan Jamsostek tersebut membutuhkan informasi rahasia itu dalam melakukan tugasnya untuk kepentingan bisnis PT Jamsostek (Persero); • Tidak melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan bagi Insan Jamsostek yang menerima informasi; • Insan Jamsostek telah mengikuti prosedur yang wajar yang terdapat pada kebijakan investasi. c. Penggandaan atau penyebarluasan Pedoman Pengelolaan Investasi untuk kepentingan pihak eksternal harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. d. Apabila Insan Jamsostek mengundurkan diri dari PT Jamsostek (Persero), maka 1 (satu) hari setelah Insan Jamsostek mengajukan surat pengunduran diri, segera dibebastugaskan dari kegiatannya. Selain itu seluruh fasilitas komunikasi dan akses seperti telepon, *e-mail* serta ID *Card* diberhentikan penggunaannya.

ETIKA BISNIS UMUM

Ruang Lingkup	Kewajiban / Larangan
	e. Kebijakan mengenai informasi rahasia ini masih tetap berlaku bagi mantan Insan Jamsostek, selama mantan Insan Jamsostek tersebut masih memiliki informasi rahasia yang diperolehnya selama bekerja di PT Jamsostek (Persero), sampai dengan 6 bulan sejak mantan Insan Jamsostek tersebut berhenti bekerja. Dalam situasi demikian, seluruh informasi rahasia harus dikembalikan kepada PT Jamsostek (Persero) paling lambat 1 bulan sejak mantan Insan Jamsostek tersebut berhenti bekerja.
Praktik yang Dilarang	a. Penyalahgunaan Informasi Non Publik yang material (*Insider Trading*) Apabila Insan Jamsostek menerima informasi rahasia yang material mengenai PT Jamsostek (Persero) atau perusahaan lain, maka Insan Jamsostek tersebut tidak dapat menggunakan informasi tersebut atau menyampaikannya ke pihak lain di lingkungan PT Jamsostek (Persero) selain pihak-pihak yang benar-benar berwenang untuk pelaksanaan tugasnya. b. Perdagangan Efek ketika memiliki Informasi Orang Dalam yang Material : Apabila Insan Jamsostek memiliki informasi orang dalam yang material mengenai emiten yang bersangkutan maka Insan Jamsostek tidak diperkenankan melakukan transaksi jual/beli saham dan/atau surat berharga apapun yang diterbitkan oleh emiten manapun. Larangan ini berlaku terhadap transaksi untuk rekening PT Jamsostek (Persero), rekening Insan Jamsostek tersebut atau rekening lain yang keputusan investasinya berada di tangan Insan Jamsostek. c. Konflik Kepentingan : Seluruh Insan Jamsostek mempunyai kewajiban untuk menghindari transaksi pribadi yang memiliki konflik kepentingan dengan tanggung jawabnya terhadap perusahaan. Dengan demikian, Insan Jamsostek tidak dapat melakukan transaksi beli/jual suatu surat berharga atas dasar pengetahuan : • Adanya kemungkinan perubahan di dalam pertimbangan investasi dan tindakan yang mengikutinya atas surat berharga yang dimaksud. • Bahwa PT Jamsostek (Persero) sedang melakukan atau mengajukan untuk melakukan transaksi atas surat berharga tersebut atau transaksi lain yang dapat mempengaruhi harga pasar dari surat berharga tersebut. • Bahwa PT Jamsostek (Persero) sedang mempertimbangkan suatu transaksi yang akan mempengaruhi harga pasar dari surat berharga tersebut.
Investasi Pribadi	Insan Jamsostek dapat melakukan investasi untuk rekening pribadi dan transaksi pribadi yang hanya dapat dijual kembali dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) bulan setelah pembelian dilakukan, serta transaksi tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan tujuan investasi perusahaan. Kepada yang bersangkutan membuat pernyataan (*declare*) tentang kepemilikan instrumen investasi kepada atasan langsung. a. Rekening Pribadi adalah rekening untuk: • Karyawan tersebut; • Keluarga karyawan tersebut yang tinggal serumah; • Entitas hukum (*partnership*, perusahaan atau *trust*) di mana karyawan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dan mempunyai kontrol terhadap keputusan investasinya; • Keuntungan pihak ketiga yang tidak berhubungan langsung dengan karyawan (misalnya organisasi sosial) yang dipimpin oleh karyawan (diluar kapasitas bersangkutan sebagai karyawan). b. Transaksi Pribadi adalah transaksi saham, surat-surat utang, obligasi, perjanjian utang dan termasuk bukti-bukti utang lain seperti utang senior, utang subordinat, surat berharga komersial, kontrak investasi, kontrak komoditi, surat-surat berharga berjangka (*futures*), serta seluruh instrumen derivatif seperti opsi, waran dan instrumen indeks, yang dieksekusi pada rekening karyawan. Definisi ini meliputi instrumen yang mungkin tidak tercakup sebagai definisi sekuritas pada Undang-Undang Pasar Modal Indonesia.

ETIKA BISNIS UMUM	
Ruang Lingkup	**Kewajiban / Larangan**
Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pribadi	Dalam upaya memperkecil terjadinya risiko transaksi untuk kepentingan investasi pribadi, maka diberlakukan kebijakan berikut : a. Seluruh pihak yang tercakup harus melaporkan ada atau tidak adanya transaksi pribadi setiap 3 bulan sekali (kuartal), dalam tenggang waktu 10 hari tiap akhir kuartal kepada atasan yang bersangkutan dan dilaporkan ke Biro Kepatuhan dan Hukum. b. Apabila Insan Jamsostek yang termasuk dalam pihak yang tercakup akan melakukan transaksi pribadi, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari atasan yang bersangkutan dan dilaporkan ke Biro Kepatuhan dan Hukum. c. Untuk selanjutnya, Biro Kepatuhan dan Hukum memonitor dan mengendalikan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara Insan Jamsostek dengan perusahaan.
Konsekuensi Terhadap Ketidakpatuhan	Penyalahgunaan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi akan mengakibatkan kensekuensi tidak hanya terhadap karyawan yang bersangkutan, tetapi juga seluruh Insan Jamsostek lainnya serta PT Jamsostek (Persero) sebagai institusi. Hukuman terhadap setiap pelanggaran akan mengacu kepada kebijakan Perjanjian Kerja Bersama. Bilamana terdapat informasi negatif mengenai suatu *counterparty*, maka Insan Jamsostek agar segera melaporkan kepada Direksi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
	Etika Auditor
Integritas	Integritas internal auditor mendasari kepercayaan para pengguna jasa. a. Harus melaksanakan pekerjaannya dengan kejujuran, kesungguhan dan tanggung jawab. b. Harus mentaati hukum dan membuat pengungkapan sesuai hukum dan profesinya. c. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan yang ilegal atau terlibat dalam tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi internal audit atau mendiskreditkan organisasinya. d. Harus menghormati dan menyumbang kepada tujuan organisasi yang sah dan etis
Obyektivitas	Internal auditor menunjukan obyektivitas yang tinggi: a. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengurangi kemampuannya untuk melakukan audit secara objektif. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan yang menimbulkan konflik kepentingan. b. Tidak boleh menerima bentuk apapun yang dapat atau diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesional. c. Harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan dari kegiatan yang di-*review*.
Kerahasiaan	Internal auditor menghargai nilai dan kepemilikan dari informasi yang diterima: a. Harus bersikap hati – hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. b. Tidak boleh menggunakan informasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk hal – hal yang dapat merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

ETIKA BISNIS UMUM	
Ruang Lingkup	**Kewajiban / Larangan**
Kompetensi	Internal auditor menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan jasa internal auditing. a. Hanya melakukan jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimillikinya. b. Melakukan jasa *internal auditing* dengan standar profesi audit internal. c. Harus senantiasa meningkatkan keahliannya, dan efektivitas serta kualitas dari jasa yang diberikan.

Penyebarluasan Kode Etik

1. Penetapan *Code of Conduct*
   Code of Conduct pada PT Jamsostek (Persero) meliputi beberapa ketentuan yang berkaitan dengan aturan Perilaku yaitu infrastruktur GCG yang ditetapkan oleh Direksi PT Jamsostek (Persero) dan Perjanjian kerja Bersama (PKB) yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang merupakan aturan perilaku Insan Jamsostek yang selanjutnya disebut *Code of Conduct*.

2. Penyebaran *Code of Conduct*
   Pelaksanaan sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh Insan Jamsostek pada dasarnya dilakukan dalam 2 (dua) tahun sekali berkenaan dengan periode penyempurnaan Infrastruktur GCG dan Perjanjian Kerja Bersama.

   Bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi *Code of Conduct*, telah disampaikan infrastruktur GCG dan PKB kepada seluruh peserta sosialisasi dan dilakukan penandatanganan Pakta Integritas, sebagai bentuk komitmen Insan Jamsostek untuk menaati *Code of Conduct* yang berlaku.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Penegakan *Code of Conduct*
   Dengan mengikuti ketentuan sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*) yang telah ditetapkan, pelapor menyampaikan laporan pelanggaran oleh Insan Jamsostek dengan memenuhi bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Komite Integritas dan/atau kepada manajemen perusahaan.

2. Pemeriksaan Terlapor
   Berdasarkan laporan pelanggaran yang diterima atas terlapor karyawan PT Jamsostek (Persero), Direksi menugaskan Biro Penagawasan Intern dan/atau Biro SDM untuk melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, dan laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Direksi.

3. Penetapan Sanksi Disiplin
   Proses penetapan sanksi disiplin didahului dengan Rapat Dewan Pertimbangan Karyawan (BAPEK) yang melibatkan unsur Serikat Pekerja Jamsostek (SPJ) agar keputusan yang diambil lebih independen dan obyektif sehingga ada perlakuan yang sama dan konsisten terhadap pelanggaran yang sejenis dalam pengenaan sanksi disiplin. Hasil rapat dan rekomendasi BAPEK disampaikan kepada Direksi sebagai bahan pertimbangan dalam pengenaan sanksi displin.

   Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BAPEK, Direksi melakukan rapat untuk mengambil keputusan atas pengenaan sanksi disiplin karyawan, dan keputusan yang diambil telah mengikat untuk ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang.

   Pelaksanaan sanksi disiplin dilaksanakan oleh Direksi untuk sanksi disiplin sedang dan berat, sedangkan sanksi disiplin ringan dilaksanakan oleh kepala unit kerja terkait.

4. Keberatan atas Sanksi Disiplin
   Karyawan yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direksi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman. Bagi Karyawan yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dapat mengajukan keberatan berdasarkan prosedur PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   Direksi berkewajiban menanggapi surat keberatan secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat keberatan dimaksud. Hukuman disiplin sedang atau berat apabila tidak ada keberatan mulai berlaku pada hari kerja ke 21 (dua puluh satu) terhitung mulai tanggal karyawan bersangkutan menerima Keputusan Disiplin.

Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

Budaya dan etika bisnis perusahaan merupakan aspek-aspek yang memiliki tujuan dan peran yang sama dalam menjalankan tata nilai perusahaan "Budaya perusahaan" bertujuan dan berperan mempersamakan sikap dan cara bertindak dalam pelaksanaan tugas dan hubungan antar organ perusahaan. Budaya perusahaan dapat dilihat sebagai penjabaran dari visi dan misi perusahaan, memuat seperangkat nilai-nilai dan norma yang mendasari interaksi antar semua anggota dalam organisasi. Sementara "etika bisnis" bertujuan dan berperan untuk memagari setiap individu supaya berperilaku tidak menyimpang dari aturan, ketentuan dan norma. Etika bisnis itu sendiri merupakan bagian dari pedoman yang memberikan petunjuk bagi pelaku bisnis, pemegang saham dan stakeholders lainnya untuk lebih memahami dan mengenal hal-hal yang baik dan benar.

Pembudayaan nilai-nilai etika bisnis seperti kejujuran, keteladanan, keterbukaan, integritas dan kerja sama di dalam aktivitas bisnis perusahaan yang sesuai dengan prinsip *corporate governance* akan menghadirkan ikatan emosional yang kuat dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang sehat. Nilai-nilai etika tersebut adalah nilai-nilai yang diyakini perusahaan sebagai sumber kekuatan penting dan berharga yang dijunjung oleh setiap insan perusahaan dan merasa terikat kepadanya serta dianut kuat dalam mengambil sikap, tindakan dan keputusan untuk menjalankan bisnis dalam pencapaian visi perusahaan.

PT Jamsostek (Persero) menyadari pentingnya budaya perusahaan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mendorong terciptanya kinerja perusahaan yang optimal. Budaya perusahaan yang dianut oleh segenap insan Jamsostek adalah memiliki keyakinan iman dalam diri, bekerja profesional, menjadi teladan, memiliki integritas, serta mampu bekerja sama.

Budaya PT Jamsostek (Persero) adalah:

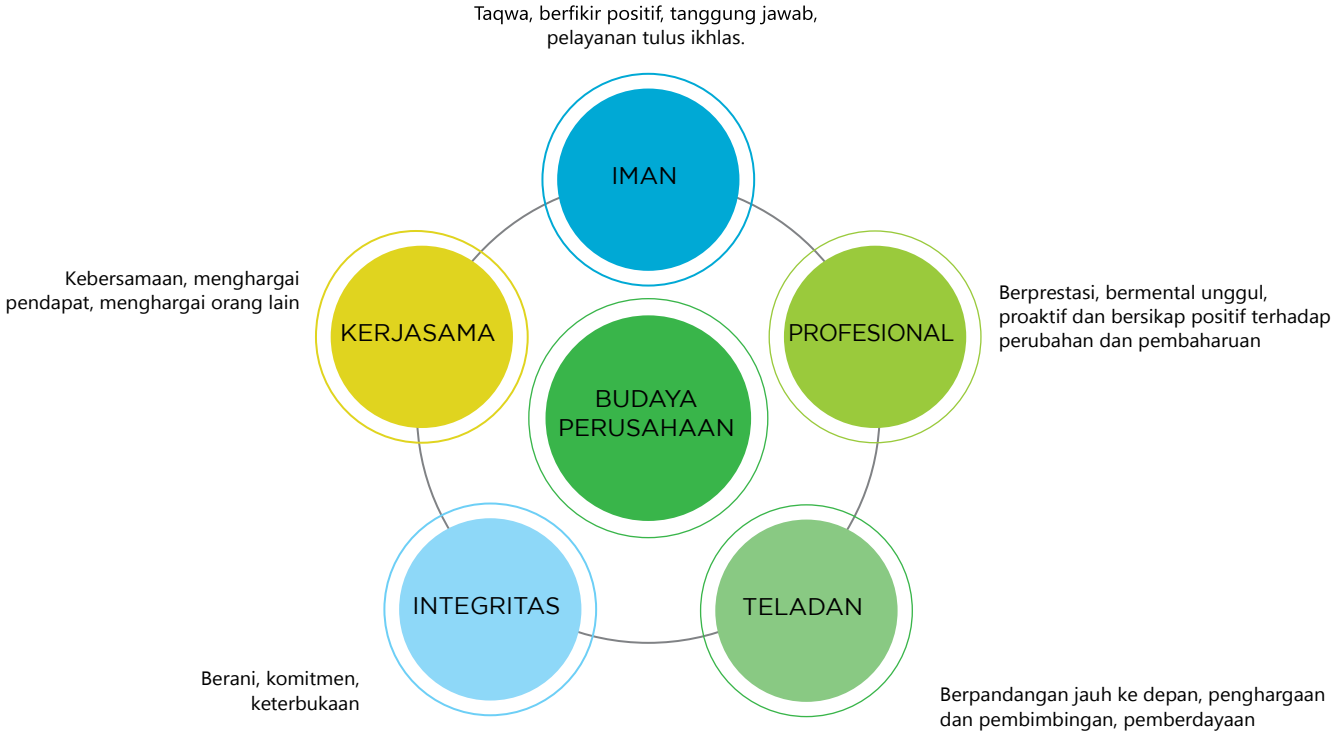

Sebagai upaya untuk internalisasi budaya perusahaan, telah dilakukan sosialisasi kepada karyawan dengan memasang *banner* tentang budaya perusahaan yang ditempatkan di setiap unit kerja. Untuk lebih memperdalam pemahaman karyawan, dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan, disampaikan juga materi tentang budaya perusahaan. Akan tetapi, perusahaan menyadari bahwa sosialisasi yang dilakukan belum berjalan efektif dan menyeluruh walaupun sampai dengan tahun 2012 belum dilakukan evaluasi mengenai internalisasi budaya perusahaan ini.

Sasaran menjadikan GCG sebagai budaya perusahaan antara lain:

1. Mengurangi terjadinya berbagai penyimpangan perilaku bisnis yang dapat merugikan bisnis perusahaan itu sendiri serta sekaligus memberi perlindungan bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan.
2. Mencapai pertumbuhan perusahaan yang konsisten dan berkesinambungan yang direfleksikan dari rasio marjin yang semakin membaik seperti peningkatan aset, pendapatan usaha, pangsa pasar dan ekuitas.
3. Meningkatnya kepercayaan *stakeholders* dan meningkatnya tingkat kepuasan peserta.
4. Kemudahan mencari pelanggan dan mitra kerja dalam setiap kegiatan usaha perusahaan.
5. Memiliki karyawan yang berkualitas dari aspek *hard skills* maupun *soft skills*.
6. Menjadi perusahaan yang dapat dijadikan tolok ukur baik di industrinya maupun secara umum.
7. Pencapaian visi dan misi perusahaan lebih mudah karena manajemen dan karyawan memiliki komitmen dan paradigma yang sama.
8. Pelaksanaan program kerja dapat lebih efektif dan efisien karena sistem dan prosedur kerja yang telah disusun berdasarkan kaidah GCG.

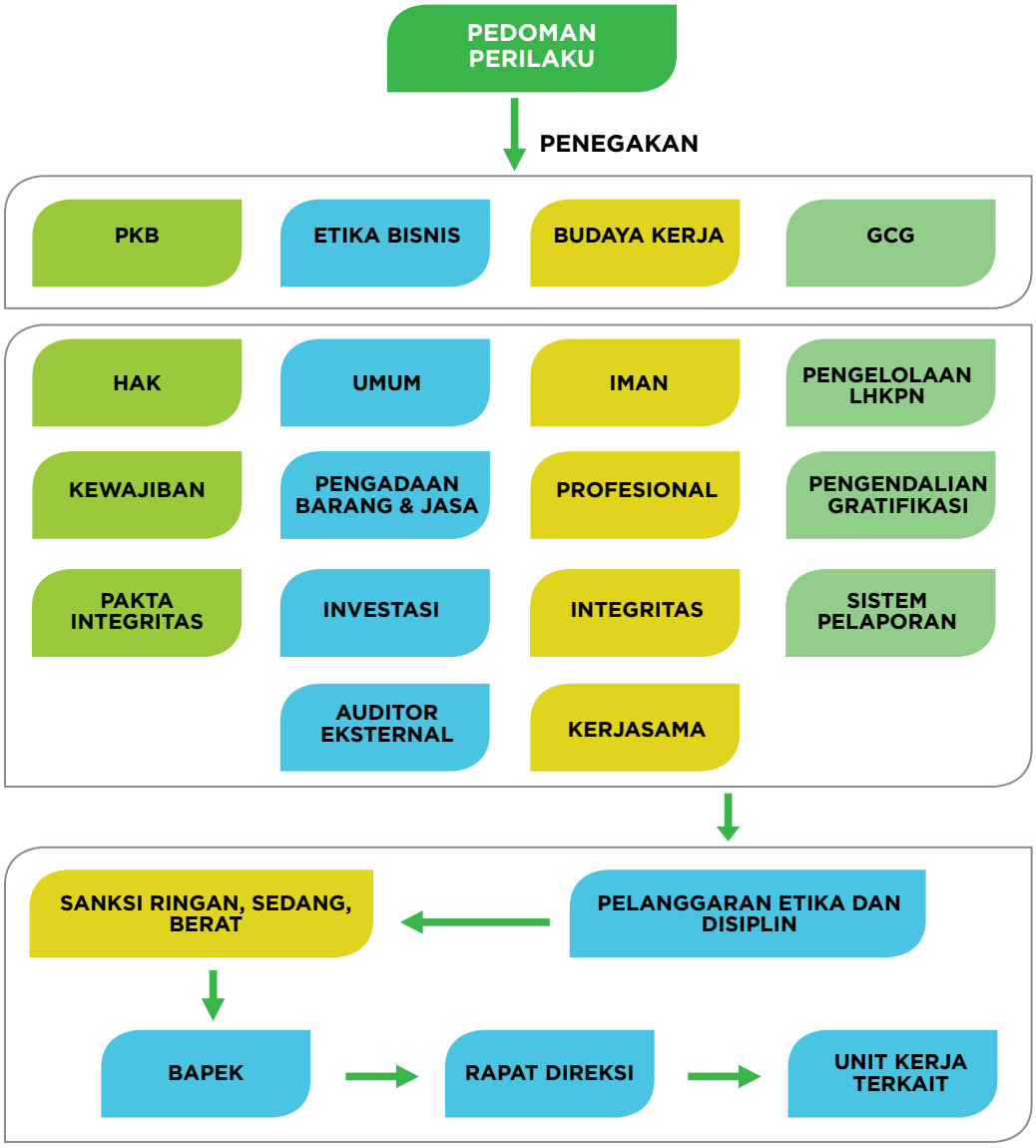

KOMITE *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Dasar Pelaksanaan

a. Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / GCG pada BUMN.
b. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
c. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE -05/MBU/2013 tanggal 30 September 2013 tentang roadmap menuju BUMN Bersih.
d. Surat Menteri BUMN Nomor : S-684/MBU/2013 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Persiapan Survai BUMN Bersih.
e. Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/373/122011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan Direktur Umum dan SDM selaku Penanggung jawab Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
f. Surat Perintah Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor : SPRIN/05/012013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Komite GCG Tahun 2013, yang diperbaharui dengan SPRIN Nomor: SPRIN/337/052013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Komite GCG.

Susunan Keanggotaan

Susunan Komite GCG Tahun 2013, sesuai dengan SPRIN Nomor : SPRIN/05/012013 tanggal 3 Januari 2013 juncto SPRIN/337/052013 tanggal 21 Mei 2013 dan SPRIN/428/072013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Komite GCG.

Tabel Susunan Komite GCG

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan	Jabatan Dalam Komite
1.	Dedy Pramiadi	Biro Sekretaris Perusahaan	Kepala Biro	Ketua
2.	Kuswahyudi	Biro Sekretaris Perusahaan	Wakil Kepala Biro	Wakil Ketua
3.	Rilexya Suryaputra	Biro Kepatuhan & Hukum	Kepala Biro	Wakil Ketua
4.	Salkoni	*Transformation Office*	Koordinator Tim Transformasi	Sekretaris
5.	Harry Kuswanda	Biro Sekretaris Perusahaan	Kaur Komunikasi Internal	Wakil Sekretaris
6.	Imam Santoso	Biro Pengadaan	Kaur Pengelolaan Kontrak & Vendor	Anggota
7.	Edy Subagyo	Biro Perencanaan Strategis	Kaur Penelitian & Perencanaan	Anggota
8.	IMG Yagustana	Biro Pengawasan Intern	Kaur Perencanaan Audit	Anggota
9.	Sari Redyowati	Biro Sekretaris Perusahaan	Kaur Sekretariat Pimpinan	Anggota
10.	Tidar Yanto Haroen	Biro SDM	Kaur Pembinaan Karyawan & Adm.	Anggota
11.	Dadang Komarudin	Biro Operasional TI	Kaur User Services	Anggota
12.	Pulung Riyanto	Biro Manajemen Risiko	Penata	Anggota
13.	Antony Sugiarto	Biro Sekretaris Perusahaan	Penata Utama Komunikasi Korporat	Anggota
14.	Honggi Dwinanda	Biro Pengawasan Intern	Auditor 3	Anggota
15.	Tania Rastasari	Biro Pengawasan Intern	Auditor 3	Anggota
16.	Irvan Rianto	Biro Sekretaris Perusahaan	Penata Madya	Anggota
17.	M. Amin H. Usman	Nara Sumber	Nara Sumber	Anggota

Program Kerja

Dalam rangka penerapan *Roadmap Good Corporate Governance* (GCG) 2011–2015 dan memenuhi *fit in infrastructure* transformasi GCG BPJS Ketenagakerjaan, maka Rencana Kerja Komite GCG tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja Direktur Umum & SDM selaku Penanggung Jawab GCG
   a. Menyusun Laporan Tahunan 2012
   b. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2013
   c. Menyusun Rencana Kerja Direktur Penanggung Jawab GCG dalam rangka pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014
   d. Menyusun Laporan Tahunan 2013

2. Penyusunan Kebijakan/Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG)
   a. Penyusunan *Road Map* BPJS *Governance*
   b. Penyusunan infrastruktur Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan
   c. Pedoman *Fraud Control System* yang terintegrasi dengan Aplikasi Sipatuh & Sihukum
   d. Pedoman penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan/ kecurangan.
   e. Pedoman Sistem Pengendalian Intern

3. Penyusunan dan *upload E-governance* dalam *website* :
   a. Penyusunan Kebijakan *E-Governance* Jamsostek
   b. *Upload E-Governance* dalam *website* yang meliputi :
      1) *E - Performance*
      2) E -Infrastruktur
      3) E -LHKPN
      4) E - Gratifikasi
      5) *E - Learning* GCG

4. Keikutsertaan dalam Program *Award*
   a. *Annual Report Award* tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Dewan Juri ARA
   b. Inovasi GCG *Award* dalam anugerah BUMN tahun 2013 yang diselenggarakan oleh BUMN Track.
   c. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) tahun 2012.
   d. *Insurance Award*

5. Program Kerja Lainnya
   a. *Workshop GCG for Executive* untuk Kader GCG Kantor Pusat/Wilayah/Cabang.
   b. Sosialisasi berkelanjutan secara masif atas infrastruktur dan inovasi GCG kepada seluruh Kantor Pusat/Wilayah/Cabang.
   c. *Internal Governance Award*:
      1) Penetapan Kriteria
      2) Penilaian
   d. Pemutakhiran Penandatanganan Pakta Integritas dan Antisuap oleh seluruh Insan Jamsostek.
   e. Melengkapi dokumen formal untuk *self assessment* GCG tahun 2012
   f. Pengadaan Konsultan *Assessment* GCG Tahun 2013
   g. Tindak lanjut *self assessment* GCG tahun 2012 (*area of improvement*)
   h. Evaluasi Direksi atas kualitas Sekretaris Perusahaan tahun 2013
   i. Pencetakan Buku Infrastruktur GCG

Pelaksanaan Program Kerja

Realisasi pelaksanaan tugas Komite GCG Tahun 2013 dibandingkan dengan Rencana Kerja mencapai rata-rata 98,75% dari target sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Program Kerja Komite GCG Tahun 2013

No.	Rencana Kerja	PIC	Realisasi	% (Penyelesaian)
1.	Program Kerja Direktur Umum & SDM Selaku Penanggung Jawab GCG			
	a. Menyusun Laporan Tahunan 2012	MAHU	Telah diselesaikan dan ditandatangani oleh Direktur Umum & SDM selaku Penanggung Jawab Penerapan GCG.	100

Realisasi Program Kerja Komite GCG Tahun 2013

No.	Rencana Kerja	Realisasi	% (Penyelesaian)
1	b. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2013	Telah diselesaikan dan ditandatangani oleh Direktur Umum & SDM selaku Penanggung Jawab Penerapan GCG.	100
	c. Menyusun Laporan Tahunan 2013	Telah diselesaikan laporan Triwulan I, II dan III dan Oktober 2013	100
		Sub Total - 1	**100,00**
2.	Penyusunan Kebijakan/ Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG)		
	a. Penyusunan *Road Map* BPJS *Governance*	Telah dibuat untuk diakomodasikan dalam ARA 2012	100
	b. Pedoman *Fraud Control* yang terintegrasi dengan Aplikasi Sipatuh & Sihukum	Surat kepada BPKP No: B/1706/022013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pembangunan *Fraud Control* System PT Jamsostek (Persero) dan sudah diselesaikan diagnosis *fraud* dan dalam proses penyusunan Pedoman Pengendalian *Fraud*	75
	c. Pedoman penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan/ kecurangan.	Keputusan Direksi No: KEP/182/062013 tentang pedoman penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan di lingkungan PT Jamsostek (Persero)	100
	d. Pedoman Sistem Pengendalian *Intern*	Dalam proses legalisasi Surat Keputusan Direksi	100
		Sub Total - 2	**93,75**
3	Penyusunan dan *upload e-governance* dalam website : a. Penyusunan Kebijakan *e-governance* Jamsostek	Menunggu kebijakan BPJS Ketenagakerjaan	100

No.	Rencana Kerja	Realisasi	% (Penyelesaian)
	b. *Upload e-governance* dalam website yang meliputi :		
	▪ e-*Performance*	Sudah di *upload*	100
	▪ e-Infrastruktur	Sudah di *upload*	100
	▪ e-LHKPN	Sudah di *upload*	100
	▪ e-Gratifikasi	Sudah di *upload*	100
	▪ e-*Learning* GCG	Sudah koordinasi dengan Biro Pengembangan & Kompetensi	100
		Sub Total - 3	**100,00**
4	Keikutsertaan dalam Program *Award*		
	a. *Annual Report Award* tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Dewan Juri ARA	Telah dibuat materi GCG untuk ARA 2012	100
	b. Inovasi GCG *Award* dalam anugerah BUMN 2013 yang diselenggarakan oleh BUMN *Track*	Sudah dilaksanakan	100
	c. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) tahun 2012	Mendapat peringkat *Trust Company*	100
	d. *Insurance Award*	Menyelesaikan Materi GCG	100
		Sub Total - 4	**100,00**
5	Program Kerja Lainnya		
	a. *Workshop* Kader GCG Kantor Pusat/Wilayah/ Cabang	Telah dilaksanakan *workshop* tanggal 22 s/d. 23 Juli 2013	100
	b. Sosialisasi berkelanjutan secara masif atas infrastruktur dan inovasi GCG kepada seluruh Kantor Pusat/ Wilayah/Cabang	Sudah ditetapkan penilaian *Internal Governance Award* (IGA) tahun 2013 oleh Direktur Umum & SDM tanggal 03 Desember 2013.	100
	c. *Internal Governance Award* :		
	- Penetapan Kriteria	Sudah dibuat surat kepada Kanwil/Divisi/ Biro	100
	- Penilaian		

No.	Rencana Kerja	Realisasi	% (Penyelesaian)
	d. Pemutakhiran penandatanganan Pakta Integritas dan Antisuap oleh seluruh Insan Jamsostek	Sudah ditetapkan penilaian *Internal Governance Award* (IGA) tahun 2013 oleh Direktur Umum & SDM tanggal 03 Desember 2013.	100
	e. Melengkapi dokumen formal untuk *self assessment* GCG tahun 2012	Laporan *self assessment* GCG sudah selesai	100
	f. Pengadaan Konsultan *Assessment* GCG Tahun 2013	Sudah dibuatkan *Term of Reference* (TOR)	100
	g. Tindak lanjut *self assessment* GCG tahun 2012 *(area of improvement)*	Telah dibuat identifikasi tanggung jawab masing-masing Divisi/Biro	100
	h. Evaluasi Direksi atas kualitas Sekretariat Perusahaan tahun 2013	Sudah ditetapkan dalam *Assessment* GCG Tahun 2013.	100
	i. Pencetakan Buku Infrastruktur GCG	Sudah diedarkan kepada seluruh Unit Kerja	100
		Sub Total - 5	**100,00**
		Rata-Rata % Penyelesaian	**98,75**

Agenda Rapat dan Tindak Lanjut Keputusan Rapat
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Komite GCG telah melaksanakan rapat sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dengan agenda dan tindak lanjut keputusan rapat rata-rata 98,66% dari target 100%, yaitu sebagai berikut :

Agenda Rapat dan Tindak Lanjut Penyelesaian Keputusan Rapat

No.	Waktu	Agenda	% TL
1	11 Maret 2013	*Kick off Meeting Assessment* GCG tahun 2012	100,00
2	15 Maret 2013	Rapat Komite GCG dengan Kepala Divisi/Biro	100,00
3	27 Maret 2013	*Self Assessment* GCG Tahun 2012	100,00
4	01 April 2013	Persiapan *workshop* GCG *for Executive*	100,00
5	03 April 2013	Rapat Koordinasi Komite GCG dengan Komite Integritas dan Antisuap	100,00
6	22 Mei 2013	Administrasi / fungsi sekretaris Komite GCG	100,00
7	29 Mei 2013	Materi GCG ARA 2012 dan tindak lanjut sesuai integritas pelayanan publik.	100,00
8	10 Juni 2013	Persiapan konsinyiring Komite GCG	100,00
9	28 Juni 2013	Evaluasi Program Kerja Semester I/2013 dan persiapan CGPI tahun 2012	100,00
10.	12 Juli 2013	Evaluasi kinerja Komite GCG	100,00

Tabel Agenda Rapat dan Tindak Lanjut Penyelesaian Keputusan Rapat

No.	Waktu	Agenda	% TL
11.	29 Juli 2013	Rapat tindak lanjut CGPI	100,00
12.	28 Agt 2013	Rapat Tindak lanjut CGPI	100,00
13.	29 Agt 2013	Evaluasi kinerja Komite GCG	100,00
14.	19 Sept 2013	Rapat Gabungan Komite GCG dan Komite Integritas dengan Direktur Umum & SDM selaku penanggung jawab GCG.	100,00
15.	16 Okt 2013	Persiapan Sosialisasi GCG Kantor Pusat	100,00
16.	29 Okt 2013	Persiapan observasi CGPI, Evaluasi ARA 2012 dan Evaluasi Program Kerja	100,00
17.	31 Okt 2013	Evaluasi Program Kerja bulan Oktober 2013	100,00
18.	01 Nop 2013	Observasi CGPI	100,00
19.	11 Nop 2013	Pembahasan lanjutan Anugerah BUMN 2013	100,00
20.	12 Nop 2013	Evaluasi Program Kerja Komite GCG dan Persiapan *Roadmap* menuju BUMN Bersih	100,00
21.	14 Nop 2013	Pembahasan Pelatihan CSR	100,00
22.	19 Nop 2013	E-*learning* GCG	100,00
23.	19 Nop 2013	Sosialisasi GCG PT Bijak	100,00
24.	22 Nop 2013	*Kick off Meeting Assessment* GCG	100,00
25.	25 Nop 2013	Persiapan Tim Visit *Internal Governance Award* (IGA)	100,00
26.	10 Des 2013	*Closing Meeting* dengan *Assessor* GCG	100,00
27.	16 Des 2013	Penyusunan dan Penerapan Program Kerja Jamsostek Bersih	87,50
28.	24 Des 2013	Evaluasi pelaksanaan program kerja Komite GCG tahun 2013 dan pembentukan Komite GCG tahun 2014.	75,00
		% Rata-Rata Tindak Lanjut	**98,66**

Tingkat Kehadiran Rapat

Tingkat kehadiran rapat Komite GCG selama Tahun 2013 dengan tingkat kehadiran rata-rata 77,96% dari target 100%.

Tingkat Kehadiran Rapat Komite GCG

No.	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	% Hadir
1	Dedy Pramiadi	23	22	95,65
2	Kuswahyudi	23	15	65,22
3	Rilexya Suryaputra	28	19	67,86
4	Salkoni	23	19	82,61
5	Harry Kuswanda	23	19	82,61

Tingkat Kehadiran Rapat Komite GCG
Tingkat kehadiran rapat Komite GCG selama Tahun 2013 dengan tingkat kehadiran rata-rata **77,96%** dari target 100%.

Tingkat Kehadiran Rapat Komite GCG

No.	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	% Hadir
6	Imam Santoso	28	21	75,00
7	Edy Subagyo	28	17	60,71
8	IMG Yagustana	23	21	91,30
9	Sari Redyowati	23	21	91,30
10	Tidar Yanto Haroen	28	23	82,14
11	Dadang Komarudin	28	17	60,71
12	Pulung Riyanto	28	22	78,57
13	Antony Sugiarto	19	17	89,47
14	Honggi Dwinanda	23	16	69,57
15	Tania Rastasari	19	15	78,95
16	Irvan Rianto	28	16	57,14
17	M. Amin H. Usman	28	27	96,43
	RATA-RATA			**77,96**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

Kebijakan Umum

1. Secara umum, pelaksanaan Program CSR atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang berfokus pada kegiatan yang memiliki keterkaitan serta mendukung perkembangan bisnis perusahaan, relevan dalam pengembangan hubungan institusi terhadap pemangku kepentingan, serta peningkatan *corporate image* di masyarakat tanpa mengabaikan aspek ketaatan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kegiatan yang tidak secara langsung berhubungan dengam pemberian manfaat kepada Peserta dimana sumber dananya diperoleh dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013 yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Selama Tahun 2013, Perusahaan tidak menyalurkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Hal ini sesuai dengan surat Kementerian BUMN nomor : S-478/D5.MBU/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Kwajiban Melakukan Rekonsiliasi Data PKBL dan *Cut-Off Date* Kegiatan dan Pelaporan PKBL per 31 Desember 2012.
4. Sebagai acuan dasar pelaksanaan TJSL dalam lingkungan Perusahaan adalah Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
   a. Undang-Undang nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Bab V pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
      1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
      2) Perseroan berkewajiban untuk menganggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepesertaan kepatutan dan kewajaran
      3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
   b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
      1) TJSL yang dilakukan oleh perseroan berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor : 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
      2) Pelaksanaan TJSL dilakukan didalam dan diluar perseroan
      3) Kewajiban TJSL disusun dalam rencana

kerja tahunan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
4) Realisasi anggaran TJSL diperhitungkan sebagai biaya Perseroan
5) Pelaksanaan TJSL wajib dimuat dalam laporan tahunan untuk dipertanggung-jawabkan
6) Penegasan pengaturan mengenai sanksi
7) Perseroan dapat menerima penghargaan dari instansi yang terkait jika telah melaksanakan TJSL yang diwajibkan juga berperan secara moral.

c. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-247/MBU/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pedoman Umum DPKP PT. Jamsostek (Persero) yang diperbaharui dengan Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-691/MBU/2012 tentang Perubahan Keputusan Nomor KEP-247/MBU/2008.

Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

1. Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta atau disingkat DPKP adalah dana yang dihimpun dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan atau keluarganya yang diprioritaskan bagi yang kurang mampu dan membantu badan/unit usaha yang mempunyai keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan peserta program Jamsostek terutama bagi badan/unit usaha skala kecil yang mempunyai keterkaitan dengan PT. Jamsostek (Persero) yang bersifat padat karya.

Pelaksanaan program bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Peserta Program Jamsostek dan atau Keluarganya melalui berbagai jenis program Peningkatan Kesejahteraan Peserta dalam bentuk dana bergulir dan tidak bergulir yang penyalurannya dalam 5 tahun terakhir dapat disajikan sebagai berikut:

a. Penyaluran Program DPKP 5 tahun terakhir Sampai dengan tahun 2013, telah disalurkan dana sebesar Rp. 1.778,95 milliar melalui Program DPKP, dimana sebesar Rp. 1.311,04 milliar disalurkan melalui program bergulir dan sebesar Rp. 467,90 milliar disalurkan melalui program hibah.

Rincian mengenai penyaluran Program DPKP selama 5 tahun terakhir dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	s.d 2008		2009		2010		2011		2012		2013		Akumulasi Sd. 2013	
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
I	**Dana Bergulir**														
	Rumah Susun Sewa	809	56.921	78	15.390	300	35.846	700	76.991	100	23.111	-	278	1.987	208.537
	Rumah Sakit Pekerja	-	-									-	13.151	-	13.151
	Pinjaman Perumahan	63.152	406.033	8.379	101.358	4.697	89.042	3.847	76.720	8.603	146.947	10.178	195.033	98.856	1.015.133
	Koperasi Karyawan	345	36.713	54	3.890	64	3.959	69	4.368	103	7.274	93	6.875	728	63.079
	DTMK	151	1.802	-	-		-				0	-	-	151	1.802
	Provider Jasa Pelkes	34	2.806	25	1.010	24	1.475	26	1.510	38	2.545	-	-	147	9.346
	Jumlah Bergulir	**64.491**	**504.275**	**8.536**	**121.648**	**5.085**	**130.322**	**4.642**	**159.589**	**8.844**	**179.877**	**10.271**	**215.337**	**101.869**	**1.311.048**
II	**Dana Tidak Bergulir**														
	Mobil Ambulance	185	33.416	4	1.533	12	4.747	7	2.780	10	4.366	8	3.562	226	50.404
	Bantuan PPK	707	39.105	222	2.030	404	6.416	258	3.195	257	5.089	195	2.401	2.043	58.236
	Kesehatan Cuma-Cuma	1.552	18.028	143	1.817	164	2.681	156	2.486	342	7.699	265	3.974	2.622	36.685
	Beasiswa	69.871	81.727	10.232	23.923	14.498	27.175	15.505	29.439	42.344	81.844	43.365	85.013	195.815	329.121
	Pelatihan TK	5.830	4.526	926	1.389	1.170	1.378	1.078	1.524	1.976	2.324	1.616	2.395	12.596	13.536
	Rehab/Renov. BLK Pemda	40	11.369	-	-					-	-	-	-	40	11.369
	Bantuan PHK	62.699	15.201	2.548	892	1.301	479	336	168	569	285	369	185	67.822	17.210
	Bant. As. Pengusaha	-	7	-	-							4.270	-	4.270	7
	Bant.Subsidi Bunga	75	105	-	-							-	-	75	105
	Bantuan Adminstrasi KPR	-	-	5.009	2.505	3.280	1.639	2.662	1.427	3.522	1.761	-	2.135	14.473	9.467
	Jumlah Tidak Bergulir	**140.252**	**164.379**	**18.862**	**32.059**	**20.425**	**38.099**	**19.744**	**37.824**	**48.763**	**98.279**	**49.893**	**97.264**	**297.939**	**467.904**
	Total Penyaluran	**204.743**	**668.654**	**27.398**	**153.707**	**25.510**	**168.421**	**24.386**	**197.413**	**57.607**	**278.156**	**60.164**	**312.601**	**399.808**	**1.778.952**

Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Kebijakan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan pada PT. Jamsostek (Persero) meliputi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER-05/MBU/2007.

Pelaksanaan PKBL dilakukan dalam bentuk *micro-credit* serta dana pembinaan kepada UMKM selaku Mitra Binaan dan *philantrophy* kepada masyarakat luas, khususnya terhadap mereka yang berkategori kurang mampu.

a. Penyaluran PKBL 5 tahun terakhir
1) Program Kemitraan
Sampai dengan tahun 2013, telah disalurkan dana sebesar Rp. 368,16 milliar melalui Program Kemitraan, dimana sebesar Rp. 307,12 milliar disalurkan melalui program bergulir dan sebesar Rp 61,03 milliar disalurkan melalui dana pembinaan yang bersifat hibah kepada Mitra Binaan.

Rincian mengenai penyaluran Program Kemitraan selama 5 tahun terakhir dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No	Uraian	PENYALURAN												Jumlah	
		s.d 2008		2009		2010		2011		2012		2013		s.d 2013	
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
1	Pinjaman														
	Sektor Industri	1.298	26.639	200	3.614	194	4.973	110	3.110	313	7.793	-	-	2.115	46.128
	Sektor Perdagangan	2.977	55.213	734	8.407	902	14.917	406	7.327	662	19.487	-	-	5.681	105.350
	Sektor Pertanian	95	2.200	858	7.823	231	3.333	2.909	17.228	1.872	6.424	-	-	5.965	37.008
	Sektor Peternakan	499	10.683	1.494	13.028	226	2.984	39	578	46	1.484	-	-	2.304	28.756
	Sektor Perkebunan	29	622	6	130	72	540	15	1.828	3	65	-	-	125	3.185
	Sektor Perikanan	351	5.871	110	1.321	108	1.756	21	518	62	1.267	-	-	652	10.732
	Sektor Jasa	1.871	35.406	203	3.106	256	5.618	135	3.391	366	8.797	-	-	2.831	56.317
	Sektor Lainnya	598	15.447	43	373	14	267	63	2.365	127	1.196	-	-	845	19.647
	Sub Total	**7.718**	**152.080**	**3.648**	**37.802**	**2.003**	**34.386**	**3.698**	**36.344**	**3.451**	**46.512**	-	-	**20.518**	**307.124**
2	Hibah														
	Pendidikan & Pelatihan	4.808	12.469	1.259	2.148	1.850	3.560	1.496	3.122	3.509	6.103	-	-	12.922	27.401
	Pemasaran & Promosi	1.202	10.656	98	3.078	199	4.643	256	6.254	502	8.694	-	-	2.257	33.324
	Pemagangan	1	2	-	-	40	80	-	-	-	-	-	-	41	82
	Penelitian & Pengembangan	-	-	-	-	120	229	-	-	-	-	-	-	120	229
	Sub Total	**6.011**	**23.127**	**1.357**	**5.226**	**2.209**	**8.511**	**1.752**	**9.376**	**4.011**	**14.797**	-	-	**15.340**	**61.037**
	TOTAL	**13.729**	**175.207**	**5.005**	**43.027**	**4.212**	**42.897**	**5.450**	**45.720**	**7.462**	**61.309**	-	-	**35.858**	**368.160**

2) Program Bina Lingkungan
Sampai dengan tahun 2013, telah disalurkan dana sebesar Rp. 142,99 milliar melalui Program Bina Lingkungan dengan rincian yang dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No	BIDANG KEGIATAN	PENYALURAN												Jumlah	
		s.d 2008		2009		2010		2011		2012		2013		s.d 2013	
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
1	Bencana Alam	18.799	8.330	1.217	2.101	1.942	1.841	7.875	1.357	65	522	-	-	29.898	14.150
2	Pendidikan & Pelatihan	13.830	14.908	943	3.693	2.777	5.096	1.037	4.645	1.154	5.866	-	-	19.741	34.208
3	Peningkatan Kesehatan	49.463	6.570	3.709	2.146	8.128	2.996	4.489	3.751	360	4.394	-	-	66.149	19.857
4	Sarana Umum	10.595	5.504	1.033	2.962	420	3.286	1.702	3.548	465	5.725	-	-	14.215	21.024
5	Sarana Ibadah	3.944	5.066	343	2.500	347	3.914	285	4.334	688	6.099	-	-	5.607	21.913
6	Pelestarian Alam	7.491	403	11.518	735	37.500	1.102	61.421	1.292	34.370	1.529	-	-	152.300	5.062
7	BUMN Peduli	7.483	3.411	-	-	-	1.550	-	875	-	20.946	-	-	7.483	26.782
	TOTAL	**111.605**	**44.192**	**18.763**	**14.138**	**51.114**	**19.785**	**76.809**	**19.800**	**37.102**	**45.081**	**-**	**-**	**295.393**	**142.995**

2. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Program CSR perusahaan dilakukan secara efektif sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Nomor: KEP/111/032013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Jamsostek (Persero).

Kebijakan pelaksanaan Program CSR berfokus pada pemberdayaan sosial kemasyarakatan dalam rangka menumbuhkembangan *awareness* atas keberadaan perusahaan serta peningkatan *corporate image* dan *corporate value* di masyarakat sekaligus mendukung aktivitas inti perusahaan dalam pemasaran Program Jamsostek.

a. Penyaluran Program CSR

Selama tahun 2013, dilakukan penyaluran program CSR sebesar Rp 16,4 miliar dalam bentuk sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Jamsostek *Goes to Campus*

Merupakan bentuk dukungan perusahaan kepada dunia pendidikan dalam bentuk kunjungan setiap anggota Direksi ke beberapa Universitas Negeri yang tersebar di seluruh Indonesia, pelaksanaan *public speech* / Kuliah Umum yang mengambil tema seputar relevansi Universitas dengan dunia kerja dan sosialisasi Program Jamsostek dengan mengundang beberapa praktisi yang relevan sebagai narasumber, serta bantuan fasilitas pendukung kegiatan belajar Mahasiswa kepada pihak Universitas.

2) Gerakan Direksi Mengajar

Merupakan bentuk partisipasi dari kampanye "Gerakan Indonesia Mengajar" sebagaimana diinisiasikan oleh Anis Baswedan, Rektor Universitas Paramadhina yang dalam perkembangan selanjutnya dicanangkan sebagai program resmi Kementerian BUMN RI sebagaimana Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-67/S.MBU/2013 tanggal 3 Mei 2013, tentang Gerakan Direksi BUMN mengajar.

Dalam kegiatan ini, setiap anggota Direksi PT. Jamsostek (Persero) melakukan kunjungan ke sekolah asal masing-masing untuk selanjutnya memberikan materi pengajaran umum dengan tema motivasi semangat belajar untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia serta bantuan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar kepada pihak sekolah.

3) Pasar Murah

Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat kurang mampu yang mengalami dampak finansial pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta kecenderungan meningkatnya harga bahan pokok menjelang ramadhan tahun 2013, dilakukan kegiatan pasar Murah dalam bentuk penyediaan paket sembako dengan harga sebesar lima puluh persen dari harga aktual.

4) Jamsostek Berbagi Ta'jil

Pelaksanaan Jamsostek berbagi ta'jil gratis dilakukan dalam bentuk distribusi makanan pembuka puasa (ta'jil) kepada masyarakat umum pada 50 (lima puluh) titik keramaian di jalan utama serta wilayah sekitar Kantor Cabang perusahaan di Provinsi DKI Jakarta selama bulan Ramadhan tahun 2013.

5) Safari Ramadhan

Kegiatan dalam bentuk kunjungan perusahaan yang diwakili oleh anggota Direksi perusahaan selama bulan Ramadhan tahun 2013 ke kota-kota besar di seluruh Indonesia. Dalam Safari Ramadhan tersebut, dilakukan kegiatan buka puasa bersama serta pemberian bantuan sosial kepada anak yatim piatu dan atau panti asuhan.

6) Mudik Bersama Jamsostek

Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap momentum Mudik Lebaran yang secara rutin terjadi setiap tahunnya menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2013, perusahaan menyediakan sarana angkutan dalam bentuk bus kepada masyarakat yang melayani rute mudik ke kota-kota sepanjang Jalur Utama Pantai Utara dari Jakarta sampai Surabaya.

7) Pos Pelayanan Kesehatan
Pendirian pos pelayanan kesehatan dilakukan dalam rangka memberikan bantuan kesehatan dalam bentuk penyediaan obat-obatan, vitamin, jasa pelayanan kesehatan sampai kepada rujukan Rumah Sakit atas kasus kecelakaan kepada pemudik yang pada titik-titik konsentrasi pemudik di seluruh Indonesia.

8) Bantuan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan di bidang kesehatan sebagai bagian dari Program CSR dilaksanakan dalam bentuk bantuan kesehatan terhadap anggota masyarakat atau partisipasi terhadap kegiatan dalam bidang kesehatan.

9) Bantuan Pembinaan Lingkungan
Kegiatan di bidang Pembinaan Lingkungan sebagai bagian dari Program CSR dilaksanakan dalam bentuk partisipasi kegiatan sosial kemasyarakatan seperti donasi terhadap pembangunan fasilitas masyarakat dan bantuan yang secara umum bersifat *philantrophist*.

10) Bantuan Pendidikan Masyarakat
Kegiatan di bidang Pendidikan sebagai bagian dari Program CSR dilaksanakan dalam bentuk beasiswa dan kegiatan pendidikan lainnya serta pemberian bantuan peralatan sekolah kepada siswa-siswi sekolah yang kurang mampu dan atau berprestasi.

Rincian Penyaluran Program CSR selama tahun 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

(juta rupiah)

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Berbagi Tajil	733.07
2	*Goes To Campus*	1,850.00
3	Mudik Bersama	1,749.50
4	Pasar Murah	4,122.95
5	Safari Ramadhan	697.14
6	Posko Kesehatan	1,326.27
7	Ibadah	902.99
8	Kesehatan	372.50
9	Lingkungan	4,266.20
10	Pendidikan	383.50
Total		**16,404.11**

Tanggungjawab Konsumen

Perlindungan peserta

1. Peserta Program Jamsostek memiliki Hak-hak yang diatur oleh Undang-undang, sehingga dengan demikian secara langsung peserta program Jamsostek telah terlindungi haknya sebagai konsumen, berupa:
   a. Perlindungan kepada tenaga kerja, dengan diselenggarakannya program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
   b. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.
   c. Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja ini meliputi:
      1) Jaminan Kecelakaan Kerja;
      2) Jaminan Kematian;
      3) Jaminan Hari Tua;
      4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
   d. Jaminan sosial tenaga kerja diperuntukkan bagi tenaga kerja dan berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja.

2. Pembinaan dan Pengawasan
   Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara dilakukan oleh pemerintah, sedangkan dalam pengawasan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyelesaian Sengketa
   a. Dalam rangka pembayaran santunan, penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara berdasarkan surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasehat.
   b. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai santunan akibat kecelakaan kerja, dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
   c. Dalam hal penetapan santunan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak dapat diterima oleh Badan Penyelenggara atau pengusaha atau tenaga kerja, maka penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh menteri.
   d. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, menteri dapat menetapkan dan mewajibkan pengusaha untuk memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja.
   e. Dalam hal penetapan menteri dianggap tidak sesuai dengan harapan pengusaha atau tenaga kerja, maka pengusaha atau peserta dapat mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan untuk mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

4. Penyidikan
   a. Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
   b. Penyidik mempunyai wewenang :
      1) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
      2) Melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
      3) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
      4) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang jaminan sosial tenaga kerja;
      5) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian sehubungan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja.

5. Sanksi Administrasi dan Pidana
   a. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban diancam dengan hukuman selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
   b. Dalam hal pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut di pidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
   c. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran.
   d. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana terhadap pengusaha, tenaga kerja dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

6. Penanggulangan atas pengaduan peserta
   Sebagai BUMN yang melaksanakan fungsi perlindungan Tenaga Kerja dan harus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. PT Jamsostek (Persero) memegang teguh prinsip transparansi dalam upaya menjaga hubungan baik, umpan balik dan masukan dari para *stakeholder* sangat diharapkan baik secara langsung melalui Cabang, maupun Kantor-kantor Wilayah. Jamsostek memiliki sebuah mekanisme dalam menangani pengaduan peserta dan melakukan penanganan pengaduan.

   Bagi Manajemen, pengaduan ini dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja Jamsostek di masa datang.

   PT Jamsostek (Persero) menangani pengaduan dan keluhan *stakeholders* melalui dua media, yaitu pusat layanan informasi program Jamsostek (*call center*) dan forum konsultasi *website*

   Jamsostek, dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
   a. *Call Center*
      Call Center ditetapkan melalui keputusan rapat Direksi yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2009 dengan menunjuk PT Karang Lewas Sejati sebagai partner kerjasama Jamsostek dalam pelaksanaan kegiatan *call center*. Guna meningkatkan pelayanan dan memberikan informasi yang standar/baku tentang program Jamsostek, pada tanggal 5 Agustus 2011 IVR system ditambahkan pada fitur *call center*, dan nomor layanan menjadi 021-29297392 dan nomor 021-5207797 ext 9.

      Pelaksanaan *call center* diorganisir oleh Divisi Teknis & Pelayanan PT Jamsostek (Persero). Semua pertanyaan/keluhan peserta dapat diselesaikan dengan baik. Dalam hal pertanyaan/penyelesaian keluhan yang terkait data (Kacab/Divisi/Biro) maka Divisi Teknis & Pelayanan berkoordinasi dengan (Kacab/Divisi/Biro PT.Jamsostek (persero)) untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Jumlah pertanyaan/Keluhan yang diterima dan ditindaklanjuti pada tahun 2013 sebanyak

78.165

Pertanyaan/keluhan yang diajukan oleh peserta di tahun 2013 mayoritas mengenai program JHT (Jaminan Hari Tua) yaitu sejumlah (37.094) dengan rincian syarat pencairan JHT (25.741), saldo JHT (9.217) dan jangka waktu pencairan (1.524) dll sebanyak (612).

Pertanyaan/keluhan terbanyak kedua mengenai website Bpjs Ketenagakerjaan sejumlah (13.152) Sedangkan di urutan ketiga adalah pertanyaan mengenai (KPJ dan sertifikat) sejumlah (11.061).

REKAP CALL CENTER
POSISI S.D DESEMBER 2013

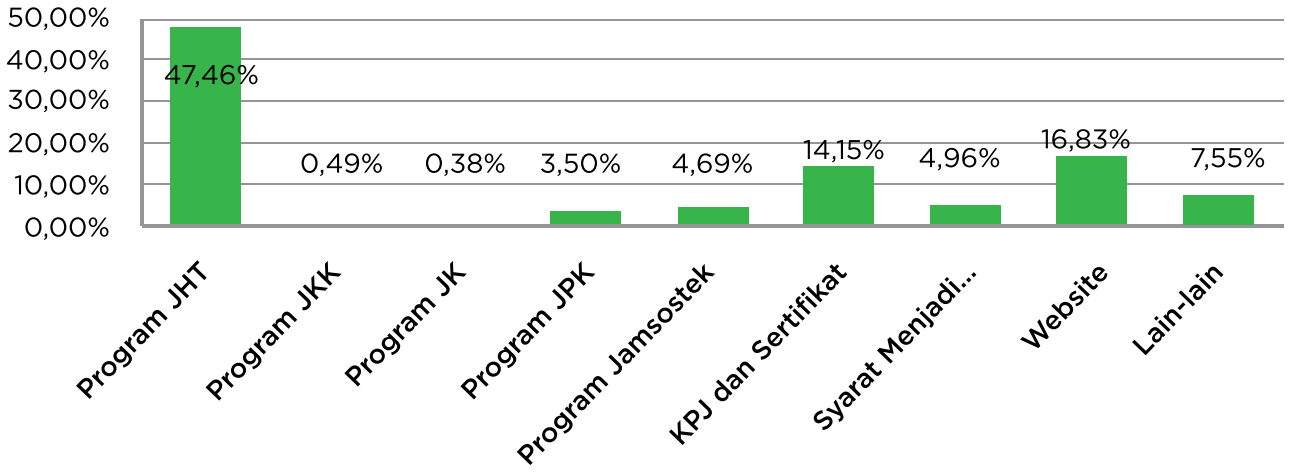

LAPORAN TAHUNAN *INCOMING CALL*
JANUARI 2013 S/D DESEMBER 2013

No	KETERANGAN	JUMLAH KELUHAN	JUMLAH KELUHAN DITINDAKLANJUTI
1	KPJ dan Sertifikat	26	26
2	Lain-Lain	132	132
3	Program Jamsostek	9	9
4	Program JHT	71	71
5	Program JK	2	2
6	Program JKK	1	1
7	Program JPK	41	41
8	Syarat Menjadi Peserta	1	1
9	Website	13	13
	Total		
	TOTAL	**296**	**296**

b. *Website* Jamsostek

Pengelolaan pengaduan dan keluhan *stakeholders* yang kedua adalah forum konsultasi pada *website* Jamsostek (www.jamsostek.co.id). Apabila *Call Center* lebih bersifat interaksi langsung dengan *stakeholders*, forum konsultasi *website* memerlukan interaksi yang tidak langsung. Mekanisme pengaksesan pertanyaan melalui forum kunsultasi *website* adalah *stakeholders* membuka situs Jamsostek kemudian akses ke menu Kontak yang terdapat pada halaman pertama bagian bawah *website*. Selanjutnya *stakeholders* dapat langsung mengisi identitas dan pertanyaan yang ingin disampaikan.

Forum yang mulai aktif sejak tahun 2008 ini dikelola oleh Biro Sekretaris Perusahaan PT Jamsostek (Persero). Namun dalam menjawab pertanyaan *stakeholders* yang sangat teknis Biro Humas mendapat bantuan dari beberapa unit kerja terkait seperti Biro Teknologi & Informasi, Divisi PKP & Kemitraan, Divisi Operasi, Divisi Teknis & Pelayanan dan Divisi JPK.

Selama tahun 2013 total pertanyaan *stakeholders* yang diterima sejumlah 15.447 dan yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas sejumlah 12.849 pertanyaan, atau 83,18% dari total pertanyaan.

Adanya pertanyaan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 16,82 %. Hal tersebut dikarenakan:

1) Tidak adanya balasan jawaban dari unit kerja terkait,
2) Tingkat mobilitas yang tinggi dari PIC forum konsultasi di Biro Sekretaris Perusahaan,
3) Tingkat aksesibilitas *website* yang rendah.

Rincian yang menggambarkan penyelesaian pertanyaan berdasarkan kategori dapat disajikan sebagai berikut:

Jumlah Pertanyaan Berdasarkan Kategori
Melalui website bpjsketenagakerjaan.go.id

No	Kategori Pertanyaan	Jumlah		% Penyelesaian
		Diajukan	Selesai	
1	Login Website	2.857	2.400	84,00%
2	Registrasi Website	2.459	2.041	83,00%
3	Program BPJS TK	1.592	1.321	82,98%
4	Klaim (JHT,JKK,JK)	1.982	1.645	83,00%
5	Lainnya	2.426	2.014	83,02%
6	No Subject	4.131	3.428	82,98%
	TOTAL	**15.447**	**12.849**	**83,18%**

Pelaksanaan *Assessment* GCG

a. Dasar Pelaksanaan

1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dan peraturan perundang-undangan serta praktik terbaik GCG.
2) Sekretaris Kementerian Negara BUMN telah mengeluarkan Keputusan Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara.

b. Hasil *Assessment*

Pada tahun 2013 penilaian dilakukan *assessment* oleh Konsultan Independen, yaitu Sodiq Purwoko & Associates sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: SPK/155/102013 tanggal 23 Oktober 2013. SPA telah menerbitkan Laporan Hasil Assesment Nomor: SPA.Lap.04.2013 tanggal 10 Desember 2013 dimana capaian PT Jamsostek (Persero) adalah 95,04 atau mencapai kualifikasi Sangat Baik.

c. Rekomendasi *Assessment*

Dari hasil pelaksanaan *assessment* GCG di PT Jamsostek (Persero) pada tahun 2013, dapat diuraikan kondisi yang belum memenuhi dan belum sepenuhnya memenuhi indikator/parameter penilaian penerapan GCG dengan rekomendasi kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

1) Pemegang Saham
   a) Membuat pedoman yang mengatur persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris BUMN.

b) Menetapkan mekanisme pembahasan dan kriteria pelaporan mengenai gejala menurunnya kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
c) Menyusun sistem penetapan dan penilaian KPI Direksi secara Individu.
d) Membuat pedoman penunjukan auditor eksternal.

2) Dewan Komisaris
a) Meningkatkan kualitas telaahan dan arahan Dewan Komisaris dengan mendayagunakan seluruh perangkat organ pendukung Dewan Komisaris.
b) Membuat rencana kerja kebijakan dan pengelolaan anak perusahaan.
c) Memberikan penilaian atas kinerja Direksi secara individual yang mengacu pada kriteria, target dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Kontrak Manajemen masing-masing anggota Direksi.
d) Membuat rencana kerja mengenai telaahan terhadap pengusulan remunerasi Direksi.
e) Menyempurnakan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko.

3) Direksi
a) Menyempurnakan Kebijakan tentang Standar Pelayanan Minimal dengan mencantumkan kompensasi dalam hal Standar Pelayanan Minimal tidak terpenuhi.
b) Mengoptimalkan *Assesment* Risiko atas Pengadaan Barang dan Jasa serta melaksanakan rekomendasi terkait Audit Operasional.
c) Menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil *Assessment* Risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya.
d) Merespon pemberitaan yang bersifat negatif dengan cepat dan akurat agar citra positif perusahaan terjaga.
e) Direksi selaku Pemegang Saham PT Binajasa Abadikarya agar menetapkan kebijakan tertulis remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan berdasarkan formula yang ditetapkan.
f) Menandatangani Pakta Integritas atas setiap tindakan transaksional yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
g) Memenuhi kebutuhan tenaga auditor sesuai dengan analisis beban kerja.
h) Meningkatkan pelatihan auditor SPI melalui pendidikan profesional yang berkelanjutan.
i) Meningkatkan jumlah Insan Jamsostek yang menandatangani Pakta Integritas dan Antisuap.
j) Menyusun dan menyampaikan laporan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan kepada KPK.
k) Memberikan sanksi/teguran tertulis kepada pejabat wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN.
l) Melengkapi analisa kinerja industri sejenis dari aspek tingkat kesehatan dan kontrak manajemen secara komprehensif dengan memperhatikan *Second Opinion* dari pihak independen.
m) Menetapkan dan melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

d. Perbandingan Hasil *Assessment*

Hasil capaian *assessment* penerapan GCG selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETE	BOBOT	HASIL ASSESSMENT				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Yang Baik secara berkelanjutan	7,00	8,51	8,51	9,45	6,56	6,69
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	6,86	6,90	6,82	8,15	8,18
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	30,19	32,45	32,02	32,92	33,24
4	Direksi	35,00	30,35	30,92	31,52	33,12	33,58
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	7,00	7,00	7,00	8,97	8,97
6	Aspek Lainnya	5,00	8,00	7,88	8,00	4,75	4,38
	Skor Keseluruhan	100,00	90,91	93,66	94,81	94,47	95,04
	Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Perspektif Jamsostek Bersih

Edukasi anti korupsi serta gratifikasi terejawantahkan dalam *Internal Governance Award*

Dalam dekade 10 tahun terakhir perusahaan telah menunjukan keberadaannya dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, hal ini terkristalisasi dari peningkatan hasil penilaian *Assessment GCG*, baik *assessment GCG* yang dilaksanakan oleh konsultan independen, maupun *self assessment* yang dilaksanakan oleh Biro Pengawasan Intern.

Pada era transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, salah satu strategi perusahaan adalah menitik beratkan kepada pembentukan infrastruktur GCG dan kepedulian serta perubahan perilaku seluruh Insan Jamsostek dalam perspektif antikorupsi, antisuap dan gratifikasi untuk mendorong Jamsotek bersih.

Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/GCG pada BUMN
2. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE -05/MBU/2013 tanggal 30 September 2013 tentang roadmap menuju BUMN Bersih.
4. Surat Menteri BUMN Nomor : S-684/MBU/2013 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Persiapan Survai BUMN Bersih.
5. Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/373/122011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan Direktur Umum dan SDM selaku Penanggung jawab Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Sosialisasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Penandatanganan Pakta Integritas Antisuap

Mengulangi sosialisasi GCG yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 kepada seluruh Insan Jamsostek, dan dilandasi dengan penyempurnaan infrastruktur GCG yang mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / GCG pada BUMN dan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, maka pada tahun 2013 dilakukan sosialisasi kembali terhadap seluruh infrastruktur GCG secara masif kepada seluruh Insan Jamsostek.

Workshop GCG for Executive

Pelaksanaan *workshop GCG for Executive* di Jakarta pada tanggal 22 – 23 Juli 2013 yang dihadiri oleh 50 (lima puluh) peserta dari Kantor Pusat/Wilayah/Cabang, dengan instruktur dari internal perusahaan dan narasumber dari eksternal perusahaan.

a. Materi *Workshop*

Materi workshop meliputi seluruh infrastruktur GCG dengan penekanan khusus kepada materi korupsi, suap, gratifikasi dan *fraud control system* yang meliputi :

No	Materi	Instruktur/Fasilitator
1.	Pengarahan Direksi	Direktur Umum & SDM
2.	Pengarahan Dewan Komisaris	Komisaris
3.	Kebijakan Gratifikasi & LHKPN	KPK
4.	Fraud Control System	BPKP
5.	GCG Highlight	Komite GCG
6.	Pedoman GCG (GCG Code)	Komite GCG
7.	Pola Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual)	Komite GCG
8.	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)	Komite GCG
9.	Pedoman Benturan Kepentingan	Komite GCG
10.	Pedoman Kepatuhan LHKPN	Komite GCG
11.	Pedoman Pengelolaan Gratifikasi	Komite GCG
12.	Pedoman Pengendalian Informasi	Komite GCG
13.	Sistem Pengendalian Intern	Komite GCG
14.	Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran	Komite GCG

b. Kesimpulan/Hasil Yang Dicapai
1) Atas hasil test tingkat pemahaman GCG diperoleh 5 (lima) peserta terbaik.
2) Rata-rata tingkat pemahaman GCG dari 50 (lima puluh) peserta sebesar 7,61 (interval nilai tertinggi 9,80 dan terendah 5,00).
3) Melakukan penilaian terhadap instruktur/ fasilitator sosialisasi GCG dengan 3 (tiga) instruktur/fasilitator terbaik.
4) Menetapkan 16 (enam belas) kader GCG untuk melaksanakan sosialisasi GCG kepada seluruh unit kerja secara keberlanjutan.

Sosialisasi GCG

Sosialisasi GCG dilaksanakan secara masif oleh kader GCG yang telah mengikuti *workshop GCG for Executive* pada seluruh unit kerja, yang dilanjutkan dengan penandatanganan kembali Pakta Integritas dan Antisuap serta melakukan evaluasi tingkat pemahaman karyawan, dimana karyawan yang telah mengikuti sosialisasi sebesar 2.701 karyawan dari 3.055 Karyawan atau 88,41%, sedangkan karyawan yang menandatangani Pakta Integritas dan Antisuap sebesar 2.717 dari 3.055 karyawan atau sebesar 88,94% dengan posisi sebagai berikut :

No.	Unit Kerja	Jumlah Karyawan	Jumlah Peserta Mengikuti Sosialisasi	Nilai Rata-Rata Pemahaman	Jumlah Karyawan TTD Pakta Integritas
1.	Kanwil Sumbagut	248	222	83.40	243
2.	Kanwil Sumbarriau	246	239	84.72	245
3.	Kanwil Sumbagsel	197	92	73.02	118
4.	Kanwil DKI Jakarta	426	389	97.65	256
5.	Kanwil Banten	129	124	81.99	129
6.	Kanwil Jabar	327	302	95.45	322
7.	Kanwil Jateng – DIY	256	253	84.77	256
8.	Kanwil Jatimbanusra	366	351	86.37	360
9.	Kanwil Kalimantan	235	196	80.82	214
10.	Kanwil Sulawesi	139	130	83.27	130
11.	Kanwil Maluku – Papua	88	70	82.32	69
12.	Kantor Pusat	398	333	83.32	375
	Jumlah	**3.055**	**2.701**	**84.76**	**2.717**

Diklat Persiapan Kerja/Induksi kepada Calon Karyawan

Laporan Penyelenggaraan Diklat Persiapan Kerja (DPK) kepada Calon Karyawan Gelombang I–V Tahun 2013 sebesar 670 Calon karyawan yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi.

a. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum penyelenggaraan Diklat Persiapan Kerja (DPK) PT Jamsostek (Persero) Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1) Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/248/122006 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Karyawan PT Jamsostek (Persero).
2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2013 – 2015 BAB III pasal 12 tentang Persyaratan Penerimaan Karyawan.

b. Waktu dan Tempat

Diklat Persiapan Kerja (DPK) Gelombang I – V berlangsung dari tanggal 19 Agustus s.d. 05 Nopember 2013 bertempat di Gedung YTKI Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta. Pendidikan dan Pelatihan Gelombang I – III berlangsung selama 11 (sebelas) hari/gelombang dan untuk Gelombang IV – V berlangsung selama 7 (tujuh) hari/gelombang, dengan rincian sebagai berikut :
1) Dinamika kelompok/kegiatan di luar kelas selama 1 (satu) hari yang bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur dan Ragunan Jakarta.
2) Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas selama 10 (sepuluh) hari untuk Gelombang I – III dan 6 (enam) hari untuk Gelombang IV – V, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Gelombang	Jumlah	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1.	I	138	Gedung YTKI Jakarta	19 s/d 29 Agustus 2013
2.	II	138		30 Agustus s/d 9 September 2013
3.	III	124		10 s/d 20 September 2013
4.	IV	135		22 s/d 28 Oktober 2013
5.	V	135		30 Oktober s/d 5 Nopember 2013
	Jumlah	**670**		

c. Materi diklat meliputi infrastruktur GCG secara highlight dengan penekanan materi diklat terhadap pedoman perilaku, korupsi, suap dan gratifikasi.

d. Peserta Diklat
Diklat Persiapan Kerja (DPK) Gelombang I – V tahun 2013 oleh 670 peserta yang berasal dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang secara khusus direkrut di wilayah Medan, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan dan Makassar yang saat ini telah ditempatkan di seluruh daerah operasional PT Jamsostek (Persero).

Diklat Kepemimpinan Madya

Laporan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Madya Angkatan XIX dan XX yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi, khususnya yang terkait dengan materi GCG *highlight*, korupsi, suap dan gratifikasi.

a. Dasar Pelaksanaan
Sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Madya Angkatan XIX dan XX PT Jamsostek (Persero) tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1) Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/248/122006 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Karyawan PT Jamsostek (Persero).
2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2013 – 2015 pasal 19 tentang Promosi Karyawan dan pasal 60 tentang Pendidikan dan Pelatihan.
3) Surat Perintah Direktur Umum & SDM Nomor: SPRIN/379/062013 tanggal 05 Juni 2013 tentang Peserta Diklat Kepemimpinan Madya angkatan XIX dan XX.

b. Waktu dan Tempat
Diklat Kepemimpinan Madya (DKMD) angkatan XIX dan XX berlangsung dari tanggal 10 s.d. 17 Juni 2013 bertempat di Hotel Aryaduta Semanggi, Jl. Garnisun Dalam No. 8 Karet Semanggi, Jakarta. Diklat dimaksud dilaksanakan selama 8 (delapan) hari, dengan rincian sebagai berikut :
1) Dinamika kelompok/kegiatan di luar kelas selama 1 (satu) hari yang bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta.
2) Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas selama 7 (tujuh) hari.

c. Peserta Diklat
Diklat Kepemimpinan Madya Angkatan XIX dan XX diikuti oleh 74 peserta yang berasal dari Kantor Pusat serta Kantor Cabang di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

No	Asal Peserta	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kantor Pusat	8 Orang	11
2.	Kanwil Sumbagut	5 Orang	7
3.	Kanwil Sumbariau	4 Orang	5
4.	Kanwil Sumbagsel	5 Orang	7
5.	Kanwil DKI Jakarta	9 Orang	12
6.	Kanwil Banten	1 Orang	2
7.	Kanwil Jabar	11 Orang	15
8.	Kanwil Jateng & DIY	7 Orang	9
9.	Kanwil Jatimnusra	14 Orang	19
10.	Kanwil Kalimantan	4 Orang	5
11.	Kanwil Sulawesi	4 Orang	5
12	Kanwil Maluku Papua	2 Orang	3
	Total	**74 Orang**	**100**

Penandatanganan Pakta Integritas dan Antisuap

Dalam rangka meningkatkan komitmen Mitra Kerja atas gerakan perusahaan untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, nepotisme, suap dan gratifikasi selama tahun 2013 maka Mitra Kerja telah menandatangani Pakta Integritas dan Antisuap sebanyak 227 Mitra Kerja. Mitra Kerja yang menandatangani Pakta Integritas dan Antisuap terdiri dari Mitra Kerja yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa termasuk Mitra Kerja Investasi di seluruh unit kerja perusahaan dengan posisi sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Jumlah Kerja Mitra
1.	Kanwil Sumbagut	24
2.	Kanwil Sumbarriau	26
3.	Kanwil Sumbagsel	0
4.	Kanwil DKI Jakarta	8
5.	Kanwil Banten	13
6.	Kanwil Jabar	23
7.	Kanwil Jateng – DIY	26
8.	Kanwil Jatimbanusra	43
9.	Kanwil Kalimantan	18
10.	Kanwil Sulawesi	12
11.	Kanwil Maluku – Papua	2
12.	Kantor Pusat	32
	Jumlah	**227**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Menyadari akan arti pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan telah mengadakan *workshop Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan tujuan agar para pengambil keputusan dan pengelola tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat memahami:

- Kondisi makro tentang bumi, dampak lingkungan dan sosial akibat kegiatan operasi perusahaan.
- Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam arti luas merespon isu berkelanjutan dan mengelola secara efektif.
- Kegunaan dan arti laporan berkelanjutan, penerapan di Indonesia dan negara lain.
- Struktur laporan berkelanjutan sesuai dengan pedoman internasional yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI)
- Indikator dan identifikasi kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial (ELS) yang akan diterapkan dalam laporan berkelanjutan.

a. Dasar Pelaksanaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya tanggung jawab sosial dan lingkungan bahwa :

1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2) Perseroan berkewajiban untuk menganggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepesertaan kepatutan dan kewajaran.
3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4) Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
5) TJSL yang dilakukan oleh perseroan berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6) Pelaksanaan TJSL dilakukan didalam dan diluar perseroan
7) Kewajiban TJSL disusun dalam rencana kerja tahunan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
8) Realisasi anggaran TJSL diperhitungkan sebagai biaya Perseroan
9) Pelaksanaan TJSL wajib dimuat dalam laporan tahunan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

10) Penegasan pengaturan mengenai sanksi
11) Perseroan dapat menerima penghargaan dari instansi yang terkait jika telah melaksanakan TJSL yang diwajibkan juga berperan secara moral.

b. Pelaksanaan
Workshop CSR dilaksanakan di Bandung pada tanggal 20 Desember 2013 yang dihadiri oleh 25 peserta dari Komite GCG dan Biro Sekretaris Perusahaan.

c. Materi Workshop meliputi :
1) Manajemen CSR
2) Laporan berkelanjutan (*sustainability*)
3) Struktur laporan berkelanjutan
4) Indikator kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial (ELS)

d. Hasil diskusi tentang antisipasi implementasi CSR di PT Jamsostek (Persero) atau BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

No	Kategori/Sub Kategori	Aspek	Indikator GRI
1.	Indikator Ekonomi	**Aspek Kinerja Ekonomi :** Nilai ekonomi langsung yang telah dibuat dan didistribusikan.	G4-EC1
		Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung : Pengembangan dan dampak dari infrastruktur investasi dan pelayanan yang mendukung.	G4-EC7
2.	Indikator Lingkungan	**Aspek Energi :** Pemakaian energi dalam organisasi.	G4-EN3
3.	Indikator Sosial Praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak	**Aspek Pekerjaan :** Jumlah total dan tingkatan dari karyawan baru yang diterima dan perputaran (mutasi) karyawan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan daerah.	G4-LA1
		Aspek Pelatihan dan Pendidikan : Rata-rata jam pelaksanaan pelatihan per tahun per karyawan berdasarkan jenis kelamin & kategori karyawan	G4-LA9
	Hak Asasi Manusia	**Aspek Kebebasan dari Berserikat dan Berunding Bersama :** Pengoperasian dan mengidentifikasikan pemasok dimana hak untuk menjalankan kebebasan berserikat dan perundingan bersama dapat dilanggar atau pada risiko yang signifikan dan tindakan yang dapat diambil untuk mendukung kebebasan ini.	G4-HR4
		Aspek Pelatihan Keamanan : Persentase dari tenaga keamanan	G4-HR7

No	Kategori/Sub Kategori	Aspek	Indikator GRI
		yang dilatih dalam kebijakan organisasi Hak Asasi Manusia atau prosedur yang relevan terhadap operasi itu sendiri.	
	Masyarakat	**Aspek Masyarakat Lokal :** Persentase dari pengoperasian yang diimplementasikan melalui gabungan dari komunitas lokal, dampaknya dan program pengembangan.	G4-SO1
		Aspek Anti Korupsi : Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan Anti Korupsi dan prosedurnya.	G4-SO4
	Tanggung Jawab Produk	**Aspek Produk dan Layanan Pelabelan :** Hasil survei berdasarkan pengukuran data kepuasan pelanggan.	G4-PR5
		Aspek Komunikasi Pemasaran : Penjualan dari produk yang kurang memenuhi standar.	G4-PR6

Pengendalian Kecurangan

Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaksanakan *diagnostic assessment fraud* dalam bentuk pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi *fraud*.

a. Dasar pelaksanaan
   1) Kerangka acuan (*term of reference*) penyusunan fraud control plan PT Jamsostek (Persero) tahun 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) dan Direktur Investigasi BUMN dan BUMD, pada bulan September 2013.
   2) Surat tugas Direktur Investigasi BUMN dan BUMD No: ST-141/D602/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang *Asistensi Diagnostic Assessment* pada PT Jamsostek (Persero).

b. Pokok-pokok capaian *diagnostic assessment fraud* capaian adalah sebagai berikut:
   1) Risiko terjadinya *fraud* pada perusahaan dengan posisi risiko *fraud* sedang karena Program Evaluasi dikategorikan Cukup Memadai dan *Fraud Risk Assesment* dikategorikan Cukup Berisiko.
   2) Hasil penilaian dengan menggunakan Program Evaluasi terhadap eksistensi dan implementasi dari 10 atribut *Fraud Control Plan* secara keseluruhan dikategorikan Cukup Memadai
   3) Hasil penilaian dengan menggunakan media *Fraud Risk Assesment* dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian pada PT Jamsostek (Persero) dikategorikan Cukup Berisiko dengan nilai 0,95.
   4) Nilai rata-rata hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner secara keseluruhan adalah 5,05 yang menunjukkan persepsi bahwa para pegawai mengetahui telah ada pengendalian *fraud* yang diterapkan oleh PT Jamsostek (Persero).

Diagnostic Assessment Fraud

Berdasarkan hasil *diagnostic assessment fraud* yang dilaksanakan oleh BPKP), dengan menggunakan Program Evaluasi, penilaian Risiko *Fraud* (*Fraud Risk Assessment*), dan Kuisioner terhadap pelaksanaan *Fraud Control Plan* PT Jamsostek (Persero), sebagai berikut:

No	Atribut	Eksistensi		Implementasi		Simpulan		
		Ada	Tidak	Ya	Tidak	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai
1	Kebijakan Anti *Fraud*	8	3	8	3		√	
2	Struktur Pertanggungjawaban	5	3	3	5		√	
3	Penilaian Risiko *Fraud*	7	1	7	1		√	
4	Kepedulian Pegawai	6	1	7	0		√	
5	Kepedulian Pelanggan & Masyarakat	6	3	6	3		√	
6	Sistem Pelaporan *Fraud*	8	1	6	3		√	
7	Perlindungan Pelapor	4	2	3	3		√	
8	Pengungkapan kepada Pihak Eksternal	0	4	0	4			√
9	Prosedur Investigasi	7	3	7	3		√	
10	Standar Perilaku dan Disiplin	7	0	7	0	√		
	Jumlah	**58**	**21**	**54**	**25**		√	

a. Rekomendasi

Berdasarkan hasil *diagnostic assesment*, direkomendasikan kepada Direksi PT Jamsostek (Persero) agar:

1) Menyusun strategi, rencana kerja, dan pedoman pengendalian kecurangan (*fraud control manual*) secara komprehensif, sehingga kebijakan dan kegiatan perusahaan terkait pengendalian kecurangan dalam bermacam-macam unsur yang berbeda dapat berjalan secara terintegrasi.
2) Menyusun indikator yang tepat untuk mengukur efektivitas kegiatan kepedulian atas *fraud* dan perubahan budaya yang mengarah kepada sikap anti *fraud.*
3) Memasukkan muatan materi tentang kepedulian terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* dalam sosialisasi ke perusahaan peserta Jamsostek.
4) Bersikap terbuka untuk mempublikasikan informasi tentang komitmen dan kepedulian perusahaan terhadap pencegahan, pendeteksian, dan penanganan fraud, termasuk juga pemberian penghargaan kepada pelapor kecurangan.
5) Memantau kepedulian *stakeholders* melalui survei atau cara lain untuk menentukan apakah upaya perubahan kepedulian dan sikap telah efektif dalam menangkal atau mendeteksi kejadian *fraud* yang terjadi dari luar organisasi.
6) Mempublikasikan etika pengadaan barang dan jasa, khususnya berkaitan dengan proses tender.
7) Menetapkan standar waktu tingkat kesegeraan atas pengaduan suatu kasus yang dilaporkan.
8) Menginformasikan posisi kasus terakhir kepada pelapor, termasuk alasan pemberhentian penanganan suatu kasus.
9) Mengatur mekanisme tentang tata cara pemberian perlindungan bagi pelapor, baik internal maupun eksternal, yang merasa dirinya terancam atau dirugikan.
10) Menyusun mekanisme pelaporan kejadian fraud kepada pihak luar, seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau lembaga lain yang berwenang.
11) Menyempurnakan dan mensinergikan prosedur (mekanisme) audit investigasi dengan prosedur pengenaan sanksi untuk menghindari pembahasan berulang dan rekomendasi yang selalu berganti serta waktu pembahasan yang lama.
12) Mengintegrasikan fungsi Biro Manajemen Risiko, Biro Kepatuhan dan Hukum, dan Biro Pengawasan Intern dalam penanganan kasus *fraud*.
13) Memberikan pelatihan yang tepat bagi pegawai dalam fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum, dan Pengawasan Intern untuk meningkatkan kompetensi dibidang penanganan *fraud*.

14) Melakukan *review* secara regular atas Pedoman Audit Khusus yang telah dimiliki.
15) Membuat *database* (sistem informasi manajemen) keterjadian *fraud*.
16) Mengatur batas waktu penutupan akses terhadap sistem komputer, terutama bagi karyawan yang bekerja di luar jam kerja dan karyawan yang akan diberhentikan atau mengajukan pemberhentian.
17) Meninjau kembali struktur pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) yang independen terhadap kepentingan manajemen PT Jamsostek (Persero).

Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi sebagai salah satu pilar gerakan *roadmap* Jamsostek bersih telah mulai dikumandangkan dalam lingkungan perusahaan, dengan tahap awal bahwa anggota Direksi dan pejabat jenjang 1 (satu) telah menjadi *role model* untuk melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK.

Sesuai dengan hasil pencerahan dari Direktur Gratifikasi KPK, perusahaan tengah melakukan kajian untk membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dengan harapan bahwa seluruh Insan Jamsostek sangat peduli untuk menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK.

a. Dasar Pelaksanaan
   1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
   2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
   3) Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) No: KEP/485/122012, tanggal 20 Desember 2012 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Jamsostek (Persero);
   4) Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) No: KEP/481/122012, tanggal 20 Desember 2012, Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Jamsostek (Persero)

b. Posisi Laporan Gratifikasi
   1) Perusahaan telah menyediakan Lemari gratifikasi untuk menampung penerimaan barang dalam bentuk gratifikasi (non material) yang belum dilaporkan ke KPK, yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Buku	1
2	Topi	1
3	Bola Golf	1
Total		**3**

   2) Direktur Umum & SDM telah melaporkan ke KPK atas gratifikasi yang diterima kepada KPK tanggal 10 Desember 2013.
   3) Terdapat 1 (satu) pejabat yang telah melaporkan gratifikasi ke KPK dan telah mendapat penetapan berdasarkan laporan sebagai berikut :
      a) Laporan penerimaan gratifikasi dari Sdr. Dodo Suharto ke KPKpada tanggal 23 April dan 19 Agustus 2013.
      b) Keputusan Pimpinan KPK No: KEP-34/01-13/05/2013 dan No: KEP-42/01-131A/2013 tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi menjadi milik negara.

Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dalam rangka pelaksanaan *Roadmap* Jamsostek bersih, perusahaan telah melakukan identifikasi kembali terhadap kepatuhan wajib lapor dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Wajib lapor LHKPN yang telah ditetapkan oleh direksi meliputi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pejabat 2 (dua) tingkat dibawah Direksi yaitu pejabat struktural Kepala Divisi/Biro, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Urusan Kantor Pusat, Kepala Bagian Kantor wlayah dan Kepala Bidang Kantor Cabang.

a. Dasar Pelaksanaan
   1) Undang-Undang No. 28 Thn 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas KKN
   2) Undang-Undang No. 30 Thn 2002 Ttg. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   3) Undang-Undang Tahun 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
   4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
   5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
   6) Keputusan Direksi No: KEP/484/122012, tentang Pedoman Pengelolaan LHKPN

b. Posisi Laporan LHKPN per 31 Desember 2013
   Dari Wajib Lapor LHKPN Pejabat PT Jamsostek (Persero) sebanyak 179 orang yang sudah melaporkan LHKPN sebanyak 173 orang atau 96,65%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Wajib Lapor	Jumlah Wajib Lapor	Posisi				%
			Form - A	Form - B	BA Negara	Total	
1.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	7	7	-	-	7	100,00
2.	Direksi Board of Directors	7	7	-	-	7	100,00
	Sub Total	**14**	**14**	-	-	**14**	**100,00**
3.	Pejabat satu Tingkat di bawah Direksi						
	a. Kepala Divisi/Biro	21	21	-	-	21	100,00
	b. Kepala Kantor Wilayah	11	11	-	-	11	100,00
	c. Dewan Komisaris Anak Perusahaan	2	2	-	-	2	100,00
	d. Direksi Anak Perusahaan	2	-	-	-	0	0,00
	e. Staf Senior Manajemen	6	6	-	-	6	100,00
	Sub Total	**42**	**40**	-	-	**40**	**95,24**
4.	Pejabat satu Tingkat di bawah Direksi						
	a. Kepala Kantor Cabang	123	119	-	-	119	96,75
	b. Kepala Bagian	-	-	-	-	0	0,00
	c. Kepala Urusan	-	-	-	-	0	0,00
	d. Kepala Bidang	-	-	-	-	0	0,00
		123	**119**	-	-	**119**	**96,75**
		179	**173**	-	-	**173**	**96,65**

Kontribusi Manajemen Risiko Terhadap Perspektif Jamsostek Bersih

Penerapan manajemen risiko sebagai salah satu pilar struktur tata kelola perusahaan yang baik, telah berkontribusi terhadap pelaksanaan Jamsostek bersih dengan melakukan *self assessment* tehadap risiko utama unit kerja sebagai *risk owner* dengan capain skor tahun 2013 sebesar 2,7 dengan tingkat *maturity level* maksimal 4.

a. Dasar Pelaksanaan
Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Manajemen Risiko merupakan salah satu pilar dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Dalam rangka mendukung penerapan GCG, maka implementasi Manajemen Risiko di PT Jamsostek (Persero) juga dirancang agar dapat memenuhi prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness* (TARIF) dan menjadi bagian dari sistem pengendalian *fraud*.

b. Penerapan Manajemen Risiko untuk mendukung Jamsostek Bersih
Dalam mendukung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta tata kelola perusahaan yang bersih dari KKN dalam kerangka Manajemen Risiko, PT Jamsostek (Persero) menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Melekatkan kewajiban pengelolaan risiko-risiko perusahaan dalam deskripsi tugas (*job description*) SDM Perusahaan, khususnya pejabat struktural sebagai bentuk responsibilitas terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya.
2) Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan batasan risiko yang dapat diterima *Risk Appetite/ Tolerance* atas risiko-risiko utama perusahaan dan diinformasikan kepada seluruh karyawan/ unit kerja, sebagai bentuk transparansi dan responsibilitas Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan risiko perusahaan. Guna mendukung kampanye pengendalian *fraud*, antikorupsi, suap dan gratifikasi. Direksi PT Jamsostek (Persero) tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) terhadap risiko *fraud*.
3) Kajian risiko operasional, investasi dan keuangan yang merupakan opini independen terhadap unit kerja teknis dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan.
4) Identifikasi dan asesmen menggunakan metode *risk and control self assessment* yang dilakukan oleh *risk owner*. Masing-masing unit kerja sebagai *risk owner* dan penanganan risiko-risiko utama yang telah direncanakan mitigasinya, sehingga prinsip akuntabilitas dan *fairness* terhadap tanggung jawab pengelolaan risiko berjalan dengan baik.
5) Guna meningkatkan kualitas tata kelola korporat (*corporate governance*) yang mendorong penerapan roadmap BUMN/Jamsostek Bersih, Biro Manajemen Risiko terus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko perusahaan dengan terus meningkatkan kesadaran (*awareness*) seluruh karyawan terhadap pengelolaan risiko, mengembangkan kebijakan, prosedur dan alat bantu pengelolaan risiko, memperbaiki kualitas proses pengukuran dan pelaporan risiko serta menyusun dan melaksanakan *roadmap* pengembangan dan penerapan Manajemen Risiko Korporasi 2012 – 2017. Dengan melaksanakan program kerja sesuai *roadmap* tersebut, kematangan penerapan Manajemen Risiko yang saat ini mencapai skor 2,7 dengan tingkatan terstandarisasi, dapat mencapai tingkat kematangan 4 atau lebih dengan tingkatan terkelola dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola perusahaan yang bersih.

Internal Governance Award

Dalam rangka penerapan GCG dan roadmap Jamsostek Bersih, perusahaan telah melaksanakan *Internal Governance Award* yang diikuti oleh seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan dan menjadi salah satu indikator *Key Performance Indicator* unit kerja.

Penilaian *Internal Governance Award* dilaksanakan oleh Komite GCG sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan wawancara akhir dengan Unit kerja yang mendapat nominasi, sedangkan keputusan akhir ditetapkan oleh Direksi, dan diumumkan pada tanggal 5 Desember 2013 pada upacara hari ulang tahun Jamsostek.

a. Dasar Pelaksanaan
1) Surat Direksi PT. Jamostek (Persero) No: B/9443/092013 tentang *Internal Governance Award*
2) Surat Direksi PT. Jamostek (Persero) No: B/9444/092013 tentang Penerapan *Good Corporate Governance*.

b. Kriteria Penilaian
1) Kriteria Penilaian Kantor Wilayah dan Kantor Cabang

No.	KRITERIA	BOBOT
1.	Sosialisasi GCG	10%
2.	Tingkat Pemahaman GCG	5%
3.	Penandatanganan Pakta Integritas dan Anti Suap a. Insan Jamsostek b. Mitra Kerja	 10% 5%
4.	Partisipasi dalam sharing praktik GCG a. Laporan Gratifikasi b. Laporan LHKPN Formulir A c. Laporan LHKPN Formulir B	 5% 8% 7%
5.	Kontribusi karyawan dalam E-*Learning* GCG	10%
6.	Penetapan sanksi disiplin ringan	10%
7.	Temuan audit berkatagori *fraud*	30%
	TOTAL	**100%**

2) Kriteria Penilaian Divisi/Biro

No.	KRITERIA	BOBOT
1.	Sosialisasi GCG	10%
2.	Tingkat Pemahaman GCG	5%
3.	Penandatanganan Pakta Integritas dan Anti Suap a. Insan Jamsostek b. Mitra Kerja	 10% 5%
4.	Partisipasi dalam *sharing* praktik GCG a. Laporan Gratifikasi b. Laporan LHKPN Formulir A c. Laporan LHKPN Formulir B	 5% 7,5% 2,5%
5.	Kontribusi karyawan dalam E-*Learning* GCG	10%
6.	Capaian skor GCG Unit Kerja dan *Area of Improvement*	15%
7.	Penetapan sanksi disiplin ringan	10%
8.	Temuan audit berkatagori *fraud*	20%
	TOTAL	**100%**

c. Penetapan Pemenang

Berdasarkan hasil penilaian maka Direksi menetapkan pemenang untuk tiap kategori yaitu sebagai berikut:

NO	KANTOR CABANG	SKOR
1	KARIMUNJAWA	89,32
2	RIAU I	88,23
3	MEDAN	86,87

NO	KANTOR WILAYAH	SKOR
1	JATIMBANUSRA	78,91
2	JATENG DIY	76,79
3	SUMBARRIAU	76,45

NO	KANTOR PUSAT	SKOR
1	BIRO KEUANGAN	87,42
2	BIRO SEKRETARIS PERUSAHAAN	83,34
3	DIVISI PKP DAN KEMITRAAN	82,46

BEST OF THE BEST	SKOR
KACAB KARIMUNJAWA	89,32

Sistim Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)

Dasar Pembentukan

Sebagai wujud dari implementasi GCG dan menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih dari praktik-praktik KKN PT Jamsostek (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara berupaya menerapkan suatu strategi mitigasi terhadap potensi risiko dan praktik-praktik KKN melalui penerapan sistem pelaporan pelanggaran. Efektivitas yang dirasakan dari sistem ini adalah dapat mendeteksi tingkat kecurangan dengan waktu yang relatif singkat dibanding dengan cara lain, dan proses konfirmasi terhadap kebenaran laporan dapat dilakukan di internal PT Jamsostek (Persero) sebelum menjadi potensi risiko reputasi berupa isu-isu negatif yang mengganggu reputasi perusahaan. Sistem Pelaporan (*Whistle Blowing System*) mengatur budaya untuk melaporkan suatu penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan, karena umumnya pelapor tidak berani menyampaikan hal-hal yang diketahui, antara lain takut kehilangan pekerjaan, promosi, dan dihindari oleh rekan-rekan sekerja. Sebagai langkah untuk efektivitas pelaksanaan sistem pelaporan dan meningkatkan *awareness* terhadap budaya ini PT Jamsostek (Persero) melakukan upaya-upaya sosialisasi tentang pemahaman mekanisme sistem ini dan komitmen perusahaan untuk memberikan jaminan sesuai Undang Undang Nomor: 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Upaya-upaya lain untuk meningkatkan tingkat *awareness* dan ketajaman dalam mengamati gejala-gejala pemicu potensi-potensi praktik tindakan KKN, dilaksanakan *Workshop* dan Pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Studi Prakarsa Anti Korupsi oleh KPK yang menjadikan PT Jamsostek (Persero) Sebagai *Pilot Project*.

Ruang Lingkup *Whistle Blowing System*

a. Permasalahan Akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan.
b. Permasalahan yang menyangkut independensi audit, baik oleh Internal Audit maupun oleh Eksternal Audit.
c. Pelanggaran peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Jamsostek maupun yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Badan Usaha Milik Negara/lainnya, yang meliputi antara lain:
   1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
   2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
   3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
   4) Peraturan internal yang berpotensi kerugian bagi PT Jamsostek (Persero) baik ketentuan internal dalam bentuk Keputusan Direksi dan turunannya pada umumnya dan yang terkait dengan infrastruktur *Good Corporate Governance* (GCG) pada khususnya yang meliputi :
      - Pedoman GCG
      - Pedoman Perilaku
      - *Board Manual*
      - Pedoman Benturan Kepentingan
      - PKB antara Manajemen Perusahaan dengan Serikat Pekerja Jamsostek (SPJ)
      - *Standard Operating Procedure* (SOP)
   5) Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap perusahaan (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
   6) Perilaku Insan Jamsostek yang tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi perusahaan dan/atau yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Struktur Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran

PT Jamsostek (Persero) membentuk Komite Integritas dan Antisuap sebagai Unit Pengelola SPP berdasarkan Keputtusan Direksi nomor KEP/489/122012 tentang pembentukan dan pengangkatan Komite Integritas dan Antisuap PT Jamsostek (Persero), terdiri dari :

Susunan Anggota Komite Integritas dan Anti Suap	
Ketua	Direktur Umum dan SDM
Sekretaris	Kepala Biro Pengawasan Intern
Anggota	Kepala Biro Kepatuhan dan Hukum
	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
	Ketua Umum Serikat Pekerja

Sekretaris Komite Integritas dan Antisuap bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi Komite Integritas dan Antisuap, termasuk di dalamnya pengelolaan laporan pelanggaran Pakta Integritas dan Antisuap dan administrasi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan efektivitas kegiatan Komite Integritas dan Antisuap.

a. Tugas Pokok
Membantu terlaksananya Pakta Integritas dan Antisuap secara baik dilingkungan PT Jamsostek (Persero).

b. Fungsi
1) Secara pro aktif memantau sistem pelaporan pelanggaran.
2) Mendorong dilaksanakannya analisis rencana tindak pencegahan Korupsi.
3) Memonitor tindak lanjut penanganan atas laporan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Insan Jamsostek.
4) Menjamin kerahasiaan identitas saksi/ pelapor pelanggaran Pakta Integritas dan Antisuap.

c. Wewenang dan Tanggung Jawab
1) Melakukan konfirmasi, klarifikasi terhadap informasi/masukan laporan pelanggaran Pakta Integritas dan Antisuap oleh pihak internal maupun pihak ekternal perusahaan dan merahasiakan identitas pelapor yang menyampaikan laporan pelanggaran Pakta Integritas dan Antisuap.
2) Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut laporan pelanggaran Pakta Integritas dan Antisuap kepada Direktur Utama.
3) Komite Integritas wajib membuat laporan triwulanan atas pengelolaan saluran pelaporan pelanggaran beserta tindak lanjutnya kepada Direktur Utama.

Saluran Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan menyediakan saluran penyampaian laporan / keluhan sebagai berikut :
a. Telepon : 08001392392
b. SMS : 08121292392
c. Email : integritas@jamsostek.co.id
d. Faxsimile : (021) 52901392
e. PO Box : 392 / JKTM 12700

Saluran pelaporan pelanggaran dimonitor setiap 2 (dua) minggu sekali oleh Komite Integritas.

Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran

Manajemen menjamin bahwa semua laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan baik. Pelanggaran yang berulang dan sistemik akan dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan, dengan mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai berikut:

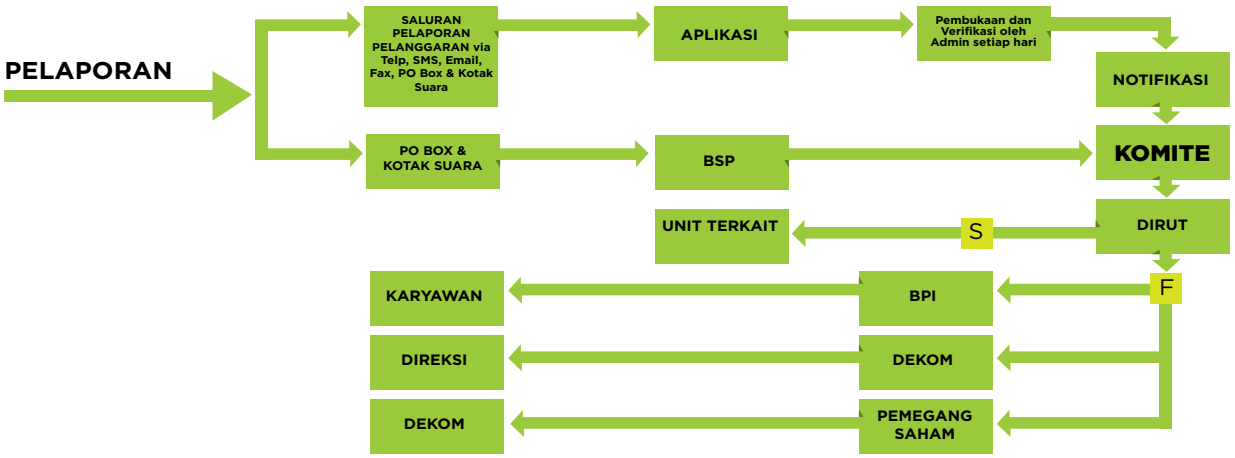

Kebijakan Perlindungan Pelapor

Manajemen berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan manajemen akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan SPP. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan sekaligus menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya. Perlindungan yang diberikan adalah terhadap perlakuan yang merugikan pelapor, seperti :
a. Pemecatan yang tidak adil;
b. Penurunan jabatan atau *grade*/golongan;

c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
d. Catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya;
e. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
f. Perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
g. Perlindungan terhadap harta pelapor;
h. Kerahasian identitas pelapor;
i. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor.
j. Perlindungan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti memberikan laporan palsu dan/atau fitnah.

Implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Pada tahun 2012 Biro Pengawasan Intern telah melaksanakan audit khusus sebanyak 7 penugasan untuk menindaklanjuti pengaduan yang diterima Perusahaan. Hasil audit telah ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi disiplin kepada 7 orang karyawan yaitu 4 orang hukuman disiplin sedang dan 3 orang hukuman disiplin berat. Meskipun pengaduan pelanggaran karyawan melalui saluran pelaporan pelanggaran tidak terlalu signifikan namun atas penerapan GCG pada umumnya dan sistem pelaporan pelanggaran pada khususnya memberikan dampak positif terhadap temuan auditor independen dan pelanggaran disiplin karyawan.

a. Jumlah Pengaduan selama tahun 2013

Selama periode tahun 2013, jumlah pengaduan yang diterima Saluran Pelaporan Pelanggaran adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah Pengaduan yang diterima Tahun 2013

No	Saluran	Klasifikasi			
		Pelanggaran	Pelayanan	*Garbage*	Total
1	SMS	35	148	151	334
2	E-mail	2	46	62	110
3	Telepon	0	7	100	107
4	Facsimile	0	0	0	0
5	PO Box	0	0	0	0
Total		**37**	**201**	**313**	**551**

Dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut :

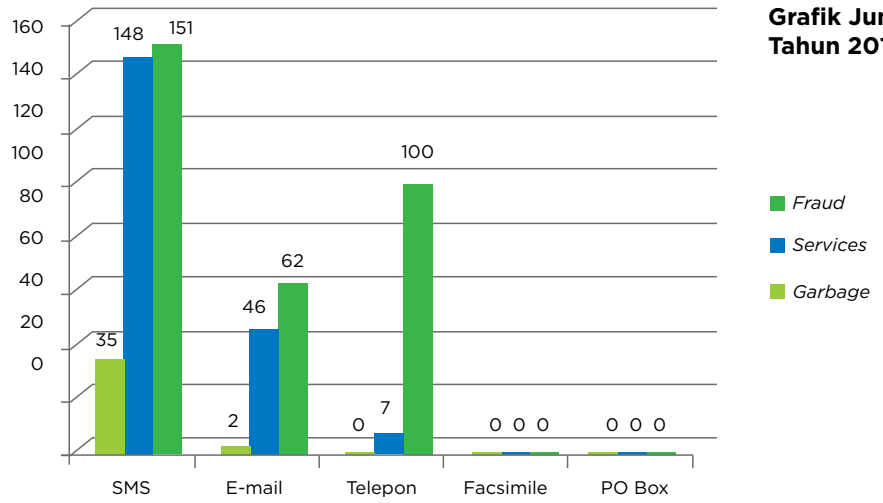

Grafik Jumlah Pengaduan yang diterima Tahun 2013

Dari grafik di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1) Data yang masuk dengan kategori garbage sejumlah 313 *data record*. Untuk antisipasi akan dikoordinasikan dengan Biro Operasional Teknologi Informasi.
2) Data pengaduan yang masuk sebanyak 37 data records dengan klasifikasi *fraud* dan 201 data records dengan klasifikasi *services*.

b. TindakLanjut selama tahun 2013

1) Klasifikasi Pelayanan (*Services*)
   Telah dikirimkan memo dari Biro Pengawasan Intern Selaku Sekretaris Komite Integritas dan Antisuap kepada Kepala Divisi pelayanan nomor : M/659/PI/092013, M/713/PI/102013 dan M/370/DIRUM&SDM/122013 tentang penyampaian pertanyaan peserta yang diterima saluran pelaporan pelanggaran.
2) Klasifikasi Pelanggaran (*Fraud*)
   Dari 37 *data records* yang masuk klasifikasi pelanggaran (*fraud*), dapat disimpulkan menjadi 11 kasus pelanggaran, dengan perincian sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Jumlah Kasus	Status Tindak Lanjut	
			Proses	Tuntas
1	Komite Integritas & Antisuap	2	2	0
2	Biro Sumber Daya Manusia	1	1	0
3	Kantor Wilayah Sumbagut	1	0	1
4	Kantor Wilayah DKI Jakarta	2	0	2
5	Kantor Wilayah Jateng & DIY	1	0	1
6	Kantor Wilayah Banten	2	1	1
7	Kantor Wilayah Jawa Barat	2	2	0
Total		**11**	**6**	**5**

Penilaian Jamsostek Bersih

Dalam rangka pelaksanaan *Roadmap* BUMN bersih, Direksi perusahaan telah menyatakan komitmen untuk berpartisipasi dan menyatakan kesanggupan serta sekaligus *sharing* atas penerapan GCG pada perusahaan yang telah diawali dengan penyusunan pedoman Antisuap pada tahun 2011, sebagai konsekuensi dari penunjukan Direktur Utama perusahaan sebagai Koordinator Komunitas pengusaha antisuap (KUPAS) BUMN.

Terlepas dari ketidak ikutan perusahaan dalam survey persepsi BUMN bersih, karena perusahaan telah beralih menjadi BPJS Ketenagakerjaan, namun terhadap muatan BUMN bersih dengan indikator dan parameter yang sama telah dilakukan *self assessment* untuk menilai sampai sejauh mana penerapan Jamsostek bersih.

a. Dasar Pelaksanaan

1) Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE -05/MBU/2013 tanggal 30 September 2013 tentang *roadmap* menuju BUMN Bersih.
2) Surat Menteri BUMN Nomor : S-684/MBU/2013 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Persiapan Survai BUMN Bersih
3) Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: S-184/D5/02/2014, tanggal 4 Februari 2014 tentang penyampaian dokumen aplikasi dalam rangka penilaian BUMN bersih

b. Evaluasi *Roadmap* Jamsostek Bersih

Berdasarkan kriteria Roadmap BUMN Bersih, maka PT Jamsostek (Persero) telah melakukan tindak lanjut sesuai dengan kondisi yang ada, dan dilakukan *self assessment* oleh Komite GCG dengan posisi penyelesaian tanggal 31 Desember 2013 sebesar 92.38 dengan rincian sebagai berikut:

Kriteria	Keterangan	Nilai
1	Komitmen untuk melaksanakan *Board Manual* bagi Direksi dan Dewan komisaris/Dewan Pengawas serta *Code of Conduct* bagi seluruh insan perusahaan BUMN yang bersih dan bebas dari gratifikasi, *fraud*, dan KKN	82,14
2	Komitmen untuk memberikan keteladanan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam rangka pelaksanaan BUMN Bersih	96,00
3	Komitmen untuk mengefektifkan pengendalian gratifikasi	93,33
4	Komitmen untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan tidak terindikasi gratifikasi	93,75
5	Komitmen untuk melaksanakan rekrutmen, penempatan, promosi dan mutasi karyawan secara fair	91,67
6	Komitmen untuk menerapkan sistem remunerasi berdasarkan penilaian kinerja yang objektif dan terukur	85,00
7	Komitmen untuk melaksanakan pengadaan yang fair, efesien dan tidak terindikasi gratifikasi	93,74
8	Komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akurasi laporan keuangan dan laporan manajemen, serta kewajiban transpafansi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	100,00
9	Komitmen untuk menerapkan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran	95,00
10	Komitmen untuk melaksanakan pelayanan minimum bagi BUMN yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum *(public service obligation)* dan BUMN yang mengelola infrastuktur	91,00
11	Komitmen untuk mengefektifkan sisetem pelaporan atas dugaan pelanggaran *(whistle blowing system)*	86,00
12	Komitmen untuk melakukan pemantauan kepatuhan jajaran BUMN pada tiga jenjang jabatan perusahaan dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK	93,33
13	Komitmen-komitmen lain dalam rangka mewujudkan BUMN Bersih	100,00
	Nilai Rata-rata	**92,38**

LAPORAN KEUANGAN

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2013 dan 2012

Dengan Penerbitan Laporan Audited Independen atas Laporan Keuangan 31 Desember 2013, Laporan Keuangan Penutup 31 Desember 2013 dan Laporan Keuangan Pembuka 1 Januari 2014, sebagai Landasan yang Kokoh untuk menuju BPJS Ketenagakerjaan

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi Konsolidasian	4
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	6
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	7
Laporan Arus Kas Konsolidasian	8
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	10

Informasi Tambahan:

Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	Lampiran I
Laporan Laba Rugi (Entitas Induk)	Lampiran II
Laporan Laba Rugi Komprehensif (Entitas Induk)	Lampiran III
Laporan Perubahaan Ekuitas (Entitas Induk)	Lampiran IV
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	Lampiran V

JAMSOSTEK
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Elvyn G. Masassya
   Alamat Kantor : Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Pondok Jaya V/4C1.1, Mampang Prapatan Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : 021 – 5207797
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Herdy Trisanto
   Alamat Kantor : Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Jati No. 41 RT/RW 5/6 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : 021-5207797
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Januari 2014

Direktur Utama

Elvyn G. Masassya

Direktur Keuangan

Herdy Trisanto

Nomor : R/009.AGA/rhp.2/2014

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) ("Perusahaan"), Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus (Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

RSM AAJ Associates is a member of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and advisory firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence number :
Minister of Finance : 1048/KM.1/2009
Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) : 405
Bank Indonesia : 063

Branch Office :
Jl. Mayjen Sungkono
Komplek Darmo Park I Blok III B 17-19
Surabaya 60256 - Indonesia

RSM AAJ
Audit • Tax • Advisory

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian tersebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus (Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta) tanggal 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Seperti diungkapkan pada Catatan 1.a atas laporan keuangan konsolidasian, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 ("UU No. 24") tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disebutkan bahwa PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014. Sesuai pasal 62 ayat 2 huruf a UU No. 24, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi, dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti diungkapkan pada Catatan 83.a.(iii) atas laporan keuangan konsolidasian, pada saat berlakunya UU No. 24, sesuai pasal 61 huruf c Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) sampai dengan berubahnya PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan ditugasi untuk menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Tenaga Kerja tanggal 27 Desember 2013 pasal 15 angka 4 dan 5 dinyatakan bahwa pada saat pengalihan aset PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) menjadi aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil pengalihan aset program PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) paling sedikit sebesar liabilitas kepada peserta. Pada tanggal 31 Desember 2013 jumlah aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban program Jaminan Pemeliharaan kesehatan yang akan diserahkan ke BPJS Kesehatan adalah masing-masing sebesar Rp 410.854.945.704.

Seperti diungkapkan pada Catatan 52.e atas laporan keuangan konsolidasian, Pada 31 Desember 2013, Perusahaan menyesuaikan aset pajak tangguhan yang berasal dari cadangan teknis JKK dan JKM sebesar Rp 1.370.393.684.333 ke cadangan umum. Pada saat PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014, dilakukan pemisahan aset untuk setiap program, dimana pada saat pemisahan aset, jumlah aset program sama dengan liabilitas program. Perubahan status program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan, per 1 Januari 2014 menjadi entitas nirlaba Dana Jaminan Sosial JKK dan JKM yang terpisah dari Perusahaan. Hasil pengelolaan program JKK dan JKM sampai dengan 31 Desember 2013 terakumulasi dalam saldo laba Perusahaan yang penggunaannya telah ditetapkan menjadi cadangan umum. Berdasarkan kondisi di atas, manajemen menyesuaikan aset pajak tangguhan ke cadangan umum.

Seperti diungkapkan pada Catatan 65 atas laporan keuangan konsolidasian, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Laporan Tahunan tahun buku 2012 tanggal 3 Mei 2013 telah disetujui reklasifikasi pos dana pengembangan Non JHT ke pos cadangan umum sebesar Rp 1.198.421.605.861.

RSM AAJ
Audit • Tax • Advisory

Hal-Hal lain

Seperti diungkapkan pada Catatan 83.a.(ii) atas laporan keuangan konsolidasian, pada saat berlakunya UU No. 24 sesuai pasal 62 angka 2 huruf d, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, paling lambat 1 Juli 2015.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit seksi 800 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal, disampaikan secara terpisah kepada manajemen masing-masing dalam laporan kami No. R/001.AAT/rhp/2014 dan No. R/002.AAT/rhp/2014 tanggal 15 Januari 2014.

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

Rudi Hartono Purba
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501

Jakarta, 15 Januari 2014

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK
DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	Catatan	2013 Rp	2012 Rp
Kas dan Setara Kas	3.d, 3.e, 5	1.141.056.650.093	569.755.106.176
Bank Investasi	3.e, 6	9.785.525.622	5.830.920.513
Deposito On Call (DOC)	3.e, 7	--	688.348.031.507
Deposito Berjangka	3.e, 8	40.179.996.691.000	41.049.377.491.000
Saham	3.e, 9	31.811.390.224.860	27.435.505.365.500
Reksadana	3.e, 10	11.767.088.603.686	9.558.352.290.051
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	3.e, 3.k, 11	1.559.187.236.653	1.386.039.516.962
Piutang Pendapatan Jatuh Tempo	3.e, 12	4.639.339.300	12.300.578.112
Piutang Investasi	3.e, 13	107.207.480.491	132.571.488.082
Uang Muka Kerja Pegawai	3.e, 14	11.756.349.377	6.410.834.890
Uang Muka Kesejahteraan Peserta	3.e, 15	13.150.812.500	--
Uang Muka Pajak	52.a	2.029.360.123	35.411.770.664
Beban Dibayar Dimuka	16	23.485.594.883	22.916.803.319
Piutang Iuran Non JHT - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.e, 17	101.949.621.383	51.239.610.913
Pinjaman Diberikan Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.e, 3.i, 18	492.098.733.108	330.074.548.457
Piutang Usaha - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.e, 3.j, 19	2.001.336.078	3.287.074.033
Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor	3.m, 20	6.458.587.255	6.190.932.359
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Bearagun Aset	3.e, 21	243.922.959.405	180.000.000.000
Sukuk	3.e, 22	5.792.911.678.126	3.928.703.584.623
Obligasi - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.e, 23	59.016.424.065.771	49.587.716.316.794
Penyertaan Langsung - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.e, 3.f, 24	30.813.767.448	30.813.767.448
Properti Investasi - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	3.g, 25	358.026.203.608	369.395.333.615
Aset Dimiliki Untuk Dijual	26	2.377.184	21.374.031
Aset Tetap - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	3.n, 27	582.425.121.653	421.599.045.591
Sarana Kesejahteraan Peserta Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	3.o, 28	160.926.289.198	73.234.521.249
Sarana Kesejahteraan Peserta Dalam Pengerjaan		304.629.791	95.236.521.294
Aset Tidak Berwujud	3.q, 29	11.950.135.062	12.638.246.567
Aset Pajak Tangguhan	3.ad, 52.e	271.830.073.331	1.495.992.985.633
Aset Lain	3.r, 30	30.308.900.627	43.487.436.794
JUMLAH ASET		**153.733.128.347.616**	**137.532.451.496.177**

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	2013 Rp	2012 Rp
LIABILITAS			
LIABILITAS KEPADA PESERTA			
Liabilitas JHT			
Liabilitas Program JHT			
Liabilitas JHT Siap Bayar	3.t, 31	1.862.173.192	1.714.350.724
Liabilitas JHT Jatuh Tempo	3.t, 3.v, 32	9.302.034.953.146	7.249.317.741.508
Hasil Pengembangan JHT	3.t, 33	10.704.238.075.469	9.718.790.150.504
Pengembalian Kepada Peserta JHT	3.t, 34	(10.704.238.075.469)	(9.718.790.150.504)
Liabilitas Jaminan Hari Tua Sesuai RSJHT	3.t, 35	125.357.753.508.487	100.744.721.448.886
Liabilitas Jaminan Hari Tua Kurang Bayar	3.t, 36	35.807.989.482	34.463.922.829
Liabilitas Jaminan Hari Tua Belum Selesai RSJHT	3.t, 37	28.178.254.253	16.161.735.108
Dana Pengembangan JHT	3.u, 38	2.323.888.992.475	8.272.781.992.143
Liabilitas Pengelolaan Program JHT			
Liabilitas Investasi JHT	3.t, 39	12.137.790.242	36.926.474.411
Pendapatan Diterima Dimuka Investasi JHT	3.t, 40	5.755.215.911	10.926.725.712
Selisih Penilaian Efek JHT	3.t, 41	(3.863.469.241.058)	1.975.096.642.560
Liabilitas Non JHT			
Liabilitas Program Non JHT			
Liabilitas Jaminan Non JHT	3.s, 42	8.424.192.889	30.282.897.226
Liabilitas Jaminan Diestimasi Non JHT	3.s, 43	58.975.781.391	11.257.169.195
Liabilitas Jaminan Belum Dilaporkan Non JHT	3.s, 44	176.011.984.984	157.258.430.232
Cadangan Teknis	3.x, 45	11.480.995.099.624	9.388.293.758.218
Dana Pengembangan Non JHT	46	110.530.896.679	1.419.242.451.741
Liabilitas Pengelolaan Program Non JHT			
Liabilitas Investasi Non JHT	47	484.507.383	525.631.362
Iuran Belum Rinci	3.w, 48	134.154.755.292	51.487.821.027
Iuran Diterima Dimuka	3.ab, 49	--	63.631.209
Iuran Karyawan	3.z, 50	11.001.301	295.790.418
Utang Usaha	3.e, 51	7.299.459.390	8.001.999.765
Utang Pajak	3.ad, 52b	366.985.861.608	106.703.609.498
Beban Akrual	3.e, 53	49.607.357.518	66.647.154.741
Pendapatan Diterima Dimuka	3.e, 54	3.302.016.750	3.232.580.376
Liabilitas Yang Masih Harus Dibayar	3.e, 55	136.770.413.184	248.245.290.181
Liabilitas Pembelian Aset	56	70.306.824.418	17.147.952.690
Jaminan Pihak Ketiga	57	28.569.457.706	25.343.171.106
Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Untuk Operasional	3.aa, 58	392.482.725.241	254.081.500.002
Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Telah Disalurkan	3.aa, 59	666.480.464.503	498.545.590.958
Liabilitas Imbalan Pascakerja	3.z, 60	483.125.094.687	344.792.951.485
Liabilitas Lain	61	3.626.075.447	1.716.368.466
Angsuran Belum Jelas Penyetor Program DPKP	3.aa, 62	1.152.597.380	615.419.151
Penyesuaian Saldo Pinjaman Diberikan Program DPKP	3.aa,63	--	4.708.307.553
Total Liabilitas		147.383.246.203.505	130.980.600.510.481

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

EKUITAS	Catatan	2013 Rp	2012 Rp
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - terdiri dari 8.000.000 saham dan 3.000.000 saham pada 31 Desember 2013 dan 2012 Dengan nilai Rp 1.000.000 per lembar saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - Terdiri dari 4.000.000 saham dan 1.500.000 saham pada 31 Desember 2013 dan 2012	64	4.000.000.000.000	1.500.000.000.000
Cadangan Umum	65	572.484.461.221	1.747.995.060.748
Cadangan Tujuan	66	863.211.054.227	588.211.054.227
Saldo Laba	67	2.287.642.937.018	2.121.461.478.945
Selisih Penilaian Efek - Dana Non JHT	68	(1.373.459.144.759)	594.180.468.866
		6.349.879.307.707	6.551.848.062.786
Kepentingan Non Pengendali	69	2.836.404	2.922.910
Jurnlah Ekuitas		6.349.882.144.111	6.551.850.985.696
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**153.733.128.347.616**	**137.532.451.496.177**

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2013 Rp	2012 Rp
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Iuran	3.ab, 70		
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)		2.365.021.248.278	1.731.531.738.620
Jaminan Kematian (JKM)		1.095.463.434.391	812.132.852.203
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)		3.188.235.583.429	1.786.808.954.109
Jasa Konstruksi		193.044.110.191	270.158.781.584
Jaminan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)		76.904.207.311	49.851.064.220
Jumlah Pendapatan Iuran		6.918.668.583.600	4.650.483.390.736
Pendapatan Operasional Anak Perusahaan	73	34.875.004.228	45.781.147.054
Jumlah Pendapatan Operasional		6.953.543.587.828	4.696.264.537.790
BEBAN JAMINAN	3.ab, 71		
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)		(563.442.819.487)	(506.807.062.772)
Jaminan Kematian (JKM)		(406.843.528.654)	(357.373.826.572)
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)		(1.957.532.291.154)	(1.168.333.698.683)
Jasa Konstruksi		(40.362.049.129)	(31.188.892.288)
Jaminan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)		(63.460.001.889)	(35.794.419.873)
Jumlah Beban Jaminan		(3.031.640.690.313)	(2.099.497.900.188)
BEBAN CADANGAN TEKNIS	3.x, 72		
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)		(1.897.185.870.334)	(1.001.675.850.351)
Jaminan Kematian (JKM)		(85.070.869.503)	(248.774.358.572)
Jasa Konstruksi		30.845.868.562	(45.516.978.212)
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)		(141.133.263.687)	(45.156.654.005)
Katastrofa		(45.024.300)	--
Jumlah Beban Cadangan Teknis		(2.092.589.159.262)	(1.341.123.841.140)
PENDAPATAN BERSIH IURAN		1.829.313.738.253	1.255.642.796.462
PENDAPATAN INVESTASI NON JHT	3.ab, 74		
Laba Pelepasan Investasi		1.394.278.377.666	1.096.124.497.418
Pendapatan Bunga		530.413.693.261	469.088.712.483
Pendapatan Dividen		214.895.575.739	219.987.705.956
Pendapatan Investasi Syariah		35.768.008.030	36.683.291.065
Pendapatan Sewa		567.261.404	1.047.236.000
Pendapatan Investasi Lainnya		316.794.007	728.268.797
Jumlah Pendapatan Investasi		2.176.239.710.107	1.823.659.711.719

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2013 Rp	2012 Rp
BEBAN INVESTASI NON JHT	3.ab, 75		
Beban Pajak Atas Kegiatan Investasi		(96.159.007.028)	(85.092.922.825)
Beban Administrasi Atas Kegiatan Investasi		(20.496.781.674)	(10.434.371.334)
Kerugian Atas Penurunan Nilai Efek Investasi		(15.450.532.000)	(2.350.910.809)
Beban Investasi Syariah		(6.078.372.158)	(21.157.339.768)
Beban Properti Investasi		(551.833.927)	(772.090.454)
Beban Manajer Investasi dan Konsultan		(417.650.088)	(428.884.800)
Beban Asuransi Aset Investasi		(1.612.683)	(6.042.251)
Beban Investasi Lainnya		(830.651.292)	(554.148.245)
Jumlah Beban Investasi		(139.986.440.850)	(120.796.710.486)
PENDAPATAN BERSIH INVESTASI		2.036.253.269.257	1.702.863.001.233
JUMLAH PENDAPATAN USAHA		**3.865.567.007.510**	**2.958.505.797.695**
Pendapatan Pengelolaan Atas Dana Investasi JHT	3.ab, 76	1.678.225.675.984	1.502.402.566.030
BEBAN USAHA	3.ab, 77		
Beban Personil		(1.132.876.218.156)	(971.485.529.384)
Beban Administrasi dan Umum		(417.284.126.223)	(220.423.133.971)
Beban Penyuluhan dan Pembinaan		(368.099.796.222)	(318.495.736.460)
Beban Jasa Produksi dan Tantiem		(307.213.394.509)	(248.065.019.960)
Beban Imbalan Pasca Kerja		(219.697.428.929)	(105.915.476.143)
Beban Penyisihan Piutang Iuran		(116.066.713.264)	(60.716.675.920)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		(82.806.754.215)	(79.660.971.581)
Beban Manajemen		(44.975.714.181)	(37.455.025.678)
Beban Perencanaan dan Pengembangan		(36.004.939.211)	(26.302.592.378)
Beban Pengembangan SDM		(29.732.565.317)	(16.519.150.398)
Beban Penyelesaian Masalah Hukum		(3.682.839.047)	(2.476.520.353)
Jumlah Beban Usaha		(2.758.440.489.274)	(2.087.515.832.226)
LABA USAHA		**2.785.352.194.220**	**2.373.392.531.499**
Pendapatan Lain-Lain	3.ab, 78	101.185.953.483	125.359.545.763
Beban Lain-Lain	3.ab, 78	(78.040.836.016)	(4.416.498.656)
PENDAPATAN LAIN-LAIN BERSIH		23.145.117.467	120.943.047.107
LABA SEBELUM PAJAK		2.808.497.311.687	2.494.335.578.606
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	52.c	(520.854.214.514)	(312.394.002.165)
LABA TAHUN BERJALAN		**2.287.643.097.173**	**2.181.941.576.441**
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA			
Pemilik Entitas Induk		2.287.642.937.018	2.181.941.146.376
Kepentingan Non Pengendali		160.155	430.065
		2.287.643.097.173	**2.181.941.576.441**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2013 Rp	2012 Rp
LABA TAHUN BERJALAN		**2.287.643.097.173**	**2.181.941.576.441**
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
Selisih Penilaian Efek Non JHT	3.e, 68	(1.967.639.613.625)	17.407.599.179
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**320.003.483.548**	**2.199.349.175.620**
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA			
Pemilik Entitas Induk		320.003.323.393	2.199.348.745.555
Kepentingan Non Pengendali		160.155	430.065
		320.003.483.548	**2.199.349.175.620**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Ekuitas yang Dapat Didiatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk						Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
		Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Saldo Laba	Pendapatan Komprehensif Lainnya Selisih Penilaian Efek Non JHT	Jumlah		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2011		**1.000.000.000.000**	**804.808.047.725**	**483.211.054.227**	**1.960.844.277.190**	**576.772.869.687**	**4.825.636.248.829**	**2.492.845**	**4.825.638.741.674**
Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari Cadangan Umum	64	500.000.000.000	(500.000.000.000)	--	--	--	--	--	--
Distribusi Laba Tahun 2011	67	--	--	--	(2.020.090.638.565)	--	(2.020.090.638.565)	--	(2.020.090.638.565)
Cadangan Umum	65	--	1.443.187.013.023	--	--	--	1.443.187.013.023	--	1.443.187.013.023
Cadangan Tujuan	66	--	--	105.000.000.000	--	--	105.000.000.000	--	105.000.000.000
Penyesuaian		--	--	--	(1.233.306.056)	--	(1.233.306.056)	--	(1.233.306.056)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	2.181.941.146.376	17.407.599.179	2.199.348.745.555	430.065	2.199.349.175.620
Saldo per 31 Desember 2012		**1.500.000.000.000**	**1.747.995.060.748**	**588.211.054.227**	**2.121.461.478.945**	**594.180.468.866**	**6.551.848.062.786**	**2.922.910**	**6.551.850.985.696**
Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari Cadangan Umum	64	2.500.000.000.000	(2.500.000.000.000)	--	--	--	--	--	--
Distribusi Laba Tahun 2012	67	--	--	--	(2.181.941.146.376)	--	(2.181.941.146.376)	--	(2.181.941.146.376)
Cadangan Umum	65	--	1.556.941.146.376		--	--	1.556.941.146.376	--	1.556.941.146.376
Cadangan Tujuan	66	--	--	275.000.000.000	--	--	275.000.000.000	--	275.000.000.000
Penyesuaian karena dampak perubahan PSAK 55 dan 62		--	(60.479.667.431)	--	60.479.667.431	--	--	--	--
Reklasifikasi Dana Pengembangan Non JHT		--	1.198.421.605.861	--	--	--	1.198.421.605.861	--	1.198.421.605.861
Penyesuaian Aset Pajak Tangguhan	52.e	--	(1.370.393.684.333)	--	--	--	(1.370.393.684.333)	--	(1.370.393.684.333)
Penyesuaian Kepentingan Non Pengendali		--	--	--	--	--	--	(246.661)	(246.661)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	2.287.642.937.018	(1.967.639.613.625)	320.003.323.393	160.155	320.003.483.548
Saldo per 31 Desember 2013		**4.000.000.000.000**	**572.484.461.221**	**863.211.054.227**	**2.287.642.937.018**	**(1.373.459.144.759)**	**6.349.879.307.707**	**2.836.404**	**6.349.882.144.111**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2013 Rp	2012 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Iuran JHT	1.543.201.216	917.262.869
Penerimaan Iuran Non JHT	221.106.701.930	184.299.900.018
Penerimaan Jasa Anak Perusahaan	90.524.726.185	75.078.647.595
Penerimaan Iuran Belum Rinci	26.617.347.943.742	20.256.175.514.178
Penerimaan Hasil Investasi JHT	12.728.508.203.113	5.533.335.502.715
Penerimaan Hasil Investasi Non JHT	2.161.834.416.967	7.665.210.409.918
Penerimaan Angsuran Pinjaman Program DPKP	53.756.462.249	50.207.198.356
Penerimaan Hasil Sewa dan Pengembangan Program DPKP	2.448.078.777	38.258.769.969
Pencairan Dana Investasi JHT	155.379.933.657.165	54.868.462.993.627
Pencairan Dana Investasi Non JHT	20.642.950.391.073	14.958.449.363.003
Pencairan Dana Non Investasi	1.215.000.000.000	--
Pencairan Penempatan Sementara Program DPKP	--	131.856.397.848
Pengembalian Angsuran Pinjaman Pegawai	6.035.765.017	6.263.911.923
Penerimaan Pendapatan Lain-Lain	58.470.399.527	21.952.452.065
Penerimaan Penjualan Aset	--	2.353.803.703
Pembayaran JHT Kepada Peserta	(9.968.268.150.430)	(7.966.739.783.577)
Pembayaran Jaminan Non JHT	(2.976.467.025.484)	(2.195.985.046.470)
Pembayaran Uang Jaminan Kepada TKI	--	(43.349.196.034)
Pembayaran Beban Jasa	(87.830.854.426)	(27.630.328.243)
Pembayaran Beban Usaha	(1.776.391.004.832)	(1.469.138.260.017)
Pembayaran Beban Investasi JHT	(104.844.785.547)	(109.611.506.725)
Pembayaran Beban Investasi Non JHT	(147.895.075.169)	(146.944.624.179)
Penempatan Dana Investasi JHT	(176.347.494.429.502)	(74.415.047.528.175)
Penempatan Dana Investasi Non JHT	(24.234.828.545.240)	(16.173.878.037.486)
Penempatan Dana Non Investasi	(1.215.000.000.000)	--
Penyaluran Pinjaman Program DPKP	(208.760.600.000)	(156.767.750.000)
Pengeluaran untuk Pengelolaan dan Perolehan SKP	(20.897.077.092)	(29.768.729.228)
Penyaluran Tidak Bergulir	(100.434.774.535)	(103.159.132.132)
Pembayaran Uang Muka Kerja	(6.803.138.278)	(137.991.823.294)
Pembayaran Pinjaman Pegawai	--	(16.850.233.208)
Pembayaran Angsuran PPh Badan	(590.523.510.666)	(402.442.751.740)
Pembayaran Lain-Lain	(276.384.869.085)	(137.185.280.126)
Pembayaran Program Manfaat Tambahan	(110.289.949.200)	(44.461.189.617)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.006.346.157.475	215.870.927.536
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan Aset Tetap	132.390.000	--
Perolehan Aset Tetap	(189.809.969.731)	(133.528.977.913)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(189.677.579.731)	(133.528.977.913)

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2013 Rp	2012 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan (Pelunasan) Pinjaman Bank	2.500.000.000	(2.000.000.000)
Pembayaran Aktivitas Pendanaan Lainnya:		
Jasa Produksi	(231.784.033.828)	(158.035.378.234)
Tantiem	(16.083.000.000)	(13.760.000.000)
Dana Bina Lingkungan	--	(40.401.812.771)
Program Kemitraan	--	(40.401.812.771)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(245.367.033.828)	(254.599.003.776)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	571.301.543.917	(172.257.054.154)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	569.755.106.176	742.012.160.330
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.141.056.650.093**	**569.755.106.176**
Kas dan Setara Kas terdiri dari:		
Kas	73.968.100	90.021.437
Bank	395.482.681.993	311.607.490.980
Giro Pos	--	57.593.759
Deposito Berjangka	259.500.000.000	183.000.000.000
Deposito On Call (DOC) Non Investasi	486.000.000.000	75.000.000.000
Total	**1.141.056.650.093**	**569.755.106.176**

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) ("Perusahaan") pada awalnya berdiri dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) pada 5 Desember 1977 dengan modal disetor Rp 2.500.000.000. Program yang ditangani masih terbatas pada Asuransi Kecelakaan Kerja (AKK), Asuransi Kematian (AK) dan Tabungan Hari Tua (THT). Status ASTEK sebagai Perum kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 bernama Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT ASTEK). Selanjutnya PT ASTEK berganti nama menjadi Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek), untuk selanjutnya disebut Perusahaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tertanggal 17 Februari 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tertanggal 22 September 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Anggaran Dasar Perusahaan ditetapkan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 15 tertanggal 5 Desember 1990 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Nomor 3 tertanggal 19 November 2013 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-60955.AH.01.02 Tahun 2013 mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Pada 25 November 2011, ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada Pasal 62 disebutkan bahwa PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Januari 2014. PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Per 1 Januari 2014, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persero), termasuk menerima peserta baru dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 8 sampai dengan 15. Sedangkan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) diserahkan kepada BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan/ASKES (Persero). Selambat-lambatnya pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi dengan menyelenggarakan program yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan menambahkan Program Jaminan Pensiun.

1.b. Tujuan dan Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar, tujuan Perusahaan adalah mewujudkan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem jaminan sosial dalam arti seluas-luasnya. Untuk mencapai tujuan ini, Perusahaan menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat preventif, kuratif dan rehabilitatif yang meliputi:

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
Jaminan Kematian (JKM);
Jaminan Hari Tua (JHT); dan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan.

Perusahaan memiliki 11 kantor wilayah, 121 kantor cabang dan 53 kantor cabang pembantu yang terletak di beberapa kota di Indonesia.

1.c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-11/MBU/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota serta komisaris Perusahaan dan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-155/MBU/2013 tentang pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan PT Jamsostek (Persero), menunjuk Denny Indrayana sebagai Komisaris Utama dan Herry Purnomo, Herman Hidayat, Iskandar Maula, Haryadi B Sukamdani, Bambang Wirahyoso dan Mathias Tambing sebagai Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-368/MBU/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 tentang pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Jamsostek (Persero), memberhentikan Herry Purnomo sebagai Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-430/MBU/2013 tertanggal 30 Desember 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota serta komisaris Perusahaan, susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Mulabasa Hutabarat	Bambang Subiyanto
Komisaris	Iskandar Maula	Prijono Tjiptoherijanto
Komisaris	Hariyadi B Sukamdani	Herry Purnomo
Komisaris	Bambang Wirahyoso	--
Komisaris	Mathias Tambing	--
Komisaris	Nina Sapti Triaswati	--
Komisaris	H.M. Saleh Khalid	--

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-68/MBU/2012 tertanggal 13 Februari 2012 tentang penetapan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi Perusahaan, susunan Dewan Direksi Perusahaan pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Dewan Direksi		
Direktur Utama	Elvyn G. Masassya	Elvyn G. Masassya
Direktur Keuangan	Herdy Trisanto	Herdy Trisanto
Direktur Investasi	Jeffry Haryadi	Jeffry Haryadi
Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi	Agus Supriyadi	Agus Supriyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	Amri Yusuf	Amri Yusuf
Direktur Pelayanan	Achmad Riadi	Achmad Riadi
Direktur Kepesertaan	Junaedi	Junaedi

Pada 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan dan Entitas Anak memiliki 3.872 dan 3.269 karyawan (tidak diaudit).

1.d. Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko

Susunan Komite Audit Perusahaan pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Komite Audit		
Ketua	Bambang Wirahyoso	Prijono Tjiptoherijanto
Anggota	Salim Siagian	Salim Siagian
Anggota	Rinaningsih	Rinaningsih

Susunan anggota Komite Manajemen Risiko pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Manajemen Risiko		
Ketua	Herman Hidayat	--
Anggota	Endi Roswendi	Didi Achdijat
Anggota	--	Khomsiyah

1.e. Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus

Perusahaan memiliki penyertaan langsung pada PT Binajasa Abadikarya (PT BIJAK) dengan persentase kepemilikan sebesar 99,98%. PT BIJAK berdomisili di Jakarta dan menjalankan usaha dalam bidang jasa pengerahan tenaga kerja dan jasa lainnya. PT BIJAK memulai operasi komersialnya pada 2004. Jumlah aset PT BIJAK per 31 Desember 2013 dan 2012 sebelum eliminasi masing-masing sebesar Rp 30.901.358.345 dan Rp 28.603.757.723 (lihat Catatan 24). Jumlah Pendapatan PT BIJAK per 31 Desember 2013 dan 2012 sebelum eliminasi masing-masing sebesar Rp 85.817.379.006 dan Rp 83.152.700.236. Jumlah Laba Komprehensif Bersih PT BIJAK per 31 Desember 2013 dan 2012 sebelum eliminasi masing-masing sebesar Rp 800.777.348 dan Rp 2.150.324.647.

Selain itu, Perusahaan juga mengelola Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) sebagai suatu entitas bertujuan khusus yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta. Total aset dari DPKP per 31 Desember 2013 dan 2012 sebelum eliminasi masing-masing sebesar Rp 1.077.171.526.501 dan Rp 781.491.643.774.

2. Adopsi Standar Baru Maupun Revisi Standar dan Intepretasi (Revisi atas PSAK dan ISAK)

2.a. Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2013:

PSAK

- PSAK No. 38 (Revisi 2012): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali;
- Penyesuaian atas PSAK No. 60 (Revisi 2010)
  Penyesuaian ini terkait dengan pengungkapan atas aset keuangan, termasuk perubahan atas beberapa ketentuan penyajian untuk:
  a. Nilai wajar atas agunan yang digunakan sebagai jaminan.
  b. Nilai tercatat atas aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai yang telah dinegosiasi ulang.

ISAK
- ISAK No. 21 *): Perjanjian Konstruksi Real Estat.

PPSAK
- PPSAK No. 7 *): Pencabutan PSAK No. 44 - Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat Paragraf 1-46, 49-55 dan 62-64;
- PPSAK No. 10: Pencabutan PSAK No. 51 - Akuntansi Kuasi Reorganisasi.

Perubahan standar yang terjadi tidak berpengaruh kepada kebijakan akuntansi Perusahaan.

**) Ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, sesuai dengan surat pengumuman DSAK-IAI Nomor 0643/DSAK/IAI/IX/2012 tertanggal 21 September 2012.*

2.b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Selama Periode Berjalan

Pada 2013 Perusahaan mengeluarkan beberapa kebijakan baru antara lain sebagai berikut:

1) PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011)
   Kebijakan baru atas piutang iuran program Jamsostek dan piutang properti investasi merupakan kelanjutan dari penerapan PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) yang belum seluruhnya selesai diterapkan pada 2012 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:
   - KEP/365/102013 tentang Klasifikasi Piutang Iuran Program Jamsostek; dan
   - KEP/342/092013 tentang Piutang Properti Investasi.
2) PSAK 13 (Revisi 2011)
   Kebijakan baru atas properti investasi merupakan penerapan PSAK 13 (Revisi 2011): Pengakuan Properti Investasi yang diterapkan pada 2013 sesuai Keputusan Direksi Nomor KEP/343/092013 tentang klasifikasi properti investasi berdasarkan tujuan penggunaannya.

Berikut ini ditampilkan daftar perubahan akuntansi yang berlaku pada 2013:

No.	Rincian Perubahan	PSAK Terkait	Nomor SK Direksi
1	Klasifikasi Piutang Iuran Program Jamsostek	PSAK 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	KEP/365/102013
2	Piutang Properti Investasi	PSAK 50 (Revisi 2010) Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	KEP/342/092013
3	Pengungkapan Properti Investasi	PSAK 13 (Revisi 2011): Properti Investasi	KEP/343/092013

Pada 2012, terdapat beberapa perubahan kebijakan akuntansi sesuai perubahan PSAK yang berlaku dan dituangkan dalam Keputusan Direksi. Penerapan PSAK baru dan Pencabutan PSAK oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 yang berdampak pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan pada 2012, sebagai berikut:

1) PSAK 28 Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian (Revisi 2010);
2) PSAK 36 Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa (Revisi 2010);
3) PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2009); dan
4) PSAK 23 Pendapatan (Revisi 2009).

Gabungan perubahan dari penerapan keempat PSAK ini berdampak signifikan pada penyajian Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2012. PT Jamsostek (Persero) menerapkan perubahan beberapa PSAK ini secara sekaligus berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP/76/032012 tertanggal 30 Maret 2012 dan berlaku mulai 1 Januari 2012. Perubahan PSAK 28 dan 36 (Revisi 2010) yang berlaku efektif per 1 Januari 2012, mengakibatkan Perusahaan harus menerapkan PSAK 1 dan 23 secara penuh yang sejatinya telah berlaku efektif per 1 Januari 2010. Penerapan PSAK 1 ini mengakibatkan perubahan urutan penyajian laporan posisi keuangan dan sesuai PSAK 23 pendapatan investasi JHT tidak disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif, tetapi disajikan sebagai liabilitas.

3) PSAK 110 Akuntansi Sukuk (Revisi 2011)
PT Jamsostek (Persero) menerapkan PSAK ini berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP/77/032012 tertanggal 30 Maret 2012 dan berlaku mulai 1 Januari 2012. Berdasarkan PSAK ini, penyajian sukuk harus dipisahkan dari obligasi dan dilakukan perubahan klasifikasi, pengukuran amortisasi dan reklasifikasi. Selain itu, ditetapkannya penentuan nilai wajar untuk investasi sukuk yang tidak lagi mengacu pada penentuan nilai wajar obligasi sesuai PSAK 55 sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KEP/332/122010 tertanggal 30 Desember 2010.
4) PSAK 9 - Pencabutan ISAK 5: Interpretasi atas Paragraf 14 PSAK 50 (1998) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual.

Namun demikian, pencabutan ISAK ini tidak mengubah penyajian sebelumnya karena secara umum telah mengacu kepada ketentuan definisi pendapatan di KDPPLK dan PSAK 23.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

3.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

3.b. Dasar Penyusunan dan Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi Jamsostek (Pajastek) yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan keuangan konsolidasi untuk arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar untuk pengukuran untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk penyertaan tertentu yang disajikan berdasarkan metode ekuitas serta investasi pada saham, obligasi, dan reksadana yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Investasi dalam kelompok ini disajikan sebesar nilai wajarnya.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, deposito berjangka dan deposito lainnya dengan jangka waktu perolehan tiga bulan atau kurang dari tanggal pelaporan, tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan, diklasifikasikan sebagai setara kas. Sedangkan untuk induk Perusahaan, seluruh aset yang telah diklasifikasikan sebagai aset investasi tidak dimasukkan sebagai kas dan setara kas.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah mata uang Rupiah.

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun Perusahaan dan Entitas Anak, dimana Perusahaan mempunyai pemilikan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung dan Entitas Bertujuan Khusus (EBK) yang berada dalam pengendalian Perusahaan sesuai dengan ISAK 7 Interpretasi atas paragraf 5 dan 19 PSAK No. 4 tentang Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus. Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) memenuhi persyaratan sebagai EBK yang harus dikonsolidasi sesuai dengan ISAK 7.

Perusahaan telah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 01 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan. Standar ini memisahkan perubahan pemilik dan non pemilik didalam ekuitas. Laporan perubahan ekuitas hanya meliputi rincian transaksi dengan pemilik dan perubahan non-pemilik didalam ekuitas yang disajikan dalam rekonsiliasi setiap komponen ekuitas. Sebagai tambahan, standar memperkenalkan laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif terdiri dari semua pendapatan dan beban yang diakui, baik dalam bentuk tunggal satu laporan atau dalam dua laporan yang terkait.

3.c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Perusahaan memiliki penyertaan langsung pada PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak) dengan persentase kepemilikan sebesar 99,98% dan mengelola Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) sebagai suatu entitas bertujuan khusus yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta.

Pada 31 Desember 2013 dan 2012, jumlah aset entitas anak dan EBK yang dikonsolidasi masing masing mencerminkan 0,72% dan 0,58% terhadap jumlah aset konsolidasian.

Seluruh saldo dan transaksi signifikan, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan Entitas Anak serta EBK sebagai satu kesatuan usaha.

Proporsi bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba atau rugi bersih dari Entitas Anak yang dikonsolidasi disajikan masing-masing dalam akun "Kepentingan Non Pengendali" pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan "Kepentingan Non Pengendali" pada Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian.

3.d. Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan, Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dikonversi kedalam Rupiah dengan kurs rata-rata wesel ekspor Bank Indonesia pada 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai berikut:

Mata Uang	2013	2012
1 Dollar Amerika Serikat (USD)	12.189	9.670

3.e. Instrumen Keuangan

PSAK 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran diterapkan secara prospektif sejak 1 Januari 2012 sesuai dengan ketentuan transisi atas standar tersebut.

Cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012, telah disusun berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) yang tidak memiliki perbedaan signifikan dengan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006).

Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuannya.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori, yaitu aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*) yang terkini.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan kedalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Biaya transaksi, jika ada, diakui secara langsung pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Penambahan maupun pengurangan dalam nilai wajar dibandingkan dengan nilai perolehan dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan pada laporan laba rugi. Perusahaan menggunakan metode tidak langsung pada perubahan pencatatan dalam nilai wajar dari aset keuangan dengan mengakui nilai perolehan dan penyesuaian nilai wajar secara terpisah.

Pendapatan bunga dari aset finansial pada nilai wajar, diakui berdasarkan basis akrual. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset finansial yang diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi, diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi dan biaya transaksi dari penjualan aset finansial diakui sebagai beban pada laporan laba rugi konsolidasian.

Biaya dari investasi pada efek ekuitas, reksadana dan utang efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi dipasar aktif, kecuali:

yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi;

yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan

dalam hal Perusahaan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya yang diamortisasi, dihitung dengan mengambil diskonto dan premi dari pembelian serta biaya yang merupakan bagian yang utuh dari tingkat bunga efektif. Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dicatat didalam pendapatan investasi. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui didalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai.

Aset Keuangan Dimiliki hingga Jatuh Tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi;
investasi yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan bunga dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dicatat sebagai laba atau rugi dan diakui sebagai pendapatan bunga. Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada awal akuisisi dan fee/biaya sebagai bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif (EIR). Amortisasi dan kerugian yang timbul dari penurunan nilai akan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Aset keuangan tersedia untuk dijual
Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di pendapatan komprehensif lainnya, diakui sebagai laba rugi. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui sebagai laba rugi.

Biaya dari investasi pada efek ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dihitung menggunakan harga rata-rata tertimbang bergerak, sedangkan biaya dari investasi pada efek utang menggunakan metode yang spesifik.

Pengakuan
Perusahaan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk kontrak regular ketika mencatat transaksi aset keuangan.

Mulai tahun 2012, Perusahaan telah menerapkan pemisahan antara investasi syariah dengan konvensional berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/77/032012 tentang reklasifikasi dan penentuan nilai wajar investasi sukuk. Investasi dalam sukuk dikelompokkan ke dalam sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan sukuk yang diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi. Pencatatan sukuk dengan kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat dengan kebijakan yang sama dengan obligasi dalam kelompok *Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL), sedangkan sukuk dalam kelompok diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi dicatat dengan kebijakan yang sama dengan obligasi dalam kelompok *Held to Maturity (HTM)*, kecuali untuk amortisasi atas diskonto, premium, dan biaya transaksi dihitung secara garis lurus.

Nilai wajar efek investasi dihitung berdasarkan hirarki nilai wajar sebagaimana ditetapkan dalam PSAK No. 55. Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP/44/022011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Penetapan Nilai Wajar Investasi Saham dan Reksadana dan Keputusan Direksi No. KEP/332/122010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Nilai Wajar Investasi Obligasi, diatur sebagai berikut:

a. Saham
Terdapat dua kelompok saham yaitu saham yang memiliki pasar aktif dan saham yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk saham yang memiliki pasar aktif, nilai wajar ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan dari penutupan hari bursa. Sedangkan untuk saham yang tidak memiliki pasar aktif maka menggunakan harga penutupan dari hari bursa terakhir yang tersedia.

b. Reksadana
Untuk reksadana menggunakan nilai aset bersih yang dipublikasikan oleh manajer investasi.

c. Obligasi
Terdapat dua kelompok obligasi yaitu obligasi yang memiliki pasar aktif dan obligasi yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk obligasi yang memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan *(bid price)* dari transaksi terakhir, atau apabila tidak tersedia maka menggunakan harga penutupan *(closing price).*

Untuk obligasi yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (mark-to-model). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data primary dealers, money brokers, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi provider info. Metode yang digunakan adalah metode Nelson Siegel Svensson. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

Investasi dalam Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA) telah diatur dalam PAJASTEK 2010. KIK-EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Efek Beragun Aset (EBA) adalah efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Beragun Aset (KIK-EBA) yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, sarana pengikatan kredit/arus kas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.

Terdapat dua jenis EBA, yaitu pendapatan tetap dan tidak tetap. EBA pendapatan tetap memiliki karakteristik sebagaimana obligasi, yaitu memiliki jangka waktu jatuh tempo, memiliki penghasilan tertentu dan dapat dibeli dibawah par, diatas par, atau pada harga nominal.

EBA pendapatan tidak tetap memiliki karakteristik sebagaimana efek ekuitas (saham). Pengelompokkan EBA mengikuti jenisnya, yaitu EBA pendapatan tetap dapat diklasifikasikan sebagai FVTPL, AFS, ataupun HTM, sedangkan EBA pendapatan tidak tetap diklasifikasikan sebagai FVTPL dan AFS.

Reklasifikasi aset keuangan
Setelah reklasifikasi per 1 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/376/122009 dan KEP/152/072010 sebagai implementasi penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006), Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangan. Perusahaan tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga

jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

a. Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

b. Terjadi setelah Perusahaan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Perusahaan telah memperoleh pelunasan dipercepat; dan

c. Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Perusahaan, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Perusahaan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Aset investasi yang sudah tidak memiliki prospek arus kas di masa depan harus dilakukan penurunan nilai atau penghentian pengakuannya sebesar 100% dan dipindahkan dari kelompok investasi ke akun aset investasi tidak produktif dalam kelompok aset lain.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laporan Laba Rugi, dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan yang diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi dicatat melalui laporan laba rugi konsolidasian sebagai “Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan”.

Per 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laporan Laba Rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang selain atau tidak diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Keuangan	**Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba-Rugi**	Aset Keuangan Dalam Kelompok Diperdagangkan	Saham Reksadana Sukuk Obligasi
	Pinjaman Diberikan & Piutang	Bank Investasi Deposito on Call Deposito Berjangka Kas & Bank Non Investasi DOC Non Investasi Piutang Iuran Pinjaman Diberikan Program DPKP	
		Piutang Usaha Pendapatan YMHD	
		Aset Lain-Lain	Aset Investasi Tidak Produktif
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	KIK-EBA Sukuk Obligasi	
	Dimiliki Untuk Dijual	Saham Reksadana Obligasi Penyertaan Langsung	

Liabilitas Keuangan	**Biaya Diamortisasi**	Utang Usaha Beban Akrual Liabilitas Yang Masih Harus Dibayar
		Liabilitas Lain - Lain

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas keuangan dapat diukur dengan menggunakan kuotasi di pasar aktif, yaitu jika harga yang dikuotasikan tersedia setiap waktu dan dapat diperoleh secara rutin dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Dalam hal tidak terdapat pasar aktif untuk suatu aset atau liabilitas keuangan, maka Perusahaan menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak yang berkeinginan dan memahami, dan bilamana tersedia, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, dan model penetapan harga opsi.

3.f. Investasi Penyertaan Langsung

Investasi penyertaan langsung dapat dibedakan menjadi: investasi penyertaan saham pada perusahaan yang diklasifikasikan sebagai Tersedia Untuk Dijual *(AFS)*, investasi pada entitas asosiasi (ada pengaruh signifikan) dan investasi pada entitas anak.

Investasi penyertaan langsung pada perusahaan dibawah 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan, disajikan sebagai aset keuangan dalam kategori tersedia untuk dijual. Pada setiap tanggal laporan, perubahan nilai tercatat dengan nilai wajar diakui pada investasi dalam laporan posisi keuangan. Apabila nilai wajar dari investasi tidak dapat ditentukan secara andal berdasarkan hirarki nilai wajar, maka investasi ini dinilai berdasarkan biaya perolehan.

Investasi pada entitas asosiasi (ada pengaruh signifikan) dicatat berdasarkan metode ekuitas. Pada setiap tanggal laporan, saldo laba/rugi entitas investee diakui ke dalam laporan laba rugi sesuai persentase kepemilikannya.

Penyertaan langsung pada entitas anak yang memenuhi syarat pengendalian dan ventura bersama (pengendalian bersama ekuitas) harus dilakukan konsolidasi sesuai persentase kepemilikannya.

Apabila nilai ekuitas entitas asosiasi yang menjadi bagian investor sesudah transaksi perubahan ekuitas asosiasi berbeda dengan nilai ekuitas asosiasi yang menjadi bagian investor sebelum transaksi perubahan ekuitas asosiasi, maka perbedaan tersebut, oleh investor diakui sebagai bagian dari ekuitas dengan akun "Bagian Pendapatan Komprehensif Lain Dari Entitas Asosiasi".

3.g. Properti Investasi

Pada tanggal 27 September 2013 dikeluarkan Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) No. KEP/343/092013 mengenai klasifikasi Properti Investasi. Didalam SK ini Properti Investasi berdasarkan tujuan penggunaannya diklasifikasikan sebagai berikut:

Jenis Properti Investasi	Taksiran Masa Manfaat	Nilai Sisa Aset Tetap
Tanah	Tidak disusutkan	Tidak ada nilai residu
Bangunan Properti		20%
Perolehan Struktur	20 tahun	
Renovasi Struktur	Berdasarkan Perhitungan Appraisal	
Renovasi Non Struktur Signifikan	Mengikuti Sisa Umur Bangunan Properti	
Renovasi Non Struktur Tidak Signifikan	4 tahun	
Aset Fasillitas Properti	Sesuai Masa Periode Penyewa	0%
Peralatan Properti	5 tahun	5%
Peralatan Lain Properti	4 tahun	5%
Aset Properti Dalam Konstruksi	Tidak disusutkan	Tidak ada nilai residu

3.h. Piutang Iuran

Sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012, piutang iuran diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.

Piutang iuran adalah iuran non JHT yang belum diterima pelunasannya sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan. Penerimaan iuran JHT diakui pada saat realisasi penerimaan iuran, dan menjadi penambahan kewajiban kepada peserta. Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) yang diimplementasikan mulai 1 Januari 2012, piutang iuran yang masih harus diterima dan dicatat dalam laporan keuangan ketika memiliki kemungkinan untuk adanya keuntungan ekonomis di masa mendatang kepada Perusahaan dan dapat diukur secara andal. Perusahaan menetapkan bahwa piutang yang memenuhi kriteria andal adalah piutang yang telah mendapat persetujuan perusahaan peserta, sedangkan piutang iuran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai aset kontinjensi.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/365/102013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Klasifikasi Piutang Iuran Program Jamsostek yang merupakan penyempurnaan Keputusan Direksi No. KEP/352/122010 ditetapkan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Umur Piutang sebagai berikut :

Klasifikasi	Umur Tunggakan
Lancar	0 bulan < x ≤ 1 bulan
Kurang Lancar	2 bulan < x ≤ 3 bulan
Macet	diatas 3 bulan

2. Piutang Iuran diakui sebesar Data Upah Siap Rekonsiliasi (DUSR) yang telah mendapat persetujuan dari perusahaan, apabila tidak tersedia DUSR maka dapat digunakan Iuran Terakhir Rekonsiliasi Final (ITRF) sebagai dasar perhitungan surat pemberitahuan yang sudah dicetak. Piutang iuran yang dihitung berdasarkan data ITRF maksimum 3 bulan belum membayar iuran.

3. Direktorat Operasional dan Pelayanan harus melakukan evaluasi atas kriteria perusahaan strategis dan bukti obyektif penurunan nilai (penyisihan) secara periodik pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Keuangan untuk dilakukan (penyisihan) penurunan nilai.

Berdasarkan Keputusan Direksi sebelumnya Nomor : KEP/352/122010 Piutang Iuran ditetapkan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Umur Piutang sebagai berikut :

Klasifikasi	Umur Tunggakan
Lancar	0 bulan < x ≤ 1 bulan
Kurang Lancar	1 bulan < x ≤ 2 bulan
Macet	diatas 2 bulan

2. Piutang Iuran diakui berdasarkan Data Upah Siap Rekonsiliasi (DUSR) yang telah mendapat persetujuan dari perusahaan.
3. Direktorat Kepesertaan harus melakukan evaluasi atas kriteria perusahaan strategis dan bukti objektif penurunan nilai (penyisihan) secara periodik pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Keuangan untuk dilakukan (penyisihan) penurunan nilai.

Berdasarkan SK Direksi tersebut diatas, juga ditetapkan teknik evaluasi penurunan nilai yaitu secara individual untuk perusahaan-perusahaan strategis dengan menggunakan metode statistik Discounted Cash Flows (DCF) dan secara kolektif yaitu untuk perusahaan strategis yang tidak memenuhi bukti obyektif penurunan nilai dan perusahaan non strategis yang dihitung berdasarkan *incurred losses* dengan menggunakan *metode migration analysis* dengan data empiris selama 3 (tiga) tahun terakhir dan berlaku sejak 1 Januari 2010.

Berikut disajikan persentase penyisihan piutang iuran tahun 2013 dan 2012 sebagai berikut:

Kategori	2013		2012	
	Umur	%	Umur	%
Lancar	0-1 bulan	1,53%	0-1 bulan	0,32%
Kurang Lancar	2-3 bulan	16,81%	1-2 bulan	41,49%
Macet	> 3 bulan	56,84%	> 2 bulan	65,96%

Perubahan pengakuan piutang iuran dan penentuan penyisihan piutang iuran sebagai bagian dari penerapan ketentuan transisi atas PSAK No. 50 & 55 (Revisi 2006) sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Edisi 4. Sesuai ketentuan ini dampak penerapan berdasarkan kebijakan sebelumnya dibandingkan berdasarkan kebijakan baru disesuaikan ke saldo laba per 1 Januari 2010.

3.i. Pinjaman yang Diberikan

1. Pinjaman yang diberikan merupakan tagihan kepada peserta yang timbul akibat pemberian pinjaman program DPKP secara bergulir kepada pihak-pihak yang ditentukan baik secara *channeling*, *executing* maupun secara langsung.
2. Sesuai PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran, penyisihan kerugian pinjaman diberikan dan piutang bunga pinjaman diberikan ditentukan berdasarkan adanya bukti obyektif penurunan nilai telah terjadi. Dalam hal bukti obyektif tidak terpenuhi, besamya penyisihan pinjaman diberikan dan bunga pinjaman diberikan ditetapkan berdasarkan estimasi pinjaman tak tertagih. Sesuai dengan PSAK 55 dan ditindaklanjuti melalui surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/334/122010 tanggal 30 Desember 2010 perihal Teknik Evaluasi Penurunan Nilai (Penyisihan) Pinjaman Diberikan Program DPKP PT Jamsostek (Persero), klasifikasi dan persentase penyisihan pinjaman diberikan dan piutang bunga pinjaman diberikan tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Kategori	Persentase		Keterangan
	2013	2012	
Lancar	4,77%	8,97%	0-6 bulan
Kurang Lancar	50,41%	52,03%	6-9 bulan
Ragu - ragu	60,77%	65,67%	9-12 bulan
Macet	86,70%	84,26%	> 12 bulan

Penentuan estimasi persentase penyisihan pinjaman diberikan dan bunga pinjaman diberikan tidak tertagih dievaluasi setiap awal tahun dan dipergunakan untuk menghitung penyisihan tahun berjalan.

3.j. Piutang Usaha

Piutang usaha dari entitas anak disajikan dalam jumlah bersihnya yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai. Kebijakan Kerugian Penurunan Nilai ditetapkan sebagai berikut:

1. Piutang usaha lancar yaitu yang berumur sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak disisihkan.
2. Piutang usaha kurang lancar yaitu piutang yang berumur diatas 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan disisihkan sebesar 25%.
3. Piutang usaha diragukan yaitu piutang yang berumur diatas 24 (dua puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan disisihkan sebesar 50%.
4. Piutang usaha macet yaitu piutang yang berumur diatas 36 (tiga puluh enam) bulan disisihkan sebesar 100%.

3.k. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak Perusahaan dilihat dari segi waktu periode akuntansi tetapi sampai dengan tanggal laporan belum dicatat sebagai pendapatan atau diterima pembayarannya.

3.l. Piutang Pendapatan Jatuh Tempo

Piutang Pendapatan Jatuh Tempo adalah pendapatan yang sudah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya.

3.m. Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor

Pencatatan persediaan perlengkapan alat tulis kantor dilaksanakan dengan menggunakan metode periodik sedangkan pengukurannya dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KEP/265/122003 tanggal 31 Desember 2003 yang disempurnakan melalui Keputusan Direksi Nomor : KEP/377/122008 tentang Pedoman Verifikasi Laporan Keuangan Kantor Daerah.

3.n. Aset Tetap

Semua aset tetap yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Perusahaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran aset tetap. Pada model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Aset tetap, kecuali tanah, telah disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KEP/93/042011 tanggal 18 April 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud di Lingkungan Perusahaan, ditetapkan beberapa perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap sebagai dampak dari penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007), meliputi sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Taksiran Masa Manfaat
Bangunan	20 tahun
Renovasi Bagian Dalam	4 tahun
Renovasi Bagian Luar / Keseluruhan	Hasil Appraisal
Kendaraan	5 tahun
Peralatan Kantor	4 tahun
Peralatan Komputer	4 tahun
Peralatan Lainnya	4 tahun

Jenis Aset Tetap	Nilai Sisa Aset Tetap
Bangunan	20%
Kendaraan Sedan	25%
Kendaraan Non Sedan	20%
Motor	10%
Peralatan Kantor	5%
Peralatan Komputer	5%
Peralatan Lainnya	5%

Berdasarkan PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah", perolehan tanah setelah tanggal 1 Januari 1999 dinyatakan berdasarkan biaya perolehannya dan tidak diamortisasi. Biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak kepemilikan tanah, ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Berdasarkan PSAK 16 (Revisi 2011), nilai sisa, taksiran masa manfaat dan metode penyusutan atas aset tetap dievaluasi dan disesuaikan setiap tanggal neraca. Dampak dari evaluasi tersebut, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai. Penurunan nilai aset tersebut diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset dan dibebankan sebagai kerugian periode berjalan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat suatu aset atau yang memberikan manfaat ekonomis yang berupa peningkatan kapasitas, kualitas produksi, atau kinerja dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan. Untuk menentukan ada tidaknya penambahan masa manfaat atas suatu renovasi aset tetap, maka ditetapkan batas signifikansi renovasi minimal sebesar 20% dari nilai perolehan aset tetap tersebut kemudian dihitung berdasarkan hasil penilaian baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam usaha, maka nilai bukunya direklasifikasi ke aset lain-lain dan tidak disusutkan. Sedangkan aset tetap yang memenuhi kriteria aset tetap yang dimiliki untuk dijual, nilai bukunya dipindahkan ke aset dimiliki untuk dijual, dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkannya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Aset dalam konstruksi dinyatakan sebesar biaya perolehannya dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

3.o. Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP)

Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) merupakan Dana dari Program DPKP yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta Jamsostek melalui pemberian sarana rusunawa, sarana pelayananan kesehatan, dan sarana kesejahteraan peserta lainnya. SKP terdiri dari tanah, bangunan dan peralatan.

Semua SKP yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan. Perusahaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran asetnya. Pada model biaya, SKP dinyatakan sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dan disajikan dalam laporan konsolidasi secara terpisah. SKP, kecuali tanah, telah disusutkan dengan metode garis lurus sebesar 5% per tahun dan peralatan sebesar 25% per tahun.

3.p. Sewa

Sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011), sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Aset yang diperoleh melalui sewa pembiayaan diakui sebagai aset sebesar nilai wajar aset sewaan pada awal sewa atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan diakui dalam posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian beban keuangan dan bagian pelunasan liabilitas untuk menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan secara langsung ke laba atau rugi, kecuali beban tersebut berkaitan langsung dengan perolehan aset tertentu yang dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan umum biaya pinjaman. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Sewa kontinjen yang timbul dari sewa operasi diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

3.q. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud dinyatakan sebesar nilai bukunya. Amortisasi dihitung dengan metode garis lurus sejak bulan perolehan sebesar 25% per tahun dan tidak dilakukan pencadangan.

3.r. Aset Lain

Aset lain terdiri dari kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, beban ditangguhkan, aset tetap yang sudah tidak digunakan, piutang pegawai, piutang lain, aset sitaan dan rekening antar kantor dan lain-lain.

3.s. Liabilitas Jaminan

Liabilitas Jaminan

Merupakan klaim program non JHT yang sudah ditetapkan namun belum dibayarkan.

Liabilitas Belum Dicairkan

Merupakan klaim jaminan yang telah dibayarkan (cek telah diterbitkan) kepada peserta (menggunakan cek) dan belum dicairkan oleh peserta. Sesuai Keputusan Direksi No. KEP/214/082009 tentang Petunjuk Teknis Tambahan, Sistem dan Prosedur Untuk Kasus Penyelesaian Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian, atas cek yang sudah lebih dari 70 (tujuh puluh) hari akan dilakukan pembatalan penetapan jaminan.

Liabilitas Jaminan Diestimasi
Utang Jaminan Diestimasi merupakan klaim program non JHT yang sudah diajukan namun sampai tanggal laporan belum disetujui atau belum ditetapkan.

Liabilitas Jaminan Non-JHT Belum Dilaporkan / *Incurred but Not Reported* (IBNR)
Merupakan estimasi jumlah jaminan non JHT yang telah terjadi namun belum dilaporkan sampai akhir tahun buku.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/149/042012 tanggal 30 April 2012, Perusahaan menerapkan perhitungan IBNR mulai tahun buku 2011 dan disajikan kembali untuk tahun 2010. IBNR mencakup program Non JHT yaitu meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jasa Konstruksi (Jakons), termasuk Program Mandiri dan Perorangan.

IBNR dihitung setiap tahun berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$IBNR = R \times J$$

Keterangan:
R = Rata-rata persentase
J = Beban klaim tahun berjalan untuk masing-masing program.

Rata-rata persentase (R) dihitung berdasarkan rata-rata perbandingan persentase klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{P1 + P2 + P3}{3} \times 100\%$$

Keterangan:
P1, P2, P3 = Persentase klaim tahun ke 1, ke 2, ke3

3.t. Liabilitas JHT

Penerimaan Iuran JHT dari perusahaan peserta Jamsostek diperlakukan sebagai penambah utang JHT sedangkan pembayarannya diperlakukan sebagai pengurang utang JHT, diikutsertakan pada utang JHT adalah bunga investasi JHT yang telah dikurangi dengan beban pengelolaan program JHT yang akan dikembalikan kepada peserta ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Ht : Total Hasil Pengembangan Saldo JHT Tahun 2013
Sa : Saldo Awal Tahun 2013
n : Bulan Iuran
In : Iuran Yang Diterima Pada Bulan ke-n Tahun 2013
Jhn : Jumlah Hari dalam Bulan Iuran
Ti : Tanggal Iuran Diterima
Hs : Hasil Pengembangan Saldo Awal
Hi : Hasil Pengembangan Iuran
Ht : Hs + Hi
Hs : {Sa x i%}
Hi : n=12
Ó {[In x i% x (1/12)] x [(Jhn-Ti/Jhn) + (12-n)]}
n=1

Bagian peserta berdasarkan rumus di atas akan menambah saldo utang JHT. Apabila hasil investasi JHT setelah dialokasikan kepada peserta masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi dana pengembangan JHT yang diklasifikasikan dalam kelompok liabilitas kepada peserta.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/444/122013 tanggal 23 Desember 2013, menetapkan besarnya pemberian hasil pengembangan dana untuk saldo awal JHT tahun 2013 adalah 8,68% dan pembayaran JHT tahun 2014 sebesar 5,6%.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/477/122012 tanggal 18 Desember 2012, menetapkan besarnya pemberian hasil pengembangan dana untuk saldo awal JHT tahun 2012 adalah 9,10% dan pembayaran JHT tahun 2013 sebesar 5,5%.

3.u. Dana Pengembangan JHT

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/ 476/122012 tanggal 18 Desember 2012, menetapkan Dana Pengembangan JHT yang dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

a. Dana Pengembangan JHT Koreksi
Dana pengembangan JHT koreksi digunakan untuk koreksi data yang tertinggal yang dibentuk dari selisih lebih (kurang) *cut off* saldo utang JHT pada saat migrasi data dari sistem *offline* ke sistem *online* serta pindahan dana dari Dana Pengembangan JHT Penyesuaian Hasil Pengembangan Setelah RUPS dan Dana Pengembangan Surplus.

Dana pengembangan JHT penyangga investasi digunakan untuk mempertahankan hasil pengembangan JHT yang stabil yang kompetitif dengan tingkat suku bunga pasar, Dana pengembangan JHT penyangga investasi bersumber dari investasi JHT netto peiode sebelumnya.

Formula dana pengembangan penyangga adalah sebagai berikut:
Dana Pengembangan JHT Penyangga dihitung dengan formula:

Dana Pengembangan JHT = 21,60% x Hasil_JHT1 x U_JHT

Keterangan:
- Hasil_JHT adalah hasil pengembangan JHT untuk perhitungan saldo JHT di awal periode berjalan dan untuk perhitungan pembayaran saldo JHT

- U_JHT adalah utang jatuh tempo ditambah utang JHT sesuai RSJHT dan utang JHT belum sesuai RSJHT

b. Dana Pengembangan JHT Penyangga (*Buffer*) Investasi
Dana Pengembangan JHT Penyangga (*Buffer*) digunakan untuk mempertahankan tingkat hasil pengembangan JHT yang stabil dan menjaga tingkat hasil pengembangan JHT yang kompetitif dengan tingkat bunga pasar.

Dana Pengembangan JHT Penyangga (*Buffer*) Investasi dihitung dengan formula:

Dana Pengembangan JHT - *Buffer* = 21,60% x Hasil_JHT1 x U_JHT[2]

Keterangan:
1. Hasil_JHT[1] adalah hasil pengembangan JHT untuk perhitungan saldo JHT diawal periode berjalan dan untuk perhitungan pembayaran saldo JHT.
2. U_JHT[2] adalah utang JHT Jatuh Tempo ditambah utang JHT sesuai RSJHT ditambah utang JHT belum sesuai RSJHT.

c. Dana Pengembangan JHT Penyesuaian Hasil Pengembangan Setelah RUPS
Dana pengembangan JHT penyesuaian hasil pengembangan setelah RUPS berasal dari alokasi hasil investasi JHT netto yang belum didistribusikan per tanggal 31 Desember karena laporan keuangan audit belum disahkan RUPS.

d. Dana Pengembangan JHT Surplus
Dana pengembangan JHT surplus adalah hasil dari pengembangan dana JHT yang akan dikembalikan kepada peserta berdasarkan hasil dari investasi bersih JHT dari tahun berjalan dan sisa dari pengembangan tahun lalu yang ditetapkan pada RUPS tahun sebelumnya. Perhitungan untuk batas atas pada dana pengembangan JHT setelah RUPS adalah sebagai berikut:

$$\text{Batas Atas (Surplus) Investasi JHT} = \left[\begin{array}{l} 0.10\% \times \left(\begin{array}{l} \text{Utang\_JHT\_Jatuh Tempo (t-1)} \\ \text{Utang\_JHT\_Sesuai\_RSJHT (t-1)} \\ \text{Utang\_JHT\_Belum\_Selesai\_RSJHT (t-1)} \end{array} \right) \\ \qquad + \\ 0.10\% \times 0.50 \times \text{Penerimaan Iuran JHT} \end{array} \right]$$

3.v. Liabilitas JHT Jatuh Tempo
Utang JHT jatuh tempo adalah seluruh iuran JHT beserta hasil pengembangannya yang harus dibayarkan kepada peserta yang mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dalam jangka waktu satu tahun ke depan sejak tanggal neraca.

3.w. Iuran Belum Rinci
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/289/112004 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Program Jamsostek yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No. KEP/77/032008 dan Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bahwa penerimaan iuran dari perusahaan yang belum didukung dengan data upah tidak dapat diakui sebagai pendapatan iuran atau penambah utang JHT. Penerimaan iuran dimaksud akan dicatat pada akun "Iuran Belum Rinci" pada kelompok liabilitas kepada peserta.

3.x. Cadangan Teknis
Cadangan Teknis untuk JKK dan JKM dibentuk berdasarkan perhitungan aktuaria dengan metode prospektif, berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan No. S.1101/MK.17/1994 tanggal 21 Juli 1994, dengan asumsi aktuaria sebagai berikut:

Tingkat Bunga	8,00%
Faktor Quota	0,50%
Tingkat Mortalita	CSO 1958
Masa Kepesertaan	sampai 55 tahun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jamsostek, pembentukan besarnya cadangan JKK dan JKM untuk pertanggungan dengan jangka waktu paling lama satu tahun adalah sebesar 40% dari penerimaan iuran JKK dan JKM tahun berjalan.

Pembentukan cadangan teknis JPK dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2004 yaitu sebesar 10% dari penerimaan iuran JPK tahun berjalan dan tidak bersifat akumulatif.

Cadangan teknis katastrofa merupakan cadangan yang dibentuk untuk mengantisipasi banyaknya klaim yang muncul karena terjadinya bencana alam.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/49/022006 tanggal 28 Februari 2006, beban cadangan katastrofa JKK, JKM, dan JPK adalah sebesar 0,5% dari penerimaan iuran tahun berjalan dan diakumulatifkan pada cadangan katastrofa.

Mulai tahun 2012, Perusahaan tidak melakukan pencadangan teknis katastrofa karena bertentangan dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dan PSAK 62 (Revisi 2011) Kontrak Asuransi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai PSAK 62 (Kontrak Asuransi) Par 14 angka 1, disebutkan bahwa tidak mengakui sebagai liabilitas setiap provisi untuk kemungkinan klaim masa mendatang, jika klaim tersebut timbul karena kontrak asuransi yang tidak ada pada akhir periode pelaporan (seperti provisi katastrofa dan provisi penyetaraan (equalization provisions)).
2. Risiko atas kejadian katastrofa baik untuk kematian maupun kecelakaan kerja bukan merupakan risiko yang tercakup dalam jenis pertanggungan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan Jamsostek.
3. Khusus untuk Program JPK, PT Jamsostek (Persero) tidak memiliki eksposure risiko katastrofa karena karakteristik penyelenggaraan JPK sebagaimana berlaku saat ini adalah sistem manage care, sehingga risiko pengobatan (termasuk karena sebab katastrofa, misalnya wabah) seluruhnya telah dialihkan dari PT Jamsostek (Persero) kepada PPK 1 & 2 bersamaan dengan pembayaran kapitasi.

3.y. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:

1. Perusahaan dan entitas anak memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya;
3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:

1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas nya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

3.z. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Perusahaan dan Entitas anak membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di neraca merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

Perusahaan menyelenggarakan program dana pensiun dan purna jasa untuk karyawan yang diangkat sebelum bulan September 2011 diselenggarakan dengan program manfaat pasti. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi Perusahaan yang besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Untuk karyawan yang diangkat terhitung mulai bulan September 2011, perusahaan mengikutsertakan pada program dana pensiun iuran pasti, jumlah kontribusi tetap terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi perusahaan sebesar 12,8%.

Perusahaan juga menyelenggarakan program iuran pasti untuk tunjangan hari tua (THT) dimana kontribusi karyawan dan Perusahaan ditetapkan masing-masing sebesar 4% dari gaji pokok per bulan.

3.aa. Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

DPKP adalah dana yang dihimpun dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja program Jamsostek dan atau keluarganya yang diprioritaskan bagi yang kurang mampu dan membantu badan/unit usaha yang mempunyai keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan peserta program Jamsostek terutama bagi badan/unit usaha skala kecil.

Akun DPKP disajikan dalam laporan konsolidasian dalam kelompok liabilitas dan terdiri dari DPKP untuk operasional dan DPKP telah disalurkan.

Perubahan DPKP tahun berjalan disajikan secara terpisah dalam laporan kinerja program DPKP.

3.ab. Pengakuan Pendapatan Iuran dan Beban

Perusahaan dan entitas anak mengakui dan mencatat pendapatan dan beban dengan basis akrual. Khusus untuk Iuran JHT diakui dan dicatat sebagai liabilitas pada saat diterima dan denda atas keterlambatan pembayaran iuran JHT, diakui dan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada laba rugi pada saat diterima. Untuk Piutang Iuran, Perusahaan mencatat dari bulan tunggakan sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaporan.

3.ac. Biaya Pengelolaan Program JHT

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.010/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua, ditetapkan bahwa persentase biaya pengelolaan JHT tahun 2013 sebesar 1,35% dan untuk tahun 2012 sebesar 1,39% dari rata-rata dana investasi JHT.

3.ad. Perpajakan

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan *balance sheet liability method*. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan dan yang akan digunakan pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima, atau dalam hal Perusahaan dan entitas anak mengajukan banding, ketika:

1. Pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap kewajiban perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat, atau;
2. Pada saat dimana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, dimana hasil yang diharapkan dari proses banding secara signifikan tidak pasti, maka pada saat itu perubahan kewajiban perpajakan diakui berdasarkan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diajukan banding.

Pajak kini dihitung berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk menyelesaikan saldo-saldo tersebut secara neto.

3.ae. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki resiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perusahaan dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan Teknis

Perhitungan cadangan teknis untuk JKK dan JKM dibentuk berdasarkan perhitungan aktuaria dengan metode prospektif, sesuai surat persetujuan Menteri Keuangan No. S.1101/MK.17/1994 tanggal 21 Juli 1994. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jamsostek, pembentukan besarnya cadangan JKK dan JKM untuk pertanggungan dengan jangka waktu paling lama satu tahun adalah sebesar 40% dari penerimaan iuran JKK dan JKM tahun berjalan. Pembentukan cadangan teknis JPK dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2004 yaitu sebesar 10% dari penerimaan iuran JPK tahun berjalan dan tidak bersifat akumulatif. Asumsi yang digunakan untuk perhitungan cadangan teknis dapat berbeda dengan kondisi pasar saat ini.

Liabilitas Pasca Kerja

Nilai kini liabilitas pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja.

Perusahaan dan entitas anak menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan kerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Estimasi Umur Manfaat Properti Investasi, Aset Tetap dan Sarana Kesejahteraan Peserta
Perusahaan, entitas anak dan DPKP melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis properti investasi, aset tetap dan sarana kesejahteraan peserta berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi fisik dan teknis serta perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (mark-to-model). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data primary dealers, money brokers, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi provider info. Metode yang digunakan adalah metode Nelson Siegel Svensson. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

Pajak Penghasilan
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan *balance sheet liability method*. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui hanya ketika pajak tangguhan yang timbul dapat dipulihkan, dalam hal ini tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi jumlah pendapatan iuran, beban jaminan, beban cadangan teknis dan beban usaha di masa depan.

3.af. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 7 (revisi 2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Perusahaan dan entitas anak telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan konsolidasian telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi. Pihak-pihak berelasi adalah:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor

b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

4. Manajemen Risiko

a. Organisasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko di Perusahaan saat ini berada dibawah tanggung jawab Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Manajemen Risiko. Terkait dengan pengelolaan Risiko, Biro Manajemen Risiko dipantau oleh Komite Manajemen Risiko yang merupakan perangkat Dewan Komisaris.

Pada dasarnya pengelolaan risiko adalah tanggung jawab seluruh unit kerja (divisi, biro, kantor wilayah dan kantor cabang). Aktifitas operasional antara lain melakukan proses pengidentifikasian, pengukuran, monitoring dan pelaporan risiko yang merupakan bagian dari aktivitas operasional semua unit kerja. Biro Manajemen Risiko mendisain/ menetapkan kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko, memfasilitasi unit kerja dalam melaksanakan manajemen risiko dan memonitor pelaporan dan kesesuaian kerangka kerja/metodologi yang diterapkan unit kerja.

Aktifitas bisnis Perusahaan meliputi pelayanan kepesertaan dan pengelolaan dana baik berupa dana JHT dan atau dana Non JHT. Terkait dengan aktifitas tersebut, Perusahaan terekspos berbagai risiko yang meliputi risiko counterpart, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.

Khusus terkait dengan pengelolaan aset keuangan yang merupakan aset terbesar, Perusahaan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan yaitu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mentaati peraturan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2004 tentang Pedoman dan Pengelolaan Investasi Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Keputusan Direksi No. KEP/324/122010 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi, Keputusan Direksi No. KEP/34/082011 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, dan Keputusan Direksi No. KEP/353/122009 tentang pedoman GCG.

b. Manajemen Risiko *Counterpart*

Risiko *counterpart* adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan dan entitas anak.

Pihak ketiga Perusahaan dan entitas anak dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional Perusahaan dan entitas anak. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti dan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta peserta Jamsostek. Perusahaan dan entitas anak melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya default (gagal bayar). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/324/122010 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi; pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu Perusahaan juga memiliki Keputusan Direksi No. KEP/34/02011, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 and 2012 adalah sebagai berikut:

	2013				
	Nilai Kotor				
	JHT	*Non-JHT*	Entitas Anak	Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai Bersih
Aset					
Bank Investasi	6.776.635.392	3.008.890.230	--	--	9.785.525.622
Deposito Berjangka	36.015.899.000.000	4.164.097.691.000	--	--	40.179.996.691.000
Saham	23.447.285.053.660	8.364.105.171.200	--	--	31.811.390.224.860
Reksadana	10.599.347.858.624	1.167.740.745.062	--	--	11.767.088.603.686
KIK - EBA	100.000.000.000	143.922.959.405	--	--	243.922.959.405
Obligasi					
Korporasi	22.894.843.821.358	3.010.037.686.412	--	(9.466.407.750)	25.895.415.100.020
Obligasi Republik Indonesia	32.251.497.807.948	869.511.157.803	--		33.121.008.965.751
Sukuk	5.599.554.771.284	200.000.000.000	--	(6.643.093.158)	5.792.911.678.126
Piutang Iuran	--	218.016.334.647	--	(116.066.713.264)	101.949.621.383
Pinjaman DPKP	--	587.333.301.407	--	(95.234.568.299)	492.098.733.108

	2012				
	Nilai Kotor				
	JHT	*Non-JHT*	Entitas Anak	Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai Bersih
Aset					
Bank Investasi	6.767.456.509	2.892.879.555	--	--	9.660.336.064
Deposito Berjangka	37.818.400.000.000	3.230.977.491.000	1.500.000.000	--	41.050.877.491.000
Saham	19.129.685.392.700	8.305.819.972.800	--	--	27.435.505.365.500
KIK - EBA	--	180.000.000.000	--	--	180.000.000.000
Obligasi					
Korporasi	20.715.767.968.700	1.865.961.719.742	--	(22.613.289.550)	22.559.116.398.893
Obligasi Republik Indonesia	26.627.409.957.215	401.189.960.687	--	--	27.028.599.917.902
Sukuk	3.735.517.957.781	200.000.000.000	--	(6.814.373.158)	3.928.703.584.623
Reksadana	8.521.534.873.576	1.036.817.416.475	--	--	9.558.352.290.051
Piutang Iuran	--	130.782.887.218	--	(79.543.276.306)	51.239.610.913
Pinjaman DPKP	--	444.081.938.294	--	(114.007.389.836)	330.074.548.458
Aset Lainnya	222.841.055.285	21.761.948.430	--	(244.603.003.715)	--

c. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki Perusahaan. Secara umum Perusahaan memiliki risiko bunga atas nilai wajar dan risiko harga.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan dan Entitas anak terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Risiko ini terkait dengan koreksi harga instrumen saham, obligasi dan reksadana akibat pengaruh perubahan tingkat suku bunga.

Perusahaan melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan rebalancing secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan Perusahaan dan Entitas anak.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat dari perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Exposure Perusahaan dan entitas anak terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan, tersedia untuk dijual, dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. Perusahaan dan Entitas anak melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Perusahaan dan entitas anak.

Berikut adalah tabel rata-rata tingkat bunga/bagi hasil pengembangan dana JHT per tahun untuk aset dan liabilitas yang penting untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012:

	2013	2012
Aset		
Saham	16,42%	17,49%
Reksa dana	10,03%	11,17%
Obligasi	9,87%	10,61%
Deposito	6,84%	
Liabilitas		
Liabilitas JHT	8,68%	9,10%
Cadangan Teknis	8,00%	8,00%

Perusahaan menggunakan Security Market Line (SML) dan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga dan pergerakan suku bunga terhadap liabilitas dan ekuitas. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut antara lain adalah nilai IHSG dan risk free rate berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012.

Analisis sensitivitas suku bunga dan harga efek per 31 Desember 2013 dan 2012:

	2013 Rata - rata	2012 Rata - rata
Sensitivitas MTM: ∆100 poin IHSG	2,19%	2,50%
SPE - Risiko Liabilitas	26,09%	24,41%
SPE - Risiko Ekuitas	49,01%	37,98%

* MTM; Mark to Market - SPE; Selisih Penilaian Efek

d. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki perusahaan maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi), maupun potensi peristiwa ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset liquid yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi).

Risiko likuiditas yang terkait aktifitas operasional non-investasi terdapat dalam aktifitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kewajiban Perusahaan untuk membayarkan jaminan hari tua kepada peserta diatur dalam bagian keempat pasal 14 Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2009 tentang perubahan keenam atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial. Kedua regulasi ini mengatur bahwa JHT dapat dibayarkan kepada tenaga kerja saat mencapai usia 55 tahun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia dan atau berhenti bekerja sebelum mencapai usia 55 tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 tahun serta telah melewati masa tunggu 1 bulan.

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, perusahaan dan entitas anak mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, perusahaan relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih likuid dibandingkan dengan kewajibannya.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan kewajiban yang menjadi arus kas masuk atau keluar per 31 Desember 2013 dan 2012:

	2013				
	Nilai Tercatat	≤ 1 Bulan	1 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan
Aset Keuangan					
Deposito	40.179.996.691.000	7.683.390.500.000	25.492.203.191.000	7.004.093.000.000	310.000.000
Saham	31.811.390.224.860	12.088.428.578.360	11.148.845.647.500	8.574.115.999.000	--
Obligasi	59.016.424.065.774	3.714.970.487.753	1.942.036.390.353	1.821.443.966.995	51.537.973.220.673
Sukuk	5.792.911.678.128	90.356.906.844	108.000.000.000	--	5.594.554.771.284
Reksadana	11.767.088.603.745	2.963.375.614.400	6.904.442.890.014	1.899.270.099.331	--
KIK-EBA	236.764.666.755	(43.235.333.245)	--	--	280.000.000.000
Total	**148.804.575.930.262**	**26.497.286.754.112**	**45.595.528.118.867**	**19.298.923.065.326**	**57.412.837.991.957**
Liabilitas Keuangan					
Non JHT	8.424.192.889	8.424.192.889	--	--	--
Diestimasi Non JHT	58.975.781.391	--	58.975.781.391	--	--
Belum Dilaporkan Non JHT	176.011.984.984	--	--	--	176.011.984.984
Cadangan Teknis	11.480.995.099.624	--	--	--	11.480.995.099.624
JHT					
JHT Siap bayar	1.862.173.192	1.862.173.192	--	--	--
JHT Jatuh Tempo	9.302.034.953.146	9.302.034.953.146	--	--	--
JHT Kurang Bayar	35.807.989.482	35.807.989.482	--	--	--
JHT Sesuai RSJHT	125.357.753.508.487	328.612.047.519	1.643.060.237.597	1.971.672.285.117	121.414.408.938.254
Total	**146.421.865.683.195**	**9.676.741.356.228**	**1.702.036.018.988**	**1.971.672.285.117**	**133.071.416.022.862**

	2012				
Aset Keuangan	**Nilai Tercatat**	**≤ 1 Bulan**	**1 - 6 Bulan**	**6 - 12 Bulan**	**> 12 Bulan**
DOC	688.348.031.507	688.348.031.507	--	--	--
Deposito	41.050.877.491.000	11.186.992.500.000	25.971.202.991.000	3.892.682.000.000	--
Saham	27.435.505.365.500	9.892.524.711.400	11.072.526.202.500	6.470.454.451.600	--
Obligasi	49.587.716.316.795	1.123.876.414.366	2.335.186.351.805	679.736.129.912	45.448.917.420.713
Sukuk	3.928.703.584.623	--	105.000.000.000	--	3.823.703.584.623
Reksadana	9.558.352.290.051	1.262.571.907.547	2.611.792.754.312	5.683.987.628.194	--
KIK-EBA	180.000.000.000	--	--	--	180.000.000.000
Total	**132.429.503.079.476**	**24.154.313.564.820**	**42.095.708.299.617**	**16.726.860.209.706**	**49.452.621.005.336**
Liabilitas Keuangan					
Non JHT	30.282.897.225	30.282.897.225	--	--	--
Diestimasi Non JHT	11.257.169.196	--	11.257.169.196	--	--
Belum Dilaporkan Non JHT	157.258.430.233	--	--	--	157.258.430.233
Cadangan Teknis	9.388.293.758.217	--	--	--	9.388.293.758.217
JHT					
JHT Siap bayar	1.714.350.724	1.714.350.724	--	--	--
JHT Jatuh Tempo	7.249.317.741.508	7.249.317.741.508	--	--	--
JHT Kurang Bayar	34.463.922.829	34.463.922.829	--	--	--
JHT Sesuai RSJHT	100.744.721.448.887	264.091.595.977	1.320.457.979.883	1.584.549.575.860	97.575.622.297.168
Total	**117.617.309.718.819**	**7.579.870.508.262**	**1.331.715.149.079**	**1.584.549.575.860**	**107.121.174.485.617**

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan, perusahaan melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitanya.

e. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/ upaya pencapaian kerja, baik terkait aktivitas investasi maupun non-investasi dalam kurun 1 (satu) tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum penyebab risiko operasional Perusahaan masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan SOP secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi (IT). Disamping itu, Perusahaan juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Terkait dengan mitigasi risiko operasional dan risiko-risiko lainnya, Perusahaan secara bertahap terus mengembangkan Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan (BCP/DRP), pengembangan infrastruktur dan implementasi Enterprise Risk Management (ERM) berbasis COSO-ERM, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko korporasi sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (Risk Based Audit/RBA) disamping itu Perusahaan terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan Jamsostek sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas perusahaan melalui sosialisasi, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai *risk-owner* memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan efektif.

5. Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

	2013 Rp	2012 Rp
Kas		
Kas	73.968.100	90.021.437
Bank		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	174.220.715.287	146.146.815.078
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	83.533.811.744	45.779.547.222
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	19.565.629.780	6.317.062.749
PT Bank Tabungan Negara Tbk	9.160.019.080	1.119.422.410
PT Bank Syariah Mandiri	1.077.393.887	644.370.998
Dollar Amerika Serikat		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	97.386.941	78.807.986
	287.654.956.719	200.086.026.443
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank Bukopin Tbk	67.707.862.503	60.838.762.086
PT Bank Pembangunan Daerah	30.528.783.140	39.984.408.386
PT Bank Agro Tbk	8.186.966.392	7.637.806.918
PT Bank Management Building	497.871.808	--
PT Bank Permata Tbk	255.275.822	1.094.990.636
PT Bank Chinatrust Indonesia	231.884.071	195.015.032
PT Bank ANZ	214.733.893	357.761.322
PT Bank Batam	200.788.691	--
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.558.954	1.412.720.157
Total Bank	107.827.725.274	111.521.464.537
Total Kas	**395.556.650.093**	**311.697.512.417**
Setara Kas		
Giro Pos	--	57.593.759
Deposito Berjangka		
Pihak Berelasi dengan Pemerintah		
PT Bank Tabungan Negara Tbk	15.000.000.000	151.500.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	1.000.000.000
Pihak Ketiga		
PT Bank Bukopin Tbk	244.500.000.000	30.000.000.000
PT Bank Agro Tbk	--	500.000.000
Total Deposito Berjangka	259.500.000.000	183.000.000.000
Deposito on Call (DOC) Non Investasi		
Pihak Ketiga		
PT Bank Bukopin Tbk	486.000.000.000	75.000.000.000
Total Setara Kas	**745.500.000.000**	**258.057.593.759**
Total Kas dan Setara Kas	**1.141.056.650.093**	**569.755.106.176**
Jangka Waktu Deposito Berjangka	≤ 3 bulan	≤ 3 bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	6,00% - 9,00%	6,00% - 6,75%

6. Bank Investasi

Akun ini merupakan saldo kas Perusahaan dalam bentuk giro yang ditujukan untuk tujuan investasi per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
JHT		
Pihak Berelasi dengan Pemerintah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.767.456.509	4.276.852.557
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.195.918	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.982.965	--
	6.776.635.392	4.276.852.557
Non JHT		
Pihak Berelasi dengan Pemerintah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.892.879.555	1.554.067.956
PT Bank BNI (Persero) Tbk	116.010.675	--
	3.008.890.230	1.554.067.956
Jumlah	**9.785.525.622**	**5.830.920.513**

7. Deposito *On Call* (DOC)

Akun ini merupakan saldo kas Perusahaan dalam bentuk DOC yang ditujukan untuk investasi per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
JHT		
Pihak Ketiga		
PT Bank CIMB Niaga Tbk - DOC JHT	--	335.800.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Overnight JHT	--	293.052.482.523
	--	628.852.482.523
Non JHT		
Pihak Ketiga		
PT Bank CIMB NiagaTbk - DOC Non JHT	--	31.200.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Overnight Non JHT	--	28.295.548.984
	--	59.495.548.984
Jumlah	**--**	**688.348.031.507**
Jangka Waktu Deposito on Call	--	≤ 1 bulan
Tingkat Bunga Kontraktual Rata-rata	--	4,02%

8. Deposito Berjangka

Akun ini merupakan penanaman dana Perusahaan dan entitas anak per 31 Desember 2013 dan 2012 dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
JHT		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.251.000.000.000	4.868.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.907.500.000.000	4.285.100.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.850.174.000.000	3.382.700.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.344.275.000.000	2.088.200.000.000
PT Bank Syariah Mandiri	743.500.000.000	1.655.000.000.000
	15.096.449.000.000	16.279.000.000.000
Pihak Ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah	14.505.700.000.000	17.028.700.000.000
PT Bank Muamalat	2.010.800.000.000	789.200.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	1.901.950.000.000	2.405.500.000.000
PT Bank International Indonesia Tbk	1.496.500.000.000	552.000.000.000
PT Bank BTPN	548.000.000.000	576.500.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	456.500.000.000	187.500.000.000
	20.919.450.000.000	21.539.400.000.000
Jumlah JHT	36.015.899.000.000	37.818.400.000.000
Non JHT		
Pihak Berelasi		
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	864.651.300.000	318.323.300.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	714.379.000.000	33.310.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	541.593.000.000	204.926.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	273.635.000.000	131.565.500.000
PT Bank Syariah Mandiri	1.000.000.000	27.500.000.000
	2.395.258.300.000	715.624.800.000
Pihak Ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah	1.068.635.791.000	1.784.222.091.000
PT Bank Bukopin Tbk	383.448.600.000	344.330.600.000
PT Bank Muamalat	241.805.000.000	257.500.000.000
PT Bank International Indonesia Tbk	61.950.000.000	33.800.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	12.500.000.000	5.000.000.000
PT Bank BTPN	500.000.000	90.500.000.000
	1.768.839.391.000	2.515.352.691.000
Jumlah Non JHT	4.164.097.691.000	3.230.977.491.000
Jumlah Deposito Berjangka	**40.179.996.691.000**	**41.049.377.491.000**
Jangka Waktu Deposito Berjangka	3 - 12 bulan	3 - 12 bulan
Tingkat Bunga Kontraktual Rata-rata	7,20%	6,01%

9. Saham

Akun ini merupakan penanaman dana Perusahaan per 31 Desember 2013 dan 2012 dalam bentuk saham yang dikelompokkan dalam Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi dan Tersedia Untuk Dijual dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
JHT		
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	392.511.200.000	178.746.890.000
Tersedia Untuk Dijual	23.054.773.853.660	18.950.938.502.700
	23.447.285.053.660	19.129.685.392.700
Non JHT		
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	112.200.000.000	95.257.950.000
Tersedia Untuk Dijual	8.251.905.171.200	8.210.562.022.800
	8.364.105.171.200	8.305.819.972.800
Jumlah	**31.811.390.224.860**	**27.435.505.365.500**

a. Rincian Saham yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Laba Rugi adalah sebagai berikut:

	2013			
	Total Saham	**Nilai Perolehan**	**Nilai Penyesuaian**	**Nilai tercatat**
JHT				
Pihak Berelasi				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.000.000	77.449.450.000	(7.249.450.000)	70.200.000.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	12.500.000	63.718.500.000	(8.093.500.000)	55.625.000.000
	21.500.000	141.167.950.000	(15.342.950.000)	125.825.000.000
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	30.721.500	238.526.772.613	(29.620.572.613)	208.906.200.000
PT Adaro Energy Tbk	53.500.000	90.311.147.219	(32.531.147.219)	57.780.000.000
	84.221.500	328.837.919.832	(62.151.719.832)	266.686.200.000
Total JHT	**105.721.500**	**470.005.869.832**	**(77.494.669.832)**	**392.511.200.000**
Non JHT				
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	16.500.000	125.130.300.000	(12.930.300.000)	112.200.000.000
Total Non JHT	**16.500.000**	**125.130.300.000**	**(12.930.300.000)**	**112.200.000.000**
Total	**122.221.500**	**595.136.169.832**	**(90.424.969.832)**	**504.711.200.000**

	2012			
	Total Saham	**Nilai Perolehan**	**Nilai Penyesuaian**	**Nilai tercatat**
JHT				
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	12.500.000	96.349.575.000	(2.599.575.000)	93.750.000.000
PT Adaro Energy Tbk	53.795.500	92.761.660.000	(7.764.770.000)	84.996.890.000
Total JHT	**66.295.500**	**189.111.235.000**	**(10.364.345.000)**	**178.746.890.000**
Non JHT				
Pihak Berelasi				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.166.000	31.360.170.809	(1.145.970.809)	30.214.200.000
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	8.672.500	68.079.125.000	(3.035.375.000)	65.043.750.000
Total Non JHT	**16.838.500**	**99.439.295.809**	**(4.181.345.809)**	**95.257.950.000**
Total	**83.134.000**	**288.550.530.809**	**(14.545.690.809)**	**274.004.840.000**

b. Rincian Saham yang diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk Dijual adalah sebagai berikut :

	2013		
	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
JHT			
Pihak Berelasi			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.565.427.555.002	(135.539.528.202)	2.429.888.026.800
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.226.374.796.031	(44.605.596.031)	2.181.769.200.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1.982.103.300.899	(300.098.975.899)	1.682.004.325.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.526.648.958.855	(47.908.855)	1.526.601.050.000
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	1.308.048.816.632	(91.740.516.632)	1.216.308.300.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.219.695.352.027	(22.432.317.627)	1.197.263.034.400
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	773.192.041.000	(77.781.116.000)	695.410.925.000
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	829.302.067.865	(287.535.667.865)	541.766.400.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	501.791.809.872	(272.322.284.872)	229.469.525.000
PT Tambang Timah (Persero) Tbk	225.189.551.120	(44.788.811.120)	180.400.740.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	208.356.806.369	(62.287.998.869)	146.068.807.500
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	203.344.623.425	(91.246.943.465)	112.097.679.960
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	190.590.514.800	(79.390.249.800)	111.200.265.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	107.078.172.800	(45.920.922.800)	61.157.250.000
	13.867.144.366.697	(1.555.738.838.037)	12.311.405.528.660
Pihak Ketiga			
PT Astra International Tbk	2.512.505.858.509	79.059.141.491	2.591.565.000.000
PT United Tractors Tbk	1.480.491.759.828	(137.790.259.828)	1.342.701.500.000
PT Bank Central Asia Tbk	1.271.198.295.227	64.321.454.773	1.335.519.750.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	1.161.947.811.062	(30.686.386.062)	1.131.261.425.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1.017.076.640.783	47.959.909.217	1.065.036.550.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	818.898.931.404	(97.045.491.404)	721.853.440.000
PT Adaro Energy Tbk	1.032.784.064.642	(444.064.184.642)	588.719.880.000
PT Kalbe Farma Tbk	529.262.426.229	57.979.873.771	587.242.300.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	508.769.146.589	(136.145.896.589)	372.623.250.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	368.394.567.627	(74.301.362.627)	294.093.205.000
PT Vale Indonesia Tbk	471.359.196.930	(224.376.396.930)	246.982.800.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	193.424.539.806	46.323.535.194	239.748.075.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	176.350.628.800	(63.013.898.800)	113.336.730.000
PT Bank Danamon Tbk	98.501.936.130	(30.375.116.130)	68.126.820.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	28.069.166.935	12.549.433.065	40.618.600.000
PT Unilever Indonesia Tbk	2.775.932.255	1.163.067.745	3.939.000.000
	11.671.810.902.756	(928.442.577.756)	10.743.368.325.000
Total JHT	**25.538.955.269.453**	**(2.484.181.415.793)**	**23.054.773.853.660**

	2013		
	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
Non JHT			
Pihak Berelasi			
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	784.211.490.289	(702.690.289)	783.508.800.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	650.561.151.858	1.068.803.142	651.629.955.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	697.557.334.124	(96.086.434.124)	601.470.900.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	633.396.090.051	(51.734.435.451)	581.661.654.600
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	405.298.144.838	389.455.162	405.687.600.000
PT Jasa Marga (Perero) Tbk	430.087.649.223	(38.161.361.723)	391.926.287.500
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	392.735.831.352	(5.074.249.502)	387.661.581.850
PT Tambang Batubara Tbk	321.696.611.600	(90.378.111.600)	231.318.500.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	399.679.118.180	(222.070.158.180)	177.608.960.000
PT Tambang Timah (Persero) Tbk	102.944.459.602	(19.955.579.602)	82.988.880.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	89.112.300.000	(37.731.300.000)	51.381.000.000
	4.907.280.181.117	(560.436.062.167)	4.346.844.118.950
Pihak Ketiga			
PT Astra International Tbk	1.118.248.828.137	7.139.135.863	1.125.387.964.000
PT United Tractors Tbk	713.035.063.631	(56.563.878.631)	656.471.185.000
PT Adaro Energy Tbk	714.886.735.812	(286.842.775.812)	428.043.960.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	347.262.310.010	8.648.189.990	355.910.500.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	354.735.793.719	(62.401.698.719)	292.334.095.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	219.786.531.845	15.286.418.155	235.072.950.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	257.451.664.782	(78.400.414.782)	179.051.250.000
PT Vale Indonesia Tbk	310.152.003.713	(144.245.178.713)	165.906.825.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	185.432.649.725	(23.301.449.725)	162.131.200.000
PT Bank Central Asia Tbk	131.863.467.151	18.272.082.849	150.135.550.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	78.784.281.378	(25.065.681.378)	53.718.600.000
PT Kalbe Farma Tbk	39.739.040.640	10.856.679.360	50.595.720.000
PT Bank Danamon Tbk	45.499.709.298	(13.507.960.548)	31.991.748.750
PT Astra Agro Lestari Tbk	4.106.386.457	2.006.363.543	6.112.750.000
PT Lapindo International Tbk	16.938.775.000	(11.469.970.500)	5.468.804.500
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	4.911.461.147	295.488.853	5.206.950.000
PT Unilever Indonesia Tbk	872.699.874	648.300.126	1.521.000.000
	4.543.707.402.319	(638.646.350.069)	3.905.061.052.250
Total Non JHT	**9.450.987.583.436**	**(1.199.082.412.236)**	**8.251.905.171.200**
Total	**34.989.942.852.889**	**(3.683.263.828.029)**	**31.306.679.024.860**

	2012		
	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
JHT			
Pihak Berelasi			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.410.971.789.166	272.042.564.134	1.683.014.353.300
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.368.283.407.272	179.966.192.728	1.548.249.600.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.325.270.076.061	92.126.545.539	1.417.396.621.600
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	802.229.594.167	214.191.005.833	1.016.420.600.000
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	787.381.868.821	(28.824.368.821)	758.557.500.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	423.954.454.135	251.574.545.865	675.529.000.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	538.856.903.578	91.650.871.422	630.507.775.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	464.817.030.427	43.991.519.573	508.808.550.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	501.791.809.872	(232.323.009.872)	269.468.800.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	208.356.806.369	(16.549.281.369)	191.807.525.000
PT Timah (Persero) Tbk	225.189.551.120	(47.101.641.120)	178.087.910.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	107.078.172.800	(29.241.672.800)	77.836.500.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	32.811.726.378	10.326.365.222	43.138.091.600
	8.196.993.190.166	801.829.636.334	8.998.822.826.500
Pihak Ketiga			
PT Astra International Tbk	1.975.869.677.670	326.825.322.330	2.302.695.000.000
PT United Tractors Tbk	1.468.890.947.577	(92.044.922.577)	1.376.846.025.000
PT Bank Central Asia Tbk	1.057.134.401.860	293.817.923.140	1.350.952.325.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	777.238.259.836	160.361.715.164	937.599.975.000
PT Adaro Energy Tbk	959.768.913.146	(166.154.663.146)	793.614.250.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	515.908.442.386	172.096.357.614	688.004.800.000
PT Indotambang Raya Tbk	481.923.589.198	31.198.135.802	513.121.725.000
PT Kalbe Farma Tbk	413.185.265.556	92.480.934.444	505.666.200.000
PT London Sumatera Indonesia Tbk	311.529.573.346	(19.367.473.346)	292.162.100.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	235.921.311.854	40.595.488.146	276.516.800.000
PT International Nickel Tbk	471.359.196.930	(243.747.596.930)	227.611.600.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	198.442.231.537	(14.106.196.537)	184.336.035.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	176.350.628.800	(10.704.638.800)	165.645.990.000
PT Indofood Consumer Brand Prod Tbk	104.420.285.004	54.372.114.996	158.792.400.000
PT Bank Danamon Tbk	98.501.936.130	3.234.115.070	101.736.051.200
PT Unilever Indonesia Tbk	45.114.989.578	31.699.410.420	76.814.400.000
	9.291.559.650.408	660.556.025.790	9.952.115.676.200
Total JHT	**17.488.552.840.574**	**1.462.385.662.124**	**18.950.938.502.700**
Non JHT			
Pihak Berelasi			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	621.732.097.195	56.551.096.205	678.283.193.400
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	540.787.734.571	69.182.615.429	609.970.350.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	486.031.137.977	98.628.343.373	584.659.481.350
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	447.096.678.591	132.958.721.409	580.055.400.000
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	321.696.611.600	20.153.388.400	341.850.000.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	165.520.042.169	101.918.657.831	267.438.700.000
PT Jasa Marga (Perero) Tbk	199.126.378.099	30.264.121.901	229.390.500.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	399.679.118.180	(191.110.798.180)	208.568.320.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	88.147.064.296	17.912.811.704	106.059.876.000
PT Timah (Persero) Tbk	102.944.459.602	(21.019.539.602)	81.924.920.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	89.112.300.000	(23.718.300.000)	65.394.000.000
	3.461.873.622.280	291.721.118.470	3.753.594.740.750

	2012		
	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
Pihak Ketiga			
PT Astra International Tbk	684.235.506.930	119.589.968.070	803.825.475.000
PT United Tractors Tbk	713.035.063.631	(34.105.653.881)	678.929.409.750
PT Bank Central Asia Tbk	441.130.515.658	140.838.784.342	581.969.300.000
PT Adaro Energy Tbk	599.559.884.437	(94.433.884.437)	505.126.000.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	289.012.529.620	117.502.670.380	406.515.200.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	312.779.586.172	65.987.438.828	378.767.025.000
PT London Sumatera Indonesia Tbk	277.513.761.753	(9.247.511.753)	268.266.250.000
PT Indotambang Raya Tbk	214.622.167.516	(2.987.242.516)	211.634.925.000
PT International Nickel Tbk	310.152.003.713	(157.257.478.713)	152.894.525.000
PT Indofood Consumer Brand Prod Tbk	68.729.400.569	34.877.999.431	103.607.400.000
PT Kalbe Farma Tbk	57.528.404.715	37.814.635.285	95.343.040.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	77.392.592.053	16.119.007.947	93.511.600.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	78.784.281.378	(272.481.378)	78.511.800.000
PT Bank Danamon Tbk	45.499.709.298	2.274.635.502	47.774.344.800
PT Unilever Indonesia Tbk	22.033.807.082	8.687.792.918	30.721.600.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	10.924.307.000	175.693.000	11.100.000.000
PT Leyand International Tbk	16.938.775.000	(8.469.387.500)	8.469.387.500
	4.219.872.296.525	237.094.985.525	4.456.967.282.050
Total Non JHT	**7.681.745.918.805**	**528.816.103.995**	**8.210.562.022.800**
Total	**25.170.298.759.379**	**1.991.201.766.119**	**27.161.500.525.500**

10. Reksadana

Akun ini merupakan penanaman dana Perusahaan per 31 Desember 2013 dan 2012 dalam bentuk unit penyertaan reksadana yang dikelompokan dalam kelompok Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi dan Tersedia Untuk Dijual dengan rincian sebagai berikut.

	2013 Rp	2012 Rp
Dana JHT		
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	24.364.096.165	--
Tersedia Untuk Dijual	10.574.983.762.458	8.521.534.873.576
	10.599.347.858.623	8.521.534.873.576
Dana Non JHT		
Tersedia Untuk Dijual	1.167.740.745.063	1.036.817.416.475
	1.167.740.745.063	1.036.817.416.475
Jumlah	**11.767.088.603.686**	**9.558.352.290.051**

a. Rincian Reksadana yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Laba Rugi adalah sebagai berikut:

	2013			
	Total Unit	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai tercatat
JHT				
Panin Dana Maksima	418.028	25.000.000.000	(635.903.835)	24.364.096.165
Total	**418.028**	**25.000.000.000**	**(635.903.835)**	**24.364.096.165**

b. Rincian Reksadana yang diklasifikasikan sebagai Tersedia Untuk Dijual adalah sebagai berikut:

	2013		
	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
JHT			
Panin Dana Maksima	1.489.920.717.074	(191.725.723.998)	1.298.194.993.076
BNP Paribas Ekuitas	1.262.927.726.130	(118.517.287.755)	1.144.410.438.375
BNP Paribas Solaris	791.498.438.747	(107.926.659.449)	683.571.779.298
Panin Dana Prima	584.238.470.061	(43.099.513.253)	541.138.956.808
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	618.123.963.109	(99.241.542.621)	518.882.420.488
Schroder Dana Mantap Plus Ii	570.000.000.000	(58.562.649.886)	511.437.350.114
Schroder Dana Prestasi Plus	527.636.761.746	(47.705.552.243)	479.931.209.503
First State Indoequity Sectora	503.815.256.360	(34.230.663.362)	469.584.592.998
Syailendra Equity Opportunity	550.000.000.000	(85.571.187.583)	464.428.812.417
Danareksa Mawar Konsumer 10	516.035.006.181	(61.855.380.520)	454.179.625.661
Insight Scholarship Fund	450.000.000.000	1.548.000.000	451.548.000.000
BNP Paribas Prima II	408.524.101.522	(55.677.881.996)	352.846.219.526
Dana Ekuitas Prima	334.308.634.756	(38.000.854.877)	296.307.779.879
Manulife Syariah Sektoral Aman	301.038.082.120	(11.946.822.914)	289.091.259.206
Mandiri Investa Equity Movemen	325.000.000.000	(81.710.212.168)	243.289.787.832
Dana Ekuitas Andalan	281.651.540.436	(47.662.624.739)	233.988.915.697
Manulife Saham Andalan	241.532.210.189	(42.098.504.744)	199.433.705.445
Schroder Dana Prestasi	200.103.859.505	(9.172.886.214)	190.930.973.291
BNP Paribas Infrastruktur Plus	198.223.047.431	(7.334.796.273)	190.888.251.158
Schroder Dana Istimewa	177.734.619.877	2.281.040.571	180.015.660.448
Syailendra Balance Opportunit	200.000.000.000	(21.951.910.520)	178.048.089.480
BNP Paribas Pesona	201.320.264.544	(43.415.483.530)	157.904.781.014
Panin Dana Bersama Plus	150.000.000.000	(3.398.205.530)	146.601.794.470
Makara Prima	141.540.565.787	(7.881.668.534)	133.658.897.253
Mandiri Investa Atraktif	148.659.049.571	(20.909.982.872)	127.749.066.699
Manulife Dana Tumbuh Berimban	114.835.129.297	(8.361.988.418)	106.473.140.879
Danareksa Mawar Fokus 10	115.085.754.430	(17.160.231.754)	97.925.522.676
Sam Indonesian Equity Fund	100.000.000.000	(7.952.256.876)	92.047.743.124
Trim Kapital	98.603.495.293	(8.268.471.205)	90.335.024.088
Bahana Dana Infrastruktur	75.054.595.060	(5.496.089.155)	69.558.505.905
Trim Syariah Saham	75.011.653.600	(7.038.668.962)	67.972.984.638
Manulife Institutional Equity Fund	80.000.000.000	(14.812.820.202)	65.187.179.798
Danareksa Mawar Rotasi Sektor	50.000.000.000	(3.614.276.805)	46.385.723.195
Mandiri Investa Ugm	687.338.459	(70.949.162)	616.389.297
Danareksa Indeks Syariah	206.403.763	4.092.915	210.496.678
First State Multistrategy Fund	100.851.245	7.874.121	108.725.366
BNP Paribas Spektra	96.979.837	1.986.841	98.966.678
Total JHT	**11.883.514.516.130**	**(1.308.530.753.672)**	**10.574.983.762.458**

	2013		
	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
Non JHT			
Panin Dana Maksima	265.046.385.913	(37.596.218.106)	227.450.167.807
Danareksa Mawar Konsumer 10	185.107.335.640	(26.210.538.680)	158.896.796.960
Schroder Dana Istimewa	168.342.055.094	(12.178.017.952)	156.164.037.142
Manulife Saham Andalan	101.215.840.000	(7.116.948.048)	94.098.891.952
BNP Paribas Solaris	100.151.860.000	(10.005.505.492)	90.146.354.508
BNP Paribas Ekuitas	100.534.100.647	(14.173.152.825)	86.360.947.822
BNP Paribas Pesona	100.053.170.838	(14.674.015.900)	85.379.154.938
Syailendra Equity Opportunity	100.000.000.000	(20.908.608.218)	79.091.391.782
Panin Dana Prima	54.770.877.516	(915.007.029)	53.855.870.487
Mandiri Investa Equity Movemen	60.000.000.000	(12.752.116.656)	47.247.883.344
First State Indoequity Sectora	50.182.990.890	(4.430.877.335)	45.752.113.557
Danareksa Mawar Fokus 10	35.056.536.040	(7.099.093.762)	27.957.442.278
Trim Kapital	13.403.534.898	(822.341.848)	12.581.193.050
Schroder Dana Prestasi Plus	1.501.392.054	140.836.783	1.642.228.837
Schroder Dana Prestasi	845.764.613	26.492.824	872.257.437
Dana Ekuitas Andalan	162.103.033	(6.682.871)	155.420.162
First State Multistrategy Fun	76.710.408	11.882.592	88.593.000
Total Non JHT	**1.336.450.657.584**	**(168.709.912.523)**	**1.167.740.745.063**
Total	**13.219.965.173.714**	**(1.477.240.666.195)**	**11.742.724.507.521**

	2012		
	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
JHT			
BNP Paribas Ekuitas	939.761.794.845	64.879.898.938	1.004.641.693.783
Panin Dana Maksima	851.264.203.990	78.602.784.806	929.866.988.796
BNP Paribas Solaris	797.215.441.990	43.690.623.423	840.906.065.413
Schroder Dana Istimewa	733.260.006.928	61.491.413.415	794.751.420.343
Schroder Dana Prestasi Plus	514.030.653.816	34.690.510.640	548.721.164.456
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	364.301.274.993	24.582.016.445	388.883.291.438
Manulife Syariah Sektoral AMA	356.069.009.172	6.436.453.629	362.505.462.801
First State Indoequity Sectora	320.820.257.160	33.149.900.037	353.970.157.197
BNP Paribas Prima II	308.524.101.522	9.433.514.895	317.957.616.417
Dana Ekuitas Andalan	277.299.452.223	11.369.820.738	288.669.272.961
Schroder Dana Mantap Plus II	270.000.000.000	12.230.833.456	282.230.833.456
BNP Paribas Pesona	276.169.470.804	100.325.358	276.269.796.162
Panin Dana Prima	230.498.752.161	31.666.090.305	262.164.842.466
BNP Paribas Spektra	200.000.000.000	16.123.941.324	216.123.941.324
Manulife Saham Andalan	201.191.375.792	1.306.740.483	202.498.116.275
Danareksa Mawar Konsumer 10	167.022.977.458	12.904.964.959	179.927.942.417
Trim Kapital	150.000.000.005	2.976.531.499	152.976.531.504
Schroder Dana Prestasi	133.336.479.005	8.364.118.162	141.700.597.167
BNP Paribas Infrastruktur Plus	123.593.898.481	2.826.038.263	126.419.936.744
Danareksa Indeks Syariah	120.184.205.432	4.425.118.007	124.609.323.439
Dana Ekuitas Prima	115.986.298.663	4.256.286.745	120.242.585.408
Manulife Dana Tumbuh Berimban	111.121.452.702	1.296.984.506	112.418.437.208
Syailendra Equity Opportunity	100.000.000.000	803.360.012	100.803.360.012
Mandiri Investa Atraktif	93.076.486.966	5.184.275.352	98.260.762.318
Makara Prima	91.540.565.787	2.439.106.006	93.979.671.793
Bahana Dana Infrastruktur	76.763.895.611	1.237.736.737	78.001.632.348
Trim Syariah Saham	50.011.653.600	714.104.296	50.725.757.896
Danareksa Mawar Fokus 10	40.085.754.430	453.946.867	40.539.701.297
Mandiri Investa UGM	20.000.000.000	48.453.662	20.048.453.662
Mandiri Investa Syariah Berimbang	9.378.422.571	774.293.601	10.152.716.172
Danareksa Anggrek	368.161.516	83.365.095	451.526.611
First State Multistrategy Fund	100.851.246	14.423.046	115.274.292
Total JHT	**8.042.976.898.869**	**478.557.974.707**	**8.521.534.873.576**

	2012		
	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
Non JHT			
BNP Paribas Ekuitas	212.003.542.285	14.123.170.875	226.126.713.160
Panin Dana Maksima	158.963.630.739	22.659.417.264	181.623.048.003
Schroder Dana Istimewa	129.815.426.129	6.378.258.976	136.193.685.105
Schroder Dana Prestasi	115.007.218.618	1.179.802.277	116.187.020.895
Manulife Saham Andalan	101.215.840.000	(1.724.966.457)	99.490.873.543
Dana Ekuitas Andalan	70.080.628.820	208.805.600	70.289.434.420
First State Indoequity Sectora	65.000.000.000	4.984.202.639	69.984.202.639
Panin Dana Prima	47.456.353.128	2.831.314.258	50.287.667.386
Schroder Dana Prestasi Plus	44.589.872.433	5.492.703.227	50.082.575.660
Danareksa Mawar Fokus 10	25.000.000.000	595.562.450	25.595.562.450
Trim Kapital	8.284.386.565	2.217.774.262	10.502.160.827
BNP Paribas Solaris	151.860.000	21.902.182	173.762.182
Danareksa Mawar Konsumer 10	107.335.640	14.754.465	122.090.105
First State Multistrategy Fun	76.710.408	17.218.871	93.929.279
BNP Paribas Pesona	53.170.838	11.519.983	64.690.821
Total Non JHT	**977.805.975.603**	**59.011.440.872**	**1.036.817.416.475**
Total	**9.020.782.874.472**	**537.569.415.579**	**9.558.352.290.051**

11. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima Perusahaan dan Program DPKP per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
JHT		
Bunga Obligasi	1.083.502.788.720	1.015.539.242.964
Bagi Hasil Sukuk	159.981.612.267	119.186.735.111
Bunga Deposito	123.018.186.180	108.558.346.389
Dividen Saham	9.158.748.301	5.922.283.950
Bunga KIK - EBA	290.277.777	--
Sewa Properti Investasi	--	4.212.467.734
Bunga Deposito *On Call*	--	211.432.704
Pendapatan Investasi Lainnya	--	339.979.598
	1.375.951.613.245	1.253.970.488.450
Non JHT		
Bunga Obligasi	43.205.955.222	29.053.141.194
Bunga Deposito	7.187.824.053	6.487.535.328
Dividen Saham	5.154.362.685	2.894.084.250
Bagi Hasil Sukuk	2.148.068.056	2.509.034.725
Bunga KIK - EBA	105.343.611	625.812.500
Sewa Properti Investasi	--	414.987.300
	57.801.553.627	41.984.595.297
Lain-lain		
Pendapatan Program DPKP	124.678.669.781	90.069.102.105
Bunga Deposito On Call Non Investasi	755.400.000	15.331.110
	125.434.069.781	90.084.433.215
Jumlah	**1.559.187.236.653**	**1.386.039.516.962**

12. Piutang Pendapatan Jatuh Tempo

Akun ini merupakan piutang bunga deposito dan obligasi yang sudah jatuh tempo dan sampai dengan tanggal laporan belum diterima.

	2013 Rp	2012 Rp
Piutang Pendapatan Deposito - JHT	3.341.623.513	9.619.128.935
Piutang Pendapatan Deposito - Jasa Konstruksi	1.223.779.729	1.322.373.560
Piutang Pendapatan Obligasi - JHT	--	800.285.625
Piutang Pendapatan Deposito - Non JHT	1.715.010	500.064.203
Piutang Pendapatan Deposito - TK Mandiri	72.221.048	58.725.789
Jumlah	**4.639.339.300**	**12.300.578.112**

13. Piutang Investasi

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari transaksi atas penjualan properti investasi dan penjualan saham, yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya (T+3) dan akan selesai pada bulan berikutnya *(outstanding transaction).*

	2013 Rp	2012 Rp
Piutang Penjualan Saham	93.219.307.011	--
Piutang Sewa Gedung	13.988.173.480	--
Piutang Penjualan Reksadana	--	132.571.488.082
Jumlah	**107.207.480.491**	**132.571.488.082**

14. Uang Muka Kerja Pegawai

Akun ini merupakan persekot kerja Perusahaan dan Program DPKP untuk keperluan dinas yang belum dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 11.756.349.377 dan Rp 6.410.834.890.

15. Uang Muka Kesejahteraan Peserta

Akun ini merupakan saldo uang muka pembangunan rumah sakit pekerja di Kawasan Berikat Nusantara per 31 Desember 2013. Rumah Sakit tersebut akan diserahterimakan dari PT KBN (Persero) kepada Perusahaan setelah adanya peresmian, setelah terlebih dahulu dilakukan proses audit oleh auditor independen.

16. Beban Dibayar di Muka

Akun ini terdiri dari:

	2013 Rp	2012 Rp
Beban Sewa Bangunan Kantor	9.976.402.144	14.255.029.321
Beban Sewa Lain	3.175.968.556	2.184.330.305
Beban Gaji Outsourcing PT Bijak	3.165.558.999	--
Beban Sewa Rumah Jabatan	2.792.025.459	2.409.387.504
Beban Asuransi	1.809.545.237	1.235.536.977
Beban Lain	2.566.094.488	2.832.519.212
Jumlah	**23.485.594.883**	**22.916.803.319**

17. Piutang Iuran Non JHT

Akun ini merupakan saldo piutang iuran Perusahaan per 31 Desember 2013 dan 2012 yang meliputi JKK, JKM, JPK dan Jakon dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Piutang Iuran		
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	74.323.625.102	8.101.154.170
Jaminan Kematian (JKM)	25.014.187.545	2.972.348.384
Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK)	83.877.802.574	7.578.590.114
Jaminan Konstruksi (Jakon)	34.800.719.426	112.130.794.550
	218.016.334.647	**130.782.887.218**
Penyisihan Penurunan Nilai		
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	(35.775.326.550)	(1.889.099.140)
Jaminan Kematian (JKM)	(13.348.597.367)	(5.166.100.278)
Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK)	(40.616.680.311)	(4.670.148.480)
Jaminan Konstruksi (Jakon)	(26.326.109.036)	(67.817.928.407)
	(116.066.713.264)	(79.543.276.305)
Jumlah	**101.949.621.383**	**51.239.610.913**

Rincian umur piutang iuran non JHT adalah sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Lancar	3.463.445.544	29.414.366.376
Kurang Lancar	38.451.609.107	3.869.834.979
Macet	176.101.279.996	97.498.685.902
Jumlah	218.016.334.647	130.782.887.257
Penyisihan Penurunan Nilai	(116.066.713.264)	(79.543.276.344)
Total	**101.949.621.383**	**51.239.610.913**

18. Pinjaman yang Diberikan

Akun ini merupakan pinjaman para peserta Jamsostek atas program Pinjaman DPKP dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kepada peserta per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Pinjaman Uang Muka Perumahan	562.763.190.784	418.119.716.300
Pinjaman Koperasi Tenaga Kerja	21.400.264.360	20.887.751.438
Pinjaman DTMK	752.553.910	752.553.910
Pinjaman Provider Pelkes	2.417.292.354	4.321.916.645
	587.333.301.408	444.081.938.293
Penyisihan Pinjaman Program DPKP	(84.085.924.851)	(101.882.591.564)
Penyisihan Pinjaman Perumahan	(9.902.372.513)	(10.473.526.733)
Penyisihan Koperasi Tenaga Kerja	(652.464.240)	(752.553.910)
Penyisihan DTMK	(593.806.696)	(898.717.629)
Penyisihan Provider Pelkes	(95.234.568.300)	(114.007.389.836)
Jumlah	**492.098.733.108**	**330.074.548.457**

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya pinjaman tersebut.

19. Piutang Usaha

Akun ini merupakan piutang usaha entitas anak yang terdiri dari:

	2013 Rp	2012 Rp
Pihak Ketiga		
TKI Industri Korea	6.817.559.700	6.817.559.700
PT Infokom Bina Ardinusa	4.492.800.000	4.492.800.000
Taiwan	708.433.332	--
Proyek	203.907.519	724.454.200
Mitra Outsourcing	192.636.702	600.172.057
Singapura	150.207.800	708.433.332
Investasi Peralatan Parkir	--	753.754.710
Lain - Lain	1.146.011.000	900.120.009
	13.711.556.053	14.997.294.008
Penyisihan Penurunan Nilai	(11.710.219.975)	(11.710.219.975)
	2.001.336.078	**3.287.074.033**

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

20. Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor

Akun ini terdiri dari:

	2013 Rp	2012 Rp
Barang Cetakan	2.650.458.010	3.105.466.336
Perlengkapan Komputer Habis Pakai	2.467.097.527	2.109.058.704
Alat Tulis Kantor	668.807.791	503.048.919
Materai	672.223.927	473.358.400
Jumlah	**6.458.587.255**	**6.190.932.359**

21. KIK - EBA

Akun ini merupakan penempatan dana dalam bentuk KIK-EBA (Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset) per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 243.922.959.405 dan Rp 180.000.000.000.

	2013 Rp	2012 Rp
KIK - EBA	243.922.959.405	180.000.000.000
Jumlah	**243.922.959.405**	**180.000.000.000**

	2013		
	Nilai Nominal	Biaya Perolehan	Nilai Tercatat
JHT			
Pihak Berelasi			
Efek Beragunan Aset Danareksa			
BTN 03-KPR Kelas A 2012	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Total JHT	**100.000.000.000**	**--**	**100.000.000.000**
Non JHT			
Pihak Berelasi			
Efek Beragunan Aset Danareksa			
BTN 04-KPR Kelas A 2012	143.922.959.405	--	143.922.959.405
Total Non JHT	**143.922.959.405**	**--**	**143.922.959.405**
Total	**243.922.959.405**	**--**	**243.922.959.405**

	2012		
	Nilai Nominal	Biaya Perolehan	Nilai Tercatat
Non JHT			
Pihak Berelasi			
Efek Beragunan Aset Danareksa			
BTN 03-KPR Kelas A 2012	180.000.000.000	--	180.000.000.000
Total	**180.000.000.000**	**--**	**180.000.000.000**

22. Sukuk

Akun ini merupakan penanaman dana Perusahaan per 31 Desember 2013 dan 2012 dalam bentuk sukuk yang dikelompokan dalam diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
JHT		
Sukuk - Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	33.356.906.842	33.356.906.842
Sukuk - Yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	5.559.554.771.284	3.695.346.677.781
	5.592.911.678.126	3.728.703.584.623
Non JHT		
Sukuk - Yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	200.000.000.000	200.000.000.000
Jumlah	**5.792.911.678.126**	**3.928.703.584.623**

a. Rincian sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi adalah sebagai Berikut:

	2013		
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Tercatat
JHT			
Pihak Ketiga			
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker 2007	33.356.906.842	33.356.906.842	33.356.906.842
Total Non JHT - Obligasi Korporasi	**33.356.906.842**	**33.356.906.842**	**33.356.906.842**

	2012		
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Tercatat
JHT			
Pihak Ketiga			
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker 2007	33.356.906.842	33.356.906.842	33.356.906.842
Total Non JHT - Obligasi Korporasi	**33.356.906.842**	**33.356.906.842**	**33.356.906.842**

Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker tahun 2007 dalam kelompok Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (FVPL) JHT dengan nominal Rp 40.000.000.000 dinyatakan telah memenuhi syarat penurunan nilai *(permanent decline)* karena kupon yang harus diterima tanggal 5 April 2012 tidak dibayarkan, Dengan menggunakan metode Discounted Cash Flows (DCF), ditetapkan nilai wajar obligasi yang baru yaitu sebesar 83,39% atau Rp 33.356.906.842. Atas penyesuaian ini diakui kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2012 sebesar Rp 6.643.093.158.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 27/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tangal 22 Maret 2013, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) dan perjanjian perdamaian tanggal 13 Maret 2013 telah disahkan dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut. Atas putusan pengadilan tersebut BLTA melaksanakan restrukturisasi kewajiban pembayaran Liabilitas Perseroan dan anak-anak perusahaannya secara bersama-sama.

Dalam perjanjian perdamaian diputuskan:

Jangka waktu pembayaran Sukuk Ijarah maksimum 10 tahun dimana semua jumlah pembayaran harus dibayarkan seluruhnya pada tanggal 31 Maret 2023;
Pelunasan yang dipercepat berasal dari *cash sweep mechanism*;
Tingkat Cicilan Imbalan Ijarah tertunggak sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2013 sebesar 5% per tahun;
Seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah yang tertunggak dan yang belum dibayarkan sebelum 1 Juli 2012 dihapuskan;
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah tertunggak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2015 akan dikapitalisasi ke sisa Imbalan Ijarah; dan
Khusus Tingkat cicilan imbalan Ijarah sebesar 5% tahun 1-3, sebesar 7% tahun 4-7, sebesar 9% tahun 8-10, pembayaran secara tunai triwulanan (dibayar di belakang periode) dimulai sejak 30 Juni 2015.

b. Rincian sukuk yang diukur pada Yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo terdiri dari:

	2013		
	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
JHT			
Pihak Berelasi			
Sukuk Pemerintah			
PBS-04	2.707.396.000.000	(201.609.303.641)	2.505.786.696.359
SBSN IFR0010	784.997.000.000	77.209.312.663	862.206.312.663
Surat Berharga Syariah Negara I	700.000.000.000	--	700.000.000.000
PBS-005	600.000.000.000	(76.014.621.438)	523.985.378.562
Surat Berharga Syariah Negara-2	300.000.000.000	--	300.000.000.000
SBSN IFR0006	250.000.000.000	576.383.700	250.576.383.700
Total Sukuk Pemerintah	5.342.393.000.000	(199.838.228.716)	5.142.554.771.284

	2013		
	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
Sukuk Korporasi			
PLN Sukuk Ijarah II TAHUN 2007	94.000.000.000	--	94.000.000.000
PLN Sukuk VB /2010	73.000.000.000	--	73.000.000.000
Syariah Ijarah PLN III 2009 Seri A	57.000.000.000	--	57.000.000.000
Sukuk Syariah Ijarah PLN I / 2006	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Adhi Sukuk Mudharabah I Tahap I 2012	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap II Tahun 2013	10.000.000.000	--	10.000.000.000
Total Sukuk Korporasi	314.000.000.000	--	314.000.000.000
Pihak Ketiga			
Sukuk Korporasi			
Sukuk Ijarah Indosat II/2007	88.000.000.000	--	88.000.000.000
Indosat Ijarah V tahun 2012	15.000.000.000	--	15.000.000.000
Total Sukuk Korporasi	103.000.000.000	--	103.000.000.000
Total JHT	**5.759.393.000.000**	**(199.838.228.716)**	**5.559.554.771.284**
Non JHT			
Pihak Berelasi			
Sukuk Pemerintah			
PLN Sukuk VB /2010	60.000.000.000	--	60.000.000.000
Total Sukuk Pemerintah	60.000.000.000	--	60.000.000.000
Pihak Ketiga			
Indosat Ijarah V tahun 2012	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	40.000.000.000	--	40.000.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B	20.000.000.000	--	20.000.000.000
Total Sukuk Korporasi	**140.000.000.000**	**--**	**140.000.000.000**
Total Non JHT	**200.000.000.000**	**--**	**200.000.000.000**
Total	**5.959.393.000.000**	**(199.838.228.716)**	**5.759.554.771.284**

	2012		
	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
JHT			
Pihak Berelasi			
Sukuk Pemerintah			
PBS-04	1.172.015.000.000	(104.969.615.235)	1.067.045.384.765
SBSN IFR0010	784.997.000.000	80.692.439.550	865.689.439.550
Surat Berharga Syariah Negara-2	700.000.000.000	--	700.000.000.000
Surat Berharga Syariah Negara I	300.000.000.000	--	300.000.000.000
SBSN IFR0006	250.000.000.000	611.853.466	250.611.853.466
Total Sukuk Pemerintah	3.207.012.000.000	(23.665.322.219)	3.183.346.677.781

	2012		
	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
Sukuk Korporasi			
PLN Sukuk Ijarah II TAHUN 2007	94.000.000.000	--	94.000.000.000
PLN Sukuk VB /2010	73.000.000.000	--	73.000.000.000
Syariah Ijarah PLN III 2009 Seri A	57.000.000.000	--	57.000.000.000
Sukuk Syariah Ijarah PLN I / 2006	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Adhi Sukuk Mudharabah I Tahap I 2012	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Total Sukuk Korporasi	304.000.000.000	--	304.000.000.000
Pihak Ketiga			
Sukuk Korporasi			
Indosat Sukuk Ijarah III /2008	105.000.000.000	--	105.000.000.000
Sukuk Ijarah Indosat II/2007	88.000.000.000	--	88.000.000.000
Indosat Ijarah V tahun 2012	15.000.000.000	--	15.000.000.000
Total Sukuk Korporasi	208.000.000.000	--	208.000.000.000
Total JHT	**3.719.012.000.000**	**(23.665.322.219)**	**3.695.346.677.781**
Non JHT			
Sukuk Pemerintah			
Pihak Berelasi			
PLN Sukuk VB /2010	60.000.000.000	--	60.000.000.000
Total Sukuk Pemerintah	60.000.000.000	--	60.000.000.000
Pihak Ketiga			
Indosat Ijarah V tahun 2012	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	40.000.000.000	--	40.000.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B	20.000.000.000	--	20.000.000.000
Total Sukuk Korporasi	**140.000.000.000**	**--**	**140.000.000.000**
Total Non JHT	**200.000.000.000**	**--**	**200.000.000.000**
Total	**3.919.012.000.000**	**(23.665.322.219)**	**3.895.346.677.781**

23. Obligasi

Akun ini merupakan penanaman dana Perusahaan per 31 Desember 2013 dan 2012 dalam bentuk obligasi yang dikelompokan dalam Nilai Wajar melalui Laba Rugi, Tersedia Untuk Dijual dan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Dana JHT		
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	1.837.634.995.000	64.968.450.000
Tersedia Untuk Dijual	1.669.659.089.750	1.840.932.645.865
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	51.629.581.136.807	45.414.663.540.500
	55.136.875.221.557	47.320.564.636.365
Dana Non JHT		
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	45.120.108.000	47.640.340.000
Tersedia Untuk Dijual	327.333.180.000	137.352.924.000
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	3.507.095.556.214	2.082.158.416.429
	3.879.548.844.214	2.267.151.680.429
Jumlah	**59.016.424.065.771**	**49.587.716.316.794**

a. Rincian Obligasi yang Diklasifikasikan ke dalam Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut:

	2013				
	Peringkat	Nilai Nominal	Biaya Perolehan	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui	Nilai Tercatat
JHT					
Obligasi Pemerintah					
Pihak Berelasi					
FR0065	idAAA	1.343.589.000.000	1.371.076.497.494	(615.717.494)	1.370.460.780.000
FR058	idAAA	440.000.000.000	513.928.484.799	(89.328.484.799)	424.600.000.000
		1.783.589.000.000	1.885.004.982.293	(89.944.202.293)	1.795.060.780.000
Obligasi Korporasi					
Pihak Berelasi					
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	30.000.000.000	30.000.000.000	(1.905.900.000)	28.094.100.000
Pihak Ketiga					
BCA Finance Tahap I/2012 seri D	idAA+	15.000.000.000	15.000.000.000	(519.885.000)	14.480.115.000
		45.000.000.000	45.000.000.000	(2.425.785.000)	42.574.215.000
Total Obligasi JHT		**1.828.589.000.000**	**1.930.004.982.293**	**(92.369.987.293)**	**1.837.634.995.000**
Non JHT					
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Medco Energi Internasional II/09	idAA-	44.000.000.000	44.000.000.000	(1.120.108.000)	45.120.108.000
Total Obligasi Non JHT		**44.000.000.000**	**44.000.000.000**	**(1.120.108.000)**	**45.120.108.000**
Total		**1.872.589.000.000**	**1.974.004.982.293**	**(93.490.095.293)**	**1.882.755.103.000**

	2012				
	Peringkat	Nilai Nominal	Biaya Perolehan	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui	Nilai Tercatat
JHT					
Obligasi Pemerintah					
Pihak Berelasi					
FR0065	idAAA	18.544.000.000	18.985.549.013	274.524.497	19.193.040.000
		18.544.000.000	18.985.549.013	274.524.497	19.193.040.000
Obligasi Korporasi					
Pihak Berelasi					
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	30.000.000.000	30.000.000.000	495.900.000	30.495.900.000
Pihak Ketiga					
BCA Finance Tahap I/2012 seri D	idAA+	15.000.000.000	15.000.000.000	279.510.000	15.279.510.000
		45.000.000.000	45.000.000.000	775.410.000	45.775.410.000
Total Obligasi JHT		**63.544.000.000**	**63.985.549.013**	**1.049.934.497**	**64.968.450.000**
Non JHT					
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Medco Energi Internasional II/09	idAA-	44.000.000.000	44.000.000.000	(1.204.940.000)	47.640.340.000
Total Obligasi Non JHT		**44.000.000.000**	**44.000.000.000**	**(1.204.940.000)**	**47.640.340.000**
Total		**107.544.000.000**	**107.985.549.013**	**(155.005.503)**	**112.608.790.000**

b. Rincian Obligasi yang Diklasifikasikan sebagai Tersedia Untuk Dijual adalah Sebagai Berikut:

	2013				
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Penyesuaian	Nilai Tercatat
JHT					
Obligasi Pemerintah					
Pihak Berelasi					
Recap Bonds FR 0056	idAAA	58.000.000.000	9.332.197.537	(11.254.839.537)	56.077.358.000
		58.000.000.000	9.332.197.537	(11.254.839.537)	56.077.358.000
Obligasi Korporasi					
Pihak Berelasi					
Sarana Multigriya Finansial I seri C 2011	idAA	264.000.000.000	90.027.416	(1.631.259.416)	262.458.768.000
Antam Berkelanjutan I seri A 2011	idAA-	180.000.000.000	--	(12.066.300.000)	167.933.700.000
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	idAA	30.000.000.000	2.777.435.356	(2.870.585.356)	29.906.850.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	5.000.000.000	56.911.463	21.628.537	5.078.540.000
		479.000.000.000	2.924.374.235	(16.546.516.235)	465.377.858.000
Pihak Ketiga					
Bank CIMB Niaga I seri B 2011	idAAA	202.500.000.000	1.535.846.977	(7.733.764.477)	196.302.082.500
Federal Intern Finance I Tahap I 2012 seri C	idAA+	200.000.000.000	--	(8.914.600.000)	191.085.400.000
Toyota Astra Financial Service II 2012	idAA	185.000.000.000	--	(4.919.890.000)	180.080.110.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 seri B	idAAA	151.000.000.000	5.374.272.801	(7.249.692.801)	149.124.580.000
Obligasi II Agung Podomoro Land 2012	idA	101.000.000.000	--	(4.825.073.000)	96.174.927.000
Obligasi Medco Energy Int III 2012	idAA-	100.000.000.000	--	(4.730.500.000)	95.269.500.000
Berlian Laju Tanker III Tahun 2007	-	57.000.000.000	--	--	57.000.000.000
BTPN Berkelanjutan I Tahap I/2011	idAA-	50.000.000.000	--	(69.750.000)	49.930.250.000
Indonesia Exim Bank I seri C (7 tahun) 2011	idAAA	38.000.000.000	2.104.486.083	(4.189.774.083)	35.914.712.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	35.500.000.000	344.544.902	(370.104.902)	35.474.440.000
Federal International Finance XI/2011 seri C	idAA+	25.000.000.000	77.584.089	38.665.911	25.116.250.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri C/2011	idAA+	20.000.000.000	42.536.503	64.623.497	20.107.160.000
Astra Sedaya Finance XI F/2010	idAA+	10.000.000.000	88.386.539	(25.536.539)	10.062.850.000
BCA Finance IV seri D thn.2011	idAAA	10.000.000.000	19.435.089	9.674.911	10.029.110.000
BCA Finance IV seri E thn.2011	idAAA	5.000.000.000	26.929.959	(32.154.959)	4.994.775.000
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	1.000.000.000	11.974.381	(7.839.381)	1.004.135.000
		1.191.000.000.000	9.625.997.321	(42.955.715.821)	1.157.670.281.500
Cadangan Penyisihan					
Berlian Laju Tanker III Tahun 2007		(9.466.407.750)	--	--	(9.466.407.750)
		(9.466.407.750)	--	--	(9.466.407.750)
Total JHT		**1.718.533.592.250**	**21.882.569.093**	**(70.757.071.593)**	**1.669.659.089.750**
Non JHT					
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Obligasi Toyota Astra Financial Services III B Tahun 2013	idAAA	107.000.000.000	--	(2.951.060.000)	104.048.940.000
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri D	idAA+	95.000.000.000	--	(4.272.055.000)	90.727.945.000
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	71.000.000.000	--	293.585.000	71.293.585.000
Medco Energi Internasional II/09 Seri B	idAA-	50.000.000.000	--	1.272.850.000	51.272.850.000
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV/2010 Seri E	idAA+	10.000.000.000	--	(10.140.000)	9.989.860.000
Total Non JHT		**333.000.000.000**	**--**	**(5.666.820.000)**	**327.333.180.000**
Total		**2.051.533.592.250**	**21.882.569.093**	**(76.423.891.593)**	**1.996.992.269.750**

	2012				
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Penyesuaian	Nilai Tercatat
JHT					
Obligasi Pemerintah					
Pihak Berelasi					
Recap Bonds FR 0056	idAAA	58.000.000.000	9.787.515.262	3.938.010.738	71.725.526.000
		58.000.000.000	9.787.515.262	3.938.010.738	71.725.526.000
Obligasi Korporasi					
Pihak Berelasi					
Sarana Multigriya Finansial I seri C 2011	idAA-	264.000.000.000	173.624.813	6.718.623.187	270.892.248.000
Antam Berkelanjutan I seri A 2011	idAA	180.000.000.000	--	8.586.360.000	188.586.360.000
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	idAA	30.000.000.000	3.450.271.620	(35.761.620)	33.414.510.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	5.000.000.000	92.585.407	158.578.508	5.251.163.915
		479.000.000.000	3.716.481.840	15.427.800.075	498.144.281.915
Pihak Ketiga					
Bank CIMB Niaga I seri B 2011	idAAA	202.500.000.000	1.978.457.959	6.037.099.541	210.515.557.500
Federal Intern Finance I Tahap I 2012 seri C	idAA+	200.000.000.000	--	3.308.600.000	203.308.600.000
Toyota Astra Financial Service II 2012	idAA	185.000.000.000	--	767.380.000	185.767.380.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 seri B	idAAA	151.000.000.000	6.916.435.178	(3.100.967.178)	154.815.468.000
Obligasi II Agung Podomoro Land 2012	idA	101.000.000.000	--	1.106.859.000	102.106.859.000
Obligasi Medco Energy Int III 2012	idAA-	100.000.000.000	--	59.800.000	100.059.800.000
APOL II Seri B /2008	No Rated	75.000.000.000	--	--	75.000.000.000
Berlian Laju Tanker III Tahun 2007	idD	57.000.000.000	--	--	57.000.000.000
BTPN Berkelanjutan I Tahap I/2011	idAA-	50.000.000.000	--	3.842.200.000	53.842.200.000
Indonesia Exim Bank I seri C (7 tahun) 2011	idAAA	38.000.000.000	2.442.323.700	56.214.300	40.498.538.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	35.500.000.000	562.031.704	1.634.069.296	37.696.101.000
Federal International Finance XI/2011 seri C	idAA+	25.000.000.000	297.396.800	428.528.200	25.725.925.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri C/2011	idAA+	20.000.000.000	138.316.418	171.943.582	20.310.260.000
Astra Sedaya Finance XI F/2010	idAA+	10.000.000.000	426.236.865	55.603.135	10.481.840.000
BCA Finance IV seri D thn.2011	idAA+	10.000.000.000	55.920.568	213.339.432	10.269.260.000
BCA Finance IV seri E thn.2011	idAA+	5.000.000.000	43.050.204	208.934.796	5.251.985.000
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	1.000.000.000	28.763.188	(2.409.188)	1.026.354.000
		1.266.000.000.000	12.888.932.584	14.787.194.916	1.293.676.127.500
JHT					
Cadangan Penyisihan					
APOL II Seri B /2008		(13.146.881.800)	--	--	(13.146.881.800)
Berlian Laju Tanker III Tahun 2007		(9.466.407.750)	--	--	(9.466.407.750)
		(22.613.289.550)	12.888.932.584	14.787.194.916	(22.613.289.550)
Total JHT		**1.780.386.710.450**	**39.281.862.270**	**48.940.200.645**	**1.840.932.645.865**
Non JHT					
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	71.000.000.000	--	1.871.134.000	72.871.134.000
Medco Energi Internasional II/09 Seri B	idAA-	50.000.000.000	--	4.136.750.000	54.136.750.000
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV/2010 Seri E	idAA+ idAA+	10.000.000.000	--	345.040.000	10.345.040.000
Total Non JHT		**131.000.000.000**	--	**6.352.924.000**	**137.352.924.000**
Total		**1.911.386.710.450**	**39.281.862.270**	**55.293.124.645**	**1.978.285.569.865**

c. Rincian Obligasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo terdiri dari:

	2013			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
JHT				
Obligasi Pemerintah				
Pihak Berelasi				
FR0065	idAAA	3.024.032.000.000	73.281.251.738	3.097.313.251.738
Recap Bonds FR 0044	idAAA	2.968.110.000.000	(230.528.751.955)	2.737.581.248.045
Recap Bonds FR 0050	idAAA	2.459.981.000.000	(10.912.158.338)	2.449.068.841.662
FR058	idAAA	1.935.280.000.000	332.672.286.172	2.267.952.286.172
Recap Bonds FR 0054	idAAA	1.984.541.000.000	177.704.133.816	2.162.245.133.816
Recap Bonds FR 0031	idAAA	1.927.000.000.000	4.318.705.964	1.931.318.705.964
Recap Bonds FR 0040	idAAA	1.608.261.000.000	50.194.542.816	1.658.455.542.816
Recap Bonds FR 0046	idAAA	1.629.026.000.000	(100.298.129.549)	1.528.727.870.451
Recap Bonds FR 0034	idAAA	1.507.500.000.000	10.645.893.037	1.518.145.893.037
Recap Bonds FR 0042	idAAA	1.382.677.000.000	(30.894.173.949)	1.351.782.826.051
Recap Bonds FR 0057	idAAA	1.028.354.000.000	131.153.421.257	1.159.507.421.257
Recap Bonds FR 0052	idAAA	831.000.000.000	294.620.935.615	1.125.620.935.615
Recap Bonds FR 0043	idAAA	1.112.000.000.000	(791.800.704)	1.111.208.199.296
Recap Bonds FR 0027	idAAA	1.065.000.000.000	(34.421.573.120)	1.030.578.426.879
Recap Bonds FR 0026	idAAA	980.000.000.000	(2.559.444.642)	977.440.555.358
Recap Bonds FR 0045	idAAA	860.839.000.000	100.538.167.132	961.377.167.132
Recap Bonds FR 0035	idAAA	848.172.000.000	(10.809.457.884)	837.362.542.116
Recap Bonds FR 0039	idAAA	730.990.000.000	7.656.097.574	738.646.097.574
Recap Bonds FR 0036	idAAA	604.000.000.000	(36.728.941.598)	567.271.058.402
Recap Bonds FR 0038	idAAA	325.209.000.000	8.967.838.657	334.176.838.657
Recap Bonds FR 0030	idAAA	280.000.000.000	248.228.776	280.248.228.776
Recap Bonds FR 0048	idAAA	201.696.000.000	(27.110.585.193)	174.585.414.807
Recap Bonds FR 0028	idAAA	162.000.000.000	(10.225.440.324)	151.774.559.676
Recap Bonds FR 0037	idAAA	113.000.000.000	2.795.054.858	115.795.054.858
Recap Bonds FR 0032	idAAA	75.000.000.000	(3.373.298.753)	71.626.701.246
FR0062	idAAA	43.124.000.000	(1.742.152.797)	41.381.847.203
Recap Bonds FR 0056	idAAA	20.000.000.000	(832.978.655)	19.167.021.345
		29.706.792.000.000	693.567.669.948	30.400.359.669.949
Obligasi Korporasi				
Pihak Berelasi				
Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I/2009	idAA+	1.050.000.000.000	--	1.050.000.000.000
PT TELKOM II seri 2B	idAAA	1.016.000.000.000	11.321.535.457	1.027.321.535.457
PLN XIIB/2010	idAAA	839.000.000.000	10.948.199.145	849.948.199.145
Bank BTN Tahap I Th.2012	idAA	619.000.000.000	832.144.730	619.832.144.730
BTN XIV	idAA	497.000.000.000	3.475.042.685	500.475.042.685
PLN XI Tahun 2010 Seri B	idAA+	469.000.000.000	2.362.417.869	471.362.417.869
Sarana Multigriya Fin I Tahap II seri C 2012	idAA	470.000.000.000	--	470.000.000.000
PLN IX Seri A Tahun 2007	idAA+	410.000.000.000	195.998.030	410.195.998.030
PLN IX Seri B Tahun 2007	idAA+	406.000.000.000	809.709.703	406.809.709.703
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idAA	340.000.000.000	--	340.000.000.000
Pegadaian XIII/09 Seri B1	idAA+	305.000.000.000	--	305.000.000.000
SMF Berkel II Tahap II C 2013	idAA	280.000.000.000	--	280.000.000.000
BTN XIII/2009 Seri C	idAA	266.000.000.000	186.158.032	266.186.158.032
PLN VIII - A / 2006	idAAA	253.000.000.000	10.414.792.046	263.414.792.046
BTN XV Tahun 2011	idAA	255.000.000.000	411.015.640	255.411.015.640
Jasa Marga XIV JM-10/10 tahun	idAA	230.000.000.000	5.896.117.888	235.896.117.888
Jasa Marga XII Seri Q/2006	idAA	212.000.000.000	758.180.023	212.758.180.023

	2013			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
PLN XI Tahun 2010 Seri A	idAAA	202.000.000.000	--	202.000.000.000
Obl II PNM 2013	idA	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	186.000.000.000	2.022.531.416	188.022.531.416
Obl Berk. II Pegadaian Tahap I D 2013	idAA+	180.000.000.000	--	180.000.000.000
SMF Berkel II Tahap I B 2012	idAA	165.000.000.000	--	165.000.000.000
LPEI Berkl I Tahap III B 2013	idAAA	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009	A+(idn)	144.000.000.000	2.029.598.993	146.029.598.993
Obl Berk. II Pegadaian Tahap I C 2013	idAA+	120.000.000.000	--	120.000.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri A 2012	idA	115.000.000.000	--	115.000.000.000
Pegadaian XIII/09 Seri C	idAA+	115.000.000.000	--	115.000.000.000
PLN VIII - B / 2006	idAA+	105.000.000.000	658.519.677	105.658.519.677
Pegadaian Berkelanjutan I tahap II seri D 2012	idAA+	105.000.000.000	157.072.025	105.157.072.025
SMF Berkel II Tahap I C 2012	idAA	105.000.000.000	--	105.000.000.000
Obl Berk. I PLN Tahap I B 2013	idAAA	95.000.000.000	--	95.000.000.000
SMF Berkel II Tahap II B 2013	idAA	95.000.000.000	--	95.000.000.000
Pegadaian Berkelanjutan I tahap II seri C 2012	idAA+	80.000.000.000	--	80.000.000.000
PEGADAIAN I seri C 2011 BERKELANJUTAN I	idAA+	78.000.000.000	1.282.474.387	79.282.474.387
PLN VII /04	idAA+	79.000.000.000	(302.456.503)	78.697.543.497
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	dAA	74.000.000.000	515.253.238	74.515.253.238
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	53.000.000.000	186.939.466	53.186.939.466
PLN X Tahun 2009 Seri A	idAAA	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Pupuk Kalimantan Timur II/2009	idAA+	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Sarana Multigriya Fin I Tahap II seri B 2012	idAA	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B	idA	25.000.000.000	--	25.000.000.000
SMF Berkel II Tahap II D 2013	idAA	25.000.000.000	--	25.000.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	22.000.000.000	119.549.260	22.119.549.260
Sarana Multigriya Finansial I seri C 2011	idAA	20.000.000.000	199.919.838	20.199.919.838
Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri C	idA	15.000.000.000	--	15.000.000.000
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	10.000.000.000	146.615.920	10.146.615.920
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	8.000.000.000	114.991.325	8.114.991.325
		10.578.000.000.000	54.742.320.291	10.632.742.320.291
Pihak Ketiga				
Indonesia Exim Bank I seri C (7 tahun) 2011	idAAA	1.252.000.000.000	98.930.541	1.252.098.930.541
Bank Ekspor Indonesia IV/2009 Seri D	idAAA	800.000.000.000	--	800.000.000.000
Indonesia Exim I seri D/2010	idAAA	703.000.000.000	--	703.000.000.000
Bank Jabar VII/2011 seri C	idAA-	600.000.000.000	--	600.000.000.000
Astra Sedaya Finance I seri B 2012	idAA+	526.000.000.000	1.145.255.776	527.145.255.776
Federal International Finance XI/2011 seri C	idAA+	522.100.000.000	265.994.871	522.365.994.871
Astra Sedaya Finance I seri C 2012	idAA+	426.000.000.000	3.362.583.002	429.362.583.002
Indofood Sukses Makmur VI 2012	idAA+	400.000.000.000	173.745.521	400.173.745.521
CIMB Niaga Berkelanjutan I 2012 Seri B	idAAA	400.000.000.000	--	400.000.000.000
Obl. Berk. I Garuda Tahap I 2013	idA	400.000.000.000	--	400.000.000.000
OCBC NISP Berkl I Tahap IC 2013	idAAA	280.000.000.000	--	280.000.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Seri B	idAA+	274.000.000.000	677.265.597	274.677.265.597
Adira Berkelanjutan I seri C 2011	idAA+	250.000.000.000	--	250.000.000.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 seri B	idAAA	249.000.000.000	143.161.919	249.143.161.919
Obligasi Indosat V/2007 Seri A	idAA+	241.000.000.000	57.769.583	241.057.769.583
Bank Sumut III tahun 2011	idA+	240.000.000.000	--	240.000.000.000

	2013			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAA+	210.000.000.000	--	210.000.000.000
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV/2010 Seri E	idAA+	207.000.000.000	--	207.000.000.000
Astra Sedaya XII seri D	idAA+	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Bank Jabar VII/2011 seri B	idAA-	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri C/2011	idAA+	160.000.000.000	45.864.669	160.045.864.669
BSD Berkelanjutan I tahap II 2013	idAA-	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obl I PTPN X 2013	idA+	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obligasi VI Bank Jabar Banten 2009 Seri B	idAA-	150.000.000.000	--	150.000.000.000
FIF X/2010 Seri D	idAA+	130.000.000.000	169.433.214	130.169.433.214
Federal Intern Finance I Tahap I 2012 seri C	idAA+	128.000.000.000	175.207.492	128.175.207.492
BCA Finance Tahap I/2012 seri D	AAA	125.000.000.000	52.446.460	125.052.446.460
Obl Berk. I Agung Pod Land I 2013	idA	120.000.000.000	--	120.000.000.000
Indosat Vi Seri B 2008	idAA+	115.000.000.000	--	115.000.000.000
Bank CIMB Niaga I seri B 2011	idAAA	95.900.000.000	2.091.570.604	97.991.570.604
BCA Finance IV seri D thn.2011	AAA	92.000.000.000	110.287.111	92.110.287.111
Indofood V Tahun 2009	idAA+	90.000.000.000	--	90.000.000.000
Obl I Hutama Karya B 2013	idA-	90.000.000.000	--	90.000.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	idAAA	80.000.000.000	693.419.482	80.693.419.482
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAA+	80.000.000.000	--	80.000.000.000
BCA Finance IV seri E thn.2011	AAA	67.000.000.000	120.520.816	67.120.520.816
Astra Sedaya Finance XI F/2010	idAA+	65.000.000.000	--	65.000.000.000
BCA Finance Tahap I/2012 seri C	AAA	55.000.000.000	40.771.290	55.040.771.290
BSD Berkelanjutan I tahap I seri A 2012	idA-	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Obl Berk. I BCA Fin Thp IIC 2013	idAA+	43.000.000.000	--	43.000.000.000
Reksa VB 2010	idA	36.000.000.000	--	36.000.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	idA	33.000.000.000	369.965.319	33.369.965.319
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	32.000.000.000	190.877.916	32.190.877.916
Obl Berk. I BCA Fin Thp IIB 2013	idAA+	22.000.000.000	--	22.000.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAA+	20.000.000.000	296.016.121	20.296.016.121
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	12.000.000.000	151.330.860	12.151.330.860
Obl I Hutama Karya A 2013	idA-	10.000.000.000	--	10.000.000.000
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	5.000.000.000	46.728.402	5.046.728.402
		10.586.000.000.000	10.479.146.567	10.596.479.146.567
Total JHT		**50.870.792.000.000**	**758.789.136.806**	**51.629.581.136.807**
Non JHT				
Obligasi Pemerintah				
Pihak Berelasi				
Recap Bonds FR 0054	idAAA	173.000.000.000	8.554.287.963	181.554.287.963
Recap Bonds FR 0068	idAAA	115.000.000.000	(3.245.126.339)	111.754.873.661
FR058	idAAA	85.000.000.000	(5.321.507.988)	79.678.492.012
Recap Bonds FR 0052	idAAA	57.000.000.000	6.950.762.586	63.950.762.586
Recap Bonds FR 0040	idAAA	55.000.000.000	893.472.573	55.893.472.573
FR0065	idAAA	65.000.000.000	(12.641.368.806)	52.358.631.194
Recap Bonds FR 0071	idAAA	50.000.000.000	971.289.432	50.971.289.432
Recap Bonds FR 0027	idAAA	50.000.000.000	(2.683.048.806)	47.316.951.194
Recap Bonds FR 0034	idAAA	40.000.000.000	1.965.878.101	41.965.878.101
Recap Bonds FR 0031	idAAA	50.000.000.000	(8.490.608.279)	41.509.391.721
Recap Bonds FR 0045	idAAA	50.000.000.000	(10.343.687.723)	39.656.312.277
Recap Bonds FR 0046	idAAA	50.000.000.000	(10.722.368.163)	39.277.631.837
Recap Bonds FR 0042	idAAA	35.000.000.000	(4.887.072.547)	30.112.927.452
Recap Bonds FR 0044	idAAA	21.353.000.000	(6.150.498.717)	15.202.501.282
Recap Bonds FR 0032	idAAA	10.000.000.000	(330.478.850)	9.669.521.150
Recap Bonds FR 0035	idAAA	8.000.000.000	638.233.368	8.638.233.368
		914.353.000.000	(44.841.842.195)	869.511.157.804

	2013			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
Obligasi Korporasi				
Pihak Berelasi				
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	638.000.000.000	(6.657.159.202)	631.342.840.798
PLN VII /04	idAAA	181.000.000.000	1.029.620.908	182.029.620.908
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013	idA	124.000.000.000	--	124.000.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idAA-	80.000.000.000	--	80.000.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	75.000.000.000	--	75.000.000.000
Mandiri Tunas Finance VI C/2011	idAA	60.000.000.000	--	60.000.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	40.000.000.000	19.587.185	40.019.587.185
PLN VIII - A / 2006	idAAA	34.000.000.000	469.257.389	34.469.257.389
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	25.000.000.000	20.097.328	25.020.097.328
Obligasi Berkelanjutan Mandiri Tunas Fin Thp I A/2013	idAA	25.000.000.000	--	25.000.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	2.000.000.000	66.217.433	2.066.217.433
		1.284.000.000.000	(5.052.378.959)	1.278.947.621.041
Pihak Ketiga				
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	272.000.000.000	118.443.338	272.118.443.338
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAA+	150.000.000.000	--	150.000.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	100.000.000.000	--	100.000.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	idA	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAA+	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Obl Berk. I Jasa Marga Thp IC 2013	idAA	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	75.000.000.000	--	75.000.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	75.000.000.000	--	75.000.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAA+	75.000.000.000	--	75.000.000.000
Obl Berk. I Danareksa IB 2012	idA	67.000.000.000	194.336.160	67.194.336.160
Indofood V Tahun 2009	idAA+	60.000.000.000	323.248.303	60.323.248.303
Federal International Finance XI/2011 seri C	idAA+	55.000.000.000	--	55.000.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	idAAA	50.000.000.000	--	50.000.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri B	idA-	25.000.000.000	--	25.000.000.000
Obl Berk. I Danareksa IA 2012	idA	25.000.000.000	--	25.000.000.000
Reksa VB 2010	idA	24.000.000.000	--	24.000.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Ser A	idAA+	5.000.000.000	749.569	5.000.749.569
		1.358.000.000.000	636.777.370	1.358.636.777.370
Total Non JHT		**3.556.353.000.000**	**(49.257.443.785)**	**3.507.095.556.214**
Total		**54.427.145.000.000**	**709.531.693.021**	**55.136.676.693.021**

	2012			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
JHT				
Obligasi Pemerintah				
Pihak Berelasi				
Recap Bonds FR 0044	idAAA	2.968.110.000.000	(240.293.499.637)	2.727.816.500.363
Recap Bonds FR 0050	idAAA	2.339.981.000.000	(68.641.764.802)	2.271.339.235.198
Recap Bonds FR 0031	idAAA	1.927.000.000.000	5.096.128.409	1.932.096.128.409
Recap Bonds FR 0054	idAAA	1.739.541.000.000	127.828.234.241	1.867.369.234.241
Recap Bonds FR 0040	idAAA	1.608.261.000.000	52.284.512.874	1.660.545.512.874
Recap Bonds FR 0046	idAAA	1.629.026.000.000	(106.011.274.177)	1.523.014.725.823
Recap Bonds FR 0034	idAAA	1.507.500.000.000	12.363.466.863	1.519.863.466.863
Recap Bonds FR 0042	idAAA	1.382.677.000.000	(31.768.957.577)	1.350.908.042.423
Recap Bonds FR 0057	idAAA	1.028.354.000.000	132.614.540.723	1.160.968.540.723
Recap Bonds FR 0052	idAAA	831.000.000.000	303.740.590.247	1.134.740.590.247
Recap Bonds FR 0043	idAAA	1.112.000.000.000	(833.848.699)	1.111.166.151.301
Recap Bonds FR 0027	idAAA	1.065.000.000.000	(53.994.031.570)	1.011.005.968.430
Recap Bonds FR 0026	idAAA	980.000.000.000	(5.323.051.875)	974.676.948.125
Recap Bonds FR 0019	idAAA	868.000.000.000	8.980.598.823	876.980.598.823
Recap Bonds FR 0035	idAAA	848.172.000.000	(11.372.113.184)	836.799.886.816
Recap Bonds FR 0039	idAAA	730.990.000.000	8.344.596.916	739.334.596.916
Recap Bonds FR 0045	idAAA	642.000.000.000	15.352.918.746	657.352.918.746
Recap Bonds FR 0036	idAAA	604.000.000.000	(40.587.649.339)	563.412.350.661
FR0065	idAAA	550.000.000.000	5.377.803.430	555.377.803.430
Recap Bonds FR 0020	idAAA	380.000.000.000	7.932.913.909	387.932.913.909
Recap Bonds FR 0038	idAAA	325.209.000.000	10.472.162.307	335.681.162.307
Recap Bonds FR 0030	idAAA	280.000.000.000	343.678.348	280.343.678.348
Recap Bonds FR 0033	idAAA	261.493.000.000	(998.788.548)	260.494.211.452
FR058	idAAA	220.280.000.000	27.846.558.547	248.126.558.547
Recap Bonds FR 0048	idAAA	201.696.000.000	(31.005.922.509)	170.690.077.491
Recap Bonds FR 0028	idAAA	162.000.000.000	(12.309.877.923)	149.690.122.077
Recap Bonds FR 0037	idAAA	113.000.000.000	2.915.367.628	115.915.367.628
Recap Bonds FR 0032	idAAA	75.000.000.000	(3.830.170.916)	71.169.829.084
FR0062	idAAA	23.124.000.000	(1.440.514.274)	21.683.485.726
ORI 5	idAAA	20.000.000.000	(5.215.767)	19.994.784.233
		26.423.414.000.000	113.077.391.214	26.536.491.391.214
Obligasi Korporasi				
Pihak Berelasi				
Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I/2009	idAA+	1.050.000.000.000	--	1.050.000.000.000
PT TELKOM II seri 2B	idAAA	1.009.000.000.000	11.652.921.111	1.020.652.921.111
PLN XIIB/2010	idAA+	839.000.000.000	12.012.996.368	851.012.996.368
Bank BTN Tahap I Th.2012	idAA	611.000.000.000	857.289.258	611.857.289.258
BTN XIV	idAA	497.000.000.000	3.859.224.726	500.859.224.726
Sarana Multigriya Fin I Tahap II seri C 2012	idAA	470.000.000.000	--	470.000.000.000
PLN XI Tahun 2010 Seri B	idAA+	459.000.000.000	223.059.185	459.223.059.185
PLN IX Seri A Tahun 2007	idAA+	410.000.000.000	240.026.754	410.240.026.754
PLN IX Seri B Tahun 2007	idAA+	406.000.000.000	864.478.463	406.864.478.463
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idAA	340.000.000.000	--	340.000.000.000
Pegadaian XIII/09 Seri B1	idAA+	305.000.000.000	--	305.000.000.000
PLN VIII - A / 2006	idAA+	253.000.000.000	13.890.006.660	266.890.006.660
BTN XIII/2009 Seri C	idAA	266.000.000.000	608.184.102	266.608.184.102
BTN XV Tahun 2011	idAA	255.000.000.000	449.435.134	255.449.435.134
Jasa Marga XIV JM-10/10 tahun	idAA	215.000.000.000	5.231.296.626	220.231.296.626
Jasa Marga XII Seri Q/2006	idAA	212.000.000.000	1.000.081.260	213.000.081.260
PLN XI Tahun 2010 Seri A	idAA+	202.000.000.000	--	202.000.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	186.000.000.000	2.640.188.906	188.640.188.906
Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009	idAAA	144.000.000.000	3.910.877.189	147.910.877.189
SMF Berkel II Tahap I B 2012	idAA	130.000.000.000	--	130.000.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri A 2012	idA	115.000.000.000	--	115.000.000.000
Pegadaian XIII/09 Seri C	idAA+	115.000.000.000	--	115.000.000.000
PLN VIII - B / 2006	idAA+	105.000.000.000	711.779.170	105.711.779.170

	2012			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
Pegadaian Berkelanjutan I tahap II seri D 2012	idAA+	105.000.000.000	181.166.919	105.181.166.919
SMF Berkel II Tahap I C 2012	idAA	105.000.000.000	--	105.000.000.000
Jasa Marga XI Seri P/03	idAA	88.000.000.000	583.203.189	88.583.203.189
Pegadaian Berkelanjutan I tahap II seri C 2012	idAA+	80.000.000.000	--	80.000.000.000
PEGADAIAN I seri C 2011 BERKELANJUTAN I	idAA+	78.000.000.000	1.394.667.789	79.394.667.789
PLN VII /04	idAA+	79.000.000.000	(566.990.935)	78.433.009.065
Jasa Marga I Zero Coupon 3 thn	idAA	72.000.000.000	(4.894.531.995)	67.105.468.005
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	dAA	61.000.000.000	(874.276.614)	60.125.723.386
Obligasi reksa III Seri C/2008	idA	50.000.000.000	--	50.000.000.000
PLN X Tahun 2009 Seri A	idAA+	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Pupuk Kalimantan Timur II/2009	idAA	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Sarana Multigriya Fin I Tahap II seri B 2012	idAA	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	22.000.000.000	159.958.381	22.159.958.381
Sarana Multigriya Finansial I seri C 2011	idAA	18.000.000.000	344.574.260	18.344.574.260
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	10.000.000.000	260.957.856	10.260.957.856
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idA+	8.000.000.000	187.291.426	8.187.291.426
		9.460.000.000.000	54.927.865.188	9.514.927.865.188
Pihak Ketiga				
Indonesia Exim Bank I seri C (7 tahun) 2011	idAAA	1.252.000.000.000	114.743.974	1.252.114.743.974
Bank Ekspor Indonesia IV/2009 Seri D	idAAA	800.000.000.000	--	800.000.000.000
Indonesia Exim I seri D/2010	idAAA	703.000.000.000	--	703.000.000.000
Bank Jabar VII/2011 seri C	idAA-	600.000.000.000	--	600.000.000.000
Astra Sedaya Finance I seri B 2012	idAA+	526.000.000.000	1.882.977.214	527.882.977.214
Federal International Finance XI/2011 seri C	idAA+	522.100.000.000	1.018.698.651	523.118.698.651
Astra Sedaya Finance I seri C 2012	idAA+	426.000.000.000	4.184.242.059	430.184.242.059
Indofood Sukses Makmur VI 2012	idAA+	400.000.000.000	217.036.416	400.217.036.416
CIMB Niaga Berkelanjutan I 2012 Seri B	idAAA	400.000.000.000	--	400.000.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Seri B	idAA+	274.000.000.000	834.398.870	274.834.398.870
Adira Berkelanjutan I seri C 2011	idAA+	250.000.000.000	--	250.000.000.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 seri B	idAAA	249.000.000.000	184.248.662	249.184.248.662
Obligasi Indosat V/2007 Ser A	idAA+	241.000.000.000	186.891.736	241.186.891.736
Bank Sumut III tahun 2011	idA+	240.000.000.000	--	240.000.000.000
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAA+	210.000.000.000	--	210.000.000.000
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV/2010 Seri E	idAA+	207.000.000.000	--	207.000.000.000
Astra Sedaya XII seri D	idAA+	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Bank Jabar VII/2011 seri B	idAA-	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri C/2011	idAA+	160.000.000.000	149.267.211	160.149.267.211
Obligasi VI Bank Jabar Banten 2009 Seri B	idAA-	150.000.000.000	--	150.000.000.000
FIF X/2010 Seri D	idAA+	130.000.000.000	648.543.099	130.648.543.099
FIF X/2010 Seri C	idAA+	128.000.000.000	194.134.034	128.194.134.034
BCA Finance Tahap I/2012 seri D	idAA+	115.000.000.000	--	115.000.000.000
Indosat Vi Seri B 2008	idAA+	115.000.000.000	--	115.000.000.000
BCA Finance IV seri D thn.2011	idAA+	92.000.000.000	319.029.027	92.319.029.027
Indofood V Tahun 2009	idAA+	90.000.000.000	--	90.000.000.000
Indosat VI Seri A / 2008	idAA+	80.000.000.000	--	80.000.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAA+	80.000.000.000	--	80.000.000.000
Bank CIMB Niaga I seri B 2011	idAAA	75.900.000.000	2.506.026.263	78.406.026.263
Federal Intern Finance I Tahap I 2012 seri C	idAA+	68.000.000.000	129.652.621	68.129.652.621
BCA Finance IV seri E thn.2011	idAA+	67.000.000.000	193.522.856	67.193.522.856
Astra Sedaya Finance XI F/2010	idAA+	65.000.000.000	--	65.000.000.000
BSD Berkelanjutan I tahap I seri A 2012	idA+	50.000.000.000	--	50.000.000.000
BCA Finance Tahap I/2012 seri C	idAA+	45.000.000.000	--	45.000.000.000
Reksa VB 2010	idA	36.000.000.000	--	36.000.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	idA	33.000.000.000	489.800.614	33.489.800.614
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	32.000.000.000	257.252.304	32.257.252.304
Indosat VII Seri B/2009	idAA+	20.000.000.000	374.695.237	20.374.695.237
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	12.000.000.000	247.096.631	12.247.096.631
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	5.000.000.000	112.026.619	5.112.026.619
		9.349.000.000.000	14.244.284.098	9.363.244.284.098
Total JHT		**45.232.414.000.000**	**182.249.540.500**	**45.414.663.540.500**

	2012			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
Non JHT				
Obligasi Pemerintah				
Pihak Berelasi				
Recap Bonds FR 0033	idAAA	65.000.000.000	(342.028.013)	64.657.971.987
Recap Bonds FR 0040	idAAA	55.000.000.000	929.785.116	55.929.785.116
Recap Bonds FR 0027	idAAA	50.000.000.000	(4.191.085.059)	45.808.914.941
Recap Bonds FR 0034	idAAA	40.000.000.000	2.125.788.026	42.125.788.026
Recap Bonds FR 0031	idAAA	50.000.000.000	(9.045.071.632)	40.954.928.368
Recap Bonds FR 0045	idAAA	50.000.000.000	(10.383.857.131)	39.616.142.869
Recap Bonds FR 0046	idAAA	50.000.000.000	(11.145.874.372)	38.854.125.628
Recap Bonds FR 0042	idAAA	35.000.000.000	(5.006.247.791)	29.993.752.209
Recap Bonds FR 0044	idAAA	21.353.000.000	(6.357.384.469)	14.995.615.531
Recap Bonds FR 0019	idAAA	10.000.000.000	(51.650.990)	9.948.349.010
Recap Bonds FR 0032	idAAA	10.000.000.000	(375.754.060)	9.624.245.940
Recap Bonds FR 0035	idAAA	8.000.000.000	680.341.061	8.680.341.061
		444.353.000.000	(43.163.039.314)	401.189.960.686
Obligasi Korporasi				
Pihak Berelasi				
PLN VII /04	idAA+	181.000.000.000	2.046.756.080	183.046.756.080
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idAA	80.000.000.000	--	80.000.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	75.000.000.000	--	75.000.000.000
Mandiri Tunas Finance VI C/2011	idA+	60.000.000.000	--	60.000.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	40.000.000.000	25.208.114	40.025.208.114
PLN VIII - A / 2006	idAA+	34.000.000.000	646.672.627	34.646.672.627
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	25.000.000.000	32.622.036	25.032.622.036
Jasa Marga XI Seri P/03	idAA	14.000.000.000	12.901.575	14.012.901.575
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	2.000.000.000	88.682.858	2.088.682.858
		511.000.000.000	2.852.843.290	513.852.843.290
Pihak Ketiga				
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	272.000.000.000	193.210.753	272.193.210.753
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAA+	150.000.000.000	--	150.000.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	100.000.000.000	--	100.000.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	idA	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAA+	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	75.000.000.000	--	75.000.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	75.000.000.000	--	75.000.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAA+	75.000.000.000	--	75.000.000.000
Indofood V Tahun 2009	idAA+	60.000.000.000	919.977.020	60.919.977.020
Federal International Finance XI/2011 seri C	idAA+	55.000.000.000	--	55.000.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	idAAA	50.000.000.000	--	50.000.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri B	idA-	25.000.000.000	--	25.000.000.000
Reksa VB 2010	idA	24.000.000.000	--	24.000.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Ser A	idAA+	5.000.000.000	2.424.680	5.002.424.680
		1.166.000.000.000	1.115.612.453	1.167.115.612.453
Total Non JHT		**2.121.353.000.000**	**(39.194.583.571)**	**2.082.158.416.429**
Total		**47.353.767.000.000**	**143.054.956.929**	**47.496.821.956.929**

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk diatas telah memadai.

Obligasi APOL

Obligasi APOL IIB/2008 dalam kelompok AFS JHT dengan nominal Rp 75.000.000.000 dinyatakan telah memenuhi syarat penurunan nilai *(permanent decline)* karena kupon yang harus diterima tanggal 18 Desember 2010 tidak dibayarkan, Dengan menggunakan metode Discounted Cash Flows (DCF), ditetapkan nilai wajar obligasi yang baru yaitu sebesar 55,14% atau Rp 41.355.750.931. Atas penyesuaian ini diakui kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2010 sebesar Rp 33.644.249.069.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 23/PKPU/2011/PN,NIAGA,JKT,PST tanggal 10 Nopember 2011, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Arpeni Pratama Ocean Line (APOL) Tbk dan perjanjian damai tanggal 1 Nopember 2011 telah disahkan dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut.

Atas putusan pengadilan tersebut APOL melaksanakan restrukturisasi kewajiban pembayaran liabilitas Perseroan. dan anak-anak perusahaannya secara bersama-sama.

Atas putusan tersebut jatuh tempo untuk pemegang obligasi rupiah adalah 30 Juni 2021 dan bunga yang ditangguhkan tidak akan dikenakan bunga dan hanya akan dibayarkan kembali melalui pembagian mekanisme cash sweep paling lambat 31 Desember 2022.

Dengan harapan restrukturisasi perdamaian diatas dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Berdasarkan perhitungan present value dari restrukturisasi yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, nilai wajar (present value) Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri B adalah sebesar Rp 61 miliar atau 82,47% atau setara dengan effective annual rate sebesar 6,82%, Atas penyesuaian ini diakui pemulihan nilai pada 31 Desember 2011 sebesar Rp 20.497.367.269. Perusahaan telah menerima sebagian pembayaran bunga obligasi APOL II (lihat Catatan 77).

Pada tahun 2013, Obligasi APOL IIB/2008 dalam kelompok AFS JHT dengan nominal Rp 75.000.000.000 telah dijual pada tanggal 19 Desember 2013 dan 27 Desember 2013 masing-masing berjumlah Rp 45.000.000.000 dan Rp 30.000.000.000 dengan nilai jual 82,471%. Bersamaan dengan penjualan tersebut juga dilakukan pemulihan nilai atas penurunan nilai tahun 2012 sebesar Rp 13.146.881.800 dan piutang bunga periode 18 September 2010 sampai dengan 24 Agustus 2011 sebesar Rp 12.335.416.667.

Obligasi BLTA

Obligasi Berlian Laju Tanker III tahun 2007 dalam kelompok AFS JHT dengan nominal Rp 57.000.000.000 dinyatakan telah memenuhi syarat penurunan nilai *(permanent decline)* karena kupon yang harus diterima tanggal 5 April 2012 tidak dibayarkan, Dengan menggunakan metode Discounted Cash Flows (DCF), ditetapkan nilai wajar obligasi yang baru yaitu sebesar 83,39% atau Rp 47.533.592.250. Atas penyesuaian ini diakui kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2012 sebesar Rp 9.466.407.750.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 27/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tangal 22 Maret 2013, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) dan perjanjian perdamaian tanggal 13 Maret 2013 telah disahkan dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut. Atas putusan pengadilan tersebut BLTA melaksanakan restrukturisasi kewajiban pembayaran Liabilitas Perseroan dan anak-anak perusahaannya secara bersama-sama.

Dalam perjanjian perdamaian diputuskan:

- Jangka waktu pembayaran Obligasi maksimum 10 tahun mulai 30 September 2013 hingga 31 Maret 2023;
- Pelunasan yang dipercepat berasal dari *cash sweep mechanism*;
- Tingkat suku bunga obligasi tertunggak sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2013 sebear 5% per tahun;
- Seluruh jumlah bunga obligasi yang tertunggak dan yang belum dibayarkan sebelum 1 Juli 2012 dihapuskan;
- Pembayaran bunga obligasi tertunggak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2015 akan dikapitalisasi ke pokok obligasi;
- Khusus apabila Emiten tidak mampu melakukan pembayaran Bunga Obligasi sesuai jadwal pada periode 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2017 maka akan dikapitalisasi ke pokok obligasi; dan
- Tingkat suku bunga Obligasi sebesar 5% tahun 1-3, sebesar 7% tahun 4-7, sebesar 9% tahun 8-10, pembayaran secara tunai triwulanan (dibayar di belakang periode) dimulai sejak 30 Juni 2015.

24. Penyertaan Langsung

Perusahaan memiliki Penyertaan Langsung Mayoritas pada anak Perusahaan PT Binajasa Abadi Karya (BIJAK) per 31 Desember 2013 sebesar Rp 14.179.183.205 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp 13.378.566.013 yang dicatat dengan metode konsolidasi dan dilakukan eliminasi (lihat Catatan 1.e).

Akun ini merupakan penanaman dana Perusahaan dan Entitas Anak per 31 Desember 2013 dan 2012 dalam bentuk penyertaan langsung yang dikelompokan dalam Tersedia Untuk Dijual dengan rincian sebagai berikut:

		2013		2012	
	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai Nominal Rp.	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai Nominal Rp.
Dana Non JHT					
Perusahaan					
Penyertaan Langsung Minoritas - Cost Method					
Bank Syariah Bukopin	Perbankan	9,46	25.630.683.148	9,46	25.630.683.148
PT Asrinda Arthasangga	Underwriter	11	82.500.000	11	82.500.000
PT Bank Muamalat	Perbankan	0,0078	109.599.500	0,0078	109.599.500
PT Marga Mandala Sakti	Jalan Tol	0,45	14.625.000.000	0,45	14.625.000.000
PT Pusako Tarinka	Perhotelan	18,67	7.653.750.000	18,67	7.653.750.000
Total			**48.101.532.648**		**48.101.532.648**
Penyertaan Tidak Langsung - Minoritas Cost Method					
PT Jatim Krida Utama	Penyalur Tenaga Kerja	6,67	200.000.000	6,67	200.000.000
Total			**48.301.532.648**		**48.301.532.648**
Dikurangi :					
Penurunan Nilai Permanen					
PT Marga Mandala Sakti	Jalan Tol		(13.975.000.000)		(13.975.000.000)
PT Pusako Tarinka	Perhotelan		(3.512.765.200)		(3.512.765.200)
			(17.487.765.200)		(17.487.765.200)
Total Non JHT Fund			**30.813.767.448**		**30.813.767.448**

Berdasarkan surat Nomor : 063/AA/DIR/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal pembayaran dividen hasil usaha tahun 2012, PT Asrinda Arthasangga telah membayarkan dividen sebesar Rp 80.670.906.

Pada tanggal 28 Mei 2013 telah diterima dividen dari PT Marga Mandala Sakti untuk tahun buku 2012 sebesar Rp 580.654.233 atas kepemilikan 6.500.000 lembar saham (0,45%).

Pada tanggal 29 Mei 2012 telah diterima dividen dari PT Marga Mandala Sakti untuk tahun buku 2011 sebesar Rp 513.136.300 atas kepemilikan 6.500.000 lembar saham (0,45%), sesuai Memo Divisi Investasi Langsung No M/463/DIL/062012 tanggal 6 Juni 2012.

Pada tanggal 22 Juni 2012 telah diterima dividen dari PT Asrinda Arthasangga untuk tahun buku 2011 sebesar Rp 36.142.392 sesuai Memo Divisi Investasi Langsung No. M/539/DIL/062012 tanggal 28 Juni 2012.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas penyertaan langsung adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai permanen.

25. Properti Investasi

Akun ini merupakan penempatan dana investasi Perusahaan per 31 Desember 2013 dan 2012 dalam bentuk properti investasi dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Harga Perolehan:		
Dana JHT	535.525.498.804	532.402.500.374
Dana Non JHT	80.891.200.277	80.891.200.277
	616.416.699.081	613.293.700.651
Aset Dalam Konstruksi		
Dana JHT	3.236.149.594	415.390.535
Dana Non JHT	168.072.648	--
	3.404.222.242	415.390.535
Total	619.820.921.323	613.709.091.186
Akumulasi Penyusutan		
Dana JHT	257.109.216.654	239.604.111.268
Dana Non JHT	4.685.501.061	4.709.646.303
	261.794.717.715	244.313.757.571
Nilai Buku	**358.026.203.608**	**369.395.333.615**

a. Mutasi dari akun dana JHT adalah sebagai berikut:

	2013				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:					
Tanah	80.409.417.112	--	--	--	80.409.417.112
Bangunan	426.047.061.208	342.760.000	--	--	426.389.821.208
Properti	14.431.422.716	1.143.962.680	--	--	15.575.385.396
Peralatan Properti	--	1.636.275.750	--	9.720.956.146	11.357.231.896
Peralatan Lain Properti	--	--	--	1.793.643.192	1.793.643.192
Properti Lainnya	11.514.599.338	--	--	(11.514.599.338)	--
	532.402.500.374	3.122.998.430	--	--	535.525.498.804
Aset Dalam Konstruksi					
Bangunan	415.390.535	2.820.759.059	--	--	3.236.149.594
Total	532.817.890.909	5.943.757.489	--	--	538.761.648.398
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	221.754.444.157	13.351.735.134	--	--	235.106.179.291
Properti	11.514.176.986	1.979.336.626	--	--	13.493.513.612
Peralatan Properti	--	1.965.437.146	--	5.131.327.742	7.096.764.888
Peralatan Lain Properti	--	208.596.480	--	1.204.162.383	1.412.758.863
Properti Lainnya	6.335.490.125	--	--	(6.335.490.125)	--
	239.604.111.268	17.505.105.386	--	--	257.109.216.654
Nilai Buku	**772.422.002.177**				**281.652.431.744**

	2012				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:					
Tanah	80.409.417.112	--	--	--	80.409.417.112
Bangunan	424.952.585.929	1.100.000.000	5.524.721	--	426.047.061.208
Properti	13.202.188.806	2.033.754.110	804.520.200	--	14.431.422.716
Properti Lain-lain	7.942.032.608	7.556.881.345	3.984.314.615	--	11.514.599.338
	526.506.224.455	10.690.635.455	4.794.359.536	--	532.402.500.374
Aset Dalam Konstruksi					
Bangunan	415.390.535	--	--	--	415.390.535
Total	526.921.614.990	10.690.635.455	4.794.359.536	--	532.817.890.909
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	199.149.768.592	23.380.348.791	(775.673.226)		221.754.444.157
Properti	9.373.797.207	2.207.481.807	(67.102.028)		11.514.176.986
Properti Lain-lain	4.466.042.929	2.537.839.640	(668.392.444)		6.335.490.125
	212.989.608.728	28.125.670.238	(1.511.167.698)	--	239.604.111.268
Nilai Buku	**739.911.223.718**				**293.213.779.641**

b. Mutasi dari akun dana non JHT adalah sebagai berikut:

	2013				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Non Sewa Guna Usaha					
Harga Perolehan:					
Tanah	74.347.346.043	--	--	--	74.347.346.043
Bangunan	6.543.854.234	--	--	--	6.543.854.234
	80.891.200.277	--	--	--	80.891.200.277
Aset Dalam Konstruksi					
Bangunan	--	168.072.648	--	--	168.072.648
Total	--	168.072.648	--	--	168.072.648
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	4.709.646.303	160.499.567	(184.644.809)	(184.644.809)	4.685.501.061
Nilai Buku	**76.181.553.974**				**76.373.771.864**

	2012				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Non Sewa Guna Usaha					
Harga Perolehan:					
Tanah	74.347.346.043	--	--	--	74.347.346.043
Bangunan	6.543.854.234	--	--	--	6.543.854.234
	80.891.200.277	--	--	--	80.891.200.277
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	4.197.404.036	512.333.144	(90.878)	--	4.709.646.303
Nilai Buku	**76.693.796.241**				**76.181.553.974**

Lokasi dan nilai wajar dari properti investasi atas tanah dan bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Jenis Properti Investasi	Lokasi	Nilai Wajar (Rp)
JHT		
Tanah	Desa Sirnasari Kecamatan Cariu Bogor Jl. Raya Cariu, Desa Sirna Sari, Kec Cariu, Kab Bogor, Jawa Barat	47.393.000.000
Tanah dan Bangunan	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Kel Kuningan Barat, Kec Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	945.267.000.000
Tanah dan Bangunan	Jl. Desa Majasari RT 08/RW02, Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	2.498.208.000
Non JHT		
Tanah	Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung Jl. Penghulu Haji Hasan Mustofa No. 45, Kel Neglasari, Kec Cibeunying Kaler, Bandung	54.201.000.000
Tanah	Jl. H Muhtar Raya, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan	63.228.200.000
Tanah	Jalan Jenderal Sudirman, Desa Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kab Bekasi, Jawa Barat	44.002.800.000
Tanah	Desa Bugel, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang Jl. Moch Toha, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Tangerang, Banten	154.454.000.000
Tanah	Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 112 Blok B, Kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	178.273.800.000
Tanah	Jl Setiabudi Utara Kav No 13 Blok B, Kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	
Tanah	Jl. Setiabudi Timur Kav No 14 Blok B Kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	
Tanah dan Bangunan	Jl. Imam Bonjol No. 1, Kecamatan Batam Timur, Kelurahan Lubuk Baja Barat, Batam	14.133.900.000

26. Aset Dimiliki Untuk Dijual

Akun ini merupakan saldo aset tetap dimiliki untuk dijual Perusahaan, yakni aset tetap yang sudah tidak produktif lagi dan selanjutnya akan dilakukan penjualan melalui lelang. Saldo aset dimiliki untuk dijual per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Gedung Kantor	200.007	4.451.940
Tanah	--	16.922.000
Lain-lain	2.177.177	91
Jumlah	**2.377.184**	**21.374.031**

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/179/062013 tentang penghapusbukuan aset tetap kendaraan dinas roda empat Perusahaan tahun 2013, tanggal 3 September 2013, ditetapkan penjualan aset kendaraan dinas roda empat sebanyak 7 (tujuh) unit dengan harga perolehan sebesar Rp 3.126.000.000 dan nilai residu sebesar Rp 781.500.000, dan pembayaran telah diterima dari pihak pembeli pada tanggal 31 Desember 2013 Selisih antara nilai tercatat dengan nilai jual Rp 425.125.000 dicatat sebagai laba penjualan aset tetap.

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/322/082012 tentang penjualan dan penghapusbukuan Aset tetap tanah dan bangunan rumah dinas Perusahaan tanggal 28 Agustus 2012 ditetapkan penjualan aset rumah dinas di Jalan Tebet Timur III/7 dengan harga Rp 2.016.052.226 dan pembayaran telah diterima dari pihak pembeli pada tanggal 14 September 2012. Aset tersebut sebelum dicatat sebagai aset dimiliki untuk dijual dengan rincian rumah jabatan sebesar Rp 1 dan tanah sebesar Rp 17.525.000, sedangkan selisih antara nilai tercatat dengan nilai jual Rp 1.998.527.225 dicatat sebagai laba penjualan aset tetap.

27. Aset Tetap

Mutasi dari akun ini adalah sebagai berikut:

	2013				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Pemilikan Langsung					
Tanah	112.760.750.321	14.002.926.234	16.922.000	409.312.500	127.156.067.055
Bangunan	219.411.570.338	36.057.206.143	1.911.958.990	217.216.491	253.774.033.982
Kendaraan dinas	177.966.957.244	50.121.664.398	3.499.572.000	--	224.589.049.642
Peralatan kantor	65.204.000.570	13.086.743.629	1.077.951.394	--	77.212.792.805
Peralatan komputer	260.321.620.664	25.391.303.185	4.023.183.272	--	281.689.740.577
Peralatan Lain	117.765.413.536	18.719.560.536	2.288.906.718	--	134.196.067.354
	953.430.312.673	157.379.404.125	12.818.494.374	626.528.991	1.098.617.751.415
Aset Dalam Konstruksi					
Tanah	409.312.500	--	--	(409.312.500)	--
Bangunan Kantor	23.829.100.767	15.903.078.031	--	(13.655.767.490)	26.076.411.308
Bangunan Lain	1.923.541.079	--	--	(1.923.541.079)	--
Peralatan kantor	--	1.098.608.694	--	13.789.475.000	14.888.083.694
Kendaraan Dinas	--	675.620.000	--	--	675.620.000
Peralatan Komputer	--	6.338.200.000	--	--	6.338.200.000
Peralatan Lain	--	10.098.620.286	--	--	10.098.620.286
Tidak berwujud	--	48.118.580.461	--	1.572.617.078	49.691.197.539
	26.161.954.346	82.232.707.472	--	(626.528.991)	107.768.132.827
Jumlah	**979.592.267.019**	**239.612.111.597**	**12.818.494.374**	**--**	**1.206.385.884.242**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	91.273.062.788	12.056.566.943	1.872.012.322	--	101.457.617.409
Kendaraan dinas	131.216.436.817	13.697.482.146	2.700.440.499	--	142.213.478.464
Peralatan kantor	50.053.783.761	7.843.465.156	1.074.193.496	--	56.823.055.421
Peralatan komputer	195.713.195.118	28.831.163.494	3.999.973.800	--	220.544.384.812
Peralatan Lain	89.736.742.944	15.460.051.080	2.274.567.541	--	102.922.226.483
	557.993.221.428	77.888.728.819	11.921.187.658	--	623.960.762.589
Nilai Buku	**421.599.045.591**				**582.425.121.653**

	2012				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Pemilikan Langsung					
Tanah	101.975.277.366	11.048.972.955	263.500.000	--	112.760.750.321
Bangunan	196.879.506.565	10.736.180.348	939.364.405	12.735.247.830	219.411.570.338
Kendaraan dinas	160.221.827.129	19.132.460.080	1.387.329.965	--	177.966.957.244
Peralatan kantor	58.555.721.497	8.746.472.508	2.098.193.435	--	65.204.000.570
Peralatan komputer	219.672.796.021	62.080.937.303	21.432.112.660	--	260.321.620.664
Peralatan Lain	111.409.787.781	10.838.963.148	4.483.337.393	--	117.765.413.536
	848.714.916.359	122.583.986.342	30.603.837.858	12.735.247.830	953.430.312.673
Aset Dalam Konstruksi					
Tanah	--	409.312.500	--	--	409.312.500
Bangunan Kantor	13.295.138.580	23.269.210.017	--	(12.735.247.830)	23.829.100.767
Bangunan Lain	1.393.041.159	530.499.920	--	--	1.923.541.079
	14.688.179.739	23.799.709.937	--	(12.735.247.830)	26.161.954.346
Total	**863.403.096.098**	**146.383.696.279**	**30.603.837.858**	**--**	**979.592.267.019**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	82.165.021.048	11.749.781.457	2.641.739.716	--	91.273.062.788
Kendaraan dinas	119.562.024.074	16.555.023.851	4.900.611.108	--	131.216.436.817
Peralatan kantor	44.061.218.595	9.224.839.001	3.232.273.835	--	50.053.783.761
Peralatan komputer	174.543.481.342	30.701.176.164	9.531.462.388	--	195.713.195.118
Peralatan Lain	76.936.021.534	18.539.850.330	5.739.128.920	--	89.736.742.944
	497.267.766.593	86.770.670.803	26.045.215.967	--	557.993.221.428
Nilai Buku	**366.135.329.505**				**421.599.045.591**

Rincian Penjualan Aset Tetap adalah sebagai berikut :

	Rp
Harga Jual	2.180.841.500
Nilai Buku	782.844.085
Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap	**1.397.997.415**

Pada tahun 2012 terjadi peristiwa terbakarnya gedung kantor cabang Tangerang I dengan harga perolehan sebesar Rp 1.956.326.990 dan nilai residu sebesar Rp 44.198.600 perusahaan telah mengasuransikan aset tersebut pada asuransi Jasindo dengan nilai pertanggungan Rp 3.140.989.374 mencakup bangunan, mesin-mesin kantor, furnitur kantor, komputer, dan perlengkapan kantor lainnya, hingga sampai dengan tahun buku 2013 perusahaan belum mendapatkan klaim asuransi. Atas aset tersebut perusahaan telah melakukan penghapusbukuan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : KEP/178/062013.

Untuk tahun 2013 dan 2012 seluruh aset telah diasuransikan terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebakaran, kehilangan, bencana alam, kerusuhan dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 761.969.536.785 dan Rp 429.739.376.676. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

Berdasarkan hasil penelaahan atas aset tetap Perusahaan pada akhir tahun, Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak terjadi penurunan nilai aset tetap Perusahaan untuk tahun-tahun berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 .

28. Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

Akun ini merupakan nilai perolehan investasi dalam bentuk pembangunan Rumah Susun Sewa untuk Peserta Jamsostek dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013				
	Bumi Lancang Kuning - Batam	Kabil Batam	Muka Kuning Batam	Cikarang	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan					
Tanah	123.024.600	4.221.008.042	19.500.000	1.913.087.580	6.276.620.222
Bangunan	37.825.443.050	127.979.612.215	10.443.763.706	16.213.828.914	192.462.647.885
Peralatan	2.458.735.625	2.786.595.000	559.950.000	1.905.000.992	7.710.281.617
	40.407.203.275	134.987.215.257	11.023.213.706	20.031.917.486	206.449.549.724
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	(23.483.295.895)	(7.184.966.057)	(1.958.205.694)	(6.367.251.457)	(38.993.719.103)
Peralatan	(2.458.735.625)	(2.148.000.313)	(559.950.000)	(1.362.855.485)	(6.529.541.423)
	(25.942.031.520)	(9.332.966.370)	(2.518.155.694)	(7.730.106.942)	(45.523.260.526)
Nilai Buku	**14.465.171.756**	**125.654.248.887**	**8.505.058.012**	**12.301.810.544**	**160.926.289.198**

	31 Desember 2012				
	Bumi Lancang Kuning - Batam	Kabil Batam	Muka Kuning Batam	Cikarang	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan					
Tanah	123.024.600	4.221.008.042	19.500.000	1.913.087.580	6.276.620.222
Bangunan	37.825.443.050	32.769.980.940	10.443.763.706	16.213.828.914	97.253.016.610
Peralatan	2.458.735.625	2.786.595.000	559.950.000	1.905.000.993	7.710.281.618
	40.407.203.275	39.777.583.982	11.023.213.706	20.031.917.487	111.239.918.450
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	(21.592.023.742)	(3.959.706.030)	(1.436.017.509)	(5.556.560.011)	(32.544.307.292)
Peralatan	(2.406.600.209)	(1.451.351.563)	(431.628.125)	(1.171.510.012)	(5.461.089.909)
	(23.998.623.951)	(5.411.057.593)	(1.867.645.634)	(6.728.070.023)	(38.005.397.201)
Nilai Buku	**16.408.579.324**	**34.366.526.389**	**9.155.568.072**	**13.303.847.464**	**73.234.521.249**

Saldo Sarana Kesejahteraan Peserta Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 atas Rusunsewa Kabil Batam sebesar Rp 95.144.489.794 sudah selesai dilaksanakan dan direklasifikasi pada tahun 2013 ke Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) program DPKP.

Untuk tahun 2013, SKP Rusunsewa Lancang Kuning, Rusunsewa Kabil, Muka Kuning Batam, SKP Rusunsewa Cikarang telah diasuransikan kepada PT Berdikari Insurance dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 156.947.334.190, terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat kebakaran, kehilangan, bencana alam, kerusuhan dan risiko lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

29. Aset Tidak Berwujud

Akun ini merupakan aset tidak berwujud berupa program *Oracle*, sistem informasi investasi, *e-procurement*, *Microsoft Office*, aplikasi perpajakan dan lisensi antivirus Perusahaan per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013			
	1 Januari	Penambahan	Reklasifikasi	31 Desember
Biaya perolehan				
Lisensi Perangkat Lunak	73.910.692.678	6.671.065.970	--	80.581.758.648
Akumulasi amortisasi				
Lisensi Perangkat Lunak	(61.272.446.111)	(7.359.177.475)	--	(68.631.623.586)
Nilai buku bersih	**12.638.246.567**	**(688.111.505)**	**--**	**11.950.135.062**

	2012			
	1 Januari	Penambahan	Reklasifikasi	31 Desember
Biaya perolehan				
Lisensi Perangkat Lunak	62.737.025.938	11.173.666.740	--	73.910.692.678
Akumulasi amortisasi				
Lisensi Perangkat Lunak	(57.205.004.112)	(4.067.441.999)	--	(61.272.446.111)
Nilai buku bersih	**5.532.021.826**	**7.106.224.741**	**--**	**12.638.246.567**

30. Aset Lain

Akun ini merupakan saldo aset lain Perusahaan, entitas anak dan Program DPKP per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Piutang Lain	12.510.608.777	26.550.298.565
Piutang Pegawai	11.833.450.055	12.176.494.452
Beban Ditangguhkan	967.655.972	488.294.856
Agunan Yang Diambil Alih	315.222.000	315.222.000
Aset Yang Sudah Tidak Digunakan	697.849.326	639.506.517
Kas Dan Setara Kas Dibatasi Penggunaannya	599.160.506	13.712.604
Pos Sementara Dalam Penyelesaian	125.568.851	2.131.975.477
Lain-lain	3.259.385.140	1.171.932.323
Jumlah	**30.308.900.627**	**43.487.436.794**

Piutang Pegawai
Jumlah Tersebut merupakan saldo Pinjaman kendaraan untuk pembelian kendaraan roda empat bagi pejabat struktural Perusahaan sesuai Keputusan Direksi Nomor : KEP/163/062008 dan Nomor: KEP/368/122011 serta saldo tuntutan ganti rugi karyawan karena penyalahgunaan keuangan.

Kas dan Setara Kas Dibatasi Penggunaannya
Aset lain-lain kas yang dibatasi penggunaanya pada rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jamsostek per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 599.160.506 dan Rp 13.712.604 yang digunakan untuk penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan*) bagi karyawan pejabat struktural Perusahaan sesuai Keputusan Direksi No. KEP/163/062008 tanggal 25 Desember 2008 dan No. KEP/368/122011.

31. Liabilitas JHT Siap Bayar

Akun ini merupakan saldo penetapan klaim JHT yang belum diambil oleh peserta per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Kantor Wilayah I	64.847.232	77.718.055
Kantor Wilayah II	25.694.403	335.466.635
Kantor Wilayah III	1.198.843.587	1.138.544.175
Kantor Wilayah IV	221.648.452	32.973.665
Kantor Wilayah V	25.791.677	8.010.274
Kantor Wilayah VI	35.256.785	37.255.510
Kantor Wilayah VII	74.168.995	20.275.302
Kantor Wilayah VIII	4.394.034	--
Kantor Wilayah IX	186.349.111	--
Kantor Wilayah X	13.612.547	64.107.108
Kantor Wilayah XI	11.566.369	--
Jumlah	**1.862.173.192**	**1.714.350.724**

32. Liabilitas JHT Jatuh Tempo

Akun ini merupakan penerimaan iuran JHT beserta hasil pengembangannya yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada peserta dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Kantor Wilayah I	570.966.864.745	509.638.090.890
Kantor Wilayah II	344.905.719.007	599.195.585.366
Kantor Wilayah III	4.791.815.791.487	3.771.199.174.706
Kantor Wilayah IV	804.637.725.193	877.747.546.543
Kantor Wilayah V	392.398.307.263	299.977.003.490
Kantor Wilayah VI	823.277.611.314	639.722.653.659
Kantor Wilayah VII	499.774.619.668	369.432.145.696
Kantor Wilayah VIII	133.839.564.264	182.405.541.158
Kantor Wilayah IX	466.799.901.778	--
Kantor Wilayah X	367.150.840.983	--
Kantor Wilayah XI	106.468.007.444	--
Jumlah	**9.302.034.953.146**	**7.249.317.741.508**

33. Hasil Pengembangan JHT

Akun ini merupakan hasil pengembangan atas program JHT per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Pendapatan Investasi		
Pendapatan Bunga Obligasi JHT	5.219.616.003.742	4.661.551.789.467
Pendapatan Bunga Deposito Berjangka	2.401.680.571.017	2.440.566.834.147
Laba Penjualan Saham	1.984.112.901.452	1.157.034.921.145
Laba Penjualan Reksadana	1.010.509.711.436	816.226.689.909
Laba Penjualan Investasi Syariah JHT	920.597.897.708	1.349.517.673.070
Pendapatan Dividen	489.686.261.399	480.296.814.424
Pendapatan Bagi Hasil Obligasi	441.985.993.768	318.713.567.232
Pendapatan Sewa Bangunan	111.441.806.940	96.269.815.431
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	79.256.302.793	24.495.725.417
Pendapatan Bunga DOC JHT	19.730.666.385	17.891.267.674
Laba Penjualan Obligasi	8.904.608.925	7.456.935.369
Pendapatan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	290.277.778	--
Keuntungan atas Kenaikan Nilai Investasi	--	982.900.987
Penerimaan Investasi Lain	12.222.108.524	21.047.898.654
Jumlah	12.700.035.111.867	11.392.052.832.926
Beban Investasi		
Kerugian Atas Penurunan Investasi Syariah JHT - Sukuk	(93.317.264.181)	--
Kerugian Atas Penurunan Nilai Saham JHT	(70.551.547.613)	(10.364.345.000)
Beban Properti Investasi	(59.745.267.226)	(60.171.698.012)
Beban Transaksi Investasi	(28.479.002.180)	(17.970.085.712)
Beban Atas Transaksi Investasi Syariah JHT - Saham	(17.108.745.148)	(21.625.671.645)
Beban Penitipan Surat Berharga	(16.023.362.840)	(19.968.356.276)
Beban PPh Atas Transaksi Saham JHT	(10.071.203.103)	(6.771.316.140)
Beban PPh Atas Sewa Bangunan Investasi JHT	(6.837.841.347)	(5.011.354.830)
Beban PPh Atas Service Charge Bangunan Investasi JHT	(4.908.163.470)	(3.319.280.500)
Beban PBB Tanah Dan Bangunan	(3.696.162.102)	(2.472.344.620)
Beban PPh Atas Pendapatan Lain Investasi Properti JHT	(2.166.495.123)	(1.446.148.006)
Beban Pengelolaan Investasi	(1.521.475.192)	(3.107.382.332)
Kerugian Atas Penurunan Nilai Reksadana JHT	(635.903.835)	--
Beban Asuransi Bangunan Investasi	(453.555.880)	(660.392.250)
Beban Bank Investasi JHT	(45.623.600)	(51.672.642)
Beban PPh Budep Berjangka Rupiah	(35.942.488)	--
Beban PPh Atas Pendapatan Lain Obligasi JHT	(315.408)	--
Beban Investasi Lainnya JHT	(1.973.489.678)	(17.920.068.427)
Jumlah	(317.571.360.414)	(170.860.116.392)
Beban Pengelolaan JHT	(1.678.225.675.984)	(1.502.402.566.030)
Total Hasil Pengembangan JHT	**10.704.238.075.469**	**9.718.790.150.504**

34. Pengembalian Kepada Peserta JHT

Akun ini merupakan saldo pengembalian kepada peserta JHT per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Hasil Pengembangan JHT Diberikan ke Peserta	10.175.027.319.661	8.665.579.109.218
Hasil Pengembangan Atas Dana Pengembangan JHT	280.968.905.400	309.101.686.511
Hasil Pengembangan JHT yg Belum Dibagikan ke Peserta	248.241.850.408	744.109.354.775
Jumlah	**10.704.238.075.469**	**9.718.790.150.504**

35. Liabilitas Jaminan Hari Tua Sesuai Rincian Saldo JHT

Akun ini merupakan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua (RSJHT) per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Liabilitas JHT Sesuai RSJHT yang Sudah Selesai	125.270.070.522.738	100.643.925.796.376
Liabilitas JHT Sesuai RSJHT yang Sudah Selesai Penyesuaian	79.912.694.075	90.739.520.169
Liabilitas JHT Sesuai RSJHT yang Sudah Selesai Program Tk Mandiri	6.797.346.573	6.797.346.573
Liabilitas JHT Sesuai RSJHT yang Sudah Selesai Program Perorangan	972.945.101	972.945.100
Liabilitas JHT Eks Timor Timur	--	2.285.840.668
Jumlah	**125.357.753.508.487**	**100.744.721.448.886**

	2013 Rp	2012 Rp
Kantor Wilayah I	5.074.132.458.172	4.856.624.153.535
Kantor Wilayah II	3.744.157.097.345	8.586.203.520.576
Kantor Wilayah III	54.385.192.618.231	44.148.366.380.701
Kantor Wilayah IV	17.373.798.627.533	20.397.820.502.399
Kantor Wilayah V	5.670.068.440.404	4.583.418.267.634
Kantor Wilayah VI	13.031.721.638.729	10.513.711.540.483
Kantor Wilayah VII	6.518.838.065.816	5.170.522.802.220
Kantor Wilayah VIII	1.866.963.226.232	2.488.054.281.338
Kantor Wilayah IX	7.512.554.245.611	--
Kantor Wilayah X	8.829.537.278.853	--
Kantor Wilayah XI	1.350.789.811.561	--
Jumlah	**125.357.753.508.487**	**100.744.721.448.886**

Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan Seketariat Negara Pengembangan Keterampilan dan Ketenagakerjaan Republik Demokratik Timor Leste (SEPFOPE RDTL) pada tanggal 28 Juli 2011 disepakati perjanjian pembayaran Jaminan Hari Tua mantan karyawan swasta pada bekas Provinsi Timor Timur untuk 4.255 tenaga kerja. Pada Tanggal 31 Desember 2013 Perusahaan telah menyerahkan Saldo Jaminan Hari Tua sebesar Rp 2.285.840.667.

Saldo liabilitas JHT sesuai RSJHT merupakan saldo dari peserta aktif dan non aktif, dimana berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 32 ayat (1) terdapat definisi peserta aktif dan non aktif, yaitu tenaga kerja mempunyai kepesertaan aktif, apabila selama masa kepesertaannya iuran tetap dibayarkan, Sedangkan kepesertaan non aktif, apabila iuran tidak lagi dibayarkan (namun saldo JHT belum dicairkan).

36. Liabilitas Jaminan Hari Tua Kurang Bayar

Akun ini digunakan untuk menampung penerimaan iuran JHT yang telah selesai direkonsiliasi pasca pembayaran klaim dan sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan kembali kepada peserta per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Kantor Wilayah I	3.973.532.139	3.775.846.363
Kantor Wilayah II	1.367.760.260	4.123.699.548
Kantor Wilayah III	12.383.597.520	11.199.915.049
Kantor Wilayah IV	8.577.036.798	12.674.586.287
Kantor Wilayah V	209.270.607	427.761.656
Kantor Wilayah VI	892.660.810	738.529.021
Kantor Wilayah VII	919.917.067	1.128.380.628
Kantor Wilayah VIII	293.486.162	395.204.277
Kantor Wilayah IX	2.320.829.139	--
Kantor Wilayah X	4.743.931.477	--
Kantor Wilayah XI	125.967.503	--
Jumlah	**35.807.989.482**	**34.463.922.829**

37. Liabilitas Jaminan Hari Tua Belum Selesai RSJHT

Akun ini merupakan penerimaan iuran JHT yang belum dapat diselesaikan RSJHT-nya untuk program LHK dan Perseorangan per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
JHT Program LHK	23.687.590.290	13.019.118.111
JHT Program Perorangan	4.490.663.963	3.142.616.997
Jumlah	**28.178.254.253**	**16.161.735.108**

38. Dana Pengembangan JHT

Akun ini merupakan saldo dana pengembangan JHT Perusahaan dan Surplus Hak Peserta per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Dana Pengembangan JHT Penyangga (*Buffer)*	1.364.438.671.979	--
Dana Pengembangan JHT	430.239.564.688	3.679.217.241.710
Surplus Hak Peserta atas Hasil Investasi JHT	529.210.755.808	4.593.564.750.433
Jumlah	**2.323.888.992.475**	**8.272.781.992.143**

Dari saldo Dana Pengembangan JHT per 31 Desember 2012 sebesar Rp 8.272.781.992.143 telah didistribusikan pada bulan Maret 2013 sebesar Rp 5.633.678.560.310 atau setara dengan tingkat bunga 6,50% kepada seluruh peserta yang belum mengambil JHT. Pendistribusian ini berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/478/122012 tanggal 18 Desember 2012. Kemudian Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/295/072013 tanggal 30 Juli 2013 Perusahaan telah mendistribusikan Dana Pengembangan JHT tahun 2012 di bulan Agustus 2013 sebesar Rp 818.594.165.600 atau setara dengan tingkat bunga 0,81% kepada seluruh peserta yang belum mengambil JHT.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KEP/476/122012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Dana Pengembangan Hari Tua, Perusahaan membentuk Dana Pengembangan JHT Penyangga (Buffer) sebesar Rp 1.364.438.671.979 digunakan untuk mempertahankan tingkat hasil pengembangan JHT yang stabil dan menjaga tingkat hasil pengembangan JHT yang kompetitif dengan tingkat bunga pasar.

39. Liabilitas Investasi JHT

Akun ini merupakan saldo liabilitas investasi JHT per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Beban YMH Dibayar Investasi	11.426.875.782	4.199.508.280
Liabilitas Pembelian Investasi JHT	124.429.025	32.244.901.689
Liabilitas Lancar Lainnya	586.485.435	482.064.442
Jumlah	**12.137.790.242**	**36.926.474.411**

40. Pendapatan Diterima Dimuka Investasi JHT

Akun ini merupakan saldo pendapatan investasi JHT diterima dimuka atas sewa dan service charge per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 5.755.215.911 dan Rp 10.926.725.712.

41. Selisih Penilaian Efek JHT

Akun ini merupakan kenaikan (penurunan) nilai wajar dari efek tertentu Perusahaan dalam kelompok AFS (*Available for Sale*) yang berasal dari dana JHT. Saldo per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Saham	(2.484.181.415.793)	1.462.385.662.124
Reksadana	(1.308.530.753.672)	478.557.974.707
Obligasi	(70.757.071.593)	34.153.005.729
Jumlah	**(3.863.469.241.058)**	**1.975.096.642.560**

42. Liabilitas Jaminan Non JHT

Akun ini merupakan saldo liabilitas jaminan Perusahaan per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Jaminan yang Sudah Ditetapkan Tetapi Belum Dibayarkan	8.400.670.598	30.002.427.827
Jaminan Sudah Dibayarkan Tetapi Belum Dicairkan	23.522.291	280.469.399
Jumlah	**8.424.192.889**	**30.282.897.226**

Jaminan yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan merupakan saldo liabilitas jaminan Perusahaan per 31 Desember 2013 dan 2012 atas jaminan yang telah ditetapkan oleh Kantor Cabang namun sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Jaminan Kecelakaan Kerja	1.750.301.157	2.820.372.700
Jaminan Kematian	5.107.000.000	15.712.250.000
Jaminan Pelayanan Kesehatan	--	739.924.086
Jasa Konstruksi	511.150.591	729.068.891
Tenaga Kerja Mandiri	1.032.218.850	10.000.812.150
Jumlah	**8.400.670.598**	**30.002.427.827**

Jaminan sudah dibayarkan tetapi belum dicairkan merupakan saldo per 31 Desember 2013 dan 2012 atas jaminan Non JHT yang sudah dibayarkan tetapi belum dicairkan oleh peserta masing-masing sebesar Rp 23.522.291 dan Rp 280.469.399.

43. Liabilitas Jaminan Diestimasi Non JHT

Akun ini merupakan saldo klaim jaminan yang belum disetujui/ditetapkan namun besarnya klaim dapat diestimasi Perusahaan berdasarkan jumlah pengajuan klaim yang disampaikan oleh peserta per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Jaminan Kecelakaan Kerja	183.429.583	5.368.137.707
Jaminan Pelayanan Kesehatan	58.729.201.217	5.690.426.962
Jaminan Jasa Konstruksi	63.150.591	198.604.526
Jumlah	**58.975.781.391**	**11.257.169.195**

44. Liabilitas Jaminan Belum Dilaporkan Non JHT

Akun ini merupakan saldo jaminan belum dilaporkan atau *Incurred But Not Reported* (IBNR) per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Jaminan Kecelakaan Kerja	78.445.785.541	72.369.428.884
Jaminan Kematian	60.019.678.518	59.501.449.864
Jaminan Pelayanan Kesehatan	29.476.698.075	19.908.625.971
Jaminan Jasa Konstruksi	8.069.822.850	5.478.925.513
Jumlah	**176.011.984.984**	**157.258.430.232**

45. Cadangan Teknis

Akun ini merupakan cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi karena jumlah pembayaran jaminan non-JHT melebihi penerimaan iuran non-JHT, sedangkan cadangan katastrofa adalah cadangan yang dibentuk oleh badan penyelenggara untuk menghadapi risiko keuangan yang mungkin timbul akibat kejadian atau keadaan yang luar biasa, Saldo per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Cadangan Teknis JKK	8.528.559.275.729	6.882.079.260.816
Cadangan Teknis JKM	2.552.569.133.407	2.216.747.384.183
Cadangan Teknis JPK	322.649.046.412	181.403.600.581
Cadangan Teknis Jasa Konstruksi	77.217.644.076	108.063.512.638
Jumlah	**11.480.995.099.624**	**9.388.293.758.218**

Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2004 disebutkan bahwa cadangan teknis untuk pertanggungan selama satu tahun dihitung sebesar 40% dari iuran tahun berjalan, sedangkan untuk cadangan teknis JPK sebesar 10% dari iuran tahun berjalan dan tidak bersifat kumulatif.

Perhitungan cadangan teknis berdasarkan aktuaris independen KIS aktuaria dalam laporan Nomor : 2472/KIS/LA/01/2014 tertanggal 15 Januari 2014.

46. Dana Pengembangan Non JHT

Akun ini merupakan saldo dana yang dipergunakan untuk pemberian manfaat tambahan kepada peserta program Non JHT, saldo per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Saldo Awal	265.282.035.496	1.463.703.641.357
Penyaluran		
Bantuan Penyelenggaraan Wokshop K3	(53.483.396.582)	(11.347.463.136)
Bantuan Medical Check Up	(39.759.716.920)	(9.103.435.400)
Bantuan Peralatan K3	(34.231.004.046)	(12.131.839.000)
Bantuan Uang Pemakaman	(15.686.000.000)	(5.604.000.000)
Bantuan Pengobatan Kanker	(4.266.700.973)	(3.012.298.134)
Bantuan Operasi Jantung	(2.826.624.930)	(2.160.573.396)
Bantuan Pelayanan Kesehatan Cuma-Cuma	(2.186.225.887)	--
Bantuan Cuci Darah	(1.228.116.682)	(1.049.791.582)
Bantuan Biaya Perawatan dan Pengobatan	(997.317.025)	--
Bantuan Pengobatan HIV/AIDS	(86.035.772)	(51.788.968)
Jumlah	**110.530.896.679**	**1.419.242.451.741**

Berdasarkan RUPS tahun buku 2012 tanggal 3 Mei 2013 disetujui reklasifikasi Dana Pengembangan Non JHT ke Pos Cadangan Umum sebesar Rp 1.198.421.605.861. Hal ini sesuai dengan Surat Direksi Nomor : B/3875/042013 tanggal 16 April 2013 berdasarkan kajian hukum yang telah dilakukan oleh Direksi Perusahaan (lihat Catatan 65). Dewan Komisaris juga merekomendasikan dalam suratnya Nomor : 26/DK/042013 tanggal 11 April 2013 yang mengatur bahwa manfaat tambahan yang disediakan Perusahaan sudah termasuk dalam layanan Program JPK Standar sehingga keberadaan Dana Pengembangan Non JHT tidak diperlukan lagi.

47. Liabilitas Investasi Non JHT

Akun ini merupakan pembelian investasi non JHT dan beban penitipan investasi non JHT yang masih harus dibayar oleh PT Jamsostek (Persero) namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 484.507.383 dan Rp 525.631.362.

48. Iuran Belum Rinci

Iuran Belum Rinci (IBR) merupakan saldo penerimaan iuran Perusahaan program Jamsostek, program LHK dan iuran belum jelas penyetor (IBJP) per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Iuran Belum Rinci Jamsostek	88.788.579.806	20.894.588.627
Iuran Belum Rinci Program LHK	34.203.869.058	18.604.642.175
Iuran Belum Jelas Penyetor	11.162.306.428	11.988.590.225
Jumlah	**134.154.755.292**	**51.487.821.027**

Iuran belum rinci merupakan penerimaan iuran perusahaan program Jamsostek dan program LHK yang belum didukung dengan upah tenaga kerja serta iuran yang belum jelas identitas penyetornya, dimana sesuai dengan Keputusan Direksi No. KEP/289/112004 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Program Jamsostek dan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja No. PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek bahwa penerimaan iuran dari perusahaan yang belum didukung dengan data upah tidak dapat diakui sebagai pendapatan iuran.

	2013			
	IBR Program Jamsostek	IBR Program LHK	Iuran Belum Jelas Penyetorannya	Jumlah
Kantor Pusat	--	--	6.312.042.335	6.312.042.335
Kantor Wilayah I	1.278.303.235	1.948.713.738	150.892.135	3.377.909.108
Kantor WIlayah II	1.292.328.899	1.336.126.147	275.931.254	2.904.386.300
Kantor WIlayah III	41.276.319.525	2.341.575.172	1.566.955.862	45.184.850.559
Kantor WIlayah IV	9.862.296.143	4.596.052.322	1.557.620.198	16.015.968.663
Kantor WIlayah V	2.931.100.051	4.208.408.605	--	7.139.508.656
Kantor Wilayah VI	14.922.072.680	2.963.113.491	430.580.988	18.315.767.159
Kantor Wilayah VII	3.546.583.955	6.589.069.198	480.672.163	10.616.325.316
Kantor WIlayah VIII	779.589.614	3.316.969.601	313.445.920	4.410.005.135
Kantor WIlayah IX	5.152.705.503	2.954.631.427	8.678.930	8.116.015.860
Kantor WIlayah X	7.294.732.586	2.028.681.787	18.419.725	9.341.834.098
Kantor WIlayah XI	452.547.615	1.920.527.570	47.066.918	2.420.142.103
	88.788.579.806	**34.203.869.058**	**11.162.306.428**	**134.154.755.292**

	2012			
	IBR Program Jamsostek	IBR Program LHK	Iuran Belum Jelas Penyetorannya	Jumlah
Kantor Wilayah I	1.063.867.579	1.450.146.160	651.907.957	3.165.921.696
Kantor WIlayah II	1.233.695.063	3.282.699.365	614.982.930	5.131.377.358
Kantor WIlayah III	13.251.633.280	1.719.277.631	5.920.899.155	20.891.810.066
Kantor WIlayah IV	3.155.359.277	7.199.915.743	2.162.964.054	12.518.239.073
Kantor WIlayah V	241.836.091	1.051.987.199	387.514.133	1.681.337.424
Kantor Wilayah VI	1.066.445.759	1.744.832.451	754.986.378	3.566.264.587
Kantor Wilayah VII	389.967.889	582.328.133	580.921.617	1.553.217.639
Kantor WIlayah VIII	491.783.690	1.573.455.493	914.414.002	2.979.653.185
	20.894.588.627	**18.604.642.175**	**11.988.590.225**	**51.487.821.027**

49. Iuran Diterima di Muka

Akun ini merupakan iuran diterima dimuka per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar nihil dan Rp 63.631.209.

50. Iuran Karyawan

Akun ini merupakan saldo potongan karyawan untuk iuran Jamsostek, pensiun, tabungan hari tua dan iuran karyawan lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 11.001.301 dan Rp 295.790.418.

51. Utang Usaha

Akun ini merupakan utang usaha entitas anak berupa saldo uang jaminan yang dibayarkan oleh TKI dan oleh perusahaan PJTKI yang akan dibayarkan kembali kepada KFSB atau kepada TKI sesuai ketentuan yang berlaku per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 7.299.459.390 dan Rp 8.001.999.765.

52. Perpajakan

a. Uang Muka Pajak

	2013 Rp	2012 Rp
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	642.495.175	670.298.913
Pasal 28	--	34.014.756.060
	642.495.175	34.685.054.973
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan		
Pajak Pertambahan Nilai	1.386.864.948	726.715.691
	1.386.864.948	726.715.691
Jumlah	**2.029.360.123**	**35.411.770.664**

Perusahaan telah menerima hasil pemeriksanaan pajak penghasilan badan tahun 2010 dengan jumlah kurang bayar sebesar Rp 3.704.778.978. Jumlah lebih bayar pajak penghasilan masa pajak tahun 2010 sebesar Rp 34.014.756.060 dibebankan pada laporan laba rugi pada beban lain-lain.

b. Utang Pajak

	2013 Rp	2012 Rp
Perusahaan		
Pajak Penghasilan		
Pasal 21	63.096.667.873	29.369.551.845
Pasal 23	2.802.804.448	807.740.300
Pasal 25	46.440.401.078	33.977.376.279
Pasal 26	71.666.066	31.944.459
Pasal 29	77.025.425.659	36.937.133.270
Pajak Pertambahan Nilai	7.761.535.217	2.791.168.899
PPHTB	124.058.298.050	--
Bea Balik Nama	39.235.965.228	--
	360.492.763.619	103.914.915.052
Entitas Anak dan EBK		
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 Ayat (2)	171.250.153	42.950.470
Pasal 21	146.606.284	104.341.870
Pasal 23	122.263.027	29.218.962
Pasal 25	213.648.398	9.460.145
Pasal 29	513.749	989.723.580
Pasal 29 Tahun 2011	48.048.747	48.048.747
Pajak Pertambahan Nilai	2.621.831.831	1.254.760.472
PPHTB	3.168.935.800	--
Pajak Parkir	--	310.190.200
	6.493.097.989	2.788.694.446
Jumlah	**366.985.861.608**	**106.703.609.498**

c. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

	2013 Rp	2012 Rp
Perusahaan		
Pajak Kini	(666.205.533.250)	(477.224.270.500)
Pajak Tangguhan	146.206.253.198	166.001.456.633
	(519.999.280.052)	(311.222.813.867)
Entitas Anak		
Pajak Kini	(879.453.294)	(1.272.447.471)
Pajak Tangguhan	24.518.832	101.259.173
	(854.934.462)	(1.171.188.298)
Pajak Kini	(667.084.986.544)	(478.496.717.971)
Pajak Tangguhan	146.230.772.030	166.102.715.806
Jumlah	**(520.854.214.514)**	**(312.394.002.165)**

d. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laba komersial dengan laba fiskal dari setiap unit bisnis Perusahaan yang dikenai peraturan perpajakan secara umum untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Laba Konsolidasian Sebelum Beban Pajak Penghasilan	2.808.497.311.687	2.494.335.578.606
Dikurangi:		
Laba Sebelum Pajak, Entitas Anak dan Eliminasi	(855.094.620)	(1.171.613.621)
Laba Sebelum Pajak Perusahaan	2.807.642.217.067	2.493.163.964.985
Ditambah/(dikurangi):		
Beda waktu:		
Penyusutan Aset Tetap	57.346.892.923	68.214.783.395
Cadangan Teknis Kewajiban	968.691.559.831	642.232.087.791
Imbalan Kerja	219.605.696.929	90.223.965.685
Penurunan Piutang	116.066.713.264	60.716.675.921
	1.361.710.862.947	861.387.512.792
Beda Tetap:		
Penghasilan yang Telah Dikenakan PPh Final	(3.653.811.146.360)	(3.112.713.996.655)
Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan ke Pajak	2.149.280.199.115	1.667.059.600.607
	(1.504.530.947.245)	(1.445.654.396.048)
Laba Fiskal	2.664.822.132.769	1.908.897.081.729
Dibulatkan	2.664.822.133.000	1.908.897.082.000
Beban Pajak Kini - Perusahaan	(666.205.533.250)	(477.224.270.500)
Dikurangi: Kredit Pajak		
Pajak Penghasilan Pasal 23	31.895.294.596	32.558.621.894
Pajak Penghasilan Pasal 25	557.284.812.995	407.728.515.336
	589.180.107.591	440.287.137.230
Pajak Penghasilan Pasal 29 Perusahaan Kurang Bayar	**(77.025.425.659)**	**(36.937.133.270)**

e. Pajak Tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Des 2011 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Rp	31 Des 2012 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Rp	Cadangan Umum Rp	31 Des 2013 Rp
Perusahaan						
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	66.019.888.707	15.987.697.650	82.007.586.357	35.492.939.060	--	117.500.525.417
Penyusutan	22.789.670.300	(3.714.190.098)	19.075.480.202	130.599.133.214	--	149.674.613.416
Penyisihan Piutang Iuran	12.660.390.800	7.225.428.276	19.885.819.076	(19.885.819.076)	--	--
Penyisihan Penyertaan Langsung	4.371.941.300	--	4.371.941.300	--	--	4.371.941.300
Cadangan Teknis	1.223.891.168.338	146.502.520.806	1.370.393.684.333	--	(1.370.393.684.333)	--
	1.329.733.059.445	**166.001.456.633**	**1.495.734.511.268**	**146.206.253.198**	**(1.370.393.684.333)**	**271.547.080.133**
Entitas Anak						
Penyisihan Penurunan Nilai	74.726.869	87.815.840	162.542.709	--	--	162.542.709
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	(26.073.600)	21.360.000	(4.713.600)	1.585.832	--	(3.127.767)
Penyusutan	108.561.923	(7.916.667)	100.645.256	22.933.000	--	123.578.256
	157.215.192	**101.259.173**	258.474.365	**24.518.832**	**--**	282.993.198
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	**1.329.890.274.637**		**1.495.992.985.633**			**271.830.073.331**

Pada 31 Desember 2013 Perusahaan menyesuaikan aset pajak tangguhan yang berasal dari cadangan teknis JKK dan JKM sebesar Rp 1.370.393.684.333 ke cadangan umum. Pada saat PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014, dilakukan pemisahan aset untuk setiap program, dimana pada saat pemisahan aset jumlah aset program sama dengan liabilitas program. Perubahan status program JKK dan JKM yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan per 1 Januari 2014 menjadi entitas nirlaba Dana Jaminan Sosial JKK dan JKM yang terpisah dari Perusahaan. Hasil pengelolaan program JKK dan JKM sampai dengan 31 Desember 2013 terakumulasi dalam saldo laba Perusahaan yang penggunaannya telah ditetapkan menjadi cadangan umum. Berdasarkan kondisi di atas manajemen menyesuaikan aset pajak tangguhan ke cadangan umum.

f. Administrasi

Perusahaan dan entitas anak menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak terutang.

Berdasarkan perubahan terakhir UU Pajak Penghasilan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutang pajak.

Sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah bahwa pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang dikenakan PPN dan pengguna jasa wajib melakukan penyetoran PPN ke persepsi.

g. Surat Ketetapan Pajak

Tahun Pajak	Objek Pajak	Nomor Hasil Pemeriksaan	Tanggal Terbit	Jumlah Kurang Bayar Pajak (Rp)
Kapitasi				
Cabang NTB				
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00003/201/10/911/13	28 Maret 2013	32.449.474
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00001/243/10/911/13	28 Maret 2013	19.980
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00001/503/10/911/13	28 Maret 2013	NIHIL
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00001/540/10/911/13	28 Maret 2013	NIHIL
Cabang Blitar				
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00003/201/10/653/13	30 July 2013	6.967.185
2011	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00005/201/11/653/13	30 July 2013	6.678.616
Madiun				
2010	SKP KB PPh Pasal 23	No. 00001/203/10/621/13	11 April 2013	726.424
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00001/201/10/621/13	11 April 2013	10.603.263
Tidak ada PPh 21 Kapitasii				
Cabang Palopo				
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00002/201/10/803/13	24 Juni 2013	2.857.025
Cabang Samarinda				
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00002/201/10/722/13	05 Juli 2013	1.741.691
Cabang Makassar				
2010	SKP KB PPh Pasal 23	No. 00024/203/10/812/13	30 Agustus 2013	451.524
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00008/201/10/812/13	30 Agustus 2013	51.791.419
Kanwil Sulawesi				
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00007/201/10/812/13	02 Agustus 2013	7.391.150
2010	SKP KB PPh Pasal 23	No. 00023/203/10/812/13	02 Agustus 2013	2.618.546
Cabang Tangerang 1				
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00004/201/10/415/13	08 Maret 2013	8.454.537
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00001/543/10/415/13	08 Maret 2013	NIHIL
2010	SKP KB PPh Pasal 23	No. 00002/503/10/415/13	08 Maret 2013	NIHIL
2010	SKP KB PPh Pasal 23	No. 00002/503/10/415/13	08 Maret 2013	NIHIL
	Jumlah SKP			**132.750.834**

Tahun Pajak	Objek Pajak	Nomor Hasil Pemeriksaan	Tanggal Terbit	Jumlah Kurang Bayar Pajak (Rp)
2010	SKP KB PPN	No. 00002/277/10/093/12	27 November 2012	119.237.149
2010	SKP KB PPN	No. 00174/207/10/093/12	27 November 2012	51.966.537
2010	SKP KB PPN	No. 00175/207/10/093/12	27 November 2012	100.203.245
2010	SKP KB PPN	No. 00176/207/10/093/12	27 November 2012	122.362.215
2010	SKP KB PPN	No. 00177/207/10/093/12	27 November 2012	27.040.022
2010	SKP KB PPN	No. 00178/207/10/093/12	27 November 2012	400.409.005
2010	SKP KB PPN	No. 00179/207/10/093/12	27 November 2012	221.368.857
2010	SKP KB PPN	No. 00180/207/10/093/12	27 November 2012	30.897.620
2010	SKP KB PPN	No. 00181/207/10/093/12	27 November 2012	46.060.353
2010	SKP KB PPN	No. 00182/207/10/093/12	27 November 2012	5.857.578
2010	SKP KB PPN	No. 00183/207/10/093/12	27 November 2012	43.564.146
2010	SKP KB PPN	No. 00184/207/10/093/12	27 November 2012	109.604.208
2010	SKP KB PPN	No. 00185/207/10/093/12	27 November 2012	165.925.365
2010	SKP KB PPN	No. 00108/107/10/093/12	27 November 2012	22.788.947
2010	SKP KB PPN	No. 00003/177/10/093/12	27 November 2012	16.933.479
2010	SKP KB PPN	No. 00002/177/10/093/12	27 November 2012	5.889.452
2010	SKP KB PPN	No. 00001/177/10/093/12	27 November 2012	597.319
2010	SKP KB PPN	No. 00107/107/10/093/12	27 November 2012	18.173.179
2010	SKP KB PPN	No. 00097/107/10/093/12	27 November 2012	7.022.505
2010	SKP KB PPN	No. 00098/107/10/093/12	27 November 2012	31.286.639
2010	SKP KB PPN	No. 00099/107/10/093/12	27 November 2012	30.511.090
2010	SKP KB PPN	No. 00100/107/10/093/12	27 November 2012	7.311.433
2010	SKP KB PPN	No. 00101/107/10/093/12	27 November 2012	109.597.073
2010	SKP KB PPN	No. 00102/107/10/093/12	27 November 2012	36.664.344
2010	SKP KB PPN	No. 00105/107/10/093/12	27 November 2012	2.511.673
2010	SKP KB PPN	No. 00104/107/10/093/12	27 November 2012	6.224.372
2010	SKP KB PPN	No. 00103/107/10/093/12	27 November 2012	22.997.984
2010	SKP KB PPN	No. 00106/107/10/093/12	27 November 2012	10.225.047
2010	SKP KB PPN	No. 00013/140/10/093/12	27 November 2012	837.554
2010	SKP KB PPN	No. 00014/140/10/093/12	27 November 2012	14.754.943
2010	SKP KB PPN	No. 00015/140/10/093/12	27 November 2012	1.397.871
2010	SKP KB PPN	No. 00016/140/10/093/12	27 November 2012	12.069.302
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00021/140/10/093/12	27 November 2012	268.025
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00024/140/10/093/12	27 November 2012	1.241.109
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00020/140/10/093/12	27 November 2012	336.365
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00022/140/10/093/12	27 November 2012	4.961.260
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00001/145/10/093/12	27 November 2012	1.188.245
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00023/140/10/093/12	27 November 2012	154.276
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00017/140/10/093/12	27 November 2012	382.234
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00019/140/10/093/12	27 November 2012	8.881.863
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00018/140/10/093/12	27 November 2012	480.982
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00007/240/10/093/12	27 November 2012	1.110.000
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00008/240/10/093/12	27 November 2012	947.200
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00009/240/10/093/12	27 November 2012	44.400
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00010/240/10/093/12	27 November 2012	826.980
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00011/240/10/093/12	27 November 2012	222.000
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00012/240/10/093/12	27 November 2012	2.423.500
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00001/245/10/093/12	27 November 2012	241.741.069
2010	SKP KB PPh Pasal 4 (2)	No. 00013/240/10/093/12	27 November 2012	27.028.293
2010	SKP KB PPh	No. 00001/206/10/093/12	27 November 2012	3.704.778.978
	Jumlah SKP			**5.799.307.285**

Perusahaan menerima SKPKB No.00003/206/07/051/09 tanggal 11 Mei 2009 atas pajak penghasilan tahun pajak 2007 sebesar Rp 63.241.891.279 yang terdiri dari pajak penghasilan badan sebesar Rp 47.195.441.253 dan bunga sebesar Rp 16.046.450.026 atas SPT lebih bayar tahun 2007 yang telah dilaporkan Perusahaan sebesar Rp 14.034.215.663 tanggal 12 Juni 2009.

Perusahaan telah mengajukan permohononan keberatan melalui suratnya Nomor : B/4935/062009 atas SKPKB tersebut dan telah membayar secara mengangsur sebesar Rp 63.241.892.279 sebagai syarat pengajuan keberatan. Karena Perusahaan berkeyakinan bahwa koreksi audit dalam SKPKB dari otoritas perpajakan atas koreksi beban cadangan teknis program jaminan kematian sebesar Rp 132.169.519.132 dan pembebanan biaya bersama (*joint cost*) tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Surat keberatan Perusahaan atas ketetapan pajak telah diterima sebagian melalui surat keputusan Nomor : KEP-275/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 11 Juni 2010 semula kurang bayar sebesar Rp 63.241.891.279 dikurangi sebesar Rp 53.132.146.638 menjadi sebesar Rp 10.109.744.641.

Pada tanggal 30 Agustus 2010, Perusahaan mengajukan banding ke pengadilan Pajak melalui surat No.B/7465/082010. Sampai tanggal laporan keuangan, Pengadilan pajak belum mengeluarkan keputusan atas banding tersebut.

53. Beban Akrual

Akun ini merupakan saldo beban masih harus dibayar Perusahaan, entitas anak dan Program DPKP per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Beban Usaha yang Masih Harus Dibayar	49.588.509.996	66.233.851.059
Tagihan Pihak Ketiga	18.847.522	159.748.946
Beban Langganan	--	253.554.736
Jumlah	**49.607.357.518**	**66.647.154.741**

54. Pendapatan Diterima di Muka

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang diterima dimuka Perusahaan dan entitas anak atas sewa bangunan investasi dan sewa gedung belanja modal per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 3.302.016.750 dan Rp 3.232.580.376.

55. Liabilitas Yang Masih Harus Dibayar

Akun ini merupakan saldo liabilitas yang masih dibayar Perusahaan per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Gratifikasi	77.366.508.533	234.619.486.958
Tantiem	49.841.056.041	13.625.803.223
Liabilitas Yang Masih Harus Dibayar Bergulir	9.180.000.000	--
Liabilitas Yang Masih Harus Dibayar Tidak Bergulir	329.500.000	--
Liabilitas Yang Masih Harus Dibayar SKP	53.348.610	--
Jumlah	**136.770.413.184**	**248.245.290.181**

56. Liabilitas Pembelian Aset

Akun ini merupakan saldo Liabilitas pembelian aset tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 70.306.824.418 dan Rp 17.147.952.690.

57. Jaminan Pihak Ketiga

Akun ini merupakan saldo jaminan pihak ketiga atas sewa ruangan per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Jaminan Sewa Bangunan	24.311.677.601	21.383.391.001
Jaminan Sewa Telepon	4.080.430.105	3.893.930.105
Jaminan Sewa Lain-lain	177.350.000	65.850.000
Jumlah	**28.569.457.706**	**25.343.171.106**

58. Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Untuk Operasional

Akun ini merupakan saldo DPKP untuk operasional per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
DPKP untuk Operasional		
Saldo Awal	254.081.500.002	452.271.712.103
Kenaikan (Penurunan) DPKP untuk Operasional	138.401.225.239	(198.190.212.101)
Jumlah	**392.482.725.241**	**254.081.500.002**

59. Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Telah Disalurkan

Akun ini merupakan saldo DPKP yang telah disalurkan per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
DPKP telah Disalurkan		
Saldo Awal	498.545.590.958	352.135.564.298
Kenaikan DPKP Telah Disalurkan	167.934.873.545	146.410.026.660
Jumlah	**666.480.464.503**	**498.545.590.958**

60. Imbalan Pasca Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja didalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Imbalan Pasca Kerja		
Perusahaan	481.980.847.687	343.651.186.485
Entitas Anak	1.144.247.000	1.141.765.000
Jumlah	**483.125.094.687**	**344.792.951.485**

Perhitungan Imbalan Kerja untuk Perusahaan
Imbalan kerja yang menjadi dasar valuasi ini adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PSAK No, 24 (revisi 2004), dan Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan.

Valuasi aktuaria per 31 Desember 2013 dan 2012 menggunakan metode *Projected Unit Credit* (PUC) dan berbagai asumsi aktuaria baik asumsi ekonomis maupun asumsi demografis, diantaranya:

	2013	2012
Perusahaan		
Tingkat Diskonto	9,04%	7,00%
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	10%	9%
Tingkat Mortalitas	1% dari mortalita	1% dari mortalita
Tingkat Cacat	TMI III tahun 2011	TMI II tahun 1999
Tingkat Pengunduran Diri	6% di usia 20 tahun, menurun hingga 1% di usia 50 tahun	6% di usia 20 tahun, menurun hingga 1% di usia 50 tahun
Usia Pensiun Normal	56 tahun	56 tahun
Entitas Anak		
Tingkat Diskonto	8,5%	6,5%
Tingkat Mortalitas	6%	6%
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	TMI III	TMI III
Tingkat Cacat	10%	10%
Tingkat Pengunduran Diri	0 - 6%	0 - 6%
Usia Pensiun Normal	55 tahun	55 tahun

Liabilitas Manfaat Imbalan Pasca Kerja

Perhitungan Manfaat Pensiun tahun 2013 dilakukan oleh aktuaris internal Perusahaan berdasarkan Laporan Aktuaris tanggal 17 Februari 2013 oleh Aktuaris Pramudya Iriawan B, FSAI, AAAI-J No. Reg. PAI 2011101391 dan tahun 2012 dilakukan oleh aktuaris eksternal berdasarkan Laporan Aktuaris oleh Aktuaris Drs. H. Amran Nangasan MSc, FSAI, AAAI-J No. Reg. PAI 2001001. Sedangkan untuk Entitas Anak, dilakukan oleh PT Mitra Aktuaria Solusi dalam laporannya No. 862R/PSAK-BAK/II/2013.

Dari perhitungan aktuaria sesuai dengan ketentuan PSAK No. 24 (revisi 2004) terhadap Imbalan Kerja berdasarkan asumsi-asumsi akturia, data peserta dan data keuangan menghasilkan jumlah (Kewajiban)/Kekayaan yang diakui pada Laporan Posisi Keuangan oleh Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Perusahaan		
Nilai kini kewajiban	1.118.615.477.519	932.136.153.108
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(605.022.670.317)	(553.970.164.178)
Biaya jasa jalu yang belum diakul - *non vested*	(31.611.959.515)	(34.514.802.446)
Liabilitas Manfaat Imbalan Pasca Kerja	481.980.847.687	343.651.186.484
Pergerakan kewajiban yang diakui di Laporan Posisi Keuangan		
Liabilitas awal periode	343.651.186.485	307.069.958.273
Behan periode berjalan	219.605.696.929	105.830.036.143
Imbalan yang dibayar	(81.276.035.727)	(69.248.807.931)
Liabilitas akhir periode	481.980.847.687	343.651.186.485
Entitas Anak		
Liabilitas awal periode	1.141.765.000	1.056.325.000
Beban periode berjalan	91.732.000	85.440.000
Imbalan yang dibayar	(89.250.000)	--
Liabilitas akhir periode	1.144.247.000	1.141.765.000
Jumlah	**483.125.094.687**	**344.792.951.485**

Beban Imbalan Pasca Kerja

Beban Imbalan Pasca Kerja diakui di laporan laba rugi konsolidasi adalah sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Beban jasa kini	77.968.277.319	37.513.838.683
Beban Bunga	56.860.305.340	38.263.207.290
Kerugian Aktuaria bersih yg diakui	81.874.271.339	27.150.147.239
Amortisasi Biaya Jasa Lalu - *non vested*	2.902.842.931	2.902.842.931
Beban diakui dalam Laporan Laba Rugi	219.605.696.929	105.830.036.143
Entitas Anak		
Biaya jasa kini	81.416.000	43.476.000
Biaya Bunga	45.851.000	57.341.000
Kerugian Aktuaria bersih yg diakui	8.596.000	(23.973.000)
Amortisasi Biaya Jasa Lalu - *non vested*	(44.131.000)	8.596.000
	91.732.000	85.440.000
Beban yang diakui dalam Laporan Laba Rugi	**219.697.428.929**	**105.915.476.143**

Nilai kini liabilitas, nilai wajar aset program dan defisit pada program serta keuntungan (kerugian) atas penyesuaian historis untuk 5 tahun terakhir, yaitu:

	2013	2012	2011	2010	2009
Nilai Kini Liabilitas	(1.118.615.477.519)	(932.136.153.108)	(546.617.246.999)	(374.643.032.309)	(311.647.482.104)
Nilai Wajar Aset Program	--	--	--	--	--
Defisit Pada Program	(1.118.615.477.519)	(932.136.153.108)	(546.617.246.999)	(374.643.032.309)	(311.647.482.104)

61. Liabilitas Lain

Akun ini merupakan saldo liabilitas lain per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 3.626.075.447 dan Rp 1.716.368.466.

62. Angsuran Belum Jelas Penyetor Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

Akun ini merupakan saldo angsuran belum jelas penyetor program DPKP per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 1.152.597.380 dan Rp 615.419.151.

63. Penyesuaian Saldo Pinjaman Diberikan Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

Akun ini merupakan saldo penyesuaian saldo pinjaman diberikan program DPKP per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar nihil dan Rp 4.708.307.553.

64. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal Nopember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusaaan dari Notaris Nanda Fauzian, SH, M.Kn, susunan pemegang saham per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	2013		
	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Rp
Negara Republik Indonesia	4.000.000	100	4.000.000.000.000

Susunan pemegang saham per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	2012		
	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Rp
Negara Republik Indonesia	1.500.000	100	1.500.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal Nopember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dari Notaris Nanda Fauzian, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, disetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 3.000.000.000.000 menjadi Rp 8.000.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 1.500.000.000.000 menjadi Rp 4.000.000.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 2.500.000.000.000 berasal dari kapitalisasi cadangan umum. Perubahan anggaran dasar telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia denga surat No. AHU-60955.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013 (lihat Catatan 52.e).

65. Cadangan Umum

Akun ini merupakan saldo cadangan umum per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Saldo awal	1.747.995.060.748	804.808.047.725
Penambahan:		
Distribusi Laba	1.556.941.146.376	1.443.187.013.023
Reklasifikasi Dana Pengembangan Non JHT	1.198.421.605.861	--
Jumlah	4.503.357.812.985	2.247.995.060.748
Pengurangan:		
Koreksi saldo laba tahun lalu		
Konversi ke Modal Disetor	(60.479.667.431)	(500.000.000.000)
Reklasifikasi ke modal disetor	(2.500.000.000.000)	--
Penyesuaian Aset Pajak Tangguhan	(1.370.393.684.333)	--
Jumlah	(3.930.873.351.764)	(500.000.000.000)
Saldo akhir	**572.484.461.221**	**1.747.995.060.748**

Distribusi laba sebesar Rp 1.556.941.146.376 berdasarkan hasil RUPS tanggal 3 Mei 2013 (lihat Catatan 67).

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Laporan Tahunan tahun buku 2012 tanggal 3 Mei 2013 disetujui reklasifikasi pos dana pengembangan Non JHT ke pos cadangan umum sebesar Rp 1.198.421.605.861.

Berdasarkan Akta no. 3 tanggal Nopember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dari Notaris Nanda Fauzian, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, disetujui penggunaan dana cadangan umum untuk mengkoreksi laba tahun buku sebelumnya sebesar Rp 60.479.667.431 karena dampak perubahan PSAK 55 tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran serta penerapan PSAK 62 tentang kontrak asuransi.

Perusahaan melakukan reklasifikasi cadangan umum sebesar Rp 2.500.000.000.000 menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan Akta no. 3 tanggal Nopember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dari Notaris Nanda Fauzian, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, (lihat Catatan 64).

Perusahaan menggunakan Cadangan Umum sebesar Rp 1.370.393.684.333 untuk penyesuaian Aset Pajak Tangguhan (lihat Catatan 52.e).

66. Cadangan Tujuan

Akun ini merupakan saldo cadangan tujuan per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berkut:

	2013 Rp	2012 Rp
Saldo Awal Tahun	588.211.054.227	483.211.054.227
Distribusi Laba	275.000.000.000	105.000.000.000
Saldo akhir	**863.211.054.227**	**588.211.054.227**

Distribusi laba sebesar Rp 275.000.000.000 pada tahun 2013 sesuai dengan RUPS tanggal 3 Mei 2013 (lihat Catatan 67).

67. Saldo Laba

Saldo laba per 31 Desember 2013 dan 2012 yang terdiri dari:

	2013 Rp	2012 Rp
Saldo awal	2.121.461.478.945	1.959.610.971.134
Distribusi laba	(2.181.941.146.376)	(2.020.090.638.565)
Penyesuaian Saldo Laba Karena Perlakuan Akuntansi	60.479.667.431	--
Laba Tahun berjalan	2.287.642.937.018	2.181.941.146.376
Jumlah	**2.287.642.937.018**	**2.121.461.478.945**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Laporan Tahunan tahun buku 2012 tanggal 3 Mei 2013 disetujui penggunaan laba 2012 sebesar Rp 2.181.941.146.376 untuk DPKP sebesar Rp 350.000.000.000, cadangan tujuan sebesar Rp 275.000.000.000 dan cadangan umum sebesar Rp 1.556.941.146.376.

Penyesuaian saldo laba sebesar Rp 60.479.667.431 telah disetujui oleh pemegang saham (lihat Catatan 65).

68. Selisih Penilaian Efek – Dana Non JHT

Akun ini merupakan saldo peningkatan (penurunan) pada nilai wajar dalam investasi yang Tersedia untuk Dijual yang dananya didapatkan dari program Non JHT. Saldo per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Saham	(1.199.082.412.236)	528.816.103.995
Reksadana	(168.709.912.523)	59.011.440.871
Obligasi	(5.666.820.000)	6.352.924.000
Jumlah	**(1.373.459.144.759)**	**594.180.468.866**

69. Kepentingan Non Pengendali

Bagian pemilik saham minoritas atas aset bersih Entitas anak per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 2.836.404 dan Rp 2.922.910.

70. Pendapatan Iuran

Saldo ini merupakan pendapatan iuran JKK, JKM, JPK, Jasa Konstruksi dan TK Mandiri untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Pendapatan Iuran Program Paket		
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.365.021.248.278	1.731.531.738.620
Jaminan Kematian (JKM)	1.095.463.434.391	812.132.852.203
Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK)	3.188.235.583.429	1.786.808.954.109
Jumlah	6.648.720.266.098	4.330.473.544.932
Pendapatan Iuran Program Khusus		
Jaminan Jasa Konstruksi	193.044.110.191	270.158.781.584
Jaminan Tenaga Kerja Mandiri	76.904.207.311	49.851.064.220
Jumlah	269.948.317.502	320.009.845.804
Jumlah Pendapatan Iuran	**6.918.668.583.600**	**4.650.483.390.736**

71. Beban Jaminan

Jumlah ini merupakan beban jaminan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Program Paket		
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	563.442.819.487	506.807.062.772
Jaminan Kematian (JKM)	406.843.528.654	357.373.826.572
Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK)	1.957.532.291.154	1.168.333.698.683
	2.927.818.639.295	2.032.514.588.027
Program Khusus		
Jaminan Jasa Kontruksi	40.362.049.129	31.188.892.288
Jaminan Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	63.460.001.889	35.794.419.873
	103.822.051.018	66.983.312.161
Jumlah	**3.031.640.690.313**	**2.099.497.900.188**

72. Beban Cadangan Teknis

Akun ini merupakan penyisihan dana yang digunakan untuk pembayaran jaminan yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang dengan rincian:

	2013 Rp	2012 Rp
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.897.185.870.334	1.001.675.850.351
Jaminan Kematian (JKM)	85.070.869.503	248.774.358.572
Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK)	141.133.263.687	45.156.654.005
Jaminan Jasa Kontruksi	(30.845.868.562)	45.516.978.212
Katastrofa	45.024.300	--
Jumlah	**2.092.589.159.262**	**1.341.123.841.140**

Beban Cadangan Teknis Jasa Konstruksi per 31 Desember 2013 sebesar (Rp 30.845.868.562) dihitung sebagai berikut:

Beban Cadangan Teknis Tahun 2013	77.217.644.076
Jurnal Balik Beban Cadangan Teknis Tahun 2012	(108.063.512.638)
Saldo Beban per 31 Desember 2013	**(30.845.868.562)**

73. Pendapatan Operasional Entitas Anak

Pendapatan operasional langsung yang diterima PT Bijak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 34.875.004.228 dan Rp 45.781.147.054.

74. Pendapatan Investasi

Akun ini merupakan pendapatan investasi pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Laba Pelepasan Investasi	1.394.278.377.666	1.096.124.497.418
Pendapatan Bunga	530.413.693.261	469.088.712.483
Pendapatan Dividen	214.895.575.739	219.987.705.956
Pendapatan Investasi Syariah	35.768.008.030	36.683.291.065
Pendapatan Sewa	567.261.404	1.047.236.000
Pendapatan Lainnya	316.794.007	728.268.797
Jumlah	**2.176.239.710.107**	**1.823.659.711.719**

a. Laba Pelepasan Investasi

	2013 Rp	2012 Rp
Saham Non JHT - Tersedia Untuk Dijual	919.940.903.058	352.453.989.421
Syariah Non JHT - Saham Tersedia Untuk Dijual	310.073.414.687	635.411.077.339
Reksadana Non JHT - Tersedia Untuk Dijual	135.344.002.421	90.609.462.349
Saham Non JHT - Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi	15.780.112.500	12.438.033.309
Syariah Non JHT - Saham Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi	13.139.945.000	5.092.655.000
Obligasi Non JHT - Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi	--	119.280.000
Jumlah	**1.394.278.377.666**	**1.096.124.497.418**

b. Pendapatan Bunga

	2013 Rp	2012 Rp
Bunga Obligasi	319.153.710.569	242.922.824.534
Deposito Berjangka	205.057.974.691	222.280.266.983
Deposito *on Call*	6.202.008.001	3.885.620.966
Jumiah	**530.413.693.261**	**469.088.712.483**

c. Pendapatan Dividen

	2013 Rp	2012 Rp
Penyertaan Langsung Minoritas	156.488.621.110	151.913.082.859
Saham - Konvensional	57.745.629.490	67.525.344.405
Saham - Syariah	661.325.139	549.278.692
Jumlah	**214.895.575.739**	**219.987.705.956**

d. Pendapatan Investasi Syariah

	2013 Rp	2012 Rp
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk	21.362.298.278	22.140.808.147
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	14.405.709.752	14.542.482.918
Jumlah	**35.768.008.030**	**36.683.291.065**

e. Pendapatan Investasi Lainnya

	2013 Rp	2012 Rp
Pendapatan Saham	224.473.212	40.650.597
Penerimaan Investasi Lain - Properti - Non JHT - Denda	78.227.771	--
Penerimaan Investasi Lain - Properti - Non JHT	10.240.807	3.200.000
Penerimaan Investasi Lain Deposito	3.612.217	43.200
Penerimaan Investasi Lain Obligasi	240.000	456.875.000
Pendapatan Investasi Lain Syariah - Non JHT	--	227.500.000
Jumlah	**316.794.007**	**728.268.797**

75. Beban Investasi

Akun ini merupakan beban untuk pengelolaan investasi Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012, dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Pajak Atas Kegiatan Investasi	96.159.007.028	85.092.922.825
Administrasi Atas Kegiatan Investasi	20.496.781.674	10.434.371.334
Kerugian Atas Penurunan Nilai Efek Investasi	15.450.532.000	2.350.910.809
Investasi Syariah	6.078.372.158	21.157.339.768
Properti Investasi	551.833.927	772.090.454
Manajer Investasi dan Konsultan	417.650.088	428.884.800
Asuransi Aset Investasi	1.612.683	6.042.251
Investasi Lainnya	830.651.292	554.148.245
Jumlah	**139.986.440.850**	**120.796.710.486**

a. Beban Pajak Atas Kegiatan Investasi

	2013 Rp	2012 Rp
PPh Atas Pendapatan Bunga Obligasi	46.940.766.668	37.341.907.500
PPh Bunga Deposito Berjangka	38.616.545.961	43.821.681.318
PPh Atas Transaksi Saham	4.634.108.792	2.267.545.013
PPh Atas Pendapatan Dividen	3.595.544.634	5.421.359
PPh Atas Pendapatan Bunga DOC	1.243.467.822	774.067.302
PBB Tanah Dan Bangunan	982.152.942	736.357.524
PPh Atas Sewa	98.224.870	68.605.710
PPh Atas Bunga Jasa Giro	47.362.654	8.409.449
PPh Atas Pendapatan Lain Investasi	832.685	68.927.650
Jumlah	**96.159.007.028**	**85.092.922.825**

b. Beban Administrasi Atas Kegiatan Investasi

	2013 Rp	2012 Rp
Transaksi Investasi	16.843.252.460	6.689.827.606
Penitipan Surat Berharga	3.037.603.899	3.729.686.561
Beban Pengelolaan Kustodian	584.296.884	--
Bank Investasi	31.628.431	12.742.500
Denda	--	2.114.667
Jumlah	**20.496.781.674**	**10.434.371.334**

c. Beban Investasi Syariah

	2013 Rp	2012 Rp
PPh Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah	6.078.372.158	7.154.319.209
Transaksi Investasi - Syariah	--	7.809.166.539
PPh Atas Transaksi Investasi Syariah	--	3.124.354.020
Kerugian Atas Penurunan Investasi Syariah	--	3.035.375.000
PPh Atas Pendapatan Lain Investasi Syariah	--	34.125.000
Jumlah	**6.078.372.158**	**21.157.339.768**

d. Beban Manajer Investasi dan Konsultan

	2013 Rp	2012 Rp
Manajemen Properti Non JHT	261.986.000	--
Konsultan Manajemen Investasi	93.950.799	410.184.800
Pengelolaan Investasi melalui *Fund Manager*	61.713.289	18.700.000
Jumlah	**417.650.088**	**428.884.800**

e. Beban Investasi Lainnya

	2013 Rp	2012 Rp
Properti Investasi	93.610.000	--
Meterai	3.510.000	4.536.000
Obligasi	--	441.857.143
Lain - Lain	733.531.292	107.755.102
Jumlah	**830.651.292**	**554.148.245**

76. Pendapatan Pengelolaan Atas Dana Investasi JHT

Akun ini merupakan pendapatan/beban pengelolaan atas dana investasi JHT selama tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 1.678.225.675.984 dan Rp 1.502.402.566.030.

Berdasarkan PMK No. 48/PMK.010/2011 tentang Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua, ditetapkan bahwa persentase pengelolaan JHT tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 1,35% dan 1,39% dari rata-rata dana investasi JHT.

77. Beban Usaha

Akun ini merupakan beban Perusahaan dan entitas anak periode 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Personil	1.132.876.218.156	971.485.529.384
Administrasi dan Umum	417.284.126.223	220.423.133.971
Penyuluhan dan Pembinaan	368.099.796.222	318.495.736.460
Jasa Produksi dan Tantiem	307.213.394.509	248.065.019.960
Imbalan Pasca Kerja	219.697.428.929	105.915.476.143
Penyisihan Piutang Iuran	116.066.713.264	60.716.675.920
Penyusutan dan Amortisasi	82.806.754.215	79.660.971.581
Manajemen	44.975.714.181	37.455.025.678
Perencanaan dan Pengembangan	36.004.939.211	26.302.592.378
Pengembangan SDM	29.732.565.317	16.519.150.398
Penyelesaian Masalah Hukum	3.682.839.047	2.476.520.353
Jumlah	**2.758.440.489.274**	**2.087.515.832.226**

a. Beban Personil

	2013 Rp	2012 Rp
Tunjangan-Tunjangan Tambahan	412.472.064.121	387.332.566.411
Tunjangan-Tunjangan Pokok	379.403.415.516	279.290.580.084
Gaji Dan Honor	172.971.130.705	159.072.961.921
Jaminan Sosial/Jpk Tambahan/ Pensiun	146.506.984.478	125.513.844.756
Penerimaan Dan Penempatan	12.698.971.155	10.807.319.991
Pembinaan Pegawai	5.514.955.960	6.725.305.837
Personil lainnya	3.308.696.221	2.742.950.384
Jumlah	**1.132.876.218.156**	**971.485.529.384**

b. Beban Administrasi dan Umum

	2013 Rp	2012 Rp
Pajak Dan Asuransi Atas Aset Tetap	171.382.797.968	7.477.169.891
Pemeliharaan Dan Pengelolaan Aset	69.573.487.526	58.088.518.035
Pengolahan Data	44.467.858.612	33.718.841.273
Perlengkapan Kantor	34.620.902.576	35.067.994.963
Sewa	32.197.598.734	28.087.173.636
Langganan	31.540.572.119	28.493.424.872
Kesekretariatan	16.088.615.663	11.792.886.878
Administrasi Keuangan	9.412.461.670	9.317.981.909
Lain - lain	7.999.831.355	8.379.142.514
Jumlah	**417.284.126.223**	**220.423.133.971**

c. Beban Penyuluhan dan Pembinaan

	2013 Rp	2012 Rp
Pembinaan Kepesertaan	163.806.795.489	136.387.494.476
Hubungan Masyarakat	91.532.419.043	81.067.378.020
Operasional Anak Perusahaan	75.370.300.507	71.102.423.476
Perjalanan Dinas	17.034.586.657	12.760.583.436
Perluasan Kepesertaan	13.955.836.561	11.488.689.399
Representasi Pejabat	6.399.857.965	5.689.167.653
Jumlah	**368.099.796.222**	**318.495.736.460**

d. Beban Jasa Produksi dan Tantiem

	2013 Rp	2012 Rp
Jasa Produksi	254.915.141.691	233.270.298.760
Tantiem	52.298.252.818	14.794.721.200
Jumlah	**307.213.394.509**	**248.065.019.960**

e. Beban Penyisihan Piutang Iuran

	2013 Rp	2012 Rp
Iuran JPK	40.616.680.311	4.670.148.480
Iuran JKK	35.775.326.550	1.889.099.140
Iuran Jakon	26.326.109.036	48.991.328.022
Iuran JKM	13.348.597.367	5.166.100.278
Jumlah	**116.066.713.264**	**60.716.675.920**

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

	2013 Rp	2012 Rp
Komputer	28.831.163.494	28.125.024.890
Peralatan	15.460.051.080	16.591.416.779
Kendaraan Dinas	13.697.482.146	13.041.742.696
Bangunan	12.024.742.722	9.707.159.561
Peralatan Kantor	7.843.465.156	7.997.587.953
Amortisasi Lisensi Perangkat Lunak	4.949.849.617	4.198.039.702
Jumlah	**82.806.754.215**	**79.660.971.581**

g. Beban Manajemen

	2013 Rp	2012 Rp
Direksi	31.989.467.741	29.340.451.455
Dewan Komisaris	6.386.082.066	3.264.029.297
Lain - lain	6.600.164.374	4.850.544.926
Jumlah	**44.975.714.181**	**37.455.025.678**

h. Beban Perencanaan dan Pengembangan

	2013 Rp	2012 Rp
Renbang Bidang Manajemen	30.434.357.586	20.818.258.545
Renbang Kerjasama Kelembagaan	2.725.903.454	2.579.122.296
Renbang Kerjasama Internasional	1.876.988.782	2.488.385.745
Renbang Bidang Program	598.082.564	379.131.307
Perpustakaan	369.606.825	37.694.485
Jumlah	**36.004.939.211**	**26.302.592.378**

i. Beban Pengembangan SDM

	2013 Rp	2012 Rp
Diklat Karier	21.005.219.568	9.706.527.992
Diklat Teknis	3.335.230.264	3.896.985.699
Diklat Penyegaran	3.332.376.278	1.926.960.857
Pengembangan Diklat	2.059.739.207	988.675.850
Jumlah	**29.732.565.317**	**16.519.150.398**

j. Beban Penyelesaian Masalah Hukum

	2013 Rp	2012 Rp
Penyusunan Produk Hukum Kepesertaan	2.445.929.776	1.545.577.875
Penyelesaian Masalah Hukum Kepesertaan	846.924.190	793.902.686
Beban Penyelesaian Masalah Hukum	77.000.000	--
Proses Penyelenggaraan Hukum Kepesertaan	312.985.081	137.039.792
Jumlah	**3.682.839.047**	**2.476.520.353**

78. Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih

Jumlah pendapatan lain-lain dan beban lain-lain diluar dari tujuan usaha perusahaan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Pendapatan Lain-Lain		
Bunga DOC - Dana Non Investasi	4.788.656.936	1.674.009.770
Jasa Giro	5.211.393.219	5.232.963.724
Denda	4.296.415.594	5.023.318.527
Sewa Bangunan Belanja Modal	1.593.800.018	444.497.887
Laba Penjualan Aset Tetap	1.397.997.415	2.181.678.558
Cadangan Katastrofra JPK	--	54.941.942.976
Pemulihan Penurunan Nilai Piutang	--	31.814.962.816
Lainnya	83.897.690.301	24.046.171.505
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	101.185.953.483	125.359.545.763

	2013 Rp	2012 Rp
Beban Lain-Lain		
PPh Jasa Giro	(809.359.246)	(415.944.794)
Denda Pajak dan Dividen	(157.248.234)	(1.718.703.165)
PPh Pasal 23	(105.302.115)	(46.609.710)
Penyisihan Piutang	(44.198.667)	(387.624.336)
Lain-Lain	(76.924.727.754)	(1.847.616.651)
Jumlah Beban Lain-Lain	(78.040.836.016)	(4.416.498.656)
Pendapatan Lain-Lain - Bersih	**23.145.117.467**	**120.943.047.107**

79. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Obligasi, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, penitipan surat berharga,
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi, Virtual Account,Co Branding
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Obligasi, Virtual Account,Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB), Penempatan Investasi - Saham
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - KIK-EBA, Penempatan Investasi - Obligasi, Penempatan Investasi - Saham, Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB)
	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Sukuk
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pupuk Kaltim	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Gresik (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	Perum Pembangunanan Perumahan Nasional	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Timah (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham

Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima oleh Direksi Perusahaan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 9.443.000.000 dan Rp 9.116.325.000.

80. Perikatan

a. Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk pelaksanaan pekerjaan *Wide Area Network* dengan nilai sebesar Rp 7.651.733.688 sesuai dengan perjanjian Nomor: PER/80/062011 dengan masa kontrak 1 Maret 2013 sampai dengan 28 Februari 2014.

b. Pengelolaan gedung Menara Jamsostek dengan PT Binajasa Abadikarya sebesar Rp 16.150.000.000 sesuai dengan PER/109/082012.

c. Jasa penyewaan PC dengan PT Pacifik Agung Tridaya sesuai dengan perjanjian nomor PER/80/062011 dan PER/145/052013 masin-masing sebesar Rp 1.919.775.000 dan Rp 39.952.000.

d. Jasa Pemeliharaan Perangkat Jarkom dengan PT Master System Infotama sebesar Rp 3.190.000.000 sesuai dengan PER/21/022012.

e. Jasa Layanan Internet Kantor Pusat dengan PT Cyber Network Indonesia sebesar Rp 899.250.000 sesuai dengan PER/26/032012.

f. Jasa penyewaan PC dengan PT Mitra Integrasi Informatika sesuai dengan perjanjian nomor PER/118/082018 sebesar Rp 2.735.370.

g. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013 yang telah disahkan dalam RUPS pengesahan RKAP tahun 2013. Biro Teknologi Informasi merencanakan pengadaan belanja modal teknlogi informasi untuk pengembangan infrastruktur sebesar Rp 100.000.000.000 yang sampai dengan 31 Desember 2013 masih dalam proses pengadaan dan akan terealisasi pada tahun 2014.

81. Kontinjensi

Piutang Iuran dan Denda

Jumlah nilai dari piutang iuran serta denda JHT dan Non JHT yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih namun belum diakui pada laporan keuangan Perusahaan dikarenakan Data Upah Siap Rekon (DUSR) belum diajukan oleh perusahaan peserta pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
Piutang Iuran		
JHT	401.526.603.108	655.402.094.649
Non JHT	141.512.388.687	190.875.165.846
	543.038.991.795	846.277.260.495
Piutang Denda		
JHT	99.801.197.918	86.771.328.215
Non JHT	35.912.514.168	24.034.162.047
	135.713.712.086	110.805.490.262
Total	**678.752.703.882**	**957.082.750.757**

Piutang iuran Non JHT, Piutang denda Non JHT, dan piutang denda JHT diakui ketika DUSR diterima dari perusahaan peserta, dan piutang JHT tidak dicatat disebabkan iuran JHT akan diakui pada saat kas diterima. Perusahaan tidak mencatatkan piutang iuran dan denda ketika tidak didukung oleh DUSR.

a. Piutang iuran JHT dan Non JHT yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
JHT		
Kantor Wilayah I	15.198.988.861	41.728.529.078
Kantor Wilayah II	16.990.154.471	44.378.615.568
Kantor Wilayah III	164.634.465.679	335.905.083.164
Kantor Wilayah IV	74.227.768.124	85.840.667.175
Kantor Wilayah V	11.837.743.120	24.762.159.573
Kantor Wilayah VI	31.316.675.152	42.351.079.827
Kantor Wilayah VII	29.139.384.126	53.180.679.831
Kantor Wilayah VIII	7.180.888.965	27.255.280.433
Kantor Wilayah IX	30.942.028.204	--
Kantor Wilayah X	16.647.187.386	--
Kantor Wilayah XI	3.411.319.019	--
	401.526.603.108	**655.402.094.649**
Non JHT		
Kantor Wilayah I	8.381.221.981	13.706.067.067
Kantor Wilayah II	9.886.165.689	22.999.740.025
Kantor Wilayah III	42.805.516.241	67.566.965.130
Kantor Wilayah IV	24.417.235.968	28.719.534.404
Kantor Wilayah V	6.629.435.267	10.437.940.186
Kantor Wilayah VI	10.802.575.498	14.914.147.673
Kantor Wilayah VII	15.827.903.768	20.117.834.142
Kantor Wilayah VIII	3.646.984.003	12.412.937.219
Kantor Wilayah IX	13.189.592.095	--
Kantor Wilayah X	4.212.543.792	--
Kantor Wilayah XI	1.713.214.384	--
	141.512.388.687	**190.875.165.846**
Total	**543.038.991.795**	**846.277.260.495**

b. Piutang denda JHT dan Non JHT yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp
JHT		
Kantor Wilayah I	6.480.935.949	5.184.135.634
Kantor Wilayah II	3.360.445.625	5.426.005.616
Kantor Wilayah III	41.294.769.450	47.683.635.707
Kantor Wilayah IV	12.159.044.347	9.727.396.482
Kantor Wilayah V	3.241.147.273	3.779.232.883
Kantor Wilayah VI	8.735.687.408	5.349.182.735
Kantor Wilayah VII	8.822.901.702	6.323.126.866
Kantor Wilayah VIII	2.413.440.589	3.298.612.292
Kantor Wilayah IX	4.747.014.184	--
Kantor Wilayah X	6.471.083.299	--
Kantor Wilayah XI	2.074.728.093	--
	99.801.197.918	**86.771.328.215**

	2013 Rp	2012 Rp
Non JHT		
Kantor Wilayah I	2.099.186.622	1.730.753.687
Kantor Wilayah II	1.584.232.995	2.928.692.464
Kantor Wilayah III	11.005.614.015	8.787.882.407
Kantor Wilayah IV	5.110.512.456	3.223.255.624
Kantor Wilayah V	1.499.435.697	1.486.756.019
Kantor Wilayah VI	3.521.295.386	1.872.443.668
Kantor Wilayah VII	3.900.514.836	2.408.329.614
Kantor Wilayah VIII	1.229.376.242	1.596.048.564
Kantor Wilayah IX	2.534.485.911	--
Kantor Wilayah X	2.519.289.313	--
Kantor Wilayah XI	908.570.695	--
	35.912.514.168	**24.034.162.047**
Total	**135.713.712.086**	**110.805.490.262**

Perkara Hukum

Dalam melakukan kegiatan, Perusahaan tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset, Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, terdiri atas:

a. Gugatan Ahli Waris A. Romli & CV. Royal Bersaudara
Gugatan perbuatan melawan hukum atas Penetapan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menetapkan bahwa klaim JKK yang diajukan CV Royal Bersaudara bukan merupakan kecelakaan kerja. Kasus ini ditangani oleh Biro Kepatuhan dan Hukum, yang saat ini masih dalam proses Kasasi Mahkamah Agung RI.

b. Gugatan Sdr Abdul Rahmah R (Mantan Karyawan PT Dharma Henwa)
Gugatan terkait Pelaporan data upah sebagian yang dilaporkan Perusahaan dalam program jamsostek, yang merugikan karyawan karena menerima santunan cacat tetap yang lebih kecil dari seharusnya. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan menetapkan Perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum. PT Dharma Henwa diharuskan membayar JKK sebesar Rp 41.082.047. Saat ini masih melakukan Kasasi Mahkamah Agung.

c. Gugatan H. M Arif & Hj. Petta Intang
Perkara sengketa tanah milik PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Kendari yang di klaim oleh H.M Arif & Hj. Petta Intang. Putusan Pengadilan Negeri Kendari menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya. Saat ini masih melakukan Kasasi Mahkamah Agung.

d. Gugatan Sdr. Dadan Umbara (Mantan Karyawan Panasia Indosyntec Group)
Gugatan perdata terkait pelaporan data upah sebagian dalam kepesertaan program jamsostek yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Saat ini Perkara disidangkan kembali di Pengadilan Negeri Bandung.

e. Gugatan Euis Widianingsih Dkk karyawan PT Panasia Filament Inti Tbk.
Gugatan terkait PDS upah iuran JHT, PT Jamsostek (Persero) sebagai Turut Tergugat. Kasus ini di tangani oleh Biro Kepatuhan dan Hukum. Dan masih ini masih berlanjut di Pengadilan Negeri Bandung.

f. Gugatan kepada Indro Tjahyono
Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Kasus pencemaran nama baik mantan Direksi (Alm Bpk A. Djunaidi) oleh Sdr Indro Tjhayono /Staf Ahli Depnakertrans.

g. Penyelesaian aset Sdr. Eddy Sofyan
Penyelesaian aset Sdr. Eddy Sofyan berupa jaminan atas 14 Sertifikat Tanah di Desa Cerucuk, Tanjung Pandan, Belitung. (Jaminan tambahan MTN PT. Volgren Indonesia)

h. Penyelesaian asset ex MTN PT. Sapta Prana Jaya
1.) Tanah di Desa Waringin Jaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang,
2.) Tanah di Desa Sinar Jaya , Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang,
3.) Tanah di Desa Tambak , Kecamatan Cimarga , Kabupaten Lebak,
4.) Tanah di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor.

i. Pelaksanaan Lelang Tahap III
Pelaksanaan Lelang Tahap III Tanah di Desa Kamarung Kecamatan Pegaden Subang Jawa Barat (Aset Jaminan MTN PT. Volgren Indonesia)
Telah dilakukan lelang eksekusi tahap III pada tanggal 27 November 2013, dan belum terjual disebabkan harga limit yang ditetapkan berdasarkan appraisal yang dilakukan oleh PN Subang lebih tinggi dari harga pasaran property setempat menyebabkan tidak ada peserta lelang

j. Investigasi bus PT Volgren Indonesia di Cirebon dan Purwokerto.
Berdasarkan laporan kunjungan Lapangan ke Purwokerto dan ditemukan Bis sudah dipotong-potong.

k. Kasus kepailitan PT Eight Oh Two Indonesia
Pengajuan Tagihan Iuran perusahaan dalam proses pailit, kepesertaan Kacab Tanjung Priok, saat ini Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit dan masih dalam proses pemberesan harta pailit oleh pihak Kurator

l. Perkara Perdata Nomor : 159/Pdt.G/PN.Jkt.Tim
Kasus sengketa ahli waris klaim JKM & JHT a/n Alm Asimin karyawan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufactoring, kepesertaan Kacab Rawamangun. Putusan PN Jakarta Timur No Nomor : 159/Pdt.G/PN.Jkt.Tim, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas putusan tersebut penggugat menyatakan banding. Saat masih dalam proses banding

m. Permasalahan Tenaga Outsorcing Pengemudi
Sudah terdapat kesepakatan dengan ditandatangani akta perdamaian di hadapan mediator Pegawai Pengawas Disnakertrans. Kasus ini telah selesai dengan dibayarnya pesangon.

n. Pendapat Hukum JAMDATUN terkait rencana investasi PT Jamsostek (Persero)
Legal Opini Jamdatun terkait Investasi yang telah disampaikan tanggal 2 Mei 2013 kepada PT. Jamsostek (Persero).

o. PHK Karyawan Outsourcing Jamsostek 2013
(i). Terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012 dan permenaker Nomor 19 tahun 2012, tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, yang penyesuaiannya paling lama 12(dua belas) bulan atau pada 13 November 2013.
(ii). Manajemen mengambil kebijakan mengakhiri penggunaan outsourcing untuk tenaga administrasi terhitung 31 Oktober 2013, dengan tahapan sbb:
- Diberikan kesempatan seleksi untuk diangkat menjadi karyawan tetap dengan persyaratan cukup longgar, mengingat kontribusinya selama ini.
- Untuk yang tidak lolos seleksi diakhiri hubungan kerjanya dengan diberiikan kompensasi sesuai ketentuan UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Sampai saat ini masih ada beberapa outsourcing yang belum menerima pengakhiran hubungan kerja dan masih melakukan upaya hukum.

p. Penangan Kasus Blitar
Berdasarkan surat kuasa Nomor : SKS /52/112013 dari Direktur Utama kepada Kanwil Jatimbanusra mengenai pelaporan kasus Blitar kepada Kejaksaan Tinggi Jatim.

q. Perkara Pidana Pembobolan JHT oleh sdr. A. Harry Mufty dkk
Perkara Pidana Pembobolan JHT oleh sdr. A. Harry Mufty dkk di beberapa kantor cabang. Sampai dengan saat ini Polsek Mampang menahan 3 orang yaitu A. Harry Mufty, Anti Kholifatin dan Sodikin. Persidangan atas kasus ini telah dilaksanakan dan menjatuhkan vonis kepada 3 terdakwa selama 9 bulan pidana penjara.

r. Kasus Penyerobotan Tanah learning Center Bogor.
Telah ditunjuk Lawfirm James Purba & Associates untuk melakukan pengamanan aset : melakukan penjagaan maupun melakukanpenanganan perkara hukum apabila ada gugatan perdata / laporan pidana dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah.

82. Transaksi Non Kas

Transaksi non kas terdiri dari

Reklasifikasi Cadangan Umum sebesar Rp 2.500.000.000.000 menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh (lihat Catatan 64 dan 65);

Reklasifikasi Dana Pengembangan Non JHT sebesar Rp 1.198.421.605.861 ke Cadangan Umum (lihat Catatan 46 dan 65); dan

Penyesuaian Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp 1.370.393.684.333 ke Cadangan Umum (lihat Catatan 52 dan 65).

83. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

a. Transformasi kelembagaan PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(i). Pada 25 November 2011, ditetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sesuai UU 24/2011, PT Jamsostek (Persero) akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015 sehingga secara resmi UU 3 Tahun 1992 dicabut dan PT Jamsostek (Persero) dibubarkan tanpa likuidasi. Program yang diselenggarakan mengalami perubahan yaitu ditambah Jaminan Pensiun, sedangkan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) diserahkan kepada BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan/ASKES (Persero). Untuk melaksanakan UU ini, sesuai Pasal 70 maka Pemerintah harus menetapkan seluruh peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan Pemerintah telah menetapkan 5 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden dan 1 Keputusan Presiden, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggraaan Jaminan Sosial.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Peraturan Presiden Nomor: 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.

7. Peraturan Presiden Nomor: 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
8. Peraturan Presiden Nomor: 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(ii). BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 untuk menyelenggaran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JK). Pada saat berlakunya UU No. 24 sesuai pasal 62 angka 2 huruf d, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, paling lambat 1 Juli 2015.

(iii). Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 61 huruf c disebutkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) sampai dengan berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan ditugasi untuk menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jaminan Sosial Tenanga Kerja (Persero) terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tanggal 27 Desember 2013 pasal 15 angka 4 dan 5 disebutkan bahwa aset dana jaminan sosial yang bersumber dari hasil pengalihan aset program jaminan sosial ketenagakerjaan paling sedikit sebesar liabilitas kepada peserta pada saat pengalihan aset PT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pengalihan aset dan liabilitas Program JPK yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :

ASET		
Kas dan Setara Kas		
Giro		367.593.823.441
Piutang Iuran		
Piutang Iuran	83.877.802.574	
Akumulasi Penyisihan Piutang Iuran	(40.616.680.311)	
Piutang Iuran (Bersih)		43.261.122.263
JUMLAH ASET		**410.854.945.704**
LIABILITAS		
Utang Jaminan		
Utang jaminan	--	
Utang jaminan diestimasi	58.729.201.217	
Utang jaminan IBNR	29.476.698.075	
		88.205.899.292
Cadangan Teknis JPK		322.649.046.412
JUMLAH LIABILITAS		**410.854.945.704**

b. Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan bahwa guna mendukung operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan, maka Negara Republik Indonesia perlu memberikan modal awal kepada BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013. Nilai modal awal sebesar Rp 500.000.000.000.

c. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menetapkan:
(i). Mengangkat Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama dua tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas	
Ketua Komisaris	Mulabasa Hutabarat
Anggota Komisaris	Iskandar Maula
Anggota Komisaris	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota Komisaris	Bambang Wirahyoso
Anggota Komisaris	Mathias Tambing
Anggota Komisaris	Nina Sapti Triaswati
Anggota Komisaris	H.M. Saleh Khalid

(ii). Mengangkat Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama dua tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sejak 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

Dewan Direksi	
Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur	Agus Supriyadi
Direktur	Jeffry Haryadi
Direktur	Amri Yusuf
Direktur	Achmad Riadi
Direktur	Junaedi
Direktur	Herdy Trisanto

84. Informasi Keuangan Tambahan

Perusahaan menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama, Informasi keuangan tambahan Perusahaan (entitas induk), dimana investasi pada entitas anak dicatat dengan metode biaya disajikan untuk dapat menganalisa hasil usaha induk perusahaan saja. Informasi keuangan tambahan Perusahaan (entitas induk) harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan, anak perusahaan serta Entitas Bertujuan Khusus.

Oleh karena perbedaan antara laporan keuangan induk perusahaan dengan laporan keuangan konsolidasian tidak material, maka catatan atas laporan keuangan induk perusahaan tidak disajikan dalam informasi keuangan tambahan ini.

85. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian.

	2013						
	Nilai Tercatat						Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Dimiliki Untuk Dijual	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Diukur Berdasarkan Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah Nilai Tercatat	
Aset Keuangan							
INVESTASI							
Bank Investasi	--	9.785.525.622	--	--	--	9.785.525.622	9.785.525.622
Deposito	--	40.179.996.691.000	--	--	--	40.179.996.691.000	40.179.996.691.000
Saham	504.711.200.000	--	31.306.679.024.860	--	--	31.811.390.224.860	31.811.390.224.860
Reksadana	24.364.096.182	--	11.742.724.507.514	--	--	11.767.088.603.696	11.767.088.603.696
KIK EBA	--	--	--	243.922.959.405	--	243.922.959.405	243.922.959.405
Sukuk	33.356.906.842	--	--	5.759.554.771.284	--	5.792.911.678.126	5.792.911.678.126
Obligasi	1.882.755.103.000	--	1.996.992.269.750	55.136.676.693.021	--	59.016.424.065.771	59.016.424.065.771
Penyertaan	--	--	30.813.767.448	--	--	30.813.767.448	30.813.767.448
NON INVESTASI							
Kas	--	--	--	--	739.668.100	739.668.100	739.668.100
Bank	--	369.226.909.138	--	--	--	369.226.909.138	369.226.909.138
DOC Non Investasi	--	486.000.000.000	--	--	--	486.000.000.000	486.000.000.000
Penempatan Sementara	--	259.500.000.000	--	--	--	259.500.000.000	259.500.000.000
Piutang Usaha	--	13.711.556.053	--	--	--	13.711.556.053	13.711.556.053
Piutang Iuran	--	218.016.334.647	--	--	--	218.016.334.647	218.016.334.647
Pend YMHD	--	1.559.187.236.653	--	--	--	1.559.187.236.653	1.559.187.236.653
Pinjaman Diberikan	--	587.333.301.407	--	--	--	587.333.301.407	587.333.301.407
Aset Investasi Tidak Produktif	--	244.603.003.716	--	--	--	244.603.003.716	--
	2.445.187.306.024	43.927.360.558.236	45.077.209.569.572	61.140.154.423.710	739.668.100	152.590.651.525.642	152.346.048.521.926

	2012						
	Nilai Tercatat						Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Dimiliki Untuk Dijual	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Diukur Berdasarkan Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah Nilai Tercatat	
Aset Keuangan							
INVESTASI							
Bank Investasi	--	5.830.920.513	--	--	--	5.830.920.513	5.830.920.513
DOC Investasi	--	688.348.031.507	--	--	--	688.348.031.507	688.348.031.507
Deposito	--	41.049.377.491.000	--	--	--	41.049.377.491.000	41.049.377.491.000
Saham	274.004.840.000	--	27.161.500.525.500	--	--	27.435.505.365.500	27.435.505.365.500
Reksadana	--	--	9.558.352.290.051	--	--	9.558.352.290.051	9.558.352.290.051
KIK EBA	--	--	--	180.000.000.000	--	180.000.000.000	180.000.000.000
Sukuk	33.356.906.842	--	--	3.895.346.677.781	--	3.928.703.584.623	3.928.703.584.623
Obligasi	112.608.790.000	--	1.978.285.569.865	47.496.821.956.929	--	49.587.716.316.794	49.587.716.316.794
Penyertaan	--	--	30.813.767.448	--	--	30.813.767.448	30.813.767.448
NON INVESTASI							
Kas	--	--	--	--	90.021.437	90.021.437	90.021.437
Bank	--	311.607.490.980	--	--	--	311.607.490.980	311.607.490.980
DOC Non Investasi	--	75.000.000.000	--	--	--	75.000.000.000	75.000.000.000
Penempatan Sementara	--	183.000.000.000	--	--	--	183.000.000.000	183.000.000.000
Piutang Usaha	--	14.997.294.008	--	--	--	14.997.294.008	14.997.294.008
Piutang Iuran	--	130.782.887.218	--	--	--	130.782.887.218	130.782.887.218
Pend YMHD	--	1.386.039.516.962	--	--	--	1.386.039.516.962	1.386.039.516.962
Pinjaman Diberikan	--	444.081.938.293	--	--	--	444.081.938.293	444.081.938.293
Aset Investasi Tidak Produktif	--	244.603.003.716	--	--	--	244.603.003.716	--
	419.970.536.842	44.533.668.574.197	38.728.952.152.864	51.572.168.634.710	90.021.437	135.254.849.920.050	135.010.246.916.334

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

- Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, sukuk, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
- Nilai wajar dari saham, reksadana, obligasi dan sukuk dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada Catatan 3e dan 23.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Perusahaan untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

i. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
ii. Tingkat 2: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
iii. Tingkat 3: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

	2013			
	Tingkat 1	**Tingkat 2**	**Tingkat 3**	**Jumlah**
Aset Keuangan				
Saham	31.811.390.224.860	--	--	31.811.390.224.860
Reksadana	11.767.088.603.687	--	--	11.767.088.603.687
Sukuk	--	5.222.155.339.624	33.356.906.842	5.255.512.246.466
Obligasi	1.795.060.780.000	58.835.693.139.870	47.533.592.250	60.678.287.512.120
	45.373.539.608.547	**64.057.848.479.494**	**80.890.499.092**	**109.512.278.587.133**

86. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas isi dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit tanggal 15 Januari 2014.

Lampiran I

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	2013 Rp	2012 Rp
Kas dan Setara Kas	855.472.391.561	374.228.671.146
Bank Investasi	9.785.525.622	5.830.920.513
Deposito On Call (DOC)	--	688.348.031.507
Deposito Berjangka	40.179.996.691.000	41.049.377.491.000
Saham	31.811.390.224.860	27.435.505.365.500
Reksadana	11.767.088.603.686	9.558.352.290.051
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1.434.508.566.872	1.295.970.414.857
Piutang Pendapatan Jatuh Tempo	4.639.339.300	12.300.578.112
Piutang Investasi	107.207.480.491	132.571.488.082
Uang Muka Kerja Pegawai	11.457.743.377	6.033.126.770
Uang Muka Pajak	642.495.175	34.685.054.973
Beban Dibayar Dimuka	15.898.442.929	19.181.229.759
Piutang Iuran Non JHT - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	101.949.621.383	51.239.610.913
Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor	6.247.195.853	6.018.416.890
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Bearagun Aset	243.922.959.405	180.000.000.000
Sukuk	5.792.911.678.126	3.928.703.584.623
Obligasi - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	59.016.424.065.771	49.587.716.316.794
Penyertaan Langsung - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	44.792.950.653	46.570.684.901
Properti Investasi - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	358.026.203.608	369.395.333.615
Aset Dimiliki Untuk Dijual	2.377.184	21.374.031
Aset Tetap - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	576.378.298.579	416.031.073.930
Sarana Kesejahteraan Peserta Dalam Pengerjaan		
Aset Tidak Berwujud	11.950.135.062	12.638.246.567
Aset Pajak Tangguhan	271.547.080.133	1.495.734.511.268
Aset Lain	27.049.515.486	40.127.085.204
JUMLAH ASET	**152.649.289.586.116**	**136.746.580.901.006**

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	2013 Rp	2012 Rp
LIABILITAS		
LIABILITAS KEPADA PESERTA		
Liabilitas JHT		
Liabilitas Program JHT		
Liabilitas JHT Siap Bayar	1.862.173.192	1.714.350.724
Liabilitas JHT Jatuh Tempo	9.302.034.953.146	7.249.317.741.508
Hasil Pengembangan JHT	10.704.238.075.469	9.718.790.150.504
Pengembalian Kepada Peserta JHT	(10.704.238.075.469)	(9.718.790.150.504)
Liabilitas Jaminan Hari Tua Sesuai RSJHT	125.357.753.508.487	100.744.721.448.886
Liabilitas Jaminan Hari Tua Kurang Bayar	35.807.989.482	34.463.922.829
Liabilitas Jaminan Hari Tua Belum Selesai RSJHT	28.178.254.253	16.161.735.108
Dana Pengembangan JHT	2.323.888.992.475	8.272.781.992.143
Liabilitas Pengelolaan Program JHT		
Liabilitas Investasi JHT	12.137.790.242	39.001.785.035
Pendapatan Diterima Dimuka Investasi JHT	5.755.215.911	10.926.725.712
Selisih Penilaian Efek JHT	(3.863.469.241.058)	1.975.096.642.560
Liabilitas Non JHT		
Liabilitas Program Non JHT		
Liabilitas Jaminan Non JHT	8.424.192.889	30.282.897.226
Liabilitas Jaminan Diestimasi Non JHT	58.975.781.391	11.257.169.195
Liabilitas Jaminan Belum Dilaporkan Non JHT	176.011.984.984	157.258.430.232
Cadangan Teknis	11.480.995.099.624	9.388.293.758.218
Dana Pengembangan Non JHT	110.530.896.679	1.419.242.451.741
Liabilitas Pengelolaan Program Non JHT		
Liabilitas Investasi Non JHT	484.507.383	525.631.362
Iuran Belum Rinci	134.154.755.292	51.487.821.027
Iuran Diterima Dimuka	--	63.631.209
Iuran Karyawan	11.001.301	295.790.418
Utang Pajak	360.492.763.619	103.914.915.052
Beban Akrual	55.963.034.685	48.905.828.543
Pendapatan Diterima Dimuka	468.516.750	651.951.406
Liabilitas Yang Masih Harus Dibayar	127.207.564.574	248.245.290.181
Liabilitas Pembelian Aset	70.306.824.418	17.147.952.690
Jaminan Pihak Ketlga	28.569.457.706	25.343.171.106
Liabilitas Imbalan Pascakerja	481.980.847.688	343.651.186.485
Liabliltas Lain-Lain	883.413.300	1.400.019.523
Total Liabilitas	146.299.410.278.413	130.192.154.240.119

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

EKUITAS	2013 Rp	2012 Rp
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham - terdiri dari 8.000.000 saham dan 3.000.000 saham pada 31 Desember 2013 dan 2012 Dengan nilai Rp 1.000.000 per lembar saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - Terdiri dari 4.000.000 saham dan 1.500.000 saham pada 31 Desember 2013 dan 2012	4.000.000.000.000	1.500.000.000.000
Cadangan Umum	572.484.461.221	1.747.995.060.748
Cadangan Tujuan	863.211.054.227	588.211.054.227
Saldo Laba	2.287.642.937.014	2.124.040.077.046
Selisih Penilaian Efek - Dana Non JHT	(1.373.459.144.759)	594.180.468.866
Jurnlah Ekuitas	6.349.879.307.703	6.554.426.660.887
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**152.649.289.586.116**	**136.746.580.901.006**

Lampiran II

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2013 Rp	2012 Rp
PENDAPATAN OPERASIONAL		
Pendapatan Iuran		
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.365.021.248.278	1.731.531.738.620
Jaminan Kematian (JKM)	1.095.463.434.391	812.132.852.203
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	3.188.235.583.429	1.786.808.954.109
Jasa Konstruksi	193.044.110.191	270.158.781.584
Jaminan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	76.904.207.311	49.851.064.220
Jumlah Pendapatan Iuran	6.918.668.583.600	4.650.483.390.736
BEBAN JAMINAN		
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	(563.442.819.487)	(506.807.062.772)
Jaminan Kematian (JKM)	(406.843.528.654)	(357.373.826.572)
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	(1.957.532.291.154)	(1.168.333.698.683)
Jasa Konstruksi	(40.362.049.129)	(31.188.892.288)
Jaminan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	(63.460.001.889)	(35.794.419.873)
Jumlah Beban Jaminan	(3.031.640.690.313)	(2.099.497.900.188)
BEBAN CADANGAN TEKNIS		
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	(1.897.185.870.334)	(1.001.675.850.351)
Jaminan Kematian (JKM)	(85.070.869.503)	(248.774.358.572)
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	(141.133.263.687)	(45.156.654.005)
Jasa Konstruksi	30.845.868.562	(45.516.978.212)
Katastrofa	(45.024.300)	--
Jumlah Beban Cadangan Teknis	(2.092.589.159.262)	(1.341.123.841.140)
PENDAPATAN BERSIH IURAN	1.794.438.734.025	1.209.861.649.408
PENDAPATAN INVESTASI NON JHT		
Laba Pelepasan Investasi	1.394.278.377.666	1.096.124.497.418
Pendapatan Bunga	530.413.693.261	469.088.712.483
Pendapatan Dividen	214.895.575.739	219.987.705.956
Pendapatan Investasi Syariah	35.768.008.030	36.683.291.065
Pendapatan dari Entitas Anak	800.617.192	3.495.186.626
Pendapatan Sewa	567.261.404	1.047.236.000
Pendapatan Investasi Lainnya	316.794.007	728.268.797
Jumlah Pendapatan Investasi	2.177.040.327.299	1.827.154.898.345

ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2013 Rp	2012 Rp
BEBAN INVESTASI NON JHT		
Beban Pajak Atas Kegiatan Investasi	(96.159.007.028)	(85.092.922.825)
Beban Administrasi Atas Kegiatan Investasi	(20.496.781.674)	(10.434.371.334)
Kerugian Atas Penurunan Nilai Efek Investasi	(15.450.532.000)	(2.350.910.809)
Beban Investasi Syariah	(6.078.372.158)	(21.157.339.768)
Beban Properti Investasi	(551.833.927)	(772.090.454)
Beban Manajer Investasi dan Konsultan	(417.650.088)	(428.884.800)
Beban Asuransi Aset Investasi	(1.612.683)	(6.042.251)
Beban Investasi Lainnya	(830.651.292)	(554.148.245)
Jumlah Beban Investasi	(139.986.440.850)	(120.796.710.486)
PENDAPATAN BERSIH INVESTASI	2.037.053.886.449	1.706.358.187.859
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	**3.831.492.620.474**	**2.916.219.837.267**
Pendapatan Pengelolaan Atas Dana Investasi JHT	1.678.225.675.984	1.502.402.566.030
BEBAN USAHA		
Beban Personil	(1.128.024.271.139)	(968.838.786.642)
Beban Administrasi dan Umum	(426.802.152.030)	(225.013.306.273)
Beban Penyuluhan dan Pembinaan	(331.878.652.850)	(276.562.173.518)
Beban Jasa Produksi dan Tantiem	(307.213.394.509)	(248.065.019.960)
Beban Imbalan Pasca Kerja	(219.605.696.929)	(105.830.036.143)
Beban Penyisihan Piutang Iuran	(116.066.713.264)	(60.716.675.920)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	(82.609.201.851)	(79.475.611.527)
Beban Manajemen	(43.373.050.703)	(35.430.326.308)
Beban Perencanaan dan Pengembangan	(36.004.939.211)	(26.302.092.378)
Beban Pengembangan SDM	(29.732.565.317)	(16.519.150.398)
Beban Penyelesaian Masalah Hukum	(3.682.839.047)	(2.476.520.353)
Jumlah Beban Usaha	(2.724.993.476.850)	(2.045.229.699.420)
LABA USAHA	**2.784.724.819.608**	**2.373.392.703.877**
Pendapatan Lain-Lain	99.887.113.850	123.717.252.743
Beban Lain-Lain	(76.969.716.391)	(2.600.699.589)
PENDAPATAN LAIN-LAIN BERSIH	22.917.397.459	121.116.553.154
LABA SEBELUM PAJAK	2.807.642.217.067	2.494.509.257.031
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(519.999.280.053)	(311.222.818.610)
LABA TAHUN BERJALAN	**2.287.642.937.014**	**2.183.286.438.421**

Lampiran III

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2013 Rp	2012 Rp
LABA TAHUN BERJALAN	**2.287.642.937.014**	**2.183.286.438.421**
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		
Selisih Penilaian Efek Non JHT	(1.967.639.613.625)	17.407.599.179
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**320.003.323.389**	**2.200.694.037.600**

Lampiran IV

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Ekuitas yang Dapat Didiatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk					
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Saldo Laba	Pendapatan Komprehensif Lainnya Selisih Penilaian Efek Non JHT	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2011	**1.000.000.000.000**	**804.808.047.725**	**483.211.054.227**	**1.960.844.277.190**	**576.772.869.687**	**4.825.636.248.829**
Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari Cadangan Umum	500.000.000.000	(500.000.000.000)	--	--	--	--
Distribusi Laba Tahun 2011	--	--	--	(2.020.090.638.565)	--	(2.020.090.638.565)
Cadangan Umum	--	1.443.187.013.023	--	--	--	1.443.187.013.023
Cadangan Tujuan	--	--	105.000.000.000	--	--	105.000.000.000
Penyesuaian	--	--	--		--	--
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	2.183.286.438.421	17.407.599.179	2.200.694.037.600
Saldo per 31 Desember 2012	**1.500.000.000.000**	**1.747.995.060.748**	**588.211.054.227**	**2.124.040.077.046**	**594.180.468.866**	**6.554.426.660.887**
Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari Cadangan Umum	2.500.000.000.000	(2.500.000.000.000)	--	--	--	--
Distribusi Laba Tahun 2012	--	--	--	(2.183.286.438.421)	--	(2.183.286.438.421)
Cadangan Umum		1.556.941.146.376	--	--	--	1.556.941.146.376
Cadangan Tujuan	--	--	275.000.000.000	--	--	275.000.000.000
Penyesuaian karena dampak perubahan PSAK 55 dan 62	--	(60.479.667.431)	--	60.479.667.431	--	--
Reklas Dana Pengembangan Non JHT	--	1.198.421.605.861	--	--	--	1.198.421.605.861
Penyesuaian Aset Pajak Tangguhan	--	(1.370.393.684.333)	--	--	--	(1.370.393.684.333)
Penyesuaian Penyertaan Langsung PT Bijak	--	--	--	(1.233.306.056)	--	(1.233.306.056)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	2.287.642.937.014	(1.967.639.613.625)	320.003.323.389
Saldo per 31 Desember 2013	**4.000.000.000.000**	**572.484.461.221**	**863.211.054.227**	**2.287.642.937.014**	**(1.373.459.144.759)**	**6.349.879.307.703**

Lampiran V

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2013 Rp	2012 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Iuran JHT	1.543.201.216	917.262.869
Penerimaan Iuran Non JHT	221.106.701.930	184.299.900.018
Penerimaan Iuran Belum Rinci	26.617.347.943.768	20.256.175.514.178
Penerimaan Hasil Investasi JHT	12.728.508.203.113	5.533.335.502.715
Penerimaan Hasil Investasi Non JHT	2.161.834.416.967	7.665.210.409.918
Pencairan Dana Investasi JHT	155.379.933.657.165	54.868.462.993.627
Pencairan Dana Investasi Non JHT	20.642.950.391.073	14.958.449.363.003
Pengembalian Uang Muka Kerja	--	131.856.397.848
Pengembalian Angsuran Pinjaman Pegawai	6.035.765.017	6.263.911.923
Penerimaan Pendapatan Lain-Lain	15.325.460.700	10.014.535.986
Pembayaran JHT Kepada Peserta	(9.968.268.150.430)	(7.966.739.783.577)
Pembayaran Jaminan Non JHT	(2.976.467.025.484)	(2.195.985.046.470)
Pembayaran Beban Usaha	(1.772.986.688.293)	(1.451.518.533.452)
Pembayaran Beban Investasi JHT	(104.844.785.547)	(109.611.506.725)
Pembayaran Beban Investasi Non JHT	(147.895.075.169)	(146.944.624.179)
Penempatan Dana Investasi JHT	(176.347.494.429.502)	(74.415.047.528.175)
Penempatan Dana Investasi Non JHT	(24.234.828.545.240)	(16.173.878.037.486)
Pembayaran Uang Muka Kerja	(6.803.138.278)	(154.842.056.502)
Pembayaran Angsuran PPh Badan	(581.758.921.400)	(401.271.568.185)
Pembayaran Lain-Lain	(254.736.536.432)	(120.923.034.454)
Pembayaran Program Manfaat Tambahan	(110.289.949.200)	(44.461.189.617)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.268.212.495.974	433.762.883.262
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan Aset Tetap	--	--
Perolehan Aset Tetap	(189.101.741.731)	(133.528.977.913)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(189.101.741.731)	(133.528.977.913)

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2013 Rp	2012 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran Aktivitas Pendanaan Lainnya:		
Jasa Produksi	(231.784.033.828)	(158.035.378.234)
Tantiem	(16.083.000.000)	(13.760.000.000)
Penyaluran DPKP	(350.000.000.000)	--
Dana Bina Lingkungan	--	(40.401.812.771)
Program Kemitraan	--	(40.401.812.771)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(597.867.033.828)	(252.599.003.776)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	481.243.720.415	47.634.901.573
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	374.228.671.146	326.593.769.573
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**855.472.391.561**	**374.228.671.146**
Kas dan Setara Kas terdiri dari:		
Kas	11.418.647	16.318.558
Bank	369.460.972.914	299.154.758.829
Giro Pos	--	57.593.759
Deposito On Call (DOC) Non Investasi	486.000.000.000	75.000.000.000
Total	**855.472.391.561**	**374.228.671.146**

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS

Laporan Keuangan Konsolidasian Penutup
Pada Tanggal 31 Desember 2013

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Konsolidasian Penutup
Pada Tanggal 31 Desember 2013

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Penutup 1

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Penutup 3

Nomor : R/102.AGA/rhp.2/2014

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian penutup PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) ("Perusahaan"), Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus (Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta) pada tanggal 31 Desember 2013 terlampir, serta suatu ikhtisar ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain ("laporan keuangan konsolidasian penutup"). Laporan keuangan konsolidasian penutup ini telah disusun oleh manajemen berdasarkan laporan keuangan konsolidasian lengkap seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.b.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Penutup

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian penutup tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian lengkap seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.b, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian penutup tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian penutup ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian penutup bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian penutup. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian penutup, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian penutup entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian penutup secara keseluruhan.

RSM AAJ Associates is a member of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and advisory firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence number :
Minister of Finance : 1048/KM.1/2009
Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) : 405
Bank Indonesia : 063

Branch Office :
Jl. Mayjen Sungkono
Komplek Darmo Park I Blok III B 17-19
Surabaya 60256 - Indonesia

RSM AAJ
Audit • Tax • Advisory

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian penutup tersebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian penutup PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus (Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta) tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2.b.

Basis Akuntansi serta Pembatasan Penggunaan dan Distribusi

Tanpa memodifikasi opini kami, kami meminta perhatian ke Catatan 2.b, yang menjelaskan basis akuntansi. Laporan keuangan konsolidasian penutup ini disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian lengkap, yang telah kami audit sesuai dengan laporan kami Nomor:R/009.AGA/rhp.2/2014 tanggal 15 Januari 2014 atas laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus (Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Seperti dijelaskan juga dalam Catatan 2.b, perbedaan antara laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan konsolidasian penutup ini adalah pada adanya distribusi laba tahun 2013 dan pemisahan aset. Untuk pengunaan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf di bawah, aset dan liabilitas yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian penutup ini dipisahkan antara aset dan kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") dan program-program (Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) berdasarkan mekanisme dan prosedur pemisahan yang dijelaskan dalam Catatan 1.f.

Laporan keuangan konsolidasian penutup ini disusun untuk memenuhi ketentuan pasal 62 ayat 2 huruf c UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembukaan Dana Jaminan Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, laporan keuangan konsolidasian penutup ini mungkin tidak cocok untuk tujuan lain. Laporan kami ditujukan semata-mata untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan, Direksi dan Komisaris PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan harus tidak didistribusikan kepada pihak selain Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan, Direksi dan Komisaris PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), disamping juga tidak cocok digunakan untuk tujuan selain yang disebutkan di atas.

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

Rudi Hartono Purba
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501

Jakarta, 11 Maret 2014

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENUTUP
Pada tanggal 31 Desember 2013
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	Catatan	31 Desember 2013					
		Sebelum	Setelah Pemisahan Aset **)				
		Pemisahan Aset *)	JHT ***)	JKK ***)	JKM ***)	JPK ***)	BPJS Konsolidasi ***)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas dan Setara Kas	2.d, 2.e, 4	1.141.056.650.093	731.523.315.410	8.443.681.712	29.021.570.363	76.968.776.219	295.099.306.389
Bank Investasi	2.e, 5	9.785.525.622	6.776.635.392	2.892.879.555	--	--	116.010.675
Deposito Berjangka	2.e, 6	40.179.996.691.000	36.015.899.000.000	1.358.214.000.000	446.090.000.000	290.500.000.000	2.069.293.691.000
Saham	2.e, 7	31.811.390.224.860	23.447.285.053.660	4.052.975.658.920	1.213.894.320.841	--	3.097.235.191.439
Reksadana	2.e, 8	11.767.088.603.686	10.599.347.858.624	581.303.572.715	138.385.558.335	--	448.051.614.012
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2.e, 2.k, 9	1.559.187.236.653	1.376.707.013.246	27.478.562.669	8.302.141.675	125.047.222	146.574.471.841
Piutang Jatuh Tempo	2.e, 10	4.639.339.300	3.341.623.513	657.791	--	--	1.297.057.996
Piutang Investasi	2.e, 11	107.207.480.491	53.018.820.555	31.318.626.797	10.011.670.581	--	12.858.362.558
Uang Muka	2.e, 12	11.756.349.377	--	--	--	--	11.756.349.377
Uang Muka Kesejahteraan Peserta	2.e, 13	13.150.812.500	--	--	--	--	13.150.812.500
Uang Muka Pajak	49.a	2.029.360.123	642.495.175	--	--	--	1.386.864.948
Beban Dibayar di Muka	14	23.485.594.883	--	--	--	--	23.485.594.883
Piutang Iuran Non JHT - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	2.e, 15	101.949.621.383	--	43.882.719.733	14.805.779.387	43.261.122.263	--
Pinjaman Diberikan Prog. DPKP - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	2.e, 2.i, 16	492.098.733.108	--	--	--	--	492.098.733.108
Piutang Usaha - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	2.e, 2.j, 17	2.001.336.078	--	--	--	--	2.001.336.078
Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor	2.m, 18	6.458.587.255	--	--	--	--	6.458.587.255
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragunan Aset	2.e, 19	243.922.959.405	100.000.000.000	44.390.501.674	3.976.815.202	--	95.555.642.529
Sukuk	2.e, 20	5.792.911.678.126	5.592.911.678.126	96.676.000.000	30.215.000.000	--	73.109.000.000
Obligasi - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	2.e, 21	59.016.424.065.771	55.136.875.221.556	1.878.075.711.084	569.025.237.670	--	1.432.447.895.461
Penyertaan Langsung - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	2.e, 2.f, 22	30.813.767.448	--	--	--	--	30.813.767.448
Properti Investasi - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	2.g, 23	358.026.203.608	281.652.431.744	--	--	--	76.373.771.864
Aset Dimiliki Untuk Dijual	24	2.377.184	--	--	--	--	2.377.184
Aset Tetap - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	25	582.425.121.653	--	--	--	--	582.425.121.653
Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) Program DPKP - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	26	160.926.289.198	--	--	--	--	160.926.289.198
Sarana Kesejahteraan Peserta Dalam Pengerjaan		304.629.791	--	--	--	--	304.629.791
Aset Tidak Berwujud	2.q, 27	11.950.135.062	--	--	--	--	11.950.135.062
Aset Pajak Tangguhan	2.ad, 49.c	271.830.073.331	--	--	--	--	271.830.073.331
Aset Lain-Lain	2.r, 28	30.308.900.627	--	--	--	--	30.308.900.627
TOTAL ASET		**153.733.128.347.616**	**133.345.981.147.001**	**8.125.652.572.650**	**2.463.728.094.054**	**410.854.945.704**	**9.386.911.588.207**

*) *Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian lengkap yang telah diaudit setelah distribusi laba yang telah disahkan berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor: S-134/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014*

**) *Pemisahan berdasarkan program JHT, JKK, JKM, JPK, dan BPJS Konsolidasi*

***) *JHT : Jaminan Hari Tua; JKK : Jaminan Kecelakaan Kerja; JKM: Jaminan Kematian; JPK: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; BPJS Konsolidasi: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beserta entitas anak dan entitas bertujuan khusus*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian penutup secara keseluruhan

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENUTUP (Lanjutan)
Pada tanggal 31 Desember 2013
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	31 Desember 2013					
		Sebelum Pemisahan Aset *)	Setelah Pemisahan Aset **)				
			JHT ***)	JKK ***)	JKM ***)	JPK ***)	BPJS Konsolidasi ***)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
LIABILITAS							
LIABILITAS KEPADA PESERTA							
Liabilitas JHT							
Liabilitas Program JHT							
Liabilitas JHT Siap Bayar	2.t, 29	1.862.173.192	1.862.173.192	--	--	--	--
Liabilitas JHT Jatuh Tempo	2.t, 2.v, 30	9.302.034.953.146	9.302.034.953.146	--	--	--	--
Hasil Pengembangan JHT	2.t, 31	10.704.238.075.469	10.704.238.075.469	--	--	--	--
Pengembalian Kepada Peserta JHT	2.t, 32	(10.704.238.075.469)	(10.704.238.075.469)	--	--	--	--
Liabilitas Jaminan Hari Tua Sesuai RSJHT	2.t, 33	125.357.753.508.487	125.357.753.508.487	--	--	--	--
Liabilitas Jaminan Hari Tua Kurang Bayar	2.t, 34	35.807.989.482	35.807.989.482	--	--	--	--
Liabilitas Jaminan Hari Tua Belum Selesai RSJHT	2.t, 35	28.178.254.253	28.178.254.253	--	--	--	--
Dana Pengembangan JHT	2.u, 36	2.323.888.992.475	2.323.888.992.475	--	--	--	--
Liabilitas Pengelolaan Program JHT							
Liabilitas Investasi JHT	2.t, 37	12.137.790.242	12.137.790.242	--	--	--	--
Pendapatan Diterima Dimuka Investasi JHT	2.t, 38	5.755.215.911	5.755.215.911	--	--	--	--
Selisih Penilaian Efek JHT	2.t, 39	(3.863.469.241.058)	(3.863.469.241.058)	--	--	--	--
Liabilitas Non JHT							
Liabilitas Program Non JHT							
Liabilitas Jaminan Non JHT	2.s, 40	8.424.192.889	--	2.911.499.059	5.512.693.830	--	--
Liabilitas Jaminan Diestimasi Non JHT	2.s, 41	58.975.781.391	--	243.324.770	3.255.404	58.729.201.217	--
Liabilitas Jaminan Belum Dilaporkan Non JHT	2.s, 42	176.011.984.984	--	86.099.610.107	60.435.676.802	29.476.698.075	--
Cadangan Teknis	2.x, 43	11.480.995.099.624	--	8.601.796.360.623	2.556.549.692.589	322.649.046.412	--
Dana Pengembangan Non JHT	44	110.530.896.679	--	80.038.730.454	30.492.166.225	--	--
Liabilitas Pengelolaan Program Non JHT							
Liabilitas Investasi Non JHT	45	484.507.383	--	234.776.654	70.317.236	--	179.413.493
Iuran Belum Rinci	2.w, 46	134.154.755.292	105.982.256.681	19.195.951.675	8.976.546.936	--	--
Iuran Karyawan	2.z, 47	11.001.301	--	--	--	--	11.001.301
Utang Usaha	2.e, 48	7.299.459.390	--	--	--	--	7.299.459.390
Utang Pajak	2.ad, 49.b	366.985.861.608	7.765.491.061	--	--	--	359.220.370.547
Beban Akrual	2.e, 50	49.607.357.518	--	--	--	--	49.607.357.518
Pendapatan Diterima di Muka	2.e, 51	3.302.016.750	--	--	--	--	3.302.016.750
Liabilitas yang Masih Harus Dibayar	2.e, 52	136.770.413.184	--	--	--	--	136.770.413.184
Liabilitas Pembelian Aset	53	70.306.824.418	--	--	--	--	70.306.824.418
Jaminan Pihak Ketlga	54	28.569.457.706	28.283.763.129	--	--	--	285.694.577
Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Untuk Operasional	2.aa, 55	792.482.725.241	--	--	--	--	792.482.725.241
Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Telah Disalurkan	2.aa, 56	666.480.464.503	--	--	--	--	666.480.464.503
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2.z, 57	483.125.094.687	--	--	--	--	483.125.094.687
Liabilitas Lain-Lain	58	3.626.075.447	--	--	--	--	3.626.075.447
Angsuran Belum Jelas Penyetor Program DPKP	2.aa, 59	1.152.597.380	--	--	--	--	1.152.597.380
Total Liabilitas		**147.783.246.203.505**	**133.345.981.147.001**	**8.790.520.253.342**	**2.662.040.349.022**	**410.854.945.704**	**2.573.849.508.436**
EKUITAS							
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk							
Modal saham - terdiri dari 8.000.000 saham dan pada 31 Desember 2013 Dengan nilai Rp 1.000.000 per lembar saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - Terdiri dari 4.000.000 saham pada 31 Desember 2013	60	4.000.000.000.000	--	--	--	--	4.000.000.000.000
Cadangan Umum	61	2.250.127.398.239	--	--	--	--	2.250.127.398.239
Cadangan Tujuan	62	1.073.211.054.227	--	--	--	--	1.073.211.054.227
Saldo Laba	63	--	--	--	--	--	--
Selisih Penilaian Efek - Dana Non JHT	64	(1.373.459.144.759)	--	(664.867.680.692)	(198.312.254.968)	--	(510.279.209.099)
		5.949.879.307.707	--	(664.867.680.692)	(198.312.254.968)	--	6.813.059.243.367
Kepentingan Non Pengendali	65	2.836.404	--	--	--	--	2.836.404
Total Ekuitas		**5.949.882.144.111**	**--**	**(664.867.680.692)**	**(198.312.254.968)**	**--**	**6.813.062.079.771**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**153.733.128.347.616**	**133.345.981.147.001**	**8.125.652.572.650**	**2.463.728.094.054**	**410.854.945.704**	**9.386.911.588.207**

**) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian lengkap yang telah diaudit setelah distribusi laba yang telah disahkan berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor: S-134/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014*

***) Pemisahan berdasarkan program JHT, JKK, JKM, JPK, dan BPJS Konsolidasi*

****) JHT : Jaminan Hari Tua; JKK : Jaminan Kecelakaan Kerja; JKM: Jaminan Kematian; JPK: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; BPJS Konsolidasi: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beserta entitas anak dan entitas bertujuan khusus*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian penutup secara keseluruhan

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO), ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENUTUP
Pada tanggal 31 Desember 2013
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

1.a Pendirian Perusahaan

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) ("Perusahaan") pada awalnya berdiri dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) pada 5 Desember 1977 dengan modal disetor Rp 2.500.000.000. Program yang ditangani masih terbatas pada Asuransi Kecelakaan Kerja (AKK), Asuransi Kematian (AK) dan Tabungan Hari Tua (THT). Status ASTEK sebagai Perum kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 bernama Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT ASTEK). Selanjutnya PT ASTEK berganti nama menjadi Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek), untuk selanjutnya disebut Perusahaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tertanggal 17 Februari 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tertanggal 22 September 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Anggaran Dasar Perusahaan ditetapkan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 15 tertanggal 5 Desember 1990 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Nomor 3 tertanggal 19 November 2013 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-60955.AH.01.02 Tahun 2013 mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Pada 25 November 2011, ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2011) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada Pasal 62 disebutkan bahwa PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Januari 2014. PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Per 1 Januari 2014, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM) yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persero), termasuk menerima peserta baru dengan tetap mengacu pada UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 8 sampai dengan 15. Sedangkan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) diserahkan kepada BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan/ASKES (Persero). Selambat-lambatnya pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi dengan menyelenggarakan program yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan menambahkan Program Jaminan Pensiun.

1.b Tujuan dan Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar, tujuan Perusahaan adalah mewujudkan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem jaminan sosial dalam arti seluas-luasnya. Untuk mencapai tujuan ini, Perusahaan menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat preventif, kuratif dan rehabilitatif yang meliputi:

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
Jaminan Kematian (JKM);
Jaminan Hari Tua (JHT); dan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan.

Perusahaan memiliki 11 kantor wilayah, 121 kantor cabang, dan 53 kantor cabang pembantu yang terletak di beberapa kota di Indonesia.

1.c Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-11/MBU/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota serta komisaris Perusahaan dan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-155/MBU/2013 tentang pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan PT Jamsostek (Persero), menunjuk Denny Indrayana sebagai Komisaris Utama dan Herry Purnomo, Herman Hidayat, Iskandar Maula, Haryadi B Sukamdani, Bambang Wirahyoso dan Mathias Tambing sebagai Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-368/MBU/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 tentang pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Jamsostek (Persero), memberhentikan Herry Purnomo sebagai Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-430/MBU/2013 tertanggal 30 Desember 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota serta komisaris Perusahaan, susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Mulabasa Hutabarat
Komisaris	Iskandar Maula
Komisaris	Hariyadi B Sukamdani
Komisaris	Bambang Wirahyoso
Komisaris	Mathias Tambing
Komisaris	Nina Sapti Triaswati
Komisaris	H.M. Saleh Khalid

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-68/MBU/2012 tertanggal 13 Februari 2012 tentang penetapan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi Perusahaan, susunan Dewan Direksi Perusahaan pada 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013
Dewan Direksi	
Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur Keuangan	Herdy Trisanto
Direktur Investasi	Jeffry Haryadi
Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi	Agus Supriyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	Amri Yusuf
Direktur Pelayanan	Achmad Riadi
Direktur Kepesertaan	Junaedi

Pada 31 Desember 2013, Perusahaan dan Entitas Anak memiliki 3.872 karyawan (tidak diaudit).

1.d Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko

Susunan Komite Audit Perusahaan pada 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013
Komite Audit	
Ketua	Bambang Wirahyoso
Anggota	Salim Siagian
Anggota	Rinaningsih

Susunan anggota Komite Manajemen Risiko pada 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013
Manajemen Resiko	
Ketua	Herman Hidayat
Anggota	Endi Roswendi

1.e Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus

Perusahaan memiliki penyertaan langsung pada PT Binajasa Abadikarya (PT BIJAK) dengan persentase kepemilikan sebesar 99,98%. PT BIJAK berdomisili di Jakarta dan menjalankan usaha dalam bidang jasa pengerahan tenaga kerja dan jasa lainnya. PT BIJAK memulai operasi komersialnya pada 2004. Jumlah aset PT BIJAK per 31 Desember 2013 sebelum eliminasi sebesar Rp 30.901.358.345.

Selain itu, Perusahaan juga mengelola Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) sebagai suatu entitas bertujuan khusus yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta. Total aset dari DPKP per 31 Desember 2013 sebelum eliminasi sebesar Rp 1.477.171.526.501.

1.f Transformasi Perusahaan menjadi BPJS dan Pemisahan Program-program

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 62 ayat 1 disebutkan bahwa PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014. Selain itu, di dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan juga bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun. Dan di dalam pasal 64 disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program-program tersebut paling lambat tanggal 1 Juli 2015.

Selanjutnya sesuai pasal 61 Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) berkewajiban antara lain untuk:
- menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan; dan
- menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Tenaga Kerja tanggal 27 Desember 2013 pasal 15 angka 4 dan 5 dinyatakan bahwa pada saat pengalihan aset PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) menjadi aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil pengalihan aset program PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) paling sedikit sebesar liabilitas kepada peserta.

Dalam PP No. 99 tersebut pasal 64 disebutkan bahwa aset dan liabilitas Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero) beralih menjadi aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan DPKP tetap diselenggarakan dalam bentuk pemberian manfaat layanan tambahan bagi peserta dan tanggung jawab sosial dan lingkungan paling lambat sampai dengan 30 Juni 2015.

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang tersebut di atas, maka Perusahaan mengeluarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/04/012014 tentang Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/05/012014 tentang Pedoman Transaksi Keuangan Pada Masa Transisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Di dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/04/012014 tentang Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Direksi BPJS Ketenagakerjaan menetapkan tiga pedoman pengalihan aset dan liabilitas keuangan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas dari PT Jamsostek (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi:
   a) Pengalihan Aset dan Liabilitas Program Jaminan Hari Tua PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabiltas Dana Jaminan Sosial Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan;
   b) Pengalihan Aset dan Liabilitas Program Jaminan Kecelakaan Kerja PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan;

c) Pengalihan Aset dan Liabilitas Program Jaminan Kematian PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas Dana Jaminan Sosial Kematian BPJS Ketenagakerjaan; dan
d) Pengalihan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Badan Penyelenggara PT Jamsostek (Persero) menjadi aset, liabilitas dan ekuitas BPJS Ketenagakerjaan;

2. Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT Jamsostek (Persero) kepada BPJS Kesehatan; dan
3. Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas dari program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) PT Jamsostek (Persero) kepada Dana Manfaat Layanan Tambahan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah-langkah pengalihan aset dan tahapan persiapan pengalihan aset yang diatur di dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/04/012014 tentang Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Langkah-langkah pengalihan aset:

a. Penentuan Sumber Dana
Sesuai PP No. 99 Tahun 2013 Pasal 15, liabilitas kepada peserta merupakan tolok ukur penentuan pemisahan aset. Jumlah liabilitas akan menjadi sumber dana program masing-masing program. Dasar nilai aset yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2011 yang dibagi menjadi sesuai program sebagai berikut:

1) Sumber Dana JHT
Sumber Dana JHT berasal dari:
a. Liabilitas kepada peserta JHT
- JHT siap bayar;
- JHT jatuh tempo;
- JHT sesuai rincian PSJHT;
- JHT kurang bayar; dan
- JHT belum selesai PSJHT.

b. Liabilitas pengelolaan program JHT
- Liabilitas Investasi;
- Pendapatan diterima dimuka investasi; dan
- Selisih Penilaian Efek (SPE) JHT.

c. Dana Pengembangan JHT
d. IBR dan iuran diterima dimuka
e. Liabilitas lain (Pajak properti dan PPh 21 atas JHT)

2) Sumber Dana Non JHT
Sumber Dana Non JHT berasal dari:
a. Liabilitas kepada peserta Non JHT
- Utang Jaminan Non JHT;
- Utang Jaminan Diestimasi Non JHT;
- Utang Jaminan Belum Dilaporkan (IBNR); dan
- Cadangan Teknis dan Katastrofa.

b. Dana pengembangan Non JHT
c. Liabilitas pengelolaan progarma JHT
- Liabilitas Investasi; dan
- Pendapatan diterima dimuka investasi.

d. IBR dan Iuran diterima dimuka
e. Selisih Penilaian Efek (SPE) Non JHT

3) Sumber Dana BPJS
Sumber Dana BPJS berasal dari:
a. Liabilitas BPJS (liabilitas diluar JHT dan Non JHT);

b. Modal disetor;
c. Cadangan umum dan cadangan tujuan;
d. Selisih Penilaian Efek (SPE); dan
e. Saldo laba.

b. Menentukan Alokasi Aset JHT, Non JHT, dan BPJS
Setelah mendapatkan jumlah sumber dana program JHT, Non JHT, dan BPJS berdasarkan langkah di atas maka langkah selanjutnya adalah menentukan besarnya alokasi aset berdasarkan proporsi masing-masing sumber dana yang jumlahnya paling sedikit sebesar liabilitasnya. Khusus untuk BPJS, aset BPJS merupakan sisa dari aset setelah dialokasikan ke masing-masing program.

1) Program JHT
Alokasi aset untuk Program JHT terdiri atas:
a. Kas setara kas;
b. Investasi;
c. Turunan investasi (Pendapatan yang masih harus diterima investasi (PYMHD), piutang pendapatan jatuh tempo (PPJT) dan piutang investasi); dan
d. Aset lain (uang muka pajak bangunan investasi).

2) Program Non JHT selain JPK
Alokasi aset untuk Program Non JHT terdiri atas:
a. Kas setara kas;
b. Investasi;
c. Turunan investasi (Pendapatan yang masih harus diterima investasi (PYMHD), piutang jatuh tempo (PPJT) dan piutang investasi); dan
d. Piutang iuran.

3) Program JPK:
Khusus untuk program JPK, jenis aset telah ditentukan dalam PP Nomor 87 Tahun 2013 yaitu terdiri dari kas dan setara kas, investasi dan piutang iuran.

4) Alokasi Aset untuk BPJS
Alokasi aset untuk BPJS merupakan residual value dari aset program, terdiri atas :
a. Kas setara kas;
b. Investasi;
c. Turunan investasi (Pendapatan yang masih harus diterima investasi (PYMHD), piutang jatuh tempo (PPJT) dan piutang investasi);
d. Aset lancar lainnya non investasi;
e. Aset tetap;
f. Aset pajak tangguhan; dan
g. Aset lain (diluar aset JHT dan Non JHT)

c. Menentukan Alokasi Sumber Dana
Pengalokasian sumber dana program dilakukan dengan menggunakan persentase proporsi per program. Proporsi atas alokasi sumber dana digunakan untuk pos-pos kewajiban yang belum teridentifikasi dengan akun masing-masing program. Penggunaan proporsi atas alokasi sumber dana hanya dilakukan untuk program Non JHT, sedangkan untuk program JHT sudah dilakukan pemisahan terhadap aset dan liabilitasnya. Alokasi sumber dana Non JHT dialokasikan jumlah sumber dana untuk masing-masing program Non JHT (program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) berdasarkan persentase proporsi per program. Dasar persentase atas proporsi menggunakan bebarapa asumsi, yaitu:

1. Pendapatan iuran
Proporsi atas pendapatan iuran digunakan untuk memisahkan IBR dan iuran diterima dimuka masing-masing program.

2. Beban jaminan program paket
   Proporsi atas beban jaminan program paket digunakan untuk memisahkan utang jaminan (jaminan sudah ditetapkan tapi belum dibayar, jaminan dalam proses dan jaminan belum dilaporkan) serta cadangan teknis dan katastrofa Jasa Konstruksi ke program JKK dan JKM.
3. Iuran bersih
   Proporsi atas iuran bersaih digunakan untuk memisahkan dana pengembangan Non JHT dan liabilitas Non JHT masing-masing program.

Proporsi atas pendapatan iuran, beban jaminan dan iuran bersih menggunakan *data series* selama 5 (lima) tahun.

d. Penentuan Aset per program
Penentuan aset untuk masing-masing program dilakukan dengan mengidentifikasi pos-pos aset yang sudah dipisahkan oleh akun. Untuk program JPK, penentuan aset program dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor: 89 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, dimana dalam PP tersebut menjelaskan bahwa aset program JPK PT Jamsostek adalah kas dan setara kas dan piutang iuran JPK. Sedangkan untuk program JHT, JKK, JKM dan BPJS penentuan aset diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Aset Investasi
   Berdasarkan langkah di atas selanjutnya ditentukan rincian instrumen investasi untuk masing-masing Program JHT, JPK, JKK dan JK, serta BPJS. Adapun strategi implementasi adalah sebagai berikut:

No.	Instrumen	Strategi Pembagian
1	Deposito	JHT : Klasifikasi aset deposito JHT tidak mengalami identifikasi ulang.
		JKK, JK, BPJS : Klasifikasi Deposito didistribusi menurut nominal penempatan dan diprioritaskan pada penempatan deposito kantor pusat.
2	Saham	JHT : Klasifikasi aset saham JHT tidak mengalami identifikasi ulang.
		JKK, JK, BPJS: Klasifikasi saham didistribusikan menurut value cost ditambah SPE (AFS) dan market value (trading) pada proporsi weighted jumlah unit lembar minimal 1 satuan.
3	Obligasi	JHT : Klasifikasi aset obligasi JHT tidak mengalami identifikasi ulang.
		JKK, JK, BPJS : Klasifikasi Obligasi didistribusikan menurut value cost ditambah SPE (AFS) dan market value (trading) pada proporsi weighted average atas nilai aset dengan rounding pada nominal obligasi (face value) minimal dalam jutaan.
4	Reksadana	JHT : Klasifikasi aset Reksadana JHT tidak mengalami identifikasi ulang.
		JKK, JK, BPJS : Klasifikasi Reksadana didistribusikan pada value cost + SPE (AFS) dan market value (trading) dengan proporsi weighted average atas value aset tersebut.
5	Property	JHT : Klasifikasi aset property JHT tidak mengalami identifikasi ulang.
		BPJS : properti non JHT pada harga cost
6	Penyertaan	JHT : Klasifikasi aset penyertaan JHT tidak mengalami identifikasi ulang.
		BPJS : Klasifikasi aset Penyertaan pada harga cost.

2. Aset Non Investasi
   Atas aset non investasi (aset lancar, aset tetap, dan aset lain) yang tidak terkait dengan investasi tidak dilakukan alokasi ke masing-masing program, baik JHT, JPK, JKK dan JK melainkan seluruhnya dialokasikan menjadi aset BPJS, kecuali untuk aset non investasi yang sudah dipisahkan secara akun sebagai aset program (piutang iuran, PPn atas sewa dan PPh 21 atas JHT).

   Hal ini disebabkan sumber dana untuk aset tersebut adalah berasal dari ekuitas BPJS, yaitu modal, cadangan umum dan cadangan tujuan.

Tahapan persiapan pengalihan aset:

1. Tahap Pertama
   Implementasi pengalihan aset tahap pertama dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan per 31 Desember 2011 yang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pendamping.

   Sesuai Surat Deputi Kepala BPKP Nomor : SP-195/D5/03/2013 tanggal 8 Februari 2013 Perihal Hasil Pendampingan Identifikasi Aset Per Program PT Jamsostek (Persero), BPKP telah menyerahkan Laporan Hasil Pendampingan Identifikasi Aset Per Program.

   Pada tahapan ini PT Jamsostek (Persero) melakukan "persiapan" pemisahan aset dengan mengacu kepada ketentuan perundangan yang sudah berlaku yaitu UU Nomor 40/2004 dan UU Nomor 24/2011, sedangkan PP Nomor 99/2013 sebagai aturan pelaksanaan belum ada.

2. Tahap Kedua
   Implementasi pengalihan aset tahap kedua dilakukan dengan melanjutkan hasil pisah aset laporan keuangan per 31 Desember 2011 dengan hasil pemisahan aset dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan Parallel Run
      Proses parallel run adalah pencatatan pengelolaan keuangan secara simultan antara pencatatan pengelolaan keuangan yang berlaku saat ini (pencatatan JHT dan Non JHT) dan pencatatan pengelolaan keuangan berdasarkan pemisahan asset per program (JHT, JKK, JK, JPK dan BPJS). Paralel run dilakukan salama masa transisi, yaitu selama 2 (dua) sejak Januari 2012 sampai dengan Desember 2013. Manfaat dari pelaksanaan parallel run ini antara lain :
      1. Sebagai upaya untuk memelihara saldo pemisahan aset per program yang telah diputuskan berdasarkan laporan per 31 Desember 2011 hingga 31 Desember 2013;
      2. Sebagai proses pembelajaran sebelum penerapan pemisahan aset secara penuh per 1 Januari 2014;
      3. Sebagai dasar pengalihan asset JPK kepada BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014; dan
      4. Sebagai pendukung laporan keuangan per program yang sangat bermanfaat dalam perhitungan kinerja per program (*surplus defisit*).

      Pelaksanaan pararel run dilakukan berdasarkan saldo awal laporan per 31 Desember 2011 dan pembukuan dilakukan secara terpisah sesuai dengan masin-masing program meskipun secara pelaporan keuangan masih belum terpisah. Untuk mendukung pararel run ini, telah dilakukan penambahan sekitar 2.000 akun baru untuk menampung seluruh transaksi investasi meliputi dana, hasil, beban, utang, dan piutang per program (JHT, JKK, JK, JPK & BPJS). Penambahan akun ini juga diikuti dengan setup aplikasi (SIPT OL dan SIINVEST), setup laporan keuangan, dan jurnal standar sehingga dapat menampung pemisahan aset dan memproses transaksi selanjutnya.

   b. Pool of Fund dalam Pelaksanaan Investasi
      Pengelolaan investasi dilakukan sebagaimana praktik yang berjalan selama ini, yaitu dengan metode pool of fund. Berdasarkan pola ini, maka penempatan dan penjualan/ pencairan investasi tidak harus dipecah secara fisik nominal per program, namun dapat dilakukan secara gabungan (pooling) tetapi diikuti dengan pemecahan administratif secara proporsional per program atas sumber dana dan hasil investasinya. Hal ini dilakukan agar mampu menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang lebih kompetitif, dibandingkan pengelolaan dana yang terpecah-pecah secara fisik nominal per program.

Dalam proses pemisahan aset program JHT, JKK, JKM, JPK dan BPJS, ada beberapa kebijakan yang dilakukan pada pos-pos aset dan liabilitas, yaitu:

a. Rebalancing
   Rebalancing merupakan proses penyamaan aset dan liabilitas program. Rebalancing dilakukan untuk memindahkan aset yang mengalami kekurangan (under) atau kelebihan (over) terhadap liabilitas akan didistribusi secara merata ke seluruh instrument investasi menurut weighted average atas value aset investasi tersebut. Setelah dilakukan rebalancing akan dilakukan proses rounding atas aset investasi.

b. Rounding (pembulatan)
Masing-masing aset memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, sehingga mempengaruhi kebijakan alokasi pemisahan asetnya. Proses rounding perlu dilakukan untuk mencegah odd lot yaitu satuan instrumen yang ganjil sehingga tidak memungkinkan untuk dicatatkan sebagai instrumen efek atau surat berharga. Proses rounding secara langsung akan berdampak kepada proporsi per masing-masing instrumen dapat berbeda antara satu program dengan program lainnya, meskipun jumlah nya tidak signifikan. Apabila setelah proses rounding masih terdapat selisih, maka aset yang dijadikan sebagai penyeimbang (balancing) adalah kas setara kas dan deposito breakable.

Berikut "satuan" terkecil instrumen investasi yang tidak dapat dipecah menjadi fraksi dibawahnya:

Instrumen	Satuan	Jumlah Unit
Deposito	Bilyet	1
Saham	Lot	500
Obligasi	Unit	1.000.000
Reksadana	Unit	Bebas

c. Dana Deposito Jasa Konstruksi (Jakon)
Program Jasa Konstruksi merupakan program tambahan di luar program pokok sebagaimana ditetapkan untuk diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yaitu terdiri dari 4 (empat) program masing-masing program JHT, JKK, JK dan JPK.

Program Jakon hanya mencakup 2 program dengan masa pertanggungan di bawah satu tahun yaitu program JKK dan JK. Karekteristik program jasa konstruksi adalah bersifat proyek (jangka pendek), sehingga setelah proyek pengerjaan selesai maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kewajiban pertanggungan terhadap tenagakerja yang bekerja pada proyek tersebut.

Sesuai karekteristik program Jasa konstruksi, maka dana program yang sudah selesai proyek diakui sebagai dana BPJS. Sedangkan dana program JKK dan JKM adalah sebesar cadangan teknis program jasa Konstruksi

Di dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/05/012014 tentang Pedoman Transaksi Keuangan Pada Masa Transisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Direksi BPJS Ketenagakerjaan menetapkan pedoman transaksi keuangan yang mengatur alur transaksi, pencatatan dan pelaporan seluruh transaksi yang digunakan pada masa transisi BPJS Ketenagakerjaan. Yang dimaksud dengan masa transisi adalah periode sampai dengan ditetapkannya Keputusan Direksi tentang *System Operating Procedure (SOP)* Keuangan yang mengacu pada peraturan perundangan yang baru.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

2.a. Pernyataan Kepatuhan
Laporan posisi keuangan konsolidasian penutup disusun berdasarkan laporan konsolidasian Perusahaan yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2.b. Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Penutup
Laporan keuangan penutup merupakan laporan yang disusun untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 62 ayat 2 huruf c. Laporan keuangan konsolidasian penutup ini dibuat berdasarkan laporan keuangan konsolidasian lengkap yang telah diaudit dan telah disusun serta disajikan berdasarkan Pedoman Akuntansi Jamsostek (pajastek) yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 40 ayat 2 disebutkan bahwa BPJS wajib memisahkan aset BPJS dengan aset Dana Jaminan Sosial. Untuk memenuhi ketentuan ini maka laporan posisi keuangan konsolidasian lengkap dipisahkan menjadi BPJS dan program-program yaitu dengan laporan posisi keuangan disajikan rinci BPJS dan per program. Dan pada pasal 62 ayat 2 (c) disebutkan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan.

Dengan terjadinya transformasi kelembagaan PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka Laporan ini merupakan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Penutup dari PT Jamsostek (Persero) dan akan menjadi dasar dalam menyajikan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka masing-masing program (Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).

Perbedaan antara laporan posisi keuangan konsolidasian lengkap dengan laporan posisi keuangan konsolidasian penutup ini adalah distribusi laba tahun 2013. Akun-akun yang terkait dengan distribusi laba adalah sebagai berikut:

Akun-akun	Sebelum Distribusi Laba Rp	Distribusi Laba Rp	Setelah Distribusi Laba Rp
Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Untuk Operasional	392.482.725.241	400.000.000.000	792.482.725.241
Cadangan Umum	572.484.461.221	1.677.642.937.018	2.250.127.398.239
Cadangan Tujuan	863.211.054.227	210.000.000.000	1.073.211.054.227
Saldo Laba	2.287.642.937.018	(2.287.642.937.018)	--

Laporan keuangan konsolidasian penutup telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual. Dasar untuk pengukuran untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi penutup adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk penyertaan tertentu yang disajikan berdasarkan metode ekuitas serta investasi pada saham, obligasi, dan reksadana yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Investasi dalam kelompok ini disajikan sebesar nilai wajarnya. Pemisahan antara aset dan liabilitas BPJS dan program-program (JHT, JKK, JKM, dan JPK) dikelola sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang dijelaskan dalam Catatan 1.f.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian penutup ini adalah mata uang Rupiah.

Laporan keuangan konsolidasian penutup mencakup akun-akun Perusahaan dan entitas anak, dimana Perusahaan mempunyai pemilikan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung dan Entitas Bertujuan Khusus (EBK) yang berada dalam pengendalian Perusahaan sesuai dengan ISAK 7 Interpretasi atas paragraf 5 dan 19 PSAK No. 4 tentang Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus. Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) memenuhi persyaratan sebagai EBK yang harus dikonsolidasi sesuai dengan ISAK 7.

Perusahaan telah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 01 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan. Standar ini memisahkan perubahan pemilik dan non pemilik didalam ekuitas.

2.c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Perusahaan memiliki penyertaan langsung pada PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak) dengan persentase kepemilikan sebesar 99,98% dan mengelola Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) sebagai suatu entitas bertujuan khusus yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta.

Pada 31 Desember 2013, jumlah aset entitas anak dan EBK yang dikonsolidasi mencerminkan 0,72% terhadap jumlah aset konsolidasian.

Seluruh saldo dan transaksi signifikan, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan Entitas Anak serta EBK sebagai satu kesatuan usaha.

Proporsi bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba atau rugi bersih dari Entitas Anak yang dikonsolidasi disajikan masing-masing dalam akun "Kepentingan Non Pengendali" pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

2.d. Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan, Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan kurs rata-rata wesel ekspor Bank Indonesia pada 31 Desember 2013 sebagai berikut:

Mata Uang	2013
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	12.189

2.e. Instrumen Keuangan

PSAK 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran diterapkan secara prospektif sejak 1 Januari 2012 sesuai dengan ketentuan transisi atas standar tersebut.

Cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan keuangan konsolidasian penutup untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, telah disusun berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) yang tidak memiliki perbedaan signifikan dengan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006).

Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuannya.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori, yaitu aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*) yang terkini.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan kedalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Biaya transaksi, jika ada, diakui secara langsung pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Penambahan maupun pengurangan dalam nilai wajar dibandingkan dengan nilai perolehan dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan pada laporan laba rugi. Perusahaan menggunakan metode tidak langsung pada perubahan pencatatan dalam nilai wajar dari aset keuangan dengan mengakui nilai perolehan dan penyesuaian nilai wajar secara terpisah.

Pendapatan bunga dari aset finansial pada nilai wajar, diakui berdasarkan basis akrual. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset finansial yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi dan biaya transaksi dari penjualan aset finansial diakui sebagai beban pada laporan laba rugi konsolidasian.

Biaya dari investasi pada efek ekuitas, reksadana dan utang efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi dipasar aktif, kecuali:

yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan

dalam hal Perusahaan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya yang diamortisasi, dihitung dengan mengambil diskonto dan premi dari pembelian serta biaya yang merupakan bagian yang utuh dari tingkat bunga efektif. Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dicatat didalam pendapatan investasi. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui didalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai.

Aset Keuangan Dimiliki hingga Jatuh Tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

investasi yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan

investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan bunga dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dicatat sebagai laba atau rugi dan diakui sebagai pendapatan bunga. Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada awal akuisisi dan fee/biaya sebagai bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif (EIR). Amortisasi dan kerugian yang timbul dari penurunan nilai akan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Aset keuangan tersedia untuk dijual
Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di pendapatan komprehensif lainnya, diakui sebagai laba rugi. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui sebagai laba rugi.

Biaya dari investasi pada efek ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dihitung menggunakan harga rata-rata tertimbang bergerak, sedangkan biaya dari investasi pada efek utang menggunakan metode yang spesifik.

Pengakuan
Perusahaan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk kontrak regular ketika mencatat transaksi aset keuangan.

Mulai tahun 2012, Perusahaan telah menerapkan pemisahan antara investasi syariah dengan konvensional berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/77/032012 tentang reklasifikasi dan penentuan nilai wajar investasi sukuk. Investasi dalam sukuk dikelompokkan ke dalam sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan sukuk yang diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi. Pencatatan sukuk dengan kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat dengan kebijakan yang sama dengan obligasi dalam kelompok *Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL), sedangkan sukuk dalam kelompok diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi dicatat dengan kebijakan yang sama dengan obligasi dalam kelompok *Held to Maturity* (HTM), kecuali untuk amortisasi atas diskonto, premium, dan biaya transaksi dihitung secara garis lurus.

Nilai wajar efek investasi dihitung berdasarkan hirarki nilai wajar sebagaimana ditetapkan dalam PSAK No. 55. Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP/44/022011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Penetapan Nilai Wajar Investasi Saham dan Reksadana dan Keputusan Direksi No. KEP/332/122010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Nilai Wajar Investasi Obligasi, diatur sebagai berikut:

a. Saham
   Terdapat dua kelompok saham yaitu saham yang memiliki pasar aktif dan saham yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk saham yang memiliki pasar aktif, nilai wajar ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan dari penutupan hari bursa. Sedangkan untuk saham yang tidak memiliki pasar aktif maka menggunakan harga penutupan dari hari bursa terakhir yang tersedia.

b. Reksadana
   Untuk reksadana menggunakan nilai aset bersih yang dipublikasikan oleh manajer investasi.

c. Obligasi
Terdapat dua kelompok obligasi yaitu obligasi yang memiliki pasar aktif dan obligasi yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk obligasi yang memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan *(bid price)* dari transaksi terakhir, atau apabila tidak tersedia maka menggunakan harga penutupan *(closing price).*

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (mark-to-model). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data primary dealers, money brokers, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi provider info. Metode yang digunakan adalah metode Nelson Siegel Svensson. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

Investasi dalam Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA) telah diatur dalam PAJASTEK 2010. KIK-EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Efek Beragun Aset (EBA) adalah efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Beragun Aset (KIK-EBA) yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, sarana pengikatan kredit/arus kas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.

Terdapat dua jenis EBA, yaitu pendapatan tetap dan tidak tetap. EBA pendapatan tetap memiliki karakteristik sebagaimana obligasi, yaitu memiliki jangka waktu jatuh tempo, memiliki penghasilan tertentu dan dapat dibeli dibawah par, diatas par, atau pada harga nominal.

EBA pendapatan tidak tetap memiliki karakteristik sebagaimana efek ekuitas (saham). Pengelompokkan EBA mengikuti jenisnya, yaitu EBA pendapatan tetap dapat diklasifikasikan sebagai FVTPL, AFS, ataupun HTM, sedangkan EBA pendapatan tidak tetap diklasifikasikan sebagai FVTPL dan AFS.

Reklasifikasi aset keuangan
Setelah reklasifikasi per 1 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/376/122009 dan KEP/152/072010 sebagai implementasi penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006), Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangan. Perusahaan tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

a. Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
b. Terjadi setelah Perusahaan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Perusahaan telah memperoleh pelunasan dipercepat; dan
c. Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Perusahaan, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Perusahaan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Aset investasi yang sudah tidak memiliki prospek arus kas di masa depan harus dilakukan penurunan nilai atau penghentian pengakuannya sebesar 100% dan dipindahkan dari kelompok investasi ke akun aset investasi tidak produktif dalam kelompok aset lain.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat melalui laporan laba rugi konsolidasian sebagai "Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan".

Per 31 Desember 2013, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang selain atau tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Keuangan	**Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba-Rugi**	Aset Keuangan Dalam Kelompok Diperdagangkan	Saham Reksadana Sukuk Obligasi
	Pinjaman Diberikan & Piutang	Bank Investasi Deposito on Call Deposito Berjangka Kas & Bank Non Investasi DOC Non Investasi Piutang Iuran Pinjaman Diberikan DPKP	
		Piutang Usaha Entitas Anak Pendapatan YMHD	
		Aset Lain-Lain	Aset Investasi Tidak Produktif
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	KIK-EBA Sukuk Obligasi	
	Dimiliki Untuk Dijual	Saham Reksadana Obligasi Penyertaan Langsung	

Liabilitas Keuangan	**Biaya Diamortisasi**	Utang Usaha Beban Akrual Liabilitas yang Masih Harus Dibayar
		Liabilitas Lain - Lain

Saling hapus instrumen keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan nilai dari aset keuangan
Pada setiap tanggal pelaporan keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penentuan nilai wajar
Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas keuangan dapat diukur dengan menggunakan kuotasi di pasar aktif, yaitu jika harga yang dikuotasikan tersedia setiap waktu dan dapat diperoleh secara rutin dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Dalam hal tidak terdapat pasar aktif untuk suatu aset atau liabilitas keuangan, maka Perusahaan menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak yang berkeinginan dan memahami, dan bilamana tersedia, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, dan model penetapan harga opsi.

2.f. Investasi Penyertaan Langsung

Investasi penyertaan langsung dapat dibedakan menjadi: investasi penyertaan saham pada perusahaan yang diklasifikasikan sebagai Tersedia Untuk Dijual (AFS), investasi pada entitas asosiasi (ada pengaruh signifikan) dan investasi pada entitas anak.

Investasi penyertaan langsung pada perusahaan dibawah 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan, disajikan sebagai aset keuangan dalam kategori tersedia untuk dijual. Pada setiap tanggal laporan, perubahan nilai tercatat dengan nilai wajar diakui pada investasi dalam laporan posisi keuangan. Apabila nilai wajar dari investasi tidak dapat ditentukan secara andal berdasarkan hirarki nilai wajar, maka investasi ini dinilai berdasarkan biaya perolehan.

Investasi pada entitas asosiasi (ada pengaruh signifikan) dicatat berdasarkan metode ekuitas. Pada setiap tanggal laporan, saldo laba/rugi entitas investee diakui ke dalam laporan laba rugi sesuai persentase kepemilikannya.

Penyertaan langsung pada entitas anak yang memenuhi syarat pengendalian dan ventura bersama (pengendalian bersama ekuitas) harus dilakukan konsolidasi sesuai persentase kepemilikannya.

Apabila nilai ekuitas entitas asosiasi yang menjadi bagian investor sesudah transaksi perubahan ekuitas asosiasi berbeda dengan nilai ekuitas asosiasi yang menjadi bagian investor sebelum transaksi perubahan ekuitas asosiasi, maka perbedaan tersebut, oleh investor diakui sebagai bagian dari ekuitas dengan akun "Bagian Pendapatan Komprehensif Lain Dari Entitas Asosiasi".

2.g. Properti Investasi

Pada tanggal 27 September 2013 dikeluarkan Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) No. KEP/343/092013 mengenai klasifilkasi Properti Investasi. Di dalam SK ini Properti Investasi berdasarkan tujuan penggunaannya diklasifikasikan sebagai berikut:

Jenis Properti Investasi	Taksiran Masa Manfaat	Nilai Sisa Aset Tetap
Tanah	Tidak disusutkan	Tidak ada nilai residu
Bangunan Properti		20%
Perolehan Struktur	20 tahun	
Renovasi Struktur	Berdasarkan Perhitungan Appraisal	
Renovasi Non Struktur Signifikan	Mengikuti Sisa Umur Bangunan Properti	
Renovasi Non Struktur Tidak Signifikan	4 tahun	
Aset Fasillitas Properti	Sesuai Masa Periode Penyewa	0%
Peralatan Properti	5 tahun	5%
Peralatan Lain Properti	4 tahun	5%
Aset Properti Dalam Konstruksi	Tidak disusutkan	Tidak ada nilai residu

2.h. Piutang Iuran

Sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012, piutang iuran diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.

Piutang iuran adalah iuran non JHT yang belum diterima pelunasannya sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan. Penerimaan iuran JHT diakui pada saat realisasi penerimaan iuran, dan menjadi penambahan kewajiban kepada peserta. Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) yang diimplementasikan mulai 1 Januari 2012, piutang iuran yang masih harus diterima dan dicatat dalam laporan keuangan ketika memiliki kemungkinan untuk adanya keuntungan ekonomis di masa mendatang kepada Perusahaan dan dapat diukur secara andal. Perusahaan menetapkan bahwa piutang yang memenuhi kriteria andal adalah piutang yang telah mendapat persetujuan perusahaan peserta, sedangkan piutang iuran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai aset kontinjensi.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/365/102013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Klasifikasi Piutang Iuran Program Jamsostek yang merupakan penyempurnan Keputusan Direksi No. KEP/352/122010 ditetapkan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Umur Piutang sebagai berikut :

Klasifikasi	Umur Tunggakan
Lancar	0 bulan < x ≤ 1 bulan
Kurang Lancar	2 bulan < x ≤ 3 bulan
Macet	di atas 3 bulan

2. Piutang Iuran diakui sebesar Data Upah Siap Rekonsiliasi (DUSR) yang telah mendapat persetujuan dari perusahaan, apabila tidak tersedia DUSR maka dapat digunakan Iuran Terakhir Rekonsiliasi Final (ITRF) sebagai dasar perhitungan surat pemberitahuan yang sudah dicetak. Piutang iuran yang dihitung berdasarkan data ITRF maksimum 3 bulan belum membayar iuran.

3. Direktorat Operasional dan Pelayanan harus melakukan evaluasi atas kriteria perusahaan strategis dan bukti obyektif penurunan nilai (penyisihan) secara periodik pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Keuangan untuk dilakukan (penyisihan) penurunan nilai.

Berdasarkan SK Direksi tersebut diatas, juga ditetapkan teknik evaluasi penurunan nilai yaitu secara individual untuk perusahaan-perusahaan strategis dengan menggunakan metode statistik *Discounted Cash Flows* (DCF) dan secara kolektif yaitu untuk perusahaan strategis yang tidak memenuhi bukti obyektif penurunan nilai dan perusahaan non strategis yang dihitung berdasarkan *incurred losses* dengan menggunakan metode *migration analysis* dengan data empiris selama 3 (tiga) tahun terakhir dan berlaku sejak 1 Januari 2010.

Berikut disajikan persentase penyisihan piutang iuran tahun 2013 sebagai berikut:

Kategori	2013	
	Umur	%
Lancar	0-1 bulan	1,53%
Kurang Lancar	2-3 bulan	16,81%
Macet	> 3 bulan	56,84%

Perubahan pengakuan piutang iuran dan penentuan penyisihan piutang iuran sebagai bagian dari penerapan ketentuan transisi atas PSAK No. 50 dan 55 (Revisi 2006) sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Edisi 4. Sesuai ketentuan ini dampak penerapan berdasarkan kebijakan sebelumnya dibandingkan berdasarkan kebijakan baru disesuaikan ke saldo laba per 1 Januari 2010.

2.i. Pinjaman yang Diberikan

1. Pinjaman yang diberikan merupakan tagihan kepada peserta yang timbul akibat pemberian pinjaman program DPKP secara bergulir kepada pihak-pihak yang ditentukan baik secara *channeling*, *executing* maupun secara langsung.

2. Sesuai PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran, penyisihan kerugian pinjaman diberikan dan piutang bunga pinjaman diberikan ditentukan berdasarkan adanya bukti obyektif penurunan nilai telah terjadi. Dalam hal bukti obyektif tidak terpenuhi, besamya penyisihan pinjaman diberikan dan bunga pinjaman diberikan ditetapkan berdasarkan estimasi pinjaman tak tertagih. Sesuai dengan PSAK 55 dan ditindaklanjuti melalui surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/334/122010 tanggal 30 Desember 2010 perihal Teknik Evaluasi Penurunan Nilai (Penyisihan) Pinjaman Diberikan Program DPKP PT Jamsostek (Persero), klasifikasi dan persentase penyisihan pinjaman diberikan dan piutang bunga pinjaman diberikan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Kategori	Persentase	Keterangan
	2013	
Lancar	4,77%	0-1 bulan
Kurang Lancar	50,41%	2-3 bulan
Ragu-ragu	60,77%	9-12 bulan
Macet	86,70%	> 12 bulan

Penentuan estimasi persentase penyisihan pinjaman diberikan dan bunga pinjaman diberikan tidak tertagih dievaluasi setiap awal tahun dan dipergunakan untuk menghitung penyisihan tahun berjalan.

2.j. Piutang Usaha

Piutang usaha dari entitas anak disajikan dalam jumlah bersihnya yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai. Kebijakan Kerugian Penurunan Nilai ditetapkan sebagai berikut:

1. Piutang usaha lancar yaitu yang berumur sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak disisihkan.
2. Piutang usaha kurang lancar yaitu piutang yang berumur diatas 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan disisihkan sebesar 25%.
3. Piutang usaha diragukan yaitu piutang yang berumur diatas 24 (dua puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan disisihkan sebesar 50%.
4. Piutang usaha macet yaitu piutang yang berumur diatas 36 (tiga puluh enam) bulan disisihkan sebesar 100%.

2.k. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak Perusahaan dilihat dari segi waktu periode akuntansi tetapi sampai dengan tanggal laporan belum dicatat sebagai pendapatan atau diterima pembayarannya.

2.l. Piutang Pendapatan Jatuh Tempo

Piutang Pendapatan Jatuh Tempo adalah pendapatan yang sudah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya.

2.m. Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor

Pencatatan persediaan perlengkapan alat tulis kantor dilaksanakan dengan menggunakan metode periodik sedangkan pengukurannya dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/265/122003 tanggal 31 Desember 2003 yang disempurnakan melalui Keputusan Direksi Nomor: KEP/377/122008 tentang Pedoman Verifikasi Laporan Keuangan Kantor Daerah.

2.n. Aset Tetap

Semua aset tetap yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Perusahaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran aset tetap. Pada model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Aset tetap, kecuali tanah, telah disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/93/042011 tanggal 18 April 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud di Lingkungan Perusahaan, ditetapkan beberapa perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap sebagai dampak dari penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007), meliputi sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Taksiran Masa Manfaat
Bangunan	20 tahun
Renovasi Bagian Dalam	4 tahun
Renovasi Bagian Luar / Keseluruhan	Hasil Appraisal
Kendaraan	5 tahun
Peralatan Kantor	4 tahun
Peralatan Komputer	4 tahun
Peralatan Lainnya	4 tahun

Jenis Aset Tetap	Nilai Sisa Aset Tetap
Bangunan	20%
Kendaraan Sedan	25%
Kendaraan Non Sedan	20%
Motor	10%
Peralatan Kantor	5%
Peralatan Komputer	5%
Peralatan Lainnya	5%

Berdasarkan PSAK No. 47, “Akuntansi Tanah”, perolehan tanah setelah tanggal 1 Januari 1999 dinyatakan berdasarkan biaya perolehannya dan tidak diamortisasi. Biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak kepemilikan tanah, ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai. Penurunan nilai aset tersebut diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset dan dibebankan sebagai kerugian periode berjalan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat suatu aset atau yang memberikan manfaat ekonomis yang berupa peningkatan kapasitas, kualitas produksi, atau kinerja dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan. Untuk menentukan ada tidaknya penambahan masa manfaat atas suatu renovasi aset tetap, maka ditetapkan batas signifikansi renovasi minimal sebesar 20% dari nilai perolehan aset tetap tersebut kemudian dihitung berdasarkan hasil penilaian baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam usaha, maka nilai bukunya direklasifikasi ke aset lain-lain dan tidak disusutkan. Sedangkan aset tetap yang memenuhi kriteria aset tetap yang dimiliki untuk dijual, nilai bukunya dipindahkan ke aset dimiliki untuk dijual, dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkannya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Aset dalam konstruksi dinyatakan sebesar biaya perolehannya dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

2.o. Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP)

Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) merupakan Dana dari Program DPKP yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta Jamsostek melalui pemberian sarana rusunawa, sarana pelayananan kesehatan, dan sarana kesejahteraan peserta lainnya. SKP terdiri dari tanah, bangunan dan peralatan.

Semua SKP yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan. Perusahaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran asetnya. Pada model biaya, SKP dinyatakan sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dan disajikan dalam laporan konsolidasi secara terpisah. SKP, kecuali tanah, telah disusutkan dengan metode garis lurus sebesar 5% per tahun dan peralatan sebesar 25% per tahun.

2.p. Sewa

Sesuai dengan PSAK No. 30 (revisi 2011), sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Aset yang diperoleh melalui sewa pembiayaan diakui sebagai aset sebesar nilai wajar aset sewaan pada awal sewa atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan diakui dalam posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian beban keuangan dan bagian pelunasan liabilitas untuk menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan secara langsung ke laba atau rugi, kecuali beban tersebut berkaitan langsung dengan perolehan aset tertentu yang dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan umum biaya pinjaman. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Sewa kontinjen yang timbul dari sewa operasi diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

2.q. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud dinyatakan sebesar nilai bukunya. Amortisasi dihitung dengan metode garis lurus sejak bulan perolehan sebesar 25% per tahun dan tidak dilakukan pencadangan.

2.r. Aset Lain

Aset lain terdiri dari kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, beban ditangguhkan, aset tetap yang sudah tidak digunakan, piutang pegawai, piutang lain, aset sitaan dan rekening antar kantor dan lain-lain.

2.s. Liabilitas Jaminan

Liabilitas Jaminan

Merupakan klaim program non JHT yang sudah ditetapkan namun belum dibayarkan.

Liabilitas Belum Dicairkan
Merupakan klaim jaminan yang telah dibayarkan (cek telah diterbitkan) kepada peserta (menggunakan cek) dan belum dicairkan oleh peserta. Sesuai Keputusan Direksi No. KEP/214/082009 tentang Petunjuk Teknis Tambahan, Sistem dan Prosedur Untuk Kasus Penyelesaian Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian, atas cek yang sudah lebih dari 70 (tujuh puluh) hari akan dilakukan pembatalan penetapan jaminan.

Liabilitas Jaminan Diestimasi
Utang Jaminan Diestimasi merupakan klaim program non JHT yang sudah diajukan namun sampai tanggal laporan belum disetujui atau belum ditetapkan.

Liabilitas Jaminan Non-JHT Belum Dilaporkan / *Incurred but Not Reported* (IBNR)
Merupakan estimasi jumlah jaminan non JHT yang telah terjadi namun belum dilaporkan sampai akhir tahun buku.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/149/042012 tanggal 30 April 2012, Perusahaan menerapkan perhitungan IBNR mulai tahun buku 2011 dan disajikan kembali untuk tahun 2010. IBNR mencakup program Non JHT yaitu meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jasa Konstruksi (Jakons), termasuk Program Mandiri dan Perorangan.

IBNR dihitung setiap tahun berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$IBNR = R \times J$$

Keterangan:
R = Rata-rata persentase
J = Beban klaim tahun berjalan untuk masing-masing program.

Rata-rata persentase (R) dihitung berdasarkan rata-rata perbandingan persentase klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{P1 + P2 + P3}{3} \times 100\%$$

Keterangan:
P1, P2, P3 = Persentase klaim tahun ke 1, ke 2, ke3

2.t. Liabilitas JHT

Penerimaan Iuran JHT dari perusahaan peserta Jamsostek diperlakukan sebagai penambah utang JHT sedangkan pembayarannya diperlakukan sebagai pengurang utang JHT, diikutsertakan pada utang JHT adalah bunga investasi JHT yang telah dikurangi dengan beban pengelolaan program JHT yang akan dikembalikan kepada peserta ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Ht : Total Hasil Pengembangan Saldo JHT Tahun 2013
Sa : Saldo Awal Tahun 2013
n : Bulan Iuran
In : Iuran Yang Diterima Pada Bulan ke-n Tahun 2013
Jhn : Jumlah Hari dalam Bulan Iuran
Ti : Tanggal Iuran Diterima
Hs : Hasil Pengembangan Saldo Awal
Hi : Hasil Pengembangan Iuran
Ht : Hs + Hi
Hs : {Sa x i%}

$$\text{Hi} \quad : n=12$$
$$\text{Ó} \{[\text{In} \times i\% \times (1/12)] \times [(\text{Jhn-Ti}/\text{Jhn}) + (12-n)]\}$$
$$n=1$$

Bagian peserta berdasarkan rumus di atas akan menambah saldo utang JHT. Apabila hasil investasi JHT setelah dialokasikan kepada peserta masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi dana pengembangan JHT yang diklasifikasikan dalam kelompok liabilitas kepada peserta.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/444/122013 tanggal 23 Desember 2013, menetapkan besarnya pemberian hasil pengembangan dana untuk saldo awal JHT tahun 2013 adalah 8,68% dan pembayaran JHT tahun 2014 sebesar 5,6%.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/477/122012 tanggal 18 Desember 2012, menetapkan besarnya pemberian hasil pengembangan dana untuk saldo awal JHT tahun 2012 adalah 9,10% dan pembayaran JHT tahun 2013 sebesar 5,5%.

2.u. Dana Pengembangan JHT

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/ 476/122012 tanggal 18 Desember 2012, menetapkan Dana Pengembangan JHT yang dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

a. Dana Pengembangan JHT Koreksi
   Dana pengembangan JHT koreksi digunakan untuk koreksi data yang tertinggal yang dibentuk dari selisih lebih (kurang) *cut off* saldo utang JHT pada saat migrasi data dari sistem *offline* ke sistem *online* serta pindahan dana dari Dana Pengembangan JHT Penyesuaian Hasil Pengembangan Setelah RUPS dan Dana Pengembangan Surplus.

   Dana pengembangan JHT penyangga investasi digunakan untuk mempertahankan hasil pengembangan JHT yang stabil yang kompetitif dengan tingkat suku bunga pasar, Dana pengembangan JHT penyangga investasi bersumber dari investasi JHT netto peiode sebelumnya.
   Formula dana pengembangan penyangga adalah sebagai berikut:
   Dana Pengembangan JHT Penyangga dihitung dengan formula:

   Dana Pengembangan JHT = 21,60% x Hasil_JHT1 x U_JHT

   Keterangan:
   - Hasil_JHT adalah hasil pengembangan JHT untuk perhitungan saldo JHT di awal periode berjalan dan untuk perhitungan pembayaran saldo JHT

   - U_JHT adalah utang jatuh tempo ditambah utang JHT sesuai RSJHT dan utang JHT belum sesuai RSJHT

b. Dana Pengembangan JHT Penyangga (*Buffer*) Investasi
   Dana Pengembangan JHT Penyangga (*Buffer*) digunakan untuk mempertahankan tingkat hasil pengembangan JHT yang stabil dan menjaga tingkat hasil pengembangan JHT yang kompetitif dengan tingkat bunga pasar.

   Dana Pengembangan JHT Penyangga (*Buffer*) Investasi dihitung dengan formula:

   Dana Pengembangan JHT - *Buffer* = 21,60% x Hasil_JHT1 x U_JHT^2

   Keterangan:
   1. Hasil_JHT^1 adalah hasil pengembangan JHT untuk perhitungan saldo JHT diawal periode berjalan dan untuk perhitungan pembayaran saldo JHT.

2. U_JHT[2] adalah utang JHT Jatuh Tempo ditambah utang JHT sesuai RSJHT ditambah utang JHT belum sesuai RSJHT.

c. Dana Pengembangan JHT Penyesuaian Hasil Pengembangan Setelah RUPS
Dana pengembangan JHT penyesuaian hasil pengembangan setelah RUPS berasal dari alokasi hasil investasi JHT netto yang belum didistribusikan per tanggal 31 Desember karena laporan keuangan audit belum disahkan RUPS.

d. Dana Pengembangan JHT Surplus
Dana pengembangan JHT surplus adalah hasil dari pengembangan dana JHT yang akan dikembalikan kepada peserta berdasarkan hasil dari investasi bersih JHT dari tahun berjalan dan sisa dari pengembangan tahun lalu yang ditetapkan pada RUPS tahun sebelumnya. Perhitungan untuk batas atas pada dana pengembangan JHT setelah RUPS adalah sebagai berikut:

$$\text{Batas Atas (Surplus) Investasi JHT} = \left\{ \begin{array}{l} 0.10\% \times \left(\begin{array}{l} \text{Utang\_JHT\_Jatuh Tempo (t-1)} \\ \text{Utang\_JHT\_Sesuai\_RSJHT (t-1)} \\ \text{Utang\_JHT\_Belum\_Selesai\_RSJHT (t-1)} \end{array} \right) \\ \\ + \\ \\ 0.10\% \times 0.50 \times \text{Penerimaan Iuran JHT} \end{array} \right\}$$

2.v. Liabilitas JHT Jatuh Tempo
Utang JHT jatuh tempo adalah seluruh iuran JHT beserta hasil pengembangannya yang harus dibayarkan kepada peserta yang mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dalam jangka waktu satu tahun ke depan sejak tanggal neraca.

2.w. Iuran Belum Rinci
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/289/112004 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Program Jamsostek yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No. KEP/77/032008 dan Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bahwa penerimaan iuran dari perusahaan yang belum didukung dengan data upah tidak dapat diakui sebagai pendapatan iuran atau penambah utang JHT. Penerimaan iuran dimaksud akan dicatat pada akun "Iuran Belum Rinci" pada kelompok liabilitas kepada peserta.

2.x. Cadangan Teknis
Cadangan Teknis untuk JKK dan JKM dibentuk berdasarkan perhitungan aktuaria dengan metode prospektif, berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan No. S.1101/MK.17/1994 tanggal 21 Juli 1994, dengan asumsi aktuaria sebagai berikut:

Tingkat Bunga	8.00%
Faktor Quota	0.50%
Tingkat Mortalita	CSO 1958
Masa Kepesertaan	sampai 55 tahun

Pembentukan cadangan teknis JPK dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2004 yaitu sebesar 10% dari penerimaan iuran JPK tahun berjalan dan tidak bersifat akumulatif. Asumsi yang digunakan untuk perhitungan cadangan teknis dapat berbeda dengan kondisi pasar saat ini.

Cadangan teknis katastrofa merupakan cadangan yang dibentuk untuk mengantisipasi banyaknya klaim yang muncul karena terjadinya bencana alam.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/49/022006 tanggal 28 Februari 2006, beban cadangan katastrofa JKK, JKM, dan JPK adalah sebesar 0,5% dari penerimaan iuran tahun berjalan dan diakumulatifkan pada cadangan katastrofa.

Mulai tahun 2012, Perusahaan tidak melakukan pencadangan teknis katastrofa karena bertentangan dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dan PSAK 62 (Revisi 2011) Kontrak Asuransi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai PSAK 62 (Kontrak Asuransi) Par 14 angka 1, disebutkan bahwa tidak mengakui sebagai liabilitas setiap provisi untuk kemungkinan klaim masa mendatang, jika klaim tersebut timbul karena kontrak asuransi yang tidak ada pada akhir periode pelaporan (seperti provisi katastrofa dan provisi penyetaraan (equalization provisions)).
2. Risiko atas kejadian katastrofa baik untuk kematian maupun kecelakaan kerja bukan merupakan risiko yang tercakup dalam jenis pertanggungan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan Jamsostek.
3. Khusus untuk Program JPK, PT Jamsostek (Persero) tidak memiliki eksposure risiko katastrofa karena karakteristik penyelenggaraan JPK sebagaimana berlaku saat ini adalah sistem manage care, sehingga risiko pengobatan (termasuk karena sebab katastrofa, misalnya wabah) seluruhnya telah dialihkan dari PT Jamsostek (Persero) kepada PPK 1 & 2 bersamaan dengan pembayaran kapitasi.

2.y. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:

1. Perusahaan dan entitas anak memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya;
3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.
Liabilitas kontinjensi adalah:

1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas nya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

2.z. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Perusahaan dan Entitas anak membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di neraca merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

Perusahaan menyelenggarakan program dana pensiun dan purna jasa untuk karyawan yang diangkat sebelum bulan September 2011 diselenggarakan dengan program manfaat pasti. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi Perusahaan yang besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Untuk karyawan yang diangkat terhitung mulai bulan September 2011, perusahaan mengikutsertakan pada program dana pensiun iuran pasti, jumlah kontribusi tetap terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi perusahaan sebesar 12,8%.

Perusahaan juga menyelenggarakan program iuran pasti untuk tunjangan hari tua (THT) dimana kontribusi karyawan dan Perusahaan ditetapkan masing-masing sebesar 4% dari gaji pokok per bulan.

2.aa. Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

DPKP adalah dana yang dihimpun dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja program Jamsostek dan atau keluarganya yang diprioritaskan bagi yang kurang mampu dan membantu badan/unit usaha yang mempunyai keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan peserta program Jamsostek terutama bagi badan/unit usaha skala kecil.

Akun DPKP disajikan dalam laporan konsolidasian dalam kelompok liabilitas dan terdiri dari DPKP untuk operasional dan DPKP telah disalurkan.

Perubahan DPKP tahun berjalan disajikan secara terpisah dalam laporan kinerja program DPKP.

2.ab. Pengakuan Pendapatan Iuran dan Beban

Perusahaan dan entitas anak mengakui dan mencatat pendapatan dan beban dengan basis akrual. Khusus untuk Iuran JHT diakui dan dicatat sebagai liabilitas pada saat diterima dan denda atas keterlambatan pembayaran iuran JHT, diakui dan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada laba rugi pada saat diterima. Untuk Piutang Iuran, Perusahaan mencatat dari bulan tunggakan sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaporan.

2.ac. Biaya Pengelolaan Program JHT

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.010/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua, ditetapkan bahwa persentase biaya pengelolaan JHT tahun 2013 sebesar 1,35% dari rata-rata dana investasi JHT.

2.ad. Perpajakan

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan balance sheet liability method. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan dan yang akan digunakan pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima, atau dalam hal Perusahaan dan entitas anak mengajukan banding, ketika:

1. Pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap kewajiban perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat, atau;

2. Pada saat dimana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, dimana hasil yang diharapkan dari proses banding secara signifikan tidak pasti, maka pada saat itu perubahan kewajiban perpajakan diakui berdasarkan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diajukan banding.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk menyelesaikan saldo-saldo tersebut secara neto.

2.ae. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian penutup Perusahaan dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perusahaan dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan Teknis

Perhitungan cadangan teknis untuk JKK dan JKM dibentuk berdasarkan perhitungan aktuaria dengan metode prospektif, sesuai surat persetujuan Menteri Keuangan No. S.1101/MK.17/1994 tanggal 21 Juli 1994. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jamsostek, pembentukan besarnya cadangan JKK dan JKM untuk pertanggungan dengan jangka waktu paling lama satu tahun adalah sebesar 40% dari penerimaan iuran JKK dan JKM tahun berjalan. Pembentukan cadangan teknis JPK dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2004 yaitu sebesar 10% dari penerimaan iuran JPK tahun berjalan dan tidak bersifat akumulatif. Asumsi yang digunakan untuk perhitungan cadangan teknis dapat berbeda dengan kondisi pasar saat ini.

Liabilitas Pasca Kerja

Nilai kini liabilitas pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja.

Perusahaan dan entitas anak menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan kerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Estimasi Umur Manfaat Properti Investasi, Aset Tetap dan Sarana Kesejahteraan Peserta
Perusahaan, entitas anak dan DPKP melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis properti investasi, aset tetap dan sarana kesejahteraan peserta berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi fisik dan teknis serta perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (mark-to-model). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data primary dealers, money brokers, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (*Himdasun*), data lelang dan data kuotasi provider info. Metode yang digunakan adalah metode Nelson Siegel Svensson. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow (DCF)* atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

Pajak Penghasilan
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan *balance sheet liability method*. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui hanya ketika pajak tangguhan yang timbul dapat dipulihkan, dalam hal ini tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi jumlah pendapatan iuran, beban jaminan, beban cadangan teknis dan beban usaha di masa depan.

2.af. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 7 (revisi 2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Perusahaan dan entitas anak telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan konsolidasian telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi. Pihak-pihak berelasi adalah:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor

b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

3. Manajemen Risiko

a. Organisasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko di Perusahaan saat ini berada dibawah tanggung jawab Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Manajemen Risiko. Terkait dengan pengelolaan Risiko, Biro Manajemen Risiko dipantau oleh Komite Manajemen Risiko yang merupakan perangkat Dewan Komisaris.

Pada dasarnya pengelolaan risiko adalah tanggung jawab seluruh unit kerja (divisi, biro, kantor wilayah dan kantor cabang). Aktifitas operasional antara lain melakukan proses pengidentifikasian, pengukuran, monitoring dan pelaporan risiko yang merupakan bagian dari aktivitas operasional semua unit kerja. Biro Manajemen Risiko mendisain/ menetapkan kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko, memfasilitasi unit kerja dalam melaksanakan manajemen risiko dan memonitor pelaporan dan kesesuaian kerangka kerja/metodologi yang diterapkan unit kerja.

Aktifitas bisnis Perusahaan meliputi pelayanan kepesertaan dan pengelolaan dana baik berupa dana JHT dan atau dana Non JHT. Terkait dengan aktifitas tersebut, Perusahaan terekspos berbagai risiko yang meliputi risiko counterpart, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.

Khusus terkait dengan pengelolaan aset keuangan yang merupakan aset terbesar, Perusahaan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan yaitu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mentaati peraturan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2004 tentang Pedoman dan Pengelolaan Investasi Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Keputusan Direksi No. KEP/324/122010 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi, Keputusan Direksi No. KEP/34/082011 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, dan Keputusan Direksi No. KEP/353/122009 tentang pedoman GCG.

b. Manajemen Risiko *Counterpart*

Risiko *counterpart* adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan dan entitas anak.

Pihak ketiga Perusahaan dan entitas anak dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional Perusahaan dan entitas anak. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti dan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta peserta Jamsostek. Perusahaan dan entitas anak melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya default (gagal bayar). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/324/122010 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi; pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu Perusahaan juga memiliki Keputusan Direksi No. KEP/34/02011, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset pada laporan posisi keuangan penutup pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013							
	Nilai Kotor						Penyisihan Kerugian	
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS	Entitas Anak	Penurunan Nilai	Nilai Bersih
Aset								
Bank Investasi	6.776.635.392	2.892.879.555	--	--	116.010.675	--	--	9.785.525.622
Deposito Berjangka	36.015.899.000.000	1.358.214.000.000	446.090.000.000	290.500.000.000	2.069.293.691.000	--	--	40.179.996.691.000
Saham	23.447.285.053.660	4.052.975.658.920	1.213.894.320.841	--	3.097.235.191.439	--	--	31.811.390.224.860
Reksadana	10.599.347.858.624	581.303.572.715	138.385.558.335	--	448.051.614.012	--	--	11.767.088.603.686
KIK - EBA	100.000.000.000	44.390.501.674	3.976.815.202	--	95.555.642.529	--	--	243.922.959.405
Obligasi								
Korporasi	22.894.843.821.360	1.448.130.287.644	443.697.726.035	--	1.118.209.672.728	--	(9.466.407.750)	25.895.415.100.017
Obligasi Republik Indonesia	32.251.497.807.949	429.945.423.440	125.327.511.635	--	314.238.222.730	--		33.121.008.965.754
Sukuk	5.599.554.771.284	96.676.000.000	30.215.000.000	--	73.109.000.000	--	(6.643.093.158)	5.792.911.678.126
Piutang Iuran	--	104.627.047.934	29.511.484.139	83.877.802.574	--	--	(116.066.713.264)	101.949.621.383
Pinjaman DPKP	--	--	--	--	587.333.301.407	--	(95.234.568.299)	492.098.733.108

c. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki Perusahaan. Secara umum Perusahaan memiliki risiko bunga atas nilai wajar dan risiko harga.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Risiko ini terkait dengan koreksi harga instrumen saham, obligasi dan reksadana akibat pengaruh perubahan tingkat suku bunga.

Perusahaan melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan rebalancing secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan Perusahaan dan entitas anak.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat dari perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Exposure Perusahaan dan entitas anak terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan, tersedia untuk dijual, dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. Perusahaan dan Entitas anak melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Perusahaan dan entitas anak.

Berikut adalah tabel rata-rata tingkat bunga/bagi hasil pengembangan dana JHT per tahun untuk aset dan liabilitas yang penting untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013:

	2013
Aset	
Saham	16,42%
Reksa dana	10,03%
Obligasi	9,87%
	6,84%
Liabilitas	
Liabilitas JHT	8,68%
Cadangan Teknis	8,00%

Perusahaan menggunakan *Security Market Line* (SML) dan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga dan pergerakan suku bunga terhadap liabilitas dan ekuitas. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut antara lain adalah nilai IHSG dan *risk free rate* berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012.

Analisis sensitivitas suku bunga dan harga efek per 31 Desember 2013:

	2013 Rata - rata
Sensitivitas MTM: ∆100 poin IHSG	2,19%
SPE - Risiko Liabilitas	26,09%
SPE - Risiko Ekuitas	49,01%

* MTM; Mark to Market - SPE; Selisih Penilaian Efek

d. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki perusahaan maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi), maupun potensi peristiwa ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset *liquid* yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi).

Risiko likuiditas yang terkait aktifitas operasional non-investasi terdapat dalam aktifitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kewajiban Perusahaan untuk membayarkan jaminan hari tua kepada peserta diatur dalam bagian keempat pasal 14 Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2009 tentang perubahan keenam atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial. Kedua regulasi ini mengatur bahwa JHT dapat dibayarkan kepada tenaga kerja saat mencapai usia 55 tahun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia dan atau berhenti bekerja sebelum mencapai usia 55 tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 tahun serta telah melewati masa tunggu 1 bulan.

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, perusahaan dan entitas anak mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, perusahaan relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih likuid dibandingkan dengan kewajibannya.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar per 31 Desember 2013:

		31 Desember 2013				
		Nilai Tercatat	≤ 1 Bulan	1 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan
Aset Keuangan						
Deposito	JHT	36.015.899.000.000	6.887.113.962.544	22.850.290.966.305	6.278.216.198.338	277.872.813
	JKK	1.358.214.000.000	259.723.479.442	861.719.017.329	236.761.024.225	10.479.004
	JKM	446.090.000.000	85.303.234.206	283.021.848.133	77.761.475.950	3.441.710
	JPK	290.500.000.000	55.550.650.176	184.307.756.019	50.639.352.515	2.241.289
	BPJS	2.069.293.691.000	395.699.173.631	1.312.863.603.213	360.714.948.972	15.965.184
	Total	**40.179.996.691.000**	**7.683.390.500.000**	**25.492.203.191.000**	**7.004.093.000.000**	**310.000.000**
Saham	JHT	23.447.285.053.660	8.910.042.243.489	8.217.501.972.356	6.319.740.837.814	--
	JKK	4.052.975.658.920	1.540.143.528.352	1.420.434.621.529	1.092.397.509.039	--
	JKM	1.213.894.320.841	461.283.669.008	425.430.021.127	327.180.630.706	--
	JPK	--	--	--	--	--
	BPJS	3.097.235.191.439	1.176.959.137.512	1.085.479.032.487	834.797.021.440	--
	Total	**31.811.390.224.860**	**12.088.428.578.360**	**11.148.845.647.500**	**8.574.115.999.000**	**--**
Obligasi	JHT	55.136.875.221.556	3.470.760.343.031	1.814.373.199.082	1.701.708.131.610	48.150.033.547.832
	JKK	1.878.075.711.084	118.221.257.063	61.801.294.004	57.963.689.391	1.640.089.470.625
	JKM	569.025.237.670	35.819.045.261	18.724.748.849	17.562.019.432	496.919.424.129
	JPK	--	--	--	--	--
	BPJS	1.432.447.895.461	90.169.842.398	47.137.148.418	44.210.126.563	1.250.930.778.083
	Total	**59.016.424.065.771**	**3.714.970.487.753**	**1.942.036.390.353**	**1.821.443.966.995**	**51.537.973.220.670**
Sukuk	JHT	5.592.911.678.126	87.237.338.935	104.271.305.140	--	5.401.403.034.053
	JKK	96.676.000.000	1.507.936.736	1.802.376.522	--	93.365.686.743
	JKM	30.215.000.000	471.288.722	563.312.576	--	29.180.398.702
	JPK	--	--	--	--	--
	BPJS	73.109.000.000	1.140.342.451	1.363.005.763	--	70.605.651.788
	Total	**5.792.911.678.126**	**90.356.906.844**	**108.000.000.000**	**--**	**5.594.554.771.284**
Reksadana	JHT	10.599.347.858.624	2.669.296.546.552	6.219.260.721.665	1.710.790.590.407	--
	JKK	581.303.572.715	146.393.121.524	341.084.991.772	93.825.459.418	--
	JKM	138.385.558.335	34.850.454.753	81.198.945.339	22.336.158.243	--
	JPK	--	--	--	--	--
	BPJS	448.051.614.012	112.835.491.571	262.898.231.238	72.317.891.204	--
	Total	**11.767.088.603.686**	**2.963.375.614.400**	**6.904.442.890.014**	**1.899.270.099.272**	**--**
KIK-EBA	JHT	100.000.000.000	--	--	--	100.000.000.000
	JKK	44.390.501.674	--	--	--	44.390.501.674
	JKM	3.976.815.202	--	--	--	3.976.815.202
	JPK	--	--	--	--	-
	BPJS	95.555.642.529	--	--	--	95.555.642.529
	Total	**243.922.959.405**	**--**	**--**	**--**	**243.922.959.405**
Total		**148.811.734.222.848**	**26.540.522.087.357**	**45.595.528.118.867**	**19.298.923.065.267**	**57.376.760.951.359**

		31 Desember 2013				
		Nilai Tercatat	≤ 1 Bulan	1 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan
Liabilitas Keuangan						
Non JHT	JKK	2.911.499.059	2.911.499.059	--	--	--
	JKM	5.512.693.830	5.512.693.830	--	--	--
	JPK	--	--	--	--	--
	BPJS	--	--	--	--	--
	Total	**8.424.192.889**	**8.424.192.889**	--	--	--
Diestimasi Non JHT	JKK	243.324.770	--	243.324.770	--	--
	JKM	3.255.404	--	3.255.404	--	--
	JPK	58.729.201.217	--	58.729.201.217	--	--
	BPJS	--	--	--	--	--
	Total	**58.975.781.391**	--	**58.975.781.391**	--	--
Belum Dilaporkan Non JHT	JKK	86.099.610.107	--	--	--	86.099.610.107
	JKM	60.435.676.802	--	--	--	60.435.676.802
	JPK	29.476.698.075	--	--	--	29.476.698.075
	BPJS	--	--	--	--	--
	Total	**176.011.984.984**	--	--	--	**176.011.984.984**
Cadangan Teknis	JKK	8.601.796.360.623	--	--	--	8.601.796.360.623
	JKM	2.556.549.692.589	--	--	--	2.556.549.692.589
	JPK	322.649.046.412	--	--	--	322.649.046.412
	BPJS	--	--	--	--	--
	Total	**11.480.995.099.624**	--	--	--	**11.480.995.099.624**
JHT						
JHT Siap bayar	JHT	1.862.173.192	1.862.173.192	--	--	--
JHT Jatuh Tempo	JHT	9.302.034.953.146	9.302.034.953.146	--	--	--
JHT Kurang Bayar	JHT	35.807.989.482	35.807.989.482	--	--	--
JHT Sesuai RSJHT	JHT	125.357.753.508.487	328.612.047.519	1.643.060.237.597	1.971.672.285.117	121.414.408.938.254
Total		**146.421.865.683.195**	**9.676.741.356.228**	**1.702.036.018.988**	**1.971.672.285.117**	**133.071.416.022.862**

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan, perusahaan melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitanya.

e. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/ upaya pencapaian kerja, baik terkait aktivitas investasi maupun non-investasi dalam kurun 1 (satu) tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum penyebab risiko operasional Perusahaan masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan SOP secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi (IT). Disamping itu, Perusahaan juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Terkait dengan mitigasi risiko operasional dan risiko-risiko lainnya, Perusahaan secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), pengembangan infrastruktur dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis COSO-ERM, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko korporasi sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*/RBA) disamping itu Perusahaan terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan Jamsostek sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas perusahaan melalui sosialisasi, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai *risk-owner* memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan efektif.

4. Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas	--	--	--	--	73.968.100	73.968.100
Bank	245.523.315.410	8.443.681.712	29.021.570.363	76.968.776.219	35.525.338.289	395.482.681.993
Deposito Berjangka	--	--	--	--	259.500.000.000	259.500.000.000
DOC Non Investasi	486.000.000.000	--	--	--	--	486.000.000.000
Total	**731.523.315.410**	**8.443.681.712**	**29.021.570.363**	**76.968.776.219**	**295.099.306.389**	**1.141.056.650.093**

Jangka Waktu Deposito Berjangka	≤ 3 bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	6,00% - 9,00%

5. Bank Investasi

Akun ini merupakan saldo kas dalam bentuk giro yang ditujukan untuk tujuan investasi per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Bank Investasi	6.776.635.392	2.892.879.555	--	--	116.010.675	9.785.525.622
Total	**6.776.635.392**	**2.892.879.555**	**--**	**--**	**116.010.675**	**9.785.525.622**

6. Deposito Berjangka

Akun ini merupakan penanaman dana per 31 Desember 2013 dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi						
Entitas Berelasi dengan Pemerintah						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.251.000.000.000	111.916.000.000	23.000.000.000	--	138.719.000.000	4.524.635.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.907.500.000.000	271.415.000.000	73.210.000.000	19.050.000.000	177.918.000.000	4.449.093.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.850.174.000.000	298.030.000.000	173.960.000.000	14.000.000.000	228.389.000.000	4.564.553.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.344.275.000.000	338.499.000.000	108.695.000.000	107.850.000.000	309.607.300.000	3.208.926.300.000
PT Bank Syariah Mandiri	743.500.000.000	1.000.000.000	--	--	--	744.500.000.000
	15.096.449.000.000	1.020.860.000.000	378.865.000.000	140.900.000.000	854.633.300.000	17.491.707.300.000

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga						
PT Bank Pembangunan Daerah	14.505.700.000.000	64.351.000.000	35.500.000.000	12.000.000.000	956.784.791.000	15.574.335.791.000
PT Bank Muamalat	2.010.800.000.000	192.805.000.000	5.500.000.000	7.500.000.000	36.000.000.000	2.252.605.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	1.901.950.000.000	24.748.000.000	23.225.000.000	114.100.000.000	221.375.600.000	2.285.398.600.000
PT Bank International Indonesia Tbk	1.496.500.000.000	42.950.000.000	3.000.000.000	16.000.000.000	--	1.558.450.000.000
PT Bank BTPN	548.000.000.000	--	--	--	500.000.000	548.500.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	456.500.000.000	12.500.000.000	--	--	--	469.000.000.000
	20.919.450.000.000	337.354.000.000	67.225.000.000	149.600.000.000	1.214.660.391.000	22.688.289.391.000
Total	**36.015.899.000.000**	**1.358.214.000.000**	**446.090.000.000**	**290.500.000.000**	**2.069.293.691.000**	**40.179.996.691.000**
Jangka Waktu Deposito Berjangka						3 - 12 bulan
Tingkat Bunga Kontraktual Rata-rata						7,20%

7. Saham

Akun ini merupakan penanaman dana per 31 Desember 2013 dalam bentuk saham yang dikelompokkan dalam Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Tersedia Untuk Dijual dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	392.511.200.000	54.797.348.556	16.432.059.351	--	40.970.592.093	504.711.200.000
Tersedia Untuk Dijual	23.054.773.853.660	3.998.178.310.364	1.197.462.261.490	--	3.056.264.599.346	31.306.679.024.860
Total	**23.447.285.053.660**	**4.052.975.658.920**	**1.213.894.320.841**	**--**	**3.097.235.191.439**	**31.811.390.224.860**

a. Rincian Saham yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Laba Rugi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013			
	Total Saham (Lembar)	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai tercatat Rp
Dana JHT				
Pihak Berelasi				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	12.500.000	63.718.500.000	(8.093.500.000)	55.625.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.000.000	77.449.450.000	(7.249.450.000)	70.200.000.000
	21.500.000	141.167.950.000	(15.342.950.000)	125.825.000.000
Pihak Ketiga				
PT Adaro Energy Tbk	53.500.000	90.311.147.219	(32.531.147.219)	57.780.000.000
PT Astra International Tbk	30.721.500	238.526.772.613	(29.620.572.613)	208.906.200.000
	84.221.500	328.837.919.832	(62.151.719.832)	266.686.200.000
Total JHT	**105.721.500**	**470.005.869.832**	**(77.494.669.832)**	**392.511.200.000**
Dana JKK				
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	8.058.434	61.112.379.633	(6.315.031.077)	54.797.348.556
Total JKK	**8.058.434**	**61.112.379.633**	**(6.315.031.077)**	**54.797.348.556**
Dana JKM				
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	2.416.479	18.325.741.953	(1.893.682.602)	16.432.059.351
Total JKM	**2.416.479**	**18.325.741.953**	**(1.893.682.602)**	**16.432.059.351**
Dana BPJS Konsolisasi				
PT Astra International Tbk	6.025.087	45.692.178.414	(4.721.586.321)	40.970.592.093
Total BPJS Konsolidasi	**6.025.087**	**45.692.178.414**	**(4.721.586.321)**	**40.970.592.093**
Total Saham FVTPL	**122.221.500**	**595.136.169.832**	**(90.424.969.832)**	**504.711.200.000**

b. Rincian Saham yang diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk Dijual adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2013		
	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
	Rp	Rp	Rp
Dana JHT			
Pihak Berelasi			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.565.427.555.002	(135.539.528.202)	2.429.888.026.800
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.226.374.796.031	(44.605.596.031)	2.181.769.200.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1.982.103.300.899	(300.098.975.899)	1.682.004.325.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.526.648.958.855	(47.908.855)	1.526.601.050.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.308.048.816.632	(91.740.516.632)	1.216.308.300.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.219.695.352.027	(22.432.317.627)	1.197.263.034.400
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	773.192.041.000	(77.781.116.000)	695.410.925.000
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	829.302.067.865	(287.535.667.865)	541.766.400.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	501.791.809.872	(272.322.284.872)	229.469.525.000
PT Timah (Persero) Tbk	225.189.551.120	(44.788.811.120)	180.400.740.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	208.356.806.369	(62.287.998.869)	146.068.807.500
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	203.344.623.425	(91.246.943.465)	112.097.679.960
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	190.590.514.800	(79.390.249.800)	111.200.265.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	107.078.172.800	(45.920.922.800)	61.157.250.000
	13.867.144.366.697	(1.555.738.838.037)	12.311.405.528.660
Pihak Ketiga			
PT Astra International Tbk	2.512.505.858.509	79.059.141.491	2.591.565.000.000
PT United Tractors Tbk	1.480.491.759.828	(137.790.259.828)	1.342.701.500.000
PT Bank Central Asia Tbk	1.271.198.295.227	64.321.454.773	1.335.519.750.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	1.161.947.811.062	(30.686.386.062)	1.131.261.425.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1.017.076.640.783	47.959.909.217	1.065.036.550.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	818.898.931.404	(97.045.491.404)	721.853.440.000
PT Adaro Energy Tbk	1.032.784.064.642	(444.064.184.642)	588.719.880.000
PT Kalbe Farma Tbk	529.262.426.229	57.979.873.771	587.242.300.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	508.769.146.589	(136.145.896.589)	372.623.250.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	368.394.567.627	(74.301.362.627)	294.093.205.000
PT Vale Indonesia Tbk	471.359.196.930	(224.376.396.930)	246.982.800.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	193.424.539.806	46.323.535.194	239.748.075.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	176.350.628.800	(63.013.898.800)	113.336.730.000
PT Bank Danamon Tbk	98.501.936.130	(30.375.116.130)	68.126.820.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	28.069.166.935	12.549.433.065	40.618.600.000
PT Unilever Indonesia Tbk	2.775.932.255	1.163.067.745	3.939.000.000
	11.671.810.902.756	(928.442.577.756)	10.743.368.325.000
Total JHT	**25.538.955.269.453**	**(2.484.181.415.793)**	**23.054.773.853.660**

	31 Desember 2013		
	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Dana JKK			
Pihak Berelasi			
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	383.561.246.773	(139.939.768)	383.421.307.005
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	321.282.288.218	308.299.466	321.590.587.684
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	336.202.731.174	(45.911.694.477)	290.291.036.697
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	302.246.292.280	(24.103.124.234)	278.143.168.046
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	200.322.312.183	111.919.788	200.434.231.971
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	210.434.163.007	(18.834.313.284)	191.599.849.723
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	190.116.694.095	(2.469.213.457)	187.647.480.638
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	153.727.381.068	(43.214.789.053)	110.512.592.015
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	193.198.384.935	(107.345.102.470)	85.853.282.465
PT Timah (Persero) Tbk	49.761.677.211	(9.646.202.566)	40.115.474.645
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	43.075.436.548	(18.238.696.779)	24.836.739.769
	2.383.928.607.492	(269.482.856.834)	2.114.445.750.658
Pihak Ketiga			
PT Astra International Tbk	536.595.352.749	3.253.569.431	539.848.922.180
PT United Tractors Tbk	344.669.549.781	(27.342.059.116)	317.327.490.665
PT Adaro Energy Tbk	345.758.095.187	(138.788.723.245)	206.969.371.942
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	165.600.035.036	4.403.764.958	170.003.799.994
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	172.305.319.819	(30.312.218.100)	141.993.101.719
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	104.878.291.232	7.753.367.710	112.631.658.942
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	124.339.922.810	(37.880.108.733)	86.459.814.077
PT Vale Indonesia Tbk	149.922.433.145	(69.725.772.969)	80.196.660.176
PT Bumi Serpong Damai Tbk	90.986.049.975	(11.286.237.388)	79.699.812.587
PT Bank Central Asia Tbk	65.050.099.957	8.951.496.462	74.001.596.419
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	38.083.039.809	(12.116.342.564)	25.966.697.245
PT Kalbe Farma Tbk	19.494.059.274	4.999.021.878	24.493.081.152
PT Bank Danamon Tbk	21.993.820.157	(6.529.528.641)	15.464.291.516
PT Astra Agro Lestari Tbk	1.935.287.573	939.408.034	2.874.695.607
PT Leyand International Tbk	8.187.928.409	(5.544.397.237)	2.643.531.172
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	2.228.452.307	194.385.385	2.422.837.692
PT Unilever Indonesia Tbk	421.831.688	313.364.933	735.196.621
	2.192.449.568.908	(308.717.009.202)	1.883.732.559.706
Total JKK	**4.576.378.176.400**	**(578.199.866.036)**	**3.998.178.310.364**
Dana JKM			
Pihak Berelasi			
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	115.545.146.858	368.537.810	115.913.684.668
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	95.037.502.322	77.028.324	95.114.530.646
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	99.414.295.788	(13.521.579.262)	85.892.716.526
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75.918.502.909	(6.481.477.789)	69.437.025.120
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	57.559.989.045	(484.954.434)	57.075.034.611
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	61.715.350.271	(5.231.479.809)	56.483.870.462
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	53.659.390.655	831.145.313	54.490.535.968
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	47.620.499.154	(13.393.108.313)	34.227.390.841
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	60.380.936.380	(33.548.923.347)	26.832.013.033
PT Timah (Persero) Tbk	15.552.183.360	(3.014.759.945)	12.537.423.415
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	13.462.509.849	(5.700.200.734)	7.762.309.115
	695.866.306.591	(80.099.772.186)	615.766.534.405

	31 Desember 2013		
	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Ketiga			
PT Astra International Tbk	164.439.436.681	1.325.154.651	165.764.591.332
PT United Tractors Tbk	107.720.728.287	(8.545.304.802)	99.175.423.485
PT Adaro Energy Tbk	106.317.258.617	(42.774.786.765)	63.542.471.852
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	50.423.320.939	1.523.070.369	51.946.391.308
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	53.400.756.677	(9.417.209.166)	43.983.547.511
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	32.409.115.261	2.474.383.803	34.883.499.064
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	38.554.967.234	(11.773.536.694)	26.781.430.540
PT Vale Indonesia Tbk	46.855.759.700	(21.791.629.000)	25.064.130.700
PT Bumi Serpong Damai Tbk	27.753.444.881	(3.644.693.660)	24.108.751.221
PT Bank Central Asia Tbk	20.398.239.371	2.975.974.224	23.374.213.595
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	11.902.220.086	(3.786.761.155)	8.115.458.931
PT Kalbe Farma Tbk	5.460.323.617	1.910.785.956	7.371.109.573
PT Bank Danamon Tbk	6.873.801.369	(2.040.695.185)	4.833.106.184
PT Astra Agro Lestari Tbk	561.630.297	326.311.231	887.941.528
PT Leyand International Tbk	2.559.000.504	(1.732.808.912)	826.191.592
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	739.044.173	68.613.138	807.657.311
PT Unilever Indonesia Tbk	131.858.214	97.953.144	229.811.358
	676.500.905.908	(94.805.178.823)	581.695.727.085
Total JKM	**1.372.367.212.499**	**(174.904.951.009)**	**1.197.462.261.490**
Dana BPJS Konsolidasi			
Pihak Berelasi			
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	285.105.096.658	(931.288.331)	284.173.808.327
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	234.241.361.318	683.475.352	234.924.836.670
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	255.231.294.862	(21.149.833.428)	234.081.461.434
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	261.940.307.162	(36.653.160.385)	225.287.146.777
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	151.316.442.000	(553.609.939)	150.762.832.061
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	157.938.135.945	(14.095.568.630)	143.842.567.315
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	145.059.148.212	(2.120.081.611)	142.939.066.601
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	120.348.731.378	(33.770.214.234)	86.578.517.144
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	146.099.796.865	(81.176.132.363)	64.923.664.502
PT Timah (Persero) Tbk	37.630.599.031	(7.294.617.091)	30.335.981.940
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	32.574.353.603	(13.792.402.487)	18.781.951.116
	1.827.485.267.034	(210.853.433.147)	1.616.631.833.887

	31 Desember 2013		
	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga			
PT Astra International Tbk	417.214.038.707	2.560.411.781	419.774.450.488
PT United Tractors Tbk	260.644.785.563	(20.676.514.713)	239.968.270.850
PT Adaro Energy Tbk	262.811.382.009	(105.279.265.803)	157.532.116.206
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	131.238.954.035	2.721.354.663	133.960.308.698
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	129.029.717.222	(22.672.271.452)	106.357.445.770
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	82.499.125.352	5.058.666.642	87.557.791.994
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	94.556.774.739	(28.746.769.356)	65.810.005.383
PT Vale Indonesia Tbk	113.373.810.867	(52.727.776.743)	60.646.034.124
PT Bumi Serpong Damai Tbk	66.693.154.869	(8.370.518.677)	58.322.636.192
PT Bank Central Asia Tbk	46.415.127.823	6.344.612.163	52.759.739.986
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	28.799.021.484	(9.162.577.660)	19.636.443.824
PT Kalbe Farma Tbk	14.784.657.749	3.946.871.526	18.731.529.275
PT Bank Danamon Tbk	16.632.087.772	(4.937.736.722)	11.694.351.050
PT Astra Agro Lestari Tbk	1.609.468.587	740.644.278	2.350.112.865
PT Leyand International Tbk	6.191.846.086	(4.192.764.350)	1.999.081.736
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	1.943.964.667	32.490.330	1.976.454.997
PT Unilever Indonesia Tbk	319.009.972	236.982.049	555.992.021
	1.674.756.927.503	(235.124.162.044)	1.439.632.765.459
Total BPJS Konsolidasi	**3.502.242.194.537**	**(445.977.595.191)**	**3.056.264.599.346**
Total Saham AFS	**34.989.942.852.889**	**(3.683.263.828.029)**	**31.306.679.024.860**

8. Reksadana

Akun ini merupakan penanaman dana per 31 Desember 2013 dalam bentuk unit penyertaan reksadana yang dikelompokan dalam kelompok Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Tersedia Untuk Dijual dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2013				
	JHT	JKK	JKM	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	24.364.096.165	--	--	--	24.364.096.165
Tersedia Untuk Dijual	10.574.983.762.460	581.303.572.715	138.385.558.335	448.051.614.011	11.742.724.507.521
Total	**10.599.347.858.625**	**581.303.572.715**	**138.385.558.335**	**448.051.614.011**	**11.767.088.603.686**

a. Rincian Reksadana yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Laba Rugi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013			
	Total Unit	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai tercatat
		Rp	Rp	Rp
JHT				
Panin Dana Maksima	418.028	25.000.000.000	635.903.835	24.364.096.165
Total Reksadana FVTPL	**418.028**	**25.000.000.000**	**635.903.835**	**24.364.096.165**

b. Rincian Reksadana yang diklasifikasikan sebagai Tersedia Untuk Dijual adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013		
	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Dana JHT			
Panin Dana Maksima	1.489.920.717.074	(191.725.723.998)	1.298.194.993.076
BNP Paribas Ekuitas	1.262.927.726.130	(118.517.287.755)	1.144.410.438.375
BNP Paribas Solaris	791.498.438.747	(107.926.659.449)	683.571.779.298
Panin Dana Prima	584.238.470.061	(43.099.513.252)	541.138.956.809
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	618.123.963.109	(99.241.542.621)	518.882.420.488
Schroder Dana Mantap Plus II	570.000.000.000	(58.562.649.886)	511.437.350.114
Schroder Dana Prestasi Plus	527.636.761.746	(47.705.552.243)	479.931.209.503
First State Indoequity Sectoral	503.815.256.360	(34.230.663.362)	469.584.592.998
Syailendra Equity Opportunity	550.000.000.000	(85.571.187.583)	464.428.812.417
Danareksa Mawar Konsumer 10	516.035.006.181	(61.855.380.520)	454.179.625.661
Insight Scholarship Fund	450.000.000.000	1.548.000.000	451.548.000.000
BNP Paribas Prima II	408.524.101.522	(55.677.881.996)	352.846.219.526
Dana Ekuitas Prima	334.308.634.756	(38.000.854.877)	296.307.779.879
Manulife Syariah Sektoral Amanah	301.038.082.120	(11.946.822.914)	289.091.259.206
Mandiri Investa Equity Movement	325.000.000.000	(81.710.212.168)	243.289.787.832
Dana Ekuitas Andalan	281.651.540.436	(47.662.624.739)	233.988.915.697
Manulife Saham Andalan	241.532.210.189	(42.098.504.744)	199.433.705.445
Schroder Dana Prestasi	200.103.859.505	(9.172.886.214)	190.930.973.291
BNP Paribas Infrastruktur Plus	198.223.047.431	(7.334.796.273)	190.888.251.158
Schroder Dana Istimewa	177.734.619.877	2.281.040.571	180.015.660.448
Syailendra Balance Opportunity	200.000.000.000	(21.951.910.520)	178.048.089.480
BNP Paribas Pesona	201.320.264.544	(43.415.483.530)	157.904.781.014
Panin Dana Bersama Plus	150.000.000.000	(3.398.205.530)	146.601.794.470
Makara Prima	141.540.565.787	(7.881.668.534)	133.658.897.253
Mandiri Investa Atraktif	148.659.049.571	(20.909.982.872)	127.749.066.699
Manulife Dana Tumbuh Berimbang	114.835.129.297	(8.361.988.418)	106.473.140.879
Danareksa Mawar Fokus 10	115.085.754.430	(17.160.231.754)	97.925.522.676
Sam Indonesian Equity Fund	100.000.000.000	(7.952.256.876)	92.047.743.124
Trim Kapital	98.603.495.293	(8.268.471.205)	90.335.024.088
Bahana Dana Infrastruktur	75.054.595.060	(5.496.089.155)	69.558.505.905
Trim Syariah Saham	75.011.653.600	(7.038.668.962)	67.972.984.638
Manulife Institutional Equity Fund	80.000.000.000	(14.812.820.202)	65.187.179.798
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis	50.000.000.000	(3.614.276.805)	46.385.723.195
Mandiri Investa UGM	687.338.459	(70.949.162)	616.389.297
Danareksa Indeks Syariah	206.403.763	4.092.915	210.496.678
First State Multistrategy Fund	100.851.245	7.874.121	108.725.366
BNP Paribas Spektra	96.979.837	1.986.841	98.966.678
Total JHT	**11.883.514.516.130**	**(1.308.530.753.671)**	**10.574.983.762.459**

	31 Desember 2013		
	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
	Rp	Rp	Rp
Dana JKK			
Panin Dana Maksima	108.195.446.459	(18.013.887.248)	90.181.559.211
Manulife Saham Andalan	83.603.374.452	(5.915.592.332)	77.687.782.120
Danareksa Mawar Konsumer 10	90.239.577.492	(12.711.547.848)	77.528.029.644
Schroder Dana Istimewa	82.939.159.739	(6.070.255.093)	76.868.904.646
BNP Paribas Solaris	49.574.278.703	(4.952.898.110)	44.621.380.593
BNP Paribas Ekuitas	48.679.518.126	(6.862.835.240)	41.816.682.886
BNP Paribas Pesona	48.447.044.478	(7.105.362.041)	41.341.682.437
Syailendra Equity Opportunity	48.012.604.734	(10.038.767.419)	37.973.837.315
Panin Dana Prima	27.612.707.811	(342.252.315)	27.270.455.496
Mandiri Investa Equity Movement	29.043.400.803	(6.172.521.176)	22.870.879.627
First State Indoequity Sectoral	24.698.978.113	(2.180.964.611)	22.518.013.502
Danareksa Mawar Fokus 10	16.362.424.698	(3.313.349.525)	13.049.075.173
Trim Kapital	6.306.292.562	(367.810.049)	5.938.482.513
Schroder Dana Prestasi Plus	725.748.498	68.078.210	793.826.708
Schroder Dana Prestasi	702.852.465	21.233.035	724.085.500
Dana Ekuitas Andalan	79.427.129	(3.356.201)	76.070.928
First State Multistrategy Fund	37.080.564	5.743.852	42.824.416
Total JKK	**665.259.916.826**	**(83.956.344.111)**	**581.303.572.715**
Dana JKM			
Panin Dana Maksima	30.861.378.414	(5.066.591.565)	25.794.786.849
Danareksa Mawar Konsumer 10	27.155.043.888	(3.842.484.573)	23.312.559.315
Schroder Dana Istimewa	23.036.827.924	(1.767.674.336)	21.269.153.588
BNP Paribas Solaris	14.734.895.473	(1.471.976.182)	13.262.919.291
Syailendra Equity Opportunity	14.684.260.092	(3.070.274.412)	11.613.985.680
BNP Paribas Ekuitas	12.710.381.133	(1.789.895.469)	10.920.485.664
BNP Paribas Pesona	12.637.725.372	(1.853.087.964)	10.784.637.408
First State Indoequity Sectoral	7.427.141.419	(655.711.093)	6.771.430.326
Mandiri Investa Equity Movement	8.146.689.906	(1.745.133.925)	6.401.555.981
Danareksa Mawar Fokus 10	5.306.901.713	(1.074.671.599)	4.232.230.114
Trim Kapital	1.906.709.185	(103.914.110)	1.802.795.075
Panin Dana Prima	1.924.439.326	(172.010.145)	1.752.429.181
Schroder Dana Prestasi Plus	226.820.596	21.276.710	248.097.306
Manulife Saham Andalan	183.681.241	3.228.705	186.909.946
Dana Ekuitas Andalan	18.503.817	(305.263)	18.198.554
First State Multistrategy Fund	11.588.912	1.795.145	13.384.057
Total JKM	**160.972.988.411**	**(22.587.430.076)**	**138.385.558.335**

	31 Desember 2013		
	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
	Rp	Rp	Rp
Dana BPJS Konsolidasi			
Panin Dana Maksima	125.989.561.040	(14.515.739.293)	111.473.821.747
Danareksa Mawar Konsumer 10	67.712.714.260	(9.656.506.259)	58.056.208.001
Schroder Dana Istimewa	62.365.660.844	(4.339.668.256)	58.025.992.588
BNP Paribas Ekuitas	39.144.201.388	(5.520.422.116)	33.623.779.272
BNP Paribas Pesona	38.968.400.988	(5.715.565.895)	33.252.835.093
BNP Paribas Solaris	35.842.685.824	(3.580.631.200)	32.262.054.624
Syailendra Equity Opportunity	37.303.135.174	(7.799.566.387)	29.503.568.787
Panin Dana Prima	25.233.730.379	(400.744.569)	24.832.985.810
Mandiri Investa Equity Movement	22.809.909.291	(4.834.461.555)	17.975.447.736
First State Indoequity Sectoral	18.056.871.358	(1.594.201.630)	16.462.669.728
Manulife Saham Andalan	17.428.784.307	(1.204.584.420)	16.224.199.887
Danareksa Mawar Fokus 10	13.387.209.629	(2.711.072.639)	10.676.136.990
Trim Kapital	5.190.533.151	(350.617.689)	4.839.915.462
Schroder Dana Prestasi Plus	548.822.960	51.481.863	600.304.823
Schroder Dana Prestasi	143.318.735	4.839.522	148.158.257
Dana Ekuitas Andalan	64.172.087	(3.021.407)	61.150.680
First State Multistrategy Fund	28.040.932	4.343.595	32.384.527
Total BPJS Konsolidasi	**510.217.752.347**	**(62.166.138.335)**	**448.051.614.012**
Total Reksadana AFS	**13.219.965.173.714**	**(1.477.240.666.193)**	**11.742.724.507.521**

9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima program dan Program DPKP per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
JHT						
Bunga Obligasi	1.083.502.788.720	--	--	--	--	1.083.502.788.720
Bagi Hasil Sukuk	159.981.612.267	--	--	--	--	159.981.612.267
Bunga Deposito	123.018.186.181	--	--	--	--	123.018.186.181
Dividen Saham	9.158.748.301	--	--	--	--	9.158.748.301
Bunga KIK - EBA	290.277.777	--	--	--	--	290.277.777
	1.375.951.613.246	--	--	--	--	1.375.951.613.246
Non JHT						
Bunga Obligasi	--	21.122.708.641	6.323.078.106	--	15.760.168.475	43.205.955.222
Bunga Deposito	--	2.282.862.433	680.636.333	125.047.222	4.099.278.064	7.187.824.052
Dividen Saham	--	3.002.151.970	971.022.487	--	1.181.188.228	5.154.362.685
Bagi Hasil Sukuk	--	1.038.348.244	324.493.941	--	785.225.871	2.148.068.056
Bunga KIK - EBA	--	32.491.381	2.910.808	--	69.941.422	105.343.611
	--	27.478.562.669	8.302.141.675	125.047.222	21.895.802.060	57.801.553.626
Lain-lain						
Pendapatan Program DPKP	--	--	--	--	124.678.669.781	124.678.669.781
Bunga Deposito On Call Non Investasi	755.400.000	--	--	--	--	755.400.000
	755.400.000	--	--	--	124.678.669.781	125.434.069.781
Total	**1.376.707.013.246**	**27.478.562.669**	**8.302.141.675**	**125.047.222**	**146.574.471.841**	**1.559.187.236.653**

10. Piutang Jatuh Tempo

Akun ini merupakan piutang bunga deposito dan obligasi yang sudah jatuh tempo dan sampai dengan tanggal laporan belum diterima.

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Piutang Pendapatan Deposito - JHT	3.341.623.513	--	--	--	--	3.341.623.513
Piutang Pendapatan Deposito - Jasa Konstruksi	--	--	--	--	1.223.779.729	1.223.779.729
Piutang Pendapatan Deposito - TK Mandiri	--	--	--	--	72.221.048	72.221.048
Piutang Pendapatan Deposito - Non JHT	--	657.791	--	--	1.057.219	1.715.010
Total	**3.341.623.513**	**657.791**	**--**	**--**	**1.297.057.996**	**4.639.339.300**

11. Piutang Investasi

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari transaksi atas penjualan properti investasi dan penjualan saham, yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya (T+3) dan akan selesai pada bulan berikutnya (*outstanding transaction*).

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Piutang Penjualan Saham	39.030.647.075	31.318.626.797	10.011.670.581	--	12.858.362.558	93.219.307.011
Piutang Sewa Gedung	13.988.173.480	--	--	--	--	13.988.173.480
Total	**53.018.820.555**	**31.318.626.797**	**10.011.670.581**	**--**	**12.858.362.558**	**107.207.480.491**

12. Uang Muka Kerja Pegawai

Akun ini merupakan persekot kerja Program DPKP untuk keperluan dinas yang belum dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:.

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Persekot Kerja Pegawai	--	--	--	--	11.756.349.377	11.756.349.377
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**11.756.349.377**	**11.756.349.377**

13. Uang Muka Kesejahteraan Peserta

Akun ini merupakan saldo uang muka pembangunan rumah sakit pekerja di Kawasan Berikat Nusantara per 31 Desember 2013. Rumah Sakit tersebut akan diserahterimakan dari PT KBN (Persero) kepada Perusahaan setelah adanya peresmian, setelah terlebih dahulu dilakukan proses audit oleh auditor independen.

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Uang Muka Kesejahteraan Peserta					13.150.812.500	13.150.812.500
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**13.150.812.500**	**13.150.812.500**

14. Beban Dibayar di Muka

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban Sewa Bangunan Kantor	--	--	--	--	9.976.402.144	9.976.402.144
Beban Sewa Lain	--	--	--	--	3.175.968.556	3.175.968.556
Beban Gaji Outsourcing	--	--	--	--	3.165.558.999	3.165.558.999
Beban Sewa Rumah Jabatan	--	--	--	--	2.792.025.459	2.792.025.459
Beban Asuransi	--	--	--	--	1.755.581.520	1.755.581.520
Beban Lain	--	--	--	--	2.620.058.205	2.620.058.205
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**23.485.594.883**	**23.485.594.883**

15. Piutang Iuran Non JHT

Akun ini merupakan saldo piutang iuran program per 31 Desember 2013 yang meliputi JKK, JKM, dan JPK dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Piutang Iuran	--	104.627.047.934	29.511.484.139	83.877.802.574	--	218.016.334.647
	--	**104.627.047.934**	**29.511.484.139**	**83.877.802.574**	**--**	**218.016.334.647**
Penyisihan Penurunan Nilai		(60.744.328.201)	(14.705.704.752)	(40.616.680.311)	--	(116.066.713.264)
	--	(60.744.328.201)	(14.705.704.752)	(40.616.680.311)	--	(116.066.713.264)
Total	**--**	**43.882.719.733**	**14.805.779.387**	**43.261.122.263**	**--**	**101.949.621.383**

Rincian umur piutang iuran program adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Lancar	--	3.284.905.392	178.540.153	--	--	3.463.445.545
Kurang Lancar	--	14.677.848.162	6.138.447.063	17.635.313.883	--	38.451.609.108
Macet	--	86.664.294.380	23.194.496.923	66.242.488.691	--	176.101.279.994
Total	--	104.627.047.934	29.511.484.139	83.877.802.574	--	218.016.334.647
Penyisihan Penurunan Nilai	--	(60.744.328.201)	(14.705.704.752)	(40.616.680.311)	--	(116.066.713.264)
Total	**--**	**43.882.719.733**	**14.805.779.387**	**43.261.122.263**	**--**	**101.949.621.383**

16. Pinjaman Diberikan Program DPKP

Akun ini merupakan pinjaman para peserta Jamsostek atas program Pinjaman DPKP dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kepada peserta per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pinjaman Uang Muka Perumahan	--	--	--	--	562.763.190.784	562.763.190.784
Pinjaman Koperasi Tenaga Kerja	--	--	--	--	21.400.264.360	21.400.264.360
Pinjaman DTMK	--	--	--	--	752.553.910	752.553.910
Pinjaman Provider Pelkes	--	--	--	--	2.417.292.354	2.417.292.354
	--	--	--	--	587.333.301.408	587.333.301.408
Penyisihan Pinjaman Program DPKP	--	--	--	--	(84.085.924.851)	(84.085.924.851)
Penyisihan Pinjaman Perumahan	--	--	--	--	(9.902.372.513)	(9.902.372.513)
Penyisihan Koperasi Tenaga Kerja	--	--	--	--	(652.464.240)	(652.464.240)
Penyisihan DTMK	--	--	--	--	(593.806.696)	(593.806.696)
Penyisihan Provider Pelkes	--	--	--	--	(95.234.568.300)	(95.234.568.300)
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**492.098.733.108**	**492.098.733.108**

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya pinjaman tersebut.

17. Piutang Usaha

Akun ini merupakan piutang usaha entitas anak yang terdiri dari:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga						
TKI Industri Korea	--	--	--	--	6.817.559.700	6.817.559.700
PT Infokom Bina Ardinusa	--	--	--	--	4.492.800.000	4.492.800.000
Taiwan	--	--	--	--	708.433.332	708.433.332
Proyek	--	--	--	--	203.907.519	203.907.519
Mitra Outsourcing	--	--	--	--	192.636.702	192.636.702
Singapura	--	--	--	--	150.207.800	150.207.800
Lain - Lain	--	--	--	--	1.146.011.000	1.146.011.000
	--	--	--	--	13.711.556.053	13.711.556.053
Penyisihan Penurunan Nilai	--	--	--	--	(11.710.219.975)	(11.710.219.975)
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.001.336.078**	**2.001.336.078**

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

18. Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Barang Cetakan	--	--	--	--	2.650.458.010	2.650.458.010
Perlengkapan Komputer Habis Pakai	--	--	--	--	2.467.097.527	2.467.097.527
Alat Tulis Kantor	--	--	--	--	668.807.791	668.807.791
Materai	--	--	--	--	672.223.927	672.223.927
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**6.458.587.255**	**6.458.587.255**

19. KIK - EBA

Akun ini merupakan penempatan dana dalam bentuk KIK-EBA (Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset) per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
KIK - EBA	100.000.000.000	44.390.501.674	3.976.815.202	--	95.555.642.529	243.922.959.405
Total	**100.000.000.000**	**44.390.501.674**	**3.976.815.202**	**--**	**95.555.642.529**	**243.922.959.405**

	2013		
	Nilai Nominal	Biaya Perolehan	Nilai Tercatat
	Rp	Rp	Rp
JHT			
Pihak Berelasi			
Efek Beragunan Aset Danareksa			
BTN 03-KPR Kelas A 2012	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Total JHT	**100.000.000.000**	**--**	**100.000.000.000**
JKK			
Pihak Berelasi			
Efek Beragunan Aset Danareksa			
BTN 04-KPR Kelas A 2012	44.390.501.674	--	44.390.501.674
Total JKK	**44.390.501.674**	**--**	**44.390.501.674**
JKM			
Pihak Berelasi			
Efek Beragunan Aset Danareksa			
BTN 04-KPR Kelas A 2012	3.976.815.202	--	3.976.815.202
Total JKM	**3.976.815.202**	**--**	**3.976.815.202**
BPJS Konsolidasi			
Pihak Berelasi			
Efek Beragunan Aset Danareksa			
BTN 04-KPR Kelas A 2012	95.555.642.529	--	95.555.642.529
Total BPJS Konsolidasi	**95.555.642.529**	**--**	**95.555.642.529**
Total KIK - EBA	**243.922.959.405**	**--**	**243.922.959.405**

20. Sukuk

Akun ini merupakan penanaman dana per 31 Desember 2013 dalam bentuk sukuk yang dikelompokan dalam diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	33.356.906.842	--	--	--	--	33.356.906.842
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	5.559.554.771.284	96.676.000.000	30.215.000.000	--	73.109.000.000	5.759.554.771.284
Total	**5.592.911.678.126**	**96.676.000.000**	**30.215.000.000**	**--**	**73.109.000.000**	**5.792.911.678.126**

a. Rincian sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi adalah sebagai Berikut:

	31 Desember 2013		
	Nilai Nominal Rp	Nilai Perolehan Rp	Nilai Tercatat Rp
JHT			
Pihak Ketiga			
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker 2007	33.356.906.842	33.356.906.842	33.356.906.842
Total JHT FVTPL	**33.356.906.842**	**33.356.906.842**	**33.356.906.842**

Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker tahun 2007 dalam kelompok Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVPL) JHT dengan nominal Rp 40.000.000.000 dinyatakan telah memenuhi syarat penurunan nilai *(permanent decline)* karena kupon yang harus diterima tanggal 5 April 2012 tidak dibayarkan. Dengan menggunakan metode *Discounted Cash Flows (DCF)*, ditetapkan nilai wajar obligasi yang baru yaitu sebesar 83,39% atau Rp 33.356.906.842. Atas penyesuaian ini diakui kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2013 sebesar Rp 6.643.093.158.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 27/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tangal 22 Maret 2013, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) dan perjanjian perdamaian tanggal 13 Maret 2013 telah disahkan dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut. Atas putusan pengadilan tersebut BLTA melaksanakan restrukturisasi kewajiban pembayaran liabilitas BLTA dan anak-anak perusahaannya secara bersama-sama.

Dalam perjanjian perdamaian diputuskan:

Jangka waktu pembayaran Sukuk Ijarah maksimum 10 tahun dimana semua jumlah pembayaran harus dibayarkan seluruhnya pada tanggal 31 Maret 2023;

Pelunasan yang dipercepat berasal dari *cash sweep mechanism*;

Tingkat Cicilan Imbalan Ijarah tertunggak sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2013 sebesar 5% per tahun;

Seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah yang tertunggak dan yang belum dibayarkan sebelum 1 Juli 2012 dihapuskan;

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah tertunggak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2015 akan dikapitalisasi ke sisa Imbalan Ijarah; dan

Khusus Tingkat cicilan imbalan Ijarah sebesar 5% tahun 1-3, sebesar 7% tahun 4-7, sebesar 9% tahun 8-10, pembayaran secara tunai triwulanan (dibayar di belakang periode) dimulai sejak 30 Juni 2015.

b. Rincian sukuk yang diukur pada Yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo terdiri dari:

	31 Desember 2013		
	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
JHT			
Pihak Berelasi			
Sukuk Pemerintah			
PBS-04	2.707.396.000.000	(201.609.303.641)	2.505.786.696.359
SBSN IFR0010	784.997.000.000	77.209.312.663	862.206.312.663
Surat Berharga Syariah Negara I	700.000.000.000	--	700.000.000.000
PBS-005	600.000.000.000	(76.014.621.438)	523.985.378.562
Surat Berharga Syariah Negara-2	300.000.000.000	--	300.000.000.000
SBSN IFR0006	250.000.000.000	576.383.700	250.576.383.700
Total Sukuk Pemerintah	**5.342.393.000.000**	**(199.838.228.716)**	**5.142.554.771.284**
Sukuk Korporasi			
PLN Sukuk Ijarah II TAHUN 2007	94.000.000.000	--	94.000.000.000
PLN Sukuk VB /2010	73.000.000.000	--	73.000.000.000
Syariah Ijarah PLN III 2009 Seri A	57.000.000.000	--	57.000.000.000
Sukuk Syariah Ijarah PLN I / 2006	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Adhi Sukuk Mudharabah I Tahap I 2012	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap II Tahun 2013	10.000.000.000	--	10.000.000.000
Total Sukuk Korporasi	**314.000.000.000**	**--**	**314.000.000.000**
Pihak Ketiga			
Sukuk Korporasi			
Sukuk Ijarah Indosat II/2007	88.000.000.000	--	88.000.000.000
Indosat Ijarah V tahun 2012	15.000.000.000	--	15.000.000.000
Total Sukuk Korporasi	**103.000.000.000**	**--**	**103.000.000.000**
Total JHT	**5.759.393.000.000**	**(199.838.228.716)**	**5.559.554.771.284**
JKK			
Pihak Berelasi			
Sukuk Korporasi			
PLN Sukuk VB /2010	29.003.000.000	--	29.003.000.000
Total Sukuk Korporasi	**29.003.000.000**	**--**	**29.003.000.000**

	31 Desember 2013		
	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Ketiga			
Sukuk Korporasi			
Indosat Ijarah V tahun 2012	24.169.000.000	--	24.169.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	19.335.000.000	--	19.335.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	14.501.000.000	--	14.501.000.000
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II	9.668.000.000	--	9.668.000.000
	67.673.000.000	**--**	**67.673.000.000**
Total JKK	**96.676.000.000**	**--**	**96.676.000.000**
JKM			
Pihak Berelasi			
Sukuk Korporasi			
PLN Sukuk VB /2010	9.064.000.000	--	9.064.000.000
Total Sukuk Korporasi	**9.064.000.000**	**--**	**9.064.000.000**
Pihak Ketiga			
Sukuk Korporasi			
Indosat Ijarah V tahun 2012	7.554.000.000	--	7.554.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	6.043.000.000	--	6.043.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	4.533.000.000	--	4.533.000.000
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II	3.021.000.000	--	3.021.000.000
	21.151.000.000	**--**	**21.151.000.000**
Total JKM	**30.215.000.000**	**--**	**30.215.000.000**
BPJS Konsolidasi			
Pihak Berelasi			
Sukuk Korporasi			
PLN Sukuk VB /2010	21.933.000.000	--	21.933.000.000
Total Sukuk Korporasi	**21.933.000.000**	**--**	**21.933.000.000**
Pihak Ketiga			
Sukuk Korporasi			
Indosat Ijarah V tahun 2012	18.277.000.000	--	18.277.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	14.622.000.000	--	14.622.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	10.966.000.000	--	10.966.000.000
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II	7.311.000.000	--	7.311.000.000
	51.176.000.000	**--**	**51.176.000.000**
Total BPJS Konsolidasi	**73.109.000.000**	**--**	**73.109.000.000**
Total Sukuk HTM	**5.959.393.000.000**	**(199.838.228.716)**	**5.759.554.771.284**

21. Obligasi

Akun ini merupakan penanaman dana per 31 Desember 2013 dalam bentuk obligasi yang dikelompokan dalam Nilai Wajar melalui Laba Rugi, Tersedia Untuk Dijual dan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	1.837.634.995.000	21.810.444.933	6.816.212.679	--	16.493.450.388	1.882.755.103.000
Tersedia Untuk Dijual	1.669.659.089.750	156.871.529.455	48.390.126.124	--	122.071.524.421	1.996.992.269.750
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	51.629.581.136.806	1.699.393.736.696	513.818.898.867	--	1.293.882.920.652	55.136.676.693.021
Total	**55.136.875.221.556**	**1.878.075.711.084**	**569.025.237.670**	**--**	**1.432.447.895.461**	**59.016.424.065.771**

a. Rincian Obligasi yang Diklasifikasikan ke dalam Nilai Wajar melalui Laba Rugi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013				
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui Rp	Nilai Tercatat Rp
JHT					
Obligasi Pemerintah					
Pihak Berelasi					
FR0065	idAAA	1.343.589.000.000	1.371.076.497.494	(615.717.494)	1.370.460.780.000
FR058	idAAA	440.000.000.000	513.928.484.799	(89.328.484.799)	424.600.000.000
		1.783.589.000.000	1.885.004.982.293	(89.944.202.293)	1.795.060.780.000
Obligasi Korporasi					
Pihak Berelasi					
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	30.000.000.000	30.000.000.000	(1.905.900.000)	28.094.100.000
Pihak Ketiga					
BCA Finance Tahap I/2012 seri D	idAA+	15.000.000.000	15.000.000.000	(519.885.000)	14.480.115.000
		45.000.000.000	45.000.000.000	(2.425.785.000)	42.574.215.000
Total Obligasi JHT		**1.828.589.000.000**	**1.930.004.982.293**	**(92.369.987.293)**	**1.837.634.995.000**
JKK					
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Medco Energi Internasional II/09	idAA-	21.269.000.000	21.269.000.000	541.444.933	21.810.444.933
Total Obligasi JKK		**21.269.000.000**	**21.269.000.000**	**541.444.933**	**21.810.444.933**
JKM					
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Medco Energi Internasional II/09	idAA-	6.647.000.000	6.647.000.000	169.212.679	6.816.212.679
Total Obligasi JKM		**6.647.000.000**	**6.647.000.000**	**169.212.679**	**6.816.212.679**
BPJS Konsolidasi					
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Medco Energi Internasional II/09	idAA-	16.084.000.000	16.084.000.000	409.450.388	16.493.450.388
Total Obligasi BPJS Konsolidasi		**16.084.000.000**	**16.084.000.000**	**409.450.388**	**16.493.450.388**
Total Obligasi FVTPL		**1.872.589.000.000**	**1.974.004.982.293**	**(91.249.879.293)**	**1.882.755.103.000**

b. Rincian Obligasi yang Diklasifikasikan sebagai Tersedia Untuk Dijual adalah Sebagai Berikut:

	31 Desember 2013				
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
JHT					
Obligasi Pemerintah					
Pihak Berelasi					
Recap Bonds FR 0056	idAAA	58.000.000.000	9.332.197.537	(11.254.839.537)	56.077.358.000
		58.000.000.000	9.332.197.537	(11.254.839.537)	56.077.358.000
Obligasi Korporasi					
Pihak Berelasi					
Sarana Multigriya Finansial I seri C 2011	idAA	264.000.000.000	90.027.416	(1.631.259.416)	262.458.768.000
Antam Berkelanjutan I seri A 2011	idAA-	180.000.000.000	--	(12.066.300.000)	167.933.700.000
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	idAA	30.000.000.000	2.777.435.356	(2.870.585.356)	29.906.850.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	5.000.000.000	56.911.463	21.628.537	5.078.540.000
		479.000.000.000	2.924.374.235	(16.546.516.235)	465.377.858.000
Pihak Ketiga					
Bank CIMB Niaga I seri B 2011	idAAA	202.500.000.000	1.535.846.977	(7.733.764.477)	196.302.082.500
Federal Intern Finance I Tahap I 2012 seri C	idAA+	200.000.000.000	--	(8.914.600.000)	191.085.400.000
Toyota Astra Financial Service II 2012	idAA	185.000.000.000	--	(4.919.890.000)	180.080.110.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 seri B	idAAA	151.000.000.000	5.374.272.800	(7.249.692.800)	149.124.580.000
Obligasi II Agung Podomoro Land 2012	idA	101.000.000.000	--	(4.825.073.000)	96.174.927.000
Obligasi Medco Energy Int III 2012	idAA-	100.000.000.000	--	(4.730.500.000)	95.269.500.000
Berlian Laju Tanker III Tahun 2007		57.000.000.000	--	--	57.000.000.000
BTPN Berkelanjutan I Tahap I/2011	idAA-	50.000.000.000	--	(69.750.000)	49.930.250.000
Indonesia Exim Bank I seri C (7 tahun) 2011	idAAA	38.000.000.000	2.104.486.082	(4.189.774.082)	35.914.712.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	35.500.000.000	344.544.902	(370.104.902)	35.474.440.000
Federal International Finance XI/2011 seri C	idAA+	25.000.000.000	77.584.089	38.665.911	25.116.250.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri C/2011	idAA+	20.000.000.000	42.536.503	64.623.497	20.107.160.000
Astra Sedaya Finance XI F/2010	idAA+	10.000.000.000	88.386.539	(25.536.539)	10.062.850.000
BCA Finance IV seri D thn.2011	idAAA	10.000.000.000	19.435.089	9.674.911	10.029.110.000
BCA Finance IV seri E thn.2011	idAAA	5.000.000.000	26.929.959	(32.154.959)	4.994.775.000
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	1.000.000.000	11.974.381	(7.839.381)	1.004.135.000
		1.191.000.000.000	9.625.997.321	(42.955.715.821)	1.157.670.281.500
Cadangan Penyisihan					
Berlian Laju Tanker III Tahun 2007		(9.466.407.750)	--	--	(9.466.407.750)
		(9.466.407.750)	--	--	(9.466.407.750)
Total JHT		**1.718.533.592.250**	**21.882.569.093**	**(70.757.071.593)**	**1.669.659.089.750**
JKK					
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Obligasi Toyota Astra Financial Services III B Tahun 2013	idAAA	49.742.000.000	--	(1.371.884.360)	48.370.115.640
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri D	idAA+	46.518.000.000	--	(2.091.867.942)	44.426.132.058
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	34.320.000.000	--	141.913.200	34.461.913.200
Medco Energi Internasional II/09 Seri B	idAA-	24.169.000.000	--	615.270.233	24.784.270.233
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV/2010 Seri E	idAA+	4.834.000.000	--	(4.901.676)	4.829.098.324
Total JKK		**159.583.000.000**	--	**(2.711.470.545)**	**156.871.529.455**
JKM					
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Obligasi Toyota Astra Financial Services III B Tahun 2013	idAAA	15.409.000.000	--	(424.980.220)	14.984.019.780
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri D	idAA+	14.010.000.000	--	(630.015.690)	13.379.984.310
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	10.726.000.000	--	44.352.010	10.770.352.010
Medco Energi Internasional II/09 Seri B	idAA-	7.554.000.000	--	192.302.178	7.746.302.178
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV/2010 Seri E	idAA+	1.511.000.000	--	(1.532.154)	1.509.467.846
Total JKM		**49.210.000.000**	--	**(819.873.876)**	**48.390.126.124**

	31 Desember 2013				
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
BPJS Konsolidasi					
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Obligasi Toyota Astra Financial Services III B Tahun 2013	idAAA	41.849.000.000	--	(1.154.195.420)	40.694.804.580
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri D	idAA+	34.472.000.000	--	(1.550.171.368)	32.921.828.632
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	25.954.000.000	--	107.319.790	26.061.319.790
Medco Energi Internasional II/09 Seri B	idAA-	18.277.000.000	--	465.277.589	18.742.277.589
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV/2010 Seri E	idAA+	3.655.000.000	--	(3.706.170)	3.651.293.830
Total BPJS Konsolidasi		**124.207.000.000**	**--**	**(2.135.475.579)**	**122.071.524.421**
Total Obligasi AFS		**2.051.533.592.250**	**21.882.569.093**	**(76.423.891.593)**	**1.996.992.269.750**

c. Rincian Obligasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo terdiri dari:

	31 Desember 2013			
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Dana JHT				
Obligasi Pemerintah				
Pihak Berelasi				
FR0065	idAAA	3.024.032.000.000	73.281.251.738	3.097.313.251.738
Recap Bonds FR 0044	idAAA	2.968.110.000.000	(230.528.751.955)	2.737.581.248.045
Recap Bonds FR 0050	idAAA	2.459.981.000.000	(10.912.158.338)	2.449.068.841.662
FR058	idAAA	1.935.280.000.000	332.672.286.172	2.267.952.286.172
Recap Bonds FR 0054	idAAA	1.984.541.000.000	177.704.133.816	2.162.245.133.816
Recap Bonds FR 0031	idAAA	1.927.000.000.000	4.318.705.964	1.931.318.705.964
Recap Bonds FR 0040	idAAA	1.608.261.000.000	50.194.542.816	1.658.455.542.816
Recap Bonds FR 0046	idAAA	1.629.026.000.000	(100.298.129.549)	1.528.727.870.451
Recap Bonds FR 0034	idAAA	1.507.500.000.000	10.645.893.037	1.518.145.893.037
Recap Bonds FR 0042	idAAA	1.382.677.000.000	(30.894.173.949)	1.351.782.826.051
Recap Bonds FR 0057	idAAA	1.028.354.000.000	131.153.421.257	1.159.507.421.257
Recap Bonds FR 0052	idAAA	831.000.000.000	294.620.935.615	1.125.620.935.615
Recap Bonds FR 0043	idAAA	1.112.000.000.000	(791.800.704)	1.111.208.199.296
Recap Bonds FR 0027	idAAA	1.065.000.000.000	(34.421.573.121)	1.030.578.426.879
Recap Bonds FR 0026	idAAA	980.000.000.000	(2.559.444.642)	977.440.555.358
Recap Bonds FR 0045	idAAA	860.839.000.000	100.538.167.132	961.377.167.132
Recap Bonds FR 0035	idAAA	848.172.000.000	(10.809.457.884)	837.362.542.116
Recap Bonds FR 0039	idAAA	730.990.000.000	7.656.097.574	738.646.097.574
Recap Bonds FR 0036	idAAA	604.000.000.000	(36.728.941.598)	567.271.058.402
Recap Bonds FR 0038	idAAA	325.209.000.000	8.967.838.657	334.176.838.657
Recap Bonds FR 0030	idAAA	280.000.000.000	248.228.776	280.248.228.776
Recap Bonds FR 0048	idAAA	201.696.000.000	(27.110.585.193)	174.585.414.807
Recap Bonds FR 0028	idAAA	162.000.000.000	(10.225.440.324)	151.774.559.676
Recap Bonds FR 0037	idAAA	113.000.000.000	2.795.054.858	115.795.054.858
Recap Bonds FR 0032	idAAA	75.000.000.000	(3.373.298.754)	71.626.701.246
FR0062	idAAA	43.124.000.000	(1.742.152.797)	41.381.847.203
Recap Bonds FR 0056	idAAA	20.000.000.000	(832.978.656)	19.167.021.344
		29.706.792.000.000	693.567.669.948	30.400.359.669.948

	31 Desember 2013			
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Korporasi				
Pihak Berelasi				
Indonesia Exim Bank I seri C (7 tahun) 2011	idAAA	1.252.000.000.000	98.930.541	1.252.098.930.541
Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I/2009	idAA+	1.050.000.000.000	--	1.050.000.000.000
PT TELKOM II seri 2B	idAAA	1.016.000.000.000	11.321.535.457	1.027.321.535.457
PLN XIIB/2010	idAAA	839.000.000.000	10.948.199.145	849.948.199.145
Bank Ekspor Indonesia IV/2009 Seri D	idAAA	800.000.000.000	--	800.000.000.000
Indonesia Exim I seri D/2010	idAAA	703.000.000.000	--	703.000.000.000
Bank BTN Tahap I Th.2012	idAA	619.000.000.000	832.144.730	619.832.144.730
BTN XIV	idAA	497.000.000.000	3.475.042.685	500.475.042.685
PLN XI Tahun 2010 Seri B	idAAA	469.000.000.000	2.362.417.869	471.362.417.869
Sarana Multigriya Financial I Tahap II seri C 2012	AA(idn)	470.000.000.000	--	470.000.000.000
PLN IX Seri A Tahun 2007	idAAA	410.000.000.000	195.998.030	410.195.998.030
PLN IX Seri B Tahun 2007	idAAA	406.000.000.000	809.709.703	406.809.709.703
Obl. Berk. I Garuda Tahap I 2013	A(idn)	400.000.000.000	--	400.000.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idAA-	340.000.000.000	--	340.000.000.000
Pegadaian XIII/09 Seri B1	idAA+	305.000.000.000	--	305.000.000.000
SMF Berkel II Tahap II C 2013	idAA	280.000.000.000	--	280.000.000.000
BTN XIII/2009 Seri C	idAA	266.000.000.000	186.158.032	266.186.158.032
PLN VIII - A / 2006	idAAA	253.000.000.000	10.414.792.046	263.414.792.046
BTN XV Tahun 2011	idAA	255.000.000.000	411.015.640	255.411.015.640
Jasa Marga XIV JM-10/10 tahun	idAA	230.000.000.000	5.896.117.888	235.896.117.888
Jasa Marga XII Seri Q/2006	idAA	212.000.000.000	758.180.023	212.758.180.023
PLN XI Tahun 2010 Seri A	idAAA	202.000.000.000	--	202.000.000.000
Obl II PNM 2013	idA	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	186.000.000.000	2.022.531.416	188.022.531.416
Obl Berk. II Pegadaian Tahap I D 2013	idAA+	180.000.000.000	--	180.000.000.000
SMF Berkel II Tahap I B 2012	idAA	165.000.000.000	--	165.000.000.000
LPEI Berkl I Tahap III B 2013	idAAA	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obl I PTPN X 2013	idA+	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009	A+(idn)	144.000.000.000	2.029.598.993	146.029.598.993
Obl Berk. II Pegadaian Tahap I C 2013	idAA+	120.000.000.000	--	120.000.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri A 2012	idA	115.000.000.000	--	115.000.000.000
Pegadaian XIII/09 Seri C	idAA+	115.000.000.000	--	115.000.000.000
PLN VIII - B / 2006	idAAA	105.000.000.000	658.519.677	105.658.519.677
Pegadaian Berkelanjutan I tahap II seri D 2012	idAA+	105.000.000.000	157.072.025	105.157.072.025
SMF Berkel II Tahap I C 2012	idAA	105.000.000.000	--	105.000.000.000
Obl Berk. I PLN Tahap I B 2013	idAAA	95.000.000.000	--	95.000.000.000
SMF Berkel II Tahap II B 2013	idAA	95.000.000.000	--	95.000.000.000
Obl I Hutama Karya B 2013	idA-	90.000.000.000	--	90.000.000.000
Pegadaian Berkelanjutan I tahap II seri C 2012	idAA+	80.000.000.000	--	80.000.000.000
Pegadaian Seri C 2011 Berkelanjutan I	idAA+	78.000.000.000	1.282.474.387	79.282.474.387
PLN VII /04	idAAA	79.000.000.000	(302.456.503)	78.697.543.497
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	idAA	74.000.000.000	515.253.238	74.515.253.238
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	53.000.000.000	186.939.466	53.186.939.466
PLN X Tahun 2009 Seri A	idAAA	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Pupuk Kalimantan Timur II/2009	idAA+	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Sarana Multigriya Financial I Tahap II seri B 2012	AA(idn)	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 201	idA	25.000.000.000	--	25.000.000.000
SMF Berkel II Tahap II D 2013	idAA	25.000.000.000	--	25.000.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	22.000.000.000	119.549.260	22.119.549.260
Sarana Multigriya Finansial I seri C 2011	AA(idn)	20.000.000.000	199.919.838	20.199.919.838
Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 201	idA	15.000.000.000	--	15.000.000.000
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	10.000.000.000	146.615.920	10.146.615.920
Obl I Hutama Karya A 2013	idA-	10.000.000.000	--	10.000.000.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	8.000.000.000	114.991.325	8.114.991.325
		13.983.000.000.000	54.841.250.831	14.037.841.250.831

	31 Desember 2013			
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Ketiga				
Bank Jabar VII/2011 seri C	idAA-	600.000.000.000	--	600.000.000.000
Astra Sedaya Finance I seri B 2012	idAA+	526.000.000.000	1.145.255.776	527.145.255.776
Federal International Finance XI/2011 seri C	idAA+	522.100.000.000	265.994.871	522.365.994.871
Astra Sedaya Finance I seri C 2012	idAA+	426.000.000.000	3.362.583.002	429.362.583.002
Indofood Sukses Makmur VI 2012	idAA+	400.000.000.000	173.745.521	400.173.745.521
CIMB Niaga Berkelanjutan I 2012 Seri B	idAAA	400.000.000.000	--	400.000.000.000
OCBC NISP Berkl I Tahap IC 2013	idAAA	280.000.000.000	--	280.000.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Seri B	idAA+	274.000.000.000	677.265.597	274.677.265.597
Adira Berkelanjutan I seri C 2011	idAA+	250.000.000.000	--	250.000.000.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 seri B	idAAA	249.000.000.000	143.161.919	249.143.161.919
Obligasi Indosat V/2007 Seri A	idAA+	241.000.000.000	57.769.583	241.057.769.583
Bank Sumut III tahun 2011	idA+	240.000.000.000	--	240.000.000.000
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAA+	210.000.000.000	--	210.000.000.000
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV/2010 Seri E	idAA+	207.000.000.000	--	207.000.000.000
Bank Jabar VII/2011 seri B	idAA-	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Astra Sedaya XII seri D	idAA+	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri C/2011	idAA+	160.000.000.000	45.864.669	160.045.864.669
Obligasi VI Bank Jabar Banten 2009 Seri B	idAA-	150.000.000.000	--	150.000.000.000
BSD Berkelanjutan I tahap II 2013	idAA-	150.000.000.000	--	150.000.000.000
FIF X/2010 Seri D	idAA+	130.000.000.000	169.433.214	130.169.433.214
Federal Intern Finance I Tahap I 2012 seri C	idAA+	128.000.000.000	175.207.492	128.175.207.492
BCA Finance Tahap I/2012 seri D	AAA(idn)	125.000.000.000	52.446.460	125.052.446.460
Obl Berk. I Agung Pod Land I 2013	idA	120.000.000.000	--	120.000.000.000
Indosat VI Seri B 2008	idAA+	115.000.000.000	--	115.000.000.000
Bank CIMB Niaga I seri B 2011	idAAA	95.900.000.000	2.091.570.604	97.991.570.604
BCA Finance IV seri D thn.2011	AAA(idn)	92.000.000.000	110.287.111	92.110.287.111
Indofood V Tahun 2009	idAA+	90.000.000.000	--	90.000.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	idAAA	80.000.000.000	693.419.482	80.693.419.482
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAA+	80.000.000.000	--	80.000.000.000
BCA Finance IV seri E thn.2011	AAA(idn)	67.000.000.000	120.520.816	67.120.520.816
Astra Sedaya Finance XI F/2010	idAA+	65.000.000.000	--	65.000.000.000
BCA Finance Tahap I/2012 seri C	AAA(idn)	55.000.000.000	40.771.290	55.040.771.290
BSD Berkelanjutan I tahap I seri A 2012	idAA-	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Obl Berk. I BCA Fin Thp IIC 2013	idAA+	43.000.000.000	--	43.000.000.000
Danareksa VB 2010	idA	36.000.000.000	--	36.000.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	33.000.000.000	369.965.319	33.369.965.319
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	32.000.000.000	190.877.916	32.190.877.916
Obl Berk. I BCA Fin Thp IIB 2013	idAA+	22.000.000.000	--	22.000.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAA+	20.000.000.000	296.016.121	20.296.016.121
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	12.000.000.000	151.330.860	12.151.330.860
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	5.000.000.000	46.728.404	5.046.728.404
		7.181.000.000.000	10.380.216.027	7.191.380.216.027
Total JHT		**50.870.792.000.000**	**758.789.136.806**	**51.629.581.136.806**

	31 Desember 2013			
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
JKK				
Obligasi Pemerintah				
Pihak Berelasi				
Recap Bonds FR 0054	idAAA	88.791.000.000	4.331.938.217	93.122.938.217
Recap Bonds FR 0068	idAAA	55.895.000.000	(1.575.044.799)	54.319.955.201
FR058	idAAA	43.826.000.000	(2.781.810.825)	41.044.189.175
FR0065	idAAA	31.198.000.000	(6.183.466.543)	25.014.533.457
Recap Bonds FR 0052	idAAA	28.885.000.000	3.514.390.718	32.399.390.718
Recap Bonds FR 0040	idAAA	26.586.000.000	431.888.397	27.017.888.397
Recap Bonds FR 0071	idAAA	24.423.000.000	471.814.158	24.894.814.158
Recap Bonds FR 0027	idAAA	24.169.000.000	(1.296.932.132)	22.872.067.868
Recap Bonds FR 0031	idAAA	24.169.000.000	(4.104.190.230)	20.064.809.770
Recap Bonds FR 0045	idAAA	24.169.000.000	(4.999.931.772)	19.169.068.228
Recap Bonds FR 0046	idAAA	24.169.000.000	(5.182.978.323)	18.986.021.677
Recap Bonds FR 0034	idAAA	19.335.000.000	950.256.327	20.285.256.327
Recap Bonds FR 0042	idAAA	16.919.000.000	(2.362.410.869)	14.556.589.131
Recap Bonds FR 0044	idAAA	10.321.000.000	(2.972.851.462)	7.348.148.538
Recap Bonds FR 0032	idAAA	4.834.000.000	(159.753.476)	4.674.246.524
Recap Bonds FR 0035	idAAA	3.867.000.000	308.506.054	4.175.506.054
		451.556.000.000	(21.610.576.560)	429.945.423.440
Obligasi Korporasi				
Pihak Berelasi				
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	300.977.000.000	(3.290.642.467)	297.686.357.533
PLN VII /04	idAA+	87.493.000.000	497.705.095	87.990.705.095
Obl Berk. I Jasa Marga Thp IC 2013	idAA	50.203.000.000	--	50.203.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idAA-	38.670.000.000	--	38.670.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Obl Berk. I Danareksa IB 2012	idAA	32.275.000.000	96.352.152	32.371.352.152
Mandiri Tunas Finance VI C/2011	idAA	29.003.000.000	--	29.003.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA+	19.335.000.000	9.467.955	19.344.467.955
PLN VIII - A / 2006	idAA	16.435.000.000	226.830.741	16.661.830.741
Obligasi Berkelanjutan Mandiri Tunas Fin Thp I A/2013	idAA	12.386.000.000	--	12.386.000.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	12.085.000.000	9.715.048	12.094.715.048
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	967.000.000	32.016.129	999.016.129
		636.083.000.000	(2.418.555.347)	633.664.444.653
Pihak Ketiga				
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	131.480.000.000	57.253.419	131.537.253.419
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAA+	72.508.000.000	--	72.508.000.000
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013	idA	60.021.000.000	--	60.021.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAA+	48.338.000.000	--	48.338.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	48.338.000.000	--	48.338.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	48.338.000.000	--	48.338.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idA	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Indofood V Tahun 2009	idAA+	29.003.000.000	156.252.842	29.159.252.842
Federal International Finance XI/2011 seri C	idA	26.586.000.000	--	26.586.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	idAAA	24.169.000.000	--	24.169.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri B	idA-	12.085.000.000	--	12.085.000.000
Obl Berk. I Danareksa IA 2012	idA-	11.924.000.000	--	11.924.000.000
Danareksa VB 2010	idAA+	11.601.000.000	--	11.601.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Seri A	idAA+	2.417.000.000	362.342	2.417.362.342
		635.570.000.000	213.868.603	635.783.868.603
Total JKK		**1.723.209.000.000**	**(23.815.263.304)**	**1.699.393.736.696**

	31 Desember 2013			
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
JKM				
Obligasi Pemerintah				
Pihak Berelasi				
Recap Bonds FR 0054	idAAA	23.341.000.000	1.152.914.026	24.493.914.026
Recap Bonds FR 0068	idAAA	17.238.000.000	(485.175.270)	16.752.824.730
FR058	idAAA	11.416.000.000	(718.509.560)	10.697.490.440
FR0065	idAAA	8.859.000.000	(1.732.804.396)	7.126.195.604
Recap Bonds FR 0040	idAAA	8.309.000.000	134.979.338	8.443.979.338
Recap Bonds FR 0052	idAAA	7.963.000.000	976.035.998	8.939.035.998
Recap Bonds FR 0027	idAAA	7.554.000.000	(405.355.014)	7.148.644.986
Recap Bonds FR 0031	idAAA	7.554.000.000	(1.282.761.099)	6.271.238.901
Recap Bonds FR 0045	idAAA	7.554.000.000	(1.562.724.341)	5.991.275.659
Recap Bonds FR 0046	idAAA	7.554.000.000	(1.619.935.382)	5.934.064.618
Recap Bonds FR 0071	idAAA	7.432.000.000	144.775.961	7.576.775.961
Recap Bonds FR 0034	idAAA	6.043.000.000	296.995.034	6.339.995.034
Recap Bonds FR 0042	idAAA	5.287.000.000	(738.227.216)	4.548.772.784
Recap Bonds FR 0044	idAAA	3.226.000.000	(929.214.109)	2.296.785.891
Recap Bonds FR 0032	idAAA	1.511.000.000	(49.935.354)	1.461.064.646
Recap Bonds FR 0035	idAAA	1.209.000.000	96.453.018	1.305.453.018
		132.050.000.000	(6.722.488.366)	125.327.511.634
Obligasi Korporasi				
Pihak Berelasi				
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	91.851.000.000	(1.000.480.131)	90.850.519.869
PLN VII /04	idAA+	27.344.000.000	155.546.709	27.499.546.709
Obl Berk. I Jasa Marga Thp IC 2013	idAA	13.569.000.000	--	13.569.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idAA-	12.086.000.000	--	12.086.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	11.331.000.000	--	11.331.000.000
Mandiri Tunas Finance VI C/2011	idAA	9.064.000.000	--	9.064.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	6.043.000.000	2.959.134	6.045.959.134
PLN VIII - A / 2006	idAA+	5.136.000.000	70.885.469	5.206.885.469
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	3.777.000.000	3.036.304	3.780.036.304
Obligasi Berkelanjutan Mandiri Tunas Fin Thp I A/2013	idAA	3.124.000.000	--	3.124.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	302.000.000	9.998.832	311.998.832
		183.627.000.000	(758.053.683)	182.868.946.317
Pihak Ketiga				
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	41.092.000.000	17.893.653	41.109.893.653
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAA+	22.661.000.000	--	22.661.000.000
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013	idA	18.117.000.000	--	18.117.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAA+	15.107.000.000	--	15.107.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	15.107.000.000	--	15.107.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	15.107.000.000	--	15.107.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAA+	11.331.000.000	--	11.331.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	11.331.000.000	--	11.331.000.000
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	11.331.000.000	--	11.331.000.000
Indofood V Tahun 2009	idAA+	9.064.000.000	48.832.044	9.112.832.044
Obl Berk. I Danareksa IB 2012	idA	8.339.000.000	28.601.884	8.367.601.884
Federal International Finance XI/2011 seri C	idA-	8.309.000.000	--	8.309.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	idAAA	7.554.000.000	--	7.554.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri B	idA-	3.777.000.000	--	3.777.000.000
Danareksa VB 2010	idAA+	3.626.000.000	--	3.626.000.000
Obl Berk. I Danareksa IA 2012	idA	2.918.000.000	--	2.918.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Seri A	idAA+	756.000.000	113.335	756.113.335
		205.527.000.000	95.440.916	205.622.440.916
Total JKM		**521.204.000.000**	**(7.385.101.133)**	**513.818.898.867**

	31 Desember 2013			
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
BPJS Konsolidasi				
Obligasi Pemerintah				
Pihak Berelasi				
Recap Bonds FR 0054	idAAA	60.868.000.000	3.069.435.720	63.937.435.720
Recap Bonds FR 0068	idAAA	41.867.000.000	(1.184.906.270)	40.682.093.730
FR058	idAAA	29.758.000.000	(1.821.187.603)	27.936.812.397
FR0065	idAAA	24.943.000.000	(4.725.097.865)	20.217.902.135
Recap Bonds FR 0052	idAAA	20.152.000.000	2.460.335.870	22.612.335.870
Recap Bonds FR 0040	idAAA	20.105.000.000	326.604.838	20.431.604.838
Recap Bonds FR 0027	idAAA	18.277.000.000	(980.761.660)	17.296.238.340
Recap Bonds FR 0031	idAAA	18.277.000.000	(3.103.656.950)	15.173.343.050
Recap Bonds FR 0045	idAAA	18.277.000.000	(3.781.031.610)	14.495.968.390
Recap Bonds FR 0046	idAAA	18.277.000.000	(3.919.454.458)	14.357.545.542
Recap Bonds FR 0071	idAAA	18.145.000.000	354.699.312	18.499.699.312
Recap Bonds FR 0034	idAAA	14.622.000.000	718.626.740	15.340.626.740
Recap Bonds FR 0042	idAAA	12.794.000.000	(1.786.434.462)	11.007.565.538
Recap Bonds FR 0044	idAAA	7.806.000.000	(2.248.433.147)	5.557.566.853
Recap Bonds FR 0032	idAAA	3.655.000.000	(120.790.020)	3.534.209.980
Recap Bonds FR 0035	idAAA	2.924.000.000	233.274.296	3.157.274.296
		330.747.000.000	(16.508.777.269)	314.238.222.731
Obligasi Korporasi				
Pihak Berelasi				
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	245.172.000.000	(2.366.036.604)	242.805.963.396
PLN VII /04	idAA+	66.163.000.000	376.369.106	66.539.369.106
Obl Berk. I Jasa Marga Thp IC 2013	idAA	36.228.000.000	--	36.228.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idAA-	29.244.000.000	--	29.244.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	27.415.000.000	--	27.415.000.000
Mandiri Tunas Finance VI C/2011	idA	21.933.000.000	--	21.933.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	14.622.000.000	7.160.094	14.629.160.094
PLN VIII - A / 2006	idAA	12.429.000.000	171.541.179	12.600.541.179
Obligasi Berkelanjutan Mandiri Tunas Fin Thp I A/2013	idAA+	9.490.000.000	--	9.490.000.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	9.138.000.000	7.345.975	9.145.345.975
Danareksa VB 2010	idAA	8.773.000.000	--	8.773.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	731.000.000	24.202.472	755.202.472
		481.338.000.000	(1.779.417.778)	479.558.582.222
Pihak Ketiga				
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	99.428.000.000	43.296.265	99.471.296.265
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAA+	54.831.000.000	--	54.831.000.000
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013	idA	45.862.000.000	--	45.862.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAA+	36.555.000.000	--	36.555.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	36.555.000.000	--	36.555.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	36.555.000.000	--	36.555.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAA+	27.415.000.000	--	27.415.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	27.415.000.000	--	27.415.000.000
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	27.415.000.000	--	27.415.000.000
Obl Berk. I Danareksa IB 2012	idA	26.386.000.000	69.382.124	26.455.382.124
Indofood V Tahun 2009	idAA+	21.933.000.000	118.163.417	22.051.163.417
Federal International Finance XI/2011 seri C	idAA+	20.105.000.000	--	20.105.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	idAAA	18.277.000.000	--	18.277.000.000
Obl Berk. I Danareksa IA 2012	idA	10.158.000.000	--	10.158.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri B	idA-	9.138.000.000	--	9.138.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Seri A	idAA+	1.827.000.000	273.893	1.827.273.893
		499.855.000.000	231.115.699	500.086.115.699
Total BPJS Konsoldasi		**1.311.940.000.000**	**(18.057.079.348)**	**1.293.882.920.652**
Total Obligasi HTM		**54.427.145.000.000**	**709.531.693.021**	**55.136.676.693.021**

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk diatas telah memadai.

Obligasi BLTA
Obligasi Berlian Laju Tanker III tahun 2007 dalam kelompok AFS JHT dengan nominal Rp 57.000.000.000 dinyatakan telah memenuhi syarat penurunan nilai (*permanent decline*) karena kupon yang harus diterima tanggal 5 April 2012 tidak dibayarkan. Dengan menggunakan metode *Discounted Cash Flows (DCF)*, ditetapkan nilai wajar obligasi yang baru yaitu sebesar 83,39% atau Rp 47.533.592.250. Atas penyesuaian ini diakui kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2013 sebesar Rp 9.466.407.750.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 27/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tangal 22 Maret 2013, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) dan perjanjian perdamaian tanggal 13 Maret 2013 telah disahkan dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut. Atas putusan pengadilan tersebut BLTA melaksanakan restrukturisasi kewajiban pembayaran liabilitas BLTA dan anak-anak perusahaannya secara bersama-sama.

Dalam perjanjian perdamaian diputuskan:
Jangka waktu pembayaran Obligasi maksimum 10 tahun mulai 30 September 2013 hingga 31 Maret 2023;
Pelunasan yang dipercepat berasal dari *cash sweep mechanism*;
Tingkat suku bunga obligasi tertunggak sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2013 sebear 5% per tahun;
Seluruh jumlah bunga obligasi yang tertunggak dan yang belum dibayarkan sebelum 1 Juli 2012 dihapuskan;
Pembayaran bunga obligasi tertunggak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2015 akan dikapitalisasi ke pokok obligasi;
Khusus apabila Emiten tidak mampu melakukan pembayaran Bunga Obligasi sesuai jadwal pada periode 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2017 maka akan dikapitalisasi ke pokok obligasi; dan
Tingkat suku bunga Obligasi sebesar 5% tahun 1-3, sebesar 7% tahun 4-7, sebesar 9% tahun 8-10, pembayaran secara tunai triwulanan (dibayar di belakang periode) dimulai sejak 30 Juni 2015.

22. Penyertaan Langsung

Akun ini merupakan penanaman dana Perusahaan dan entitas anak per 31 Desember 2013 dalam bentuk penyertaan langsung yang dikelompokan dalam Tersedia Untuk Dijual dengan rincian sebagai berikut:

		31 Desember 2013	
	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai Nominal Rp
BPJS Konsolidasi			
Perusahaan			
Penyertaan Langsung Minoritas -			
Metode Biaya			
Bank Syariah Bukopin	Perbankan	9,46	25.630.683.148
PT Asrinda Arthasangga	Underwriter	11	82.500.000
PT Bank Muamalat	Perbankan	0,0078	109.599.500
PT Marga Mandala Sakti	Jalan Tol	0,45	14.625.000.000
PT Pusako Tarinka	Perhotelan	18,67	7.653.750.000
Total			**48.101.532.648**

	Jenis Usaha	31 Desember 2013 Persentase Kepemilikan (%)	31 Desember 2013 Nilai Nominal Rp
Penyertaan Tidak Langsung - Minoritas			
Metode Biaya			
PT Jatim Krida Utama	Penyalur Tenaga Kerja	6,67	200.000.000
Total			**48.301.532.648**
Dikurangi :			
Penurunan Nilai Permanen			
PT Marga Mandala Sakti	Jalan Tol		(13.975.000.000)
PT Pusako Tarinka	Perhotelan		(3.512.765.200)
			(17.487.765.200)
Total BPJS Konsolidasi			**30.813.767.448**

Berdasarkan surat Nomor : 063/AA/DIR/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal pembayaran dividen hasil usaha tahun 2012, PT Asrinda Arthasangga telah membayarkan dividen sebesar Rp 80.670.906.

Pada tanggal 28 Mei 2013 telah diterima dividen dari PT Marga Mandala Sakti untuk tahun buku 2012 sebesar Rp 580.654.233 atas kepemilikan 6.500.000 lembar saham (0,45%).

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas penyertaan langsung adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai permanen.

23. Properti Investasi

Akun ini merupakan penempatan dana investasi per 31 Desember 2013 dalam bentuk properti investasi dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013 Rp
Harga Perolehan:	
JHT	535.525.498.804
BPJS Konsolidasi	80.891.200.277
	616.416.699.081
Aset Dalam Konstruksi	
JHT	3.236.149.594
BPJS Konsolidasi	168.072.648
	3.404.222.242
Total	619.820.921.323
Akumulasi Penyusutan	
JHT	257.109.216.654
BPJS Konsolidasi	4.685.501.061
	261.794.717.715
Nilai Buku	**358.026.203.608**

a. Mutasi dari akun dana JHT adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:					
Tanah	80.409.417.112	--	--	--	80.409.417.112
Bangunan	426.047.061.208	342.760.000	--	--	426.389.821.208
Properti	14.431.422.716	1.143.962.680	--	--	15.575.385.396
Peralatan Properti	--	1.636.275.750	--	9.720.956.146	11.357.231.896
Peralatan Lain Properti	--	--	--	1.793.643.192	1.793.643.192
Properti Lainnya	11.514.599.338	--	--	(11.514.599.338)	--
	532.402.500.374	3.122.998.430	--	--	535.525.498.804
Aset Dalam Konstruksi					
Bangunan	415.390.535	2.820.759.059	--	--	3.236.149.594
Total	532.817.890.909	5.943.757.489	--	--	538.761.648.398
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	221.754.444.157	13.351.735.134	--	--	235.106.179.291
Properti	11.514.176.986	1.979.336.626	--	--	13.493.513.612
Peralatan Properti	--	1.965.437.146	--	5.131.327.742	7.096.764.888
Peralatan Lain Properti	--	208.596.480	--	1.204.162.383	1.412.758.863
Properti Lainnya	6.335.490.125	--	--	(6.335.490.125)	--
	239.604.111.268	17.505.105.386	--	--	257.109.216.654
Nilai Buku	**772.422.002.177**				**281.652.431.744**

b. Mutasi dari akun dana BPJS Konsolidasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:					
Tanah	74.347.346.043	--	--	--	74.347.346.043
Bangunan	6.543.854.234	--	--	--	6.543.854.234
	80.891.200.277	--	--	--	80.891.200.277
Aset Dalam Konstruksi					
Bangunan	--	168.072.648	--	--	168.072.648
Total	--	168.072.648	--	--	168.072.648
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	4.709.646.303	160.499.567	(184.644.809)	--	4.685.501.061
Nilai Buku	**76.181.553.974**				**76.373.771.864**

Lokasi dari properti investasi dan nilai wajar atas tanah dan bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Jenis Properti Investasi	Lokasi	Nilai Wajar Rp
JHT		
Tanah	Desa Sirnasari Kecamatan Cariu Bogor Jl. Raya Cariu, Desa Sirna Sari, Kec Cariu, Kab Bogor, Jawa Barat	47.393.000.000
Tanah dan Bangunan	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Kel Kuningan Barat, Kec Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	945.267.000.000
Tanah dan Bangunan	Jl. Desa Majasari RT 08/RW02, Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa	2.498.208.000
BPJS Konsolidasi		
Tanah	Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung Jl. Penghulu Haji Hasan Mustofa No. 45, Kel Neglasari, Kec Cibeunying Kaler, Bandung	54.201.000.000
Tanah	Jl. H Muhtar Raya, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan	63.228.200.000
Tanah	Jalan Jenderal Sudirman, Desa Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kab Bekasi, Jawa Barat	44.002.800.000
Tanah	Desa Bugel, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang Jl. Moch Toha, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Tangerang, Banten	154.454.000.000
Tanah	Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 112 Blok B, Kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	178.273.800.000
Tanah	Jl Setiabudi Utara Kav No 13 Blok B, Kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	
Tanah	Jl. Setiabudi Timur Kav No 14 Blok B Kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	
Tanah dan Bangunan	Jl. Imam Bonjol No. 1, Kecamatan Batam Timur, Kelurahan Lubuk Baja Barat, Batam	14.133.900.000

24. Aset Dimiliki Untuk Dijual

Akun ini merupakan saldo aset tetap dimiliki untuk dijual Perusahaan, yakni aset tetap yang sudah tidak produktif lagi dan selanjutnya akan dilakukan penjualan melalui lelang. Saldo aset dimiliki untuk dijual per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Gedung Kantor	--	--	--	--	200.007	200.007
Lain-lain	--	--	--	--	2.177.177	2.177.177
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.377.184**	**2.377.184**

25. Aset Tetap

Mutasi dari akun ini adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
BPJS Konsolidasi					
Harga Perolehan					
Tanah	112.760.750.321	14.002.926.234	16.922.000	409.312.500	127.156.067.055
Bangunan	219.411.570.338	36.057.206.143	1.911.958.990	217.216.491	253.774.033.982
Kendaraan dinas	177.966.957.244	50.121.664.398	3.499.572.000		224.589.049.642
Peralatan kantor	65.204.000.570	13.018.934.529	1.010.142.294		77.212.792.805
Peralatan komputer	260.321.620.664	25.285.945.685	3.917.825.772		281.689.740.577
Peralatan Lain	117.765.413.536	46.526.653.818	30.096.000.000		134.196.067.354
	953.430.312.673	185.013.330.807	40.452.421.056	626.528.991	1.098.617.751.415
Aset Dalam Konstruksi					
Tanah	409.312.500	--	--	(409.312.500)	--
Bangunan Kantor	23.829.100.767	15.903.078.031	--	(13.655.767.490)	26.076.411.308
Bangunan Lain	1.923.541.079	--	--	(1.923.541.079)	--
Peralatan kantor	--	1.098.608.694	--	13.789.475.000	14.888.083.694
Kendaraan Dinas	--	675.620.000	--	--	675.620.000
Peralatan Komputer	--	6.338.200.000	--	--	6.338.200.000
Peralatan Lain	--	10.098.620.286	--	--	10.098.620.286
Tidak berwujud	--	48.118.580.461	--	1.572.617.078	49.691.197.539
	26.161.954.346	82.232.707.472	--	(626.528.991)	107.768.132.827
Total	**979.592.267.019**	**267.246.038.279**	**40.452.421.056**	**--**	**1.206.385.884.242**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	91.273.062.788	8.312.805.526	(1.872.012.322)	--	101.457.880.637
Kendaraan dinas	131.216.436.817	8.296.601.148	(2.700.440.499)	--	142.213.478.464
Peralatan kantor	50.053.783.761	5.687.966.174	(1.074.193.496)	--	56.815.943.431
Peralatan komputer	195.713.195.118	20.830.875.892	(3.999.973.800)	--	220.544.044.810
Peralatan Lain	89.736.742.944	10.918.104.762	(2.274.567.541)	--	102.929.415.247
	557.993.221.428	54.046.353.502	(11.921.187.658)	--	623.960.762.589
Nilai Buku	**421.599.045.591**				**582.425.121.653**

Untuk tahun 2013, seluruh aset telah diasuransikan terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebakaran, kehilangan, bencana alam, kerusuhan dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 761.969.536.785. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

Berdasarkan hasil penelaahan atas aset tetap Perusahaan pada akhir tahun, Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak terjadi penurunan nilai aset tetap Perusahaan pada 31 Desember 2013.

26. Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

Akun ini merupakan nilai perolehan investasi dalam bentuk pembangunan Rumah Susun Sewa untuk Peserta Jamsostek dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013				
	Bumi Lancang Kuning - Batam	Kabil Batam	Muka Kuning Batam	Cikarang	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
BPJS Konsolidasi					
Harga Perolehan					
Tanah	123.024.600	4.221.008.042	19.500.000	1.913.087.580	6.276.620.222
Bangunan	37.825.443.050	127.979.612.215	10.443.763.706	16.213.828.914	192.462.647.885
Peralatan	2.458.735.625	2.786.595.000	559.950.000	1.905.000.992	7.710.281.617
	40.407.203.275	134.987.215.257	11.023.213.706	20.031.917.486	206.449.549.724
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	(23.483.295.895)	(7.184.966.057)	(1.958.205.694)	(6.367.251.457)	(38.993.719.103)
Peralatan	(2.458.735.625)	(2.148.000.313)	(559.950.000)	(1.362.855.485)	(6.529.541.423)
	(25.942.031.520)	(9.332.966.370)	(2.518.155.694)	(7.730.106.942)	(45.523.260.526)
Nilai Buku	**14.465.171.756**	**125.654.248.887**	**8.505.058.012**	**12.301.810.544**	**160.926.289.198**

Saldo Sarana Kesejahteraan Peserta Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 atas Rusunsewa Kabil Batam sebesar Rp 95.144.489.794 sudah selesai dilaksanakan dan direklasifikasi pada tahun 2013 ke Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) program DPKP.

Untuk tahun 2013, SKP Rusunsewa Lancang Kuning, Rusunsewa Kabil, Muka Kuning Batam, SKP Rusunsewa Cikarang telah diasuransikan kepada PT Berdikari Insurance dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 156.947.334.190, terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat kebakaran, kehilangan, bencana alam, kerusuhan dan risiko lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

27. Aset Tidak Berwujud

Akun ini merupakan aset tidak berwujud berupa program Oracle, sistem informasi investasi, e-procurement, Microsoft Office, aplikasi perpajakan dan lisensi antivirus Perusahaan per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013			
	1 Januari	Penambahan	Pengurangan	31 Desember
	Rp	Rp	Rp	Rp
BPJS Konsolidasi				
Biaya perolehan				
Lisensi Perangkat Lunak	73.910.692.678	--	--	73.910.692.678
Akumulasi amortisasi				
Lisensi Perangkat Lunak	(61.272.446.111)	(688.111.505)	--	(61.960.557.616)
Nilai buku bersih	**12.638.246.567**	**(688.111.505)**	**--**	**11.950.135.062**

28. Aset Lain-lain

Akun ini merupakan saldo aset lain Perusahaan, entitas anak dan Program DPKP per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Piutang Lain	--	--	--	--	12.510.608.777	12.510.608.777
Piutang Pegawai	--	--	--	--	11.833.450.055	11.833.450.055
Beban yang Ditangguhkan	--	--	--	--	967.655.972	967.655.972
Agunan yang Diambil Alih	--	--	--	--	315.222.000	315.222.000
Aset Yang Sudah Tidak Digunakan	--	--	--	--	697.849.326	697.849.326
Kas dan Setara Kas						
Dibatasi Penggunaannya	--	--	--	--	599.160.506	599.160.506
Pos Sementara Dalam Penyelesaian	--	--	--	--	125.568.851	125.568.851
Lain-lain	--	--	--	--	3.259.385.140	3.259.385.140
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**30.308.900.627**	**30.308.900.627**

Piutang Pegawai
Jumlah tersebut merupakan saldo pinjaman kendaraan untuk pembelian kendaraan roda empat bagi pejabat struktural Perusahaan sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/163/062008 dan Nomor: KEP/368/122011 serta saldo tuntutan ganti rugi karyawan karena penyalahgunaan keuangan.

Kas dan Setara Kas Dibatasi Penggunaannya
Aset lain-lain kas yang dibatasi penggunaanya pada rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jamsostek per 31 Desember 2013 sebesar Rp 599.160.506 yang digunakan untuk penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan*) bagi karyawan pejabat struktural Perusahaan sesuai Keputusan Direksi No. KEP/163/062008 tanggal 25 Desember 2008 dan No. KEP/368/122011.

29. Liabilitas JHT Siap Bayar

Akun ini merupakan saldo penetapan klaim JHT yang belum diambil oleh peserta per 31 Desember 2013 sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kantor Wilayah I	64.847.232	--	--	--	--	64.847.232
Kantor Wilayah II	25.694.403	--	--	--	--	25.694.403
Kantor Wilayah III	1.198.843.587	--	--	--	--	1.198.843.587
Kantor Wilayah IV	221.648.452	--	--	--	--	221.648.452
Kantor Wilayah V	25.791.677	--	--	--	--	25.791.677
Kantor Wilayah VI	35.256.785	--	--	--	--	35.256.785
Kantor Wilayah VII	74.168.995	--	--	--	--	74.168.995
Kantor Wilayah VIII	4.394.034	--	--	--	--	4.394.034
Kantor Wilayah IX	186.349.111	--	--	--	--	186.349.111
Kantor Wilayah X	13.612.547	--	--	--	--	13.612.547
Kantor Wilayah XI	11.566.369	--	--	--	--	11.566.369
Total	**1.862.173.192**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.862.173.192**

30. Liabilitas JHT Jatuh Tempo

Akun ini merupakan penerimaan iuran JHT beserta hasil pengembangannya yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada peserta dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun per 31 Desember 2013 sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kantor Wilayah I	570.966.864.745	--	--	--	--	570.966.864.745
Kantor Wilayah II	344.905.719.007	--	--	--	--	344.905.719.007
Kantor Wilayah III	4.791.815.791.487	--	--	--	--	4.791.815.791.487
Kantor Wilayah IV	804.637.725.193	--	--	--	--	804.637.725.193
Kantor Wilayah V	392.398.307.263	--	--	--	--	392.398.307.263
Kantor Wilayah VI	823.277.611.314	--	--	--	--	823.277.611.314
Kantor Wilayah VII	499.774.619.668	--	--	--	--	499.774.619.668
Kantor Wilayah VIII	133.839.564.264	--	--	--	--	133.839.564.264
Kantor Wilayah IX	466.799.901.778	--	--	--	--	466.799.901.778
Kantor Wilayah X	367.150.840.983	--	--	--	--	367.150.840.983
Kantor Wilayah XI	106.468.007.444	--	--	--	--	106.468.007.444
Total	**9.302.034.953.146**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9.302.034.953.146**

31. Hasil Pengembangan JHT

Akun ini merupakan hasil pengembangan atas program JHT per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Investasi						
Pendapatan Bunga Obligasi JHT	5.219.616.003.742	--	--	--	--	5.219.616.003.742
Pendapatan Bunga Deposito Berjangka	2.401.680.571.017	--	--	--	--	2.401.680.571.017
Laba Penjualan Saham	1.984.112.901.452	--	--	--	--	1.984.112.901.452
Laba Penjualan Reksadana	1.010.509.711.436	--	--	--	--	1.010.509.711.436
Laba Penjualan Investasi Syariah JHT	920.597.897.708	--	--	--	--	920.597.897.708
Pendapatan Dividen	489.686.261.399	--	--	--	--	489.686.261.399
Pendapatan Bagi Hasil Obligasi	441.985.993.768	--	--	--	--	441.985.993.768
Pendapatan Sewa Bangunan	111.441.806.940	--	--	--	--	111.441.806.940
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	79.256.302.793	--	--	--	--	79.256.302.793
Pendapatan Bunga DOC JHT	19.730.666.385	--	--	--	--	19.730.666.385
Laba Penjualan Obligasi	8.904.608.925	--	--	--	--	8.904.608.925
Pendapatan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	290.277.778	--	--	--	--	290.277.778
Penerimaan Investasi Lain	12.222.108.524	--	--	--	--	12.222.108.524
Total	12.700.035.111.867	--	--	--	--	12.700.035.111.867

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban Investasi						
Kerugian Atas Penurunan Investasi Syariah JHT - Sukuk	(93.317.264.181)	--	--	--	--	(93.317.264.181)
Kerugian Atas Penurunan Nilai Saham JHT	(70.551.547.613)	--	--	--	--	(70.551.547.613)
Beban Properti Investasi	(59.745.267.228)	--	--	--	--	(59.745.267.228)
Beban Transaksi Investasi	(28.479.002.180)	--	--	--	--	(28.479.002.180)
Beban Atas Transaksi Investasi Syariah JHT - Saham	(17.108.745.148)	--	--	--	--	(17.108.745.148)
Beban Penitipan Surat Berharga	(16.023.362.840)	--	--	--	--	(16.023.362.840)
Beban PPh Atas Transaksi Saham JHT	(10.071.203.103)	--	--	--	--	(10.071.203.103)
Beban PPh Atas Sewa Bangunan Investasi JHT	(6.837.841.347)	--	--	--	--	(6.837.841.347)
Beban PPh Atas Service Charge Bangunan Investasi JHT	(4.908.163.470)	--	--	--	--	(4.908.163.470)
Beban PBB Tanah Dan Bangunan	(3.696.162.102)	--	--	--	--	(3.696.162.102)
Beban PPh Atas Pendapatan Lain Investasi Properti JHT	(2.166.495.123)	--	--	--	--	(2.166.495.123)
Beban Pengelolaan Investasi	(1.521.475.192)	--	--	--	--	(1.521.475.192)
Kerugian Atas Penurunan Nilai Reksadana JHT	(635.903.835)	--	--	--	--	(635.903.835)
Beban Asuransi Bangunan Investasi	(453.555.880)	--	--	--	--	(453.555.880)
Beban Bank Investasi JHT	(45.623.600)	--	--	--	--	(45.623.600)
Beban PPh Budep Berjangka	(35.942.488)	--	--	--	--	(35.942.488)
Beban PPh Atas Pendapatan Lain Obligasi JHT	(315.408)	--	--	--	--	(315.408)
Beban Investasi Lainnya JHT	(1.973.489.676)	--	--	--	--	(1.973.489.676)
Total	(317.571.360.414)	--	--	--	--	(317.571.360.414)
Beban Pengelolaan JHT	(1.678.225.675.984)	--	--	--	--	(1.678.225.675.984)
Total Hasil Pengembangan JHT	**10.704.238.075.469**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10.704.238.075.469**

32. Pengembalian Kepada Peserta JHT

Akun ini merupakan saldo pengembalian kepada peserta JHT per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Hasil Pengembangan JHT Diberikan ke Peserta	10.175.027.319.661	--	--	--	--	10.175.027.319.661
Hasil Pengembangan Atas Dana Pengembangan JHT	280.968.905.400	--	--	--	--	280.968.905.400
Hasil Pengembangan JHT yg Belum Dibagikan ke Peserta	248.241.850.408	--	--	--	--	248.241.850.408
Total	**10.704.238.075.469**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10.704.238.075.469**

33. Liabilitas Jaminan Hari Tua Sesuai Rincian Saldo JHT

Akun ini merupakan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua (RSJHT) per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Liabilitas JHT Sesuai RSJHT yang Sudah Selesai	125.270.070.522.738	--	--	--	--	125.270.070.522.738
Liabilitas JHT Sesuai RSJHT yang Sudah Selesai Penyesuaian	79.912.694.075	--	--	--	--	79.912.694.075
Liabilitas JHT Sesuai RSJHT yang Sudah Selesai Program Tk Mandiri	6.797.346.573	--	--	--	--	6.797.346.573
Liabilitas JHT Sesuai RSJHT yang Sudah Selesai Program Perorangan	972.945.101	--	--	--	--	972.945.101
Total	**125.357.753.508.487**	**--**	**--**	**--**	**--**	**125.357.753.508.487**

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kantor Wilayah I	5.074.132.458.172	--	--	--	--	5.074.132.458.172
Kantor Wilayah II	3.744.157.097.345	--	--	--	--	3.744.157.097.345
Kantor Wilayah III	54.385.192.618.231	--	--	--	--	54.385.192.618.231
Kantor Wilayah IV	17.373.798.627.533	--	--	--	--	17.373.798.627.533
Kantor Wilayah V	5.670.068.440.404	--	--	--	--	5.670.068.440.404
Kantor Wilayah VI	13.031.721.638.729	--	--	--	--	13.031.721.638.729
Kantor Wilayah VII	6.518.838.065.816	--	--	--	--	6.518.838.065.816
Kantor Wilayah VIII	1.866.963.226.232	--	--	--	--	1.866.963.226.232
Kantor Wilayah IX	7.512.554.245.611	--	--	--	--	7.512.554.245.611
Kantor Wilayah X	8.829.537.278.853	--	--	--	--	8.829.537.278.853
Kantor Wilayah XI	1.350.789.811.561	--	--	--	--	1.350.789.811.561
Total	**125.357.753.508.487**	**--**	**--**	**--**	**--**	**125.357.753.508.487**

Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan Seketariat Negara Pengembangan Keterampilan dan Ketenagakerjaan Republik Demokratik Timor Leste (SEPFOPE RDTL) pada tanggal 28 Juli 2011 disepakati perjanjian pembayaran Jaminan Hari Tua mantan karyawan swasta pada bekas Provinsi Timor Timur untuk 4.255 tenaga kerja. Pada tanggal 31 Desember 2013 Perusahaan telah menyerahkan Saldo Jaminan Hari Tua sebesar Rp 2.285.840.667.

Saldo liabilitas JHT sesuai RSJHT merupakan saldo dari peserta aktif dan non aktif, dimana berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 32 ayat (1) terdapat definisi peserta aktif dan non aktif, yaitu tenaga kerja mempunyai kepesertaan aktif, apabila selama masa kepesertaannya iuran tetap dibayarkan, Sedangkan kepesertaan non aktif, apabila iuran tidak lagi dibayarkan (namun saldo JHT belum dicairkan).

34. Liabilitas Jaminan Hari Tua Kurang Bayar

Akun ini digunakan untuk menampung penerimaan iuran JHT yang telah selesai direkonsiliasi pasca pembayaran klaim dan sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan kembali kepada peserta per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kantor Wilayah I	3.973.532.139	--	--	--	--	3.973.532.139
Kantor Wilayah II	1.367.760.260	--	--	--	--	1.367.760.260
Kantor Wilayah III	12.383.597.520	--	--	--	--	12.383.597.520
Kantor Wilayah IV	8.577.036.798	--	--	--	--	8.577.036.798
Kantor Wilayah V	209.270.607	--	--	--	--	209.270.607
Kantor Wilayah VI	892.660.810	--	--	--	--	892.660.810
Kantor Wilayah VII	919.917.067	--	--	--	--	919.917.067
Kantor Wilayah VIII	293.486.162	--	--	--	--	293.486.162
Kantor Wilayah IX	2.320.829.139	--	--	--	--	2.320.829.139
Kantor Wilayah X	4.743.931.477	--	--	--	--	4.743.931.477
Kantor Wilayah XI	125.967.503	--	--	--	--	125.967.503
Total	**35.807.989.482**	**--**	**--**	**--**	**--**	**35.807.989.482**

35. Liabilitas Jaminan Hari Tua Belum Selesai RSJHT

Akun ini merupakan penerimaan iuran JHT yang belum dapat diselesaikan RSJHT-nya untuk program LHK dan Perseorangan per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
JHT Program LHK	23.687.590.290	--	--	--	--	23.687.590.290
JHT Program Perorangan	4.490.663.963	--	--	--	--	4.490.663.963
Total	**28.178.254.253**	**--**	**--**	**--**	**--**	**28.178.254.253**

36. Dana Pengembangan JHT

Akun ini merupakan saldo dana pengembangan JHT Perusahaan dan Surplus Hak Peserta per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Dana Pengembangan JHT Penyangga (*Buffer*)	1.358.870.092.501	--	--	--	--	1.358.870.092.501
Dana Pengembangan JHT	435.808.144.166					435.808.144.166
Surplus Hak Peserta atas Hasil Investasi JHT	529.210.755.808	--	--	--	--	529.210.755.808
Total	**2.323.888.992.475**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.323.888.992.475**

Dari saldo Dana Pengembangan JHT per 31 Desember 2012 sebesar Rp 8.272.781.992.143 telah didistribusikan pada bulan Maret 2013 sebesar Rp 5.633.678.560.310 atau setara dengan tingkat bunga 6,50% kepada seluruh peserta yang belum mengambil JHT. Pendistribusian ini berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/478/122012 tanggal 18 Desember 2012. Kemudian Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/295/072013 tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan telah mendistribusikan Dana Pengembangan JHT tahun 2012 di bulan Agustus 2013 sebesar Rp 818.594.165.600 atau setara dengan tingkat bunga 0,81% kepada seluruh peserta yang belum mengambil JHT.

37. Liabilitas Investasi JHT

Akun ini merupakan saldo liabilitas investasi JHT per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban YMH Dibayar Investasi	11.426.875.782	--	--	--	--	11.426.875.782
Liabilitas Pembelian Investasi JHT	124.429.025	--	--	--	--	124.429.025
Liabilitas Lancar Lainnya	586.485.435	--	--	--	--	586.485.435
Total	**12.137.790.242**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12.137.790.242**

38. Pendapatan Diterima di Muka Investasi JHT

Akun ini merupakan saldo pendapatan investasi JHT diterima di muka per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Sewa Bangunan Investasi	5.755.215.911	--	--	--	--	5.755.215.911
Total	**5.755.215.911**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5.755.215.911**

39. Selisih Penilaian Efek JHT

Akun ini merupakan kenaikan (penurunan) nilai wajar dari efek tertentu Perusahaan dalam kelompok AFS (*Available for Sale*) yang berasal dari dana JHT Saldo per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saham	(2.484.181.415.793)	--	--	--	--	(2.484.181.415.793)
Reksadana	(1.308.530.753.672)	--	--	--	--	(1.308.530.753.672)
Obligasi	(70.757.071.593)	--	--	--	--	(70.757.071.593)
Total	**(3.863.469.241.058)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**(3.863.469.241.058)**

40. Liabilitas Jaminan Non JHT

Akun ini merupakan saldo liabilitas jaminan Non JHT Perusahaan per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Jaminan yang Sudah Ditetapkan Tetapi Belum Dibayarkan	--	2.887.976.768	5.512.693.830	--	--	8.400.670.598
Jaminan Sudah Dibayarkan Tetapi Belum Dicairkan	--	23.522.291	--	--	--	23.522.291
Total	**--**	**2.911.499.059**	**5.512.693.830**	**--**	**--**	**8.424.192.889**

Jaminan yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan merupakan saldo liabilitas jaminan Perusahaan per 31 Desember 2013 atas jaminan yang telah ditetapkan oleh Kantor Cabang namun sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta.

Jaminan sudah dibayarkan tetapi belum dicairkan merupakan saldo per 31 Desember 2013 atas jaminan Non JHT yang sudah dibayarkan tetapi belum dicairkan oleh peserta.

41. Liabilitas Jaminan Diestimasi Non JHT

Akun ini merupakan saldo klaim jaminan yang belum disetujui/ditetapkan namun besarnya klaim dapat diestimasi Perusahaan berdasarkan jumlah pengajuan klaim yang disampaikan oleh peserta per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Jaminan Kecelakaan Kerja	--	183.429.583	--	--	--	183.429.583
Jaminan Pelayanan Kesehatan	--	--	--	58.729.201.217	--	58.729.201.217
Jaminan Jasa Konstruksi	--	59.895.187	3.255.404	--	--	63.150.591
Total	**--**	**243.324.770**	**3.255.404**	**58.729.201.217**	**--**	**58.975.781.391**

42. Liabilitas Jaminan Belum Dilaporkan Non JHT

Akun ini merupakan saldo jaminan belum dilaporkan atau Incurred But Not Reported (IBNR) per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Jaminan Belum Dilaporkan Non JHT	--	86.099.610.107	60.435.676.802	29.476.698.075	--	176.011.984.984
Total	**--**	**86.099.610.107**	**60.435.676.802**	**29.476.698.075**	**--**	**176.011.984.984**

43. Cadangan Teknis

Akun ini merupakan cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi karena jumlah pembayaran jaminan non-JHT melebihi penerimaan iuran non-JHT, sedangkan cadangan katastrofa adalah cadangan yang dibentuk oleh badan penyelenggara untuk menghadapi risiko keuangan yang mungkin timbul akibat kejadian atau keadaan yang luar biasa, Saldo per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Cadangan Teknis	--	8.351.063.388.041	2.410.501.137.809	322.649.046.412	--	11.084.213.572.262
Cadangan Katastrofa	--	250.732.972.582	146.048.554.780	--	--	396.781.527.362
Total	**--**	**8.601.796.360.623**	**2.556.549.692.589**	**322.649.046.412**	**--**	**11.480.995.099.624**

Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2004 disebutkan bahwa cadangan teknis untuk pertanggungan selama satu tahun dihitung sebesar 40% dari iuran tahun berjalan, sedangkan untuk cadangan teknis JPK sebesar 10% dari iuran tahun berjalan dan tidak bersifat kumulatif.

Perhitungan cadangan teknis berdasarkan aktuaris independen KIS aktuaria dalam laporan Nomor : 2472/KIS/LA/01/2014 tertanggal 15 Januari 2014.

44. Dana Pengembangan Non JHT

Akun ini merupakan saldo dana yang dipergunakan untuk pemberian manfaat tambahan kepada peserta program Non JHT, saldo per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Awal	--	192.098.661.744	73.183.373.752	--	--	265.282.035.496
Penyaluran						
Bantuan Penyelenggaraan Wokshop K3	--	(38.728.928.213)	(14.754.468.369)	--	--	(53.483.396.582)
Bantuan Medical Check Up	--	(28.791.201.023)	(10.968.515.897)	--	--	(39.759.716.920)
Bantuan Peralatan K3	--	(24.787.694.557)	(9.443.309.489)	--	--	(34.231.004.046)
Bantuan Uang Pemakaman	--	(11.358.702.079)	(4.327.297.921)	--	--	(15.686.000.000)
Bantuan Pengobatan Kanker	--	(3.089.645.876)	(1.177.055.097)	--	--	(4.266.700.973)
Bantuan Operasi Jantung	--	(2.046.843.712)	(779.781.218)	--	--	(2.826.624.930)
Bantuan Pelayanan Kesehatan Cuma-Cuma	--	(1.583.111.598)	(603.114.289)	--	--	(2.186.225.887)
Bantuan Cuci Darah	--	(889.316.047)	(338.800.635)	--	--	(1.228.116.682)
Bantuan Biaya Perawatan dan Pengobatan	--	(722.187.107)	(275.129.918)	--	--	(997.317.025)
Bantuan Pengobatan HIV/AIDS	--	(62.301.078)	(23.734.694)	--	--	(86.035.772)
Total	**--**	**80.038.730.454**	**30.492.166.225**	**--**	**--**	**110.530.896.679**

Berdasarkan RUPS tahun buku 2012 tanggal 3 Mei 2013 disetujui reklasifikasi Dana Pengembangan Non JHT ke Pos Cadangan Umum sebesar Rp 1.198.421.605.861. Hal ini sesuai dengan Surat Direksi Nomor : B/3875/042013 tanggal 16 April 2013 berdasarkan kajian hukum yang telah dilakukan oleh Direksi Perusahaan (lihat Catatan 61). Dewan Komisaris juga merekomendasikan dalam suratnya Nomor : 26/DK/042013 tanggal 11 April 2013 yang mengatur bahwa manfaat tambahan yang disediakan Perusahaan sudah termasuk dalam layanan Program JPK Standar sehingga keberadaan Dana Pengembangan Non JHT tidak diperlukan lagi.

45. Liabilitas Investasi Non JHT

Akun ini merupakan pembelian investasi non JHT dan beban penitipan investasi non JHT yang masih harus dibayar oleh Perusahaan namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran per 31 Desember 2013 dengan rincian sebgai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Investasi Non JHT	--	234.776.654	70.317.236	--	179.413.493	484.507.383
Total	**--**	**234.776.654**	**70.317.236**	**--**	**179.413.493**	**484.507.383**

46. Iuran Belum Rinci

Iuran Belum Rinci (IBR) merupakan saldo penerimaan iuran Perusahaan program Jamsostek, program LHK dan iuran belum jelas penyetor (IBJP) per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Iuran Belum Rinci Jamsostek	105.982.256.681	19.195.951.675	8.976.546.936	--	--	134.154.755.292
Total	**105.982.256.681**	**19.195.951.675**	**8.976.546.936**	**--**	**--**	**134.154.755.292**

Iuran belum rinci merupakan penerimaan iuran perusahaan program Jamsostek dan program LHK yang belum didukung dengan upah tenaga kerja serta iuran yang belum jelas identitas penyetornya, dimana sesuai dengan Keputusan Direksi No. KEP/289/112004 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Program Jamsostek dan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja No. PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek bahwa penerimaan iuran dari perusahaan yang belum didukung dengan data upah tidak dapat diakui sebagai pendapatan iuran.

		31 Desember 2013			
		IBR Program Jamsostek	IBR Program LHK	Iuran Belum Jelas Penyetorannya	Total
Kantor Pusat	JHT	--	--	4.986.513.443	4.986.513.443
	JKK	--	--	903.178.269	903.178.269
	JKM	--	--	422.350.622	422.350.622
	JPK	--	--	--	--
	Total	--	--	6.312.042.335	6.312.042.335
Kantor Wilayah I	JHT	1.009.859.556	1.539.483.853	119.204.787	2.668.548.195
	JKK	182.910.006	278.837.784	21.590.872	483.338.663
	JKM	85.533.673	130.392.101	10.096.476	226.022.250
	JPK	--	--	--	--
	Total	1.278.303.235	1.948.713.738	150.892.135	3.377.909.108
Kantor Wllayah II	JHT	1.020.939.830	1.055.539.656	217.985.691	2.294.465.177
	JKK	184.916.912	191.183.778	39.482.484	415.583.174
	JKM	86.472.157	89.402.713	18.463.079	194.337.949
	JPK	--	--	--	--
	Total	1.292.328.899	1.336.126.147	275.931.254	2.904.386.300
Kantor Wllayah III	JHT	32.608.292.425	1.849.844.385,88	1.237.895.131	35.696.031.942
	JKK	5.906.150.946	335.051.588	224.212.768	6.465.415.302
	JKM	2.761.876.154	156.679.198	104.847.963	3.023.403.315
	JPK	--	--	--	--
	Total	41.276.319.525	2.341.575.172	1.566.955.862	45.184.850.559
Kantor Wllayah IV	JHT	7.791.213.953	3.630.881.334	1.230.519.956	12.652.615.244
	JKK	1.411.177.410	657.640.484	222.876.945	2.291.694.840
	JKM	659.904.780	307.530.503	104.223.296	1.071.658.579
	JPK	--	--	--	--
	Total	9.862.296.143	4.596.052.322	1.557.620.198	16.015.968.663
Kantor Wllayah V	JHT	2.315.569.040	3.324.642.798	--	5.640.211.838
	JKK	419.405.595	602.173.274	--	1.021.578.869
	JKM	196.125.416	281.592.533	--	477.717.949
	JPK	--	--	--	--
	Total	2.931.100.051	4.208.408.605	--	7.139.508.656
Kantor Wilayah VI	JHT	11.788.437.417	2.340.859.658	340.158.981	14.469.456.056
	JKK	2.135.171.321	423.986.338	61.611.024	2.620.768.682
	JKM	998.463.942	198.267.495	28.810.984	1.225.542.421
	JPK	--	--	--	--
	Total	14.922.072.680	2.963.113.491	430.580.988	18.315.767.159
Kantor Wilayah VII	JHT	2.801.801.324	5.205.364.666	379.731.009	8.386.897.000
	JKK	507.474.029	942.817.522	68.778.476	1.519.070.027
	JKM	237.308.601	440.887.010	32.162.678	710.358.289
	JPK	--	--	--	--
	Total	3.546.583.955	6.589.069.198	480.672.163	10.616.325.316
Kantor Wllayah VIII	JHT	615.875.795	2.620.405.985	247.622.277	3.483.904.057
	JKK	111.550.012	474.618.943	44.850.387	631.019.342
	JKM	52.163.807	221.944.673	20.973.256	295.081.736
	JPK	--	--	--	--
	Total	779.589.614	3.316.969.601	313.445.920	4.410.005.135
Kantor Wllayah IX	JHT	4.070.637.347	2.334.158.827	6.856.355	6.411.652.529
	JKK	737.290.941	422.772.655	1.241.852	1.161.305.448
	JKM	344.777.214	197.699.945	580.724	543.057.882
	JPK	--	--	--	--
	Total	5.152.705.503	2.954.631.427	8.678.930	8.116.015.860
Kantor Wllayah X	JHT	5.762.838.743	1.602.658.612	14.551.583	7.380.048.937
	JKK	1.043.789.569	290.280.262	2.635.644	1.336.705.475
	JKM	488.104.274	135.742.913	1.232.498	625.079.686
	JPK	--	--	--	--
	Total	7.294.732.586	2.028.681.787	18.419.725	9.341.834.098
Kantor Wllayah XI	JHT	357.512.616	1.517.216.780	37.182.865	1.911.912.261
	JKK	64.754.187	274.804.679	6.734.717	346.293.583
	JKM	30.280.812	128.506.111	3.149.336	161.936.259
	JPK	--	--	--	--
	Total	452.547.615	1.920.527.570	47.066.918	2.420.142.103
Total		**88.788.579.806**	**34.203.869.058**	**11.162.306.428**	**134.154.755.292**

47. Iuran Karyawan

Akun ini merupakan saldo potongan karyawan untuk iuran Jamsostek, pensiun, tabungan hari tua dan iuran karyawan lainnya per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Potongan Serikat Pekerja Jamsostek	--	--	--	--	9.975.000	9.975.000
Iuran Jamsostek	--	--	--	--	399.580	399.580
Potongan Iuran Pensiun	--	--	--	--	148.950	148.950
Yayasan Al-Maghfirah	--	--	--	--	148.000	148.000
Perkumpulan Kematian Karyawan	--	--	--	--	100.190	100.190
Iuran JHT	--	--	--	--	59.580	59.580
Koperasi	--	--	--	--	1	1
Lain-lain	--	--	--	--	170.000	170.000
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**11.001.301**	**11.001.301**

48. Utang Usaha

Akun ini merupakan utang usaha entitas anak berupa saldo uang jaminan yang dibayarkan oleh TKI dan oleh perusahaan PJTKI yang akan dibayarkan kembali kepada KFSB atau kepada TKI sesuai ketentuan yang berlaku per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Usaha	--	--	--	--	7.299.459.390	7.299.459.390
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**7.299.459.390**	**7.299.459.390**

49. Perpajakan

a. Uang Muka Pajak

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Perusahaan						
Pajak Pertambahan Nilai	642.495.175	--	--	--	--	642.495.175
Entitas Anak						
Pajak Pertambahan Nilai	--	--	--	--	1.386.864.948	1.386.864.948
Total	**642.495.175**	**--**	**--**	**--**	**1.386.864.948**	**2.029.360.123**

b. Utang Pajak

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Perusahaan						
Pajak Penghasilan						
Pasal 21	7.765.491.061	--	--	--	55.331.176.812	63.096.667.873
Pasal 23	--	--	--	--	2.802.804.448	2.802.804.448
Pasal 25	--	--	--	--	46.440.401.078	46.440.401.078
Pasal 26	--	--	--	--	71.666.066	71.666.066
Pasal 29	--	--	--	--	77.025.425.659	77.025.425.659
Pajak Pertambahan Nilai	--	--	--	--	7.761.535.217	7.761.535.217
PPHTB	--	--	--	--	124.058.298.050	124.058.298.050
Bea Balik Nama	--	--	--	--	39.235.965.228	39.235.965.228
	7.765.491.061	--	--	--	352.727.272.558	360.492.763.619
Entitas Anak dan EBK						
Pajak Penghasilan						
Pasal 4 Ayat (2)	--	--	--	--	171.250.153	171.250.153
Pasal 21	--	--	--	--	146.606.284	146.606.284
Pasal 23	--	--	--	--	122.263.027	122.263.027
Pasal 25	--	--	--	--	213.648.398	213.648.398
Pasal 29	--	--	--	--	513.749	513.749
Pasal 29 Tahun 2011	--	--	--	--	48.048.747	48.048.747
Pajak Pertambahan Nilai	--	--	--	--	2.621.831.831	2.621.831.831
PPHTB	--	--	--	--	3.168.935.800	3.168.935.800
	--	--	--	--	6.493.097.989	6.493.097.989
Total	**7.765.491.061**	**--**	**--**	**--**	**359.220.370.547**	**366.985.861.608**

c. Pajak Tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan BPJS Konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Rp	Cadangan Umum Rp	31 Desember 2013 Rp
Perusahaan				
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	82.007.586.357	35.492.939.060	--	117.500.525.417
Penyusutan	19.075.480.202	130.599.133.214	--	149.674.613.416
Penyisihan Piutang Iuran	19.885.819.076	(19.885.819.076)	--	--
Penyisihan Penyertaan Langsung	4.371.941.300	--	--	4.371.941.300
Cadangan Teknis	1.370.393.684.333	--	(1.370.393.684.333)	--
	1.495.734.511.268	**146.206.253.198**	**(1.370.393.684.333)**	**271.547.080.133**
Entitas Anak				
Penyisihan Penurunan Nilai	162.542.709	--	--	162.542.709
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	(4.713.600)	1.585.833	--	(3.127.767)
Penyusutan	100.645.256	22.933.000	--	123.578.256
	258.474.365	**24.518.833**	**--**	**282.993.198**
Total Aset Pajak Tangguhan	**1.495.992.985.633**			**271.830.073.331**

Pada 31 Desember 2013 Perusahaan menyesuaikan aset pajak tangguhan yang berasal dari cadangan teknis JKK dan JKM sebesar Rp 1.370.393.684.333 ke cadangan umum. Pada saat Perusahaan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014, dilakukan pemisahan aset untuk setiap program, dimana pada saat pemisahan aset jumlah aset program sama dengan liabilitas program. Perubahan status program JKK dan JKM yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan per 1 Januari 2014 menjadi entitas nirlaba Dana Jaminan Sosial JKK dan JKM yang terpisah dari Perusahaan. Hasil pengelolaan program JKK dan JKM sampai dengan 31 Desember 2013 terakumulasi dalam saldo laba Perusahaan yang penggunaannya telah ditetapkan menjadi cadangan umum. Berdasarkan kondisi di atas manajemen menyesuaikan aset pajak tangguhan ke cadangan umum.

d. Administrasi

Perusahaan dan entitas anak menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak terutang.

Berdasarkan perubahan terakhir UU Pajak Penghasilan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutang pajak.

Sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah bahwa pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang dikenakan PPN dan pengguna jasa wajib melakukan penyetoran PPN ke persepsi.

e. Surat Ketetapan Pajak

Tahun Pajak	Objek Pajak	Nomor Hasil Pemeriksaan	Tanggal Terbit	Total Kurang Bayar Pajak Rp
Kapitasi				
Cabang NTB				
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00003/201/10/911/13	28 Maret 2013	32.449.474
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00001/243/10/911/13	28 Maret 2013	19.980
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00001/503/10/911/13	28 Maret 2013	NIHIL
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00001/540/10/911/13	28 Maret 2013	NIHIL
Cabang Blitar				
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00003/201/10/653/13	30 July 2013	6.967.185
2011	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00005/201/11/653/13	30 July 2013	6.678.616
Cabang Madiun				
2010	SKP KB PPh Pasal 23	No. 00001/203/10/621/13	11 April 2013	726.424
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00001/201/10/621/13	11 April 2013	10.603.263
Tidak ada PPh 21 Kapitasi				
Cabang Palopo				
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00002/201/10/803/13	24 Juni 2013	2.857.025
Cabang Samarinda				
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00002/201/10/722/13	05 Juli 2013	1.741.691
Cabang Makassar				
2010	SKP KB PPh Pasal 23	No. 00024/203/10/812/13	30 Agustus 2013	451.524
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00008/201/10/812/13	30 Agustus 2013	51.791.419
Kanwil Sulawesi				
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00007/201/10/812/13	02 Agustus 2013	7.391.150
2010	SKP KB PPh Pasal 23	No. 00023/203/10/812/13	02 Agustus 2013	2.618.546
Cabang Tangerang 1				
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00004/201/10/415/13	08 Maret 2013	8.454.537
2010	SKP KB PPh Pasal 21	No. 00001/543/10/415/13	08 Maret 2013	NIHIL
2010	SKP KB PPh Pasal 23	No. 00002/503/10/415/13	08 Maret 2013	NIHIL
2010	SKP KB PPh Pasal 23	No. 00002/503/10/415/13	08 Maret 2013	NIHIL
	Total SKP			**132.750.834**

Perusahaan menerima SKPKb No.00003/206/07/051/09 tanggal 11 Mei 2009 atas pajak penghasilan tahun pajak 2007 sebesar Rp 63.241.891.279 yang terdiri dari pajak penghasilan badan sebesar Rp 47.195.441.253 dan bunga sebesar Rp 16.046.450.026 atas SPT lebih bayar tahun 2007 yang telah dilaporkan Perusahaan sebesar Rp 14.034.215.663 tanggal 12 Juni 2009.

Perusahaan telah mengajukan permohononan keberatan melalui suratnya Nomor: B/4935/062009 atas SKPKB tersebut dan telah membayar secara mengangsur sebesar Rp 63.241.892.279 sebagai syarat pengajuan keberatan. Karena Perusahaan berkeyakinan bahwa koreksi audit dalam SKPKB dari otoritas perpajakan atas koreksi beban cadangan teknis program jaminan kematian sebesar Rp 132.169.519.132 dan pembebanan biaya bersama (joint cost) tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Surat keberatan Perusahaan atas ketetapan pajak telah diterima sebagian melalui surat keputusan Nomor: KEP-275/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 11 Juni 2010 semula kurang bayar sebesar Rp 63.241.891.279 dikurangi sebesar Rp 53.132.146.638 menjadi sebesar Rp 10.109.744.641.

Pada tanggal 30 Agustus 2010, Perusahaan mengajukan banding ke pengadilan Pajak melalui surat No. B/7465/082010. Sampai tanggal laporan keuangan, Pengadilan pajak belum mengeluarkan keputusan atas banding tersebut.

50. Beban Akrual

Akun ini merupakan saldo beban akrual per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban Usaha yang Masih Harus Dibayar	--	--	--	--	49.588.509.996	49.588.509.996
Tagihan Pihak Ketiga	--	--	--	--	18.847.522	18.847.522
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**49.607.357.518**	**49.607.357.518**

51. Pendapatan Diterima di Muka

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang diterima di muka entitas anak atas sewa bangunan investasi dan sewa gedung belanja modal per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Diterima di Muka					3.302.016.750	3.302.016.750
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**3.302.016.750**	**3.302.016.750**

52. Liabilitas yang Masih Harus Dibayar

Akun ini merupakan saldo liabilitas yang masih harus dibayar Perusahaan per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Gratifikasi	--	--	--	--	77.366.508.533	77.366.508.533
Tantiem	--	--	--	--	49.841.056.041	49.841.056.041
Liabilitas yang Masih Harus Dibayar Bergulir	--	--	--	--	9.180.000.000	9.180.000.000
Liabilitas yang Masih Harus Dibayar Tidak Bergulir	--	--	--	--	329.500.000	329.500.000
Liabilitas yang Masih Harus Dibayar SKP	--	--	--	--	53.348.610	53.348.610
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**136.770.413.184**	**136.770.413.184**

53. Liabilitas Pembelian Aset

Akun ini merupakan saldo liabilitas pembelian aset tetap per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Pembelian Aset	--	--	--	--	70.306.824.418	70.306.824.418
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**70.306.824.418**	**70.306.824.418**

54. Jaminan Pihak Ketiga

Akun ini merupakan saldo jaminan pihak ketiga atas sewa ruangan per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Jaminan Sewa Bangunan	24.068.560.825	--	--	--	243.116.776	24.311.677.601
Jaminan Sewa Telepon	4.039.625.804	--	--	--	40.804.301	4.080.430.105
Jaminan Sewa Lain-lain	175.576.500	--	--	--	1.773.500	177.350.000
Total	**28.283.763.129**	**--**	**--**	**--**	**285.694.577**	**28.569.457.706**

55. Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Untuk Operasional

Akun ini merupakan saldo DPKP untuk operasional per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
DPKP untuk Operasional						
Saldo Awal	--	--	--	--	254.081.500.002	254.081.500.002
Distribusi Laba Tahun 2013	--	--	--	--	400.000.000.000	400.000.000.000
Penurunan DPKP untuk Operasional	--	--	--	--	138.401.225.239	138.401.225.239
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**792.482.725.241**	**792.482.725.241**

Distribusi laba tahun 2013 sebesar Rp 400.000.000.000 pada tahun 2014 sesuai dengan RUPS tanggal 11 Maret 2014 (lihat Catatan 63).

56. Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Telah Disalurkan

Akun ini merupakan saldo DPKP yang telah disalurkan per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
DPKP telah Disalurkan						
Saldo Awal	--	--	--	--	498.545.590.958	498.545.590.958
Kenaikan DPKP Telah Disalurkan	--	--	--	--	167.934.873.545	167.934.873.545
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**666.480.464.503**	**666.480.464.503**

57. Imbalan Pasca Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pentuup sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	--	--	--	--	483.125.094.687	483.125.094.687
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**483.125.094.687**	**483.125.094.687**

Rincian imbalan pasca kerja BPJS Konsolidasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013 Rp
Imbalan Pasca Kerja	
Perusahaan	481.980.847.687
Entitas Anak	1.144.247.000
Total	**483.125.094.687**

Perhitungan Imbalan Kerja untuk Perusahaan

Imbalan kerja yang menjadi dasar valuasi ini adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PSAK No, 24 (revisi 2010), dan Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan.

Valuasi aktuaria per 31 Desember 2013 menggunakan metode *Projected Unit Credit* (PUC) dan berbagai asumsi aktuaria baik asumsi ekonomis maupun asumsi demografis, diantaranya:

	31 Desember 2013
Perusahaan	
Tingkat Diskonto	9,04%
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	10%
Tingkat Mortalitas	1% dari mortalita
Tingkat Cacat	TMI III tahun 2011
Tingkat Pengunduran Diri	6% di usia 20 tahun, menurun hingga 1% di usia 50 tahun
Usia Pensiun Normal	56 tahun
Entitas Anak	
Tingkat Diskonto	8,5%
Tingkat Mortalitas	6%
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	TMI III
Tingkat Cacat	10%
Tingkat Pengunduran Diri	0 - 6%
Usia Pensiun Normal	55 tahun

Liabilitas Manfaat Imbalan Pasca Kerja

Perhitungan Manfaat Pensiun tahun 2013 dilakukan oleh aktuaris internal Perusahaan berdasarkan Laporan Aktuaris tanggal 17 Februari 2013 oleh Aktuaris Pramudya Iriawan B, FSAI, AAAI-J No. Reg. PAI 2011101391 dan tahun 2012 dilakukan oleh aktuaris eksternal berdasarkan Laporan Aktuaris oleh Aktuaris Drs. H. Amran Nangasan MSc, FSAI, AAAI-J No. Reg. PAI 2001001. Sedangkan untuk Entitas Anak, dilakukan oleh PT Mitra Aktuaria Solusi dalam laporannya No. 862R/PSAK-BAK/II/2013.

Dari perhitungan aktuaria sesuai dengan ketentuan PSAK No. 24 (revisi 2004) terhadap Imbalan Kerja berdasarkan asumsi-asumsi akturia, data peserta dan data keuangan menghasilkan jumlah (Kewajiban)/Kekayaan yang diakui pada Laporan Posisi Keuangan oleh Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013 Rp
Perusahaan	
Nilai Kini Kewajiban	1.118.615.477.519
Kerugian Aktuarial yang Belum Diakui	(605.022.670.317)
Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakul - *Non Vested*	(31.611.959.515)
Liabilitas Manfaat Imbalan Pasca Kerja	481.980.847.687
Pergerakan Liabilitas yang diakui di Laporan Posisi Keuangan Penutup	
Liabilitas Awal Periode	343.651.186.485
Behan Periode Berjalan	219.605.696.929
Imbalan yang Dibayar	(81.276.035.727)
Liabilitas Akhir Periode Perusahaan	481.980.847.687
Entitas Anak	
Liabilitas Awal Periode	1.141.765.000
Beban Periode Berjalan	91.732.000
Imbalan yang Dibayar	(89.250.000)
Liabilitas Akhir Periode	1.144.247.000
Total	**483.125.094.687**

58. Liabilitas Lain-lain

Akun ini merupakan saldo liabilitas lain per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pos Sementara dalam Penyelesaian	--	--	--	--	253.393.103	253.393.103
Lain-Lain	--	--	--	--	3.372.682.344	3.372.682.344
Total	**--**	**--**	**--**	**--**	**3.626.075.447**	**3.626.075.447**

59. Angsuran Belum Jelas Penyetor Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

Akun ini merupakan saldo angsuran belum jelas penyetor program DPKP per 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.152.597.380.

60. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 19 November 2013 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusaaan dari Notaris Nanda Fauzian, SH, M.Kn, susunan pemegang saham Perusahaan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Desember 2013		
	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Total Rp
Negara Republik Indonesia	4.000.000	100	4.000.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 19 November 2013 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dari Notaris Nanda Fauzian, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, disetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 3.000.000.000.000 menjadi Rp 8.000.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 1.500.000.000.000 menjadi Rp 4.000.000.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 2.500.000.000.000 berasal dari kapitalisasi cadangan umum. Perubahan anggaran dasar telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-60955.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 November 2013 (lihat Catatan 61).

61. Cadangan Umum

Akun ini merupakan saldo cadangan umum Perusahaan per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	2013 Rp
BPJS Konsolidasi	
Saldo Awal	1.747.995.060.748
Penambahan:	
Distribusi Laba Tahun 2012	1.556.941.146.376
Reklasifikasi Dana Pengembangan Non JHT	1.198.421.605.861
Distribusi Laba Tahun 2013	1.677.642.937.018
Total	6.181.000.750.003
Pengurangan:	
Koreksi saldo laba tahun lalu	(60.479.667.431)
Reklasifikasi ke modal disetor	(2.500.000.000.000)
Koreksi Aset Pajak Tangguhan	(1.370.393.684.333)
Total	(3.930.873.351.764)
Saldo Akhir	**2.250.127.398.239**

Distribusi laba tahun 2012 sebesar Rp 1.556.941.146.376 pada tahun 2013 berdasarkan hasil RUPS tanggal 3 Mei 2013 (lihat Catatan 63).

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Laporan Tahunan tahun buku 2012 tanggal 3 Mei 2013 disetujui reklasifikasi pos dana pengembangan Non JHT ke pos cadangan umum sebesar Rp 1.198.421.605.861 (lihat Catatan 44).

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 19 November 2013 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dari Notaris Nanda Fauzian, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, disetujui penggunaan dana cadangan umum untuk mengkoreksi laba tahun buku sebelumnya sebesar Rp 60.479.667.431 karena dampak perubahan PSAK 55 tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran serta penerapan PSAK 62 tentang kontrak asuransi.

Perusahaan melakukan reklasifikasi cadangan umum sebesar Rp 2.500.000.000.000 menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan Akta No. 3 tanggal 19 November 2013 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dari Notaris Nanda Fauzian, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, (lihat Catatan 60).

Perusahaan menggunakan Cadangan Umum sebesar Rp 1.370.393.684.333 untuk penyesuaian Aset Pajak Tangguhan (lihat Catatan 49.c).

Distribusi laba tahun 2013 sebesar Rp 1.677.642.937.018 pada tahun 2014 berdasarkan hasil RUPS tanggal 11 Maret 2014 (lihat Catatan 63).

62. Cadangan Tujuan

Akun ini merupakan saldo cadangan tujuan per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berkut:

	31 Desember 2013 Rp
BPJS Konsolidasi	
Saldo Awal Tahun	588.211.054.227
Distribusi Laba Tahun 2012	275.000.000.000
Distribusi Laba Tahun 2013	210.000.000.000
Saldo Akhir	**1.073.211.054.227**

Distribusi laba tahun 2012 sebesar Rp 275.000.000.000 pada tahun 2013 sesuai dengan RUPS tanggal 3 Mei 2013 (lihat Catatan 63).

Distribusi laba tahun 2013 sebesar Rp 210.000.000.000 pada tahun 2014 sesuai dengan RUPS tanggal 11 Maret 2014 (lihat Catatan 63).

63. Saldo Laba

Saldo laba per 31 Desember 2013 terdiri dari:

	31 Desember 2013 Rp
Saldo Awal	2.121.461.478.945
Distribusi Laba Tahun 2012	(2.181.941.146.376)
Penyesuaian Saldo Laba Karena Perlakuan Akuntansi	60.479.667.431
Laba Tahun Tahun Berjalan	2.287.642.937.018
Distribusi Laba Tahun 2013	(2.287.642.937.018)
Total	**--**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Laporan Tahunan tahun buku 2012 tanggal 3 Mei 2013 disetujui penggunaan laba 2012 sebesar Rp 2.181.941.146.376 untuk DPKP sebesar Rp 350.000.000.000, cadangan tujuan sebesar Rp 275.000.000.000 dan cadangan umum sebesar Rp 1.556.941.146.376.

Penyesuaian saldo laba sebesar Rp 60.479.667.431 telah disetujui oleh pemegang saham (lihat Catatan 61).
Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: S-134/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan PT Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2013, disetujui penggunaan laba tahun 2013 sebesar Rp 2.287.642.937.018 untuk DPKP sebesar Rp 400.000.000.000, cadangan tujuan sebesar Rp 210.000.000.000 dan cadangan umum sebesar Rp 1.677.642.937.018.

64. Selisih Penilaian Efek – Dana Non JHT

Akun ini merupakan saldo peningkatan (penurunan) pada nilai wajar dalam investasi yang Tersedia untuk Dijual yang dananya didapatkan dari program Non JHT. Saldo per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013					
	JHT	JKK	JKM	JPK	BPJS Konsolidasi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saham	--	(578.199.866.036)	(174.904.951.009)	--	(445.977.595.191)	(1.199.082.412.236)
Reksadana	--	(83.956.344.111)	(22.587.430.083)	--	(62.166.138.329)	(168.709.912.523)
Obligasi	--	(2.711.470.545)	(819.873.876)	--	(2.135.475.579)	(5.666.820.000)
Total	**--**	**(664.867.680.692)**	**(198.312.254.968)**	**--**	**(510.279.209.099)**	**(1.373.459.144.759)**

65. Kepentingan Non Pengendali

Bagian pemilik saham minoritas atas aset bersih entitas anak per 31 Desember 2013 sebesar Rp 2.836.404.

66. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Obligasi, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, penitipan surat berharga, Rekening Kustodi
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi, Virtual Account, Co Branding, Rekening Kustodi
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Obligasi, Virtual Account,Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB), Penempatan Investasi - Saham, Rekening Kustodi
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - KIK-EBA, Penempatan Investasi - Obligasi, Penempatan Investasi - Saham, Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB)
	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Sukuk
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pupuk Kalimantan Timur	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	Perum Pembangunanan Perumahan Nasional	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Timah (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham

67. Kontinjensi

Piutang Iuran dan Denda

Jumlah nilai dari piutang iuran serta denda JHT dan Non JHT yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih namun belum diakui pada laporan keuangan Perusahaan dikarenakan Data Upah Siap Rekon (DUSR) belum diajukan oleh perusahaan peserta pada 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013				
	JHT Rp	JKK Rp	JKM Rp	JPK Rp	Total Rp
Piutang Iuran	401.526.603.108	52.225.856.429	21.867.414.441	67.419.117.817	543.038.991.795
Piutang Denda	99.801.197.918	13.255.308.979	5.548.483.439	17.108.721.750	135.713.712.086
Total	**501.327.801.026**	**65.481.165.408**	**27.415.897.880**	**84.527.839.567**	**678.752.703.882**

Piutang iuran Non JHT, Piutang denda Non JHT, dan piutang denda JHT diakui ketika DUSR diterima dari perusahaan peserta, dan piutang JHT tidak dicatat disebabkan iuran JHT akan diakui pada saat kas diterima. Perusahaan tidak mencatatkan piutang iuran dan denda ketika tidak didukung oleh DUSR.

a. Piutang iuran JHT dan Non JHT yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013				
	JHT Rp	JKK Rp	JKM Rp	JPK Rp	Total Rp
Piutang Iuran					
Kantor Wilayah I	15.198.988.861	1.475.943.848	800.790.360	6.104.487.772	23.580.210.842
Kantor Wilayah II	16.990.154.471	3.132.163.039	1.022.939.684	5.731.062.967	26.876.320.160
Kantor Wilayah III	164.634.465.679	18.770.731.709	8.668.156.286	15.366.628.247	207.439.981.920
Kantor Wilayah IV	74.227.768.124	9.324.068.690	3.909.679.422	11.183.487.855	98.645.004.093
Kantor Wilayah V	11.837.743.120	1.164.465.433	634.014.184	4.830.955.650	18.467.178.387
Kantor Wilayah VI	31.316.675.152	3.994.714.987	1.885.878.455	4.921.982.056	42.119.250.650
Kantor Wilayah VII	29.139.384.126	6.364.504.119	1.676.937.026	7.786.462.623	44.967.287.894
Kantor Wilayah VIII	7.180.888.965	1.075.535.182	411.300.383	2.160.148.438	10.827.872.969
Kantor Wilayah IX	30.942.028.204	4.827.158.462	1.723.811.233	6.638.622.400	44.131.620.299
Kantor Wilayah X	16.647.187.386	1.509.400.623	953.684.802	1.749.458.367	20.859.731.178
Kantor Wilayah XI	3.411.319.019	587.170.335	180.222.607	945.821.443	5.124.533.403
Total	**401.526.603.108**	**52.225.856.429**	**21.867.414.441**	**67.419.117.817**	**543.038.991.795**

b. Piutang denda JHT dan Non JHT yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013				
	JHT Rp	JKK Rp	JKM Rp	JPK Rp	Total Rp
Denda Iuran					
Kantor Wilayah I	6.480.935.949	774.809.782	324.324.333	1.000.052.507	8.580.122.571
Kantor Wilayah II	3.360.445.625	584.740.399	244.763.998	754.728.599	4.944.678.620
Kantor Wilayah III	41.294.769.450	4.062.172.133	1.700.367.365	5.243.074.517	52.300.383.465
Kantor Wilayah IV	12.159.044.347	1.886.290.148	789.574.174	2.434.648.134	17.269.556.803
Kantor Wilayah V	3.241.147.273	553.441.716	231.662.815	714.331.166	4.740.582.970
Kantor Wilayah VI	8.735.687.408	1.299.710.127	544.040.137	1.677.545.122	12.256.982.794
Kantor Wilayah VII	8.822.901.702	1.439.680.026	602.629.542	1.858.205.268	12.723.416.538
Kantor Wilayah VIII	2.413.440.589	453.762.771	189.938.629	585.674.842	3.642.816.831
Kantor Wilayah IX	4.747.014.184	935.478.750	391.578.073	1.207.429.088	7.281.500.094
Kantor Wilayah X	6.471.083.299	929.869.685	389.230.199	1.200.189.429	8.990.372.612
Kantor Wilayah XI	2.074.728.093	335.353.444	140.374.172	432.843.079	2.983.298.788
Total	**99.801.197.918**	**13.255.308.979**	**5.548.483.439**	**17.108.721.750**	**135.713.712.086**

Perkara Hukum

Dalam melakukan kegiatan, Perusahaan tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset, Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, terdiri atas:

a. Gugatan Ahli Waris A. Romli & CV. Royal Bersaudara
   Gugatan perbuatan melawan hukum atas Penetapan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menetapkan bahwa klaim JKK yang diajukan CV Royal Bersaudara bukan merupakan kecelakaan kerja. Kasus ini ditangani oleh Biro Kepatuhan dan Hukum, yang saat ini masih dalam proses Kasasi Mahkamah Agung RI.

b. Gugatan Sdr Abdul Rahmah R (Mantan Karyawan PT Dharma Henwa)
   Gugatan terkait Pelaporan data upah sebagian yang dilaporkan Perusahaan dalam program jamsostek, yang merugikan karyawan karena menerima santunan cacat tetap yang lebih kecil dari seharusnya. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan menetapkan Perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum. PT Dharma Henwa diharuskan membayar JKK sebesar Rp 41.082.047. Saat ini masih melakukan Kasasi Mahkamah Agung.

c. Gugatan H. M Arif & Hj. Petta Intang
   Perkara sengketa tanah milik PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Kendari yang di klaim oleh H.M Arif & Hj. Petta Intang. Putusan Pengadilan Negeri Kendari menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya. Saat ini masih melakukan Kasasi Mahkamah Agung.

d. Gugatan Sdr. Dadan Umbara (Mantan Karyawan Panasia Indosyntec Group)
   Gugatan perdata terkait pelaporan data upah sebagian dalam kepesertaan program jamsostek yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Saat ini Perkara disidangkan kembali di Pengadilan Negeri Bandung.

e. Gugatan Euis Widianingsih Dkk karyawan PT Panasia Filament Inti Tbk.
   Gugatan terkait PDS upah iuran JHT, PT Jamsostek (Persero) sebagai Turut Tergugat. Kasus ini di tangani oleh Biro Kepatuhan dan Hukum. Dan masih ini masih berlanjut di Pengadilan Negeri Bandung.

f. Gugatan kepada Indro Tjahyono
   Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Kasus pencemaran nama baik mantan Direksi (Alm Bpk A. Djunaidi) oleh Sdr Indro Tjhayono /Staf Ahli Depnakertrans.

g. Penyelesaian aset Sdr. Eddy Sofyan
   Penyelesaian aset Sdr. Eddy Sofyan berupa jaminan atas 14 Sertifikat Tanah di Desa Cerucuk, Tanjung Pandan, Belitung. (Jaminan tambahan MTN PT Volgren Indonesia)

h. Penyelesaian asset ex MTN PT Sapta Prana Jaya
   1) Tanah di Desa Waringin Jaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang,
   2) Tanah di Desa Sinar Jaya , Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang,
   3) Tanah di Desa Tambak , Kecamatan Cimarga , Kabupaten Lebak,
   4) Tanah di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor.

i. Pelaksanaan Lelang Tahap III
   Pelaksanaan Lelang Tahap III Tanah di Desa Kamarung Kecamatan Pegaden Subang Jawa Barat (Aset Jaminan MTN PT Volgren Indonesia).

   Telah dilakukan lelang eksekusi tahap III pada tanggal 27 November 2013, dan belum terjual disebabkan harga limit yang ditetapkan berdasarkan appraisal yang dilakukan oleh PN Subang lebih tinggi dari harga pasaran property setempat menyebabkan tidak ada peserta lelang.

j. Investigasi bus PT Volgren Indonesia di Cirebon dan Purwokerto.
Berdasarkan laporan kunjungan Lapangan ke Purwokerto dan ditemukan Bis sudah dipotong-potong.

k. Kasus kepailitan PT Eight Oh Two Indonesia
Pengajuan Tagihan Iuran perusahaan dalam proses pailit, kepesertaan Kacab Tanjung Priok, saat ini Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit dan masih dalam proses pemberesan harta pailit oleh pihak Kurator

l. Perkara Perdata Nomor : 159/Pdt.G/PN.Jkt.Tim
Kasus sengketa ahli waris klaim JKM & JHT a/n Alm Asimin karyawan PT Yamaha Indonesia Motor Manufactoring, kepesertaan Kacab Rawamangun. Putusan PN Jakarta Timur Nomor : 159/Pdt.G/PN.Jkt.Tim, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas putusan tersebut penggugat menyatakan banding. Saat masih dalam proses banding

m. Permasalahan Tenaga Outsorcing Pengemudi
Sudah terdapat kesepakatan dengan ditandatangani akta perdamaian di hadapan mediator Pegawai Pengawas Disnakertrans. Kasus ini telah selesai dengan dibayarnya pesangon.

n. Pendapat Hukum JAMDATUN terkait rencana investasi PT Jamsostek (Persero)
Legal Opini Jamdatun terkait Investasi yang telah disampaikan tanggal 2 Mei 2013 kepada PT Jamsostek (Persero).

o. PHK Karyawan Outsourcing Jamsostek 2013
(i). Terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012 dan permenaker Nomor 19 tahun 2012, tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, yang penyesuaiannya paling lama 12 (dua belas) bulan atau pada 13 November 2013.
(ii). Manajemen mengambil kebijakan mengakhiri penggunaan outsourcing untuk tenaga administrasi terhitung 31 Oktober 2013, dengan tahapan sbb:
- Diberikan kesempatan seleksi untuk diangkat menjadi karyawan tetap dengan persyaratan cukup longgar, mengingat kontribusinya selama ini.
- Untuk yang tidak lolos seleksi diakhiri hubungan kerjanya dengan diberiikan kompensasi sesuai ketentuan UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Sampai saat ini masih ada beberapa outsourcing yang belum menerima pengakhiran hubungan kerja dan masih melakukan upaya hukum.

p. Penangan Kasus Blitar
Berdasarkan surat kuasa Nomor: SKS /52/112013 dari Direktur Utama kepada Kanwil Jatimbanusra mengenai pelaporan kasus Blitar kepada Kejaksaan Tinggi Jatim.

q. Perkara Pidana Pembobolan JHT oleh sdr. A. Harry Mufty dkk
Perkara Pidana Pembobolan JHT oleh sdr. A. Harry Mufty dkk di beberapa kantor cabang. Sampai dengan saat ini Polsek Mampang menahan 3 orang yaitu A. Harry Mufty, Anti Kholifatin dan Sodikin. Persidangan atas kasus ini telah dilaksanakan dan menjatuhkan vonis kepada 3 terdakwa selama 9 bulan pidana penjara.

r. Kasus Penyerobotan Tanah learning Center Bogor.
Telah ditunjuk Lawfirm James Purba & Associates untuk melakukan pengamanan aset : melakukan penjagaan maupun melakukanpenanganan perkara hukum apabila ada gugatan perdata / laporan pidana dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah.

68. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian.

	31 Desember 2013						
	Nilai Tercatat						Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Dimiliki Untuk Dijual	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Diukur Berdasarkan Biaya Perolehan Diamortisasi	Total Nilai Tercatat	
JHT							
Aset Keuangan							
INVESTASI							
Bank Investasi	--	6.776.635.392	--	--	--	6.776.635.392	6.776.635.392
Deposito	--	36.015.899.000.000	--	--	--	36.015.899.000.000	36.015.899.000.000
Saham	392.511.200.000	--	23.054.773.853.660	--	--	23.447.285.053.660	23.447.285.053.660
Reksadana	24.364.096.165	--	10.574.983.762.459	--	--	10.599.347.858.624	10.599.347.858.624
KIK EBA	--	--	--	100.000.000.000	--	100.000.000.000	100.000.000.000
Sukuk	33.356.906.842	--	--	5.559.554.771.284	--	5.592.911.678.126	5.592.911.678.126
Obligasi	1.837.634.994.999	--	1.669.659.089.750	51.629.581.136.807	--	55.136.875.221.556	55.136.875.221.556
Penyertaan	--	--	--	--	--	--	--
NON INVESTASI							
Kas	--	--	--	--	--	--	--
Bank	--	245.523.315.410	--	--	--	245.523.315.410	245.523.315.410
DOC Non Investasi	--	486.000.000.000	--	--	--	486.000.000.000	486.000.000.000
Penempatan Sementara	--	--	--	--	--	--	--
Piutang Usaha	--	--	--	--	--	--	--
Piutang Iuran	--	--	--	--	--	--	--
Pend YMHD	--	1.376.707.013.246	--	--	--	1.376.707.013.246	1.376.707.013.246
Pinjaman Diberikan	--	--	--	--	--	--	--
Aset Investasi Tidak Produktif	--	--	--	--	--	--	--
Total JHT	**2.287.867.198.006**	**38.130.905.964.048**	**35.299.416.705.869**	**57.289.135.908.091**	**--**	**133.007.325.776.014**	**133.007.325.776.014**
JKK							
Aset Keuangan							
INVESTASI							
Bank Investasi	--	2.892.879.555	--	--	--	2.892.879.555	2.892.879.555
Deposito	--	1.358.214.000.000	--	--	--	1.358.214.000.000	1.358.214.000.000
Saham	54.368.502.024	--	3.998.607.156.896	--	--	4.052.975.658.920	4.052.975.658.920
Reksadana	--	--	581.303.572.715	--	--	581.303.572.715	581.303.572.715
KIK EBA	--	--	--	44.390.501.674	--	44.390.501.674	44.390.501.674
Sukuk	--	--	--	96.676.000.000	--	96.676.000.000	96.676.000.000
Obligasi	21.810.444.933	--	156.871.529.455	1.699.393.736.696	--	1.878.075.711.084	1.878.075.711.084
Penyertaan	--	--	--	--	--	--	--
NON INVESTASI							
Kas	--	--	--	--	--	--	--
Bank	--	8.443.681.712	--	--	--	8.443.681.712	8.443.681.712
DOC Non Investasi	--	--	--	--	--	--	--
Penempatan Sementara	--	--	--	--	--	--	--
Piutang Usaha	--	--	--	--	--	--	--
Piutang Iuran	--	43.882.719.733	--	--	--	43.882.719.733	43.882.719.733
Pend YMHD	--	27.478.562.669	--	--	--	27.478.562.669	27.478.562.669
Pinjaman Diberikan	--	--	--	--	--	--	--
Aset Investasi Tidak Produktif	--	--	--	--	--	--	--
Total JKK	**76.178.946.957**	**1.440.911.843.669**	**4.736.782.259.066**	**1.840.460.238.370**	**--**	**8.094.333.288.062**	**8.094.333.288.062**
JKM							
Aset Keuangan							
INVESTASI							
Bank Investasi	--	--	--	--	--	--	--
Deposito	--	446.090.000.000	--	--	--	446.090.000.000	446.090.000.000
Saham	16.283.743.450	--	1.197.610.577.391	--	--	1.213.894.320.841	1.213.894.320.841
Reksadana	--	--	138.385.558.335	--	--	138.385.558.335	138.385.558.335
KIK EBA	--	--	--	3.976.815.202	--	3.976.815.202	3.976.815.202
Sukuk	--	--	--	30.215.000.000	--	30.215.000.000	30.215.000.000
Obligasi	6.816.212.679	--	48.390.126.124	513.818.898.867	--	569.025.237.670	569.025.237.670
Penyertaan	--	--	--	--	--	--	--
NON INVESTASI							
Kas	--	--	--	--	--	--	--
Bank	--	29.021.570.363	--	--	--	29.021.570.363	29.021.570.363
DOC Non Investasi	--	--	--	--	--	--	--
Penempatan Sementara	--	--	--	--	--	--	--
Piutang Usaha	--	--	--	--	--	--	--
Piutang Iuran	--	14.805.779.387	--	--	--	14.805.779.387	14.805.779.387
Pend YMHD	--	8.302.141.675	--	--	--	8.302.141.675	8.302.141.675
Pinjaman Diberikan	--	--	--	--	--	--	--
Aset Investasi Tidak Produktif	--	--	--	--	--	--	--
Total JKM	**23.099.956.129**	**498.219.491.425**	**1.384.386.261.850**	**548.010.714.069**	**--**	**2.453.716.423.473**	**2.453.716.423.473**

	31 Desember 2013						
	Nilai Tercatat						Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Dimiliki Untuk Dijual	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Diukur Berdasarkan Biaya Perolehan Diamortisasi	Total Nilai Tercatat	
JPK							
Aset Keuangan							
INVESTASI							
Bank Investasi	--	--	--	--	--	--	--
Deposito	--	290.500.000.000	--	--	--	290.500.000.000	290.500.000.000
Saham	--	--	--	--	--	--	--
Reksadana	--	--	--	--	--	--	--
KIK EBA	--	--	--	--	--	--	--
Sukuk	--	--	--	--	--	--	--
Obligasi	--	--	--	--	--	--	--
Penyertaan	--	--	--	--	--	--	--
NON INVESTASI							
Kas	--	--	--	--	--	--	--
Bank	--	76.968.776.219	--	--	--	76.968.776.219	76.968.776.219
DOC Non Investasi	--	--	--	--	--	--	--
Penempatan Sementara	--	--	--	--	--	--	--
Piutang Usaha	--	--	--	--	--	--	--
Piutang Iuran	--	43.261.122.263	--	--	--	43.261.122.263	43.261.122.263
Pend YMHD	--	125.047.222	--	--	--	125.047.222	125.047.222
Pinjaman Diberikan	--	--	--	--	--	--	--
Aset Investasi Tidak Produktif	--	--	--	--	--	--	--
Total JPK	**--**	**410.854.945.704**	**--**	**--**	**--**	**410.854.945.704**	**410.854.945.704**
BPJS Konsolidasi							
Aset Keuangan							
INVESTASI							
Bank Investasi	--	116.010.675	--	--	--	116.010.675	116.010.675
Deposito	--	2.069.293.691.000	--	--	--	2.069.293.691.000	2.069.293.691.000
Saham	41.547.754.526	--	3.055.687.436.913	--	--	3.097.235.191.439	3.097.235.191.439
Reksadana	--	--	448.051.614.012	--	--	448.051.614.012	448.051.614.012
KIK EBA	--	--	--	95.555.642.529	--	95.555.642.529	95.555.642.529
Sukuk	--	--	--	73.109.000.000	--	73.109.000.000	73.109.000.000
Obligasi	16.493.450.388	--	122.071.524.421	1.293.882.920.652	--	1.432.447.895.461	1.432.447.895.461
Penyertaan	--	--	30.813.767.448	--	--	30.813.767.448	30.813.767.448
NON INVESTASI							
Kas	--	73.968.100	--	--	--	73.968.100	73.968.100
Bank	--	35.525.338.289	--	--	--	35.525.338.289	35.525.338.289
DOC Non Investasi	--	--	--	--	--	--	--
Penempatan Sementara	--	259.500.000.000	--	--	--	259.500.000.000	259.500.000.000
Piutang Usaha	--	2.001.336.078	--	--	--	2.001.336.078	2.001.336.078
Piutang Iuran	--	--	--	--	--	--	--
Pend YMHD	--	146.574.471.841	--	--	--	146.574.471.841	146.574.471.841
Pinjaman Diberikan	--	492.098.733.108	--	--	--	492.098.733.108	492.098.733.108
Aset Investasi Tidak Produktif	--	30.308.900.627	--	--	--	30.308.900.627	--
Total BPJS Konsolidasi	**58.041.204.914**	**3.035.492.449.718**	**3.656.624.342.794**	**1.462.547.563.181**	**--**	**8.212.705.560.607**	**8.182.396.659.980**
Total	**2.445.187.306.006**	**43.516.384.694.564**	**45.077.209.569.579**	**61.140.154.423.711**	**--**	**152.178.935.993.860**	**152.148.627.093.233**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

- Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, sukuk, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
- Nilai wajar dari saham, reksadana, obligasi dan sukuk dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada Catatan 2.e, 7, 8, 20, dan 21.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Perusahaan untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

i. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
ii. Tingkat 2: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
iii. Tingkat 3: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

	2013			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Total
JHT				
Aset Keuangan				
Saham	23.447.285.053.660	--	--	23.447.285.053.660
Reksadana	10.599.347.858.624	--	--	10.599.347.858.624
Sukuk	--	5.559.554.771.282	33.356.906.844	5.592.911.678.126
Obligasi	1.795.060.780.000	53.294.280.849.303	47.533.592.253	55.136.875.221.556
Total JHT	**35.841.693.692.284**	**58.853.835.620.585**	**80.890.499.097**	**94.776.419.811.966**
JKK				
Aset Keuangan				
Saham	4.052.975.658.920	--	--	4.052.975.658.920
Reksadana	581.303.572.715	--	--	581.303.572.715
Sukuk	--	96.676.000.000	--	96.676.000.000
Obligasi	--	1.878.075.711.084	--	1.878.075.711.084
Total JKK	**4.634.279.231.635**	**1.974.751.711.084**	**--**	**6.609.030.942.719**
JKM				
Aset Keuangan				
Saham	1.213.894.320.841	--	--	1.213.894.320.841
Reksadana	138.385.558.335	--	--	138.385.558.335
Sukuk	--	30.215.000.000	--	30.215.000.000
Obligasi	--	569.025.237.670	--	569.025.237.670
Total JKM	**1.352.279.879.176**	**599.240.237.670**	**--**	**1.951.520.116.846**
BPJS Konsolidasi				
Aset Keuangan				
Saham	3.097.235.191.439	--	--	3.097.235.191.439
Reksadana	448.051.646.012	--	--	448.051.646.012
Sukuk	--	73.109.000.000	--	73.109.000.000
Obligasi	--	1.432.447.895.461	--	1.432.447.895.461
Total BPJS Konsolidasi	**3.545.286.837.451**	**1.505.556.895.461**	**--**	**5.050.843.732.912**
Total	**45.373.539.640.546**	**62.933.384.464.800**	**80.890.499.097**	**108.387.814.604.443**

69. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

a. Transformasi kelembagaan PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(i). Pada 25 November 2011, ditetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sesuai UU 24/2011, PT Jamsostek (Persero) akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015 sehingga secara resmi UU 3 Tahun 1992 dicabut dan PT Jamsostek (Persero) dibubarkan tanpa likuidasi. Program yang diselenggarakan mengalami perubahan yaitu ditambah Jaminan Pensiun, sedangkan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) diserahkan kepada BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan/ASKES (Persero). Untuk melaksanakan UU ini, sesuai Pasal 70 maka Pemerintah harus menetapkan seluruh peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, Pemerintah telah menetapkan 5 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden dan 1 Keputusan Presiden, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggraaan Jaminan Sosial.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Peraturan Presiden Nomor: 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.
7. Peraturan Presiden Nomor: 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
8. Peraturan Presiden Nomor: 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(ii). BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JK). Pada saat berlakunya UU No. 24 sesuai pasal 62 angka 2 huruf d, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, paling lambat 1 Juli 2015.

(iii). Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 61 huruf c disebutkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) sampai dengan berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan ditugasi untuk menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jaminan Sosial Tenanga Kerja (Persero) terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tanggal 27 Desember 2013 pasal 15 angka 4 dan 5 disebutkan bahwa aset dana jaminan sosial yang bersumber dari hasil pengalihan aset program jaminan sosial ketenagakerjaan paling sedikit sebesar liabilitas kepada peserta pada saat pengalihan aset PT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pengalihan aset dan liabilitas Program JPK yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :

		Rp
ASET		
Kas dan Setara Kas		
Giro		367.593.823.441
Piutang Iuran		
Piutang Iuran	83.877.802.574	
Akumulasi Penyisihan Piutang Iuran	(40.616.680.311)	
Piutang Iuran (Bersih)		43.261.122.263
JUMLAH ASET		**410.854.945.704**
LIABILITAS		
Utang Jaminan		
Utang jaminan	--	
Utang jaminan diestimasi	58.729.201.217	
Utang jaminan IBNR	29.476.698.075	
		88.205.899.292
Cadangan Teknis JPK		322.649.046.412
JUMLAH LIABILITAS		**410.854.945.704**

b. Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan bahwa guna mendukung operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan, maka Negara Republik Indonesia perlu memberikan modal awal kepada BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013. Nilai modal awal adalah sebesar Rp 500.000.000.000.

c. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menetapkan:
(i). Mengangkat Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama dua tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi atau sejak 1 Januari 2014 sebagai berikut :

Dewan Pengawas	
Ketua Dewan Pengawas	Mulabasa Hutabarat
Anggota Dewan Pengawas	Iskandar Maula
Anggota Dewan Pengawas	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota Dewan Pengawas	Bambang Wirahyoso
Anggota Dewan Pengawas	Mathias Tambing
Anggota Dewan Pengawas	Nina Sapti Triaswati
Anggota Dewan Pengawas	H.M. Saleh Khalid

(ii). Mengangkat Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama dua tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan beroperasi atau sejak 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

Dewan Direksi	
Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur	Agus Supriyadi
Direktur	Jeffry Haryadi
Direktur	Amri Yusuf
Direktur	Achmad Riadi
Direktur	Junaedi
Direktur	Herdy Trisanto

70. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Penutup

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas isi dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian penutup yang diotorisasi untuk terbit tanggal 11 Maret 2014.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS

Laporan Keuangan Konsolidasian Pembuka
Per 1 Januari 2014

d1/April 24, 2014 Paraf:

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Konsolidasian Pembuka
Per 1 Januari 2014

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Pembuka 1

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pembuka 3

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMBUKA
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	1 Januari 2014 Rp
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	3.c, 3.d, 3.e, 4	363.156.126.321
Piutang Investasi	3.d, 3.f, 5	12.858.362.558
Piutang Hasil Investasi	3.d, 3.f, 6	147.996.577.059
Piutang Lain	3.d, 3.f, 7	555.225.184.438
Deposito	3.d, 8	2.359.793.691.000
Uang Muka	3.g, 9	24.907.161.877
Uang Muka Pajak	3.v, 27.a	1.386.864.948
Beban Dibayar di Muka	10	32.208.110.854
Investasi Jangka Pendek		
Saham	3.d, 11	3.097.235.191.439
Reksadana	3.d, 12	448.051.614.012
Pinjaman Diberikan Program Manfaat Layanan Tambahan -		
Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	3.d, 3.h, 13	492.098.733.108
Piutang Usaha - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	3.d, 3.i, 14	2.001.336.078
Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor	3.j, 15	6.458.587.255
Aset Dimiliki Untuk Dijual	3.m, 16	2.377.184
TOTAL ASET LANCAR		7.543.379.918.131
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi Jangka Panjang		
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragunan Aset	3.d, 17	95.555.642.529
Sukuk	3.d, 18	73.109.000.000
Obligasi	3.d, 19	1.432.447.895.461
Penyertaan Langsung - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	3.d, 3.k, 20	30.813.767.448
Properti Investasi - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	3.l, 21	76.373.771.864
Aset Tetap - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	3.m, 22	582.425.121.653
Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) Program Manfaat Layanan Tambahan	3.n, 23	161.230.918.989
Aset Takberwujud	3.p, 24	11.950.135.062
Aset Pajak Tangguhan	3.v, 27.c	271.830.073.331
Aset Tidak Lancar Lain	3.q, 25	17.745.677.946
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		2.753.482.004.283
TOTAL ASET		**10.296.861.922.414**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian penutup secara keseluruhan

D1/April 24, 2014

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMBUKA (Lanjutan)
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	1 Januari 2014 Rp
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Kepada Pihak Ketiga	3.d, 3.s, 26	285.694.577
Utang Pajak	3.v, 27.b	358.315.759.050
Utang Insentif	3.d, 28	127.207.564.574
Beban Akrual	3.d, 29	59.170.206.128
Pendapatan Diterima di Muka	3.d, 30	3.302.016.750
Manfaat Layanan Tambahan Untuk Operasional	3.t, 31	792.482.725.241
Manfaat Layanan Tambahan Telah Disalurkan	3.t, 32	666.480.464.503
Liabilitas Jangka Pendek Lain	3.d, 33	489.281.664.504
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		**2.496.526.095.327**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas Imbalan Pascakerja	3.u, 34	483.125.094.687
Liabilitas Jangka Panjang Lain	3.d, 35	4.148.652.629
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		**487.273.747.316**
TOTAL LIABILITAS		**2.983.799.842.643**
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal	36	4.500.000.000.000
Ekuitas Lain	37	3.323.338.452.466
Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	38	(510.279.209.099)
		7.313.059.243.367
Saldo Bagian Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Asosiasi	39	2.836.404
Total Ekuitas		**7.313.062.079.771**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**10.296.861.922.414**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian penutup secara keseluruhan

D1/April 24, 2014

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMBUKA
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan posisi keuangan konsolidasian pembuka BPJS Ketenagakerjaan disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian penutup PT Jamsostek (Persero), entitas anak, dan entitas bertujuan khusus yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2. Gambaran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial

2.a Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan") pada awalnya berdiri dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) pada 5 Desember 1977. Status ASTEK sebagai Perum kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 bernama Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT ASTEK). Pada tahun 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 PT ASTEK berganti nama menjadi Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek). Pada 25 November 2011, ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada Pasal 62 disebutkan bahwa PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan) sejak 1 Januari 2014. PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Akta Notaris No. 1 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, tanggal 2 April 2014 tentang Akta Penyimpanan menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamsostek (Persero) tentang Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Penutup per 31 Desember 2013 PT Jamsostek (Persero).

Modal BPJS Ketenagakerjaan berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) dan modal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 menyatakan bahwa guna mendukung operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan, maka Negara Republik Indonesia memberikan modal yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2013 sebesar Rp 500.000.000.000.

Per 1 Januari 2014, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM) yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persero), termasuk menerima peserta baru dengan tetap mengacu pada UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 8 sampai dengan 15. Sedangkan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) diserahkan kepada BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan/ASKES (Persero). Selambat-lambatnya pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi dengan menyelenggarakan program yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan menambahkan Program Jaminan Pensiun.

2.b Tujuan dan Kegiatan

Tujuan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program sebagai berikut :

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- Jaminan Hari Tua (JHT);
- Jaminan Pensiun (JP); dan
- Jaminan Kematian (JK)

Tugas utama BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
- Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
- Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;
- Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; dan
- Memberi informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki 11 kantor wilayah, 121 kantor cabang, dan 53 kantor cabang pembantu yang terletak di beberapa kota di Indonesia.

2.c Dewan Pengawas, Direksi, dan Karyawan

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan susunan sebagai berikut:

- Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014
Dewan Pengawas	
Ketua Dewan Pengawas	Mulabasa Hutabarat
Anggota Dewan Pengawas	Iskandar Maula
Anggota Dewan Pengawas	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota Dewan Pengawas	Bambang Wirahyoso
Anggota Dewan Pengawas	Mathias Tambing
Anggota Dewan Pengawas	Nina Sapti Triaswati
Anggota Dewan Pengawas	H.M. Saleh Khalid

- Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014
Dewan Direksi	
Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur Keuangan	Herdy Trisanto
Direktur Investasi	Jeffry Haryadi
Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi	Agus Supriyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	Amri Yusuf
Direktur Pelayanan	Achmad Riadi
Direktur Kepesertaan	Junaedi

Pada 1 Januari 2014, BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak memiliki 3.872 karyawan (tidak diaudit).

2.d Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko

Susunan Komite Audit BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014
Komite Audit	
Ketua	Bambang Wirahyoso
Anggota	Salim Siagian
Anggota	Rinaningsih

Komite Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 adalah Endi Roswendi

2.e Entitas Anak

BPJS Ketenagakerjaan memiliki penyertaan langsung pada PT Binajasa Abadikarya (PT BIJAK) dengan persentase kepemilikan sebesar 99,98%. PT BIJAK berdomisili di Jakarta dan menjalankan usaha dalam bidang jasa pengerahan tenaga kerja dan jasa lainnya. PT BIJAK memulai operasi komersialnya pada 2004. Jumlah aset PT BIJAK per 1 Januari 2014 sebelum eliminasi sebesar Rp 30.901.358.345.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mengelola Manfaat Layanan Tambahan (MLT) sebagai suatu entitas bertujuan khusus yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta. Total aset dari MLT per 1 Januari 2014 sebelum eliminasi sebesar Rp 1.477.171.526.501.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

3.a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Pembuka

Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pedoman Akuntansi BPJS disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain:

a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
c. *International Financial Reporting Standards; dan*
d. Peraturan perudang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Program Jaminan Ketenagakerjaan.

Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

a. Pengklasifikasian aset keuangan awal dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Neto, Tersedia Untuk Dijual, Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang, sesuai persyaratan masing-masing klasifikasi berdasarkan kondisi pada tanggal tersebut;
b. Jumlah tercatat aset awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah;
c. Jumlah tercatat liabilitas awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah; dan
d. Jumlah tercatat ekuitas awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah.

Laporan keuangan pembuka merupakan laporan yang disusun untuk memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 62 ayat 2 (c) disebutkan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pembuka BPJS Ketenagakerjaan disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian penutup PT Jamsostek (Persero), entitas anak, dan entitas bertujuan khusus per 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh kantor akuntan independen dan telah disahkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK-50/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013 Perusahaan Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero).

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 49 ayat 2 disebutkan bahwa "Subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan", dan dijelaskan kembali pada UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 40 ayat 2 disebutkan bahwa BPJS wajib memisahkan aset BPJS dengan aset Dana Jaminan Sosial. Untuk memenuhi ketentuan ini maka Laporan Posisi Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan disusun sesuai dengan Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber aset BPJS Ketenagakerjaan berasal dari :
1) Modal awal pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
2) Hasil pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) yang menyelenggarakan program jaminan sosial;
3) Hasil pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
4) Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pengalihan Aset dan Liabilitas PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan telah ditetapkan dalam 3 (tiga) Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/04/012014 tentang Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber Dana BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari
   a. Liabilitas BPJS (liabilitas diluar JHT dan Non JHT);
   b. Modal disetor;
   c. Cadangan umum dan cadangan tujuan;
   d. Selisih Penilaian Efek (SPE); dan
   e. Saldo laba.

2. Alokasi Aset BPJS Ketenagakerjaan
   a. Kas dan setara kas;
   b. Investasi;
   c. Turunan investasi (Pendapatan yang masih harus diterima investasi (PYMHD), piutang jatuh tempo (PPJT) dan piutang investasi);
   d. Aset lancar lainnya non investasi;
   e. Aset tetap;
   f. Aset pajak tangguhan; dan
   g. Aset lain (diluar aset JHT dan Non JHT)

3. Alokasi Sumber Dana BPJS Ketenagakerjaan
   Pengalokasian sumber dana program dilakukan dengan menggunakan persentase proporsi per program. Proporsi atas alokasi sumber dana digunakan untuk pos-pos kewajiban yang belum teridentifikasi dengan akun masing-masing program. Penggunaan proporsi atas alokasi sumber dana hanya dilakukan untuk program Non JHT, sedangkan untuk program JHT sudah dilakukan pemisahan terhadap aset dan liabilitasnya. Alokasi sumber dana Non JHT dialokasikan jumlah sumber dana untuk masing-masing program Non JHT (program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) berdasarkan persentase proporsi per program. Dasar persentase atas proporsi menggunakan beberapa asumsi, yaitu:

a. Pendapatan iuran
   Proporsi atas pendapatan iuran digunakan untuk memisahkan IBR dan iuran diterima dimuka masing-masing program.
b. Beban jaminan program paket
   Proporsi atas beban jaminan program paket digunakan untuk memisahkan utang jaminan (jaminan sudah ditetapkan tapi belum dibayar, jaminan dalam proses dan jaminan belum dilaporkan) serta cadangan teknis dan katastrofa Jasa Konstruksi ke program JKK dan JKM.
c. Iuran bersih
   Proporsi atas iuran bersih digunakan untuk memisahkan dana pengembangan Non JHT dan liabilitas Non JHT masing-masing program. Proporsi atas pendapatan iuran, beban jaminan dan iuran bersih menggunakan data series selama 5 (lima) tahun.

4. Penentuan Aset BPJS Ketenagakerjaan
   a. Aset Investasi terdiri dari Deposito, Saham, Obligasi, Reksadana, Properti, dan Penyertaan; dan
   b. Aset Non Investasi yang tidak terkait dengan investasi dialokasikan menjadi aset BPJS Ketenagakerjaan.

Dasar pengukuran dalam penyusunan menyiapkan laporan keuangan pembuka adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk penyertaan tertentu yang disajikan berdasarkan metode ekuitas serta investasi pada saham, obligasi, dan reksadana yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Investasi dalam kelompok ini disajikan sebesar nilai wajarnya.

Laporan keuangan konsolidasian pembuka telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual.

Mata uang penyajian dan fungsional yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian pembuka ini adalah mata uang Rupiah.

Laporan keuangan konsolidasian pembuka mencakup akun-akun BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak, dimana BPJS Ketenagakerjaan mempunyai pemilikan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung dan Entitas Bertujuan Khusus (EBK) yang berada dalam pengendalian BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ISAK 7 Interpretasi atas paragraf 5 dan 19 PSAK No. 4 tentang Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus. Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) memenuhi persyaratan sebagai EBK yang harus dikonsolidasi sesuai dengan ISAK 7.

Laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan.

3.b. Prinsip-prinsip Konsolidasian

BPJS Ketenagakerjaan memiliki penyertaan langsung pada PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak) dengan persentase kepemilikan sebesar 99,98% dan mengelola Layanan Manfaat Tambahan (LMT) sebagai suatu entitas bertujuan khusus yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta. Pada 1 Januari 2014, jumlah aset entitas anak dan EBK yang dikonsolidasi mencerminkan 0,72% terhadap jumlah aset konsolidasian.

Seluruh saldo dan transaksi signifikan, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak serta EBK sebagai satu kesatuan usaha.

Proporsi bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba atau rugi bersih dari Entitas Anak yang dikonsolidasi disajikan masing-masing dalam akun “Kepentingan Non Pengendali” pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

3.c. Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan BPJS Ketenagakerjaan, Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan kurs rata-rata wesel ekspor Bank Indonesia pada 1 Januari 2014 sebagai berikut:

Mata Uang	1 Januari 2014
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	12.189

3.d. Instrumen Keuangan

Pengembangan Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan dalam penempatan instrumen investasi dalam negeri. Instrumen investasi tersebut meliputi:

a. Deposito Berjangka
   Yang termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada bank paling tinggi 15% dari jumlah investasi untuk setiap bank.

b. Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase.

c. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase.

d. Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek.
   - Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Maksimal 50% dari Aset Bersih; dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

e. Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
   - Maksimal 50% dari jumlah investasi; dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

f. Reksadana
   - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
   - Maksimal 50% dari jumlah investasi; dan
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 15% dari jumlah investasi.

g. Efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset.
   - Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
   - Maksimal 20% dari jumlah investasi; dan
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi.

h. Dana investasi *real estate*
   - Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;

- Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi; dan
- Maksimal 20% dari jumlah investasi.

i. *Repurchase agreement*
- Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA);
- Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
- Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;
- Nilai *repurchase agreement* tidak lebih dari 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan;
- Maksimal 5% dari jumlah investasi; dan
- Setiap *counterpart* paling tinggi 2% dari jumlah investasi.

j. Penyertaan Langsung
- Badan usaha yang bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha jasa keuangan;
- Tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan kerjasama;
- Maksimal 5% dari jumlah investasi; dan
- Setiap pihak paling tinggi 1% dari jumlah investasi.

k. Tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan
- Memberikan penghasilan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- Tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir pihak lain; dan
- Maksimal 5% dari jumlah investasi.

PSAK 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran diterapkan secara prospektif sejak 1 Januari 2012 sesuai dengan ketentuan transisi atas standar tersebut.

Cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan keuangan konsolidasian pembuka per 1 Januari 2014, telah disusun berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011).

Aset Keuangan
BPJS Ketenagakerjaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto, pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuannya.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto
Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori, yaitu aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*) yang terkini.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan kedalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Biaya transaksi, jika ada, diakui secara langsung pada laporan kinerja keuangan komprehensif konsolidasian. Penambahan maupun pengurangan dalam nilai wajar dibandingkan dengan nilai perolehan dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan pada laporan kinerja keuangan. BPJS Ketenagakerjaan menggunakan metode tidak langsung pada perubahan pencatatan dalam nilai wajar dari aset keuangan dengan mengakui nilai perolehan dan penyesuaian nilai wajar secara terpisah.

Pendapatan bunga dari aset finansial pada nilai wajar, diakui berdasarkan basis akrual. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset finansial yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto, diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi dan biaya transaksi dari penjualan aset finansial diakui sebagai beban pada laporan kinerja keuangan konsolidasian.
Biaya dari investasi pada efek ekuitas, reksadana dan utang efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto yang dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi dipasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- dalam hal BPJS Ketenagakerjaan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya yang diamortisasi, dihitung dengan mengambil diskonto dan premi dari pembelian serta biaya yang merupakan bagian yang utuh dari tingkat bunga efektif. Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dicatat didalam pendapatan investasi. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui didalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Aset Keuangan Dimiliki hingga Jatuh Tempo
Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta BPJS Ketenagakerjaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto;
- investasi yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan bunga dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dicatat sebagai laba atau rugi dan diakui sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada awal akuisisi dan *fee*/biaya sebagai bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif (EIR). Amortisasi dan kerugian yang timbul dari penurunan nilai akan diakui dalam laporan kinerja keuangan konsolidasian.

Aset keuangan tersedia untuk dijual
Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di pendapatan komprehensif lainnya, diakui sebagai laba rugi. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui sebagai laba rugi.

Biaya dari investasi pada efek ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dihitung menggunakan harga rata-rata tertimbang bergerak, sedangkan biaya dari investasi pada efek utang menggunakan metode yang spesifik.

Pengakuan
Aset keuangan diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan dalam perjanjian. Pencatatan aset keuangan yang diperoleh dibursa efek menggunakan tanggal perdagangan (*trading date*).

Investasi syariah dipisahkan dengan investasi konvensional, investasi dalam sukuk dikelompokkan ke dalam sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto dan sukuk yang diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi. Pencatatan sukuk dengan kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto dicatat dengan kebijakan yang sama dengan obligasi dalam kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto, sedangkan sukuk dalam kelompok diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi dicatat dengan kebijakan yang sama dengan obligasi dalam kelompok Dimilki hingga Jatuh Tempo, kecuali untuk amortisasi atas diskonto, premium, dan biaya transaksi dihitung secara garis lurus.

Penetapan Nilai Wajar Investasi diatur sebagai berikut:

a. Saham
   Terdapat dua kelompok saham yaitu saham yang memiliki pasar aktif dan saham yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk saham yang memiliki pasar aktif, nilai wajar ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan dari penutupan hari bursa. Sedangkan untuk saham yang tidak memiliki pasar aktif maka menggunakan harga penutupan dari hari bursa terakhir yang tersedia.

b. Reksadana
   Untuk reksadana menggunakan nilai aset bersih yang dipublikasikan oleh manajer investasi.

c. Obligasi
   Terdapat dua kelompok obligasi yaitu obligasi yang memiliki pasar aktif dan obligasi yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk obligasi yang memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan (*bid price*) dari transaksi terakhir, atau apabila tidak tersedia maka menggunakan harga penutupan (*closing price*).

Untuk obligasi yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (*mark-to-model*). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers*, *money brokers*, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi provider info. Metode yang digunakan adalah metode Nelson Siegel Svensson. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

KIK-EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Efek Beragun Aset (EBA) adalah efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Beragun Aset (KIK-EBA) yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, sarana pengikatan kredit/arus kas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.

Terdapat dua jenis EBA, yaitu pendapatan tetap dan tidak tetap. EBA pendapatan tetap memiliki karakteristik sebagaimana obligasi, yaitu memiliki jangka waktu jatuh tempo, memiliki penghasilan tertentu dan dapat dibeli dibawah par, diatas par, atau pada harga nominal.

EBA pendapatan tidak tetap memiliki karakteristik sebagaimana efek ekuitas (saham). Pengelompokkan EBA mengikuti jenisnya, yaitu EBA pendapatan tetap dapat diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto, Tersedia untuk Dijual, ataupun Dimiliki hingga Jatuh Tempo, sedangkan EBA pendapatan tidak tetap diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto dan Tersedia untuk Dijual.

Reklasifikasi aset keuangan

BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

a. Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
b. Terjadi setelah BPJS Ketenagakerjaan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau BPJS Ketenagakerjaan telah memperoleh pelunasan dipercepat; dan
c. Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali BPJS Ketenagakerjaan, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan kinerja keuangan konsolidasian.

Aset investasi yang sudah tidak memiliki prospek arus kas di masa depan harus dilakukan penurunan nilai atau penghentian pengakuannya sebesar 100% dan dipindahkan dari kelompok investasi ke akun aset investasi tidak produktif dalam kelompok aset lain.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto

Liabilitas keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto, dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto dicatat melalui laporan kinerja keuangan konsolidasian komprehensif sebagai "Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan".

Per 1 Januari 2014, BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto.

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang selain atau tidak diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto.

Setelah pengakuan awal, BPJS Ketenagakerjaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka BPJS Ketenagakerjaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

BPJS Ketenagakerjaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Keuangan	**Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Neto**	Aset Keuangan Dalam Kelompok Diperdagangkan	Saham Reksadana Sukuk Obligasi
	Pinjaman Diberikan & Piutang	Kas dan Setara Kas Deposito Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain Pinjaman Diberikan LMT	
		Piutang Usaha	
		Aset Lain-Lain	Aset Investasi Tidak Produktif
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	KIK-EBA Sukuk Obligasi	
	Dimiliki Untuk Dijual	Saham Reksadana Obligasi Penyertaan Langsung	

Liabilitas Keuangan	**Biaya Diamortisasi**	Utang kepada Pihak Ketiga Utang Insentif Beban Akrual Liabilitas Jangka Pendek Lain
		Liabilitas Jangka Panjang Lain

Saling hapus instrumen keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan nilai dari aset keuangan
Pada setiap tanggal pelaporan keuangan, BPJS Ketenagakerjaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penentuan nilai wajar
Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas keuangan dapat diukur dengan menggunakan kuotasi di pasar aktif, yaitu jika harga yang dikuotasikan tersedia setiap waktu dan dapat diperoleh secara rutin dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Dalam hal tidak terdapat pasar aktif untuk suatu aset atau liabilitas keuangan, maka BPJS Ketenagakerjaan menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak yang berkeinginan dan memahami, dan bilamana tersedia, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, dan model penetapan harga opsi.

3.e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Termasuk dalam kas dan setara kas adalah kas dan setara kas yang hanya digunakan untuk *car loan* dan *housing loan*.

3.f. Piutang

Piutang terdiri dari piutang investasi dan piutang hasil investasi.

Piutang Investasi

Piutang Investasi merupakan piutang yang timbul karena pelepasan investasi.

Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi terdiri dari:

a. Piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka dan obligasi;
b. Piutang yang timbul dari pendapatan bagi hasil penempatan dana dan investasi pada deposito syariah dan surat berharga syariah;
c. Piutang yang timbul dari pendapatan dividen, baik yang berasal dari saham yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di bursa efek, reksadana dan lain-lain; dan
d. Piutang yang timbul dari penyewaan porperti investasi.

3.g. Uang Muka

Uang muka merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pihak internal atau eksternal untuk suatu kegiatan yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung.

3.h. Pinjaman yang Diberikan

1. Pinjaman yang diberikan merupakan tagihan kepada peserta yang timbul akibat pemberian pinjaman Program Layanan Manfaat Tambahan secara bergulir kepada pihak-pihak yang ditentukan baik secara *channeling*, *executing* maupun secara langsung.
2. Klasifikasi dari penyisihan pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:
   i. Lancar, yaitu kategori untuk pinjaman diberikan yang tepat waktu pembayarannya atau terjadi keterlambatan sampai dengan 6 (enam) bulan.
   ii. Kurang lancar, yaitu kategori untuk pinjaman diberikan yang pembayarannya terjadi keterlambatan diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan.
   iii. Ragu-ragu, yaitu kategori untuk pinjaman diberikan yang pembayarannya terjadi keterlambatan diatas 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
   iv. Macet, yaitu kategori untuk pinjaman diberikan yang pembayarannya terjadi keterlambatan diatas 12 (dua belas) bulan.
3. Penyisihan kerugian pinjaman diberikan untuk debitur besar ditentukan berdasarkan adanya bukti objektif penurunan nilai telah terjadi. Dalam hal bukti obyektif tidak terpenuhi, besarnya penyisihan pinjaman ditetapkan berdasarkan teknik evaluasi secara kolektif yang dihitung secara *migration analysis*. Persentase penyisihan pinjaman tak tertagih dihitung secara empiris dari data historis kolektibilitas pinjaman diberikan selama 3 (tiga) tahun sebelum tahun laporan dari masing-masing klasifikasi.
4. Penentuan estimasi persentase penyisihan pinjaman diberikan dan tingkat pengembalian (*recovery rate*) dievaluasi setiap awal tahun dan dipergunakan untuk menghitung penyisihan tahun berjalan.

Klasifikasi dan persentase penyisihan pinjaman diberikan dan piutang bunga pinjaman diberikan pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

Kategori	Persentase	Keterangan
Lancar	4,77%	0-1 bulan
Kurang Lancar	50,41%	2-3 bulan
Ragu-ragu	60,77%	9-12 bulan
Macet	86,70%	> 12 bulan

3.i. Piutang Usaha

Piutang usaha entitas anak disajikan dalam jumlah bersihnya yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai. Kebijakan penyisihan penurunan nilai ditetapkan sebagai berikut:

1. Piutang usaha lancar yaitu yang berumur sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak disisihkan.
2. Piutang usaha kurang lancar yaitu piutang yang berumur diatas 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan disisihkan sebesar 25%.
3. Piutang usaha diragukan yaitu piutang yang berumur diatas 24 (dua puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan disisihkan sebesar 50%.
4. Piutang usaha macet yaitu piutang yang berumur diatas 36 (tiga puluh enam) bulan disisihkan sebesar 100%.

3.j. Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor

Pencatatan persediaan perlengkapan alat tulis kantor dilaksanakan dengan menggunakan metode periodik sedangkan pengukurannya dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

3.k. Investasi Penyertaan Langsung

Investasi penyertaan langsung dapat dibedakan menjadi: investasi penyertaan saham pada perusahaan yang diklasifikasikan sebagai Tersedia Untuk Dijual, investasi pada entitas asosiasi (ada pengaruh signifikan) dan investasi pada entitas anak.

Investasi penyertaan langsung pada perusahaan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan, disajikan sebagai aset keuangan dalam kategori tersedia untuk dijual. Pada setiap tanggal laporan, perubahan nilai tercatat dengan nilai wajar diakui pada investasi dalam laporan posisi keuangan. Apabila nilai wajar dari investasi tidak dapat ditentukan secara andal berdasarkan hirarki nilai wajar, maka investasi ini dinilai berdasarkan biaya perolehan.

Investasi pada entitas asosiasi (ada pengaruh signifikan) dicatat berdasarkan metode ekuitas. Pada setiap tanggal laporan, saldo laba/rugi entitas investee diakui ke dalam laporan kinerja keuangan sesuai persentase kepemilikannya.

Penyertaan langsung pada entitas anak yang memenuhi syarat pengendalian dan ventura bersama (pengendalian bersama ekuitas) harus dilakukan konsolidasi sesuai persentase kepemilikannya.

Apabila nilai ekuitas entitas asosiasi yang menjadi bagian investor sesudah transaksi perubahan ekuitas asosiasi berbeda dengan nilai ekuitas asosiasi yang menjadi bagian investor sebelum transaksi perubahan ekuitas asosiasi, maka perbedaan tersebut, oleh investor diakui sebagai bagian dari ekuitas dengan akun "Bagian Pendapatan Komprehensif Lain Dari Entitas Asosiasi".

3.l. Properti Investasi

Properti investasi adalah penanaman dana investasi BPJS Ketenagakerjaan pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional dan ditujukan untuk menghasilkan pendapatan investasi. Investasi dalam properti tanah disajikan sebesar biaya perolehannya properti investasi tanah tidak disusutkan, karena BPJS Ketenagakerjaan berniat untuk memperpanjang haknya apabila periode haknya telah berakhir. Investasi dalam properti bangunan disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Properti bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sebesar persentase tetap 5% per tahun dari harga perolehannya.

3.m. Aset Tetap

Semua aset tetap yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran aset tetap. Pada model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Aset tetap, kecuali tanah, telah disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap.

Kebijakan akuntansi atas aset tetap antara lain meliputi sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Taksiran Masa Manfaat
Bangunan	20 tahun
Renovasi Bagian Dalam	4 tahun
Renovasi Bagian Luar / Keseluruhan	Hasil Appraisal
Kendaraan	5 tahun
Peralatan Kantor	4 tahun
Peralatan Komputer	4 tahun
Peralatan Lainnya	4 tahun

Jenis Aset Tetap	Nilai Sisa Aset Tetap
Bangunan	20%
Kendaraan Sedan	25%
Kendaraan Non Sedan	20%
Motor	10%
Peralatan Kantor	5%
Peralatan Komputer	5%
Peralatan Lainnya	5%

Berdasarkan PSAK No. 47, “Akuntansi Tanah”, perolehan tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehannya dan tidak diamortisasi. Biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak kepemilikan tanah, ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Berdasarkan PSAK 16 (Revisi 2011), nilai sisa, taksiran masa manfaat dan metode penyusutan atas aset tetap dievaluasi dan disesuaikan setiap tanggal neraca. Dampak dari evaluasi tersebut, jika ada, diakui dalam laporan kinerja keuangan pada periode terjadinya.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai. Penurunan nilai aset tersebut diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset dan dibebankan sebagai kerugian periode berjalan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat suatu aset atau yang memberikan manfaat ekonomis yang berupa peningkatan kapasitas, kualitas produksi, atau kinerja dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan. Untuk menentukan ada tidaknya penambahan masa manfaat atas suatu renovasi aset tetap, maka ditetapkan batas signifikansi renovasi minimal sebesar 20% dari nilai perolehan aset tetap tersebut kemudian dihitung berdasarkan hasil penilaian baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam usaha, maka nilai bukunya direklasifikasi ke aset lain-lain dan tidak disusutkan. Sedangkan aset tetap yang memenuhi kriteria aset tetap yang dimiliki untuk dijual, nilai bukunya dipindahkan ke aset dimiliki untuk dijual, dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkannya diakui dalam laporan kinerja keuangan konsolidasian tahun berjalan.

Aset dalam konstruksi dinyatakan sebesar biaya perolehannya dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

3.n. Sarana Kesejahteraan Peserta

Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) merupakan Dana MLT yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pemberian sarana rusunawa, sarana pelayanan kesehatan, dan sarana kesejahteraan peserta lainnya. SKP terdiri dari tanah, bangunan dan peralatan.

Semua SKP yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan. BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran asetnya. Pada model biaya, SKP dinyatakan sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dan disajikan dalam laporan konsolidasi secara terpisah. SKP, kecuali tanah, telah disusutkan dengan metode garis lurus sebesar 5% per tahun dan peralatan sebesar 25% per tahun.

3.o. Sewa

Sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011), sewa diklasifikasikan sebagai pembiayaan apabila sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Aset yang diperoleh melalui sewa pembiayaan diakui sebagai aset sebesar nilai wajar aset sewaan pada awal sewa atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan diakui dalam posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian beban keuangan dan bagian pelunasan liabilitas untuk menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan secara langsung ke laporan kinerja keuangan, kecuali beban tersebut berkaitan langsung dengan perolehan aset tertentu yang dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan umum biaya pinjaman. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Sewa kontinjen yang timbul dari sewa operasi diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

3.p. Aset Takberwujud

Aset takberwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai bentuk wujud fisik. Aset takberwujud dinyatakan sebesar nilai bukunya. Amortisasi dihitung dengan metode garis lurus sejak bulan perolehan sebesar 25% per tahun dan tidak dilakukan pencadangan.

3.q. Aset Tidak Lancar Lain

Aset tidak lancar lain terdiri dari beban ditangguhkan, aset tetap yang sudah tidak digunakan, piutang lain, aset sitaan dan lain-lain.

3.r. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:

1. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya;
3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:

1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau

2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas nya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

3.s. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang pihak ketiga adalah kas yang diterima sebagai titipan pihak ketiga atas penggunaan aset. Utang pihak ketiga berasal dari sewa bangunan, sewa telepon, dan sewa lain. Utang pihak ketiga merupakan jaminan dari pihak ketiga dan wajib diserahkan kembali kepada pihak ketiga.

3.t. Manfaat Layanan Tambahan (MLT)

MLT adalah dana yang dihimpun dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja program Jamsostek dan atau keluarganya yang diprioritaskan bagi yang kurang mampu dan membantu badan/unit usaha yang mempunyai keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan peserta program Jamsostek terutama bagi badan/unit usaha skala kecil.

Akun MLT disajikan dalam laporan konsolidasi dalam kelompok liabilitas dan terdiri dari MLT untuk operasional dan MLT telah disalurkan.

3.u. Liabilitas Imbalan Pascakerja

BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas anak membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program dana pensiun dan purna jasa untuk karyawan yang diangkat sebelum bulan September 2011 diselenggarakan dengan program manfaat pasti. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan yang besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Untuk karyawan yang diangkat terhitung mulai bulan September 2011, BPJS Ketenagakerjaan mengikutsertakan pada program dana pensiun iuran pasti, jumlah kontribusi tetap terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi perusahaan sebesar 12,8%.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan program iuran pasti untuk tunjangan hari tua (THT) dimana kontribusi karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing sebesar 4% dari gaji pokok per bulan.

3.v. Perpajakan

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan *balance sheet liability method*. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan dan yang akan digunakan pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima, atau dalam hal BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengajukan banding, ketika:

1. Pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap kewajiban perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat, atau;

2. Pada saat dimana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, dimana hasil yang diharapkan dari proses banding secara signifikan tidak pasti, maka pada saat itu perubahan kewajiban perpajakan diakui berdasarkan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diajukan banding.

Pajak kini dihitung berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk menyelesaikan saldo-saldo tersebut secara neto.

3.w. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan pembuka mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. BPJS Ketenagakerjaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Liabilitas Pasca Kerja

Nilai kini liabilitas pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan kerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Estimasi Umur Manfaat Properti Investasi, Aset Tetap dan Sarana Kesejahteraan Peserta

BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak, dan entitas bertujuan khusus melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis properti investasi, aset tetap dan sarana kesejahteraan peserta berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi fisik dan teknis serta perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (*mark-to-model*). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers*, *money brokers*, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi provider info. Metode yang digunakan adalah metode *Nelson Siegel Svensson*. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan *balance sheet liability method*. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui hanya ketika pajak tangguhan yang timbul dapat dipulihkan, dalam hal ini tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi jumlah pendapatan iuran, beban jaminan, beban cadangan teknis dan beban usaha di masa depan.

3.x. Transaksi dengan Pihak Berelasi

BPJS Ketenagakerjaan menerapkan PSAK 7 (revisi 2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan konsolidasian telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi. Pihak-pihak berelasi adalah:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

4. Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

	1 Januari 2014 Rp
Kas	
Kas	73.968.100
Bank	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	39.011.570.159
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.644.585.925
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.696.136.904
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	9.160.019.080
PT Bank Syariah Mandiri	1.077.393.887
Dollar Amerika Serikat	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	97.386.941
	74.687.092.896
Pihak Ketiga	
Rupiah	
PT Bank Bukopin Tbk	16.567.785.526
PT Bank Pembangunan Daerah	8.167.087.186
PT Bank Agro Tbk	2.040.918.640
PT Bank Management Building	497.871.808
PT Bank Permata Tbk	255.275.822
PT Bank Chinatrust Indonesia	231.884.071
PT Bank ANZ	214.733.893
PT Bank Batam	200.788.691
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.548.507
Total Bank	28.179.894.144
Bank Investasi	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	116.010.675
Total Kas	**103.056.965.815**
Setara Kas	
Deposito Berjangka	
Pihak Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	15.000.000.000
Pihak Ketiga	
PT Bank Bukopin Tbk	244.500.000.000
Total Setara Kas	**259.500.000.000**
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	**599.160.506**
Total Kas dan Setara Kas	**363.156.126.321**
Jangka Waktu Deposito Berjangka	≤ 3 bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	6,00% - 9,00%

Dari saldo tersebut, terdapat saldo Bank Program JPK sebesar Rp 76.968.776.219 yang akan diserahkan kepada BPJS Kesehatan pada saat pengalihan aset JPK.

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas pada rekening Bank Mandiri Cabang Gedung BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan*) bagi karyawan pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan. Saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 1 Januari 2014 sebesar Rp 599.160.506.

5. Piutang Investasi

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari transaksi atas penjualan saham, yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya (T+3) dan akan selesai pada saat jatuh tempo (*outstanding transaction*). Saldo piutang investasi per 1 Januari 2014 adalah sebesar Rp 12.858.362.558.

6. Piutang Hasil Investasi

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima dan piutang pendapatan jatuh tempo atas bunga deposito sudah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal laporan belum diterima. Saldo piutang hasil investasi per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
Bunga Obligasi	15.760.168.475
Bunga Deposito	4.099.278.065
Dividen Saham	1.181.188.228
Bagi Hasil Sukuk	785.225.871
Bunga KIK - EBA	69.941.421
	21.895.802.060
Piutang Jatuh Tempo	
Piutang Pendapatan Deposito	1.422.105.218
Lain-lain	
Pendapatan Manfaat Layanan Tambahan	124.678.669.781
Total	**147.996.577.059**

Dari saldo pendapatan yang masih harus diterima tersebut, terdapat saldo bunga deposito Program JPK sebesar Rp 125.047.222 yang akan diserahkan kepada BPJS Kesehatan pada saat pengalihan aset.

7. Piutang Lain

Akun ini merupakan saldo piutang lain per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Piutang Modal Awal	500.000.000.000
Piutang Iuran JPK	43.261.122.263
Pinjaman Kendaraan	11.216.188.010
Tuntutan Ganti Rugi	617.262.045
Piutang Lain	130.612.120
Total	**555.225.184.438**

Piutang modal awal merupakan piutang setoran Modal Awal BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 500.000.000.000 yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2013 sesuai dengan PP Nomor 83 tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Piutang iuran JPK sebesar Rp 43.261.122.263 merupakan saldo piutang iuran dari Program JPK yang akan diserahkan kepada BPJS Kesehatan pada saat pengalihan aset.

8. Deposito

Akun ini merupakan penempatan dana per 1 Januari 2014 dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	417.457.300.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	242.389.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	196.968.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	138.719.000.000
	995.533.300.000
Pihak Ketiga	
PT Bank Pembangunan Daerah	968.784.791.000
PT Bank Bukopin Tbk	335.475.600.000
PT Bank Muamalat	43.500.000.000
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	16.000.000.000
PT Bank BTPN	500.000.000
	1.364.260.391.000
Total	**2.359.793.691.000**
Jangka Waktu Deposito Berjangka	3 - 12 bulan
Tingkat Bunga Kontraktual Rata-rata	7,20%

Dari saldo tersebut, terdapat saldo deposito berjangka Program JPK sebesar Rp 290.500.000.000 yang akan diserahkan dalam bentuk kas kepada BPJS Kesehatan pada saat pengalihan aset JPK.

9. Uang Muka

Akun ini merupakan saldo uang muka per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Persekot Kerja Pegawai	11.590.743.377
Uang Muka Manfaat Layanan Tambahan	13.316.418.500
Total	**24.907.161.877**

10. Beban Dibayar di Muka

Akun ini merupakan saldo beban dibayar di muka per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Beban Sewa Bangunan Kantor	18.727.740.190
Beban Sewa Lain	3.175.968.556
Beban Gaji *Outsourcing*	3.165.558.999
Beban Sewa Rumah Jabatan	2.792.025.459
Beban Asuransi	1.726.759.445
Beban Lain	2.620.058.205
Total	**32.208.110.854**

11. Saham

Akun ini merupakan saldo penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 dalam bentuk Saham yang diklasifikasikan dalam Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto dan Tersedia untuk Dijual dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto	40.970.592.093
Tersedia untuk Dijual	3.056.264.599.346
Total	**3.097.235.191.439**

a. Rincian Saham yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014			
	Total Saham (Lembar)	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai tercatat Rp
PT Astra International Tbk	6.025.087	45.692.178.414	(4.721.586.321)	40.970.592.093
Total	**6.025.087**	**45.692.178.414**	**(4.721.586.321)**	**40.970.592.093**

b. Rincian Saham yang diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk Dijual adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014		
	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	285.105.096.658	(931.288.331)	284.173.808.327
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	234.241.361.318	683.475.352	234.924.836.670
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	255.231.294.862	(21.149.833.428)	234.081.461.434
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	261.940.307.162	(36.653.160.385)	225.287.146.777
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	151.316.442.000	(553.609.939)	150.762.832.061
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	157.938.135.945	(14.095.568.630)	143.842.567.315
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	145.059.148.212	(2.120.081.611)	142.939.066.601
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	120.348.731.378	(33.770.214.234)	86.578.517.144
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	146.099.796.865	(81.176.132.363)	64.923.664.502
PT Timah (Persero) Tbk	37.630.599.031	(7.294.617.091)	30.335.981.940
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	32.574.353.603	(13.792.402.487)	18.781.951.116
	1.827.485.267.034	(210.853.433.147)	1.616.631.833.887

	1 Januari 2014		
	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Ketiga			
PT Astra International Tbk	417.214.038.707	2.560.411.781	419.774.450.488
PT United Tractors Tbk	260.644.785.563	(20.676.514.713)	239.968.270.850
PT Adaro Energy Tbk	262.811.382.009	(105.279.265.803)	157.532.116.206
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	131.238.954.035	2.721.354.663	133.960.308.698
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	129.029.717.222	(22.672.271.452)	106.357.445.770
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	82.499.125.352	5.058.666.642	87.557.791.994
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	94.556.774.739	(28.746.769.356)	65.810.005.383
PT Vale Indonesia Tbk	113.373.810.867	(52.727.776.743)	60.646.034.124
PT Bumi Serpong Damai Tbk	66.693.154.869	(8.370.518.677)	58.322.636.192
PT Bank Central Asia Tbk	46.415.127.823	6.344.612.163	52.759.739.986
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	28.799.021.484	(9.162.577.660)	19.636.443.824
PT Kalbe Farma Tbk	14.784.657.749	3.946.871.526	18.731.529.275
PT Bank Danamon Tbk	16.632.087.772	(4.937.736.722)	11.694.351.050
PT Astra Agro Lestari Tbk	1.609.468.587	740.644.278	2.350.112.865
PT Leyand International Tbk	6.191.846.086	(4.192.764.350)	1.999.081.736
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	1.943.964.667	32.490.330	1.976.454.997
PT Unilever Indonesia Tbk	319.009.972	236.982.049	555.992.021
	1.674.756.927.503	(235.124.162.044)	1.439.632.765.459
Total	**3.502.242.194.537**	**(445.977.595.191)**	**3.056.264.599.346**

12. Reksadana

Akun ini merupakan penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 dalam bentuk unit penyertaan Reksadana yang diklasifikasikan dalam kelompok Tersedia untuk Dijual dengan rincian sebagai berikut.

	1 Januari 2014		
	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Panin Dana Maksima	125.989.561.040	(14.515.739.293)	111.473.821.747
Danareksa Mawar Konsumer 10	67.712.714.260	(9.656.506.259)	58.056.208.001
Schroder Dana Istimewa	62.365.660.844	(4.339.668.256)	58.025.992.588
BNP Paribas Ekuitas	39.144.201.388	(5.520.422.116)	33.623.779.272
BNP Paribas Pesona	38.968.400.988	(5.715.565.895)	33.252.835.093
BNP Paribas Solaris	35.842.685.824	(3.580.631.200)	32.262.054.624
Syailendra Equity Opportunity	37.303.135.174	(7.799.566.387)	29.503.568.787
Panin Dana Prima	25.233.730.379	(400.744.569)	24.832.985.810
Mandiri Investa Equity Movement	22.809.909.291	(4.834.461.555)	17.975.447.736
First State Indoequity Sectoral	18.056.871.358	(1.594.201.630)	16.462.669.728
Manulife Saham Andalan	17.428.784.307	(1.204.584.420)	16.224.199.887
Danareksa Mawar Fokus 10	13.387.209.629	(2.711.072.639)	10.676.136.990
Trim Kapital	5.190.533.151	(350.617.689)	4.839.915.462
Schroder Dana Prestasi Plus	548.822.960	51.481.863	600.304.823
Schroder Dana Prestasi	143.318.735	4.839.522	148.158.257
Dana Ekuitas Andalan	64.172.087	(3.021.407)	61.150.680
First State Multistrategy Fund	28.040.926	4.343.601	32.384.527
Total	**510.217.752.341**	**(62.166.138.329)**	**448.051.614.012**

13. Pinjaman yang Diberikan Program Manfaat Layanan Tambahan

Akun ini merupakan pinjaman para peserta BPJS Ketenagakerjaan atas program Pinjaman MLT dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kepada peserta per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Pinjaman Uang Muka Perumahan	562.763.190.784
Pinjaman Koperasi Karyawan	21.400.264.360
Pinjaman Dana Talangan Modal Kerja	752.553.910
Pinjaman Provider Pelayanan Kesehatan	2.417.292.354
	587.333.301.408
Penyisihan Pinjaman Uang Muka Perumahan	(84.085.924.851)
Penyisihan Pinjaman Koperasi Karyawan	(9.902.372.513)
Penyisihan Dana Talangan Modal Kerja	(652.464.240)
Penyisihan Provider Pelayanan Kesehatan	(593.806.696)
	(95.234.568.300)
Total	**492.098.733.108**

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya pinjaman tersebut.

14. Piutang Usaha

Akun ini merupakan piutang usaha entitas anak per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Pihak Ketiga	
TKI Industri Korea	6.817.559.700
PT Infokom Bina Ardinusa	4.492.800.000
Taiwan	708.433.332
Proyek	203.907.519
Mitra Outsourcing	192.636.702
Singapura	150.207.800
Lain - Lain	1.146.011.000
	13.711.556.053
Penyisihan Penurunan Nilai	(11.710.219.975)
Total	**2.001.336.078**

15. Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor

Akun ini merupakan saldo perlengkapan dan alat tulis kantor per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Barang Cetakan	2.650.458.010
Perlengkapan Komputer Habis Pakai	2.467.097.527
Alat Tulis Kantor	668.807.791
Materai	672.223.927
Total	**6.458.587.255**

16. Aset Dimiliki untuk Dijual

Akun ini merupakan saldo aset dimiliki untuk dijual atas aset tetap yang sudah tidak produktif lagi dan selanjutnya akan dilakukan penjualan per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Gedung Kantor	200.007
Lain-lain	2.177.177
Total	**2.377.184**

17. Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragunan Aset

Akun ini merupakan penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK-EBA) per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014		
	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
Efek Beragunan Aset Danareksa BTN 04-KPR Kelas A 2012	95.555.642.529	--	95.555.642.529
Total	**95.555.642.529**	**--**	**95.555.642.529**

18. Sukuk

Akun ini merupakan penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 dalam bentuk sukuk yang dikelompokkan dalam yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014		
	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
Sukuk Korporasi			
PLN Sukuk VB /2010	21.933.000.000	--	21.933.000.000
	21.933.000.000	**--**	**21.933.000.000**
Pihak Ketiga			
Sukuk Korporasi			
Indosat Ijarah V tahun 2012	18.277.000.000	--	18.277.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	14.622.000.000	--	14.622.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	10.966.000.000	--	10.966.000.000
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II	7.311.000.000	--	7.311.000.000
	51.176.000.000	**--**	**51.176.000.000**
Total	**73.109.000.000**	**--**	**73.109.000.000**

19. Obligasi

Akun ini merupakan penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 dalam bentuk obligasi yang dikelompokan dalam Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto, Tersedia untuk Dijual dan yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto	16.493.450.388
Tersedia untuk Dijual	122.071.524.421
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	1.293.882.920.652
Total	**1.432.447.895.461**

a. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014				
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Medco Energi Internasional II/09 Seri B	idAA-	16.084.000.000	16.084.000.000	409.450.388	16.493.450.388
Total		**16.084.000.000**	**16.084.000.000**	**409.450.388**	**16.493.450.388**

b. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk Dijual terdiri dari:

	1 Januari 2014				
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Obligasi Toyota Astra Financial Services III B Tahun 2013	idAAA	41.849.000.000	--	(1.154.195.420)	40.694.804.580
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri D	idAA+	34.472.000.000	--	(1.550.171.368)	32.921.828.632
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	25.954.000.000	--	107.319.790	26.061.319.790
Medco Energi Internasional II/09 Seri B	idAA-	18.277.000.000	--	465.277.589	18.742.277.589
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV/2010 Seri E	idAA+	3.655.000.000	--	(3.706.170)	3.651.293.830
Total		**124.207.000.000**	**--**	**(2.135.475.579)**	**122.071.524.421**

c. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo terdiri dari:

	1 Januari 2014			
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Pemerintah				
Pihak Berelasi				
Recap Bonds FR 0054	idAAA	60.868.000.000	3.069.435.720	63.937.435.720
Recap Bonds FR 0068	idAAA	41.867.000.000	(1.184.906.270)	40.682.093.730
FR058	idAAA	29.758.000.000	(1.821.187.603)	27.936.812.397
Recap Bonds FR 0052	idAAA	20.152.000.000	2.460.335.870	22.612.335.870
Recap Bonds FR 0040	idAAA	20.105.000.000	326.604.838	20.431.604.838
FR0065	idAAA	24.943.000.000	(4.725.097.865)	20.217.902.135
Recap Bonds FR 0071	idAAA	18.145.000.000	354.699.312	18.499.699.312
Recap Bonds FR 0027	idAAA	18.277.000.000	(980.761.660)	17.296.238.340
Recap Bonds FR 0034	idAAA	14.622.000.000	718.626.740	15.340.626.740
Recap Bonds FR 0031	idAAA	18.277.000.000	(3.103.656.950)	15.173.343.050
Recap Bonds FR 0045	idAAA	18.277.000.000	(3.781.031.610)	14.495.968.390
Recap Bonds FR 0046	idAAA	18.277.000.000	(3.919.454.458)	14.357.545.542
Recap Bonds FR 0042	idAAA	12.794.000.000	(1.786.434.462)	11.007.565.538
Recap Bonds FR 0044	idAAA	7.806.000.000	(2.248.433.147)	5.557.566.853
Recap Bonds FR 0032	idAAA	3.655.000.000	(120.790.020)	3.534.209.980
Recap Bonds FR 0035	idAAA	2.924.000.000	233.274.296	3.157.274.296
		330.747.000.000	(16.508.777.269)	314.238.222.731

	1 Januari 2014			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Obligasi Korporasi				
Pihak Berelasi				
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	245.172.000.000	(2.366.036.604)	242.805.963.396
PLN VII /04	idAA+	66.163.000.000	376.369.106	66.539.369.106
Obl Berk. I Jasa Marga Thp IC 2013	idAA	36.228.000.000	--	36.228.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idAA-	29.244.000.000	--	29.244.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	27.415.000.000	--	27.415.000.000
Mandiri Tunas Finance VI C/2011	idA	21.933.000.000	--	21.933.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	14.622.000.000	7.160.094	14.629.160.094
PLN VIII - A / 2006	idAA	12.429.000.000	171.541.179	12.600.541.179
Obligasi Berkelanjutan Mandiri Tunas Fin Thp I A/2013	idAA+	9.490.000.000	--	9.490.000.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	9.138.000.000	7.345.975	9.145.345.975
Danareksa VB 2010	idAA	8.773.000.000	--	8.773.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	731.000.000	24.202.472	755.202.472
		481.338.000.000	(1.779.417.778)	479.558.582.222
Pihak Ketiga				
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	99.428.000.000	43.296.265	99.471.296.265
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAA+	54.831.000.000	--	54.831.000.000
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013	idA	45.862.000.000	--	45.862.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAA+	36.555.000.000	--	36.555.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	36.555.000.000	--	36.555.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	36.555.000.000	--	36.555.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAA+	27.415.000.000	--	27.415.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	27.415.000.000	--	27.415.000.000
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	27.415.000.000	--	27.415.000.000
Obl Berk. I Danareksa IB 2012	idA	26.386.000.000	69.382.124	26.455.382.124
Indofood V Tahun 2009	idAA+	21.933.000.000	118.163.417	22.051.163.417
Federal International Finance XI/2011 seri C	idAA+	20.105.000.000	--	20.105.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	idAAA	18.277.000.000	--	18.277.000.000
Obl Berk. I Danareksa IA 2012	idA	10.158.000.000	--	10.158.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri B	idA-	9.138.000.000	--	9.138.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Seri A	idAA+	1.827.000.000	273.893	1.827.273.893
		499.855.000.000	231.115.699	500.086.115.699
Total		**1.311.940.000.000**	**(18.057.079.348)**	**1.293.882.920.652**

20. Penyertaan Langsung

Akun ini merupakan penanaman dana BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak per 1 Januari 2014 dalam bentuk penyertaan langsung yang dikelompokan dalam Tersedia untuk Dijual dengan rincian sebagai berikut:

		1 Januari 2014	
	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai Nominal Rp
Penyertaan Langsung Minoritas - Metode Biaya			
PT Bank Syariah Bukopin	Perbankan	9,46	25.630.683.148
PT Asrinda Arthasangga	Underwriter	11	82.500.000
PT Bank Muamalat	Perbankan	0,0078	109.599.500
PT Marga Mandala Sakti	Jalan Tol	0,45	14.625.000.000
PT Pusako Tarinka	Perhotelan	18,67	7.653.750.000
Total			**48.101.532.648**
Penyertaan Tidak Langsung Minoritas - Metode Biaya			
PT Jatim Krida Utama	Penyalur Tenaga Kerja	6,67	200.000.000
Total			**48.301.532.648**
Dikurangi :			
Penurunan Nilai Permanen			
PT Marga Mandala Sakti	Jalan Tol		(13.975.000.000)
PT Pusako Tarinka	Perhotelan		(3.512.765.200)
			(17.487.765.200)
Total			**30.813.767.448**

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas penyertaan langsung adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai permanen.

21. Properti Investasi

Akun ini merupakan penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 dalam bentuk properti investasi dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Harga Perolehan:	
Tanah	74.347.346.043
Bangunan	6.543.854.234
	80.891.200.277
Aset Dalam Konstruksi	
Bangunan	168.072.648
Total	168.072.648
Akumulasi Penyusutan	
Bangunan	4.685.501.061
Nilai Buku	**76.373.771.864**

Lokasi dari properti investasi dan nilai wajar atas tanah dan bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Jenis Properti Investasi	Lokasi	Nilai Wajar Rp
Tanah	Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung Jl. Penghulu Haji Hasan Mustofa No. 45, Kel Neglasari, Kec Cibeunying Kaler, Bandung	54.201.000.000
Tanah	Jl. H Muhtar Raya, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan	63.228.200.000
Tanah	Jalan Jenderal Sudirman, Desa Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kab Bekasi, Jawa Barat	44.002.800.000
Tanah	Desa Bugel, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang Jl. Moch Toha, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Tangerang, Banten	154.454.000.000
Tanah	Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 112 Blok B, Kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	178.273.800.000
Tanah	Jl Setiabudi Utara Kav No 13 Blok B, Kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	
Tanah	Jl. Setiabudi Timur Kav No 14 Blok B Kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	
Tanah dan Bangunan	Jl. Imam Bonjol No. 1, Kecamatan Batam Timur, Kelurahan Lubuk Baja Barat, Batam	14.133.900.000

22. Aset Tetap

Akun ini merupakan saldo aset tetap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Harga Perolehan	
Tanah	127.156.067.055
Bangunan	253.774.033.982
Kendaraan dinas	224.589.049.642
Peralatan kantor	77.212.792.805
Peralatan komputer	281.689.740.577
Peralatan Lain	134.196.067.354
	1.098.617.751.415
Aset Dalam Konstruksi	
Bangunan Kantor	26.076.411.308
Peralatan kantor	14.888.083.694
Kendaraan Dinas	675.620.000
Peralatan Komputer	6.338.200.000
Peralatan Lain	10.098.620.286
Tidak berwujud	49.691.197.539
	107.768.132.827
Total	**1.206.385.884.242**
Akumulasi Penyusutan	
Bangunan	101.457.880.637
Kendaraan dinas	142.213.478.464
Peralatan kantor	56.815.943.431
Peralatan komputer	220.544.044.810
Peralatan Lain	102.929.415.247
	623.960.762.589
Nilai Buku	**582.425.121.653**

Per 1 Januari 2014, seluruh aset telah diasuransikan terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebakaran, kehilangan, bencana alam, kerusuhan dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 761.969.536.785. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

Berdasarkan hasil penelaahan atas aset tetap BPJS Ketenagakerjaan pada akhir tahun, Manajemen BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa tidak terjadi penurunan nilai aset tetap BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.

23. Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) Program Manfaat Layanan Tambahan

Akun ini merupakan nilai perolehan investasi dalam bentuk pembangunan Rumah Susun Sewa untuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014					
	Bumi Lancang Kuning - Batam	Kabil Batam	Muka Kuning Batam	Cikarang	Wijaya Kusuma Semarang	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan						
Tanah	123.024.600	4.221.008.042	19.500.000	1.913.087.580	--	6.276.620.222
Bangunan	37.825.443.050	127.979.612.215	10.443.763.706	16.213.828.914	--	192.462.647.885
Peralatan	2.458.735.625	2.786.595.000	559.950.000	1.905.000.992	--	7.710.281.617
	40.407.203.275	134.987.215.257	11.023.213.706	20.031.917.486	--	206.449.549.724
Aset Dalam Konstruksi						
Bangunan	163.517.791	--	--	--	141.112.000	304.629.791
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	(23.483.295.895)	(7.184.966.057)	(1.958.205.694)	(6.367.251.457)	--	(38.993.719.103)
Peralatan	(2.458.735.625)	(2.148.000.313)	(559.950.000)	(1.362.855.485)	--	(6.529.541.423)
	(25.942.031.520)	(9.332.966.370)	(2.518.155.694)	(7.730.106.942)	--	(45.523.260.526)
Nilai Buku	**14.628.689.546**	**125.654.248.887**	**8.505.058.012**	**12.301.810.544**	**141.112.000**	**161.230.918.989**

Per 1 Januari 2014, SKP Rusun sewa Lancang Kuning, Rusunsewa Kabil, Muka Kuning Batam, SKP Rusun sewa Cikarang telah diasuransikan kepada PT Berdikari Insurance dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 156.947.334.190, terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat kebakaran, kehilangan, bencana alam, kerusuhan dan risiko lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

24. Aset Takberwujud

Akun ini merupakan saldo aset takberwujud atas lisensi dan pengembangan perangkat lunak per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Biaya perolehan	
Lisensi Perangkat Lunak	73.910.692.678
Akumulasi amortisasi	
Lisensi Perangkat Lunak	(61.960.557.616)
Nilai buku bersih	**11.950.135.062**

25. Aset Tidak Lancar Lain

Akun ini merupakan saldo aset lain BPJS Ketenagakerjaan, Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Piutang Lain	9.199.442.941
Piutang Pegawai	3.180.553.716
Beban yang Ditangguhkan	967.655.972
Aset yang Sudah Tidak Digunakan	697.849.326
Agunan yang Diambil Alih	315.222.000
Pos Sementara Dalam Penyelesaian	125.568.851
Lain-lain	3.259.385.140
Total	**17.745.677.946**

26. Utang kepada Pihak Ketiga

Akun ini merupakan saldo utang kepada pihak ketiga atas jaminan sewa per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Jaminan Sewa Bangunan	243.116.776
Jaminan Sewa Telepon	40.804.301
Jaminan Sewa Lain-lain	1.773.500
Total	**285.694.577**

27. Perpajakan

a. Uang Muka Pajak

	1 Januari 2014 Rp
Entitas Anak	
Pajak Pertambahan Nilai	1.386.864.948
Total	**1.386.864.948**

b. Utang Pajak

	1 Januari 2014 Rp
BPJS Ketenagakerjaan	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	55.331.176.812
Pasal 23	2.802.804.448
Pasal 25	46.440.401.078
Pasal 26	71.666.066
Pasal 29	77.025.425.659
Pajak Pertambahan Nilai	6.856.923.720
BPHTB	124.058.298.050
Bea Balik Nama	39.235.965.228
	351.822.661.061
Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 Ayat (2)	171.250.153
Pasal 21	146.606.284
Pasal 23	122.263.027
Pasal 25	213.648.398
Pasal 29	513.749
Pasal 29 Tahun 2011	48.048.747
Pajak Pertambahan Nilai	2.621.831.831
BPHTB	3.168.935.800
	6.493.097.989
Total	**358.315.759.050**

c. Pajak Tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan per 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
BPJS Ketenagakerjaan	
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	117.500.525.417
Penyusutan	149.674.613.416
Penyisihan Penyertaan Langsung	4.371.941.300
	271.547.080.133
Entitas Anak	
Penyisihan Penurunan Nilai	162.542.709
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	(3.127.767)
Penyusutan	123.578.256
	282.993.198
Total Aset Pajak Tangguhan	**271.830.073.331**

d. Administrasi

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak terutang.

Berdasarkan perubahan terakhir UU Pajak Penghasilan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutang pajak.

Sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah bahwa pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang dikenakan PPN dan pengguna jasa wajib melakukan penyetoran PPN ke persepsi.

28. Utang Insentif

Akun ini merupakan saldo insentif yang masih harus dibayar BPJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Gratifikasi	77.366.508.533
Tantiem	49.841.056.041
Total	**127.207.564.574**

29. Beban Akrual

Akun ini merupakan saldo beban akrual BPJS Ketenagakerjaan, Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Beban Usaha yang Masih Harus Dibayar	49.588.509.996
Liabilitas yang Masih Harus Dibayar Bergulir	9.180.000.000
Liabilitas yang Masih Harus Dibayar Tidak Bergulir	329.500.000
Liabilitas yang Masih Harus Dibayar SKP	53.348.610
Tagihan Pihak Ketiga	18.847.522
Total	**59.170.206.128**

30. Pendapatan Diterima di Muka

Akun ini merupakan saldo pendapatan diterima di muka BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak per 1 Januari 2014 sebesar Rp 3.302.016.750.

31. Manfaat Layanan Tambahan untuk Operasional

Akun ini merupakan saldo MLT untuk operasional per 1 Januari 2014 sebesar Rp 792.482.725.241.

Dari saldo manfaat layanan tambahan untuk operasional tersebut, terdapat distribusi laba PT Jamsostek (Pesero) tahun buku 2013 sebesar Rp 400.000.000.000 yang dialokasikan sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: S-134/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan PT Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2013.

32. Manfaat Layanan Tambahan Telah Disalurkan

Akun ini merupakan saldo MLT yang telah disalurkan per 1 Januari 2014 sebesar Rp 666.480.464.503.

33. Liabilitas Jangka Pendek Lain

Akun ini merupakan saldo liabilitas jangka pendek lain per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Utang Titipan JPK	410.854.945.704
Liabilitas Pembelian Aset	70.306.824.418
Liabilitas Usaha	7.299.459.390
Selisih Rekonsiliasi Bank	630.020.197
Liabilitas Investasi	179.264.089
Iuran Karyawan	11.001.301
Lain-lain	149.405
Total	**489.281.664.504**

Saldo utang titipan JPK sebesar Rp 410.854.945.704 merupakan utang JPK yang diestimasi dan utang JPK IBNR yang akan diserahkan kepada BPJS Kesehatan pada saat pengalihan aset JPK.

34. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pembuka sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Imbalan Pasca Kerja	
BPJS Ketenagakerjaan	481.980.847.687
Entitas Anak	1.144.247.000
Total	**483.125.094.687**

Perhitungan Imbalan Kerja

Imbalan kerja yang menjadi dasar valuasi ini adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PSAK No, 24 (revisi 2010), dan Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan.

Valuasi aktuaria per 31 Desember 2013 merupakan saldo pembuka pada 1 Januari 2014 menggunakan metode *Projected Unit Credit* (PUC) dan berbagai asumsi aktuaria baik asumsi ekonomis maupun asumsi demografis, diantaranya:

	1 Januari 2014
BPJS Ketenagakerjaan	
Tingkat Diskonto	9,04%
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	10%
Tingkat Mortalitas	1% dari mortalita
Tingkat Cacat	TMI III tahun 2011
Tingkat Pengunduran Diri	6% di usia 20 tahun, menurun hingga 1% di usia 50 tahun
Usia Pensiun Normal	56 tahun
Entitas Anak	
Tingkat Diskonto	8,5%
Tingkat Mortalitas	6%
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	TMI III
Tingkat Cacat	10%
Tingkat Pengunduran Diri	0 - 6%
Usia Pensiun Normal	55 tahun

Liabilitas Manfaat Imbalan Pasca Kerja

Perhitungan Manfaat Pensiun per 31 Desember 2013 merupakan saldo pembuka pada 1 Januari 2014 yang dilakukan oleh aktuaris internal BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Laporan Aktuaris tanggal 14 Januari 2014 oleh Aktuaris Pramudya Iriawan B, FSAI, AAAI-J No. Reg. PAI 2011101391.

Dari perhitungan aktuaria sesuai dengan ketentuan PSAK No. 24 (Revisi 2004) terhadap Imbalan Kerja berdasarkan asumsi-asumsi akturia, data peserta dan data keuangan menghasilkan jumlah (Kewajiban)/Kekayaan yang diakui pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Pembuka oleh BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
BPJS Ketenagakerjaan	
Nilai Kini Kewajiban	1.118.615.477.519
Kerugian Aktuarial yang Belum Diakui	(605.022.670.317)
Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakul - *Non Vested*	(31.611.959.515)
Liabilitas Manfaat Imbalan Pasca Kerja	481.980.847.687
Pergerakan Liabilitas yang diakui di Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi Pembuka	
Liabilitas Awal Periode	343.651.186.485
Behan Periode Berjalan	219.605.696.929
Imbalan yang Dibayar	(81.276.035.727)
Liabilitas Akhir Periode	481.980.847.687
Entitas Anak	
Liabilitas Awal Periode	1.141.765.000
Beban Periode Berjalan	91.732.000
Imbalan yang Dibayar	(89.250.000)
Liabilitas Akhir Periode	1.144.247.000
Total	**483.125.094.687**

35. Liabilitas Jangka Panjang Lain

Akun ini merupakan saldo liabilitas jangka panjang lain per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Pos Sementara dalam Penyelesaian	253.393.102
Lain-Lain	3.895.259.527
Jumlah	**4.148.652.629**

36. Modal

Akun ini merupakan saldo modal BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari penyertaan Pemerintah dan pengalihan modal PT Jamsostek (Persero) per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Modal Awal	500.000.000.000
Penambahan:	
Pengalihan Modal PT Jamsostek (Persero)	4.000.000.000.000
Total	**4.500.000.000.000**

Sesuai Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan, pencatatan modal BPJS Ketenagakerjaan merupakan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dan tidak terbagi atas lembar saham.

37. Ekuitas Lain

Akun ini merupakan ekuitas lain BPJS Ketenagakerjaan atas cadangan umum dan cadangan tujuan per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Cadangan Umum	2.250.127.398.239
Cadangan Tujuan	1.073.211.054.227
Total	**3.323.338.452.466**

Dari saldo tersebut, terdapat distribusi laba PT Jamsostek (Persero) tahun buku 2013 masing-masing sebesar Rp 1.677.642.937.018 dan Rp 210.000.000.000 yang dialokasikan untuk cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: S-134/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan PT Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2013.

38. Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Akun ini merupakan saldo selisih penilaian efek atas saham, reksadana dan obligasi per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Saham	(445.977.595.191)
Reksadana	(62.166.138.329)
Obligasi	(2.135.475.579)
Total	**(510.279.209.099)**

39. Saldo Bagian Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Asosiasi

Bagian pemilik saham minoritas atas aset bersih Entitas anak per 1 Januari 2014 sebesar Rp 2.836.404.

40. Transaksi dengan Pihak Berelasi

BPJS Ketenagakerjaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah		
	Negara Republik Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, Penitipan Surat Berharga, Rekening Kustodi
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, Co Branding
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - KIK-EBA, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Deposito
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Timah (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Danareksa (Persero)	Penempatan Investasi - Reksadana, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi

41. Adopsi Standar Baru Maupun Revisi Standar dan Intepretasi (Revisi atas PSAK dan ISAK)

a. Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2014:

- ISAK No. 27 : Pengalihan Aset dari pelanggan
- ISAK No. 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Selama Periode Berjalan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pada tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan beberapa kebijakan baru antara lain sebagai berikut:

1) PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011)
   Kebijakan baru atas piutang properti investasi merupakan kelanjutan dari penerapan PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/84/032014
2) PSAK 13 (Revisi 2011)
   Kebijakan baru atas properti investasi merupakan penerapan PSAK 13 (Revisi 2011): Pengakuan Properti Investasi yang diterapkan pada 2014 sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/85/032014 tentang klasifikasi properti investasi berdasarkan tujuan penggunaannya.

Berikut ini ditampilkan daftar perubahan akuntansi yang berlaku pada 1 Januari 2014:

No	Rincian Perubahan	PSAK Terkait	Nomor SK Direksi
1	Perubahan Penyajian Laporan Posisi Keuangan	PSAK 1 (Revisi 2013) Penyajian Laporan Keuangan	KEP/461/122013
2	Piutang Properti Investasi	PSAK 50 (Revisi 2010) Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 55 (Revisi 2011) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	KEP/84/032014
3	Klasifikasi Properti Investasi	PSAK 13 (Revisi 2011) Properti Investasi	KEP/85/032014

42. Manajemen Risiko

a. Organisasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada BPJS Ketenagakerjaan saat ini berada dibawah tanggung jawab Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Manajemen Risiko. Terkait dengan pengelolaan Risiko, Biro Manajemen Risiko dipantau oleh Komite Manajemen Risiko yang merupakan perangkat Dewan Pengawas.

Pada dasarnya pengelolaan risiko adalah tanggung jawab seluruh unit kerja (divisi, biro, kantor wilayah dan kantor cabang). Aktifitas operasional antara lain melakukan proses pengidentifikasian, pengukuran, monitoring dan pelaporan risiko yang merupakan bagian dari aktivitas operasional semua unit kerja. Biro Manajemen Risiko mendesain/menetapkan kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko, memfasilitasi unit kerja dalam melaksanakan manajemen risiko dan memonitor pelaporan dan kesesuaian kerangka kerja/metodologi yang diterapkan unit kerja.

Aktifitas bisnis BPJS Ketenagakerjaan meliputi pelayanan kepesertaan dan pengelolaan dana. Terkait dengan aktifitas tersebut, BPJS Ketenagakerjaan terekspos berbagai risiko yang meliputi risiko *counterpart*, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Khusus terkait dengan pengelolaan aset keuangan yang merupakan aset terbesar, BPJS Ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mentaati peraturan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor: 22 tahun 2004 tentang Pedoman dan Pengelolaan Investasi Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

b. Manajemen Risiko *Counterpart*

Risiko *counterpart* adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.

Pihak ketiga dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti dan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya default (gagal bayar). Pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian pembuka pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014		
	Nilai Kotor	Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai Bersih
	Rp	Rp	Rp
Aset			
Bank Investasi	116.010.675	--	116.010.675
Deposito Berjangka	2.359.793.691.000	--	2.359.793.691.000
Saham	3.097.235.191.439	--	3.097.235.191.439
Reksadana	448.051.614.012	--	448.051.614.012
Pinjaman LMT	587.333.301.408	(95.234.568.300)	492.098.733.108
KIK - EBA	95.555.642.529	--	95.555.642.529
Sukuk	73.109.000.000	--	73.109.000.000
Obligasi			
Korporasi	1.118.209.672.730	--	1.118.209.672.730
Obligasi Republik Indonesia	314.238.222.731	--	314.238.222.731

c. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Secara umum BPJS Ketenagakerjaan memiliki risiko bunga atas nilai wajar dan risiko harga.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur BPJS Ketenagakerjaan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Risiko ini terkait dengan koreksi harga instrumen saham, obligasi dan reksadana akibat pengaruh perubahan tingkat suku bunga.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan rebalancing secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat dari perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Exposure BPJS Ketenagakerjaan terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan menggunakan *Security Market Line* (SML) dan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga dan pergerakan suku bunga terhadap liabilitas dan ekuitas. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut antara lain adalah nilai IHSG dan *risk free rate* berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012.

Analisis sensitivitas suku bunga dan harga efek per 1 Januari 2014:

	1 Januari 2014 Rata - rata
Sensitivitas MTM: ∆100 poin IHSG	2,19%
SPE - Risiko Liabilitas	26,09%
SPE - Risiko Ekuitas	49,01%

* MTM; Mark to Market - SPE; Selisih Penilaian Efek

d. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi), maupun potensi peristiwa ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset *liquid* yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi).

Risiko likuiditas yang terkait aktifitas operasional non-investasi terdapat dalam aktifitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, BPJS Ketenagakerjaan mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, BPJS Ketenagakerjaan relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih likuid dibandingkan dengan kewajibannya.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar per 1 Januari 2014:

	1 Januari 2014				
	Nilai Tercatat Rp	≤ 1 Bulan Rp	1 - 6 Bulan Rp	6 - 12 Bulan Rp	> 12 Bulan Rp
Aset Keuangan					
Deposito	2.359.793.691.000	686.199.173.631	1.312.863.603.213	360.714.948.972	15.965.184
Saham	3.097.235.191.439	1.176.959.137.512	1.085.479.032.487	834.797.021.440	--
Obligasi	1.432.447.895.461	90.169.842.398	47.137.148.418	44.210.126.563	1.250.930.778.083
Sukuk	73.109.000.000	1.140.342.450	1.363.005.762	--	70.605.651.788
Reksadana	448.051.614.012	112.835.491.571	262.898.231.238	72.317.891.204	--
KIK-EBA	95.555.642.529	--	--	--	95.555.642.529
Total	**7.506.193.034.441**	**2.067.303.987.561**	**2.709.741.021.117**	**1.312.039.988.178**	**1.417.108.037.584**

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitanya.

e. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/ upaya pencapaian kerja, baik terkait aktivitas investasi maupun non-investasi dalam kurun 1 (satu) tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum penyebab risiko operasional BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan SOP secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi (IT). Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Terkait dengan mitigasi risiko operasional dan risiko-risiko lainnya, BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), pengembangan infrastruktur dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis COSO-ERM, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko korporasi sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*/RBA) disamping itu BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas BPJS Ketenagakerjaan melalui sosialisasi, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai risk-owner memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan efektif.

43. Kontinjensi

Perkara Hukum

Dalam melakukan kegiatan, BPJS Ketenagakerjaan tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset, Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, terdiri atas:

a. Gugatan kepada Indro Tjahyono
   Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Kasus pencemaran nama baik mantan Direksi (Alm Bpk A. Djunaidi) oleh Sdr Indro Tjhayono /Staf Ahli Depnakertrans.

b. Penyelesaian aset Sdr. Eddy Sofyan
   Penyelesaian aset Sdr. Eddy Sofyan berupa jaminan atas 14 Sertifikat Tanah di Desa Cerucuk, Tanjung Pandan, Belitung. (Jaminan tambahan MTN PT Volgren Indonesia). Saat ini dalam proses koordinasi dengan Jaksa Pengacara selaku Kuasa Hukum BPJS Ketenagakerjaan.

c. Penyelesaian aset ex MTN PT Sapta Prana Jaya
   1) Tanah di Desa Waringin Jaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang,
   2) Tanah di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang,
   3) Tanah di Desa Tambak , Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak,
   4) Tanah di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor.

   Tanah di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang telah dilakukan pemblokiran oleh kantor BPN Lebak dan kantor BPN Pandeglang sesuai pengajuan blokir yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI selaku kuasa Hukum BPJS Ketenagakerjaan.

   Tanah di Kabupaten Bogor telah dilakukan survei oleh Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 3 April 2014 dan akan segera diajukan pemblokiran pada kantor BPN Bogor dan Kantor Camat Kelapanunggal Bogor.

d. Pelaksanaan Lelang Tahap III
Pelaksanaan Lelang Tahap III Tanah di Desa Kamarung Kecamatan Pegaden Subang Jawa Barat (Aset Jaminan MTN PT Volgren Indonesia).

Telah dilakukan lelang eksekusi tahap III pada tanggal 27 November 2013, dan belum terjual disebabkan harga limit yang ditetapkan berdasarkan appraisal yang dilakukan oleh PN Subang lebih tinggi dari harga pasaran property setempat menyebabkan tidak ada peserta lelang.

e. Investigasi bus PT Volgren Indonesia di Cirebon dan Purwokerto.
Berdasarkan laporan kunjungan Lapangan ke Purwokerto dan ditemukan Bis sudah dipotong-potong. Saat ini dalam proses koordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI selaku Kuasa Hukum BPJS Ketenagakerjaan.

f. Kasus kepailitan PT Eight Oh Two Indonesia
Pengajuan Tagihan Iuran perusahaan dalam proses pailit, kepesertaan Kacab Tanjung Priok, saat ini Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit dan masih dalam proses pemberesan harta pailit oleh pihak Kurator

g. Pendapat Hukum JAMDATUN terkait rencana investasi PT Jamsostek (Persero)
Legal Opini Jamdatun terkait Investasi yang telah disampaikan tanggal 2 Mei 2013 kepada PT Jamsostek (Persero).

h. PHK Karyawan *Outsourcing* Jamsostek 2013
(i). Terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012 dan permenaker Nomor 19 tahun 2012, tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, yang penyesuaiannya paling lama 12 (dua belas) bulan atau pada 13 November 2013.
(ii). Manajemen mengambil kebijakan mengakhiri penggunaan outsourcing untuk tenaga administrasi terhitung 31 Oktober 2013, dengan tahapan sbb:
- Diberikan kesempatan seleksi untuk diangkat menjadi karyawan tetap dengan persyaratan cukup longgar, mengingat kontribusinya selama ini.
- Untuk yang tidak lolos seleksi diakhiri hubungan kerjanya dengan diberiikan kompensasi sesuai ketentuan UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Sampai saat ini masih terdapat 132 tenaga *outsourcing* yang masih menolak kebijakan PHK. Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan anjuran terhadap 8 *outsourcing* Kebon Sirih dan Dinsosnaker Kabupaten Purwakarta telah menerbitkan anjuran terhadap 4 *outsourcing* Purwakarta. BPJS Ketenagakerjaan menerima anjuran tersebut. 120 *outsourcing* lainnya masih menunggu proses klarifikasi dan mediasi di Disnakertrans setempat.

i. Penangan Kasus Blitar
Berdasarkan surat kuasa Nomor: SKS /52/112013 dari Direktur Utama kepada Kanwil Jatimbanusra mengenai pelaporan kasus Blitar kepada Kejaksaan Tinggi Jatim. Kepala Cabang Blitar telah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Trenggalek untuk melakukan penagihan kepada mitra binaan yang menunggak kewajiban pembayaran angsuran pinjaman.

j. Kasus Penyerobotan Tanah learning Center Bogor.
Tanah milik BPJS Ketenagakerjaan di jalan Dadali, Bogor telah berada dalam penguasaan kantor hukum James Purba & Associates selaku kuasa hukum BPJS Ketenagakerjaan dan sudah tidak ada gangguan dari pihak Ahli Waris Hj. Asmara. Kantor hukum James Purba & Associates akan menjaga dan mengamankan aset tanah tersebut selama 18 bulan terhitung dari Desember 2013. Selanjutnya akan segera dilakukan pembangunan Learning Center setelah ada pemenang lelang Kontraktor pembangunan gedung.

44. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

a. BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM). Pada saat berlakunya UU No. 24 sesuai pasal 62 angka 2 huruf d, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, paling lambat 1 Juli 2015.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan bahwa guna mendukung operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan, maka Negara Republik Indonesia perlu memberikan modal awal kepada BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013. Pada tanggal 18 Februari 2014, BPJS Ketenagakerjaan telah menerima nilai modal awal adalah sebesar Rp 500.000.000.000.

c. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 61 huruf c disebutkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) sampai dengan berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan ditugasi untuk menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014.

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tanggal 27 Desember 2013 pasal 15 angka 4 dan 5 disebutkan bahwa aset dana jaminan sosial yang bersumber dari hasil pengalihan aset program jaminan sosial ketenagakerjaan paling sedikit sebesar liabilitas kepada peserta pada saat pengalihan aset PT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

   Pengalihan aset dan liabilitas Program JPK yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :

		1 Januari 2014 Rp
ASET		
Kas dan Setara Kas		
Giro		367.593.823.441
Piutang Iuran		
Piutang Iuran	83.877.802.574	
Akumulasi Penyisihan Piutang Iuran	(40.616.680.311)	
Piutang Iuran (Bersih)		43.261.122.263
JUMLAH ASET		**410.854.945.704**
LIABILITAS		
Utang Jaminan		
Utang jaminan	--	
Utang jaminan diestimasi	58.729.201.217	
Utang jaminan IBNR	29.476.698.075	
		88.205.899.292
Cadangan Teknis JPK		322.649.046.412
JUMLAH LIABILITAS		**410.854.945.704**

Berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 16 April 2014 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, tentang Pengalihan Aset dan Liabilitas serta Hak dan Kewajiban Program JPK Eks PT Jamsostek (Persero), BPJS Ketenagakerjaan telah mengalihkan aset dan liabilitas Program JPK pada tanggal 16 April 2014 dalam bentuk kas sebesar Rp 367.593.823.441 dengan total aset dan liabilitas Program JPK yang dialihkan ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 410.854.945.704.

d. BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan penerimaan iuran JPK yang masih diterima selama bulan Januari sampai Maret 2014 secara bertahap kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 13.937.204.558 dengan rincian sebagai berikut:

Tahap	Tanggal	Nilai Rp
1	26 Maret 2014	723.224.840
2	28 Maret 2014	1.116.380.164
3	1 April 2014	453.214.085
4	2 April 2014	5.366.275.319
5	3 April 2014	724.149.721
6	8 April 2014	4.052.548.150
7	9 April 2014	1.501.412.279
Total		**13.937.204.558**

45. Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku pada Tanggal 1 Januari 2014

Standar revisi yang wajib diterapkan untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai 1 Januari 2015 dan relevan dengan operasi BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
- PSAK 1 (revisi 2013) “Penyajian laporan keuangan”
- PSAK 4 (revisi 2013) “Laporan keuangan tersendiri”
- PSAK 15 (revisi 2013) “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama”
- PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan kerja”
- PSAK 65 “Laporan keuangan konsolidasian”
- PSAK 66 “Pengaturan bersama”
- PSAK 67 “Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain”
- PSAK 68 “Pengukuran nilai wajar”

46. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang tercatat dalam laporan keuangan pembuka.

	1 Januari 2014					
	Nilai Tercatat					Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar	Dimiliki Untuk Dijual	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Total Nilai Tercatat	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan						
INVESTASI						
Bank Investasi	--	--	--	116.010.675	116.010.675	116.010.675
Deposito	--	--	--	2.359.793.691.000	2.359.793.691.000	2.359.793.691.000
Saham	40.970.592.093	3.056.264.599.346	--	--	3.097.235.191.439	3.097.235.191.439
Reksadana	--	448.051.614.012	--	--	448.051.614.012	448.051.614.012
KIK EBA	--	--	95.555.642.529	--	95.555.642.529	95.555.642.529
Sukuk	--	--	73.109.000.000	--	73.109.000.000	73.109.000.000
Obligasi	16.493.450.388	122.071.524.421	1.293.882.920.652	--	1.432.447.895.461	1.432.447.895.461
Penyertaan	--	30.813.767.448	--	--	30.813.767.448	30.813.767.448
NON INVESTASI						
Kas	--	--	--	73.968.100	73.968.100	73.968.100
Bank	--	--	--	103.771.598.537	103.771.598.537	103.771.598.537
Deposito	--	--	--	259.500.000.000	259.500.000.000	259.500.000.000
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	--	--	--	599.160.506	599.160.506	599.160.506
Piutang Investasi	--	--	--	12.858.362.558	12.858.362.558	12.858.362.558
Piutang Hasil Investasi	--	--	--	147.996.577.059	147.996.577.059	147.996.577.059
Piutang Lain	--	--	--	555.225.184.438	555.225.184.438	555.225.184.438
Pinjaman Diberikan	--	--	--	492.098.733.108	492.098.733.108	492.098.733.108
Aset Investasi Tidak Produktif	--	--	--	17.745.677.946	17.745.677.946	17.745.677.946
Total	**57.464.042.481**	**3.657.201.505.227**	**1.462.547.563.181**	**3.949.778.963.927**	**9.126.992.074.816**	**9.126.992.074.816**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:
- Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, sukuk, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
- Nilai wajar dari saham, reksadana, sukuk, dan obligasi dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada Catatan 3.d, 12, 13, 19, dan 20.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:
i. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
ii. Tingkat 2: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
iii. Tingkat 3: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

	1 Januari 2014			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan				
Saham	3.097.235.191.439	--	--	3.097.235.191.439
Reksadana	448.051.646.012	--	--	448.051.646.012
Sukuk	--	73.109.000.000	--	73.109.000.000
Obligasi	--	1.432.447.895.461	--	1.432.447.895.461
Total	**3.545.286.837.451**	**1.505.556.895.461**	**--**	**5.050.843.732.912**

47. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Pembuka

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pembuka BPJS Ketenagakerjaan yang diotorisasi untuk terbit tanggal 17 April 2014.

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA

Laporan KeuanganPembuka
Per 1 Januari 2014

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT)

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Pembuka
Per 1 Januari 2014

Laporan Aset Neto 1

Catatan atas Laporan Keuangan Pembuka 2

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA
LAPORAN ASET NETO
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	1 Januari 2014 Rp
ASET		
Kas dan Setara Kas	3.b, 3.p, 4	747.927.078.270
Piutang Investasi	3.b, 5	53.018.820.555
Piutang Hasil Investasi	3.b, 3.c, 6	1.380.048.636.759
Beban Dibayar di Muka	7	28.822.075
Deposito	3.b, 3.p, 8	36.015.899.000.000
Saham	3.b, 3.p, 9	23.447.285.053.660
Reksadana	3.b, 3.p, 10	10.599.347.858.624
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragunan Aset	3.b, 3.p, 11	100.000.000.000
Sukuk	3.b, 3.p, 12	5.592.911.678.126
Obligasi - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	3.b, 3.p, 13	55.136.875.221.556
Properti Investasi - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	3.d, 14	1.035.203.207.997
TOTAL ASET		**134.108.545.377.622**
LIABILITAS DAN ASET NETO		
LIABILITAS		
Utang Jaminan Hari Tua Siap Bayar	3.e, 15	37.670.162.674
Utang Kepada Pihak Ketiga	3.f, 16	28.283.763.129
Utang Pajak	3.g, 17	8.027.607.383
Pendapatan Diterima Dimuka	3.h, 18	14.506.553.957
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3.i, 19	12.137.790.242
Liabilitas Jaminan Hari Tua Jatuh Tempo	3.j, 20	9.302.034.953.146
TOTAL LIABILITAS		**9.402.660.830.531**
ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT JAMINAN HARI TUA		
Iuran Pokok	3.l, 21	125.491.914.019.421
Hasil Pengembangan	3.m, 22	2.323.888.992.475
Aset Neto	3.k, 23	(3.109.918.464.805)
TOTAL ASET NETO		**124.705.884.547.091**
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		**134.108.545.377.622**

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMBUKA
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan pembuka Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) disusun berdasarkan laporan konsolidasian penutup PT Jamsostek (Persero) yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2. Gambaran Program Jaminan Hari Tua

2.a. Pembentukan Program Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua ("Program JHT") dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 18 yang menyebutkan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi:

- Jaminan Kesehatan;
- Jaminan Kecelakaan Kerja;
- Jaminan Hari Tua;
- Jaminan Pensiun;dan
- Jaminan Kematian.

Program JHT sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 6 ayat 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

2.b. Kepesertaan dan Iuran

Kepesertaan dalam Program JHT adalah pekerja yang telah membayar iuran.

Peserta Program JHT terdiri dari:

- Peserta penerima gaji atau upah, meliputi :
  - Pekerja yang bekerja pada penyelenggara Negara; dan
  - Pekerja yang bekerja bukan pada penyelenggara Negara.
- Peserta bukan penerima gaji atau upah, meliputi:
  - Orang yang berusaha sendiri;
  - Orang yang berusaha sendiri dibantu oleh pekerja tidak tetap dan/atau anggota keluarga;
  - Orang yang bekerja dibantu orang lain atau anggota keluarga;
  - Orang yang bekerja atau berusaha dengan sistem bagi hasil atau setoran atau komisi;
  - Pemilik perusahaan; dan
  - Tenaga kerja magang, tenaga honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap lainnya baik di perusahaan maupun pemerintah.
- Peserta bukan penerima upah selain tersebut diatas.

Iuran Program JHT yang adalah:

- Bagi peserta penerima gaji atau upah, sebesar persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.
- Bagi peserta bukan penerima gaji atau upah, besar iuran ditetapkan oleh pemerintah.

2.c. Tujuan dan Manfaat Program Jaminan Hari Tua

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 35, tujuan Program JHT adalah untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Manfaat Program JHT:

- Manfaat Program JHT berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap,atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- Pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.

Manfaat program JHT diberikan kepada:

- Ahli waris yang sah dari peserta yang meninggal dunia berhak atas manfaat JHT.
- Urutan ahli waris yang berhak menerima manfaat JHT meliputi:
  - Janda atau duda atau anak.
  - Dalam hal tidak ada janda, duda, atau anak maka diberikan kepada:
    i. Keturunan sedarah tenaga kerja menurut garis lurus kebawah dan keatas sampai derajat kedua (bapak, ibu, cucu, kakek dan nenek);
    ii. Saudara kandung;
    iii. Mertua;
    iv. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya tenaga kerja; dan
    v. Apabila tidak ada wasiat maka jaminan JHT dikembalikan ke program JHT.

2.d. Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan susunan sebagai berikut:

- Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014
Dewan Pengawas	
Ketua Dewan Pengawas	Mulabasa Hutabarat
Anggota Dewan Pengawas	Iskandar Maula
Anggota Dewan Pengawas	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota Dewan Pengawas	Bambang Wirahyoso
Anggota Dewan Pengawas	Mathias Tambing
Anggota Dewan Pengawas	Nina Sapti Triaswati
Anggota Dewan Pengawas	H.M. Saleh Khalid

- Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014
Dewan Direksi	
Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi	Agus Supriyadi
Direktur Investasi	Jeffry Haryadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	Amri Yusuf
Direktur Pelayanan	Achmad Riadi
Direktur Kepesertaan	Junaedi
Direktur Keuangan	Herdy Trisanto

2.e. Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko

Susunan Komite Audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014
Komite Audit	
Ketua	Bambang Wirahyoso
Anggota	Salim Siagian
Anggota	Rinaningsih

Komite Manajemen Risiko Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT pada 1 Januari 2014 adalah Endi Roswendi.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

3.a. Dasar Penyusunan, Pengukuran dan Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Program Jaminan Hari Tua. Pedoman Akuntansi Program JHT disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain:

a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
c. *International Financial Reporting Standards; dan*
d. Peraturan perudang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Program JHT.

Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Program Jaminan Hari Tua mulai diterapkan pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

1) Penentuan aset investasi awal yang akan diukur pada nilai wajar dan yang akan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi sesuai persyaratan sesuai dengan kondisi pada tanggal tersebut;
2) Jumlah tercatat aset awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah;
3) Jumlah tercatat liabilitas awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah;dan
4) Jumlah tercatat aset neto awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah.

Laporan keuangan pembuka merupakan laporan yang disusun untuk memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 62 ayat 2 huruf c disebutkan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan Posisi Laporan Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Laporan Aset Neto Pembuka Program JHT disusun berdasarkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh kantor akuntan independen dan telah disahkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK-50/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013 Perusahaan Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 49 ayat 2 disebutkan bahwa “Subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan”, dan dijelaskan kembali pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 40 ayat 2 disebutkan bahwa BPJS wajib memisahkan aset BPJS dengan aset Dana Jaminan Sosial. Untuk memenuhi ketentuan ini maka Laporan Aset Neto Pembuka Jaminan Hari Tua disusun sesuai dengan Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber aset program JHT berasal dari :
1) Iuran program JHT termasuk bantuan iuran;
2) Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan program JHT;
3) Pengalihan aset program JHT yang menjadi hak peserta PT Jamsostek (Persero);dan
4) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Aset dan Liabilitas Program JHT PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset dan Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan telah ditetapkan dalam 3 (tiga) Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/04/012014 tentang Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap dijabarkan sebagai berikut:

1) Sumber Dana Program JHT terdiri dari:
   a. Liabilitas Kepada Peserta Program JHT.
      - JHT Siap Bayar;
      - JHT Jatuh Tempo;
      - JHT Sesuai Rincian Pernyataan Saldo JHT (PSJHT);
      - JHT Kurang Bayar;dan
      - JHT Belum Selesai PSJHT.
   b. Liabilitas Pengelolaan Program JHT.
      - Liabilitas Investasi;
      - Pendapatan diterima dimuka investasi;dan
      - Selisih penilaian efek (SPE) JHT.
   c. Dana Pengembangan JHT.
   d. Iuran Belum Rinci (IBR) dan Iuran Diterima Dimuka.
   e. Liabilitas Lain (Pajak Properti dan PPh 21 atas JHT).

2) Alokasi Aset Program JHT
   a. Kas setara Kas;
   b. Investasi;
   c. Turunan investasi (pendapatan yang masih harus diterima, piutang jatuh tempo dan piutang investasi);dan
   d. Aset lain (uang muka pajak bangunan investasi).

3) Alokasi Sumber Dana Program JHT
   Pengalokasian sumber dana program dilakukan dengan menggunakan persentase proporsi per program. Proporsi atas alokasi sumber dana digunakan untuk pos-pos kewajiban yang belum teridentifikasi dengan akun masing-masing program. Penggunaan proporsi atas alokasi sumber dana hanya dilakukan untuk program Non JHT, sedangkan untuk program JHT sudah dilakukan pemisahan terhadap aset dan liabilitasnya.

4) Penentuan Aset Program JHT
   a. Aset Investasi terdiri dari Deposito, Saham, Obligasi dan Reksadana;dan
   b. Aset Non Investasi terdiri dari kas setara kas dan bank investasi.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan aset neto pembuka adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk investasi pada saham, obligasi, dan reksadana yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan. Investasi dalam kelompok ini disajikan sebesar nilai wajarnya.

Laporan aset neto pembuka Dana Jaminan Sosial Program JHT telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual.

Mata uang penyajian dan fungsional dalam Laporan Aset Neto Pembuka ini adalah mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Program JHT telah disajikan sesuai PSAK 18 (Revisi 2010): Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya.

3.b. Instrumen Keuangan

Pengembangan Aset

Pengembangan aset Program JHT sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 bahwa pengembangan aset dilakukan dalam bentuk investasi yang ditempatkan pada instrumen investasi dalam negeri. Instrumen investasi tersebut meliputi:

1) Deposito Berjangka
   Yang termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada bank paling tinggi 15% dari jumlah investasi untuk setiap bank.

2) Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia
   - Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase.

3) Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
   - Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase.

4) Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
   - Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Maksimal 50% dari jumlah investasi;dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

5) Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
   - Maksimal 50% dari jumlah investasi;dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

6) Reksadana
   - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
   - Maksimal 50% dari jumlah investasi;dan
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 15% dari jumlah investasi.

7) *Repurchase agreement*
   - Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA);
   - Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesi dan/atau Bank Indonesia;
   - Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;
   - Nilai repurchase agreement tidak lebih dari 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan;
   - Setiap *counterpart* paling tinggi 2% dari jumlah investasi;dan
   - Maksimal 5% dari jumlah investasi.

8) Efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset
   - Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;dan
   - Maksimal 20% dari jumlah investasi.

9) Investasi berupa dana investasi *real estate*
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi;dan
   - Maksimal 20% dari jumlah investasi.

10) Penyertaan langsung
   - Setiap pihak tidak melebihi 1% dari jumlah investasi;dan
   - Maksimal 5% dari jumlah investasi.

11) Investasi berupa tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan, seluruhnya maksimal 5% dari jumlah investasi.

Aset Keuangan

Klasifikasi Aset Keuangan antara lain adalah Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset pada saat awal pengakuannya. Pengakuan aset keuangan yang diperdagangkan di bursa efek adalah pada saat tanggal perdagangan (*trading date*).

Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar

Kategori ini terdiri dari dua sub kategori, yaitu aset keuangan untuk tujuan diperdagangkan (*trading*) dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (*Fair Value Option*).

Aset Keuangan yang masuk dalam kategori untuk diperdagangkan (*trading*) jika memiliki tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat (*short term profit taking*) dan aset keuangan yang merupakan bagian dari portofolio intrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Dalam hal pengertian diperdagangkan tersebut menggambarkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang, dan umumnya digunakan untuk tujuan memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek.

Aset Keuangan yang masuk dalam kategori diukur pada nilai wajar (*Fair Value Option*) jika menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena nilai wajar mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan suatu pengukuran atau pengakuan yang akan timbul (*accounting mismatch*). *Accounting mismatch* bisa saja terjadi, sebagai contohnya adalah ketika terdapat liabilitas berdasarkan kontrak asuransi yang pengukurannya memasukkan informasi terkini (contoh cadangan teknis) namun aset keuangan terkait tidak diukur pada nilai wajar.

Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Kategori ini memiliki dua sub kategori, yaitu aset keuangan Nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, kategori kedua adalah entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Penilaian intensi dan kemampuan entitas untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo, tidak hanya ketika pertama kali diakui, tetapi juga pada setiap tanggal pelaporan keuangan. Sedangkan entitas tidak memiliki intensi positif jika belum menetapkan periode kepemilikan investasi, bermaksud untuk menjual sewaktu-waktu (selain dalam situasi yang tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya) sebagai reaksi terhadap perubahan suku bunga atau risiko pasar, kebutuhan likuiditas, perubahan ketersediaan dan tingkat pengembalian investasi alternatif, perubahan sumber dan syarat pembiayaan, atau perubahan risiko mata uang asing dan pihak penerbit memiliki hak untuk menyelesaikan pada suatu jumlah yang secara signifikan lebih rendah dari harga perolehan yang diamortisasi.

Entitas tidak memiliki kemampuan untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo jika tidak memiliki sumber daya keuangan yang tersedia untuk melanjutkan pendanaan investasi tersebut hingga jatuh tempo.

Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang

Kategori ini memiliki dua sub kategori, antara lain adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan aset keuangan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan Awal

Aset keuangan diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan sesuai dalam perjanjian. Untuk aset keuangan yang diperoleh di bursa efek dicatat dengan menggunakan tanggal perdagangan (*trading date*).

Aset Investasi

Aset investasi program JHT diukur pada nilai wajar, pada saat awal perolehan untuk penyertaan langsung dan properti diakui sebesar harga perolehan sedangkan untuk aset keuangan diakui sebesar nilai wajarnya dan biaya transaksi diakui sebagai beban investasi. Pengukuran selanjutnya aset investasi diukur pada nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui sebagai selisih penilaian investasi.

Khusus efek utang yang diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban (atau bagian spesifik kewajiban) program JHT dapat diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Perhitungan Suku Bunga Efektif adalah sebagai berikut:

$$\mathrm{PV} = \frac{CF}{(1+i)^1} + \frac{CF}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{CF}{(1+i)^t}$$

Keterangan:

PV (*Present Value*)	:	Nilai wajar yang merupakan nilai kini dari aset keuangan yg diperoleh
CF (*Cash Flow*)	:	Arus kas bersih yg akan diterima berdasarkan ketentuan perjanjian
i (*Interest*)	:	Suku bunga efektif
t (*Time*)	:	Jangka Waktu

Penurunan Nilai

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan. Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang. Penurunan nilai atas aset keuangan dalam kategori nilai wajar tidak ada pengujian penurunan nilai. Sedangkan untuk kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang dilakukan pengujian penurunan nilai.

Pembalikan Penurunan Nilai

Ketentuan pembalikan penurunan nilai tidak diterapkan pada aset keuangan dalam kategori nilai wajar seperti halnya tidak diterapkannya ketentuan penurunan nilai pada aset keuangan dalam kategori nilai wajar. Sedangkan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang pembalikan penurunan nilai tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat melebihi nilai tercatat pada tanggal pemulihan apabila sebelumnya tidak terjadi penurunan nilai. Jumlah pembalikan penurunan nilai dalam dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang diakui sebagai keuntungan tahun berjalan.

Hirarki Nilai Wajar

Hirarki nilai wajar yang digunakan dalam kategori nilai wajar adalah harga kuotasi pasar aktif dan teknik penilaian. Pasar aktif yaitu harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Harga kuotasi pasar yang sesuai untuk aset keuangan yaitu harga penawaran (*bid price*) di pasar.

Sukuk

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atas aset berwujud tertentu, manfaat atas aset berwujud tertentu dan jasa baik yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu atau kegiatan investasi yang telah ditentukan.

SUKUK	Nilai Wajar	Biaya Perolehan
Klasifikasi	Model usaha entitas bertujuan tidak untuk memperoleh arus kas kontraktual atau persyaratan kontraktual tidak menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil (mudharabah) atau imbalan (ijarah)	Model usaha entitas bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual menetukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil (mudharabah) atau imbalan (ijarah)
Reklasifikasi	Tidak dapat direklasifikasikan ke kategori diukur pada biaya perolehan, kecuali terjadi perubahan model usaha.	
Pengakuan dan Penghentian Pengakuan	Diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan dalam perjanjian.	
	Dihentikan pengakuannya ketika berakhirnya hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari sukuk.	
Pengukuran Awal	Diukur pada nilai wajar (harga beli). Biaya transaksi yang terjadi diakui sebagai beban	Diukur pada biaya perolehan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi
Pengukuran Selanjutnya	Diukur pada nilai wajar. Kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui sebagai selisih penilaian investasi	Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus
Penurunan Nilai	Tidak ada pengujian penurunan nilai	Dilakukan pengujian penurunan nilail, kecuali jumlah terpulihkan dihitung sebesar jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.
Pembalikan Penurunan Nilai	Tidak diterapkan	Mengacu pada ketentuan atas aset keuangan
Hirarki Nilai Wajar	Harga Kuotasi Pasar Aktif	
	Teknik penilaian nilai wajar yang digunakan adalah penggunaan harga transaksi wajar paling kini dan referensi nilai wajar intrumen lain yang secara substansi sama.	

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa suatu kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain atau dengan kondisi yang berpotensi merugikan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dan diukur pada harga perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif. Pengakuan dan penghentian pengakuan atas liabilitas keuangan diakui pada entitas terkait dengan ketentuan dalam perjanjian.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka dilakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Penghentian liabilitas keuangan dilakukan ketika liabilitas keuangan diselesaikan, dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Saling hapus instrumen keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan nilai dari aset keuangan
Pada setiap tanggal pelaporan keuangan, dievaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penentuan nilai wajar
Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas keuangan dapat diukur dengan menggunakan kuotasi di pasar aktif, yaitu jika harga yang dikuotasikan tersedia setiap waktu dan dapat diperoleh secara rutin dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Dalam hal tidak terdapat pasar aktif untuk suatu aset atau liabilitas keuangan, maka ditentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak yang berkeinginan dan memahami, dan bilamana tersedia, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, dan model penetapan harga opsi.

Klasifikasi Instrumen Keuangan
Program JHT mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Keuangan	**Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar**	Aset Keuangan Untuk Tujuan Diperdagangkan (*Trading*)	Efek Utang, Efek Ekuitas dan Reksadana
		Aset Keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada Nilai Wajar (*Fair Value Option*)	Efek Utang, Efek Ekuitas dan Reksadana
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Aset Keuangan Nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan jatuh temponya	Efek Utang, Efek Ekuitas dan Reksadana
		Entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo	Efek Utang, Efek Ekuitas dan Reksadana
	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Aset Keuangan Nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan	Kas dan Bank Deposito Piutang
		Tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif	
Liabilitas Keuangan	**Biaya Perolehan Diamortisasi dengan Metode Suku Bunga Efektif**	Utang Kepada Pihak Ketiga Biaya Yang Masih Harus Dibayar	

3.c. Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi terdiri atas:

a. Piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual dan bagi hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka dan obligasi.
b. Piutang yang timbul dari pendapatan dividen antara lain yang berasal dari saham dan reksa dana.
c. Piutang yang timbul dari pendapatan sewa properti investasi.

3.d. Properti Investasi

Pengelolaan properti investasi mengacu pada Keputusan Direksi Nomor KEP/85/032014 mengenai klasifikasi properti investasi, klasifikasi properti investasi berdasarkan tujuan penggunaanya sebagai berikut:

a. Tanah;
b. Bangunan Properti;
c. Aset Fasilitas Properti;
d. Peralatan Properti;
e. Peralatan Lain Properti;dan
f. Aset Properti Dalam Konstruksi.

Aset Properti Investasi dikuasai oleh Program Jaminan Hari Tua untuk menghasilkan sewa (*rent*) atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian (*appraisal*) oleh pihak yang berkompeten dan ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan perubahan aset neto.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan perubahan aset neto dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

3.e. Utang Jaminan Hari Tua Siap Bayar

Utang Jaminan Hari Tua Siap Bayar merupakan jumlah utang JHT yang sudah ditetapkan dan siap dibayarkan kepada peserta. Perhitungan utang JHT siap bayar dilakukan berdasarkan akumulasi penerimaan iuran JHT dan hasil pengembangannya untuk peserta yang telah mengajukan klaim pencairan JHT.

3.f. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang ini merupakan utang yang harus dibayarkan kepada pihak selain penerima dan BPJS. Utang ini merupakan liabilitas keuangan dalam kategori diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

3.g. Perpajakan

Utang pajak adalah pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetorkan ke kas negara. Utang pajak diakui pada saat terjadi pembayaran manfaat JHT kepada peserta sebesar jumlah yang dipotong dan harus disetorkan ke kas negara.

3.h. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan kas dari pihak lain sebagai pembayaran jasa tertentu dan sampai dengan akhir periode jasa tersebut belum diberikan.

3.i. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya yang sudah jatuh tempo atau yang telah diterima manfaatnya tetapi belum dibayar.

3.j. Liabilitas Jaminan Hari Tua Jatuh Tempo

Liabilitas Jaminan Hari Tua Jatuh Tempo merupakan hasil estimasi jumlah yang dibayarkan kepada peserta yang usianya mencapai minimal 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal pelaporan.

3.k. Aset Neto Tersedia Untuk Manfaat Jaminan Hari Tua

Merupakan aset Program JHT setelah dikurangi liabilitasnya, diukur pada akhir periode pelaporan bertambah sebesar jumlah pendapatan setelah dikurangi beban selama periode berjalan dan disajikan secara terpisah untuk iuran pokok dan hasil pengembangannya.

3.l. Iuran Pokok

Penerimaan Iuran JHT dari perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan diperlakukan sebagai penambah aset neto iuran pokok sedangkan pembayarannya diperlakukan sebagai pengurang aset neto iuran pokok, diikutsertakan pada aset neto iuran pokok adalah bunga investasi JHT yang telah dikurangi dengan beban pengelolaan program JHT yang akan dikembalikan kepada peserta ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Ht : Total Hasil Pengembangan Saldo JHT Tahun 2014
Sa : Saldo Awal Tahun 2014
n : Bulan Iuran
In : Iuran Yang Diterima Pada Bulan ke-n Tahun 2014
Jhn : Jumlah Hari dalam Bulan Iuran
Ti : Tanggal Iuran Diterima
Hs : Hasil Pengembangan Saldo Awal
Hi : Hasil Pengembangan Iuran
Ht : Hs + Hi
Hs : {Sa x i%}
Hi : n=12
Ó {[In x i% x (1/12)] x [(Jhn-Ti/Jhn) + (12-n)]}
n=1

Bagian peserta berdasarkan rumus di atas akan menambah saldo aset neto hasil pengembangan. Apabila hasil investasi JHT setelah dialokasikan kepada peserta masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi dana pengembangan JHT yang diklasifikasikan dalam kelompok aset neto hasil pengembangan kepada peserta.

3.m. Hasil Pengembangan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/476/122012 tanggal 18 Desember 2012, menetapkan Dana Pengembangan JHT yang dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

a) Dana Pengembangan JHT Koreksi
Dana pengembangan JHT koreksi digunakan untuk koreksi data yang tertinggal yang dibentuk dari selisih lebih (kurang) *cut off* saldo utang JHT pada saat migrasi data dari sistem *offline* ke sistem *online* serta pindahan dana dari Dana Pengembangan JHT Penyesuaian Hasil Pengembangan Setelah RUPS dan Dana Pengembangan Surplus.

Dana pengembangan JHT penyangga investasi digunakan untuk mempertahankan hasil pengembangan JHT yang stabil yang kompetitif dengan tingkat suku bunga pasar, Dana pengembangan JHT penyangga investasi bersumber dari investasi JHT netto peiode sebelumnya.

Formula dana pengembangan penyangga adalah sebagai berikut:
Dana Pengembangan JHT Penyangga dihitung dengan formula:

Dana Pengembangan JHT = 21,60% x Hasil_JHT1 x U_JHT

Keterangan:
1. Hasil_JHT adalah hasil pengembangan JHT untuk perhitungan saldo JHT di awal periode berjalan dan untuk perhitungan pembayaran saldo JHT

2. U_JHT adalah utang jatuh tempo ditambah utang JHT sesuai RSJHT dan utang JHT belum sesuai RSJHT

b) Dana Pengembangan JHT Penyangga (*Buffer*) Investasi
Dana Pengembangan JHT Penyangga (*Buffer*) digunakan untuk mempertahankan tingkat hasil pengembangan JHT yang stabil dan menjaga tingkat hasil pengembangan JHT yang kompetitif dengan tingkat bunga pasar.

Dana Pengembangan JHT Penyangga (*Buffer*) Investasi dihitung dengan formula:

Dana Pengembangan JHT - *Buffer* = 21,60% x Hasil_JHT1 x U_JHT2

Keterangan:
1. Hasil_JHT[1] adalah hasil pengembangan JHT untuk perhitungan saldo JHT diawal periode berjalan dan untuk perhitungan pembayaran saldo JHT.
2. U_JHT[2] adalah utang JHT Jatuh Tempo ditambah utang JHT sesuai RSJHT ditambah utang JHT belum sesuai RSJHT.

c) Dana Pengembangan JHT Penyesuaian Hasil Pengembangan Setelah RUPS
Dana pengembangan JHT penyesuaian hasil pengem6bangan setelah RUPS berasal dari alokasi hasil investasi JHT netto yang belum didistribusikan per tanggal 31 Desember karena laporan keuangan audit belum disahkan RUPS.

d) Dana Pengembangan JHT Surplus
Dana pengembangan JHT surplus adalah hasil dari pengembangan dana JHT yang akan dikembalikan kepada peserta berdasarkan hasil dari investasi bersih JHT dari tahun berjalan dan sisa dari pengembangan tahun lalu yang ditetapkan pada RUPS tahun sebelumnya. Perhitungan untuk batas atas pada dana pengembangan JHT setelah RUPS adalah sebagai berikut:

$$\text{Batas Atas (Surplus) Investasi JHT} = \left\{ \begin{array}{l} 0.10\% \times \left(\begin{array}{l} \text{Utang\_JHT\_Jatuh Tempo (t-1)} \\ \text{Utang\_JHT\_Sesuai\_RSJHT (t-1)} \\ \text{Utang\_JHT\_Belum\_Selesai\_RSJHT (t-1)} \end{array} \right) \\ \qquad + \\ 0.10\% \times 0.50 \times \text{Penerimaan Iuran JHT} \end{array} \right\}$$

3.n. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:
1. Perusahaan dan entitas anak memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya;
3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:

1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas nya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

3.o. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan pembuka Program JHT mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Program JHT mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (*mark-to-model*). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers*, *money brokers*, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi provider info. Metode yang digunakan adalah metode *Nelson Siegel Svensson*. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow (DCF)* atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

3.p. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Program JHT menerapkan PSAK 7 (revisi 2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Program JHT telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan konsolidasian telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi. Pihak-pihak berelasi adalah:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor

b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);atau
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

4. Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

	1 Januari 2014 Rp
Bank	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	118.583.166.243
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	54.563.233.292
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.900.899.927
	186.047.299.462
Pihak Ketiga	
PT Bank Bukopin Tbk	44.369.570.690
PT Bank Pembangunan Daerah	19.401.199.764
PT Bank Agro Tbk	5.332.363.898
PT Bank CIMB Niaga Tbk	9.064
	69.103.143.416
Total Bank	**255.150.442.878**
Bank Investasi	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.767.456.509
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.195.918
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.982.965
	6.776.635.392
***Deposito on Call* (DOC) Non Investasi**	
Pihak Ketiga	
PT Bank Bukopin Tbk	486.000.000.000
Total Kas dan Setara Kas	**747.927.078.270**
Jangka Waktu *Deposito On Call*	≤ 3 bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	6,00% - 9,00%

5. Piutang Investasi

Akun ini merupakan saldo piutang investasi Program JHT per 1 Januari 2014 yang berasal dari transaksi penjualan saham yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya (T+3) dan akan selesai pada saat jatuh tempo (outstanding transaction) dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Piutang Penjualan Saham	39.030.647.075
Piutang Sewa Gedung	13.988.173.480
Total	**53.018.820.555**

6. Piutang Hasil Investasi

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima dan piutang pendapatan jatuh tempo atas bunga deposito sudah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal laporan belum diterima Program JHT Per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	
Bunga Obligasi	1.083.502.788.720
Bagi Hasil Sukuk	159.981.612.267
Bunga Deposito	123.018.186.180
Dividen Saham	9.158.748.301
Bunga KIK - EBA	290.277.778
Bunga Deposito Non Investasi	755.400.000
	1.376.707.013.246
Piutang Pendapatan Jatuh Tempo	
Pendapatan Deposito Jatuh Tempo	3.341.623.513
Total	**1.380.048.636.759**

7. Beban Dibayar di Muka

Akun ini merupakan beban dibayar di muka atas asuransi gedung menara Jamsostek Program JHT per 1 Januari 2014 sebesar Rp 28.822.075.

8. Deposito

Akun ini merupakan penanaman dana Program JHT per 1 Januari 2014 dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.251.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.907.500.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.850.174.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.344.275.000.000
PT Bank Syariah Mandiri	743.500.000.000
	15.096.449.000.000
Pihak Ketiga	
PT Bank Pembangunan Daerah	14.505.700.000.000
PT Bank Muamalat	2.010.800.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	1.901.950.000.000
PT Bank International Indonesia Tbk	1.496.500.000.000
PT Bank BTPN	548.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	456.500.000.000
	20.919.450.000.000
Total	**36.015.899.000.000**
Jangka Waktu Deposito Berjangka	3 - 12 bulan
Tingkat Bunga Kontraktual Rata-rata	7,20%

9. Saham

Akun ini merupakan saldo penempatan dana Program JHT per 1 Januari 2014 dalam bentuk Saham yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014			
	Total Saham (Lembar)	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi				
Entitas Berelasi dengan Pemerintah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	320.524.106	2.500.088.026.800	--	2.500.088.026.800
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	303.023.500	2.181.769.200.000	--	2.181.769.200.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	390.478.500	1.737.629.325.000	--	1.737.629.325.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	710.047.000	1.526.601.050.000	--	1.526.601.050.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	86.263.000	1.216.308.300.000	--	1.216.308.300.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	305.035.168	1.197.263.034.400	--	1.197.263.034.400
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	148.751.000	695.410.925.000	--	695.410.925.000
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	53.376.000	541.766.400.000	--	541.766.400.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	210.522.500	229.469.525.000	--	229.469.525.000
PT Timah (Persero) Tbk	115.641.500	180.400.740.000	--	180.400.740.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	295.088.500	146.068.807.500	--	146.068.807.500
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	128.847.908	112.097.679.960	--	112.097.679.960
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	336.970.500	111.200.265.000	--	111.200.265.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	123.550.000	61.157.250.000	--	61.157.250.000
	3.528.119.182	12.437.230.528.660	--	12.437.230.528.660
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	411.834.000	2.800.471.200.000	--	2.800.471.200.000
PT United Tractors Tbk	70.668.500	1.342.701.500.000	--	1.342.701.500.000
PT Bank Central Asia Tbk	139.845.000	1.335.519.750.000	--	1.335.519.750.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	56.990.500	1.131.261.425.000	--	1.131.261.425.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	162.601.000	1.065.036.550.000	--	1.065.036.550.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	563.948.000	721.853.440.000	--	721.853.440.000
PT Adaro Energy Tbk	598.611.000	646.499.880.000	--	646.499.880.000
PT Kalbe Farma Tbk	473.582.500	587.242.300.000	--	587.242.300.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	13.074.500	372.623.250.000	--	372.623.250.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	153.975.500	294.093.205.000	--	294.093.205.000
PT Vale Indonesia Tbk	96.856.000	246.982.800.000	--	246.982.800.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	23.620.500	239.748.075.000	--	239.748.075.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	145.303.500	113.336.730.000	--	113.336.730.000
PT Bank Danamon Tbk	18.167.152	68.126.820.000	--	68.126.820.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	1.628.000	40.618.600.000	--	40.618.600.000
PT Unilever Indonesia Tbk	151.500	3.939.000.000	--	3.939.000.000
	2.930.857.152	11.010.054.525.000	--	11.010.054.525.000
Total	**6.458.976.334**	**23.447.285.053.660**	**--**	**23.447.285.053.660**

Sesuai Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Program JHT, pada saat penerapan awal Per 1 Januari 2014, aset investasi *dalam kelompok Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual dicatat pada nilai bawaannya (deemed cost). Nilai tercatat Saham per 31 Desember 2013 yang disajikan adalah sebagai berikut:*

a. Rincian Saham yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Laba Rugi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013			
	Total Saham (Lembar)	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai tercatat Rp
Pihak Berelasi				
Entitas Berelasi dengan Pemerintah				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	12.500.000	63.718.500.000	(8.093.500.000)	55.625.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.000.000	77.449.450.000	(7.249.450.000)	70.200.000.000
	21.500.000	141.167.950.000	(15.342.950.000)	125.825.000.000
Pihak Ketiga				
PT Adaro Energy Tbk	53.500.000	90.311.147.219	(32.531.147.219)	57.780.000.000
PT Astra International Tbk	30.721.500	238.526.772.613	(29.620.572.613)	208.906.200.000
	84.221.500	328.837.919.832	(62.151.719.832)	266.686.200.000
Total	**105.721.500**	**470.005.869.832**	**(77.494.669.832)**	**392.511.200.000**

b. Rincian Saham yang diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk Dijual adalah sebagai berikut :

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMBUKA (Lanjutan)
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Desember 2013		
	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.565.427.555.002	(135.539.528.202)	2.429.888.026.800
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.226.374.796.031	(44.605.596.031)	2.181.769.200.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1.982.103.300.899	(300.098.975.899)	1.682.004.325.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.526.648.958.855	(47.908.855)	1.526.601.050.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.308.048.816.632	(91.740.516.632)	1.216.308.300.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.219.695.352.027	(22.432.317.627)	1.197.263.034.400
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	773.192.041.000	(77.781.116.000)	695.410.925.000
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	829.302.067.865	(287.535.667.865)	541.766.400.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	501.791.809.872	(272.322.284.872)	229.469.525.000
PT Timah (Persero) Tbk	225.189.551.120	(44.788.811.120)	180.400.740.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	208.356.806.369	(62.287.998.869)	146.068.807.500
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	203.344.623.425	(91.246.943.465)	112.097.679.960
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	190.590.514.800	(79.390.249.800)	111.200.265.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	107.078.172.800	(45.920.922.800)	61.157.250.000
	13.867.144.366.697	(1.555.738.838.037)	12.311.405.528.660
Pihak Ketiga			
PT Astra International Tbk	2.512.505.858.509	79.059.141.491	2.591.565.000.000
PT United Tractors Tbk	1.480.491.759.828	(137.790.259.828)	1.342.701.500.000
PT Bank Central Asia Tbk	1.271.198.295.227	64.321.454.773	1.335.519.750.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	1.161.947.811.062	(30.686.386.062)	1.131.261.425.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1.017.076.640.783	47.959.909.217	1.065.036.550.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	818.898.931.404	(97.045.491.404)	721.853.440.000
PT Adaro Energy Tbk	1.032.784.064.642	(444.064.184.642)	588.719.880.000
PT Kalbe Farma Tbk	529.262.426.229	57.979.873.771	587.242.300.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	508.769.146.589	(136.145.896.589)	372.623.250.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	368.394.567.627	(74.301.362.627)	294.093.205.000
PT Vale Indonesia Tbk	471.359.196.930	(224.376.396.930)	246.982.800.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	193.424.539.806	46.323.535.194	239.748.075.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	176.350.628.800	(63.013.898.800)	113.336.730.000
PT Bank Danamon Tbk	98.501.936.130	(30.375.116.130)	68.126.820.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	28.069.166.935	12.549.433.065	40.618.600.000
PT Unilever Indonesia Tbk	2.775.932.255	1.163.067.745	3.939.000.000
	11.671.810.902.756	(928.442.577.756)	10.743.368.325.000
Total	**25.538.955.269.453**	**(2.484.181.415.793)**	**23.054.773.853.660**

10. Reksadana

Akun ini merupakan saldo penempatan dana Program JHT per 1 Januari 2014 dalam bentuk Reksadana yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014			
	Total Saham (Lembar)	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Panin Dana Maksima	22.691.850	1.322.559.089.241	--	1.322.559.089.241
BNP Paribas Ekuitas	79.313.054	1.144.410.438.375	--	1.144.410.438.375
BNP Paribas Solaris	373.214.263	683.571.779.298	--	683.571.779.298
Panin Dana Prima	190.417.270	541.138.956.809	--	541.138.956.809
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	459.993.990	518.882.420.488	--	518.882.420.488
Schroder Dana Mantap Plus II	290.663.721	511.437.350.114	--	511.437.350.114
Schroder Dana Prestasi Plus	22.402.729	479.931.209.503	--	479.931.209.503
First State Indoequity Sectoral	104.605.277	469.584.592.998	--	469.584.592.998
Syailendra Equity Opportunity	156.674.554	464.428.812.417	--	464.428.812.417
Danareksa Mawar Konsumer 10	349.065.068	454.179.625.661	--	454.179.625.661
Insight Scholarship Fund	450.000.000	451.548.000.000	--	451.548.000.000
BNP Paribas Prima II	214.522.264	352.846.219.526	--	352.846.219.526
Dana Ekuitas Prima	82.175.551	296.307.779.879	--	296.307.779.879
Manulife Syariah Sektoral Amanah	92.059.364	289.091.259.206	--	289.091.259.206
Mandiri Investa Equity Movement	274.141.694	243.289.787.832	--	243.289.787.832
Dana Ekuitas Andalan	67.715.569	233.988.915.697	--	233.988.915.697
Manulife Saham Andalan	127.499.668	199.433.705.445	--	199.433.705.445
Schroder Dana Prestasi	7.459.669	190.930.973.291	--	190.930.973.291
BNP Paribas Infrastruktur Plus	79.692.836	190.888.251.158	--	190.888.251.158
Schroder Dana Istimewa	33.706.127	180.015.660.448	--	180.015.660.448
Syailendra Balance Opportunity	92.976.475	178.048.089.480	--	178.048.089.480
BNP Paribas Pesona	7.850.741	157.904.781.014	--	157.904.781.014
Panin Dana Bersama Plus	128.874.679	146.601.794.470	--	146.601.794.470
Makara Prima	77.232.148	133.658.897.253	--	133.658.897.253
Mandiri Investa Atraktif	36.963.573	127.749.066.699	--	127.749.066.699
Manulife Dana Tumbuh Berimbang	65.276.893	106.473.140.879	--	106.473.140.879
Danareksa Mawar Fokus 10	76.502.773	97.925.522.676	--	97.925.522.676
Sam Indonesian Equity Fund	55.689.645	92.047.743.124	--	92.047.743.124
Trim Kapital	12.662.010	90.335.024.088	--	90.335.024.088
Bahana Dana Infrastruktur	9.800.865	69.558.505.905	--	69.558.505.905
Trim Syariah Saham	51.360.448	67.972.984.638	--	67.972.984.638
Manulife Institutional Equity Fund	66.842.192	65.187.179.798	--	65.187.179.798
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis	47.383.138	46.385.723.195	--	46.385.723.195
Mandiri Investa UGM	320.310	616.389.297	--	616.389.297
Danareksa Indeks Syariah	84.297	210.496.678	--	210.496.678
First State Multistrategy Fund	34.412	108.725.366	--	108.725.366
BNP Paribas Spektra	82.812	98.966.678	--	98.966.678
Total	**4.207.951.930**	**10.599.347.858.624**	**--**	**10.599.347.858.624**

Sesuai Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Program JHT, pada saat penerapan awal Per 1 Januari 2014, aset investasi dalam kelompok Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual dicatat dicatat pada nilai bawaannya (deemed cost). Nilai tercatat Reksadana per 31 Desember 2013 yang disajikan adalah sebagai berikut:

a. Rincian Reksadana yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Laba Rugi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013			
	Total Unit	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai tercatat Rp
Panin Dana Maksima	418.028	25.000.000.000	635.903.835	24.364.096.165
Total	**418.028**	**25.000.000.000**	**635.903.835**	**24.364.096.165**

b. Rincian Reksadana yang diklasifikasikan sebagai Tersedia Untuk Dijual adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013		
	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Panin Dana Maksima	1.489.920.717.074	(191.725.723.998)	1.298.194.993.076
BNP Paribas Ekuitas	1.262.927.726.130	(118.517.287.755)	1.144.410.438.375
BNP Paribas Solaris	791.498.438.747	(107.926.659.449)	683.571.779.298
Panin Dana Prima	584.238.470.061	(43.099.513.252)	541.138.956.809
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	618.123.963.109	(99.241.542.621)	518.882.420.488
Schroder Dana Mantap Plus II	570.000.000.000	(58.562.649.886)	511.437.350.114
Schroder Dana Prestasi Plus	527.636.761.746	(47.705.552.243)	479.931.209.503
First State Indoequity Sectoral	503.815.256.360	(34.230.663.362)	469.584.592.998
Syailendra Equity Opportunity	550.000.000.000	(85.571.187.583)	464.428.812.417
Danareksa Mawar Konsumer 10	516.035.006.181	(61.855.380.520)	454.179.625.661
Insight Scholarship Fund	450.000.000.000	1.548.000.000	451.548.000.000
BNP Paribas Prima II	408.524.101.522	(55.677.881.996)	352.846.219.526
Dana Ekuitas Prima	334.308.634.756	(38.000.854.877)	296.307.779.879
Manulife Syariah Sektoral Amanah	301.038.082.120	(11.946.822.914)	289.091.259.206
Mandiri Investa Equity Movement	325.000.000.000	(81.710.212.168)	243.289.787.832
Dana Ekuitas Andalan	281.651.540.436	(47.662.624.739)	233.988.915.697
Manulife Saham Andalan	241.532.210.189	(42.098.504.744)	199.433.705.445
Schroder Dana Prestasi	200.103.859.505	(9.172.886.214)	190.930.973.291
BNP Paribas Infrastruktur Plus	198.223.047.431	(7.334.796.273)	190.888.251.158
Schroder Dana Istimewa	177.734.619.877	2.281.040.571	180.015.660.448
Syailendra Balance Opportunity	200.000.000.000	(21.951.910.520)	178.048.089.480
BNP Paribas Pesona	201.320.264.544	(43.415.483.530)	157.904.781.014
Panin Dana Bersama Plus	150.000.000.000	(3.398.205.530)	146.601.794.470
Makara Prima	141.540.565.787	(7.881.668.534)	133.658.897.253
Mandiri Investa Atraktif	148.659.049.571	(20.909.982.872)	127.749.066.699
Manulife Dana Tumbuh Berimbang	114.835.129.297	(8.361.988.418)	106.473.140.879
Danareksa Mawar Fokus 10	115.085.754.430	(17.160.231.754)	97.925.522.676
Sam Indonesian Equity Fund	100.000.000.000	(7.952.256.876)	92.047.743.124
Trim Kapital	98.603.495.293	(8.268.471.205)	90.335.024.088
Bahana Dana Infrastruktur	75.054.595.060	(5.496.089.155)	69.558.505.905
Trim Syariah Saham	75.011.653.600	(7.038.668.962)	67.972.984.638
Manulife Institutional Equity Fund	80.000.000.000	(14.812.820.202)	65.187.179.798
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis	50.000.000.000	(3.614.276.805)	46.385.723.195
Mandiri Investa UGM	687.338.459	(70.949.162)	616.389.297
Danareksa Indeks Syariah	206.403.763	4.092.915	210.496.678
First State Multistrategy Fund	100.851.245	7.874.121	108.725.366
BNP Paribas Spektra	96.979.837	1.986.841	98.966.678
Total	**11.883.514.516.130**	**(1.308.530.753.671)**	**10.574.983.762.459**

11. Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragunan Aset

Akun ini merupakan penempatan dana Program JHT dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragunan Aset (KIK-EBA) per 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014		
	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Efek Beragunan Aset Danareksa BTN 03-KPR Kelas A 2012	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Total	**100.000.000.000**	**--**	**100.000.000.000**

12. Sukuk

Akun ini merupakan penempatan dana Program JHT per 1 Januari 2014 dalam bentuk Sukuk yang dikelompokan dalam diukur pada Nilai Wajar dan Yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Nilai Wajar	33.356.906.842
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	5.559.554.771.284
Total	**5.592.911.678.126**

a. Rincian Sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada Nilai Wajar adalah sebagai Berikut:

	1 Januari 2014		
	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Ketiga			
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker 2007	33.356.906.842	33.356.906.842	33.356.906.842
Total	**33.356.906.842**	**33.356.906.842**	**33.356.906.842**

Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker tahun 2007 dalam kelompok Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi dengan nominal Rp 40.000.000.000 dinyatakan telah memenuhi syarat penurunan nilai (permanent decline) karena kupon yang harus diterima tanggal 5 April 2012 tidak dibayarkan, dengan menggunakan metode Discounted Cash Flows (DCF), ditetapkan nilai wajar obligasi yang baru yaitu sebesar 83,39% atau Rp 33.356.906.842. Atas penyesuaian ini diakui kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2012 sebesar Rp 6.643.093.158.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 27/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tangal 22 Maret 2013, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) dan perjanjian perdamaian tanggal 13 Maret 2013 yang disahkan dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut. Atas putusan pengadilan tersebut BLTA melaksanakan restrukturisasi kewajiban pembayaran Liabilitas Perseroan dan anak-anak perusahaannya secara bersama-sama.

Dalam perjanjian perdamaian diputuskan:
- Jangka waktu pembayaran Sukuk Ijarah maksimum 10 tahun dimana semua jumlah pembayaran harus dibayarkan seluruhnya pada tanggal 31 Maret 2023;
- Pelunasan yang dipercepat berasal dari *cash sweep mechanism*;
- Tingkat Cicilan Imbalan Ijarah tertunggak sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2013 sebesar 5% per tahun;
- Seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah yang tertunggak dan yang belum dibayarkan sebelum 1 Juli 2012 dihapuskan;
- Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah tertunggak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2015 akan dikapitalisasi ke sisa Imbalan Ijarah; dan
- Khusus Tingkat cicilan imbalan Ijarah sebesar 5% tahun 1-3, sebesar 7% tahun 4-7, sebesar 9% tahun 8-10, pembayaran secara tunai triwulanan (dibayar di belakang periode) dimulai sejak 30 Juni 2015.

b. Rincian Sukuk yang diukur pada Yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo terdiri dari:

	1 Januari 2014		
	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi			
Sukuk Pemerintah			
PBS-04	2.707.396.000.000	(201.609.303.641)	2.505.786.696.359
SBSN IFR0010	784.997.000.000	77.209.312.663	862.206.312.663
Surat Berharga Syariah Negara I	700.000.000.000	--	700.000.000.000
PBS-005	600.000.000.000	(76.014.621.438)	523.985.378.562
Surat Berharga Syariah Negara-2	300.000.000.000	--	300.000.000.000
SBSN IFR0006	250.000.000.000	576.383.700	250.576.383.700
	5.342.393.000.000	**(199.838.228.716)**	**5.142.554.771.284**
Sukuk Korporasi			
PLN Sukuk Ijarah II TAHUN 2007	94.000.000.000	--	94.000.000.000
PLN Sukuk VB /2010	73.000.000.000	--	73.000.000.000
Syariah Ijarah PLN III 2009 Seri A	57.000.000.000	--	57.000.000.000
Sukuk Syariah Ijarah PLN I / 2006	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Adhi Sukuk Mudharabah I Tahap I 2012	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap II Tahun 2013	10.000.000.000	--	10.000.000.000
	314.000.000.000	**--**	**314.000.000.000**
Pihak Ketiga			
Sukuk Korporasi			
Sukuk Ijarah Indosat II/2007	88.000.000.000	--	88.000.000.000
Indosat Ijarah V tahun 2012	15.000.000.000	--	15.000.000.000
	103.000.000.000	**--**	**103.000.000.000**
Total	**5.759.393.000.000**	**(199.838.228.716)**	**5.559.554.771.284**

13. Obligasi

Akun ini merupakan penempatan dana Program JHT per 1 Januari 2014 dalam bentuk obligasi yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar dan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014
	Rp
Nilai Wajar	3.507.294.084.750
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	51.629.581.136.806
Total	**55.136.875.221.556**

a. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan ke dalam Nilai Wajar adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014				
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Pemerintah					
Pihak Berelasi					
FR0065	idAAA	1.343.589.000.000	1.370.460.780.000	--	1.370.460.780.000
FR058	idAAA	440.000.000.000	424.600.000.000	--	424.600.000.000
Recap Bonds FR 0056	idAAA	58.000.000.000	56.077.358.000	--	56.077.358.000
		1.841.589.000.000	1.851.138.138.000	--	1.851.138.138.000
Obligasi Korporasi					
Pihak Berelasi					
Sarana Multigriya Finansial I seri C 2011	idAA	262.458.768.000	262.458.768.000	--	262.458.768.000
Antam Berkelanjutan I seri A 2011	idAA-	167.933.700.000	167.933.700.000	--	167.933.700.000
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	idAA	29.906.850.000	29.906.850.000	--	29.906.850.000
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	30.000.000.000	28.094.100.000	--	28.094.100.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	5.078.540.000	5.078.540.000	--	5.078.540.000
		495.377.858.000	493.471.958.000	--	493.471.958.000
Pihak Ketiga					
Bank CIMB Niaga I seri B 2011	idAAA	196.302.082.500	196.302.082.500	--	196.302.082.500
Federal Intern Finance I Tahap I 2012 seri C	idAA+	191.085.400.000	191.085.400.000	--	191.085.400.000
Toyota Astra Financial Service II 2012	idAA	180.080.110.000	180.080.110.000	--	180.080.110.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 seri B	idAAA	149.124.580.000	149.124.580.000	--	149.124.580.000
Obligasi II Agung Podomoro Land 2012	idA	96.174.927.000	96.174.927.000	--	96.174.927.000
Obligasi Medco Energy Int III 2012	idAA-	95.269.500.000	95.269.500.000	--	95.269.500.000
Berlian Laju Tanker III Tahun 2007		57.000.000.000	57.000.000.000	--	57.000.000.000
BTPN Berkelanjutan I Tahap I/2011	idAA-	49.930.250.000	49.930.250.000	--	49.930.250.000
Indonesia Exim Bank I seri C (7 tahun) 2011	idAAA	35.914.712.000	35.914.712.000	--	35.914.712.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	35.474.440.000	35.474.440.000	--	35.474.440.000
Federal International Finance XI/2011 seri C	idAA+	25.116.250.000	25.116.250.000	--	25.116.250.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri C/2011	idAA+	20.107.160.000	20.107.160.000	--	20.107.160.000
BCA Finance Tahap I/2012 seri D	idAA+	15.000.000.000	14.480.115.000	--	14.480.115.000
Astra Sedaya Finance XI F/2010	idAA+	10.062.850.000	10.062.850.000	--	10.062.850.000
BCA Finance IV seri D thn.2011	idAAA	10.029.110.000	10.029.110.000	--	10.029.110.000
BCA Finance IV seri E thn.2011	idAAA	4.994.775.000	4.994.775.000	--	4.994.775.000
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	1.004.135.000	1.004.135.000	--	1.004.135.000
		1.172.670.281.500	1.172.150.396.500	--	1.172.150.396.500
Cadangan Penyisihan					
Berlian Laju Tanker III Tahun 2007		(9.466.407.750)	(9.466.407.750)	--	(9.466.407.750)
		(9.466.407.750)	**(9.466.407.750)**	--	(9.466.407.750)
Total		**3.500.170.731.750**	**3.507.294.084.750**	--	**3.507.294.084.750**

b. Rincian Obligasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo adalah Sebagai Berikut:

	1 Januari 2014			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Obligasi Pemerintah				
Pihak Berelasi				
FR0065	idAAA	3.024.032.000.000	73.281.251.738	3.097.313.251.738
Recap Bonds FR 0044	idAAA	2.968.110.000.000	(230.528.751.955)	2.737.581.248.045
Recap Bonds FR 0050	idAAA	2.459.981.000.000	(10.912.158.338)	2.449.068.841.662
FR058	idAAA	1.935.280.000.000	332.672.286.172	2.267.952.286.172
Recap Bonds FR 0054	idAAA	1.984.541.000.000	177.704.133.816	2.162.245.133.816
Recap Bonds FR 0031	idAAA	1.927.000.000.000	4.318.705.964	1.931.318.705.964
Recap Bonds FR 0040	idAAA	1.608.261.000.000	50.194.542.816	1.658.455.542.816
Recap Bonds FR 0046	idAAA	1.629.026.000.000	(100.298.129.549)	1.528.727.870.451
Recap Bonds FR 0034	idAAA	1.507.500.000.000	10.645.893.037	1.518.145.893.037
Recap Bonds FR 0042	idAAA	1.382.677.000.000	(30.894.173.949)	1.351.782.826.051
Recap Bonds FR 0057	idAAA	1.028.354.000.000	131.153.421.257	1.159.507.421.257
Recap Bonds FR 0052	idAAA	831.000.000.000	294.620.935.615	1.125.620.935.615
Recap Bonds FR 0043	idAAA	1.112.000.000.000	(791.800.704)	1.111.208.199.296
Recap Bonds FR 0027	idAAA	1.065.000.000.000	(34.421.573.121)	1.030.578.426.879
Recap Bonds FR 0026	idAAA	980.000.000.000	(2.559.444.642)	977.440.555.358
Recap Bonds FR 0045	idAAA	860.839.000.000	100.538.167.132	961.377.167.132
Recap Bonds FR 0035	idAAA	848.172.000.000	(10.809.457.884)	837.362.542.116
Recap Bonds FR 0039	idAAA	730.990.000.000	7.656.097.574	738.646.097.574
Recap Bonds FR 0036	idAAA	604.000.000.000	(36.728.941.598)	567.271.058.402
Recap Bonds FR 0038	idAAA	325.209.000.000	8.967.838.657	334.176.838.657
Recap Bonds FR 0030	idAAA	280.000.000.000	248.228.776	280.248.228.776
Recap Bonds FR 0048	idAAA	201.696.000.000	(27.110.585.193)	174.585.414.807
Recap Bonds FR 0028	idAAA	162.000.000.000	(10.225.440.324)	151.774.559.676
Recap Bonds FR 0037	idAAA	113.000.000.000	2.795.054.858	115.795.054.858
Recap Bonds FR 0032	idAAA	75.000.000.000	(3.373.298.754)	71.626.701.246
FR0062	idAAA	43.124.000.000	(1.742.152.797)	41.381.847.203
Recap Bonds FR 0056	idAAA	20.000.000.000	(832.978.656)	19.167.021.344
		29.706.792.000.000	693.567.669.948	30.400.359.669.948

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMBUKA (Lanjutan)
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	1 Januari 2014			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Obligasi Korporasi				
Pihak Berelasi				
Indonesia Exim Bank I seri C (7 tahun) 2011	idAAA	1.252.000.000.000	98.930.541	1.252.098.930.541
Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I/2009	idAA+	1.050.000.000.000	--	1.050.000.000.000
PT TELKOM II seri 2B	idAAA	1.016.000.000.000	11.321.535.457	1.027.321.535.457
PLN XIIB/2010	idAAA	839.000.000.000	10.948.199.145	849.948.199.145
Bank Ekspor Indonesia IV/2009 Seri D	idAAA	800.000.000.000	--	800.000.000.000
Indonesia Exim I seri D/2010	idAAA	703.000.000.000	--	703.000.000.000
Bank BTN Tahap I Th.2012	idAA	619.000.000.000	832.144.730	619.832.144.730
BTN XIV	idAA	497.000.000.000	3.475.042.685	500.475.042.685
PLN XI Tahun 2010 Seri B	idAAA	469.000.000.000	2.362.417.869	471.362.417.869
Sarana Multigriya Financial I Tahap II seri C 2(	AA(idn)	470.000.000.000	--	470.000.000.000
PLN IX Seri A Tahun 2007	idAAA	410.000.000.000	195.998.030	410.195.998.030
PLN IX Seri B Tahun 2007	idAAA	406.000.000.000	809.709.703	406.809.709.703
Obl. Berk. I Garuda Tahap I 2013	A(idn)	400.000.000.000	--	400.000.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idAA-	340.000.000.000	--	340.000.000.000
Pegadaian XIII/09 Seri B1	idAA+	305.000.000.000	--	305.000.000.000
SMF Berkel II Tahap II C 2013	idAA	280.000.000.000	--	280.000.000.000
BTN XIII/2009 Seri C	idAA	266.000.000.000	186.158.032	266.186.158.032
PLN VIII - A / 2006	idAAA	253.000.000.000	10.414.792.046	263.414.792.046
BTN XV Tahun 2011	idAA	255.000.000.000	411.015.640	255.411.015.640
Jasa Marga XIV JM-10/10 tahun	idAA	230.000.000.000	5.896.117.888	235.896.117.888
Jasa Marga XII Seri Q/2006	idAA	212.000.000.000	758.180.023	212.758.180.023
PLN XI Tahun 2010 Seri A	idAAA	202.000.000.000	--	202.000.000.000
Obl II PNM 2013	idA	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	186.000.000.000	2.022.531.416	188.022.531.416
Obl Berk. II Pegadaian Tahap I D 2013	idAA+	180.000.000.000	--	180.000.000.000
SMF Berkel II Tahap I B 2012	idAA	165.000.000.000	--	165.000.000.000
LPEI Berkl I Tahap III B 2013	idAAA	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obl I PTPN X 2013	idA+	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009	A+(idn)	144.000.000.000	2.029.598.993	146.029.598.993
Obl Berk. II Pegadaian Tahap I C 2013	idAA+	120.000.000.000	--	120.000.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri A 2012	idA	115.000.000.000	--	115.000.000.000
Pegadaian XIII/09 Seri C	idAA+	115.000.000.000	--	115.000.000.000
PLN VIII - B / 2006	idAAA	105.000.000.000	658.519.677	105.658.519.677
Pegadaian Berkelanjutan I tahap II seri D 2012	idAA+	105.000.000.000	157.072.025	105.157.072.025
SMF Berkel II Tahap I C 2012	idAA	105.000.000.000	--	105.000.000.000
Obl Berk. I PLN Tahap I B 2013	idAAA	95.000.000.000	--	95.000.000.000
SMF Berkel II Tahap II B 2013	idAA	95.000.000.000	--	95.000.000.000
Obl I Hutama Karya B 2013	idA-	90.000.000.000	--	90.000.000.000
Pegadaian Berkelanjutan I tahap II seri C 2012	idAA+	80.000.000.000	--	80.000.000.000
Pegadaian Seri C 2011 Berkelanjutan I	idAA+	78.000.000.000	1.282.474.387	79.282.474.387
PLN VII /04	idAAA	79.000.000.000	(302.456.503)	78.697.543.497
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	idAA	74.000.000.000	515.253.238	74.515.253.238
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	53.000.000.000	186.939.466	53.186.939.466
PLN X Tahun 2009 Seri A	idAAA	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Pupuk Kalimantan Timur II/2009	idAA+	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Sarana Multigriya Financial I Tahap II seri B 2(	AA(idn)	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun	idA	25.000.000.000	--	25.000.000.000
SMF Berkel II Tahap II D 2013	idAA	25.000.000.000	--	25.000.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	22.000.000.000	119.549.260	22.119.549.260
Sarana Multigriya Finansial I seri C 2011	AA(idn)	20.000.000.000	199.919.838	20.199.919.838
Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun	idA	15.000.000.000	--	15.000.000.000
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	10.000.000.000	146.615.920	10.146.615.920
Obl I Hutama Karya A 2013	idA-	10.000.000.000	--	10.000.000.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	8.000.000.000	114.991.325	8.114.991.325
		13.983.000.000.000	54.841.250.831	14.037.841.250.831

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMBUKA (Lanjutan)
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	1 Januari 2014			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga				
Bank Jabar VII/2011 seri C	idAA-	600.000.000.000	--	600.000.000.000
Astra Sedaya Finance I seri B 2012	idAA+	526.000.000.000	1.145.255.776	527.145.255.776
Federal International Finance XI/2011 seri C	idAA+	522.100.000.000	265.994.871	522.365.994.871
Astra Sedaya Finance I seri C 2012	idAA+	426.000.000.000	3.362.583.002	429.362.583.002
Indofood Sukses Makmur VI 2012	idAA+	400.000.000.000	173.745.521	400.173.745.521
CIMB Niaga Berkelanjutan I 2012 Seri B	idAAA	400.000.000.000	--	400.000.000.000
OCBC NISP Berkl I Tahap IC 2013	idAAA	280.000.000.000	--	280.000.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Seri B	idAA+	274.000.000.000	677.265.597	274.677.265.597
Adira Berkelanjutan I seri C 2011	idAA+	250.000.000.000	--	250.000.000.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 seri B	idAAA	249.000.000.000	143.161.919	249.143.161.919
Obligasi Indosat V/2007 Seri A	idAA+	241.000.000.000	57.769.583	241.057.769.583
Bank Sumut III tahun 2011	idA+	240.000.000.000	--	240.000.000.000
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAA+	210.000.000.000	--	210.000.000.000
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV/2010	idAA+	207.000.000.000	--	207.000.000.000
Bank Jabar VII/2011 seri B	idAA-	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Astra Sedaya XII seri D	idAA+	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri C/2011	idAA+	160.000.000.000	45.864.669	160.045.864.669
Obligasi VI Bank Jabar Banten 2009 Seri B	idAA-	150.000.000.000	--	150.000.000.000
BSD Berkelanjutan I tahap II 2013	idAA-	150.000.000.000	--	150.000.000.000
FIF X/2010 Seri D	idAA+	130.000.000.000	169.433.214	130.169.433.214
Federal Intern Finance I Tahap I 2012 seri C	idAA+	128.000.000.000	175.207.492	128.175.207.492
BCA Finance Tahap I/2012 seri D	AAA(idn)	125.000.000.000	52.446.460	125.052.446.460
Obl Berk. I Agung Pod Land I 2013	idA	120.000.000.000	--	120.000.000.000
Indosat VI Seri B 2008	idAA+	115.000.000.000	--	115.000.000.000
Bank CIMB Niaga I seri B 2011	idAAA	95.900.000.000	2.091.570.604	97.991.570.604
BCA Finance IV seri D thn.2011	AAA(idn)	92.000.000.000	110.287.111	92.110.287.111
Indofood V Tahun 2009	idAA+	90.000.000.000	--	90.000.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	idAAA	80.000.000.000	693.419.482	80.693.419.482
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAA+	80.000.000.000	--	80.000.000.000
BCA Finance IV seri E thn.2011	AAA(idn)	67.000.000.000	120.520.816	67.120.520.816
Astra Sedaya Finance XI F/2010	idAA+	65.000.000.000	--	65.000.000.000
BCA Finance Tahap I/2012 seri C	AAA(idn)	55.000.000.000	40.771.290	55.040.771.290
BSD Berkelanjutan I tahap I seri A 2012	idAA-	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Obl Berk. I BCA Fin Thp IIC 2013	idAA+	43.000.000.000	--	43.000.000.000
Danareksa VB 2010	idA	36.000.000.000	--	36.000.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	33.000.000.000	369.965.319	33.369.965.319
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	32.000.000.000	190.877.916	32.190.877.916
Obl Berk. I BCA Fin Thp IIB 2013	idAA+	22.000.000.000	--	22.000.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAA+	20.000.000.000	296.016.121	20.296.016.121
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	12.000.000.000	151.330.860	12.151.330.860
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	5.000.000.000	46.728.404	5.046.728.404
		7.181.000.000.000	10.380.216.027	7.191.380.216.027
Total		**50.870.792.000.000**	**758.789.136.806**	**51.629.581.136.806**

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk diatas telah memadai.

Sesuai Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Program JHT, pada saat penerapan awal Per 1 Januari 2014, aset investasi dalam kelompok Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual dicatat dicatat pada nilai bawaannya (*deemed cost*). Nilai tercatat obligasi posisi per 31 Desember 2013 yang disajikan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013 Rp
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	1.837.634.995.000
Tersedia Untuk Dijual	1.669.659.089.750
Total	**3.507.294.084.750**

a. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Laba Rugi adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2013			
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Pemerintah					
Pihak Berelasi					
FR0065	idAAA	1.343.589.000.000	1.371.076.497.494	(615.717.494)	1.370.460.780.000
FR058	idAAA	440.000.000.000	513.928.484.799	(89.328.484.799)	424.600.000.000
		1.783.589.000.000	1.885.004.982.293	(89.944.202.293)	1.795.060.780.000
Obligasi Korporasi					
Pihak Berelasi					
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	30.000.000.000	30.000.000.000	(1.905.900.000)	28.094.100.000
Pihak Ketiga					
BCA Finance Tahap I/2012 seri D	idAA+	15.000.000.000	15.000.000.000	(519.885.000)	14.480.115.000
		45.000.000.000	45.000.000.000	(2.425.785.000)	42.574.215.000
Total		**1.828.589.000.000**	**1.930.004.982.293**	**(92.369.987.293)**	**1.837.634.995.000**

b. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk Dijual adalah sebagai berikut:

		31 Desember 203			
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Pemerintah					
Pihak Berelasi					
Recap Bonds FR 0056	idAAA	58.000.000.000	9.332.197.537	(11.254.839.537)	56.077.358.000
		58.000.000.000	9.332.197.537	(11.254.839.537)	56.077.358.000
Obligasi Korporasi					
Pihak Berelasi					
Sarana Multigriya Finansial I seri C 2011	idAA	264.000.000.000	90.027.416	(1.631.259.416)	262.458.768.000
Antam Berkelanjutan I seri A 2011	idAA-	180.000.000.000	--	(12.066.300.000)	167.933.700.000
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	idAA	30.000.000.000	2.777.435.356	(2.870.585.356)	29.906.850.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	5.000.000.000	56.911.463	21.628.537	5.078.540.000
		479.000.000.000	2.924.374.235	(16.546.516.235)	465.377.858.000
Pihak Ketiga					
Bank CIMB Niaga I seri B 2011	idAAA	202.500.000.000	1.535.846.977	(7.733.764.477)	196.302.082.500
Federal Intern Finance I Tahap I 2012 seri C	idAA+	200.000.000.000	--	(8.914.600.000)	191.085.400.000
Toyota Astra Financial Service II 2012	idAA	185.000.000.000	--	(4.919.890.000)	180.080.110.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 seri B	idAAA	151.000.000.000	5.374.272.800	(7.249.692.800)	149.124.580.000
Obligasi II Agung Podomoro Land 2012	idA	101.000.000.000	--	(4.825.073.000)	96.174.927.000
Obligasi Medco Energy Int III 2012	idAA-	100.000.000.000	--	(4.730.500.000)	95.269.500.000
Berlian Laju Tanker III Tahun 2007		57.000.000.000	--	--	57.000.000.000
BTPN Berkelanjutan I Tahap I/2011	idAA-	50.000.000.000	--	(69.750.000)	49.930.250.000
Indonesia Exim Bank I seri C (7 tahun) 2011	idAAA	38.000.000.000	2.104.486.082	(4.189.774.082)	35.914.712.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	35.500.000.000	344.544.902	(370.104.902)	35.474.440.000
Federal International Finance XI/2011 seri C	idAA+	25.000.000.000	77.584.089	38.665.911	25.116.250.000
Adira Dinamika Multi Finance V seri C/2011	idAA+	20.000.000.000	42.536.503	64.623.497	20.107.160.000
Astra Sedaya Finance XI F/2010	idAA+	10.000.000.000	88.386.539	(25.536.539)	10.062.850.000
BCA Finance IV seri D thn.2011	idAAA	10.000.000.000	19.435.089	9.674.911	10.029.110.000
BCA Finance IV seri E thn.2011	idAAA	5.000.000.000	26.929.959	(32.154.959)	4.994.775.000
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	1.000.000.000	11.974.381	(7.839.381)	1.004.135.000
		1.191.000.000.000	9.625.997.321	(42.955.715.821)	1.157.670.281.500
Cadangan Penyisihan					
Berlian Laju Tanker III Tahun 2007		(9.466.407.750)	--	--	(9.466.407.750)
		(9.466.407.750)	--	--	(9.466.407.750)
Total		**1.718.533.592.250**	**21.882.569.093**	**(70.757.071.593)**	**1.669.659.089.750**

Obligasi BLTA

Obligasi Berlian Laju Tanker III tahun 2007 dalam kelompok Nilai Wajar dengan nominal Rp 57.000.000.000 dinyatakan telah memenuhi syarat penurunan nilai *(permanent decline)* karena kupon yang harus diterima tanggal 5 April 2012 tidak dibayarkan, Dengan menggunakan metode *Discounted Cash Flows* (DCF), ditetapkan nilai wajar obligasi yang baru yaitu sebesar 83,39% atau Rp 47.533.592.250. Atas penyesuaian ini diakui kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2012 sebesar Rp 9.466.407.750.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 27/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tangal 22 Maret 2013, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) dan perjanjian perdamaian tanggal 13 Maret 2013 yang disahkan dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut. Atas putusan pengadilan tersebut BLTA melaksanakan restrukturisasi kewajiban pembayaran Liabilitas BLTA dan entitas anak secara bersama-sama.

Dalam perjanjian perdamaian diputuskan:

- Jangka waktu pembayaran Obligasi maksimum 10 tahun mulai 30 September 2013 hingga 31 Maret 2023;
- Pelunasan yang dipercepat berasal dari *cash sweep mechanism*;
- Tingkat suku bunga obligasi tertunggak sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2013 sebear 5% per tahun;
- Seluruh jumlah bunga obligasi yang tertunggak dan yang belum dibayarkan sebelum 1 Juli 2012 dihapuskan;
- Pembayaran bunga obligasi tertunggak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2015 akan dikapitalisasi ke pokok obligasi;
- Khusus apabila Emiten tidak mampu melakukan pembayaran Bunga Obligasi sesuai jadwal pada periode 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2017 maka akan dikapitalisasi ke pokok obligasi; dan
- Tingkat suku bunga Obligasi sebesar 5% tahun 1-3, sebesar 7% tahun 4-7, sebesar 9% tahun 8-10, pembayaran secara tunai triwulanan (dibayar di belakang periode) dimulai sejak 30 Juni 2015.

14. Properti Investasi

Akun ini merupakan penempatan dana investasi program JHT per 1 Januari 2014 dalam bentuk properti investasi sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/461/122013 tentang Pedoman Akuntansi Program JHT, pencatatan properti investasi program JHT mengacu pada PSAK 18 (Revisi 2010) “Entitas Purna Karya”, yaitu menggunakan model nilai wajar untuk pengukuran setelah pengakuan awal. Laba atau rugi antara biaya historis dan nilai wajar diakui di dalam laporan perubahan aset neto.

Nilai wajar properti investasi per 1 Januari 2014 ditentukan berdasarkan hasil laporan Penilai Independen sebagai berikut:

a. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Muhammad Taufik Nomor : 122-01/PNL/MT/VIII/13 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Laporan Penilaian Properti untuk Menara Jamsostek. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode arus kas yang didiskonto dan pendekatan kalkulasi biaya.
b. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan Nomor : 0251-F/PNL/MBPRU-JKT/VII/13 tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Aset yang berlokasi Jalan Raya Cariu, Desa Sirna Sari, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan nilai pasar dan nilai jual paksa.
c. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Firman Azis dan Rekan Nomor : 54/KJPP_FA&R.BDG/ATB /UM/2/ 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penilaian Aset yang berlokasi Jalan Desa Majasari RT 08/RW02, Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya.

	31 Desember 2013	1 Januari 2014	
	Saldo Akhir Rp	Penyesuaian Rp	Saldo Awal Rp
Harga Perolehan:			
Tanah	80.409.417.112	402.083.482.888	482.492.900.000
Bangunan	426.389.821.208	91.154.195.861	517.544.017.069
Peralatan Lain Properti	1.793.643.192	181.506.397	1.975.149.589
Peralatan Properti	11.357.231.896	2.030.280.479	13.387.512.375
Aset Fasilitas Properti	15.575.385.396	992.093.973	16.567.479.369
	535.525.498.804	496.441.559.599	1.031.967.058.403
Aset Dalam Konstruksi			
Bangunan	3.236.149.594	--	3.236.149.594
Total	538.761.648.398	496.441.559.599	1.035.203.207.997
Akumulasi Penyusutan			
Bangunan	235.106.179.291	(235.106.179.291)	--
Peralatan Lain Properti	1.412.758.863	(1.412.758.863)	--
Peralatan Properti	7.096.764.888	(7.096.764.888)	--
Aset Fasilitas Properti	13.493.513.612	(13.493.513.612)	--
	257.109.216.654	(257.109.216.654)	--
Nilai Buku	**281.652.431.744**	**753.550.776.253**	**1.035.203.207.997**

Selisih antara nilai buku per 31 Desember 2013 dengan nilai wajar sebagaimana diatas sebesar Rp 753.550.776.253 langsung diakui sebagai penambah aset neto per 1 Januari 2014.

Lokasi dari properti investasi atas tanah dan bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Jenis Properti Investasi	Lokasi	Nilai Wajar Rp
Tanah	Desa Sirnasari Kecamatan Cariu Bogor Jl. Raya Cariu, Desa Sirna Sari, Kec Cariu, Kab Bogor, Jawa Barat	47.393.000.000
Tanah dan Bangunan	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Kel Kuningan Barat, Kec Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	985.312.000.000
Tanah dan Bangunan	Jl. Desa Majasari RT 08/RW02, Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa	2.498.208.000

Pada 1 Januari 2014, properti investasi telah diasuransikan terhadap semua risiko kepada PT Jasindo dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 808.090.800.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungkan.

15. Utang Jaminan Hari Tua Siap Bayar

Akun ini merupakan saldo utang JHT siap bayar dan utang JHT kurang bayar yang belum diambil oleh peserta per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Liabilitas JHT Siap Bayar	1.862.173.192
Liabilitas JHT Kurang Bayar	35.807.989.482
Total	**37.670.162.674**

a. Liabilitas JHT Siap Bayar

	1 Januari 2014 Rp
Kantor Wilayah I	64.847.232
Kantor Wilayah II	25.694.403
Kantor Wilayah III	1.198.843.587
Kantor Wilayah IV	221.648.452
Kantor Wilayah V	25.791.677
Kantor Wilayah VI	35.256.785
Kantor Wilayah VII	74.168.995
Kantor Wilayah VIII	4.394.034
Kantor Wilayah IX	186.349.111
Kantor Wilayah X	13.612.547
Kantor Wilayah XI	11.566.369
Total	**1.862.173.192**

b. Liabilitas JHT Kurang Bayar

	1 Januari 2014 Rp
Kantor Wilayah I	3.973.532.139
Kantor Wilayah II	1.367.760.260
Kantor Wilayah III	12.383.597.520
Kantor Wilayah IV	8.577.036.798
Kantor Wilayah V	209.270.607
Kantor Wilayah VI	892.660.810
Kantor Wilayah VII	919.917.067
Kantor Wilayah VIII	293.486.162
Kantor Wilayah IX	2.320.829.139
Kantor Wilayah X	4.743.931.477
Kantor Wilayah XI	125.967.503
Total	**35.807.989.482**

16. Utang kepada Pihak Ketiga

Akun ini merupakan saldo jaminan pihak ketiga atas jaminan sewa per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Jaminan Sewa Bangunan	24.068.560.825
Jaminan Sewa Telepon	4.039.625.804
Jaminan Sewa Lain-lain	175.576.500
Total	**28.283.763.129**

17. Utang Pajak

	1 Januari 2014 Rp
Pajak Penghasilan PPh 21	7.765.491.061
Pajak Pertambahan Nilai	262.116.322
Total	**8.027.607.383**

18. Pendapatan Diterima di Muka

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang diterima dimuka program JHT atas sewa bangunan investasi per 1 Januari 2014 sebesar Rp 14.506.553.957.

19. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Akun ini merupakan saldo biaya yang masih harus dibayar program JHT atas pembelian saham dan biaya pengelolaan properti per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Beban Yang Masih Harus Dibayar Investasi	11.426.875.782
Liabilitas Pembelian Saham	22.336.313
Liabilitas Investasi Lain	102.092.712
Liabilitas Lancar Lain	586.485.435
	12.137.790.242

20. Liabilitas Jaminan Hari Tua Jatuh Tempo

Akun ini merupakan penerimaan iuran JHT beserta hasil pengembangannya yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada peserta dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun per 1 Januari 2014 sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Kantor Wilayah I	570.966.864.745
Kantor Wilayah II	344.905.719.007
Kantor Wilayah III	4.791.815.791.487
Kantor Wilayah IV	804.637.725.193
Kantor Wilayah V	392.398.307.263
Kantor Wilayah VI	823.277.611.314
Kantor Wilayah VII	499.774.619.668
Kantor Wilayah VIII	133.839.564.264
Kantor Wilayah IX	466.799.901.778
Kantor Wilayah X	367.150.840.983
Kantor Wilayah XI	106.468.007.444
Total	**9.302.034.953.146**

21. Iuran Pokok

Akun ini merupakan saldo penerimaan iuran pokok Program JHT per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
JHT Selesai PSJHT	125.357.753.508.487
JHT Belum Selesai PSJHT	28.178.254.253
Iuran Belum Rinci Jamsostek	105.982.256.681
Total	**125.491.914.019.421**

a. JHT Selesai PSJHT
Akun ini merupakan Penyesuaian Saldo Jaminan Hari Tua (PSJHT) per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Liabilitas JHT Sesuai PSJHT yang Sudah Selesai	125.270.070.522.738
Liabilitas JHT Sesuai PSJHT yang Sudah Selesai Penyesuaian	79.912.694.075
Liabilitas JHT Sesuai PSJHT yang Sudah Selesai Program TK Mandiri	6.797.346.573
Liabilitas JHT Sesuai PSJHT yang Sudah Selesai Program Perorangan	972.945.101
Total	**125.357.753.508.487**

	1 Januari 2014 Rp
Kantor Wilayah I	5.074.132.458.172
Kantor Wilayah II	3.744.157.097.345
Kantor Wilayah III	54.385.192.618.231
Kantor Wilayah IV	17.373.798.627.533
Kantor Wilayah V	5.670.068.440.404
Kantor Wilayah VI	13.031.721.638.729
Kantor Wilayah VII	6.518.838.065.816
Kantor Wilayah VIII	1.866.963.226.232
Kantor Wilayah IX	7.512.554.245.611
Kantor Wilayah X	8.829.537.278.853
Kantor Wilayah XI	1.350.789.811.561
Total	**125.357.753.508.487**

Saldo liabilitas JHT sesuai PSJHT merupakan saldo dari peserta aktif dan non aktif, dimana berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 84 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 32 ayat (1) terdapat definisi peserta aktif dan non aktif, yaitu tenaga kerja mempunyai kepesertaan aktif, apabila selama masa kepesertaannya iuran tetap dibayarkan, Sedangkan kepesertaan non aktif, apabila iuran tidak lagi dibayarkan (namun saldo JHT belum dicairkan).

b. JHT Belum Selesai PSJHT
Akun ini merupakan penerimaan iuran JHT yang belum dapat diselesaikan PSJHT-nya untuk program LHK dan Perseorangan per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
JHT Program LHK	23.687.590.290
JHT Program Perorangan	4.490.663.963
Total	**28.178.254.253**

c. Iuran Belum Rinci
Iuran Belum Rinci (IBR) merupakan saldo penerimaan iuran program Jamsostek, program LHK dan iuran belum jelas penyetor (IBJP) per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014			
	IBR Program Jamsostek Rp	IBR Program LHK Rp	Iuran Belum Jelas Penyetorannya Rp	Total Rp
Kantor Pusat	--	--	4.986.513.443	4.986.513.443
Kantor Wilayah I	1.009.859.558	1.539.483.853	119.204.787	2.668.548.198
Kantor WIlayah II	1.020.939.830	1.055.539.656	217.985.691	2.294.465.177
Kantor WIlayah III	32.608.292.425	1.849.844.386	1.237.895.131	35.696.031.942
Kantor WIlayah IV	7.791.213.953	3.630.881.334	1.230.519.956	12.652.615.243
Kantor WIlayah V	2.315.569.040	3.324.642.798	--	5.640.211.838
Kantor Wilayah VI	11.788.437.417	2.340.859.658	340.158.981	14.469.456.056
Kantor Wilayah VII	2.801.801.324	5.205.364.666	379.731.009	8.386.896.999
Kantor WIlayah VIII	615.875.795	2.620.405.985	247.622.277	3.483.904.057
Kantor WIlayah IX	4.070.637.347	2.334.158.827	6.856.355	6.411.652.529
Kantor WIlayah X	5.762.838.743	1.602.658.612	14.551.583	7.380.048.938
Kantor WIlayah XI	357.512.616	1.517.216.780	37.182.865	1.911.912.261
Total	**70.142.978.048**	**27.021.056.555**	**8.818.222.078**	**105.982.256.681**

Iuran belum rinci merupakan penerimaan iuran program Jamsostek dan program LHK yang belum didukung dengan upah tenaga kerja serta iuran yang belum jelas identitas penyetornya dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan iuran.

22. Hasil Pengembangan

Akun ini merupakan saldo Dana Pengembangan JHT dan Surplus Hak Peserta per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Dana Pengembangan JHT Penyangga (*Buffer*)	1.364.438.671.979
Dana Pengembangan JHT	430.239.564.688
Surplus Hak Peserta atas Hasil Investasi JHT	529.210.755.808
Total	**2.323.888.992.475**

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/476/122012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Dana Pengembangan Hari Tua, Perusahaan membentuk Dana Pengembangan JHT Penyangga (Buffer) sebesar Rp 1.364.438.671.979 digunakan untuk mempertahankan tingkat hasil pengembangan JHT yang stabil dan menjaga tingkat hasil pengembangan JHT yang kompetitif dengan tingkat bunga pasar.

23. Aset Neto

Akun ini merupakan penyesuaian selisih penilaian efek untuk instrument investasi Saham, Reksadana dan Obligasi per 31 Desember 2013 dan penilaian kembali atas aset properti investasi per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Penyesuaian Selisih Penilaian Efek	
Saham	(2.484.181.415.793)
Obligasi	(70.757.071.593)
Reksadana	(1.308.530.753.672)
	(3.863.469.241.058)
Penyesuaian Nilai Wajar Atas Properti Investasi	
Tanah	402.083.482.888
Bangunan	351.467.293.365
	753.550.776.253
Total	**(3.109.918.464.805)**

Sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/461/122013 tentang Pedoman Akuntansi Program JHT, terdapat kebijakan pada saat penerapan awal Per 1 Januari 2014, yaitu:

a. Aset investasi dalam kelompok Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual dicatat pada nilai bawaannya (*deemed cost*) dan selisih penilaian efek menjadi saldo awal aset neto.
b. Pehitungan cadangan teknis mengacu pada jangka pendek dan selisih perhitungan menjadi saldo awal aset neto.

24. Adopsi Standar Baru Maupun Revisi Standar dan Intepretasi (Revisi atas PSAK dan ISAK)

a. Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2014:

- ISAK No. 27 : Pengalihan Aset dari pelanggan
- ISAK No. 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Selama Periode Berjalan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menetapkan Pedoman Akuntansi Program Jaminan Hari Tua yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pada tahun 2014 Perusahaan mengeluarkan beberapa kebijakan baru antara lain sebagai berikut:

1) PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011)
   Kebijakan baru atas piutang properti investasi merupakan kelanjutan dari penerapan PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KEP/84/032014
2) PSAK 13 (Revisi 2011)
   Kebijakan baru atas properti investasi merupakan penerapan PSAK 13 (Revisi 2011): Pengakuan Properti Investasi yang diterapkan pada 2014 sesuai Keputusan Direksi Nomor : KEP/85/032014 tentang klasifikasi properti investasi berdasarkan tujuan penggunaannya.

Berikut ini ditampilkan daftar perubahan akuntansi yang berlaku pada 1 Januari 2014:

No	Rincian Perubahan	PSAK Terkait	Nomor SK Direksi
1	Perubahan Penyajian Laporan Posisi Keuangan	PSAK 18 (Revisi 2010) Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya	KEP/461/122013
2	Piutang Properti Investasi	PSAK 50 (Revisi 2010) Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 55 (Revisi 2011) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	KEP/84/032014
3	Klasifikasi Properti Investasi	PSAK 13 (Revisi 2011) Properti Investasi	KEP/85/032014

25. Manajemen Risiko

a. Organisasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada Program JHT saat ini berada dibawah tanggung jawab Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan. Terkait dengan pengelolaan Risiko, Biro Manajemen Risiko dipantau oleh Komite Manajemen Risiko yang merupakan perangkat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Pada dasarnya pengelolaan risiko adalah tanggung jawab seluruh unit kerja (divisi, biro, kantor wilayah dan kantor cabang) BPJS Ketenagakerjaan. Aktifitas operasional antara lain melakukan proses pengidentifikasian, pengukuran, monitoring dan pelaporan risiko yang merupakan bagian dari aktivitas operasional semua unit kerja BPJS Ketenagekerjaan. Biro Manajemen Risiko BPJS Ketenagekerjaan mendesain/ menetapkan kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko, memfasilitasi unit kerja dalam melaksanakan manajemen risiko dan memonitor pelaporan dan kesesuaian kerangka kerja/metodologi yang diterapkan unit kerja.
Aktifitas bisnis Program JHT meliputi pelayanan kepesertaan dan pengelolaan dana JHT. Terkait dengan aktifitas tersebut, Program JHT terekspos berbagai risiko yang meliputi risiko counterpart, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.

Khusus terkait dengan pengelolaan aset keuangan yang merupakan aset terbesar, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan potensi kerugian yang berdampak pada kinerja Program JHT yaitu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mentaati peraturan yang berlaku.

b. Manajemen Risiko Counterpart

Risiko counterpart adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterpart (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada Program JHT.

Pihak ketiga Program JHT dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional Program JHT. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti dan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya default (gagal bayar). Pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko counterpart terhadap aset pada laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014		
	Nilai Kotor	Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai Bersih
Aset			
Bank Investasi	6.776.635.392	--	6.776.635.392
Deposito Berjangka	36.015.899.000.000	--	36.015.899.000.000
Saham	23.447.285.053.660	--	23.447.285.053.660
Reksadana	10.599.347.858.624	--	10.599.347.858.624
KIK - EBA	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Obligasi			
Korporasi	22.894.843.821.360	(9.466.407.750)	22.885.377.413.610
Obligasi Republik Indonesia	32.251.497.807.949	--	32.251.497.807.949
Sukuk	5.599.554.771.284	(6.643.093.158)	5.592.911.678.126

c. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki Program JHT. Secara umum Program JHT memiliki risiko bunga atas nilai wajar dan risiko harga.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur Program JHT terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Risiko ini terkait dengan koreksi harga instrumen saham, obligasi dan reksadana akibat pengaruh perubahan tingkat suku bunga.

Program JHT melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan rebalancing secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan Program JHT.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat dari perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Exposure Program JHT terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang dinilai pada nilai wajar dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Program JHT.

Berikut adalah tabel rata-rata tingkat bunga/bagi hasil pengembangan dana JHT per tahun untuk aset dan aset neto yang penting untuk tahun yang berakhir 1 Januari 2014:

	1 Januari 2014
Aset	
Saham	16,42%
Reksa dana	10,03%
Obligasi	9,87%
Deposito	6,84%
Aset Neto	
Hasil Pengembangan	8,68%

Program JHT menggunakan Security Market Line (SML) dan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga dan pergerakan suku bunga terhadap liabilitas dan ekuitas. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut antara lain adalah nilai IHSG dan risk free rate berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012.

Analisis sensitivitas suku bunga dan harga efek per 1 Januari 2014:

	1 Januari 2014 Rata - rata
Sensitivitas MTM: △100 poin IHSG	2,19%
SPE - Risiko Liabilitas	26,09%
SPE - Risiko Ekuitas	49,01%

* MTM; Mark to Market - SPE; Selisih Penilaian Efek

d. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki Program JHT maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi), maupun potensi peristiwa ketidakmampuan Program JHT memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset liquid yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi).
Risiko likuiditas yang terkait aktifitas operasional non-investasi terdapat dalam aktifitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kewajiban Program JHT untuk membayarkan jaminan hari tua kepada peserta diatur dalam bagian keempat pasal 14 Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2009 tentang perubahan keenam atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial. Kedua regulasi ini mengatur bahwa JHT dapat dibayarkan kepada tenaga kerja saat mencapai usia 55 tahun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia dan atau berhenti bekerja sebelum mencapai usia 55 tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 tahun serta telah melewati masa tunggu 1 bulan.

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, BPJS Ketenagakerjaan selaku penganggung jawab program JHT mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, Program JHT relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih likuid dibandingkan dengan kewajibannya.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan kewajiban yang menjadi arus kas masuk atau keluar per 1 Januari 2014:

	1 Januari 2014				
	Nilai Tercatat	≤ 1 Bulan	1 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan
Aset Keuangan					
Deposito	36.015.899.000.000	6.887.113.962.544	22.850.290.966.305	6.278.216.198.338	277.872.813
Saham	23.447.285.053.660	8.910.042.243.489	8.217.501.972.356	6.319.740.837.814	--
Obligasi	55.136.875.221.556	3.470.760.343.031	1.814.373.199.082	1.701.708.131.610	48.150.033.547.832
Sukuk	5.592.911.678.126	87.237.338.935	104.271.305.140	--	5.401.403.034.053
Reksadana	10.599.347.858.624	2.669.296.546.552	6.219.260.721.665	1.710.790.590.407	--
KIK-EBA	100.000.000.000	--	--	--	100.000.000.000
Total	**130.892.318.811.966**	**22.024.450.434.552**	**39.205.698.164.549**	**16.010.455.758.169**	**53.651.714.454.698**

	1 Januari 2014				
	Nilai Tercatat	≤ 1 Bulan	1 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan
Liabilitas Keuangan					
JHT Siap bayar	1.862.173.192	1.862.173.192	--	--	--
JHT Jatuh Tempo	9.337.842.942.628	9.337.842.942.628	--	--	--
JHT Sesuai PSJHT	125.357.753.508.487	328.612.047.519	1.643.060.237.597	1.971.672.285.117	121.414.408.938.254
Total	**134.697.458.624.307**	**9.668.317.163.339**	**1.643.060.237.597**	**1.971.672.285.117**	**121.414.408.938.254**

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan, BPJS Ketenagakerjaan selaku penganggung jawab program JHT melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitanya.

e. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/ upaya pencapaian kerja, baik terkait aktivitas investasi maupun non-investasi dalam kurun 1 (satu) tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan selaku penganggung jawab program JHT untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum penyebab risiko operasional BPJS Ketenagakerjaan selaku penganggung jawab program JHT masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan SOP secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi (IT). Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku penganggung jawab program JHT juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Terkait dengan mitigasi risiko operasional dan risiko-risiko lainnya, BPJS Ketenagakerjaan selaku penganggung jawab program JHT secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), pengembangan infrastruktur dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis COSO-ERM, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko korporasi sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit/RBA*) disamping itu BPJS Ketenagakerjaan selaku penganggung jawab program JHT terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan Jamsostek sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas BPJS Ketenagakerjaan selaku penganggung jawab program JHT melalui sosialisasi, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai risk-owner memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan efektif.

26. Kontinjensi

Piutang Iuran dan Denda

Jumlah nilai dari piutang iuran serta denda JHT yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih namun belum diakui pada laporan keuangan Program JHT dikarenakan Data Upah Siap Rekon (DUSR) belum diajukan oleh perusahaan peserta per 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Piutang Iuran	401.526.603.108
Piutang Denda	99.801.197.918
Total	**501.327.801.026**

Piutang denda JHT diakui ketika DUSR diterima dari perusahaan peserta dan piutang JHT tidak dicatat disebabkan iuran JHT akan diakui pada saat kas diterima. Program JHT tidak mencatatkan piutang iuran dan denda ketika tidak didukung oleh DUSR.

a. Piutang iuran JHT yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Piutang Iuran	
Kantor Wilayah I	15.198.988.861
Kantor Wilayah II	16.990.154.471
Kantor Wilayah III	164.634.465.679
Kantor Wilayah IV	74.227.768.124
Kantor Wilayah V	11.837.743.120
Kantor Wilayah VI	31.316.675.152
Kantor Wilayah VII	29.139.384.126
Kantor Wilayah VIII	7.180.888.965
Kantor Wilayah IX	30.942.028.204
Kantor Wilayah X	16.647.187.386
Kantor Wilayah XI	3.411.319.019
Total	**401.526.603.108**

b. Piutang denda JHT yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Denda Iuran	
Kantor Wilayah I	6.480.935.949
Kantor Wilayah II	3.360.445.625
Kantor Wilayah III	41.294.769.450
Kantor Wilayah IV	12.159.044.347
Kantor Wilayah V	3.241.147.273
Kantor Wilayah VI	8.735.687.408
Kantor Wilayah VII	8.822.901.702
Kantor Wilayah VIII	2.413.440.589
Kantor Wilayah IX	4.747.014.184
Kantor Wilayah X	6.471.083.299
Kantor Wilayah XI	2.074.728.093
Total	**99.801.197.918**

Perkara Hukum

Dalam melakukan kegiatan, Program JHT tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset, Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, terdiri atas:

a. Kasus kepailitan PT Eight Oh Two Indonesia
   Pengajuan Tagihan Iuran perusahaan dalam proses pailit, kepesertaan Kacab Tanjung Priok, saat ini Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit dan masih dalam proses pemberesan harta pailit oleh pihak Kurator.

b. Perkara Pidana Pembobolan JHT oleh sdr. A. Harry Mufty dkk
   Perkara Pidana Pembobolan JHT oleh sdr. A. Harry Mufty dkk di beberapa kantor cabang. Pada kasus kantor cabang Setiabudi sampai dengan saat ini Polsek Mampang menahan 3 orang yaitu A. Harry Mufty, Anti Kholifatin dan Sodikin. Persidangan atas kasus ini telah dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013 dan menjatuhkan vonis kepada 3 terdakwa selama 9 bulan pidana penjara. Sedangkan pada kasus kantor cabang Rawamangun, TSA Advocate selaku kuasa hukum BPJS Ketenagakerjaan telah membuat laporan kepada Polsek Pulogadung dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : 105/K/II/2014/S.Pg tanggal 18 Februari 2014.

c. Pelaksanaan Lelang Tahap III
Pelaksanaan Lelang Tahap III Tanah di Desa Kamarung Kecamatan Pegaden Subang Jawa Barat (Aset Jaminan MTN PT Volgren Indonesia). Telah dilakukan lelang eksekusi tahap III pada tanggal 27 November 2013, dan belum terjual disebabkan harga limit yang ditetapkan berdasarkan appraisal yang dilakukan oleh PN Subang lebih tinggi dari harga pasaran property setempat menyebabkan tidak ada peserta lelang. Sampai dengan saat ini pelaksanaan lelang masih dalam proses koordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI.

27. Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku Pada Tanggal 1 Januari 2014

Standar revisi yang wajib diterapkan untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai 1 Januari 2015 dan relevan dengan operasi Perusahaan adalah sebagai berikut:
- PSAK 1 (revisi 2013) “Penyajian laporan keuangan”
- PSAK 4 (revisi 2013) “Laporan keuangan tersendiri”
- PSAK 15 (revisi 2013) “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama”
- PSAK 24 (revisi 2013) “Irnbalan kerja”
- PSAK 65 “Laporan keuangan konsolidasian”
- PSAK 66 “Pengaturan bersama”
- PSAK 67 “Pengungkapan kepentingan dalarn entitas lain”
- PSAK 68 “Pengukuran nilai wajar”

28. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Program JHT melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	Negara Republik Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Obligasi, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, penitipan surat berharga, Rekening Kustodi
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi, Virtual Account, Co Branding, Rekening Kustodi
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Obligasi, Virtual Account,Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB), Penempatan Investasi - Saham, Rekening Kustodi
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - KIK-EBA, Penempatan Investasi - Obligasi, Penempatan Investasi - Saham, Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB)
	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Sukuk
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pupuk Kalimantan Timur	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi - Obligasi
	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Hutama Karya (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Timah (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham

29. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Program JHT yang tercatat dalam laporan posisi keuangan.

	1 Januari 2014				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Total Nilai Tercatat	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
INVESTASI					
Bank Investasi	--	--	6.776.635.392	6.776.635.392	6.776.635.392
Deposito	--	--	36.015.899.000.000	36.015.899.000.000	36.015.899.000.000
Saham	23.447.285.053.660	--	--	23.447.285.053.660	23.447.285.053.660
Reksadana	10.599.347.858.624	--	--	10.599.347.858.624	10.599.347.858.624
KIK EBA	--	100.000.000.000	--	100.000.000.000	100.000.000.000
Sukuk	33.356.906.842	5.559.554.771.284	--	5.592.911.678.126	5.592.911.678.126
Obligasi	3.507.294.084.750	51.629.581.136.806	--	55.136.875.221.556	55.136.875.221.556
NON INVESTASI					
Bank	--	--	254.274.653.456	254.274.653.456	254.274.653.456
DOC Non Investasi	--	--	486.000.000.000	486.000.000.000	486.000.000.000
Piutang Investasi	--	--	53.018.820.555	53.018.820.555	53.018.820.555
Piutang Hasil Investasi	--	--	1.380.048.636.759	1.380.048.636.759	1.380.048.636.759
Total JHT	**37.587.283.903.876**	**57.289.135.908.090**	**38.196.017.746.162**	**133.072.437.558.128**	**133.072.437.558.128**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:
- Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, sukuk, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
- Nilai wajar dari saham, reksadana, obligasi dan sukuk dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada catatan 3b, 9, 10, 11 dan 13.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Program JHT untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:
i. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
ii. Tingkat 2: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
iii. Tingkat 3: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

	1 Januari 2014			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Total
Aset Keuangan				
Saham	23.447.285.053.660	--	--	23.447.285.053.660
Reksadana	10.599.347.858.624	--	--	10.599.347.858.624
Sukuk	--	5.559.554.771.282	33.356.906.844	5.592.911.678.126
Obligasi	1.795.060.780.000	53.294.280.849.303	47.533.592.253	55.136.875.221.556
Total	**35.841.693.692.284**	**58.853.835.620.585**	**80.890.499.097**	**94.776.419.811.966**

30. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Pembuka Program JHT

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan kuangan Program JHT yang diotorisasi untuk terbit tanggal 17 April 2014.

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Laporan Keuangan Pembuka
Per Tanggal 1 Januari 2014

d1/April 24, 2014 Paraf:

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Pembuka
Per 1 Januari 2014

Laporan Posisi Keuangan Pembuka 1

Catatan atas Laporan Keuangan Pembuka 2

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
LAPORAN POSISI KEUANGAN PEMBUKA

Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	1 Januari 2014 Rp
ASET		
Bank	3.b, 3.l, 4	11.336.561.267
Piutang Iuran - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	3.b, 3.c, 5	43.882.719.733
Piutang Investasi	3.b, 3.c, 6	31.318.626.797
Piutang Hasil Investasi	3.b, 3.c, 7	27.479.220.460
Deposito	3.b, 3.l, 8	1.358.214.000.000
Saham	3.b, 3.l, 9	4.052.975.658.920
Reksadana	3.b, 3.l, 10	581.303.572.715
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragunan Aset	3.b, 11	44.390.501.674
Sukuk	3.b, 12	96.676.000.000
Obligasi	3.b, 3.l, 13	1.878.075.711.084
TOTAL ASET		**8.125.652.572.650**
LIABILITAS DAN ASET NETO		
LIABILITAS		
Utang Jaminan Kecelakaan Kerja	3.d, 14	2.208.174.039
Cadangan Teknis		
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Proses	3.e, 15	243.324.770
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan	3.f, 16	19.820.066.297
Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan	3.g, 17	796.451.994.950
Liabilitas Lain	3.h, 18	100.172.783.803
TOTAL LIABILITAS		**918.896.343.859**
ASET NETO	3.i, 19	**7.206.756.228.791**
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		**8.125.652.572.650**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian penutup secara keseluruhan

D1/April 24, 2014

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMBUKA
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan posisi keuangan pembuka Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan Program JKK disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian penutup PT Jamsostek (Persero), Entitas Anak dan Bertujuan Khusus yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2. Gambaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja

2.a Pembentukan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Program Jaminan Kecelakaan Kerja ("Program JKK") dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 18 yang menyebutkan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi :

- Jaminan Kesehatan;
- Jaminan Kecelakaan Kerja;
- Jaminan Hari Tua;
- Jaminan Pensiun;dan
- Jaminan Kematian.

Program JKK sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 6 ayat 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

2.b Kepesertaan dan Iuran

Peserta Program JKK adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Peserta Program JKK terdiri atas:

- Peserta penerima gaji atau upah.
- Peserta bukan penerima gaji atau upah.

Iuran tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja, dengan pembagian sebagai berikut:

- Bagi pekerja penerima gaji atau upah, iuran proporsional terhadap upah atau penghasilan dan iuran seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja.
- Bagi pekerja bukan penerima gaji atau upah, besar iuran ditetapkan oleh pemerintah.

2.c Tujuan dan Manfaat Program JKK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 31, tujuan penyelenggaraan Program JKK adalah untuk memberikan jaminan kepada peserta dalam memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Manfaat Program JKK diberikan kepada:

a. Ahli waris yang sah dari peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat jaminan Kecelakaan Kerja.
b. Urutan ahli waris yang berhak menerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi:
    i. Janda atau duda atau anak

ii. Apabila point i tidak ada maka diberikan kepada:
- Keturunan sedarah tenaga kerja menurut garis lurus kebawah dan ke atas sampai derajat kedua (bapak, ibu, cucu, kakek dan nenek);
- Saudara kandung;
- Mertua;dan
- Apabila tidak ada ahli waris yang sah maka biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak yang mengurus pemakaman dan santunan Kecelakaan Kerja dikembalikan ke dana jaminan sosial untuk peningkatan manfaat bagi peserta.

2.d Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan susunan sebagai berikut

- Susunan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK pada 1 Januari 2014 sebagai berikut:

	1 Januari 2014
Dewan Pengawas	
Ketua Dewan Pengawas	Mulabasa Hutabarat
Anggota Dewan Pengawas	Iskandar Maula
Anggota Dewan Pengawas	Hariyadi B Sukamdani
Anggota Dewan Pengawas	Bambang Wirahyoso
Anggota Dewan Pengawas	Mathias Tambing
Anggota Dewan Pengawas	Nina Sapti Triaswati
Anggota Dewan Pengawas	H.M. Saleh Khalid

- Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014
Dewan Direksi	
Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur Keuangan	Herdy Trisanto
Direktur Investasi	Jeffry Haryadi
Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi	Agus Supriyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	Amri Yusuf
Direktur Pelayanan	Achmad Riadi
Direktur Kepesertaan	Junaedi

2.e Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko

Susunan Komite Audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014
Komite Audit	
Ketua	Bambang Wirahyoso
Anggota	Salim Siagian
Anggota	Rinaningsih

Susunan Komite Manajemen Risiko Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK pada 1 Januari 2014 adalah Endi Roswendi.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

3.a. Dasar Penyusunan, Pengukuran dan Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Pedoman Akuntansi Program JKK disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain:

a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
c. *International Financial Reporting Standards; dan*
d. Peraturan perudang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Program JKK

Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Program Jaminan Kecelakaan Kerja mulai diterapkan pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

1) Penentuan aset investasi awal yang akan diukur pada nilai wajar dan yang akan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi sesuai persyaratan sesuai dengan kondisi pada tanggal tersebut;
2) Jumlah tercatat aset awal sesuai laporan posisi keuanga pembuka yang ditetapkan pemerintah;
3) Jumlah tercatat liabilitas awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah;dan
4) Jumlah tercatat aset neto awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah.

Laporan posisi keuangan pembuka merupakan laporan yang disusun untuk memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 62 ayat 2 (c) disebutkan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Laporan posisi keuangan pembuka Program JKK disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian penutup PT Jamsostek (Persero), Entitas Anak dan Bertujuan Khusus per 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh kantor akuntan independen dan telah disahkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK-50/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013 Perusahaan Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero).

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 49 ayat 2 disebutkan bahwa "Subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan", dan dijelaskan kembali pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 40 ayat 2 disebutkan bahwa BPJS wajib memisahkan aset BPJS dengan aset Dana Jaminan Sosial. Untuk memenuhi ketentuan ini maka Laporan Posisi Keuangan Pembuka Jaminan Kecelakaan Kerja disusun sesuai dengan Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber aset program JKK berasal dari :

1) Iuran program JKK termasuk bantuan iuran;
2) Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan program JKK;.
3) Pengalihan aset program JKK yang menjadi hak peserta PT Jamsostek (Persero);dan
4) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Aset dan Liabilitas Program JKK PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset dan Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan telah ditetapkan dalam 3 (tiga) Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/04/012014 tentang Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber Dana Program JKK terdiri dari
   a. Liabilitas kepada peserta Non JHT.
      - Utang Jaminan Non JHT;
      - Utang Jaminan Diestimasi Non JHT;
      - Utang Jaminan Belum Dilaporkan (IBNR); dan
      - Cadangan Teknis dan Katastrofa.
   b. Dana pengembangan Non JHT.
   c. Liabilitas pengelolaan program JHT.
      - Liabilitas Investasi; dan
      - Pendapatan diterima di muka investasi.
   d. IBR dan Iuran diterima di muka.
   e. Selisih Penilaian Efek (SPE) Non JHT.

2. Alokasi Aset Program JKK
   a. Kas dan setara Kas;
   b. Investasi; dan
   c. Turunan investasi (PYMHD, piutang jatuh tempo dan piutang investasi).

3. Alokasi Sumber Dana Program Jaminan Kecelakaan Kerja
   Pengalokasian sumber dana program dilakukan dengan menggunakan persentase proporsi per program. Proporsi atas alokasi sumber dana digunakan untuk pos-pos kewajiban yang belum teridentifikasi dengan akun masing-masing program. Penggunaan proporsi atas alokasi sumber dana hanya dilakukan untuk program Non JHT, sedangkan untuk program JHT sudah dilakukan pemisahan terhadap aset dan liabilitasnya. Alokasi sumber dana Non JHT dialokasikan jumlah sumber dana untuk masing-masing program Non JHT (program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) berdasarkan persentase proporsi per program. Dasar persentase atas proporsi menggunakan beberapa asumsi, yaitu:
   a. Pendapatan iuran
      Proporsi atas pendapatan iuran digunakan untuk memisahkan IBR dan iuran diterima dimuka masing-masing program.
   b. Beban jaminan program paket
      Proporsi atas beban jaminan program paket digunakan untuk memisahkan utang jaminan (jaminan sudah ditetapkan tapi belum dibayar, jaminan dalam proses dan jaminan belum dilaporkan) serta cadangan teknis dan katastrofa Jasa Konstruksi ke program JKK dan JKM.
   c. Iuran bersih
      Proporsi atas iuran bersaih digunakan untuk memisahkan dana pengembangan Non JHT dan liabilitas Non JHT masing-masing program. Proporsi atas pendapatan iuran, beban jaminan dan iuran bersih menggunakan data series selama 5 (lima) tahun.

4. Penentuan Aset Program Jaminan Kecelakaan Kerja
   a. Aset Investasi terdiri dari Deposito, Saham, Obligasi dan Reksadana; dan
   b. Aset Non Investasi terdiri dari kas dan setara kas, bank investasi dan piutang iuran Program JKK.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan pembuka adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk penyertaan tertentu yang disajikan berdasarkan metode ekuitas serta investasi pada saham, obligasi, dan reksadana yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Investasi dalam kelompok ini disajikan sebesar nilai wajarnya.

Laporan posisi keuangan pembuka telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual.

Mata uang penyajian dan fungsional dalam laporan keuangan konsolidasian penutup ini adalah mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Program JKK telah disajikan sesuai PSAK 45 (Revisi 2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

3.b. Instrumen Keuangan

Pengembangan Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pengembangan aset Program JKK dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan dalam penempatan instrumen investasi dalam negeri. Instrumen investasi tersebut meliputi:

a. Deposito Berjangka
   Yang termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada bank paling tinggi 15% dari jumlah investasi untuk setiap bank.
b. Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase.

c. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase.

d. Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
   - Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Maksimal 50% dari Aset Bersih;dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

e. Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
   - Maksimal 50% dari Aset Bersih;dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

f. Reksadana
   - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
   - Maksimal 50% dari Aset Bersih;dan
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 15% dari jumlah investasi.

g. Repurchase agreement
   - Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA);
   - Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesi dan/atau Bank Indonesia;
   - Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;
   - Nilai repurchase agreement tidak lebih dari 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan;
   - Maksimal 50% dari Aset Bersih;dan
   - Setiap *counterpart* paling tinggi 2% dari jumlah investasi.

h. Efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset
   - Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
   - Maksimal 50% dari Aset Bersih;dan
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi.

Aset Keuangan

Klasifikasi Aset Keuangan antara lain adalah Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset pada saat awal pengakuannya.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar

Kategori ini terdiri dari dua sub kategori, yaitu aset keuangan untuk tujuan diperdagangkan (*trading*) dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (*Fair Value Option*).

Aset Keuangan yang masuk dalam kategori untuk diperdagangkan (*trading*) jika memiliki tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat (*short term profit taking*) dan aset keuangan yang merupakan bagian dari portofolio intrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Dalam hal pengertian diperdagangkan tersebut menggambarkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang, dan umumnya digunakan untuk tujuan memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek.

Aset Keuangan yang masuk dalam kategori diukur pada nilai wajar (*Fair Value Option*) jika menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena *FVO* mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan suatu pengukuran atau pengakuan yang akan timbul (*accounting mismatch*). *Accounting mismatch* bisa saja terjadi, sebagai contohnya adalah ketika terdapat liabilitas berdasarkan kontrak asuransi yang pengukurannya memasukkan informasi terkini (contoh cadangan teknis) namun aset keuangan terkait tidak diukur pada nilai wajar.

Aset Keuangan Dimiliki hingga Jatuh Tempo

Kategori ini memiliki dua sub kategori, yaitu aset keuangan Nonderivatif dengan pembayaran tetap/telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, kategori kedua adalah entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Penilaian intensi dan kemampuan entitas untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo, tidak hanya ketika pertama kali diakui, tetapi juga pada setiap tanggal pelaporan keuangan. Sedangkan entitas tidak memiliki intensi positif jika belum menetapkan periode kepemilikan investasi, bermaksud untuk menjual sewaktu-waktu (selain dalam situasi yang tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya) sebagai reaksi terhadap perubahan suku bunga atau risiko pasar, kebutuhan likuiditas, perubahan ketersediaan dan tingkat pengembalian investasi alternatif, perubahan sumber dan syarat pembiayaan, atau perubahan risiko mata uang asing dan pihak penerbit memiliki hak untuk menyelesaikan pada suatu jumlah yang secara signifikan lebih rendah dari harga perolehan yang diamortisasi.

Entitas tidak memiliki kemampuan untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo jika tidak memiliki sumber daya keuangan yang tersedia untuk melanjutkan pendanaan investasi tersebut hingga jatuh tempo.

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Kategori ini memiliki dua sub kategori, antara lain adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan aset keuangan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan Awal

Aset keuangan diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan sesuai dalam perjanjian. Untuk aset keuangan yang diperoleh di bursa efek dicatat dengan menggunakan tanggal perdagangan (*trading date*).

Pengukuran

Pengukuran aset keuangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dibagi atas pengukuran awal dan pengukuran selanjutnya. Masing-masing pengukuran memiliki kategori sebagai berikut:

	Nilai Wajar	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pengukuran Awal	- Diukur sebesar nilai wajar (harga beli) - Biaya transaksi diakui sebagai beban tahun berjalan	- Diukur sebesar harga perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi) - Biaya transaksi adalah biaya tambahan selain harga beli yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perolehan.
Pengukuran Selanjutnya	- Diukur dengan nilai wajar - Kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui sebagai selisih penilaian investasi	- Diukur pada harga perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Komponen harga perolehan adalah diskonto, premium dan biaya transaksi. - Instrumen utang, sebelum diukur pada nilai wajar, dilakukan amortisasi antara biaya perolehan dan nilai par (nominal) dengan menggunakan suku bunga efektif dan diakui sebagai pendapatan bunga. - Metode suku bunga efektif adalah metode yg digunakan untuk menghitung harga perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi) yg diamortisasi dari aset keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yg relevan. - Suku bunga efektif adalah suku bunga yg secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan. - Saat menghitung suku bunga efektif, Program JKK mengestimasi arus kas dengan mempertimbangakan seluruh persyaratan konraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangakan kerugian di masa depan. - Bagian bunga yg terjadi diantara tanggal pembayaran bunga terakhir dan tanggal pembelian (accrued interest) diamortisasi sampai dengan pembayaran bunga yang pertama kali.

Perhitungan Suku Bunga Efektif adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{PV} = \frac{CF}{(1+i)^1} + \frac{CF}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{CF}{(1+i)^t}$$

PV	*Present value*	Nilai wajar yang merupakan nilai kini dari aset keuangan yg diperoleh.
CF	*Cash flow*	Arus kas bersih yg akan diterima berdasarkan ketentuan perjanjian.
i	*Interest*	Suku bunga efektif
t	*Time*	Jangka waktu

Penurunan Nilai

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan. Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang. Penurunan nilai atas aset keuangan dalam kategori Nilai Wajar tidak ada pengujian penurunan nilai. Sedangkan untuk kategori yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang dilakukan pengujian penurunan nilai.

Pembalikan Penurunan Nilai

Ketentuan pembalikan penurunan nilai tidak diterapkan pada aset keuangan dalam kategori Nilai Wajar seperti halnya tidak diterapkannya ketentuan penurunan nilai pada aset keuangan dalam kategori Nilai Wajar. Sedangkan dalam kategori yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang pembalikan penurunan nilai tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat melebihi nilai tercatat pada tanggal pemulihan apabila sebelumnya tidak terjadi penurunan nilai. Jumlah pembalikan penurunan nilai dalam yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang diakui sebagai keuntungan tahun berjalan.

Hirarki Nilai Wajar

Hirarki Nilai Wajar yang digunakan dalam kategori Nilai Wajar adalah harga kuotasi pasar aktif dan teknik penilaian. Pasar aktif yaitu harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Harga kuotasi pasar yang sesuai untuk aset keuangan yaitu harga penawaran (*bid price*) di pasar.

Sukuk

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atas aset berwujud tertentu, manfaat atas aset berwujud tertentu dan jasa baik yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu atau kegiatan investasi yang telah ditentukan.

SUKUK	Nilai Wajar	Biaya Perolehan
Klasifikasi	Model usaha entitas bertujuan **tidak** untuk memperoleh arus kas kontraktual atau persyaratan kontraktual tidak menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil (mudharabah) atau imbalan (ijarah)	Model usaha entitas bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual menetukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil (mudharabah) atau imbalan (ijarah)
Reklasifikasi	Tidak dapat direklasifikasikan ke kategori diukur pada biaya perolehan, kecuali terjadi perubahan model usaha.	
Pengakuan dan Penghentian Pengakuan	Diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan dalam perjanjian.	
	Dihentikan pengakuannya ketika berakhirnya hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari sukuk.	
Pengukuran Awal	Diukur pada nilai wajar (harga beli). Biaya transaksi yang terjadi diakui sebagai beban	Diukur pada biaya perolehan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi
Pengukuran Selanjutnya	Diukur pada nilai wajar. Kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui sebagai selisih penilaian investasi	Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus
Penurunan Nilai	Tidak ada pengujian penurunan nilai	Dilakukan pengujian penurunan nilail, kecuali jumlah terpulihkan dihitung sebesar jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

SUKUK	Nilai Wajar	Biaya Perolehan
Pembalikan Penurunan Nilai	Tidak diterapkan	Mengacu pada ketentuan atas aset keuangan
Hirarki Nilai Wajar	Harga Kuotasi Pasar Aktif	
	Teknik penilaian nilai wajar yang digunakan adalah penggunaan harga transaksi wajar paling kini dan referensi nilai wajar intrumen lain yang secara substansi sama.	

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa suatu kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain atau dengan kondisi yang berpotensi merugikan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dan diukur pada harga perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif. Pengakuan dan penghentian pengakuan atas liabilitas keuangan diakui pada entitas terkait dengan ketentuan dalam perjanjian.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Penghentian liabilitas keuangan dilakukan ketika liabilitas keuangan diselesaikan, dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Manajemen mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Keuangan	**Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar**	Aset Keuangan untuk Tujuan Diperdagangkan	Saham Reksadana Sukuk Obligasi
		Aset Keuangan yang Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar	Saham Reksadana Sukuk Obligasi
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Aset Keuangan Nonderivatif dengan Pembayaran Tetap atau telah Ditentukan Jatuh Temponya	KIK-EBA Sukuk Obligasi
		Entitas Mempunyai Intensi Positif dan Kemampuan untuk Memiliki Aset Keuangan Hingga Jatuh Tempo	KIK-EBA Sukuk Obligasi
	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	Aset Keuangan Nonderivatif dengan Pembayaran Tetap atau telah Ditentukan	Bank Deposito Piutang Iuran Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi
		Tidak Mempunyai Kuotasi di Pasar Aktif	

Liabilitas Keuangan	**Harga Perolehan Diamortisasi dengan Metode Suku Bunga Efektif**	Utang Jaminan Liabilitas Jaminan Dalam Proses Liabilitas Jaminan Belum dilaporkan Iuran yang Belum merupakan Pendapatan
		Liabilitas Lain

3.c. Piutang

Piutang terdiri dari piutang iuran, piutang investasi, dan piutang hasil investasi.

Piutang Iuran

Piutang iuran Program JKK adalah iuran Program JKK yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima pelunasannya sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan. Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011), piutang iuran yang masih harus diterima dan dicatat dalam laporan keuangan ketika memiliki kemungkinan untuk adanya keuntungan ekonomis di masa mendatang kepada Program JKK dan dapat diukur secara andal. Program JKK menetapkan bahwa piutang yang memenuhi kriteria andal adalah piutang yang telah mendapat persetujuan perusahaan peserta, sedangkan piutang iuran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai aset kontinjensi.

Klasifikasi Piutang Iuran Program JKK adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi Umur Piutang sebagai berikut :

Klasifikasi	Umur Tunggakan
Lancar	0 bulan < x ≤ 1 bulan
Kurang Lancar	2 bulan < x ≤ 3 bulan
Macet	di atas 3 bulan

2. Piutang Iuran diakui sebesar Data Upah Siap Rekonsiliasi (DUSR) yang telah mendapat persetujuan dari perusahaan, apabila tidak tersedia DUSR maka dapat digunakan Iuran Terakhir Rekonsiliasi Final (ITRF) sebagai dasar perhitungan surat pemberitahuan yang sudah dicetak. Piutang iuran yang dihitung berdasarkan data ITRF maksimum 3 bulan belum membayar iuran.

3. Direktorat Operasional dan Pelayanan harus melakukan evaluasi atas kriteria perusahaan strategis dan bukti obyektif penurunan nilai (penyisihan) secara periodik pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Keuangan untuk dilakukan (penyisihan) penurunan nilai.

Berikut disajikan persentase penyisihan piutang iuran per 1 Januari 2014 sebagai berikut:

Kategori	1 Januari 2014	
	Umur	%
Lancar	0-1 bulan	1,53%
Kurang Lancar	2-3 bulan	16,81%
Macet	> 3 bulan	56,84%

Perubahan pengakuan piutang iuran dan penentuan penyisihan piutang iuran sebagai bagian dari penerapan ketentuan transisi atas PSAK No. 50 dan 55 (Revisi 2006) sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Edisi 4.

Piutang Investasi

Piutang Investasi merupakan piutang yang timbul karena pelepasan investasi.

Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi Program JKK terdiri dari:

a. Piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka/obligasi;dan

b. Piutang yang timbul dari pendapatan dividen, baik yang berasal dari saham, reksadana dan bagi hasil sukuk.

3.d. Utang Jaminan Kecelakaan Kerja

Utang Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan kewajiban yang timbul karena terjadinya peristiwa kecelakaan kerja, atas diri tertanggung (peserta) yang sudah ditetapkan dan disetujui namun pada tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta. Utang jaminan ini merupakan klaim jaminan yang telah ditetapkan dan disetujui namun pada tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta. Utang Jaminan Kecelakaan Kerja diakui pada saat penetapan jaminan telah disetujui sebesar jumlah yang ditetapkan untuk dibayarkan kepada peserta.

3.e. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Proses

Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja dalam proses merupakan jumlah klaim atas jaminan yang diajukan oleh peserta namun belum disetujui atau belum ditetapkan dan dapat diestimasi berdasarkan jumlah klaim yang diajukan. Liabilitas jaminan dalam proses ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria.

3.f. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan

Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*/IBNR) adalah estimasi jumlah klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan sampai akhir periode pelaporan. Liabilitas ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Atas jumlah estimasi jumlah klaim yang telah dibentuk, dilakukan tes kecukupan liabilitas dengan menggunakan estimasi kini (*current estimate*). Estimasi jumlah Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja belum dilaporkan diakui pada akhir periode berdasarkan data historis minimal selama 3 tahun. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja belum dilaporkan disajikan dalam pos cadangan teknis dalam kelompok liabilitas.

3.g. Iuran Yang Belum Merupakan Pendapatan/Liabilitas Jaminan Masa Depan

Iuran yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari iuran yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggunannya masih berjalan pada akhir periode. Liabilitas jaminan masa depan adalah cadangan yang dibentuk untuk estimasi klaim selama masa pertanggungan. Program JKK merupakan program asuransi jangka pendek karena masa pertanggungan kurang dari satu tahun, kecuali JKK yang memberikan jaminan lebih dari satu tahun yang merupakan program asuransi jangka panjang. Iuran yang belum merupakan pendapatan disajikan dalam pos cadangan teknis dalam kelompok liabilitas. Iuran yang belum merupakan pendapatan/liabilitas jaminan kecelakaan kerja masa depan diakui pada saat pembentukannya sebesar jumlah yang dibentuk berdasarkan perhitungan aktuaria.

3.h. Liabilitas Lain

Liabilitas lainnya adalah liabilitas yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos liabilitas dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Iurab Belum Rinci

Penerimaan iuran dari perusahaan yang belum didukung dengan data upah tidak dapat diakui sebagai pendapatan iuran atau penambah utang JHT. Penerimaan iuran dimaksud akan dicatat pada akun "Iuran Belum Rinci" pada kelompok liabilitas kepada peserta.

3.i. Aset Neto

Merupakan aset Program JKK setelah dikurangi liabilitasnya. Aset neto program JKK tidak diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat karena pemberi sumber daya adalah penerima manfaat dari sumber daya tersebut, bukan pihak lain yang tidak menerima manfaat dari program JKK. Pada akhir periode pelaporan aset neto akan bertambah atau berkurang sebesar jumlah pendapatan setelah dikurangi beban selama periode pelaporan.

3.j. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:
1. Program JKK memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya;
3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:
1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas nya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

3.k. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan pembuka Program JKK mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Program JKK mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

<u>Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan</u>

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (*mark-to-model*). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers*, *money brokers*, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi provider info. Metode yang digunakan adalah metode Nelson Siegel Svensson. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow (DCF)* atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

3.l. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Program JKK menerapkan PSAK 7 (revisi 2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Program JKK telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan konsolidasian telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi. Pihak-pihak berelasi adalah:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor

b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).;
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);atau
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

4. Bank

Akun ini terdiri dari:

	1 Januari 2014 Rp
Bank	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.747.058.036
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.876.459.571
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	443.669.036
	6.067.186.643
Pihak Ketiga	
PT Bank Bukopin Tbk	1.525.893.914
PT Bank Pembangunan Daerah	667.217.919
PT Bank Agro Tbk	183.382.924
PT Bank CIMB Niaga Tbk	312
	2.376.495.069
Total Bank	**8.443.681.712**
Bank Investasi	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.892.879.555
Total Bank Investasi	**2.892.879.555**
Total	**11.336.561.267**

5. Piutang Iuran

Akun ini merupakan saldo piutang iuran Program JKK per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Lancar	3.284.905.392
Kurang Lancar	14.677.848.162
Macet	86.664.294.380
Total	104.627.047.934
Penyisihan Penurunan Nilai	(60.744.328.201)
Total	**43.882.719.733**

6. Piutang Investasi

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari transaksi atas penjualan saham, yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya (T+3) dan akan selesai pada saat jatuh tempo (*outstanding transaction*). Saldo piutang investasi per 1 Januari 2014 adalah sebesar Rp 31.318.626.797.

7. Piutang Hasil Investasi

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima dan piutang pendapatan jatuh tempo atas bunga deposito sudah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal laporan belum diterima Program JKK yang dibuka per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Bunga Obligasi	21.122.708.641
Dividen Saham	3.002.151.970
Bunga Deposito	2.282.862.433
Bagi Hasil Sukuk	1.038.348.244
Bunga KIK - EBA	32.491.381
Pendapatan Deposito Jatuh Tempo	657.791
Total	**27.479.220.460**

8. Deposito

Akun ini merupakan penanaman dana per 1 Januari 2014 dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk	338.499.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	298.030.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	271.415.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	111.916.000.000
PT Bank Syariah Mandiri	1.000.000.000
	1.020.860.000.000

	1 Januari 2014 Rp
Pihak Ketiga	
PT Bank Muamalat	192.805.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah	64.351.000.000
PT Bank International Indonesia Tbk	42.950.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	24.748.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	12.500.000.000
	337.354.000.000
Total	**1.358.214.000.000**
Jangka Waktu Deposito On Call	3 - 12 bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	7,20%

9. Saham

Akun ini merupakan saldo penempatan dana Program JKK per 1 Januari 2014 dalam bentuk Saham yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014			
	Total Saham (Lembar)	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi				
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	27.193.000	383.421.307.005	--	383.421.307.005
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	149.577.018	321.590.587.684	--	321.590.587.684
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	65.233.941	290.291.036.697	--	290.291.036.697
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.659.381	278.143.168.046	--	278.143.168.046
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	27.838.088	200.434.231.971	--	200.434.231.971
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	40.983.925	191.599.849.723	--	191.599.849.723
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	47.808.275	187.647.480.638	--	187.647.480.638
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	10.887.940	110.512.592.015	--	110.512.592.015
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	78.764.479	85.853.282.465	--	85.853.282.465
PT Timah (Persero) Tbk	25.715.048	40.115.474.645	--	40.115.474.645
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	50.175.232	24.836.739.769	--	24.836.739.769
	559.836.327	2.114.445.750.658	--	2.114.445.750.658
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	87.447.981	594.646.270.736	--	594.646.270.736
PT United Tractors Tbk	16.701.447	317.327.490.665	--	317.327.490.665
PT Adaro Energy Tbk	191.638.307	206.969.371.942	--	206.969.371.942
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	8.564.423	170.003.799.994	--	170.003.799.994
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	74.341.938	141.993.101.719	--	141.993.101.719
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	17.195.673	112.631.658.942	--	112.631.658.942
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	3.033.678	86.459.814.077	--	86.459.814.077
PT Vale Indonesia Tbk	31.449.671	80.196.660.176	--	80.196.660.176
PT Bumi Serpong Damai Tbk	62.265.479	79.699.812.587	--	79.699.812.587
PT Bank Central Asia Tbk	7.748.858	74.001.596.419	--	74.001.596.419
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	33.290.637	25.966.697.245	--	25.966.697.245
PT Kalbe Farma Tbk	19.752.485	24.493.081.152	--	24.493.081.152
PT Bank Danamon Tbk	4.123.811	15.464.291.516	--	15.464.291.516
PT Astra Agro Lestari Tbk	115.218	2.874.695.607	--	2.874.695.607
PT Leyand International Tbk	23.394.081	2.643.531.172	--	2.643.531.172
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	238.703	2.422.837.692	--	2.422.837.692
PT Unilever Indonesia Tbk	28.277	735.196.621	--	735.196.621
	581.330.667	1.938.529.908.262	--	1.938.529.908.262
Total	**1.141.166.994**	**4.052.975.658.920**	**--**	**4.052.975.658.920**

Sesuai Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Program JKK, pada saat penerapan awal per 1 Januari 2014, aset investasi dalam kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto dan Tersedia untuk Dijual dicatat pada nilai bawaannya (*deemed cost*). Nilai tercatat Saham posisi per 31 Desember 2013 yang disajikan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013 Rp
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	54.797.348.556
Tersedia Untuk Dijual	3.998.178.310.364
Total	**4.052.975.658.920**

a. Rincian Saham yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013			
	Total Saham (Lembar)	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai tercatat Rp
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	8.058.434	61.112.379.633	(6.315.031.077)	54.797.348.556
Total JKK	**8.058.434**	**61.112.379.633**	**(6.315.031.077)**	**54.797.348.556**

b. Rincian Saham yang diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk Dijual adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2013		
	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	383.561.246.773	(139.939.768)	383.421.307.005
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	321.282.288.218	308.299.466	321.590.587.684
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	336.202.731.174	(45.911.694.477)	290.291.036.697
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	302.246.292.280	(24.103.124.234)	278.143.168.046
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	200.322.312.183	111.919.788	200.434.231.971
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	210.434.163.007	(18.834.313.284)	191.599.849.723
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	190.116.694.095	(2.469.213.457)	187.647.480.638
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	153.727.381.068	(43.214.789.053)	110.512.592.015
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	193.198.384.935	(107.345.102.470)	85.853.282.465
PT Timah (Persero) Tbk	49.761.677.211	(9.646.202.566)	40.115.474.645
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	43.075.436.548	(18.238.696.779)	24.836.739.769
	2.383.928.607.492	(269.482.856.834)	2.114.445.750.658
Pihak Ketiga			
PT Astra International Tbk	536.595.352.749	3.253.569.431	539.848.922.180
PT United Tractors Tbk	344.669.549.781	(27.342.059.116)	317.327.490.665
PT Adaro Energy Tbk	345.758.095.187	(138.788.723.245)	206.969.371.942
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	165.600.035.036	4.403.764.958	170.003.799.994
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	172.305.319.819	(30.312.218.100)	141.993.101.719
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	104.878.291.232	7.753.367.710	112.631.658.942
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	124.339.922.810	(37.880.108.733)	86.459.814.077
PT Vale Indonesia Tbk	149.922.433.145	(69.725.772.969)	80.196.660.176
PT Bumi Serpong Damai Tbk	90.986.049.975	(11.286.237.388)	79.699.812.587
PT Bank Central Asia Tbk	65.050.099.957	8.951.496.462	74.001.596.419
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	38.083.039.809	(12.116.342.564)	25.966.697.245
PT Kalbe Farma Tbk	19.494.059.274	4.999.021.878	24.493.081.152
PT Bank Danamon Tbk	21.993.820.157	(6.529.528.641)	15.464.291.516
PT Astra Agro Lestari Tbk	1.935.287.573	939.408.034	2.874.695.607
PT Leyand International Tbk	8.187.928.409	(5.544.397.237)	2.643.531.172
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	2.228.452.307	194.385.385	2.422.837.692
PT Unilever Indonesia Tbk	421.831.688	313.364.933	735.196.621
	2.192.449.568.908	(308.717.009.202)	1.883.732.559.706
Total	**4.576.378.176.400**	**(578.199.866.036)**	**3.998.178.310.364**

10. Reksadana

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKK per 1 Januari 2014 dalam bentuk unit penyertaan Reksadana yang diklasifikasikan dalam kelompok Nilai Wajar dengan rincian sebagai berikut.

	1 Januari 2014			
	Total Unit	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Panin Dana Maksima	1.547.293	90.181.559.211	--	90.181.559.211
Manulife Saham Andalan	49.666.461	77.687.782.120	--	77.687.782.120
Danareksa Mawar Konsumer 10	59.585.075	77.528.029.644	--	77.528.029.644
Schroder Dana Istimewa	14.392.931	76.868.904.646	--	76.868.904.646
BNP Paribas Solaris	24.362.234	44.621.380.593	--	44.621.380.593
BNP Paribas Ekuitas	2.898.094	41.816.682.886	--	41.816.682.886
BNP Paribas Pesona	2.055.434	41.341.682.437	--	41.341.682.437
Syailendra Equity Opportunity	12.810.433	37.973.837.315	--	37.973.837.315
Panin Dana Prima	9.595.993	27.270.455.496	--	27.270.455.496
Mandiri Investa Equity Movement	25.771.167	22.870.879.627	--	22.870.879.627
First State Indoequity Sectoral	5.016.142	22.518.013.502	--	22.518.013.502
Danareksa Mawar Fokus 10	10.194.385	13.049.075.173	--	13.049.075.173
Trim Kapital	832.381	5.938.482.513	--	5.938.482.513
Schroder Dana Prestasi Plus	37.055	793.826.708	--	793.826.708
Schroder Dana Prestasi	28.290	724.085.500	--	724.085.500
Dana Ekuitas Andalan	22.015	76.070.928	--	76.070.928
First State Multistrategy Fund	13.554	42.824.416	--	42.824.416
Total	**218.828.937**	**581.303.572.715**	**--**	**581.303.572.715**

Sesuai Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Program JKK, pada saat penerapan awal per 1 Januari 2014, aset investasi dalam kelompok Tersedia untuk Dijual dicatat pada nilai bawaannya (*deemed cost*). Nilai tercatat Reksadana posisi per 31 Desember 2013 yang disajikan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013		
	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Panin Dana Maksima	108.195.446.459	(18.013.887.248)	90.181.559.211
Manulife Saham Andalan	83.603.374.452	(5.915.592.332)	77.687.782.120
Danareksa Mawar Konsumer 10	90.239.577.492	(12.711.547.848)	77.528.029.644
Schroder Dana Istimewa	82.939.159.739	(6.070.255.093)	76.868.904.646
BNP Paribas Solaris	49.574.278.703	(4.952.898.110)	44.621.380.593
BNP Paribas Ekuitas	48.679.518.126	(6.862.835.240)	41.816.682.886
BNP Paribas Pesona	48.447.044.478	(7.105.362.041)	41.341.682.437
Syailendra Equity Opportunity	48.012.604.734	(10.038.767.419)	37.973.837.315
Panin Dana Prima	27.612.707.811	(342.252.315)	27.270.455.496
Mandiri Investa Equity Movement	29.043.400.803	(6.172.521.176)	22.870.879.627
First State Indoequity Sectoral	24.698.978.113	(2.180.964.611)	22.518.013.502
Danareksa Mawar Fokus 10	16.362.424.698	(3.313.349.525)	13.049.075.173
Trim Kapital	6.306.292.562	(367.810.049)	5.938.482.513
Schroder Dana Prestasi Plus	725.748.498	68.078.210	793.826.708
Schroder Dana Prestasi	702.852.465	21.233.035	724.085.500
Dana Ekuitas Andalan	79.427.129	(3.356.201)	76.070.928
First State Multistrategy Fund	37.080.564	5.743.852	42.824.416
Total	**665.259.916.826**	**(83.956.344.111)**	**581.303.572.715**

11. Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragunan Aset

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKK dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK-EBA) per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014		
	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Efek Beragunan Aset Danareksa BTN 03-KPR Kelas A 2012	44.390.501.674	--	44.390.501.674
Total	**44.390.501.674**	**--**	**44.390.501.674**

12. Sukuk

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKK per 1 Januari 2014 dalam bentuk sukuk yang diklasifikasikan dalam diukur pada yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014		
	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
Sukuk Korporasi			
PLN Sukuk VB /2010	29.003.000.000	--	29.003.000.000
Total Sukuk Korporasi	**29.003.000.000**	**--**	**29.003.000.000**
Pihak Ketiga			
Sukuk Korporasi			
Indosat Ijarah V tahun 2012	24.169.000.000	--	24.169.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	19.335.000.000	--	19.335.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	14.501.000.000	--	14.501.000.000
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II	9.668.000.000	--	9.668.000.000
	67.673.000.000	**--**	**67.673.000.000**
Total	**96.676.000.000**	**--**	**96.676.000.000**

13. Obligasi

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKK per 1 Januari 2014 dalam bentuk obligasi yang dikelompokan dalam Nilai Wajar dan yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Nilai Wajar	178.681.974.388
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	1.699.393.736.696
Total	**1.878.075.711.084**

a. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014				
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Medco Energi Internasional II/09 Seri B	idAA-	55.589.000.000	56.272.358.133	--	56.272.358.133
Obligasi Toyota Astra Financial Services III B Tahun 2013	idAAA	49.742.000.000	48.370.115.640	--	48.370.115.640
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri D	idAA+	46.518.000.000	44.426.132.058	--	44.426.132.058
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idAA-	24.169.000.000	24.784.270.233	--	24.784.270.233
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV/2010 Seri E	idAA+	4.834.000.000	4.829.098.324	--	4.829.098.324
Total		**180.852.000.000**	**178.681.974.388**	**--**	**178.681.974.388**

b. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo terdiri dari:

	1 Januari 2014			
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Pemerintah				
Pihak Berelasi				
Recap Bonds FR 0054	idAAA	88.791.000.000	4.331.938.217	93.122.938.217
Recap Bonds FR 0068	idAAA	55.895.000.000	(1.575.044.799)	54.319.955.201
FR058	idAAA	43.826.000.000	(2.781.810.825)	41.044.189.175
FR0065	idAAA	31.198.000.000	(6.183.466.543)	25.014.533.457
Recap Bonds FR 0052	idAAA	28.885.000.000	3.514.390.718	32.399.390.718
Recap Bonds FR 0040	idAAA	26.586.000.000	431.888.397	27.017.888.397
Recap Bonds FR 0071	idAAA	24.423.000.000	471.814.158	24.894.814.158
Recap Bonds FR 0027	idAAA	24.169.000.000	(1.296.932.132)	22.872.067.868
Recap Bonds FR 0031	idAAA	24.169.000.000	(4.104.190.230)	20.064.809.770
Recap Bonds FR 0045	idAAA	24.169.000.000	(4.999.931.772)	19.169.068.228
Recap Bonds FR 0046	idAAA	24.169.000.000	(5.182.978.323)	18.986.021.677
Recap Bonds FR 0034	idAAA	19.335.000.000	950.256.327	20.285.256.327
Recap Bonds FR 0042	idAAA	16.919.000.000	(2.362.410.869)	14.556.589.131
Recap Bonds FR 0044	idAAA	10.321.000.000	(2.972.851.462)	7.348.148.538
Recap Bonds FR 0032	idAAA	4.834.000.000	(159.753.476)	4.674.246.524
Recap Bonds FR 0035	idAAA	3.867.000.000	308.506.054	4.175.506.054
		451.556.000.000	(21.610.576.560)	429.945.423.440
Obligasi Korporasi				
Pihak Berelasi				
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	300.977.000.000	(3.290.642.467)	297.686.357.533
PLN VII /04	idAA+	87.493.000.000	497.705.095	87.990.705.095
Obl Berk. I Jasa Marga Thp IC 2013	idAA	50.203.000.000	--	50.203.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idAA-	38.670.000.000	--	38.670.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Obl Berk. I Danareksa IB 2012	idAA	32.275.000.000	96.352.152	32.371.352.152
Mandiri Tunas Finance VI C/2011	idAA	29.003.000.000	--	29.003.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA+	19.335.000.000	9.467.955	19.344.467.955
PLN VIII - A / 2006	idAA	16.435.000.000	226.830.741	16.661.830.741
Obligasi Berkelanjutan Mandiri Tunas Fin Thp I A/2013	idAA	12.386.000.000	--	12.386.000.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	12.085.000.000	9.715.048	12.094.715.048
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	967.000.000	32.016.129	999.016.129
		636.083.000.000	(2.418.555.347)	633.664.444.653

	1 Januari 2014			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga				
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	131.480.000.000	57.253.419	131.537.253.419
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAA+	72.508.000.000	--	72.508.000.000
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013	idA	60.021.000.000	--	60.021.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAA+	48.338.000.000	--	48.338.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	48.338.000.000	--	48.338.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	48.338.000.000	--	48.338.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idA	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Indofood V Tahun 2009	idAA+	29.003.000.000	156.252.842	29.159.252.842
Federal International Finance XI/2011 seri C	idA	26.586.000.000	--	26.586.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	idAAA	24.169.000.000	--	24.169.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri B	idA-	12.085.000.000	--	12.085.000.000
Obl Berk. I Danareksa IA 2012	idA-	11.924.000.000	--	11.924.000.000
Danareksa VB 2010	idAA+	11.601.000.000	--	11.601.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Seri A	idAA+	2.417.000.000	362.342	2.417.362.342
		635.570.000.000	213.868.603	635.783.868.603
Total		**1.723.209.000.000**	**(23.815.263.304)**	**1.699.393.736.696**

Sesuai Keputusan Direksi PT Jamsostek (Pesero) Nomor: KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Program JKK, pada saat penerapan awal per 1 Januari 2014, aset investasi dalam kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto dan Tersedia untuk Dijual dicatat pada nilai bawaannya (*deemed cost*). Nilai tercatat obligasi posisi per 31 Desember 2013 yang disajikan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013 Rp
Nilai Wajar melalui Laba Rugi	21.810.444.933
Tersedia untuk Dijual	156.871.529.455
Total	**178.681.974.388**

a. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013				
	Peringkat	Nilai Nominal	Biaya Perolehan	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp	Rp
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Medco Energi Internasional II/09 Seri B	idAA-	21.269.000.000	21.269.000.000	541.444.933	21.810.444.933
Total		**21.269.000.000**	**21.269.000.000**	**541.444.933**	**21.810.444.933**

b. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk Dijual adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013				
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
JKK					
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Obligasi Toyota Astra Financial Services III B Tahun 2013	idAAA	49.742.000.000	--	(1.371.884.360)	48.370.115.640
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri D	idAA+	46.518.000.000	--	(2.091.867.942)	44.426.132.058
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	34.320.000.000	--	141.913.200	34.461.913.200
Medco Energi Internasional II/09 Seri B	idAA-	24.169.000.000	--	615.270.233	24.784.270.233
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV/2010 Seri E	idAA+	4.834.000.000	--	(4.901.676)	4.829.098.324
Total		**159.583.000.000**	**--**	**(2.711.470.545)**	**156.871.529.455**

14. Utang Jaminan Kecelakaan Kerja

Akun ini merupakan saldo utang jaminan Program JKK atas penetapan klaim belum diambil peserta per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Jaminan yang Sudah Ditetapkan Tetapi Belum Dibayarkan	2.184.651.748
Jaminan Sudah Dibayarkan Tetapi Belum Dicairkan	23.522.291
Total	**2.208.174.039**

Jaminan yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan merupakan saldo liabilitas jaminan per 1 Januari 2014 atas jaminan yang telah ditetapkan oleh Kantor Cabang namun sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta.

Jaminan sudah dibayarkan tetapi belum dicairkan merupakan saldo per 1 Januari 2014 atas Jaminan Kecelakaan Kerja yang sudah dibayarkan tetapi belum dicairkan oleh peserta.

15. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Proses

Akun ini merupakan saldo liabilitas jaminan dalam proses Program JKK atas pengajuan klaim peserta yang belum disetujui/ditetapkan namun besaran klaim dapat diestimasi/disesuaikan berdasarkan pengajuan awal peserta per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Jaminan Kecelakaan Kerja	183.429.583
Jaminan Jasa Konstruksi	59.895.187
Total	**243.324.770**

Perhitungan cadangan teknis liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja dalam proses berdasarkan aktuaris internal BPJS Ketenagakerjaan dalam Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja tanggal 7 April 2014. Aktuaris melakukan perhitungan dengan menggunakan data liabilitas dalam proses sesuai laporan posisi keuangan PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013.

16. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan

Akun ini merupakan saldo liabilitas jaminan belum dilaporkan Program JKK atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported*/IBNR) per 1 Januari 2014 sebesar Rp 19.820.066.297.

Perhitungan cadangan teknis liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja belum dilaporkan berdasarkan aktuaris internal BPJS Ketenagakerjaan dalam Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja tanggal 7 April 2014. Metode perhitungan yang digunakan oleh aktuaria adalah *basic chain ladder* atau metode segitiga.

17. Iuran Belum Merupakan Pendapatan

Akun ini merupakan saldo iuran yang belum diakui sebagai pendapatan Program JKK karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode per 1 Januari 2014 sebesar Rp 796.451.994.950.

Iuran yang belum merupakan pendapatan ditentukan secara agregat dan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja.

Perhitungan cadangan teknis iuran belum merupakan pendapatan berdasarkan aktuaris internal BPJS Ketenagakerjaan dalam Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja tanggal 7 April 2014. Metode perhitungan yang digunakan oleh aktuaria sesuai dengan proporsi iuran dengan masa pertanggungan atau perlindungan yang belum diselesaikan atau dilalui pada tanggal valuasi.

Jumlah peserta Program JKK adalah sebanyak 12.244.367 peserta, dengan rata-rata usia 32,95 tahun dan masa kepesertaan 4,83 tahun.

Asumsi yang digunakan aktuaria adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rata - rata
Kenaikan Upah	10%
Kenaikan Biaya Perawatan dan Pengobatan	6%
Kenaikan Biaya Transportasi	4%
Dana Operasional	10%
Yield Surat Utang Negara (1 Tahun)	5,35%

18. Liabilitas Lain

Akun ini merupakan saldo liabilitas lain-lain Program JKK per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Iurang Belum Rinci	19.195.951.675
Iuran Diterima di Muka	703.325.020
Utang Investasi	234.776.654
Dana Pengembangan	80.038.730.454
Total	**100.172.783.803**

Iuran belum rinci merupakan penerimaan iuran yang belum didukung dengan upah tenaga kerja serta iuran yang belum jelas identitas penyetornya dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan iuran. Rincian iuran belum rinci adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014			
	IBR Program JKK	IBR Program LHK	Iuran Belum Jelas Penyetorannya	Total
Kantor Pusat	--	--	903.178.269	903.178.269
Kantor Wilayah I	182.910.006	278.837.784	21.590.872	483.338.663
Kantor Wllayah II	184.916.912	191.183.778	39.482.484	415.583.174
Kantor Wllayah III	5.906.150.946	335.051.588	224.212.768	6.465.415.302
Kantor Wllayah IV	1.411.177.410	657.640.484	222.876.945	2.291.694.840
Kantor Wllayah V	419.405.595	602.173.274	--	1.021.578.869
Kantor Wilayah VI	2.135.171.321	423.986.338	61.611.024	2.620.768.682
Kantor Wilayah VII	507.474.029	942.817.522	68.778.476	1.519.070.027
Kantor Wllayah VIII	111.550.012	474.618.943	44.850.387	631.019.342
Kantor Wllayah IX	737.290.941	422.772.655	1.241.852	1.161.305.448
Kantor Wllayah X	1.043.789.569	290.280.262	2.635.644	1.336.705.475
Kantor Wllayah XI	64.754.187	274.804.679	6.734.717	346.293.583
Total	**12.704.590.929**	**4.894.167.308**	**1.597.193.438**	**19.195.951.675**

19. Aset Neto

Akun ini merupakan saldo aset neto Program JKK per 1 Januari 2014 adalah sebesar Rp 7.206.756.228.791.

Sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/461/122013 tentang Pedoman Akuntansi Program JKK, terdapat kebijakan pada saat penerapan awal Per 1 Januari 2014, yaitu:

a. Aset investasi dalam kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto dan Tersedia untuk Dijual dicatat pada nilai bawaannya (*deemed cost*) dan selisih penilaian efek menjadi saldo awal aset neto.
b. Pehitungan cadangan teknis mengacu pada jangka pendek dan selisih perhitungan menjadi saldo awal aset neto.

Rincian atas kebijakan diatas adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Selisih Penilaian Efek	
Saham	(578.199.866.036)
Reksadana	(83.956.344.111)
Obligasi	(2.711.470.545)
	(664.867.680.692)
Selisih Perhitungan Cadangan Teknis	7.805.344.365.673
Selisih Perhitungan Liabilitas Belum Dilaporkan	66.279.543.810
Total	**7.206.756.228.791**

20. Adopsi Standar Baru Maupun Revisi Standar dan Intepretasi (Revisi atas PSAK dan ISAK)

a. Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2014:

- ISAK No. 27 : Pengalihan Aset dari pelanggan
- ISAK No. 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Selama Periode Berjalan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menetapkan Pedoman Akuntansi Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

21. Manajemen Risiko

a. Organisasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada Program JKK saat ini berada dibawah tanggung jawab Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan. Terkait dengan pengelolaan Risiko, Biro Manajemen Risiko dipantau oleh Komite Manajemen Risiko yang merupakan perangkat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Pada dasarnya pengelolaan risiko adalah tanggung jawab seluruh unit kerja (divisi, biro, kantor wilayah dan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan). Aktifitas operasional antara lain melakukan proses pengidentifikasian, pengukuran, monitoring dan pelaporan risiko yang merupakan bagian dari aktivitas operasional semua unit kerja. Biro Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan mendesain/menetapkan kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko, memfasilitasi unit kerja BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan manajemen risiko dan memonitor pelaporan dan kesesuaian kerangka kerja/metodologi yang diterapkan unit kerja.

Aktifitas bisnis Program JKK meliputi pelayanan kepesertaan dan pengelolaan dana JKK. Terkait dengan aktifitas tersebut, Program JKK terekspos berbagai risiko yang meliputi risiko *counterpart*, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Khusus terkait dengan pengelolaan aset keuangan yang merupakan aset terbesar, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Program JKK yaitu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mentaati peraturan yang berlaku.

b. Manajemen Risiko *Counterpart*

Risiko *counterpart* adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada Program JKK.

Pihak ketiga dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional Program JKK. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti dan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta peserta Program JKK BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggungjawab Program JKK melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya default (gagal bayar). Pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset pada laporan posisi keuangan penutup pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014		
	Nilai Kotor	Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai Bersih
	Rp	Rp	Rp
Aset			
Bank	11.336.561.267	--	11.336.561.267
Deposito	1.358.214.000.000	--	1.358.214.000.000
Piutang Iuran	104.627.047.934	(60.744.328.201)	43.882.719.733
Saham	4.052.975.658.920	--	4.052.975.658.920
Reksadana	581.303.572.715	--	581.303.572.715
KIK - EBA	44.390.501.674	--	44.390.501.674
Sukuk	96.676.000.000	--	96.676.000.000
Obligasi			
Obligasi Republik Indonesia	429.945.423.440	--	429.945.423.440
Korporasi	1.448.130.287.644	--	1.448.130.287.644

c. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki Program JKK. Secara umum Program JKK memiliki risiko bunga atas nilai wajar dan risiko harga.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur Program JKK terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Risiko ini terkait dengan koreksi harga instrumen saham, obligasi dan reksadana akibat pengaruh perubahan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan rebalancing secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan Program JKK.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat dari perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Exposure Program JKK terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Program JKK.

Program JKK menggunakan *Security Market Line* (SML) dan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga dan pergerakan suku bunga terhadap liabilitas dan ekuitas. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut antara lain adalah nilai IHSG dan *risk free rate* berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012.

Analisis sensitivitas suku bunga dan harga efek per 1 Januari 2014:

	1 Januari 2014 Rata - rata
Sensitivitas MTM: ∆100 poin IHSG	2,19%
SPE - Risiko Liabilitas	26,09%
SPE - Risiko Ekuitas	49,01%

* MTM; Mark to Market - SPE; Selisih Penilaian Efek

d. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki Program JKK maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi), maupun potensi peristiwa ketidakmampuan Program JKK memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset *liquid* yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi).

Risiko likuiditas yang terkait aktifitas operasional non-investasi terdapat dalam aktifitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, Program JKK relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih likuid dibandingkan dengan kewajibannya.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar per 1 Januari 2014:

	1 Januari 2014				
	Nilai Tercatat Rp	≤ 1 Bulan Rp	1 - 6 Bulan Rp	6 - 12 Bulan Rp	> 12 Bulan Rp
Aset Keuangan					
Deposito	1.358.214.000.000	259.723.479.442	861.719.017.329	236.761.024.225	10.479.004
Saham	4.052.975.658.920	1.540.143.528.352	1.420.434.621.529	1.092.397.509.039	--
Reksadana	581.303.572.715	146.393.121.524	341.084.991.772	93.825.459.418	--
KIK-EBA	44.390.501.674	--	--	--	44.390.501.674
Obligasi	1.878.075.711.084	118.221.257.063	61.801.294.004	57.963.689.391	1.640.089.470.625
Sukuk	96.676.000.000	1.507.936.736	1.802.376.522	--	93.365.686.742
Total	**8.011.635.444.393**	**2.065.989.323.117**	**2.686.842.301.156**	**1.480.947.682.073**	**1.777.856.138.045**
Liabilitas Keuangan					
Utang Jaminan Kecelakaan Kerja	2.208.174.039	2.208.174.039	--	--	--
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Proses	243.324.770	--	243.324.770	--	--
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan	86.099.610.107	--	--	--	86.099.610.107
Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan	1.254.676.485.092	--	**1.254.676.485.092**	--	--
Total	**1.343.227.594.008**	**2.208.174.039**	**1.254.919.809.862**	**--**	**86.099.610.107**

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitanya.

e. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/ upaya pencapaian kerja, baik terkait aktivitas investasi maupun non-investasi dalam kurun 1 (satu) tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum penyebab risiko operasional BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan SOP secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi (IT). Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Terkait dengan mitigasi risiko operasional dan risiko-risiko lainnya, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), pengembangan infrastruktur dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis COSO-ERM, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko korporasi sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*/RBA) disamping itu BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKK melalui sosialisasi, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai *risk-owner* memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan efektif.

22. Kontinjensi

Piutang Iuran dan Denda

Jumlah nilai dari piutang iuran serta denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih namun belum diakui pada laporan keuangan Program JKK dikarenakan Data Upah Siap Rekon (DUSR) belum diajukan oleh perusahaan peserta pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Piutang Iuran	52.225.856.429
Piutang Denda	13.255.308.979
Total	**65.481.165.408**

Piutang iuran dan Piutang denda diakui ketika DUSR diterima dari perusahaan peserta. Perusahaan tidak mencatatkan piutang iuran dan denda ketika tidak didukung oleh DUSR.

a. Piutang iuran yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Piutang Iuran	
Kantor Wilayah I	1.475.943.848
Kantor Wilayah II	3.132.163.039
Kantor Wilayah III	18.770.731.709
Kantor Wilayah IV	9.324.068.690
Kantor Wilayah V	1.164.465.433
Kantor Wilayah VI	3.994.714.987
Kantor Wilayah VII	6.364.504.119
Kantor Wilayah VIII	1.075.535.182
Kantor Wilayah IX	4.827.158.462
Kantor Wilayah X	1.509.400.623
Kantor Wilayah XI	587.170.335
Total	**52.225.856.429**

b. Piutang denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Denda Iuran	
Kantor Wilayah I	774.809.782
Kantor Wilayah II	584.740.399
Kantor Wilayah III	4.062.172.133
Kantor Wilayah IV	1.886.290.148
Kantor Wilayah V	553.441.716
Kantor Wilayah VI	1.299.710.127
Kantor Wilayah VII	1.439.680.026
Kantor Wilayah VIII	453.762.771
Kantor Wilayah IX	935.478.750
Kantor Wilayah X	929.869.685
Kantor Wilayah XI	335.353.444
Total	**13.255.308.979**

Perkara Hukum

Dalam melakukan kegiatan, Program JKK tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset, Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, terdiri atas:

a. Gugatan Sdr Abdul Rahmah R (Mantan Karyawan PT Dharma Henwa)
   Gugatan terkait Pelaporan data upah sebagian yang dilaporkan Perusahaan dalam program jamsostek, yang merugikan karyawan karena menerima santunan cacat tetap yang lebih kecil dari seharusnya. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan menetapkan Perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum. PT Dharma Henwa diharuskan membayar JKK sebesar Rp 41.082.047. Saat ini masih melakukan Kasasi Mahkamah Agung.

b. Kasus kepailitan PT Eight Oh Two Indonesia
   Pengajuan Tagihan Iuran perusahaan dalam proses pailit, kepesertaan Kacab Tanjung Priok, saat ini Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit dan masih dalam proses pemberesan harta pailit oleh pihak Kurator.

23. Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku Pada Tanggal 1 Januari 2014

Standar revisi yang wajib diterapkan untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai 1 Januari 2015 dan relevan dengan operasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PSAK 1 (revisi 2013) "Penyajian laporan keuangan"
- PSAK 4 (revisi 2013) "Laporan keuangan tersendiri"
- PSAK 15 (revisi 2013) "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama"
- PSAK 24 (revisi 2013) "Irnbalan kerja"
- PSAK 65 "Laporan keuangan konsolidasian"
- PSAK 66 "Pengaturan bersama"
- PSAK 67 "Pengungkapan kepentingan dalams entitas lain"
- PSAK 68 "Pengukuran nilai wajar"

24. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Program JKK melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	Negara Republik Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, Penitipan Surat Berharga, Rekening Kustodi
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, Co Branding
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - KIK-EBA, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Deposito
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Timah (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Danareksa (Persero)	Penempatan Investasi - Reksadana, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi

25. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Program JKK yang tercatat dalam laporan keuangan pembuka.

	1 Januari 2014				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
INVESTASI					
Bank Investasi	--	--	2.892.879.555	2.892.879.555	2.892.879.555
Deposito	--	--	1.358.214.000.000	1.358.214.000.000	1.358.214.000.000
Saham	4.052.975.658.920	--	--	4.052.975.658.920	4.052.975.658.920
Reksadana	581.303.572.715	--	--	581.303.572.715	581.303.572.715
KIK EBA	--	44.390.501.674	--	44.390.501.674	44.390.501.674
Sukuk	--	96.676.000.000	--	96.676.000.000	96.676.000.000
Obligasi	178.681.974.388	1.699.393.736.696	--	1.878.075.711.084	1.878.075.711.084
NON INVESTASI					
Bank	--	--	8.443.681.712	8.443.681.712	8.443.681.712
Piutang Iuran	--	--	43.882.719.733	43.882.719.733	43.882.719.733
Piutang Investasi	--	--	31.318.626.797	31.318.626.797	31.318.626.797
Piutang Hasil Investasi	--	--	27.479.220.460	27.479.220.460	27.479.220.460
Total	**4.812.961.206.023**	**1.840.460.238.370**	**1.472.231.128.257**	**8.125.652.572.650**	**8.125.652.572.650**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:
- Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, sukuk, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
- Nilai wajar dari saham, reksadana, sukuk, dan obligasi dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada Catatan 3.b, 9, 10, 11, dan 13.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Program JKK untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:
i. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
ii. Tingkat 2: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
iii. Tingkat 3: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

	1 Januari 2014			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan				
Saham	4.052.975.658.920	--	--	4.052.975.658.920
Reksadana	581.303.572.715	--	--	581.303.572.715
Sukuk	--	96.676.000.000	--	96.676.000.000
Obligasi	--	1.878.075.711.084	--	1.878.075.711.084
Total	**4.634.279.231.635**	**1.974.751.711.084**	**--**	**6.609.030.942.719**

26. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Pembuka

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas isi dan penyusunan laporan keuangan pembuka Program JKK yang diotorisasi untuk terbit tanggal 17 April 2014.

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

Laporan Keuangan Pembuka
Per 1 Januari 2014

d1/April 24, 2014 Paraf:

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Pembuka
Per 1 Januari 2014

Laporan Posisi Keuangan Pembuka 1

Catatan atas Laporan Keuangan Pembuka 2

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN PEMBUKA

Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	1 Januari 2014 Rp
ASET		
Bank	3.b, 3.l, 4	29.021.570.363
Piutang Iuran - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	3.b, 3.c, 5	14.805.779.387
Piutang Investasi	3.b, 3.c, 6	10.011.670.581
Piutang Hasil Investasi	3.b, 3.c, 7	8.302.141.675
Deposito	3.b, 3.l, 8	446.090.000.000
Saham	3.b, 3.l, 9	1.213.894.320.841
Reksadana	3.b, 3.l, 10	138.385.558.335
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragunan Aset	3.b, 11	3.976.815.202
Sukuk	3.b, 12	30.215.000.000
Obligasi	3.b, 3.l, 13	569.025.237.670
TOTAL ASET		**2.463.728.094.054**
LIABILITAS DAN ASET NETO		
LIABILITAS		
Utang Jaminan Kematian	3.d, 14	5.183.800.000
Cadangan Teknis		
Liabilitas Jaminan Kematian dalam Proses	3.e, 15	3.255.404
Liabilitas Jaminan Kematian Belum Dilaporkan	3.f, 16	117.788.586.106
Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan	3.g, 17	351.109.127.810
Liabilitas Lain	3.h, 18	39.867.924.227
TOTAL LIABILITAS		**513.952.693.547**
ASET NETO	3.i, 19	**1.949.775.400.507**
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		**2.463.728.094.054**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian penutup secara keseluruhan

D1/April 24, 2014

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMBUKA
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan posisi keuangan pembuka Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan Program JKM disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian penutup PT Jamsostek (Persero), Entitas Anak dan Bertujuan Khusus yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2. Gambaran Program Jaminan Kematian

2.a Pembentukan Program Jaminan Kematian

Program Jaminan Kematian ("Program JKM") dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 18 yang menyebutkan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi :

- Jaminan Kesehatan;
- Jaminan Kecelakaan Kerja;
- Jaminan Hari Tua;
- Jaminan Pensiun;dan
- Jaminan Kematian.

Program JKM sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 6 ayat 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

2.b Kepesertaan dan Iuran

Peserta Program JKM adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Peserta Program JKM terdiri atas:

- Peserta penerima gaji atau upah.
- Peserta bukan penerima gaji atau upah.

Iuran tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja, dengan pembagian sebagai berikut:

- Bagi pekerja penerima gaji atau upah, iuran proporsional terhadap upah atau penghasilan dan iuran seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja.
- Bagi pekerja bukan penerima gaji atau upah, besar iuran ditetapkan oleh pemerintah.

2.c Tujuan dan Manfaat Program JKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 31, tujuan penyelenggaraan Program JKM adalah untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Manfaat program JKM berupa santunan kematian dan biaya pemakaman yanng dibayarkan sekaligus diberikan kepada alhi waris. Urutan ahli waris yang berhak menerima manfaat Jaminan Kematian meliputi:

a. Janda atau duda atau anak
b. Apabila point a tidak ada maka diberikan kepada:
    - Keturunan sedarah tenaga kerja menurut garis lurus kebawah dan ke atas sampai derajat kedua (bapak, ibu, cucu, kakek dan nenek);
    - Saudara kandung;
    - Mertua;dan

- Apabila tidak ada ahli waris yang sah maka biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak yang mengurus pemakaman dan santunan Kecelakaan Kerja dikembalikan ke dana jaminan sosial untuk peningkatan manfaat bagi peserta.

2.d Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan susunan sebagai berikut

- Susunan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM pada 1 Januari 2014 sebagai berikut:

	1 Januari 2014
Dewan Pengawas	
Ketua Dewan Pengawas	Mulabasa Hutabarat
Anggota Dewan Pengawas	Iskandar Maula
Anggota Dewan Pengawas	Hariyadi B Sukamdani
Anggota Dewan Pengawas	Bambang Wirahyoso
Anggota Dewan Pengawas	Mathias Tambing
Anggota Dewan Pengawas	Nina Sapti Triaswati
Anggota Dewan Pengawas	H.M. Saleh Khalid

- Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014
Dewan Direksi	
Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur Keuangan	Herdy Trisanto
Direktur Investasi	Jeffry Haryadi
Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi	Agus Supriyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	Amri Yusuf
Direktur Pelayanan	Achmad Riadi
Direktur Kepesertaan	Junaedi

2.e Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko

Susunan Komite Audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014
Komite Audit	
Ketua	Bambang Wirahyoso
Anggota	Salim Siagian
Anggota	Rinaningsih

Susunan anggota Komite Manajemen Risiko Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 adalah Endi Roswendi.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

3.a. Dasar Penyusunan, Pengukuran dan Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Program Jaminan Kematian. Pedoman Akuntansi Program JKM disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain:

a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;

c. *International Financial Reporting Standards; dan*
d. Peraturan perudang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Program JKM

Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Program Jaminan Kematian mulai diterapkan pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:
1) Penentuan aset investasi awal yang akan diukur pada nilai wajar dan yang akan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi sesuai persyaratan sesuai dengan kondisi pada tanggal tersebut;
2) Jumlah tercatat aset awal sesuai laporan posisi keuanga pembuka yang ditetapkan pemerintah;
3) Jumlah tercatat liabilitas awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah;dan
4) Jumlah tercatat aset neto awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah.

Laporan posisi keuangan pembuka merupakan laporan yang disusun untuk memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 62 ayat 2 (c) disebutkan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Laporan posisi keuangan pembuka Program JKM disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian penutup PT Jamsostek (Persero), Entitas Anak dan Bertujuan Khusus per 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh kantor akuntan independen dan telah disahkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK-50/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013 Perusahaan Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)..

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 49 ayat 2 disebutkan bahwa “Subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan”, dan dijelaskan kembali pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 40 ayat 2 disebutkan bahwa BPJS wajib memisahkan aset BPJS dengan aset Dana Jaminan Sosial. Untuk memenuhi ketentuan ini maka Laporan Posisi Keuangan Pembuka Jaminan Kematian disusun sesuai dengan Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber aset Program JKM berasal dari :
1) Iuran Program JKM termasuk bantuan iuran;
2) Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan Program JKM;
3) Pengalihan aset Program JKM yang menjadi hak peserta PT Jamsostek (Persero);dan
4) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Aset dan Liabilitas Program JKM PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset dan Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kematian BPJS Ketenagakerjaan telah ditetapkan dalam 3 (tiga) Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/04/012014 tentang Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap dijabarkan sebagai berikut:
1. Sumber Dana Program JKM terdiri dari
   a. Liabilitas kepada peserta Non JHT.
      - Utang Jaminan Non JHT;
      - Utang Jaminan Diestimasi Non JHT;
      - Utang Jaminan Belum Dilaporkan (IBNR); dan
      - Cadangan Teknis dan Katastrofa.
   b. Dana pengembangan Non JHT.
   c. Liabilitas pengelolaan program JHT.
      - Liabilitas Investasi; dan
      - Pendapatan diterima dimuka investasi.

d. IBR dan Iuran diterima dimuka.
e. Selisih Penilaian Efek (SPE) Non JHT.

2. Alokasi Aset Program JKM
   a. Kas dan setara Kas;
   b. Investasi;dan
   c. Turunan investasi (PYMHD, piutang jatuh tempo dan piutang investasi).

3. Alokasi Sumber Dana Program Jaminan Kematian
   Pengalokasian sumber dana program dilakukan dengan menggunakan persentase proporsi per program. Proporsi atas alokasi sumber dana digunakan untuk pos-pos kewajiban yang belum teridentifikasi dengan akun masing-masing program. Penggunaan proporsi atas alokasi sumber dana hanya dilakukan untuk program Non JHT, sedangkan untuk program JHT sudah dilakukan pemisahan terhadap aset dan liabilitasnya. Alokasi sumber dana Non JHT dialokasikan jumlah sumber dana untuk masing-masing program Non JHT (program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) berdasarkan persentase proporsi per program. Dasar persentase atas proporsi menggunakan beberapa asumsi, yaitu:
   a. Pendapatan iuran
      Proporsi atas pendapatan iuran digunakan untuk memisahkan IBR dan iuran diterima dimuka masing-masing program.
   b. Beban jaminan program paket
      Proporsi atas beban jaminan program paket digunakan untuk memisahkan utang jaminan (jaminan sudah ditetapkan tapi belum dibayar, jaminan dalam proses dan jaminan belum dilaporkan) serta cadangan teknis dan katastrofa Jasa Konstruksi ke Program JKM dan JKM.
   c. Iuran bersih
      Proporsi atas iuran bersaih digunakan untuk memisahkan dana pengembangan Non JHT dan liabilitas Non JHT masing-masing program. Proporsi atas pendapatan iuran, beban jaminan dan iuran bersih menggunakan data series selama 5 (lima) tahun.

4. Penentuan Aset Program Jaminan Kematian
   a. Aset Investasi terdiri dari Deposito, Saham, Obligasi dan Reksadana;dan
   b. Aset Non Investasi terdiri dari kas setara kas, bank investasi dan piutang iuran Program JKM.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan pembuka adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk penyertaan tertentu yang disajikan berdasarkan metode ekuitas serta investasi pada saham, obligasi, dan reksadana yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Investasi dalam kelompok ini disajikan sebesar nilai wajarnya.

Laporan posisi keuangan pembuka telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual.

Mata uang penyajian dan fungsional dalam laporan keuangan konsolidasian penutup ini adalah mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Program JKM telah disajikan sesuai PSAK 45 (Revisi 2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

3.b. Instrumen Keuangan

Pengembangan Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pengembangan aset Program JKM dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan dalam penempatan instrumen investasi dalam negeri. Instrumen investasi tersebut meliputi:

a. Deposito Berjangka
   Yang termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada bank paling tinggi 15% dari jumlah investasi untuk setiap bank.
b. Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase.

c. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase.

d. Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
   - Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Maksimal 50% dari Aset Bersih;dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

e. Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
   - Maksimal 50% dari Aset Bersih;dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

f. Reksadana
   - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
   - Maksimal 50% dari Aset Bersih;dan
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 15% dari jumlah investasi.

g. Repurchase agreement
   - Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA);
   - Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesi dan/atau Bank Indonesia;
   - Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;
   - Nilai repurchase agreement tidak lebih dari 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan;
   - Maksimal 50% dari Aset Bersih;dan
   - Setiap *counterpart* paling tinggi 2% dari jumlah investasi.

h. Efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset
   - Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.;
   - Maksimal 50% dari Aset Bersih;dan
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi.

Aset Keuangan

Klasifikasi Aset Keuangan antara lain adalah Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset pada saat awal pengakuannya.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar

Kategori ini terdiri dari dua sub kategori, yaitu aset keuangan untuk tujuan diperdagangkan (*trading*) dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (*Fair Value Option*).

Aset Keuangan yang masuk dalam kategori untuk diperdagangkan (*trading*) jika memiliki tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat (*short term profit taking*) dan aset keuangan yang merupakan bagian dari portofolio intrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Dalam hal pengertian diperdagangkan tersebut menggambarkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang, dan umumnya digunakan untuk tujuan memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek.

Aset Keuangan yang masuk dalam kategori diukur pada nilai wajar (*Fair Value Option*) jika menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena *FVO* mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan suatu pengukuran atau pengakuan yang akan timbul (*accounting mismatch*). *Accounting mismatch* bisa saja terjadi, sebagai contohnya adalah ketika terdapat liabilitas berdasarkan kontrak asuransi yang pengukurannya memasukkan informasi terkini (contoh cadangan teknis) namun aset keuangan terkait tidak diukur pada nilai wajar.

Aset Keuangan Dimiliki hingga Jatuh Tempo
Kategori ini memiliki dua sub kategori, yaitu aset keuangan Nonderivatif dengan pembayaran tetap/telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, kategori kedua adalah entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Penilaian intensi dan kemampuan entitas untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo, tidak hanya ketika pertama kali diakui, tetapi juga pada setiap tanggal pelaporan keuangan. Sedangkan entitas tidak memiliki intensi positif jika belum menetapkan periode kepemilikan investasi, bermaksud untuk menjual sewaktu-waktu (selain dalam situasi yang tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya) sebagai reaksi terhadap perubahan suku bunga atau risiko pasar, kebutuhan likuiditas, perubahan ketersediaan dan tingkat pengembalian investasi alternatif, perubahan sumber dan syarat pembiayaan, atau perubahan risiko mata uang asing dan pihak penerbit memiliki hak untuk menyelesaikan pada suatu jumlah yang secara signifikan lebih rendah dari harga perolehan yang diamortisasi.

Entitas tidak memiliki kemampuan untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo jika tidak memiliki sumber daya keuangan yang tersedia untuk melanjutkan pendanaan investasi tersebut hingga jatuh tempo.

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Kategori ini memiliki dua sub kategori, antara lain adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan aset keuangan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan Awal
Aset keuangan diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan sesuai dalam perjanjian. Untuk aset keuangan yang diperoleh di bursa efek dicatat dengan menggunakan tanggal perdagangan (*trading date*).

Pengukuran
Pengukuran aset keuangan Program Jaminan Kematian dibagi atas pengukuran awal dan pengukuran selanjutnya. Masing-masing pengukuran memiliki kategori sebagai berikut:

	Nilai Wajar	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pengukuran Awal	- Diukur sebesar nilai wajar (harga beli) - Biaya transaksi diakui sebagai beban tahun berjalan	- Diukur sebesar harga perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi) - Biaya transaksi adalah biaya tambahan selain harga beli yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perolehan.
Pengukuran Selanjutnya	- Diukur dengan nilai wajar - Kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui sebagai selisih penilaian investasi	- Diukur pada harga perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Komponen harga perolehan adalah diskonto, premium dan biaya transaksi. - Instrumen utang, sebelum diukur pada nilai wajar, dilakukan amortisasi antara biaya perolehan dan nilai par (nominal) dengan menggunakan suku bunga efektif dan diakui sebagai pendapatan bunga. - Metode suku bunga efektif adalah metode yg digunakan untuk menghitung harga perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi) yg diamortisasi dari aset keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yg relevan. - Suku bunga efektif adalah suku bunga yg secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan. - Saat menghitung suku bunga efektif, Program JKK mengestimasi arus kas dengan mempertimbangakan seluruh persyaratan konraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangakan kerugian di masa depan.
		- Bagian bunga yg terjadi diantara tanggal pembayaran bunga terakhir dan tanggal pembelian (accrued interest) diamortisasi sampai dengan pembayaran bunga yang pertama kali.

Perhitungan Suku Bunga Efektif adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{PV} = \frac{CF}{(1+i)^1} + \frac{CF}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{CF}{(1+i)^t}$$

PV	*Present value*	Nilai wajar yang merupakan nilai kini dari aset keuangan yg diperoleh.
CF	*Cash flow*	Arus kas bersih yg akan diterima berdasarkan ketentuan perjanjian.
i	*Interest*	Suku bunga efektif
t	*Time*	Jangka waktu

Penurunan Nilai

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan. Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang. Penurunan nilai atas aset keuangan dalam kategori Nilai Wajar tidak ada pengujian penurunan nilai. Sedangkan untuk kategori yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang dilakukan pengujian penurunan nilai.

Pembalikan Penurunan Nilai

Ketentuan pembalikan penurunan nilai tidak diterapkan pada aset keuangan dalam kategori Nilai Wajar seperti halnya tidak diterapkannya ketentuan penurunan nilai pada aset keuangan dalam kategori Nilai Wajar. Sedangkan dalam kategori yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang pembalikan penurunan nilai tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat melebihi nilai tercatat pada tanggal pemulihan apabila sebelumnya tidak terjadi penurunan nilai. Jumlah pembalikan penurunan nilai dalam yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang diakui sebagai keuntungan tahun berjalan.

Hirarki Nilai Wajar

Hirarki Nilai Wajar yang digunakan dalam kategori Nilai Wajar adalah harga kuotasi pasar aktif dan teknik penilaian. Pasar aktif yaitu harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Harga kuotasi pasar yang sesuai untuk aset keuangan yaitu harga penawaran (*bid price*) di pasar.

Sukuk

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atas aset berwujud tertentu, manfaat atas aset berwujud tertentu dan jasa baik yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu atau kegiatan investasi yang telah ditentukan.

SUKUK	Nilai Wajar	Biaya Perolehan
Klasifikasi	Model usaha entitas bertujuan tidak untuk memperoleh arus kas kontraktual atau persyaratan kontraktual tidak menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil (mudharabah) atau imbalan (ijarah)	Model usaha entitas bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual menetukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil (mudharabah) atau imbalan (ijarah)
Reklasifikasi	Tidak dapat direklasifikasikan ke kategori diukur pada biaya perolehan, kecuali terjadi perubahan model usaha.	
Pengakuan dan Penghentian Pengakuan	Diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan dalam perjanjian.	
	Dihentikan pengakuannya ketika berakhirnya hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari sukuk.	
Pengukuran Awal	Diukur pada nilai wajar (harga beli). Biaya transaksi yang terjadi diakui sebagai beban	Diukur pada biaya perolehan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi
Pengukuran Selanjutnya	Diukur pada nilai wajar. Kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui sebagai selisih penilaian investasi	Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus
Penurunan Nilai	Tidak ada pengujian penurunan nilai	Dilakukan pengujian penurunan nilail, kecuali jumlah terpulihkan dihitung sebesar jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

SUKUK	Nilai Wajar	Biaya Perolehan
Pembalikan Penurunan Nilai	Tidak diterapkan	Mengacu pada ketentuan atas aset keuangan
Hirarki Nilai Wajar	Harga Kuotasi Pasar Aktif	
	Teknik penilaian nilai wajar yang digunakan adalah penggunaan harga transaksi wajar paling kini dan referensi nilai wajar intrumen lain yang secara substansi sama.	

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa suatu kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain atau dengan kondisi yang berpotensi merugikan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dan diukur pada harga perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif. Pengakuan dan penghentian pengakuan atas liabilitas keuangan diakui pada entitas terkait dengan ketentuan dalam perjanjian.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Penghentian liabilitas keuangan dilakukan ketika liabilitas keuangan diselesaikan, dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Manajemen mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Keuangan	**Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar**	Aset Keuangan untuk Tujuan Diperdagangkan	Saham Reksadana Sukuk Obligasi
		Aset Keuangan yang Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar	Saham Reksadana Sukuk Obligasi
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Aset Keuangan Nonderivatif dengan Pembayaran Tetap atau telah Ditentukan Jatuh Temponya	KIK-EBA Sukuk Obligasi
		Entitas Mempunyai Intensi Positif dan Kemampuan untuk Memiliki Aset Keuangan Hingga Jatuh Tempo	KIK-EBA Sukuk Obligasi
	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	Aset Keuangan Nonderivatif dengan Pembayaran Tetap atau telah Ditentukan	Bank Deposito Piutang Iuran Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi
		Tidak Mempunyai Kuotasi di Pasar Aktif	

Liabilitas Keuangan	**Harga Perolehan Diamortisasi dengan Metode Suku Bunga Efektif**	Utang Jaminan Liabilitas Jaminan Dalam Proses Liabilitas Jaminan Belum dilaporkan Iuran yang Belum merupakan Pendapatan
		Liabilitas Lain

3.c. Piutang

Piutang terdiri dari Piutang Iuran, piutang investasi, dan piutang hasil investasi.

Piutang Iuran

Piutang iuran Program JKM adalah iuran Program JKM yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima pelunasannya sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan. Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011), piutang iuran yang masih harus diterima dan dicatat dalam laporan keuangan ketika memiliki kemungkinan untuk adanya keuntungan ekonomis di masa mendatang kepada Program JKM dan dapat diukur secara andal. Program JKM menetapkan bahwa piutang yang memenuhi kriteria andal adalah piutang yang telah mendapat persetujuan perusahaan peserta, sedangkan piutang iuran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai aset kontinjensi.

Klasifikasi Piutang Iuran Program JKM adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi Umur Piutang sebagai berikut :

Klasifikasi	Umur Tunggakan
Lancar	0 bulan < x ≤ 1 bulan
Kurang Lancar	2 bulan < x ≤ 3 bulan
Macet	di atas 3 bulan

2. Piutang Iuran diakui sebesar Data Upah Siap Rekonsiliasi (DUSR) yang telah mendapat persetujuan dari perusahaan, apabila tidak tersedia DUSR maka dapat digunakan Iuran Terakhir Rekonsiliasi Final (ITRF) sebagai dasar perhitungan surat pemberitahuan yang sudah dicetak. Piutang iuran yang dihitung berdasarkan data ITRF maksimum 3 bulan belum membayar iuran.

3. Direktorat Operasional dan Pelayanan harus melakukan evaluasi atas kriteria perusahaan strategis dan bukti obyektif penurunan nilai (penyisihan) secara periodik pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Keuangan untuk dilakukan (penyisihan) penurunan nilai.

Berikut disajikan persentase penyisihan piutang iuran per 1 Januari 2014 sebagai berikut:

Kategori	1 Januari 2014	
	Umur	%
Lancar	0-1 bulan	1,53%
Kurang Lancar	2-3 bulan	16,81%
Macet	> 3 bulan	56,84%

Perubahan pengakuan piutang iuran dan penentuan penyisihan piutang iuran sebagai bagian dari penerapan ketentuan transisi atas PSAK No. 50 dan 55 (Revisi 2006) sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Edisi 4.

Piutang Investasi

Piutang Investasi merupakan piutang yang timbul karena pelepasan investasi.

Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi Program JKM terdiri dari:

a. Piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka/obligasi;dan
b. Piutang yang timbul dari pendapatan dividen, baik yang berasal dari saham, reksadana dan bagi hasil sukuk.

3.d. Utang Jaminan Kematian

Utang Jaminan Kematian merupakan kewajiban yang timbul karena terjadinya peristiwa kematian, atas diri tertanggung (peserta) yang sudah ditetapkan dan disetujui namun pada tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta. Utang jaminan ini merupakan klaim jaminan yang telah ditetapkan dan disetujui namun pada tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta. Utang Jaminan Kematian diakui pada saat penetapan jaminan telah disetujui sebesar jumlah yang ditetapkan untuk dibayarkan kepada ahli waris.

3.e. Liabilitas Jaminan Kematian Dalam Proses

Liabilitas Jaminan Kematian dalam proses merupakan jumlah klaim atas jaminan yang diajukan oleh peserta namun belum disetujui atau belum ditetapkan dan dapat diestimasi berdasarkan jumlah klaim yang diajukan. Liabilitas jaminan dalam proses ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria.

3.f. Liabilitas Jaminan Kematian Belum Dilaporkan

Liabilitas Jaminan Kematian belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*/IBNR) adalah estimasi jumlah klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan sampai akhir periode pelaporan. Liabilitas ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Atas jumlah estimasi jumlah klaim yang telah dibentuk, dilakukan tes kecukupan liabilitas dengan menggunakan estimasi kini (*current estimate*). Estimasi jumlah Liabilitas Jaminan Kematian belum dilaporkan diakui pada akhir periode berdasarkan data historis minimal selama 3 tahun. Liabilitas Jaminan Kematian belum dilaporkan disajikan dalam pos cadangan teknis dalam kelompok liabilitas.

3.g. Iuran Yang Belum Merupakan Pendapatan

Iuran yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari iuran yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggunannya masih berjalan pada akhir periode. Program JKM merupakan program asuransi jangka pendek karena masa pertanggungan kurang dari satu tahun. Iuran yang belum merupakan pendapatan disajikan dalam pos cadangan teknis dalam kelompok liabilitas. Iuran yang belum merupakan pendapatan diakui pada saat pembentukannya sebesar jumlah yang dibentuk berdasarkan perhitungan aktuaria.

3.h. Liabilitas Lain

Liabilitas lainnya adalah liabilitas yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos liabilitas dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Iuran Belum Rinci

Penerimaan iuran dari perusahaan yang belum didukung dengan data upah tidak dapat diakui sebagai pendapatan iuran atau penambah utang JHT. Penerimaan iuran dimaksud akan dicatat pada akun "Iuran Belum Rinci" pada kelompok liabilitas kepada peserta.

3.i. Aset Neto

Merupakan aset Program JKM setelah dikurangi liabilitasnya. Aset neto program JKM tidak diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat karena pemberi sumber daya adalah penerima manfaat dari sumber daya tersebut, bukan pihak lain yang tidak menerima manfaat dari program JKM. Pada akhir periode pelaporan aset neto akan bertambah atau berkurang sebesar jumlah pendapatan setelah dikurangi beban selama periode pelaporan.

3.j. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:
1. Program JKK memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya;
3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:
1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas nya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

3.k. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan pembuka Program JKM mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Program JKM mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

<u>Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan</u>

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (*mark-to-model*). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers*, *money brokers*, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi provider info. Metode yang digunakan adalah metode Nelson Siegel Svensson. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow (DCF)* atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

3.l. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Program JKM menerapkan PSAK 7 (revisi 2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Program JKM telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan konsolidasian telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi. Pihak-pihak berelasi adalah:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);atau
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

4. Bank

Akun ini terdiri dari:

	1 Januari 2014 Rp
Bank	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.878.920.849
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.449.532.956
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.524.923.913
	20.853.377.718
Pihak Ketiga	
PT Bank Bukopin Tbk	5.244.612.373
PT Bank Pembangunan Daerah	2.293.278.271
PT Bank Agro Tbk	630.300.930
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.071
	8.168.192.645
Total Bank	**29.021.570.363**

5. Piutang Iuran

Akun ini merupakan saldo piutang iuran Program JKM per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Lancar	178.540.153
Kurang Lancar	6.138.447.063
Macet	23.194.496.923
Total	29.511.484.139
Penyisihan Penurunan Nilai	(14.705.704.752)
Total	**14.805.779.387**

6. Piutang Investasi

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari transaksi atas penjualan saham, yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya (T+3) dan akan selesai pada saat jatuh tempo (*outstanding transaction*). Saldo piutang investasi per 1 Januari 2014 adalah sebesar Rp 10.011.670.581.

7. Piutang Hasil Investasi

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima dan piutang pendapatan jatuh tempo atas bunga deposito sudah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal laporan belum diterima Program JKM yang dibuka per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Bunga Obligasi	6.323.078.106
Dividen Saham	971.022.487
Bunga Deposito	680.636.333
Bagi Hasil Sukuk	324.493.941
Bunga KIK - EBA	2.910.808
Total	**8.302.141.675**

8. Deposito

Akun ini merupakan penanaman dana per 1 Januari 2014 dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	173.960.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk	108.695.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	73.210.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.000.000.000
	378.865.000.000

	1 Januari 2014 Rp
Pihak Ketiga	
PT Bank Pembangunan Daerah	35.500.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	23.225.000.000
PT Bank Muamalat	5.500.000.000
PT Bank International Indonesia Tbk	3.000.000.000
	67.225.000.000
Total	**446.090.000.000**
Jangka Waktu Deposito On Call	3 - 12 bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	7,20%

9. Saham

Akun ini merupakan saldo penempatan dana Program JKM per 1 Januari 2014 dalam bentuk Saham yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014			
	Total Saham (Lembar)	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi				
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	8.220.829	115.913.684.668	--	115.913.684.668
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	44.239.317	95.114.530.646	--	95.114.530.646
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	19.301.734	85.892.716.526	--	85.892.716.526
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.902.183	69.437.025.120	--	69.437.025.120
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.568.130	57.075.034.611	--	57.075.034.611
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	12.082.111	56.483.870.462	--	56.483.870.462
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.541.410	54.490.535.968	--	54.490.535.968
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	3.372.157	34.227.390.841	--	34.227.390.841
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	24.616.526	26.832.013.033	--	26.832.013.033
PT Timah (Persero) Tbk	8.036.810	12.537.423.415	--	12.537.423.415
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	15.681.433	7.762.309.115	--	7.762.309.115
	166.562.640	615.766.534.405	--	615.766.534.405
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	26.793.625	182.196.650.683	--	182.196.650.683
PT United Tractors Tbk	5.219.759	99.175.423.485	--	99.175.423.485
PT Adaro Energy Tbk	58.835.622	63.542.471.852	--	63.542.471.852
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	2.616.947	51.946.391.308	--	51.946.391.308
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	23.028.035	43.983.547.511	--	43.983.547.511
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	5.325.725	34.883.499.064	--	34.883.499.064
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	939.699	26.781.430.540	--	26.781.430.540
PT Vale Indonesia Tbk	9.829.071	25.064.130.700	--	25.064.130.700
PT Bumi Serpong Damai Tbk	18.834.962	24.108.751.221	--	24.108.751.221
PT Bank Central Asia Tbk	2.447.562	23.374.213.595	--	23.374.213.595
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	10.404.435	8.115.458.931	--	8.115.458.931
PT Kalbe Farma Tbk	5.944.443	7.371.109.573	--	7.371.109.573
PT Bank Danamon Tbk	1.288.828	4.833.106.184	--	4.833.106.184
PT Astra Agro Lestari Tbk	35.589	887.941.528	--	887.941.528
PT Leyand International Tbk	7.311.430	826.191.592	--	826.191.592
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	79.572	807.657.311	--	807.657.311
PT Unilever Indonesia Tbk	8.839	229.811.358	--	229.811.358
	178.944.143	598.127.786.436	--	598.127.786.436
Total	**345.506.783**	**1.213.894.320.841**	**--**	**1.213.894.320.841**

Sesuai Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Program JKM, pada saat penerapan awal per 1 Januari 2014, aset investasi dalam kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto dan Tersedia untuk Dijual dicatat pada nilai bawaannya (*deemed cost*). Nilai tercatat Saham posisi per 31 Desember 2013 yang disajikan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013 Rp
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	16.432.059.351
Tersedia Untuk Dijual	1.197.462.261.490
Total	**1.213.894.320.841**

a. Rincian Saham yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013			
	Total Saham (Lembar)	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai tercatat Rp
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	2.416.479	18.325.741.953	(1.893.682.602)	16.432.059.351
Total	**2.416.479**	**18.325.741.953**	**(1.893.682.602)**	**16.432.059.351**

b. Rincian Saham yang diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk Dijual adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2013		
	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	115.545.146.858	368.537.810	115.913.684.668
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	95.037.502.322	77.028.324	95.114.530.646
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	99.414.295.788	(13.521.579.262)	85.892.716.526
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75.918.502.909	(6.481.477.789)	69.437.025.120
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	57.559.989.045	(484.954.434)	57.075.034.611
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	61.715.350.271	(5.231.479.809)	56.483.870.462
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	53.659.390.655	831.145.313	54.490.535.968
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	47.620.499.154	(13.393.108.313)	34.227.390.841
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	60.380.936.380	(33.548.923.347)	26.832.013.033
PT Timah (Persero) Tbk	15.552.183.360	(3.014.759.945)	12.537.423.415
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	13.462.509.849	(5.700.200.734)	7.762.309.115
	695.866.306.591	(80.099.772.186)	615.766.534.405
Pihak Ketiga			
PT Astra International Tbk	164.439.436.681	1.325.154.651	165.764.591.332
PT United Tractors Tbk	107.720.728.287	(8.545.304.802)	99.175.423.485
PT Adaro Energy Tbk	106.317.258.617	(42.774.786.765)	63.542.471.852
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	50.423.320.939	1.523.070.369	51.946.391.308
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	53.400.756.677	(9.417.209.166)	43.983.547.511
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	32.409.115.261	2.474.383.803	34.883.499.064
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	38.554.967.234	(11.773.536.694)	26.781.430.540
PT Vale Indonesia Tbk	46.855.759.700	(21.791.629.000)	25.064.130.700
PT Bumi Serpong Damai Tbk	27.753.444.881	(3.644.693.660)	24.108.751.221
PT Bank Central Asia Tbk	20.398.239.371	2.975.974.224	23.374.213.595
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	11.902.220.086	(3.786.761.155)	8.115.458.931
PT Kalbe Farma Tbk	5.460.323.617	1.910.785.956	7.371.109.573
PT Bank Danamon Tbk	6.873.801.369	(2.040.695.185)	4.833.106.184
PT Astra Agro Lestari Tbk	561.630.297	326.311.231	887.941.528
PT Leyand International Tbk	2.559.000.504	(1.732.808.912)	826.191.592
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	739.044.173	68.613.138	807.657.311
PT Unilever Indonesia Tbk	131.858.214	97.953.144	229.811.358
	676.500.905.908	(94.805.178.823)	581.695.727.085
Total	**1.372.367.212.499**	**(174.904.951.009)**	**1.197.462.261.490**

10. Reksadana

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKM per 1 Januari 2014 dalam bentuk unit penyertaan Reksadana yang diklasifikasikan dalam kelompok Nilai Wajar dengan rincian sebagai berikut.

	1 Januari 2014			
	Total Unit	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Panin Dana Maksima	442.575	25.794.786.849	--	25.794.786.849
Danareksa Mawar Konsumer 10	17.917.140	23.312.559.315	--	23.312.559.315
Schroder Dana Istimewa	3.982.433	21.269.153.588	--	21.269.153.588
BNP Paribas Solaris	7.241.245	13.262.919.291	--	13.262.919.291
Syailendra Equity Opportunity	3.917.965	11.613.985.680	--	11.613.985.680
BNP Paribas Ekuitas	756.841	10.920.485.664	--	10.920.485.664
BNP Paribas Pesona	536.193	10.784.637.408	--	10.784.637.408
First State Indoequity Sectoral	1.508.413	6.771.430.326	--	6.771.430.326
Mandiri Investa Equity Movement	7.213.346	6.401.555.981	--	6.401.555.981
Danareksa Mawar Fokus 10	3.306.363	4.232.230.114	--	4.232.230.114
Trim Kapital	252.693	1.802.795.075	--	1.802.795.075
Panin Dana Prima	616.649	1.752.429.181	--	1.752.429.181
Schroder Dana Prestasi Plus	11.581	248.097.306	--	248.097.306
Manulife Saham Andalan	119.493	186.909.946	--	186.909.946
Dana Ekuitas Andalan	5.267	18.198.554	--	18.198.554
First State Multistrategy Fund	4.236	13.384.057	--	13.384.057
Total	**47.832.433**	**138.385.558.335**	**--**	**138.385.558.335**

Sesuai Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Program JKM, pada saat penerapan awal per 1 Januari 2014, aset investasi dalam kelompok Tersedia untuk Dijual dicatat pada nilai bawaannya (*deemed cost*). Nilai tercatat Reksadana posisi per 31 Desember 2013 yang disajikan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013		
	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
	Rp	Rp	Rp
Panin Dana Maksima	30.861.378.414	(5.066.591.565)	25.794.786.849
Danareksa Mawar Konsumer 10	27.155.043.888	(3.842.484.573)	23.312.559.315
Schroder Dana Istimewa	23.036.827.924	(1.767.674.336)	21.269.153.588
BNP Paribas Solaris	14.734.895.473	(1.471.976.182)	13.262.919.291
Syailendra Equity Opportunity	14.684.260.092	(3.070.274.412)	11.613.985.680
BNP Paribas Ekuitas	12.710.381.133	(1.789.895.469)	10.920.485.664
BNP Paribas Pesona	12.637.725.372	(1.853.087.964)	10.784.637.408
First State Indoequity Sectoral	7.427.141.419	(655.711.093)	6.771.430.326
Mandiri Investa Equity Movement	8.146.689.906	(1.745.133.925)	6.401.555.981
Danareksa Mawar Fokus 10	5.306.901.713	(1.074.671.599)	4.232.230.114
Trim Kapital	1.906.709.185	(103.914.110)	1.802.795.075
Panin Dana Prima	1.924.439.326	(172.010.145)	1.752.429.181
Schroder Dana Prestasi Plus	226.820.596	21.276.710	248.097.306
Manulife Saham Andalan	183.681.241	3.228.705	186.909.946
Dana Ekuitas Andalan	18.503.817	(305.263)	18.198.554
First State Multistrategy Fund	11.588.918	1.795.138	13.384.057
Total	**160.972.988.417**	**(22.587.430.083)**	**138.385.558.335**

11. Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragunan Aset

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKM dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK-EBA) per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014		
	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Efek Beragunan Aset Danareksa BTN 04-KPR Kelas A 2012	3.976.815.202	--	3.976.815.202
Total	**3.976.815.202**	**--**	**3.976.815.202**

12. Sukuk

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKM per 1 Januari 2014 dalam bentuk sukuk yang diklasifikasikan dalam diukur pada yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014		
	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
Sukuk Korporasi			
PLN Sukuk VB /2010	9.064.000.000	--	9.064.000.000
Total Sukuk Korporasi	**9.064.000.000**	**--**	**9.064.000.000**
Pihak Ketiga			
Sukuk Korporasi			
Indosat Ijarah V tahun 2012	7.554.000.000	--	7.554.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	6.043.000.000	--	6.043.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	4.533.000.000	--	4.533.000.000
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II	3.021.000.000	--	3.021.000.000
	21.151.000.000	**--**	**21.151.000.000**
Total	**30.215.000.000**	**--**	**30.215.000.000**

13. Obligasi

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKM per 1 Januari 2014 dalam bentuk obligasi yang dikelompokan dalam Nilai Wajar dan yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Nilai Wajar	55.206.338.803
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	513.818.898.867
Total	**569.025.237.670**

a. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014				
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Obligasi Toyota Astra Financial Services III B Tahun 2013	idAAA	15.409.000.000	14.984.019.780	--	14.984.019.780
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri D	idAA+	14.010.000.000	13.379.984.310		13.379.984.310
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	10.726.000.000	10.770.352.010	--	10.770.352.010
Medco Energi Internasional II/09 Seri B	idAA-	14.201.000.000	14.562.514.857	--	14.562.514.857
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV/2010 Seri E	idAA+	1.511.000.000	1.509.467.846	--	1.509.467.846
Total		**55.857.000.000**	**55.206.338.803**	**--**	**55.206.338.803**

b. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo terdiri dari:

	1 Januari 2014			
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Pemerintah				
Pihak Berelasi				
Recap Bonds FR 0054	idAAA	23.341.000.000	1.152.914.026	24.493.914.026
Recap Bonds FR 0068	idAAA	17.238.000.000	(485.175.270)	16.752.824.730
FR058	idAAA	11.416.000.000	(718.509.560)	10.697.490.440
FR0065	idAAA	8.859.000.000	(1.732.804.396)	7.126.195.604
Recap Bonds FR 0040	idAAA	8.309.000.000	134.979.338	8.443.979.338
Recap Bonds FR 0052	idAAA	7.963.000.000	976.035.998	8.939.035.998
Recap Bonds FR 0027	idAAA	7.554.000.000	(405.355.014)	7.148.644.986
Recap Bonds FR 0031	idAAA	7.554.000.000	(1.282.761.099)	6.271.238.901
Recap Bonds FR 0045	idAAA	7.554.000.000	(1.562.724.341)	5.991.275.659
Recap Bonds FR 0046	idAAA	7.554.000.000	(1.619.935.382)	5.934.064.618
Recap Bonds FR 0071	idAAA	7.432.000.000	144.775.961	7.576.775.961
Recap Bonds FR 0034	idAAA	6.043.000.000	296.995.034	6.339.995.034
Recap Bonds FR 0042	idAAA	5.287.000.000	(738.227.216)	4.548.772.784
Recap Bonds FR 0044	idAAA	3.226.000.000	(929.214.109)	2.296.785.891
Recap Bonds FR 0032	idAAA	1.511.000.000	(49.935.354)	1.461.064.646
Recap Bonds FR 0035	idAAA	1.209.000.000	96.453.018	1.305.453.018
		132.050.000.000	(6.722.488.366)	125.327.511.634
Obligasi Korporasi				
Pihak Berelasi				
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	91.851.000.000	(1.000.480.131)	90.850.519.869
PLN VII /04	idAA+	27.344.000.000	155.546.709	27.499.546.709
Obl Berk. I Jasa Marga Thp IC 2013	idAA	13.569.000.000	--	13.569.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idAA-	12.086.000.000	--	12.086.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	11.331.000.000	--	11.331.000.000
Mandiri Tunas Finance VI C/2011	idAA	9.064.000.000	--	9.064.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	6.043.000.000	2.959.134	6.045.959.134
PLN VIII - A / 2006	idAA+	5.136.000.000	70.885.469	5.206.885.469
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	3.777.000.000	3.036.304	3.780.036.304
Obligasi Berkelanjutan Mandiri Tunas Fin Thp I A/2013	idAA	3.124.000.000	--	3.124.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	302.000.000	9.998.832	311.998.832
		183.627.000.000	(758.053.683)	182.868.946.317

	1 Januari 2014			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga				
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAA+	41.092.000.000	17.893.653	41.109.893.653
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAA+	22.661.000.000	--	22.661.000.000
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013	idA	18.117.000.000	--	18.117.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAA+	15.107.000.000	--	15.107.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	15.107.000.000	--	15.107.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	15.107.000.000	--	15.107.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAA+	11.331.000.000	--	11.331.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	11.331.000.000	--	11.331.000.000
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	11.331.000.000	--	11.331.000.000
Indofood V Tahun 2009	idAA+	9.064.000.000	48.832.044	9.112.832.044
Obl Berk. I Danareksa IB 2012	idA	8.339.000.000	28.601.884	8.367.601.884
Federal International Finance XI/2011 seri C	idA-	8.309.000.000	--	8.309.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	idAAA	7.554.000.000	--	7.554.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri B	idA-	3.777.000.000	--	3.777.000.000
Danareksa VB 2010	idAA+	3.626.000.000	--	3.626.000.000
Obl Berk. I Danareksa IA 2012	idA	2.918.000.000	--	2.918.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Seri A	idAA+	756.000.000	113.335	756.113.335
		205.527.000.000	95.440.916	205.622.440.916
Total		**521.204.000.000**	**(7.385.101.133)**	**513.818.898.867**

Sesuai Keputusan Direksi PT Jamsostek (Pesero) Nomor: KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Program JKM, pada saat penerapan awal per 1 Januari 2014, aset investasi dalam kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto dan Tersedia untuk Dijual dicatat pada nilai bawaannya (*deemed cost*). Nilai tercatat obligasi posisi per 31 Desember 2013 yang disajikan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013
	Rp
Nilai Wajar melalui Laba Rugi	6.816.212.679
Tersedia untuk Dijual	48.390.126.124
Total	**55.206.338.803**

a. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013				
	Peringkat	Nilai Nominal	Biaya Perolehan	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp	Rp
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Medco Energi Internasional II/09 Seri B	idAA-	6.647.000.000	6.647.000.000	169.212.679	6.816.212.679
Total		**6.647.000.000**	**6.647.000.000**	**169.212.679**	**6.816.212.679**

b. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk Dijual adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013				
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi Rp	Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Obligasi Toyota Astra Financial Services III B Tahun 2013	idAAA	15.409.000.000	--	(424.980.220)	14.984.019.780
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri D	idAA+	14.010.000.000	--	(630.015.690)	13.379.984.310
Agung Podomoro Land I 2011 seri A	idA	10.726.000.000	--	44.352.010	10.770.352.010
Medco Energi Internasional II/09 Seri B	idAA-	7.554.000.000	--	192.302.178	7.746.302.178
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV/2010 Seri E	idAA+	1.511.000.000	--	(1.532.154)	1.509.467.846
Total		**49.210.000.000**	**--**	**(819.873.876)**	**48.390.126.124**

14. Utang Jaminan Kematian

Akun ini merupakan saldo utang jaminan Program JKM atas penetapan klaim belum diambil peserta per 1 Januari 2014 sebesar Rp 5.183.800.000.

Jaminan yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan merupakan saldo liabilitas jaminan per 1 Januari 2014 atas jaminan yang telah ditetapkan oleh Kantor Cabang namun sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta.

15. Liabilitas Jaminan Kematian Dalam Proses

Akun ini merupakan saldo liabilitas jaminan dalam proses Program JKM atas pengajuan klaim peserta yang belum disetujui/ditetapkan namun besaran klaim dapat diestimasi/disesuaikan berdasarkan pengajuan awal peserta per 1 Januari 2014 sebesar Rp 3.255.404.

Perhitungan cadangan teknis liabilitas Jaminan Kematian dalam proses berdasarkan aktuaris internal BPJS Ketenagakerjaan dalam Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja tanggal 7 April 2014. Aktuaris melakukan perhitungan dengan menggunakan data liabilitas dalam proses sesuai laporan posisi keuangan PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013.

16. Liabilitas Jaminan Kematian Belum Dilaporkan

Akun ini merupakan saldo liabilitas jaminan belum dilaporkan Program JKM atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported*/IBNR) per 1 Januari 2014 sebesar Rp 117.788.586.106.

Perhitungan cadangan teknis liabilitas Jaminan Kematian belum dilaporkan berdasarkan aktuaris internal BPJS Ketenagakerjaan dalam Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja tanggal 7 April 2014. Metode perhitungan yang digunakan oleh aktuaria adalah *basic chain ladder* atau metode segitiga.

17. Iuran Belum Merupakan Pendapatan

Akun ini merupakan saldo iuran yang belum diakui sebagai pendapatan Program JKM karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode per 1 Januari 2014 sebesar Rp 351.109.127.810.

Iuran yang belum merupakan pendapatan ditentukan secara agregat dan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah iuran untuk Program Jaminan Kematian.

Perhitungan cadangan teknis iuran belum merupakan pendapatan berdasarkan aktuaris internal BPJS Ketenagakerjaan dalam Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja tanggal 7 April 2014. Metode perhitungan yang digunakan oleh aktuaria sesuai dengan proporsi iuran dengan masa pertanggungan atau perlindungan yang belum diselesaikan atau dilalui pada tanggal valuasi.

Jumlah peserta Program JKK adalah sebanyak 12.244.287 peserta, dengan rata-rata usia 32,95 tahun dan masa kepesertaan 4,83 tahun.

Asumsi yang digunakan aktuaria adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rata - rata
Kenaikan Upah	10%
Dana Operasional	10%
Yield Surat Utang Negara (1 Tahun)	5,35%

18. Liabilitas Lain

Akun ini merupakan saldo liabilitas lain-lain Program JKM per 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Iuran Belum Rinci	8.976.546.936
Iuran Diterima di Muka	328.893.830
Utang Investasi	70.317.236
Dana Pengembangan	30.492.166.225
Total	**39.867.924.227**

Iuran belum rinci merupakan penerimaan iuran yang belum didukung dengan upah tenaga kerja serta iuran yang belum jelas identitas penyetornya dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan iuran. Rincian iuran belum rinci adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014			
	IBR Program Jamsostek Rp	IBR Program LHK Rp	Iuran Belum Jelas Penyetorannya Rp	Total Rp
Kantor Pusat	--	--	422.350.622	422.350.622
Kantor Wilayah I	85.533.673	130.392.101	10.096.476	226.022.250
Kantor Wllayah II	86.472.157	89.402.713	18.463.079	194.337.949
Kantor Wllayah III	2.761.876.154	156.679.198	104.847.963	3.023.403.315
Kantor Wllayah IV	659.904.780	307.530.503	104.223.296	1.071.658.579
Kantor Wllayah V	196.125.416	281.592.533	--	477.717.949
Kantor Wilayah VI	998.463.942	198.267.495	28.810.984	1.225.542.421
Kantor Wilayah VII	237.308.601	440.887.010	32.162.678	710.358.289
Kantor Wllayah VIII	52.163.807	221.944.673	20.973.256	295.081.736
Kantor Wllayah IX	344.777.214	197.699.945	580.723	543.057.882
Kantor Wllayah X	488.104.274	135.742.913	1.232.498	625.079.685
Kantor Wllayah XI	30.280.812	128.506.111	3.149.336	161.936.259
Total	**5.941.010.830**	**2.288.645.195**	**746.890.911**	**8.976.546.936**

19. Aset Neto

Akun ini merupakan saldo aset neto Program JKM per 1 Januari 2014 adalah sebesar Rp 1.949.775.400.507.

Sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/461/122013 tentang Pedoman Akuntansi Program JKM, terdapan kebijakan pada saat penerapan awal Per 1 Januari 2014, yaitu:

a. Aset investasi dalam kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto dan Tersedia untuk Dijual dicatat pada nilai bawaannya (*deemed cost*) dan selisih penilaian efek menjadi saldo awal aset neto.
b. Pehitungan cadangan teknis mengacu pada jangka pendek dan selisih perhitungan menjadi saldo awal aset neto.

Rincian atas kebijakan diatas adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Selisih Penilaian Efek	
Saham	(174.904.951.009)
Reksadana	(819.873.876)
Obligasi	(22.587.430.083)
	(198.312.254.968)
Selisih Perhitungan Cadangan Teknis	2.205.440.564.779
Selisih Perhitungan Liabilitas Belum Dilaporkan	(57.352.909.304)
Total	**1.949.775.400.507**

20. Adopsi Standar Baru Maupun Revisi Standar dan Intepretasi (Revisi atas PSAK dan ISAK)

a. Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2014:

- ISAK No. 27 : Pengalihan Aset dari pelanggan
- ISAK No. 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Selama Periode Berjalan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menetapkan Pedoman Akuntansi Program Jaminan Kematian yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

21. Manajemen Risiko

a. Organisasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada Program JKM saat ini berada dibawah tanggung jawab Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan. Terkait dengan pengelolaan Risiko, Biro Manajemen Risiko dipantau oleh Komite Manajemen Risiko yang merupakan perangkat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Pada dasarnya pengelolaan risiko adalah tanggung jawab seluruh unit kerja (divisi, biro, kantor wilayah dan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan). Aktifitas operasional antara lain melakukan proses pengidentifikasian, pengukuran, monitoring dan pelaporan risiko yang merupakan bagian dari aktivitas operasional semua unit kerja. Biro Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan mendesain/menetapkan kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko, memfasilitasi unit kerja BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan manajemen risiko dan memonitor pelaporan dan kesesuaian kerangka kerja/metodologi yang diterapkan unit kerja.

Aktifitas bisnis Program JKM meliputi pelayanan kepesertaan dan pengelolaan dana JKM. Terkait dengan aktifitas tersebut, Program JKM terekspos berbagai risiko yang meliputi risiko *counterpart*, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Khusus terkait dengan pengelolaan aset keuangan yang merupakan aset terbesar, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Program JKM yaitu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mentaati peraturan yang berlaku.

b. Manajemen Risiko *Counterpart*

Risiko *counterpart* adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada Program JKM.

Pihak ketiga dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional Program JKM. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti dan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta peserta Program JKM BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggungjawab Program JKM melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya default (gagal bayar). Pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset pada laporan posisi keuangan penutup pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014		
	Nilai Kotor	**Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai**	**Nilai Bersih**
Aset			
Deposito Berjangka	446.090.000.000	--	446.090.000.000
Piutang Iuran	29.511.484.139	(14.705.704.752)	14.805.779.387
Saham	1.213.894.320.841	--	1.213.894.320.841
Reksadana	138.385.558.335	--	138.385.558.335
KIK - EBA	3.976.815.202	--	3.976.815.202
Obligasi			
Korporasi	443.697.726.035	--	443.697.726.035
Obligasi Republik Indonesia	125.327.511.635	--	125.327.511.635
Sukuk	30.215.000.000	--	30.215.000.000

c. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki Program JKM. Secara umum Program JKM memiliki risiko bunga atas nilai wajar dan risiko harga.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur Program JKM terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Risiko ini terkait dengan koreksi harga instrumen saham, obligasi dan reksadana akibat pengaruh perubahan tingkat suku bunga.

BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan rebalancing secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan Program JKM.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat dari perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Exposure Program JKM terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Program JKM.

Program JKM menggunakan *Security Market Line* (SML) dan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga dan pergerakan suku bunga terhadap liabilitas dan ekuitas. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut antara lain adalah nilai IHSG dan *risk free rate* berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012.

Analisis sensitivitas suku bunga dan harga efek per 1 Januari 2014:

	1 Januari 2014 Rata - rata
Sensitivitas MTM: ∆100 poin IHSG	2,19%
SPE - Risiko Liabilitas	26,09%
SPE - Risiko Ekuitas	49,01%

* MTM; Mark to Market - SPE; Selisih Penilaian Efek

d. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki Program JKM maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi), maupun potensi peristiwa ketidakmampuan Program JKM memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset *liquid* yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi).

Risiko likuiditas yang terkait aktifitas operasional non-investasi terdapat dalam aktifitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, Program JKM relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih likuid dibandingkan dengan kewajibannya.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar per 1 Januari 2014:

	1 Januari 2014				
	Nilai Tercatat	≤ 1 Bulan	1 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan
Aset Keuangan					
Deposito	446.090.000.000	85.303.234.206	283.021.848.133	77.761.475.950	3.441.710
Saham	1.213.894.320.841	461.283.669.008	425.430.021.127	327.180.630.706	--
Obligasi	569.025.237.670	35.819.045.261	18.724.748.849	17.562.019.432	496.919.424.129
Sukuk	30.215.000.000	471.288.722	563.312.576	--	29.180.398.702
Reksadana	138.385.558.335	34.850.454.753	81.198.945.339	22.336.158.243	--
KIK-EBA	3.976.815.202	--	--	--	3.976.815.202
Total	**2.401.586.932.048**	**617.727.691.949**	**808.938.876.023**	**444.840.284.332**	**530.080.079.743**

	1 Januari 2014				
	Nilai Tercatat	≤ 1 Bulan	1 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan
Liabilitas Keuangan					
Utang Jaminan Kecelakaan Kerja	5.183.800.000	5.183.800.000	--	--	--
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Proses	3.255.404	--	3.255.404	--	--
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan	117.788.586.106	--	--	--	117.788.586.106
Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan	351.109.127.810	--	--	--	351.109.127.810
Total	**474.084.769.320**	**5.183.800.000**	**3.255.404**	**--**	**468.897.713.916**

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitanya.

e. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/ upaya pencapaian kerja, baik terkait aktivitas investasi maupun non-investasi dalam kurun 1 (satu) tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum penyebab risiko operasional BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan SOP secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi (IT). Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Terkait dengan mitigasi risiko operasional dan risiko-risiko lainnya, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), pengembangan infrastruktur dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis COSO-ERM, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko korporasi sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*/RBA) disamping itu BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM melalui sosialisasi, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai risk-owner memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan efektif.

22. Kontinjensi

Piutang Iuran dan Denda

Jumlah nilai dari piutang iuran serta denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih namun belum diakui pada laporan keuangan Program JKM dikarenakan Data Upah Siap Rekon (DUSR) belum diajukan oleh perusahaan peserta pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Piutang Iuran	21.867.414.441
Piutang Denda	5.548.483.439
Total	**27.415.897.880**

Piutang iuran dan Piutang denda diakui ketika DUSR diterima dari perusahaan peserta. Perusahaan tidak mencatatkan piutang iuran dan denda ketika tidak didukung oleh DUSR.

a. Piutang iuran yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Piutang Iuran	
Kantor Wilayah I	800.790.360
Kantor Wilayah II	1.022.939.684
Kantor Wilayah III	8.668.156.286
Kantor Wilayah IV	3.909.679.422
Kantor Wilayah V	634.014.184
Kantor Wilayah VI	1.885.878.455
Kantor Wilayah VII	1.676.937.026
Kantor Wilayah VIII	411.300.383
Kantor Wilayah IX	1.723.811.233
Kantor Wilayah X	953.684.802
Kantor Wilayah XI	180.222.607
Total	**21.867.414.441**

b. Piutang denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014 Rp
Denda Iuran	
Kantor Wilayah I	324.324.333
Kantor Wilayah II	244.763.998
Kantor Wilayah III	1.700.367.365
Kantor Wilayah IV	789.574.174
Kantor Wilayah V	231.662.815
Kantor Wilayah VI	544.040.137
Kantor Wilayah VII	602.629.542
Kantor Wilayah VIII	189.938.629
Kantor Wilayah IX	391.578.073
Kantor Wilayah X	389.230.199
Kantor Wilayah XI	140.374.172
Total	**5.548.483.439**

Perkara Hukum

Dalam melakukan kegiatan, Program JKM tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset, Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan adalah Kasus kepailitan PT Eight Oh Two Indonesia. Atas kasus ini pengajuan Tagihan Iuran perusahaan dalam proses pailit, kepesertaan Kacab Tanjung Priok, saat ini Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit dan masih dalam proses pemberesan harta pailit oleh pihak Kurator.

23. Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku Pada Tanggal 1 Januari 2014

Standar revisi yang wajib diterapkan untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai 1 Januari 2015 dan relevan dengan operasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PSAK 1 (revisi 2013) “Penyajian laporan keuangan”
- PSAK 4 (revisi 2013) “Laporan keuangan tersendiri”
- PSAK 15 (revisi 2013) “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama”
- PSAK 24 (revisi 2013) “Irnbalan kerja”
- PSAK 65 “Laporan keuangan konsolidasian”
- PSAK 66 “Pengaturan bersama”
- PSAK 67 “Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain”
- PSAK 68 “Pengukuran nilai wajar”

24. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Program JKM melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	Negara Republik Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, Penitipan Surat Berharga, Rekening Kustodi
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, Co Branding
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - KIK-EBA, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Deposito
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Timah (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Danareksa (Persero)	Penempatan Investasi - Reksadana, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi

25. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Program JKM yang tercatat dalam laporan keuangan pembuka.

	1 Januari 2014				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
INVESTASI					
Bank Investasi				--	--
Deposito	--	--	446.090.000.000	446.090.000.000	446.090.000.000
Saham	1.213.894.320.841	--	--	1.213.894.320.841	1.213.894.320.841
Reksadana	138.385.558.335	--	--	138.385.558.335	138.385.558.335
KIK EBA	--	3.976.815.202	--	3.976.815.202	3.976.815.202
Sukuk	--	30.215.000.000	--	30.215.000.000	30.215.000.000
Obligasi	55.206.338.803	513.818.898.867	--	569.025.237.670	569.025.237.670
NON INVESTASI					
Bank	--	--	29.021.570.363	29.021.570.363	29.021.570.363
Piutang Iuran	--	--	14.805.779.387	14.805.779.387	14.805.779.387
Piutang Investasi	--	--	10.011.670.581	10.011.670.581	10.011.670.581
Piutang Hasil Investasi	--	--	8.302.141.675	8.302.141.675	8.302.141.675
Total	**1.407.486.217.979**	**548.010.714.069**	**508.231.162.006**	**2.463.728.094.054**	**2.463.728.094.054**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:
- Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, sukuk, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
- Nilai wajar dari saham, reksadana, sukuk, dan obligasi dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada Catatan 3.b, 9, 10, 11, dan 13.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Program JKM untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:
i. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
ii. Tingkat 2: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
iii. Tingkat 3: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

	1 Januari 2014			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan				
Saham	1.213.894.320.841	--	--	1.213.894.320.841
Reksadana	138.385.558.335	--	--	138.385.558.335
Sukuk	--	30.215.000.000	--	30.215.000.000
Obligasi	--	569.025.237.670	--	569.025.237.670
Total	**1.352.279.879.176**	**599.240.237.670**	**--**	**1.951.520.116.846**

26. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Pembuka

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas isi dan penyusunan laporan keuangan pembuka Program JKM yang diotorisasi untuk terbit tanggal 17 April 2014.

KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG PT JAMSOSTEK (PERSERO)

DAFTAR NAMA KANTOR, STATUS KELAS KANTOR, ALAMAT, TELEPON DAN FAXIMILE BPJS KETENAGAKERJAAN SELURUH INDONESIA					
No	NAMA KANTOR	STATUS KANTOR	ALAMAT KANTOR	TELEPON	FAXIMILE
	KANTOR PUSAT	PUSAT	JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 79 JAKARTA SELATAN	021 - 5207797	021 - 5202310
1	KANWIL SUMBAGUT		JL. KAPTEN PATTIMURA NO. 334 LANTAI II MEDAN 20153 P.O. BOX 1479	061 -4532818 061 - 4536184	061 - 4155037
*	MEDAN	CABANG I	JL. KAPTEN PATTIMURA NO. 334 LANTAI 1 MEDAN 20153 P.O. BOX 1479	061 - 4155674 HUNTING	061 - 4564344 061 - 4147342
*	PEMATANG SIANTAR	CABANG II	JL SAKTI LUBIS NO. 5 PEMATANGSIANTAR PO BOX 156 - KODE POS 20116	0622 - 22438	0622 - 23265
*	KISARAN	CABANG II	JL. SISINGAMARAJA NO. 460 KISARAN 21214 PO BOX 11	0623 - 43992 0623 - 347136	0623 - 41862
*	SIBOLGA	CABANG III	JL. R. SUPRAPTO NO. 89 SIBOLGA	0631 - 21712 0631 - 24094	0631 - 21934
*	TANJUNG MORAWA	CABANG II	JL. RAYA MEDAN - TANJUNG MORAWA KM 14,5 TANJUNG MORAWA	061 - 7941709 061 - 7941882	061 - 7941712
*	LHOKSEUMAWE	CABANG II	JL. T. HAMZAH BENDAHARA P.O. BOX 15 LHOKSEUMAWE 24531	0645 - 43635 0645 - 45873	0645 - 43135
*	BANDA ACEH	CABANG III	JL. TGK. M. DAUD BEUREU'EH NO. 152 BANDA ACEH, 23126 PO BOX 105	0651 - 23045	0651 - 33551
*	MEULABOH	CABANG III	JL. SWADAYA NO. 23 DESA UJUNG BAROH MEULABOH	0655 - 7006043 0655 - 7006044	0655 - 7000914
*	LANGSA	CABANG III	JL. JEND. AHMAD YANI GAMPONG BARO LANGSA	0641 - 21886	0641 - 20628
*	BELAWAN	CABANG II	JL.YOS SUDARSONO NO.101 MEDAN	061-6628841 061-6631291	061-6628842
*	BINJAI	CABANG III	JL. SOEKARNO - HATTA NO. 469, KM 18 BINJAI TIMUR, BINJAI	061-8820465 061-8820466	061 - 882 9766
2	KANWIL SUMBARRIAU		JL. ARIFIN ACHMAD KOMPLEK PERKANTORAN MEGA ASRI GREEN OFFICE RUKAN A11-A12 PEKANBARU - RIAU	0761 - 8415841	0761 - 8415842
*	SUMATERA BARAT	CABANG II	JL. VETERAN NO. 47A PADANG - SUMATERA BARAT	0751 - 22985	0751 - 22987
*	BATAM I	CABANG I	JL. IMAM BONJOL GD. GRAHA NAGOYA MAS LT. 1 NAGOYA - BATAM 29432	0778 - 458324	0778 - 452993

No	NAMA KANTOR	STATUS KANTOR	ALAMAT KANTOR	TELEPON	FAXIMILE
*	BATAM II	CABANG II	JL GAJAH MADA KOMP. PERTOKOAN TIBAN IMPIAN BLOK A1 NO. 1-3 TIBAN - BATAM 29432	0778 - 7496442 0778 - 7496443	0778 - 7496441
*	BUKITTINGGI	CABANG III	JL NAWAWI NO. 05 BUKITTINGGI	0752 - 35199 0752 - 626590	0752 - 33720
*	R I A U I	CABANG I	JL. TENGKU ZAINAL ABIDIN NO. 26 PEKANBARU 28112 - RIAU	0761 - 33257 0761 - 37384 0761 - 27036	0761 - 27035 0761 - 33245
*	RIAU II	CABANG III	JL. H.R SOEBRANTAS NO. 41 A-B PEKANBARU - RIAU	0761 - 61707 0761 - 65116	0761 - 65121
*	SOLOK	CABANG III	JL. SYECH KUTUT NO. 72 KOTA SOLOK - 27324	0755 - 325692	0755 - 20613
*	TANJUNG PINANG	CABANG II	JL. ENGKU PUTRI NO. 3 TANJUNG PINANG 29112 KEPULAUAN RIAU	0771 - 315057	0771 - 21929
*	RENGAT	CABANG II	JL. SULTAN NO. 68 RENGAT, KAB. INDRAGIRI HULU RIAU 293123	0769 - 21168	0769 - 21677
*	DURI	CABANG III	JL. JAWA NO. 4 DURI 28784 - RIAU	0765 - 598133 0765 - 92187	0765 - 92198
*	DUMAI	CABANG III	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 131 DUMAI - RIAU	0765 - 36728	0765 - 32794
3	KANWIL SUMBAGSEL		JL. BASUKI RAHMAT NO. 1303 A-B RT. 20 RW. 008 KEL. 20 ILIR II KEC. KEMUNING KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN 30126	0711 - 350309	0711 - 350348
*	PALEMBANG	CABANG I	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 131 RT. 30 RW. 08 KEL. 20 ILIR I KEC. ILIR TIMUR 1 PALEMBANG SUMATERA SELATAN 30126	0711 - 310017	0711 - 362033
*	BENGKULU	CABANG II	JL. P. NATADIRJA NO. 8 KM. 7,5 RT. 06 RW. 02 KEL. JALAN GEDANG KEC. GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU 38225	0736 - 20451 0736 - 343385	0736 - 20007
*	JAMBI I	CABANG II	JL. SLAMET RIYADI NO.16 KELURAHAN SOLOK SIPINKEC. TELANAI PURA KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI 37212	0741 - 61918 0741 - 63356 0741 - 65775 0741 - 667796 0741 - 667753 0741 - 66243	0741-62737
*	JAMBI II	CABANG III	JL. LINTAS SUMATERA KM. 1 RUKO NO. 6-7 RT. 08 RW. 03 KEL. MANGGIS KEC. BATHIN 3 SIMPANG JAMBI-MUARA BUNGO JAMBI	0747 - 22295	0747 - 323016

No	NAMA KANTOR	STATUS KANTOR	ALAMAT KANTOR	TELEPON	FAXIMILE
*	MUARA ENIM	CABANG II	JL. JEND. AHMAD YANI NO. 54 B MUARA ENIM	0734 - 423300 0734 - 422301	0734 - 421821
*	PANGKAL PINANG	CABANG II	JL. JEND SUDIRMAN NO.9 RT. 05 RW. 02 KEL. GABEK 1 KEC. PANGKALBALAM KOTA PANGKAL PINANG PROVINSI BANGKA BELITUNG 3311	0717 - 431415	0717 - 431216
*	LAMPUNG I	CABANG I	JL. DRS. WARSITO NO. 4 RT. 003 RW. 005 KEL. TALANG KEC. TELUK BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG 35229	0721 - 486036 0721 - 486783	0721 - 486051
*	LAMPUNG II	CABANG III	JL. NEGARA NO. 11 KEL. YUKUM JAYA KEC. TERBANGGI BESAR, KAB. LAMPUNG TENGAH	0725 - 527567	0724-26765
4	KANWIL DKI JAKARTA		MENARA JAMSOSTEK LT. 8 TOWER B JL. GATOT SUBROTO NO. 38 KAV. 71-73 PANCORAN JAKARTA SELATAN	021 - 5229291 021 - 5229306 021 - 5229314	021 - 5229321 021 - 5229331
*	SALEMBA	CABANG I	JL. SALEMBA RAYA NO. 65 JAKARTA SELATAN	021 - 3908573 021 - 3914440 021 - 3905226 021 - 3905227	021 - 3905229
*	RAWAMANGUN	CABANG I	JL PEMUDA KAV. 10 N0. 90 JAKARTA TIMUR 13220	021 - 47868141 - 43	021 - 47867071 021 - 4755690
*	GROGOL	CABANG I	JL. DAAN MOGOT NO. 95C GEDUNG BANK LIPPO LT. 3 JAKARTA BARAT 11510	021 - 5664269 021 - 5659123 021 - 5604074 021 - 5665331	021 - 5664268
*	TANJUNG PRIOK	CABANG I	KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT GADING INDAH BLOK I NO. 5 S/D 8 KELAPA GADING JAKARTA UTARA	021 - 4530123 021 - 45846876 (Indo - Net)	021-45842723 021-45842724
*	PULOGADUNG	CABANG II	JL. PULO AYANG RAYA BLOK OR 1 GD. ASTRA AGRO LESTARI GROUND FLOOR, KAWASAN INDUSTRI PGADUNG	021 - 4616641	021 - 4616648 021 - 4616649
*	SETIABUDI	CABANG I	MENARA JAMSOSTEK LT. 2 JL. GATOT SUBROTO KAV 38 JAKARTA SELATAN	021 - 5279318 S/D 23	021 - 5279324
*	GAMBIR	CABANG I	JL. IR.H.JUANDA NO. 12 GEDUNG BANK DINAR LT. 3 JAKARTA PUSAT	021 - 3857701 021 - 3857775 021 - 3857702	021 - 3512176
*	CILANDAK	CABANG I	JL. RA. KARTINI KAV 13 CILANDAK BARAT JAKARTA SELATAN 12430	021 - 75917963 s/d 72	021 - 5917973 - 4

No	NAMA KANTOR	STATUS KANTOR	ALAMAT KANTOR	TELEPON	FAXIMILE
*	KEBAYORAN BARU	CABANG III	JL. DHARMAWANGSA III GRAND WIJAYA CENTRE BLOK G 18 - 19 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 12160	021 - 72333515 - 17 Hunting	021 - 72786022
*	KEBON SIRIH	CABANG I	JL. K.H. WAHID HASYIM NO. 94 JAKARTA PUSAT	021 - 3141709	021 - 3905119
*	PLUIT	CABANG II	JL. PLUIT SELATAN RAYA BLOK Q GEDUNG DE PLOEIT CENTRALE JAKARTA UTARA	021 - 29076501 / 02	021 - 29076506 / 7
*	CAWANG	CABANG II	GEDUNG CAWANG KENCANA LANTAI 6 SUITE 601 JL. MAYJEN SUTOYO KAV. 22 JAKARTA TIMUR 13630	021 - 8007971 021 - 8002659 021 - 80670144	021 - 8002659
*	GATOT SUBROTO I	CABANG I	DIPO BUSINESS CENTER JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 51-52 JAKARTA PUSAT	021 - 29866111 S/D 114	021 - 29866100
*	GATOT SUBROTO II	CABANG II	MAYAPADA TOWER II (LANTAI DASAR) JL. JEND. SUDIRMAN KAV 27 JAKARTA SELATAN	021-5289 21 02 S/D 05	528 92 103
*	GATOT SUBROTO III	CABANG III	MUTIARA BUILDING 4TH SUITE 403 JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.10	021 - 7975207 021 - 7975208	021 - 7975201
*	CILINCING	CABANG III	JL. RAYA PLUMPANG SEMPER NO. 6-7 JAKARTA UTARA	021 - 43901718 021 - 43901721 021 - 4304682 021 - 4304683	021 - 4304681
*	MANGGA DUA	CABANG III	JL MANGGA DUA RAYA GRANG BOUTIQUE CENTRE BLOK C NO. 5 JAKARTA 14430	021 - 6286534 021 - 6286535	021 - 6122663
5	KANWIL BANTEN		JL. A. YANI NO. 108 SERANG BANTEN	0254 - 229451 0254 - 267140	0254 - 228885
*	KALIDERES	CABANG III	JL. DAAN MOGOT KM 14 KOMP. NAGA SAKTI BLOK 6 D JAKARTA BARAT	021 - 54395596 021 - 54395598	021 - 54395696
*	TANGERANG I	CABANG I	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II KAV. 14 TANGERANG 15118 P.O. BOX 235	021 - 5587403 021 - 5524110	021 - 5527002 021 - 5589582
*	TANGERANG II	CABANG II	JL. GATOT SUBROTO, RUKO CIMONE JAYANO.101, 101A, 101B RT 01 RW.01 KELURAHAN CIMONE JAYA KEC. KARAWACI - TANGERANG	021 - 55764091 021 - 55764092	021 - 55764093

No	NAMA KANTOR	STATUS KANTOR	ALAMAT KANTOR	TELEPON	FAXIMILE
*	TANGERANG III	CABANG III	RUKO BSD SEKTOR IV BLOK RS JL. RINJANI III/5 NO. 38 SERPONG TANGERANG	021 - 53153735 021 - 53153736	021 - 53153740
*	TANGERANG IV	CABANG II	RUKO CITRA RAYA BLOK K1 NO. 28 CIKUPA - TANGGERANG	021 - 59401988 021 - 59401989	021 - 59402001
*	SERANG	TNABANG I	JL. JEND. A.YANI NO. 1154 SERANG 42118 P.O. BOX 65	0254 - 205155 0254 - 200794	0254 - 200031
6	KANWIL JABAR		JL. P. HASAN MUSTOFA NO. 39 BANDUNG 40124 PO BOX 1449	022 - 7102732 HUNTING	022 - 7200609
*	BANDUNG I	CABANG I	JL. P. H. HASAN MUSTOFA NO. 39 BANDUNG 40124 PO BOX 1449	022 - 7204486 022 - 7102733 HUNTING	022 - 7275570
*	BANDUNG II	CABANG II	JL. LODAYA NO. 42 S KOTA BANDUNG 40262	022 - 7322311 HUNTING	022 - 7322314
*	BOGOR I	CABANG I	JL. PEMUDA NO. 28 BOGOR	0251 - 8318179	0251 - 8313760 0251 - 8855716
*	BOGOR II	CABANG II	JL. RAYA CILEUNGSI KM 1 NO. 6 JONGGOL - BOGOR 16820	021 - 8230763 021 - 8230764	021 - 8230765
*	BEKASI	CABANG I	JL. PRAMUKA NO. 29 BEKASI 17141	021 - 8843909 021 - 88954262 021 - 88958073 021 - 88958076 021 - 8855716	021 - 8855716
*	KARAWANG	CABANG II	JL. TUPAREV NO. 390 (GEDUNG BANK TATA) KARAWANG 41312	0267 - 411439 0267 - 416376	0267 - 400966
*	CIKARANG	CABANG II	OFFICE PARK KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TAHAP II JL. CIKARANG BARU RAYA NO 12 CIKARANG	021-89113873 S/D 75	021-89113877 / 78
*	CIMAHI	CABANG II	GEDUNG SANGKURIANG PLASA LANTAI II JL SANGKURIANG NO. 19 - 23 CIMAHI	022-6644669 022-6644679	022-6626910
*	SUKABUMI	CABANG II	JL. RAYA SURYAKENCANA NO. 68 SUKABUMI 14311 PO BOX 74	0266 - 222481	0266 - 62497222
*	CIREBON	CABANG II	JL. EVAKUASI NO. 11 B CIREBON 45135 PO BOX 164	0231 - 485660	0231 - 485785
*	PRIANGAN TIMUR	CABANG III	JL. IR. H. JUANDA KM. 1 KOTA TASIKMALAYA	0265 - 235387 0265 - 327987 0265 - 327811	0265 - 331346
*	PURWAKARTA	CABANG II	JL. TERUSAN IBRAHIM SINGADILAGA 14 PURWAKARTA	0264 - 231108 0264 - 214971	0264 - 230751

No	NAMA KANTOR	STATUS KANTOR	ALAMAT KANTOR	TELEPON	FAXIMILE
*	MAJALAYA	CABANG II	JL. SOEKARNO HATTA NO. 592 BANDUNG	022 - 7500380	022 - 7500810
*	DEPOK	CABANG III	JL. MARGONDA RAYA NO. 56 KOMPLEK RUKO ITC DEPOK NO. 19 - 20, DEPOK	021 - 77215101 s/d 02 021 - 77215105	021 - 77215103 s/d 04
7	KANWIL JATENG & DIY		JL. PEMUDA NO. 130 SEMARANG 50132 P.O. BOX 1062	024 - 3559563 024 - 3559564	024 - 3517623 024 - 3557627
*	SEMARANG I	CABANG I	JL. PEMUDA NO. 130 SEMARANG 50132	024 - 3520279 024 - 3588880	024 - 3553712 024 - 3588878
*	SEMARANG II	CABANG II	JL. SOEKARNO HATTA NOMOR 78 A SEMARANG	024 - 76747997 024 - 76746681	024 - 76746682 024 - 76746683
*	SURAKARTA	CABANG I	JL. BHAYANGKARA NO. 42 SURAKARTA	0271 - 736637 0271 - 736630	0271 - 716261
*	YOGYAKARTA	CABANG I	JL. URIP SUMOHARDJO NO. 106 YOGYAKARTA 55222	0274 - 518953 0274 - 519670 0274 - 519671	0274 - 518223
*	KLATEN	CABANG III	JL. KOPRAL SAYOM NO 11 KARANG ANOM - KLATEN UTARA	0272 - 326602 0272 - 327331	0272 - 326016 0282 - 534567
*	CILACAP	CABANG II	JL. M.T. HARYONO NO.18 CILACAP 53213	0282 - 537979 0282 - 531388	
*	PEKALONGAN	CABANG III	KOMPLEK PERKANTORAN PODOSUGIH JL. MAJAPAHIT PEKALONGAN	0285 - 425857 0285 - 425858	0285 - 425859
*	KUDUS	CABANG II	JL. PRAMUKA NO. 368 KUDUS 59319 P.O. BOX 172	0291 - 437874	0291 - 431151
*	MAGELANG	CABANG III	JL. JEND. GATOT SOEBROTO NO. 8 PAKELAN -MAGELANG PO BOX 226	0293 - 310430	0293 - 310431
*	PURWOKERTO	CABANG III	JL. LETJEND. S. PARMAN 80 PURWOKERTO 53141	0281 - 642484 0281 - 642481 0281 - 642486	0281 - 642482
*	TEGAL	CABANG III	RUKO PALM TOWN HOUSE BLOK R 5 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN - TEGAL PO BOX 97	0283 - 341545 0283 - 341546	0283 - 343543
*	UNGARAN	CABANG II	JL.SOEKARNO HATTA NO. 10 UNGARAN	(024) 6923036 6926928 6926929	(024) 76913460
8	KANWIL JATIM		JL. RAYA JUANDA NO 52 SEDATI - SIDOARJO	031 - 8663222	031 - 8666146
*	KARIMUNJAWA	CABANG I	JL. KARIMUNJAWA NO. 6 SURABAYA	031 - 5031183	031 - 5017014

No	NAMA KANTOR	STATUS KANTOR	ALAMAT KANTOR	TELEPON	FAXIMILE
*	PASURUAN	CABANG II	JL. IR. H. JUANDA NO. 77 PASURUAN - 67126	0343 - 425011	0343 - 428188 0343 - 428165
*	MALANG	CABANG II	JL.DR. SUTOMO NO.1 MALANG 65111 P.O. BOX 193	0341 - 354450 0341 - 367507	0341 - 367507
*	SIDOARJO	CABANG I	JL. PAHLAWAN PINANG INDAH BLOK A2 NO. 1-4 SIDOARJO 61251 P.O. BOX 210	031 - 8945592 s/d 94	031 - 8945591
*	DARMO	CABANG II	JL. DIPONEGORO NO.6 SURABAYA	031 - 5668979 031 - 5687791	031 - 5675944 031 - 5623444
*	GRESIK	CABANG II	JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. 121 A GRESIK	031 - 3972121 031 - 3984344 031 - 3974349 031 - 3975277 031 - 3974341	031 - 3985572
*	JEMBER	CABANG III	JL. GAJAH MADA NO 199 JEMBER	0331 - 486370 0331 - 429067	0331 - 485602
*	BANYUWANGI	CABANG III	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 49 BANYUWANGI	0333 - 410483 0333 - 424754	0333 - 421677
*	MADIUN	CABANG III	JL. A. RAHMAN SALEH NO. 8 MADIUN 63139	0351 - 492018 0351 - 462864	0351 - 452974
*	KEDIRI	CABANG II	JL. URIP SUMOHARJO NO. 199 PO BOX 187 KEDIRI 64122	0354 - 689718 / 9	0654 - 685188
*	MOJOKERTO	CABANG II	JL. GAJAH MADA NO. 135 KOTA MOJOKERTO	0321 - 332121 0321 - 392237 0321 - 321024	0321 - 323327
*	BOJONEGORO	CABANG III	JL. DIPONEGORO NO. 18 BOJONEGORO	0353 - 881978 0353 - 881835	0353 - 885966
*	MADURA	CABANG III	JL. HALIM PERDANA KUSUMA KAB. BANGKALAN MADURA - 69115	031 - 3093589 031 - 3091529	031 - 3099184
*	BLITAR	CABANG III	JL. IR. SOEKARNO NO. 71 KOTA BLITAR - 66131	0342 - 806778 0342 - 800987	0342 - 801354
*	TANJUNG PERAK	CABANG II	JL. PERAK TIMUR NO. 82 SURABAYA	031 - 3524460 031 - 3524584 031 - 3530987 031 - 3530985	031 - 3298686
*	RUNGKUT	CABANG II	JL. RAYA JEMUR SARI NO.6. SURABAYA	031-8438826 031-8472664	031 - 8472664
9	KANWIL KALIMANTAN		JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 43 BLOK H 1-2 BALIKPAPAN PERMAI	0542 - 734962 0542 - 440779	0542 - 423264
*	BALIKPAPAN	CABANG I	JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 43 BALIKPAPAN PERMAI BLOK H 1-2 BALIKPAPAN	0542 - 421920 0542 - 427213 0542 - 745005	0542 - 426043

No	NAMA KANTOR	STATUS KANTOR	ALAMAT KANTOR	TELEPON	FAXIMILE
				0542 - 745006	
*	SAMARINDA	CABANG I	JL. IR. H. JUANDA SAMARINDA	0541 - 761192 0541 - 761193 0541 - 761194	0541 - 761196
*	BONTANG	CABANG II	JL. IR. H. DJUANDA NO. 15 BONTANG	0548 - 21128 0548 -21778	0548 - 24955
*	TARAKAN	CABANG III	JL. JEND SUDIRMAN NO. 18 TARAKAN	0551 - 21260 0551 - 32012	0551 - 51177
*	BERAU	CABANG III	JL. HAJI ISA III NO. 89 TANJUNG REDEB KAB. BERAU 77311	0554 - 21976 0554 - 25669	0554 - 2027266
*	KALIMANTAN BARAT	CABANG II	JL. JEND. ACHMAD YANI NO. 63 PONTIANAK	0561 - 767909	0561 - 730031
*	KALIMANTAN SELATAN	CABANG II	JL. BRIGJEN HASAN BASRI NO. 84 A BANJARMASIN 70124	0511 - 3302042 0511 - 3302043 0511 - 3302044	0511 - 3362221
*	PALANGKARAYA	CABANG III	JL. RTA. MILONO KM.3,5 NO. 92 PALANGKARAYA	0536 - 3239254 0536 - 3235849	0536 - 3223694
*	SAMPIT	CABANG III	JL. MT. HARYONO NO. 77 SAMPIT PO BOX 153	0531 - 21961	0531 - 31201
*	KOTA BARU	CABANG III	RUKO BUMI SAIJAAN PERMAI BLOK 4B-5B JL. RAYA STAGEN KM. 4,5 KOTA BARU	0518 - 23760 0518 - 24262	0518 - 21019
*	PANGKALAN BUN	CABANG III	JL. DIPONEGORO NO. 57 RT 1 PANGKALAN BUN 74115 KALIMANTAN TENGAH	0532 - 27786 0532 - 27891	0532 - 22517
10	KANWIL SULAMALU		JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 222 MAKASSAR 90144	0411 - 452373 0411 - 452873	0411 - 452359
*	MAKASSAR	CABANG I	JL. URIP SUMOHARDJO KM 4,5 PAMPANG MAKASSAR 90232	0411 - 441581 0411 - 441591	0411 - 441533
*	SULAWESI TENGGARA	CABANG III	JL. EDY SABARA NO. 392 BY PASS KENDARI SULAWESI TENGGARA 93127	0401 - 3131344 0401 - 3131355	0401 - 3127067
*	PALOPO	CABANG III	JL ANDI KAMBO NO. 99 PALOPO 91921	0471 - 21698	0471 - 22248
*	SULAWESI UTARA	CABANG II	JL. 17 AGUSTUS MANADO 95113	0431 - 851667 0431 - 855724	0431 - 854068
*	SULAWESI TENGAH	CABANG III	JL. TOWUA NO. 51 TOTURA PALU KODE POS 94113	0451 - 481212 0451 - 488231	0451 - 488229
*	GORONTALO	CABANG III	JL. PROF. DR. JHON ARIO KATILI NO. 22 (EX ANDALAS) GORONTALO	0435 - 828267	0435 - 830016

No	NAMA KANTOR	STATUS KANTOR	ALAMAT KANTOR	TELEPON	FAXIMILE
*	MALUKU	CABANG II	JL. JEND. ACHMAD YANI AMBON 97124	0911 - 354035	0911 - 354095
*	MALUKU UTARA	CABANG III	JL. KAPITAN PATTIMURA NO. 2 TERNATE MALUKU UTARA	0921 - 3121243 0921 - 3122790	0921 - 3125524
11	KANWIL BANUSPA		JL. HAYAM WURUK NO. 143 DENPASAR - BALI		
*	BALI I	CABANG I	JL HAYAM WURUK NO. 143 PO BOX 472 DENPASAR 80233	0361 -8691796 S/D 8691799	0361 - 727822
*	BALI II	CABANG III	JL. DHARMA GIRI BYPASS BURUAN GIANYAR - BALI 80581	0361 - 945718 0361 - 945719	0361 - 945522
*	NUSA TENGGARA BARAT	CABANG II	JL. LANGKO NO. 15 MATARAM 83126 - NTB P.O. BOX 1042	0370 - 640127 0370 - 634714	0370 - 634103
*	NUSA TENGGARA TIMUR	CABANG III	JL. WILALAMENTIK 88 OEBOBO KUPANG 85111	0380 - 825655	0380 - 831457
*	PAPUA BARAT	CABANG III	JL. BASUKI RAHMAT NO. 6 SORONG	0951 - 323749	0951 - 323646
*	PAPUA	CABANG III	JL. RAYA ABEPURA BUCEN II ENTROP NO. 10 PAPUA 99223	0967 - 551303 0967 - 551304	0967 - 551305 0901 - 321600
*	TIMIKA	CABANG III	JL. KARTINI NO. 9 TIMIKA	0901 - 323259	

KANTOR CABANG PEMBANTU

No	NAMA KANTOR	ALAMAT KANTOR	TELEPON	FAXIMILE
1	KCP RANTAU PRAPAT	Jl. WR Supratman no 237 Rantau Prapat Labuhan Batu, Smumut		
2	KCP DHARMASRAYA	Jl. Gunung Tua Kabupaten Dharmasraya		
3	KCP INDRAGIRI HILIR	Jl. Trimas Tembilahan Indragiri Hilir		
4	KCP KARIMUN	Jl. Perlambangan Ruko Padimas Blok A No. 7 Tanjung Balai Karimun	0777-323813	
5	KCP BETUNG	Banyuasin, Musi Banyuasin		
6	KCP LUBUK LINGGAU	Jl. Yos Sudarso No 27 Rt.02 Kel. Marga Mulya Kecamatan Lubuk Linggau II		
7	KCP BETUNG	Jl. ZA Pagar Alam, Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Lampung Selatan		
8	KCP BELITUNG	Jl. Jend. Sudirman Ruko Cakra RT 09/ RW 04 Desa Pangkal lalang Kec. Tanjung Pandan, Belitung		

No	NAMA KANTOR	ALAMAT KANTOR	TELEPON	FAXIMILE
9	KCP MARUNDA	Jl Raya Cilincing Ujung No 36 Marunda Jakarta Utara		
10	KCP CILEGON	Gedung Bank BNI - Lantai II Jl. S. A. Tirtayasa No 25 Cilegon 42414		
11	KCP CIBITUNG	Ruko Lembah Hijau Kawasan Lippo City Cikarang		
12	KCP CIANJUR	Jl. KH Abullah bin nuh No 6 Cianjur, Jawa Barat		
13	KCP INDRAMAYU	Jl. Jend. Sudirman, Indramayu		
14	KCP GARUT	Perukoan Goldland Estate No A2 Jl. Karacak Kab. Garut		
15	KCP SUBANG	Jl. Raya Kalijati Timur, Dusun Bina Marga RT 11/04 Desa Kalijati Timur, Kec. Kalijati Subang		
16	KCP SUKOHARJO	Jl. Slamet Riyadi No 27, Sukohardjo		
17	KCP SLEMAN	Jl. Godean Km 2 RT03 Sleman, Sleman		
18	KCP BOYOLALI	Kabupaten Blora		
19	KCP PURBALINGGA			
20	KCP PANDAAN	Ruko Taman Dayu Blok E/17 Pandaan Pasuruan	0343-5640023	
21	KCP PROBOLINGGO	Ruko Panjaitan Place Jl. Panjaitan No. 78	0335-427114	
22	KCP KRIAN	Ruko Mandiri Residence Blok A3 No. 5 Jl Kyai Mojo Krian Sidoarjo	031-8982155	031-8984095
23	KCP DRIYOREJO	Driyorejo-Gresik		
24	KCP LUMAJANG	Dinas TK dan Transmigrasi Jl. Veteran No 72		
25	KCP SITUBONDO	Ruang Pelayana terpadu Kantor Disnaker Jl. PB Sudirman	0338-83921314	
26	KCP JOMBANG	Jl. Wahid Hasyim No. 9	0321-850570	0321- 850554
27	KCP TUBAN	Jl. Sunan Kalijaga no 51	0356-323323	
28	KCP TULUNGAGUNG	Jl. Mayor Sujadi No 17	0355-33445	
29	KCP BADUNG	Kuta Badung - Bali		
30	KCP SUMBAWA	Kantor Disnakertrans Jl. Garuda No.93		
31	KCP TANAH GROGOT	Jl. Ahmad Yani No. 15 Rt 2/4 kab. Paser	0543-2705399	0543-23625
32	KCP KUTAI KARTANEGARA	Jl. Imanudin, Tenggarong		
33	KCP KUTAI BARAT	Bisnis Center, Sendawar		
34	KCP SANGATA	Jl. Yos Sudarso III, Teluk Lingga Kutai Timur	0549-21621	0549-2027666

No	NAMA KANTOR	ALAMAT KANTOR	TELEPON	FAXIMILE
35	KCP SANGGAU	Jl. Ahmad Yani No.54	0564-24422	0564-24433
36	KCP KETAPANG	Jl. DI Panjaitan No. 42 B	0534-33857	0534-31237
37	KCP SINTANG	Jl. MT Haryono, Sintang		
38	KCP SINGKAWANG	Jl. Diponegoro, Singkawang		
39	KCP TANJUNG	Jl. Tanjung Putri No. 5 Rt. 7 Pembataan Murung Budak	0526-2022965	0526-2022724
40	KCP TANAH LAUT	Jl. A. Sairani Rt. 09 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut		
41	KCP SERUYAN	Jl. Bakti M Tong , Pembuang Hulu, Kec. Hanau Kab. Seruyan		
42	KCP BATU LICIN	Jl. Raya Batulicin No. 22 Rt. 13 Rw. 03 Batulicin Kab. Tanah Bumbu	0518-71373	0518-71374
43	KCP MAMUJU	Jl. Pattalundru No. 17A Kota Mamuju		
44	KCP MAROS	Jl. Topaz 56, Maros		
45	KCP PARE-PARE	Jl. Jend Sudirman No. 61 Kota Pare-pare		
46	KCP BAU-BAU	Jl. Jend Sudirman Komp. Disnakertrans Kota Baubau		
47	KCP MALILI	Jl. Soekarno Hatta No. 10 Malili, Kab. Luwu Timur		
48	KCP BANGGAI	Jl. Yos Sudarso No. 22 Kota Luwuk		
49	KCP MANOKWARI	Jl. Percetakan Negara No. 5 Kota Manokwari		
50	KCP MERAUKE	Jl. Biak No. 9 Kab. Merauke		
51	KCP BONE	Jl. MT. Haryono No.14 Watampone	0481-27833	0481-27811
52	KJP GOWA	Jl. Tumanurung Raya Ruko B-8, Sungguminasa	0411-8215764	
53	KCP PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	Jl. Poros Makassar – Pangkep Komp. Ruko Mattampa Abadi A2	0410-2315953	0410-2315954

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN
TAHUNAN
2013

JAMSOSTEK
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

Kantor Pusat :
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79
Jakarta Selatan - 12930
T (021) 520 7797
F (021) 520 2310

www.bpjsketenagakerjaan.go.id